

LEADING THE WAY TO EMPOWER THE NATION





Cerita Sampul

Cover Story



LEADING THE WAY TO EMPOWER THE NATION

Sebagai perusahaan dengan peran strategis pada industri ketenagalistrikan Indonesia, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk mendorong proses transisi energi menuju pencapaian target *net zero emission* pada 2060. Seiring hal itu, pada akhir 2022, PLN telah menyelesaikan pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* sebagai upaya bersama dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki, dengan bertransformasi sebagai perusahaan yang ramping, lincah, dan efisien. Atas komitmen serta pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* tersebut, tahun 2022 menjadi momentum penting bagi PLN untuk memperkuat kepemimpinan dan peran strategis dalam menghadirkan energi yang berkelanjutan bagi negeri.

As a company with a strategic role in the Indonesian electricity industry, PT PLN (Persero) is committed to encouraging the energy transition process towards achieving the net zero emission target in 2060. Along with that, at the end of 2022, PLN has completed the establishment of Holding and Sub-Holding as a joint effort to optimize all of its potential, by transforming into a lean, agile, and efficient company. For this commitment and the establishment of the Holding and Sub-Holding, the year 2022 became an important momentum for PLN to strengthen its leadership and strategic role in providing sustainable energy for the country.

Kesinambungan Tema

Theme Continuity

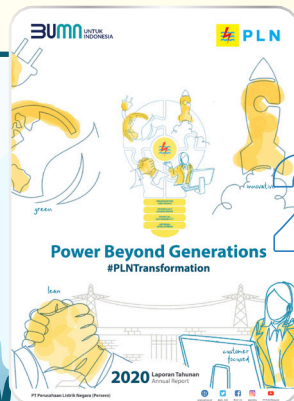
20
21



TRANSISI MENUJU NET ZERO EMISSIONS
Transition to Net Zero Emissions



POWER BEYOND GENERATIONS
Power Beyond Generations



20
20



20
19

**MEMAKNAI TANTANGAN,
MENINGKATKAN LAYANAN**
Redefining Challenges, Enhancing
Services



ENERGI OPTIMISME UNTUK INDONESIA
Energy Optimism for Indonesia



20
18



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer

Laporan ini merupakan laporan tahunan PT Perusahaan Listrik negara (Persero), memuat informasi berupa pernyataan operasional, keuangan, proyeksi, hingga rencana bisnis yang disajikan bagi pemangku kepentingan. Kecuali yang bersifat historis, informasi-informasi tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian yang dapat mengakibatkan perbedaan material terhadap perkembangan aktual. Selain itu, informasi yang bersifat proyektif disusun berdasarkan asumsi serta kondisi terkini yang valid dan telah dipastikan keabsahannya. Perseroan tidak menjamin informasi tersebut akan memberikan hasil yang sepenuhnya sesuai harapan.

Laporan tahunan ini memuat "PLN" dan "Perseroan" yang mengacu pada PT Perusahaan Listrik negara (Persero). Penggunaan keduanya dilakukan semata-mata demi kemudahan penyampaian.

This report is an annual report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), which contains information in the form of operational statements, finances, projections, and business plans to be presented to stakeholders. Except for historical information, such information has prospects of risks and uncertainties that could result in material differences from actual developments. In addition, projective information is prepared based on assumptions and current conditions that are valid and their validity has been confirmed. The Company does not guarantee that this information will provide results that fully meet expectations.

This annual report contains "PLN" and "the Company" which refers to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). The use of both is done solely for the convenience of delivery.

Keunggulan Kompetitif

Competitive Advantages

Perseroan beroperasi dengan sejumlah keunggulan kompetitif sebagai penyedia energi di Indonesia, sebagai berikut:

The Company operates with a number of competitive advantages as an energy provider in Indonesia, as follows:

1

PERUSAHAAN PENYEDIA ENERGI LISTRIK YANG TERINTEGRASI PENUH DI INDONESIA

A fully-integrated Indonesian electric utility company

Kegiatan usaha terintegrasi mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, pembangunan infrastruktur kelistrikan, hingga pemasaran energi listrik.

Integrated business activities from power generation, transmission, distribution, construction of electricity infrastructure, to marketing of electricity.

2

POSISI PASAR YANG SUPERIOR

Superior market position

Jumlah pelanggan mencapai 85,6 juta yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Total customer reached 85.6 million spread throughout Indonesia.

3

DUKUNGAN KUAT DAN TERBUKTI DARI PEMERINTAH RI

Strong and Proven Support from the Government of the Republic of Indonesia

- Saham sepenuhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Menerima penjaminan dari Pemerintah di antaranya atas pinjaman yang diterima dan efek utang yang diterbitkan.
- Menerima subsidi dan kompensasi dari Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam APBN terkait fungsi vital PLN sebagai *Public Service Obligation* (PSO).

- The Company's shares are wholly owned (100%) by the Indonesian Government.
- Guaranteed by the Government in terms of loans received and debt securities issued.
- Receiving subsidy and compensation revenue from the Government as regulated in the State Budget related to PLN's vital function as a Public Service Obligation (PSO).

4

KEPERCAYAAN DARI INVESTOR

Trust From Investors

- Peringkat utang yang baik, setara dengan Pemerintah Indonesia.
 - a. Lembaga Pemeringkat Internasional: Moody's (Baa2/*Stable*), S&P (BBB/*Stable*), Fitch (BBB/*Stable*), dan JCR (BBB+/*Stable*)
 - b. Lembaga Pemeringkat Nasional: Pefindo (AAA/*Stable*)
- Diversifikasi pendanaan dari penerbitan efek utang berupa obligasi konvensional, sukuk baik berdenominasi Rupiah yang diterbitkan di Indonesia maupun *global bond* yang berdenominasi valuta asing dan diterbitkan di pasar keuangan dunia serta penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) oleh Entitas Anak.
- Dukungan pendanaan dari berbagai perbankan nasional maupun asing.
- Dukungan pendanaan dari *two step loans* atau penerusan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada PLN untuk pembiayaan berbagai proyek-listrik.

- Good debt rating, on par with the Government of Indonesia.
 - a. International Rating Agency: Moody's (Baa2/*Stable*), S&P (BBB/*Stable*), Fitch (BBB/*Stable*), and JCR (BBB+/*Stable*)
 - b. National Rating Agency: Pefindo (AAA/*Stable*)
- Diversification of funding from the issuance of debt securities in the form of conventional bonds and sukuk in Rupiah issued in Indonesia and global bonds in foreign currency issued in global financial markets, in addition to the issuance of Asset-Backed Securities (ABS) by Subsidiaries.
- Financing support from various national and foreign banks.
- Financing support from two-step loans or the Indonesian Government's foreign loans which are not bound by guarantees and forwarded to PLN to finance numerous electricity projects.

5

MEMIMPIN KOMPETENSI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Leading Competence in the Field Of Electricity

Dikelola oleh manajemen yang berpengalaman dan memiliki kompetensi yang teruji di bidang ketenagalistrikan.

Managed by management who are experienced and have proven competence in the electricity sector.



Capaian Penting 2022

Significant Achievements in 2022

OPERASIONAL • OPERATIONS



) *Termasuk milik PLN, IPP dan Sewa / *Including power plants owned by PLN, IPP, and Leased

Capaian Penting 2022

Significant Achievements in 2022





Capaian Penting 2022

Significant Achievements in 2022

KEUANGAN • FINANCE



Capaian Penting 2022

Significant Achievements in 2022





Daftar Isi

Table of Contents

	Cerita Sampul Cover Story
1	Kesinambungan Tema Theme Continuity
2	Sanggahan dan Tanggung Jawab Disclaimer
3	Keunggulan Kompetitif Competitive Advantages
4	Capaian Penting 2022 Significant Achievements in 2022
8	Daftar Isi Table of Contents
12	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications



Kilas Kinerja

Performance Highlights

22	Ikhtisar Data Keuangan Penting Overview on Important Financial Data
27	Ikhtisar Infrastruktur dan Operasional Infrastructure and Operational Highlights
27	Ikhtisar Kinerja Lainnya Other Performance Highlights
28	Pengembangan Energi Baru Terbarukan New Renewable Energy Development
32	Informasi Saham Share Information
33	Aksi Korporasi Corporate Action
34	Peringkat Surat Utang Debt Securities Rating
34	Peristiwa Penting 2022 2022 Significant Events



Laporan Manajemen

Management Report

38	Laporan Dewan Komsaris Board of Commissioners Report
58	Laporan Direksi Board of Directors Report



Profil Perusahaan

Company Profile

86	Informasi Perusahaan Company Information
88	Riwayat Singkat The Company at A Glance
90	Kronologis Perubahan Nama Perusahaan Chronology of Name Change
91	Makna Logo Perusahaan Company Logo Meaning
94	Jejak Langkah Milestones
96	Kegiatan Usaha Business Activities
100	Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Values
106	Struktur Organisasi Organization Structure
108	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
121	Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Changes in Board of Commissioners Composition
122	Profil Direksi Board of Directors Profile
134	Perubahan Komposisi Direksi Changes in the Board of Directors Composition

135	Perubahan Anggota Manajemen Setelah Tahun Buku 2022 Changes in the Management Composition After the 2022 Fiscal Year
136	Profil SDM Perusahaan Profile of Corporate Human Capital
138	Keanggotaan dalam Asosiasi Association Membership
139	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition and Structure
140	Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan <i>Special Purpose Vehicles</i> (SPV) Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, and Special Purpose Vehicles (SPV)
145	Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham Share Listing and Issuance Chronology
145	Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya Other Securities Listing and Issuance Chronology
147	Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan Capital Market Supporting Institutions and Professionals
152	Wilayah Operasi, Jaringan Unit Bisnis & Kantor Perwakilan serta Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak dan Entitas Asosiasi Operational Area, Business Unit Network & Representative Offices, and the Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, and Associated Entities
154	Jaringan Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan Business Unit Network and Representative Offices
158	Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures
162	Informasi Pada Situs Web Perusahaan Information on the Company's Website

Daftar Isi

Table of Contents



Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

166	Kondisi Ekonomi Makro dan Industri Ketenagalistrikan Dunia Macroeconomic Conditions and Global Electricity Industry	204	Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statements of Cash Flows	211	Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment
169	kondisi Ekonomi Makro dan Industri Ketenagalistrikan Indonesia Indonesian Macroeconomic Conditions and the Electricity Industry	205	Kemampuan Membayar Utang, Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya Solvency, Receivables Collectability, and Other Financial Ratios	211	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Facts and Information Subsequent to Accountant's Reporting Date
178	Tinjauan Operasional Operational Review	206	Kemampuan Membayar Utang Solvency	212	Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events
178	Tinjauan Segmen Operasi Overview on Operating Segment	206	Tingkat Kolektibilitas Piutang Receivables Collectability Rate	213	Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan dan Laba Perusahaan Impact of Price Changes on Company Revenue and Profits
185	Kinerja Usaha Business Performance	207	Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal serta Dasar Penentuan Kebijakan Capital Structure and Management Policy on Capital Structure and Basis of Policy Determination	213	Dampak Perubahan Harga Jual Listrik The Impact of Changes in the Selling Price of Electricity
188	Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Review	207	Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Management Policy on Capital Structure	213	Perbandingan antara Target dan Realisasi 2021 serta Proyeksi 2022 Comparison between the 2021 Target and Realization and the 2022 Projection
189	Tinjauan Keuangan Financial Review	208	Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Basis for Selection of Management Policy on Capital Structure	214	Prospek Usaha Perusahaan Business Outlook
189	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position	208	Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Goods Investment	218	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
190	Aset Assets	209	Tujuan Ikatan Material Investasi Barang Modal Purpose of Material Commitment for Capital Goods Investment	218	Strategi Pemasaran Marketing Strategy
191	Ekuitas Equity	210	Sumber Dana Source of Funds	222	Pangsa Pasar Market Share
192	Liabilitas Liabilities	210	Mata Uang yang Menjadi Denominasi dan Mitigasi Risiko Mata Uang Asing Denomination and Foreign Currency Risk Mitigation	222	Kebijakan dan Pembagian Dividen Policy and Distribution of Dividends
194	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian Consolidated Statements of Profit of Loss and Other Comprehensive Income			222	Kebijakan Dividen Dividend Policy
				222	Pembagian Dividen Tahun 2022 Dividend Distribution in 2022



Daftar Isi

Table of Contents

223	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/ MSOP) Employee and/or Management Stock Option Program (ESOP/ MSOP)	235	Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya yang Diterapkan Changes in Accounting Policies and Their Impacts	253	Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Mechanism
223	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of the Use of Proceeds from Public Offering	237	Kontribusi Terhadap Negara Contribution to the Country	253	Soft-Structure GCG GCG Soft Structure
223	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi Material Transaction Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/ Related Parties	237	Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity	257	Sosialisasi GCG GCG Dissemination
223	Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Material Transactions Containing Conflicts of Interest	237	Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Potential Matters that Had Significant Effect on the Company's Going Concern	258	Penilaian GCG GCG Assessment
223	Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi Transactions with Affiliated or Related Parties	241	Penilaian Manajemen terhadap Beragam Faktor yang Berpengaruh terhadap Kelangsungan Usaha Management Assessment on Various Factors Affecting the Going Concern	258	Penilaian GCG Tahun 2022 GCG Assessment 2022
228	Kebijakan Perusahaan terkait dengan Mekanisme Review atas Transaksi Company Policy related to Transaction Review Mechanism	241	Penilaian Manajemen terhadap Beragam Faktor yang Berpengaruh terhadap Kelangsungan Usaha Management Assessment on Various Factors Affecting the Going Concern	258	Kriteria yang Digunakan dalam Penilaian Assessment Criteria
228	Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait Fulfillment of Related Regulations and Provisions	243	Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment Assumptions Used by the Management in Conducting Assessment	259	Hasil Penilaian GCG Periode Tahun 2022 2022 GCG Assessment Results
229	Informasi Material Transaksi Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Transaction Material Related to Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Restructuring			260	Rekomendasi Hasil Penilaian GCG Tahun 2022 Recommendations for the 2022 GCG Assessment Results
232	Perubahan Peraturan dan Dampaknya Terhadap Perusahaan Changes in Regulation and Their Impact on the Company			263	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
				264	Informasi Pemegang Saham Shareholders Information
				265	Penyelenggaraan RUPS Tahun 2022 Implementation of the 2022 GMS
				271	Informasi mengenai Keputusan RUPS Tahun 2021 Information on the 2021 GMS Resolutions
				272	Dewan Komisaris Board of Commissioners
				307	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of the Board of Commissioners
				307	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners
				309	Komite Audit Audit Committee
				323	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee



Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

247	Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Commitment to Good Corporate Governance Implementation
249	Dasar Penerapan GCG Basis of GCG Implementation
251	Milestone GCG GCG Milestone
253	Penanggung Jawab Pelaksanaan GCG Party in Charge of GCG Implementation

Daftar Isi

Table of Contents

336	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	430	Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Whistleblowing System
348	Direksi Board of Directors	436	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Management of State Officials Assets Report
380	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	438	Pengungkapan Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Disclosure of Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors
384	Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Intern) Internal Audit Unit	438	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) Management and/or Employee Stock Option Program (ESOP/MSOP)
394	Akuntan Publik Public Accountant	438	Kebijakan Anti-Korupsi Anti-Corruption Policy
396	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	439	Pernyataan Bebas Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik Statement of Not Granting Funds for Political Activities
396	Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka yang Diakui Internasional (COSO) Conformity of Internal Control System to Internationally Recognized Framework (COSO)	439	Kebijakan Anti-Fraud Anti-Fraud Policy
399	Manajemen Risiko Risk Management	439	Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan Prevention of Gratuity and Conflict of Interest
409	Fungsi Kepatuhan Compliance Function	441	Sistem Manajemen Anti-Penyuapan Anti-Bribery Management System
413	Perkara Penting Significant Case	445	Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance
416	Sanksi Administratif oleh Regulator Administrative Sanctions Imposed by Regulator		
417	Informasi Kepatuhan terhadap Peraturan Perpajakan Information on Compliance with Tax Regulations		
417	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data		
418	Transformasi Budaya Perusahaan Transformation of Corporate Culture		
424	Standar Etika Perusahaan Code of Conduct		
427	Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services		

Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021:

Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference On Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social and Environmental Responsibility



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Perseroan menerima penghargaan dan sertifikasi selama 2022, dengan perincian sebagai berikut:

The Company received awards and certification throughout 2022, with the details as follows:

PENGHARGAAN

Penghargaan yang Diterima PT PLN (Persero)

JANUARI • JANUARY

Tanggal Perolehan / Awarding Date	Penyelenggara/ Pemberi Penghargaan / Organizer	Nama Penghargaan / Name of Award	Penerima / Recipient
31 Januari 2022 / January 31, 2022	Contact Center World	Gold - Best Contact Center pada 16th Annual Global Contact Center World Awards / Gold - Best Contact Center on 16th Annual Global Contact Center World Awards	PT PLN (Persero)
		Gold - Best Self Service Technology pada 16th Annual Global Contact Center World Awards	PT PLN (Persero)

MARET • MARCH

Tanggal Perolehan / Awarding Date	Penyelenggara/ Pemberi Penghargaan / Organizer	Nama Penghargaan / Name of Award	Penerima / Recipient
23 Maret 2022 / March 23, 2022	Kementerian BUMN / Minister of SOE	JUARA Stakeholder Relation Management pada BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) / CHAMPION Stakeholder Relation Management at BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS)	PT PLN (Persero)
		JUARA 1 CID PROGRAM KESEHATAN pada BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) / 1st RANK IN CID HEALTH PROGRAM at BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS)	PT PLN (Persero)
		JUARA 1 CID PROGRAM LINGKUNGAN pada BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) / 1st RANK IN CID ENVIRONMENTAL PROGRAM at BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS)	PT PLN (Persero)
		JUARA 2 TJSL OFFICER OF THE YEAR pada BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) / 2nd RANK IN TJSL OFFICER OF THE YEAR at BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS)	PT PLN (Persero)
		JUARA 2 CONTENT CREATOR pada BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) / 2nd RANK CONTENT CREATOR at BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS)	PT PLN (Persero)
25 Maret 2022 / March 25, 2022	PR Indonesia	Public Relation Indonesia Awards 2022 - Sub kategori Video Profile, Gold Winner / Public Relation Indonesia Awards 2022 - Video Profile, Gold Winner Sub-category	PT PLN (Persero)
		Public Relation Indonesia Awards 2022 - Sub kategori Krisis dan Paska Krisis, Bronze Winner / Public Relation Indonesia Awards 2022 - Crisis and Post-Crisis sub category, Bronze Winner	PT PLN (Persero)
		Public Relation Indonesia Awards 2022 - Silver Winner - Kampanye PLN Mobile #SemuaMakinMudah / Public Relation Indonesia Awards 2022 - Silver Winner - PLN Mobile #SemuaMakinMudah Campaign	PT PLN (Persero)
		Public Relation Indonesia Awards 2022 - Kategori Terpopuler di Media Cetak 2021 / Public Relation Indonesia Awards 2022 - Most Popular Category in Print Media 2021	PT PLN (Persero)
30 Maret 2022 / March 30, 2022	TOP Business	TOP CSR AWARDS 2022 #STAR 5	PT PLN (Persero)
		TOP LEADER ON CSR COMMITMEN 2022	PT PLN (Persero) - Direktur Utama

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

APRIL • APRIL

Tanggal Perolehan / Awarding Date	Penyelenggara/ Pemberi Penghargaan / Organizer	Nama Penghargaan / Name of Award	Penerima / Recipient
22 April 2022 / April 22, 2022	Beritasatu Media Holdings dan Bumi Global Karbon / Beritasatu Media Holdings and Bumi Global Karbon	Predikat Green untuk kategori BUMN penghargaan Transparansi Emisi Korporasi (TEK) 2022 / Green predicate for the category of SOEs for the 2022 Corporate Emissions Transparency (TEK) Award	PT PLN (Persero)
		Predikat Platinum Plus kategori BUMN penghargaan Transparansi Emisi Korporasi (TEK) 2022 / Platinum Plus predicate in the SOE category, the 2022 Corporate Emissions Transparency (TEK) Award.	PT PLN (Persero)

MEI • MAY

Tanggal Perolehan / Awarding Date	Penyelenggara/ Pemberi Penghargaan / Organizer	Nama Penghargaan / Name of Award	Penerima / Recipient
9 Mei 2022 / May 9, 2022	Kementerian BUMN	Peringkat pertama National Champion Kategori Customer/ Buyer untuk kelas usaha BUMN pada Apresiasi Mitra BUMN Champion 2022 / First place at National Champion in the Customer/Buyer category for the SOE business class at the 2022 SOE Champion Partner Appreciation	PT PLN (Persero)
		Gold Winner 'The Most Promising Company In Tactical Marketing' pada BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022 / Gold Winner for 'The Most Promising Company In Tactical Marketing' at SOE Entrepreneurial Marketing Award 2022	PT PLN (Persero)
18 Mei 2022 / May 18, 2022	Markplus, Inc	Silver Winner 'The Most Promising Company In Branding Campaign' pada BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022 / Silver Winner for 'The Most Promising Company In Branding Campaign' at BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022	PT PLN (Persero)
		Dewi BUMN 2022 pada BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022 / Dewi BUMN 2022 at the BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022	PT PLN (Persero)
		'CMO of The Year BUMN' pada BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022 / 'CMO of the Year BUMN' at the BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022	PT PLN (Persero)

JUNI • JUNE

Tanggal Perolehan / Awarding Date	Penyelenggara/ Pemberi Penghargaan / Organizer	Nama Penghargaan / Name of Award	Penerima / Recipient
21 Juni 2022 / June 21, 2022	Markplus, Inc	Marketeers Omni Brands of the Year 2022	PT PLN (Persero)
23 Juni 2022 / June 23, 2022	Indonesian Social Sustainability Forum	Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards Kategori Silver / Sustainable Village Development Awards Silver Category	PT PLN (Persero) - PT PLN (Persero) UID Jawa Timur



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

JULI • JULY

Tanggal Perolehan / Awarding Date	Penyelenggara/ Pemberi Penghargaan / Organizer	Nama Penghargaan / Name of Award	Penerima / Recipient
8 Juli 2022 / July 8, 2022	EngageRocket	Silver Medal pada kategori 'Best Company Culture' dalam ajang The Workplace of The Year 2022 Awards / Silver Medal in the 'Best Company Culture' category in The Workplace of The Year 2022 Awards	PT PLN (Persero)
29 Juli 2022 / July 29, 2022	Contact Center World- Asia Pasific (CCW-APAC)	Community Spirit Category: GOLD pada Contact Center World - Asia Pasific (CCW-APAC)	PT PLN (Persero)
		Sales Campaign Category: GOLD pada Contact Center World - Asia Pasific (CCW-APAC)	PT PLN (Persero)

AGUSTUS • AUGUST

Tanggal Perolehan / Awarding Date	Penyelenggara/ Pemberi Penghargaan / Organizer	Nama Penghargaan / Name of Award	Penerima / Recipient
24 Agustus 2022 / August 24, 2022	Kementerian Perindustrian (Kemenperin) / Ministry of Industry	Penghargaan INDI 4.0 dengan skor 3.5 / INDI 4.0 Award with a score of 3.5	PT PLN (Persero)

SEPTEMBER • SEPTEMBER

Tanggal Perolehan / Awarding Date	Penyelenggara/ Pemberi Penghargaan / Organizer	Nama Penghargaan / Name of Award	Penerima / Recipient
1 September 2022 / September 1, 2022	SWA Media	Indonesia Best Business Transformation Award 2022	PT PLN (Persero)
14 September 2022 / September 14, 2022	Sucofindo	Silver untuk kriteria Non B3 pada Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) / Silver for Non B3 criteria in the Environmental and Social Innovation Award (ENSIA)	PT PLN (Persero) - UIKL Tanjung Jati B
		Gold dalam kriteria B3 pada Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) / Gold in B3 criteria in the Environmental and Social Innovation Award (ENSIA)	PT PLN (Persero) - UIKL Tanjung Jati B
		2 platinum dalam kriteria Efisiensi Air dan Kehati pada Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) / 2 platinum in the Water Efficiency and Biodiversity criteria at the Environmental and Social Innovation Award (ENSIA)	PT PLN (Persero) - UIKL Tanjung Jati B
22 September 2022 / September 22, 2022	Infobank	The Best SOE in Digital Service Transformation 2022 pada Infobank The Best State-Owned Enterprise Award 2022 / The Best SOE in Digital Service Transformation 2022 in Infobank The Best State-Owned Enterprise Award 2022	PT PLN (Persero)
29 September 2022 / September 29, 2022	Rakyat Merdeka Award 2022	Tokoh Transformasi Digital Kelistrikan Nasional pada Rakyat Merdeka Award 2022 / Figure of National Electricity Digital Transformation at the 2022 People's Freedom Award	PT PLN (Persero) - Direktur Utama

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

OKTOBER • OCTOBER

Tanggal Perolehan / Awarding Date	Penyelenggara/ Pemberi Penghargaan / Organizer	Nama Penghargaan / Name of Award	Penerima / Recipient
4 Oktober 2022 / October 4, 2022	Subroto Award 2022	Penghargaan Subroto Award Bidang Efisiensi Energi (PSBE) / Subroto Award in the Field of Energy Efficiency (PSBE)	PT PLN (Persero) - PLTGU Muara Karang
			PT PLN (Persero) - PLTGU Gresik (2 penghargaan)
			PT PLN (Persero) - PLTGU Tambak Lorok
			PT PLN (Persero) - PLTGU Muara Tawar
			PT PLN (Persero) - PLTGU Priok
			PT PLN (Persero) - PLTG Pesanggaran Bali
			PT PLN (Persero) - PLTU Tanjung Jati B
			PT PLN (Persero) - PLTU Paiton
			PT PLN (Persero) - PLTU Pacitan
			PT PLN (Persero) - PLTU Indramayu
			PT PLN (Persero) - PLTU Rembang
			PT PLN (Persero) - PLTU Pelabuhan Ratu (2 Penghargaan)
			PT PLN (Persero) - PLTU Tanjung Awar-Awar (2 Penghargaan)
			PT PLN (Persero) - PLTU Tenayan
4 Oktober 2022 / October 4, 2022	Subroto Award 2022	Penghargaan Subroto Award Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan / Subroto Award in the Field of Electricity Safety	PT PLN (Persero) - PLTA Brantas
			PT PLN (Persero) - PLTA Cirata
			PT PLN (Persero) - PLTU Paiton
			PT PLN (Persero) - PLTU Suge Belitung
			PT PLN (Persero) - PLTGU Gresik
			PT PLN (Persero) - PLTG Sambera
			PT PLN (Persero) - PLTA Cirata
			PT PLN (Persero) - PLTA Asahan



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Tanggal Perolehan / Awarding Date	Penyelenggara/ Pemberi Penghargaan / Organizer	Nama Penghargaan / Name of Award	Penerima / Recipient
5 Oktober 2022 / October 5, 2022	Kementerian ESDM / Ministry of ESDM	Inovasi bidang pembangkitan listrik Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 / Innovation in the field of electricity generation of the 2022 Dharma Karya Energy and Mineral Resources Award	PT PLN (Persero)
		Inovasi di bidang transmisi Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 / Innovation in the field of transmission of the 2022 Dharma Karya Energy and Mineral Resources Award	PT PLN (Persero)
		Inovasi di bidang transmisi dan distribusi Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 / Innovation in the field of transmission and distribution of the 2022 Dharma Karya Energy and Mineral Resources Award	PT PLN (Persero)
		Inovasi di bidang pembangkitan Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 / Innovation in the field of generation of the 2022 Energy and Mineral Resources Dharma Karya Award	PT PLN (Persero)
8 Oktober 2022 / October 8, 2022	IN'HUB	International Forum of Innovator IN'HUB Tahun 2022.	PT PLN (Persero) - Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat (UIT JBB)
13 Oktober 2022 / October 13, 2022	Marketeers	Community Empowerment of The Year pada Marketers Editor's Choice Award 2022 / Community Empowerment of The Year at the 2022 Marketers Editor's Choice Award	PT PLN (Persero) - Program Electrifying Agriculture
19 Oktober 2022 / October 19, 2022	Asia HRD Awards	The Asia HRD Award 2022 kategori Contribution to Organisation	PT PLN (Persero)
19 Oktober 2022 / October 19, 2022	Business Asia	Best CEO Indonesia pada Indonesia Digital Innovation and Achievement Award 2022 Bussines Asia	PT PLN (Persero) - Direktur Utama
		Best Digital Technology in Energy Services pada Indonesia Digital Innovation and Achievement Award 2022 Bussines Asia	PT PLN (Persero)

NOVEMBER • NOVEMBER

Tanggal Perolehan / Awarding Date	Penyelenggara/ Pemberi Penghargaan / Organizer	Nama Penghargaan / Name of Award	Penerima / Recipient
11 November 2022 / November 11, 2022	PR Indonesia	Pemimpin Terpopuler di Sosial Media Kategori Pemimpin/CEO Subkategori BUMN non Tbk / Most Popular Leaders on Social Media for Leader/CEO Category, Non-TBK BUMN Sub-category	PT PLN (Persero) - Direktur Utama
17 November 2022 / November 17, 2022	Yayasan BUMN Untuk Indonesia / BUMN Foundation for Indonesia	Kontribusi di Bidang Kemanusiaan / Contribution in Humanity	PT PLN (Persero)
		Penghargaan khusus atas keterlibatan karyawan, direksi dan komisaris dalam penanganan pandemi COVID-19 / Special appreciation for the involvement of employees, directors and commissioners in handling the COVID-19 pandemic	PT PLN (Persero)
		The Top Leadership for SDGs pada ISDA 2022 / The Top Leadership for SDGs at ISDA 2022	PT PLN (Persero) - Direktur Utama
		The Most Committed Corporate for SDGs on Social Pillar pada ISDA 2022 / The Most Committed Corporate for SDGs on Social Pillar at ISDA 2022	PT PLN (Persero)
		The Most Committed Corporate for SDGs on Economy Pillar pada ISDA 2022 / The Most Committed Corporate for SDGs on Economy Pillar at ISDA 2022	PT PLN (Persero)
		The Most Committed Corporate for SDGs on Environment Pillar pada ISDA 2022 / The Most Committed Corporate for SDGs on Environment Pillar at ISDA 2022	PT PLN (Persero)
		ISDA 2022 Pilar Sosial kategori Gold / ISDA 2022 Social Pillar Gold category	PT PLN (Persero) - Divisi Komunikasi Korporat dan TJSL
		ISDA 2022 Pilar Sosial kategor Gold / ISDA 2022 Social Pillar Gold category	PT PLN (Persero) - UIW NUSA TENGGARA BARAT
22 November 2022 / November 22, 2022	CORPORATE FORUM FOR CSR DEVELOPMENT (CFCD)	ISDA 2022 Pilar Sosial kategori Platinum / ISDA 2022 Social Pillar Platinum category	PT PLN (Persero) - UID JAWA TENGAH & DIY
		ISDA 2022 Pilar Sosial kategori Silver / ISDA 2022 Social Pillar Silver category	PT PLN (Persero) - "UIW Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah"

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Tanggal Perolehan / Awarding Date	Penyelenggara/ Pemberi Penghargaan / Organizer	Nama Penghargaan / Name of Award	Penerima / Recipient
		ISDA 2022 Pilar Ekonomi kategori Platinum / ISDA 2022 Economic Pillar Platinum category	PT PLN (Persero) - UID Jawa Timur
		ISDA 2022 Pilar Ekonomi kategori Platinum / ISDA 2022 Economic Pillar Platinum category	PT PLN (Persero) - UID Jakarta Raya
		ISDA 2022 Pilar Ekonomi kategori Gold / ISDA 2022 Economic Pillar Gold category	PT PLN (Persero) - UID Jawa Timur
		ISDA 2022 Pilar Lingkungan kategori Gold / ISDA 2022 Environmental Pillar Gold category	PT PLN (Persero) - Divisi K3L
		ISDA 2022 Pilar Lingkungan kategori Gold / ISDA 2022 Environmental Pillar Gold category	PT PLN (Persero) - UIW NTT
		ISDA 2022 Pilar Lingkungan kategori Gold / ISDA 2022 Environmental Pillar Gold category	PT PLN (Persero) - "UIKL Kalimantan Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Mahakam"
		ISDA 2022 Pilar Lingkungan kategori Gold / ISDA 2022 Environmental Pillar Gold category	PT PLN (Persero) - UIW NTT
24 November 2022 / November 24, 2022	Kementerian ESDM / Ministry of ESDM	Penghargaan Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan Sub Kategori Sistem Grid Code Jawa Madura dan Bali / Award in the Field of Electricity Safety, Grid Code System Sub Category for Java, Madura and Bali	PT PLN (Persero) - PLTU Tanjung Jati B
28 November 2022 / November 28, 2022	Info Brand	Excellent Leader of the Year, based on Digital Corporate Brand Awareness Aspect, Revenue & Revenue Growth Aspect, dan Nett Profit dan Profit Growth Aspect	PT PLN (Persero) - Direktur Utama
29 November 2022 / December 29, 2022	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Dukungan dalam Pelaksanaan KTT G20, kategori Infrastruktur / Support in Implementation of the G20 Summit, Infrastructure category	PT PLN (Persero) - Direktur Utama
30 November 2022 / November 30, 2022	Warta Ekonomi Group	The Best BUMN 2022 in Category Energy, Oil, and Gas Industry pada Indonesia Best BUMN Awards 2022 / The Best BUMN 2022 in the Energy, Oil, and Gas Industry Category at the Indonesia Best BUMN Awards 2022	PT PLN (Persero)

DESEMBER • DECEMBER

Tanggal Perolehan / Awarding Date	Penyelenggara/ Pemberi Penghargaan / Organizer	Nama Penghargaan / Name of Award	Penerima / Recipient
1 Desember 2022 / December 1, 2022	Katadata	Green Initiative Awards	PT PLN (Persero)
4 Desember 2022 / December 4, 2022	Metro TV	BUMN Berprestasi kategori Deviden untuk Negara pada kegiatan Apresiasi Bagimu Negeri BUMN Berprestasi / SOEs with Achievement in the Dividend category for the State in the activity of Appreciation for the State SOEs with Achievements	PT PLN (Persero)
6 Desember 2022 / December 6, 2022	Komisi Informasi Pusat RI / Central Information Commission of the Republic of Indonesia	Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 Kategori Badan Usaha Milik Negara sebagai Badan Publik Menuju Informatif / Public Agency Information Disclosure Award 2022 Category of State-Owned Enterprise as a Public Agency Towards Informative	PT PLN (Persero)
8 Desember 2022 / December 8, 2022	MarkPlus, Inc	The Best Industry Marketing Champion 2022, kategori 'Utilities' pada Indonesia Marketing Convention (IMC) 2022 / The Best Industry Marketing Champion 2022, 'Utilities' category at the 2022 Indonesia Marketing Convention (IMC)	PT PLN (Persero) - Direktur Utama
10 Desember 2022 / December 10, 2022	Konferensi Federasi Organisasi Persatuan Insinyur se-Asia Tenggara / The Conference of Asian Federation of Engineering Organization	AFE0 Honorary Member	PT PLN (Persero) - Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT)
10 Desember 2022 / December 10, 2022	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Dukungan dalam mengembangkan UMKM selama Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Kalimantan Barat / Support in developing MSMEs during the Proudly Made in Indonesia National Movement in West Kalimantan	PT PLN (Persero)



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications



Tanggal Perolehan / Awarding Date	Penyelenggara/ Pemberi Penghargaan / Organizer	Nama Penghargaan / Name of Award	Penerima / Recipient
12 Desember 2022 / December 12, 2022	CNBC	CEO of The Year	PT PLN (Persero) - Direktur Utama
		Excellent Service and Digital Transformation 2022	PT PLN (Persero)
13 Desember 2022 / December 13, 2022	Bisnis Indonesia	The Best State Owned Enterprise in 2022 pada TOP BUMN Awards	PT PLN (Persero)
13 Desember 2022 / December 13, 2022	Energy and Mining Editor Society (E2S)	The Best CEO Power Company pada Energy and Mining Editor Society Awards 2022 / The Best CEO Power Company at the 2022 Energy and Mining Editor Society Awards	PT PLN (Persero) - Direktur Utama
		The Best Press Release pada Energy and Mining Editor Society Awards 2022 / The Best Press Release at the 2022 Energy and Mining Editor Society Awards	PT PLN (Persero) - EVP KOM dan TJSL
		The Best Public Relation Manager pada Energy and Mining Editor Society Awards 2022 / The Best Public Relation Manager at the 2022 Energy and Mining Editor Society Awards	PT PLN (Persero) - UID Bali - Manager Komunikasi
14 Desember 2022 / December 14, 2022	It Works	Top Digital Implementation 2022 level stars 5 pada Top Digital 2022 / Top Digital Implementation 2022 level stars 5 on Top Digital 2022	PT PLN (Persero)
		Top Leader on Digital Implementation 2022 pada Top Digital 2022 / Top Leader on Digital Implementation 2022 on Top Digital 2022	PT PLN (Persero) - Darmawan Prasodjo
16 Desember 2022 / December 16, 2022	The Economics	Best Corporate Secretary in Electricity Utilities	PT PLN (Persero) - Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
20 Desember 2022 / December 20, 2022	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian / Coordinating Ministry for Economic Affairs	Appreciation of Excellence dalam acara Apresiasi Sukses Presidensi G20 Indonesia 2022 / Appreciation of Excellence in the G20 Indonesia Presidency Success Appreciation event 2022	PT PLN (Persero)
29 Desember 2022 / December 29, 2022	Kementerian LHK / Ministry of LHK	CEO Green Leadership Utama	PT PLN (Persero) - Direktur Utama
		PROPER EMAS / GOLD PROPER	15 Pembangkit Listrik Milik PLN Group / 15 Generators of PLN Group

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

SERTIFIKASI / CERTIFICATIONS

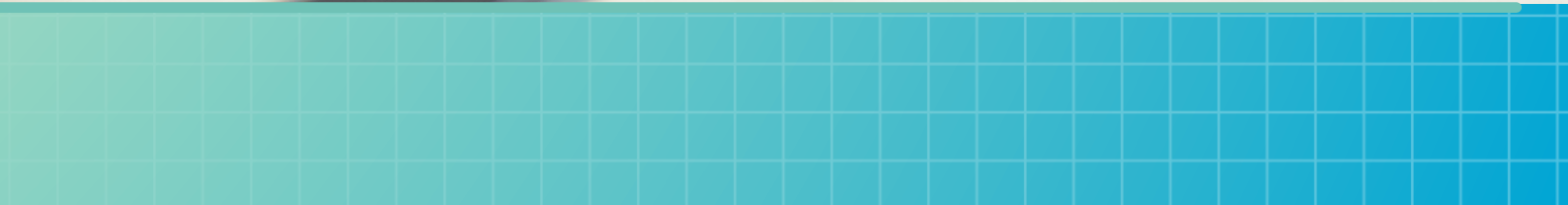
Standar Sertifikasi yang telah disertifikasi di Unit Induk / Standard Certification at Parent Unit	Jumlah / Total	Keterangan / Description
Integrated Management System (IMS)	46	Masih Berlaku di Tahun 2022 / Still Valid in 2022
SNI ISO 9001 : 2015 Sistem Manajemen Mutu / Quality Management Systems	42	Masih Berlaku di Tahun 2022 / Still Valid in 2022
Sistem Manajemen K3 PP No 50 Tahun 2012 (SMK3) / OHS Management System / Government Regulation No. 050 Of 2012 (SMK3)	42	Masih Berlaku di Tahun 2022 / Still Valid in 2022
Sistem Manajemen K3 /ISO 45001:2018 / OHS Management System ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems (SMK3)	27	Masih Berlaku di Tahun 2022 / Still Valid in 2022
SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan / Environmental Management System (SML)	24	Masih Berlaku di Tahun 2022 / Still Valid in 2022
SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan / Anti Bribery Management System (SMAP)	49	Masih Berlaku di Tahun 2022 / Still Valid in 2022
SNI ISO 55001:2014 Sistem Manajemen Aset / Asset Management System (SMA/EAM)	6	Masih Berlaku di Tahun 2022 / Still Valid in 2022
SNI ISO 50001:2012 Sistem Manajemen Energi / Energy Management System (SME)	1	Masih Berlaku di Tahun 2022 / Still Valid in 2022
SNI ISO 17025 Akreditasi Pengujian dan Kalibrasi Laboratorium / Testing and Calibration Laboratories	2	Masih Berlaku di Tahun 2022 / Still Valid in 2022
SNI ISO 22301:2019 Business Continuity Management System (BCMS)	1	Masih Berlaku di Tahun 2022 / Still Valid in 2022
SNI ISO 27001 Sistem Keamanan Informasi	2	Masih Berlaku di Tahun 2022 / Still Valid in 2022
SNI ISO 17065:2015 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) / SNI ISO 17065:2015 – Product Certification Institution	1	Masih Berlaku di Tahun 2022 / Still Valid in 2022
SNI ISO 31000:2009 Sistem Manajemen Risiko / Risk Management System		Guideline Sistem Manajemen / Management System Guideline
SNI ISO 26000:2010 Corporate Social Responsibility (CSR)		Guideline Sistem Manajemen / Management System Guideline

Kilas Kinerja

Performance Highlights

01







Ikhtisar Data Keuangan Penting

Overview on Important Financial Data

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Dalam jutaan rupiah / In millions of Rupiah

Uraian / Description	2018	2019	2020*	2021	2022
ASET / ASSETS					
ASET TIDAK LANCAR / NON-CURRENT ASSETS					
Aset tetap / Property, plant, and equipment	1.336.478.233	1.400.685.118	1.401.888.487	1.427.058.358	1.433.048.983
Aset hak-guna / Right-of-use assets	-	-	31.193.985	29.762.537	29.005.193
Properti investasi / Investment properties	5.125.448	5.283.708	5.408.572	5.451.410	5.623.489
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama / Investment in associates and joint venture	8.726.339	10.300.765	14.112.585	17.810.839	24.243.468
Pajak dibayar di muka / Prepaid taxes	-	-	8.898.076	17.112.377	11.351.639
Aset pajak tangguhan / Deferred tax assets	7.578.386	2.215.963	195.289	264.705	427.448
Piutang pihak berelasi / Receivables from related parties	1.031.237	951.643	1.309.326	1.160.081	1.288.270
Rekening bank dibatasi penggunaannya / Restricted cash in banks	5.688.712	5.980.703	5.882.934	4.861.882	4.454.508
Piutang lain-lain / Other receivables	961.377	824.545	886.052	1.145.976	1.348.132
Piutang dari Pemerintah / Receivables from Government	-	-	17.275.490	18.254.891	2.587.938
Aset tidak lancar lain / Other non-current assets	13.482.762	7.445.895	4.635.419	4.422.025	5.199.459
Biaya dibayar di muka dan uang muka / Prepaid expenses and advances	-	-	-	-	169.367
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	1.379.072.494	1.433.688.340	1.491.686.215	1.527.305.081	1.518.747.894
ASET LANCAR / CURRENT ASSETS					
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents	33.294.560	46.598.783	54.735.434	37.968.399	51.503.096
Rekening bank dibatasi penggunaannya / Restricted cash in banks	-	-	-	206.279	302.386
Investasi jangka pendek / Short-term investment	1.216.886	334.153	366.708	297.720	533.332
Piutang usaha / Trade receivables	23.802.663	25.130.538	21.278.416	23.802.386	24.757.282
Piutang dari Pemerintah / Receivables from Government	-	45.426.981	819.067	8.300.000	18.882.562
Piutang subsidi listrik / Receivables on electricity subsidy	-	-	-	-	-
Piutang lain-lain / Other receivables	9.507.768	2.024.103	1.746.344	1.249.618	1.368.707
Piutang kompensasi / Compensation receivables	23.173.464	-	-	-	-
Persediaan / Inventories	15.506.567	12.934.233	10.277.289	10.393.419	17.534.804
Pajak dibayar di muka / Prepaid taxes	5.894.120	17.634.137	7.287.693	2.701.520	3.524.488
Biaya dibayar di muka dan uang muka / Prepaid expenses and advances	1.007.572	1.206.785	640.881	808.968	646.651
Piutang pihak berelasi / Receivables from related parties	5.954	4.719	76.673	183.066	231.006
Aset lancar lain / Other current assets	5.697	72.241	-	-	107.068
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	113.415.251	151.366.673	97.228.505	85.911.375	119.391.382
JUMLAH ASET / TOTAL ASSETS	1.492.487.745	1.585.055.013	1.588.914.720	1.613.216.456	1.638.139.276

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Overview on Important Financial Data

Uraian / Description	2018	2019	2020*	2021	2022
LIABILITAS DAN EKUITAS / LIABILITIES AND EQUITY					
EKUITAS / EQUITY					
Modal saham / Capital stock	109.826.526	115.181.002	135.342.182	135.460.886	145.536.096
Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham / Stock subscription from Government in issuance process	-	10.528.230	-	10.075.210	5.000.000
Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital	20.179.333	9.919.958	5.216.571	34.608	34.608
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali / Difference in value from transaction with non-controlling interests	-	-	-	-	(2.100)
Saldo laba / Retained earnings	131.017.926	131.332.627	136.585.580	149.619.244	164.095.397
Penghasilan komprehensif lain / Other comprehensive income	665.849.322	661.509.952	661.734.097	685.408.045	675.695.036
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Equity attributable to owners of the parents	926.873.107	928.471.769	938.878.430	980.597.993	990.359.037
Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interests	540.750	908.644	934.162	1.009.130	1.091.529
Jumlah Ekuitas / Total Equity	927.413.857	929.380.413	939.812.592	981.607.123	991.450.566
LIABILITAS JANGKA PANJANG / NON-CURRENT LIABILITIES					
Liabilitas pajak tangguhan / Deferred tax liabilities	13.420.136	28.121.540	31.746.600	45.576.375	48.427.461
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun / Long-term liabilities - net of current portion					
Penerusan pinjaman / Two-step loans	36.105.279	35.251.741	35.501.803	31.778.793	30.182.450
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank / Government and non-bank Government financial institution loans	5.343.629	4.359.569	3.649.146	2.927.754	2.202.823
Utang sewa / Lease liabilities	14.468.336	11.569.377	14.035.913	10.471.903	8.413.952
Utang bank / Bank loans	152.965.997	184.023.820	154.489.751	139.045.012	122.437.243
Utang obligasi dan sukuk ijarah / Bonds payable and sukuk ijara	131.681.821	174.292.298	192.850.308	187.734.643	198.471.221
Utang listrik swasta / Electricity purchase payable	7.115.916	6.431.448	6.097.857	5.711.211	5.711.856
Utang KIK - EBA / KIK - EBA loans	2.221.167	1.354.642	655.772	-	-
Utang pihak berelasi / Payable to related parties	1.000	92	9.432	-	-
Utang lain-lain / Other payables	94.427	133.662	182.093	466.379	671.526
Pendapatan ditangguhkan / Deferred revenue	-	-	5.644.472	13.271.056	20.060.147
Liabilitas imbalan kerja / Employee benefits liabilities	43.760.226	50.838.258	54.609.453	48.087.727	65.038.580
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Non-Current Liabilities	407.177.934	496.376.447	499.472.600	485.070.853	501.617.259
LIABILITAS JANGKA PENDEK / CURRENT LIABILITIES					
Utang usaha / Trade payables	48.607.674	52.002.783	39.148.555	47.904.756	51.083.262
Utang pajak / Taxes payable	2.560.128	2.383.288	1.747.279	1.998.768	2.285.782
Biaya masih harus dibayar / Accrued expenses	14.809.018	11.043.469	6.990.380	6.528.616	7.353.802



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Overview on Important Financial Data

Uraian / Description	2018	2019	2020*	2021	2022
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek / Short-term employee benefits liabilities	5.873.558	10.943.638	8.959.711	10.320.993	9.311.116
Uang jaminan langganan / Customer's security deposits	13.465.735	14.235.879	14.802.396	15.584.069	16.539.411
Utang biaya proyek / Project cost payables	315.828	150.664	153.983	114.546	2.096.511
Pendapatan ditangguhkan / Deferred revenue	929.947	1.049.231	1.617.725	740.906	1.143.357
Liabilitas derivatif / Derivative liabilities	-	-	327.544	107.271	-
Utang jangka panjang - jatuh tempo dalam satu tahun / Current maturities of long-term liabilities					
Penerusan pinjaman / Two-step loans	2.530.273	2.725.805	3.033.168	2.920.412	3.002.264
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank / Government and non-bank Government financial institution loans	1.860.649	1.998.476	2.416.967	1.960.686	1.425.985
Utang sewa / Lease liabilities	2.624.629	2.540.107	4.450.390	4.570.040	4.448.363
Utang bank / Bank loans	28.145.737	21.693.338	18.816.957	26.841.397	29.972.875
Utang obligasi dan sukuk ijarah / Bonds payable and sukuk ijarah	2.120.612	6.946.478	14.970.000	5.420.392	2.863.200
Utang listrik swasta / Electricity purchase payables	394.403	399.458	427.974	457.545	528.890
Utang KIK - EBA / KIK - EBA loans	686.819	586.620	871.177	569.578	-
Utang lain-lain / Other payables	32.970.944	30.598.919	30.895.322	20.498.505	13.016.633
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities	157.895.954	159.298.153	149.629.528	146.538.480	145.071.451
JUMLAH LIABILITAS / TOTAL LIABILITIES	565.073.888	655.674.600	649.102.128	631.609.333	646.688.710
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	1.492.487.745	1.585.055.013	1.588.914.720	1.613.216.456	1.638.139.276

*) Direklasifikasikan kembali / Reclassified

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dalam jutaan rupiah / In millions of Rupiah

Uraian / Description	2018	2019	2020*	2021*	2022
PENDAPATAN USAHA / REVENUE					
Penjualan tenaga listrik / Sales of electricity	263.477.551	276.061.925	274.898.464	288.862.726	311.057.224
Penyambungan pelanggan / Customer connection fees	7.309.172	6.934.597	312.725	493.437	857.468
Subsidi listrik Pemerintah / Government electricity subsidy	48.101.754	51.711.774	47.988.114	49.796.949	58.831.960
Pendapatan kompensasi / Compensation income	23.173.464	22.253.517	17.904.508	23.392.162	63.649.821
Lain-lain / Others	2.111.019	2.644.067	4.311.826	4.426.733	6.735.470
Jumlah Pendapatan Usaha / Total Revenue	272.897.742	359.605.880	345.415.637	366.972.007	441.131.943
BEBAN USAHA / OPERATING EXPENSES					
Bahan bakar dan pelumas / Fuel and lubricants	137.266.678	136.084.482	106.014.285	118.419.490	151.376.726
Pembelian tenaga listrik / Purchased electricity	84.267.611	83.563.991	96.250.367	103.553.472	130.230.383
Sewa / Leases	4.272.082	3.617.376	5.502.571	4.772.014	2.793.187
Pemeliharaan / Maintenance	20.737.601	22.328.178	21.940.509	22.600.774	23.948.698

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Overview on Important Financial Data

Uraian / Description	2018	2019	2020*	2021*	2022
Kepegawaian / Personnel	22.950.087	25.908.771	24.965.707	25.092.756	24.884.860
Penyusutan aset tetap / Property, plant, and equipment	30.744.712	35.318.071	36.662.917	38.327.468	40.992.657
Penyusutan aset hak-guna / Right-of-use assets depreciation	-	-	2.479.663	3.113.803	3.063.978
Lain-lain / Others	7.950.118	8.620.069	7.192.146	7.239.348	8.903.313
Jumlah Beban Usaha / Total Operating Expenses	308.188.889	315.440.938	301.008.165	323.119.125	386.193.802
LABA (RUGI) USAHA / OPERATING PROFIT (LOSS)	(35.291.147)	44.164.942	44.407.472	43.852.882	54.938.141
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI / OPERATING PROFIT AFTER SUBSIDY	35.984.071	44.164.942	44.407.472	43.852.882	54.938.141
Penghasilan/(beban) lain-lain – bersih / Other income/(expenses) – net	15.663.363	(3.667.666)	1.916.966	(3.719.419)	2.841.675
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing – bersih / (Loss)/gain on foreign exchange – net	(10.926.741)	9.486.326	(7.742.152)	2.676.145	(19.790.474)
Penghasilan keuangan / Finance income	804.321	755.103	1.125.519	787.231	687.495
Beban keuangan / Finance costs	(21.624.176)	(24.619.495)	(27.415.886)	(20.375.755)	(17.135.165)
LABA SEBELUM PAJAK / PROFIT BEFORE TAX	19.900.838	26.119.210	12.291.919	23.221.084	21.541.672
BEBAN PAJAK / INCOME TAX EXPENSE	(8.325.082)	(21.797.080)	(6.298.491)	(10.046.207)	(7.126.952)
LABA TAHUN BERJALAN / PROFIT FOR THE YEAR	11.575.756	4.322.130	5.993.428	13.174.877	14.414.720
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak / Other comprehensive income for the year after tax	47.387.046	(4.295.591)	308.766	24.007.703	(9.006.358)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN / TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	58.962.802	26.539	6.302.194	37.182.580	5.408.362
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada: / Income for the year attributable to:					
Pemilik entitas induk / Owners of the parent	11.568.286	7.470	51.208	13.128.626	14.334.040
Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interests	7.470	11.575.756	4.322.130	46.251	80.680
Jumlah / Total	11.575.756	4.322.130	5.993.428	13.174.877	14.414.720
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada: / Total comprehensive income for the year attributable to:					
Pemilik entitas induk / Owners of the parent	58.955.332	(24.669)	6.259.650	37.107.612	5.316.879
Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interests	7.470	51.208	42.544	74.968	91.483
Jumlah / Total	58.962.802	26.539	6.302.194	37.182.580	5.408.362
LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (dalam Rupiah penuh) / EARNINGS PER SHARE BASIC/DILUTED (in full amount)	105.332	37.516	48.439	96.972	99.339

*) Direklasifikasikan kembali / Reclassified



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Overview on Important Financial Data

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Dalam jutaan rupiah / In millions of Rupiah

Uraian / Description	2018	2019	2020*	2021	2022
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi / Net cash provided by operating activities	35.042.025	39.682.505	91.609.951	68.621.074	97.710.224
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi / Net cash used in investing activities	(100.155.597)	(100.981.652)	(69.015.717)	(59.552.028)	(54.763.962)
Kas bersih (digunakan)/diperoleh dari aktivitas pendanaan / Net cash (used)/provided by operating activities	55.638.471	75.002.591	(14.619.905)	(25.880.660)	(30.092.064)
(Penurunan)/Kenaikan bersih kas dan setara kas / (Decrease)/Increase in cash and cash equivalents	(9.475.101)	13.703.444	7.974.329	(16.811.614)	12.854.198
Kas dan setara kas awal tahun / Cash and cash equivalents at the beginning of the year	42.291.959	33.294.560	46.598.783	54.735.434	37.968.399
Kas dan setara kas akhir tahun / Cash and cash equivalents at the end of the year	33.294.560	46.598.783	54.735.434	37.968.399	51.503.096

*)Direklasifikasikan kembali / Reclassified

RASIO KEUANGAN / FINANCIAL RATIOS

Uraian / Description	2018	2019	2020*	2021	2022
Rasio Solvabilitas (%) / Solvency Ratio (%)					
Total Liabilitas terhadap Aset / Debt to Asset Ratio	37,86	41,37	40,85	39,15	39,48
Total Liabilitas terhadap Ekuitas / Liability to Equity Ratio	60,93	70,55	69,07	64,34	65,23
Debt to equity ratio	41,78	48,77	47,95	42,71	41,32
EBITDA to interest expense	315,5	331,7	316,2	437,6	494,5
Rasio Likuiditas (%) / Liquidity Ratio (%)					
Rasio Lancar / Current Ratio	71,83	95,02	64,98	58,63	82,30
Rasio Kas / Cash Ratio	21,86	29,46	36,83	26,11	35,87
Rasio Rentabilitas (%) / Rentability Ratio (%)					
Rasio Laba terhadap Ekuitas / Return on Equity Ratio	1,25	0,47	0,64	1,34	1,45
Rasio Laba terhadap Aset / Return on Asset Ratio	0,78	0,27	0,38	0,82	0,88
Rasio laba terhadap Pendapatan Usaha / Return on Operating Income Ratio	(12,93)	12,28	12,86	12,24	3,27
Rasio Profitabilitas (%) / Profitability Ratio (%)					
Margin Laba Usaha / Operating Profit Margin	10,46	12,28	12,86	12,24	12,45
Margin Laba Bersih / Net Profit Margin	3,36	1,20	1,74	3,58	3,27
EBITDA Margin	19,82	22,71	25,10	24,22	19,21
Rasio Operasional (x) / Operational Ratio (x)					
Perputaran Piutang Usaha / Receivable Turnover	11,39	11,28	11,85	12,82	12,81
Collection Period (Hari) / Collection Period (Day)	32,05	32,35	30,89	28,48	28,49
Perputaran Aset Tetap / Fixed Asset Turnover	0,21	0,20	0,20	0,20	0,22

*)Direklasifikasikan kembali / Reclassified

Ikhtisar Infrastruktur dan Operasional

Infrastructure and Operational Highlights

Uraian / Description	2018	2019	2020*	2021	2022
Jumlah pembangkit (unit)* / Total power plants (unit)*	6.545	6.723	6.677	6.760	6.928
Jumlah pelanggan (juta) / Number of Customers (mio)	71.917.397	75.705.614	79.000.033	82.543.980	85.636.198
Kapasitas terpasang (MW)* / Power Capacity (MW)	57.822	62.833	63.336	64.553	69.040
Produksi Listrik (GWh) / Electricity Production (GWh)	267.085	278.941	274.851	289.471	308.002
Daya mampu pembangkit (MW) / Optimum powerplant capacity (MW)	51.343	58.506	52.263	57.679	61.726
Panjang jaringan transmisi (kms) / Length of transmission network (kms)	53.278	58.959	61.334	64.807	68.206
Panjang jaringan distribusi (kms) / Length of distribution network (kms)	953.460	979.855	1.006.265	1.022.124	1.033.662,09
Penjualan tenaga listrik (GWh) / Sale of electricity (GWh)	234.618	245.518	243.583	257.634	273.761
Susut Jaringan (%) / Network losses (%)	9,51	9,32	9,15	8,59	8,72
Rasio elektrifikasi (%) / Electrification ratio (%)	98,30	98,89	99,20	99,45	99,63

*) Termasuk milik PLN, IPP dan Sewa. / *) Including owned by PLN, IPP and Rent

Ikhtisar Kinerja Lainnya

Other Performance Highlights

Uraian / Description	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Pelanggan / Customer satisfaction Index	89,16%	91,09%	90,75%	95,17%	97,41%
Biaya Training (Rp Miliar) / Training Cost (Rp Billion)	445,2	553,5	255,9	182,0	529
<i>Good Corporate Governance (GCG) Assessment:</i>					
• Jenis asesmen / Assessment type	Independent (BPKP)	Self-assessment	Independent (BPKP)	Self-assessment	Independent (BPKP)
• Skor / Score	87,40	88,11	89,56	90,46	90,026
• Kategori / Category	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent
<i>Tingkat Kesehatan Perusahaan / Corporate Soundness Level</i>					
• Skor KPI Korporat / Corporate KPI Score	96,53	96,41	103,46	107,49	101,92
• Kategori / Category	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA



Pengembangan Energi Baru Terbarukan

New Renewable Energy Development

TRANSFORMASI GREEN

Program Transformasi EBT

Sampai dengan 31 Desember 2022, PLN terus menjalankan Program Transformasi guna menjawab tantangan ke depan, dengan 4 (empat) fokus utama strategi sebagai berikut:

Green	Meningkatkan kapasitas pembangkitan dengan fokus pada EBT, untuk mendukung tercapainya pengadaan listrik yang lebih ramah lingkungan. / Increasing generation capacity by focusing on NRE to support the realization of more environmentally friendly electricity supply.
Innovative	Menciptakan model bisnis inovatif dalam ekosistem ketenagalistrikan yang memberikan kontribusi terhadap revenue PLN, di luar penjualan kWh. / Creating an innovative business model in an electricity ecosystem that contributes to the revenue of PLN outside kWh sales.
Customer-focused	Memberikan kepuasan dan pengalaman lebih baik untuk para pelanggan PLN. / Delivering satisfaction and better experience for PLN's customers.
Lean	Memastikan pengadaan listrik yang andal dan efisien. / Ensuring reliable and efficient electricity supply.

Dalam Pilar Transformasi *Green*, terdapat 3 program utama, yaitu:

1. Implementasi program RJPP 2019-2024 (target COD maksimum di 2024).
2. Program *Green Booster* antara lain program *Co-firing*, pelaksanaan konversi PLTD ke pembangkit EBT.
3. Pengembangan pembangkit EBT lainnya a.l PLTP, PLTA, PLTS, PLTB dll. (ditargetkan COD 2025).

Atas sasaran strategis itu, PLN berfokus pada pengembangan energi bersih dan ramah lingkungan, dengan didukung *strategic initiative* yang menjadi target korporat. Perincian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *Co-firing* biomassa pada pembangkit PLTU PLN dengan target penurunan emisi CO² sebesar 334 ribu ton atau berkurang 0,13% di tahun 2022.
2. Kerja sama kemitraan strategis dengan BUMN untuk menjaga ketersediaan dan keekonomian pasokan biomassa untuk program *Co-firing*.
3. Program Konversi PLTD ke Pembangkit EBT tahap 1 dengan 183 lokasi sebesar 212 MW.
4. Penambahan kapasitas pembangkit Energi Baru dan Terbarukan yang ditargetkan beroperasi di tahun 2022 tersebar di 16 lokasi dengan total kapasitas sebesar 228,69 MW, yang terdiri dari:
 - a. 14 PLTA/M dengan total kapasitas 178,7 MW;
 - b. 1 PLTP dengan total kapasitas 45 MW;
 - c. 1 PLTSa dengan total kapasitas 5 MW.

GREEN TRANSFORMATION

NRE Transformation Program

As of December 31, 2022, PLN continues to carry out Transformation Program to address the future challenges, with 4 (four) main strategic focuses as follows:

In the Green Transformation Pillar, there are 3 main programs, namely:

1. 2019-2024 RJPP program implementation (COD target by 2024 at maximum).
2. Green Booster program, including co-firing program, implementation of PLTD conversion to NRE power plant.
3. Development of other NRE power plants, such as PLTP, PLTA, PLTS, PLTB, etc. (COD target by 2025).

Based on the strategic objective, PLN focuses on developing clean and environmentally friendly energy, supported by the strategic initiative that serves as the corporate targets. The details on the matter are as follows:

1. Implementation of biomass co-firing in PLN PLTU with the CO² emission reduction target of 334 thousand ton or decreased by 0,13% in 2022.
2. Strategic partnership cooperation with SOEs to secure the availability and economic value of biomass supply for co-firing program.
3. Phase 1 of the PLTD to NRE power plants conversion program in 183 locations at 212 MW.
4. Addition of New and Renewable Energy generator capacity which is targeted to operate in 2022 spread across 16 locations with a total capacity of 228.69 MW, consisting of:
 - a. 14 PLTA/M with a total capacity of 178.7 MW;
 - b. 1 PLTP with a total capacity of 45 MW;
 - c. 1 PLTSa with a total capacity of 5 MW.

Pengembangan Energi Baru Terbarukan New Renewable Energy Development

5. Penyelesaian dokumen perencanaan seperti *Feasibility Study* proyek, dokumen perencanaan pengadaan dan dokumen engineering untuk kelanjutan proyek.

5. The completion of planning documents, such as project feasibility study, procurement planning documents, and engineering documents for project continuity.

Perkembangan Transformasi EBT Tahun 2022

Sampai dengan akhir 2022, Perseroan telah merealisasikan sejumlah inisiatif strategis terkait transformasi EBT, dengan uraian sebagai berikut:

1. Implementasi *Co-firing* sebanyak 36 lokasi dengan realisasi energi *Co-firing* sebesar 599,3 GWh atau ekuivalen dengan penggunaan biomassa sebesar 585,7 ribu ton. Adapun, 36 lokasi PLTU yang telah beroperasi dengan *Co-firing*, yaitu:

(1) PLTU Paiton	(11) PLTU PLTU Suralaya 5-7	(21) PLTU Kendari	(31) PLTU Amurang
(2) PLTU Pacitan	(12) PLTU Paiton-9	(22) PLTU Ropa-Ende	(32) PLTU Sumbawa Barat
(3) PLTU Jeranjang	(13) PLTU Pelabuhan Ratu	(23) PLTU PLTU Asam-asam	(33) PLTU Bangka Baru (Air Anyir)
(4) PLTU Suralaya	(14) PLTU Barru	(24) PLTU Sintang	(34) PLTU Pangkalan Susu
(5) PLTU Ketapang	(15) PLTU Adipala	(25) PLTU Pulang Pisau	(35) PLTU Teluk Balikpapan
(6) PLTU Sanggau	(16) PLTU Tj Awar-awar	(26) PLTU Tarahan	(36) PLTU Sebalang
(7) PLTU Anggrek	(17) PLTU Indramayu	(27) PLTU Nagan Raya	
(8) PLTU Rembang	(18) PLTU Kupang Baru	(28) PLTU Punagaya	
(9) PLTU Labuhan Banten	(19) PLTU Bukit Asam	(29) PLTU Belitung (Sage)	
(10) PLTU Lontar	(20) PLTU Suralaya 8	(30) PLTU Berau	

NRE Transformation Progress in 2022

By the end of 2022, the Company had realized several strategic initiatives regarding the NRE transformation, with the description as follows:

1. Co-firing implementation in 36 locations with co-firing energy realization at 599.3 GWh or equivalent to the use of 585.7 thousand tons of biomass. The 36 PLTU locations which have operated through co-firing are as follows:

2. Kerja sama kemitraan strategis dengan BUMN untuk menjaga ketersediaan dan keekonomian pasokan biomassa untuk program *Co-firing*. di antaranya HoA dengan Perhutani, PTPN dan PT Sang Hyang Seri. PLN juga telah melakukan MoU pengelolaan sampah menjadi Bahan Baku Jumputan Padat (BBJP) Plant dengan beberapa Pemerintah Daerah di antaranya Pemkab Ende, Pemprov NTB, Pemkot Cilegon, Pemkot Balikpapan, Pemkot Singkawang, Pemkot Tuban, Pemkot Indramayu, Pemkab Sidoarjo, Pemkot Medan, Pemkot Pekanbaru, Pemkot Tidore dan Pemkot Pangkal Pinang.

2. Strategic partnership cooperation with SOEs to secure the availability and economic value of biomass supply for co-firing program, including HoA with Perhutani, PTPN and PT Sang Hyang Seri. PLN has also entered into an MoU on waste management into Solid Jumputan Raw Material (BBJP) Plant with several local governments including Ende Regency Government, West Nusa Tenggara Provincial Government, Cilegon City Government, Balikpapan City Government, Singkawang City Government, Tuban City Government, Indramayu City Government, Sidoarjo Regency Government, Medan City Government, Pekanbaru City Government, Tidore Municipal Government and Pangkal Pinang Municipal Government.

3. Program Konversi PLTD ke Pembangkit EBT yang akan dilakukan secara bertahap, dengan tahap 1 direncanakan sebesar 212 MW di 183 lokasi di tahun 2022. Namun, Program ini belum sepenuhnya terlaksana pada tahun 2022 dikarenakan beberapa kendala seperti: lokasi proyek yang tersebar dan sulit dijangkau, kompleksitas proyek, skala proyek yang kecil, serta kendala pemenuhan

3. The PLTD to NRE Generator Conversion Program will be carried out in stages, where in phase 1 it was planned for 212 MW in 183 locations in 2022. However, this program has not been fully implemented in 2022 due to several obstacles such as: project locations are spread out and difficult to reach, project complexity, small project scale, and obstacles to complying with regulations



Pengembangan Energi Baru Terbarukan

New Renewable Energy Development

regulasi terkait TKDN sementara pasar lokal belum siap. Kendala-kendala tersebut menjadikan harga yang ditawarkan menjadi lebih mahal. Untuk proyek ini akan semakin diperdalam sehingga akan dapat tereksekusi di tahun berikutnya.

related to TKDN while the local market is not ready yet. These obstacles make the offered price becomes more expensive. This project will be further reviewed so that it can be executed in the following year.

4. Pembangkit EBT baru yang berhasil operasi pada tahun 2022 adalah sebesar 172,25 MW yang tersebar pada 23 lokasi, terdiri dari:

(1) PLTM Maiting Hulu-2 9,01 MW	(7) PLTM Endikat 8,01 MW	(13) PLTM Ussu Malili 3 MW	(19) PLTM Lambur #2 4,16 MW
(2) PLTM Ma'dong 11,39 MW	(8) PLTS Hybrid Selayar 1,3 MW	(14) PLTM Aek Sibundong 10 MW	(20) PLTP Sorik Merapi #3 62,8 MW
(3) PLTM Sungai Buaya 3,46 MW	(9) PLTM Korokabalo 2,8 MW	(15) PLTS Hybrid Sangihe 1,3 MW	(21) PLTS Nusa Penida 3,1 MW
(4) PLTM Batu Brak 7,7 MW	(10) PLTP Sokoria #1 6,58 MW	(16) PLTS Hybrid Medang 0,31 MW	(22) PLTS Terapung Waduk Muara Nusa Dua 0,08 MW
(5) PLTM Cikaengan 5,24 MW	(11) PLTM Tomata 11,18 MW	(17) PLTM Gumiwang-1 0,2 MW	(23) PLTM Kandibata-1 9,7 MW
(6) PLTM Batu Gajah 10 MW	(12) PLTM Sengak-1 0,72 MW	(18) PLTM Gumiwang-2 0,2 MW	

4. The new NRE power plants operating in 2022 with 172,25 MW capacity and spreading across 23 locations were:

5. Terkait dengan penyelesaian dokumen perencanaan EBT, pada 2022 PLN berhasil menyelesaikan sebanyak 7 dokumen kelayakan proyek EBT, 36 dokumen penawaran dan 6 dokumen enjiniring. Penyelesaian dokumen-dokumen ini sangat penting untuk dapat mempersiapkan perencanaan penambahan kapasitas EBT secara matang dan layak dari semua aspek.

5. Regarding the completion of NRE planning documents, in 2022 PLN has succeeded in completing 7 NRE project feasibility documents, 36 bidding documents, and 6 engineering documents. Completion of these documents is very important in order to be able to prepare plans for adding NRE capacity in a mature and feasible manner from all aspects.

PENGEMBANGAN SOLAR PV

Rencana Pengembangan PV Berdasarkan RUPTL 2021-2030

Rencana pengembangan solar PV berdasarkan RUPTL 2021-2030 adalah sebesar 4.680 MW atau sebesar 22,36% dari total pembangkit EBT yang akan dikembangkan sampai dengan tahun 2030.

SOLAR PV DEVELOPMENT

PV Development Plan Based on 2021-2030 RUPTL

The solar PV development plan based on 2021-2030 RUPTL amounting to 4,680 MW or 22.36% of total NRE power plants to be developed until 2030.

Tantangan Pengembangan

Dalam pengembangan pembangkit PLTS terdapat tantangan yang perlu ditinjau lebih lanjut guna kelancaran dalam tahap eksekusi nantinya.

a. Intermittensi PLTS

Kemampuan jaringan PLN untuk menerima listrik dari PLTS menyebabkan peningkatan biaya investasi, juga di sisi PLN.

Development Challenges

In the development of PLTS, there are challenges that need to be addressed to support the execution in the later stages.

a. PLTS Intermittence

The ability of the PLN network to receive electricity from PLTS results in the rising of investment cost, also for PLN.



Pengembangan Energi Baru Terbarukan New Renewable Energy Development

- Investasi tambahan termasuk: *Automatic Generation Control, Precise Forecasting Generation, Automatic Dispatch System, SCADA system upgrading*, dll.
 - Penambahan *spin reserve capacity* (sebagai *back up* pembangkitan)
 - Pengetatan *Grid Code*, merupakan biaya tambahan untuk IPP dan PLN
- b. Optimalisasi TKDN
Regulasi pemerintah yang mensyaratkan nilai minimal TKDN 60% menjadi tantangan dalam pengembangan PLTS mengingat kapasitas produk lokal yang masih belum cukup untuk memenuhi target tersebut.
- c. Lahan
Pengembangan pembangkit PLTS membutuhkan lahan yang cukup besar yaitu sekitar 1,2 - 1.4 Ha untuk kapasitas 1 MWp PLTS, sehingga perlu koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat serta *stakeholder* setempat. Kemudahan perizinan dan pembebasan lahan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proyek PLTS.
- d. Sumber pendanaan
Beberapa masukan dari pengembang yang terkendala, menyampaikan keterbatasan sumber pembiayaan dalam negeri dengan tingkat bunga yang relatif tinggi.
- Additional investments include: *Automatic Generation Control, Precise Forecasting Generation, Automatic Dispatch System, SCADA system upgrading*, etc.
 - Addition of *spin reserve capacity* (as *back up* generator)
 - Tightening of the *Grid Code*, an additional cost for IPP and PLN.
- b. TKDN optimization
Government regulation that requires a minimum TKDN value of at least 60% is a challenge in the development of PLTS considering that local product capacity is still insufficient to meet this target.
- c. Land
The development of PLTS requires a large expanse of land, approximately 1.2 - 1.4 Ha for a capacity of 1 MWp PLTS, thus requiring intensive coordination with the local government and local stakeholders. Ease of licensing and land acquisition become factors of consideration in the implementation of PLTS projects.
- d. Source of funding
Several inputs from developers that faced constraints convey the limited sources of domestic financing with relatively high interest rates

PROGRAM PLTS ATAP

Realisasi Pelanggan PLTS Atap Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi Pelanggan PLTS atap sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 6.522 pelanggan, dengan kapasitas PLTS atap terdaftar adalah 80.454.831 WP (*Watt Peak*).

ROOFTOP PV PROGRAM

Rooftop PV Customer Realization in Quarter IV of 2021

The realization of Rooftop PV customers as of Quarter IV amounted to 6,522 customers, with registered rooftop PV capacity at 80,454,831 WP (*Watt Peak*).

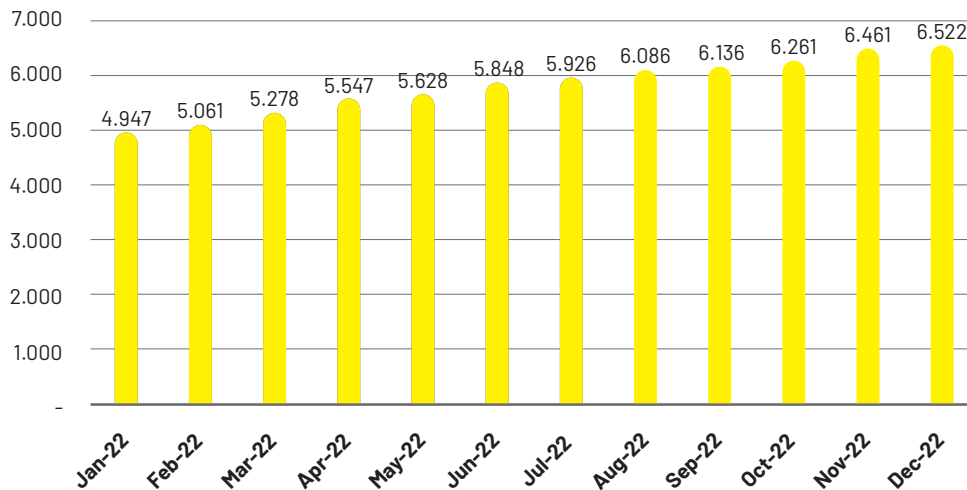


Pengembangan Energi Baru Terbarukan

New Renewable Energy Development

Penambahan Pelanggan PLTS Atap

The Increase of PV Customer



Informasi Saham

Share Information

JUMLAH SAHAM

Sampai dengan 31 Desember 2022, saham Perseroan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sejumlah 439.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- per saham, dengan modal yang sudah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 145.536.096 lembar saham.

INFORMASI SAHAM

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perseroan tidak melakukan penawaran umum perdana saham dan karenanya tidak memperdagangkan saham di bursa mana pun. Atas hal tersebut, tidak terdapat informasi terkait jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan, serta volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan, tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), hingga nama bursa tempat saham dicatatkan.

TOTAL SHARES

As of December 31, 2022, the Company's shares wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia consisting of 439,000,000 shares, with a par value of Rp1,000,000,- per share with subscribed and paid-up capital amounting to 145,536,096 shares.

SHARES INFORMATION

As of December 31, 2022, the Company did not conduct an initial public offering of shares and therefore did not trade its shares on any stock exchange. For this reason, there is no information on the number of outstanding shares, market capitalization based on the price on the Stock Exchange where the shares are listed, the highest, lowest and closing share prices based on the price on the Stock Exchange where the shares are listed, and trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed, year of shares issuance, number of shares, par value of shares, share offering price for each corporate action, number of listed shares after each corporate action, and the name of the stock exchange where the shares are listed.

Aksi Korporasi

Corporate Action

Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham tunggal PLN memberikan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp5 triliun. Pemberian PMN ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 31 Agustus 2022.

Pemberian PMN ini tidak terlepas dari penugasan Pemerintah kepada PLN antara lain berupa program pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan, membangun transmisi gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022.

Selama 2022, Perseroan mempersiapkan Transformasi *Holding* dan *Sub-Holding* sebelum akhirnya aksi korporasi tersebut difinalisasi melalui keputusan Menteri BUMN selaku pemegang saham PLN yang menyetujui pembentukan 4 (empat) *Sub-Holding* PLN yaitu: 2 (dua) *Sub-Holding* pembangkitan (PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power), *Sub-Holding* energi primer yaitu PLN Energi Primer Indonesia, dan *Sub-Holding* Beyond kWh PLN Icon Plus.

Aksi korporasi ini mengalihkan hampir seluruh aset pembangkitan dari PLN Holding ke 2 *Sub-Holding* pembangkitan, serta mengalihkan kepemilikan atas PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) dan PT PLN Gas Geothermal (PLNGG) kepada PT PLN Batubara yang kemudian menjadi PLN Energi Primer Indonesia.

The Government of the Republic of Indonesia as the sole shareholder of PLN increased the State Equity Participation (PMN) amounting to Rp5 trillion. The PMN derives from the State Budget for 2022 Fiscal Year and signed by the President of the Republic of Indonesia in Government Regulation No. 27 of 2022 on Addition of the Republic of Indonesia State Equity Participation in the Share Capital of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Corporation on August 31, 2022.

The provision of this PMN is inseparable from the Government's assignment to PLN, including in the form of an electricity infrastructure funding program, building transmission substations, and distribution of rural electricity for the 2021-2022 development year.

Throughout 2022, the Company was preparing for the Holding and Sub-Holding Transformation before the corporate action was finalized through a decision of the Minister of SOEs as a shareholder of PLN which approves the establishment of 4 (four) PLN Sub-Holdings, namely: 2 (two) generation sub holdings (PLN Indonesia Power and PLN Nusantara Power), the primary energy Sub-Holding, namely PLN Energi Primer Indonesia, and the Beyond kWh PLN Icon Plus Sub-Holding.

This corporate action transferred almost all of the generation assets from PLN Holding to 2 generation Sub-Holdings, as well as transferring ownership of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) and PT PLN Gas Geothermal (PLNGG) to PT PLN Batubara which later became PLN Energi Primer Indonesia.

Peringkat Surat Utang

Debt Securities Rating

Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2022, Perseroan menerima peringkat kredit dari sejumlah lembaga pemeringkat baik yang berskala domestik maupun internasional sebagai berikut:

As of December 31, 2021 and 2022, the Company earned credit rating from several domestic and international rating agencies as follows:

No.	Lembaga Pemeringkat / Rating Agency	Peringkat / Rating		Outlook
		2021	2022	
Domestik / Domestic				
1	Pefindo	AAA	AAA	Stable
Internasional / International				
1	S&P	BBB	BBB	Stable
2	Moody's	Baa2	Baa2	Stable
3	Fitch Ratings	BBB	BBB	Stable
4	Japan Credit Rating (JCR)	BBB+	BBB+	Stable

Peristiwa Penting 2022

2022 Significant Events

1. Pada Triwulan I tahun 2022 telah terbit Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13.K/HK.021/MEM.S/2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara Ke Luar Negeri dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. Dengan adanya keputusan ini diharapkan kepastian dan pemenuhan kebutuhan batubara PLN dapat terpenuhi.
2. Terbitnya PP No 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
3. Terbitnya UU No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diimplementasikan pada awal tahun 2022 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
1. In the first quarter of 2022, the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 13.K/HK.021/MEM.S/2022 on Guidelines for the Imposition of Administrative Sanctions, the Prohibition of Sales of Coal Abroad and the Imposition of Fines and Funds for Compensating Needs Domestic Coal was issued. With this decision, it is hoped that certainty and fulfillment of PLN's coal needs can be fulfilled.
2. Issuance of PP No. 9 of 2022 on the Second Amendment to Government Regulation No. 51 of 2008 on Income Tax on Income from Construction Services Businesses.
3. Issuance of Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations which was implemented in early 2022 where this law is the final amendment to Law No. 8 of 1983 on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods.

Peristiwa Penting 2022

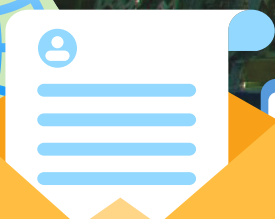
2022 Significant Events

4. Pada Triwulan II tahun 2022 telah terbit Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-162/TL.04/MEM.L/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*) Periode Juli-September 2022.
5. Pada 21 September 2022, Menteri BUMN Erick Tohir melakukan Virtual Launch *Holding dan Sub-Holding* PLN yang merestrukturisasi PLN untuk memiliki 4 Sub-Holding, yaitu 2 Sub-Holding pembangkitan (PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power), *Sub-Holding* energi primer (PLN Energi Primer Indonesia) dan *Sub-Holding* Beyond kwh (PLN Icon Plus).
6. Pada Triwulan IV tahun 2022, PT PLN (Persero) mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo dan *stakeholders* atas kerja keras untuk menyukseskan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bali dalam memberikan keandalan pasokan listrik selama perhelatan internasional tersebut berlangsung.
7. Pada 29 Desember 2022, PLN mencatatkan sejarah dengan meraih 15 penghargaan Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) Emas Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Semakin spesial, dalam anugerah tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, juga mendapatkan penghargaan sebagai CEO Green Leadership Utama.
8. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, kepada perusahaan yang telah menerapkan *Social Future Fit Society*.
9. Pada 30 Desember 2022, Menteri BUMN menyetujui *Legal End State Holding dan Sub-Holding* PLN yang akan berjalan efektif sejak 1 Januari 2023, yang ditandai dengan peralihan aset secara legal dari *Holding* kepada *Sub-Holding*.
4. In the second quarter of 2022, the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. T-162/TL.04/MEM.L/2022 dated June 2, 2022 on Tariff Adjustment for the July-September 2022 Period was issued.
5. On September 21, 2022, the Minister of SOE, Erick Thohir, conducted a Virtual Launch of PLN Holding and Sub-Holding which restructured PLN to have 4 Sub-Holdings, namely 2 generation Sub-Holdings (PLN Indonesia Power and PLN Nusantara Power), primary energy sub holding (PLN Energi Primer Indonesia) and the sub-holding Beyond kwh (PLN Icon Plus).
6. In the fourth quarter of 2022, PT PLN (Persero) received appreciation from President Joko Widodo and stakeholders for their hard work in making the G20 Summit held in Bali a success in providing reliable electricity supply during the international event.
7. On December 29, 2022, PLN made history by winning 15 awards for the 2022 Gold Company Performance Assessment Program (Proper) organized by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). Even more special, in this award, the President Director of PLN, Darmawan Prasodjo, also received an award as the Main Green Leadership CEO.
8. The award was given directly by the Vice President of the Republic of Indonesia, Ma'ruf Amin, to companies that have implemented the Social Future Fit Society.
8. On December 30, 2022, the Minister of SOE approved the Legal End State PLN Holding Sub-Holding which will be effective from January 1, 2023, which was marked by the legal transfer of assets from Holding to Sub Holding.

Laporan Manajemen

Management Report

02





Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga di tengah momentum pemulihan ekonomi di tahun 2022, PT PLN (Persero) mampu mencatatkan pencapaian kinerja yang baik. Seiring hal tersebut, Perseroan juga mampu melaksanakan upaya-upaya yang diperlukan guna menyiapkan pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN, serta memenuhi penugasan dalam memberikan dukungan bagi presidensi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Melalui kesempatan ini, kami mewakili Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan Perseroan untuk tahun 2022. Laporan ini akan memuat antara lain informasi penilaian terhadap kinerja Direksi, mekanisme pengawasan, pandangan atas penerapan tata kelola perusahaan, hingga pandangan atas prospek usaha PLN untuk tahun 2023.

Uraian mengenai masing-masing pembahasan tersebut adalah sebagai berikut.

Let us praise the Almighty God for His blessings and grace, so that PT PLN (Persero) managed to record good performance achievements amid the momentum of economic growth in 2022. Along with this, the Company was also able to carry out the necessary efforts to prepare for the establishment of the PLN Holding and Sub-Holding, as well as fulfill the assignment in providing support for the Indonesian presidency at the G20 Summit.

On this occasion, on behalf of the Board of Commissioners, we would like to deliver a monitoring and advisory report on the management of the Company for 2022. This report contains, among others, information on evaluation of the Board of Directors performance, oversight mechanisms, views on the implementation of corporate governance, and views on PLN's business prospects for 2023.

Description of each of these discussions is as follows.



AMIEN SUNARYADI

**Komisaris Utama dan
Komisaris Independen**
President Commissioner and
Independent Commissioner

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

TINJAUAN EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI

Secara umum, tahun 2022 merupakan tahun ketika aktivitas perekonomian dunia telah berangsur pulih dari dampak pandemi Covid-19. Hal tersebut antara lain dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) sejumlah negara di dunia yang terealisasi secara lebih baik dibanding yang sebelumnya diekspektasikan, merujuk pada simpulan *International Monetary Fund (IMF)* di dalam dokumen *World Economic Outlook* edisi Januari 2023. Indikator-indikator lain yang dapat digunakan sebagai ukuran pemulihan ekonomi dunia adalah tingkat konsumsi sektor swasta serta investasi pada pasar tenaga kerja yang menguat.

MACROECONOMIC AND INDUSTRY REVIEW

In general, 2022 was a year when global economic activities have gradually recovered from the impact of the Covid-19 pandemic. This can be measured, among others, through the Gross Domestic Product (GDP) of several countries in the world which were realized better than previously expected, referring to the conclusion of the International Monetary Fund (IMF) in the January 2023 edition of the *World Economic Outlook* document. Other indicators that can be used as a measure of global economic recovery are the level of private sector consumption and investment in the strengthening labor market.



Sampai dengan 31 Desember 2022, Dewan Komisaris telah menerapkan pengawasan terhadap kinerja Direksi secara saksama, dengan tetap memperhatikan sejumlah faktor yang secara signifikan memberi pengaruh terhadap kinerja Direksi, mencakup perkembangan eksternal dan internal Perseroan.

Meski demikian, di tengah situasi pemulihan tersebut, tetap terdapat sejumlah faktor yang menjadi gangguan bagi stabilitas ekonomi dunia, mencakup tingkat inflasi yang tinggi, konflik terbuka antara Rusia dan Ukraina, hingga gelombang pandemi baru seiring munculnya subvarian Covid-19. Sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina, misalnya, terjadi gangguan pada rantai pasok sejumlah komoditas dunia, antara lain komoditas pangan dan energi. Seiring hal itu, sebagai dampak munculnya subvarian baru Covid-19, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok seiring diterapkannya kembali kebijakan karantina wilayah pada sejumlah kota besar di negara tersebut.

Even so, in the midst of this recovery situation, there were still a number of factors that interrupted world economic stability, including high inflation rates, open conflict between Russia and Ukraine, to a new wave of pandemics due to the emergence of the Covid-19 subvariant. As a result of the Russia-Ukraine conflict, for example, there has been disruption in the supply chains of a number of world commodities, including food and energy commodities. Along with this, as a result of the emergence of a new sub-variant of Covid-19, there was a slowdown in China's economic growth as the regional quarantine policy was reimplemented in a number of major cities in the country.

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

Mengacu pada dokumen *World Energy Outlook 2022* yang dirilis International Energy Agency pada November 2022, konflik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi pada Februari telah memberi dampak pada sistem energi dunia, berupa hambatan pada pola permintaan dan penawaran hingga keretakan pada hubungan perdagangan jangka panjang. Situasi tersebut mendorong terjadinya kenaikan harga-harga komoditas energi, seperti bahan bakar minyak dan gas bumi dengan persentase masing-masing sebesar 90% dan 50%. Sebagai dampaknya, masyarakat pada sejumlah kawasan kehilangan akses terhadap sumber energi modern, dengan

Referring to the *World Energy Outlook 2022* document released by the International Energy Agency in November 2022, the conflict between Russia and Ukraine that occurred in February has had an impact on the world energy system in the form of obstacles to demand and supply patterns to damages in long-term trade relations. This situation prompted an increase in the prices of energy commodities, such as fuel oil and natural gas, with respective percentages of 90% and 50%. As a result, people in a number of regions have lost access to modern energy sources, with around 75 million people who recently had access to electricity losing

As of December 31, 2022, the Board of Commissioners has carefully oversaw of the performance of the Board of Directors, while taking into account a number of factors that significantly influenced the performance of the Board of Directors, including the Company's external and internal developments.

sekitar 75 juta orang yang baru mendapatkan akses listrik kehilangan kemampuan untuk membeli serta 100 juta orang telah beralih kembali pada sumber energi tradisional, antara lain melalui penggunaan biomassa untuk memasak.

Di tengah situasi tersebut, perekonomian Indonesia mampu tetap tumbuh secara baik, didukung oleh pemulihan mobilitas individu, tingkat daya beli masyarakat yang terjaga, serta aktivitas produksi yang ekspansif. Mengacu pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Februari 2023, tingkat inflasi terealisasi secara terjaga dan tetap terkendali, ditutup di angka 5,51% pada Desember 2022 (yoy), dengan *Prompt Manufacturing Index* Bank Indonesia 50,06%. Daya

the ability to buy it and 100 million people having switched back to traditional energy sources, including through the use of biomass for cooking.

In the middle of this situation, the Indonesian economy was able to continue to grow well, supported by the recovery of individual mobility, maintained levels of public purchasing power, and expansive production activities. Referring to data released by Statistics Indonesia in February 2023, the inflation rate was realized in a controlled manner, closing at 5.51% in December 2022 (yoy), with Bank Indonesia's *Prompt Manufacturing Index* of 50.06%. Maintained public purchasing

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

beli masyarakat yang terjaga juga terlihat pada peningkatan nilai transaksi uang elektronik, kartu debit, dan kartu kredit sebesar 0,66% (yoy), sesuai data Bank Indonesia. Seiring situasi tersebut, terjadi peningkatan penjualan listrik secara nasional yaitu sebesar 2,70% (yoy), didorong oleh konsumsi segmen bisnis yang menguat.

Sesuai informasi yang dirilis Kementerian ESDM, konsumsi listrik padalingkupanasional untuk tahun 2022 adalah mencapai 1.173 kWh per kapita, atau meningkat 4,45% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 1.123 kWh. Realisasi tersebut memenuhi 92,51% terhadap target yang sebesar 1.268 kWh. Seiring hal itu, per tahun 2022, Indonesia mencatatkan rasio elektrifikasi mencapai 99,63% atau meningkat 0,18%, dengan kapasitas pembangkit terpasang mencapai 81,2 GW atau meningkat 9,14% dari tahun sebelumnya. Dengan mengacu pada target rasio elektrifikasi yang sebesar 100% per 2022, Pemerintah melalui Kementerian ESDM berfokus pada peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara Timur, serta pulau-pulau lainnya, untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% per tahun 2023.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

Sampai dengan 31 Desember 2022, Dewan Komisaris telah menerapkan pengawasan terhadap kinerja Direksi secara saksama, dengan tetap memperhatikan sejumlah faktor yang secara signifikan memberi pengaruh terhadap kinerja Direksi, mencakup perkembangan eksternal dan internal Perseroan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Dewan Komisaris menilai, Direksi beserta jajaran terkait telah berhasil mencatatkan kinerja yang positif. Kinerja yang positif itu antara lain dapat diukur melalui sejumlah capaian serta penerapan implementasi strategi Perseroan yang dijelaskan sebagai berikut.

power is also evident in the increase in the value of electronic money, debit card, and credit card transactions by 0.66% (yoy), according to data from Bank Indonesia. In line with this situation, there was an increase in national electricity sales of 2.70% (yoy), driven by stronger consumption in the business segment.

According to information released by the Ministry of Energy and Mineral Resources, national electricity consumption in 2022 was 1,173 kWh per capita, or an increase of 4.45% compared to the previous year which at 1,123 kWh. Such realization met 92.51% of the target of 1,268 kWh. In line with this, Indonesia recorded an electrification ratio of 99.63% in 2022, an increase of 0.18%, with installed generating capacity reaching 81.2 GW or an increase of 9.14% from the previous year. With reference to the electrification ratio target of 100% by 2022, the Government through the Ministry of Energy and Mineral Resources is focusing on increasing the electrification ratio in eastern Indonesia, namely Maluku, North Maluku, Papua, East Nusa Tenggara, and other islands, to achieve an electrification ratio of 100 % as of 2023.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE AND THE IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S STRATEGY

As of December 31, 2022, the Board of Commissioners has carefully supervised the Board of Directors performance, while taking into account factors that significantly influenced the Board of Directors, including the Company's external and internal developments. Based on the results of this supervision, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors and related staff have succeeded in recording positive performance. This positive performance can be measured, among others, through achievements and implementation of the Company's strategy which are explained as follows.

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

Untuk tahun 2022, Perseroan tercatat mampu memperoleh kinerja operasional dan keuangan yang kuat. Hal tersebut di antaranya terlihat melalui realisasi produksi listrik yang mencapai 308.002,30 GWh atau meningkat 6,40%, dengan jumlah produksi sendiri 179.495,52 GWh atau meningkat 1,13% dibanding tahun sebelumnya. Atas jumlah produksi tersebut, Perseroan mencatatkan penjualan listrik mencapai 273.761 GWh, atau meningkat 6,26% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian, pada kinerja keuangan, Perseroan mampu mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp441,13 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 20,21%. Perolehan laba usaha Perseroan di tahun 2022 adalah Rp54,94 triliun, meningkat 25,28% dari tahun sebelumnya.

Kinerja operasional yang baik untuk tahun 2022 juga terlihat melalui hasil pengukuran indeks lama gangguan (*System Average Interruption Duration Index/SAIDI*) serta indeks frekuensi gangguan (*System Average Interruption Frequency/SAIFI*), dengan perolehan masing-masing sebesar 463,20 menit/pelanggan serta 5,62 kali/pelanggan. Perolehan kedua indeks tersebut memperlihatkan adanya perbaikan tingkat keandalan layanan dibanding tahun sebelumnya, dengan persentase 14,24-16,12%.

Dewan Komisaris menilai, Direksi beserta jajaran terkait telah mampu menjaga pemenuhan kinerja Perseroan terhadap target yang disusun. Di tahun 2022, penjualan listrik mencapai 273.761 GWh atau memenuhi 104% terhadap target. Seiring kinerja operasional tersebut, pendapatan usaha yang diperoleh Perseroan pada tahun 2022 adalah mencapai Rp441,13 triliun atau memenuhi sebesar 107% terhadap RKAP 2022, dengan perolehan laba usaha sejumlah Rp54,94 triliun atau setara 174% terhadap target.

For 2022, the Company was capable of obtaining strong operational and financial performance. This can be seen, among others, through the realization of electricity production which reached 308,002.30 GWh or an increase of 6.40%, with total own production of 179,495.52 GWh or an increase of 1.13% compared to the previous year. For this amount of production, the Company's electricity sales reached 273,761 GWh, an increase of 6.26% compared to the previous year. Then, in terms of financial performance, the Company posted revenues of Rp441.13 trillion, an increase from the previous year of 20.21%. The Company's operating profit in 2022 was Rp54.94 trillion, an increase of 25.28% from the previous year.

Good operational performance in 2022 can also be seen through the measurement results of the System Average Interruption Duration Index (SAIDI) and the System Average Interruption Frequency (SAIFI) index, with respective acquisitions of 463.20 minutes/customer and 5.62 times/customer. The acquisition of these two indexes shows an improvement in the level of service reliability compared to the previous year, with a percentage of 14.24-16.12%.

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors and related staff have been able to maintain the fulfillment of the Company's performance against the targets set. In 2022, the electricity sales reached 273,761 GWh or fulfilling 104% of the target. In line with this operational performance, the revenue earned by the Company in 2022 reached Rp441.13 trillion or 107% of the 2022 RKAP, with an operating profit of Rp54.94 trillion or 174% of the target.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Sejalan dengan penilaian Dewan Komisaris, kinerja Direksi atas pengelolaan Perseroan juga dinilai melalui sejumlah perangkat penilaian, meliputi penilaian melalui *Key Performance Indicators* (KPI) dan *assessment* GCG, yang masing-masing memperlihatkan hasil yang baik. Untuk penilaian KPI, Direksi mampu memenuhi sejumlah target capaian pada masing-masing program kerja dengan perolehan skor keseluruhan mencapai 101,92. Direksi, sebagai salah satu aspek *assessment* GCG, telah mendapat penilaian dari BPKP sebagai pihak penilai untuk tahun 2022 dengan besaran skor GCG korporat sebesar 90,026.

Secara khusus, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras Direksi beserta jajaran terkait dalam melaksanakan program transformasi perusahaan melalui pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN di tahun 2022. Dewan Komisaris menilai, Direksi telah menerapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam merencanakan, mematangkan, hingga melaksanakan pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN, seiring pendekatan yang baik dengan segenap unsur pemangku kepentingan.

Atas seluruh pencapaian Perseroan hingga pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN di tahun 2022, Dewan Komisaris optimistis, Perseroan akan mampu berakselerasi memperkuat kontribusi melalui efisiensi proses bisnis dan utilisasi aset yang jauh lebih optimal.

MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan peran pengawasan terhadap pengelolaan bisnis dan operasional yang dilaksanakan oleh Direksi. Sebagai bagian dari penerapan GCG, praktik pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan guna sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances*, dengan lingkup penerapan mencakup penyusunan dan penerapan rencana kerja tahunan hingga kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In line with the assessment of the Board of Commissioners, the performance of the Board of Directors in managing the Company is also assessed through a number of assessment tools, including assessments through *Key Performance Indicators* (KPI) and GCG assessments, each of which shows good results. For KPI assessment, The Board of Directors was able to meet several achievement targets in each work program with an overall score of 101.92. The Board of Directors, as one of the GCG assessment aspects, has received an assessment from the BPKP as the assessor for 2022 with a corporate GCG score amounted to 90.026.

In particular, the Board of Commissioners appreciates the efforts and hard work of the Board of Directors and related staff in implementing the Company's transformation program through the establishment of a PLN Holding and Sub-Holding in 2022. The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has implemented the necessary steps in planning, finalizing, and implementing establishment of PLN Holding and Sub-Holding, along with a good approach with all elements of stakeholders.

For all of the Company's achievements up to the establishment of the PLN Holding and Sub-Holding in 2022, the Board of Commissioners is optimistic that the Company will be able to accelerate the strengthening of its contribution through business process efficiency and far more optimal asset utilization.

OVERSIGHT MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF COMPANY STRATEGY

In accordance with the applicable laws and regulations, the Board of Commissioners has the duty and responsibility to carry out the oversight role of the business and operational management carried out by the Board of Directors. As part of the implementation of GCG, the supervisory practices of the Board of Commissioners are carried out as part of a checks and balances mechanism, with the scope of implementation covering the preparation and implementation of the annual work plan to compliance with the Articles of Association, GMS Resolutions, and applicable laws and regulations.

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

Untuk 2022, Dewan Komisaris memastikan, mekanisme pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur di dalam Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Dewan Komisaris dan Direksi. Sesuai ketentuan tersebut, mekanisme pengawasan juga telah mencakup penyusunan dan penerapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta strategi jangka panjang di dalam Rencana Jangka Panjang (RJP).

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat kepada Direksi

Seiring pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat, berupa saran, rekomendasi, dan arahan, kepada Direksi. Penyampaian nasihat diterapkan sejalan dengan praktik pengawasan, yaitu mencakup penyusunan dan penerapan RKAP dan RJP Perseroan, dengan ketentuan yang diatur di dalam Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Dewan Komisaris dan Direksi.

Selama 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan pemberian nasihat kepada Direksi secara baik, sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai cara pemberian nasihat, Dewan Komisaris menghadiri rapat konsultasi bersama Direksi yang telah terselenggara sejumlah 12 kali dalam satu tahun. Dewan Komisaris juga telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi tertentu dengan frekuensi pelaksanaan sejumlah 21 kali dalam satu tahun.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai organ pengawas dan pemberi nasihat Perseroan, Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi beserta seluruh jajaran terkait untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Melalui pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris memastikan aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi beserta jajaran terkait senantiasa memenuhi praktik-praktik terbaik GCG, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta standar penerapan yang berlaku bagi Perseroan.

For 2022, the Board of Commissioners ensured that the oversight mechanism for the implementation of the Company's strategy has been carried out in accordance with the provisions stipulated in the Board of Commissioners and Board of Directors Work Procedures (*Board Manual*). In accordance with these provisions, the oversight mechanism has also included the preparation and implementation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as well as the long-term strategy in the Long-Term Plan (RJP).

Frequency and Method of Providing Advice to the Board of Directors

Along with supervising the implementation of the Company's strategy, the Board of Commissioners has carried out the duties and responsibilities of providing advice in the form of suggestions, recommendations, and directions, to the Directors. Submission of advice is carried out in line with supervisory practices which includes the preparation and implementation of the Company's RKAP and RJP, with provisions regulated in the Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Throughout 2022, the Board of Commissioners has carried out the provision of advice to the Board of Directors properly, in accordance with applicable regulations. As a way of providing advice, the Board of Commissioners attends consultation meetings with the Board of Directors which have been held 12 times a year. The Board of Commissioners has also held meetings of the Board of Commissioners by inviting certain members of the Board of Directors with a frequency of 21 times a year.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

As the supervisory and advisory organ of the Company, the Board of Commissioners always encourages the Board of Directors and all related staff to implement good corporate governance (GCG) practices. Through supervision and advisory, the Board of Commissioners ensures that management activities carried out by the Board of Directors and related staff always comply with GCG best practices, based on statutory regulations and implementing standards that apply to the Company.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Dewan Komisaris memandang bahwa selama tahun 2022 Direksi beserta jajaran terkait telah melaksanakan pengelolaan Perseroan sesuai penerapan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dewan Komisaris telah memastikan, Direksi beserta jajaran terkait telah melaksanakan pengelolaan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan serta standar penerapan GCG, sesuai status dan lingkup industri Perseroan.

Dewan Komisaris memandang, sebagai dukungan terhadap pelaksanaan transformasi perusahaan dan pembentukan *Holding dan Sub-Holding PLN di tahun 2022, Direksi dan jajaran terkait telah melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam memperkuat struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan. Hal itu terwujud antara lain dengan implementasi program *Breakthrough Organization Structure serta pemutakhiran sejumlah perangkat *soft-structure Perseroan, mencakup Anggaran Dasar, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja, Tata Laksana Kerja (Board Manual) Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS), hingga piagam Komite Audit.***

Penerapan praktik GCG yang telah dilaksanakan secara baik selama 2022 dapat diukur melalui hasil penilaian GCG oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan perolehan skor 90,026 atau dalam kategori "Sangat Baik". Skor tersebut memperlihatkan adanya peningkatan pencapaian dibanding hasil penilaian pada periode asesmen sebelumnya tahun 2020 oleh lembaga independen dengan perolehan skor 89,559 atau dalam kategori "Sangat Baik".

Pandangan atas Penerapan Manajemen Risiko

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan GCG, Dewan Komisaris menerapkan pengawasan dan pemberian nasihat atas fungsi manajemen risiko yang dimiliki dan dioperasikan di lingkup internal Perseroan. Atas hal tersebut, Dewan Komisaris telah didukung oleh keberadaan Komite Manajemen Risiko, yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain mencakup koordinasi implementasi hingga pengawasan terhadap keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen *Risk Maturity Index (RMI) PLN.*

Throughout 2022, the Board of Commissioners views that the Board of Directors and related staff have carried out the management of the Company in accordance with the implementation of GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The Board of Commissioners has ensured that the Board of Directors and related staff have carried out management by complying with laws and regulations and GCG implementation standards, according to the status and scope of the Company's industry.

The Board of Commissioners views that, as support for the implementation of the Company transformation and the establishment of the PLN Holding and Sub-Holding in 2022, the Board of Directors and related ranks have taken the necessary steps to strengthen the structure and infrastructure of the Company's governance. This was realized, among others, by implementing the Breakthrough Organization Structure program as well as updating soft-structure tools of the Company, including the Articles of Association, Organizational Guidelines and Work Procedures, Board Manuals for the Board of Commissioners and Board of Directors, Whistleblowing System policies (WBS), to the Audit Committee charter.

The implementation of GCG practices that have been well implemented in 2022 can be measured through the results of the GCG assessment by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) with a score of 90.026 or in the "Excellent" category. This score shows an increase in achievement compared to the results of previous assessment by independent institution for period 2020 with a score of 89.559 or in the "Excellent" category.

Views on the Implementation of Risk Management

As an integral part of GCG implementation, the Board of Commissioners supervises and provides advice on the risk management function that is owned and operated within the Company's internal scope. On this matter, the Board of Commissioners has been supported by the existence of a Risk Management Committee, which carries out duties and responsibilities which include, among others, coordination of implementation to supervision of the existence and level of effectiveness of each component of PLN's Risk Maturity Index (RMI).

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

Untuk 2022, Dewan Komisaris memandang, Direksi beserta jajaran terkait telah melaksanakan implementasi manajemen risiko secara baik. Hal tersebut terlihat melalui pengelolaan profil dan kajian risiko pada seluruh lapisan organisasi, yaitu unit, divisi, hingga anak perusahaan. Sesuai *roadmap* menuju level *maturity 4.0*, Direksi beserta jajaran terkait juga telah menerapkan 2 *stream* strategi *capacity building*, dengan sejumlah 23.970 pegawai telah mengikuti program diklat pembelajaran dan sejumlah 1.813 pegawai telah mengikuti program sertifikasi manajemen risiko. Selain itu, selama tahun 2022, Perseroan melalui masing-masing pemilik risiko telah menerapkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi (Smarter), yang selain berfungsi sebagai *database* dan *risk register* juga memberi kemampuan dalam menunjang pemantauan pelaksanaan mitigasi dan *Early Warning System* (EWS) atasi *Key Risk Indicator* (KRI) pada setiap profil risiko.

Secara berkala, Perseroan melaksanakan penilaian tingkat kematangan manajemen risiko atau *Risk Management Maturity* (RMM), yaitu setiap semester pada seluruh entitas yaitu divisi/satuan kantor pusat, unit induk, anak perusahaan, dan korporat. Untuk 2022, penilaian tingkat kematangan manajemen risiko Perseroan dilakukan dengan pengukuran *Risk Maturity Index* (RMI), dengan skor penilaian secara korporat pada semester II sebesar 3,14, atau berada di atas target yang sebesar 3,10, serta meningkat dibanding skor pada semester I yang sebesar 2,85.

Pandangan atas Kinerja Fungsi Kepatuhan

Dewan Komisaris memahami bahwa fungsi kepatuhan merupakan unsur penting dalam keseluruhan praktik GCG, sebagai bagian dari penerapan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) di dalam tata kelola perusahaan PLN. Keberadaan fungsi kepatuhan merupakan wujud dari upaya PLN untuk memastikan sistem, kebijakan, dan proses bisnis yang dilaksanakan senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG. Atas kesadaran tersebut, Dewan Komisaris secara saksama menerapkan pengawasan terhadap penerapan fungsi kepatuhan Perseroan, yang dilaksanakan melalui keberadaan Divisi Kepatuhan.

For 2022, the Board of Commissioners views that the Board of Directors and related staff have implemented risk management properly. This can be seen through the management of risk profiles and review at all levels of the organization, namely units, divisions, and subsidiaries. In accordance with the roadmap towards maturity level 4.0, the Board of Directors and related staff have also implemented 2 streams of capacity building strategies, with a total of 23,970 employees having attended the education and training program and a total of 1,813 employees having attended the risk management certification program. In addition, throughout 2022, the Company through each risk owner has implemented the use of the Integrated Risk Management Information System (Smarter) application, which besides functioning as a database and risk register also provides the ability to support monitoring of mitigation implementation and the Early Warning System (EWS) or Key Risk Indicator (KRI) for each risk profile.

The Company periodically carries out an assessment of the level of Risk Management Maturity (RMM), which is every semester for all entities, namely divisions/units of the head office, parent units, subsidiaries, and corporates. In 2022, the assessment of the Company's risk management maturity level was carried out by measuring the Risk Maturity Index (RMI), with a corporate assessment score in the second semester at 3.14, or above the target at 3.10, and an increase compared to the score in semester I at 2.85.

View on Compliance Function Performance

The Board of Commissioners understands that the compliance function is an important element in all GCG practices, as part of the implementation of Governance, Risk Management and Compliance (GRC) in PLN's corporate governance. The existence of the compliance function is a manifestation of PLN's efforts to ensure that the systems, policies, and business processes are always in accordance with laws and regulations and GCG principles. Based on this awareness, the Board of Commissioners carefully supervises the implementation of the Company's compliance function, which is carried out through the existence of the Compliance Division.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Dewan Komisaris memandang fungsi kepatuhan Perseroan telah diterapkan secara baik selama tahun 2022. Hal tersebut dapat diukur melalui pencapaian kinerja Divisi Kepatuhan dengan rata-rata *Maturity Level* Kepatuhan Unit Induk pada level 4,22 dari skala 5,00, dengan Divisi/Satuan rata-rata pada level 4,18 dari skala 5,00. Di samping itu, penerapan fungsi kepatuhan juga dapat diukur melalui hasil evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi oleh UPG Perseroan dengan perolehan skor 98,65. Kepatuhan pegawai dalam melaporkan ada atau tidak adanya kejadian gratifikasi dan *conflict of interest* rata-rata sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 98,63% dari total seluruh pegawai. Hal lain yang dapat menjadi acuan dalam menilai penerapan fungsi kepatuhan untuk tahun 2022 antara lain hasil Survei *Awareness* Kepatuhan dengan perolehan sebesar 97,75% dari total seluruh pegawai 42.741 pegawai, serta penyampaian LHKPN yang mencapai 100%, dengan total wajib lapor LHKPN sejumlah 8.819 wajib lapor.

Hasil penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2022 telah mendapatkan pengakuan eksternal, berupa pemerolehan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP untuk Kantor Pusat, seluruh Unit Induk dan seluruh Anak Perusahaan. Selain itu, pada 2022, Perseroan kerap diundang untuk menjadi Narasumber oleh beberapa Perusahaan BUMN maupun swasta khususnya terkait tema implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS). Perseroan juga mengikuti kegiatan acara Hakordia yang diselenggarakan oleh KPK RI pada Desember 2022.

Pandangan atas Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) dan Peran Dewan Komisaris dalam WBS

Dewan Komisaris melaksanakan pemantauan terhadap pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS) Perseroan, sebagai bagian dari penerapan fungsi pengawasan terhadap praktik GCG. Secara mendasar, Perseroan melakukan pengelolaan terhadap WBS dengan tujuan untuk mencegah dan menangani dugaan praktik korupsi, suap, dan praktik-praktik kecurangan yang terjadi di dalam lingkup internal, yang dilaksanakan di bawah tanggung jawab Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai pihak pelaksana mekanisme WBS PLN.

The Board of Commissioners views that the Company's compliance function has been implemented properly in 2022. This can be measured through the achievement of the performance of the Compliance Division with the average *Maturity Level* of Compliance of the Parent Unit at the level of 4,22 out of a scale of 5.00, with the average Division/Unit at the level 4,18 out of a scale of 5.00. In addition, the implementation of the compliance function can also be measured through the results of an evaluation of the implementation of gratuity control by the Company's UPG with a score of 98.65. Employee compliance in reporting the gratuities and conflicts of interest on average as of December 31, 2022 was 98.63% of the total number of employees. Other matters that can be used as a reference in assessing the implementation of the compliance function in 2022 include the results of the Compliance Awareness Survey with an acquisition 97.75% of 42,741 employees, and LHKPN submissions reaching 100% with total of 8,819 people required to report LHKPN.

The result of the implementation of the compliance function carried out as of 2022 received external recognition, namely SNI ISO 37001:2016 SMAP Certification for the Head Office, all Main Units and Subsidiaries. In addition, in 2022, the Company was often invited to become a speaker by several state-owned and private companies, especially regarding the implementation of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System and Management of Whistleblowing System (WBS). The Company also participated in the Hakordia event organized by the KPK RI in December 2022.

Views on the Implementation of the *Whistleblowing System* (WBS) and the Role of the Board of Commissioners in the WBS

The Board of Commissioners monitors the management of the Company's *Whistleblowing System* (WBS) as part of the implementation of the oversight function of GCG practices. Fundamentally, the Company manages the WBS with the aim of preventing and dealing with allegations of corruption, bribery, and fraud practices that occur within the internal scope, which is carried out under the responsibility of the Internal Audit Unit (SPI) as the implementing party of the PLN WBS mechanism.

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

Untuk 2022, Dewan Komisaris memandang, WBS Perseroan telah diterapkan dan dikelola secara baik dengan didukung oleh keberadaan infrastruktur yang memadai. Dewan Komisaris menilai Perseroan telah memiliki mekanisme pelaporan, perlindungan bagi pelaporan, dan tindak lanjut atas laporan pengaduan yang diterima, dengan didukung pedoman pengelolaan sesuai dengan Peraturan Direksi No. 0010.P/DIR/2022 tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di lingkungan PT PLN (Persero) tanggal 02 Maret 2022. Di samping itu, Perseroan juga telah menyediakan sejumlah media penyampaian pelaporan yang dapat diakses secara mudah, dengan prosedur penyampaian pengaduan yang telah disosialisasikan secara luas. Adapun, media pengaduan WBS berupa *website*, telepon/WA/SMS, *e-mail* dan surat yang selanjutnya didokumentasikan pada media aplikasi WBS.

Sebagai hasil dari penerapan WBS pada 2022, pihak pengelola WBS telah memproses 220 materi pengaduan, yang seluruhnya telah selesai dilakukan analisis dan evaluasi pengaduan, dengan rincian pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 77 materi pengaduan (35%), terkait operasional/kepegawaian sebanyak 97 materi pengaduan (44%), serta yang masuk dalam kategori *Fraud* dan/atau Pelanggaran sebanyak 46 (21%).

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan fungsinya sebagai organ pengawas pengelolaan Perseroan dengan didukung oleh keberadaan 3 (tiga) komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Manajemen Risiko. Secara periodik, Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap ketiga komite, dengan mengukur pemenuhan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang termuat di dalam piagam komite. Di samping itu, penilaian terhadap komite juga dilakukan melalui pengukuran pemenuhan pelaksanaan program kerja komite dengan *Key Performance Indicators* (KPI).

For 2022, the Board of Commissioners views that the Company's WBS has been properly implemented and managed, supported by adequate infrastructure. The Board of Commissioners considers that the Company has a reporting mechanism, protection for reporting, and follow-up on received reports of complaints, supported by management guidelines in accordance with Regulation of the Board of Directors No.0010.P/DIR/2022 on Whistleblowing System within PT PLN (Persero) dated March 2, 2022. In addition, the Company has also provided a number of reporting media that can be easily accessed, with complaints submission procedures that have been widely disseminated. The WBS complaint media are in the form of websites, telephone/WA/SMS, e-mail, and letters which are then documented on the WBS application media.

As a result of the implementation of the WBS in 2022, the WBS manager has processed 220 complaint materials, all of which have been completed with analysis and evaluation of complaints, with details of complaints that cannot be followed up at 77 complaint materials (35%), related to operations/staffing at 97 materials complaints (44%), and 46 (21%) fall into the category of Fraud and/or Violation.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners carries out its function as a supervisory organ for the management of the Company supported by 3 (three) committees, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Committee. The Board of Commissioners periodically evaluates the three committees by measuring the fulfillment of duties and responsibilities according to the provisions contained in the committee charter. In addition, the assessment of the committee is also carried out by measuring the fulfillment of the implementation of the committee's work program using *Key Performance Indicators* (KPI).

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report



1. AMIEN SUNARYADI
Komisaris Utama dan
Komisaris Independen
 President Commissioner and
 Independent Commissioner

2. SUAHASIL NAZARA
Wakil Komisaris Utama
 Vice President Commissioner

3. MOHAMAD IKHSAN
Komisaris
 Commissioner

4. DUDY PURWAGANDHI
Komisaris
 Commissioner

5. EKO SULISTYO
Komisaris
 Commissioner



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report



6. SUSIWIJONO MOEGIARSO
Komisaris
Commissioner

7. DADAN KUSDIANA
Komisaris
Commissioner

8. TEDI BHARATA
Komisaris
Commissioner

9. ALEX ISKANDAR MUNAF
Komisaris Independen
Independent Commissioner

10. CHARLES SITORUS
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Penilaian terhadap kinerja masing-masing komite untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Komite Audit

Untuk 2022, Dewan Komisaris menilai, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik. Sesuai ketentuan di dalam piagam komite, Komite Audit telah melaksanakan *review* tersebut proses penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP), melakukan *review* terhadap progres dan hasil akhir pekerjaan KAP, melakukan pengawasan terhadap aktivitas Satuan Pengawas Internal (SPI), hingga menelaah dan memberi tanggapan atas Laporan Manajemen secara triwulanan di tahun 2022.

Kinerja Komite Audit yang baik untuk 2022 antara lain dapat diukur melalui pelaksanaan rapat kerja internal yang sejumlah 39 kali, atau telah memenuhi program kerja sesuai KPI Komite Audit. Sesuai program kerja di dalam KPI, Komite Audit juga telah menghadiri rapat dengan Dewan Komisaris sejumlah 28 kali, serta melakukan kunjungan kerja ke unit/anak perusahaan sejumlah 14 kali.

Secara keseluruhan, pencapaian KPI Komite Audit tahun 2022 terlihat pada perolehan skor yang sejumlah 103 dari bobot maksimal sebesar 100. Penjabaran terperinci mengenai pencapaian KPI Komite Audit tahun 2022 dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan, subbagian *Key Performance Indicators* (KPI) Komite Audit.

Komite Manajemen Risiko

Dewan Komisaris menilai Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik pada 2022. Sesuai ketentuan di dalam piagam komite, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mencakup aktivitas penelaahan atas manajemen risiko serta pengendalian internal Perseroan. Di samping itu, Komite Manajemen Risiko telah melakukan 29 kajian atas permintaan Direksi, untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris.

The assessment of the performance of each committee for 2022 is as follows.

Audit Committee

The Board of Commissioners considers that the Audit Committee has carried out its duties and responsibilities properly in 2022. In accordance with the provisions in the committee charter, the Audit Committee has carried out a review of the process of establishing a Public Accounting Firm (KAP), reviewed the progress and final results of KAP work, supervised the activities of the Internal Audit Unit (SPI), as well as reviewed and provided responses to reports Management quarterly in 2022.

The good performance of the Audit Committee for 2022, among others, can be measured through the convention of 39 internal work meetings or having fulfilled the work program according to the Audit Committee KPI. In accordance with the work program in the KPI, the Audit Committee has also attended 28 meetings with the Board of Commissioners, as well as made 14 working visits to units/subsidiaries.

Overall, the achievement of the Audit Committee KPI in 2022 can be seen in the acquisition of a score of 103 out of a maximum value of 100. A detailed description of the achievement of the Audit Committee KPI in 2022 can be seen in the Corporate Governance chapter, the Audit Committee's Key Performance Indicators (KPI) subchapter.

Risk Management Committee

The Board of Commissioners considers that the Risk Management Committee has carried out its duties and responsibilities appropriately in 2022. In accordance with the provisions in the committee charter, the Risk Management Committee has carried out duties and responsibilities including reviewing risk management activities and the Company's internal controls. In addition, the Risk Management Committee has conducted 29 reviews at the request of the Board of Directors to obtain recommendations or approval from the Board of Commissioners.

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

Kinerja Komite Manajemen Risiko untuk tahun 2022 dapat diukur melalui perolehan skor KPI Komite yang sebesar 100, dari bobot maksimal sebesar 100. Sesuai program kerja di dalam KPI Komite, Komite Manajemen Risiko telah melakukan *review* dan tanggapan atas rencana Perseroan, melaksanakan sejumlah program kerja strategis, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas triwulanan kepada Dewan Komisaris. Uraian lebih lanjut mengenai pencapaian KPI Komite Manajemen Risiko tahun 2022 dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan, subbagian *Key Performance Indicators* (KPI) Komite Manajemen Risiko.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris menilai, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik untuk tahun 2022, yang terlihat melalui pencapaian skor KPI Komite sebesar 100, atau memenuhi pencapaian bobot maksimal. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan seluruh program kerja komite, mencakup pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan organisasi dan SDM, penilaian kinerja Direksi, mengawasi pengelolaan dan pengembangan SDM, hingga melakukan penelaahan terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas untuk tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan penelaahan terhadap usulan perubahan *blueprint* organisasi dan pengusulan wakil PLN pada *Sub-Holding*/anak perusahaan dalam rangka pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN. Terkait hal tersebut, Komite juga telah melakukan penelaahan terhadap permohonan persetujuan perubahan organisasi dan tata kerja Perseroan serta menelaah usulan penunjukan pejabat Direksi dan Dewan Komisaris *Sub-Holding*/anak perusahaan.

The performance of the Risk Management Committee for 2022 can be measured by obtaining a KPI Committee score of 100, out of a maximum value of 100. According to the work program in the KPI Committee, the Risk Management Committee has reviewed and responded to the Company's plans, implemented a number of strategic work programs, as well as submitted quarterly reports on the implementation of duties to the Board of Commissioners. Further description of the achievement of the Risk Management Committee's KPIs in 2022 can be seen in the Corporate Governance chapter, the Risk Management Committee's Key Performance Indicators (KPI) subchapter.

Nomination and Remuneration Committee

The Board of Commissioners considers that the Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties and responsibilities properly in 2022, which can be seen through the achievement of the Committee's KPI score of 100, or meeting the maximum value achieved. The Nomination and Remuneration Committee has carried out all of the committee's work programs, including overseeing the effectiveness of organizational and HR management, evaluating the performance of the Board of Directors, overseeing the management and development of HR, to reviewing the remuneration policies for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

As part of carrying out its duties for 2022, the Nomination and Remuneration Committee has reviewed the proposed changes to the organizational blueprint and proposed PLN representatives to Sub-Holdings/subsidiaries in the context of establishing PLN Holding and Sub-Holdings. In this regard, the Committee has also reviewed the application for approval for changes in the organization and work procedures of the Company and reviewed the proposed appointment of officers for the Board of Directors and Board of Commissioners of Sub-Holdings/subsidiaries.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris telah melakukan peninjauan terhadap prospek usaha Perseroan untuk tahun 2023 yang disusun oleh Direksi, yaitu melalui proses penyusunan dan persetujuan RKAP. Atas peninjauan tersebut, Dewan Komisaris memandang, prospek usaha yang disusun telah memberikan pemaparan yang komprehensif terhadap peluang dan tantangan yang diproyeksikan akan dihadapi Perseroan pada 2023. Dewan Komisaris memberi perhatian khusus terhadap sejumlah faktor risiko yang dapat memberi pengaruh terhadap aktivitas bisnis dan operasional Perseroan, dan telah memastikan bahwa Direksi beserta jajaran terkait memiliki target serta sasaran yang realistis untuk dipenuhi.

Terkait hal tersebut, Dewan Komisaris memberi perhatian khusus terhadap sejumlah faktor eksternal yang akan dihadapi Perseroan untuk tahun 2023 mencakup proyeksi situasi ekonomi makro, baik pada lingkup global maupun nasional, serta proyeksi perkembangan kebutuhan industri ketenagalistrikan untuk tahun mendatang.

Situasi ekonomi global untuk tahun 2023 diperkirakan akan berlangsung secara lebih ketat dibanding tahun 2022. Hal tersebut dapat diketahui melalui, antara lain, proyeksi IMF yang memperkirakan ekonomi global akan tumbuh sebesar 2,9% atau lebih rendah dibanding estimasi pertumbuhan di tahun 2022 yang sebesar 3,4%. Sejumlah faktor yang diperkirakan memberi pengaruh terhadap situasi tersebut di antaranya peningkatan suku bunga bank sentral guna menurunkan inflasi serta dampak lanjutan dari konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Untuk 2023, harga minyak bumi diproyeksikan turun hingga kisaran 16% sementara komoditas selain minyak bumi diperkirakan turun rata-rata 6,3%. Konflik geopolitik yang diperkirakan masih akan memberi dampak tetap menjadi faktor yang melatarbelakangi situasi rentan, yang berpengaruh pada harga gas bumi serta komoditas pangan khususnya gandum. Batu bara, hingga Maret 2023, tercatat mengalami pelemahan harga dipengaruhi menurunnya permintaan, misalnya pada negara-negara di kawasan Eropa serta India.

VIEWS ON THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS

The Board of Commissioners has reviewed the Company's business prospects for 2023 prepared by the Board of Directors, namely through the process of preparing and approving the RKAP. Based on this review, the Board of Commissioners views that the prepared business prospects have provided a comprehensive presentation of the opportunities and challenges projected to be faced by the Company for 2023. The Board of Commissioners pays special attention to risk factors that may affect the Company's business and operational activities, and has ensured that the Board of Directors and related staff have realistic targets and goals to fulfill.

In this regard, the Board of Commissioners pays special attention to external factors that will be faced by the Company for 2023 including projections of the macroeconomic situation, both at global and national scope, as well as projected developments in the needs of the electricity industry for the coming year.

The global economic situation for 2023 is expected to be tougher than in 2022. This can be seen through, among others, the IMF's projection that estimates the global economy will grow by 2.9% or lower than the estimated growth in 2022 at 3.4%. Several factors are expected to influence this situation, including an increase in central bank interest rates to reduce inflation and the aftermath of the geopolitical conflict between Russia and Ukraine.

For 2023, oil prices are projected to fall by around 16% while commodities other than petroleum are expected to fall by an average of 6.3%. The geopolitical conflict which is expected to continue to have an impact remains a factor underlying the vulnerable situation, which affects the price of natural gas and food commodities, especially wheat. Coal, as of March 2023, experienced a weakening in price due to declining demand for example in countries in Europe and India.

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

Meski demikian, di tengah proyeksi situasi ekonomi global tersebut, ekonomi Indonesia diperkirakan tetap mampu tumbuh secara cukup kuat. Masih merujuk pada proyeksi IMF yang dirilis pada Januari 2023, pertumbuhan pada kelompok negara berkembang Asia diperkirakan mencapai 5,3% atau lebih tinggi dibanding estimasi realisasi pada tahun 2022 yang sebesar 4,3%. Pertumbuhan pada kawasan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) diperkirakan mencapai 4,3% pada 2023 dan meningkat menjadi 4,7% untuk tahun 2024.

Di tengah proyeksi ekonomi makro tersebut, industri ketenagalistrikan khususnya di Indonesia akan dipengaruhi proyeksi peningkatan konsumsi listrik hingga perkembangan pemenuhan target untuk mencapai *net-zero emission* pada 2060. Situasi perekonomian yang diperkirakan membaik pada 2023 diperkirakan menjadi dasar peningkatan konsumsi listrik, seiring dukungan Pemerintah terhadap penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat dan pejabat lembaga negara, antara lain terlihat melalui pemberian subsidi pada pembelian motor listrik dan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal di atas, Dewan Komisaris memandang, Perseroan tetap memiliki prospek usaha yang baik untuk tahun 2023. Lebih dari itu, prospek usaha yang baik diperkirakan juga akan dipengaruhi oleh perubahan struktur grup melalui pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN yang telah secara efektif berlaku dan diharapkan mulai memberi dampak positif terhadap pencapaian kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris mengalami 3 (tiga) kali perubahan selama tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut:

However, amidst the projected global economic situation, the Indonesian economy is expected to continue to grow quite strongly. Still referring to the IMF projections released in January 2023, growth in the developing group of Asian countries is estimated to reach 5.3% or higher than the estimated realization in 2022 at 4.3%. Growth in the ASEAN-5 region (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand) is estimated to reach 4.3% in 2023 and increase to 4.7% in 2024.

Amid these macroeconomic projections, the electricity industry, especially in Indonesia, will be influenced by projected increases in electricity consumption until progress is made to meet the target of achieving net-zero emissions in 2060. The economic situation, which is expected to improve in 2023, is expected to be the basis for increasing electricity consumption, in line with Government support towards the use of electric vehicles by the public and officials of state institutions, which can be seen through the provision of subsidies for the purchase of electric motorcycles and the use of electric cars as official vehicles.

Taking into account the external factors above, the Board of Commissioners views that the Company still has good business prospects for 2023. Moreover, good business prospects are also expected to be influenced by changes in the group structure through the establishment of Holding and Sub-Holding PLN which are effective and are expected to begin to have a positive impact on the achievement of the Company's operational and financial performance.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

The composition of the Board of Commissioners underwent 3 (three) changes throughout 2022, with the following description:

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

1. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 25 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-85/MBU/03/2022. Menteri BUMN selaku pemegang saham menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Ardan Adiperdana sebagai Komisaris dan mengangkat Bapak Tedi Bharata sebagai Komisaris Perseroan.
2. Perubahan kedua terjadi pada tanggal 22 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-154/MBU/07/2022. Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Heru Winarko sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Bapak Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Perubahan ketiga terjadi pada tanggal 22 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku RUPS No. SK-212/MBU/09/2022. Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Rida Mulyana sebagai Komisaris dan mengangkat Bapak Dadan Kusdiana sebagai Komisaris Perseroan.

Atas ketiga perubahan tersebut, komposisi Dewan Komisaris pada posisi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

For these three changes, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2022 is as follows:

Jabatan / Position	Nama / Name
Komisaris Utama dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	Amien Sunaryadi
Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner	Suhasil Nazara
Komisaris / Commissioner	Dadan Kusdiana
Komisaris / Commissioner	Susiwijono Moegiarso
Komisaris / Commissioner	Mohamad Ikhsan
Komisaris / Commissioner	Dudy Purwagandhi
Komisaris / Commissioner	Tedi Bharata
Komisaris / Commissioner	Eko Sulisty
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Charles Sitorus
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Alex Iskandar Munaf

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Kami mewakili jajaran Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih yang dalam kepada Bapak Ardan Adiperdana, Bapak Heru Winarko, dan Bapak Rida Mulyana atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kepada Bapak Tedi Bharata, Bapak Charles Sitorus, dan Bapak Dadan Kusdiana, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk mengemban amanah baru sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

PENUTUP

Sebagai penutup, Dewan Komisaris menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, karena atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan, Perseroan mampu mencatatkan kinerja yang positif untuk 2022. Seiring hal tersebut, Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada Direksi, jajaran manajemen, serta seluruh insan PLN atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan.

Kami optimistis kepercayaan, dukungan, kerja keras, dan dedikasi yang telah diberikan akan terpelihara untuk tahun-tahun mendatang, sehingga Perseroan mampu berperan secara optimal di tengah proses transisi energi menuju target *net zero emission* pada 2060.

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our deep gratitude to Mr. Ardan Adiperdana, Mr. Heru Winarko, and Mr. Rida Mulyana for their dedication and hard work while serving as members of Board of Commissioners of the Company. As to Mr. Tedi Bharata, Mr. Charles Sitorus, and Mr. Dadan Kusdiana, we would like to welcome to join us in carrying out our new mandate as members of the Board of Commissioners of the Company.

CLOSING

To conclude, the Board of Commissioners would like to extend its deep gratitude to shareholders and stakeholders for the trust and support given, the Company was able to record positive performance for 2022. The Board of Commissioners would also like to express appreciation to the Board of Directors, staff management, as well as all PLN personnel for the hard work and dedication given.

We are optimistic that the trust, support, hard work, and dedication that has been given will be maintained for the coming years, so that the Company is able to play an optimal role in the midst of the energy transition process towards the *net zero emission* target in 2060.

Atas Nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners

PT PLN (Persero)

AMIEN SUNARYADI

Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Respected Shareholders and Stakeholders,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas anugerah dan karunia-Nya, PT PLN (Persero) berhasil melalui berbagai tantangan yang ada di tahun 2022 dengan capaian serta kinerja yang positif. Lebih dari itu, dengan sinergi bersama segenap pemangku kepentingan, PLN juga telah merealisasikan sejumlah capaian strategis, antara lain mencakup transformasi perusahaan melalui pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN, hingga merealisasikan program-program kerja prioritas sesuai rencana jangka panjang dan jangka pendek Perseroan.

Kami selaku Direksi PLN akan menyampaikan laporan pengurusan perusahaan untuk tahun 2022, sebagai salah satu wujud transparansi kepada segenap pemangku kepentingan. Lebih lanjut, laporan ini akan mengungkapkan informasi mengenai bagaimana kami merumuskan strategi dan kebijakan strategis Perseroan, serta bagaimana Direksi berupaya memastikan berjalannya strategi tersebut untuk meraih capaian yang telah ditargetkan. Laporan ini akan menyajikan analisis kinerja Perseroan serta perbandingan antara pencapaian kinerja tersebut dengan target-target yang telah ditetapkan, termasuk kendala-kendala yang kami hadapi untuk mencapai target tersebut. Di samping itu, laporan ini juga akan menyajikan analisis prospek usaha PLN untuk tahun-tahun mendatang. Akhirnya, melalui laporan ini, pemangku kepentingan diharapkan dapat mengetahui bagaimana kami menjalankan perusahaan ini dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Let us express our praise and gratitude to the Almighty God, for His grace and blessings, PT PLN (Persero) has succeeded in tackling numerous challenges in 2022 with positive achievements and performance. Moreover, with the synergy with all stakeholders, PLN has also realized several strategic achievements, including company transformation through the establishment of PLN Holding and Sub-Holding, to realizing priority work programs according to the Company's short- and long-term plans.

We, as the Board of Directors of PLN, would like to deliver a company management report for 2022 as a form of transparency to all stakeholders. Furthermore, this report will disclose information about how we formulate the Company's strategy and strategic policies, as well as how the Board of Directors seeks to ensure the implementation of this strategy to achieve the targeted achievements. This report presents an analysis of the Company's performance as well as a comparison between the achievement of this performance and the set targets, including the obstacles faced in achieving these targets. In addition, this report also presents an analysis of PLN's business prospects for the coming years. Finally, through this report, stakeholders are expected to learn how we run the Company by adhering to the principles of good corporate governance.



DARMAWAN PRASODJO

Direktur Utama
President Director

Laporan Direksi

Board of Directors Report



Laba bersih Perseroan tercatat Rp14,41 triliun atau naik 9,42% dibanding laba bersih tahun 2021 yang sebesar Rp13,17 triliun, mencapai 224,11% di atas target laba bersih RKAP 2022 yang sebesar Rp6,43 triliun.

TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI

Situasi ekonomi makro dunia pada tahun 2022 ditandai oleh tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibanding tahun 2021, meski terdapat peningkatan pertumbuhan pada kelompok negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand). Mengacu pada dokumen *World Economic Outlook* yang dirilis International Monetary Fund (IMF) pada Januari 2023, pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2022 diestimasikan terealisasi sebesar 3,4% atau menurun dibanding realisasi tahun 2021 yang mencapai 6,2%. Kelompok negara ekonomi maju dan ekonomi berkembang masing-masing diestimasikan tumbuh lebih rendah dibanding tahun 2021, dengan selisih 2,7-2,8%. Di tengah situasi tersebut, negara-negara ASEAN-5 diestimasikan tumbuh sebesar 5,2%, lebih tinggi dari realisasi tahun 2021 dengan selisih 1,4%.

Indonesia, sebagai bagian dari kelompok negara ASEAN-5, tercatat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun 2021, didukung oleh konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat serta daya beli masyarakat yang terjaga. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Februari 2023, ekonomi Indonesia untuk tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31% atau lebih tinggi 1,61% dibanding realisasi di tahun 2021. Pertumbuhan positif ini turut didukung oleh sejumlah kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah dan

MACROECONOMIC AND INDUSTRY REVIEW

The global macroeconomic situation in 2022 was marked by lower growth rates compared to that of 2021, despite increased growth in the ASEAN-5 group of countries (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand). Referring to the *World Economic Outlook* document released by the International Monetary Fund (IMF) in January 2023, world economic growth for 2022 was estimated to be realized at 3.4% or a decrease compared to the realization in 2021 at 6.2%. The developed and developing economy groups are each estimated to have lower growth compared to 2021, with a difference of 2.7-2.8%. Amid this situation, ASEAN-5 countries are estimated to grow by 5.2%, higher than the realization in 2021 with a difference of 1.4%.

Indonesia, as part of the ASEAN-5 group, recorded better growth compared to 2021, supported by strong consolidation of fiscal and monetary policies and maintained public purchasing power. Referring to data from Statistics Indonesia (BPS) released in February 2023, Indonesia's economy for 2022 grew by 5.31% or 1.61% higher than that of 2021. Such positive growth was also supported by fiscal and monetary policies issued by the Government and related agencies, among others in the form of distributing social protection,

Laporan Direksi Board of Directors Report

Company's net profit was recorded at Rp14.41 trillion, an increase of 9.42% compared to the 2021 net profit of Rp13.17 trillion, 224.11% above the 2022 RKAP net profit target of Rp6.43 trillion.

instansi terkait antara lain berupa penyaluran perlindungan sosial, peningkatan subsidi energi, serta kenaikan suku bunga acuan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate dari 3,50% pada awal Tahun 2022 menjadi 5,50% pada Desember 2022, sehingga daya beli masyarakat dapat tetap terjaga, yang dicerminkan antara lain melalui tingkat inflasi yang moderat dan terkendali serta peningkatan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 9,43%.

Di tengah situasi ekonomi makro tersebut, terdapat dorongan yang kuat pada sejumlah negara di dunia untuk mempercepat peralihan penggunaan minyak dan gas menuju sumber-sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), yang salah satunya dipicu oleh konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Dorongan untuk mempercepat penggunaan sumber energi berbasis EBT antara lain terlihat pada perubahan kebijakan serta kebijakan baru yang dikeluarkan sejumlah negara, seperti negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, serta kelompok negara G7. Selain itu, komitmen yang kuat dari negara-negara di dunia atas penggunaan EBT juga terlihat pada proyeksi penambahan penggunaan sumber-sumber terbarukan di dalam *The Stated Policies Scenario* (STEPS) 2022-2050, yang memperlihatkan peningkatan secara masif atas penggunaan *Solar PV* dan tenaga angin.

increasing energy subsidies, increasing the BI 7-Day (Reverse) Repo Rate from 3.50% in the early 2022 to 5,50% in December 2022, so that people's purchasing power could be maintained, which was reflected, among others, through the moderate and controlled inflation rate and an increase in Income Tax Article 21 revenue of 9,43%.

Against the backdrop of this macroeconomic situation, there was a strong push for a several countries to accelerate the shift from using oil and gas to New and Renewable Energy (NRE) sources, which was triggered by the geopolitical conflict between Russia and Ukraine. The motivation to accelerate the use of EBT-based energy sources, among others, can be seen in policy changes and new policies issued by a number of countries, such as European Union countries, the United States, China, and the G7 group of countries. In addition, the strong commitment of countries in the world to the use of NRE is also seen in the projected increase in the use of renewable sources in *The Stated Policies Scenario* (STEPS) 2022-2050, which illustrates a massive increase in the use of *Solar PV* and wind power.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Seiring pemulihan ekonomi di tahun 2022, industri ketenagalistrikan Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan dibanding tahun 2021. Berdasarkan informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi listrik per kapita Indonesia di tahun 2022 adalah sebesar 1.173 kWh/kapita per tahun, atau lebih tinggi 4,45% dibanding konsumsi di tahun 2021. Hal tersebut sekaligus memperlihatkan tren peningkatan konsumsi listrik pada interval 2018-2022 yang berada pada rentang 0,46-4,45%. Di samping itu, masih mengacu pada informasi Kementerian ESDM, kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia telah meningkat dari 74,4 GW pada 2021 menjadi 81,2 GW pada 2022, atau tumbuh 9,14%.

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN

Direksi memahami peran sentral PLN di industri ketenagalistrikan Indonesia, dan karenanya, berkomitmen kuat untuk terus berkontribusi maksimal dalam mengelola pembangkitan, transmisi, hingga distribusi listrik bagi masyarakat. Hingga 31 Desember 2022, PLN beroperasi dengan jumlah pembangkit sebanyak 6.928 unit, dengan 6.314 unit merupakan milik PLN. Kapasitas terpasang pembangkit listrik PLN adalah sebesar 69.039 MW, dengan kapasitas pembangkit milik PLN sebesar 44.940 MW. Jumlah pelanggan PLN pada 31 Desember 2022 adalah 85,6 juta pelanggan, atau meningkat 3,75% dari tahun 2021. Seiring hal itu, PLN merealisasikan daya tersambung mencapai 161.861,54 MVA atau meningkat 5,40% dari tahun 2021, dengan regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara memiliki persentase pertumbuhan tertinggi sebesar 7,38%.

Sampai dengan akhir 2022, Direksi melaporkan, PLN secara konsisten terus mendorong proses transisi energi menuju penggunaan EBT, sebagai kontribusi bagi pencapaian *net zero emission* di Indonesia pada 2060. Pada 31 Desember 2022, PLN memiliki daya terpasang pembangkit EBT sebesar 8.524 MW. Produksi KWh listrik, dengan bauran energi dari EBT, mencapai 13,14% atau meningkat dari 12,74% pada tahun 2021.

As the economy recovered in 2022, Indonesia's electricity industry grew compared to that of 2021. Based on information from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), Indonesia's electricity consumption per capita in 2022 was 1,173 kWh/capita per year, or higher 4.45% compared to consumption in 2021. This also shows a trend of increasing electricity consumption in the 2018-2022 interval in the percentage range of 0.46-4.45%. Beside of that, still referring to information from the Ministry of Energy and Mineral Resources, the installed capacity of power plants in Indonesia has increased from 74.4 GW in 2021 to 81.2 GW in 2022, or a growth of 9.14%.

COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS

The Board of Directors is aware of PLN's central role in the Indonesian electricity industry, and therefore, we are strongly committed to always contributing optimally in managing the generation, transmission, and distribution of electricity for the community. As of December 31, 2022, PLN was operating with a total of 6,928 generator units, of which 6,314 units belong to PLN. The installed capacity of PLN's power plants is 69,039 MW, with PLN's generating capacity of 44,940 MW. The number of PLN customers on December 31, 2022 was 85.6 million customers, or an increase of 3.75% from 2021. In line with this, PLN realized connected power of 161,861.54 MVA, an increase of 5.40% from that of 2021, with the Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara had the highest growth percentage at 7.38%.

As of the end of 2022, PLN consistently continued to encourage the energy transition process towards the use of EBT, as a contribution to achieving net zero emission in Indonesia in 2060. As of December 31, 2022, PLN has an installed power of EBT generators of 8,524 MW of KWh of electricity production, with the energy mix from EBT reaching 13.14% or an increase from 12.74% in 2021.



Laporan Direksi Board of Directors Report

Selain itu, PLN juga terus berkontribusi dalam menyediakan energi listrik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran subsidi listrik kepada kelompok pelanggan yang berhak, sesuai ketentuan Pemerintah. Direksi memastikan, penyaluran subsidi selama tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan lebih lanjut atas strategi dan capaian PLN untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi PLN untuk "Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi", kami menetapkan strategi jangka panjang yang dicanangkan sejak 2020 yaitu Program Transformasi PLN. Program Transformasi PLN terbagi menjadi 4 (empat) tema tujuan strategis dan 4 (empat) pendukung strategis sebagai berikut:

Tujuan Strategis (Strategic Goals)

1. **Green** dengan tujuan untuk memimpin transisi energi Indonesia melalui peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara pesat dan efisien;
2. **Innovative** yang akan menstimulasi pertumbuhan melalui model bisnis dan layanan yang inovatif;
3. **Customer Focused** yang bertujuan memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui kualitas dan layanan kelas dunia;
4. **Lean** yang bertujuan menyediakan tenaga listrik yang *lean*, andal dan berbiaya termurah untuk pelanggan.

Pencapaian tujuan-tujuan strategis tersebut akan ditopang oleh Pendukung Strategis (*Strategic Enablers*) sebagai berikut:

1. Organisasi dan SDM.
2. Pengembangan Teknologi.
3. Keberlanjutan Finansial.
4. Pembangunan Nasional.

In addition, PLN also continues to contribute in providing affordable electrical energy for all levels of society to maintain economic growth through the distribution of electricity subsidies to eligible customer groups, in accordance with Government regulations. The Board of Directors ensures that the distribution of subsidies in 2022 has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations.

Further explanation of PLN's strategy and achievements in 2022 is as follows.

STRATEGY AND STRATEGIC POLICY

To realize PLN's vision of "Becoming the Leading Electricity Company in Southeast Asia and #1 Customer Choice for Energy Solutions", we have established a long-term strategy that was launched in 2020, namely the PLN Transformation Program. The PLN Transformation Program is divided into 4 (four) strategic objective themes and 4 (four) strategic supports as follows:

Strategic Goals

1. **Green** with the aim of leading Indonesia's energy transition through a rapid and efficient increase in New Renewable Energy (EBT);
2. **Innovative** which will stimulate growth through innovative business models and services;
3. **Customer Focused** which aims to provide satisfaction to customers through world-class quality and service;
4. **Lean** which aims to provide lean, reliable, and lowest cost electric power for customers.

The achievement of these strategic objectives will be supported by Strategic Enablers as follows:

1. Organization and HR.
2. Technology Development.
3. Financial Sustainability.
4. National Development.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Untuk mengoperasikan *strategic goals* dan *strategic enabler* Transformasi PLN tersebut, Direksi menyusun berbagai program terobosan (*breakthrough*) yang terus disesuaikan sebagai bentuk adaptasi dan respons terhadap kebutuhan, tantangan, dan dinamika yang dihadapi oleh PLN. *Breakthrough* transformasi yang awalnya sejumlah 20, telah dikembangkan menjadi 28 *breakthrough* sampai dengan akhir 2022.

Berbagai *breakthrough* Transformasi PLN adalah sebagai berikut:

The Role of the Board of Directors in the Formulation of Strategy and Strategic Policy

To operate the strategic goals and strategic enablers of the PLN Transformation, the Board of Directors has prepared various breakthrough programs which are continuously adjusted as a form of adaptation and response to the needs, challenges, and dynamics faced by PLN. The initial 20 transformation breakthroughs have been expanded to 28 breakthroughs by the end of 2022.

PLN Transformation breakthroughs are as follows:

Breakthrough Transformasi PLN

PLN Transformation Breakthrough

Strategic Goals	Green	Innovative	Customer Focused	Lean
Breakthrough	<ul style="list-style-type: none"> Implement RJP 2019-2024 (5 GW) Launch Green Boosters Launch Large Scale Renewables Carbon Neutral 2060 	<ul style="list-style-type: none"> Billing & Collection Optimization Fiber Optics Rollout Electric Vehicles Infrastructure Captive Power Acquisition 	<ul style="list-style-type: none"> Outage Management (Notification & Yantek Optimization) PLN Mobile Relaunch 	<ul style="list-style-type: none"> Digital Power Plant Digital Procurement Digitally Enabled Distribution Excellence Dispatch Optimization Investment Prioritization (Short Term & Long Term) Optimize Primary Energy (Coal & Gas) Anti Blackout Advanced Metering Infrastructure Centralized Planning Material Return & Warehouse Inventory Integrated Supply Chain Excellence
Target	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas EBT: 18 GW (2025) / EBT Capacity: 18 GW (2025) Bauran Energi EBT: 23% (2025) / NRE Energy Mix: 23% (2025) 	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Innovative: 5% dari Revenue 2024 / Rp18 Tn (2024) / Innovative Revenue: 5% of Revenue 2024 / Rp18 Tn (2024) 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Pelanggan: 97,41 (2024) / Customer Satisfaction Index: 97.41 (2024) 30 juta pengguna PLN Mobile (2024) / 30 million PLN Mobile users (2024) 	<ul style="list-style-type: none"> SAIDI : 500 menit (2024) / SAIDI : 500 minutes (2024) BPP/COGS: Rp1.458/ kWh (2024)
Strategic Enablers	Organization & People	Technology Advancement	Financial Sustainability	National Development
Breakthrough	<ul style="list-style-type: none"> Organization Structure Streamline Subsidiary/Holding dan Sub-Holding Zero Accident 	<ul style="list-style-type: none"> Digitally Enabled Execution Machine 	<ul style="list-style-type: none"> Digitalization of Centralized Payment 	<ul style="list-style-type: none"> Regulatory, Sector Structure, and Tariff Optimization Local Content (TKDN)

Laporan Direksi Board of Directors Report

Peranan Direksi dalam Memastikan Implementasi Strategi

Direksi mengawal proses Transformasi PLN melalui *Transformation Office* yang telah memanfaatkan *single source of truth* melalui platform WAVE yang menyediakan *tools* untuk memantau progres dari masing-masing *breakthrough*. Kami telah memperinci setiap *breakthrough* Transformasi menjadi subinisiatif-subinisiatif sebagai operasionalisasi dari *breakthrough*. Selain itu, melalui platform WAVE, kami secara proaktif memantau perkembangan dari masing-masing inisiatif mulai dari level L0 (*Idea*) sampai dengan L4 (*Executed*). Sampai dengan akhir 2022, terdapat 2.137 subinisiatif dengan 1.146 di antaranya telah mencapai tahap L4.

PERBANDINGAN HASIL YANG DICAPAI TERHADAP TARGET

Progres Transformasi PLN

Sampai dengan 3 tahun diterapkan, program-program Transformasi telah memperlihatkan beberapa capaian. Untuk tujuan strategis *Green*, dengan aspirasi transformasi berupa pengembangan kapasitas pembangkit listrik EBT yang ditargetkan mencapai 18 GW di tahun 2025, PLN telah mencapai 8,5 GW pada 2022. Sementara itu, untuk aspirasi bauran energi EBT yang ditargetkan 23% pada 2025, telah tercapai 13,14%. Untuk tujuan strategis *Lean*, PLN telah melampaui target durasi gangguan listrik (SAIDI) sebesar 500 menit/pelanggan/tahun pada 2024, dengan capaian SAIDI tahun 2022 sebesar 463,2 menit/pelanggan/tahun. Untuk Biaya Pokok Penyediaan listrik, terdapat peningkatan menjadi Rp1.473/kWh di tahun 2022, seiring dengan peningkatan biaya energi primer dan kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah.

Untuk tujuan strategis *Innovative*, PLN mencapai pendapatan inovatif *beyond kWh* 2,36% atau 8,5 triliun pada tahun 2022, dari yang ditargetkan 5% atau Rp18 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, untuk tujuan strategis *Customer Focused*, PLN mencapai indeks kepuasan pelanggan sebesar 97,41 pada tahun 2022, atau telah melampaui target yang sebesar 97 pada 2024. Hal yang sama juga terlihat pada target pengguna PLN Mobile sebanyak 30 juta *downloader* pada tahun 2024, yang telah tercapai dengan realisasi 36,7 juta *downloader* pada tahun 2022.

The Role of the Board of Directors in Ensuring Strategy Implementation

The Board of Directors oversees the PLN Transformation process through the Transformation Office which has utilized a single source of truth through the WAVE platform which provides tools to monitor the progress of each breakthrough. We have broken down each Transformation breakthrough into sub-initiatives as the operationalization of the breakthrough. In addition, through the WAVE platform, we proactively monitor the progress of each initiative from level L0 (*Idea*) to L4 (*Executed*). As of the end of 2022, there were 2,137 sub-initiatives with 1,146 of them having reached the L4 stage.

COMPARISON OF RESULTS ACHIEVED AGAINST TARGETS

PLN Transformation Progress

Up to 3 years of implementation, the Transformation programs have shown several achievements. For the Green strategic goal, with transformational aspirations in the form of developing EBT power plant capacity which is targeted to reach 18 GW in 2025, PLN has reached 8.5 GW in 2022. Meanwhile, for the EBT energy mix aspirations which are targeted at 23% in 2025, 13.14% has been achieved. For the Lean strategic goal, PLN has exceeded the target of electricity interruption duration (SAIDI) of 500 minutes/ customer/ year in 2024, with SAIDI achievement in 2022 at 463.2 minutes/ customer/year. For the Basic Cost of Provision of electricity, there was an increase to Rp1,473/kWh in 2022, in line with the increase in primary energy costs and an increase in the US dollar exchange rate against the rupiah.

For Innovative strategic goals, PLN achieved innovative revenue *beyond kWh* at 2.36% or 8.5 trillion in 2022, from the targeted 5% or Rp18 trillion in 2024. Meanwhile, for the Customer Focused strategic objective, PLN achieved a customer satisfaction index of 97.41 in 2022, or exceeded the target of 97 in 2024. The same can be seen in the PLN Mobile user target of 30 million downloaders in 2024, which has been achieved with the realization of 36.7 million downloaders in 2022.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Pembentukan *Holding dan Sub-Holding* PLN

Organisasi dan SDM merupakan *enabler* penting dalam upaya mencapai tujuan Transformasi PLN. Sejalan dengan hal tersebut, di tahun 2022 PLN menjalankan terobosan dengan melakukan penyesuaian *stream* kegiatan bisnis PLN melalui inisiatif pembentukan *Holding dan Sub-Holding* PLN. Pembentukan *Holding dan Sub-Holding* sejalan dengan arah strategis PLN dalam menghadapi dinamika internal dan eksternal dengan penerapan optimalisasi organisasi. Terobosan tersebut telah melalui kajian yang mendalam, mendapatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, serta disetujui oleh pemegang saham melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-213/MBU/09/2022. Melalui keputusan tersebut, Menteri BUMN selaku pemegang saham menyetujui pembentukan organisasi virtual *Holding dan Sub-Holding* PLN pada 21 September 2022 sebagai masa transisi menuju pembentukan organisasi *Holding dan Sub-Holding* yang secara legal terimplementasi pada 1 Januari 2023.

Pada restrukturisasi *Holding dan Sub-Holding* tersebut, PLN membentuk 4 *Sub-Holding* meliputi PLN Energi Primer Indonesia yang fokus pada bisnis penyediaan energi primer yang menjadi sumber energi listrik, 2 *Sub-Holding* Pembangkitan Listrik yaitu PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power, serta *Sub-Holding* PLN Icon Plus yang berfokus pada pencapaian target untuk meningkatkan pendapatan *beyond kWh*, yaitu sebesar 5% *revenue* pada 2024, melalui pengembangan bisnis konektivitas, layanan digital, dan peningkatan *customer experience*.

Direksi optimistis, melalui pembentukan *Holding dan Sub-Holding* ini, PLN akan memaksimalkan perannya sebagai *holding* untuk berfokus pada pengelolaan dan pengembangan portofolio dan sinergi bisnis di seluruh grup secara terintegrasi. Lini bisnis transmisi dan pemasaran listrik serta distribusi dan retail tetap dikelola oleh PLN *holding* untuk memastikan kehadiran listrik ke seluruh pelosok tanah air, khususnya daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) demi menghadirkan ketersediaan energi listrik yang berkeadilan serta mendukung transisi energi. PLN sebagai *holding* akan melakukan peran *parenting* terhadap *Sub-Holding* dengan spirit organisasi yang ringkas, lincah, sederhana, dinamis dan profesional, dengan pengelolaan bisnis dan keuangan di bawah kendali PLN.

Establishment of PLN Holding and Sub-Holding

Organization and human resources are key enablers to achieve PLN's Transformation goals. In line with this, in 2022 PLN made a breakthrough by aligning PLN's business activity streams through the initiative to form PLN Holding and Sub-Holding. The establishment of Holding and Sub-Holding is in line with PLN's strategic direction in dealing with internal and external dynamics by implementing organizational optimization. This breakthrough has gone through an in-depth study, was supervised by the Board of Commissioners, and was approved by shareholders through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No. SK-213/MBU/09/2022. Through this decision, the Minister of SOEs as a shareholder approved the establishment of the PLN Holding and Sub-Holding virtual organization on September 21, 2022 as a transitional period towards establishing a Holding and Sub-Holding organization which was legally implemented on January 1, 2023.

In the Holding and Sub-Holding restructuring, PLN formed 4 Sub-Holdings including PLN Energi Primer Indonesia which focuses on the primary energy supply business which is a source of electrical energy, 2 Sub-Holdings for Power Generation namely PLN Indonesia Power and PLN Nusantara Power, as well as the PLN Icon Plus Sub-Holding which focuses on achieving the target to increase beyond kWh revenue, which is 5% revenue in 2024, through the development of the connectivity business, digital services, and improving the customer experience.

The Board of Directors is optimistic that through the establishment of this Holding and Sub-Holding, PLN will maximize its role as a Holding to focus on managing and developing portfolios and business synergy across the group in an integrated manner. The electricity transmission and marketing as well as distribution and retail business lines are still managed by PLN holding to ensure the presence of electricity to every corner of the country, especially the Frontier, Outermost, and Least Developed (3T) areas in order to provide equitable availability of electrical energy and support the energy transition. PLN as the holding company will carry out the parenting role for Sub-Holding with a concise, agile, simple, dynamic, and professional organizational spirit, with business and financial management under the control of PLN.

Laporan Direksi Board of Directors Report

Pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN diharapkan dapat mendukung keseluruhan proses bisnis PLN menjadi lebih efektif dan efisien, dengan utilisasi aset yang lebih optimal. Lebih dari itu, pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN juga diharapkan mendorong *technical skill* menjadi lebih fit dan relevan dalam merespons tantangan zaman, dengan *corporate culture* yang lebih produktif dan profesional.

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi salah satu fokus utama sekaligus tantangan Transformasi PLN dalam mendukung penyediaan energi bersih dan ramah lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa *strategic initiatives* menjadi target kami pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *Co-firing* biomassa pada pembangkit PLTU PLN dengan target penurunan emisi CO² sebesar 334 ribu ton atau berkurang sebesar 0,13%.
2. Kerja sama kemitraan strategis dengan BUMN untuk menjaga ketersediaan dan keekonomian pasokan biomassa untuk program *Co-firing* .
3. Program konversi PLTD ke pembangkit EBT pada 200 lokasi.
4. Penambahan kapasitas pembangkit Energi Baru Terbarukan yang ditargetkan beroperasi dengan target di tahun 2022 sebesar 228,7 MW. Target COD PLT EBT tahun 2022 adalah 16 lokasi dengan total kapasitas sebesar 228,7 MW, yang terdiri dari:
 - a. 14 PLTA/M dengan total kapasitas 178,7 MW;
 - b. 1 PLTP dengan total kapasitas 45 MW;
 - c. 1 PLTSa dengan total kapasitas 5 MW.
5. Penyelesaian dokumen perencanaan seperti *Feasibility Study* proyek, dokumen perencanaan pengadaan dan dokumen pengadaan konsultan untuk kelanjutan proyek.

Capaian dari *strategic initiative* Transformasi EBT pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program *co-firing* biomassa telah terimplementasi di 36 lokasi dengan kapasitas 599,3 GW, penggunaan biomassa sebanyak 585,7 ribu ton dan berkontribusi pada pengurangan emisi CO² sebesar 595,7 ribu ton CO² atau sebesar 0,23% sehingga melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,13%.

The establishment of PLN Holding and Sub-Holding is expected to be able to support PLN's overall business processes to become more effective and efficient, with more optimal asset utilization. Moreover, the establishment of PLN Holding and Sub-Holding is also expected to encourage technical skills to be more fit and relevant in responding to the challenges of the times, with a more productive and professional corporate culture.

Development of New and Renewable Energy

The development of New and Renewable Energy (NRE) is one of the main focuses as well as challenges for PLN's Transformation in supporting the provision of clean and environmentally friendly energy. To achieve this goal, several strategic initiatives are our target in 2022, as follows:

1. Implementation of *Co-firing* of biomass at PLN PLTU generators with a target of reducing CO₂ emissions by 334 thousand tons or 0.13%.
2. Strategic partnership cooperation with SOEs to maintain the availability and economy of biomass supply for the *Co-firing* program.
3. The PLTD to NRE generator conversion program in 200 location
4. Additional New Renewable Energy generating capacity which is targeted to operate with a target of 228.7 MW in 2022. The target of COD PLT NRE in 2022 is 16 locations with a total capacity of 228.7 MW, consisting of:
 - a. 14 PLTA/M with a total capacity of 178.7 MW;
 - b. 1 PLTP with a total capacity of 45 MW;
 - c. 1 PLTSa with a total capacity of 5 MW.
5. Completion of planning documents such as project feasibility studies, procurement planning documents, and consultant procurement documents for project continuation.

The achievements of the NRE Transformation strategic initiative in 2022 are as follows:

1. The biomass *co-firing* program has been implemented in 36 locations with a capacity of 599.3 GW, used 585.7 thousand tons of biomass and contributed to reducing CO₂ emissions by 595.7 thousand tons of CO₂ or by 0.23%, thus exceeding the target set at 0.13%.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

2. Untuk mendukung program *co-firing*, kami telah menjamin kemitraan strategis dengan beberapa pihak seperti BUMN dan Pemerintah Daerah terkait dengan penyediaan biomassa sebagai bahan baku *co-firing*.
3. Untuk program konversi PLTD ke Pembangkit EBT di tahun 2022 masih mengalami kendala seperti (i) lokasi yang banyak dan tersebar serta proyek yang cukup kompleks, (ii) skala proyek yang kecil yang belum menarik bagi pengembang, (iii) keterbatasan infrastruktur mengingat lokasi PLTD yang berada di pelosok yang berpotensi menimbulkan biaya konstruksi, logistik dan transportasi, (iv) masih rendahnya tingkat kandungan dalam negeri dari peralatan pembangkit EBT sehingga belum sejalan dengan regulasi yang mensyaratkan TKDN minimal 60%, sehingga menyebabkan penawaran yang masuk dari proses pengadaan memiliki HPS yang tinggi bahkan sebagian masih di atas BPP dari PLTD yang ada, sehingga menjadi tidak layak dari sisi keuangan.
4. Penambahan kapasitas pembangkit EBT pada tahun 2022 mencapai 172,25 MW yang tersebar di 23 lokasi.
5. Untuk penyelesaian dokumen perencanaan EBT, telah selesai dilakukan *feasibility study* pada 6 proyek, penyelesaian 36 dokumen *bidding* untuk program konversi PLTD ke EBT, serta penyelesaian sebanyak 10 dokumen kajian pengembangan EBT.

Sampai dengan akhir 2022, kapasitas pembangkit EBT yang dikelola oleh sistem PLN mencapai 8,5 GW dan bauran energi EBT tercapai 13,14%.

Kinerja Operasional Perusahaan

Untuk tahun 2022, Direksi melaporkan, PLN mencatatkan kinerja operasional yang baik. Hal tersebut terlihat melalui peningkatan penjualan listrik yang sebesar 6,26% dibanding tahun sebelumnya, dari sejumlah 257.634 GWh menjadi 273.761 GWh. Dengan membandingkannya terhadap RKAP 2022, realisasi tersebut telah memenuhi pencapaian target mencapai 104,09%. Peningkatan penjualan itu dikontribusikan oleh penambahan pelanggan sebesar 3,75% dibanding tahun sebelumnya, dari sejumlah 82,5 juta pelanggan menjadi 85,6 juta pelanggan pada posisi 31 Desember 2022. Jumlah pelanggan tersebut sekaligus memenuhi sebesar 99,83% terhadap target RKAP 2022.

2. To support the *co-firing* program, we have guaranteed strategic partnerships with several parties such as state-owned enterprises and local governments regarding the supply of biomass as a raw material for *co-firing*.
3. The PLTD to NRE Generator conversion program in 2022 still experienced obstacles such as (i) numerous and spread out locations and the projects are quite complex, (ii) the project scale is small which is less attractive to developers, (iii) infrastructure limitations considering the location PLTD located in remote areas that have the potential to incur construction, logistics and transportation costs, (iv) the low level of domestic content of NRE generating equipment so that it is not in line with regulations that require a minimum TKDN of 60%, resulting in offers coming in from the procurement process to have HPS which are high and some are still above the BPP of the existing PLTD, so that it is not feasible from a financial standpoint.
4. The addition of NRE generating capacity in 2022 reached 172,25 MW spread across 23 locations.
5. For the completion of NRE planning documents, feasibility studies have been carried out on 6 projects, 36 bidding documents for the PLTD to NRE conversion program have been completed, and 10 NRE development review documents have been completed.

As of the end of 2022, the capacity of NRE generators managed by the PLN system reached 8.5 GW and the NRE energy mix reached 13.14%.

Operational Performance

PLN recorded good operational performance in 2022. This can be seen from the increase in electricity sales by 6.26% compared to the previous year, from 257,634 GWh to 273,761 GWh. Compared to the 2022 RKAP, this realization has met the target of achieving 104.09%. The increase in sales was contributed by the addition of customers by 3.75% compared to the previous year, from 82.5 million customers to 85.6 million customers as of December 31, 2022. This number of customers simultaneously fulfilled 99.83% of the 2022 RKAP target.

Laporan Direksi Board of Directors Report

Peningkatan penjualan listrik tersebut dikontribusikan oleh seluruh upaya PLN dalam memastikan ketersediaan energi listrik bagi pelanggan. Untuk tahun 2022, PLN mencatatkan total produksi listrik mencapai 308.002,30 GWh, meningkat 6,40% dibanding tahun 2021. Pencapaian tersebut menunjukkan pemenuhan target RKAP 2022 dengan persentase 102,66%. Dari keseluruhan pencapaian tersebut, total produksi tenaga listrik yang berasal dari produksi sendiri adalah sejumlah 179.495,52 GWh, atau memenuhi sebesar 109,99% terhadap target RKAP 2022.

Lebih lanjut, untuk tahun 2022, Direksi beserta jajaran terkait telah memastikan terjaganya keandalan layanan bagi pelanggan di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu diukur melalui indeks lama gangguan (*System Average Interruption Duration Index/SAIDI*), dengan hasil sebesar 463,20 menit/pelanggan atau lebih baik sebesar 14,24% dibanding tahun sebelumnya, serta indeks frekuensi gangguan (*System Average Interruption Frequency/SAIFI*), dengan hasil sebesar 5,62 kali/pelanggan atau lebih baik 16,12% dibanding tahun sebelumnya. Realisasi tersebut sekaligus memenuhi target RKAP 2022, dengan pemenuhan SAIDI sebesar 79,04% dan SAIFI sebesar 80,29% (polaritas negatif).

Direksi menegaskan bahwa PLN memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung proses transisi energi di Indonesia, menuju *carbon neutral* pada tahun 2060. Komitmen tersebut dapat dilihat melalui pencapaian bauran Energi Baru Terbarukan PLN dengan total produksi listrik mencapai 13,14% dibanding seluruh produksi listrik pada tahun 2022. Pencapaian tersebut sekaligus memperlihatkan peningkatan bauran EBT dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 12,74%.

Kinerja Keuangan Perusahaan

Atas seluruh pencapaian operasional tersebut, PLN berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif. Pada posisi 31 Desember 2022, PLN membukukan aset sejumlah Rp1.638,14 triliun, atau memenuhi sebesar 95,25% terhadap target RKAP 2022. Seiring hal itu, PLN membukukan liabilitas sejumlah Rp646,69 triliun, 92,63% dari target RKAP 2022, serta membukukan ekuitas sejumlah Rp991,45 triliun, atau memenuhi sebesar 97,04% terhadap target RKAP 2022.

The increase in electricity sales was contributed by all of PLN's efforts to ensure the availability of electrical energy for customers. PLN's total electricity production in 2022 reached 308,002.30 GWh, an increase of 6.40% compared to that of 2021. This achievement shows the fulfillment of the 2022 RKAP target with a percentage of 102.66%. Of all these achievements, the total production of electricity from its own production was 179,495.52 GWh, or 109.99% of the 2022 RKAP target.

Furthermore, the Board of Directors and related staff have ensured that service reliability was maintained for customers in all regions of Indonesia in 2022. This is measured through System Average Interruption Duration Index (SAIDI), with a result of 463.20 minutes/customer or 14.24% better than the previous year, as well as System Average Interruption Frequency (SAIFI), with a result of 5.62 times/customer or 16.12% better than the previous year. This realization also met the 2022 RKAP target, with SAIDI fulfillment of 79.04% and SAIFI of 80.29% (negative polarity).

The Board of Directors emphasized that PLN has a strong commitment to supporting the energy transition process in Indonesia towards carbon neutral in 2060. This commitment can be seen in the achievement of PLN's Renewable Energy mix with total electricity production reaching 13.14% of all electricity production in 2022. This achievement also shows an increase in the NRE mix compared to the previous year which was 12.74%.

Operational Performance

PLN managed to record positive financial performance. As of December 31, 2022, PLN posted assets of Rp1,638.14 trillion, or fulfilled 95.25% of the 2022 RKAP target. Along with this, PLN recorded liabilities of Rp646.69 trillion, 92.63% of the 2022 RKAP target, as well as posted equity of Rp991.45 trillion, or 97.04% of the 2022 RKAP target.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Untuk tahun 2022, PLN tercatat merealisasikan pendapatan usaha sejumlah Rp441,13 triliun, atau meningkat 20,21% dibanding tahun 2021. Perolehan tersebut sekaligus memperlihatkan pemenuhan terhadap target RKAP 2022 dengan persentase 106,37%. Kontribusi paling dominan atas perolehan tersebut berasal dari penjualan tenaga listrik, yang terealisasi sejumlah Rp311,06 triliun atau memenuhi target dengan persentase 105,22%. Selain itu, pendapatan kompensasi mencatatkan porsi yang cukup besar terhadap pendapatan usaha di tahun 2022, dengan realisasi sejumlah Rp63,65 triliun atau setara 128,15% terdapat target RKAP 2022 seiring dengan peningkatan konsumsi listrik masyarakat.

PLN merealisasikan besaran beban usaha sejumlah Rp386,19 triliun untuk tahun 2022, atau terkendali dengan persentase 101,03% terhadap target RKAP 2022. Realisasi beban usaha tersebut secara dominan dikontribusikan oleh biaya bahan bakar dan minyak pelumas sebesar Rp151,38 triliun diikuti biaya pembelian tenaga listrik sebesar Rp130,23 triliun, dengan capaian persentase 114,78% dan 92,80% terhadap target RKAP 2022. Sejumlah hal yang berkontribusi terhadap realisasi beban usaha tersebut meliputi peningkatan biaya pembelian batu bara sejumlah Rp63,06 atau 23,76% di atas target RKAP, serta peningkatan biaya BBM sejumlah Rp39,33 triliun atau lebih besar 39,51% di atas target RKAP.

Direksi melaporkan, dengan perolehan pendapatan dan beban usaha tersebut, PLN membukukan peningkatan laba usaha sebesar 25,27%, menjadi sejumlah Rp54,94 triliun untuk tahun 2022 atau 69,13% di atas target RKAP 2022. Adapun, laba bersih Perseroan tercatat Rp14,41 triliun atau naik 9,42% dibanding laba bersih tahun 2021 yang sebesar Rp13,17 triliun, mencapai 224,11% di atas target laba bersih RKAP 2022 yang sebesar Rp6,43 triliun.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Capaian kinerja PLN untuk tahun 2022 dapat diukur melalui pencapaian seluruh target ditetapkan oleh pemegang saham dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Manajemen. Realisasi total skor KPI untuk tahun 2022 adalah sebesar 101,92 atau di atas bobot maksimal sebesar 100,00, sehingga PLN berada pada kategori perusahaan SEHAT kategori AAA. Terdapat 5 (lima) indikator utama yang menjadi kinerja kunci PLN, yaitu

PLN's revenue in 2022 amounted to Rp441.13 trillion, or an increase of 20.21% compared to that of 2021. This achievement also shows fulfillment of the 2022 RKAP target with a percentage of 106.37%. The most dominant contribution to this acquisition came from sales of electricity, which was realized at Rp311.06 trillion or met the target with a percentage of 105.22%. In addition, compensation income recorded a sizable portion of revenue in 2022, with a realization of Rp63.65 trillion or the equivalent of 128.15% of the 2022 RKAP target in line with increasing public electricity consumption.

Operating expenses of PLN in 2022 amounted to Rp386.19 trillion, or under control with a percentage of 101.03% of the 2022 RKAP target. The realization of these operating expenses was predominantly contributed by the cost of fuel and lubricating oil of Rp151.38 trillion, followed by the cost of purchasing electricity of Rp130.23 trillion, with percentage achievements of 114.78% and 92.80% of the 2022 RKAP target. A number of things that contributed to the realization of these operating expenses included an increase in the cost of purchasing coal at Rp63.06 trillion or 23.76% above the RKAP target, as well as an increase in fuel costs at Rp39.33 trillion or 39.51% higher than the RKAP target.

With the acquisition of revenue and operating expenses, PLN's operating profit increased by 25.27%, to a total of Rp54.94 trillion in 2022 or 69.13% above the 2022 RKAP target. Meanwhile, the Company's net profit was recorded at Rp14.41 trillion, an increase of 9.42% compared to the 2021 net profit of Rp13.17 trillion, 224.11% above the 2022 RKAP net profit target of Rp6.43 trillion.

Company Soundness Level

PLN's performance achievements in 2022 can be measured through the achievement of all targets set by shareholders in Management's Key Performance Indicators (KPI). Realization of the total KPI score for 2022 was 101.92 or above the maximum value of 100.00, so that PLN was a HEALTHY company in the AAA category. There are 5 (five) main indicators which are PLN's key performance, namely

Laporan Direksi Board of Directors Report

Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, dan Pengembangan Talenta, dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia

Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia merupakan variabel KPI untuk mengukur kinerja keuangan, operasional, sosial (termasuk peran BUMN sebagai *agent of development*) secara berkesinambungan, serta lingkungan dengan mempertimbangkan tingkat risiko (*risk appetite*) Perusahaan yang ditetapkan.

Pada 2022, skor untuk indikator ini terealisasi sebesar 35,08 atau di atas bobot maksimal yang sebesar 33. Keseluruhan indikator kinerja pada kategori ini seperti EBITDA, ROIC-WACC, *interest bearing debt*, rasio elektrifikasi nasional, implementasi program reformasi subsidi, penurunan emisi karbon CO₂, kerja sama terkait *carbon credit pilot project* dan pembangunan *green industry cluster*, berhasil melampaui sasaran RKAP.

Inovasi Model Bisnis

Inovasi model bisnis merupakan variabel KPI untuk mengukur keberhasilan inovasi model bisnis Perusahaan. Pada tahun 2022, target inovasi model bisnis ini meliputi program dedieselisasi dan gasifikasi, pendirian *Holding* dan *Sub-Holding* PLN, dan pencapaian *maturity level* pengelolaan risiko.

Pada 2022, skor untuk indikator ini terealisasi sebesar 21,62, masih melampaui bobot target sebesar 21. Terdapat beberapa indikator yang belum berhasil untuk dicapai, seperti program dedieselisasi dan program konversi PLTD ke EBT yang terkendala oleh tidak berhasilnya proses pengadaan yang rencananya akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023. Meski demikian, indikator lainnya pada kategori ini berhasil melampaui sasaran, seperti terealisasinya program gasifikasi di Gorontalo dan New FSRU Jawa Barat, berhasil dilaksanakannya Legal End-State *Holding* dan *Sub-Holding* PLN pada 30 Desember 2023 yang berlaku efektif per 1 Januari 2023, serta tercapainya target *maturity level* pengelolaan manajemen risiko korporat sebesar 3,14 dari target 3,1.

Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Increase in Investment, and Talent Development, with the following description:

Economic and Social Value for Indonesia

Economic and social value for Indonesia is a KPI variable to measure financial, operational, social performance (including the role of SOE as an agent of development) on an ongoing basis, as well as the environment by taking into account the determined level of risk (*risk appetite*) of the Company.

In 2022, the score for this indicator was realized at 35.08 or above the maximum value of 33. Overall performance indicators in this category such as EBITDA, ROIC-WACC, interest bearing debt, national electrification ratio, implementation of subsidy reform programs, CO₂ carbon emission reduction, cooperation related to carbon credit pilot projects and the development of a green industry cluster, succeeded in exceeding the RKAP target.

Business Model Innovation

Business model innovation is a KPI variable to measure the success of the Company's business model innovation. In 2022, the target for this business model innovation includes de-dieselization and gasification programs, establishment of PLN Holding and Sub-Holding, and achievement of maturity level of risk management.

The score for this indicator was realized at 21.62 in 2022, still exceeding the target value of 21. There were several indicators that have not been successfully achieved, such as the de-dieselization program and the PLTD to NRE conversion program which were constrained by the unsuccessful procurement process which is planned to be carried out again in 2023. However, other indicators in this category have succeeded in exceeding the target, such as the realization of the gasification program in Gorontalo and the New FSRU West Java, the successful implementation of Legal End-State PLN Holding and Sub-Holding on December 30, 2023 which became effective as of January 1, 2023, as well as achieving the corporate risk management maturity level target of 3.14 from the target of 3.1.



Laporan Direksi

Board of Directors Report



1. DARMAWAN PRASODJO
Direktur Utama
President Director

2. SINTHYA ROESLY
Direktur Keuangan
Director of Finance

3. YUSUF DIDI SETIARTO
Direktur Legal dan
Manajemen Human Capital
Director of Legal and
Human Capital Management

4. WILUYO KUSDWIHARTO
Direktur Manajemen
Proyek dan Energi Baru
Terbarukan
Director of Project
Management and New
Renewable Energy



Laporan Direksi

Board of Directors Report



5. HARTANTO WIBOWO
Direktor Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis
 Director of Corporate Planning and Business Development

6. EVY HARYADI
Direktor Transmisi dan Perencanaan Sistem
 Director of Transmission and System Planning

7. EDI SRIMULYANTI
Direktor Retail dan Niaga
 Director of Retail and Commerce

8. ADI PRIYANTO
Direktor Distribusi
 Director of Distribution

9. ADI LUMAKSO
Direktor Manajemen Pembangkitan
 Director of Generation Management



Laporan Direksi

Board of Directors Report

Kepemimpinan Teknologi

Indikator kinerja kepemimpinan teknologi terdiri atas target penurunan durasi dan frekuensi gangguan listrik (SAIDI/SAIFI), penurunan susut distribusi, implementasi *Smart Meter* AMI, dan implementasi *Smart Grid*.

Pada 2022, skor untuk indikator ini terealisasi sebesar 21,89 dari bobot maksimal sebesar 23. Hal ini disebabkan karena indikator implementasi *Smart Meter* AMI yang ditargetkan terpasang pada 1,2 juta pelanggan pada tahun 2022 belum mencapai sasaran. Sebaliknya, untuk indikator jumlah gangguan listrik SAIDI/SAIFI, PLN berhasil melampaui target dengan durasi dan frekuensi gangguan di tahun 2022 yang jauh lebih rendah daripada target. Hal yang sama juga terjadi pada susut distribusi yang tercapai lebih rendah dari sasaran, menunjukkan semakin efisiennya sistem transmisi dan distribusi kami, seiring semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan.

Peningkatan Investasi

Pengembangan investasi merupakan variabel KPI yang pada RKAP 2022 diukur dari penambahan kapasitas pembangkit EBT, peningkatan kapasitas transmisi, peningkatan kapasitas gardu induk, serta peningkatan jumlah infrastruktur kendaraan listrik.

Pada 2022, skor untuk indikator ini terealisasi sebesar 10,77 atau mendekati bobot maksimal yang sebesar 11. Terdapat 2 indikator kinerja pada kategori pengembangan investasi yang belum mencapai sasaran yaitu penambahan kapasitas pembangkit EBT yang mencapai 172,25 MW dari target sebesar 228,69 MW serta peningkatan kapasitas jaringan transmisi yang tercapai 2.984,57 kms dari target sebesar 4.537 kms. Beberapa kendala yang menghambat pencapaian 2 indikator KPI ini antara lain terjadinya longsor pada horizontal *penstock tuner* pada proyek PLTA Jatigede 110 MW serta masih banyaknya kendala pembebasan lahan di sepanjang jalur proyek transmisi.

Technology Leadership

Technology leadership performance indicators consist of targets for reducing the duration and frequency of power interruption (SAIDI/SAIFI), reducing distribution losses, implementing *Smart Meter* AMI, and implementing *Smart Grid*.

The score for this indicator was realized at 21.89 out of a maximum weight of 23 in 2022. This was because the *Smart Meter* AMI implementation indicator which was targeted to be installed on 1.2 million customers in 2022 has not reached the target. Moreover, for the number of SAIDI/SAIFI power outages indicator, PLN has managed to exceed the target with the duration and frequency of disturbances in 2022 which are much lower than the target. The same thing happened to the distribution losses which were lower than the target, showing the increasing efficiency of our transmission and distribution system in line with the increasing quantity and quality of electricity infrastructure.

Increase in Investment

Investment development is a KPI variable which in the 2022 RKAP is measured by adding NRE generating capacity, increasing transmission capacity, increasing the capacity of substations, and increasing the number of electric vehicle infrastructure.

The score for this indicator in 2022 was realized at 10.77 or close to the maximum value of 11. There were 2 performance indicators in the investment development category that have not reached the target, namely the addition of NRE generating capacity which reached 172.25 MW from the target of 228.69 MW as well as an increase in transmission network capacity which achieved 2,984.57 kms from the target of 4,537 kms. Some of the obstacles that hindered the achievement of these 2 KPI indicators include the occurrence of landslides on the horizontal *penstock tuner* in the 110 MW Jatigede hydropower project and the many obstacles to land acquisition along the transmission project path.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Indikator peningkatan kapasitas gardu induk berhasil melampaui sasaran, dengan kapasitas gardu induk baru yang berhasil di-energize sebesar 5.610 MVA, melebihi sasaran yang sebesar 4.930 MVA, serta infrastruktur kendaraan listrik (EV) berupa SPKLU yang berhasil mencapai sebanyak 73 SPKLU atau jauh melampaui sasaran yang sebanyak 40 SPKLU. Pengembangan infrastruktur EV di tahun 2022 ini juga turut mensukseskan penyelenggaraan KTT G20 di Indonesia di samping ikut berperan pada semakin meningkatnya populasi kendaraan listrik di Indonesia.

Pengembangan Talenta

Pengembangan talenta merupakan variabel KPI untuk mengukur seberapa baik Perusahaan dalam meningkatkan kemampuan dan melatih tenaga kerja terkait teknologi terbaru, meningkatkan *governance* dalam penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, membentuk wadah talenta BUMN (*talent pool*) pada level menengah, dan/atau menerapkan lingkungan yang inklusif, dinamis, inovatif, dan ber-AKHLAK.

Pada 2022, skor untuk indikator ini terealisasi sebesar 12,56, melampaui bobot sasaran maksimal sebesar 12, ditandai dengan pengembangan *talent milenial* (<42 tahun) dalam *nominated talent* dan pengembangan perempuan dalam *nominated talent*. Hal tersebut menunjukkan komitmen PLN dalam mendorong pengembangan para pemimpin muda dan mendukung kesetaraan gender.

Tantangan yang Dihadapi dan Langkah Strategis yang Diterapkan

Dalam perjalanan selama 2022, PLN menghadapi sejumlah tantangan yang secara umum dapat teratasi dan dapat ditangani secara baik. Beberapa *highlight* tantangan yang dihadapi PLN di tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

The indicator for increasing the capacity of the substation managed to exceed the target, with a new substation capacity that was successfully energized by 5,610 MVA, exceeding the target of 4,930 MVA, as well as electric vehicle infrastructure (EV) in the form of SPKLU which managed to reach 73 SPKLU or far exceeded the target set. The development of EV infrastructure in 2022 also contributed to the success of holding the G20 Summit in Indonesia in addition to playing a role in the increasing population of electric vehicles in Indonesia.

Talent Development

Talent development is a KPI variable to measure how well the Company is in increasing capabilities and training the workforce regarding the latest technology, improving governance in appointing the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE, establishing an SOE talent pool at the middle level, and/or implementing an inclusive, dynamic, innovative, and moral environment.

In 2022, the score for this indicator was realized at 12.56, exceeding the maximum target value of 12, marked by the development of millennial talent (<42 years old) in nominated talent and the development of women in nominated talent. This shows PLN's commitment to encouraging the development of young leaders and supporting gender equality.

Challenges Faced and Strategic Steps Implemented

In the course of 2022, PLN faced numerous challenges which in general can be overcome and handled well. Several highlights of the challenges faced by PLN in 2022 are as follows.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Pertama, PLN menghadapi tantangan atas fluktuasi harga energi primer seperti batu bara dan BBM di pasar internasional. Hal tersebut dipengaruhi oleh gejolak politik internasional yang mengganggu pasokan energi primer utamanya batu bara untuk kebutuhan pembangkit-pembangkit yang dioperasikan PLN. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi tantangan ini yaitu mentransformasi tata kelola energi primer, salah satunya dengan melakukan kontrak jangka panjang dengan memonitor kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*), yang terpantau secara digital dan terintegrasi dengan sistem *database* di Kementerian ESDM sebagai regulator dalam pertambangan batu bara.

Kedua, pada 2022, PLN memperoleh tantangan dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan rangkaian pertemuan di berbagai kota dalam periode Presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Hal tersebut telah dilaksanakan secara baik dengan memastikan keseluruhan kesiapan infrastruktur kelistrikan dalam menjaga keandalan pasokan listrik, termasuk mempersiapkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan beautifikasi distribusi.

Ketiga, PLN semakin dihadapkan dengan desakan transisi energi di Indonesia dengan target bauran listrik dari EBT sebesar 23% pada 2025. Pada 2022, PLN masih menghadapi tantangan *oversupply* penyediaan listrik di beberapa daerah akibat pertumbuhan penjualan listrik yang dalam beberapa tahun sebelumnya sempat lebih rendah dari rencana, terutama disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 antara tahun 2020-2022. Sementara itu, pengembangan EBT sendiri membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Menghadapi tantangan tersebut, PLN berupaya untuk terus meningkatkan bauran energi dari sumber-sumber EBT. Selama 2022, terdapat sejumlah capaian positif dalam upaya mendorong penggunaan energi bersih, antara lain implementasi *co-firing*, pengembangan teknologi CCS, *smart grid & control system*, pembangunan pembangkit EBT, penjualan *Renewable Energy Certificate* (REC), dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

First, PLN faced fluctuations in the price of primary energy such as coal and fuel in the international market. This was influenced by international political turmoil which disrupted the supply of primary energy, especially coal for the needs of the plants operated by PLN. Efforts were made to overcome this challenge, namely transforming primary energy governance, one of which is by entering into long-term contracts by monitoring domestic market obligations (DMO), which are digitally monitored and integrated with the database system at the Ministry of Energy and Mineral Resources as a regulator in coal mining.

Second, in 2022, PLN faced a challenge in supporting the successful holding of a series of meetings in various cities during the period of the Indonesian Presidency at the G20 Summit. This has been well implemented by ensuring the overall readiness of the electricity infrastructure in maintaining the reliability of electricity supply, including preparing Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) and distribution beautification.

Third, PLN was faced with the pressure of energy transition in Indonesia with a target of a mix of electricity from NRE of 23% in 2025. In 2022, PLN still faced challenge of oversupply of electricity in several regions due to the growth in electricity sales which in the previous few years was lower than the initial plans, mainly due to the conditions of the Covid-19 pandemic between 2020-2022. Meanwhile, the development of NRE requires a lot of funding. Facing these challenges, PLN seeks to continue to increase the energy mix from NRE sources. Throughout 2022, there were a number of positive achievements in efforts to encourage the use of clean energy, including the implementation of *co-firing*, development of CCS technology, smart grid & control systems, construction of NRE generators, sales of Renewable Energy Certificates (REC), and development of the electric vehicle ecosystem.



Laporan Direksi Board of Directors Report

ANALISIS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Secara umum, situasi ekonomi dunia untuk tahun 2023 diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibanding tahun 2022. Sesuai laporan yang dikeluarkan IMF pada Januari 2023, ekonomi dunia untuk tahun 2023 diproyeksi tumbuh 2,9%, atau lebih rendah dibanding estimasi pertumbuhan di tahun 2022 yang sebesar 3,4%. Pada proyeksi tersebut, kelompok negara maju diperkirakan tumbuh 1,2%, atau lebih rendah 1,5% dibanding estimasi pertumbuhan di tahun 2022. Adapun, ekonomi kelompok negara berkembang diproyeksikan tumbuh 4,0% di tahun 2023, atau sedikit lebih tinggi dari estimasi tahun 2022 yang sebesar 3,9%.

Terdapat sejumlah faktor yang diasumsikan berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut. *Pertama*, tingkat inflasi yang diperkirakan turun pada kisaran 84% negara-negara di dunia, terukur melalui Indeks Harga Konsumen yang diperkirakan lebih rendah pada tahun 2023. Hal tersebut antara lain merefleksikan penurunan harga komoditas bahan bakar dan non-bahan bakar seiring pelemahan permintaan pada pasar dunia. *Kedua*, konflik antara Rusia dan Ukraina yang menghadirkan situasi ekonomi yang rentan, di samping fragmentasi geopolitik di antara negara-negara dunia.

Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan tetap mampu tumbuh secara kuat. Mengacu pada informasi Bank Indonesia pada Februari 2023, ekonomi Indonesia di tahun 2023 diperkirakan mampu tumbuh pada kisaran 4,5-5,3%, seiring peningkatan mobilitas masyarakat, peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA), hingga penyelesaian Proyek Strategis Negara (PSN). Faktor lain yang diperkirakan memberi pengaruh mencakup peningkatan permintaan domestik, baik berupa konsumsi rumah tangga maupun investasi.

COMPANY BUSINESS PROSPECT ANALYSIS

In general, the world economic situation for 2023 is predicted to experience lower growth compared to that of 2022. According to a report issued by the IMF in January 2023, the world economy for 2023 is projected to grow 2.9%, or lower than the estimated growth in 2022 at 3.4%. In this projection, the developed country group is estimated to grow 1.2%, or 1.5% lower than the estimated growth in 2022. Meanwhile, the developing country group's economy is projected to grow 4.0% in 2023, or slightly higher than the estimation in 2022 which is 3.9%.

There were factors that are assumed to influence the economic growth projection. First, the inflation rate that was estimated to fall in the range of 84% in several countries as measured through the Consumer Price Index which is predicted to be lower in 2023. This reflects, among other things, the decline in fuel and non-fuel commodity prices in line with weakened demand in the market world. Second, the conflict between Russia and Ukraine which presents a vulnerable economic situation, in addition to geopolitical fragmentation among world countries.

Amidst these conditions, the Indonesian economy is expected to continue to grow strongly in 2023. Referring to information from Bank Indonesia in February 2023, Indonesia's economy in 2023 is expected to grow in the range of 4.5-5.3%, in line with increased people mobility, increased Foreign Investment (PMA), to the completion of State Strategic Projects (PSN). Other factors that are expected to have an impact include increasing domestic demand, both in the form of household consumption and investment.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Atas peningkatan konsumsi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, industri ketenagalistrikan Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan berada pada situasi penguatan yang serupa. Sesuai dokumen yang dipublikasikan Dewan Energi Nasional RI pada Desember 2022, terdapat proyeksi peningkatan permintaan listrik nasional hingga tahun 2032, mencapai 433 TWh pada skenario *Business as Usual* (BaU) serta 702 TWh pada skenario optimistis. Seiring hal tersebut, dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hingga rasio elektrifikasi, PLN memproyeksikan adanya pertumbuhan listrik Indonesia di tahun 2023, yaitu sebesar 228 TWh pada skenario optimistis atau 280 TWh pada skenario moderat.

Dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang diasumsikan berpengaruh, Direksi beserta jajaran terkait memastikan, PLN memiliki prospek usaha yang baik di tahun 2023. Melalui penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, PLN menetapkan proyeksi realisasi pertumbuhan penjualan di tahun 2023 dengan pertumbuhan penjualan sebesar 5,66% pada skenario optimistis dan 5,20% pada skenario moderat. Proyeksi tersebut memperlihatkan tingkat pertumbuhan di bawah realisasi pada tahun 2022 yang sebesar 6,26%.

Prospek usaha PLN untuk tahun mendatang juga akan dipengaruhi oleh restrukturisasi perusahaan melalui pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN, yang membuat PLN beroperasi dengan 4 (empat) *Sub-Holding* mulai awal tahun 2023. Pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN secara mendasar merupakan upaya bersama dalam memaksimalkan potensi perusahaan, guna memperkuat kinerja dan kontribusi di tahun-tahun mendatang. Direksi optimistis, dengan pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* tersebut, PLN akan mampu merealisasikan kinerja operasional dan keuangan yang membaik, seiring meningkatnya efektivitas proses bisnis dan utilisasi aset yang optimal.

Due to the increase in consumption and the projected economic growth, the Indonesian electricity industry in 2023 is expected to be in a similar strengthening situation. According to a document published by the Republic of Indonesia's National Energy Council in December 2022, there is a projected increase in national electricity demand until 2032, reaching 433 TWh in the Business as Usual (BaU) scenario and 702 TWh in an optimistic scenario. In line with this, taking into account the projected population, Gross Regional Domestic Product (GRDP), to the electrification ratio, PLN projects Indonesia's electricity growth in 2023, which is 228 TWh in an optimistic scenario or 280 TWh in a moderate scenario.

Taking into account a number of factors that are assumed to be influential, the Board of Directors and related staff ensure that PLN has good business prospects in 2023. Through the preparation of the 2021-2030 Electricity Supply Business Plan (RUPTL), PLN sets a projected realization of sales growth in 2023 with sales growth of 5.66% in an optimistic scenario and 5.20% in a moderate scenario. This projection shows a growth rate below the realization in 2022 of 6.26%.

PLN's business prospects for the coming year will also be affected by corporate restructuring through the establishment of PLN Holding and Sub-Holding, where PLN operating with 4 (four) Sub-Holdings starting early 2023. The formation of PLN Holding and Sub-Holding is fundamentally a joint effort in maximizing the Company's potential, in order to strengthen performance and contribution in the coming years. The Board of Directors is optimistic that the establishment of the PLN Holding and Sub-Holding, will be able to realize improved operational and financial performance, in line with increasing business process effectiveness, and optimal asset utilization.

Laporan Direksi Board of Directors Report

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Direksi memahami, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan aspek yang secara mendasar wajib dipenuhi dalam keseluruhan praktik pengelolaan Perseroan. PLN merupakan entitas BUMN sekaligus warga korporasi yang bertanggung jawab, dan karenanya, berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya perusahaan secara efisien dan produktif seiring pemenuhan hak kepada seluruh pemangku kepentingan.

Atas pemahaman tersebut, Direksi melaporkan, PLN telah melaksanakan seluruh aktivitas bisnis dan operasional selama tahun 2022 melalui penerapan prinsip-prinsip GCG, sesuai standar *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2022, Direksi telah memimpin dan memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan secara menyeluruh, dengan didukung keberadaan *soft-structure* dan struktur organisasi yang memadai.

Direksi beserta jajaran melakukan pemutakhiran terhadap sejumlah kebijakan dan aturan internal Perseroan di tahun 2022. Hal tersebut antara lain terwujud melalui ditetapkannya Pedoman GCG dan *Board Manual* Perusahaan, *Executive Board* dan *Corporate Charter*, serta sejumlah Peraturan Direksi mencakup Peraturan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero), Peraturan Direksi tentang Kebijakan Strategis Penerapan *Governance*, *Risk Management and Compliance* (GRC), Peraturan Direksi tentang Kebijakan Strategis Audit Internal, Peraturan Direksi tentang Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan PT PLN (Persero), serta Peraturan Direksi tentang *Human Capital Experience System* (HXMS).

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Directors understands that the implementation of good corporate governance (GCG) is an aspect that basically must be fulfilled in the overall management practices of the Company. PLN is an SOE as well as a responsible corporate citizen, and therefore, is committed to managing the Company's resources efficiently and productively while fulfilling the rights of all stakeholders.

Based on this understanding, the Board of Directors would like to convey that PLN has carried out all business and operational activities during 2022 through the implementation of GCG principles, according to best practice standards and applicable laws and regulations. During 2022, the Board of Directors has led and ensured that the implementation of GCG principles has been carried out thoroughly, supported by the existence of an adequate soft-structure and organizational structure.

The Board of Directors and staff updated a number of the Company's internal policies and regulations in 2022. This was realized, among other things, through the establishment of the Company's GCG Code and Board Manual, Executive Board and Corporate Charter, as well as the Board of Directors Regulations including the Board of Directors Regulations on the Organization and Working Procedures of PT PLN (Persero), the Board of Directors Regulation on the Strategic Policy for Implementing Governance, Risk Management and Compliance (GRC), the Board of Directors Regulation on Internal Audit Strategic Policy, the Board of Directors Regulation on Corporate Performance Management and Organizational Performance Assessment in PT PLN (Persero), as well as the Board of Directors Regulation on Human Capital Experience System (HXMS).

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Sebagai upaya dalam memperkuat implementasi GCG, Direksi memastikan, PLN telah menerapkan sosialisasi dan internalisasi terkait aturan-aturan baru tersebut. Selain itu, Direksi juga berupaya untuk semakin menguatkan komitmen dan pemahaman organisasi tentang implementasi GCG antara lain dengan menyelenggarakan Forum GCG PLN dan Anak Perusahaan serta melaksanakan kegiatan pengenalan perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang baru menjabat di tahun 2022.

Kualitas penerapan GCG dan GRC PLN dapat diukur melalui sejumlah penilaian yang telah dilakukan, mencakup *assessment* GCG, penilaian *Risk Maturity Index*, serta penilaian *Maturity Level* Kepatuhan. Di tahun 2022, PLN melakukan *assessment* GCG yang dilakukan oleh BPKP dengan perolehan skor mencapai 90,026 dengan kategori "Sangat Baik", atau meningkat dibanding periode asesmen pihak independen sebelumnya pada tahun 2020 yang sebesar 89,559 dengan kategori "Sangat Baik". Pada pengukuran *Risk Maturity Index*, PLN memperoleh skor sebesar 3,75 pada semester II tahun 2022, lebih tinggi dari target yang sebesar 3,15 serta lebih tinggi dari realisasi di semester I yang sebesar 3,51. Secara korporat, PLN berhasil memperoleh skor 3,14 untuk penilaian *Risk Maturity Index*, diatas target yang ditetapkan sebesar 3,1. Di samping itu, skor *maturity level* kepatuhan pada tahun 2022 mencapai 4,14 atau tetap stabil dibanding pencapaian tahun sebelumnya yaitu 4,13. Di samping itu, kualitas penerapan GCG juga ditunjukkan lewat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh PLN yang mencapai 100% dengan total Wajib Laport sejumlah 8.819 orang.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) kali perubahan komposisi Direksi, baik perubahan anggota maupun nomenklatur jabatan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 6 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-2/MBU/01/2022. Melalui keputusan tersebut, Menteri BUMN selaku pemegang saham menyetujui untuk:

As an effort to strengthen GCG implementation, the Board of Directors ensures that PLN has implemented dissemination and internalization regarding these new rules. In addition, the Board of Directors also seeks to further strengthen organizational commitment and understanding of GCG implementation, among others by holding a GCG Forum for PLN and Subsidiaries and carrying out company introduction activities to the Board of Commissioners and Board of Directors who have just served in 2022.

The quality of PLN's GCG and GRC implementation can be measured through a number of assessments that have been carried out, including GCG assessments, Risk Maturity Index assessments, and Compliance Maturity Level assessments. In 2022, PLN carried out a GCG assessment conducted by BPKP with a score of 90.026 in the "Excellent" category, or an increase compared to the previous assessment by independent institution period 2020 at 89.559 in the "Excellent" category. In measuring the Risk Maturity Index, PLN obtained a score of 3.75 in semester II of 2022, higher than the target of 3.15 and higher than the realization in semester I of 3.51. At corporate level, PLN reached 3.14 for Risk Maturity Index assessment, higher than the set target at 3.1. Meanwhile, the compliance maturity level score in 2022 reached 4.14 or remained stable compared to the achievement in the previous year at 4.13. In addition, the quality of GCG implementation is also demonstrated through the compliance with the submission of the State Administration Wealth Report (LHKPN) by PLN which reached 100% with a total of 8,819 Mandatory Reporters.

CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

In 2022, there were 2 (two) changes in the composition of the Board of Directors, both changes in members and position nomenclature, with the following details:

1. The first change was on January 6, 2022 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprise (SOE) No. SK-2/MBU/01/2022. Through this decision, the Minister of SOE as a shareholder agreed to:

Laporan Direksi Board of Directors Report

- Memberhentikan dengan hormat Bapak Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energi Primer PLN.
 - Mengangkat Bapak Hartanto Wibowo sebagai Direktur Energi Primer PLN.
2. Perubahan kedua terjadi pada tanggal 21 September 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-213/MBU/09/2022. Melalui keputusan tersebut, Menteri BUMN selaku pemegang saham menyetujui untuk:
- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PLN:
 1. Bapak Bob Saril, sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan.
 2. Bapak Haryanto W.S, sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali.
 - Mengubah nomenklatur Direksi dan mengalihkan jabatan Direktur sebagai berikut:
 1. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara menjadi Direktur Distribusi yang kemudian dijabat oleh Bapak Adi Priyanto.
 2. Meniadakan nomenklatur jabatan Direktur Energi Primer.
 3. Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia menjadi Direktur Legal dan Manajemen *Human Capital* yang kemudian dijabat oleh Bapak Yusuf Didi Setiarto.
 4. Direktur Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan menjadi Direktur Manajemen Pembangkitan yang kemudian dijabat oleh Bapak Adi Lumakso.
 5. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan yang kemudian dijabat oleh Ibu Sinthya Roesly.
 6. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan menjadi Direktur retail dan Niaga.
 7. Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan menjadi Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan yang kemudian dijabat oleh Bapak Wiluyo Kusdwiarto.
- Honorably dismiss Mr. Rudy Hendra Prastowo as Director of Primary Energy of PLN.
 - Appoint Mr. Hartanto Wibowo as Director of Primary Energy of PLN.
2. The second change was on September 21, 2022 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprise (SOE) No. SK-213/MBU/09/2022. Through this decision, the Minister of SOE as a shareholder agreed to:
- Honorably dismiss the following names as members of the Board of Directors of PLN:
 1. Mr. Bob Saril, as Director of Commerce and Customer Management.
 2. Mr. Haryanto W.S, as Regional Business Director for Java, Madura and Bali.
 - Change the nomenclature of the Board of Directors and assign the position of the Director as follows:
 1. Regional Business Director for Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara became Director of Distribution which was then held by Mr. Adipriyanto.
 2. Eliminate the nomenclature of the position of Director of Primary Energy.
 3. The Director of Human Resources Management became the Director of Legal and Human Capital Management which was then held by Mr. Yusuf Didi Setiarto.
 4. Regional Business Director for Sumatra and Kalimantan became Director of Power Generation Management which was later held by Mr. Adi Lumakso.
 5. The Director of Finance and Risk Management became the Director of Finance which was then held by Ms. Sinthya Roesley.
 6. Director of Commerce and Customer Management became Director of Retail and Commerce.
 7. Director of Mega Projects and New Renewable Energy became Director of Project Management and New Renewable Energy which was then held by Mr. Wiluyo Kusdwiarto.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

- | | |
|--|--|
| <p>8. Direktur Perencanaan Korporat menjadi Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis yang kemudian dijabat oleh Bapak Hartanto Wibowo.</p> <p>9. Direktur Bisnis regional Jawa, Madura dan Bali menjadi Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem yang kemudian dijabat oleh Bapak Evy Haryadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengangkat Ibu Edi Srimulyanti menjadi Direktur Retail dan Niaga. | <p>8. The Director of Corporate Planning became the Director of Corporate Planning and Business Development which was then held by Mr. Hartanto Wibowo.</p> <p>9. Regional Business Director for Java, Madura, and Bali became Director of Transmission and System Planning which was later held by Mr. Evy Haryadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appoint Ms. Edi Srimulyanti as Director of Retail and Commerce. |
|--|--|

Dengan perubahan-perubahan tersebut, komposisi Direksi PLN pada posisi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

With these changes, the composition of the Board of Directors of PLN as of December 31, 2022 is as follows:

Jabatan / Position	Nama / Name
Direktur Utama / President Director	Darmawan Prasodjo
Direktur Keuangan / Director of Finance	Sinthya Roesly
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis / Director of Corporate Planning and Business Development	Hartanto Wibowo
Direktur Legal dan Manajemen Human Capital / Director of Legal and Human Capital Management	Yusuf Didi Setiarto
Direktur Retail dan Niaga / Director of Retail and Commerce	Edi Srimulyanti
Direktur Manajemen Pembangkitan / Director of Generator Management	Adi Lumakso
Direktur Distribusi / Director of Distribution	Adi Priyanto
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Project Management and New and Renewable Energy	Wiluyo Kusdwiarto

Mewakili jajaran Direksi, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rudy Hendra Prastowo, Bapak Bob Saril, dan Bapak Haryanto W.S atas upaya dan kerja keras yang telah diberikan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan usaha PLN, selama menjabat sebagai anggota Direksi. Kemudian, kepada anggota Direksi yang baru, yaitu Bapak Hartanto Wibowo dan Ibu Edi Srimulyanti, kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat mengemban amanah baru.

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our gratitude to Mr. Rudy Hendra Prastowo, Mr. Bob Saril, and Mr. Haryanto W.S for the efforts and hard work that have been given to support the management and business development of PLN, while serving as members of the Board of Directors. Then, we would like to welcome the new members of the Board of Directors, namely Mr. Hartanto Wibowo and Mrs. Edi Srimulyanti, and congratulations on carrying out your new mandate.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

PENUTUP

Kami percaya bahwa seluruh kinerja PLN tidak akan tercapai tanpa dukungan dan kepercayaan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan untuk tahun 2022, kami menyampaikan terima kasih kepada segenap pemangku kepentingan PLN, mencakup pemegang saham, karyawan, pelanggan, regulator, kreditur, hingga masyarakat.

Lebih dari itu, secara khusus, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham PLN atas dukungan yang sangat besar dan nyata sehingga PLN dapat menjalankan tugas menghadirkan energi listrik untuk Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dewan Komisaris atas pengawasan, nasihat, arahan, serta saran perbaikan yang telah diberikan kepada Direksi, sebagai sinergi yang kuat dalam rangka mendorong peningkatan kualitas kontribusi PLN bagi negeri.

Direksi PLN optimistis, dukungan, kepercayaan, hingga sinergi yang telah terjalin akan mampu terjaga dan semakin ditingkatkan untuk menghadapi tantangan yang semakin dinamis di tahun-tahun mendatang.

CLOSING

We believe that all of PLN's performance would not be achieved without the strong support and trust of all stakeholders. For the support and trust that has been given for 2022, we express our gratitude to all PLN stakeholders, including shareholders, employees, customers, regulators, creditors, and the community.

Moreover, in particular, we would like to express our deep gratitude to the government of the Republic of Indonesia as the PLN shareholder for the enormous and concrete support so that PLN can carry out the task of providing electrical energy for Indonesia. We would also like to extend our gratitude to the Board of Commissioners for the supervision, advice, directions, and suggestions for improvement that have been given to the Board of Directors, as a strong synergy in order to encourage the improvement of the quality of PLN's contribution to the country.

The Board of Directors of PLN is optimistic that the support, trust, and synergies that have been established will be maintained and further improved to face the increasingly dynamic challenges in the coming years.

Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors

PT PLN (Persero)

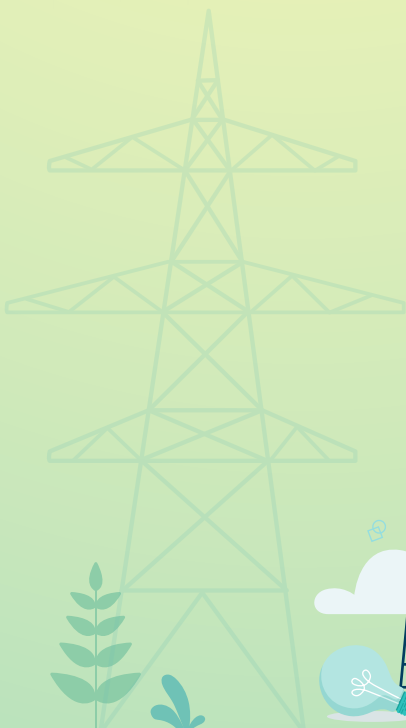
DARMAWAN PRASODJO

Direktur Utama
President Director

Profil Perusahaan

Company Profile

03





PLN

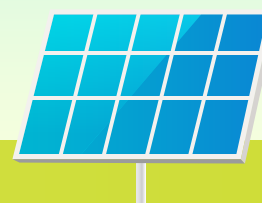
KANTOR PUSAT



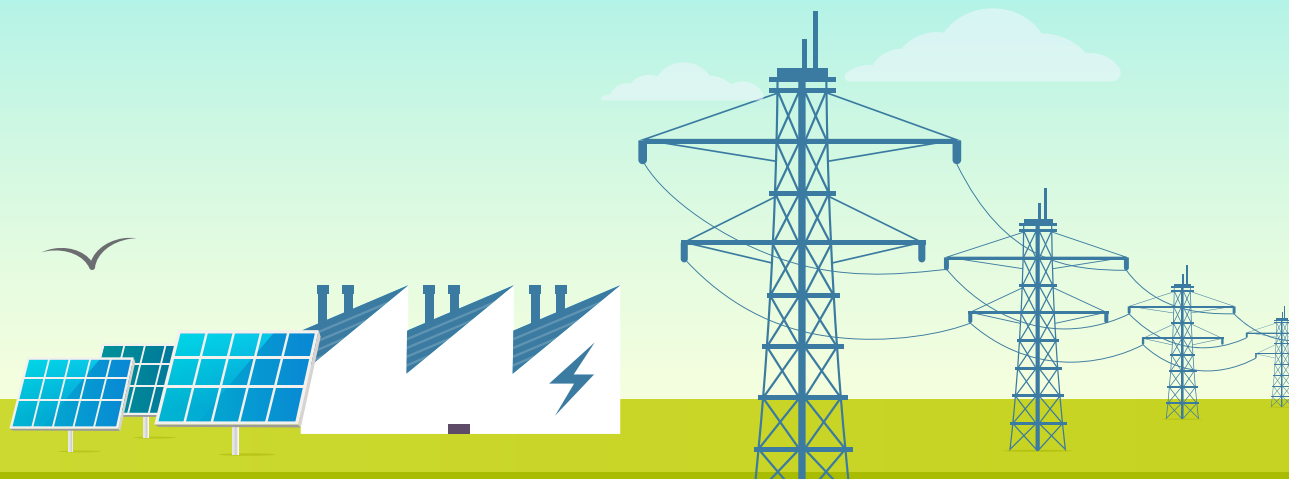


Informasi Perusahaan

Company Information



Nama Perusahaan / Company Information	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Tanggal Pendirian / Date of Establishment	<ul style="list-style-type: none"> Pertama kali berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 1 SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945. / Established as Electricity and Gas Bureau based on the Government Decree No. 1 SD/1945 dated October 27, 1945. Menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT PLN (Persero) berdasarkan Akta 169, 30 Juli 1994 dari Notaris Sutjipto. / It became a Limited Liability Company under the name PT PLN (Persero) based on Deed 169, July 30, 1994, from Sutjipto, Notary.
Bidang Usaha / Line of Business	Pembangkitan, Distribusi, Transmisi, dan Jasa Lain Terkait Kelistrikan / Generation, Distribution, Transmission, and Other Services Related to Electricity
Dasar Hukum Pendirian / Legal Basis of Establishment	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan Pemerintah No. 1 SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas. / Government Stipulation No. 1 SD/1945 dated October 27, 1945, established as Electricity and Gas Bureau. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1961, diganti sebagai Perusahaan Negara, disebut sebagai Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. / Government Regulation No. 67 of 1961, it was changed to a State Company (Perusahaan Negara), and renamed as General Management Board of State Electricity Company. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965, dibentuk sebagai Perusahaan Listrik Negara. / Government Regulation No. 19 of 1965, it was established as State-Owned Electricity Company. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972, tanggal 3 Juni 1972, ditegaskan menjadi Perusahaan Umum Perusahaan Listrik Negara. / Government Regulation No. 18 of 1972, dated June 3, 1972, it was affirmed as a Public Corporation (Perum) of State Electricity. Akta 169, 30 Juli 1994 dari Sutjipto, Notaris, diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT PLN (Persero). / Deed No. 169, July 30, 1994, from Sutjipto, Notary, it was changed to a Limited Liability Company under the name of PT PLN (Persero).
Pemegang Saham / Shareholder	Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan 100% / Government of the Republic of Indonesia with ownership percentage of 100%.
Modal Dasar / Authorized Capital	Rp439.000.000.000.000,- yang terbagi atas 439.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham. / Rp439,000,000,000,000 divided into 439,000,000 shares with a par value of Rp1,000,000 per share.
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid Capital	Rp145.536.096.000.000,- yang terbagi atas 145.536.096 saham / Rp145,536,096,000,000 divided into 145,536,096 shares



Tanggal Pencatatan Obligasi Pertama Kali di Bursa / Initial Bonds Listing Date on the Stock Exchange	10 November 1992 / November 10, 1992
Nama Bursa / Stock Exchange Name	Bursa Efek Indonesia (dh. Bursa Paralel Indonesia) / Indonesia Stock Exchange (formerly Indonesia Parallel Exchange)
Kode Obligasi / Bonds Code	PPLN
Jumlah Karyawan / Total Employees	42.151 karyawan / 42,151 employees 9.326 karyawan anak perusahaan / 9.326 subsidiaries employees
Entitas Anak Perusahaan / Subsidiaries	<ul style="list-style-type: none"> • PT Indonesia Power • PT PLN Nusantara Power (dahulu bernama PT Pembangkitan Jawa Bali) / PT PLN Nusantara Power (formerly known as PT Pembangkitan Jawa Bali) • PT Pelayanan Listrik Nasional Batam • PT Indonesia Comnets Plus • PT PLN Tarakan • PT PLN Energi Primer Indonesia (dahulu bernama PT PLN Batubara) / PT Energi Primer Indonesia (formerly known as PT PLN Batubara) • PT PLN Gas & Geothermal • PT Prima Layanan Nasional Enjiniring • Majapahit Holding BV • PT Haleyora Power • PT Pelayaran Bahtera Adhiguna • PT Energy Management Indonesia • PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara
Wilayah Operasional / Operational Area	Seluruh Daerah di Republik Indonesia / All Regions in the Republic of Indonesia
Alamat Perusahaan / Company's Address	Kantor Pusat / Head Office Jl. Trunojoyo Blok M I -135 Jakarta 12160 Telepon / Phone : (021) 7261875; 7261122; 7262234; 7251234; 7250550 Fax : (021) 7221330; 7397150 Situs Web : www.pln.co.id Email : investor.relation@pln.co.id

Sejarah Singkat

PLN

Brief History of PLN



PLN terus berkembang sebagai salah satu korporasi pengelola aset kelistrikan terbesar di

Indonesia. PLN continued to grow as one of the largest electricity asset management corporations in Indonesia.



PLN berdiri pada 27 Oktober 1945 sebagai Jawatan Listrik dan Gas, yang beroperasi di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit listrik sebesar 157,5 MW. Dengan konteks kemerdekaan nasional, pemuda dan buruh listrik melalui delegasi buruh/pegawai listrik dan gas bersama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Sukarno untuk menyerahkan perusahaan Belanda yang sebelumnya diambil alih Jepang, untuk kemudian menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia.

Sebelumnya, perusahaan yang kemudian diubah menjadi Jawatan Listrik dan Gas tersebut merupakan beberapa perusahaan asal Belanda yang mengoperasikan pabrik gula dan perkebunan teh di wilayah Nusantara. Seiring hadirnya kebutuhan tenaga listrik pada proses produksi di akhir

PLN was established on October 27, 1945, under the name of the Electricity and Gas Bureau under the Department of Public Works and Energy with a power generation capacity of 157.5 MW. On the occasion of the national independence, the youths and the electricity workers through the delegation of electricity and gas workers/employees, together with the head of the Central KNI took an initiative to meet President Soekarno to hand over the Dutch companies, which were previously taken over by the Japanese, to the Government of the Republic of Indonesia.

Initially, the company that later became the Bureau of Electricity and Gas were several Dutch companies that operated sugar factories and tea plantations in the archipelago. As the presence of the need for electric power

Sejarah Singkat PLN

Brief History of PLN

abad ke-19, N.V. Handelsvennootschap yang berpusat di Amsterdam mendirikan perusahaan listrik di Batavia dengan nama *Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij* (NIEM). Perang Dunia II yang juga berlangsung di wilayah Nusantara akhirnya membuat perusahaan listrik itu diambil alih tentara Jepang, sebelum kemudian berhasil dikuasai oleh pemuda Indonesia.

Setelah beroperasi sebagai Jawatan Listrik dan Gas, PLN kemudian diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) pada 1 Januari 1961. Pada era ini, PLN beroperasi pada bidang usaha penyediaan listrik, gas, dan kokas, sebelum akhirnya diubah kembali pada 1 Januari 1965 menjadi 2 (dua) perusahaan negara, yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Selanjutnya, sesuai Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang diperkuat Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972, status PLN berubah menjadi menjadi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara dan bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK).

Kemudian, berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H No. 169 tanggal 30 Juli 1994, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero) dan tetap sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum. Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada 2009, sesuai Undang-Undang No. 30 tahun 2009, PLN tidak lagi beroperasi sebagai PKUK melainkan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Sejak saat itu, PLN terus berkembang sebagai salah satu korporasi pengelola aset kelistrikan terbesar di Indonesia. Hingga kini, PLN telah mengelola pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas terpasang 69.040 MW, serta jaringan transmisi sepanjang 68.205 kms dan gardu induk sebesar 161.367 MVA.

in the production process in the late 19th century, N.V. Handelsvennootschap, based in Amsterdam, established an electricity company in Batavia under the name *Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij* (NIEM). World War II, which also took place in the Indonesian archipelago, finally made the electricity company taken over by the Japanese army, before being successfully controlled by Indonesian youths.

After operating as the Bureau of Electricity and Gas, PLN was then changed to become BPU-PLN (General Board of the State Electricity Company) on January 1, 1961. In this era, PLN operated in the business sector providing electricity, gas and coke, before finally being changed back on January 1, 1965 it became 2 (two) state companies, namely the State Electricity Company (PLN) and the State Gas Company (PGN). Furthermore, according to Government Regulation no. 30 of 1970 which was strengthened by Government Regulation no. 18 of 1972, the status of PLN changed to become a State Electricity Public Company (Perum) and acted as the Holder of Authority to Conduct Business Electricity (PKUK).

Then based on the Deed of Notary Sutjipto, S.H., No. 169 dated July 30, 1994, the status of the Company's legal entity changed to a Limited Liability Company under the name PT Perusahaan Listrik Negara, abbreviated as PT PLN (Persero) and remained as the Holder of Authority to Conduct Business Electricity (PKUK) in providing electricity for the public interest. The government is obliged to provide compensation for all costs incurred by SOEs including the expected margin for SOEs that are given special assignments as stipulated in Law (UU) No. 19 of 2003 on State Owned Enterprises (SOEs).

Under the Law No. 30 of 2009, PLN no longer operates as PKUK, but instead becomes a State-Owned Enterprise (SOE) holding an Electricity Supply Business License (IUPTL) with the task of providing electricity for the public interest. Since then, PLN continued to grow as one of the largest electricity asset management corporations in Indonesia. To this day, PLN has managed a power plant with a capacity of 69,040 MW and a transmission network of 68,205 kms and a substation of 161,367 MVA.

Kronologi Perubahan Nama Perusahaan

Chronology of Name Change

27 Oktober • October 27

1945

Sesuai PP No. 1SD/1945, Perusahaan berdiri dengan nama Jawatan Listrik dan Gas, di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. / Based on Government Stipulation No. 1 SD/1945, the Company was established as the Electricity and Gas Bureau under the Department of Public Works and Energy.

1 Januari • January 1

1961

Sesuai PP No. 67/1961, Perusahaan berubah nama menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara). / Based on Government Regulation No. 67/1961, the Company changed its name to BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara/General Management Board of State Electricity Company).

1 Januari • January 1

1965

Sesuai PP No. 19/1965 BPU PLN dipecah menjadi 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN). / Based on Government Regulation No. 19/1965, BPU PLN demerged into 2 state companies, namely Perusahaan Listrik Negara (PLN) and Perusahaan Gas Negara (PGN).

3 Juni • June 3

1972

Sesuai PP No. 18/1972, Perusahaan berubah nama menjadi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara. / Based on Government Regulation No. 18/1972, the Company changed its name to Public Corporation (Perum) of State Electricity.

16 Juni • June 16

1994

Sesuai PP No. 23/1994 Perusahaan berubah nama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Listrik Negara atau PT PLN (Persero). / Based on Government Regulation No. 23/1994, the Company changed its name to Perusahaan Perseroan (Persero) Listrik Negara or PT PLN (Persero).

Makna Logo Perusahaan

Company Logo Meaning



Logo PLN merupakan bagian dari identitas perusahaan yang terdiri dari *Logogram* dan *Logotype*, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. *Logogram* tersusun dari 3 (tiga) elemen visual, yaitu:

1. Bidang Persegi sebagai dasar, berwarna kuning, dan tanpa garis pinggir.
 - a. Bidang Persegi melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisasi dengan sempurna.
 - b. Warna kuning menggambarkan pencerahan seperti yang diharapkan PT PLN (Persero) bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Warna kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap Insan yang berkarya di PT PLN (Persero).

The Logo used as the Company's Identity consists of the Logogram and Logotype which are an integral and inseparable part. The Logogram is composed of 3 (three) visual elements, namely:

1. Yellow, borderless square shape as the base form.
 - a. Square shape symbolizes that PT PLN (Persero) is a container or organization that is perfectly organized.
 - b. The yellow color depicts enlightenment as expected from PT PLN (Persero) that electricity is able to create enlightenment for people's lives. The yellow color also symbolizes the fiery spirit of every individual who works at PT PLN (Persero).

Makna Logo Perusahaan

Company Logo Meaning

2. Petir atau Kilat, berwarna merah, bentuk atas tebal, bentuk bawah runcing, dan memotong/menembus tiga gelombang.
 - a. Petir atau Kilat melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh PT PLN (Persero). Selain itu, Petir juga mengartikan kerja cepat dan tepat para Insan PT PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi pelanggannya,
 - b. Warna merah memberikan representasi kedewasaan PT PLN (Persero) selaku perusahaan listrik pertama di Indonesia dan dinamisme gerak laju PT PLN (Persero) beserta Insan Perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.
3. Tiga Gelombang, berwarna biru, berbentuk sinusodia ($2\frac{1}{2}$ perioda), ujung gelombang menghadap ke bawah, tersusun sejajar dalam arah mendatar, dan terletak di tengah-tengah pada dasar kuning.
 - a. Tiga Gelombang memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti oleh PT PLN (Persero) yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para Insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya.
 - b. Warna biru melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada tugas untuk menuju dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta keandalan yang dimiliki Insan PT PLN (Persero) dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

Sedangkan *Logotype* terdiri dari singkatan kalimat "Perusahaan Listrik Negara" yakni PLN yang disusun dari karakter huruf yang khas, sehingga memiliki standar khusus dan ciri tertentu hanya dimiliki oleh PT PLN (Persero).

Meanwhile, the *Logotype* consists of the acronym for the State Electricity Company, namely PLN, which is composed of distinctive letter characters so that it has special standards and is only owned by PT PLN (Persero).



PLTS Cirata, Jawa Barat /
Cirata Solar Power Plant, West Java



Jejak Langkah

Milestones



Perusahaan-perusahaan Hindia Belanda di bidang pabrik gula dan perkebunan teh membangun pembangkit listrik untuk keperluan operasional mereka sendiri. / Dutch companies (sugar factories and tea plantations) constructed power plants for their own operational use.

Akhir abad 19
End of 19th Century

Seluruh perusahaan penyedia tenaga listrik eks-Hindia Belanda diambil alih pemerintah Jepang. / All of the electricity generating facilities under the Dutch rule were taken over by the Japanese occupying forces.

1942-1945

Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. / President Soekarno established the Electricity and Gas Bureau operating under the Department of Public Works and Energy.

27 Oktober 1945
October 27, 1945

Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas. / The Electricity and Gas Bureau reconstituted into BPU-PLN (General Management Board of State Electricity Company) engaged in generating power, gas, and coke.

1 Januari 1961
January 1, 1961

PLN menjadi salah satu dari kelompok perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia versi Fortune 500. / PLN became one of the companies with the largest revenues in the world according to Fortune 500.

2014

PLN mengoperasikan *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai bahan bakar pengganti BBM untuk memenuhi kebutuhan pembangkit beban puncak (*peaker*). / PLN operated Compressed Natural Gas (CNG) as an alternative for fossil fuel to meet the needs of peak load generators (peakers).

2013

Pemerintah menyerahkan saham BUMN PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) kepada PT PLN (Persero) pada tanggal 5 Agustus 2011 dan menjadi anak perusahaan PT PLN (Persero). / The Government handed over the SOE shares of PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) to PT PLN (Persero) on August 5, 2011, thus establishing BAG as a subsidiary of PT PLN (Persero).

2011

Sesuai Perpres No.4 Tahun 2010, PLN ditugaskan untuk membangun PLTU berbahan bakar batu bara, gas maupun panas bumi dalam bentuk program percepatan tahap kedua (FTP II). / Based on Presidential Regulation No. 4 of 2010, PLN was mandated to build coal, gas, and geothermal steam power plants under Fast Track Project phase II (FTP II).

2010

- PLN mendeklarasikan dimulainya pembangunan PLTU berbahan bakar batu bara, gas maupun panas bumi sebesar 35.000 MW dengan target penyelesaian 5 tahun ke depan. / PLN declared the commencement of the construction of coal, gas, and geothermal power plants with the capacity of 35,000 MW scheduled for completion in 5 years.

2015

- PLN mulai merealisasikan proyek pembangunan PLTU berteknologi *ultra super critical* dengan kapasitas 2.000 MW di Batang (Jawa Tengah) melalui skema *Public Private Partnership*. / PLN began the construction project of a steam power plant using ultra super critical technology with a capacity of 2,000 MW in Batang (Central Java) through the Public Private Partnership scheme.

Untuk memenuhi amanat Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, PLN mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah untuk mengeksekusi proyek ketenagalistrikan dalam hal penjaminan, percepatan perizinan & non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, penyelesaian hambatan & permasalahan, serta penyelesaian masalah hukum yang dihadapi. /

2016

PLN melakukan Transformasi *Holding dan Sub-Holding* (HSH) dengan *4-Sub-Holding* yang terdiri dari 2 SH Pembangkitan (*Generation Company/ Genco*), 1 SH Energi Primer dan 1 SH Beyond kWh di PLN untuk memberikan *value creation* dan mampu menjawab tantangan di masing-masing sub sektor yang dihadapi. / PLN carried out a Holding and Sub-Holding or HSH Transformation with 4-Sub-Holding consisting of 2 SH Generation Company (Genco), 1 SH Primary Energy and 1 SH Beyond kWh at PLN to provide value creation and be able to respond to challenges in each of the relevant sub-sectors.

- PLN mensosialisasikan RUPTL 2021-2030 yang sangat mengedepankan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) / PLN disseminated the 2021-2030 RUPTL which prioritizes the use of New Renewable Energy (NRE).
- PLN mengakuisisi PT Energy Management Indonesia dan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara untuk mengakselerasikan dan mendukung program-program Transformasi. / PLN acquired PT Energy Management Indonesia and PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara to accelerate and support Transformation programs.

2022

2021



Jejak Langkah Milestones

BPU-PLN dibubarkan, dibentuklah Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas. / BPU-PLN was dismissed and two state companies were established, i.e., Perusahaan Listrik Negara (PLN) that managed the electricity sector and Perusahaan Gas Negara (PGN) that managed the gas sector.

1 Januari 1965
January 1, 1965

Status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1970. / The Company's status was changed to Public Corporation (Perum) in accordance with the Government Regulation No. 30 of 1970.

1970

Status PLN berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara dan bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. / PLN's status was changed to Public Corporation of State Electricity and acted as the Holder of Authority to Conduct Electricity Business (PKUK) with the mandate to provide electricity for the public interest.

1972

Sesuai Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2009, PLN tidak lagi bertindak sebagai PKUK, tetapi beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. / Based on Law No. 30 of 2009, PLN was no longer designated as PKUK, but operated as a State-Owned Enterprise (SOE) with the mandate to provide electricity for the public interest.

2009

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2006, PLN ditugaskan untuk membangun PLTU berbahan bakar batu bara sebesar 10.000 MW tahap pertama (FTP I). / Based on Presidential Regulation No. 71 of 2006, PLN was mandated to build a coal-fired Steam Power Plant with a capacity of 10,000 MW under Fast Track Project phase I (FTP I).

2006

PLN memulai program transformasi menjadi perusahaan penyedia dan penyalur listrik kelas dunia. / PLN began its transformation program into a world-class electricity provider and distributor.

2005

Status badan hukum berubah menjadi Perseroan Terbatas, sesuai Akta No. 169 Tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H. Notaris, Jakarta. / Legal status was changed into Limited Liability Company, according to Deed No. 169 dated July 30, 1994 from Sutjipto, S.H., notary in Jakarta.

1994

To fulfill the mandate of Presidential Decree No. 4 of 2016 on Acceleration of Electricity Infrastructure Development, PLN was fully supported by the Government to execute electricity projects in terms of guarantees, accelerated licensing & non-licensing, provision of primary energy, spatial planning, land provision, solving obstacles & problems, and solving all legal issues faced.

Tidak ada lagi sistem kelistrikan di Indonesia yang mengalami defisit. Artinya, masalah pemadaman akibat kekurangan pasokan daya listrik sudah terselesaikan. / There was no longer deficit in Indonesia's electricity system. This means the blackout problem due to the lack of electricity supply has been resolved.

2017

Di tengah peningkatan harga energi primer dunia serta nilai tukar Rupiah yang melemah terhadap US Dolar, PLN tetap mampu menyediakan listrik yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus melanjutkan program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. / In the midst of increasing world primary energy prices and the weakening Rupiah exchange rate against the US Dollar, PLN was still able to provide affordable electricity to the public while continuing the electricity infrastructure development program.

2018

- PLN mencanangkan inisiatif strategis TRANSFORMASI, menetapkan Aspirasi PLN di tahun 2025 mendatang, meredefinisikan Visi Perseroan dan menetapkan AKHLAK sebagai rumusan Nilai-nilai Perusahaan. / PLN launched the TRANSFORMATION strategic initiative, determined PLN's Aspirations in 2025, redefined the Company's Vision, and established AKHLAK as the formulation of Corporate Values.
- Penerapan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di PT PLN (Persero). / Implementation of SNI ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System at PT PLN (Persero).

2020

- Dengan terbitnya Perpres No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi Jalan, PLN mendukung penuh pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sebagai salah satu peluang bisnis baru di masa depan, di antaranya dengan menginisiasi pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). / Due to the issuance of Presidential Regulation No. 55 of 2019 on Acceleration of Battery Electric Vehicle Program for Road Transportation, PLN fully supported the development of electric vehicle ecosystem in Indonesia as one of new business opportunities in the future, including by initiating development of Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU).

2019

Kegiatan Usaha

Business Activities



KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, PLN beroperasi pada kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Bidang usaha tersebut meliputi sejumlah kegiatan, berupa pembangkitan, penyaluran, dan distribusi, di samping melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan tenaga listrik, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PLN menjalankan usaha penunjang tenaga listrik meliputi:

1. Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
2. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
3. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
4. Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on the Company's Articles of Association, PLN operates in the electricity supply business. The business activities covers a number of activities, namely generation, transmission and distribution, in addition to planning and constructing electricity supply facilities as well as developing electricity supply, which is carried out in accordance with applicable laws and regulations.

PLN also runs electricity supporting businesses, which include the following activities:

1. Consultation related to electricity;
2. Construction and installation of electricity equipment;
3. Maintenance of electricity equipment;
4. Development of equipment technology that supports electricity supply.

Kegiatan Usaha Business Activities

Selain itu, PLN dapat melakukan sejumlah kegiatan berikut:

1. Ikut dalam kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya yang terkait dengan penyediaan ketenagalistrikan, antara lain: energi tidak terbarukan (antara lain batu bara, gas alam, minyak bumi), energi terbarukan (antara lain air, panas bumi, matahari, angin, biomassa, bahan bakar, nabati, hibrida, gelombang air laut), dan sumber energi lainnya seperti nuklir yang dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
2. Melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada bidang pembangkitan, penyaluran, distribusi, dan retail tenaga listrik;
3. Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan listrik;
4. Melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional telekomunikasi, dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lapangan usahanya ataupun bidang-bidang lain yang dianggap perlu untuk menunjang usaha Perseroan, baik dalam bentuk kerja sama usaha patungan, kerja sama bagi hasil, kontrak manajemen, dan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan usaha jasa yang menyangkut bidang ketenagalistrikan termasuk konsultasi, konstruksi, pendidikan, dan pelatihan manajemen jasa enjinering, penelitian dan pengembangan teknik ketenagalistrikan dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LINI BISNIS PERUSAHAAN

Pembangkitan Tenaga Listrik

Sampai dengan 31 Desember 2022, PLN mengoperasikan pembangkit listrik dengan kapasitas lebih dari 69.040 MW, MW, dimana 65,1% dari kapasitas pembangkit tersebut dimiliki oleh PLN, 33,3% dimiliki oleh IPP, dan sisanya adalah pembangkit sewa.

Beside, PLN can carry out the following activities:

1. Participate in business activities and the utilization of natural resources and other energy sources related to electricity supply, including: non-renewable energy (such as coal, natural gas, petroleum), renewable energy (such as water, geothermal, solar, wind, biomass, fuels, biofuels, hybrids, sea waves), and other energy sources, such as nuclear, which can be developed in line with technological developments and pursuant to the applicable laws and regulations;
2. Provide operational and regulatory services (*dispatchers*) in the field of electricity generation, transmission, distribution and retail;
3. Carry out industrial activities in hardware and software in the electricity sector and other equipment related to electricity;
4. Enter into collaboration with other agencies or other parties or administering bodies in the electricity sector both from within the country and overseas in the fields of development, telecommunications operations, and information related to electricity, finance, human resources, research and development according to the field of business or other fields deemed necessary to support the Company's business, whether in the form of joint venture cooperation, production sharing cooperation, management contracts, and other forms, pursuant to the applicable laws and regulations;
5. Conduct service businesses related to the electricity sector, including consulting, construction, education, and training in engineering services management, research and development of electricity techniques and other services, pursuant to the applicable laws and regulations.

THE COMPANY'S LINE OF BUSINESS

Electric Power Generation

As of December 31, 2022, PLN operates power plants with a capacity of more than 69,040 MW, of which 65.1% of the generating capacity is owned by PLN, while 33.3% owned by IPP and the rest are leased generators.



Kegiatan Usaha

Business Activities

Status Kepemilikan / Ownership Status	Kapasitas (MW) / Capacity (MW)
Milik PLN / Owned by PLN	44.940
Swasta (IPP) / Private (IPP)	22.962
Sewa / Leased	1.137
Jumlah / Total	69.040

Persentase kapasitas terpasang per jenis pembangkit pada akhir Desember 2022 adalah sebagai berikut:

At the end of December 2022, the percentage of installed capacity per type of generator is as follows:

Jenis Pembangkit / Type Of Generator	Kapasitas (MW) / Capacity (MW)	Persentase / Percentage
PLTU	36.923,00	53,48%
PLTGU	12.746,68	18,46%
PLTD	4.227,75	6,12%
PLTMG	2.601,10	3,77%
PLTA	5.083,05	7,36%
PLTM & PLTMH	552,01	0,80%
PLTG	4.016,30	5,82%
PLTP	2.533,68	3,67%
PLT Surya, PLT Bayu & PLT Biomasa	356,02	0,52%

Penyaluran Tenaga Listrik

Sampai dengan 31 Desember 2022, PLN menguasai dan mengoperasikan 100% jaringan transmisi di Indonesia, yang membentang hingga mencapai total panjang 68.206 kilometer sirkuit (kms), dan total kapasitas gardu induk 161.367 Mega Volt Ampere (MVA).

Total panjang jaringan transmisi tersebut terdiri dari jaringan 500 kV sepanjang 6.971 kms, 275 kV sepanjang 3.828 kms, 150 kV sepanjang 51.378 kms, 70 kV sepanjang 5.910 kms, dan 25 & 30 kV sepanjang 101 kms.

Electric Power Transmission

As of December 31, 2022, PLN owns and operates 100% of the transmission network in Indonesia, which stretches to a total length of 68,206 circuit kilometers (kms), and a total substation capacity of 161,367 Mega Volt Ampere (MVA).

The total length of the transmission network consists of 500 kV for 6,971 kms, 275 kV for 3,828 kms, 150 kV for 51,378 kms, 70 kV for 5,910 kms, and 25 & 30 kV for 101 kms.



Kegiatan Usaha

Business Activities



PLTP Kamojang, Jawa Barat /
 Kamojang Geothermal Powerplant, West Java

Distribusi dan Pelayanan Pelanggan

PLN mengontrol dan mengoperasikan 100% jaringan distribusi di Indonesia. Pada akhir 2022, kami memiliki jaringan distribusi sepanjang 1.033.662,09 kms untuk melayani 85,6 juta pelanggan kami di seluruh wilayah Indonesia.

Distribution and Customer Service

PLN controls and operates 100% of the distribution network in Indonesia. By the end of 2022, the Company owned a distribution network of 1,033,662.09 kms to serve its 85.6 million customers throughout Indonesia.

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Values

Moto • Motto



Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik

Electricity for a Better Life



MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan, dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

PERSETUJUAN VISI DAN MISI

PLN menetapkan visi, misi, dan tata nilai perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun. Visi, misi, dan tata nilai perusahaan yang berlaku untuk tahun 2022 telah disetujui seiring penetapan Program Transformasi, dengan diberlakukannya Keputusan Direksi Nomor 0244.K/DIR/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Visi Perusahaan PT PLN (Persero).

PURPOSE AND OBJECTIVE OF THE COMPANY

To organize an electricity business for public use in sufficient quantity and quality and also to earn profit and perform Government's assignment in electricity business in order to support the development of the country with the application of the principles of a Limited Liability Company.

VISION AND MISSION APPROVAL

PLN determines the vision, mission, and corporate values as an integral part of the preparation of the Long Term Plan (RJP) which is carried out periodically every 5 (five) years. The vision, mission, and corporate values implemented in 2022 have been approved along with the establishment of the Transformation Program, with the enactment of Decree of the Board of Directors No. 0244.K/DIR/2020 dated December 10, 2020 on Determination Vision of PT PLN (Persero).

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Values

Visi • Vision

Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.

- **Perusahaan Listrik**
Perusahaan memiliki bisnis utama berupa penyediaan tenaga listrik dengan tetap mengembangkan bisnis di sepanjang rantai nilai ketenagalistrikan mulai dari energi primer, pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan untuk mendukung keberlanjutan industri ketenagalistrikan di Indonesia.
- **Terkemuka se-Asia Tenggara**
Perusahaan mampu menyediakan tenaga listrik dengan standar kualitas pelayanan kelas dunia sehingga menjadikan Indonesia sebagai pilihan investasi utama di Asia Tenggara. Pelayanan kelas dunia yang dimaksud diharapkan dapat diwujudkan pada tahun 2024 dengan menjadi top 20 *World Bank getting electricity rank*.
- **Terpercaya #1 Pilihan Pelanggan**
Perusahaan merupakan pilihan utama pelanggan karena kualitas dan pelayanan yang diberikan sehingga konsumen menjadi loyal.
- **Solusi Energi**
Perusahaan dapat memberikan nilai kepada pelanggan berupa solusi total terhadap setiap permasalahan terkait energi sehingga perusahaan harus mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan usaha, serta konsisten dalam pengembangan standar kerja.

To be the Leading Electricity Company in Southeast Asia and #1 Customer Choice for Energy Solutions

- **Electricity Company**
The company's primary business is the provision of electric power while continuing to develop its business along the electricity value chain starting from primary energy, generation, transmission, distribution and sales to support the sustainability of the electricity industry in Indonesia.
- **Leading in Southeast Asia**
The company can provide electricity with world-class service quality standards, and thus making Indonesia the first investment choice in Southeast Asia. The world-class service in question is expected to be realized in 2024, when it becomes the top 20 World Bank getting electricity rank.
- **The Most Trusted Customers' Choice**
The company is the customers' first choice due to the quality and services provided so that consumers become loyal.
- **Energy Solution**
Companies can provide value to customers in the form of total solutions to every energy-related problem so companies must be able to anticipate various business opportunities and challenges, and be consistent in developing work standards.

Misi • Mission

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
- Running the electricity business and other related fields, oriented to the satisfaction of customers, company members and shareholders.
- Making electricity as a medium to improve the quality of people's lives.
- Keeping electrical power into driving economic activity.
- Carrying out environmentally sound business activities.



Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Values

Tata Nilai Perusahaan • Corporate Values

Tata nilai PLN mengacu pada *core values* BUMN yang diberlakukan melalui Surat Edaran Menteri BUMN SE-7/MBU/07/2020, berupa "AKHLAK". Penjelasan mengenai tata nilai tersebut adalah sebagai berikut:

PLN's values refer to the SOEs core values which are enacted through the SOE Minister Circular Letter SE-7/MBU/07/2020, in the form of "AKHLAK". The explanation of these values is as follows:



Amanah / Trustworthiness	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan / Upholding the trust given	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi janji dan komitmen / Keep promises and commitments Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan / Responsible for the tasks, decisions, and actions carried out
Kompeten / Competent	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas / Continuously learning and developing capabilities	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah / Increase self-competence to respond to ever-changing challenges Membantu orang lain belajar / Help others learn Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik / Finish the tasks with the best quality
Harmonis / Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan / Caring for each other and respecting differences	<ul style="list-style-type: none"> Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya / Respect everyone regardless of their backgrounds Suka menolong orang lain / Like to help others Membangun lingkungan kerja yang kondusif / Build a conducive work environment
Loyal / Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara / Remaining dedicated and prioritizing the interests of the nation and the state	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara / Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOE, and the State Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar / Willing to sacrifice to achieve a greater goal Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika / Obey the leaders as long as it is not against the law and ethics

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Values

Adaptif / Adaptive	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan / Making continuous innovations and remaining enthusiastic in moving or facing changes	<ul style="list-style-type: none"> • Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik / Quickly adjust to being better • Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi / Continuously making improvements to keep up with technological developments • Bertindak proaktif / Be proactive
Kolaboratif / Collaborative	Membangun kerja sama yang sinergis / Building synergistic cooperation	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi / Provide opportunities for various parties to contribute • Terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah / Open to work together to generate added value • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama / Mobilizing the use of various resources for common goals

Sejak 2020, Kementerian BUMN menetapkan *core values* AKHLAK sebagai identitas dan perekat budaya kerja, yang merupakan dukungan dalam upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan bagi perusahaan-perusahaan BUMN.

Since 2020, the Ministry of SOEs has established AKHLAK core values as an identity and uniting element of work culture, which supports the sustainable improvement of SOEs' performance.

PLN mengimplementasikan *core values* AKHLAK sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, dengan mendorong Insan Perseroan untuk memegang teguh kepercayaan yang diberikan (Amanah), terus belajar dan mengembangkan kapabilitas (Kompeten), saling peduli dan menghargai perbedaan (Harmonis), berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara (Loyal), terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan (Adaptif) serta membangun kerja sama yang sinergis (Kolaboratif).

PLN implements AKHLAK core values as a guiding principle in carrying out daily business activities by encouraging the Company's personnel to uphold the trust given (Amanah), continue to learn and develop capabilities (Competent), care for each other and respect differences (Harmony), be dedicated and prioritize the interests of the nation and state (Loyal), continue to innovate and be enthusiastic in moving or facing change (Adaptive) and building synergistic cooperation (Collaborative).

Core values AKHLAK telah ditetapkan sebagai nilai-nilai perusahaan PLN berdasarkan Keputusan Direksi No. 0073.P/DIR/2020 tanggal 28 September 2020.

AKHLAK's Core Values were set as the Company's value formulation on September 28, 2020 based on Decree No. 0073.P/DIR/2020.

SOSIALISASI DAN UPAYA PENCAPAIAN VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Perseroan mempertimbangkan upaya pencapaian visi dan misi perusahaan pada setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional.

DISSEMINATION AND EFFORTS TO ACCOMPLISH THE COMPANY'S VISION AND MISSION

Efforts to achieve the Company's vision and mission are examined in each planning stage and throughout operational activities

Untuk menjamin tercapainya visi dan misi perusahaan, Perseroan mensosialisasikan visi dan misi kepada seluruh pegawai secara periodik. Proses penerimaan, evaluasi kinerja pegawai, promosi dan rotasi merupakan salah satu momen yang biasa digunakan Perseroan untuk melakukan proses sosialisasi visi dan misi perusahaan.

Periodically, the Company disseminates the vision and mission to all employees to ensure the Company's vision and mission are achieved. The Company uses recruitment process, employee's performance evaluation, promotion, and rotation as a momentum to disseminate its vision and mission.



Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Values

TRANSFORMASI PLN

Hingga 2022, Perseroan terus melanjutkan implementasi aspirasi strategis Transformasi PLN, dengan penjelasan sebagai berikut:

TRANSFORMATION OF PLN

As of 2022, the Company continued the implementation of strategic aspiration for the transformation of PLN, as follows:

VISION

STRATEGIC GOALS

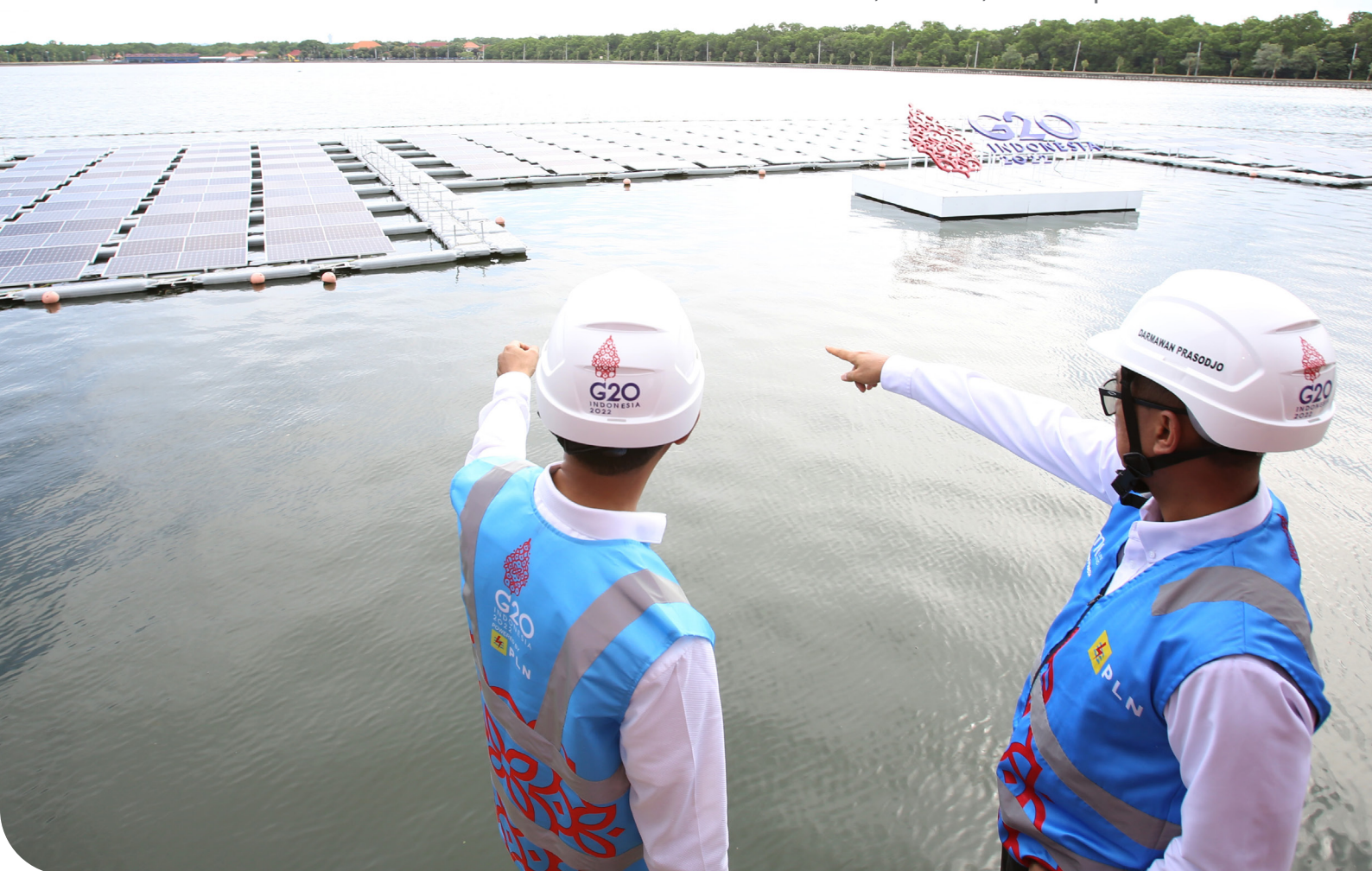
STRATEGIC ENABLERS



PLN memiliki visi untuk tumbuh sebagai perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi #1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Dengan visi tersebut, PLN mendorong pertumbuhan usaha melalui upaya menghadirkan listrik berbiaya rendah dengan pasokan listrik yang aman dan andal. Lebih dari itu, PLN terus mengupayakan penyediaan listrik rendah karbon dan berkontribusi pada upaya dekarbonisasi, di samping mengembangkan layanan berkualitas tinggi melalui pemanfaatan teknologi digital.

PLN's vision is to grow as the leading electricity company in Southeast Asia and become the customer's #1 choice for energy solutions. With this vision, PLN encourages business growth by providing low-cost electricity with a safe and reliable power supply. More than that, PLN continues to strive to provide low-carbon electricity and contribute to decarbonization efforts, in addition to developing high-quality services through the use of digital technology.

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Values



Visi PLN tersebut secara mendasar dicapai melalui penerapan 4 *Strategic Goals*, sebagai berikut:

1. Aspirasi **Green** untuk memimpin transisi energi Indonesia melalui peningkatan energi terbarukan yang cepat dan efisien;
2. Aspirasi **Innovative** untuk mendorong pertumbuhan Perusahaan lewat bisnis model dan layanan yang inovatif;
3. Aspirasi **Customer Focused** untuk memuaskan konsumen lewat kualitas layanan kelas dunia; serta
4. Aspirasi **Lean** untuk bisa menyediakan listrik yang andal dengan harga yang terjangkau.

Keempat *Strategic Goals* tersebut perlu didukung oleh 4 (empat) *enabler* strategis, yaitu (1) organisasi dan SDM yang andal, (2) kemajuan teknologi, (3) kemampuan keuangan yang berkelanjutan serta (4) pembangunan nasional.

Fundamentally, the visions of PLN are achieved by the implementation of the 4 *Strategic Goals*, as follows:

1. **Green** aspiration to lead Indonesia's energy transition through rapid and efficient upgrading of renewable energy;
2. **Innovative** aspiration to drive the Company's growth through innovative business models and services;
3. **Customer-Focused** aspiration to satisfy consumers through world-class service quality; and
4. **Lean** aspiration to be able to provide reliable electricity at an affordable price.

The four *Strategic Goals* need to be supported by strategic enablers, namely (1) reliable organization and human resources, (2) technological advances, (3) sustainable financial capabilities, and (4) national development.



Struktur Organisasi

Organization Structure

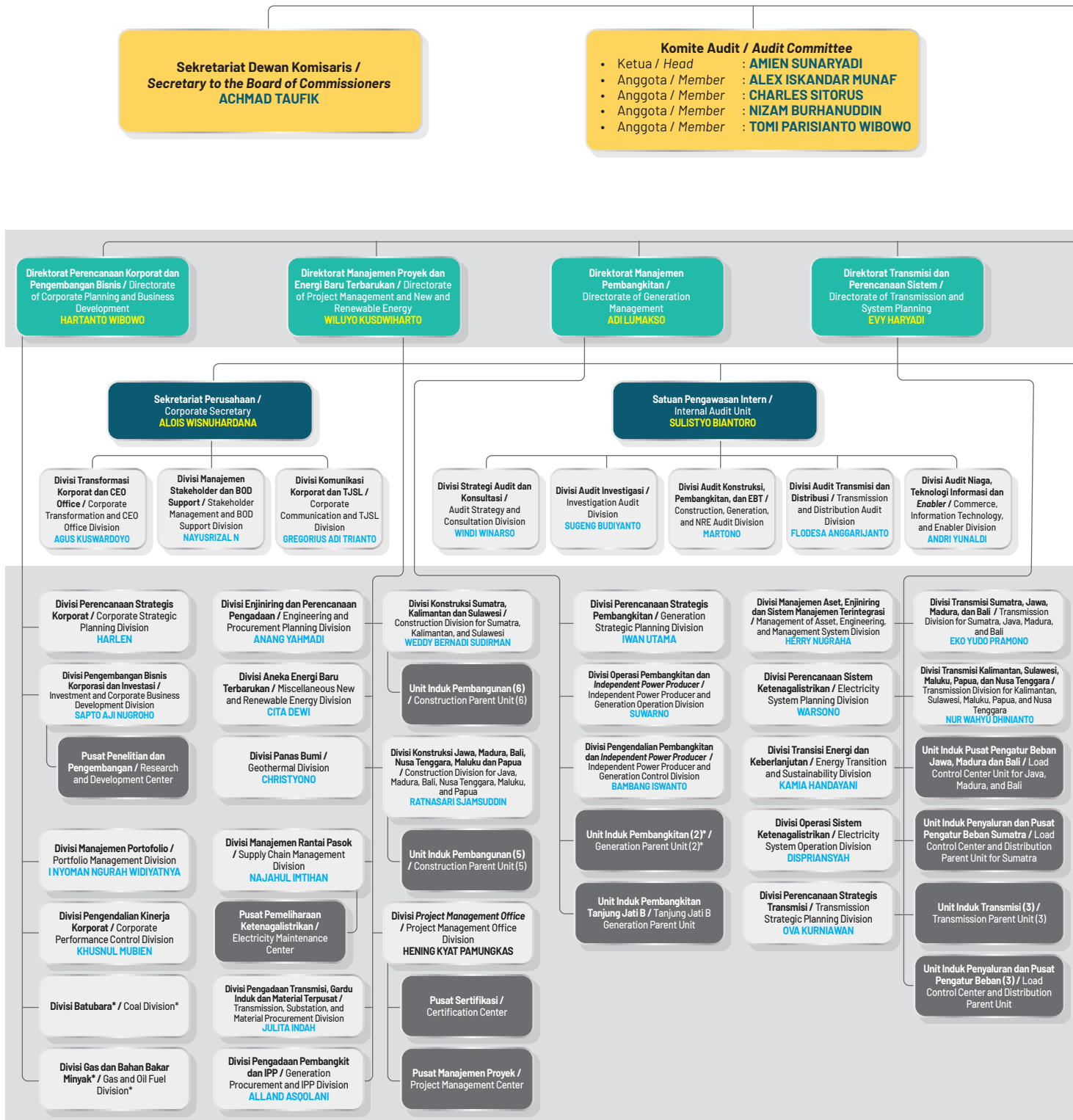
(31 Desember 2022 / December 31, 2022)

Berikut ini adalah struktur organisasi pada Organ Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2022.

The following is the organizational structure of the Board of Commissioners and Board of Directors organs as of 31 December 2022.

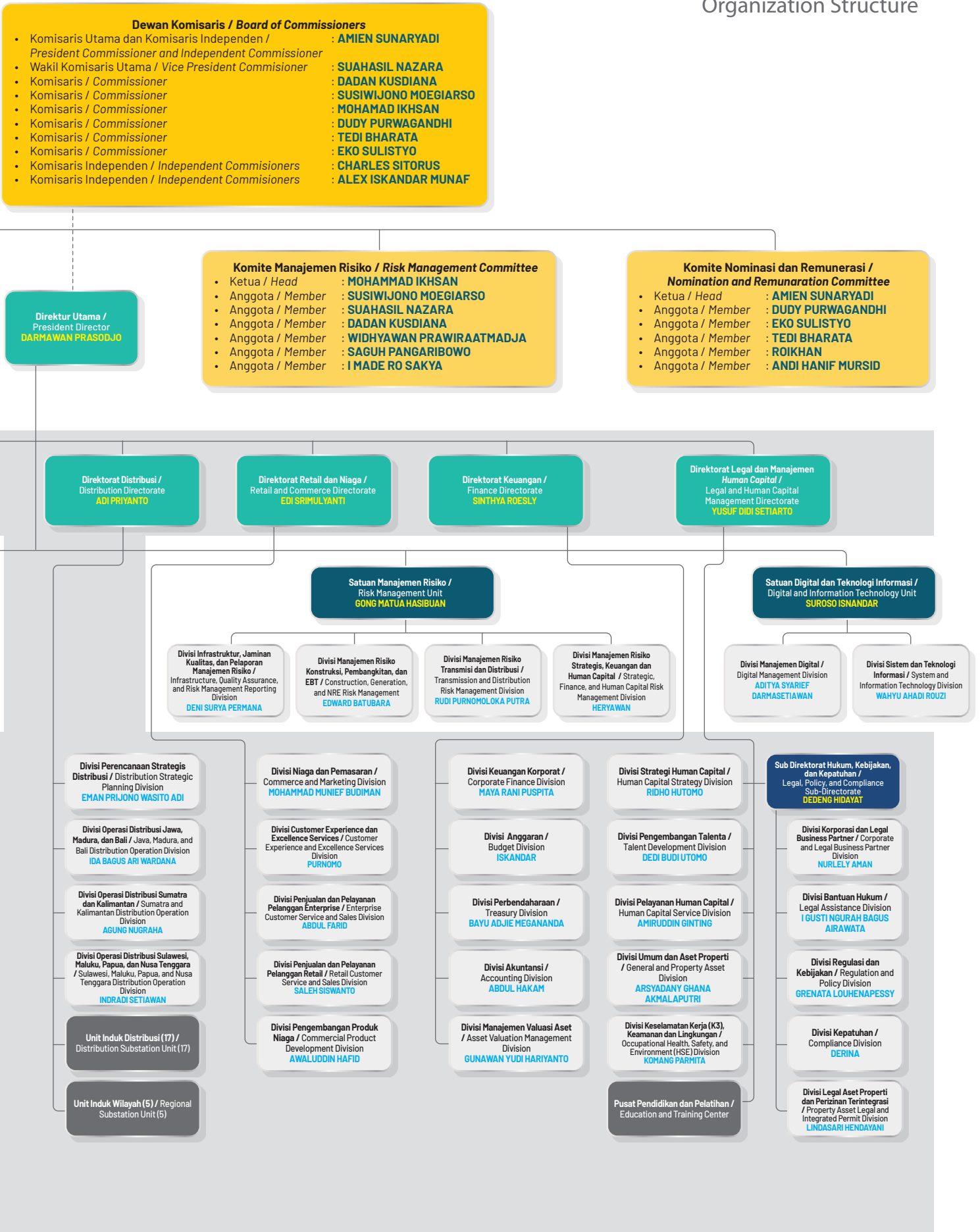
Adapun struktur organisasi Direksi adalah berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0054.P/DIR/2022.

The organizational structure of the Directors is based on Directors Regulation Number 0054.P/DIR/2022.



*) Efektif dibubarkan sejak 1 Januari 2023 sehubungan dengan keputusan RUPS mengenai pemberlakuan legal end state Holding dan Sub-Holding PLN / Effectively disbanded since January 1, 2023 in connection with the GMS resolution regarding the implementation of the legal end state of PLN Holding and Sub-Holding

Struktur Organisasi Organization Structure





Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



AMIEN SUNARYADI

Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First Period
	Usia / Age	62 tahun / 62 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Malang, 23 Januari 1960 / Malang, January 23, 1960
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 / He was appointed as President Commissioner cum Independent Commissioner based on Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Professional Accounting (MPA), The School of Accountancy, Georgia State University, Atlanta, USA (1992) • Diploma IV (Akuntan), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1986) / Diploma IV (Accountant), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1986) • Diploma III (Ajun Akuntan), STAN (1982) / Diploma III (Junior Accountant), STAN (1982) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas (2014-2018) / Head of Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities/SKK Migas (2014-2018) • Partner di Divisi <i>Fraud Investigation & Dispute Services</i> (FIDS) Ernst & Young Indonesia (2012-2014) / Partner in Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) Division at Ernst & Young Indonesia (2012-2014) • Senior Governance and Anti-Corruption Officer di World Bank Indonesia (2008-2012) / Senior Governance and Anti-Corruption Officer at World Bank Indonesia (2008-2012) • Expert Staff, The Indonesian Financial Intelligence Unit (PPATK) (2008, 6 bulan) / Expert Staff, The Indonesian Financial Intelligence Unit (PPATK) (2008, 6 months) • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK (2003-2007) / Deputy Chairman of Corruption Eradication Commission/KPK (2003-2007) • Executive Director of the Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) (2003, 6 bulan) • Senior Manager, Disputes Analysis and Investigations, PT PWC-Indonesia (2000-2003) • Program Director, Lembaga Pengkajian Good Governance (LPGG) (1999-2003) / Director Program, Lembaga Pengkajian Good Governance (LPGG) (1999-2003) • Berbagai posisi dan fungsi di BPKP (1982-2000) / Various positions and functions in BPKP (1982-2000) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> • Partner pada Firma Hukum Assegaf Hamzah and Partners/AHP (2019-sekarang) / Partner at Assegaf Hamzah and Partners Law Firm/AHP (2019-present) • Senior Advisor PT Integra Solusi Optima/ISO (2019-sekarang) / Senior Advisor of PT Integra Solusi Optima/ISO (2019-present) 	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First Period
	Usia / Age	52 tahun / 52 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Jakarta, 23 November 1970 / Jakarta, November 23, 1970
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 / Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Doctor of Philosophy (PhD), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2003) • Master of Science (MSc), Cornell University, USA (1997) • Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1994) / Bachelor of Economics, Universitas Indonesia (1994) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional/KEN (2013-2019) / Member of the Board of National Economic Committee/KEN (2013-2019) • Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2016) / Head of Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance (2016) • Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K (2010-2015) / Coordinator of Policy Working Group at the Secretariat of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction/TNP2K (2010-2015) • Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah/KPPOD (2009-2015) / Deputy Chairman of Committee for the Monitoring of Regional Autonomy Implementation/KPPOD (2009-2015) • Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB Universitas Indonesia (2009-2013) / Head of Department of Economics, Faculty of Economics and Business/FEB, Universitas Indonesia (2009-2013) • Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011) / Members of Assistance Team of the Minister of Finance for Fiscal Decentralization (2009-2011) • Kepala Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB, Universitas Indonesia (2005-2008) / Head of Demographic Institute, Faculty of Economics and Business/FEB, Universitas Indonesia (2005-2008) • Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005) / Head of Postgraduate Study Program in Economics (2004-2005) • Guru Besar di bidang Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2009) / Professor in the field of Economics, Universitas Indonesia (2009) • Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (1999) / Lecturer at the Faculty of Economics and Business (FEB) at the Universitas Indonesia (1999) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Wakil Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan RI (2019-sekarang) / Vice Minister of Finance, The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2019-present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	



SUAHASIL NAZARA
Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

**SUSIWIJONO MOEGIARSO****Komisaris**
Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First Period
	Usia / Age	53 tahun / 53 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Ponorogo, 17 Juli 1969 / Ponorogo, July 17, 1969
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 / Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta (2017) / Master of Economics, Universitas Trisakti, Jakarta (2017) • Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Indonesia (1997) / Bachelor of Management Economics, Universitas Indonesia (1997) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2018-sekarang) / Secretary of the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2018-present) • Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan (2015-2018) / Expert Staff to the Minister of Finance for Organization, Bureaucracy, and Information Technology, Ministry of Finance (2015-2018) • Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan (2012-2015) / Director of Customs and Excise Revenue and Regulations, Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance (2012-2015) • Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (2010-2012) / Director of Customs and Excise Information, Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance (2010-2012) • Kepala Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (2006-2010) / Head of Sub-directorate of Automation Systems and Procedures, Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance (2006-2010) • Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (2005-2006) / Head of Sub-Directorate of Risk Management, Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance (2005-2006) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2018-sekarang) / Secretary of the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2018-present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First Period
	Usia / Age	58 tahun / 58 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Sigli, 7 November 1964 / Sigli, November 7, 1964
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-334/MBU/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 / Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-334/MBU/12/2019 dated December 26, 2019	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, Amerika Serikat (1999) / Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA (1999) • MA in Economics, Vanderbilt University, Nashville, Tenn, Amerika Serikat (1991) / MA in Economics, Vanderbilt University, Nashville, Tenn, USA (1991) • Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1988) / Bachelor of Economics, Universitas Indonesia (1988) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Tim Asistensi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2017-2019) / Member of Assistance Team, Coordinating Minister for Economic Affairs (2017-2019) • Anggota Tim Ahli Wakil Presiden RI (2014-2019) / Member of Expert Team for Vice President of the Republic of Indonesia (2014-2019) • Komisaris PT PGN Tbk (2015-2019) / Commissioner at PT PGN Tbk (2015-2019) • Head of Advisory Panel, ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office/AMRO, Singapore (2018-2019) / Head of Advisory Panel, ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office/AMRO, Singapore (2018-2019) • Member of Policy Advisory AMRO, Singapore (2015-2019) / Member of Policy Advisory AMRO, Singapore (2015-2019) • Ketua Tim Asistensi Menko Perekonomian, Kemenko Perekonomian (2014-2017) / Coordinating Minister for the Economy Assistance Team Leader, Coordinating Ministry for the Economy (2014-2017) • Komisaris PT JICT (2011-2017) / Commissioner at PT JICT (2011-2017) • Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014) / Special Staff to the Vice President of the Republic of Indonesia (2009-2014) • Komisaris PT Danareksa (2008-2015) / Commissioner at PT Danareksa (2008-2015) • Komisaris Independen PT Bakrie Brothers (2006-2015) / Independent Commissioner of PT Bakrie Brothers (2006-2015) • Board of Trustee International Food Policy Research Institute, IFPRI (2009-2014) • Anggota Dewan Riset Nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi (2006-2009) / Member of the National Research Council, State Ministry of Research and Technology (2006-2009) • Staf Khusus Menko Perekonomian, Menko Perekonomian (2004-2009) / Special Staff to the Coordinating Minister for the Economy, Coordinating Minister for the Economy (2004-2009) • Anggota Dewan Maritim Republik Indonesia (1999-2007) / Member of the Maritime Council of the Republic of Indonesia (1999-2007) • Kepala LPEM FE UI (2001-2005) / Head of LPEM FE UI (2001-2005) • Wakil Ketua Pokja Ekonomi, Lemhanas (2000-2005) / Vice Chairman of Working Group for Economics, Lemhanas (2000-2005) • Anggota LP3E, Kadin Indonesia (1999-2005) / Member of LP3E, Indonesian Chamber of Commerce and Industry (1999-2005) • Komisaris Independen PT Indosat (2003-2004) / Independent Commissioner of PT Indosat (2003-2004) • Komisaris PT PLN (Persero) (2001-2003) / Commissioner of PT PLN (Persero) (2001-2003) • Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEUI (1999-2001) / Deputy Head of the FEUI Economic and Social Research Institute (1999-2001) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> • Member of Advisory Board, Mandiri Institute (Desember 2019-Sekarang) / Member of Advisory Board, Mandiri Institute (December 2019-Present) • Staf Khusus Menteri BUMN (2019-sekarang) / Special Staff of Minister of SOEs (2019-present) • Member of Policy Advisory, Asian Development Bank Institute, Tokyo, Japan (2015-sekarang) / Member of Policy Advisory, Asian Development Bank Institute, Japan (2015-present) • Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2010-sekarang) / Professor of Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (2010-present) • Anggota Masyarakat Ekonomi Statistik, BPS dan Bappenas (2007-sekarang) / Member of the Statistical Economic Community, Statistics Indonesia and Bappenas (2007-present) 	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	



MOHAMAD IKHSAN
Komisaris
Commissioner



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



DUDY PURWAGANDHI
Komisaris
Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First Period
	Usia / Age	52 tahun / 52 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Manado, 23 September 1970 / Manado, September 23, 1970
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 / Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-22/MBU/01/2020 dated January 16, 2020	
Pendidikan / Education	Sarjana Hukum, Universitas Trisakti (1995) / Bachelor of Law, Universitas Trisakti (1995)	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Seacons Trading Limited, Singapore (2011-2020) / Director of Seacons Trading Limited, Singapore (2011-2020) • Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (2019) / Deputy Treasurer of National Campaign Team (TKN), Koalisi Indonesia Maju (2019) • Staf Khusus Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2018-2019) / Special Staff of Minister of Administrative Reform and Bureaucracy Reform (2018-2019) • Komisaris PT Satui Terminal Utama (2015-2019) / Commissioner at PT Satui Terminal Utama (2015-2019) • Direktur PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011) / Director at PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011) • Direktur PT Jhonlin Marine Trans (2008-2009) / Director at PT Jhonlin Marine Trans (2008-2009) • Direktur PT Jhonlin Air Transport (2008-2009) / Director at PT Jhonlin Air Transport (2008-2009) • Internal Audit PT Dua Samudera Perkasa (2007-2008) / Internal Audit at PT Dua Samudera Perkasa (2007-2008) • GA Dept. Head PT Tri Usaha Bhakti / Truba (Operational) (2004-2007) / GA Dept. Head of PT Tri Usaha Bhakti / Truba (Operational) (2004-2007) • Staff of Assistant BOD PT Tri Usaha Bhakti Truba (Holding) (1997-2004) / Staff of Assistant to BOD at PT Tri Usaha Bhakti Truba (Holding) (1997-2004) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak ada / None	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	54 tahun / 54 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Kendal, 30 Maret 1968 / Kendal, March 30, 1968
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Surakarta, Jawa Tengah / Surakarta, Central Java
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 / Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-22/MBU/01/2020 dated January 16, 2020	
Pendidikan / Education	Sarjana Sejarah, Universitas Sebelas Maret Surakarta (1994) / Bachelor of History, Universitas Sebelas Maret Surakarta (1994)	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Danareksa (2016-2020) / Commissioner at PT Danareksa (2016-2020) • Deputi IV Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (2014-2019) / Deputy IV for Political Communication and Information Dissemination of Presidential Staff Office (2014-2019) • Konsultan Politik Gubernur DKI Jakarta (2012-2014) / Political Consultant to the Governor of DKI Jakarta (2012-2014) • Konsultan Politik Walikota Surakarta (2008-2012) / Political Consultant to the Mayor of Surakarta (2008-2012) • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta (2003-2008) / Chairman of the General Election Commission (KPU) of Surakarta City (2003-2008) • Direktur Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (2000-2003) / Director of the Consortium for Monitoring and Empowerment of Public Institutions (2000-2003) • Pendiri Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) (2000-2003) / Founder of Women's Solidarity for Humanity and Human Rights (SPEK-HAM) (2000-2003) • Direktur Penelitian di Lembaga Gita Pertiwi Ecological Studies Project (1994-2000) / Research Director at Gita Pertiwi Institute for Ecological Studies Project (1994-2000) • Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Solo dan menjadi Koordinator KIPP Jawa Tengah (1996-1999) / Coordinator of the Independent Election Monitoring Committee (KIPP) Solo and became KIPP Coordinator of Central Java (1996-1999) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak ada / None	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	



EKO SULISTYO
Komisaris
Commissioner



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



DADAN KUSDIANA
Komisaris
Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	54 tahun / 54 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Sumedang, 29 Desember 1968 / Sumedang, December 29, 1968
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-212/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022 / Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK-212/MBU/09/2022 dated September 21, 2022.	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Doctoral Energy Science, Kyoto University • Master Energy Science, Kyoto University • Sarjana Mekanisme Pertanian, Institut Pertanian Bogor / Bachelor's Degree in Agricultural Mechanisms, Institut Pertanian Bogor 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Director General of New Renewable Energy and Energy Conservation (2020-sekarang) / Director of General New Renewable Energy and Energy Conservation (2020-present) • Head of Research And Development Agency, MEMR (2019-2020) • Senior Advisor to Minister on the Economic of Natural Resources (2017-2019) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (Agustus 2022-Februari 2023) / Act. Director General of Electricity of the Ministry of ESDM (August 2022 - February 2023)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	39 tahun / 39 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Magelang, 31 Mei 1983 / Magelang, May 31, 1983
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Depok
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-85/MBU/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 / Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-85/MBU/03/2022 dated March 25, 2022	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Public Administration, Columbia University (2016) • Sarjana Sistem Informasi Manajemen, Universitas Pelita Harapan (2001-2005) / Bachelor Management Information System, Universitas Pelita Harapan (2001-2005) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Khusus V Menteri BUMN (Maret 2021-Juli 2021) / Special Staff V to the Minister of SOEs (March 2021-July 2021) • VP Office of the Board PT Indonesia Asahan Aluminium (2019-2021) / VP Office of the Board PT Indonesia Asahan Aluminium (2019-2021) • Kepala Seksi Industri Telematika Badan Koordinasi Penanaman Modal (2016-2019) / Head of the Telematics Industry Section at Investment Coordinating Board (2016-2019) • Kepala Seksi Infrastruktur Energi Badan Koordinasi Penanaman Modal (2012-2014) / Head of the Energy Infrastructure Section at Investment Coordinating Board (2012-2014) • Wakil Direktur Indonesia Investment Promotion Center – New York (2009-2012) / Vice Director at Indonesia Investment Promotion Center – New York (2009-2012) • Staf Project Management PT Siemens Indonesia (2005-2008) / Project Management Staff at PT Siemens Indonesia (2005-2008) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Agustus 2021-sekarang) / Deputy of Human Resources, Technology and Information at the Ministry of State-Owned Enterprises (August 2021-present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	



TEDI BHARATA
Komisaris
Commissioner



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



ALEX ISKANDAR MUNAF
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	61 tahun / 61 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Jakarta, 16 Maret 1961 / Jakarta, March 16, 1961
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Tangerang Selatan / South Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 / Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Ph.D Program Economics, The American University, Washington DC, USA (1989) • Master of Arts in Applied Economics degree, The American University, Washington DC, USA (1987) • Bachelor of Science in Business Administration degree, The American University, Washington DC, USA (1984) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Lecturer, Swiss German University • Lecturer, IPMI International Business School (Institute Pengembangan Manajemen Indonesia) • Lecturer, President University • Lecturer, BINUS University • Lecturer, Thames Business College Jakarta • Lecturer, Bidakara International Education Institute • Lecturer, Universitas Atmajaya • Executive Director ALATIEF Corporation (1993 – 1996) • Director PT BISMATEK – Business and Management Consultant (1993 – 1996) • Head of Laboratory for Economics, Management and Quantitative – Economics School for Finance and Banking of Indonesia (STEKPI) Jakarta (1991 – 1993) • Head of Finance and Banking Program, Economics School for Finance and Banking of Indonesia (STEKPI) Jakarta (1991-1993) • Teaching Assistant in Macroeconomics, The American University, Washington DC, USA (1988-1989) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak ada / None	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	56 tahun / 56 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Medan, 9 Mei 1966 / Medan, May 9, 1966
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-154/MBU/07/2022 tanggal 22 Juli 2022 / Decree of the Minister of SOE as GMS No. SK-154/MBU/07/2022 dated July 22, 2022	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Doctor of Research Management, Bina Nusantara • Magister Ilmu Administrasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) / Master of Administration, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) • Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor / Bachelor's Degree in Agricultural Industry Technology, Institut Pertanian Bogor 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Bisnis Jaringan & Layanan Keuangan, PT Pos Indonesia (Persero) (2020-2022) / Director of Network Business & Financial Services, PT Pos Indonesia (Persero) (2020-2022) • Direktur Komersial, PT Pos Indonesia (Persero) (2018-2020) / Director of Commerce, PT Pos Indonesia (Persero) (2018-2020) • Direktur Informasi dan Teknologi, PT Pos Indonesia (Persero) (2016-2018) / Director of Information and Technology, PT Pos Indonesia (Persero) (2016-2018) • Direktur Pengembangan Usaha, PT Perdagangan Indonesia (Persero) (2015-2016) / Director of Business Development, PT Perdagangan Indonesia (Persero) (2015-2016) • Plt. Direktur Utama, PD. Pembangunan Sarana Jaya (BUMD DKI Jakarta) (2015) / Act. President Director, PD. Pembangunan Sarana Jaya (BUMD DKI Jakarta) (2015) • Direktur Pengembangan, PD. Pembangunan Sarana Jaya (BUMD DKI Jakarta) (2013-2015) / Director of Development, PD. Pembangunan Sarana Jaya (BUMD DKI Jakarta) (2013-2015) • Direktur Sales, PT Smart Telecom (2008-2011) / Director of Sales, PT Smart Telecom (2008-2011) • Direktur Sales, PT Bakrie Telecom (2004-2008) / Director of Sales, PT Bakrie Telecom (2004-2008) • Head of Marketing, PT Satelindo Agustus (2002-2004) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak ada / None	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	



CHARLES SITORUS
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Komisaris yang berhenti menjabat di 2022 • Commissioners who have served in 2022



RIDA MULYANA*
Komisaris
Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First Period
	Usia / Age	59 tahun / 59 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Sumedang, 2 Mei 1963 / Sumedang, May 2, 1963
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Tangerang Selatan / South Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019. / Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-55/MBU/02/2019 dated February 28, 2019.	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Petroleum Engineering, University of London, UK (1992) • Sarjana Perminyakan, Institut Teknologi Bandung (1988) / Bachelor of Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung (1988) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM (2013-2019) / Director General of New & Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources (2013-2019) • Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ESDM (2010-2013) / Bureau Head of Planning and Cooperation of Ministry of Energy and Mineral Resources (2010-2013) • Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" (2009-2010) / Head of Research and Development Center for Oil and Gas Technology "Lemigas" (2009-2010) • Sekretaris Direktorat Jenderal Migas (2009) / Secretary of Directorate General of Oil and Gas (2009) • Kepala Bidang Program, Puslitbangtek Migas "Lemigas" (2008-2009) / Division Head of Program, Research and Development Center for Oil and Gas "Lemigas" (2008-2009) • Kepala Bagian Tata Usaha, Puslitbangtek Migas "Lemigas" (2002-2008) / Section Head of Administration, Research and Development Center for Oil and Gas "Lemigas" (2002-2008) • Perakayasa Muda-Puslitbangtek "Lemigas" (2001-2002) / Junior Engineer - Research and Development Center "Lemigas" (2001-2002) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM (2019-sekarang) / Director General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources (2019-present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham. / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders.	

*) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 28 Februari 2019-21 September 2022 /

*) Served as the Company's Commissioner from February 28, 2019 - September 21, 2022.

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Komisaris yang berhenti menjabat di 2022 • Commissioners who have served in 2022

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	63 tahun / 63 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Singkawang, 16 Juni 1959 / Singkawang, June, 16 1959
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-90/MBU/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-90/MBU/03/2021 dated March 17, 2021	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Manajemen Strategik, Program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (2013) / Doctor of Strategic Management, Postgraduate Program of Management, Universitas Indonesia (2013) Master Bisnis, MBA Program, Saint Mary's University (1992) / Master of Business, MBA Program, Saint Mary's University (1992) D4 Akuntansi, STAN (1987) / Bachelor of Applied Sciences in Accounting, STAN (1987) D3 Akuntansi, STAN (1980) / Associate Degree in Accounting, STAN (1980) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris PT Bank Mandiri (2016-2021) / Commissioner at PT Bank Mandiri (2016-2021) Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019-2020) / Special Staff of the Minister of Tourism and Creative Economy (2019-2020) Komisaris Utama PT Jasa Raharja (Persero) (2013-2016) / President Commissioner of PT Jasa Raharja (Persero) (2013-2016) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2015) / Head of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) (2015) Deputi Kepala BPKP Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian (2013) / Deputy Head of BPKP for Supervision of Government Agencies in the Economic Sector (2013) Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2011-2013) / Commissioner at PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2011-2013) Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (2006) / Deputy Head of BPKP for State Accountants (2006) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Staf Khusus I Menteri BUMN (Januari 2021-sekarang) / Special Staff I to the Minister of SOEs (Jan 2021-present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	



ARDAN ADIPERDANA*
Komisaris
Commissioner

*) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 17 Maret 2021-25 Maret 2022 /

*) Served as the Company's Commissioner from March 17, 2021 - March 25, 2022



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Komisaris yang berhenti menjabat di 2022 • Commissioners who have served in 2022



HERU WINARKO*

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	60 tahun / 60 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Jakarta, 1 Desember 1962 / Jakarta, December 1, 1962
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 / Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	
Pendidikan / Education	Sarjana Hukum Universitas Airlangga (1996) / Bachelor of Law, Universitas Airlangga (1996)	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Pati Bareskrim Polri (Kepala BNN)(2018) / High-Ranking Officer of Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (Head of BNN) (2018) • Pati Bareskrim Polri (Deputi Penindakan KPK)(2015) / High-Ranking Officer of Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (Deputy for Enforcement of KPK)(2015) • Pati SSDM Polri (2015) / High-Ranking Officer of Human Resources Staffs of the Indonesian National Police (2015) • KAPOLDA Lampung (2012) / Lampung Regional Police Chief (2012) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak ada / None	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

*) Menjabat sebagai komisaris Perseroan pada 16 Juli 2021-16 Juni 2022 /

*) Served as the Company's Commissioner from July 16, 2021 – June 16, 2022

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Changes in Board of Commissioners Composition

Pada tahun 2022, Perseroan melakukan 3 (tiga) kali perubahan komposisi Dewan Komisaris. Informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

In 2022, the Company made 3 (three) changes to the composition of the Board of Commissioners. Further information regarding the matter is as follows:

	1 Januari-25 Maret 2022 / January 1 - March 25, 2022	25 Maret-22 Juli 2022 / March 25 - July 22, 2022	22 Juli-21 September 2022 / July 22 - September 21, 2022	21 September-31 Desember 2022 / September 21 - December 31, 2022
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 / Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-85/MBU/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 / Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-85/MBU/03/2022 dated March 25, 2022	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-154/MBU/07/2022 tanggal 22 Juli 2022 / Decree of the Minister of SOE as the GMS No. SK-154/MBU/07/2022 dated July 22, 2022	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-212/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022 / Decree of the Minister of SOE as the GMS No. SK-212/MBU/09/2022 dated September 21, 2022
Komisaris Utama dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	Amien Sunaryadi	Amien Sunaryadi	Amien Sunaryadi	Amien Sunaryadi
Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner	Suahasil Nazara	Suahasil Nazara	Suahasil Nazara	Suahasil Nazara
Komisaris / Commissioner	Rida Mulyana	Rida Mulyana	Rida Mulyana	Dadan Kusdiana
Komisaris / Commissioner	Susiwijono Moegiarso	Susiwijono Moegiarso	Susiwijono Moegiarso	Susiwijono Moegiarso
Komisaris / Commissioner	Mohamad Ikhsan	Mohamad Ikhsan	Mohamad Ikhsan	Mohamad Ikhsan
Komisaris / Commissioner	Dudy Purwagandhi	Dudy Purwagandhi	Dudy Purwagandhi	Dudy Purwagandhi
Komisaris / Commissioner	Ardan Adiperdana	Tedi Bharata	Tedi Bharata	Tedi Bharata
Komisaris / Commissioner	Eko Sulistyio	Eko Sulistyio	Eko Sulistyio	Eko Sulistyio
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Heru Winarko	Heru Winarko	Charles Sitorus	Charles Sitorus
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Alex Iskandar Munaf	Alex Iskandar Munaf	Alex Iskandar Munaf	Alex Iskandar Munaf



Profil Direksi

Board of Directors Profile



DARMAWAN PRASODJO
Direktur Utama
President Director

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	52 tahun / 52 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Magelang, 19 Oktober 1970 / Magelang, October 19, 1970
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	<ul style="list-style-type: none"> • Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-389/MBU/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 / Appointed as President Director based on Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-389/MBU/12/2021 dated December 6, 2021 • Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama pada 23 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 / He was appointed as Vice President Director on December 23, 2019 based on Decree of Minister of SOEs as the Company's GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019. 	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Nicholas Institute, Duke University – USA (Sep 2009 – Des 2012) Post-Doctoral, Natural Resources dan Energy Policy / Nicholas Institute, Duke University – USA (Sep 2009 – Dec 2012) Post-Doctoral, Natural Resources and Energy Policy • Texas A&M University – USA (Jan 2004 – May 2011) PhD, Applied Economics, Natural Resources Economics • Texas A&M University – USA (Jan 1998 – Dec 1999) MCS, <i>Computer Science with Software Engineering</i> 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) (2019 – 2021) / Vice President Director at PT PLN (Persero) (2019 – 2021) • Komisaris PT PLN (Persero) (2018–2019) / Commissioner at PT PLN (Persero) (2018–2019) • Pendiri, Pemimpin Redaksi, dan Ekonom Energi di Petronomist.com (2011–sekarang) / Founder, Editor in Chief, and Energy Economist at Petronomist.com (2011–present) • Co-chair Post 2015 Millenium Development Goals (MDGs), Bali (2013) / Co-chair Post 2015 Millennium Development Goals (MDGs), Bali (2013) • Direktur di Indonesia Center for Green Economy dan Kepala Jurusan di Prodi Green Economy, Surya University (2012–2013) / Director at Indonesia Center for Green Economy and Department Head of Green Economy Study Program, Surya University (2012–2013) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

Profil Direksi

Board of Directors Profile

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	53 tahun / 53 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Pekanbaru, 6 Oktober 1969 / Pekanbaru, October 6, 1969
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 / Appointed as Director for the first time based on the Decree of Minister of SOEs as the Company's GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019.	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manajemen, IPMI International Business School (2003) / Master of Management, IPMI International Business School (2003) Master of Business Administration, Monash University, Australia (2003) Master of Engineering Science, School of Electrical Engineering, University of New South Wales, Australia (1996) Sarjana Teknik Elektro, Universitas Indonesia (1993) / Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Indonesia (1993) Diploma Sastra Inggris, Universitas Indonesia (1993) / Diploma in English Literature, Universitas Indonesia (1993) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Eksekutif/CEO merangkap Ketua Dewan Direktur, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI atau Indonesia Eximbank (2017-2019) / Executive Director/CEO cum Chairperson of Board of Directors, Indonesian Export Financing Institution/LPEI or Indonesia Eximbank (2017-2019) Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII (2009-2017) / President Director at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)(2009-2017) Deputi Direktur Perencanaan Strategis Korporat PT PLN (Persero) (2006-2009) / Deputy Director of Strategic Corporate Planning at PT PLN (Persero) (2006-2009) Manajer Analisa & Evaluasi Sistem PT PLN (Persero)(2003-2006) / System Analysis & Evaluation Manager at PT PLN (Persero)(2003-2006) Divisi Keuangan & Niaga PT PLN (Persero) (1996-2003) / Finance & Commerce Division at PT PLN (Persero)(1996-2003) Power System Operations Engineer PT PLN (Persero) (1994-1996) / Power System Operation Engineer at PT PLN (Persero)(1994-1996) Commissioning Engineer Thermal Power Generation Project PT PLN (Persero) (1993-1994) / Commissioning Engineer of Thermal Power Generation Project at PT PLN (Persero)(1993-1994) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris PT Industri Baterai Indonesia (Oktober 2022 - Sekarang) / Commissioner at Indonesia Battery Corporation (October 2022 - Present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / She does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	



SINTHYA ROESLY
Direktur Keuangan
Director of Finance



Profil Direksi

Board of Directors Profile



YUSUF DIDI SETIARTO
Direktur Legal dan Manajemen
Human Capital
Director of Legal and Human Capital
Management

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	48 tahun / 48 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Padang, 17 Januari 1974 / Padang, January 17, 1974
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-392/MBU/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 / Appointed as Director for the first time based on the Decree of the Minister of SOE as the GMS of the Company No. SK-392/MBU/12/2021 dated December 7, 2021	
Pendidikan / Education	Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (1999) / Bachelor of Law, Universitas Indonesia (1999)	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Ahli Utama Kedeputan Bidang Energi (Eselon 1B) pada Kantor Staf Presiden (KSP) (2015 - 2021) / Principal Expert Staff of the Deputy for Energy (Echelon 1B) at the Presidential Staff Office (KSP) (2015-2021) • CEO Advisor pada PT Pertamina (Persero) (2019 - 2020) / CEO Advisor at PT Pertamina (Persero) (2019-2020) • Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) Dewan Komisaris pada PT Pertamina (Persero) (2017 - 2020) / Member of Risk Management Monitoring Committee (KPMR) of the Board of Commissioners at PT Pertamina (Persero) (2017-2020) • <i>Special Advisor</i> Menteri ESDM (2016) / <i>Special Advisor</i> of the Minister of ESDM (2016) • <i>Special Advisor</i> Wakil Menteri ESDM (2016 - 2019) / <i>Special Advisor</i> of the Deputy of the Ministry of ESDM (2017-2019) • Tenaga Ahli Kepala Biro Hukum KESDM (2017 - 2019) / Expert Staff of Head of Legal Bureau of KESDM (2017 - 2019) • SVP Legal/Kepala Divisi Hukum dan Formalitas BP Migas/SKK Migas (2013 - 2015) / SVP Legal/Head of Legal and Formalities Division of BP Migas/SKK Migas (2013 - 2015) • VP of Commercial Contract BP Migas/SKK Migas (2011 - 2013) / VP of Commercial Contract at BP Migas/SKK Migas (2011-2013) • <i>Senior Lawyer</i> BP Migas/SKK Migas (2009 - 2011) / <i>Senior Lawyer</i> at BP Migas/SKK Migas (2009-2011) • <i>Junior Lawyer</i> BP Migas/SKK Migas (2003 - 2009) / <i>Junior Lawyer</i> at BP Migas/SKK Migas (2003-2009) • <i>Associate Lawyer</i> di Wiriadinata & Widyawan Law Offices (W&W) (2000 - 2003) / <i>Associate Lawyer</i> at Wiriadinata & Widyawan Law Offices (W&W) (2000-2003) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (September 2022 - Sekarang) / President Commissioner of PT PLN Energi Primer Indonesia (September 2022 - Present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

Profil Direksi

Board of Directors Profile

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	47 tahun / 47 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Boyolali, 9 Februari 1976 / Boyolali, February 9, 1976
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-2/MBU/01/2022 tanggal 6 Januari 2022 / Appointed as Director for the first time based on the Decree of the Minister of SOE as the GMS of the Company No. SK-2/MBU/01/2022 dated January 6, 2022	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> S1 Teknik Industri Institut Teknologi Bandung / Bachelor of Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung S2 Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta / Master of Management majoring in Financial Management, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> EVP Anggaran PT PLN (Persero) (2021) / EVP of Budgeting at PT PLN (Persero)(2021) EVP Risk Management PT PLN (Persero)(2020) / EVP of Risk Management at PT PLN (Persero) Direktur Keuangan merangkap Direktur Pengembangan PT PLN Batu Bara (2018 - 2020) / Director of Finance cum Director of Development at PT PLN Batu Bara (2018-2020) VP Portfolio Management (2016-2017) / VP of Portfolio Management (2016-2017) Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Korporat PT Pembangkitan Jawa-Bali (2016) / Head of Corporate Planning and Development at PT Pembangkitan Jawa-Bali (2016) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris Utama PT Indonesia Comnets Plus (September 2022 - Sekarang) / President Commissioner of PT Indonesia Comnets Plus (September 2022 - Present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	



HARTANTO WIBOWO
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis
Director of Corporate Planning and Business Development



Profil Direksi

Board of Directors Profile



WILUYO KUSDWIARTO

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan
Director of Project Management and New Renewable Energy

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode kedua / Second Periode
	Usia / Age	51 tahun / 51 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Surabaya, 25 Juli 1971 / Surabaya, July 25, 1971
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	<ul style="list-style-type: none"> • Diangkat sebagai Direktur untuk periode pertama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 / Appointed as Director for the first period based on the Decree of the Minister of SOE as the GMS of the Company No. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017 • Diangkat sebagai Direktur untuk periode kedua berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-162/MBU/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 / Appointed as Director for the second period based on the Decree of the Minister of SOE as the GMS of the Company No. SK-162/MBU/07/2022 dated July 25, 2022 	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Manajemen, Universiti Tenaga Nasional, Malaysia (2005) / Master of Management, Universiti Tenaga Nasional, Malaysia (2005) • Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1994) / Bachelor of Mechanical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1994) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Mega Proyek dan EBT (2021-2022) / Director of Mega Project and NRE (2021-2022) • Direktur Bisnis Regional Sumatra Kalimantan (2020-2021) / Regional Business Director for Sumatra and Kalimantan (2020-2021) • Direktur Bisnis Regional Sumatra (2017-2020) / Regional Business Director for Sumatra (2017-2020) • Kepala Divisi Konstruksi Regional Sumatra PT PLN (Persero) (2015-2017) / Head of Regional Construction Division for Sumatra at PT PLN (Persero) (2015-2017) • General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII (2013-2015) / General Manager at PT PLN (Persero) for Development VIII Main Unit (2013-2015) • Mulai berkarir di PT PLN (Persero) sejak 1995 / Started his career at PT PLN (1995) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris Utama PT PLN Indonesia Power (September 2022 - Sekarang) / President Commissioner of PT PLN Indonesia Power (September 2022 - Present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

Profil Direksi

Board of Directors Profile

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	53 tahun / 53 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Pati, 22 Juli 1969 / Pati, July 22, 1969
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-389/MBU/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 / Appointed as Director for the first time based on the Decree of the Minister of SOE as the GMS of the Company No. SK-389/MBU/12/2021 dated December 6, 2021	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • S2 Magister Manajemen Bisnis, Universitas Tenaga Nasional, Malaysia / Master of Business Management, Universitas Tenaga Nasional, Malaysia • S2 Magister Manajemen Bisnis, Universitas Sriwijaya / Master of Business Management, Universitas Sriwijaya • S1 Listrik, Universitas Sriwijaya / Bachelor of Electricity, Universitas Sriwijaya • S1 Sipil (Bangunan), Universitas Diponegoro / Bachelor of Civil Engineering (Building), Universitas Diponegoro 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Expert Pengadaan pada Direktorat Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Kantor Pusat / Procurement Expert at the Mega Project and NRE Directorate of PT PLN (Persero) Head Office • Expert Pengadaan pada Direktorat Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan PT PLN (Persero) / Procurement Expert at the Sumatra and Kalimantan Regional Business Directorate of PT PLN (Persero) • Executive Vice President Konstruksi Regional Sumatra pada Direktorat Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan PT PLN (Persero) / Executive Vice President of Sumatra Regional Construction at the Directorate of Sumatra and Kalimantan Regional Business PT PLN (Persero) • Kepala Divisi Konstruksi Regional Sumatra pada Direktorat Bisnis Regional Sumatra PT PLN (Persero) Kantor Pusat / Head of the Sumatra Regional Construction Division at the Directorate of Sumatra Regional Business PT PLN (Persero) Head Office • Kepala Divisi Administrasi Konstruksi pada Direktorat Pengadaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat / Head of the Construction Administration Division at the Procurement Directorate of PT PLN (Persero) Head Office • General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V PT PLN (Persero) / General Manager of PT PLN (Persero) Main Unit Development V PT PLN (Persero) • General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan X PT PLN (Persero) / General Manager of PT PLN (Persero) Development Unit X PT PLN (Persero) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	



ADI LUMAKSO

**Direktor Manajemen Pembangkitan
Director of Generation Management**



Profil Direksi

Board of Directors Profile

**EVY HARYADI**

**Direktur Transmisi dan
Perencanaan Sistem**
Director of Transmission and
System Planning

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	53 tahun / 53 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Jakarta, 19 Desember 1969 / Jakarta, December 19, 1969
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-200/MBU/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 / Appointed as Director for the first time based on the Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK- SK-200/MBU/06/2021 dated June 16, 2021	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Power Engineering, Waseda University Tokyo (1999) • Sarjana Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1993) / Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1993) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Satuan Pusat Keunggulan PT PLN (Persero)(2021) / Head of Center of Excellence at PT PLN (Persero)(2021) • General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (2019-2021) / General Manager of Java Bali Load Control Center at PT PLN (Persero)(2019-2021) • General Manager PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (2017-2019) / General Manager of Center for Research and Development of Electricity at PT PLN (Persero)(2017-2019) • Staf Ahli Direksi PT PLN (Persero)(2016-2017) / Expert Staff to the Board of Directors of PT PLN (Persero)(2016-2017) • Kepala Divisi Operasi PLN Bisnis Regional Sumatra (2016) / Head of Operations Division of PLN Sumatra Regional Business (2016) • General Manager PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali (2013-2016) / General Manager at PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali (2013-2016) • Manajer Operasi Sistem PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali (2010-2013) / System Operations Manager at PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali (2010-2013) • Manajer Operasi Sistem PT PLN (Persero) P3B Sumatra (2009-2010) / System Operations Manager at PT PLN (Persero) P3B Sumatra (2009-2010) • Manajer Bidang Perencanaan Operasi PT PLN (Persero) Unit Bidding dan Operasi Sistem (2006-2009) / Operational Planning Manager at PT PLN (Persero) Bidding Unit and System Operation (2006-2009) • Manajer PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali (2003-2006) / Manager of PT PLN (Persero) Bali Distribution Management Area (2003-2006) • Kepala Cabang Solok PLN Wilayah Sumatra Barat (2001-2003) / Head of PLN Solok Branch for West Sumatra Region (2001-2003) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris Utama PT Indonesia Comnets Plus (September 2021 - Sekarang) / President Commissioner of PT Indonesia Comnets Plus (September 2021 - present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

Profil Direksi

Board of Directors Profile

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	56 Tahun / 56 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Tulungagung, 6 Februari 1966 / Tulungagung, February 6, 1966
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-392/MBU/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 / Appointed as Director for the first time based on the Decree of the Minister of SOE as the GMS of the Company No. SK-392/MBU/12/2021 dated December 7, 2021	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • S2 Listrik - Institut Teknologi Bandung (1998) / Master of Electricity - Institut Teknologi Bandung (1998) • S2 Bidang Manajemen - IPWI Jakarta (1998) / Master of Management - IPWI Jakarta (1998) • S2 Manajemen Bisnis - Jakarta Institute Of Management Studies (1997) / Master of Business Management - Jakarta Institute of Management Studies (1997) • S1 Listrik Institut Teknologi Sepuluh November (1991) / Bachelor of Electricity - Institut Teknologi Sepuluh November (1991) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur (2021) / General Manager of PT PLN (Persero) East Java Distribution Parent Unit (2021) • General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali (2020 -2021) / General Manager of PT PLN (Persero) Bali Distribution Parent Unit (2020 -2021) • Kepala Divisi Perencanaan Sistem PT PLN (Persero)(2017-2020) / Head of System Planning Division at PT PLN (Persero)(2017-2020) • Mulai berkarier di PT PLN (Persero) sejak 1993 / Started his career at PT PLN (Persero)(1993) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	



ADI PRIYANTO
Direktur Distribusi
Director of Distribution



Profil Direksi

Board of Directors Profile



EDI SRIMULYANTI
Direktur Retail dan Niaga
 Director of Retail and Commerce

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	57 tahun / 57 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Kediri, 3 Oktober 1966 / Kediri, October 3, 1966
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-213/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022 / Appointed as Director for the first time based on the Decree of the Minister of SOE as the GMS No. SK-213/MBU/09/2022 dated September 21, 2022	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Listrik, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1989) / Bachelor's Degree in Electricity, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1989) • S2 Bidang Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia (2005-2007) / Master's Degree in Financial Management, Universitas Indonesia (2005-2007) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Vice President Metering DIV QAS (2018 - 2019) • Vice President Change Management DIV CMO (2019 - 2020) • Executive Vice President Change Management Office (2020 - 2022) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris PT PLN Tarakan (April 2021 - November 2022) / Commissioner of PT PLN Tarakan (April 2021 - November 2022)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

Profil Direksi

Board of Directors Profile

Direktur yang berhenti menjabat di 2022 • Directors who have served in 2022

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	58 tahun / 58 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Bogor, 6 Juli 1964 / Bogor, July 6, 1964
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 / Appointed as Director for the first time based on the Decree of the Minister of SOE as the GMS of the Company No. SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Engineering Management, Universiti Tenaga Nasional, Malaysia (2006) / Master of Engineering Management, Universiti Tenaga Nasional, Malaysia (2006) • Master Manajemen Bisnis Administrasi & Teknologi, Institut Teknologi Bandung (2002) / Master of Business Administration & Technology Management, Institut Teknologi Bandung (2002) • Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (1991) / Bachelor of Mechanical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1991) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama PT PLN Batubara (2018-2020) / President Director at PT PLN Batubara (2018-2020) • Kepala Divisi Operasi Regional Kalimantan pada Direktorat Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero) (2017-2018) / Head of the Kalimantan Regional Operations Division at the Kalimantan Regional Business Directorate of PT PLN (Persero) (2017-2018) • General Manager PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi (2016-2017) / General Manager at PT PLN (Persero) Certification Center (2016-2017) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	



RUDY HENDRA PRASTOWO*
Direktur Energi Primer
Director of Primary Energy

*) Berhenti menjabat sebagai Direktur Perseroan pada 6 Januari 2022 /

*) Ended serving as Director of the Company on January 6, 2022



Profil Direksi

Board of Directors Profile

Direktur yang berhenti menjabat di 2022 • Directors who have served in 2022



BOB SARIL*

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan
Director of Commerce and Customer Management

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	54 tahun / 54 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Palembang, 27 Oktober 1968 / Palembang, October 27, 1968
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 / Appointed as Director for the first time based on the Decree of the Minister of SOE as the GMS of the Company No. SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Electrical Engineering, University of New South Wales, Australia (2002) • Sarjana Teknik Elektro, Universitas Sriwijaya, Palembang (1993) / Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Sriwijaya, Palembang (1993) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • General Manager PT PLN (Persero) UID Jawa Timur (2019-2020) / General Manager at PT PLN (Persero) UID East Java (2019-2020) • General Manager PT PLN (Persero) UIW Sulawesi Selatan, Tenggara & Barat (2017-2019) / General Manager at PT PLN (Persero) UIW South, Southeast & West Sulawesi (2017-2019) • General Manager PT PLN (Persero) UIW Aceh (2015-2017) / General Manager at PT PLN (Persero) UIW Aceh (2015-2017) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

*) Berhenti menjabat sebagai Direktur Perseroan pada 21 September 2022 /

*) Ended serving as Director of the Company on September 1, 2022

Profil Direksi

Board of Directors Profile

Direktur yang berhenti menjabat di 2022 • Directors who have served in 2022

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode kedua / Second period
	Usia / Age	63 tahun / 63 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Boyolali, 6 April 1959 / Boyolali, April 6, 1959
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	<ul style="list-style-type: none"> • Diangkat sebagai Direktur untuk periode pertama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. S-211/MBU/10/2015 tanggal 8 September 2015 / Appointed as Director for the first period based on the Decree of the Minister of SOE as the GMS of the Company No. S-211/MBU/10/2015 dated September 8, 2015 • Diangkat sebagai Direktur untuk periode kedua berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-357/MBU/ 11/2020 tanggal 4 November 2020 / Appointed as Director for the second period based on the Decree of the Minister of SOE as the GMS of the Company No. SK-357/MBU/11/2020 dated November 4, 2020 	
Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Manajemen, STIE IPWIJA (2003) / Master of Management, STIE IPWIJA (2003) • Sarjana Elektro, Institut Teknologi Bandung (1983) / Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1983) 	
Pengalaman Kerja / Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali PT PLN (Persero) (2019-2020) / Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali at PT PLN (Persero) (2019-2020) • Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) (2017-2019) / Director of Regional Business for Western Part of Java at PT PLN (Persero) (2017-2019) • Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PT PLN (Persero) (2015-2017) / Director of Regional Business for Maluku and Papua at PT PLN (Persero) (2015-2017) • General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2014-2015) / General Manager of PT PLN (Persero) Distribution for Jakarta Raya and Tangerang (2014-2015) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	



HARYANTO WS*
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali
Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali

*) Berhenti menjabat sebagai Direktur Perseroan pada 21 September 2022 /

*) Ended serving as Director of the Company on September 21, 2022



Perubahan Komposisi Direksi

Changes in the Board of Directors Composition

Pada tahun 2022, komposisi Direksi Perseroan mengalami 2 (dua) perubahan. Informasi mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

In 2022, the Board of Directors Composition underwent 2 (two) changes. The information regarding the matter is as follows:

	1 Januari-6 Januari 2022 / January 1 - January 6, 2022	6 Januari-21 September 2022 / January 6 - September 21, 2022	21 September-31 Desember 2022 / September 21 - December 31, 2022
Direktur Utama / President Director	Darmawan Prasodjo	Darmawan Prasodjo	Darmawan Prasodjo
Direktur Keuangan / Director of Finance	-	-	Sinthya Roesly
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management	Sinthya Roesly	Sinthya Roesly	-
Direktur Perencanaan Korporat / Director of Corporate Planning	Evy Haryadi	Evy Haryadi	-
Direktur Transmisi dan Perencanaan System / Director of Transmission and System Planning	-	-	Evy Haryadi
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Management	Yusuf Didi Setiarto	Yusuf Didi Setiarto	-
Direktur Legal dan Manajemen Human Capital / Director of Legal and Human Capital Management	-	-	Yusuf Didi Setiarto
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Director of Commerce and Customer Managements	Bob Saril	Bob Saril	-
Direktur Retail dan Niaga / Director of Retail and Commerce	-	-	Edi Srimulyanti
Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy	Rudy Hendra Prastowo	Hartanto Wibowo	-
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis / Director of Corporate Planning and Business Development	-	-	Hartanto Wibowo
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali	Haryanto W.S	Haryanto W.S	-
Direktur Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan / Director of Regional Business for Sumatra Kalimantan	Adi Lumakso	Adi Lumakso	-
Direktur Manajemen Pembangkitan / Director of Generation Management	-	-	Adi Lumakso
Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	Adi Priyanto	Adi Priyanto	-
Direktur Distribusi / Director of Distribution	-	-	Adi Priyanto
Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Mega Projects and New Renewable Energy	Wiluyo Kusdiharto	Wiluyo Kusdiharto	-
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Project and New Renewable Energy Management	-	-	Wiluyo Kusdiharto

Perubahan Anggota Manajemen Setelah Tahun Buku 2022

Changes in the Management Composition After the 2022 Fiscal Year

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS SETELAH BERAKHIRNYA TAHUN BUKU 2022

Sejak berakhirnya tahun buku 2022 sampai dipublikasikannya laporan ini, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI SETELAH BERAKHIRNYA TAHUN BUKU 2022

Sejak berakhirnya tahun buku 2022 sampai dipublikasikannya laporan ini, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS AFTER THE 2022 FISCAL YEAR

Since the end of the 2022 fiscal year until the publication of this report, there has been no change in the composition of the Board of Commissioners.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION AFTER THE 2022 FISCAL YEAR

Since the end of the 2022 fiscal year until the publication of this report, there has been no change in the composition of the Board of Directors.

Profil SDM Perusahaan

Profile of Corporate Human Capital



Sampai dengan 31 Desember 2022, jumlah pegawai PLN Grup secara kumulatif mencapai 51.477 orang atau menurun dibanding pada akhir tahun sebelumnya yang sejumlah 52.116 orang. Keseluruhan jumlah karyawan di akhir tahun 2022 terdiri dari 42.151 pegawai *holding* dan 9.326 pegawai anak perusahaan.

As of December 31 2022, the cumulative number of PLN Group's employees has reached 51,477 employees or a decrease compared to the end of the previous year at 52,116 people. The total number of employees at the end of 2022 consists of 42,151 holding employees and 9,326 subsidiary employees.

Komposisi Karyawan *Holding* (PLN) dan Anak Perusahaan PLN Tahun 2020-2022

Composition of Employees of Holding (PLN) And PLN Subsidiaries in 2020-2022

Uraian / Description	2020	2021	2022
Jumlah Pegawai Holding (PLN) / Total Employees of Holding (PLN)	43.994	42.755	42.151
Anak Perusahaan / Subsidiary			
• PT Indonesia Power	4.222	4.228	4.195
• PT PLN Nusantara Power (dahulu bernama PT Pembangkitan Jawa Bali) / PT PLN Nusantara Power (formerly known as PT Pembangkitan Jawa Bali)	3.091	3.008	2.970
• PT Indonesia Comnet Plus	768	793	782
• PT PLN Energi Primer Indonesia (dahulu bernama PT PLN Batubara) / PT Energi Primer Indonesia (formerly known as PT PLN Batubara)	108	113	117
• PT PLN Gas dan Geothermal	52	57	56
• PT PLN Enjiniring	326	261	269
• PT PLN Tarakan	82	98	112
• PT PLN Batam	511	504	500
• PT BAG	47	66	74
• PT Haleyora Power	141	149	169
• PT Energy Management Indonesia	-	48	40
• PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara	-	33	37
• Tugas Karya ke AP Lain (YPK PLN, PT IBI dan PT Unelec Indonesia) / Work Assignments to Other Subsidiaries (YPK PLN, PT IBI, and PT Unelec Indonesia)	1	3	5
Jumlah Pegawai Anak Perusahaan / Total Employees of Subsidiaries	9.349	9.361	9.326
Total	53.343	52.116	51.477

Profil SDM Perusahaan

Profile of Corporate Human Capital

Pada 31 Desember 2022, keseluruhan pegawai *holding* PLN terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 33.824 orang dan pegawai perempuan sejumlah 8.327 orang. Terkait hal tersebut, PLN memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam penyusunan komposisi pegawai sebagai bagian dari penerapan kebijakan non-diskriminasi. Proporsi jumlah pegawai laki-laki yang lebih banyak hingga akhir 2022 secara umum dipengaruhi oleh sebagian besar bidang pekerjaan di PLN adalah penugasan di lapangan, seperti pengoperasian pembangkit listrik dan gardu induk, pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi listrik serta pelayanan pelanggan yang berlangsung 24 jam.

Dalam pelaksanaan beberapa pekerjaan pendukung seperti petugas baca meter, petugas *contact center*, petugas layanan teknik, petugas keamanan (*satpam*), petugas kebersihan (*cleaning services*) dan lainnya, PLN menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dengan skema pemborongan pekerjaan melalui perjanjian kontrak sebagai mitra kerja PLN.

Para pekerja yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pemborongan pekerjaan tersebut adalah tenaga alih daya yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan alih daya mitra kerja PLN.

Kebijakan PLN tentang pengelolaan alih daya telah diselaraskan dengan regulasi yang berlaku termasuk hak-hak ketenagakerjaan yang harus dipenuhi perusahaan alih daya kepada pekerjanya.

As of December 31, 2022, all PLN holding employees consisted of a number of 33,824 male employees and 8,327 female employees. In this regard, PLN is committed to applying the principle of gender equality in the preparation of the composition of employees as part of implementing a non-discrimination policy. The proportion of male employees that is higher until the end of 2022 is generally influenced by most of the fields of work at PLN, namely field assignments, such as operating power plants and substations, maintenance of electricity transmission and distribution networks and customer service that lasts 24 hours.

In carrying out several supporting works, such as meter reading officers, contact center officers, technical service officers, security guards, cleaning services, etc., PLN hands over part of the work to other companies with a job charter scheme through contract agreements as PLN business partners.

The workers who carry out the work based on the job chartering contract are outsourced workers who have a working relation with PLN's outsourced company partners.

PLN's policy regarding outsourcing management has been adjusted to applicable regulations including labor rights that must be fulfilled by outsourcing companies for their workers.

Komposisi Karyawan Holding (PLN) Tahun 2020-2022

Composition Of Employees Of Holding (PLN) In 2020-2022

Uraian / Description	2020	2021	2022
Jenis kelamin / Gender			
Perempuan / Female	8.504	8.351	8.327
Laki-laki / Male	35.490	34.404	33.824
Jumlah / Total	43.994	42.755	42.151
Usia / Age			
≤ 25	9.036	7.042	4.941
26 - 30	13.969	14.168	14.259
31 - 35	8.138	8.760	9.804
36 - 40	3.535	4.425	5.274
41 - 45	1.131	1.286	1.564
46 - 50	3.383	2.692	2.046
> 50	4.802	4.382	4.263
Jumlah / Total	43.994	42.755	42.151





Profil SDM Perusahaan

Profile of Corporate Human Capital

Uraian / Description	2020	2021	2022
Level Jabatan / Position			
Fungsional / Functional	28.300	27.988	27.298
Supervisori Dasar / Basic Supervisor	9.278	8.857	8.933
Supervisori Atas / Top Supervisor	4.015	3.688	3.658
Manajemen Dasar / Basic Management	1.816	1.663	1.683
Manajemen Menengah / Middle Management	470	442	446
Manajemen Atas / Top Management	115	117	114
Jumlah / Total	43.994	42.755	42.151
Tingkat pendidikan / Educational Level			
≤ D2	17.291	15.980	14.116
D3	9.843	9.795	9.833
S1	15.518	15.527	16.626
S2	1.333	1.440	1.564
S3	9	13	12
Jumlah / Total	43.994	42.755	42.151
Penugasan / Assignment			
Unit Bisnis PLN / PLN Business Unit	40.984	39.230	38.517
PLN Kantor Pusat / PLN Head Office	3.010	3.525	3.634
Jumlah / Total	43.994	42.755	42.151
Status Ketenagakerjaan / Employment Status			
Permanen / Permanent	43.994	42.753	42.144
Kontrak / Contract	-	2	7
Jumlah / Total	43.994	42.755	42.151



Keanggotaan dalam Asosiasi

Association Membership

Di samping menjalankan usaha di sektor ketenagalistrikan, PLN juga aktif menjadi anggota dalam asosiasi sebagai berikut:

In addition to conducting business in electricity, PLN is also an active member of a number of associations, which include:

Nama Organisasi / Organization Name	Status Keanggotaan / Member Status
Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA)	Sekretariat Utama mewakili Indonesia / Main Secretariat representing Indonesia
Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and Western Pacific (AESIEAP)	Anggota / Member
Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia / METI / Indonesian Renewable Energy Society / METI	Anggota Utama / Member
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia / The Indonesian Electrical Power Society	Anggota / Member
Indonesia Global Compact Network (IGCN) of the United Nations Global Compact (UNGC)	Anggota / Member

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition and Structure

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Sampai dengan 31 Desember 2022, seluruh saham PLN dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN 5% ATAU LEBIH

Sampai dengan 31 Desember 2022, seluruh saham PLN dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Atas hal tersebut, tidak terdapat informasi mengenai kepemilikan saham dengan porsi 5% atau lebih untuk disajikan pada bagian ini.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan 31 Desember 2022, seluruh saham PLN dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat anggota Direksi ataupun Dewan Komisaris dengan kepemilikan saham pada Perseroan.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM KURANG DARI 5%

Sampai dengan 31 Desember 2022, seluruh saham PLN dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Atas hal tersebut, tidak terdapat informasi mengenai kepemilikan saham dengan porsi kurang dari 5% untuk disajikan pada bagian ini.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN KLASIFIKASI JENIS INVESTOR DAN KEWARGANEGARAAN

Sampai dengan 31 Desember 2022, seluruh saham PLN dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai kepemilikan saham berdasarkan klasifikasi jenis investor dan kewarganegaraan untuk disajikan pada bagian ini.

SHARE OWNERSHIP COMPOSITION

As of December 31, 2022, all PLN shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

COMPOSITION OF SHAREHOLDING WITH 5% OWNERSHIP OR MORE

As of December 31, 2022, all PLN shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. For this reason, there is no information regarding share ownership with a portion of 5% or more to be presented in this section.

COMPOSITION OF SHAREHOLDING BY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

As of December 31, 2022, all of PLN's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Hence, all members of the Board of Directors and Board of Commissioners do not own any PLN shares.

COMPOSITION OF SHAREHOLDING WITH LESS THAN 5% OWNERSHIP

As of December 31, 2022, all of PLN's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, information on shareholders with less than 5% ownership is not presented in this report.

COMPOSITION OF SHAREHOLDING BASED ON CLASSIFICATION OF INVESTOR TYPE AND NATIONALITY

As of December 31, 2022, all of PLN's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, the information on shareholding composition based on investor type and nationality is not presented in this report.



Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan Special Purpose Vehicles (SPV)

Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, and Special Purpose Vehicles (SPV)

ENTITAS ANAK

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, PLN memiliki entitas anak melalui kepemilikan langsung dengan perincian sebagai berikut:

SUBSIDIARIES

As of December 31, 2022, PLN directly owned a number of subsidiaries as follows:

Nama / Name	Jenis Usaha / Nature of Business	Domisili / Domicile	Tahun Operasi Komersial / Year of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan (%) / Percentage of Ownership (%)		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (Rp Miliar) / Total Assets Before Elimination (in billions Rp)	
				2021	2022	2021	2022
PT Indonesia Power	Pembangkitan Tenaga Listrik / Electric Power Generation	Jakarta	1995	99,99	99,99	207.252	211.876
PT PLN Nusantara Power (dahulu bernama PT Pembangkitan Jawa Bali) / PT PLN Nusantara Power (formerly known as PT Pembangkitan Jawa Bali)	Pembangkitan Tenaga Listrik / Electric Power Generation	Surabaya	1995	99,99	99,99	172.164	174.960
PT Indonesia Comnets Plus	Jasa Penyedia Jaringan Telekomunikasi / Telecommunication Network Provider	Jakarta	2000	99,99	99,99	5.327	6.955
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	Penyediaan Tenaga Listrik / Electric Power Supplier	Batam	2000	99,99	99,99	20.269	19.978
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	Jasa Enjiniring, Pengadaan dan Konstruksi / Engineering, Procurement, and Construction Services	Jakarta	2003	99,90	99,90	1.167	1.167
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	Jasa pemeliharaan dan operasi / Maintenance and operation	Tarakan	2004	99,97	99,97	685	817
PT PLN Energi Primer Indonesia (dahulu bernama PT PLN Batubara) / PT Energi Primer Indonesia (formerly known as PT PLN Batubara)	Perdagangan batu bara / Coal trading	Jakarta	2009	99,99	99,99	6.113	5.604
PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal	Pembangkitan tenaga listrik / Power Generation	Jakarta	2010	99,99	99,99	890	2.765
Majapahit Holding BV	Lembaga Keuangan / Financial Institution	Belanda	2006	100,00	100,00	5.225	5.752
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Pelayaran / Shipping	Jakarta	2011	99,99	99,99	3.703	4.508
PT Haleyora Power	Jasa pengelolaan dan pemanfaatan energi / Energy management and utilization services	Jakarta	2013	99,99	99,99	1.375	1.356
PT Energy Management Indonesia	Jasa konservasi energi dan lingkungan serta energi baru terbarukan / Energy and environmental conservation service and new renewable energy	Jakarta	1987	99,99	99,99	64	41
PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara	Jasa pengelolaan energi / Energy services	Jakarta	2000	95,00	95,00	450	1.322

Kemudian, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, PLN memiliki entitas anak melalui kepemilikan tidak langsung dengan perincian sebagai berikut:

For the period ending on December 31, 2022, PLN through its subsidiaries has indirect ownership as follows:

Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan Special Purpose Vehicles (SPV) Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, and Special Purpose Vehicles (SPV)(SPV)

Nama / Name	Jenis Usaha / Nature of Business	Domisili / Domicile	Tahun Operasi Komersial / Year of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan (%) / Percentage of Ownership (%)		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (Rp Miliar) / Total Assets Before Elimination (in billions Rp)	
				2021	2022	2021	2022
PT Indonesia Power							
PT Cogindo Daya Bersama (CDB)	Kogenerasi, pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen / Cogeneration, energy distribution, energy service and management	Jakarta	1999	99,99	99,99	1.204	1.198
PT Artha Daya Coalindo	Perdagangan batu bara / Coal trading	Jakarta	1998	80,00	80,00	896	668
PT Indo Ridlatama Power	Pembangkitan tenaga listrik / Electric Power generation	Jakarta	2018	90,00	90,00	1.503	1.549
PT Putra Indotenaga	Ketenagalistrikan dan energi / Electricity and energy	Jakarta	2016	99,99	99,99	4.536	7.257
PT Indo Tenaga Hijau	Pengembangan energi baru dan terbarukan / Development of new and renewable energy	Jakarta	Dalam tahap pengembangan / Under development stage	95,45	95,81	86	92
PT PLN Nusantara Power (dahulu bernama PT Pembangkitan Jawa Bali) / PT PLN Nusantara Power (formerly known as PT Pembangkitan Jawa Bali)							
PT PJB Services	Jasa / Service	Surabaya	2001	98,00	99,00	1.414	1.689
PT Rekadaya Elektrika (RE)	Jasa listrik dan engineering / Electricity and engineering	Jakarta	2004	98,90	98,90	1.437	1.943
PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	Investasi pembangkit <i>Independent Power Producer</i> (IPP)	Surabaya	2002	72,97	72,97	395	485
PT PJB Investasi	Investasi ketenagalistrikan / Electricity investment	Jakarta	2015	99,99	99,99	6.428	8.010
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	Perdagangan barang dan jasa, engineering <i>supply chain</i> dan konsultasi dibidang ketenagalistrikan / Operation and services trading, engineering supply chain and consultation in the electricity sector	Jakarta	2018	100,00	100,00	299	471
PT Prima Power Nusantara	Jasa engineering, pengadaan, dan konstruksi / Engineering, procurement and construction	Jakarta	2017	99,9	100,00	241	200
PT Mitra Karya Prima	Jasa / Service	Surabaya	2005	92	92	146	174
PT PJB Investindo	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal; Usaha pengadaan listrik / Financing in the form of equity participation; Electricity procurement business	Jakarta	2020	99,99	99,99	118	194
PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata	Investasi / Investment	Jakarta	2020	99,99	99,99	123	194
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam							
PT Pelayanan Energi Batam	Pembangunan pipa gas dan energi lainnya / Construction of gas pipeline and other energy	Batam	2016	99,99	99,99	904	987



Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan Special Purpose Vehicles (SPV) Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, and Special Purpose Vehicles (SPV)(SPV)

Nama / Name	Jenis Usaha / Nature of Business	Domisili / Domicile	Tahun Operasi Komersial / Year of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan (%) / Percentage of Ownership (%)		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (Rp Miliar) / Total Assets Before Elimination (in billions Rp)	
				2021	2022	2021	2022
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring							
PT Rekadaya Elektrika Consult	Supervisi dan konsultasi / Supervision and consultation	Jakarta	2010	99,8	99,8	123	121
Majapahit Holding B.V. (MH)							
Majapahit Finance B.V. (MF)	Lembaga Keuangan / Financial Institution	Belanda	2006	100,00	100,00	12.795	12.795
PT Haleyora Power							
PT Haleyora Powerindo (HPI)	Jasa / Service	Jakarta	2013	95,00	95,00	527	553
PT PLN Energi Primer Indonesia (dahulu bernama PT PLN Batubara) / PT Energi Primer Indonesia (formerly known as PT PLN Batubara)							
PT Jambi Prima Coal	Pertambangan batu bara / Coal mining	Jambi	2010	60,00	60,00	267	286
PT PLNBB Investasi	Investasi / Investment	Jakarta	2018	99,96	99,96	1.880	2.024
PT PLNBB Niaga	Perdagangan batu bara / Coal trading	Jakarta	Dalam tahap pengembangan / Under development stage	100,00	100,00	283	183
PT Mahakarya Abadi Prima	Pertambangan batu bara / Coal mining	Jambi	Dalam tahap pengembangan / Under development stage	80,00	80,00	3	5
PT Bangun Persada Jambi Energi	Pertambangan batu bara / Coal mining	Jambi	-	80,00	80,00	36	51
PT Prima Bara Indonesia	Pertambangan batu bara / Coal mining	Jakarta	Dalam tahap pengembangan / Under development stage	51,00	51,00	139	139
PT Banyan Koalindo Lestari	Pertambangan batu bara / Coal mining	Palembang	2018	51,00	51,00	464	574
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan)							
PT Paguntaka Cahaya Nusantara	Jasa pemeliharaan dan operasi / Maintenance and operation service	Balikpapan	2018	99,96	99,96	93	112
PT Energi Management Indonesia							
PT Energi Biomassa Indonesia	Jasa konservasi energi dan lingkungan serta energi baru terbarukan / Energy and environmental conservation and new renewable energy service	Jakarta	Dalam tahap pengembangan / Under development stage	99	99	3	3
PT Energi Bangun Indonesia	Jasa perdagangan ekspor dan impor, perindustrian, pembangunan / Export and import trading, industry construction	Jakarta	Dalam tahap pengembangan / Under development stage	80,00	99,99	0	0,81

Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan Special Purpose Vehicles (SPV) Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, and Special Purpose Vehicles (SPV)(SPV)

ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA, DAN SPECIAL PURPOSE VEHICLES

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, PLN memiliki Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama melalui kepemilikan langsung dengan perincian sebagai berikut:

Nama / Name	Jenis Usaha / Nature of Business	Domisili / Domicile	Tahun Operasi Komersial / Year of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan (%) / Percentage of Ownership (%)	
				2021	2022
Entitas Asosiasi / Associates					
PT Geo Dipa Energi	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Jakarta	2002	5,50	5,50
PT Unelec Indonesia	Penunjang Penyedia Tenaga listrik / Electric Power Supply Supports	Jakarta	1988	32,35	32,35
Ventura Bersama / Joint Venture					
PT Industri Baterai Indonesia	Industri EV Battery dan ESS / EV Battery and ESS Industry	Jakarta	Dalam tahap pengembangan / Under development stage	25	25

ASSOCIATES, JOINT VENTURES, AND SPECIAL PURPOSE VEHICLES

As of December 31, 2022, PLN directly owned the following Associated Entities and Joint Ventures:

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, PLN memiliki Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan *Special Purpose Vehicles* (SPV) melalui kepemilikan tidak langsung, dengan perincian sebagai berikut:

For the period ending on December 31, 2022, PLN owned Associates, Joint Ventures, and Special Purpose Vehicles (SPV) through indirect ownership with details as follows

Nama / Name	Bidang Usaha / Line of Business	Domisili / Domicile	Tahun Mulai Beroperasi / Year of Operations	Kepemilikan Saham oleh Perseroan (%) / Company Share Ownership Percentage (%)	
				2021	2022
Entitas Asosiasi / Associates					
PT Indo Pusaka Berau	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Berau	2005	46,53 / PT IP	46,53 / PT IP
PT Sumber Segara Primadaya	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Cilacap	2006	49,00/PT PJB	49,00/PT PJB
PT Rekind Daya Mamuju	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Jakarta	2018	10,00 / PT PJB	10,00 / PT PJB
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Jakarta	2019	30,00 / PT PJB	30,00 / PT PJB
PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Sumatera Selatan / South Sumatera	Dalam tahap konstruksi / Under construction	10,00 / PT PJB	10,00 / PT PJB
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Jakarta	2019	30 / PT PJB	30 / PT PJB
PT North Sumatra Hydro Energy	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Sumatra Utara / North Sumatra	Dalam tahap pengembangan / In development stage	25 / PT PJB	25 / PT PJB
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Jakarta	Dalam tahap konstruksi / Under construction	51 / PT PJB	51 / PT PJB
PT Mitra Energi Batam	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Batam	2004	30,00/PT PLN Batam	30,00/PT PLN Batam
PT Dalle Energy Batam	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Batam	2013	20,00/PTPLN Batam	20,00/PTPLN Batam
PT Tanjung Kasam Power	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Batam	2012	10,00/PT PLN Batam	10,00/PTPLN Batam



Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan Special Purpose Vehicles (SPV) Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, and Special Purpose Vehicles (SPV)(SPV)

Nama / Name	Bidang Usaha / Line of Business	Domisili / Domicile	Tahun Mulai Beroperasi / Year of Operations	Kepemilikan Saham oleh Perseroan (%) / Company Share Ownership Percentage (%)	
				2021	2022
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Jakarta	2013	45,00/PT Haleyora Power	45,00/PT Haleyora Power
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Operasi dan Pemeliharaan / Operation and Maintenance	Jepara	2010	49,00 / PT PJB	49,00/ PT PJB
PT Bajradaya Sentranusa	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Asahan	2011	36,61/ PT PJB	36,61/ PT PJB
PT Bukit Pembangkit Innovative	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Palembang	2015	40,25 / PT PJB	40,25/ PT PJB
PT GCL Indotenaga	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Jakarta	2021	35,00 / PT IP	35,00/ PT IP
PT Sriwijaya Bara Logistik	Transportasi batubara / Coal transportation	Musi Banyuasin	2014	25,50/ PT PLNBB Investasi	25,50 PT PLNBB Investasi
PT Musi Mitra Jaya	Transportasi batubara / Coal transportation	Palembang	2011	25,50/ PT PLNBB Investasi	25,50/ PT PLNBB Investasi
Ventura Bersama / Joint Venture					
PT Perta Daya Gas	Transportasi dan penyimpanan LNG/ Transportation and storage of LNG	Jakarta	2015	35,00 / PT IP	35,00 / PT IP
PT Rajamandala Electric Power	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Jakarta	2019	51,00% / PT IP	51,00% / PT IP
PT Indo Raya Tenaga	Pembangkitan tenaga listrik / Electricity supplier	Jakarta	Dalam tahap pengembangan / In development stage	51,00% / PT IP	51,00% / PT IP
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia	Peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik / Electricity controller and distribution	Jakarta	2014	49,00% / PT PLNE	49,00%/ PT PLNE
PT PBM Adhiguna Putera	Pelayaran / Shipping	Jakarta	1987	25 / PT BAg	25 / PT BAg
PT Maxpower Cogindo Batam	Pembangkitan tenaga listrik, kelistrikan, perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya / Power generation, supporting activities electricity, wholesaler of office machinery and industry, spare parts and fittings*	Batam	2022	30	30

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham

Share Listing and Issuance Chronology

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perseroan tidak melakukan penawaran umum perdana saham dan karenanya tidak memperdagangkan saham di bursa mana pun. Atas hal itu, tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa di mana saham Perusahaan dicatatkan untuk disajikan pada bagian ini.

As of December 31, 2021, the Company did not carry out initial public offerings or trade its shares on any stock exchange. Therefore, there are no information regarding the year of share issuance, number of shares, nominal value of shares, offering price for each corporate action and number of shares listed after each corporate action, and the name of stock exchange where the Company listed its shares.

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing and Issuance Chronology

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perseroan telah beberapa kali melakukan penerbitan obligasi dan sukuk, baik dalam mata uang rupiah maupun asing, yang dilakukan baik di dalam maupun luar negeri. Informasi mengenai obligasi dan sukuk yang belum jatuh tempo dan belum lunas, serta obligasi dan sukuk yang jatuh tempo pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

OBLIGASI DAN SUKUK YANG BELUM JATUH TEMPO DAN BELUM LUNAS

Pada 31 Desember 2022, terdapat beberapa obligasi dan sukuk dalam mata uang rupiah yang belum jatuh tempo dengan total nilai Rp30,16 triliun, dengan tenor 3 tahun sampai 20 tahun, yang diterbitkan secara bertahap dari tahun 2013 sampai dengan 2020. Selain itu, terdapat obligasi dalam mata uang asing yang belum jatuh tempo dengan nilai USD 10,19 miliar, EUR 1 miliar, dan JPY 19,5 miliar. Perincian obligasi dan sukuk Perseroan yang belum jatuh tempo dan belum lunas pada 31 Desember 2022 telah disajikan dalam subbagian Ikhtisar Obligasi, Sukuk Atau Obligasi Konversi.

As of December 31, 2022, the Company issued bonds and Sukuk several times, both in rupiah and foreign currencies, both at home and abroad. Information regarding bonds and Sukuk that have not yet matured and have not been paid off, as well as bonds and Sukuk that are due in 2022 are as follows:

BONDS AND SUKUK NOT YET MATURED AND NOT YET PAID-OFF

As of December 31, 2021, there were several bonds and sukuk that had not yet matured in Rupiah in the total value of Rp30.16 trillion, with a tenor of 3 years to 20 years which were issued in stages from 2013 to 2020. Meanwhile, bonds denominated in foreign currencies that had not yet matured was a total of USD10.19 billion, EUR1 billion, and JPY19.5 billion. The list of PLN bonds and sukuk that had not matured and had not been paid off by December 31, 2022 has been presented in the Sub-Chapter of Summary of Bonds, Sukuk or Convertible Bonds in this Annual Report.



Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham

Share Listing and Issuance Chronology

OBLIGASI DAN SUKUK YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2022

Secara kumulatif, obligasi dan sukuk Perseroan dengan mata uang rupiah yang jatuh tempo pada tahun 2022 mencapai Rp4,96 triliun, sedangkan obligasi dan sukuk dalam mata uang asing adalah sejumlah JPY3,7 miliar. Informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

BONDS AND SUKUK MATURING IN 2022

Cumulatively, the Company's rupiah-denominated bonds and Sukuk maturing in 2022 reach Rp4.96 trillion, while bonds and Sukuk in foreign currencies are JPY3.7 billion. Further information regarding the matter is as follows:

No.	Nama Obligasi / Domestic Bond Name	Nominal (Rp Miliar/ JPY Juta) / Nominal Value (in billions of Rp / millions of JPY)	Kupon (%) / Coupon (%)	Tenor (Tahun) / Tenor (Year)	Tanggal Terbit / Date Issued	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Peringkat / Rating
Obligasi Domestik / Domestic Bond							
1	PLN IX 2007 SERI B	1.200	10,90%	15	10-Jul-07	10-Jul-22	idAAA
2	PLN XII 2010 SERI B	1.855	10,40%	12	08-Jul-10	08-Jul-22	idAAA
3	PLN SUKUK IJARAH V SERI B	340	10,40%	12	08-Jul-10	08-Jul-22	idAAA(sy)
4	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A	214	7,70%	5	11-Jul-17	11-Jul-22	idAAA
5	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A	186	7,70%	5	11-Jul-17	11-Jul-22	idAAA(sy)
6	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A	451,5	7,20%	5	03-Nov-17	03-Nov-22	idAAA
7	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A	83,5	7,20%	5	03-Nov-17	03-Nov-22	idAAA(sy)
8	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri A	369	8,50%	3	19-Feb-19	19-Feb-22	idAAA
9	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri A	263	8,50%	3	19-Feb-19	19-Feb-22	idAAA(sy)
Obligasi Global / Global Bond							
1	Japanese Yen Bond 2019 Seri 1-3Y	3.700	0,430%	3	20-Sep-19	20-Sep-22	<ul style="list-style-type: none"> • BBB (S&P Rating) • Baa2 (Moody's Rating) • BBB (Fitch Rating) • BBB+ (Japan Credit)

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan

Capital Market Supporting Institutions and Professionals

Dalam melaksanakan aktivitas usahanya, PLN didukung oleh sejumlah lembaga dan profesi penunjang perusahaan. Perincian lembaga dan profesi penunjang perusahaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

In conducting its business activities, PLN is supported by a number of supporting institutions and professionals. The detail on the company institutions and professionals in 2022 is as follows:

Nama dan Alamat / Name and Address	Periode Penugasan / Service Period	Ruang Lingkup Penugasan / Scope of Service	Biaya Jasa Penunjang Per Tahun / Supporting Service Fees per Year
KANTOR AKUNTAN PUBLIK / PUBLIC ACCOUNTING FIRM			
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia) Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 - INDONESIA	2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT PLN (Persero) 2. PT Indonesia Power dan Entitas Anak / PT Indonesia Power and Its Subsidiaries 3. PT Haleyora Power dan Entitas Anak / PT Haleyora Power and Its Subsidiaries 4. PT PLN Gas dan Geothermal 5. PT PLN Nusantara Power (dahulu bernama PT Pembangkitan Jawa Bali) dan Entitas Anak / PT PLN Nusantara Power (formerly known as PT Pembangkitan Jawa Bali) and Its Subsidiaries 6. PT PLN Batam dan Entitas Anak / PT PLN Batam and Its Subsidiaries 7. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 8. PT PLN Energi Primer Indonesia (dahulu bernama PT PLN Batubara) dan Entitas Anak / PT Energi Primer Indonesia (formerly known as PT PLN Batubara) and Its Subsidiaries 9. PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan dan Entitas Anak / PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan and Its Subsidiaries 10. PT Indonesia Comnets Plus 11. PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dan Entitas Anak / PT Prima Layanan Nasional Enjiniring and Its Subsidiaries 12. PT Energy Management Indonesia dan Entitas Anak / PT Energy Management Indonesia and Its Subsidiaries 13. Dana Pensiun PT PLN (Persero) / PT PLN (Persero) Pension Fund 	Rp37,46 miliar / Rp37.46 billion
BIRO ADMINISTRASI EFEK / SHARE REGISTRAR			
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53 Jakarta 12190 - Indonesia	2004 sampai dengan Obligasi PLN dan/atau Sukuk PLN dinyatakan lunas / 2004 - until the Bonds of PLN and/ or Sukuk of PLN are declared settled	Penatausahaan Pencatatan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Efek, Agen Pembayaran dan/atau jasa administrasi lainnya sehubungan dengan Efek Bersifat Utang PLN di Bursa Efek Indonesia / Administering Registration of Ownership or Change of Ownership of Securities, Payment Agents, and/or other administrative services in connection with PLN's Debt Securities on Indonesia Stock Exchange	Pelaksanaan tugas Agen Pembayaran: 0,05% dari bunga Efek Bersifat Utang dan bagi hasil untuk Sukuk yang dibayarkan. Biaya diperhitungkan per seri dengan ketentuan min. Rp2.500.000,- dan maks Rp10.000.000,- atau sesuai dengan ketentuan biaya layanan jasa berdasarkan Peraturan KSEI / Duty implementation of Payment Agent: 0.05% of interest on Debt Securities and profit sharing for Sukuk paid. The fee is calculated per series with the condition that min. Rp2,500,000 and a maximum of Rp10,000,000 or in accordance with the provisions of the service fee based on the KSEI Regulation
WALI AMANAT OBLIGASI / BOND TRUSTEES			
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Sampai dengan Obligasi PLN dan/atau Sukuk Ijarah PLN dinyatakan lunas / Until Bonds of PLN and/ or Sukuk Ijara of PLN are declared settled	Mewakili kepentingan para pemegang Obligasi PLN VIII seri B, Obligasi PLN IX seri B, Obligasi XII seri B, Obligasi Berkelanjutan I, II, III & IV PLN serta Sukuk Ijarah V seri B, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, II, III & IV PLN / Representing the interests of holders of PLN Bonds VIII series B, PLN Bonds IX series B, PLN Shelf Bonds XII series B, PLN Shelf Bonds I, II, III & IV and Shelf Sukuk Ijara V series B, PLN Shelf Sukuk Ijara I, II, III & IV	Sekurang-kurangnya Rp45.000.000,- dan sebanyak-banyaknya Rp70.000.000,- per masing-masing jenis Efek bersifat utang / Trustee services for a minimum of Rp45,000,000 and a maximum of Rp70,000,000 per each type of debt securities



Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan

Capital Market Supporting Institutions and Professionals

Nama dan Alamat / Name and Address	Periode Penugasan / Service Period	Ruang Lingkup Penugasan / Scope of Service	Biaya Jasa Penunjang Per Tahun / Supporting Service Fees per Year
Deutsche Bank Trust Company Americas 60 Wall Street, MS: NYC 60-1630, New York, New York 10005	Program Obligasi Internasional tahun 2007, 2012, 2017, 2018, 2019, dan 2020 / International Bonds Programs of 2007, 2012, 2017, 2018, 2019, and 2020	Mewakili kepentingan para pemegang obligasi serta menjadi agen pembayaran transaksi yang berhubungan dengan para pemegang obligasi / Representing the interests of bondholders and acting as a payment agent for transactions related to the bondholders	±USD5.000 – USD7.000 per tranche
AGEN FISKAL / FISCAL AGENT			
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan	Program Obligasi Samurai (dalam mata uang Japanese Yen) tahun 2019 / Samurai Bonds Program (in Japanese Yen) in 2019	Agen yang bertanggung jawab pada proses pembayaran-pembayaran semua transaksi yang berhubungan dengan obligasi Samurai dari PLN ke pemegang obligasi dan sebaliknya serta menangani proses administrasi dan notifikasi terkait obligasi / Agent responsible for the payment process of all transactions related to Samurai bonds from PLN to the bondholders and vice versa and handling the administration and notification related to bond processes	JPY2.300.000 in advance
PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK / RATING AGENCIES			
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Panin Tower Senayan City 17th floor Jalan Asia Afrika Lot. 19	Sampai dengan PLN menginginkan diakhirinya kerja sama Pemeringkatan/ dinyatakan pailit/ dibubarkan dan/atau sampai dengan seluruh Efek Bersifat Utang PLN dinyatakan lunas / Until PLN wants to end the rating cooperation/ declared bankruptcy/ dissolution and/or until the entire PLN Debt Securities are declared settled	Pemeringkatan atas Perusahaan dan Efek Bersifat Utang Perusahaan / Rating the Company and the Company's Debt Securities	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Jasa Pemeringkatan atas Obligasi/ Sukuk (excl. PPN) (0,04% x nilai emisi setiap penerbitan Efek Bersifat Utang untuk realisasi penerbitan sampai dengan Rp20 triliun; 0,38% x nilai emisi setiap penerbitan Efek Bersifat Utang untuk realisasi penerbitan >Rp20 triliun) / Bond/ Sukuk Rating Service Fee (Excl. VAT) (0.04% x issuance value of each issuance of Debt Securities for the realization of issuance up to Rp20 trillion; 0.38% x issuance value of each issuance of Debt Securities for the realization of issuance >Rp20 trillion) Biaya Pemantauan Tahunan (Excl. PPN) (penjualan obligasi, dan/atau sukuk ≤ Rp5 triliun sebesar Rp125.000.000,- penjualan obligasi, dan/atau sukuk > Rp5 triliun sebesar Rp175.000.000,-) / Monitoring Fees (Excl. PPN) (sales of bonds, and/or sukuk ≤ Rp5 trillion in the amount of Rp125,000,000.- sales of bonds, and/or sukuk > Rp5 trillion in the amount of Rp175,000,000.-)
Moody's Investor Service Singapore Pte. Limited 50 Raffles Place #23-06, Singapore Land Tower Singapore, 048623	Program Obligasi Internasional tahun 2007, 2009, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, dan 2020 / International Bonds Programs of 2007, 2009, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, and 2020	Pemeringkatan atas Perusahaan / Rating the Company	USD88.000 per tahun / USD88.000 per year
Standard and Poor's Singapore Pte. Ltd 12 Marina Boulevard #23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore 018982	Program Obligasi Internasional tahun 2007, 2009, 2011, 2012, 2018, 2019, dan 2020 / International Bonds Programs of 2007, 2009, 2011, 2012, 2018, 2019, and 2020	Pemeringkatan atas Perusahaan / Rating the Company	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Tahunan: USD42.000 dan/atau USD60.000 per tahun / Annual Fee: USD42.000 and/or USD60.000 per year Annual Surveillance fees: USD92.000- USD95.000 per tahun / Annual Surveillance fees: USD92.000-USD95.000 per year

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan

Capital Market Supporting Institutions and Professionals

Nama dan Alamat / Name and Address	Periode Penugasan / Service Period	Ruang Lingkup Penugasan / Scope of Service	Biaya Jasa Penunjang Per Tahun / Supporting Service Fees per Year
Fitch Ratings Ltd. 30 North Colonnade London E14 5GN	Program Obligasi Internasional tahun 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, dan 2020 / International Bonds Programs of 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, and 2020	Pemeringkatan atas Perusahaan / Rating the Company	USD77.500 per tahun / USD77.500 per year
Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR) Jiji Press Building 5-15-8 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan	Program Obligasi Samurai (dalam mata uang Japanese Yen) tahun 2019 / Samurai Bonds Program (in Japanese Yen) in 2019	Pemeringkatan atas Perusahaan / Rating the Company	JPY1.000.000/tahun / JPY1,000,000/year
BURSA EFEK / STOCK EXCHANGE			
PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190	1992-2022	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka / The party organizing and providing systems and/or facilities to bring together securities sales offering and purchase of other parties that aims to trade securities between them	Annual Fee sekurang-kurangnya Rp10.000.000,- dan sebanyak-banyaknya Rp150.000.000,- per masing-masing jenis efek bersifat utang / Annual Fee of at least Rp10,000,000 and a maximum of Rp150,000,000 per each type of debt Securities
Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX) 2 Shenton Way, #02-02 SGX Centre 1, Singapore 068804	Program Obligasi Internasional tahun 2006, 2007, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, dan 2020 / International Bonds Programs of 2007, 2009, 2011, 2012, 2017, and 2018	Penyelenggaraan dan penyediaan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan permintaan dan penawaran jual-beli Efek oleh pihak-pihak terkait dengan tujuan perdagangan Efek (salah satunya obligasi) / Organizing and providing systems and/or facilities to bring together the demand and offering of securities sales and purchase of other parties related to the securities trading (one of which is bonds)	±SGD25,000 per establishment of the program
NOTARIS / NOTARY			
Lenny Janis, SH Jln. Hang Lekir 9 No.1 Jakarta 12120	2019-selesai / 2019 until Completion	Pembuatan Akta Notaris dan Legalisasi Akta / Preparing Notary Deeds and Legalizing Deeds	Rata-rata ±Rp3.574.935/tahun / Average ±Rp3,574,935/Year
Muhammad Hanafi, SH Komp. Rukan Tendeand Square No. 26 Jl. Walter Mongonsidi 122-124 Kebayoran Baru, Jakarta 12180	2021-selesai / 2021 until Completion	Pembuatan Akta Notaris dan Legalisasi Akta / Preparing Notary Deeds and Legalizing Deeds	Rata-rata ±Rp500.000,-/tahun / Average ±Rp500.000/Year
KONSULTAN HUKUM / LEGAL CONSULTANT			
Nahr Murdhono Mitra Building 9th Floor Suite 902 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 21 Jakarta 12930	2010-selesai / 2010 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi, Pendampingan Proyek / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations, Project Assistance	Rata-rata ±Rp466.729.425,-/Tahun / Average ±Rp466,729,425/year
UMBRA Telkom Landmark Tower Tower 2, 49th Floor Jl. Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta 12710	2018-selesai / 2018 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi, Pendampingan Proyek / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations, Project Assistance	Rata-rata ±Rp614.205.021,-/Tahun / Average ±Rp614,205,021/year



Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan

Capital Market Supporting Institutions and Professionals

Nama dan Alamat / Name and Address	Periode Penugasan / Service Period	Ruang Lingkup Penugasan / Scope of Service	Biaya Jasa Penunjang Per Tahun / Supporting Service Fees per Year
Azwar Hadisupani Rum & Partners Menara Palma Lt. 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 6 Jakarta	2018-selesai / 2018 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi, Pendampingan Proyek / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations, Project Assistance	Rata-rata ±Rp319.180.200,-/Tahun / Average ±Rp319,180,200/year
Tumbuan & Partners Jl. Gandaria Tengah III No. 8 RT 3/RW 1 Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12240	2016-selesai / 2016 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi, Pendampingan Proyek / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations, Project Assistance	Rata-rata ±Rp389.670.521,-/Tahun / Average ±Rp389,670,521/year
Kantor Hukum Anullah & Partners Sampoerna Strategic Square Tower B 19th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta	2014-selesai / 2014 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations	Rata-rata ±Rp216.723.760,-/Tahun / Average ±Rp216,723,760/year
Citra Lentera Hukum Gedung AKABA Jl. Sunan Kalijaga No. 63 A Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160	2015-selesai / 2015 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations	Rata-rata ±Rp134.685.833,-/Tahun / Average ±Rp134,685,833/year
Ferisamad Perkantoran Royal Palace Blok C No. 10 Jl. Prof Soepomo No. 178 Jakarta 12870	2015-selesai / 2015 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations	Rata-rata ±Rp274.598.197,-/Tahun / Average ±Rp274,598,197/year
Hadiputranto Hadinoto & Partner (HHP) Pacific Century Palace level 55 SCBD District Lot 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	2014-selesai / 2014 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi, Pendampingan Proyek / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations, Project Assistance	Rata-rata ±Rp788.030.463,-/Tahun / Average ±Rp788,030,463/year
Hogan Lovells Lee & Lee 50 Collier Quay 20-01 OVE Bayfront Singapore 049321	2016-selesai / 2016 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi, Pendampingan Proyek / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations, Project Assistance	Rata-rata ±Rp324.731.495,-/Tahun / Average ±Rp324,731,495,-/year
Karsa Mandiri Kindo Square Blok C-8 Jl. Duren Tiga Raya No. 101 Jakarta Selatan 12790	2015-selesai / 2015 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi, Pendampingan Proyek dan Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations, Project Assistance and Legal Aid Assistance	Rata-rata ±Rp354.165.320,-/Tahun / Average ±Rp354,165,320/year
Alfonso Law Firm The H Tower LT 15 Suite G JI H.R Rasuna Said Kav 20 Kuningan Jakarta Selatan	2020-selesai / 2020 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi, Pendampingan Proyek dan Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations, Project Assistance and Legal Aid Assistance	Rata-rata ±Rp517.058.536,-/Tahun / Average ±Rp517,058,536/year
JANIS & ASSOCIATES Royal Palace Blok C11 Jalan Prof Soepomo No 178A, Jakarta Selatan	2018-selesai / 2018 until completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-rata ±Rp719.403.776,-/Tahun / Average ±Rp 719,403,776,-/year

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan

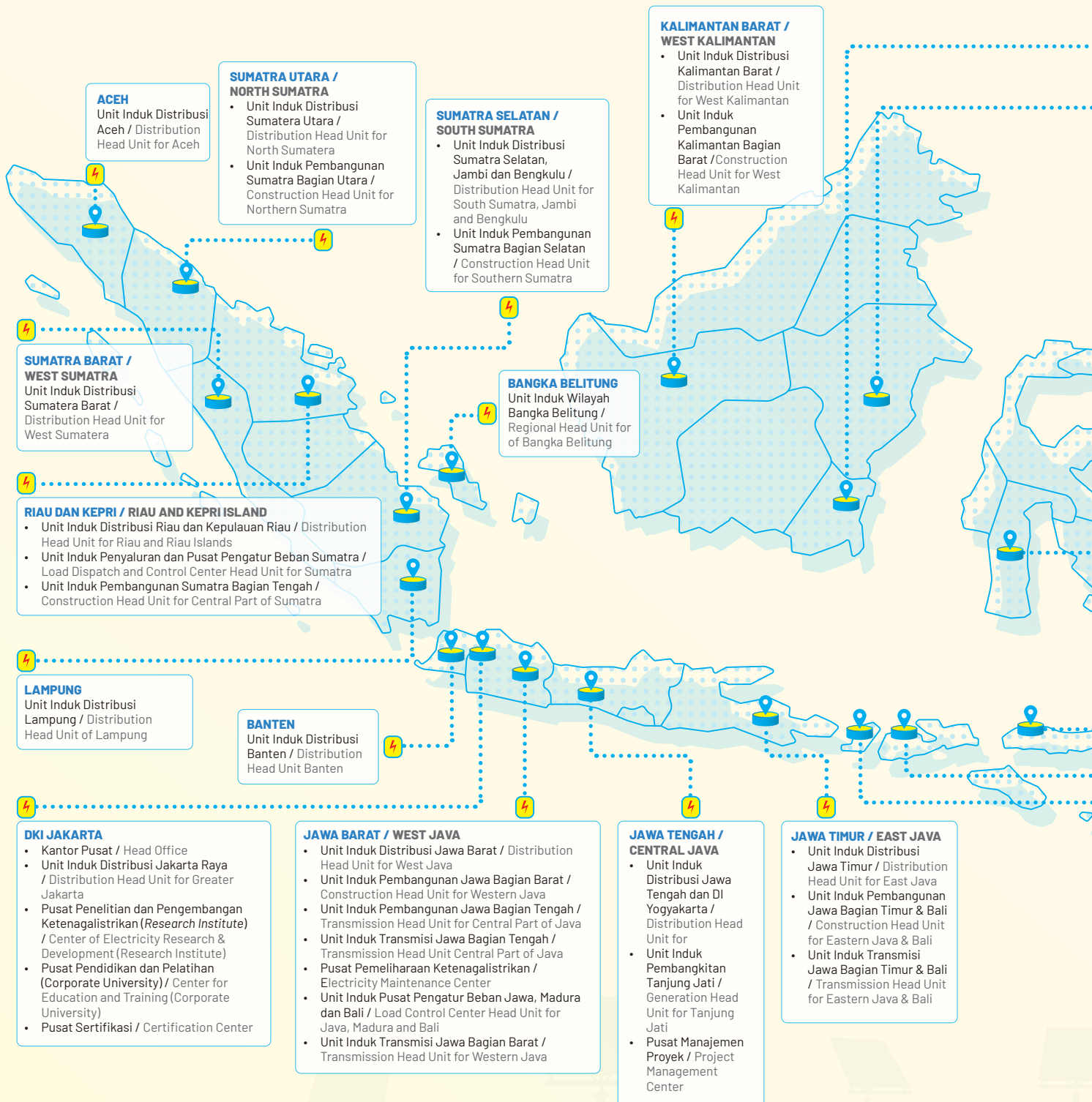
Capital Market Supporting Institutions and Professionals

Nama dan Alamat / Name and Address	Periode Penugasan / Service Period	Ruang Lingkup Penugasan / Scope of Service	Biaya Jasa Penunjang Per Tahun / Supporting Service Fees per Year
JTAsyer Law Firm Kompleks Wijaya Graha Puri Blok 65 Jl Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan	2020-selesai / 2020 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations	Rata-rata ±Rp629.521.976,-/Tahun / Average ±Rp629,521,976/year
Krismandro Family Lawyer & Partner JL Kapten A. Riva 1006 Ilir Barat I Palembang	2020-selesai / 2020 until completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-rata ±Rp103.500.000,-/Tahun / Average ±Rp103,500,000/year
LBH Adil JL Gusdur Kawasan Pertokoan SimPANG Tiga Blok E-16 Jombang	2020-selesai / 2020 until completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-rata ±Rp157.500.000,-/Tahun / Average ±Rp157,500,000/year
Melli Darsa & Co Gedung WTC Lt. 3 Jl Jend Sudirma Kav 29-31 Jakarta	2020-selesai / 2020 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations	Rata-rata ±Rp611.912.507,-/Tahun / Average ±Rp611,912,507/year
Nurruddin & Partners Gedung Arva Lt 2 Jl Cikini Raya No 60 Jakarta Pusat	2019-selesai / 2019 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations	Rata-rata ±Rp182.025.000,-/Tahun / Average ±Rp182,025,000/year
Reggie Tentero & Partners Plaza Asia Lt 3 Suite 3D Jl Jend. Sudirman Kav 59 Jakarta Selatan	2020-selesai / 2020 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi, Pendampingan Proyek dan Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations, Project Assistance and Legal Aid Assistance	Rata-rata ±Rp933.619.118,-/Tahun / Average ±Rp933,619,118/year
Guido Hidayanto & Partners World Trade Center 3 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta	2022-selesai / 2022 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi, Pendampingan Proyek dan Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations, Project Assistance and Legal Aid Assistance	Rata-rata ±Rp8.575.000.000,-/Tahun / Average ±Rp8,575,000,000/year
Maramis, Purba, Santi, Singara Lawfirm Sequis Center Lantai 7, Unit 706 Jl. Jenderal Sudirman Kav 71, Jakarta	2022-selesai / 2022 until completion	Legal Opinion Terkait Kontrak, Legal Opinion Terkait Regulasi, Pendampingan Proyek dan Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinion Regarding Regulations, Project Assistance and Legal Aid Assistance	Rata-rata ±Rp135.740.395,-/Tahun / Average ±Rp135,740,395/year
Dede Sri Astuti & Partner Hanurata Graha Lantai 2 Nomor 67-69 Jakarta	2022-selesai / 2022 until completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-rata ±Rp1.620.916.666,-/Tahun / Average ±Rp1,620,916,666/year
Ramlan & Partner Puri Radensa Blok A Nomor 03, Jalan Raden Saleh, Kec Sukmajaya, Depok	2022-selesai / 2022 until completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-rata ±Rp320.000.000,-/Tahun / Average ±Rp320,000,000/year
Forte Law Firm Menara Kuningan Lantai 30 B-C, Jalan H-R. Rasuna Said Kavling 5, Jakarta Selatan.	2022-selesai / 2022 until completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-rata ±Rp262.237.500,-/Tahun / Average ±Rp262,237,500/year



Wilayah Operasi, Jaringan Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan, Serta Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak, dan Entitas Asosiasi

Operational Area, Business Unit Network & Representative Offices, and the Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, and Associated Entities

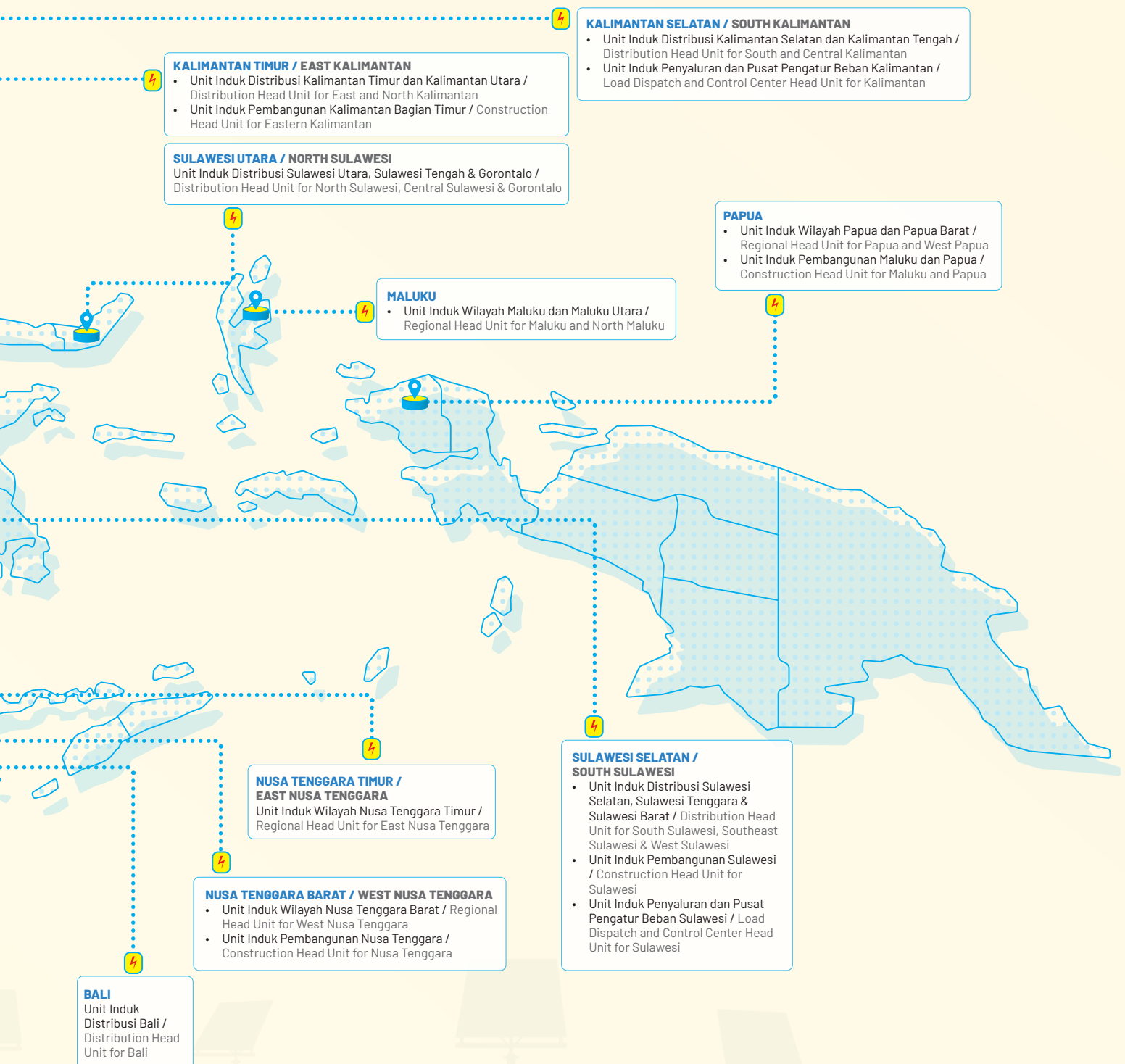


WILAYAH OPERASI

Perseroan membagi segmen operasi berdasarkan fungsinya yaitu Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis, Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan, Manajemen Pembangkitan, Transmisi dan Perencanaan Sistem, Distribusi, Retail dan Niaga, Keuangan, serta *Legal* dan Manajemen *Human Capital*. Penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

OPERATIONAL AREA

The Company classifies its operating segments based on their functions, namely Corporate Planning and Business Development, Project Management and Renewable Energy, Generation Management, Transmission and System Planning, Distribution, Retail and Commerce, Finance, and Legal and Human Capital Management, as follows:





Jaringan Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Business Unit Network and Representative Offices

JARINGAN UNIT BISNIS DAN KANTOR PERWAKILAN / BUSINESS UNIT NETWORK AND REPRESENTATIVE OFFICES

No.	Jenis Kantor / Type of Office	Alamat / Address
I.	PT PLN (Persero) Kantor Pusat / Head Office	Jl. Trunojoyo Blok M I -135, Jakarta 12160 Telp. : (021) 7261875; 7261122; 7262234; 7251234; 7250550 Fax : (021) 7221330; 7397150 E-mail : webmaster@pln.co.id Home page : www.pln.co.id
II.	PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan / Research and Development Center of PT PLN (Persero) ISO/IEC 17025:2005	Jl. Duren Tiga No. 102, Jakarta 12760 Telp. : (021) 7973774, 7980190, 7989982 (Hunting) 7991155 (GM) Fax : (021) 7991762, 7975414 E-mail : customercare@pln-litbang.co.id Home Page : www.pln-litbang.co.id Jwots : 13107,13109,13110,13111,13115,13121
III.	PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan / Education and Training Center of PT PLN (Persero)	Jl. HR. Harsono RM. No. 59, Ragunan - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Telp. : (021) 7811292, 7811293, 7800832, 7811368 (KPUSDIKLAT) Fax : (021) 7811294, 7811295 (Sekretaris KPUSDIKLAT) 7829263 (SDM) Website : http://pln-pusdiklat.co.id Vicon Ruang Meeting : 192.168.13.178
IV.	PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan / Electricity Maintenance Center of PT PLN (Persero)	Jl. Banten No. 10 Bandung 40272 Telp. : (022) 7236791-3 Fax : (022) 7236794 E-mail : pusharlis@pln.co.id Homepage : www.pln.co.id/pusharlis
V.	PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek / Project Management Center of PT PLN (Persero) ISO 9001:2000 LMK - KAN	Jl. Slamet No. 1, Gajah Mungkur, Semarang 50232 Telp. : (024) 8310060 Fax : (024) 8317241 E-mail : pusmankon@pln.co.id
VI.	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi / Certification Center of PT PLN (Persero) ISO 17021:2011	Jl. Laboratorium, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760 Telp. : (021) 7900034 Fax : (021) 7982034, 7992056, 7943450 Jwots : 15192, 15193, 15194, 1595 E-mail : niaga.pusertif@pln.co.id Homepage : www.pln.co.id/jaser Vicon : 192.168.1.154
VII. Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban / Transmission and Load Control Center		
1.	PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatra / Load Dispatch and Control Center Head Unit for Sumatera	Jl. Musyawarah/Nangka Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau 28233 Telp. : (0761) 6700011, 6700012 Fax : (0761) 6700015 E-mail : sekretariatp3bs@yahoo.co.id, p3bs@pln.co.id
2.	PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura dan Bali/ Java, Madura, and Bali Load Control Center Head Unit ISO 9001: 2000	Jl. JCC Cinere 16514, Jakarta Selatan Telp. : (021) 7542646, 7543566 Fax : (021) 7542516 E-mail : Sekr.p2b@gmail.com
3.	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat / Transmission Head Unit for Western Java	Jl. JCC, Krukut Limo Cinere, Jakarta Selatan 16514 Telp. : (021) 7543566 Fax : (021) 7542380
4.	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah / Transmission Head Unit for Central Java	Jl. Moch. Toha Km. 4 Komplek PLN Cigereleng, Bandung 40255 Telp. : (022) 5201723 Fax : (022) 5220214 E-mail : sekretariat.tjbt@gmail.com; sekr.induk@pln.co.id
5.	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali / Transmission Head Unit for Eastern Java and Bali	Jl. Suningrat No. 45 Taman, Sidoarjo, Surabaya 61257 Telp. : (031) 7882113, 7882114 Fax : (031) 7882578, 7883266 E-mail : tjbtb1@pln.co.id
6.	PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan / Load Dispatch and Control Center Head Unit	Jl. Panglima Batur Barat No. 1, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70711 Telp. : (0511) 4772520, 4772633, 4772261 Fax : (0511) 4773283 E-mail : plnkitlur@pln.co.id

Jaringan Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Business Unit Network and Representative Offices

No.	Jenis Kantor / Type of Office	Alamat / Address
7.	PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sulawesi / Load Dispatch and Control Center Head Unit for Sulawesi	Jl. Letjen Hertasning Blok B Panakukkang, Makassar 90222 Telp. : (0411) 444488 Fax : (0411) 440888
VIII. Kantor Wilayah / Regional Offices		
1	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung / Regional Head Unit for Bangka Belitung	Jl. Soekarno Hatta KM 5 Pangkalpinang 33171, Bangka Belitung Telp. : (0717) 439300 (Hunting) Fax : (0717) 439600 E-mail : wbabel@pln.co.id
2	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara / Regional Head Unit for Maluku and North Maluku	Jl. Diponegoro No. 2, Ambon 97127 Telp. : (0911) 311810, 347766, 354696 Fax : (0911) 310910 E-mail : plnwilmaluku@plnmmu.co.id
3	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat / Regional Head Unit for Papua and West Papua	Jl. Ahmad Yani No. 18, Jayapura 99111 Telp. : (0967) 533891, 533981, 536637 Fax : (0967) 534694 E-mail : wilpapua@pln.co.id
4	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat / Regional Head Unit for West Nusa Tenggara	Jl. Langko No. 25-27 Ampenan Mataram 83114 Telp. : (0370) 643123 Fax : (0370) 648692 E-mail : sekretariat.ntb@pln.co.id
5	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur / Regional Head Unit for East Nusa Tenggara	Jl. Piet A. Tallo No. 101, Kupang 85228 Telp. : (0380) 8554005 (Hunting) Fax : (0380) 8554010 E-mail : ntt@pln.co.id Website : http://www.pln.co.id/ntt
IX. Kantor Distribusi / Distribution Units		
1	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur / Distribution Head Unit for East Java	Jl. Embong Trengguli No. 19 - 21 Surabaya 60271 Telp. : (031) 5340651 - 5340655 Fax : (031) 5310057 Jwots : 71016 -18 Hunting E-mail : moch.sulatyo@pln.co.id Website : www.pln-jatim.co.id
2	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Distribution Head Unit for Central Java and D.I Yogyakarta	Jl. Teuku Umar No. 47, Semarang Telp. : (024) 8411991 (hunting) Fax : (024) 8412268 E-mail : plnjatengdiy@pln.co.id Website : www.plnjateng.co.id E-mail : plnubd@plnjateng.co.id
3	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat / Distribution Head Unit for West Java	Jl. Asia Afrika No. 63, Bandung 40111 Telp. : (022) 4230747 (hunting), 4206287 (GM) Fax : (022) 4230822, 4207114 Jwots : 30995 E-mail : info.djbb@pln.co.id
4	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten / Distribution Head Unit for Banten	Jl. Jendral Sudirman No. 1, Tangerang 15118 Telp. : (021) 5526716, 5526717 Fax : (021) 5526721 E-mail : disbanten@pln.co.id
5	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya / Distribution Head Unit for Jakarta Raya ISO 9001: 2008	Jl. M. I. Ridwan Rais No. 1, Jakarta 10110 Telp. : (021) 3454000, 3455000 Fax : (021) 3456694 E-mail : humasjaya@pln.co.id
6	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali / Distribution Head Unit for Bali ISO 9001: 2000	Jl. Letda Tantular No. 1 Renon, Denpasar 80234 Telp. : (0361) 221960 s.d 221968, 221957 Fax : (0361) 227101



Jaringan Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Business Unit Network and Representative Offices

No.	Jenis Kantor / Type of Office	Alamat / Address
7	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung / Distribution Head Unit for Lampung ISO 9001: 2008	Jl. Z.A. Pagar Alam No. 05 Rajabasa, Bandar Lampung 35144 Telp. : (0721) 774868 Fax : (0721) 780247 E-mail : kanwil.lampung@pln.co.id
8	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh / Distribution Head Unit for Aceh	Jl. H. Mohd. Tgk. Daud Bereueh No. 172 Lampriet, Banda Aceh, Aceh 23243 Telp. : (0651) 22188 (Hunting 8 Saluran) Fax : (0651) 21516 E-mail : sekretariat.wa@pln.co.id
9	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara / Distribution Head Unit for North Sumatera	Jl. K.L. Yos Sudarso No. 284, Medan 20115 Telp. : (061) 6615155 Fax : (061) 6613789 E-mail : plnsumut@plnwill.co.id
10	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatra Barat / Distribution Head Unit for West Sumatra	Jl. Dr. Wahidin No. 8, Padang 25121 Telp. : (0751) 33446 Fax : (0751) 29540, 31564 E-mail : PLN W3@indosat.net..id
11	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau / Distribution Head Unit for Riau and Riau Islands	Jl. Musyawarah RT. 01 RW. 09, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, Riau 28295 Telp. : (0761) 855840, 855841, 853737, 855309 Fax : (0761) 855310 E-mail : wrkr@pln.co.id
12	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu / Distribution Head Unit for South Sumatera, Jambi and Bengkulu	Jl. Kapten A. Rivai No. 37, Palembang 30129 Telp. : (0711) 358355, 358804, 358859, 313217 (GM) Fax : (0711) 310376, 356759 (GM) E-mail : gmws2jb@plnpalembang.co.id Website : http://www.plnpalembang.co.id
13	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat / Distribution Head Unit for West Kalimantan	Jl. Adi Sucipto Km 7,3 Sei Raya Pontianak, Kalimantan Barat 78391 Telp. : (0561) 722037 Fax : (0561) 721395 E-mail : kalbar@pln.co.id
14	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah / Distribution Head Unit for South Kalimantan and Central Kalimantan	Jl. Panglima Batur Barat No. 1, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70711 Telp. : (0511) 4772520, 4774342, 4772261 Fax : (0511) 4772442 E-mail : humas.kalseteng@pln.co.id
15	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara / Distribution Head Unit for East Kalimantan dan North Kalimantan	Jl. MT. Haryono No. 384, Balikpapan 76114 Telp. : (0542) 871840 (Hunting) Fax : (0542) 876130 E-mail : kaltimra@pln.co.id
16	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo / Distribution Head Unit for North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo	Jl. Bethesda No. 32, Manado 95116 Telp. : (0431) 863644, 865651, 862444 (GM) Fax : (0431) 863660, 862360 E-mail : gmsutg@pln.co.id
17	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat / Distribution Head Unit for South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi	Jl. Letjend Hertasning Blok B, Kotak Pos 1206, Panakukang, Makassar 90222 Telp. : (0411) 457155, 457157 Fax : (0411) 444800
X. Pembangkitan dan Penyaluran / Generation and Transmission Units		
1	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B / Generation Head Unit for Tanjung Jati B	Desa Tubanan, Kec Kembang Kab. Jepara, Jawa Tengah 59453 Telp. : (0291) 772121, 772123, 772124 Fax : (0291) 772125 E-mail : tanjungjatib@pln.co.id

Jaringan Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Business Unit Network and Representative Offices

No.	Jenis Kantor / Type of Office	Alamat / Address
XI. Unit Induk Pembangunan / Construction Parent Units		
1	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara / Construction Head Unit for North Sumatera	Jl. Dr. Cipto No. 12, Medan 20152 Telp. : (061) 4144151, 4144152 Fax : (061) 4144153 E-mail : sekrtr.gm@pikitringsuar.co.id
2	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah / Construction Head Unit for Central Sumatera	Komplek Citra Garden Blok R1 No. 7 -11 dan R2 No. 1 - 3 Jl. Purwodadi Panam, Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, RIAU 28294 Telp. : (0761) 6704881 Fax : (0761) 6704882 E-mail : uipsumbagteng@gmail.com
3	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan / Construction Head Unit for South Sumatera	Jl. Residen A. Rozak No. 2180 Sekojo, Palembang 30118 Telp. : (0711) 719103 s.d 719109 Fax : (0711) 719102 E-mail : info@uipring-Sumatra2.co.id
4	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat / Construction Head Unit for West Java	Jl. Ehave-Gandul Kel. Gandul Kec. Cinere, Depok 16514 Telp. : (021) 7535500, 7548461, 7548467 Fax : (021) 7535599
5	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah / Construction Head Unit for Central Java	Jl. Karawitan No. 32, Turangga, Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat 40264 Telp. : (022) 7320595 Fax : (022) 7320596 E-mail : sekretariatuiplibt1@gmail.com
6	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali / Construction Head Unit for East Java and Bali	Jl. Ketintang Baru I No. 1-3 Surabaya 60231 Telp. : (031) 8281200 Fax : (031) 8280214 E-mail : sekre.uip7@pln.co.id; sekretariat.uip7@gmail.com
7	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur / Construction Head Unit for East Kalimantan	Jl. MT. Haryono No. 384, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114 Telp. : (0542) 871559 Fax : (0542) 871558, 871565 E-mail : plnuipkalbagtim@pln.co.id
8	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat / Construction Head Unit for West Kalimantan	Jl. Letjen Suprpto No. 50 G, Pontianak, Kalimantan Barat 78121 Telp. : (0561) 762580 Fax : (0561) 762579 E-mail : uip.kalimantan.barat@gmail.com
9	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara / Construction Head Unit for Nusa Tenggara	Jl. Yos Sudarso No. 2A, Mataram 83114 Telp. : (0370) 621732, 621733 Fax : (0370) 621734 E-mail : pln@uip-nusra.co.id
10	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi / Construction Head Unit for Sulawesi	Jl. Letjend. Hertasning, Panakkukang, Makassar 90222 Telp. : (0411) 852519 Fax : (0411) 444339 E-mail : pln.uipsulbagsel@pln.co.id
11	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku Dan Papua / Construction Head Unit for Maluku and Papua	Jl. Baru Kotaraja, Kelurahan Wai Mhorock, Kecamatan Abepura Jayapura, Papua 99225 Telp. : (0967) 587773, 5180157, 581740 Fax : (0967) 581740 E-mail : plnuippapua@pln.co.id



Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures



ENTITAS ANAK / SUBSIDIARIES

Entitas Anak – Kepemilikan Langsung / Subsidiaries – Direct Ownership

PT Indonesia Power

Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12950

PT PLN Nusantara Power (dahulu bernama PT Pembangkitan Jawa Bali) / PT PLN Nusantara Power (formerly known as PT Pembangkitan Jawa Bali)

Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya 60231

PT Indonesia Comnets Plus

Kawasan PLN Cawang, Jl. Mayjend Sutoyo No. 1, Cililitan, Jakarta Timur 13640

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

Jl. Ciputat Raya No. 123, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta 12310

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

Jl. Engku Putri No. 3, Batam Centre, Batam 29432

PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan

Jl. MT Haryono, Komplek Balikpapan Baru Blok A5 No.1-5, Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

PT PLN Energi Primer Indonesia (dahulu bernama PT PLN Batubara) / PT Energi Primer Indonesia (formerly known as PT PLN Batubara)

Jl. Warung Buncit Raya No. 10 RT 011/009, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740

PT PLN Gas dan Geothermal

Gedung KMO (Kyai Maja Office) Tower Lantai 8, Jl. Kyai Maja Office No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Majapahit Holding BV

Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, The Netherlands

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

Jl. Kalibesar Timur No. 10-12, Jakarta Barat 11110

PT Haleyora Power

Kindo Square, Blok A15-16, Jl. Duren Tiga Raya No. 101, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta 12760

PT Energy Management Indonesia

Gedung Graha Pura Lantai 3, Jl. Pancoran Indah I No. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, 12780

PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara

Gedung Sentral Senayan II, Jl. Asia Afrika No. 8, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat

ENTITAS AFILIASI ANAK / AFFILIATED ENTITIES OF SUBSIDIARIES

Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Indonesia Power / Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Indonesia Power

PT Cogindo Daya Bersama

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Lantai 9, Jakarta

PT Artha Daya Coalindo

Centennial Tower Lt. 19, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12950

Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures



ENTITAS AFILIASI ANAK / AFFILIATED ENTITIES OF SUBSIDIARIES

PT Indo Ridlatama Power

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 1, Jakarta Selatan 12950

PT Indo Tenaga Hijau

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 1, Jakarta Selatan

PT Putra Indo Tenaga

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 1, Jakarta Selatan 12950

PT Suralaya Indo Tenaga

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 2, Jakarta Selatan

PT Putra Suralaya Indotenaga

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 2, Jakarta Selatan

Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT PLN Nusantara Power (dahulu bernama PT Pembangunan Jawa Bali) / Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT PLN Nusantara Power (formerly known as PT Pembangunan Jawa Bali)
PT PJB Services

Jl. Raya Juanda No. 17, Sidoarjo 61253

PT Rekadaya ElektriKA

Gedung 18 Office Park, Jl. TB Simatupang No.18, Kebagusan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

PT Navigat Innovative Indonesia

Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya 60231

PT PJB Investasi

Menara Bidakara Tower 2 Lt. 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 12870

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang

Recapital Building Lt. 3, Jl. Adityawarman No. 55, Jakarta Selatan 12160

PT Prima Power Nusantara

Menara Enjiniring Lt. 7, Jl. Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

PT Mitra Karya Prima

Ruko Juanda Business Centre Blok A Nomor 4 – 6, Jalan Raya Juanda Nomor 1 Sidoarjo

PT PJB Investindo

Menara Bidakara 2, Lt. 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan 12870

PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata

Menara Bidakara 2, Lt. 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan 12870

Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Pelayanan Listrik Nasional Batam / Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
PT Pelayanan Energi Batam

Graha Energi Batam, Jl. Brigjen Katamso 8, Kampung Taroka – Tanjung Uncang – Batam



Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

ENTITAS AFILIASI ANAK / AFFILIATED ENTITIES OF SUBSIDIARIES

Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Prima Layanan Nasional Enjiniring / Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

PT Rekadaya ElektriKA Consult

Wisma BNI 46 Lt. 17, BNI City, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Pusat

Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Majapahit Holding B.V. (MH) / Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through Majapahit Holding B.V. (MH)

Majapahit Finance B.V. (MF)

Herikerbergweg 88 1101 CM, Amsterdam, The Netherlands

Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Haleyora Power / Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Haleyora Power

PT Haleyora Powerindo (HPI)

Jl. Kyai Tapa No. 216, Jakarta Barat

Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT PLN Energi Primer Indonesia (dahulu bernama PT PLN Batubara) / Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Energi Primer Indonesia (formerly known as PT PLN Batubara)

PT Jambi Prima Coal

Komp. Citra Land NGK B-07, Walk Plaza AlegroMayang Mangurai, Kota Baru, Jambi 36129

PT PLNBB Investasi

Jl. Warung Buncit Raya No 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740

PT PLNBB Niaga

Jl. Warung Buncit Raya No 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan) / Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan)

PT Paguntaka Cahaya Nusantara

Jl. RE Martadinata RT. 52 No. 35, Balikpapan, Kalimantan Timur 76121

Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Pelayaran Bahtera Adhiguna / Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

PT Adhi Guna Putera

Jl. Kartini VII No. 2, RT 010/RW 004, Kartini, Sawah Besar, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10750

Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Energy Management Indonesia / Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Energy Management Indonesia

PT Energi Biomassa Indonesia

Gedung Graha Pura Lantai 3, Jl. Pancoran Indah I No. 52, Pancoran, Jakarta Selatan - 12780

PT Energi Bangun Indonesia

Graha Pratama Building Lantai 12
Jl. M.T. Haryono Lantai 12, Jakarta Selatan

ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA, DAN SPECIAL PURPOSE VEHICLES (SPV) / ASSOCIATES, JOINT VENTURES, AND SPECIAL PURPOSE VEHICLES (SPV)

Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama – Kepemilikan Langsung / Associates and Joint Ventures – Direct Ownership

PT Geo Dipa Energi

Gedung Aldevco Octagon Lantai 5, Jl. Warung Jati Barat raya No. 75, Jakarta Selatan 12740

PT Unelec Indonesia

Jl. Swadaya PLN Klender, RT.9/RW.2, Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13930

Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan SPV – Kepemilikan Tidak Langsung / Associates, Joint Ventures, and SPV – Indirect Ownership

PT Mitra Energi Batam

Jl. Lintas Gas Negara Trans Bareleng KM 3,5 Panaran, Tembesi-Batu Aji, Batam 29438

PT Indo Pusaka Berau

Jalan Pemuda No. 356, Tanjung Redeb, Berau Kalimantan Timur 77311

Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA, DAN SPECIAL PURPOSE VEHICLES (SPV) / ASSOCIATES, JOINT VENTURES, AND SPECIAL PURPOSE VEHICLES (SPV)

PT Sumber Segara Primadaya

Gedung Treasury Tower, 39th Fl. SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

PT Dalle Energy Batam

Jl. Lintas Gas Negara Trans Barelang KM 3,5 Panaran, Tembesi-Batu Aji, Batam 29438

PT Tanjung Kasam Power

Jl. Pattimura, Sei. Kasam RT/RW 003/002, Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Batam 29467

PT Energi Pelabuhan Indonesia

Jl. Yos Sudarso No.30, RT.19/RW.5, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PT PBM Adhiguna Putra

Jl. Kartini VII No. 2 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat

PT Bajradaya Sentranusa

Jl. Wijaya III No.5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali

PLTU Tanjung Jati B Jawa Bali Unit 3 & 4, Desa Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Jawa Tengah

PT Perta Daya Gas

Komplek Pelabuhan Tanjung Emas, Jl. Ronggo Warsito No.1 Semarang, Jawa Tengah

PT Bukit Pembangkit Innovative

Jl. Lintas Sumatra, Muara Enim-Lahat, Desa Gunung Kembang, Kec. Merapi Timur, Kab. Lahat, Sumatra Selatan

PT Crompton Power Switchgear Indonesia

Jl. Wijaya I No. 61, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170

PT Rajamandala Electric Power

PLTA Rajamandala
Jl. PLTA Rajamandala, Kp. Bantarcaringin, Desa Cihea, RT. 4/RW. 10, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

PT Rekind Daya Mamuju

Gedung Nucira Lantai 4, Jl. MT Haryono Kav. 27 Jakarta 12820

PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali

Desa Kramatwatu, Kec. Bojonegara, Kab. Serang, Banten

PT GCL Indotenaga

PLTU Kalbar-1, Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat

PT Sumbagselenergi Sakti Pewali

KYK Building, Jl. Cideng Barat No. 32-33, Jakarta Pusat

PT North Sumatra Hydro Energy

Jl. Prapanca Raya, No. 16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali

APL Tower, Lantai 39, Unit D1, Jl. Letjend. S Parman, Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

PT Sriwijaya Bara Logistik

Jl. Kemang Raya No 43, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730

PT Indo Raya Tenaga

PLTU Jawa 9-10, Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Suralaya Merak, Cilegon, Banten

PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi

WTC 3 Lantai 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Pusat

PT Musi Mitra Jaya

Jl. Kemang Raya No 43, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730

PT Maxpower Cogindo Batam

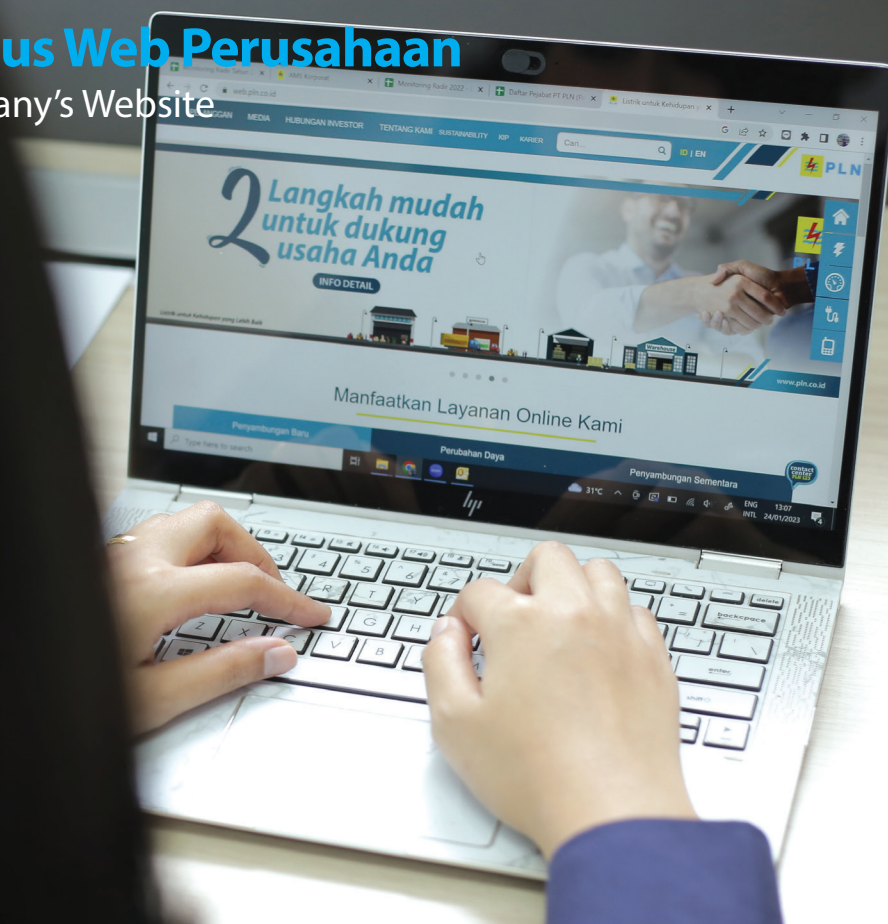
PLTMG 30 MW Baloi
Jl. Jendral Sudirman, kompleks PLN Batam GI Sei Baloi, Batam

PT Industri Baterai Indonesia

Treasury Tower, Lantai 51
SCBD Lot-28, Jl. Jenderal Soedirman Kav. 52-52, Jakarta Selatan

Informasi Pada Situs Web Perusahaan

Information on the Company's Website



Perseroan menerapkan prinsip transparansi sesuai praktik terbaik *Good Corporate Governance* (GCG), termasuk standar penerapan yang terdapat pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Penerapan standar tersebut antara lain terwujud melalui akses informasi pada situs web resmi Perseroan, yaitu pada alamat <https://web.pln.co.id/>, yang telah memuat 4 (empat) bagian utama sebagai berikut:

1. Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi pemodal atau investor;
3. Informasi tata kelola perusahaan; dan
4. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Perseroan melakukan pemutakhiran terhadap informasi yang tersedia pada situs web tersebut secara berkala, sebagai upaya dalam menjaga muatan situs web bersifat akurat sesuai perkembangan terkini Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah memastikan seluruh informasi yang terdapat di dalamnya dapat diakses secara mudah oleh pemangku kepentingan Perseroan, antara lain melalui penyampaian secara dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.

The Company applies the principle of transparency in accordance with the best practices of *Good Corporate Governance* (GCG), including the implementation standards contained in OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Issuer or Public Company Websites OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines. The implementation of these standards, among others, is realized through access to information on the Company's official website, namely at the address <https://web.pln.co.id/>, which contains 4 (four) main sections as follows:

1. General information of the Issuer or Public Company;
2. Information for investors;
3. Corporate governance information; and
4. Corporate social responsibility information.

The Company regularly updates the information available on the website to keep the website content accurate according to the Company's latest developments. In addition, the Company has also ensured that all the information contained in it can be accessed easily by the Company's stakeholders, including through bilingual delivery, namely Indonesian language and English.

Informasi Pada Situs Web Perusahaan Information on the Company's Website

Secara mendasar, muatan situs web Perseroan terdiri atas sejumlah pokok informasi sebagai berikut:

1. Informasi terkait Pelanggan: Layanan Online, Listrik Pintar, Tarif Tenaga Listrik, Q&A Tarif Listrik, Uang Jaminan Langganan, Informasi P2TL, Kompensasi, Informasi Tagihan dan Token Listrik, dan Stimulus Covid-19.
2. Informasi terkait Hubungan Investor: Informasi Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Statistik, Informasi Saham, Informasi RUPS, Informasi Dividen, Informasi Obligasi, Informasi Prospektus, Peringkat Utang, Informasi Penunjang Pasar Modal, Informasi Investor, Informasi Fakta Material, *Independent Power Producers*, dan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Informasi tentang Media: Siaran Pers, Warta PLN, Program 35.000 MW, Video, *Journalist Award*, Inovasi dan Penghargaan.
4. Informasi terkait Profil Perusahaan (Tentang Kami): Profil Perusahaan, *Good Corporate Governance*, Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi, Anak Perusahaan, Buku Saku Covid-19 PLN, Pedoman Perilaku, *Whistleblower's System*, Ekspedisi Papua Terang, LHKPN Dewan Komisaris dan Direksi, Program Pengendalian Gratifikasi, LHKPN, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, *Workshop* Penggunaan Listrik yang Aman dan Produktif, dan Tata Nilai Manajemen Risiko.
5. Informasi tentang Program PLN Peduli: PLN Peduli, *Corporate Social Responsibility*, Laporan PKBL & CSR, dan Video PLN Peduli.
6. Informasi tentang Keterbukaan Informasi Perusahaan (KIP), yang terhubung ke alamat domain KIP, yaitu eppid.pln.co.id. Layanan ini merupakan sarana layanan *online* bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PLN.
7. Informasi terkait Karier: Informasi Rekrutmen PLN, Pendaftaran, dan Pengumuman *Test*.

Lebih dari itu, situs web Perseroan juga memuat informasi-informasi lain yang relevan dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan, khususnya terkait bidang ketenagalistrikan serta bisnis Perseroan.

Fundamentally, the contents of the Company's website consist of a number of key information as follows:

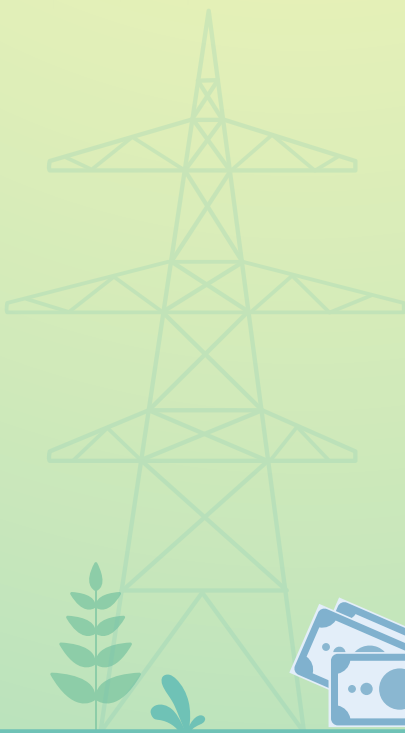
1. Information on Customers: Online Services, PLN Promotions, Smart Electricity, Electricity Tariffs, Electricity Tariffs Q&A, Customer Security Deposits, P2TL Information, Compensation, Electricity Bills and Token Information, and Covid-19 Stimulus.
2. Information on Investor Relations: Financial Information, Annual Report, Sustainability Report, Statistical Report, Stock Information, GMS Information, Dividend Information, Bond Information, Prospectus Information, Debt Rating, Capital Market Supporting Information, Investor Information, Material Fact Information, *Independent Power Producers*, and Procurement of Goods/Services.
3. Information on the media: press releases, PLN news, 35,000 MW Program, Video, *Journalist Award*, Innovation and Awards.
4. Information on company profile (About Us): Company Profile, *Good Corporate Governance*, Organizational Structure, Board of Commissioners, Directors, Subsidiaries, PLN Covid-19 Pocket Book, Code of Conduct, *Whistleblower's System*, Bright Papua Expedition, LHKPN Board of Commissioners and Directors, Gratification Control Program, LHKPN, Anti Bribery Management System, *Workshop* on Safe and Productive Use of Electricity, and Risk Management Values.
5. Information on PLN Peduli Program: PLN Peduli, *Corporate Social Responsibility*, PKBL & CSR Reports, and PLN Peduli Videos.
6. Information on Corporate Information Disclosure (KIP), which is linked to KIP's domain address, namely eppid.pln.co.id. This service is an online service facility for applicants for public information as a form of implementing public information disclosure at PLN.
7. Career-related information: PLN Recruitment Information, Registration, and Test Announcements.

In addition, the Company's website also contains other relevant and useful information for stakeholders, particularly related to the electricity sector and the Company's business.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and
Analysis

04







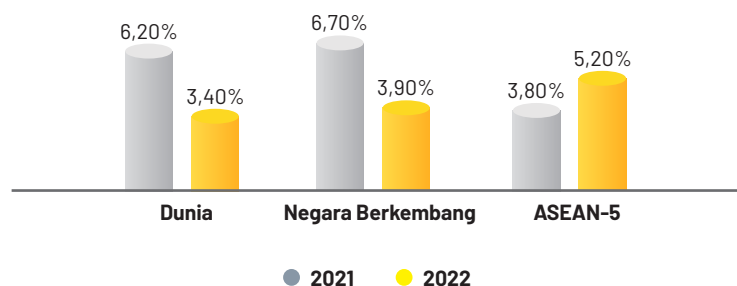
KONDISI EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN DUNIA

Secara kumulatif, realisasi pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2022 diestimasikan menurun dibanding tahun 2021. Mengacu pada dokumen *World Economic Outlook* International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2023, Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 diestimasikan terealisasi sebesar 3,4% atau menurun dibanding pertumbuhan di tahun 2021 yang 6,2%. Pada estimasi tersebut, kelompok negara ekonomi berkembang diestimasikan tumbuh 3,9% atau menurun dibanding tahun 2021 yang 6,7%, sedangkan kelompok ekonomi maju diestimasikan tumbuh 2,7%, atau menurun dibanding tahun 2021 yang 5,4%. Adapun, kelompok negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore & Thailand) diestimasikan tumbuh 1,4% lebih tinggi dibanding tahun 2021, yaitu sebesar 5,2% pada 2022 dibanding 3,8% pada 2021.

MACROECONOMIC CONDITIONS AND GLOBAL ELECTRICITY INDUSTRY

Cumulatively, world economic growth for 2022 was estimated to decrease compared to 2021. Referring to the January 2023 edition of the *World Economic Outlook* document from International Monetary Fund (IMF), world economic growth in 2022 was estimated to be realized at 3.4% or decreased compared to growth in 2021 at 6.2%. In this estimation, the developing economy group is estimated to grow 3.9%, or a decrease compared to 2021 at 6.7%, while the advanced economic group is estimated to grow 2.7%, or a decrease compared to 2021 at 5.4%. Meanwhile, the ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore & Thailand) group countries are estimated to grow 1.4% higher than in 2021, namely 5.2% in 2022 compared to 3.8% in 2021.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi 2021-2022



Comparison of Economic Growth in 2021-2022

Sumber: International Monetary Fund (*World Economic Outlook 2022*, Januari 2023)

Source: International Monetary Fund (*World Economic Outlook 2022*, January 2023)

Peristiwa yang berdampak signifikan terhadap situasi ekonomi makrodunia, invasi Rusia atas Ukraina, menyebabkan adanya gangguan terhadap stabilitas situasi ekonomi karena gangguan rantai pasok serta inflasi mengalami kenaikan di tengah pertumbuhan yang rendah, khususnya bagi negara-negara Eropa dan negara-negara berpenghasilan rendah. Negara-negara Eropa menghadapi penurunan ketersediaan pasokan gas, yang membuat permintaan terhadap batu bara meningkat. Di samping itu, terdapat dampak lain berupa meningkatnya harga komoditas pangan, yang mengakibatkan tekanan pada negara-negara berpenghasilan rendah yang menjadi lebih rentan mengalami kerawanan pangan. Di sisi lain kenaikan suku bunga bank sentral beberapa negara untuk memerangi inflasi turut membebani aktivitas ekonomi yang menyebabkan kondisi pembiayaan lebih ketat.

Events that had a significant impact on the world macroeconomic situation, such as Russia's invasion of Ukraine, disturbed the stability of the economic situation due to supply chain disruptions and increased inflation amid low growth, especially for European countries and low-income countries. European countries faced a decrease in the availability of gas supplies, which increase demand for coal. Moreover, there was another impact in the form of rising food commodity prices, which put pressure on low-income countries which are more vulnerable to experiencing food insecurity. On the other hand, the increase in interest rates by the central banks of several countries to combat inflation also weighed on economic activity, causing tighter financing conditions.

Meski demikian, konflik geopolitik di kawasan Eropa Timur telah memicu dorongan untuk mempercepat peralihan penggunaan minyak dan gas menuju sumber-sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal tersebut antara lain dapat diketahui melalui proyeksi oleh *British Petroleum Integrated Supply and Trading* (BP PIC) atas penurunan permintaan yang tajam terhadap bahan bakar fosil hingga tahun 2035, setelah peristiwa invasi Rusia. *International Energy Agency* (IEA) dalam *World Energy Outlook 2022* mengungkapkan bahwa gangguan pada sektor energi menghadirkan peluang pertumbuhan dan lapangan usaha atas penggunaan sumber-sumber energi bersih, yang tercermin melalui dukungan kebijakan oleh sejumlah negara mencakup Jepang, Korea, dan India. Salah satunya melalui *Japan's Green Transformation Programme*, inisiatif yang digagas Pemerintah Jepang untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan percepatan transisi energi bersih.

However, geopolitical conflicts in the Eastern European region have sparked a push to accelerate the shift from oil and gas to New and Renewable Energy (EBT) sources. This can be seen, among others, through projections by the *British Petroleum Integrated Supply and Trading* (BP PIC) for a sharp decline in demand for fossil fuels until 2035, after the Russian invasion. The *International Energy Agency* (IEA) in the *World Energy Outlook 2022* reveals that disruptions to the energy sector present growth opportunities and business fields for the use of clean energy sources, which is reflected through policy support by a number of countries including Japan, Korea, and India. One of them is through *Japan's Green Transformation Programme*, an initiative initiated by Japanese Government to promote sustainable economic growth by reducing greenhouse gas emissions and accelerating the clean energy transition.

Terkait hal tersebut, selama 2022, sejumlah negara mengumumkan kebijakan ataupun perubahan kebijakan terkait penyediaan energi listrik, dengan beberapa contoh sebagai berikut:

In this regard, throughout 2022, a number of countries announced policies or changes in policy related to the supply of electrical energy, with some examples which can be seen in the following table:

Perubahan Kebijakan dan Kebijakan Baru Terkait Penyediaan Energi Listrik Tahun 2022

Changes in Policy and New Policies Regarding the Provision of Electrical Energy in 2022

	Perubahan Kebijakan / Changes in Policy	Otoritas yang Mengeluarkan / Issuing Authority
Uni Eropa / European Union	Phase out coal-fired power plants in Czech Republic, Slovenia and Romania (emergency law)	Sejumlah pemerintah (Januari dan Juni 2022) / Governments (January and June 2022)
Amerika Serikat / United States	<ul style="list-style-type: none"> Inflation Reduction Act provides funding for energy and climate programmes, including expanding and extending tax credits and incentives to promote clean energy technologies Five states updated their renewable portfolio standard policies 	Pemerintah Federal (Agustus 2022) / Federal Government (August 2022)
Tiongkok / China	New Plan for Renewable Energy Development: higher targets for renewables	Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (Juni 2022) / National Development and Reform Commission (June 2022)
	Kebijakan Baru / New Policy	Otoritas yang Mengeluarkan / Issuing Authority
Kelompok Negara G7 / G7 Countries	Achieve predominantly decarbonised electricity sectors by 2035	G7 Ministers of Climate, Energy and the Environment (Mei 2022)
Uni Eropa / European Union	Fit for 55: Council agrees on binding 40% EU-level target for renewables in overall energy mix	Dewan Uni Eropa (Juni 2022) / European Union Council (June 2022)
Bahrain, Indonesia, Nigeria, Saudi Arabia	Target net zero emissions pada 2060 / Net zero emissions target by 2060	Sejumlah pemerintah. / Several governments.
India	Target net zero emissions pada 2050 / Net zero emissions target by 2050	Perdana Menteri (November 2021) / Prime Minister (November 2021)

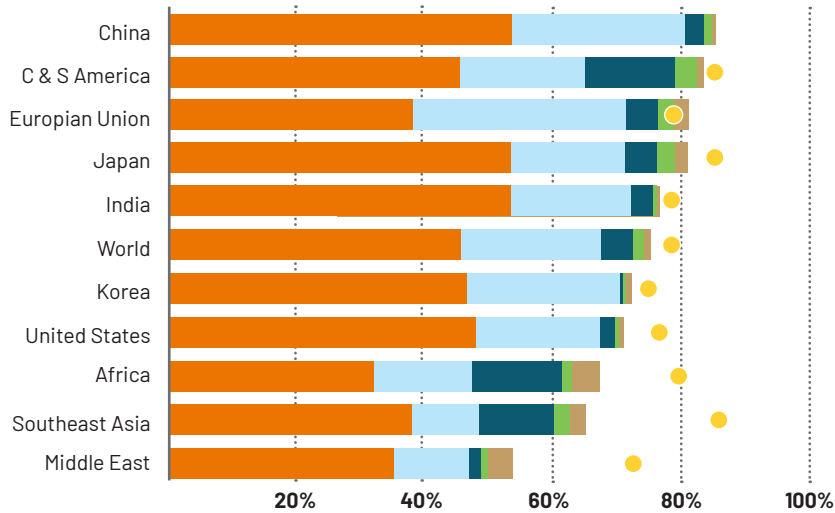
Sumber: International Energy Agency (World Energy Outlook 2022, November 2022)

Source: International Energy Agency (World Energy Outlook 2022, November 2022)

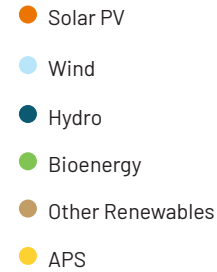
Komitmen yang lebih kuat dari sejumlah negara menuju penggunaan energi terbarukan juga dapat diketahui melalui proyeksi penambahan proporsi penggunaan sumber terbarukan di dalam *The Stated Policies Scenario* (STEPS), yang memperlihatkan pertumbuhan secara masif atas penggunaan *Solar PV* dan tenaga angin. Hal tersebut dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut:

Stronger commitment from a number of countries towards the use of renewable energy can also be seen through the projected increase in the proportion of the use of renewable sources in *The Stated Policies Scenario* (STEPS), which shows massive growth in the use of *Solar PV* and wind power. This can be seen in the following chart:

Bauran EBT dalam Total Tambahan Kapasitas Pembangkit berdasarkan Kawasan dalam STEPS, 2022-2050



Share of renewables in total power capacity additions by region in the STEPS, 2022-2050



Sumber: International Energy Agency (*World Energy Outlook 2022*, November 2022)

Source: International Energy Agency (*World Energy Outlook 2022*, November 2022)

Selama 2022, sistem penyediaan energi listrik pada lingkup dunia mengalami sejumlah tantangan khususnya terkait aspek keterjangkauan biaya. IEA mengestimasi kondisi pasar dan gangguan sektor energi yang terjadi di tahun 2022 telah meningkatkan biaya penyediaan energi listrik global hingga 30%. Hal tersebut secara dominan merupakan akibat dari peningkatan harga gas bumi. Di samping itu, adanya peningkatan biaya penyediaan energi listrik juga merefleksikan peningkatan harga komoditas lain, mencakup batu bara dan minyak bumi, yang diperburuk dengan penurunan ketersediaan energi nuklir dan *hydropower*.

Electric energy supply system experienced a number of challenges on a global scale throughout 2022, especially related to the affordability aspect. The IEA estimates that market conditions and energy sector disruptions that occurred in 2022 had increased the cost of global electricity provision by up to 30%. This was predominantly the result of an increase in natural gas prices. In addition, the increase in the cost of electricity provision also reflects the increase in the prices of other commodities, including coal and oil, which is exacerbated by the decrease in the availability of nuclear energy and *hydropower*.

KONDISI EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN INDONESIA

KONDISI EKONOMI MAKRO INDONESIA

Di tengah situasi tersebut, perekonomian Indonesia untuk tahun 2022 mampu merealisasikan pertumbuhan yang kuat, didukung kelanjutan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), penyaluran program vaksinasi, serta sejumlah kebijakan fiskal oleh regulator. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan kumulatif sebesar 5,31% di tahun 2022, atau melampaui target Pemerintah yang sebesar 5,20%. Pulau Jawa berkontribusi terhadap perekonomian tahun 2022 sebesar 56,48%, diikuti pulau Sumatra dan Kalimantan dengan kontribusi masing-masing sebesar 22,04% dan 9,23%.

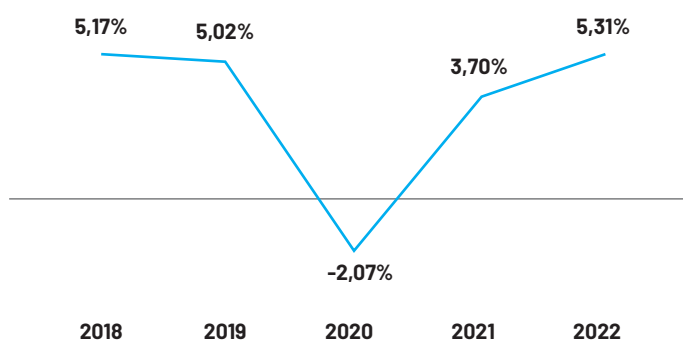
INDONESIAN MACROECONOMIC CONDITIONS AND THE ELECTRICITY INDUSTRY

INDONESIAN MACROECONOMIC CONDITIONS

Amid such situation, the Indonesian economy in 2022 managed to achieve strong growth, supported by the continuation of the Covid-19 Handling and National Economic Recovery (PC-PEN) program, distribution of vaccination programs, as well as a number of fiscal policies by the regulator. Referring to data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia was able to record a cumulative growth at 5.31% in 2022, or exceeded the Government's target of 5.20%. Java contributed 56.48% to the economy in 2022, followed by Sumatra and Kalimantan with contributions of 22.04% and 9.23%, respectively.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Indonesia's Economic Growth



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Source: Central Bureau of Statistics (BPS)

Lebih lanjut, situasi perekonomian Indonesia yang tumbuh secara kuat di tahun 2022 didorong oleh lonjakan komoditas global yang mengangkat ekspor dan surplus neraca perdagangan ke rekor tertinggi, penghapusan pembatasan kegiatan terkait pandemi, bauran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekspor nasional meningkat mencapai 16,28%. Sebagai kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2022 tercatat meningkat 4,93%, seiring pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 3,87% (yoy) dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 5,64% (yoy).

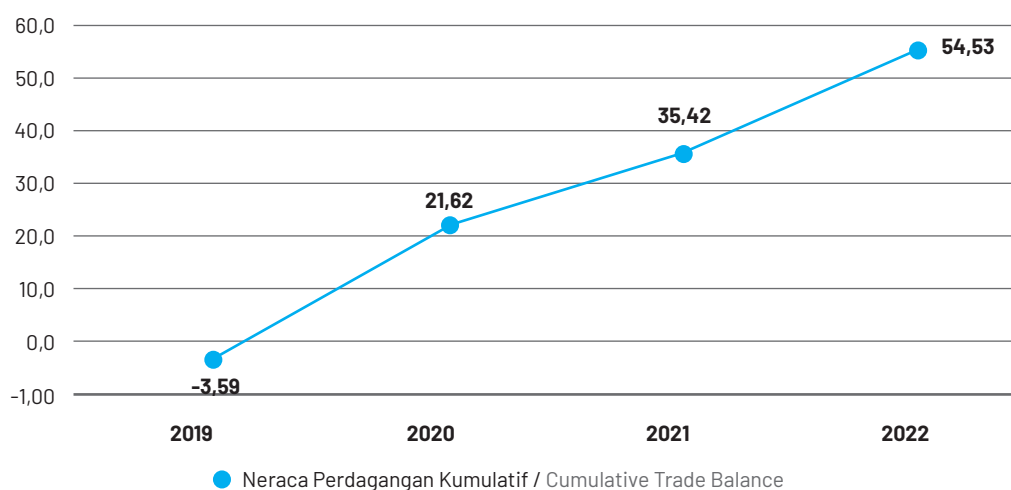
Furthermore, Indonesia's economic situation which grew strongly in 2022 was driven by a surge in global commodities that increased exports and trade balance surpluses to the highest record, the removal of restrictions on activities related to the pandemic, and a mix of fiscal and monetary policies so as to maintain people's purchasing power. National export growth increased to 16.28%. As the main contributor to Gross Domestic Product (GDP), household consumption growth in 2022 increased by 4.93%, in line with the growth of Gross Fixed Capital Formation (PMTB) of 3.87% (yoy) and the consumption of Non-Profit Institutions Serving Households (LNPRT) of 5.64% (yoy).

Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia tercatat berada pada posisi surplus 54,53 miliar USD pada tahun 2022, atau tumbuh mencapai 53,96% dibandingkan tahun 2021. Hal ini ditopang oleh ekspor komoditas unggulan yaitu batu bara. Atas realisasi tersebut, tren peningkatan neraca perdagangan Indonesia tahun 2019-2022 dapat dilihat melalui grafik berikut.

Cumulatively, Indonesia's trade balance recorded a surplus of USD54.53 billion in 2022, or grew to 53.96% compared to 2021. This was supported by exports of superior commodities, namely coal. Based on this realization, the trend of increasing Indonesia's trade balance for 2019-2022 can be seen in the following chart.

Neraca Perdagangan Indonesia 2019-2022

Indonesia Trade Balance in 2019-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (Berita Resmi Statistik, 6 Februari 2023)

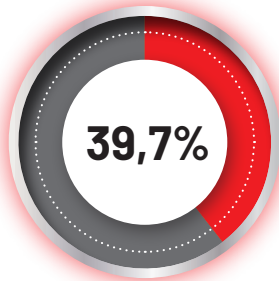
Source: Statistics Indonesia (Official Statistical News, February 6, 2023)

Mengacu pada informasi Kementerian Keuangan RI, APBN tahun 2022 secara umum disiapkan guna melanjutkan dukungan terhadap program PC-PEN, dengan kebijakan fiskal berupa dukungan vaksinasi, perawatan pasien, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat. Selama 2022, APBN berperan penting sebagai instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat, mendukung gerak dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara kumulatif, realisasi belanja negara tahun 2022 tercatat tumbuh 10,92% (yoy) dan memenuhi 99,55% dibanding pagu anggaran.

Referring to information from the Indonesian Ministry of Finance, the 2022 State Budget was generally prepared to continue support for the PC-PEN program, with fiscal policies in the form of vaccination support, patient care, and social protection for the community. Throughout 2022, the APBN plays an important role as a stabilizing instrument in protecting the public, supporting the movement of the business world and priority sectors, and encouraging economic growth. Cumulatively, the realization of state expenditure in 2022 grew 10.92% (yoy) and fulfilled 99.55% compared to the budget ceiling.

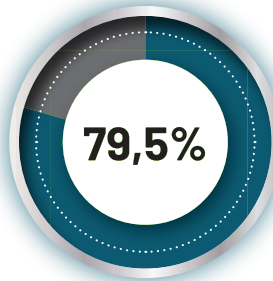
Sampai dengan 18 November 2022, Pemerintah telah merealisasikan penyaluran program PC-PEN sejumlah Rp280,7 triliun, atau mencapai 61,61% dari pagu anggaran. Secara spesifik, realisasi tersebut terbagi dalam sejumlah kelompok penyaluran, dengan realisasi masing-masing kelompok dibanding pagu anggaran sebagai berikut:

As of November 18, 2022, the Government has realized the disbursement of the PC-PEN program amounting to Rp280.7 trillion or 61.61% of the budget ceiling. Specifically, the realization was divided into a number of distribution groups with the realization of each group compared to the budget ceiling as follows:


**Penanganan Kesehatan /
Health Handling**


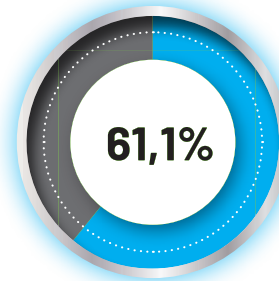
Pagu / Ceiling Rp122,54 T
Realisasi / Realization Rp48,6 T

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (<https://pen.kemkenku.go.id/>)

**Perlindungan Masyarakat /
Community Protection**


Pagu / Ceiling Rp154,76 T
Realisasi / Realization Rp123,1 T

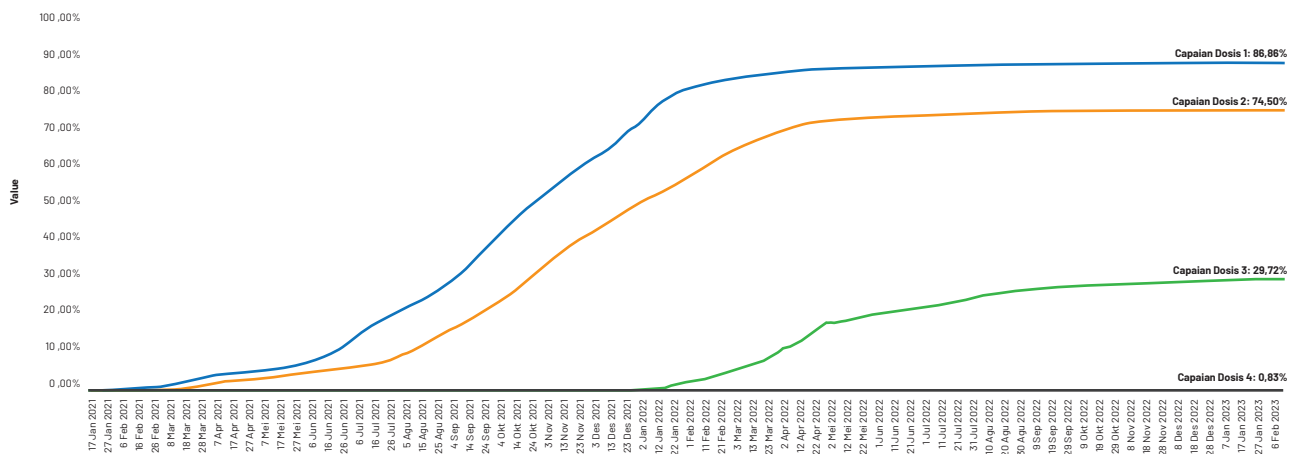
Source: Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (<https://pen.kemkenku.go.id/>)

**Penguatan Pemulihan Ekonomi /
Strengthening Economic Recovery**


Pagu / Ceiling Rp178,32 T
Realisasi / Realization Rp109,0 T

Seiring hal itu, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah merealisasikan penyaluran vaksin Covid-19 dengan pemenuhan vaksin dosis pertama dan kedua pada posisi 6 Februari 2023 masing-masing mencapai 74,50% dan 86,86%.

In line with this, the Government through the Indonesian Ministry of Health has realized the distribution of the Covid-19 vaccine by fulfilling the first and second doses of vaccine which as of February 6, 2023 has reached 74.50% and 86.86%, respectively.

Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia / Covid-19 Vaccination Coverage in Indonesia


Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (<https://vaksin.kemkes.go.id/>)

Source: Ministry of Health of the Republic of Indonesia (<https://vaksin.kemkes.go.id/>)

TINJAUAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN INDONESIA

Mengacu pada informasi yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, konsumsi listrik per kapita di Indonesia untuk tahun 2022 adalah sebesar 1.173 kWh/kapita, atau

OVERVIEW OF THE INDONESIAN ELECTRICITY INDUSTRY

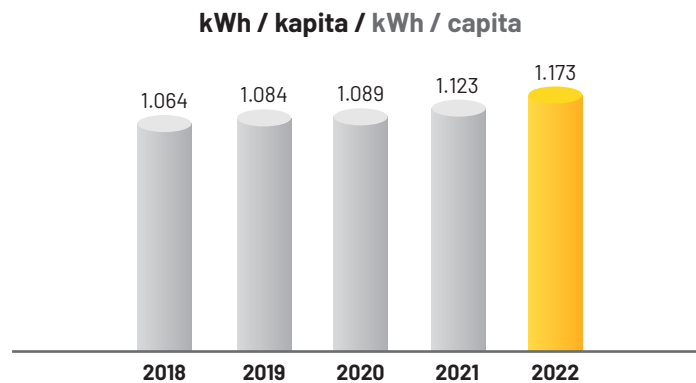
Referring to the information published by the Ministry of Energy and Mineral Resources, electricity consumption per capita in Indonesia for 2022 was 1,173 kWh/capita,

meningkat sebesar 4,45% dibanding tahun 2021. Tingkat konsumsi tersebut sekaligus memperlihatkan adanya tren peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir, seperti yang terlihat melalui grafik berikut:

or an increase of 4.45% compared to that of 2021. This consumption shows an increasing trend for the last 5 (five) years as shown in the following chart:

Konsumsi Listrik Per Kapita Indonesia (2018-2022)

Indonesia's Electricity Consumption Per Capita (2018-2022)



Sumber: Kementerian ESDM

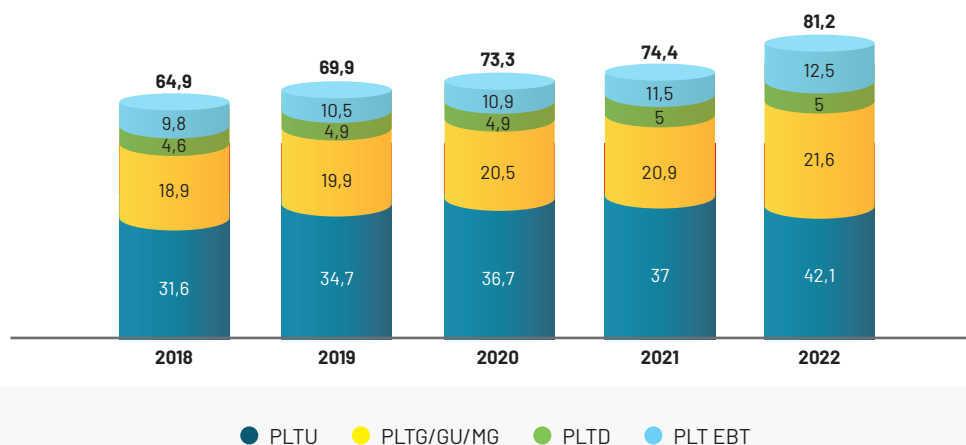
Source: Ministry of Energy and Mineral Resources

Seiring hal itu, masih merujuk pada informasi Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi Indonesia untuk tahun 2022 adalah mencapai 99,63%. Persentase tersebut sekaligus memperlihatkan peningkatan 0,18% dibanding rasio elektrifikasi di tahun 2021 yang sebesar 99,45%. Dari keseluruhan persentase tersebut, Jakarta dan Bali memiliki rasio elektrifikasi mencapai 100%, dengan sejumlah 20 (dua puluh) provinsi lain telah mencapai rasio elektrifikasi 99,99%. Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus melanjutkan upaya peningkatan rasio elektrifikasi, khususnya bagi wilayah di Indonesia timur mencakup Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, hingga pulau-pulau kecil, dalam rangka tercapainya rasio elektrifikasi 100% di tahun 2023.

Moreover, still referring to the information from the Ministry of Energy and Mineral Resources, Indonesia's electrification ratio for 2022 was 99.63%. This percentage shows an increase of 0.18% compared to the electrification ratio in 2021 at 99.45%. Of the total percentage, Jakarta and Bali have an electrification ratio of 100%, with a number of 20 (twenty) other provinces having achieved an electrification ratio of 99.99%. The government through the Ministry of Energy and Mineral Resources continues to increase the electrification ratio, especially for regions in eastern Indonesia including Maluku, Papua, East Nusa Tenggara, to small islands, in order to achieve an electrification ratio of 100% in 2023.

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia untuk tahun 2022 adalah mencapai 81,2 GW, atau meningkat 9,14% dibanding tahun 2021 yang sebesar 74,4 GW. Dari capaian tersebut, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tercatat memiliki kapasitas terpasang paling besar yaitu sebesar 42,1 GW, atau mencapai 51,85% dari keseluruhan kapasitas terpasang, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) tercatat sebesar 21,6 GW, atau setara 26,60%, sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan (PLT EBT) sebesar 12,5 GW, atau mencapai 15,39%.

The installed capacity of power plants in Indonesia in 2022 was 81.2 GW or an increase of 9.14% compared to 2021 at 74.4 GW. Of these achievements, the Steam Power Plant (PLTU) was recorded as having the largest installed capacity of 42.1 GW or reaching 51.85% of the total installed capacity, the Gas Steam Power Plant (PLTG) was recorded at 21.6 GW or equivalent to 26.60%, while the New Renewable Energy Power Plant (PLT EBT) was 12.5 GW or 15.39%.

Pembangkit Listrik Kapasitas Terpasang (2018-2022)**Indonesia's Installed Power Generation Capacity (2018-2022)**

Sumber: Kementerian ESDM

Source: Ministry of Energy and Mineral Resources

POSISI PLN DI INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN INDONESIA

Perseroan memiliki peran sentral di dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia, dengan kegiatan usaha yang terintegrasi mencakup konstruksi infrastruktur ketenagalistrikan, pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga retail. Peran sentral tersebut didukung posisi pasar yang kuat karena sangat dominan di dalam hal pembangkitan, di samping memiliki jaringan transmisi dan distribusi yang sangat luas di seluruh wilayah Indonesia.

Dari sisi *supply*, Perseroan menyediakan listrik dengan mengoperasikan pembangkit milik sendiri, *Independent Power Plant* (IPP), dan sewa, dengan total 6.928 unit atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sejumlah 6.760 unit. Dari keseluruhan pembangkit tersebut, sejumlah 6.314 pembangkit merupakan pembangkit milik Perseroan.

Dari sisi kapasitas terpasang, pembangkit listrik milik Perseroan masih didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan unit pembangkit sejumlah 130 unit dengan kapasitas terpasang sebesar 20.418,5MW. Jumlah tersebut diikuti oleh pembangkit berbahan bakar gas (PLTG, PLTGU, PLTMG) dengan kapasitas terpasang 16.750,90 MW, pembangkit listrik energi baru terbarukan (PLTA, PLTM, PLTMH, PLTP, PLTS, PLTB, PLTBM) dengan kapasitas terpasang 4.205,85 MW, serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas terpasang 3.564,25 MW.

PLN'S POSITION IN THE INDONESIAN ELECTRICITY INDUSTRY

The Company has a central role in the electricity industry in Indonesia, with integrated business activities covering electricity infrastructure construction, generation, transmission, distribution, to retail. This central role is supported by a strong market position as it is very dominant in terms of generation, in addition to having a very wide transmission and distribution network throughout Indonesia.

From the supply viewpoint, the Company provides electricity by operating its own power plant, Independent Power Plant (IPP), and renting, with a total of 6,928 units or an increase compared to the previous year which was 6,760 units. Of the total power plants, 6,314 power plants belong to the Company.

In terms of installed capacity, the Company's power plants are still dominated by Steam Power Plants (PLTU) at 130 generating units with an installed capacity of 20,418.5MW, followed by gas-fired power plants (PLTG, PLTGU, PLTMG) with an installed capacity of 16,750.90 MW, new renewable energy power plants (PLTA, PLTM, PLTMH, PLTP, PLTS, PLTB, PLTBM) with an installed capacity of 4,205.85 MW, as well as a Diesel Power Plant (PLTD) with an installed capacity of 3,564.25 MW.

Perbandingan jumlah pembangkit dan kapasitas terpasang milik Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Comparison of the number of generators and installed capacity of the Company for the last 5 (five) years is as follows:

Jumlah Pembangkit Listrik Milik PLN (Unit)		Total Power Plants Owned by PLN (Unit)				
Jenis Pembangkit Listrik / Type of Power Plant	2018	2019	2020	2021	2022	
PLTA/PLTM/PLTMH	266	243	244	246	249	
PLTU	110	133	127	126	130	
PLTG	98	68	66	66	68	
PLGU	74	73	79	79	81	
PLTP	22	18	18	18	18	
PLTD	5.327	5.350	5.400	5.258	5.363	
PLTMG	-	-	-	193	194	
PLT Surya	78	96	118	150	204	
PLT Bayu	5	5	5	5	5	
PLTBM	-	1	2	2	2	
Jumlah / Total	5.980	5.987	6.059	6.143	6.314	

Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik PLN (MW)		Installed Capacity of PLN's Power Plant (MW)				
Jenis Pembangkit Listrik / Type of Power Plant	2018	2019	2020	2021	2022	
PLTA/PLTM/PLTMH	3.583,98	3.584,08	3.584,08	3.504,42	3.596,99	
PLTU	20.750,00	20.277,63	20.277,63	20.365,00	20.418,5	
PLTG/GU/MG	15.234,60	16.239,34	16.239,34	16.377,84	16.750,9	
PLTP	579,50	579,26	579,26	579,26	579,26	
PLTD	3.692,38	3.476,82	3.476,82	3.532,61	3.564,62	
PLT Surya	14,65	16,71	16,71	21,34	28,62	
PLT Bayu dan PLTBM	0,97	0,97	0,97	0,97	0,47	
Jumlah / Total	41.696,67	43.856,58	44.174,80	44.464,75	44.939,88	

Seiring pemulihan kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2022, Perseroan merealisasikan total produksi energi listrik mencapai 308.002 GWh atau meningkat sebesar 6,4% dibanding tahun 2021 yang sejumlah 289.471 GWh. Secara mendasar, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pemulihan kondisi perekonomian yang mendorong peningkatan konsumsi listrik.

As the Indonesian economy recovered in 2022, the Company realized a total electricity production of 308,002 GWh or an increase of 6.4% compared to 2021 at 289,471 GWh. Fundamentally, this was influenced by the recovery in economic conditions which led to an increase in electricity consumption.

Perbandingan jumlah energi yang diproduksi Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The comparison of the amount of energy produced by the Company for the last 5 (five) years is as follows:

Energi yang Diproduksi (GWh)**Produced Energy (GWh)**

Uraian / Description	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Listrik Pembangkit PLN / Electricity Production of PLN's Power Plant	178.194	186.457	172.622	177.485	179.496
Produksi Listrik dari Sewa / Electricity Production from Leased	10.505	7.086	5.070	5.488	4.324
Produksi Listrik dari IPP dan Proyek / Electricity Production from IPP and Projects	78.387	85.399	97.159	106.497	124.183
Total Produksi Listrik / Total Electricity Production	267.085	278.942	274.851	289.471	308.002

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, peningkatan produksi listrik di tahun 2022 dipengaruhi oleh adanya peningkatan permintaan (*demand*) dari pelanggan. Realisasi energi terjual mencapai 273.761 GWh di tahun 2022 tercapai pada situasi pertumbuhan ekonomi makro nasional sebesar 5,31%, sedangkan realisasi energi terjual 257.634,25 GWh di tahun 2021 tercapai pada pertumbuhan ekonomi makro sebesar 3,7%.

Peningkatan produksi energi yang dihasilkan di tahun 2022 tersebut juga didukung dengan peningkatan panjang jaringan transmisi Perseroan dibanding tahun sebelumnya. Pada posisi 31 Desember 2022, Perseroan memiliki panjang transmisi mencapai 68.206 kms atau meningkat 5,24% dibanding tahun sebelumnya yang sepanjang 64.807 kms.

PERAN PLN DALAM PENYALURAN SUBSIDI LISTRIK

Sebagai BUMN, Perseroan tidak hanya melaksanakan kegiatan usaha dengan berorientasi pada keuntungan tetapi juga menjalankan peran pelayanan publik termasuk penyaluran subsidi kepada kelompok pelanggan yang berhak menerima, sesuai ketentuan Pemerintah. Sesuai APBN, subsidi merupakan transfer dana dari Pemerintah yang membuat harga suatu barang atau jasa menjadi lebih murah. Dengan pemahaman tersebut, subsidi listrik dipahami sebagai wujud bantuan dari Pemerintah bagi masyarakat agar dapat memperoleh tarif listrik yang lebih mudah dibanding tarif keekonomian.

Penyaluran subsidi listrik dilakukan berdasarkan undang-undang sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi: "Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu".

As previously stated, the increase in electricity production in 2022 was influenced by an increase in demand from customers. Realization of energy sold in 2022 was achieved in a situation of national macroeconomic growth of 5.31%, while the realization of energy sold in 2021 was achieved in macroeconomic growth of 3.7%.

The increase in energy production in 2022 was also supported by the increase in the length of the Company's transmission network compared to the previous year. As of December 31, 2022, the Company has a transmission length of 68,206 kms, increased by 5.24% compared to the previous year at 64,807 kms.

THE ROLE OF PLN IN DISTRIBUTION OF ELECTRICITY SUBSIDIES

As an SOE, the Company carries out business activities not only with a profit orientation but also presenting the role of public service in distributing subsidies to entitled groups of customers in accordance with Government regulations. According to the State Budget, subsidies are transfers of funds from the Government which make the price of a good or service affordable. With this understanding, electricity subsidies are recognized as a form of assistance from the Government for the public so that they can obtain electricity tariffs that are easier than economic tariffs.

The distribution of electricity subsidies is carried out based on the following laws:

- Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2007 on Energy: "The government and local governments provide subsidy funds for underprivileged groups of people".

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: "Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk: kelompok masyarakat tidak mampu".
- Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2009 on Electricity: "For the provision of electricity, the Government and local governments provide funds for: underprivileged groups of people".

Untuk 2022, Biaya Pokok Penyediaan listrik berada pada rata-rata Rp1.473 per kWh. Dengan adanya subsidi Pemerintah yang disalurkan melalui Perseroan, masyarakat golongan pelanggan Rumah Tangga penerima subsidi memperoleh tarif lebih murah, yaitu pada kisaran Rp415,- sampai dengan Rp605,- per kWh, sesuai daya terpasangnya.

Cost of Providing Electricity in 2022 was at average of Rp1,473 per kWh. With the existence of government subsidies channeled through the Company, household customers who receive subsidies receive cheaper tariffs, namely in the range of Rp415 to Rp605 per kWh, according to their installed power.

Perubahan kebijakan subsidi listrik oleh Pemerintah dari tahun ke tahun, sesuai data Kementerian Keuangan RI, dapat dilihat melalui tabel berikut.

Changes in the electricity subsidy policy by the Government over the year, according to data from the Indonesian Ministry of Finance, can be seen in the following table:

Tahun / Year	Penjelasan / Explanation
2014	Perubahan kebijakan subsidi listrik yang dilakukan hanya berupa kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan tarif listrik, seperti kebijakan untuk menaikkan tarif listrik sebesar 10% di tahun 2010 dan sebesar 15% di tahun 2013. Akan tetapi, semua 38 golongan pelanggan PLN masih menerima subsidi listrik pada periode ini. / The changes to the electricity subsidy policy that were carried out were only in the form of policies to increase or decrease electricity tariffs, such as the policy to increase electricity tariffs by 10% in 2010 and by 15% in 2013. However, all 38 groups of PLN's customers still received electricity subsidies during the period.
2015	Pemerintah menghapus subsidi listrik untuk 12 jenis pelanggan PLN yang terdiri dari pelanggan golongan rumah tangga daya 1300 VA ke atas, pelanggan golongan Industri Besar (200 VA ke atas), pelanggan golongan Bisnis Besar (6600 VA ke atas), dan pelanggan golongan Pemerintah (6600 VA ke atas). / The government removed electricity subsidies for 12 types of PLN's customers, consisting of household customers with the power of 1,300 VA and above, Large Industry customers (200 VA and above), Large Business customers (6,600 VA and above), and Government customers (6,600 VA and above). Kebijakan ini didasari pemahaman bahwa golongan pelanggan tersebut tidak berhak menerima subsidi listrik. Kebijakan ini secara signifikan mengurangi besaran anggaran subsidi listrik dari Rp99,30 triliun di 2014 menjadi Rp56,55 triliun di 2015. / This policy was based on the understanding that these customer groups were not entitled to receive electricity subsidies. This policy significantly reduced the electricity subsidy budget from Rp99.30 trillion in 2014 to Rp56.55 trillion in 2015.
2017	Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk terus melakukan perbaikan sasaran penerima subsidi listrik dengan melakukan reformasi subsidi listrik untuk golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA. / The government and DPR RI agreed to continue to improve the target of electricity subsidy recipients by reforming electricity subsidies for the household groups with the power of 450 VA and 900 VA. Kebijakan ini dilakukan untuk mengembalikan mandat pemberian subsidi, yaitu untuk masyarakat kurang mampu. Reformasi ini dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu menasar pelanggan rumah tangga 900 VA. Pelanggan rumah tangga 900 VA yang berhak menerima subsidi adalah rumah tangga yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu/BDT (sekarang menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS). / This policy was carried out to restore the mandate to provide subsidies, namely for the underprivileged. This reform was carried out in stages by first targeting household customers with the power of 900 VA. The household customers with the power of 900 VA who were entitled to receive the subsidy were the households registered in the Integrated Database/BDT (now the Integrated Social Welfare Data/DTKS).
2021	Untuk mengatasi adanya rumah tangga yang berhak menerima subsidi tapi tidak terdaftar dalam BDT, maka Pemerintah dan PLN menyediakan mekanisme pengaduan yang memungkinkan mereka untuk menerima tarif listrik bersubsidi. / To overcome the issue of households that were entitled to receive subsidies but were not registered with the BDT, the Government and PLN provided a complaint mechanism that allowed them to receive subsidized electricity tariffs.
2022	Saat ini semua pelanggan rumah tangga 450 VA masih menerima subsidi listrik. Pemerintah sedang mengupayakan untuk melanjutkan reformasi subsidi listrik. / Currently, all household customers with the power of 450 VA still receive electricity subsidies. The government is working to continue the electricity subsidy reformation.
2022	Pemerintah masih memberikan subsidi untuk pelanggan listrik rumah tangga tidak mampu dengan daya terpasang 450-900 VA. / The government still provided subsidies for underprivileged household electricity customers with an installed power of 450-900 VA.

Tinjauan Operasional

Operational Review



Penjualan tenaga listrik PLN untuk tahun 2022 adalah 273.761 GWh, atau meningkat 6,26% dibanding realisasi di tahun 2021 yang 257.634 GWh. Peningkatan tersebut disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian Indonesia seiring dengan pandemi Covid-19 yang semakin mereda.

PLN's electricity sales in 2022 were 273,761 GWh, or an increase of 6.26% compared to the realization in 2021 at 257,634 GWh. Such increase was due to Indonesia's economic condition that was getting better along with the subsided Covid-19 pandemic.



TINJAUAN SEGMENT OPERASI

Informasi Segmen

Segmen operasi Perseroan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pada sisi konstruksi, operasi, dan pengembangan, khususnya yang digunakan dalam mengambil keputusan yang strategis. Untuk tahun 2022, manajemen Perseroan membagi segmen operasi menjadi 3 (tiga) segmen operasi regional, yaitu (1) Sumatra dan Kalimantan, (2) Jawa, Madura, dan Bali, serta (3) Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.

Penjualan Listrik

Penjualan tenaga listrik PLN untuk tahun 2022 adalah 273.761 GWh, atau meningkat 6,26% dibanding realisasi di tahun 2021 yang 255.068 GWh. Peningkatan tersebut disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian Indonesia seiring dengan pandemi Covid-19 yang semakin mereda.

OVERVIEW ON OPERATING SEGMENT

Segment Information

The Company's operating segments are identified based on needs on the construction, operation, and development aspects, especially those used in making strategic decisions. In 2022, the Company's management divided the operating segments into 3 (three) regional operating segments, namely (1) Sumatra and Kalimantan, (2) Java, Madura and Bali, and (3) Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara.

Electricity Sales

PLN's electricity sales in 2022 were 273,761 GWh, or an increase of 6.26% compared to the realization in 2021 at 255,068 GWh. Such increase was due to Indonesia's economic condition that was getting better along with the subsided Covid-19 pandemic.

Realisasi penjualan listrik berdasarkan kelompok tarif untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Realization of electricity sales based on tariff groups for 2022 is as follows:

Penjualan Tenaga Listrik Per Kelompok Tarif

Dalam satuan GWh

Golongan Tarif / Tariff Group	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Rumah Tangga / Households	116.095	115.370	725	0,63
Industri / Industry	88.483	80.904	7.579	9,37
Bisnis / Business	50.532	42.428	5.933	13,98
Sosial / Social	10.074	8.666	1.407	16,24
Pemerintah / Government	8.577	8.253	324	3,93
Traksi / Traction	344	317	26	8,43
Curah / Bulk	135	107	28	26,23
Layanan Khusus / Special Service	1.692	1.588	103	6,51
Jumlah / Total	273.761	257.634	16.127	6,26

Electric Power Sales Per Tariff Group

In GWh unit

Berdasarkan segmen operasi regional, penjualan listrik pada regional Sumatra dan Kalimantan tercatat mengalami kenaikan 3.764 GWh atau 6,82% secara tahunan, dari sejumlah 55.230 GWh menjadi 58.994 GWh di tahun 2022. Regional Jawa, Madura, dan Bali tercatat naik sebesar 5,78%, dari 183.793 GWh menjadi 194.419 GWh. Kemudian, pada regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, terjadi kenaikan sejumlah 1.738 GWh atau 9,34% secara tahunan, dari sejumlah 18.611 GWh menjadi 20.349 GWh di tahun 2022.

Based on the regional operating segment, electricity sales in the Sumatra and Kalimantan region increased by 3,764 GWh or 6.82% on an annual basis, from 55,230 GWh to 58,994 GWh in 2022. The Java, Madura and Bali regions increased by 5.78%, from 183,793 GWh to 194,419 GWh. Then, the Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara regions increased by 1,738 GWh or 9.34% on an annual basis, from 18,611 GWh to 20,349 GWh in 2022.

Penjualan Tenaga Listrik Per Regional

Dalam satuan GWh

Uraian / Description	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Sumatra dan Kalimantan* / Sumatra and Kalimantan*	58.994	55.230	3.764	6,82
Jawa, Madura, dan Bali / Java, Madura, and Bali	194.419	183.793	10.626	5,78
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara / Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	20.349	18.611	1.738	9,34
Jumlah / Total	273.761	257.634	16.127	6,26

Electric Power Sales Per Region

In GWh unit

*) Termasuk Batam

*) Including Batam

Jumlah Pelanggan

Pelanggan PLN pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah 85.636.198 pelanggan, atau meningkat 3,75% dibanding posisi di tahun sebelumnya yang sejumlah 82.543.980 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan terjadi paling besar pada segmen rumah tangga, yaitu

Total Customers

PLN customers as of December 31, 2022 were 85,636,198 customers or increased by 3.75% compared to the previous year at 82,543,980 customers. The highest increase in the number of customers occurred in the household segment, namely 2,625,912 customers or 3.47% on an annual basis

sejumlah 2.625.912 pelanggan atau 3,47% secara tahunan, dari 75.701.985 pelanggan menjadi 78.327.897 pelanggan di tahun 2022. Berdasarkan persentase, segmen sosial mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,89%, dari 159.057 pelanggan menjadi 179.553 pelanggan di tahun 2022. Adapun, pelanggan segmen bisnis tercatat meningkat 7,67% dibanding tahun sebelumnya, dari 4.203.129 pelanggan menjadi 4.525.414 pelanggan.

from 75,701,985 customers to 78,327,897 customers in 2022. Based on the percentage, the social segment recorded the highest growth, namely 12.89%, from 159,057 customers to 179,553 customers in 2022. Meanwhile, business segment customers increased by 7,67% compared to the previous year from 4.203.129 customers to 4.525.414 customers.

Jumlah Pelanggan Per Kelompok Tarif

Dalam satuan pelanggan

Golongan Tarif / <i>Tariff Group</i>	2022	2021	Perubahan / <i>Changes</i>	
			Nominal	Persentase (%) / <i>Percentage (%)</i>
Rumah Tangga / <i>Households</i>	1.920.790	1.838.283	82.507	4,49
Industri / <i>Industry</i>	78.327.722	75.701.789	2.625.933	3,47
Bisnis / <i>Business</i>	4.525.414	4.203.129	322.285	7,67
Sosial / <i>Social</i>	179.553	159.057	20.496	12,89
Pemerintah / <i>Government</i>	567.548	544.817	22.731	4,17
Traksi / <i>Traction</i>	79	78	1	1,28
Curah / <i>Bulk</i>	24	23	1	4,35
Layanan Khusus / <i>Special Service</i>	115.068	96.804	18.264	18,87
Jumlah / <i>Total</i>	85.636.198	82.543.980	3.092.218	3,75%

Total Customers Per Tariff Group

In customer unit

Berdasarkan segmen regional, peningkatan jumlah pelanggan paling tinggi terjadi pada regional Jawa, Madura, Bali, yaitu sejumlah 1.700.603 pelanggan dari sejumlah 51.259.474 menjadi 52.960.077 pelanggan per 31 Desember 2022. Regional Sumatra dan Kalimantan mencatat peningkatan jumlah pelanggan dari 21.654.091 menjadi 22.566.743 pelanggan, atau sebesar 4,21% dibanding tahun sebelumnya. Adapun, jumlah pelanggan pada regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara tercatat meningkat 4,97% secara tahunan, dari 9.630.415 menjadi 10.109.378 pelanggan.

Based on the regional segment, the highest increase in the number of customers occurred in the Java, Madura, and Bali groups, by 1,700,603 customers from 51,259,474 to 52,960,077 customers as of December 31, 2022. Customers of the Sumatra and Kalimantan region increased from 21,654,091 to 22,566,743 customers or 4.21% compared to the previous year. Meanwhile, total customers in the Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara regions increased by 4.97% on an annual basis, from 9,630,415 to 10,109,378 customers.

Jumlah Pelanggan Per Regional

Dalam satuan pelanggan

Uraian / <i>Description</i>	2022	2021	Perubahan / <i>Changes</i>	
			Nominal	Persentase (%) / <i>Percentage (%)</i>
Sumatra dan Kalimantan* / <i>Sumatra and Kalimantan*</i>	22.566.743	21.654.091	912.652	4,21
Jawa, Madura, dan Bali / <i>Java, Madura, and Bali</i>	52.960.077	51.259.474	1.700.603	3,32
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara / <i>Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara</i>	10.109.378	9.630.415	478.963	4,97
Jumlah / <i>Total</i>	85.636.198	82.543.980	3.092.218	3,75

Total Customers Per Region

In customer unit

*) Termasuk Batam

*) Including Batam

Dari keseluruhan jumlah pelanggan untuk tahun 2022, pelanggan pada regional Jawa, Madura, dan Bali mencatatkan porsi paling dominan yaitu sebesar 61,84% dari jumlah pelanggan secara nasional. Regional Sumatra dan Kalimantan mencatatkan kontribusi sebesar 26,35% sedangkan regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara berkontribusi sebesar 11,81% dari keseluruhan jumlah pelanggan. Meski demikian, persentase penambahan pelanggan tertinggi justru terjadi di luar Jawa, Madura dan Bali, yang menunjukkan bahwa semakin meratanya pertumbuhan ekonomi termasuk juga cakupan jaringan listrik di luar Jawa, Madura dan Bali.

Daya Tersambung

Atas peningkatan jumlah pelanggan tersebut, daya tersambung PLN diketahui mengalami kenaikan yaitu sebesar 5,40%, dari 153.565,96 MVA menjadi 161.861,54 MVA per 31 Desember 2022. Peningkatan daya tersambung paling besar terjadi pada segmen rumah tangga, yaitu sejumlah 3.856,48 MVA atau meningkat 5,04% dari 76.566,83 MVA menjadi 80.423,31 MVA.

Daya Tersambung Per Kelompok Tarif

Dalam satuan MVA

Golongan Tarif / Tariff Group	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Rumah Tangga / Households	80.423,27	76.566,79	3.856,48	5,04
Industri / Industry	34.714,29	33.151,55	1.562,74	4,71
Bisnis / Business	34.117,75	31.974,80	2.142,95	6,70
Sosial / Social	6.355,66	5.975,53	380,33	6,36
Pemerintah / Government	5.123,91	4.919,14	204,77	4,16
Traksi / Traction	380,09	374,55	5,54	1,48
Curah / Bulk	50,79	41,37	9,42	22,77
Layanan Khusus / Special Service	695,78	562,98	132,80	23,59
Jumlah / Total	161.861,54	153.565,96	8.295,58	5,40

Daya tersambung pada regional Sumatra dan Kalimantan tercatat meningkat sejumlah 2.123,92 MVA menjadi 36.546,30 MVA, atau sebesar 6,17% dibanding pada tahun sebelumnya yang sejumlah 34.422,38 MVA. Adapun, daya tersambung untuk regional Jawa, Madura, dan Bali tercatat mengalami peningkatan paling tinggi, yaitu sejumlah 5.144,77 MVA atau meningkat 4,89% dari 105.230,17 MVA menjadi 110.374,94 MVA pada posisi 31 Desember 2022.

Of the total number of customers in 2022, customers in the Java, Madura, and Bali regions recorded the most dominant portion at 61.84% of the total number of customers nationally. The Sumatra-Kalimantan region recorded a contribution of 26.35% while the Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara regions contributed 11.81% of the total number of subscribers. However, the highest percentage of additional customers actually occurred outside Java, Madura, and Bali, indicating that economic growth is more evenly distributed, including the coverage of the electricity network outside Java, Madura and Bali.

Connected Power

Due to the increase in the number of customers, PLN's connected power has increased by 5.40%, from 153,565.96 MVA to 161,861.54 MVA as of December 31, 2022. The highest increase in connected power occurred in the household segment by 3,856.48 MVA or 5.04% from 76,566.83 MVA to 80,423.31 MVA.

Connected Power Per Tariff Group

In MVA unit

Golongan Tarif / Tariff Group	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Rumah Tangga / Households	80.423,27	76.566,79	3.856,48	5,04
Industri / Industry	34.714,29	33.151,55	1.562,74	4,71
Bisnis / Business	34.117,75	31.974,80	2.142,95	6,70
Sosial / Social	6.355,66	5.975,53	380,33	6,36
Pemerintah / Government	5.123,91	4.919,14	204,77	4,16
Traksi / Traction	380,09	374,55	5,54	1,48
Curah / Bulk	50,79	41,37	9,42	22,77
Layanan Khusus / Special Service	695,78	562,98	132,80	23,59
Jumlah / Total	161.861,54	153.565,96	8.295,58	5,40

Connected power in the Sumatra and Kalimantan region increased by 2,123.92 MVA to 36,546.30 MVA, or 6.17% compared to the previous year at 34,422.38 MVA. Meanwhile, connected power for the Java, Madura, and Bali regions recorded the highest increase by 5,144.77 MVA or 4.89% from 105,230.17 MVA to 110,374.94 MVA as of December 31, 2022.

Daya Tersambung Per Regional

Dalam satuan MVA

Uraian / Description	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Sumatra dan Kalimantan* / Sumatra and Kalimantan*	36.546,30	34.422,38	2.123,92	6,17
Jawa, Madura, dan Bali / Java, Madura, and Bali	110.374,94	105.230,17	5.144,77	4,89
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara / Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	14.940,30	13.913,41	1.026,89	7,38
Jumlah / Total	161.861,54	153.565,96	8.295,58	5,40

*) Termasuk Batam

Persentase peningkatan daya tersambung di luar Jawa, Madura dan Bali juga lebih tinggi disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik di wilayah-wilayah tersebut seiring dengan pemerataan pembangunan serta infrastruktur, termasuk potensi industri di luar Jawa, Madura dan Bali yang semakin bertumbuh.

Susut Jaringan

Susut jaringan mengacu pada hilangnya energi listrik sebagai konsekuensi dari penyaluran energi listrik, baik yang terjadi pada proses transmisi maupun distribusi. Susut jaringan dapat disebabkan oleh penyebab teknis seperti faktor penghantar dan peralatan, juga disebabkan oleh faktor non-teknis seperti pencurian listrik dan kesalahan pencatatan meter.

Realisasi susut jaringan pada 2022 adalah sebesar 8,72%, atau lebih tinggi dibanding susut pada 2021 yang sebesar 8,59%. Susut jaringan untuk tahun 2022 terdiri atas susut transmisi sebesar 1,92%, atau lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 1,97%, serta susut distribusi yang sebesar 6,94% atau lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang sebesar 6,77%.

Peningkatan persentase susut jaringan tersebut disebabkan karena masih adanya sisa stimulus Covid-19 pada tahun 2021. Usaha untuk menurunkan susut teknis dan non teknis terus dilaksanakan, salah satunya dengan pelaksanaan P2TL dan penggantian kWh meter. Realisasi perolehan P2TL total yaitu 1.495 GWh setara dengan Rp1.691,7 miliar.

Connected Power Per Region

In MVA unit

Uraian / Description	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Sumatra dan Kalimantan* / Sumatra and Kalimantan*	36.546,30	34.422,38	2.123,92	6,17
Jawa, Madura, dan Bali / Java, Madura, and Bali	110.374,94	105.230,17	5.144,77	4,89
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara / Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	14.940,30	13.913,41	1.026,89	7,38
Jumlah / Total	161.861,54	153.565,96	8.295,58	5,40

*) Including Batam

The percentage increase in connected power outside Java, Madura, and Bali was also higher due to improving economic growth in these areas along with equitable distribution of development and infrastructure, including growing industrial potential outside Java, Madura, and Bali.

Network Losses

Network loss refers to the loss of electrical energy as a consequence of the distribution of electrical energy, both in the transmission and distribution processes. Network losses can be caused by technical causes such as conductor factors and equipment which were also caused by non-technical factors such as electricity theft and meter recording errors.

Realization of network losses in 2022 was 8.72%, or higher than losses in 2021 at 8.59%. Network losses for 2022 consist of transmission losses of 1.92%, or lower than the previous year at 1.97%, and distribution losses at 6.94% or higher than 2021 at 6.77%.

The increase in the percentage of network losses was due to the remaining Covid-19 Stimulus in 2021. Efforts to minimize technical and non-technical losses are continuing, one of which is by implementing P2TL and replacing kWh meters. Realization of total P2TL acquisition of 1,495 GWh or equal to Rp1,691.7 billion.

Susut Jaringan

Dalam satuan persen (%)

Uraian / Description	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Susut Transmisi / Transmission Losses	1,92	1,97	(0,05)	(2,54)
Susut Distribusi / Distribution Losses	6,94	6,77	0,17	2,51
Susut Jaringan / Network Losses	8,72	8,59	0,13	1,51

Lebih lanjut, realisasi susut jaringan tahun 2022 memperlihatkan perubahan yang bervariasi pada masing-masing regional. Susut jaringan regional Sumatera dan Kalimantan tahun 2022 adalah sebesar 10,80%, atau lebih rendah dibanding pada tahun 2021 yang sebesar 10,97%. Pada regional Jawa, Madura, dan Bali, susut jaringan terealisasi sebesar 7,99%, naik dibanding susut pada tahun sebelumnya yang sebesar 7,87%. Adapun pada regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, susut jaringan terealisasi sebesar 9,46%, atau meningkat dibanding pada tahun 2021 yang 8,46%. Susut jaringan di Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara meningkat lebih disebabkan karena faktor non-teknis daripada faktor teknis, karena perbaikan jaringan kelistrikan di daerah tersebut justru telah berhasil menurunkan susut teknis dari 1,02% menjadi 0,83%. Kenaikan susut justru terjadi pada faktor non-teknis yang menunjukkan perlu lebih ditingkatkan lagi penertiban penggunaan listrik di sisi distribusi.

Susut Jaringan Per Regional

Dalam satuan persen (%)

Uraian / Description	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Sumatra dan Kalimantan* / Sumatra and Kalimantan*	10,80	10,97	(0,17)	(1,55)
Jawa, Madura, dan Bali / Java, Madura, and Bali	7,99	7,87	0,12	1,52
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara / Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	9,46	8,46	1	11,82
Jumlah / Total	8,72	8,59	0,13	1,51

*) Termasuk Batam

Tingkat Keandalan Layanan

Tingkat keandalan layanan PLN diukur dengan menggunakan indeks lama gangguan (*System Average Interruption Duration Index/SAIDI*) serta indeks frekuensi gangguan (*System Average Interruption Frequency/SAIFI*). SAIDI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat durasi gangguan per pelanggan, sedangkan SAIFI digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah gangguan per pelanggan.

Network Losses

In percent (%)

Furthermore, the realization of network losses in 2022 showed various changes in each region. Regional network losses in Sumatera and Kalimantan in 2022 were 10.80%, or lower than that of 2021 at 10.97%. In the Java, Madura, and Bali regions, network losses were realized at 7.99%, an increase compared to losses in the previous year at 7.87%. As for the Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara regions, network losses were realized at 9.46%, an increase compared to 2021 at 8.46%. Network losses in Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara increased due to non-technical factors than technical factors as the improvement of the electricity network in these areas has succeeded in reducing technical losses from 1.02% to 0.83%. The increase in losses actually occurred due to non-technical factors which indicated that it was necessary to further increase the regulation of the use of electricity on the distribution aspect.

Network Losses Per Region

In percent (%)

*) Including Batam

Service Reliability Level

Service reliability level of PLN is measured using the system average interruption duration index (SAIDI) and the system average interruption frequency index (SAIFI). SAIDI is a measure used to determine the duration of interruptions per customer, while SAIFI is used to measure the number of interruptions per customer.

**SAIDI Per Regional**

Dalam satuan menit/pelanggan

Uraian / Description	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Sumatra dan Kalimantan* / Sumatra and Kalimantan*	659,26	766,17	(106,91)	(13,95)
Jawa, Madura, dan Bali / Java, Madura, and Bali	368,87	428,58	(59,71)	(13,93)
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara / Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	519,70	625,56	(105,86)	(16,92)
Jumlah / Total	463,20	540,12	(76,92)	(14,24)

*) Termasuk Batam

SAIDI Per Region

In minute/customer

Uraian / Description	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Sumatra dan Kalimantan* / Sumatra and Kalimantan*	659,26	766,17	(106,91)	(13,95)
Jawa, Madura, dan Bali / Java, Madura, and Bali	368,87	428,58	(59,71)	(13,93)
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara / Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	519,70	625,56	(105,86)	(16,92)
Jumlah / Total	463,20	540,12	(76,92)	(14,24)

*) Including Batam

SAIFI Per Regional

Dalam satuan kali/pelanggan

Uraian / Description	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Sumatra dan Kalimantan* / Sumatra and Kalimantan*	7,28	8,77	(1,49)	(16,99)
Jawa, Madura, dan Bali / Java, Madura, and Bali	4,42	5,28	(0,86)	(16,29)
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara / Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	8,20	9,55	(1,35)	(14,14)
Jumlah / Total	5,62	6,70	(1,08)	(16,12)

*) Termasuk Batam

SAIFI Per Regional

Dalam satuan kali/pelanggan

Uraian / Description	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Sumatra dan Kalimantan* / Sumatra and Kalimantan*	7,28	8,77	(1,49)	(16,99)
Jawa, Madura, dan Bali / Java, Madura, and Bali	4,42	5,28	(0,86)	(16,29)
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara / Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	8,20	9,55	(1,35)	(14,14)
Jumlah / Total	5,62	6,70	(1,08)	(16,12)

*) Including Batam

Penyebab SAIDI yang dominan adalah gangguan distribusi dengan kontribusi 75,89% dari total seluruh gangguan. Dari total gangguan distribusi tersebut yang paling dominan adalah gangguan fasilitas penyulang (57,57%) dengan kontribusi terbesar adalah gangguan konduktor Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) tidak terencana sebesar 43,43%. Penyebab dominan berikutnya adalah padam terencana (34,23%) dengan pemeliharaan fasilitas penyulang (26,67%) sebagai kontributor terbesar.

The dominant cause of SAIDI was distribution disturbance with a contribution of 75.89% of the total disturbance. Of the total distribution disturbances, the most dominant disturbances were feeder facility disturbances (57.57%) with the largest contribution being SUTM unplanned conductor disturbances of 43.43%. The next dominant cause was planned outages (34.23%) with maintenance of feeder facilities (26.67%) as the biggest contributor.

Penyebab SAIFI yang dominan adalah gangguan distribusi dengan kontribusi 82,69% dari total seluruh gangguan. Dari total gangguan distribusi, yang paling dominan adalah gangguan fasilitas penyulang (69,68%) dengan kontribusi terbesar yaitu gangguan konduktor SUTM tidak terencana sebesar 53,36%. Penyebab dominan berikutnya adalah padam terencana (23,00%) dengan pemeliharaan penyulang (17,12%) sebagai kontributor terbesar.

The dominant cause of SAIFI was distribution disturbances with a contribution of 82.69% of the total disturbances. Of the total distribution disturbances, the most dominant disturbances was the feeder facilities disturbance (69.68%) with the largest contribution being SUTM unplanned conductors disturbance of 53.36%. The next dominant cause was planned outages (23.00%) with feeder maintenance (17.12%) as the biggest contributor.

Secara konsolidasi, realisasi indeks SAIDI untuk tahun 2022 adalah sebesar 463,20 menit/pelanggan, atau lebih singkat dibanding pada tahun 2021 yang sebesar 540,12 menit/pelanggan. Adapun, indeks SAIFI secara konsolidasi pada tahun 2022 adalah sebesar 5,62 kali/pelanggan, atau lebih

On a consolidated basis, the realization of the SAIDI index in 2022 was 463.20 minutes/customer or shorter than in 2021 at 540.12 minutes/customer. Meanwhile, the SAIFI index on a consolidated basis in 2022 was 5.62 times/customer or better than in 2021 at 6.70 times/customer. Based on the realization

baik dibanding pada tahun 2021 yang sebesar 6,70 kali/pelanggan. Atas realisasi SAIDI dan SAIFI tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perseroan mampu menghadirkan tingkat keandalan layanan yang lebih baik pada tahun 2022 dibanding tahun 2021.

KINERJA USAHA

Kapasitas Terpasang

Sampai dengan 31 Desember 2022, kapasitas pembangkit yang terpasang pada sistem PLN adalah 69.040 MW, dengan kapasitas pembangkit PLN adalah sejumlah 44.940 MW, atau meningkat 1,07% dari posisi 31 Desember 2021 yang sebesar 44.465 MW. Komposisi kapasitas pembangkit terpasang pada tahun 2022 terdiri dari sebesar 65,09% milik PLN, sebesar 33,26% milik swasta (*Independent Power Producer/IPP*), serta sebesar 1,65% sewa.

Kapasitas Terpasang Pembangkit

Dalam MW

Status Kepemilikan / Ownership Status	2022	2021	2020	Perubahan 2021-2022 (%) / Changes in 2021-2022 (%)
Milik PLN / Owned by PLN	44.940	44.465	44.175	1,07
Swasta (IPP) / Private (IPP)	22.962	18.722	17.720	22,65
Sewa / Lease	1.137	1.366	1.441	(16,76)
Jumlah / Total	69.040	64.553	63.336	6,95

Peningkatan kapasitas terpasang tersebut disebabkan oleh beroperasi pembangkit-pembangkit dari proyek 35.000 MW yang selesai COD di tahun 2022.

Produksi Tenaga Listrik

PLN memperoleh tenaga listrik melalui pembangkit milik sendiri, pembangkit sewa, serta pembelian tenaga listrik dari pihak swasta (IPP dan Proyek). Untuk 2022, total produksi listrik PLN adalah mencapai 308.002,30 GWh, atau meningkat 18.531,73 GWh atau 6,40% dibanding pada tahun 2021 yang sebesar 289.470,57 GWh. Keseluruhan tenaga listrik PLN tersebut terdiri dari sebesar 179.495,52 GWh (58,28%) berasal dari pembangkit sendiri, berasal dari pembangkit sewa sebesar 4.323,52 GWh (1,40%), serta berasal dari pembelian (IPP dan Proyek) sebesar 124.183,27 GWh (40,32%).

Terdapat penurunan jumlah tenaga listrik yang berasal dari pembangkit sewa sebesar 21,23% dibanding tahun sebelumnya, yang disebabkan karena sebagian besar pembangkit sewa berbahan bakar BBM, yang hanya menjadi cadangan dan dioperasikan hanya saat kondisi beban puncak. Adapun produksi listrik dari pembelian (IPP dan Proyek)

of SAIDI and SAIFI, it can be concluded that the Company was able to present a better level of service reliability in 2022 compared to 2021.

BUSINESS PERFORMANCE

Installed Capacity

As of December 31, 2022, the installed generating capacity in the PLN system was 69,040 MW, with PLN's generating capacity of 44,940 MW, an increase of 1.07% from the position of December 31, 2021 at 44,465 MW. The composition of installed generating capacity in 2022 consisted of 65.09% owned by PLN, 33.26% owned by the private sector (*Independent Power Producer/IPP*), and 1.65% leased.

Installed Plant Capacity

In MW

Status Kepemilikan / Ownership Status	2022	2021	2020	Perubahan 2021-2022 (%) / Changes in 2021-2022 (%)
Milik PLN / Owned by PLN	44.940	44.465	44.175	1,07
Swasta (IPP) / Private (IPP)	22.962	18.722	17.720	22,65
Sewa / Lease	1.137	1.366	1.441	(16,76)
Jumlah / Total	69.040	64.553	63.336	6,95

The increase in installed capacity was due to the operation of power plants from the 35,000 MW project which completed its COD in 2022.

Electricity Power Production

PLN obtains electricity through its own generators, leased generators, and purchases of electricity from the private sector (IPP and Projects). PLN's total electricity production in 2022 was 308,002.30 GWh, increased by 18,531.73 GWh or 6.40% compared to 2021 at 289,470.57 GWh. The entire PLN electricity consisted of 179,495.52 GWh (58.28%) from its own power plants, 4,323.52 GWh (1.40%) from leased power plants, and 124,183.27 GWh from purchases (IPP and Projects) (40.32%).

There was a decrease in the amount of electricity from leased generators by 21.23% compared to the previous year as most of the leased power plants were fuel-powered, which only served as a reserve and were operated only during peak load conditions. The electricity production from purchases (IPP and projects) increased by 16.61% compared to the previous

diketahui meningkat 16,61% dibanding tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh meningkatnya kapasitas pembangkit IPP. Kontrak dengan IPP menggunakan skema *Take or Pay* sehingga perlu untuk dioperasikan secara optimal sehingga mendapatkan BPP yang lebih ekonomis.

year, which was due to the increase in IPP generating capacity. Contracts with IPPs use the *Take or Pay* scheme so that they need to be operated optimally so as to get a more economical BPP.

Produksi Listrik

Dalam satuan GWh

Uraian / Description	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Produksi Sendiri / Own Production	179.495,52	177.485,39	2.010,13	1,13
Sewa / Lease	4.323,52	5.488,49	(1.164,97)	(21,23)
Pembelian - IPP dan Proyek / Purchase - IPP and Projects	124.183,27	106.496,69	17.686,58	16,61
Jumlah / Total	308.002,30	289.470,57	18.531,73	6,40

Electricity Production

In GWh

Bauran Energi BBM

Bauran energi Bahan Bakar Minyak (BBM) mengacu pada perbandingan produksi listrik yang berasal dari pembangkit berbahan bakar BBM dengan keseluruhan pembangkit listrik. Realisasi bauran energi BBM dipengaruhi oleh pola operasi di dalam sistem kelistrikan serta tingkat kinerja dari pembangkit berbahan bakar murah, mencakup batu bara, air, dan panas bumi, serta pembangkit berbahan bakar gas dan lain-lain. Strategi operasi pembangkit diterapkan melalui pola *merit order* untuk mencapai sasaran operasional berupa nilai keekonomian sistem kelistrikan (BPP terjaga) serta memenuhi keandalan pasokan listrik (menghindari pemadaman).

Fuel Energy Mix

Fuel (BBM) energy mix refers to the ratio of electricity production from fuel-fired power plants to all power plants. The realization of the fuel energy mix is influenced by the pattern of operations in the electricity system and the performance level of low-cost fuel plants, including coal, water, and geothermal, as well as gas-fired plants and others. The power plant operation strategy is implemented through a merit order pattern to achieve operational targets in the form of the economic value of the electricity system (maintained BPP) and to meet the reliability of electricity supply (to avoid blackouts).

Bauran energi BBM (tanpa pembangkit IPP) pada pembangkit-pembangkit PLN di tahun 2022 adalah sebesar 5,58%, atau lebih baik dibanding tahun 2021 yang sebesar 5,71%, serta lebih baik dibanding sasaran yang ditetapkan di awal tahun yang sebesar 5,76%.

The fuel energy mix (without IPP power plants) in PLN power plants in 2022 was 5.58%, or better than 2021 which was 5.71%, and better than the target set at the beginning of the year which was 5,76%.

Bauran Energi BBM

Dalam satuan persen (%)

Jenis Pembangkit / Type of Power Plant	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
BBM / Fuel Oils	5,58	5,71	(0,13)	(2,28)
Non-BBM / Non-Oil Fuels	94,42	94,29	0,13	0,14
Batu Bara / Coal	62,52	61,98	0,54	0,87
Gas Alam / Natural Gas	22,18	23,37	(1,19)	(5,09)
Panas Bumi / Geothermal	2,24	2,30	(0,06)	(2,61)
Air / Hydro	7,15	6,48	0,67	10,34
Lainnya / Others	0,3300	0,1528	0,1772	115,97
Jumlah / Total	100,00	100,00	-	-

Fuel Energy Mix

In percent (%)

Penurunan bauran energi BBM disebabkan oleh upaya menekan produksi dengan pembangkit BBM karena BPP-nya sangat tinggi. Adapun, produksi listrik sebisa mungkin berasal dari pembangkit-pembangkit yang lebih murah

The decline in the fuel energy mix was caused by efforts to suppress production with fuel generators because the BPP was very high. Meanwhile, electricity was produced using generators that were more affordable as possible.

Pada posisi 31 Desember 2022, total pembangkit EBT terpasang pada sistem PLN baik milik sendiri, sewa maupun IPP mencapai 8.524,76 MW yang masih didominasi oleh PLTA (5.083 MW) dan PLTP (2.533,68 MW).

As of December 31, 2022, the total EBT generators installed in the PLN system, whether owned, rented or IPP, reached 8,524.76 MW which were still dominated by hydropower (5,083 MW) and geothermal power plants (2,533.68 MW).

Realisasi bauran EBT diperoleh dengan membandingkan produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar biomassa dan EBT dengan total produksi listrik dari keseluruhan pembangkit listrik. Pencapaian bauran energi EBT tanpa IPP pada tahun 2022 adalah sebesar 9,72%, sementara realisasi bauran listrik dari EBT dengan IPP adalah sebesar 13,14%.

The total realization of the NRE mix was obtained by comparing the electricity production from biomass-fired and NRE-fired power plants with the total electricity production from all power plants. The achievement of the NRE energy mix without IPP in 2022 was 9.72%, while the realization of the electricity mix from NRE with IPP was 13.14%.

Bauran Energi EBT (Tanpa IPP)

Dalam satuan persen (%)

Bauran Energi EBT / NRE Energy Mix	2022	2021	Perubahan 2021-2022 / Changes in 2021-2022	% Kenaikan / % Increase
EBT Tanpa IPP / NRE without IPP	9,72	8,93	0,79	9,15
EBT Dengan IPP / NRE with IPP	13,14	12,74	0,4	3,14

NRE Mix (Without IPP)

In percent (%)

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan bauran EBT antara lain:

- Adanya peningkatan dalam implementasi *cofiring* batu bara dengan biomassa. Pada 2022, implementasi *cofiring* dilakukan pada 36 PLTU dengan menggunakan biomassa sebesar 585 ribu ton dan menghasilkan energi sebesar 599 GWh, meningkat dari implementasi tahun 2021 pada 27 lokasi PLTU dengan menggunakan 285 ribu ton biomassa dan menghasilkan energi sebanyak 269 GWh.
- Adanya penambahan kapasitas EBT yang menyumbang kenaikan produksi listrik pada tahun 2022. Penambahan kapasitas terpasang pembangkit EBT sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebesar 796 MW yang terdiri dari PLTA/M sebesar 548 MW, PLTP sebesar 225 MW, PLTS sebesar 8 MW, dan PLTBio/Sa sebesar 16 MW.

Several factors that supported an increase in the NRE mix include:

- There was an increase in the implementation of coal co-firing with biomass. In 2022, the co-firing was implemented at 36 PLTUs using 585 thousand tons of biomass and producing 599 GWh of energy, an increase from the implementation in 2021 which was implemented at 27 PLTUs using 285 thousand tons of biomass and producing 269 GWh of energy.
- There was an additional NRE capacity which contributes to an increase in electricity production in 2022. The addition of the installed capacity of NRE generators from 2021 to 2022 is 796 MW consisting of PLTA/M of 548 MW, PLTP of 225 MW, PLTS of 8 MW, and PLTBio/Sa of 16 MW.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Review



Sesuai opini KAP, Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN (Persero) telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

In accordance with KAP's opinion, the Consolidated Financial Statements of PT PLN (Persero) have been presented fairly in all material respects.



TINJAUAN KEUANGAN

Tinjauan keuangan yang akan diungkapkan pada bagian ini mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian PLN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, yang telah diaudit dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Laporan Keuangan Konsolidasian PLN tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PricewaterhouseCoopers atau PwC dengan Surat Izin Praktik Akuntan Publik No. 241/KM.1/2015 tanggal 07/04/2015 bertindak sebagai Akuntan Publik.

Sesuai opini KAP, Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam jutaan rupiah

Laporan Posisi Keuangan / Statements of Financial Position	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	1.518.747.894	1.527.305.081	(8.557.187)	-0.56
Aset Lancar / Current Assets	119.391.382	85.911.375	33.480.007	38.97
Total Aset / Total Assets	1.638.139.276	1.613.216.456	24.922.820	1.54
Ekuitas / Equity	991.450.566	981.607.123	9.843.443	1.00
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	501.617.259	485.070.853	16.546.406	3.41
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	145.071.451	146.538.480	(1.467.029)	-1.00
Total Liabilitas / Total Liabilities	646.688.710	631.609.333	15.079.377	2.39
Total Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	1.638.139.276	1.613.216.456	24.922.820	1.54

Untuk tahun 2022, PLN membukukan pertumbuhan aset sebesar 1,54% atau mencapai Rp24,92 triliun, yaitu dari Rp1.613,21 triliun menjadi sejumlah Rp1.638,14 triliun, didukung oleh penurunan aset tidak lancar senilai Rp8,56 triliun atau 0,56% dibanding tahun sebelumnya. Seiring hal tersebut, aset lancar tercatat mengalami peningkatan sebesar 38,97%, yaitu dari Rp85,91 triliun menjadi sejumlah Rp119,39 triliun.

FINANCIAL REVIEW

The financial review that will be disclosed in this section refers to PLN's Consolidated Financial Statements for the period ending on December 31, 2022, which have been audited and prepared based on the applicable Financial Accounting Standards in Indonesia. PLN's Consolidated Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) PricewaterhouseCoopers or PwC with Public Accountant Practice License No. 241/KM.1/2015 dated 07/04/2015 acting as a Public Accountant.

In accordance with KAP's opinion, the Consolidated Financial Statements presented fairly, in all material respects, the consolidated financial position, financial performance, and consolidated cash flows for the year ended then, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

In millions of rupiah

For 2022, PLN's asset grew by 1.54% or Rp24.92 trillion, from Rp1,613.21 trillion to Rp1,638.14 trillion, supported by a decrease in non-current assets of Rp8.56 trillion or 0.56% compared to the previous year. Consequently, current assets increased by 38.97%, from Rp85.91 trillion to Rp119.39 trillion.

PLN mencatatkan peningkatan ekuitas sebesar 1,00% dibanding tahun sebelumnya, menjadi sejumlah Rp991,45 triliun. Sementara itu, total liabilitas Perseroan tercatat meningkat sebesar 2,39% menjadi Rp646,69 triliun di tahun 2022, seiring peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar 3,41%.

PLN's equity increased by 1.00% compared to the previous year, to Rp991.45 trillion. Meanwhile, the Company's total liabilities increased by 2.39% to Rp646.69 trillion in 2022, along with an increase in non-current liabilities of 3.41%.

ASET

Aset Tidak Lancar

Dalam jutaan rupiah

ASSETS

Non-current Assets

In millions of rupiah

Aset Tidak Lancar / Non-current Assets	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Aset tetap / Property, plant, and equipment	1.433.048.983	1.427.058.358	5.990.625	0,42
Aset hak-guna / Right-of-use assets	29.005.193	29.762.537	(757.344)	-2,54
Properti investasi / Investment properties	5.623.489	5.451.410	172.079	3,16
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama / Investments in associates and joint venture	24.243.468	17.810.839	6.432.629	36,12
Pajak dibayar di muka / Prepaid tax	11.351.639	17.112.377	(5.760.738)	-33,66
Aset pajak tangguhan / Deferred tax assets	427.448	264.705	162.743	61,48
Piutang pihak berelasi / Receivables from related parties	1.288.270	1.160.081	128.189	11,05
Rekening bank dibatasi penggunaannya / Restricted cash in banks	4.454.508	4.861.882	(407.374)	-8,38
Piutang lain-lain / Other receivables	1.348.132	1.145.976	202.156	17,64
Piutang dari Pemerintah / Receivables from Government	2.587.938	18.254.891	(15.666.953)	-85,82
Biaya dibayar di muka dan uang muka / Prepaid expenses and advances	169.367	-	169.367	-
Aset tidak lancar lain / Other non-current assets	5.199.459	4.422.025	777.434	17,58
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-current Assets	1.518.747.894	1.527.305.081	(8.557.187)	-0,56

PLN mencatatkan penurunan total aset tidak lancar sebesar 0,56% secara tahunan, yaitu dari Rp1.527 triliun menjadi sejumlah Rp1.519 triliun per 31 Desember 2022. Penurunan tersebut dikontribusikan oleh tidak adanya piutang dari Pemerintah di tahun 2022, dari sebelumnya sejumlah Rp15.667 miliar, serta penurunan pajak dibayar di muka sejumlah Rp5.761 miliar dari tahun 2021.

PLN's non-current assets decreased by 0.56% on an annual basis, from Rp1,527 trillion to Rp1,519 trillion as of December 31, 2022. Such decrease was contributed by the absence of receivables from the Government in 2022 from the previous amount of Rp15,667 billion, as well as a decrease in prepaid taxes of Rp5,761 billion from 2021.

Penurunan aset tidak lancar serta peningkatan laba bersih untuk tahun 2022 memberi dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan, berupa peningkatan rasio ROI menjadi 0,86% dibanding periode tahun sebelumnya yang sebesar 0,82%.

The decrease in non-current assets and the increase in net profit for 2022 impacted the Company's financial performance, resulting in an increase in the ROI ratio to 0.86% compared to that of the previous year at 0.82%.

Aset Lancar

Dalam jutaan rupiah

Current Assets

In millions of rupiah

Aset Lancar / Current Assets	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents	51.503.096	37.968.399	13.534.697	35,65
Rekening bank dibatasi penggunaannya / Restricted cash in banks	302.386	206.279	96.107	46,59
Investasi jangka pendek / Short-term investments	533.332	297.720	235.612	79,14
Piutang usaha / Trade receivables	24.757.282	23.802.386	954.896	4,01
Piutang dari Pemerintah / Receivables from Government	18.882.562	8.300.000	10.582.562	127,50
Piutang lain-lain / Other receivables	1.368.707	1.249.618	119.089	9,53
Persediaan / Inventories	17.534.804	10.393.419	7.141.385	68,71
Pajak dibayar di muka / Prepaid taxes	3.524.488	2.701.520	822.968	30,46
Biaya dibayar di muka dan uang muka / Prepaid expenses and advances	646.651	808.968	(162.317)	-20,06
Piutang pihak berelasi / Receivables from related parties	231.006	183.066	47.940	26,19
Aset lancar lain / Other current assets	107.068	-	107.068	-
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	119.391.382	85.911.375	33.480.007	38,97

PLN mencatatkan peningkatan aset lancar sebesar 38,97%, yaitu dari Rp85,91 triliun menjadi Rp119,39 triliun per 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh peningkatan kas dan setara kas sejumlah Rp13,53 triliun serta piutang dari Pemerintah Rp10,58 triliun dibanding tahun sebelumnya

PLN's current assets increased by 38.97%, from Rp85.91 trillion to Rp119.39 trillion as of December 31, 2022. Such increase was contributed by an increase in cash and cash equivalents of Rp13.53 trillion and receivables from the Government Rp10.58 trillion compared to previous year.

Peningkatan aset lancar untuk tahun 2022 berdampak terhadap kinerja keuangan PLN, yaitu peningkatan rasio-rasio seperti *current ratio* dari 58,63% menjadi 82,3%, *cash ratio* dari 26,11% menjadi 35,9%, serta *quick ratio* dari 42,36% menjadi 52,91%.

The increase in current assets for 2022 impacted PLN's financial performance, namely an increase in ratios such as the current ratio from 58.63% to 82.3%, the cash ratio from 26.11% to 35.9%, and the quick ratio from 42.36% to 52.91%.

EKUITAS

Dalam jutaan rupiah

EQUITY

In millions of rupiah

Ekuitas / Equity	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Modal saham / Capital stock	145.536.096	135.460.886	10.075.210	7,44
Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital	5.000.000	10.075.210	(5.075.210)	-50,37
Penyertaan Modal Negara dalam proses penerbitan saham / Stock subscription from Government in issuance process	34.608	34.608	-	0,00
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali / Difference in value from transaction with non-controlling interests	(2.100)	-	(2.100)	-
Saldo laba / Retained earnings	164.095.397	149.619.244	14.476.153	9,68
Penghasilan komprehensif lain / Other comprehensive income	675.695.036	685.408.045	(9.713.009)	-1,42
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Equity attributable to owners of the parent	990.359.037	980.597.993	9.761.044	1,00
Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interest	1.091.529	1.009.130	82.399	8,17
Jumlah Ekuitas / Total Equity	991.450.566	981.607.123	9.843.443	1,00



Per 31 Desember 2022, Ekuitas PLN tercatat meningkat sebesar 1,00% secara tahunan dari Rp981,61 triliun menjadi Rp991,45 triliun. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan kenaikan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp14,48 triliun dan peningkatan modal saham sebesar Rp10,08 triliun.

As of December 31, 2022, PLN's Equity increased by 1.00% on an annual basis from Rp981.61 trillion to Rp991.45 trillion. The increase in equity was mainly due to an increase in appropriated retained earnings of Rp14.48 trillion and an increase in share capital of Rp10.08 trillion.

Peningkatan ekuitas pada tahun 2022 tersebut berdampak terhadap kinerja keuangan PLN, yaitu peningkatan ROE dari 1,34% menjadi 1,5%.

The increase in equity in 2022 impacted PLN's financial performance, namely an increase in ROE from 1.34% to 1.5%.

LIABILITAS

Liabilitas Tidak Lancar

Dalam jutaan rupiah

Liabilitas Tidak Lancar / Non-current Liabilities	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Liabilitas pajak tangguhan / Deferred tax liabilities	48.427.461	45.576.375	2.851.086	6,26
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun: / Long-term liabilities - net of current portion				
Penerusan pinjaman / Two-step loans	30.182.450	31.778.793	(1.596.343)	-5,02
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank / Government and non-bank Government financial institution loans	2.202.823	2.927.754	(724.931)	-24,76
Utang sewa / Lease liabilities	8.413.952	10.471.903	(2.057.951)	-19,65
Utang bank / Bank loans	122.437.243	139.045.012	(16.607.769)	-11,94
Utang obligasi dan sukuk ijarah / Bonds payable and sukuk ijarah	198.471.221	187.734.643	10.736.578	5,72
Utang listrik swasta / Electricity purchase payable	5.711.856	5.711.211	645	0,01
Utang KIK - EBA / KIK-EBA loans	-	0	-	-
Utang pihak berelasi / Payables to related parties	-	0	-	-
Utang lain-lain / Other payables	671.526	466.379	205.147	43,99
Pendapatan ditangguhkan / Deferred revenue	20.060.147	13.271.056	6.789.091	51,16
Liabilitas imbalan kerja / Employee benefits liabilities	65.038.580	48.087.727	16.950.853	35,25
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Non-current Liabilities	501.617.259	485.070.853	16.546.406	3,41

LIABILITIES

Non-current Liabilities

In millions of rupiah

PLN mencatatkan peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar 3,41% secara tahunan, menjadi Rp501,62 triliun per 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Liabilitas imbalan kerja Rp16,95 triliun utang obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp10,74 triliun.

PLN's non-current liabilities increased by 3.41% on an annual basis, to Rp501.62 trillion as of December 31, 2022. Such increase was mainly due to an increase in employee benefit liabilities of Rp16.95 trillion and bonds and sukuk ijarah of Rp10.74 trillion.

Peningkatan liabilitas jangka panjang tersebut berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan untuk tahun 2022, yaitu Debt to EBITDA yang naik dari 4,5 kali di tahun 2021 menjadi 4,8 kali di tahun 2022.

The increase in non-current liabilities affected the Company's financial performance for 2022, namely Debt to EBITDA which rose from 4.5 times in 2021 to 4.8 times in 2022.

Liabilitas Jangka Pendek

Dalam jutaan rupiah

Current Liabilities

In millions of rupiah

Liabilitas Jangka Pendek / <i>Current Liabilities</i>	2022	2021	Perubahan / <i>Changes</i>	
			Nominal	Persentase (%) / <i>Percentage (%)</i>
Utang usaha / <i>Trade payables</i>	51.083.262	47.904.756	3.178.506	6,64
Utang pajak / <i>Taxes payable</i>	2.285.782	1.998.768	287.014	14,36
Biaya masih harus dibayar / <i>Accrued expenses</i>	7.353.802	6.528.616	825.186	12,64
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek / <i>Short-term employee benefits liabilities</i>	9.311.116	10.320.993	(1.009.877)	-9,78
Uang jaminan langganan / <i>Customer's security deposits</i>	16.539.411	15.584.069	955.342	6,13
Utang biaya proyek / <i>Project cost payables</i>	2.096.511	114.546	1.981.965	1730,28
Pendapatan ditangguhkan / <i>Deferred revenue</i>	1.143.357	740.906	402.451	54,32
Liabilitas derivatif / <i>Derivative liabilities</i>	-	107.271	(107.271)	-100,00
Utang jangka panjang - jatuh tempo dalam satu tahun: / <i>Current maturities of long-term liabilities:</i>				
Penerusan pinjaman / <i>Two-steps loans</i>	3.002.264	2.920.412	81.852	2,80
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank / <i>Government and non-bank government financial institution loans</i>	1.425.985	1.960.686	(534.701)	-27,27
Utang sewa / <i>Lease liabilities</i>	4.448.363	4.570.040	(121.677)	-2,66
Utang bank / <i>Bank loans</i>	29.972.875	26.841.397	3.131.478	11,67
Utang obligasi dan sukuk ijarah / <i>Bonds payable and sukuk ijarah</i>	2.863.200	5.420.392	(2.557.192)	-47,18
Utang listrik swasta / <i>Electricity purchase payables</i>	528.890	457.545	71.345	15,59
Utang KIK - EBA / <i>KIK - EBA loans</i>	-	569.578	(569.578)	-100,00
Utang lain-lain / <i>Other payables</i>	13.016.633	20.498.505	(7.481.872)	-36,50
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / <i>Total Current Liabilities</i>	145.071.451	146.538.480	(1.467.029)	-1,00

Liabilitas jangka pendek PLN tercatat mengalami penurunan 1,00% secara tahunan, menjadi Rp145,07 triliun per 31 Desember 2022. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan utang lain-lain sebesar Rp7,48 triliun dan utang obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp2,56 triliun.

Peningkatan liabilitas jangka pendek tersebut memberi dampak terhadap kinerja keuangan PLN untuk tahun 2022 yaitu peningkatan rasio-rasio perusahaan mencakup *current ratio* dari 58,6% di tahun 2021 menjadi 82,3% di tahun 2022, *cash ratio* dari 26,1% (2021) menjadi 35,9% (2022), serta *quick ratio* dari 42,4% (2021) menjadi 52,9% (2022).

PLN's current liabilities decreased by 1.00% on an annual basis, to Rp145.07 trillion as of December 31, 2022. The decrease was mainly influenced by a decrease in other payables of Rp7.48 trillion and bonds payable and sukuk ijarah of Rp2.56 trillion.

The increase in current liabilities has an impact on PLN's financial performance for 2022, namely an increase in the Company's ratios including the current ratio from 58.6% in 2021 to 82.3% in 2022, cash ratio from 26.1% in 2021 to 35.9% in 2022, as well as a quick ratio from 42.4% in 2021 to 52.9% in 2022.



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Dalam jutaan rupiah

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OF LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

In millions of rupiah

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif / Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	2022	2021*	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
PENDAPATAN USAHA / REVENUE				
Penjualan tenaga listrik / Sales of electricity	311.057.224	288.862.726	22.194.498	7,68
Penyambungan pelanggan / Customer connection fees	857.468	493.437	364.031	73,77
Subsidi listrik Pemerintah / Government electricity subsidy	58.831.960	49.796.949	9.035.011	18,14
Pendapatan kompensasi / Compensation income	63.649.821	23.392.162	40.257.659	172,10
Lain-lain / Others	6.735.470	4.426.733	2.308.737	52,15
Jumlah Pendapatan Usaha / Total Revenue	441.131.943	366.972.007	74.159.936	20,21
BEBAN USAHA / OPERATING EXPENSES				
Bahan bakar dan pelumas / Fuel and lubricants	151.376.726	118.419.490	32.957.236	27,83
Pembelian tenaga listrik / Purchased electricity	130.230.383	103.553.472	26.676.911	25,76
Sewa / Leases	2.793.187	4.772.014	(1.978.827)	-41,47
Pemeliharaan / Maintenance	23.948.698	22.600.774	1.347.924	5,96
Kepegawaian / Personnel	24.884.860	25.092.756	(207.896)	-0,83
Penyusutan aset tetap / Property, plant and equipment depreciation	40.992.657	38.327.468	2.665.189	6,95
Penyusutan aset hak-guna / Right-of-use assets depreciation	3.063.978	3.113.803	(49.825)	-1,60
Lain-lain / Others	8.903.313	7.239.348	1.663.965	22,99
Jumlah Beban Usaha / Total Operating Expenses	386.193.802	323.119.125	63.074.677	19,52
LABA (RUGI) USAHA / OPERATING PROFIT (LOSS)	54.938.141	43.852.882	11.085.259	25,28
Penghasilan/(beban) lain-lain – bersih / Other Income (expense) – net	2.841.675	(3.719.419)	6.561.094	-176,40
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing – bersih / Gain (loss) on foreign exchange – net	(19.790.474)	2.676.145	(22.466.619)	-839,51
Penghasilan keuangan / Finance income	687.495	787.231	(99.736)	-12,67
Beban keuangan / Finance costs	(17.135.165)	(20.375.755)	3.240.590	-15,90
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	21.541.672	23.221.084	(1.679.412)	-7,23
Beban Pajak / Income Tax Expense	(7.126.952)	(10.046.207)	2.919.255	-29,06
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year	14.414.720	13.174.877	1.239.843	9,41
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak / Other comprehensive income for the year after tax	(9.006.358)	24.007.703	(33.014.061)	-137,51
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the year	5.408.362	37.182.580	(31.774.218)	-85,45
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada: / Profit for the year attributable to:				
Pemilik entitas induk / Owners of the parent	14.334.040	13.128.626	1.205.414	9,18
Keentingan non-pengendali / Non-controlling interest	80.680	46.251	34.429	74,44
Jumlah / Total	14.414.720	13.174.877	1.239.843	9,41
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada: / Total comprehensive income for the year attributable to:				
Pemilik entitas induk / Owners of the parent	5.316.879	37.107.612	(31.790.733)	-85,67
Keentingan non-pengendali / Non-controlling interest	91.483	74.968	16.515	22,03
Jumlah / Total	5.408.362	37.182.580	(31.774.218)	-85,45
Laba Per Saham Dasar/Dilusian (dalam Rupiah penuh) / Basic/Diluted Earnings per Share (in Rupiah full amount)	99.339	96.972	2.367	2,44

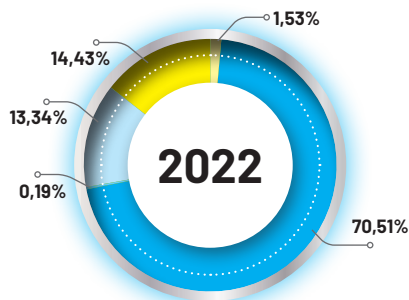
*Direklasifikasikan kembali

*Reclassified

Pendapatan Usaha

Untuk tahun 2022, PLN membukukan pendapatan usaha sejumlah Rp441,13 triliun atau meningkat 20,21% dibanding perolehan untuk tahun 2021. Kontribusi pendapatan usaha paling dominan berasal dari komponen penjualan tenaga listrik dengan persentase 70,51%, dibandingkan tahun 2021 yang 78,72%. Selain itu, komponen pendapatan kompensasi mencatatkan porsi yang cukup besar yaitu 14,43%, dibanding tahun 2021 yang 6,37%. Kemudian, porsi tersebut diikuti oleh komponen subsidi pemerintah dengan persentase 13,34% terhadap jumlah pendapatan usaha, pendapatan lain-lain dengan persentase 1,53%, serta penyambungan pelanggan dengan persentase 0,19%.

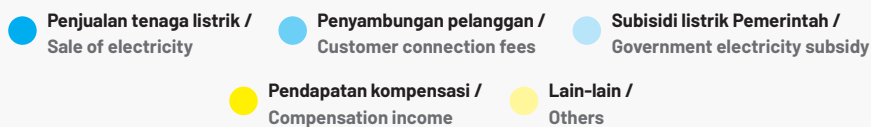
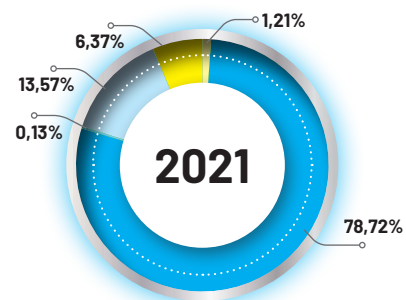
Komposisi Pendapatan Usaha



Revenue

PLN's total revenue in 2022 amounted to 441.13 trillion, an increase of 20.21% compared to that of 2021. The most dominant contribution to the revenue came from the electricity sales component with a percentage of 70.51%, compared to 2021 which was 78.72%. In addition, the compensation income component recorded a sizable portion of 14.43%, compared to 2021 at 6.37%. The next portions are the government subsidy component with a percentage of 13.34% of total revenue, other income with a percentage of 1.53%, and customer connection with a percentage of 0.19%.

Revenue Composition



Penjualan Tenaga Listrik

Pendapatan usaha dari penjualan tenaga listrik PLN tercatat meningkat sebesar 7,7% secara tahunan, dari Rp288,86 triliun menjadi Rp311,06 triliun di tahun 2022.

Terkait hal itu, pada proses pelaksanaan penjualan tenaga listrik, terdapat pengujian dan masa uji coba (*commissioning test*) yang merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. Beban dan pendapatan atas penjualan tenaga listrik yang terjadi pada masa uji coba dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan dikarenakan instalasi listrik belum beroperasi secara komersial.

Sale of Electricity

Revenue from the sale of electricity increased by 7.7% on an annual basis, from Rp288.86 trillion to Rp311.06 trillion in 2022.

Related to this, there are testing and commissioning test in the process of implementing the sale of electricity which are a series of inspection and testing activities for electrical installations that have been completed and are going into operation. The costs and revenues from the sale of electricity that occurred during the commissioning test are capitalized into construction in progress because the electrical installation has not yet been commercially operated.

Beban masa uji coba PLN di tahun 2022 adalah sejumlah Rp255,88 miliar. Dengan demikian, hasil penjualan tenaga listrik bersih (setelah dikurangi masa uji coba) untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp311,06 triliun.

Peningkatan pendapatan dari penjualan listrik di tahun 2022 terutama dipengaruhi oleh peningkatan penjualan dari segmen pelanggan umum yang meningkat 7,32% secara tahunan, menjadi Rp289,3 triliun. Adapun, kontribusi dari segmen pelanggan umum untuk tahun 2022 adalah 93,24%, dibanding pada tahun 2021 yang sebesar 93,24%.

Penjualan tenaga listrik untuk tahun 2022 dan 2021 didasarkan pada Tarif Dasar Listrik, yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 21 Tahun 2017 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN Batam.

Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. T162/TL.04/MEM.L/2022 tanggal 2 Juni 2022, perihal penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) periode Juli - September 2022, menyatakan bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) periode Juli - September 2022 untuk golongan pelanggan R-2/TR, R-3/TR, dan Pemerintah disesuaikan sebagai berikut:

1. R-2/TR : Rp1.699,53/kWh;
2. R-3/TR : Rp1,699,53/kWh;
3. P-1/TR : Rp1.699,53/kWh;
4. P-2/TM WBP: Kx Rp1.415,01/kWh; LWBP Rp1.415,01/kWh; kVArh Rp1.522,88/kVArh;
5. P-3/TR Rp1.699,53/kWh.

Sedangkan untuk golongan pelanggan non-subsidi lain adalah tetap, yaitu sama dengan Tarif Tenaga Listrik periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2022.

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, total penjualan tenaga listrik termasuk penerimaan stimulus Covid-19 dari Pemerintah masing-masing adalah sebesar nihil dan Rp9,97 triliun. Penerimaan stimulus Covid-19 terdiri dari diskon tarif untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri dan pembebasan rekening minimum, serta biaya beban dan abonemen.

Expenses for PLN's commissioning test in 2022 amounted to Rp255.88 billion. Thus, the result of net electricity sales (net of commissioning test) for 2022 amounted to Rp311.06trillion.

The increase in revenue from sales of electricity in 2022 was mainly influenced by an increase in sales from the public customer segment which increased by 7.32% on an annual basis to Rp289.3 trillion. Meanwhile, the contribution from the public customer segment for 2022 amounted to 93.24%, compared to 2021 at 93.24%.

Sales of electricity in 2022 and 2021 were based on the Basic Electricity Tariff determined by the Government and Local Government as follows:

- Regulation of the Minister of ESDM No. 28 of 2016 with the latest amendment of Regulation of the Minister of ESDM No. 3 of 2020.
- Regulation of the Governor of Riau Islands No. 21 of 2017 on the tariff of electricity provided by PLN Batam.

Letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources No. T162/TL.04/MEM.L/2022 dated June 2, 2022 on the adjustment in electricity tariff adjustment for the period of July - September 2022, states that the electricity tariff adjustment for the period of July - September 2022 for class R-2/TR, R-3/TR customers, and the Government are adjusted as follows:

1. R-2/TR: Rp1,699.53/kWh;
2. R-3/TR: Rp1,699.53/kWh;
3. P-1/TR: Rp1,699.53/kWh;
4. P-2/TM WBP: Kx Rp1,415.01/kWh; LWBP Rp1,415.01/kWh; kVArh Rp1,522.88/kVArh;
5. P-3/TR Rp1,699.53/kWh.

Whereas for other non-subsidized customer groups it is fixed, which is the same as the Electricity Tariff for the second quarter (April-June) of 2022.

For the year ended on December 31, 2022 and 2021, the total sales of electricity included receipts of Covid-19 stimulus from the Government of Indonesia that were nil and Rp9.97 trillion, respectively. Receipts of Covid-19 stimulus consisted of tariff discount for households, business and industrial customers and minimum account exemption, expenses, and subscription fees.

Program stimulus sektor ketenagalistrikan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan No. B-467/TL.04/DJL.03/2021 tanggal 2 Maret 2021 mengacu pada hasil Rapat Terbatas tanggal 28 Desember 2020 serta tindak lanjut kesepakatan 3 (tiga) Menteri (Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN) tanggal 31 Desember 2020 yang membahas Kebijakan Subsidi Listrik dan Program Stimulus Sektor Ketenagalistrikan.

Perincian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik Perusahaan bagi Pelanggan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri Tahun 2021 diperpanjang untuk rekening listrik dan pembelian token bulan April sampai dengan Juni 2021, dengan ketentuan:
 - a. Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA), bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450 VA), dan industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA):
 - Reguler (Pascabayar): rekening listrik diberikan diskon sebesar 50% (biaya pemakaian dan biaya beban);
 - Prabayar: diberikan diskon tarif listrik untuk pembelian token sebesar 50%;
 - b. Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA):
 - Reguler (Pascabayar): rekening listrik diberikan diskon sebesar 25% (biaya pemakaian dan biaya beban);
 - Prabayar: diberikan diskon tarif listrik untuk pembelian token sebesar 25%;
2. Dalam pemberian diskon tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada butir 1, Perusahaan wajib memperhatikan besaran konsumsi energi listrik pelanggan dengan mempertimbangkan batasan maksimal jam nyala per bulan;
3. Pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum diperpanjang untuk rekening bulan April sampai dengan Juni 2021 dengan ketentuan pembebasan sebesar 50%.

Stimulus program for electricity sector determined by the Government based on Letter of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of Electricity No. B-467/TL.04/DJL.03/2021 dated March 2, 2021, refers to the results of the Limited Meeting on December 28, 2020 and the follow-up of agreement of the 3 (three) Ministers (Minister of ESDM, Minister of Finance, and Minister of SOEs) on December 31, 2020 which covered the Electricity Subsidy Policy and the Electricity Sector Stimulus Program.

Details regarding these matters are as follows:

1. The implementation of the Company's electricity tariff discounts for Households, Business, and Industrial Customers in 2021 was extended for electricity bills and token purchases from April to June 2021, with the following conditions:
 - a. Customers of 450 VA (R1/TR 450 VA) power households, 450 VA (B1/TR 450 VA) small businesses and 450 VA power (I1/TR 450 VA) small industries:
 - Regular (Postpaid): electricity bills were given a discount of 50% (usage fees and charges);
 - Prepaid: given a 50% discount on electricity rates for token purchases;
 - b. Subsidized 900 VA power household customers (R1/TR 900 VA):
 - Regular (Postpaid): electricity bills were given a discount of 25% (usage fees and load charges);
 - Prepaid: given a 25% discount on electricity rates for token purchases;
2. In granting electricity tariff discounts as referred to in point 1, PT PLN (Persero) was obliged to pay attention to the amount of electricity consumption of customers by taking into account the maximum limit on usage hours per month;
3. Exemption from expense or subscription fees, as well as exemption from the application of the minimum account provisions was extended for accounts in April to June 2021 with a provision of 50% exemption.

Perpanjangan sampai dengan triwulan III disampaikan melalui surat tanggal 2 Juli 2021 dari Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor B-1641/TL.04/DJL.3/2021. Selanjutnya, perpanjangan sampai dengan triwulan IV disampaikan melalui surat tanggal 22 Juli 2021 dari Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor B-1734/TL.04/DJL.3/2021.

Subsidi Listrik Pemerintah

Untuk 2022, PLN membukukan peningkatan pendapatan dari subsidi sebesar 18,14% secara tahunan dari Rp49,80 triliun menjadi Rp58,83 triliun.

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah margin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif yang telah mendapatkan penyesuaian tarif otomatis. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui PLN. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik tahun anggaran 2022 dan 2021 dilakukan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.02/2021, tanggal 7 Desember 2021 dan No. 174/PMK.02/2019, tanggal 22 November 2019. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi biaya pokok penyediaan tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. Biaya pokok penyediaan tenaga listrik dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, di bawah Kementerian ESDM.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. DIPA-999.07.1.979321/2022 dan No. DIPA-999.07.1.979321/2021 revisi ke-2, pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2022 dan 2021 ditetapkan masing-masing sebesar Rp56,40 triliun dan Rp53,59 triliun. Pagu tertinggi tersebut termasuk 7% margin di atas biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

The extension until the third quarter was submitted by letter dated July 2, 2021 from the Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of Electricity No. B-1641/TL.04/DJL.3/2021. Furthermore, the extension until the fourth quarter was submitted by letter dated July 22, 2021 from the Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of Electricity Number B-1734/TL.04/DJL.3/2021.

Government Electricity Subsidy

Revenue from subsidies in 2022 increased by 18.14% on an annual basis from Rp49.80 trillion to Rp58.83 trillion.

Subsidy income is the income from the Government of Indonesia on the difference between allowable costs plus a margin of 7% with the actual selling price per each group of tariffs except for groups that have received automatic tariff adjustments. This refers to Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 3 of 2020 on the fourth amendment to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 28 of 2016 on electricity tariffs provided by PT PLN (Persero).

The Government of the Republic of Indonesia has provided electricity subsidy to customers through the Company. The procedures for calculation and payment of electricity subsidy for Budget 2022 and 2021 Fiscal Years referred to Regulations of Minister of Finance No. 178/PMK.02/2021, dated December 7, 2021 and No. 174/PMK.02/2019, dated November 22, 2019. The electricity subsidy was calculated from the negative difference between the average selling price of electricity (Rp/kWh) for each tariff class minus the basic cost of providing electricity (Rp/kWh) in the voltage in each tariff class multiplied by the sales volume (kWh) for each tariff group. The basic cost of providing electricity was calculated based on a formula determined by the Directorate General of Electricity, under the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Based on the Letter of Approval of the Budget Implementation List (DIPA) No. DIPA-999.07.1.979321/2022 and No. DIPA-999.07.1.979321/2021 2nd revision, the highest ceiling for electricity subsidies for the 2022 and 2021 fiscal years was set at Rp56.40 trillion and Rp53.59 trillion, respectively. The highest ceiling included a 7% margin above the cost of providing electricity.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Direktorat Jenderal Anggaran, di bawah Kementerian Keuangan.

Pendapatan Kompensasi

Pendapatan kompensasi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas tarif golongan non-subsidi yang sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan tarif. Kompensasi dari Pemerintah diakui sebagai pendapatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan/atau BPK Republik Indonesia, dan jumlahnya telah diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah Indonesia. Nilai kompensasi merupakan estimasi manajemen yang pada akhir tahun akan ditinjau oleh BPKP dan/atau BPK.

PLN membukukan pendapatan kompensasi sejumlah Rp63,65 triliun di tahun 2022, atau meningkat 172,10% dibandingkan tahun 2021 yang sejumlah Rp23,39 triliun. BPKP No. SP-137/D4/04/2022 tanggal 8 Februari 2022 kepada Menteri Keuangan, yang menyatakan bahwa penggantian biaya pokok penyediaan dalam bentuk kompensasi dari Pemerintah atas kehilangan potensi pendapatan tenaga listrik untuk golongan tarif non-subsidi tahun 2021 sebesar Rp24,59 triliun. Perseroan telah menerima pembayaran piutang kompensasi tahun 2021 secara penuh pada tanggal 1 Juli 2022.

Berdasarkan PMK No. 159/PMK.02/2022, Perusahaan mencatat pendapatan dan piutang kompensasi sesuai dengan asersi manajemen dan akan ditetapkan sebagai kebijakan dana kompensasi oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil review oleh BPKP. Finalisasi kebijakan dana kompensasi tersebut akan dilakukan berdasarkan LHP BPK. Perbedaan yang timbul dari hasil audit BPK akan mempengaruhi laba rugi pada tahun audit tersebut difinalisasi. Nilai piutang kompensasi pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang akan di-review oleh BPKP dan/atau BPK.

Selama 2022, pendapatan kompensasi sebesar Rp63,65 triliun di mana Perusahaan menerima pembayaran kompensasi tahun 2022 sebesar Rp72,13 triliun. Saldo piutang kompensasi tahun 2022 adalah sebesar Rp16,79 triliun.

The amount of electricity subsidy within a budget year was finalised based on the result of the compliance audit on the usage of electricity subsidy performed by an auditor assigned by the Directorate General of Budget under the Ministry of Finance.

Compensation Income

Compensation income is income from the Government of Indonesia for non-subsidized tariffs, which since 2017 have not experienced changes in tariff increases. Compensation from the Government is recognized as income based on the Audit Results Report (LHP) of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and/or BPK of the Republic of Indonesia and the amount has been recognized as a liability by the Government of Indonesia. The compensation value is a management estimate which will be reviewed by BPKP and/or BPK at the end of the year.

PLN posted compensation income of Rp63.65 trillion in 2022, or an increase of 172.10% compared to 2021 at Rp23.39 trillion. The compensation income is based on BPKP Letter No. SP-137/D4/04/2022 dated February 8, 2022 to the Minister of Finance which states that the replacement of the basic cost of supply in the form of compensation from the Government for the loss of potential electricity revenue for the non-subsidized tariff class in 2021 at Rp24.59 trillion. The Company has received payment of compensation receivables for 2021 in full on July 1, 2022.

Based on PMK No. 159/PMK.02/2022, the Company records compensation income and receivables in accordance with management's assertions and will be determined as a compensation fund policy by the Minister of Finance based on the results of review by BPKP. The finalization of the compensation fund policy will be carried out based on BPK's LHP. Differences arising from the results of the BPK audit will affect profit and loss in the year the audit is finalized. The value of compensation receivables as of December 31, 2022 is based on management's best estimate which will be reviewed by BPKP and/or BPK.

Compensation income in 2022 amounted to Rp63.65 trillion where the Company has received compensation payments at Rp72.13 trillion in the fiscal year. The balance of compensation receivables in 2022 was Rp16.79 trillion.

Pendapatan Usaha Lain-lain

Pendapatan usaha lain-lain mengacu pada pendapatan yang berasal dari pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi, sewa trafo, dan jasa-jasa administratif lainnya. Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada periode akuntansi saat jasa tersebut telah diberikan. Untuk kontrak harga tetap, pendapatan diakui berdasarkan servis aktual yang diberikan hingga akhir periode pelaporan sebagai proporsi dari total servis yang akan diberikan karena pelanggan telah menerima dan menggunakan manfaat secara simultan.

Selain itu, pendapatan usaha lain-lain juga dikontribusikan dari pendapatan penjualan batubara yang diakui pada setiap penjualan individu ketika mengontrol transfer ke pelanggan. Kontrol beralih ke pelanggan dan pendapatan penjualan diakui ketika batu bara dimuat ke kapal saat proses pengiriman ke pelabuhan tujuan atau tempat pelanggan. Penjualan batubara ini dilakukan dengan syarat *Free On Board* (FOB), di mana PLN tidak memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan atau asuransi setelah kontrol barang telah berlalu dari pelabuhan muat. Untuk jangka waktu ini, hanya ada satu kewajiban pelaksanaan, yaitu untuk penyediaan produk pada titik lokasi kontrol lewat. Selain itu, PLN menjual batu bara dengan syarat *Cost, Insurance and Freight* (CIF), tetapi berdasarkan perjanjian penjualan, kepemilikan, dan risiko kerugian atas batu bara akan tetap berada pada Perseroan, sampai batu bara melewati pelabuhan bongkar.

Di tahun 2022, PLN mencatatkan pendapatan usaha lain-lain sebesar Rp6,7 triliun, meningkat 52,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp4,43 triliun. Perincian pendapatan usaha lain-lain PLN tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Usaha Lain-Lain 2021-2022

Dalam jutaan rupiah

Pendapatan Lain-Lain / Other Revenue	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Penjualan batubara / Coal sales	2.671.192	1.043.968	1.627.224	155,9
Jaringan dan jasa telekomunikasi / Telecommunication network and service	2.116.327	1.730.517	385.810	22,3
Jasa pemeliharaan / Maintenance service	676.723	459.245	217.478	47,4
Sewa transformator / Transformer rental	447.662	396.300	51.362	13,0
Perubahan daya tersambung dan administrasi / Upgrading of electricity power and administration	93.067	58.974	34.093	57,8
Lain-lain / Others	730.499	737.729	(7.230)	-1,0
Jumlah / Total	6.735.470	4.426.733	2.308.737	52,2

Other Revenue

Other revenue represents income from network and telecommunication services, transformer rental and other administrative services. Revenue from rendering services is recognized in the accounting period in which the services are rendered. For fixed price contracts, revenue is recognized based on the actual services provided until the end of the reporting period as a proportion of the total services to be provided because the customers have received and used the benefits simultaneously.

In addition, other revenue is also derived from coal sales revenue which is recognized in each individual sale when controlling transfers to customers. Control passes to the customer and sales revenue is recognized when coal is loaded onto ships during the shipping process to the port of destination or customer location. The sale of coal is carried out on *Free On Board* (FOB) terms, where PLN has no responsibility for transportation or insurance after control of the goods has passed from the port of loading. For this period, there is only one performance obligation, namely to supply products at the control point of passage. In addition, PLN sells coal under *Cost, Insurance and Freight* (CIF) terms, but based on the sales agreement, ownership and risk of loss of coal will remain with the Company, until the coal passes the unloading port.

In 2022, PLN recorded other revenue of Rp6.7 trillion, increased by 52.2% compared to the previous year at Rp4.43 trillion. Details of PLN's other revenue for 2022 are as follows:

Other Income in 2021-2022

In millions of rupiah

Pendapatan Lain-Lain / Other Revenue	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Penjualan batubara / Coal sales	2.671.192	1.043.968	1.627.224	155,9
Jaringan dan jasa telekomunikasi / Telecommunication network and service	2.116.327	1.730.517	385.810	22,3
Jasa pemeliharaan / Maintenance service	676.723	459.245	217.478	47,4
Sewa transformator / Transformer rental	447.662	396.300	51.362	13,0
Perubahan daya tersambung dan administrasi / Upgrading of electricity power and administration	93.067	58.974	34.093	57,8
Lain-lain / Others	730.499	737.729	(7.230)	-1,0
Jumlah / Total	6.735.470	4.426.733	2.308.737	52,2

Penyambungan Pelanggan

PLN mengakui biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan yang digunakan untuk membangun atau mengakuisisi aset tetap untuk menghubungkan pelanggan secara tidak langsung berkaitan erat dengan pasokan listrik kepada pelanggan. Pasokan listrik dan biaya penyambungan merupakan satu kesatuan karena pelanggan tidak dapat memperoleh manfaat dari kedua layanan ini secara terpisah. Infrastruktur penyambungan berfungsi untuk memenuhi kewajiban penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan. Pasokan listrik dan biaya penyambungan pada dasarnya sama dan memiliki pola transfer yang sama ke pelanggan. Oleh karena itu, biaya penyambungan dan pasokan tenaga listrik merupakan satu kewajiban pelaksanaan. Dengan demikian, biaya penyambungan diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi dengan tarif 5% per tahun dihitung sejak tanggal koneksi.

Untuk tahun 2022, biaya jasa penyambungan listrik pelanggan yang diakui sebagai pendapatan usaha PLN adalah sebesar Rp857 miliar, meningkat 73,77% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sejumlah Rp493 miliar. Terkait hal tersebut, biaya penyambungan diamortisasi sejak tanggal penyambungan sesuai masa estimasi konsumsi pelanggan. Konsumsi pelanggan diestimasikan berdasarkan rata-rata masa manfaat aset distribusi.

Beban Usaha

Seiring meningkatnya penjualan, PLN membukukan peningkatan beban usaha sebesar 19,52% secara tahunan, menjadi sejumlah Rp386,19 triliun untuk tahun 2022. Secara terperinci, peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan:

1. Bahan bakar dan pelumas s.d Desember 2022 sebesar Rp151.377 miliar, meningkat sebesar 27,8% atau Rp32.957 miliar dibandingkan tahun lalu yang membukukan beban bahan bakar & pelumas sebesar Rp118.419 miliar;
2. Beban pembelian tenaga listrik meningkat sebesar Rp26.677 miliar atau 25,8% dari semula di tahun 2021 sebesar Rp103.553 miliar menjadi Rp130.230 miliar di tahun 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan karena naiknya pembelian tenaga listrik dari 106,5 TWh di Desember 2021 menjadi 124,2 TWh di Desember 2022. Peningkatan pembelian tenaga listrik ini juga dipengaruhi oleh depresiasi nilai Rupiah terhadap mata uang USD. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD mempengaruhi beban pembelian energi dari IPP dikarenakan kurang lebih sebesar 50% dari jumlah beban pembelian tenaga listrik menggunakan mata uang asing;

Customer Connection

PLN views the connection fees received from customers that are used to build or acquire fixed assets to connect customers indirectly closely related to the supply of electricity to customers. The power supply and connection costs are integral as the customer cannot benefit from these two services on their own. The connection infrastructure serves to fulfil the obligation to provide electricity to customers. The power supply and connection costs are essentially the same, and have the same transfer pattern to the customer. Therefore, the cost of connecting and supplying electricity is an implementation obligation. Accordingly, the connection fee is recognized as deferred revenue and amortized at a rate of 5% per annum from the connection date.

For 2022, customer connection fees that were recognized as PLN's revenue amounted to Rp857 billion, increased by 73.77% compared to 2021 at Rp493 billion. The connection fees are amortized from the connection date according to the estimated customer consumption period. Customer consumption is estimated based on the average useful life of the distribution assets.

Operating Expenses

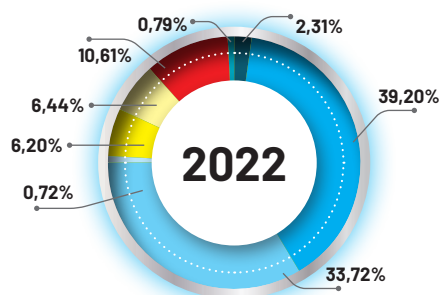
As sales increased, PLN posted an increase in operating expenses by 19.52% on an annual basis to Rp386.19 trillion for 2022. In detail, such increase was due to:

1. Fuel and lubricants as of December 2022 at Rp151,377 billion, an increase of 27.8% or Rp32,957 billion compared to last year which posted fuel & lubricant expenses of Rp118,419 billion;
2. The cost of purchasing electricity increased by Rp26,677 billion or 25.8% from Rp103,553 billion in 2021 to Rp130,230 billion in 2022. This increase was mainly due to an increase in electricity purchases from 106.5 TWh in December 2021 to 124.2 TWh in December 2022. This increase in electricity purchases was also affected by the depreciation of Rupiah against the USD. Fluctuations in the exchange rate of rupiah against the USD affected the cost of purchasing energy from IPPs because approximately 50% of the total cost of purchasing electricity was in foreign currency;

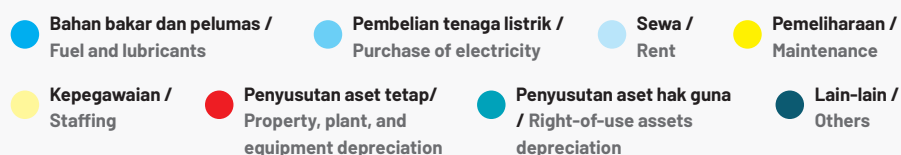
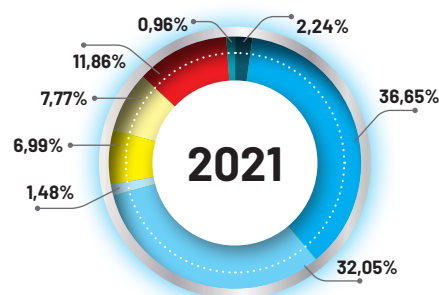
3. Beban penyusutan aset tetap sebesar Rp40.993 miliar, lebih tinggi 7,0% atau Rp2.665 miliar dibandingkan dengan periode lalu sebesar Rp38.327 miliar. Beban penyusutan aset hak guna nilai untuk Desember 2022 lebih rendah 1,6% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

3. Property, plant and equipment depreciation expenses amounted to Rp40,993 billion, 7.0% or Rp2,665 billion higher compared to the previous period at Rp38,327 billion. The depreciation expense on right-of-use assets for December 2022 was 1.6% lower compared to the same period in 2021.

Komposisi Beban Usaha



Operating Expenses Composition



Kenaikan beban usaha PLN pada tahun 2022 tidak berdampak terhadap kinerja keuangan PLN.

The increase in operating expenses in 2022 did not have an impact on PLN's financial performance.

Labanya (Rugi) Usaha

Seiring peningkatan beban usaha tersebut, laba usaha PLN tercatat naik 25,28% secara tahunan dari sebelumnya Rp43,85 triliun menjadi Rp54,94 triliun untuk tahun 2022. Peningkatan laba usaha tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan tenaga listrik dan pendapatan kompensasi.

Operating Profit (Loss)

Along with the increase in operating expenses, PLN's operating profit increased by 25.28% on an annual basis from the previous Rp43.85 trillion to Rp54.94 trillion in 2022. The increase in operating profit was due to increase in electricity sales and compensation income.

Penghasilan/(Beban) Lain-Lain - Bersih

Untuk tahun 2022, PLN membukukan penghasilan lain-lain - bersih sejumlah Rp2,84 triliun, atau meningkat dibanding beban lain-lain - bersih sejumlah Rp3,72 triliun. Realisasi penghasilan lain-lain - bersih tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya kenaikan bagian laba bersih perusahaan asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp444,4 miliar. Selain itu pada tahun 2021 terdapat pencadangan atas ketidakpastian dalam perlakuan pajak berupa beban sebesar Rp4,52 triliun.

Other Income/(Expenses) - Net

Other income - net in 2022 amounted to Rp2.84 trillion, or an increase by Rp3.72 trillion compared to other expenses - net. The realization of other income - net was mainly influenced by an increase in the share of net profit of associates and joint ventures of Rp444.4 billion. In addition, there was a provision for uncertainty in tax treatment in the form of expense of Rp4.52 trillion in 2021.

Realisasi penghasilan dibanding beban lain-lain – bersih tahun 2022 tersebut tidak berdampak terhadap kinerja keuangan PLN.

Beban Keuangan

Beban keuangan PLN tercatat mengalami penurunan sebesar 15,90%, dari sejumlah Rp20,38 triliun menjadi Rp17,13 triliun untuk tahun 2022. Penurunan ini seiring dengan berkurangnya saldo *interest bearing debt*.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak PLN tercatat mengalami penurunan sebesar 7,23%, dari sejumlah Rp23,22 triliun di tahun 2021 menjadi Rp21,54 triliun di tahun 2022. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kerugian selisih kurs sebesar Rp19,79 triliun atau 840% dibanding tahun 2021 dengan keuntungan selisih kurs sebesar Rp2,68 triliun.

Kenaikan kerugian selisih kurs tersebut memberi dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan, berupa penurunan EBITDA dari Rp93,9 triliun menjadi Rp84,7 triliun, EBITDA Margin dari 27,2% menjadi 19,2%, dan kenaikan Debt to EBITDA dari 4,5 kali menjadi 4,8 kali.

Laba Tahun Berjalan

Meskipun EBITDA Perseroan mengalami penurunan sebagai dampak dari meningkatnya kerugian selisih kurs, PLN mampu mencatatkan laba tahun berjalan sejumlah Rp14,41 triliun di tahun 2022, atau meningkat sebesar 9,41% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp13,17 triliun. Atas keseluruhan jumlah tersebut, PLN mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk mencapai Rp14,33 triliun, atau meningkat sebesar 9,19% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp13,13 triliun. Peningkatan laba tahun berjalan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan penjualan tenaga listrik, penurunan biaya sewa, serta penurunan beban pajak.

Peningkatan laba tahun berjalan tersebut memberi dampak terhadap kinerja keuangan PLN, berupa peningkatan laba per saham/dilusi dari Rp96.972 menjadi Rp99.339, dan peningkatan ROE dari 1,34% menjadi 1,45%.

Realization of income compared to other expenses – net in 2022 has no impact on PLN's financial performance.

Finance Costs

financial expenses of PLN decreased by 15.90%, from Rp20.38 trillion to Rp17.13 trillion in 2022. The decrease was in line with the decreased interest-bearing debt balance.

Profit Before Tax

PLN's profit before tax in 2022 decreased by 7,23%, from Rp23.22 trillion in 2021 to Rp21.54 trillion. This was mainly due to an increase in loss on foreign exchange of Rp19.79 trillion or 840% compared to 2021 with a gain on foreign exchange of Rp2.68 trillion.

The increase in foreign exchange losses had an impact on the Company's financial performance, in the form of a decrease in EBITDA from IDR 93.9 trillion to IDR 84.7 trillion, EBITDA Margin from 27.2% to 19.2%, and Debt to EBITDA increase from 4.5 times to 4.8 times.

Profit for the Year

Even though the Company's EBITDA decreased as a result of the increase in foreign exchange losses, PLN was able to achieve profit for the year of PLN in 2022 amounted to Rp14.41 trillion, an increase by 9,41% compared to the previous year at Rp13.17 trillion. For this entire amount, PLN recorded profit for the year attributable to the owners of the parent at Rp14.33 trillion or an increase of 9.19% compared to the previous year at Rp13.13 trillion. The increase in profit for the year was affected by an increase in sales of electricity, a decrease in lease costs, and a decrease in tax expense.

The increase in profit for the year had an impact on PLN's financial performance, in the form of an increase in earnings per share/diluted from Rp96,972 to Rp99,339 and an increase in ROE from 1.34% to 1.45%.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Perseroan membukukan penurunan penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar 85,48% secara tahunan, dari Rp37,18 triliun menjadi Rp5,40 triliun untuk tahun 2022. Penurunan tersebut terjadi seiring penurunan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp33,01 triliun, dari Rp24,01 triliun di tahun 2021 menjadi minus Rp9,00 triliun di tahun 2022.

Comprehensive Income for the Year

Comprehensive income for the year decreased by 85.48% on an annual basis, from Rp37.18 trillion to Rp5.40 trillion in 2022. Such decrease occurred in line with a decrease in other comprehensive income for the year after tax of Rp24.12 trillion, from Rp33.01 trillion in 2021 to minus Rp9.00 trillion in 2022.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Dalam miliaran rupiah

Laporan Arus Kas / Statements of Cash Flows	2022	2021	Perubahan / Changes	
			Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi / Net cash provided from operating activities	97.710	68.621	29.089	42,4
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi / Net cash used in investing activities	(54.764)	(59.552)	4.788	(8,0)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan / Net cash used in financing activities	(30.092)	(25.881)	(4.211)	16,27
(Penurunan)/Kenaikan bersih kas dan setara kas / Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents	12.854	(16.812)	29.666	(176,5)
Kas dan setara kas awal tahun / Cash and cash equivalents at beginning of the year	37.968	54.735	(16.767)	(30,63)
Kas dan setara kas akhir tahun / Cash and cash equivalents at end of year	51.503	37.968	13.535	35,6

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

In billions of rupiah

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Di tahun 2022, Perseroan membukukan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sejumlah Rp97,71 triliun, atau meningkat 42,39% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp68,62 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh telah diterimanya pendapatan kompensasi sebesar Rp17,90 triliun untuk periode 2021 dan Rp72,13 triliun untuk periode 2022.

Cash Flows from Operating Activities

Net cash provided from operating activities in 2022 amounted to Rp97.71 trillion, an increase of 42.39% compared to the previous year at Rp68.62 trillion. The increase was mainly influenced by receipt of compensation income of Rp17.90 trillion for the 2021 period and Rp72.13 trillion for the 2022.

Peningkatan kas bersih dari aktivitas operasi tersebut berdampak terhadap kinerja keuangan PLN berupa naiknya Rasio CFO dan juga DSCR basis arus kas.

The increase in net cash from operating activities had an impact on PLN's financial performance in the form of an increase in the CFO ratio and the DSCR on a cash flow basis.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Secara kumulatif, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi oleh PLN untuk tahun 2022 tercatat mencapai Rp54,76 triliun atau menurun 8,0% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp59,55 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi karena perusahaan masih melakukan prioritas *capital expenditure* untuk merelaksasi kas yang dimilikinya.

Penurunan kas bersih untuk aktivitas investasi tersebut tidak berdampak terhadap kinerja keuangan PLN.

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Perseroan membukukan pengeluaran kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun 2022 meningkat sebesar 16,27%, dari Rp25,88 triliun menjadi Rp30,09 triliun. Peningkatan tersebut terutama didukung kondisi likuiditas PLN yang masih stabil sehingga perusahaan lebih banyak melakukan pembayaran utang dan mengurangi penarikan utang, serta relatif rendahnya realisasi investasi.

Peningkatan kas bersih untuk aktivitas pendanaan tersebut tidak berdampak terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Cash Flows from Investing Activities

Cumulatively, net cash used for investment activities by PLN in 2022 amounted to Rp54.76 trillion, a decrease of 8.0% compared to the previous year at Rp59.55 trillion. The decrease was mainly because the Company was still prioritizing capital expenditure to relax its cash.

The decrease in net cash for investing activities had no impact on PLN's financial performance.

Cash Flows from Financing Activities

The Company recorded a net cash used for financing activities for 2022 increased by 16.27%, from Rp25.88 trillion to Rp30.09 trillion. This increase was mainly supported by the condition of PLN's liquidity which remained stable so that the Company made more debt payments and reduced debt withdrawals, as well as the relatively low investment realization.

The increase in net cash for funding activities has no impact on the Company's financial performance.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

SOLVENCY, COLLECTABILITY RATE, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Rasio-Rasio Keuangan

Financial Ratios

Uraian / Description	Satuan / Unit	2022	2021
Rasio Solvabilitas / Solvency			
Total Liabilitas terhadap Aset / Liability to Asset Ratio		39.48	39.15
Total Liabilitas terhadap Ekuitas / Liability to Equity Ratio	Persen (%) / Percent (%)	65.23	64.34
<i>Debt to equity ratio</i>		41.32	42.71
<i>EBITDA to interest expense</i>		494.50	437.6
Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio			
Rasio Lancar / Current Ratio	Persen (%) / Percent (%)	82.30	58.63
Rasio Kas / Cash Ratio		35.87	26.11
Rasio Rentabilitas / Rentability Ratio			
Rasio Laba terhadap Ekuitas / Return on Equity		1.45	1.34
Rasio Laba terhadap Aset / Return on Assets	Persen (%) / Percent (%)	0.88	0.82
Rasio Laba terhadap Pendapatan / Return on Income		3.27	12.24
Rasio Profitabilitas / Profitability Ratio			
Margin Laba Usaha / Profit Margin		12.45	12.24
Margin Laba Bersih / Net Profit Margin	Persen (%) / Percent (%)	3.27	3.58
<i>EBITDA Margin</i>		19.21	24.22



Uraian / Description	Satuan / Unit	2022	2021
Rasio Operasional / Operational Ratio			
Perputaran Piutang Usaha / Receivables Turnover	Kali (x) / Times (x)	12.81	12.82
Collection Period	Hari / Day(s)	28.49	28.48
Perputaran Aset Tetap / Fixed Asset Turnover	Kali (x) / Times (x)	0.22	0.20

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

PLN mengukur kemampuan membayar utang melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Uraian mengenai kedua rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan PLN dalam melunasi seluruh kewajiban yang harus segera dipenuhi (liabilitas jangka pendek). Secara spesifik, rasio likuiditas yang digunakan terdiri dari rasio lancar dan rasio kas. Rasio lancar PLN untuk tahun 2022 adalah sebesar 82,30%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 58,63%. Adapun rasio kas untuk tahun 2022 adalah sebesar 35,87%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 26,11%. Peningkatan kedua rasio tersebut dikontribusikan oleh peningkatan kas dan piutang pada pemerintah yang terjadi di tahun 2022 dibanding 2021.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan PLN dalam memenuhi segala kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk tahun 2022, PLN membukukan rasio liabilitas terhadap ekuitas sebesar 65,23% atau lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 64,34%. Adapun rasio liabilitas terhadap aset PLN untuk tahun 2022 adalah sebesar 39,48% atau lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 39,15%. Penurunan kedua rasio tersebut dikontribusikan oleh peningkatan total aset yang terjadi di tahun 2022 dibanding 2021.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Untuk tahun 2022, PLN mencatatkan penguatan kolektibilitas piutang usaha dengan jumlah perputaran piutang usaha mencapai 28,49 hari, atau sedikit lebih lama dibanding tahun 2021 yang sejumlah 28,48 hari. Seiring penguatan profil kolektibilitas piutang, rasio perputaran piutang usaha PLN untuk tahun 2022 adalah sebesar 12,81x, atau lebih rendah dibanding tahun 2021 yang sebesar 12,82x.

SOLVENCY

PLN measures its ability to pay debts by calculating the ratio of liquidity and solvency. The description of the two ratios is as follows:

Liquidity Ratio

The liquidity ratio is the ratio used to measure PLN's ability to pay off all obligations that must be fulfilled immediately (current liabilities). Specifically, the liquidity ratio used consists of the current ratio and the cash ratio. PLN's current ratio for 2022 was 82.30%, higher than the previous year at 58.63%. Meanwhile, the cash ratio for 2022 was 35.87%, higher than the previous year at 26.11%. The increase in both ratios was contributed by the increase in cash and receivables from the government that occurred in 2022 compared to 2021.

Solvency Ratio

The solvency ratio is the ratio used to measure PLN's ability to fulfill all of its obligations, both short-term and long-term obligations. In 2022, PLN posted a liability to equity ratio of 65.23% or lower than the previous year at 64.34%. liability to assets ratio in 2022 was 39.48% or lower than the previous year which at 39.15%. The decrease in both ratios was contributed by the increase in total assets that occurred in 2022 compared to 2021.

RECEIVABLES COLLECTABILITY RATE

PLN's trade receivables collectability in 2022 strengthened with the number of trade receivables turnover reaching 28.49 days, or slightly longer than in 2021 at 28.48 days. As the receivables collectability profile strengthened, PLN's trade receivables turnover ratio for 2022 was 12.81, or lower than in 2021 which was 12.82x.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL SERTA DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN

PLN mengelola risiko modal sebagai upaya memastikan kemampuan melanjutkan kelangsungan usaha, di samping untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Untuk tahun 2022, struktur modal PLN terdiri dari 39,48% liabilitas dan 60,52% ekuitas, dibanding struktur modal di tahun 2021 yang terdiri dari 39,15% liabilitas dan 60,85% ekuitas. Liabilitas PLN di tahun 2022 sebagian besar digunakan untuk membiayai investasi berupa pembangunan infrastruktur listrik baik pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Sebagian lainnya digunakan untuk membiayai aktivitas operasi. Adapun ekuitas PLN di tahun 2022 sebagian kecilnya digunakan untuk membayar dividen.

Struktur modal PLN untuk tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Dalam jutaan rupiah

Struktur Modal / Capital Structure	2022		2021		Perubahan / Change	
	Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)	Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)	Nominal	Persentase (%) / Percentage (%)
Liabilitas / Liabilities	646.689	39,48	631.609	39,15	15.080	2,39
Ekuitas / Equity	991.451	60,52	981.607	60,85	9.843	1,00
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	1.638.140	100,00	1.613.216	100,00	24.924	3,39

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE AND BASIS OF POLICY DETERMINATION

PLN manages capital risk as an effort to ensure the ability to continue as a going concern, in addition to ensuring compliance with the capital adequacy ratio limit. PLN's capital structure in 2022 consisted of 39.48% liabilities and 60.52% equity, compared to the capital structure in 2021 which consisted of 39.15% liabilities and 60.85% equity. Most of PLN's liabilities in 2022 were used to finance investments in the form of electricity infrastructure development for generation, transmission, and distribution. Others are used to finance operating activities. As for PLN's equity in 2022, a small portion was used to pay dividends.

PLN's capital structure for 2022 and 2021 can be seen in the following table.

In millions of rupiah

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Manajemen PLN menetapkan kebijakan struktur modal sebagai berikut:

- Struktur modal mencerminkan keseimbangan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian untuk meningkatkan nilai Perseroan, dengan cara:
 - Memperhitungkan penggunaan utang yang proporsional untuk menjaga kemampuan pembayaran kewajiban keuangan (tingkat bunga) dan pokok pinjaman yang sejalan dengan pengendalian likuiditas Perseroan.
 - Mengoptimalkan rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri.
- Struktur modal ditinjau dengan melakukan evaluasi hubungan antara *financial leverage*, nilai Perseroan dan biaya modal.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

PLN management determines the capital structure policy as follows:

- The capital structure reflects the balance between financial risk and rate of return to increase the value of the Company, by:
 - Taking into account the use of proportional debt to maintain the ability to pay financial obligations (interest rates) and loan principal which is in line with the Company's liquidity control.
 - Optimizing economic profitability and profitability of equity.
- The capital structure is reviewed by evaluating the relationship between financial leverage, Company value, and the cost of capital.



3. Struktur modal terdiri atas kombinasi yang optimal atas utang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perseroan serta memastikan pelaksanaan program pengembangan usaha.
 4. Kombinasi struktur modal yang mencakup perbandingan ekuitas terhadap likuiditas ditetapkan melalui pelaksanaan analisis sensitivitas dengan berbagai variasi asumsi inti yang paling mungkin dihadapi oleh Perseroan.
 5. Perseroan telah memiliki kebijakan struktur modal dengan menetapkan pemenuhan *covenant* dari para kreditor.
3. The capital structure consists of an optimal combination of debt and equity which maximizes the value of the Company and ensures the implementation of business development programs.
 4. The combination of capital structure which includes the ratio of equity to liquidity is determined through the implementation of a sensitivity analysis with a variety of core assumptions that are most likely to be faced by the Company.
 5. The Company has a capital structure policy by stipulating the fulfillment of covenants from creditors.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Direksi secara berkala melakukan tinjauan terhadap struktur permodalan Perseroan. Dalam proses tersebut, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko terkait, mencakup risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas.

Struktur modal PLN dipengaruhi oleh adanya penugasan dari Pemerintah dalam proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Liabilitas PLN terutama digunakan untuk membangun infrastruktur listrik baik pembangkitan, transmisi, dan distribusi.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

PLN melakukan ikatan pengadaan untuk investasi barang modal saat berlangsungnya pembangunan proyek, umumnya dilakukan sebelum atau sebagai bagian dari tahap *engineering, procurement, and construction* (EPC).

Untuk tahun 2022, PLN melakukan ikatan material untuk pengerjaan program percepatan dan konstruksi rutin dengan perincian sebagai berikut:

BASIS FOR SELECTION OF MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The Board of Directors periodically reviews the Company's capital structure. In the process, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks, covering market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk, and liquidity risk.

PLN's capital structure is affected by an assignment from the Government in the 35,000 MW power plant development project. PLN's liabilities are mainly used to build electricity infrastructure for generation, transmission, and distribution.

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

PLN enters into procurement agreements for investment in capital goods during project development, generally carried out before or as part of the engineering, procurement, and construction (EPC) stage.

For 2022, PLN carried out material commitments for acceleration programs and regular construction with the following details:

Uraian / Description	Mata Uang yang Menjadi Denominasi / Denominated Currency	Nilai dalam Mata Uang Asing (Nilai Penuh) / Value in Foreign Currency (Full Amount)	Konversi ke Rupiah (dalam Jutaan Rupiah) / Converted to Rupiah (in millions of rupiah)
Program Percepatan / Acceleration Program			
1. Kontrak pembangkitan / Power plant contract	USD	44.599.629	695.397
	Rupiah		1.268.234
Sub-Jumlah / Sub-Total			1.963.631
2. Kontrak transmisi / Transmission contract	Rupiah		65.282
Kontrak Konstruksi Rutin / Regular Construction Contract	USD	660.301.216	10.295.417
	EUR	195.846.989	3.273.118
	JPY	8.678.537.824	1.023.685
	Rupiah		33.786.491
	Lain-lain* / Others*	7.841.413.351	10.702
Jumlah / Total			48.369.039

*) Perolehan barang modal dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan.

*) Acquisition of capital goods in other foreign currencies is presented in an amount equivalent to USD using the exchange rate at the reporting date

TUJUAN IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

PLN melakukan ikatan material dengan tujuan untuk memastikan proses pembangunan dan pengadaan pembangkitan, transmisi, dan distribusi, dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik agar dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Kontrak pembangkitan mengacu pada kontrak yang dilakukan oleh PLN untuk membangun PLTU berbahan bakar batu bara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa-Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa-Bali, sesuai ketentuan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 beserta perubahan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 tanggal 23 Desember 2009. Adapun, kontrak transmisi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dan membangun transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.489 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

PURPOSE OF MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

PLN conducts material commitment with the aim of ensuring that the process of development and procurement of generation, transmission, and distribution to meet the demand for electricity so that it can be completed properly and on time.

Generation contracts refer to contracts entered into by PLN to build coal-fired power plants in 42 locations in Indonesia, including 10 power plants with a total capacity of 7,490 MW in Java-Bali and 32 power plants with a total capacity of 2,769 MW outside Java-Bali, according to the provisions in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 of 2006 dated July 5, 2006 and amendments based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 dated December 23, 2009. Meanwhile, the transmission contract was carried out with the aim of upgrading and building new transmission and substations in Java and outside Java. This project was financed using own funds and the withdrawal of bank credit facilities.

As of December 31, 2022, the Company has signed 37 EPC contracts covering 10 power plants with a total capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 27 power plants with a total capacity of 2,489 MW outside Java - Bali. Based on the EPC contract, the Company is required to pay a down payment of approximately 15% of the contract value and 85% will be funded through bank credit facilities.

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri Perusahaan dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

SUMBER DANA

PLN melakukan ikatan untuk investasi barang modal dengan sumber dana dari pendanaan internal, dan untuk menutupi kekurangan pendanaan Perseroan menargetkan perolehan dana investasi dari Penanaman Modal Negara, fasilitas pinjaman dari sejumlah Bank, serta penerbitan obligasi terjamin.

MATA UANG YANG MENJADI DENOMINASI DAN MITIGASI RISIKO MATA UANG ASING

Selain mata uang Rupiah, PLN dapat melakukan kontrak dengan menggunakan mata uang asing (USD, EUR, NZD, JPY). Atas hal itu, sejak tahun 2015, PLN telah melakukan transaksi lindung nilai terhadap beberapa eksposur ikatan dan kontinjensi dalam mata uang asingnya guna memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Transaksi lindung nilai PLN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara, beserta peraturan teknis pelaksanaan terkait.

Sebagai upaya mitigasi terhadap risiko mata uang asing, PLN melakukan pembahasan khusus dengan Bank Indonesia demi mendapatkan pemahaman komprehensif terhadap keadaan pasar. PLN kemudian mempertimbangkan keadaan pasar ke dalam proyeksi keuangan internal serta mengembangkan strategi yang disetujui bersama, untuk memitigasi eksposur risiko mata uang asing dengan membeli instrumen mata uang asing yang dibutuhkan pada momentum yang tepat.

Selain itu, PLN melakukan analisis terhadap sensitivitas mata uang asing untuk mengetahui setiap 10% kenaikan dan penurunan rupiah terhadap mata uang asing yang dinilai relevan. Kenaikan dan penurunan 10% tersebut memperlihatkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini. Analisis sensitivitas tersebut mencakup saldo *item* moneter setelah pajak dalam mata uang asing, serta menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

The capital goods procurement agreement for regular construction is a contract that has been signed for additional power plants and development of transmission and distribution networks. This project is financed using the Company's own funds and external parties through foreign loans, assistance, and investment projects as part of the state budget.

SOURCE OF FUNDS

PLN entered into a commitment for investment in capital goods with sources of funds from internal funding, and to cover funding shortfalls the Company was targeting obtaining investment funds from State Investment, loan facilities from a number of banks, and issuance of guaranteed bonds.

DENOMINATION AND FOREIGN CURRENCY RISK MITIGATION

Apart from Rupiah, PLN may enter into contracts using foreign currencies (USD, EUR, NZD, JPY). For this reason, since 2015, PLN has hedged several exposures to commitments and contingencies in foreign currencies in order to mitigate the risk of fluctuations in foreign currency exchange rates. PLN's hedging transactions are carried out in accordance with Regulation of the Minister of SOE No. 09/MBU/2013 on General Policy on Hedging Transactions for State-Owned Enterprises, along with relevant implementing technical regulations.

As an effort to mitigate foreign currency risk, PLN conducts special discussions with Bank Indonesia to obtain a comprehensive understanding of market conditions. PLN then takes into account market conditions into its internal financial projections and develops a mutually agreed strategy to mitigate foreign currency risk exposure by purchasing the required foreign currency instruments at the right momentum.

Moreover, PLN conducts an analysis of foreign currency sensitivity to find out every 10% increase or decrease in the rupiah against foreign currencies that is considered relevant. The 10% increase and decrease reflect management's assessment of a rational change in exchange rates, taking into account the current economic conditions. The sensitivity analysis includes after-tax monetary item balances in foreign currencies, as well as adjusting translations at the end of the year for 10% changes in foreign currency exchange rates.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

PLN secara periodik melakukan investasi barang modal berupa aset tetap. Jumlah investasi barang modal PLN untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp51,70 triliun, dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Investasi Barang Modal / Type of Capital Goods Investment	2022	Tujuan / Objective
Pembangunan pembangkit / Power plant construction	9,16	Program investasi yang dijalankan pada tahun 2022 antara lain bertujuan untuk: / Objectives of investment program implemented in 2022 are as follows:
Maintenance CAPEX / CAPEX Maintenance	7,96	
Penyambungan pelanggan / Customer connection	7,20	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Infrastruktur listrik baik pembangkitan, transmisi dan distribusi / Development of electricity infrastructure for generation, transmission, and distribution • Maintenance CAPEX / CAPEX maintenance • Pembangunan dan pengembangan sarana lainnya. / Construction and development of other facilities.
Pengembangan jaringan distribusi / Distribution network development	6,68	
Pengembangan transmisi dan GI / Transmission and GI development	11,32	
Pembangunan Infrastruktur Gas / Gas infrastructure development	4,78	
Pembangunan <i>Fiber Optic</i> / Fiber Optic development	0,01	
Pembangunan infrastruktur energi primer / Primary energy infrastructure development	0,42	
Sarana / Facilities	2,52	
IDC	1,64	
Total	51,70	

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

PLN periodically invests in capital goods in the form of fixed assets. PLN's investment in capital goods for 2022 amounted to Rp51.70trillion, with the following details:

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Setelah tanggal laporan akuntan, terdapat sejumlah fakta material terkait Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor S-886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan Holding dan Sub-Holding PT PLN (Persero) Masa/Tahap *Legal End-State* serta Restrukturisasi dan Pengalihan Harta yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 69 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, SH., Perseroan membentuk *Sub-Holding* Grup yang berlaku efektif 1 Januari 2023 melalui:
 - 1) Pemekaran usaha atau pemisahan tidak murni/ *spin-off* atas sebagian aktiva dan pasiva kegiatan usaha pembangkitan dan energi primer Grup kepada PT PLN Nusantara Power ("PNP"; dahulu bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali) dan PT PLN Indonesia Power ("PIP"; dahulu bernama PT Indonesia Power).
 - 2) Penyertaan modal non-tunai (inbreng) kepada PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI"; dahulu bernama PT PLN Batubara) berupa seluruh kepemilikan saham PLN pada PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal ("PLN GG") dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAG").

MATERIAL FACTS AND INFORMATION SUBSEQUENT TO ACCOUNTANT'S REPORTING DATE

After the date of the accountant's report, there were a number of material facts related to the Company with the following details:

1. Based on the Decree of the Minister of SOE of the Republic of Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 dated December 30, 2022 on the Approval for the Establishment of Holding and Sub-Holding of PT PLN (Persero) Period/Legal End-State Stage and Restructuring and Transfer of Assets set forth in the Deed Notary No. 69 dated December 30, 2022 from Muhammad Hanafi, S.H., the Company established a Sub-Holding Group which became effective on January 1, 2023 through:
 - 1) Business expansion or spin-off of some of the assets and liabilities of the Group's generation and primary energy business activities to PT PLN Nusantara Power ("PNP"; formerly known as PT Pembangkitan Jawa-Bali) and PT PLN Indonesia Power ("PIP"; formerly known as PT Indonesia Power).
 - 2) Non-cash capital investment (inbreng) to PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI"; formerly known as PT PLN Batubara) in the form of all of the PLN share ownership in PT Pengembang Listrik Nasional Gas and Geothermal ("PLN GG") and PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAG").

- | | |
|---|--|
| <p>2. Pembentukan 4 (empat) <i>Sub-Holding</i> Grup yang terdiri atas:</p> <p>1) Dua <i>Sub-Holding</i> di bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu PNP dan PIP.
Akta pemisahan kegiatan usaha pembangkitan kepada PNP dengan nilai yang akan ditukar menjadi kepemilikan saham baru perusahaan pada PNP sebesar Rp151.255.249.000.000,00, sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR"), yang tertuang dalam Akta Notaris No. 70 dan No. 76 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, SH. Akta pemisahan kegiatan usaha pembangkitan kepada PIP dengan nilai yang akan ditukar menjadi kepemilikan saham baru perusahaan pada PIP sebesar Rp175.974.993.000.000,00, sesuai dengan hasil penilaian KJPP RHR yang tertuang dalam Akta Notaris No. 71 dan No. 77 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, SH.</p> <p>2) Satu <i>Sub-Holding</i> di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu EPI.
Akta pemasukan (Inbren) ke dalam EPI berupa seluruh kepemilikan saham perusahaan pada PLN GG dan BAG dengan nilai yang akan ditukar menjadi kepemilikan saham baru sebesar Rp2.273.717.000.000,00, sesuai dengan hasil penilaian KJPP RHR, yang tertuang dalam Akta Notaris No. 72 dan No. 78 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, SH.</p> <p>3) Satu <i>Sub-Holding</i> untuk kegiatan usaha diluar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan (<i>Beyond kWh</i>), yaitu PT Indonesia Comnets Plus.</p> | <p>2. Establishment of 4 (four) Group Sub-Holdings consisting of:</p> <p>1) Two Sub-Holdings in the field of power generation, namely PNP and PIP.
The deed of spin-off of the generation business activity to PNP with the value to be exchanged into the Company's new share ownership in PNP of Rp151,255,249,000,000.00, in accordance with the results of the assessment by the Rengganis, Hamid & Rekan Public Appraisal Service Office ("KJPP RHR"), which was stated in Notary Deed No. 70 and No. 76 dated December 30, 2022 from Muhammad Hanafi, S.H. The deed of spin-off of the generation business activity to PIP with the value to be exchanged into the Company's new share ownership in PIP amounting to Rp175,974,993,000,000.00, in accordance with the results of the KJPP RHR assessment as stated in the Notary Deed No. 71 and No. 77 dated December 30, 2022 from Muhammad Hanafi, S.H.</p> <p>2) One Sub-Holding in the field of supply and logistics of primary energy, namely EPI.
Deed of entry (Inbren) into EPI in the form of all of the Company's share ownership in PLN GG and BAG with a value that will be exchanged for new share ownership of Rp2,273,717,000,000.00, in accordance with the results of the KJPP RHR assessment, which was stated in the Notary Deed No. 72 and No. 78 dated December 30, 2022 from Muhammad Hanafi, S.H.</p> <p>3) One Sub-Holding for business activities other than electricity generation, transmission, and distribution (<i>Beyond kWh</i>), namely PT Indonesia Comnets Plus.</p> |
|---|--|

Pelaksanaan Aksi Korporasi *Legal End-State* tersebut telah memenuhi ketentuan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan, termasuk pengumuman di surat kabar harian nasional Kompas dan Bisnis Indonesia tanggal 3 Januari 2023 sebagai penyampaian keterbukaan informasi atau fakta material sesuai ketentuan POJK nomor 31/POJK.04/2015 dan mempertimbangkan Pasal 133 UU Nomor 40 tahun 2007.

The implementation of the Legal End-State Corporate Action has met the prevailing laws and regulations in the Company, including the announcement in national newspaper, Kompas and Bisnis Indonesia, on January 3, 2023, as the disclosure of information or material facts in accordance with POJK No. 31/POJK.04/2015 and taking into account Article 133 of Law No.40 of 2007.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Pada 2022, tidak terdapat kejadian luar biasa dan jarang terjadi yang berpengaruh terhadap keuangan Perseroan.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

There were no extraordinary and rare events that affect the Company's finances in 2022.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN LABA PERUSAHAAN

DAMPAK PERUBAHAN HARGA JUAL LISTRIK

Pada 2022, terdapat penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) kepada pelanggan rumah tangga mampu nonsubsidi golongan 3.500 Volt Ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) dan golongan pemerintah (P1, P2, dan P3) mulai 1 Juli 2022, yang ditetapkan berdasarkan Surat Menteri ESDM Nomor T-163/TL.04/MPM.L/2022. Atas penyesuaian tersebut, pelanggan rumah tangga R2 berdaya 3.500 AV hingga 5.500 VA dan R3 berdaya 6.600 VA ke atas mendapat penyesuaian tarif dari Rp1.444,7 per kWh menjadi 1.699,53 per kWh. Adapun, pelanggan pemerintah P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA dan P3 mendapat penyesuaian tarif dari Rp1.444,7 kWh menjadi Rp1.699,53 per kWh, serta pelanggan pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA dari Rp1.114,74 kWh menjadi Rp1.52288 kWh.

Penyesuaian tarif tenaga listrik tersebut tidak memengaruhi perolehan pendapatan dan laba PLN pada 2022, tetapi berdampak terhadap perbaikan arus kas Perusahaan dan mengurangi beban fiskal Pemerintah terkait kompensasi listrik.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI 2021 SERTA PROYEKSI 2022

PLN menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha di setiap tahun buku. RKAP tahun 2022 telah dipresentasikan di hadapan Pemegang Saham, serta dibahas dan disahkan di dalam RUPS. Di samping itu, PLN juga menyusun serangkaian target di dalam RKAP tahun 2023, yang ditetapkan berdasarkan asumsi ekonomi makro yang dinilai relevan dan memberi pengaruh secara signifikan.

Perbandingan antara target RKAP 2022 dan realisasinya, beserta perbandingan dengan proyeksi yang ditetapkan pada RKAP 2023, adalah sebagai berikut:

IMPACT OF PRICE CHANGES ON COMPANY REVENUE AND PROFITS

THE IMPACT OF CHANGES IN THE SELLING PRICE OF ELECTRICITY

In 2022, there was tariff adjustments for non-subsidized able-bodied household customers of the 3,500 Volt Ampere (VA) group and above (R2 and R3) and the government group (P1, P2, and P3) starting July 1, 2022, which was stipulated based on the Letter of the Minister of Energy and Mineral Resources No. T-163/TL.04/MPM.L/2022. Due to this adjustment, household customers R2 with power of 3,500 AV to 5,500 VA and R3 with power of 6,600 VA and above received a tariff adjustment from Rp1,444.7 per kWh to 1,699.53 per kWh. Meanwhile, government customers P1 with power from 6,600 VA to 200 kVA and P3 received a tariff adjustment from Rp1,444.7 kWh to Rp1,699.53 per kWh, as well as government customers P2 with power above 200 kVA from Rp1,114.74 kWh to Rp1,52288 kWh.

The electricity tariff adjustment did not affect PLN's revenue and profit in 2022, but has an impact on improving the Company's cash flow and reducing the Government's fiscal expense related to electricity compensation.

COMPARISON BETWEEN THE 2021 TARGET AND REALIZATION AND THE 2022 PROJECTION

PLN prepares the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as a reference in implementing business activities in each fiscal year. The 2022 RKAP has been presented before the shareholders as well as discussed and validated at the GMS. In addition, PLN has also prepared a series of targets in the 2023 RKAP, which are set based on macroeconomic assumptions that are considered relevant and have a significant impact.

The comparison between the 2022 RKAP targets and their realization, along with a comparison with the projections set in the 2023 RKAP, is as follows:

Keterangan / Description	Satuan / Unit	RKAP 2022 / 2022 RKAP	Realisasi / Realization	Proyeksi 2023 / 2023 Projection
Keuangan / Finance				
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets		1.621.254	1.518.748	1.584.171
Aset Lancar / Current Assets		98.650	119.391	108.338
Total Aset / Total Assets		1.719.903	1.638.139	1.692.509
Jumlah Ekuitas / Total Equity		1.021.728	991.451	1.012.132
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	Rp Juta /	540.202	501.617	521.360
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	Rp Million	157.973	145.072	159.017
Pendapatan Usaha / Revenue		414.733	441.132	509.765
Biaya Usaha / Operating Expense		382.251	386.194	461.049
Laba Usaha / Operating Profit		32.482	54.938	48.716
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year		6.433	14.415	12.810
Produksi dan Penjualan / Production and Sales				
GWh Loko Sentral (Bruto Production)	GWh	300.035	308.002	327.167
GWh Penjualan Tenaga Listrik / Electricity Sales GWh	GWh	263.012	273.761	286.225

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh pada kisaran 4,5-5,3% untuk tahun 2023, dan mampu menguat hingga 4,7-5,5% pada tahun 2024. Di dalam proyeksi tersebut, faktor yang diasumsikan akan memberi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain tingkat konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang tetap positif di tengah situasi pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Kemudian, Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia diproyeksikan menurun dan kembali pada sasaran $3,0\pm 1\%$ di tahun 2023 serta $2,5\pm 1\%$ di tahun 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023. Hal tersebut diperkirakan terjadi seiring tetap terkendalinya inflasi harga impor dengan nilai tukar rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang *font loaded*, *preemptive*, dan *forward looking*.

Dewan Energi Nasional RI melalui dokumen *Outlook Energi Indonesia 2022* mengungkapkan proyeksi peningkatan permintaan listrik nasional (termasuk konsumsi listrik untuk beberapa industri *smelter*) pada tahun 2032 sebesar 433 TWh pada skenario *Business as Usual* (BaU) dan 702 TWh pada skenario optimistis (OPT). Pangsa permintaan energi listrik pada tahun 2032 untuk skenario OPT terbagi atas sektor industri dengan persentase 46,6%, sebagai sektor dengan porsi terbesar, diikuti sektor transportasi yang sebesar 19,7%, rumah tangga 20,7%, komersial sebesar 12,1%, dan sektor lainnya sebesar 0,9%.

BUSINESS OUTLOOK

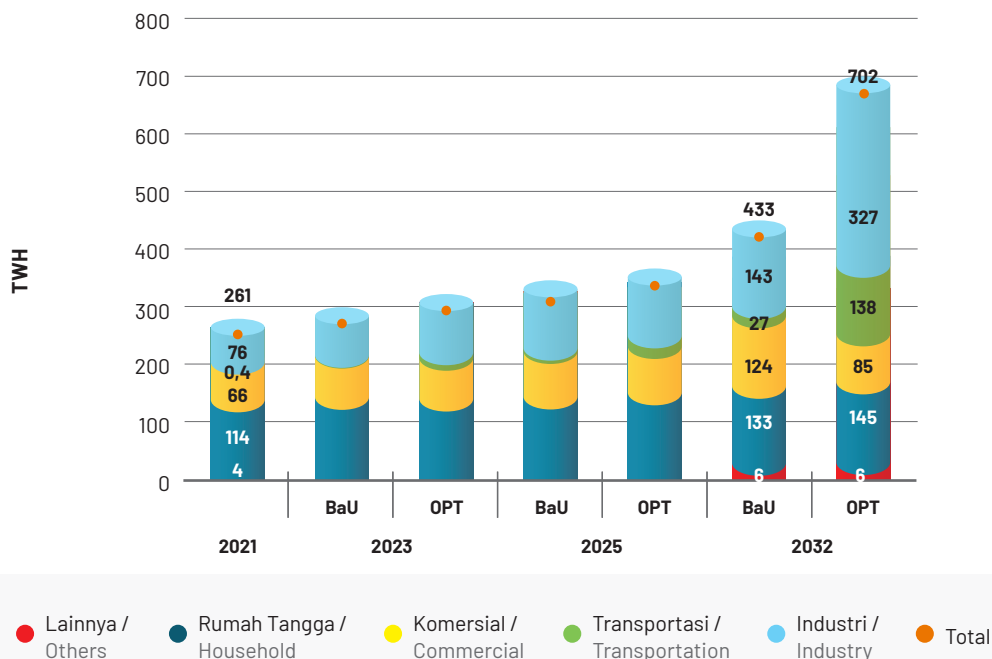
Bank Indonesia projects that the Indonesian economy will be able to grow in the range of 4.5-5.3% for 2023, and be able to strengthen to 4.7-5.5% in 2024. In this projection, factors assumed to provide support for economic growth include levels of private consumption, investment, and export performance which remain positive amidst the sluggish global economic growth. Then, Indonesia's Consumer Price Index (CPI) is projected to decline and return to the target of $3.0\pm 1\%$ in 2023 and $2.5\pm 1\%$ in 2024, with core inflation returning earlier in the first half of 2023. This is expected to occur as import price inflation remains under control with a stable rupiah exchange rate and a monetary policy response that is *font-loaded*, *pre-emptive*, and *forward-looking*.

The Indonesian National Energy Council through the *Indonesia Energy Outlook 2022* document reveals the projected increase in national electricity demand (including electricity consumption for several *smelter* industries) in 2032 of 433 TWh in the *Business as Usual* (BaU) scenario and 702 TWh in the optimistic scenario (OPT). The share of electricity demand in 2032 for the OPT scenario is divided into the industrial sector with a percentage of 46.6%, as the sector with the largest portion, followed by the transportation sector at 19.7%, households at 20.7%, commercial at 12.1%, and other sectors at 0.9%.

Mengacu pada skenario OPT tersebut, terdapat proyeksi peningkatan pangsa konsumsi listrik di sektor industri dan transportasi, sebagai pengaruh kebijakan pembangunan kawasan industri baru terutama pada wilayah Jawa. Di samping itu, proyeksi peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh pemanfaatan kendaraan listrik yang telah mulai disosialisasikan antara lain melalui imbauan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas sejak tahun 2022 serta penggunaan kendaraan listrik pada sejumlah moda transportasi publik.

Proyeksi permintaan listrik per sektor hingga tahun 2032 dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut:

Proyeksi Permintaan Listrik Per Sektor 2021-2032



Sumber: Outlook Energi Indonesia 2022, Dewan Energi Nasional

Referring to the OPT scenario, there is a projected increase in the share of electricity consumption in the industrial and transportation sectors, as a result of the policy of developing new industrial estates, especially in the Java region. Apart from that, the projected increase is also influenced by the use of electric vehicles which has begun to be disseminated, among others through calls for the use of electric vehicles as official vehicles starting in 2022 and the use of electric vehicles in a number of modes of public transportation.

Projection of electricity demand per sector until 2032 can be seen in the following graph:

Projection for Electricity Demand Per Sector in 2021-2032

Source: Outlook Energi Indonesia 2022, Dewan Energi Nasional

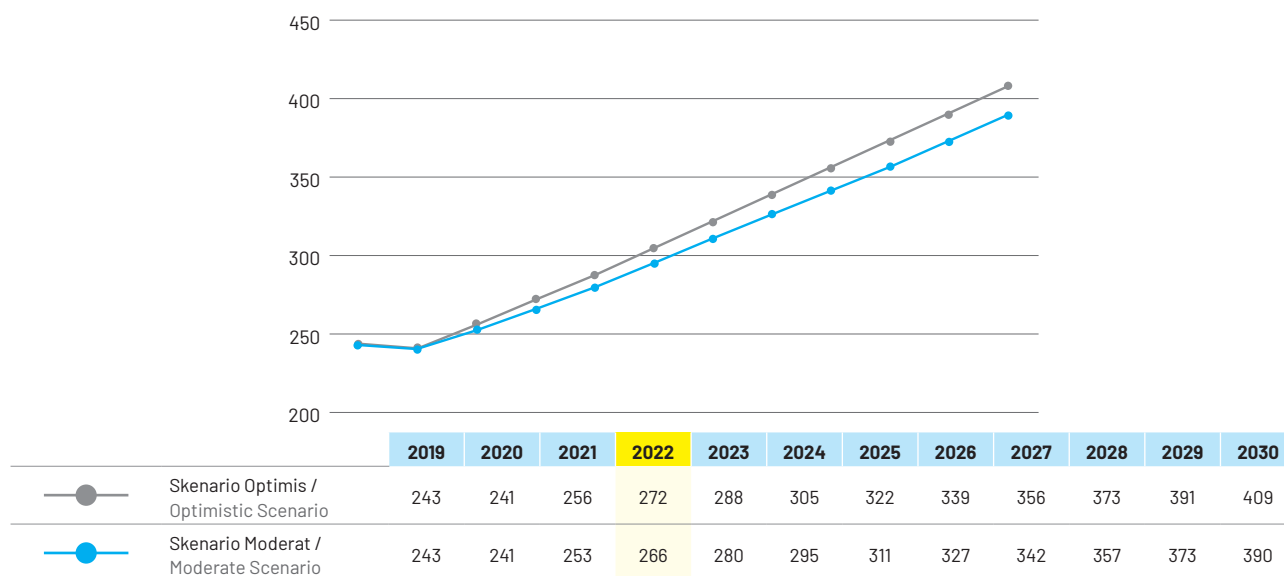
Mengacu pada dokumen RUPTL 2021-2030, dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk, tingkat inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, hingga rasio elektrifikasi, Perseroan memproyeksikan adanya pertumbuhan listrik Indonesia sebesar 288 TWh pada skenario optimistis atau 280 TWh pada skenario moderat untuk tahun 2023. Angka tersebut memperlihatkan tingkat pertumbuhan yang lebih baik dibanding proyeksi untuk tahun 2022, yang sebesar 272 TWh untuk skenario optimistis dan 266 TWh untuk skenario moderat.

Referring to the 2021-2030 RUPTL document, taking into account the projected population, inflation rate, Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, to the electrification ratio, the Company projects Indonesia's electricity growth of 288 TWh in an optimistic scenario or 280 TWh in a moderate scenario for 2023. This illustrates a better growth rate than the projection for 2022, which is 272 TWh for an optimistic scenario and 266 TWh for a moderate scenario.



Proyeksi Permintaan Listrik Per Sektor 2021-2032

Projection for Electricity Demand Per Sector in 2021-2032



Sumber: RUPTL 2021-2030

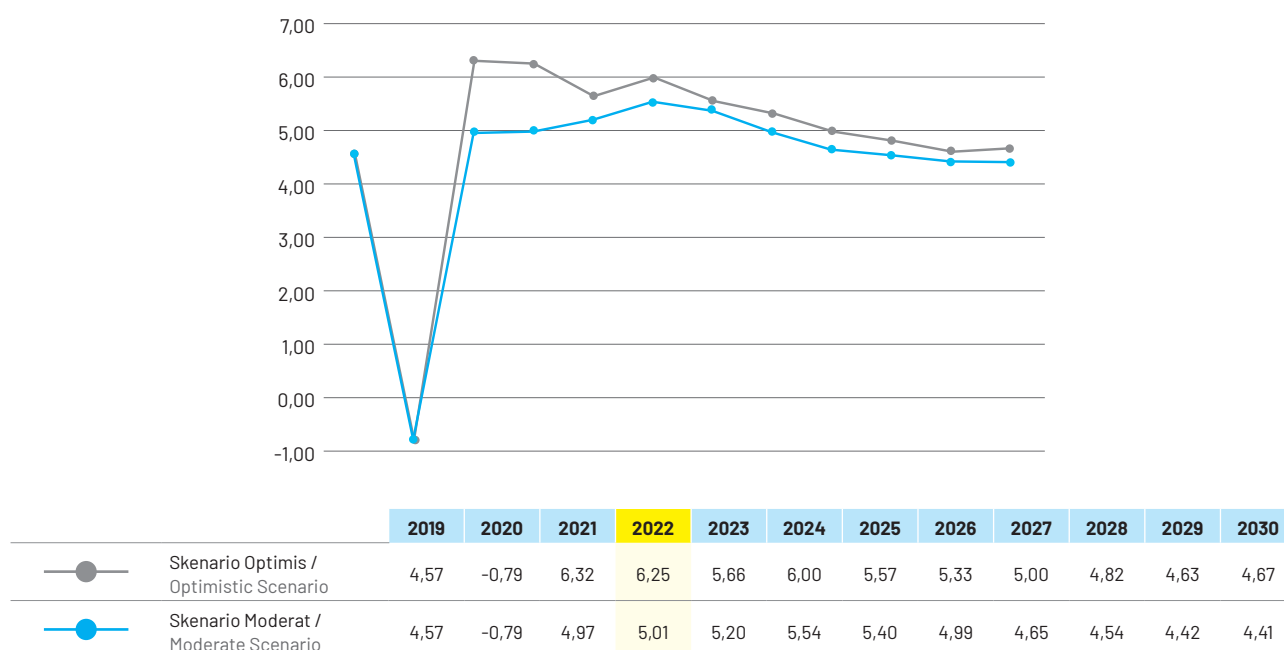
Source: RUPTL 2021-2030

Dengan proyeksi pertumbuhan listrik itu, Perseroan memproyeksikan realisasi pertumbuhan penjualan dengan persentase 5,66% pada skenario optimistis dan 5,20% pada skenario moderat untuk tahun 2023. Proyeksi tersebut memperlihatkan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibanding tahun 2022, dengan persentase 6,25% pada skenario optimistis dan 5,01% pada skenario moderat.

With this electricity growth projection, the Company projects the realization of sales growth with a percentage of 5.66% in an optimistic scenario and 5.20% in a moderate scenario for 2023. This projection shows a lower growth rate compared to 2022 with a percentage of 6.25% in the optimistic scenario and 5.01% in the moderate scenario.

Proyeksi Pertumbuhan Penjualan (%)

Sales Growth Projection (%)



Sumber: RUPTL 2021-2030

Source: RUPTL 2021-2030

Prospek usaha Perseroan pada tahun mendatang secara mendasar juga akan dipengaruhi oleh restrukturisasi perusahaan melalui pembentukan Holding Sub-Holding PLN. Restrukturisasi tersebut merupakan wujud komitmen PLN dalam mempercepat akselerasi menuju transisi energi, sekaligus sebagai upaya mendorong optimalisasi utilisasi aset, *core competency*, serta *technical skills*. Lebih dari itu, pembentukan Holding Sub-Holding PLN merupakan upaya Perseroan dalam memanfaatkan potensi pengembangan usaha agar lebih lincah (*agile*) dan efektif di tengah perubahan zaman.

Melalui pembentukan *Holding Sub-Holding* ini, sejak direncanakan pada tahun 2022 Perseroan di awal tahun 2023 memiliki 4 (empat) *Sub-Holding* yaitu PLN Energi Primer Indonesia, PLN Nusantara Power (*Generation Company 1*), PLN Indonesia Power (*Generation Company 2*), dan Indonesia Comnets Plus (ICON Plus). PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power merupakan *Sub-Holding* di bidang pembangkitan listrik, PLN Energi Primer Indonesia merupakan *Sub-Holding* di bidang penyediaan dan logistik energi primer, sedangkan ICON Plus akan fokus pada upaya meningkatkan *revenue* dari selain penjualan listrik (*Beyond kWh*).

Pembentukan *Holding Sub-Holding* ini diyakini mampu mendorong peningkatan efektivitas efisiensi proses bisnis Perseroan, dengan utilisasi aset yang jauh lebih optimal. Secara mendasar, masing-masing *Sub-Holding* akan memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset negara, aspek yang sebelumnya menjadi lini depan operasional Perseroan dalam menyediakan listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, Perseroan sebagai perusahaan *Holding* akan berfokus pada hal-hal strategis mencakup pengembangan portofolio, perluasan pelanggan, serta peningkatan kualitas layanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Di samping itu, Perseroan memiliki agenda untuk menerapkan inovasi bisnis pada bidang-bidang selain kelistrikan (*Beyond kWh*) secara lebih cepat hingga menjadi sumber pendapatan baru, melalui pembentukan *Sub-Holding* PLN ICON Plus. Lebih lanjut, *Sub-Holding* ini diharapkan dapat secara optimal meningkatkan peluang aliansi strategis, khususnya di bidang teknologi dan pendanaan, di samping melakukan manuver bisnis yang lebih lincah untuk mendukung PLN sebagai *Holding*. Dengan pembentukan *Sub-Holding* ini, PLN ICON

The Company's business prospects in the coming year will also be fundamentally affected by the Company's restructuring effort through the establishment of the PLN Holding Sub-Holding. This restructuring is a manifestation of PLN's commitment to accelerating towards the energy transition, as well as an effort to encourage optimization of asset utilization, core competencies, and technical skills. Moreover, the establishment of PLN Holding Sub-Holding is an effort of the Company to exploit the potential for business development to be more agile and effective amid changing times.

Through the establishment of this Holding Sub-Holding, since planned in 2022, the Company in early 2023 has 4 (four) Sub-Holdings namely PLN Energi Primer Indonesia, PLN Nusantara Power (Generation Company 1), PLN Indonesia Power (Generation Company 2), and Indonesia Comnets Plus (ICON Plus). PLN Nusantara Power and PLN Indonesia Power are Sub-Holdings in the field of electricity generation, PLN Energi Primer Indonesia is a Sub-Holding in the supply and logistics sector of primary energy, while ICON Plus will focus to increase revenue from non-electricity sales (*Beyond kWh*).

The establishment of Holding Sub-Holding is believed to be able to boost the effectiveness of the Company's business process efficiency, with far more optimal asset utilization. Fundamentally, each Sub-Holding will have a strategic role in managing state assets, an aspect that was previously the front line of the Company's operations in providing electricity to communities throughout Indonesia. Meanwhile, the Company as a holding company will focus on strategic matters including portfolio development, customer expansion, and improving service quality for all Indonesian people.

Furthermore, the Company has an agenda to implement business innovations in fields other than electricity (*Beyond kWh*) more quickly to become a new source of income, through the establishment of the PLN ICON Plus Sub-Holding. Moreover, this Sub-Holding is expected to optimally increase opportunities for strategic alliances, especially in the fields of technology and funding, in addition to maneuvering businesses more agile to support PLN as a Holding. With the establishment of this Sub-Holding, PLN ICON Plus will

Plus akan berfokus pada pengelolaan dan pengembangan penggunaan sejumlah aset kelistrikan dari yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi layanan kelistrikan, dimanfaatkan untuk menyediakan layanan di luar kelistrikan (*Beyond Kwh*). Layanan yang dikembangkan mencakup layanan internet, PLN *Market Place*, hingga EV Charging.

ASPEK PEMASARAN STRATEGI PEMASARAN

Dalam rangka mencapai pertumbuhan penjualan sesuai target yang ditetapkan, PLN melaksanakan 2 (dua) strategi pemasaran, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemakaian energi listrik pelanggan eksisting dan mempertahankan pelanggan eksisting, sedangkan strategi ekstensifikasi bertujuan untuk meningkatkan kWh jual ataupun pendapatan penjualan dengan melakukan penambahan pelanggan baru, termasuk mengakuisisi pelanggan yang memiliki *captive power* dan dedieselisasi.

Strategi intensifikasi terdiri dari:

1. Meningkatkan pemakaian pelanggan eksisting (*natural growth*) melalui peningkatan keandalan listrik, meminimalisasi kebocoran dan pencurian listrik serta mendorong *electrifying lifestyle*;
2. Meningkatkan pemakaian pelanggan dengan menambah kapasitas daya tersambung (reguler, layanan prioritas atau B2B);
3. Meningkatkan pemakaian pelanggan melalui migrasi layanan reguler ke layanan prioritas atau B2B; dan
4. Meningkatkan pemakaian melalui akuisisi *captive* pada pelanggan eksisting.

Strategi ekstensifikasi terdiri dari:

1. Meningkatkan penjualan melalui percepatan penyambungan baru pelanggan reguler maupun layanan prioritas sesuai dengan SLA penyambungan;
2. Meningkatkan penjualan melalui akuisisi pelanggan yang memiliki *captive power* (akuisisi pelanggan *captive*, dedieselisasi dan *electrifying agriculture*); dan
3. Meningkatkan penjualan melalui akuisisi pelanggan baru dedieselisasi, baik *non-agriculture* maupun *electrifying agriculture* pada sektor *agriculture, marine, cold storage, perikanan, peternakan* dan lainnya.

focus on managing and developing the use of a number of electricity assets which were previously only designated for electricity services and utilized to provide services outside of electricity (*Beyond Kwh*). Services developed include internet services, PLN *Market Place*, to EV Charging.

MARKETING ASPECT MARKETING STRATEGY

In order to achieve sales growth according to the set targets, PLN implements 2 (two) marketing strategies, namely intensification and extensification. The intensification strategy is carried out with the aim of optimizing the electricity consumption of existing customers and retaining existing customers, while the extensification strategy aims to increase sales kWh or sales revenue by adding new customers, including acquiring customers with captive power and dedieselization.

The intensification strategy consists of:

1. Increasing the use of existing customers (*natural growth*) by increasing electricity reliability, minimizing electricity leakage and theft, and encouraging electrifying lifestyle;
2. Increasing customer usage by increasing connected power capacity (regular, priority service or B2B);
3. Increasing customer usage through migration of regular services to priority services or B2B; and
4. Increasing usage through captive acquisition of existing customers.

The extensification strategy consists of:

1. Increasing sales by accelerating the connection of new regular customers and priority services in accordance with the SLA connection;
2. Increasing sales through the acquisition of customers who have captive power (*captive customer acquisition, dedieselization and electrifying agriculture*); and
3. Increasing sales through the acquisition of new dedieselization customers, both *non-agriculture* and *electrifying agriculture* in the agriculture, marine, cold storage, fisheries, livestock, and other sectors.

Untuk merealisasikan strategi tersebut di atas, PLN melaksanakan sejumlah program kerja sebagai berikut:

1. Kegiatan pemasaran kunjungan pelanggan, meliputi:
 - a. Menawarkan Layanan Prioritas/B2B/REC/produk & jasa PLN Group kepada pelanggan potensial melalui pemasaran agresif dan bekerja sama dengan anak/cucu perusahaan;
 - b. Membangun *Partnership Role 123* antara PLN dan *Key Account* (Pelanggan Kunci) sebagai berikut:
 - i. GM membangun *partnership* dengan 10 pelanggan terbesar di unit induk;
 - ii. Manajer UP3 membangun *partnership* dengan minimal 20 pelanggan terbesar di Unitnya selain *partnership* pada poin 1;
 - iii. Manajer ULP membangun *partnership* dengan minimal 20 pelanggan terbesar di Unitnya selain *partnership* pada poin 1 dan 2;
 - c. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk penambahan konsumsi energi listrik melalui:
 - i. Dinas Perikanan dan Kelautan, untuk penyediaan es atau *freezer* bagi penampungan ikan nelayan, dan menciptakan usaha industri perikanan bagi nelayan;
 - ii. Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti tambak udang, pemecah batu, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri rumah tangga, kuliner, dengan menambah penerangan jalan, pompa air, modal usaha dan lainnya;
 - iii. Pengelola pelabuhan untuk mengganti penggunaan listrik dari diesel di perahu maupun kapal, menjadi penggunaan listrik dari instalasi PLN, terutama saat kapal bersandar di pelabuhan (*shore-connection*);
 - iv. Dinas Lingkungan Hidup, untuk mendorong penggunaan listrik PLN dan peralatan listrik, dengan pertimbangan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
 - v. Dinas Pariwisata, untuk pengembangan *resort* atau daerah-daerah wisata baru;
 - vi. Kanwil/Kantor Kementerian Agama atau pengurus rumah ibadah, untuk penyediaan penyejuk ruangan (AC) di rumah-rumah ibadah;
 - vii. BKPM & BKPMD, untuk mendapatkan data calon pelanggan potensial;

To realize the above strategy, PLN has implemented a number of work programs as follows:

1. Marketing activities by visiting customers, including:
 - a. Offering Priority Services/ B2B/ REC/ PLN Group products & services to potential customers through aggressive marketing and collaboration with subsidiaries/second tier subsidiaries;
 - b. Building Partnership Role 123 between PLN and Key Accounts (Key Customers) as follows:
 - i. GM builds partnerships with the 10 largest customers in the parent unit;
 - ii. The UP3 manager builds a partnership with at least the 20 biggest customers in its unit other than the partnership in point 1;
 - iii. ULP Managers build partnerships with at least the 20 largest customers in their Units apart from partnerships on points 1 and 2;
 - c. Collaborating with stakeholders to increase electricity consumption through:
 - i. Department of Fisheries and Maritime Affairs to provide ice or freezers for fishermen's fish storage and to create fishing industry businesses for fishermen;
 - ii. Regional Government to increase Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) such as shrimp ponds, stone crushers, agriculture, fisheries, plantations, animal husbandry, home industry, culinary, by adding street lighting, water pumps, business capital, and others;
 - iii. Port managers to replace the use of electricity from diesel in boats and ships, to use electricity from the PLN installation, especially when the ship is docked at the port (*shore-connection*);
 - iv. Environmental Service to encourage the use of PLN electricity and electrical equipment, with consideration of improving the quality of the environment;
 - v. Tourism Office for the development of resorts or new tourist areas;
 - vi. Regional Offices of the Ministry of Religion or administrators of houses of worship, to provide air conditioning (AC) in places of worship;
 - vii. BKPM & BKPMD to obtain data on potential customers;

- d. Meningkatkan penjualan melalui dorongan pemakaian baru dengan cara sebagai berikut:
 - i. Mendatangi pemakai listrik (industri, bangunan komersil) yang belum menggunakan listrik PLN, dan menawarkan berbagai kemudahan agar menggunakan listrik PLN sebagai sumber utama;
 - ii. Mendorong regulasi daerah yang mengharuskan gedung komersial bertingkat menerangi gedungnya dengan lampu hias/sorot yang menambah keindahan kota;
 - e. Memetakan dan mendorong pelanggan yang menggunakan *captive power* dan dedieselisasi untuk beralih kepada listrik PLN;
 - f. Proaktif menyampaikan informasi kesiapan kapasitas sistem dan produk layanan melalui dialog dengan setiap asosiasi (besi baja, semen, tekstil, kimia, REI, APERSI, dll), perbankan dan segmen pelanggan, serta setiap instansi Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Bappeda, BKPM, BKPM, Dinas Perindustrian, Dinas ESDM, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dll) minimal sekali per semester untuk menggali potensi pelanggan;
 - g. Melakukan pertemuan dengan pelanggan dan/atau calon pelanggan potensial secara berkala; dan
 - h. Melaksanakan akselerasi layanan pelanggan dan calon pelanggan potensial dengan upaya terobosan dalam percepatan nota kesepakatan, percepatan pembayaran dan percepatan penyalaan, seperti pelayanan listrik masa konstruksi dengan menggunakan UGB/powerbank/UPS.
2. Kegiatan pemasaran produk, meliputi:
 - a. Mendorong tambah daya bagi pelanggan retail (TR) yang jam nyala minimumnya $\geq 400-600$ jam;
 - b. Melakukan sosialisasi & pemasaran keliling (sarling) ke pelanggan retail (TR) di tempat yang strategis;
 - c. Bekerja sama dengan *event organizer* pesta, penyewa jasa tenda pesta, dan pasar malam untuk memakai listrik PLN (UGB/Power Bank/UPS) dalam acaranya, misalnya untuk penggunaan *standing AC*, lampu terang benderang, *exhaust fan*, lemari pendingin untuk *coin box*, dll, dengan menggunakan layanan penyambungan sementara;
 - d. Membuat program paket listrik untuk pemakaian sementara pesta dengan persyaratan mudah, biaya murah, dan cepat saji, sehingga bila pemangku hajatan membutuhkan listrik pesta, akan terlayani dengan baik;
- d. Increasing sales by encouraging new usage in the following ways:
 - i. Visit electricity users (industry, commercial buildings) who do not yet use PLN electricity, and offer various conveniences to use PLN electricity as the main source;
 - ii. Encouraging regional regulations that require high-rise commercial buildings to illuminate their buildings with decorative lights that add to the beauty of the city;
 - e. Mapping and encouraging customers who use *captive power* and de-dieselization to switch to PLN electricity;
 - f. Proactively delivering information on system capacity readiness and service products through dialogue with every association (steel, cement, textile, chemical, REI, APERSI, etc.), banking and customer segments, as well as every Regional Government agency (Governor, Regent/Mayor, Bappeda, BKPM, BKPM, Industry Service, ESDM Service, Tourism Office, Maritime Affairs and Fisheries Service, etc.) at least once per semester to explore potential customers;
 - g. Conducting regular meetings with customers and/or potential customers; and
 - h. Carrying out accelerated customer service and potential prospective customers with breakthrough efforts in accelerating memorandums of agreement, accelerating payments and accelerating startup, such as electricity services during the construction period using UGB/powerbank/UPS.
2. Product marketing activities, including:
 - a. Encouraging added power for retail customers (TR) whose minimum operating hours are $\geq 400-600$ hours;
 - b. Conducting dissemination & mobile marketing (sarling) to retail customers (TR) in strategic places;
 - c. Collaborating with party event organizers, party tent service tenants, and night markets to use PLN (UGB/Power Bank/UPS) electricity for the event, for example for the use of *standing AC*, bright lights, exhaust fans, coolers for coin boxes, etc., by using the temporary connection service;
 - d. Creating an electricity package program for temporary use of parties with easy requirements, low cost, and fast serving, so that when the party's organizer needs electricity, it will be served well;

- e. Membuka peluang kepada masyarakat untuk membuat bisnis baru, seperti penyewaan AC atau kipas angin untuk hajatan, dengan komitmen bahwa PLN mendukung bisnis baru tersebut dengan penyediaan listrik mudah, murah, cepat;
 - f. Melakukan promosi produk dan layanan PLN melalui spanduk, brosur, *standing banner*, baliho, *outlet/stand* pameran, dll, di lokasi dan waktu yang strategis. Di samping itu, juga dapat melakukan promosi dengan memanfaatkan media massa, radio, TV, kolaborasi dengan pemerintah dan forum komunikasi antar pemangku kepentingan maupun komunitas;
 - g. Mengajak dan mengimbau pengembang rusun/apartemen untuk langsung melengkapi unit apartemen dengan kelengkapan rumah tangga yang berbasis listrik. PLN dapat membantu dengan pemberian diskon biaya penyambungan baru;
 - h. Bekerja sama dengan warung kaki lima untuk memanfaatkan SPLU sebagai *charging station* dan keperluan bisnis lainnya (*cool case*, *juicer*, *coffee maker*, *electric cattle*, kompor induksi, dll).
 - i. Bekerja sama dengan *dealer* kendaraan listrik dan pihak lainnya untuk memanfaatkan produk SPKLU & SPBKLU serta memiliki *home charging*; dan
 - j. Mengajak masyarakat untuk mengunduh dan menggunakan PLN Mobile.
3. Kegiatan pemasaran *electrifying lifestyle* meliputi:
 - a. Mengampanyekan penggunaan kompor induksi dan kendaraan listrik kepada seluruh masyarakat;
 - b. Memastikan kepemilikan dan penggunaan kompor induksi di seluruh pegawai PLN;
 - c. Membuat kegiatan yang berhubungan dengan budaya penggunaan peralatan listrik;
 - d. Bekerja sama dengan pengusaha makanan dan minuman ringan untuk memasang *cool case* sebagai tempat memajang dan menjual makan/minuman panas atau dingin;
 - e. Mengampanyekan kenyamanan beraktivitas dengan suhu udara di sekitar 21-23 derajat Celcius. Dengan demikian, konsumsi listrik untuk AC akan semakin banyak;
 - f. Mendorong penggunaan dispenser untuk penyediaan air minum dingin dan panas di ruang kantor;
 - g. Mendorong penggunaan *hot water boiler* di ruang rapat. *Boiler* jenis ini lebih cepat menyediakan air panas dibanding *dispenser*;
 - e. Opening opportunities for the public to create new businesses, such as renting air conditioners or fans for celebrations, with the commitment that PLN supports these new businesses by providing easy, affordable, fast electricity;
 - f. Promoting PLN products and services through banners, brochures, standing banners, billboards, outlets/exhibition stands, etc., at strategic locations and times. Promotions can also be carried out by utilizing mass media, radio, TV, collaboration with the government and communication forums between stakeholders and the community;
 - g. Inviting and urging flat/apartment developers to immediately equip apartment units with electricity-based household equipment. PLN can help by providing a discount on the cost of a new connection;
 - h. Collaborating with street food stalls to utilize SPLU as a charging station and other business needs (cool cases, juicers, coffee makers, electric cattle, induction cookers, etc.).
 - i. Collaborating with electric vehicle dealers and other parties to utilize SPKLU & SPBKLU products and have home charging; and
 - j. Inviting people to download and use PLN Mobile.
3. Electrifying lifestyle marketing activities including:
 - a. Campaigning for the use of induction cookers and electric vehicles to public;
 - b. Ensuring the ownership and use of induction cookers by all PLN employees;
 - c. Making activities related to the culture of using electrical equipment;
 - d. Collaborating with food and beverage entrepreneurs to install cool cases as a place to display and sell hot or cold food/drinks;
 - e. Campaigning for comfortable activities with temperatures around 21-23 degrees Celsius. Thus, electricity consumption for air conditioners will increase;
 - f. Encouraging the use of dispensers for the provision of cold and hot drinking water in office spaces;
 - g. Encouraging the use of hot water boilers in meeting rooms. This type of boiler provides hot water faster than a dispenser;

- h. Mendorong penyediaan *vending machine* untuk menjual makanan dan minuman panas/dingin;
 - i. Mengampanyekan penggunaan *jet air dryer* dibanding kertas tisu untuk mengeringkan tangan;
 - j. Bekerja sama dengan Pemprov/Pemkab/Pemkot atau asosiasi, untuk menyelenggarakan lomba menghias gedung dengan pencahayaan lampu pada malam hari;
 - k. Mendorong pengalihan pemakaian pemanas air gas menjadi pemanas air listrik.
 - l. Mendorong lomba penggunaan listrik di tempat-tempat fasilitas publik (gedung, ruang terbuka, alun-alun, dll) dengan memberi penghargaan sehingga fasilitas publik tersebut menjadi terang benderang, indah, bersih, sehat dan ramah lingkungan dengan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Pertamanan/Tata Kota; dan
 - m. Bekerja sama dengan pengembang perumahan, untuk menyediakan kompor induksi/listrik dan peralatan berbasis listrik lainnya seperti *air dryer*, *exhaust fan*, pemanas air dan lainnya di rumah-rumah, apartemen, atau bangunan kantor.
- h. Encouraging the provision of vending machines to sell hot/cold food and drinks;
 - i. Campaigning for the use of jet air dryers instead of paper towels to dry hands;
 - j. Collaborating with the Provincial Government/Regency Government/ City Government or associations, to organize competitions to decorate buildings with lighting at night;
 - k. Encouraging the diversion of the use of gas water heaters to electric water heaters.
 - l. Encouraging competitions for the use of electricity in public facilities (buildings, open spaces, squares, etc.) by giving awards so that these public facilities become bright, beautiful, clean, healthy and eco-friendly in collaboration with the Environment Agency and/or or the Parks/City Planning Service; and
 - m. Collaborating with housing developers to provide induction/electric stoves and other electricity-based equipment such as air dryers, exhaust fans, water heaters and others in homes, apartments or office buildings.

PANGSA PASAR

PLN adalah penyedia utama di listrik di Indonesia mulai dari produksi listrik hingga distribusi ke pelanggan. Jumlah pelanggan PLN sampai dengan tahun 2022 mencapai 85,6 juta pelanggan sehingga dari sisi jumlah pelanggan dapat dikatakan bahwa PLN menguasai pangsa pasar konsumen listrik di Indonesia.

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

KEBIJAKAN DIVIDEN

PLN membagikan dividen atas laba bersih, sesuai dengan keputusan pemegang saham dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang ditetapkan berdasarkan kinerja tahun berjalan dan kebutuhan pengembangan usaha jangka panjang. Sejumlah hal yang menjadi pertimbangan dalam pembagian dividen antara lain perolehan laba bersih di tahun buku, kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan, serta rencana modal dan prospek pertumbuhan usaha ke depan.

PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN 2022

Di tahun 2022, PLN membagikan dividen tahun buku 2021 dengan pengungkapan serta perbandingan dengan pembagian di tahun 2021 sebagai berikut:

MARKET SHARE

PLN is the main provider of electricity in Indonesia from electricity production to distribution to customers. Total customers of PLN by 2022 reached 85.6 million customers, therefore in terms of the number of customers it can be said that PLN dominates the share of the electricity consumer market in Indonesia.

POLICY AND DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

DIVIDEND POLICY

PLN distributes dividends on net profit in accordance with shareholder resolutions in the General Meeting of Shareholders (GMS) forum, which are determined based on current year performance and long-term business development needs. A number of things are taken into consideration in the distribution of dividends, including the acquisition of net profit in the fiscal year, the Company's financial condition and soundness level, as well as capital planning, and prospects for future business growth.

Dividend Distribution in 2022

PLN distributed dividends for the 2022 fiscal year with disclosure and comparison with the 2021 distribution as follows:

Uraian / Description	2022	2021
Jumlah dividen yang dibayarkan dalam tahun berjalan (Rp miliar) / Total dividends distributed in the current year (Rp billion)	750	400
Tanggal pengumuman / Announcement date	27 Juni 2022 / June 27, 2022	28 Juni 2021 / June 28, 2021
Tanggal pembayaran / Payment date	27 Juli 2022 / July 27, 2022	26 Juli 2021 / July 26, 2021
Dividen per lembar saham (Rp) / Dividend per share (Rp)	5.153	2.953
Rasio pembayaran dividen (%) / Dividend payout ratio (%)	0,05	0,03

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Sampai dengan 31 Desember 2022, PLN tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP). Atas hal itu, tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga *exercise* untuk diungkapkan pada bagian ini.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Selama 2022, PLN tidak melakukan/melakukan penawaran umum baik saham maupun obligasi. Oleh sebab itu, tidak terdapat informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum untuk diungkapkan pada bagian ini.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama 2022, PLN tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI ATAU BERELASI

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai ketentuan yang termuat dalam PSAK No. 7: "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan OJK No. VIII.G.7.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional. Entitas yang berelasi

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OPTION PROGRAM (ESOP/MSOP)

As of December 31, 2022, PLN did not have an employee and/or management share ownership program (ESOP/MSOP). For this reason, there is no information regarding the number of ESOP/MSOP shares and their realization, time period, requirements for eligible employees and/or management, and exercise prices to be disclosed in this section.

REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Throughout 2022, PLN did not conduct a public offering of either shares or bonds. Therefore, there is no information regarding the actual use of proceeds from the public offering to be disclosed in this section.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST

Throughout 2022, PLN did not make transactions that contain conflicts of interest.

TRANSACTIONS WITH AFFILIATED OR RELATED PARTIES

The Company conducted transactions with related parties as defined by PSAK No. 7: "Related Party Disclosures" and OJK Regulation No. VIII.G.7.

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the Government. Government refers to the Government, Government agencies, and similar bodies both locally, nationally, and internationally. Entities related to the Government include entities that

dengan Pemerintah termasuk entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Sifat Hubungan Berelasi

Sifat hubungan berelasi dalam transaksi yang dilakukan PLN adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN;
2. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan;
3. Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama;
4. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personel manajemen kunci Perusahaan.

Ketentuan Transaksi Berelasi

PLN melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Penjualan produk dan jasa kepada pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan, yang pada umumnya menggunakan dasar harga pasar yang berlaku ditambah margin tertentu sesuai kesepakatan;
2. Pengangkutan bahan bakar maupun suku cadang oleh pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak pengangkutan yang disepakati bersama berdasarkan hasil negosiasi dengan memperhatikan unsur-unsur biaya yang ada ditambah dengan margin tertentu;
3. Penempatan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan dan perjanjian yang saling menguntungkan dan memberikan keuntungan optimal pada Perseroan;
4. Perolehan dana pinjaman dilakukan melalui negosiasi syarat dan kondisi yang paling optimal bagi kepentingan operasional Perseroan.

Pihak Berelasi

Daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup PLN adalah sebagai berikut:

are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments which are shareholders of the entity, or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as proxy of the shareholder.

Nature of Affiliated Relations

Nature of relation in transactions carried out by PLN is as follows:

1. The government in this case is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, who is the shareholder of the Company and SOEs;
2. The Company has an affiliated relationship with other SOEs that are jointly owned by the Ministry of Finance;
3. The Company has significant influence over investments in associates or joint ventures;
4. The Board of Commissioners and the Board of Directors are key management personnel of the Company.

Terms of Affiliated Transactions

PLN carries out transactions with related parties by implementing the following policies:

1. Sales of goods and services to related parties are determined based on sales contracts, which generally use the prevailing market price basis plus a certain margin according to the agreement;
2. Transportation of fuel and spare parts by related parties is determined based on a mutually agreed freight in accordance with the results of negotiations by taking into account the existing cost elements plus a certain margin.
3. Fund placements are made based on needs and mutually beneficial agreements that provide optimal benefits to the Company.
4. Obtaining loan funds is carried out through negotiation of the most optimal terms and conditions for the Company's operational interests.

Related Parties

The list of related parties that have transactions with the PLN Group is as follows:

Pihak-Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Natur of Relations	Alasan Transaksi / Nature of Transactions	Kewajaran Transaksi / Transaction Fairness
Pemerintah Republik Indonesia / Government of the Republic of Indonesia	Pemegang saham akhir / Ultimate shareholders	Penerimaan subsidi listrik, penerimaan penerusan pinjaman, dan utang kepada pemerintah / Receipt of electricity subsidy, two-step loan and government loan	Wajar / Fair
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan penerimaan utang bank / Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans.	Wajar / Fair
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan penerimaan utang bank / Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans	Wajar / Fair
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, dan penerimaan utang bank / Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, and receipt of bank loans	Wajar / Fair
PT Bank DKI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank / Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans	Wajar / Fair
PT Bank Pembangunan Daerah	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank / Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans	Wajar / Fair
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank / Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans	Wajar / Fair
PT Bank Syariah Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank / Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans	Wajar / Fair
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan Utang Bank / Receipt of Bank Payables	Wajar / Fair
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas / Purchase of gas	Wajar / Fair
PT Pertamina Geothermal Energy	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas / Purchase of fuels and lubricants	Wajar / Fair
PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas / Purchase of gas	Wajar / Fair
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan / Insurance services for Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels	Wajar / Fair
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah nonbank / Receipt of non-bank government financial institution	Wajar / Fair
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi / Construction services	Wajar / Fair



Pihak-Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Natur of Relations	Alasan Transaksi / Nature of Transactions	Kewajaran Transaksi / Transaction Fairness
PT Wijaya Karya	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi / Construction services	Wajar / Fair
PT Pelabuhan Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Utang sewa / Lease liabilities	Wajar / Fair
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Entitas asosiasi / Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Tanjung Kasam Power	Entitas asosiasi / Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Dalle Energy Batam	Entitas asosiasi / Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Mitra Energi Batam	Entitas asosiasi / Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi / Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Riau Power	Entitas asosiasi / Associate	Transaksi pembelian saham / Purchase of shares	Wajar / Fair
PT Bajradaya Sentranusa	Ventura Bersama / Joint Venture	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Ventura Bersama / Joint Venture	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Bukit Pembangkit Innovative	Ventura Bersama / Joint Venture	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Ventura Bersama / Joint Venture	Pemberian pinjaman jangka panjang dan transaksi pembelian tenaga listrik / Issuance of long-term loans and purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Rajamandala Electric Power	Ventura Bersama / Joint Venture	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Perta Daya Gas	Ventura Bersama / Joint Venture	Pemberian pinjaman jangka panjang dan transaksi pembelian tenaga listrik / Issuance of long-term loans and purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Transportasi Gas Indonesia	Pihak berelasi lainnya / Other related parties	Transaksi jasa penyaluran gas / Gas distribution services	Wajar / Fair
PT Pertamina Gas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas / Purchase of gas	Wajar / Fair
PT Bukit Asam Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar batubara / Purchase of coal	Wajar / Fair
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah non-bank / Receipt of non-bank government financial institution loans	Wajar / Fair
PT Rekind Daya Mamuju	Entitas asosiasi / Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi	Ventura bersama / Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang / Issuance of long-term loans	Wajar / Fair
PT GCL Indonesia	Ventura bersama / Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang / Issuance of long-term loans	Wajar / Fair
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Utang sewa / Lease liabilities	Wajar / Fair
Dana Pensiun PLN	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Utang sewa / Lease liabilities	Wajar / Fair
PT Djakarta Llyod	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Utang sewa / Lease liabilities	Wajar / Fair

Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi

PLN melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan pengungkapan sesuai jenis transaksi sebagai berikut:

Value of Transactions with Related Parties

PLN entered into transactions with related parties with type of transactions as follows:

Dalam jutaan rupiah

In millions of rupiah

Jenis Transaksi / Type of Transactions	Nilai Transaksi / Transaction Value		Keterangan / Description	Persentase (%) / Percentage (%)	
	2022	2021		2022	2021
Piutang berelasi / Related parties	1.519.276	1.343.147	Persentase terhadap total aset / Percentage to total assets	0,09	0,08
Rekening bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya / Restricted cash in banks	356.884	225.789	Persentase terhadap total aset / Percentage to total assets	0,02	0,01
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents	49.327.970	35.880.127	Persentase terhadap total aset / Percentage to total assets	3,01	2,22
Investasi jangka pendek / Short-term investments	513.287	290.332	Persentase terhadap total aset / Percentage to total assets	0,03	0,02
Piutang usaha - BUMN / Trade receivables - SOE	2.347.650	2.280.440	Persentase terhadap total aset / Percentage to total assets	0,14	0,14
Piutang dari Pemerintah / Receivables from Government	21.470.500	26.554.891	Persentase terhadap total aset / Percentage to total assets	1,31	1,65
Total Terhadap Aset / Total to Assets	75.535.567	66.574.726	Persen terhadap Aset / Percentage to Assets	4,60	4,12
Penerusan pinjaman / Two-step loans	33.184.714	34.699.205	Persentase terhadap total liabilitas / Percentage to total liabilities	5,13	5,49
Utang sewa / Lease liabilities	1.257.372	1.641.819	Persentase terhadap total liabilitas / Percentage to total liabilities	0,19	0,26
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank / Government and non-bank Government financial institution loans	3.628.808	4.888.440	Persentase terhadap total liabilitas / Percentage to total liabilities	0,56	0,77
Utang bank / Bank loans	36.886.258	40.678.317	Persentase terhadap total liabilitas / Percentage to total liabilities	5,70	6,45
Utang usaha / Trade payables	15.212.073	20.566.633	Persentase terhadap total liabilitas / Percentage to total liabilities	2,35	3,25
Utang lain-lain / Other payables	5.423.484	5.417.671	Persentase terhadap total liabilitas / Percentage to total liabilities	0,84	0,87
Biaya masih harus dibayar / Accrued expenses	587.968	459.798	Persentase terhadap total liabilitas / Percentage to total liabilities	0,10	0,09
Total Terhadap Liabilitas / Total to Liabilities	96.180.677	108.351.883	Persen terhadap Liabilitas / Percentage to Liabilities	14,87	17,15
Penjualan tenaga listrik - BUMN / Sales of electricity - SOE	20.157.947	17.884.988	Persentase terhadap total penjualan tenaga listrik / Percentage to total sales of electricity	6,48	6,19
Subsidi listrik Pemerintah / Government electricity subsidy	58.831.960	49.796.949	Persentase terhadap total subsidi / Percentage to total subsidy	100,00	100,00
Pendapatan kompensasi / Compensation income	63.649.821	23.392.162	Persentase terhadap total pendapatan kompensasi / Percentage to total compensation income	100,00	100,00
Pendapatan usaha lain-lain / Other revenues	2.401.799	1.666.277	Persentase terhadap total pendapatan usaha lain-lain / Percentage to total other revenues	35,66	37,64



Jenis Transaksi / Type of Transactions	Nilai Transaksi / Transaction Value		Keterangan / Description	Persentase (%) / Percentage (%)	
	2022	2021		2022	2021
Beban bahan bakar dan pelumas / Fuel and lubricants expenses	62.380.009	45.023.208	Persentase terhadap total beban / Percentage to total expenses	41,20	38,02
Beban pembelian tenaga listrik / Purchased electricity expenses	32.567.208	27.616.874	Persentase terhadap total beban / Percentage to total expenses	25,00	26,67
Beban usaha lain-lain / Other operating expenses	861.933	789.768	Persentase terhadap total beban / Percentage to total expenses	9,68	10,91
Beban keuangan / Finance costs	1.429.540	4.064.034	Persentase terhadap total beban / Percentage to total expenses	8,34	19,94

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI

PLN menerapkan kebijakan untuk menerapkan sistem pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*), sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan serta transparansi dan akurasi pencatatan transaksi bisnis.

COSO merupakan organisasi internasional yang menyediakan kerangka dan pedoman manajemen risiko, pengendalian internal, dan pencegahan *fraud*. PLN mengadopsi standar COSO pada ICoFR (*Internal Control over Financial Reporting*).

Secara spesifik, penerapan ICoFR oleh PLN bertujuan untuk memenuhi kriteria COSO tentang pelaporan keuangan yang andal. Penerapan ICoFR di PLN diharapkan tidak hanya membantu Perusahaan dalam mencapai keandalan laporan keuangan, tetapi untuk membuktikan bahwa proses bisnis sudah dijalankan dengan efektif.

PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

PLN melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *International Financial Report Standard* (IFRS).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan IFRS. Sasaran Konvergensi IFRS adalah merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS, Konvergensi PSAK terhadap IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap, sehingga PSAK yang berlaku saat ini juga mengalami beberapa kali revisi agar sesuai dengan IFRS terkini.

COMPANY POLICY RELATED TO TRANSACTION REVIEW MECHANISM

PLN implements a policy to implement an internal control system using the COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) approach, as an effort to increase accountability for every decision as well as transparency and accuracy of recording business transactions.

COSO is an international organization that provides frameworks and guidelines for risk management, internal control, and fraud prevention. PLN adopts the COSO standard on ICoFR (*Internal Control over Financial Reporting*).

Specifically, implementation of ICoFR by PLN aims to meet COSO criteria for reliable financial reporting. The implementation of ICoFR at PLN is expected not only to assist the Company in achieving reliable financial reports, but to prove that business processes have been carried out effectively.

FULFILLMENT OF RELATED REGULATIONS AND PROVISIONS

PLN prepares financial reports in accordance with Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAS IAI), Financial Services Authority Regulations (OJK) and *International Financial Report Standards* (IFRS).

The Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) has converged the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) with IFRS. The goal of IFRS Convergence is to revise PSAK so that it is materially in line with IFRS, PSAK Convergence to IFRS in Indonesia is being carried out in stages, so that the PSAK currently in effect has also undergone several revisions to comply with the latest IFRS.

PLN sebagai entitas yang sudah *listing* di pasar modal domestik maupun internasional, berkewajiban untuk mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (PSAK) yang berbasis pada IFRS dan Peraturan OJK yang berlaku. Standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh Perseroan dituangkan dalam bentuk Kebijakan Akuntansi. Meski dalam praktik penyusunan laporan keuangan telah mengadopsi PSAK yang berlaku pada saat periode pelaporan, pemutakhiran Kebijakan Akuntansi Perseroan akan selalu dilakukan dengan berpedoman pada PSAK terkini dan peraturan-peraturan terbaru sebagai pedoman tertulis kepada para pelaku dan pelaksana penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Perseroan.

INFORMASI MATERIAL TRANSAKSI TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI

Sehubungan dengan pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN, Menteri Badan Usaha Milik Negara telah menyetujui pembentukan 4 (empat) *Sub-Holding* PLN yang terdiri atas: 2 (dua) *Sub-Holding* di bidang pembangkitan tenaga listrik, yakni PT PLN Nusantara Power (sebelumnya bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali) dan PT Indonesia Power; 1 (satu) *Sub-Holding* di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu PT Energi Primer Indonesia (sebelumnya bernama PT PLN Batubara); dan 1 (satu) *Sub-Holding* untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan (*Beyond kWh*) yaitu PT Indonesia Comnets Plus.

Berdasarkan Persetujuan Menteri BUMN Nomor S-886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022, PT PLN (Persero) telah melakukan aksi korporasi dalam rangka Masa/Tahap *Legal End-State* pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PT PLN (Persero) yang telah berlaku efektif pada 1 Januari 2023 meliputi (seluruhnya selanjutnya disebut sebagai Aksi Korporasi *Legal End-State*):

1. Pemekaran usaha atau pemisahan tidak murni/*spin-off* atas sebagian aktiva dan pasiva pembangkitan dan energi primer PT PLN (Persero):
 - a. *Spin-off* kepada PT PLN Nusantara Power sebesar Rp151.255.249.000.000,- dan kepada PT Indonesia Power sebesar Rp175.974.993.000.000,- sesuai nilai wajar per tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid dan Rekan yang telah disahkan melalui Akta Notaris Nomor 76 dan Nomor 77 tanggal 30 Desember 2022 oleh Muhammad Hanafi, SH;

PLN as an entity that has been listed on domestic and international capital markets, is obliged to follow the applicable financial accounting standards in Indonesia (PSAK) based on IFRS and applicable OJK Regulations. The financial accounting standards used by the Company are set forth in the form of Accounting Policies. Even though in practice the preparation of financial statements has adopted the PSAK that was in effect during the reporting period, updating of the Company's Accounting Policies will always be carried out by referring to the latest PSAK and the latest regulations as written guidelines for actors and executors of preparing Financial Statements within the Company.

MATERIAL INFORMATION ON TRANSACTION RELATED TO INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND RESTRUCTURING

There In connection with the establishment of PLN Holding and Sub-Holding, the Minister of State-Owned Enterprise has approved the establishment of 4 (four) PLN Sub-Holdings consisting of: 2 (two) Sub-Holdings in the field of electricity generation, namely PT PLN Nusantara Power (formerly PT Pembangkitan Jawa-Bali) and PT Indonesia Power; 1 (one) Sub-Holding in primary energy supply and logistics, namely PT Energi Primer Indonesia (formerly PT PLN Batubara); and 1 (one) Sub-Holding for business activities other than generation, transmission, and distribution of electricity (*Beyond kWh*), namely PT Indonesia Comnets Plus.

Based on the approval of the Minister of SOE No.S-886/MBU/12/2022 dated December 30, 2022, PT PLN (Persero) has carried out corporate actions within the framework of the Legal End-State Period/Stage for the establishment of Holding and Sub-Holding of PT PLN (Persero) which has become effective on January 1, 2023, including (all hereinafter referred to as Legal End-State Corporation Actions):

1. Business division or spin-off of some of PT PLN (Persero) generation and primary energy assets and liabilities:
 - a. Spin-off to PT PLN Nusantara Power amounting to Rp151,255,249,000,000.- and to PT Indonesia Power amounting to Rp175,974,993,000,000.- in accordance with fair value as of June 30, 2022 based on the Valuation Report from the Rengganis, Hamid and Rekan Public Appraiser Services Office which has been approved through Notary Deed No. 76 and No. 77 dated December 30, 2022 by Muhammad Hanafi, S.H.;

- b. Atas Pemekaran usaha atau pemisahan tidak murni/ *spin-off* tersebut, PT PLN (Persero) memiliki modal ditempatkan dan disetor pada PT PLN Nusantara Power sebanyak 308.510.498.000 lembar saham dan pada PT Indonesia Power sebanyak 357.165.633.599 lembar saham yang mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PT PLN Nusantara Power serta PT Indonesia Power, yang telah disahkan melalui Akta Notaris Nomor 70 dan 71 tanggal 30 Desember 2022 oleh Muhammad Hanafi, SH serta mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000005.AH.01.02.TAHUN 2023 dan AHU-0000006.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 1 Januari 2023;
2. Penyertaan modal non-tunai (*inbreng*) kepada PT PLN Energi Primer Indonesia yang berasal dari pengalihan seluruh saham PT PLN (Persero) di PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dan PT PLN Gas & Geothermal sebagai berikut:
- a. Pengalihan penyertaan modal PT PLN (Persero) pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna sejumlah 21.674 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00,- per saham atau seluruhnya senilai Rp21.674.000.000,00,- serta Pengalihan penyertaan modal PT PLN (Persero) pada PT PLN Gas & Geothermal sejumlah 24.999 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per saham atau seluruhnya senilai Rp24.999.000.000,00,- yang mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PT PLN Gas & Geothermal dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna;
- b. Total nilai transaksi Penyertaan modal non-tunai (*inbreng*) tersebut adalah sebesar Rp2.273.717.000.000,00,- sesuai nilai wajar per 30 Juni 2022 berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid dan Rekan yang telah disahkan melalui Akta Notaris Nomor 78 tanggal 30 Desember 2022 oleh Muhammad Hanafi, SH;
- b. Due to the business expansion or spin-off, PT PLN (Persero) has issued and paid-up capital into PT PLN Nusantara Power of 308,510,498,000 shares and in PT Indonesia Power of 357,165,633,599 shares representing 99.99 % of the total issued and paid-up capital of PT PLN Nusantara Power and PT Indonesia Power, which was validated through Notary Deeds No. 70 and No. 71 dated December 30, 2022 by Muhammad Hanafi, S.H., and obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-0000005.AH.01.02.TAHUN 2023 and AHU-0000006.AH.01.02.TAHUN 2023 dated January 1, 2023;
2. Non-cash equity participation (*inbreng*) to PT PLN Energi Primer Indonesia originating from the transfer of all shares of PT PLN (Persero) in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna and PT PLN Gas & Geothermal as follows:
- a. Transfer of PT PLN (Persero)'s equity participation in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna amounting to 21,674 shares with a nominal value of Rp1,000,000.- per share or a total value of Rp21,674,000,000.- and transfer of PT PLN (Persero)'s equity participation in PT PLN Gas & Geothermal totaling 24,999 shares with a nominal value of Rp1,000,000.- per share or a total value of Rp24,999,000,000.- representing 99.99% of the total issued and paid-up capital of PT PLN Gas & Geothermal and PT Pelayaran Bahtera Adhiguna;
- b. The total transaction value of non-cash equity participation (*inbreng*) was Rp2,273,717,000,000.00.- according to fair value as of June 30, 2022 based on the Valuation Report from the Rengganis, Hamid and Rekan Public Appraiser Services Office which was validated through Notary Deed No. 78 dated December 30, 2022 by Muhammad Hanafi, S.H.;

c. Atas Penyertaan modal non-tunai (*inbreg*) tersebut, PT PLN (Persero) memiliki modal ditempatkan dan disetor pada PT PLN Energi Primer Indonesia sebanyak 2.298.716 lembar saham yang mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PT PLN Energi Primer Indonesia, yang telah disahkan melalui Akta Notaris Nomor 72 tanggal 30 Desember 2022 oleh Muhammad Hanafi, serta mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000004.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 1 Januari 2023.

Pelaksanaan Aksi Korporasi *Legal End-State* tersebut telah memenuhi ketentuan perundangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan, termasuk pengumuman di surat kabar harian nasional Kompas dan Bisnis Indonesia tanggal 3 Januari 2023 sebagai penyampaian keterbukaan informasi atau fakta material sesuai ketentuan POJK nomor 31/POJK.04/2015 dan mempertimbangkan Pasal 133 UU Nomor 40 tahun 2007.

Selanjutnya, PT PLN (Persero) akan menindaklanjuti Persetujuan Menteri BUMN Nomor S-886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 di atas sebagai dasar persetujuan penggunaan nilai buku untuk Aksi Korporasi *Legal End-State*, kepada otoritas yang berwenang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK/010/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.

Melalui Aksi Korporasi *Legal End-State* terkait pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* ini, PT PLN (Persero) mengharapkan percepatan Transformasi PLN melalui organisasi yang lebih lincah dan inovatif sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja serta *value creation* dari aset-aset yang dimiliki PLN Group maupun melalui bisnis *beyond kWh* dan mempercepat tercapainya agenda ESG.

c. For the non-cash equity participation (*inbreg*), PT PLN (Persero) has issued and paid-up capital at PT PLN Energi Primer Indonesia amounting to 2,298,716 shares representing 99.99% of the total issued and paid-up capital of PT PLN Energi Primer Indonesia, which was validated through Notarial Deed No. 72 dated December 30, 2022 by Muhammad Hanafi, and obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights by virtue of letter No. AHU-0000004.AH.01.02.Tahun 2023 dated January 1, 2023.

The implementation of the Legal End-State Corporate Action has complied with the statutory provisions and regulations that apply to the Company, including the announcement in the national daily newspapers Kompas and Bisnis Indonesia on January 3, 2023 as a submission of information disclosure or material facts in accordance with POJK provisions No. 31/POJK.04 /2015 and considering Article 133 of Law No. 40 of 2007.

Furthermore, PT PLN (Persero) will follow up on the Approval of the Minister of SOE No. S-886/MBU/12/2022 dated December 30, 2022 above as the basis for approval for the use of book value for Legal End-State Corporate Actions, to the competent authority based on Regulation of the Minister of Finance No. 56/PMK/010/2021 of 2021 on the Second Amendment Regulation of the Minister of Finance No. 52/PMK.010/2017 of 2017 on Use of Book Value for the Transfer and Acquisition of Assets in the Context of Business Merger, Consolidation, Expansion or Acquisition.

Through the Legal End-State Corporate Action related to the establishment of this Holding and Sub-Holding, PT PLN (Persero) expects the acceleration of the PLN Transformation through a more agile and innovative organization so as to be able to encourage increased performance and value creation from the assets owned by the PLN Group as well as through the business beyond kWh and accelerate the achievement of the ESG agenda.



PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Pada 2022, Pemerintah memberlakukan sejumlah regulasi terkait industri ketenagalistrikan, dengan perincian dan dampak terhadap PLN diungkapkan sebagai berikut:

CHANGES IN REGULATIONS AND ITS IMPACT ON THE COMPANY

In 2022, the Government enacted a number of regulations related to the electricity industry, with details and impacts on PLN disclosed as follows:

No.	Jenis Peraturan / Regulation	Perihal / Subject	Keterangan / Description	Dampak terhadap PLN / Impact on PLN
1.	Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2022 / Presidential Regulation No. 63 of 2022	Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara / Details of the Nusantara Capital City Master Plan	Peraturan ini merupakan pelaksana UU 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. / This regulation is the implementation of Law 3 of 2022 on the State Capital. Memuat perincian rencana induk IKN, yang merupakan pedoman komprehensif dalam pelaksanaan pembangunan ibu kota negara. / Contains details of the IKN master plan, which is a comprehensive guideline for implementing the development of the national capital.	Berdasarkan Lampiran Perpres 63 Tahun 2022 Bab III tentang Prinsip Dasar Pembangunan IKN (poin 3.6.7.2.1) menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan Ibu Kota Nusantara akan dilakukan dengan cara khusus yang dilaksanakan oleh pemegang wilayah usaha. Sistem usaha pengelolaan investasi khususnya dari sisi pembangkitan akan melibatkan partisipasi investasi badan usaha milik negara, swasta atau lainnya serta dukungan Pemerintah. Penyediaan tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara juga membutuhkan kebijakan tarif tersendiri secara khusus. Hal ini menyiratkan akan ada wilayah usaha khusus di IKN yang dikelola bukan oleh PLN. Meski demikian, PLN masih dapat berpartisipasi dalam pembangunan meski terbatas melalui penugasan khusus pada awal pembangunan, atau skema lain yang mungkin seperti KPBU dan pembentukan SPC. / Appendix to Presidential Decree 63 of 2022 Chapter III on Basic Principles of IKN Development (point 3.6.7.2.1) states that the management and development of Nusantara Capital City electricity system will be carried out in a special way carried out by the business area holder. The investment management business system, especially from the generation aspect, will involve the investment participation of state-owned, private or other companies as well as government support. Provision of electricity in the Nusantara Capital City also requires a special separate tariff policy. This implies that there will be special business areas in IKN that are not managed by PLN. However, PLN can still participate in development although limited through special assignments at the start of construction, or other possible schemes such as PPP and the formation of SPC.

No.	Jenis Peraturan / Regulation	Perihal / Subject	Keterangan / Description	Dampak terhadap PLN / Impact on PLN
2.	Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2022 / Presidential Regulation No. 64 of 2022	Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibukota Negara Nusantara / Spatial Planning of the Nusantara Capital National Strategic Area	Peraturan ini merupakan pelaksana UU 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam peraturan ini sudah mengatur rencana detail tata ruang IKN, termasuk penempatan sarana dan prasarana standar pelayanan minimum perkotaan. / This regulation is the implementation of Law 3 of 2022 on the State Capital. This regulation has regulated the detailed layout plan for the IKN, including the placement of urban minimum service standard facilities and infrastructure.	<p>Perpres ini mengatur mengenai rencana penyediaan sarana dan prasarana yang terintegrasi dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum perkotaan di IKN yang mendukung fungsi kawasan, di antaranya penyediaan tenaga listrik berbasis energi terbarukan melalui PLTS dan pemanfaatan hidrogen. / This Presidential Regulation regulates plans to provide integrated facilities and infrastructure to fulfill minimum urban service standards in IKN that support regional functions, including the provision of renewable energy-based electricity through PLTS and the utilization of hydrogen.</p> <p>Dalam hal ini PLN perlu mempersiapkan sistem ketenagalistrikan Kalimantan untuk dapat memasok dan menjaga keandalan sistem Kalimantan yang akan terkoneksi dengan sistem jaringan Ibu Kota Nusantara. Dengan kondisi sistem kelistrikan IKN yang dipasok dari pembangkit EBET apabila belum terkoneksi dengan baterai, maka sistem jaringan Kalimantan harus bisa mem-backup sifat intermiten pembangkit EBET IKN tersebut. / In this case, PLN needs to prepare the Kalimantan electricity system to be able to supply and maintain the reliability of the Kalimantan system which will be connected to the network system of the Nusantara Capital City. With the condition that the IKN electrical system is supplied from the NRE generator if it is not connected to a battery, the Kalimantan network system must be able to back up the intermittent nature of the IKN NRE generator.</p>
3.	Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2022 / Presidential Regulation No. 65 of 2022	Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan Di Ibu Kota Nusantara / Land Acquisition and Land Management in Nusantara Capital City	Mengatur mengenai perolehan Tanah oleh Otorita IKN dan/atau kementerian/lembaga di IKN diatur dalam Pasal 16 UU No 3 tahun 2022 tentang IKN. Dalam Perpres ini perolehan tanah dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap penguasaan tanah masyarakat, hak individu atau hak komunal masyarakat adat. Perolehan tanah di KIKN dilakukan melalui 2 (dua) cara sesuai status tanahnya yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah untuk tanah dengan yang berada pada kawasan Area Penggunaan Lain / Non-Kehutanan. / Regulate the acquisition of land by the IKN Authority and/or ministries/agencies in the IKN is regulated in Article 16 of Law No. 3 of 2022 on IKN. In this Presidential Decree, land acquisition is carried out by taking into account and providing protection for community land tenure, individual rights or communal rights of indigenous peoples. Acquisition of land at KIKN is carried out in 2 (two) ways according to the status of the land, namely releasing forest areas and land acquisition for land located in the area of Other/Non-Forest Use Areas.	<p>Pembagian status tanah di IKN terdiri dari Tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dilekatkan Hak Pakai dan ditetapkan sebagai Barang Milik Negara, penggunaan tanah dengan status BMN melalui regulasi yang mengatur BMN. / The distribution of land status in IKN consists of land used for government administration attached with usage rights and designated as state property, land use with BMN status through regulations governing BMN.</p> <p>Untuk selain tanah yang digunakan penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan menjadi Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara dan dilekatkan HGU di atasnya. Untuk penggunaan tanah HGU, PLN dapat melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah dalam jangka waktu dengan biaya tertentu dan dapat didaftarkan HGB atas nama PLN. / For other than land that is used for government administration, it is determined to be Assets Under the Authority of the Nusantara Capital City Authority and HGU is attached to it. For the use of HGU land, PLN can enter into a land use cooperation agreement for a period of time with a certain fee and HGB can be registered on behalf of PLN.</p>



No.	Jenis Peraturan / Regulation	Perihal / Subject	Keterangan / Description	Dampak terhadap PLN / Impact on PLN
4.	Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2022 / Regulation of the Minister of ESDM No. 16 of 2022	Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik / Procedures for Implementing Carbon Economic Value in the Power Generation Sub-Sector	<p>Merupakan peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. / A derivative regulation from Presidential Regulation No. 98 of 2021 on the Implementation of Carbon Economic Value for the Achievement of Nationally Determined Contribution Targets and Control of Greenhouse Gas Emissions in National Development.</p> <p>Nilai Ekonomi Karbon, yang selanjutnya disingkat NEK, adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. Penyelenggaraan NEK Subsektor pembangkit tenaga listrik meliputi: / Carbon Economic Value, hereinafter abbreviated as CEV, is the value of each unit of greenhouse gas emissions resulting from human activities and economic activities. Implementation of CEV in the power generation sub-sector includes:</p> <p>a. Penetapan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi GRK Pembangkit Tenaga Listrik (PTBAE); / Determination of Technical Approval for Power Plant GHG Emission Limits (PTBAE);</p> <p>b. Penyusunan rencana monitoring Emisi GRK pembangkit tenaga listrik; / Preparation of a plan for monitoring GHG Emissions for power plants;</p> <p>c. Penetapan PTBAE-PU; / Determination of PTBAE-PU;</p> <p>d. Perdagangan karbon; / Carbon trading;</p> <p>e. Penyusunan laporan emisi GRK pembangkit tenaga listrik; dan / Preparation of GHG emission reports for power plants; And</p> <p>f. Evaluasi pelaksanaan Perdagangan Karbon dan pelelangan PTBAE-PU. / Evaluation of PTBAE-PU Carbon Trading and tender implementation.</p>	<p>Berlakunya pajak karbon untuk pembangkit listrik berdampak pada bertambahnya beban pajak bagi pembangkit yang dimiliki PLN maupun pembangkit milik IPP yang dapat berdampak pada harga jual listrik yang harus dibayar PLN. / The enactment of the carbon tax for power plants has an impact on increasing the tax expense for generators owned by PLN and IPP's plants which can have an impact on the selling price of electricity that must be paid by PLN.</p> <p>Penyelenggaraan NEK dilaksanakan dengan ketentuan: a. Untuk PLTU dan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan bahan bakar fosil lainnya, meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f; dan b. Untuk pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi baru (EB) dan energy terbarukan (ET), meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang dilakukan melalui mekanisme Offset Emisi GRK. / CEV implementation is carried out with the following provisions: a. For PLTU and power plants that utilize other fossil fuels, include the activities referred to in letters a through f; and b. For power plants that utilize new energy sources (NE) and renewable energy (RE), include the activities referred to in letter d which are carried out through the GHG Emission Offset mechanism.</p> <p>PLN harus melakukan monitoring Emisi GRK pembangkit tenaga listrik tahunan di setiap unit pembangkit tenaga listrik. / PLN shall monitor the annual power plant GHG emissions in each power generation unit.</p> <p>Berlakunya mekanisme perdagangan karbon, menjadi peluang bagi PLN untuk menambah pendapatan PLN. / The implementation of the carbon trading mechanism is an opportunity for PLN to increase PLN's revenue.</p>
5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 tahun 2022 / Regulation of the Minister of Finance No. 159 of 2022	Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No 159/PMK.02/2021 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik. / Amendments to Regulation of the Minister of Finance No 159/PMK.02/2021 of 2021 on Procedures for Provision, Disbursement, and Accountability of Compensation Funds for Shortages of Business Entity Revenue Due to the Policy on Determining Retail Prices for Oil Fuel and Electricity Tariffs.	Merupakan Peraturan Pengganti Peraturan Menteri Keuangan No 159/PMK.02/2021 tahun 2021. / A Regulation in Lieu of Minister of Finance Regulation No 159/PMK.02/2021 of 2021.	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan dan pembayaran Dana Kompensasi (DK) dilakukan untuk periode triwulanan. / Calculation and payment of the Compensation Fund (DK) is carried out for a quarterly period. Perhitungan DK Triwulan pertama, triwulan kedua dan triwulan ketiga paling lambat tanggal 10 setelah triwulanan berkenaan berakhir. Untuk triwulan keempat untuk bulan Oktober dan/atau Oktober dan November disampaikan paling lambat bulan November dan/atau bulan Desember. / DK calculation for the first quarter, second quarter, and third quarter no later than the 10th after the concerned quarter ends. For the fourth quarter for October and/or October and November submitted no later than November and/or December. Pembayaran direncanakan mengikuti alur perhitungan DK secara triwulanan dengan mempertimbangkan kemampuan APBN. / Payments are planned to follow the flow of DK calculations on a quarterly basis by taking into account the capabilities of the State Budget.

No.	Jenis Peraturan / Regulation	Perihal / Subject	Keterangan / Description	Dampak terhadap PLN / Impact on PLN
6.	Keputusan Menteri ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 / Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022	Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri / Fulfillment of Domestic Coal Needs	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Permen ESDM 25/2018 jo. Permen ESDM 7/2020 / Implementing the provisions of Article 32 paragraph (2) of the Minister of Energy and Mineral Resources 25/2018 jo. ESDM Regulation 7/2020 • Menetapkan persentase DMO kepada pengusaha batubara sebesar 25% / Setting the DMO percentage for coal entrepreneurs at 25% • Pengenaan kewajiban pembayaran dana kompensasi, denda, dan denda dan dana kompensasi bagi pengusaha batubara yang tidak memenuhi DMO. / Imposition of obligations to pay compensation funds, fines, and compensation funds for coal entrepreneurs who do not fulfill the DMO. • Pengenaan sanksi administratif berupa pelarangan penjualan batu bara ke LN, penghentian sementara seluruh kegiatan operasi, dan pencabutan izin bagi pengusaha batu bara yang tidak memenuhi denda dan dana kompensasi. / Imposition of administrative sanctions in the form of prohibiting coal sales to overseas, temporary suspension of all operating activities, and revocation of permits for coal entrepreneurs who do not comply with fines and compensation funds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formula Kompensasi Listrik dihitung dari selisih tarif sesuai formula <i>tariff adjustment</i> dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah dikalikan volume penjualan (perhitungan volume mencakup penjualan tenaga Listrik WBP dan LWBP serta kelebihan daya reaktif (kVArh)). / The electricity compensation formula is calculated from the difference in tariffs according to the tariff adjustment formula with the rate set by the Government multiplied by the sales volume (the volume calculation includes sales of WBP and LWBP electricity and excess reactive power (kVArh)). • Adanya mekanisme <i>set-off</i> untuk pengembalian kelebihan pembayaran dana kompensasi listrik, sehingga tidak membebani <i>cashflow</i> PLN apabila terdapat pengembalian. / There is a set-off mechanism for refunding overpayments of electricity compensation funds, so that it does not burden PLN's cash flow if there is a return. <p>Memberikan jaminan penyediaan pasokan batubara untuk kepentingan dalam negeri, termasuk untuk kebutuhan PLTU Batubara PLN dengan menambahkan ketentuan pengenaan sanksi administratif bagi pengusaha batubara yang tidak memenuhi kewajiban (denda dan dana kompensasi) yang dikenakan karena tidak memenuhi DMO. / Guarantee the supply of coal for domestic purposes, including for the needs of the PLN Coal Power Plant by adding provisions for the imposition of administrative sanctions for coal entrepreneurs who do not fulfill obligations (fines and compensation funds) imposed for not fulfilling the DMO.</p>

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA YANG DITERAPKAN

Penerapan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan.

- Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual"

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND THEIR IMPACTS

The adoption of the new PSAK, amendments and annual adjustments which are effective for the fiscal year beginning on or after January 1, 2022 did not cause significant changes to the Company's accounting policies and did not have a material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year.

- Amendments to PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies"
- Amendments to PSAK No. 22: "Business Combinations - A Reference to a Conceptual Framework"

- Amandemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69: "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73: "Sewa"
- Amendments to PSAK No. 57: "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets of Onerous Contracts - The Cost of Fulfilling the Contract"
- Annual adjustment to PSAK No. 69: "Agriculture"
- Annual adjustment to PSAK No. 71: "Financial Instruments"
- Annual adjustment to PSAK No. 73: "Lease"

Standar baru, amandemen, revisi, dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, tetapi belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar"
- Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amandemen PSAK No. 16: "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amandemen PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 46: "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK No. 73: "Sewa - Kewajiban Sewa dalam Transaksi Jual dan Sewa Balik"
- Amandemen PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - "Informasi Komparatif"
- Revisi PSAK No. 101: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- Revisi PSAK No. 107: "Akuntansi Ijarah"
- Revisi PSAK No. 109: "Zakat, Infaq dan Akuntansi Sedekah"

Standar baru, amandemen, revisi dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perseroan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen, revisi dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

New standards, amendments, revisions and annual adjustments that have been issued but have not yet become effective for the fiscal year starting on January 1, 2022 are as follows:

- PSAK - SFAS No. 74: "Insurance Contracts"
- Amendment to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current"
- Amendment to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies"
- Amendment to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements - Long-term Liabilities with Covenants"
- Amendment to SFAS No. 16: "Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use"
- Amendment to SFAS No. 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates"
- Amendment to SFAS No. 46: "Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction"
- Amendment to SFAS No. 73: "Leases - Leases Liability in a Sale and Leaseback Transaction"
- Amendment to SFAS No. 74: "Insurance Contracts regarding Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information"
- Revision to SFAS No. 101: "Presentation of Sharia Financial Statements"
- Revision to SFAS No. 107: "Ijarah Accounting"
- Revision to SFAS No. 109: "Zakah, Infaq and Sadaqah Accounting"

The new standards, amendments, revisions, and annual adjustments above are effective starting January 1, 2023, except for PSAK No. 74 and Amendments to PSAK No. 74 effective from January 1, 2025, but earlier application is permitted.

As of the completion date of these consolidated financial statements, the Company is still reviewing the impact that may arise from the adoption of new standards, amendments, revisions, and annual adjustments to the Company's consolidated financial statements.

KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

Selain melalui pembayaran dividen, PLN menyalurkan kontribusi kepada negara berupa pajak. Untuk tahun 2022, PLN telah memenuhi seluruh kewajiban pajak sejumlah Rp35,28 triliun, dengan perincian sebagai berikut:

Dalam rupiah penuh

Jenis Pajak / Type of Tax	2022	2021
PPh Final 4 Ayat 2 / Final Income Tax Article 4 Paragraph 2	553.787.778.046	817.797.467.740
PPh 21 / Income Tax Article 21	1.919.549.536.679	1.564.863.121.360
PPh 15, 22, 23, dan 26 / Income Tax Articles 15, 22, 23, and 26	4.373.174.550.099	4.544.176.674.239
PPh Badan*) / Corporate Income Tax *)	(*)	117.478.157.280
PPN dan PPnBM / VAT and Sales Tax on Luxury Goods	12.426.853.766.002	11.099.344.206.216
Bea Meterai / Stamp Duty	32.105.453.579	64.557.696.603
Bea Masuk / Import Duty	1.852.566.000	3.491.893.000
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah / Regional Tax and Retribution	15.968.206.316.217	13.104.201.851.202
Jumlah / Total	35.275.529.966.622	31.198.432.910.360

*) Untuk PPh Badan 2022, Perusahaan melakukan perpanjangan pelaporan kepada DJP s.d 30 Juni 2023 sesuai surat DJP No. S-00007/ETB/KPP.1903/2023 tanggal 18 April 2023.

CONTRIBUTION TO THE COUNTRY

Apart from paying dividends, PLN distributes contributions to the country in the form of taxes. For 2022, PLN has fulfilled all tax obligations amounting to Rp35.28 trillion, with details as follows:

In full amount of rupiah

*) For 2022 Corporate Income Tax, the Company extended reporting to the DJP until June 30, 2023 according to DJP letter No. S-00007/ETB/KPP.1903/2023 dated April 18, 2023.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

Perbaikan Ekonomi di tengah Kondisi Pandemi

Sampai dengan 2022, pandemi Covid-19 masih menghadirkan dampak terhadap situasi ekonomi makro Indonesia, meski secara umum telah terjadi pemulihan yang signifikan dibanding situasi pada tahun-tahun sebelumnya. Dinamika situasi pandemi Covid-19, mencakup dampak munculnya gelombang pandemi akibat subvarian baru, menjadi faktor risiko yang menahan laju pemulihan ekonomi nasional.

Terkait hal tersebut, sejumlah variabel yang memberi pengaruh terhadap bisnis Perseroan di tahun 2022 dapat dilihat melalui uraian masing-masing indikator ekonomi sebagai berikut:

- *Prompt Manufacturing Index* – Bank Indonesia (PMI-BI)
Kinerja sektor industri pengolahan pada posisi akhir tahun 2022 tetap kuat dan masih berada pada fase ekspansif, tercermin dari PMI-BI triwulan IV-2022 yang sebesar 50,06% meski lebih rendah dari posisi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 53,71%. Kondisi ekspansif terjadi pada mayoritas komponen pembentuk PMI-BI.

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

POTENTIAL MATTERS THAT HAD SIGNIFICANT EFFECT ON THE COMPANY'S GOING CONCERN

Economic Recovery Amid the Pandemic

Covid-19 pandemic still had an impact on Indonesia's macroeconomic situation as of 2022, although in general there has been a significant recovery compared to the situation in previous years. The dynamics of the Covid-19 pandemic situation, including the impact of the emergence of a pandemic wave due to new subvariants, is a risk factor that had held back the pace of national economic recovery.

In this regard, a number of variables that influence the Company's business in 2022 can be seen through the description of each economic indicator as follows:

- *Prompt Manufacturing Index* – Bank Indonesia (PMI-BI)
The performance of the manufacturing industry sector at the end of 2022 remained strong and was still in an expansionary phase as reflected in the PMI-BI quarter IV-2022 which was 50.06%, despite being lower than the position in the previous quarter at 53.71%. Expansive conditions occurred in the majority of the components that make up the PMI-BI.

Kinerja sektor industri pengolahan diproyeksi akan meningkat sebesar 53,30% pada posisi triwulan I tahun 2023, atau lebih tinggi dibanding posisi pada triwulan I tahun 2022 yang sebesar 50,06%.

- **Survei Konsumen Bank Indonesia**
Survei konsumen Bank Indonesia yang dilakukan pada Desember 2022 mengindikasikan keyakinan konsumen yang meningkat dan cenderung stabil terhadap kondisi ekonomi Indonesia, dengan perolehan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 119,9, atau sedikit lebih tinggi dibanding posisi bulan Januari dan November 2022 dengan perolehan masing-masing sebesar 119,6 dan 119,1.

Menguatnya keyakinan konsumen pada posisi Desember 2022 dipengaruhi oleh Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuk, terutama Indeks Penghasilan. Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tetap terjaga dengan Indeks Ekspektasi Penghasilan tercatat meningkat.

- **Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia**
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang dilakukan pada triwulan IV 2022 mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha yang tetap kuat, tercermin melalui nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 10,27% atau meningkat dari posisi triwulan IV 2021 yang sebesar 7,10%. Tetap kuatnya kegiatan dunia usaha pada triwulan IV 2022 didukung oleh sektor tersier yang tumbuh lebih tinggi, terutama sektor jasa-jasa serta sektor pengangkutan dan komunikasi, yang terjadi sejalan dengan peningkatan permintaan saat Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Natal dan akhir tahun.

Potensi Energi Baru Terbarukan Yang Besar di Indonesia

Produksi energi fosil terutama minyak bumi yang berkurang serta komitmen global dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, mendorong Pemerintah untuk meningkatkan peran energi baru dan terbarukan secara terus-menerus sebagai bagian dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi. Menurut PP tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050. Indonesia mempunyai potensi energi baru terbarukan yang cukup besar untuk mencapai target bauran energi primer tersebut, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

The performance of the processing industry sector is projected to increase by 53.30% in the first quarter of 2023, higher than the position in the first quarter of 2022 at 50.06%.

- **Bank Indonesia Consumer Survey**
The Bank Indonesia consumer survey conducted in December 2022 indicated consumer confidence was increasing and tending to be stable in Indonesia's economic conditions, with the Consumer Confidence Index (IKK) of 119.9, or slightly higher than the positions in January and November 2022 with acquisitions of 119.6 and 119.1 respectively.

The strengthening consumer confidence in December 2022 was influenced by the Economic Conditions Index (IKE) which recorded an increase in all constituent components, especially the Income Index. Meanwhile, the Consumer Expectation Index (IEK) was maintained with an increase in the Income Expectation Index.

- **Bank Indonesia Business Activity Survey**
The Bank Indonesia Business Activity Survey (SKDU) conducted in the fourth quarter of 2022 indicates that the performance of business activities remains strong as reflected in the value of the Weighted Net Balance (WNB) of 10.27%, an increase from the position of the fourth quarter of 2021 at 7.10%. The solid business activity in the fourth quarter of 2022 was supported by the higher growth of the tertiary sector, especially the services sector and the transportation and communication sector which occurred in line with increased demand during Christmas and the end of the year.

Huge New Renewable Energy Potential in Indonesia

The reduced production of fossil energy, especially petroleum as well as global commitment to minimizing greenhouse gas emissions, has encouraged the Government to continuously increase the role of new and renewable energy as part of maintaining energy security and independence. According to PP on the National Energy Policy, the target for the mix of new and renewable energy in 2025 is at least 23% and 31% in 2050. Indonesia has potential for new and renewable energy that is large enough to achieve the target of the primary energy mix, as shown in the following table:

Jenis Energi / Type of Energy	Potensi / Potential
Tenaga Air / Hydro	94,3 GW
Panas Bumi / Geothermal	28,5 GW
Bioenergi / Bioenergy	<ul style="list-style-type: none"> • PLT Bio: 32,6 GW • BBN: 200 ribu Bph / 200 thousand Bph
Surya / Solar	207,8 GWp
Angin / Wind	60,6 GW
Energi Laut / Ocean-powered	17,9 GW

Sumber: Kementerian ESDM

Source: Kementerian ESDM

Komitmen dan Dukungan Pemerintah untuk Diversifikasi Energi

Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan untuk mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di antaranya sebagai berikut:

- Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 (Pasal 14) tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, mengamanatkan bahwa pelaksanaan percepatan infrastruktur ketenagalistrikan mengutamakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa pemberian insentif fiskal, kemudahan perizinan dan nonperizinan, penetapan harga beli tenaga listrik dari masing-masing jenis sumber energi baru dan terbarukan, pembentukan badan usaha tersendiri dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk dijual ke PT PLN (Persero), dan/atau penyediaan subsidi.
- Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2019, yang mewajibkan penggunaan biodiesel bagi PSO dan non PSO sesuai pasal 18 ayat (1b).
- Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, merupakan regulasi khusus mengatur pembelian tenaga listrik yang berasal dari Energi Terbarukan. Perpres ini mengatur mengenai pengutamaan pemanfaatan energi terbarukan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN dengan tetap mempertimbangkan kesiapan sistem dan keseimbangan *supply* dan *demand* listrik, selain itu aspek keekonomian dari pembangkit juga menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan. Dalam Perpres ini juga mengatur mengenai *early retirement* PLTU Batubara milik PLN maupun IPP yang bekerjasama dengan PLN. Dalam rangka pembelian tenaga listrik Perpres ini mengatur Harga Patokan Tertinggi (HPT) pembelian tenaga listrik

Government Commitment and Support for Energy Diversification

The government has issued various regulations to accelerate the development of New Renewable Energy (NRE) as follows:

- Presidential Regulation No. 4 of 2016 (Article 14) on the Acceleration of Electricity Infrastructure mandates that the implementation of the acceleration of electricity infrastructure prioritizes the use of new and renewable energy. The Government and/or Regional Governments can provide support in the form of providing fiscal incentives, facilitating licensing and non-licensing, setting the purchase price of electricity from each type of new and renewable energy sources, establishing separate business entities in the context of supplying electricity to be sold to PT PLN(Persero), and/or provision of subsidies.
- Presidential Regulation No. 66 of 2018 on the Second Amendment to Presidential Regulation No. 61 of 2015 on Collection and Use of Oil Palm Plantation Funds, as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 16 of 2019, which requires the use of biodiesel for PSO and non-PSO according to article 18 paragraph (1b).
- Presidential Regulation No. 112 of 2022 on the Acceleration of Renewable Energy Development for the Provision of Electricity, is a special regulation governing the purchase of electricity sourced from Renewable Energy. This Presidential Decree regulates prioritizing the use of renewable energy in the PLN electricity supply business plan while still considering the readiness of the system and the balance of supply and demand for electricity. Moreover, the economic aspect of the generator is also the main point that must be considered. The Presidential Decree also regulates the early retirement of coal-fired power plants owned by PLN and IPPs in collaboration with PLN. In the context of purchasing electricity, this Presidential Decree stipulates the Highest Benchmark Price (HPT) for purchasing electricity with a price

dengan evaluasi kelayakan harga dilakukan setiap tahun, HPT yang dapat digunakan sebagai *ceiling price* maupun harga kontrak. Dalam proses pengadaannya pembelian tenaga listrik Perpres ini mengatur melalui metode Penunjukan langsung atau Pemilihan langsung. Perpres ini merupakan dasar hukum penugasan bagi PLN dalam menyediakan listrik dari energi terbarukan, maka dari itu pemerintah memberikan dukungan melalui peran-peran Kementerian dan dukungan finansial melalui mekanisme kompensasi.

- Peraturan Menteri ESDM No. 49 Tahun 2017 merupakan penyempurnaan atas Permen ESDM No. 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
- Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2017 merupakan revisi dari Permen ESDM No. 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang diterbitkan dalam rangka mewujudkan iklim usaha makin baik dengan tetap mendorong praktik efisiensi serta mewujudkan harga listrik yang wajar dan terjangkau.
- Peraturan Menteri ESDM No. 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan 172/PMK.04/2022.
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN Tahun 2021-2030

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021 mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN Tahun 2021-2030. Pokok-pokok yang diatur dalam RUPTL tersebut antara lain:

1. Proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sebesar 4,9%;
2. Total rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 40.575 MW dengan rincian:

eligibility evaluation carried out every year, HPT which can be used as a ceiling price or contract price. In the process of procuring the purchase of electricity, this Presidential Decree regulates through the method of direct appointment or direct election. This regulation is the legal basis for assigning PLN to provide electricity from renewable energy, therefore the government provides support through Ministry roles and financial support through a compensation mechanism.

- Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 49 of 2017 is an improvement to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 10 of 2017 on Principles in the Power Purchase Agreement.
- Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 50 of 2017 is a revision of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 12 of 2017 on Utilization of Renewable Energy Sources for the Provision of Electricity, which was issued to create a better business climate while continuing to encourage efficiency practices and realizing reasonable and affordable electricity prices.
- Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 49 of 2018 on the Use of Rooftop Solar Power Generation Systems by Consumers of PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- Regulation of the Ministry of Finance (PMK) No. 218/PMK.04/2019 on Exemption from Import Duty and/or No Tax Collection in the Context of Import on the Import of Goods for Geothermal Activities, as amended by 172/PMK.04/2022.
- Regulation of the Ministry of Finance (PMK) No. 80/PMK.08/2022 on Geothermal Development Support Through the Use of Geothermal Sector Infrastructure Financing Funds at PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

PLN Electricity Supply Business Plan (RUPTL) for 2021-2030

The government through Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021 validated the PLN Electricity Supply Business Plan (RUPTL) for 2021-2030. The main points regulated in the RUPTL include:

1. The projected average growth in electricity demand is 4.9%;
2. The total plan for building a power plant is 40,575 MW, with the following details:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan sebesar 20.923 MW atau setara dengan 51,6% dari total pembangkit tenaga listrik; b. Pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi fosil sebesar 19,652 MW atau setara dengan 48,4% dari total pembangkit tenaga listrik; <ul style="list-style-type: none"> 3. Target bauran energi baru dan terbarukan pembangkit tenaga listrik tahun 2025 sebesar 23,0%; 4. Total rencana pembangunan jaringan transmisi sebesar 47.723 kms; 5. Total rencana pembangunan gardu induk sebesar 76.662 MVA; 6. Total rencana pembangunan jaringan distribusi sebesar 455.547 kms; 7. Total rencana pembangunan gardu distribusi sebesar 31.095 MVA. | <ul style="list-style-type: none"> a. Power plants sourced from new and renewable energy of 20,923 MW or equivalent to 51.6% of the total power plants; b. Power plants sourced from fossil energy of 19.652 MW or equivalent to 48.4% of the total power plants; <ul style="list-style-type: none"> 3. The target for the mix of new and renewable energy for power plants in 2025 is 23.0%; 4. The plan of total transmission network development is 47,723 kms; 5. The total substation development plan is 76,662 MVA; 6. The plan of total distribution network development is 455,547 kms; 7. The plan of total distribution substation development is 31,095 MVA. |
|---|---|

PENILAIAN MANAJEMEN TERHADAP BERAGAM FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

PLN menilai kelangsungan usaha, mencakup terkait faktor-faktor yang disebutkan di atas, dengan melakukan pemetaan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Hasil pemetaan SWOT yang dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal Perseroan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

MANAGEMENT ASSESSMENT ON VARIOUS FACTORS AFFECTING THE GOING CONCERN

PLN assesses business continuity, including the factors mentioned above, by conducting a SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) mapping. The results of the SWOT mapping carried out on the Company's internal and external factors in 2022 are as follows:

Strength	
Faktor Eksternal / External Factors	
<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu perusahaan utilitas ketenagalistrikan terbesar di dunia dengan 85 juta pelanggan. • Basis aset yang besar, salah satu yang terbesar di dunia dan terbesar di Asia Tenggara, dengan infrastruktur ketenagalistrikan yang tersebar di seluruh Indonesia. • Peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai penyedia listrik terbesar. • Kemampuan yang baik dalam mengamankan suplai bahan bakar untuk pembangkitan. • Tenaga kerja yang kompeten secara teknis dan bersemangat dengan budaya pelayanan. • 70% angkatan kerja merupakan generasi milenial yang familiar dengan digitalisasi. • Tarif listrik yang kompetitif di ASEAN. • Memiliki jalur distribusi, transmisi, (<i>capillary power network</i>) termasuk jaringan <i>fiber optic</i> yang luas di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • One of the world's largest electric utility companies with 85 million customers. • Large asset base, one of the largest in the world and the largest in Southeast Asia, with power infrastructure spread across Indonesia. • Strategic role in the Indonesian economy as the largest electricity provider. • Good ability to secure fuel supply for generation. • A technically competent and passionate workforce with a service culture. • 70% of the workforce are millennials who are familiar with digitization. • Competitive electricity rates in ASEAN. • Having distribution and transmission lines (<i>capillary power network</i>) including an extensive fiber optic network in Indonesia.



Weakness

Faktor Internal / Internal Factors

- Kondisi keuangan yang terbatas, membatasi kemampuan untuk menyokong pertumbuhan, *shortage cash flow*, utang yang cukup, pertumbuhan *revenue* cenderung melambat.
- Aset pembangkit sebagian sudah cukup tua sehingga menjadi salah satu penyebab performa keandalan dan efisiensi pembangkit belum menjadi "Best in Class".
- Tingkat otomasi jaringan, performa susut termasuk rendah sehingga mempengaruhi keandalan.
- Pelayanan pelanggan yang belum sepenuhnya terstandarisasi dan seragam.
- Proses bisnis belum sepenuhnya terdigitalisasi sehingga berpengaruh pada efisiensi dan kelancaran eksekusi operasi dan program kerja.
- Secara umum, pegawai kurang dalam pengetahuan bisnis dan keuangan, serta belum siap menghadapi 3D (digitalisasi, desentralisasi, dekarbonisasi).
- Dominasi bahan bakar fosil dalam bauran energi, kadar emisi cukup tinggi, penetrasi EBT masih rendah.
- Proses perencanaan PLN memakan waktu cukup lama (1 tahun penuh), belum dapat melakukan *cascading* strategi secara efektif ke unit dalam organisasi, dan belum ada *monitoring* yang efektif atas eksekusi strategi.
- Limited financial conditions, limiting the ability to support growth, shortage of cash flow, debt is quite high, revenue growth tends to slow down.
- Some of the generator assets are quite old, causing the generator's reliability and efficiency performance not being "Best in Class".
- Network automation level, including low shrinkage performance that affects reliability.
- Not fully standardized and equal customer service.
- Business processes have not been fully digitized so that it affects the efficiency and smooth execution of operations and work programs.
- In general, employees lack business and financial knowledge, and are not ready to face 3D (digitization, decentralization, decarbonization).
- Domination of fossil fuels in the energy mix, emission levels are quite high, NRE penetration is still low.
- PLN planning process takes a long time.

Opportunity and Threat

Faktor Eksternal / External Factors

- Perubahan model bisnis pada utilitas ketenagalistrikan global yang lebih mutakhir: peluang untuk belajar dari pengalaman perusahaan utilitas lain.
- EBT mulai muncul sebagai opsi yang *cost efficient* menggantikan PLTD (penurunan *capex* solar PV (1-2% per tahun).
- Pertumbuhan konsumsi energi akan stagnan setelah 2035, namun *demand* listrik masih akan tumbuh positif, sekitar 5% per tahun, didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat mengandalkan suplai listrik.
- Akselerasi dalam adopsi teknologi seperti: solar PV yang semakin ekonomis, kendaraan listrik roda dua; digitalisasi pembangkit dan jaringan listrik.
- Dukungan *stakeholder*, karena peran sebagai pemegang PSO.
- Tersedia sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan lebih jauh.
- Peluang dari tumbuhnya aktivitas wisata di masa mendatang.
- Peluang penetrasi di *fiber optics*.
- Peluang pendapatan dari pengelolaan *billing* dan pembayaran.
- Struktur tarif, yang ditetapkan Pemerintah, membuat PLN semakin tergantung pada subsidi dan kompensasi; *revenue* hanya menutupi *marginal cost*; proyeksi subsidi yang terus naik; tidak ada mekanisme yang layak untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pendanaan.
- Berkembangnya "disruptive trends" (*electrification of the economy, renewables, new technologies, shift of profit pools and new competition*) yang akan mengubah pola bisnis sektor ketenagalistrikan.
- Business model shifts to more recent global power utilities: opportunities to learn from the experiences of other utility companies.
- NRE is starting to emerge as a cost-efficient option to replace PLTD (reduced solar PV capex (1-2% per year).
- Energy consumption growth will stagnate after 2035, but electricity demand will still grow positively, around 5% per year, supported by technological developments that rely heavily on electricity supply.
- Acceleration in technology adoption such as: more economical solar PV, two-wheeled electric vehicles; digitization of power plants and grids.
- Stakeholder support, due to their role as PSO holders.
- Availability of natural resources that can be utilized further.
- Opportunities from the growth of tourism activities in the future.
- Penetration opportunities in fiber optics.
- Revenue opportunities from billing and payment management.
- The tariff structure, set by the Government, makes PLN even more dependent on subsidies and compensation; revenue only covers marginal cost; projected subsidies that continue to rise; there are no proper mechanisms in place to ensure funding needs are met.
- The development of "disruptive trends" (electrification of the economy, renewables, new technologies, shift of profit pools and new competition) that will change the pattern of business in the electricity sector.

Opportunity and Threat

Faktor Eksternal / External Factors

- *Value pools* bisnis kelistrikan akan bergeser dari hulu ke hilir, sehingga seimbang antara pembangkitan dan T&D dengan *revenue model* yang berubah (hal ini ancaman untuk pemain di sisi pembangkitan).
- Lahirnya "*indirect competitor*" yang juga mengambil keuntungan dari pemanfaatan aset digitalnya (seperti Gojek/Grab yang berbisnis pada ekosistem kendaraan listrik, Tokopedia untuk *billing*, perusahaan penyedia layanan solar *PV rooftop*); serta pemain baru yang menawarkan model bisnis baru dengan sumber daya inovatif dalam layanan penyediaan listrik.
- Target EBT 23% pada 2025 dari Pemerintah, dan 50% pasca 2035.
- Target penurunan emisi ~30% pada tahun 2050, hal ini menjadi ancaman terhadap kenaikan biaya operasi dan investasi PLN.
- Geografi Indonesia yang kompleks, terdiri dari ribuan pulau.
- The value pools of the electricity business will shift from upstream to downstream, so that there is a balance between generation and T&D with a changing revenue model (this is a threat to players in terms of generation).
- The birth of "indirect competitors" who also take advantage of the utilization of their digital assets (e.g., Gojek/Grab doing business in the electric vehicle ecosystem, Tokopedia for billing, rooftop solar PV service providers); as well as new players offering new business models with innovative resources in electricity supply services.
- EBT target of 23% in 2025 from the Government, and 50% after 2035.
- The target of reducing emissions is ~30% in 2050.
- Indonesia's complex geography, consisting of thousands of islands.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT

Perseroan menggunakan beberapa pertimbangan dalam melakukan *assessment* tersebut. Asumsi yang digunakan mengacu kepada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan kebijakan Pemerintah lainnya seperti asumsi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan jumlah penduduk, inflasi, target elektrifikasi, dan target pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Proyeksi pertumbuhan ekonomi memperhatikan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap sektor-sektor ekonomi dan waktu pemulihan untuk setiap sektor terkait. Asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut menggunakan 2 (dua) skenario: optimistis dan moderat. Di samping itu, PLN menggunakan data daftar tunggu pelanggan besar serta program Pemerintah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Destinasi Wisata Super Prioritas, dan lain-lain.

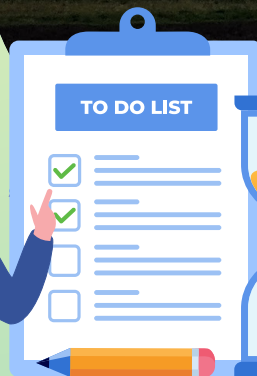
ASSUMPTIONS USED BY THE MANAGEMENT IN CONDUCTING ASSESSMENT

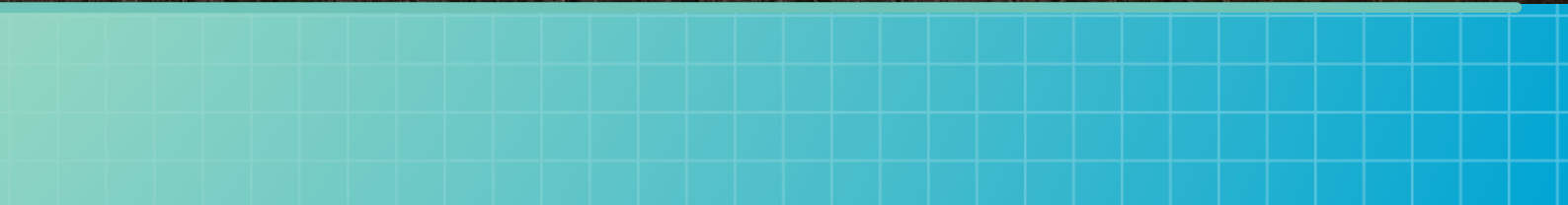
The Company considers several matters in conducting the assessment. The assumptions used refer to the National Electricity General Plan (RUKN) and other Government policies, such as assumptions of economic growth, population growth and number, inflation, electrification targets, and targets for the development of New and Renewable Energy (NRE). Economic growth projections take into account the impact of the COVID-19 pandemic on economic sectors and the recovery duration for each related sector. The assumption of the economic growth projection uses 2 (two) scenarios: optimistic and moderate. In addition, PLN uses waiting list data for large customers as well as government programs, such as Special Economic Zones (SEZ), Industrial Estates (KI), Priority Tourism Destinations (DPP), Super Priority Tourist Destinations, and others.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate
Governance

05







GI Skyline, Jayapura /
Skyline Substation, Jayapura



PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memiliki komitmen yang kuat dalam mengedepankan pemenuhan peraturan perundang-undangan serta nilai etika bisnis dan sosial yang berlaku, sebagai bagian dari penciptaan hubungan harmonis jangka panjang antara PLN dan seluruh pemangku kepentingan.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) has a strong commitment to prioritizing compliance with laws and regulations as well as applicable business and social ethical values, as an effort of creating a long-term harmonious relationship between PLN and all stakeholders.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memiliki komitmen yang kuat dalam mengedepankan pemenuhan peraturan perundang-undangan serta nilai etika bisnis dan sosial yang berlaku, sebagai bagian dari penciptaan hubungan harmonis jangka panjang antara PLN dan seluruh pemangku kepentingan. PLN beroperasi sebagai entitas usaha yang terus menghadirkan kontribusi positif bagi pemegang saham, pegawai, pelanggan, mitra usaha, hingga masyarakat secara luas. Atas komitmen tersebut, PLN secara konsisten melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

COMMITMENT TO GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) has a strong commitment to prioritizing compliance with laws and regulations as well as applicable business and social ethical values, as an effort of creating a long-term harmonious relationship between PLN and all stakeholders. PLN strives to make positive contributions to shareholders, employees, customers, business partners and the general public. For this commitment, PLN consistently implements business management and development according to the principles of Good Corporate Governance (GCG).



PLN melakukan penyempurnaan terhadap penerapan GCG antara lain dengan memutakhirkan *soft-structure* GCG yang dimiliki, di samping mengevaluasi kualitas penerapan GCG yang dilakukan secara berkala. Hal itu dilaksanakan sebagai upaya PLN dalam menyelaraskan praktik tata kelola perusahaan dengan perkembangan situasi industri, peraturan perundang-undangan, praktik penerapan terbaik yang berlaku, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

Untuk tahun 2022, PLN melaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka menjaga hingga meningkatkan kualitas penerapan GCG, antara lain:

1. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG periode tahun 2022;
2. Implementasi Aplikasi GCG *Monitoring and Control System*;
3. *Monitoring* dan pemenuhan *Area of Improvement* Asesmen GCG periode tahun sebelumnya;
4. Proses *review* dan pembahasan untuk pemutakhiran Pedoman GCG dan *Board Manual* Perusahaan;
5. Induksi kepada Dewan Komisaris dan Direksi baru;
6. Implementasi *Maturity Level* Kepatuhan;
7. Implementasi *Maturity Level* Manajemen Risiko (ERM);
8. Penyempurnaan pemantauan Kinerja Korporat dengan pemantauan Kinerja Individual Direksi yang disampaikan melalui Laporan Manajemen;
9. Kajian dan pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PT PLN (Persero);
10. Penerbitan pedoman *Executive Board* dan *Corporate Charter*;
11. Penguatan fungsi manajemen risiko dengan prinsip *Four Eyes Principles*.
12. Penerbitan sejumlah Peraturan Direksi dalam rangka peningkatan kualitas penerapan GRC, di antaranya:
 - a. Penerbitan Peraturan Direksi tentang Kebijakan Strategis Penerapan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT PLN (Persero);
 - b. Penerbitan Peraturan Direksi tentang Kebijakan Strategis Audit Internal PT PLN (Persero);
 - c. Penerbitan Peraturan Direksi tentang Manajemen Kinerja Korporat dan Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan PT PLN (Persero);

Improvements of GCG implementation at PLN includes update of GCG *soft-structure* and regular evaluation of GCG implementation. This was implemented as PLN's effort to align corporate governance practices with developments in the industrial conditions, laws and regulations, applicable best practices, and stakeholder needs.

In 2022, PLN carried out a number of activities in order to maintain and improve the quality of GCG implementation, namely:

1. Implementation of the 2022 GCG Self Assessment;
2. Implementation of GCG *Monitoring and Control System* Application;
3. Monitoring and fulfilling of the GCG Assessment Area of Improvement from the previous year;
4. Review and discussion process for updating the Company's GCG Guidelines and Board Manual;
5. Induction to the new Board of Commissioners and Board of Directors;
6. Implementation of Compliance *Maturity Level*;
7. Implementation of *Maturity Level* of Enterprise Risk Management (ERM);
8. Improvement of Corporate Performance monitoring of the Board of Directors Individual Performance conveyed through Management Reports;
9. Review and establishment of PT PLN (Persero) Holding and Sub-Holding
10. Issuance of Executive Board Manual and Corporate Charter;
11. Strengthening of the risk management function with the *Four Eyes Principles*.
12. Issuance of a number of Board of Directors Regulations to improve the quality of GCG implementation, including:
 - a. Issuance of the Board of Directors Regulation concerning Strategic Policy Implementation of Governance, Risk Management and Compliance (GRC) within PT PLN (Persero);
 - b. Issuance of the Board of Directors Regulations concerning Internal Audit Strategic Policy of PT PLN (Persero);
 - c. Issuance of Board of Directors Directors Regulation concerning Corporate Performance Management and Organizational Performance Assessment of PT PLN (Persero);

DASAR PENERAPAN GCG

PLN menerapkan praktik GCG pada perusahaan induk dan anak-anak perusahaan berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di tahun 2022, dengan perincian sebagai berikut:

BASIS OF GCG IMPLEMENTATION

PLN applies GCG practices to the holding company and its subsidiaries based on a number of laws and policies effective as of 2022, with the following details:

Jenis Regulasi / Regulation	Dasar Hukum / Legal Basis
Undang-Undang (UU) Republik Indonesia / Law of the Republic of Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs). UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. / Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. / Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. / Law No. 14 of 2008 on Information Disclosure.
Peraturan Menteri (Permen) BUMN / Regulation of the Minister of SOEs	<ul style="list-style-type: none"> Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara. / Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and the amendment No. PER-09/MBU/2012 on Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen BUMN No. PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. / Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs as last amended with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-14/MBU/10/2021 dated October 29, 2021 Permen BUMN No. PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN No. PER-04/MBU/06/2020 tanggal 26 Juni 2020. / Regulation of the Minister of SOEs No. PER-03/MBU/2012 Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises as amended with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/06/2020 dated June 26, 2020 Permen BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021. / Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining Income of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises as last amended with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-13/MBU/09/2021 dated September 24, 2021 Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. / Regulation of the Minister of SOEs No. PER-08/MBU/12/2019 dated December 12, 2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises. Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022. / Regulation of the Minister of SOEs No. PER-11/MBU/07/2021 dated July 30 2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Directors of State-Owned Enterprises as amended with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-7/MBU/09/2022 dated September 20, 2022
Surat Keputusan (SK)/ Surat Edaran (SE) Kementerian BUMN / Decree/ Circular Letter of the Ministry of SOEs	<ul style="list-style-type: none"> SE Menteri Negara BUMN No. SE-01/MBU/S/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) Sebagai Pengurus Partai Politik, Dan/Atau Anggota Legislatif Dan/Atau Calon Anggota Legislatif. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-01/MBU/S/01/2019 dated January 22, 2019 on Involvement of the Board of Directors and Board of Commissioners of the SOE Group (SOEs, Subsidiaries of SOEs, and Affiliated Companies of SOEs) as Management of Political Parties, and/or Legislative Members, and/or Candidate of Legislative Members. SE Menteri Negara BUMN No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan BUMN yang bersih melalui implementasi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanganan kepentingan serta pengawasan intern. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-2/MBU/07/2019 dated July 29, 2019 on clean management of SOEs through the prevention of corruption, collusion, and nepotism and handling of interests and internal supervision. SE Menteri Negara BUMN No. SE-7/MBU/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 Ketaatan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-7/MBU/12/2019 dated December 3, 2019 on Compliance with the Provisions of Laws and Regulations in the Framework of Implementing Good Corporate Governance. SE Menteri Negara BUMN No. SE-8/MBU/12/2019 tanggal 5 Desember 2019 Larangan Memberikan <i>Souvenir</i> atau Sejenisnya. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-8/MBU/12/2019 dated December 5, 2019 on Prohibition of Giving Souvenirs or the Like. SE Menteri Negara BUMN No. SE-9/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penerapan Etika dan/atau kepatutan dalam rangka pengurusan dan pengawasan perusahaan. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-9/MBU/12/2019 dated December 12, 2019 on Implementation of Ethics and/or Propriety in the Management and Supervision of Company. SE Menteri Negara BUMN No. SK-315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan BUMN. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. SK-315/MBU/12/2019 dated December 12, 2019 on Structuring Subsidiaries or Joint Ventures within SOEs. SE Menteri Negara BUMN No. 6/MBU/06/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Afiliasi yang Terkonsolidasi Badan Usaha Milik Negara. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. 6/MBU/06/2020 dated June 16, 2020 on General Meeting of Shareholders in Subsidiaries of State-Owned Enterprises and Consolidated Affiliation of State-Owned Enterprises. SE Menteri Negara BUMN No. 7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-nilai Utama (<i>Core Values</i>) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. 7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 on Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises.



Jenis Regulasi / Regulation	Dasar Hukum / Legal Basis
	<ul style="list-style-type: none"> • SE Menteri Negara BUMN No. 12/MBU/10/2020 tanggal 27 Oktober tentang Larangan Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) dan Penggunaan Sumber Daya BUMN Group dalam Kegiatan Politik Praktis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). / Circular Letter of the Minister of SOEs No. 12/MBU/10/2020 dated October 27 on Prohibition of the Involvement of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Boards, and Employees of SOE Group (SOEs, Subsidiaries of SOEs, and Affiliated Companies of SOEs) and the Use of SOE Group's Resources in Practical Political Activities for Regional Head Elections (Pilkada). • SE Menteri Negara BUMN No. 7/MBU/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Grup Badan Usaha Milik Negara. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. 7/MBU/05/2021 dated May 5, 2021 on Prevention of Corruption and Control of Gratifications Related to Holidays within the State-Owned Enterprise Group. • SE Menteri Negara BUMN No. 9/MBU/09/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. 9/MBU/09/2021 dated September 10, 2021 on Performance Evaluation of Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises. • SE Menteri Negara BUMN No. 10/MBU/09/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Tata Negeri Kebiasaan Baru di Lingkungan Grup Badan Usaha Milik Negara. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. 10/MBU/09/2021 dated September 16, 2021 on New Normal Arrangement in the State-Owned Enterprise Group. • SE Menteri Negara BUMN No. 15/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Larangan Insan Badan Usaha Milik Negara Terlibat dalam Tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. 15/MBU/10/2021 dated October 29, 2021 on Prohibition of State-Owned Enterprise Personnel Engaging in Violent-Based Extremism Actions that Lead to Terrorism. • Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) Pada Badan Usaha Milik Negara. / Decree of the Secretary of Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. • Pedoman Pelaksanaan Asesmen Bagi Talenta Direksi BUMN / Guidelines for the Implementation of Talent Assessment for Board of Directors in SOEs
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) / Regulation of Financial Services Authority (POJK)	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; / POJK No.15/POJK.04/2020 on Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies; • POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; / POJK No. 33/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies; • POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; / POJK No. 34/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies • POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; / POJK No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies; • POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; / POJK No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Governance Code of Public Companies; • POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik; / POJK No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies; • POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit; / POJK No. 55/POJK.04/2015 on Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee; • POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; / POJK No. 56/POJK.04/2015 on Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter; • POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. / POJK No. 29/POJK.04/2016 on Annual Report of Issuers or Public Companies.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) / Circular Letter of Financial Services Authority	<ul style="list-style-type: none"> • SE OJK No. 55 /POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. / SE OJK No. 55 /POJK.04/2015 dated December 29, 2015 on Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee. • SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. / SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 dated June 29, 2021 on Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.
Lain-lain / Others	Pedoman Umum <i>Governansi Korporat</i> Indonesia (PUG-KI) 2021 oleh Komite Nasional Kebijakan <i>Governansi</i> / General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) 2021 by the National Committee on Governance Policy

Dengan berpedoman kepada sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di atas, PLN menyusun kebijakan internal Perseroan mencakup Pedoman Tata Kelola Perusahaan atau *Code of Corporate Governance*. Pedoman Tata kelola Perusahaan PLN telah dimutakhirkan pada Juli 2022 dengan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

By referring to the aforementioned policies and the prevailing laws and regulations, PLN has drawn up a company policy regarding the Code of Corporate Governance, which was last updated on July 2022 and signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

MILESTONE GCG

Komitmen PLN untuk secara konsisten menerapkan dan menyempurnakan praktik GCG terlihat melalui sejumlah capaian pada rentang tahun 2002-2022, antara lain:

GCG MILESTONE

PLN's commitment to consistently implementing and improving GCG practices is manifested in a number of achievements throughout 2002-2022, which include:

-  **2002** Pengukuran/analisis *gap* implementasi GCG / Measurement/analysis of GCG implementation.
-  **2003**
 - Deklarasi Komitmen GCG / Declaration of GCG Commitment
 - Peluncuran Pedoman GCG / Launch of GCG Guidelines
-  **2009**
 - Peluncuran *Board Manual*. / Launch of Board Manual
 - Pembentukan Komite GCG Dewan Komisaris. / Establishment of GCG Committee of the Board of Commissioners.
 - Pembentukan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan. / Establishment of the Risk and Compliance Management Division.
 - GCG menjadi salah satu indikator kinerja Perusahaan / GCG is a part of the Company's performance indicators.
-  **2010** Peluncuran buku saku Pedoman *Code of Conduct* / Launch of the Code of Conduct pocket book.
-  **2012**
 - Peluncuran Pedoman Gratifikasi. / Launch of Gratuity Guidelines.
 - Peluncuran Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS). / Launch of Whistleblowing System (WBS) Policy.
 - Pemutakhiran Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. / Update of Guidelines for Procurement of Goods and Services.
-  **2013**
 - Kerja sama dengan Transparansi International Indonesia (TII) terkait Program PLN Berintegritas. / Collaboration with Transparansi International Indonesia (TII) regarding the PLN Integrity Program.
 - Implementasi sistem pengendalian internal berbasis COSO-IcoFR. / Implementation of COSO-IcoFR-based internal control system.
-  **2014**
 - Peluncuran Program PLN Bersih (Gratifikasi, LHKPN, *Complaint Handling System*). / Launch of "PLN Bersih" Program (Gratuity, LHKPN, Complaint Handling System).
 - Pembentukan *Change Agent* PLN Bersih. / Establishment of "PLN Bersih" Change Agent.
-  **2014**
 - Peluncuran Program PLN Bersih (Gratifikasi, LHKPN, *Complaint Handling System*). / Launch of "PLN Bersih" Program (Gratuity, LHKPN, Complaint Handling System).
 - Pembentukan *Change Agent* PLN Bersih. / Establishment of "PLN Bersih" Change Agent.
-  **2015** Penguatan struktur CSR / Strengthening CSR structure
-  **2016**
 - Pemutakhiran Pedoman GCG dan *Board Manual*. / Update of GCG Guidelines and Board Manual.
 - Pemutakhiran kebijakan *Whistleblowing System*. / Update of Whistleblowing System policy.
-  **2017**
 - Pemutakhiran *Internal Audit Charter*. / Update of Internal Audit Charter.
 - Pemutakhiran *Code of Ethic* dan *Code of Conduct*. / Update of Code of Ethics and Code of Conduct.
 - Pemutakhiran Pedoman Gratifikasi dan LHKPN. / Update of Gratuity and LHKPN Guidelines.
-  **2018**
 - Pemutakhiran komitmen Direksi dan Dewan Komisaris atas Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perusahaan. / Update of commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Company Code of Conduct and Business Ethics.
 - Pemanfaatan IT untuk memperluas komitmen terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis. / Use of IT to expand commitment to Code of Conduct and Business Ethics.
 - Penguatan relasi dengan *stakeholders* lewat Edaran Direksi PT PLN(Persero)No. 8 E/DIR/2018 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) di Lingkungan PT PLN (Persero). / Strengthening relations with stakeholders through the Circular Letter of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 8E/DIR/2018 on Technical Guidelines for Stakeholder Governance within PT PLN (Persero).
 - Pembentukan Divisi Kepatuhan. / Establishment of Compliance Division.
 - Pembentukan Divisi *Change Management Office*. / Establishment of Change Management Office Division.
 - Pembentukan Departemen Bisnis dan Pelayanan Pelanggan. / Establishment of Business and Customer Service Department.



2019

- Sosialisasi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis serta peluncuran Tata Nilai PLN dengan *tagline* "PLN Terbaik." / Dissemination of Code of Conduct and Business Ethics and launching of PLN Values with the *tagline* "PLN Terbaik."
- Pembaharuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dengan Perdir No. 0164.P/DIR/2019 / Update of Guidelines for Procurement of Goods and Services pursuant to Regulation of Board of Directors No. 0164.P/DIR/2019.
- Pembaharuan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dengan Perdir No. 0117.P/DIR/2019 dan penetapan Perdir No. 0119.P/DIR/2019 tentang Mekanisme Penyusunan dan Pemantauan Kajian Risiko untuk kegiatan dan Rancangan Keputusan / Update of Guidelines for Implementation of Risk Management pursuant to Regulation of the Board of Directors No. 0117.P/DIR/2019 and Regulation of the Board of Directors No. 0119.P/DIR/2019 on Mechanisms for Preparing and Monitoring Risk Assessments for Activities and Draft of Decisions.
- Penerbitan Perdir No. 0196.P/DIR/2019 tentang Penerapan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) / Issuance of Regulation of the Board of Directors No. 0196.P/DIR/2019 on Implementation of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC)
- Penerbitan Perdir No. 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan Anti *Fraud* di Lingkungan PT PLN (Persero) / Issuance of Regulation of the Board of Directors No. 0121.P/DIR/2019 on Anti-Fraud Policy within PT PLN (Persero).
- Penerbitan Pedoman Direksi No. 0122.P/DIR/2019 mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero) / Issuance of Guidelines of the Board of Directors No. 0122.P/DIR/2019 on Management of Conflicts of Interest within PT PLN (Persero)
- Pelaksanaan *Gap Analysis* SNI ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan / Implementation of SNI ISO 37001: 2016 Gap Analysis on the Anti-Bribery Management System.
- Perubahan atas Perdir No 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). / Amendment to Regulation of the Board of Directors No. 0051.P/DIR/2018 on Organization and Work Procedure of PT PLN (Persero).
- Perubahan Kedua atas Perdir No 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). / Second Amendment to Regulation of the Board of Directors No 0051.P/DIR/2018 on Organization and Work Procedure of PT PLN (Persero).

2020

- Penerbitan Perdir Nomor 0048.P/DIR/2020 tentang Tata Kelola Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN (Persero). / Issuance of Regulation of the Board of Directors No. 0048.P/DIR/2020 on Anti-Bribery Governance within PT PLN (Persero).
- Implementasi *Pilot Project* Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 di beberapa Divisi Kantor Pusat dan Unit Induk PLN dan Anak Perusahaan. / Implementation of SNI ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System Pilot Project in several Head Office Divisions and PLN Main Development Units and Subsidiaries.
- Sosialisasi SMAP untuk mitra kerja PLN. / Dissemination of SMAP for PLN business partners.
- Penerbitan Pedoman *Maturity Level* Kepatuhan 2020. / Issuance of Guidelines for 2020 Compliance Maturity Level.
- Inisiasi Aplikasi GCG *Control and Monitoring System*. / Initiation of GCG Control and Monitoring System Application.
- Penerbitan Perdir Nomor 0063.P/DIR/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0004.P/DIR/2018 tentang Direktori Kompetensi PT PLN (Persero). / Issuance of Regulation of the Board of Directors Number 0063.P/DIR/2020 on Amendment to Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0004.P/DIR/2018 on Competency Directory of PT PLN (Persero).

2021

- Implementasi *Maturity Level* Manajemen Risiko (ERM). / Implementation of Maturity Level Risk Management (ERM).
- Penerbitan Perdir No. 0162.P/DIR/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). / Issuance of Perdir No. 0162.P/DIR/2021 about Organization and Work Procedure at PT PLN (Persero).
- Terbentuknya Komite Sustainability PT PLN (Persero). / The establishment of the PT PLN (Persero) Sustainability Committee.
- Penerbitan Perdir No. 0071.P/DIR/2021 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN (Persero). / Issuance of Perdir No. 0071.P/DIR/2021 concerning General Guidelines for Integrated Risk Management of PT PLN (Persero).
- Penerbitan Perdir No. 0141.P/DIR/2021 tentang Arsitektur dan Tata Kelola Kebijakan PT PLN (Persero). / Issuance of Perdir No. 0141.P/DIR/2021 concerning Architecture and Policy Governance of PT PLN (Persero).

2022

- Pemutakhiran Pedoman GCG dan *Board Manual Perusahaan*; / Update of the Company's GCG Code and Board Manual;
- Penerbitan Pedoman *Executive Board* dan *Corporate Charter*; / Issuance of Executive Board Manual and Corporate Charter;
- Penerbitan Perdir No. 0319.P/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT PLN (Persero); / Issuance of Board of Directors Regulation No. 0319.P/DIR/2022 on Strategic Policy of Governance, Risk Management and Compliance (GRC) at PT PLN (Persero);
- Penerbitan Perdir No. 0316.P/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis Audit Internal PT PLN (Persero); dan/ Issuance of Board of Directors Regulation No. 0316.P/DIR/2022 on Strategic Policy of Governance, Risk Management and Compliance (GRC) at PT PLN (Persero); and
- Penerbitan Perdir No. 0007.P/DIR/2022 tentang Manajemen Kinerja Korporasi Dan Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan PT PLN (Persero). / Issuance of Board of Directors Regulation No. 0007.P/DIR/2022 on Corporate Performance Management and Organizational Performance Achievement at PT PLN (Persero).



PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN GCG

Guna mendorong efektivitas kualitas penerapan GCG, PLN menetapkan Direktur Utama sebagai penanggung jawab utama penerapan dan pemantauan GCG Perseroan. Penetapan tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Direksi Nomor 0054.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme tata kelola PLN mengacu pada serangkaian proses penerapan GCG yang utamanya dijalankan oleh 3 (tiga) organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS merupakan organ dengan kedudukan tertinggi, Dewan Komisaris merupakan organ pengawas, sedangkan Direksi merupakan organ pengelola Perseroan.

Dalam pelaksanaan penerapan GCG, ketiga organ tersebut didukung oleh keberadaan sejumlah organ di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Sejumlah organ tersebut terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai organ di bawah Dewan Komisaris, serta Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, serta komite-komite Direksi sebagai organ di bawah Direksi. Komite-komite Direksi terdiri dari Komite IPP dan Kerja Sama Kemitraan, Komite Energi Primer, Komite Investasi dan Pendanaan, Komite Niaga, Komite SDM dan Organisasi, Komite Anak Perusahaan dan Afiliasi, Komite Penghapusan dan Pelepasan Aset, dan Komite Operasional.

Lebih dari itu, PLN menerapkan proses audit pihak independen terhadap penyajian laporan keuangan tahunan, laporan hasil evaluasi kinerja dan laporan tingkat kepatuhan perusahaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Proses audit oleh pihak independen tersebut merupakan salah satu wujud penerapan prinsip transparansi serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PLN, selaku BUMN dan emiten.

SOFT-STRUCTURE GCG

PLN melaksanakan penerapan GCG dengan didukung oleh keberadaan sejumlah peraturan dan kebijakan internal yang berfungsi sebagai *soft-structure* GCG, yang secara mendasar disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan serta standar praktik terbaik yang berlaku. Terkait hal itu, PLN menyempurnakan dan memutakhirkan *soft-structure* GCG yang dimiliki secara berkala, agar *soft-structure* GCG PLN tetap relevan terhadap perkembangan kondisi internal dan eksternal Perseroan.

PARTY IN CHARGE OF GCG IMPLEMENTATION

To encourage the effectiveness of GCG implementation, PLN appointed the Present Director as the party in charge for implementing and monitoring the Company's GCG. This determination is carried out through the Board of Directors Regulation No. 0054.P/DIR/2022 concerning the Organization and Work Procedure of PT PLN (Persero).

CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

PLN's governance mechanism refers to a series of GCG implementation processes which are mainly carried out by 3 (three) organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. The GMS is the organ with the highest position, the Board of Commissioners is the supervisory organ, and the Board of Directors is the managing organ of the Company.

In implementing GCG, the three organs are supported by the organs under the Board of Commissioners and Board of Directors. These organs consist of the Audit Committee, Risk Management Committee, Nomination and Remuneration Committee, as organs under the Board of Commissioners, as well as the Internal Audit Unit, Corporate Secretary, and committees of the Board of Directors as organs under the Board of Directors. The Board of Directors committees consist of IPP and Partnership Committees, Primary Energy Committee, Investment and Funding Committee, Commerce Committee, HC and Organizational Committee, Subsidiaries and Affiliates Committee, Asset Removal and Disposal Committee, and Operations Committee.

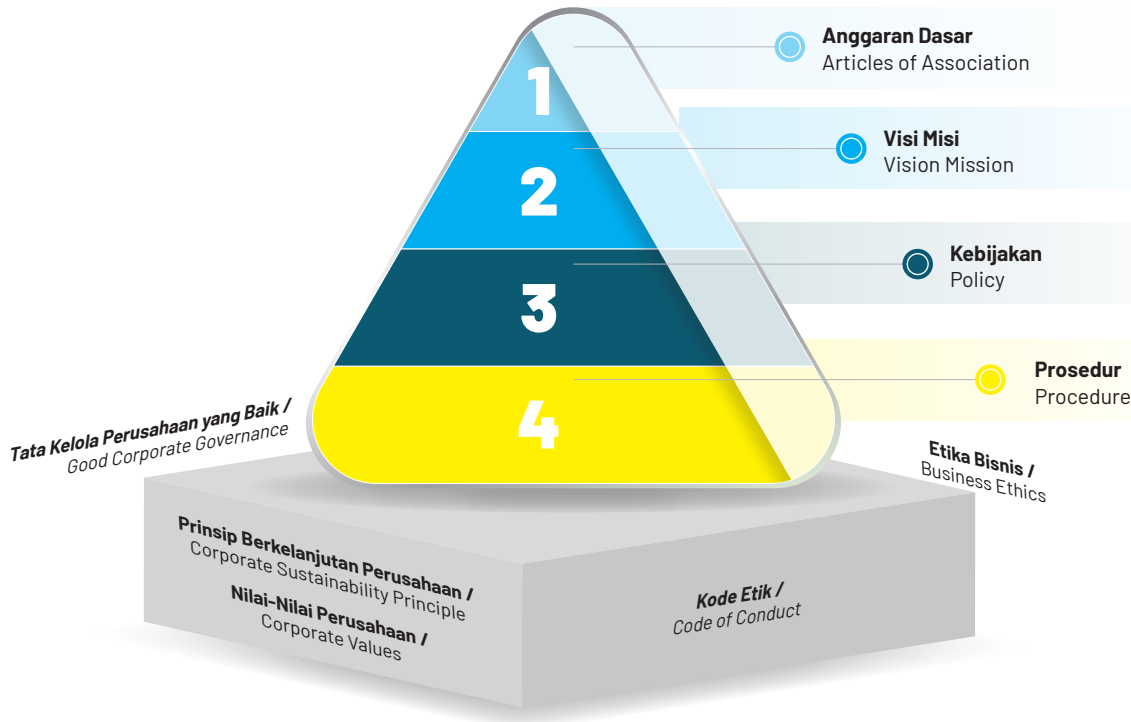
In addition, PLN implements an independent party audit for the annual financial statements, reports on performance evaluation results, and reports on Company compliance level conducted by a public accountant. The audit process by an independent party is the implementation of transparency and accountability principles at PLN, as a SOE and issuer.

GCG SOFT STRUCTURE

GCG implementation at PLN is supported by the a number of internal regulations and policies that function as GCG soft-structure, prepared based on applicable laws and regulations and best practice standards. PLN regularly refines and updates the GCG soft-structure to stay relevant to the developments in the Company's internal and external conditions.

Soft-structure GCG PLN tercermin melalui arsitektur kebijakan PT PLN (Persero), sesuai Peraturan Direksi No. 0141.P/DIR/2021 tentang Arsitektur dan Tata Kelola Kebijakan PT PLN (Persero), dengan ilustrasi sebagai berikut:

The GCG soft-structure is reflected through the policy architecture of PT PLN (Persero), according to Board of Directors Regulation No. 0141.P/DIR/2021 concerning PT PLN (Persero) Policy Architecture and Governance, which can be seen the following illustration:



Secara spesifik, soft-structure GCG PLN terdiri atas sejumlah peraturan dan kebijakan internal dengan perincian sebagai berikut:

Specifically, PLN's GCG soft-structure consists of a number of internal regulations and policies with the following details:

Jenis Peraturan / Regulation	Keterangan dan Pemutakhiran / Description and Updates
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga / Articles of Association	Hingga 31 Desember 2022, Perseroan telah melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir termuat dalam Akta Notaris Lenny Janis Ishak No. 11, tanggal 22 Agustus 2022. / As of December 31, 2022, the latest amendment to the Articles of Association made by the Company is contained in the Deed of Notary Lenny Janis Ishak No. 11 dated August 22, 2022
Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Code of Corporate Governance	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman GCG merupakan acuan bagi seluruh organ Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Pedoman GCG difokuskan pada fungsi dan tanggung jawab organ Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai organ-organ utama dalam pelaksanaan GCG. Pedoman GCG ditinjau secara berkala sesuai perkembangan Perusahaan. / The GCG Code is a reference for all Company organs in carrying out their respective duties and obligations. The GCG code is focused on the functions and responsibilities of the Company's organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors, as the frontline in the implementation of GCG. The GCG Code is reviewed periodically according to the needs of the Company. Terakhir dimutakhirkan pada Juli 2022 yang ditandatangani oleh segenap jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PLN. / Last updated on July 2022 which was signed by the entire Board of Commissioners and Board of Directors of PLN.

Jenis Peraturan / Regulation	Keterangan dan Pemutakhiran / Description and Updates
Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>) / Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>) menjadi panduan Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing, guna mencapai visi dan misi Perusahaan. <i>Board Manual</i> PLN terdiri dari <i>Board Manual</i> Direksi dan Dewan Komisaris (Buku 1) yang mengatur tata laksana hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, <i>Board Manual</i> Direksi (Buku 2) yang mengatur tata laksana hubungan kerja di organ Direksi dan <i>Board Manual</i> Dewan Komisaris (Buku 3) yang mengatur tata laksana kerja di organ Dewan Komisaris. / The Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors serves as a guideline for the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's vision and mission. The PLN Board Manual consists of the Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners (Book 1) which regulates the procedures for working relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Board Manual of the Board of Directors (Book 2) which regulates the procedures for working relations in the organs of the Board of Directors and the Board Manual of the Board of Commissioners (Book 3) which regulates the work procedures in the organs of the Board of Commissioners. Terakhir dimutakhirkan pada Juli 2022 yang ditandatangani oleh segenap jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PLN. / Last updated on July 2022 which was signed by the entire Board of Commissioners and Board of Directors of PLN.
Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perusahaan (<i>Code of Conduct</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (<i>Code of Conduct</i>) merupakan panduan bagi seluruh insan PLN untuk berperilaku sesuai dengan harapan Perusahaan, sehingga pada akhirnya akan tertanam dan menjadi perilaku khas yang membedakan PLN dengan perusahaan-perusahaan lainnya. / The Code of Conduct is a guide for all PLN's personnel to behave in accordance with the Company's expectations, so that in the end it will be embedded and become a distinctive behavior that distinguishes PLN from other companies. Setiap tahun, PLN melakukan internalisasi dan sosialisasi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis kepada seluruh insan PLN dan anak perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi dan pemimpin unit, yang harus diikuti dengan menandatangani pernyataan komitmen untuk melaksanakan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis. Penandatanganan komitmen dilakukan melalui media aplikasi KOMANDO, sehingga dapat diakses oleh insan PLN di seluruh Indonesia. / Every year PLN internalizes and disseminates the Code of Conduct and Business Ethics to all employees of PLN and its subsidiaries, the Board of Commissioners, Board of Directors and unit leaders, which must be followed by signing a statement of commitment to implement the Code of Conduct and Business Ethics. The signing of the commitment is carried out through the KOMANDO application media so that it can be reached by PLN's personnel throughout Indonesia. Terakhir dimutakhirkan pada Februari 2021 seiring dengan perubahan Tata Nilai menjadi Tata Nilai AKHLAK yang berlaku di seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dokumen ini ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama PLN. / Last updated in February 2021 in line with the change in the Corporate Values to AKHLAK Values, which apply to all State-Owned Enterprises (SOEs). This document is signed by the President Director and the President Commissioner of PLN.
Piagam Komite Audit / Audit Committee Charter	<ul style="list-style-type: none"> Piagam Komite Audit menjadi pedoman bagi Komite Audit, yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hak Komite Audit dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Dewan Komisaris, agar efisien, efektif, transparan profesional, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. / The Audit Committee Charter is a guideline for the Audit Committee which regulates the position, duties, authorities, obligations and responsibilities as well as the rights of the Audit Committee in carrying out its duties and functions in assisting the Board of Commissioners in an efficient, effective, transparent, professional, independent and accountable manner. Terakhir dimutakhirkan September 2022 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT PLN (Persero). / Last updated on September 2022 signed by the Board of Commissioners of PT PLN (Persero).
Piagam Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee Charter	<ul style="list-style-type: none"> Piagam Komite Manajemen Risiko menjadi pedoman bagi Komite Manajemen Risiko, yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hak Komite Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Dewan Komisaris, agar efisien, efektif, transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. / The Risk Management Committee Charter is a guideline for the Risk Management Committee that regulates the position, duties, authorities, obligations, and responsibilities as well as the rights of the Risk Management Committee in carrying out its duties and functions in assisting the Board of Commissioners in an efficient, effective, transparent, professional, independent, and accountable manner. Terakhir dimutakhirkan pada tanggal 16 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT PLN (Persero). / Last updated on December 16, 2021 and signed by the Board of Commissioners of PT PLN (Persero)
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Charter	<ul style="list-style-type: none"> Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi, yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hak Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Dewan Komisaris, agar efisien, efektif, transparan profesional, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. / The Nomination and Remuneration Committee Charter serves as a guide for the Nomination and Remuneration Committee which regulates the positions, duties, authorities, obligations and responsibilities as well as the rights of the Nomination and Remuneration Committee in carrying out their duties and functions in assisting the Board of Commissioners in an efficient, effective, transparent, professional and independent manner. and accountable. Terakhir dimutakhirkan pada Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT PLN (Persero). / Last updated on June 2021, signed by the Board of Commissioners of PT PLN (Persero).
Piagam Pengawasan Intern / Internal Audit Charter	<ul style="list-style-type: none"> Piagam Pengawasan Intern menjadi pedoman pelaksanaan tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan independensi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam melaksanakan kegiatan dengan tidak membatasi Auditor Internal untuk membuat pertimbangan profesional. / The Internal Audit Charter is the guidelines for the implementation of duties, responsibilities, authorities, and independence of the Internal Audit Unit (SPI) in carrying out activities without restricting Internal Auditors from making professional judgments. Terakhir dimutakhirkan pada tanggal 4 September 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. / Last updated on September 04, 2020 which was signed by the President Director and President Commissioner.

Jenis Peraturan / Regulation	Keterangan dan Pemutakhiran / Description and Updates
Buku Pedoman Manajemen Risiko / Risk Management Guide Book	<p>PLN memiliki Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0071.P/DIR/2021 pada tanggal 15 April 2021 untuk menjaga agar PLN tetap dalam koridor pengelolaan usaha yang hati-hati dalam setiap aktivitas yang dilakukannya, melalui pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal terkait dengan penerapan <i>good corporate governance</i>. Peraturan tersebut sekaligus mencabut Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0117.P/DIR/2019 dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0119.P/DIR/2019. Untuk melengkapi pedoman manajemen risiko terintegrasi tersebut, PLN menetapkan Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0010.E/DIR/2021 tentang Prosedur Pelaksanaan Four-Eyes Principle (4EP) dalam Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 Desember 2021. / PLN has Integrated Risk Management General Guidelines as stipulated in the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0071.P/DIR/2021 dated April 15, 2021 to keep PLN in the prudent business management in every activity it undertakes through compliance with the laws and regulations and internal regulations related to the implementation of good corporate governance. The regulation also revokes the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0117.P/DIR/2019 and the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0119.P/DIR/2019. To complete the integrated risk management guidelines, PLN has issued a Circular of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0010.E/DIR/2021 concerning Procedures for Implementation of the Four-Eyes Principle (4EP) in Decision Making on December 22, 2021</p>
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa / Guidelines for Procurement of Goods and Services	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pengadaan barang dan jasa diatur melalui Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero). Peraturan Direksi ini memuat petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa di lingkungan PLN, agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sesuai dengan praktik terbaik. / Provisions for the procurement of goods and services are regulated in Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0022.P/DIR/2020 on Guidelines for the Procurement of Goods/Services in PT PLN (Persero). This Board of Directors Regulation contains technical instructions for the procurement of goods and services within PLN so that the process of procurement of goods and services can be carried out efficiently, effectively, transparently and accountably, in accordance with best practices. • Terakhir dimutakhirkan pada tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama melalui Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0156.P/DIR/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero). / Last updated on August 30, 2021, signed by the President Director by virtue of Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0156.P/DIR/2021 on Amendments to Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0022.P/DIR/2020 on Guidelines for the Procurement of Goods/Services in PT PLN (Persero).
Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System	<p>Perusahaan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) yang diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0010.P/DIR/2022 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) di Lingkungan PT PLN (Persero) yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Maret 2022. / The Company implements a whistleblowing system, which is regulated in Circular Letter of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0010.P/DIR/2022 on Whistleblowing System at PT PLN (Persero) valid since March 2, 2022</p>
Pedoman Organisasi / Guidelines for Organization	<p>Pedoman terkini tentang organisasi dan tata kerja PLN diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0054.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan tata Kerja PT PLN (Persero) yang ditetapkan pada 20 Oktober 2022 sebagai acuan organisasi Perusahaan, yang bertujuan untuk menyesuaikan organisasi dengan perubahan nomenklatur jabatan Direksi PLN dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab, akuntabilitas, koordinasi, dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. / Latest Guidelines on the organization and work procedures of PLN are regulated in the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0054.P/DIR/2022 on the Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero) which was stipulated on October 20, 2022 as a reference for the Company's organization which aims to adjust the organization by changing the nomenclature of the position of the Board of Directors of PLN and increasing the effectiveness of the implementation of responsibilities, accountability, coordination, and decision making quickly and accurately.</p>
Kebijakan Pelaporan LHKPN / LHKPN Reporting Policy	<p>Kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para pejabat struktural di lingkungan PLN diatur dalam Perdri No. 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero). / The obligation to submit a State Administrators Asset Report (LHKPN) for structural officials within PLN is regulated in Regulation of the Board of Directors No. 0074.P/DIR/2017 on Guidelines for State Administrators Asset Reports (LHKPN) within PT PLN (Persero).</p>
Kebijakan Transaksi Keuangan Perusahaan / Company Financial Transaction Policy	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0054.K/DIR/2014 tentang Pedoman Transaksi Keuangan Antara PT PLN (Persero) dengan Mitra Kerja Guna Mendukung PLN Bersih. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindarkan insan PLN dari segala bentuk penyimpangan praktik bisnis termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. / Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0054.K/DIR/2014 on Guidelines for Financial Transactions between PT PLN (Persero) and the Business Partners to Support Clean PLN. This policy aims to prevent PLN's personnel from any forms of business practice irregularities including corruption, collusion, and nepotism • Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0168.P/DIR/2021 tentang Kebijakan Strategis Sentralisasi Pembayaran PT PLN (Persero). / Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No.0168.2021 on Submission of Regulation of the Board of Directors on the Strategic Policy of Centralized Payments of PT PLN (Persero). • Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0069.P/DIR/2021 tentang Pedoman Investasi Pengembangan dan Pengelolaan Ketenagalistrikan di Lingkungan PT PLN (Persero) yang bertujuan untuk memastikan proses perencanaan investasi dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian disertai dengan mekanisme <i>check and balance</i>, serta untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam penetapan proyek investasi yang akan dilaksanakan di lingkungan PLN termasuk atas urutan prioritasnya. / Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0069.P/DIR/2021 concerning Guidelines for Investment in the Development and Management of Electricity in PT PLN (Persero) which aims to ensure that the investment planning process is carried out carefully and with prudence accompanied by a check and balance mechanism and accelerates decision making in determining investment projects to be implemented within PLN, including the order of priority.

Jenis Peraturan / Regulation	Keterangan dan Pemutakhiran / Description and Updates
Kebijakan Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan / Policy on Prevention of Gratuity and Conflict of Interest	Kebijakan pencegahan gratifikasi diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0076.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PLN. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi insan PLN untuk mengambil sikap yang tegas terhadap gratifikasi untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bersih dan sehat, serta bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Terkait potensi benturan kepentingan dalam proses bisnis, PLN menerbitkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0122.P/DIR/2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero). Selanjutnya, pada tahun 2020, PLN menerbitkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0048.P/DIR/2020 tentang Tata Kelola Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN (Persero) dan Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0011.E/DIR/2020 tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN (Persero). / Policy on prevention of gratuity is regulated in Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0076.P/DIR/2017 on Guidelines for Gratification Control at PLN. This policy is the guidelines for PLN's personnel to take a firm stance on gratification in order to realize a clean and healthy management of the Company and free from any forms of corruption, collusion, and nepotism. Regarding potential conflicts of interest in business processes, PLN issued Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0122.P/DIR/2019 on Management of Conflict of Interest within PT PLN (Persero). Furthermore, in 2020, PLN issued Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0048.P/DIR/2020 on Anti-Bribery Governance within PT PLN (Persero) and PT PLN (Persero) Circular Letter of the Board of Directors No. 0011.E/DIR/2020 on Guidelines for the Anti-Bribery Compliance Function within PT PLN (Persero).
Kebijakan Manajemen Portofolio Bisnis / Business Portfolio Management Policy	PLN menerbitkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1780.P/DIR/2018 sebagai pedoman untuk menyelaraskan arah dan strategi manajemen portofolio bisnis PLN beserta anak perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah bagi Grup PLN secara keseluruhan, memperjelas akuntabilitas interaksi antara PLN sebagai perusahaan induk dengan anak perusahaan, meningkatkan sinergi antara Grup PLN secara keseluruhan, dan melakukan manajemen portofolio bisnis PLN dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Misi manajemen portofolio bisnis PLN dikenal dengan SOLID (Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capability, Increasing Profit Contribution, dan Developing New Edge). / PLN issued Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 1780.P/DIR/2018 as the guidelines to align the direction and strategy of the management of the business portfolio of PLN and its subsidiaries in order to provide added value to the PLN Group as a whole, clarify the accountability of interactions between PLN as the parent company and its subsidiaries, enhance synergies between the PLN Group as a whole and manage PLN's business portfolio by applying the principles of GCG. PLN's business portfolio management mission is known as SOLID (Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capability, Increasing Profit Contribution and Developing New Edge).
Kebijakan Pelayanan Pelanggan / Customer Service Policy	Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, Perusahaan memiliki sejumlah kebijakan terkait pelayanan pelanggan di antaranya berupa Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0133.P/DIR/2019 tentang Pedoman Tata Usaha Konsumen di Lingkungan PT PLN (Persero), Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 022.K/DIR/2012 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik di Lingkungan PT PLN (Persero), Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 004.E/DIR/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan, Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0001.E/DIR/2016 tentang Prosedur Percepatan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya Bagi Pelanggan Tegangan Rendah dengan Daya 100 sampai dengan 200 kVA dan lain-lain. / In order to provide the best service for customers, the Company has a number of policies related to customer service, namely Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0133.P/DIR/2019 on Guidelines for Consumer Governance in PT PLN (Persero). Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 022.K/DIR/2012 on Quality Level of Electricity Supply Services within PT PLN (Persero), Circular Letter of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 004.E/DIR/2012 on Procedures for Implementing Compensation for Service Quality Levels, Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0001.E/DIR/2016 concerning Procedures for Accelerating New Connections and Changes in Power for Low Voltage Customers with 100 to 200 kVA Power, etc.

SOSIALISASI GCG

Sebagai upaya memperkuat implementasi GCG, PLN melakukan program sosialisasi dan internalisasi GCG antara lain melalui program Forum GCG, serta induksi kepada Dewan Komisaris dan Direksi baru, yang pada tahun 2022 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Pengenalan Perusahaan untuk Komisaris PT PLN (Persero), Bapak Tedi Bharata;
2. Program Pengenalan Perusahaan untuk Direktur Energi Primer PT PLN (Persero), Bapak Hartanto Wibowo;
3. Program Pengenalan Perusahaan untuk Komisaris Independen PT PLN (Persero), Bapak Charles Sitorus;

GCG DISSEMINATION

As an effort to strengthen the implementation of GCG, PLN conducts GCG dissemination and internalization programs, including through the GCG Forum and induction to the new Board of Commissioners and Directors. In addition, PLN also conducted dissemination and internalization of GCG in 2022, in the form of:

1. Company Induction Program for Commissioner of PT PLN (Persero), Tedi Bharata;
2. Company Introduction Program for Director of Primary Energy of PT PLN (Persero), Hartanto Wibowo;
3. Company Introduction Program for Independent Commissioner of PT PLN (Persero), Charles Sitorus;



4. Sosialisasi Pedoman GCG dan *Board Manual* pada acara Forum GCG PT PLN (Persero) yang telah dilaksanakan pada 25-26 Agustus 2022 di Yogyakarta
5. Program Pengenalan Perusahaan untuk Komisaris PT PLN (Persero), Dadan Kusdiana pada; dan
6. Program Pengenalan Perusahaan untuk Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Edi Srimulyanti.

PENILAIAN GCG

Secara berkala, PLN melakukan penilaian (*assessment*) implementasi GCG sebagai upaya memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG selama satu periode penilaian. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta standar praktik-praktik terbaik penerapan GCG, khususnya ketentuan penilaian yang termuat dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Penilaian GCG PLN dilakukan oleh pihak eksternal independen setiap 2 (dua) tahun sekali. Selain itu, di antara periode tersebut, PLN melakukan penilaian secara mandiri (*self-assessment*). Hasil penilaian yang dilakukan periodik tersebut merupakan dasar bagi PLN dalam mengidentifikasi area-area perbaikan untuk periode penerapan selanjutnya.

PENILAIAN GCG TAHUN 2022

Pada awal tahun 2023, PLN melakukan penilaian GCG untuk implementasi GCG periode tahun 2022. Penilaian tersebut dilakukan oleh asesor independen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan informasi ringkas sebagai berikut:

Aspek / Aspect	Keterangan / Description
Jenis Penilaian / Type of Assessment	Penilaian oleh asesor independen / Assessment by independent party
Penilai / Assessor	BPKP
Metode Penilaian / Assessment Method	Kegiatan review dokumen, kuisioner, dan wawancara / Document review, questionnaires, and interviews
Periode Penerapan / Implementation Period	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 / January 1, 2022 to December 31, 2022
Tahun Pengukuran / Assessment Year	2023

KRITERIA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN

Penilaian penerapan GCG PLN untuk tahun 2022 dilakukan oleh BPKP dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Proses penilaian GCG menggunakan standar alat uji yang

GCG ASSESSMENT

PLN regularly conducts GCG implementation assessment as an effort to obtain an overview of the condition of GCG implementation in the assessment period. The assessment is carried out based on the applicable regulations and best practice standards for GCG implementation, especially assessment provisions contained in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S. MBU/2012 on Indicators/Parameters for assessment and evaluation of the implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

PLN's GCG assessment is carried out by an independent assessor every 2 (two) years. In addition, PLN conducts self-assessments. The results of the periodic assessment serve as the basis for PLN in identifying the area of improvement for the next period.

GCG ASSESSMENT 2022

In early 2023, PLN conducted an assessment for the 2022 GCG implementation. The assessment was carried out by assessor of Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) with brief information as follows:

ASSESSMENT CRITERIA

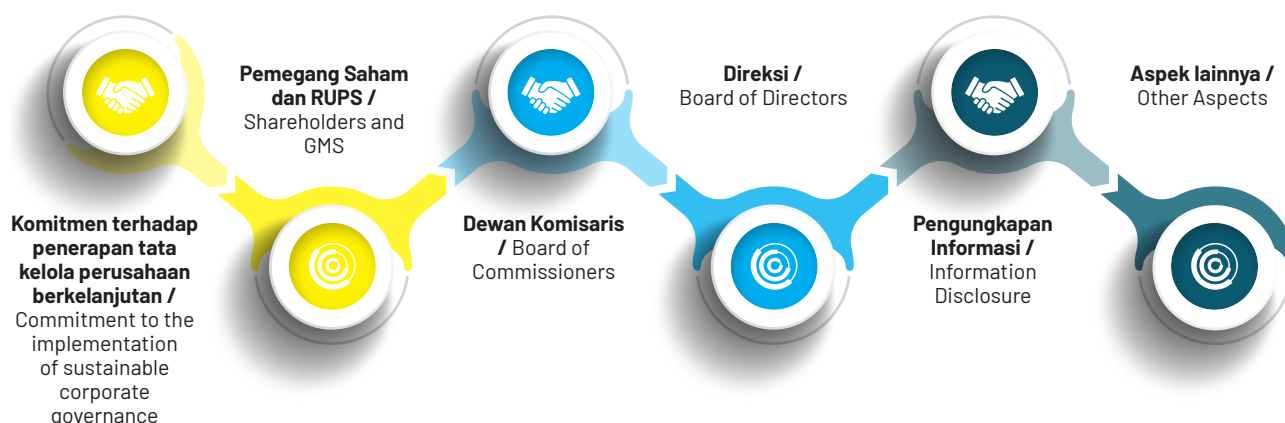
Assessment of GCG implementation at PLN in 2022 was carried out by BPKP in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. GCG assessment process applies testing instrument standards

diatur di dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S. MBU/2012, mencakup 43 indikator dengan 153 parameter.

set out in Decision of Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S. MBU/2012 of 43 indicators with 153 parameters.

Penilaian GCG PLN mengukur tingkat kesesuaian penerapan GCG periode 1 Januari-31 Desember 2022, berdasarkan pemenuhan parameter/scorecard pada 6 aspek berikut:

The assessment covers alignment of GCG implementation based on fulfillment of parameters/scorecards in the following 6 aspects:



HASIL PENILAIAN GCG PERIODE TAHUN 2022

Penilaian penerapan GCG PLN untuk tahun 2022 dilakukan oleh BPKP dengan menitikberatkan pada evaluasi pemenuhan rekomendasi perbaikan atas hasil penilaian GCG di tahun sebelumnya. Berdasarkan penilaian tersebut, PLN memperoleh skor 90,026 serta predikat "Sangat Baik", dengan rincian sebagai berikut:

2022 GCG ASSESSMENT RESULTS

PLN's 2022 GCG implementation assessment was carried out by BPKP with an emphasis on evaluation of the fulfillment of recommendations for improvement on the previous year's GCG assessment results. Based on this assessment, PLN obtained a score of 90,026 and the title "Excellent", with the following details:

No.	Aspek Pengujian oleh Asesor Independen / Assessment Aspects by Independent Assessors	Bobot / Value	2020		2022	
			Pencapaian / Achievement	Persentase (%) / Percentage (%)	Pencapaian / Achievement	Persentase (%) / Percentage (%)
1.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan / Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,000	6,848	97,83	6,734	96,20
2.	Pemegang Saham dan RUPS / Shareholders and GMS	9,000	7,900	87,78	8,128	90,31
3.	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	35,000	33,263	95,04	33,291	95,12
4.	Direksi / Board of Directors	35,000	32,02	191,49	32,017	91,48
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency	9,000	8,274	91,93	8,607	95,63
6.	Aspek Lainnya / Other Aspects	5,000	1,250	25,00	1,250	25,00
Total Skor / Total Score		100,000	89,559	89,56	90,026	90,026
Peringkat Kualitas Penerapan GCG / Quality Rating of GCG Implementation			SANGAT BAIK / EXCELLENT		SANGAT BAIK / EXCELLENT	



REKOMENDASI HASIL PENILAIAN GCG TAHUN 2022

Terhadap parameter pada masing-masing aspek yang memerlukan perbaikan, PLN direkomendasikan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

1. Belum terdapat SK Direksi yang secara khusus menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan muatan tugas minimal untuk:
 - a. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
 - c. Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.

Aspek Pemegang Saham/RUPS

1. Pemegang Saham telah memberikan Persetujuan atas Aksi Korporasi Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) PT PLN, namun persetujuan diberikan melebihi dari ketentuan waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Pemegang Saham telah menetapkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-9/MBU/09/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Namun, peraturan tersebut belum memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan Dewan Komisaris.
3. Pemegang Saham telah menetapkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), pada BUMN Pasal 12 ayat (6) menyebutkan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru sampai kepada RUPS/Menteri, namun belum terdapat pedoman rinci terkait pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

RECOMMENDATIONS FOR THE 2022 GCG ASSESSMENT RESULTS

From the results of the Self-Assessment, there are parameters in each Aspect of Testing (indicators) that still need improvement, such as

Aspect of Commitment to the Implementation of Sustainable Governance

1. There was no Decree of the Board of Directors that specifically appoints a member of the Board of Directors as the person in charge of implementing and monitoring Good Corporate Governance, with a minimum load of tasks for:
 - a. Preparing work plans needed to ensure the Company complies with the Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and other laws and regulations in order to implement the principles of Good Corporate Governance;
 - b. Monitoring and maintaining that the Company's business activities do not deviate from the applicable regulations;
 - c. Monitoring and maintaining the Company's compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties.

Aspect of Shareholders/GMS

1. Shareholders have given approval for PT PLN's Corporate Actions to write-off and transfer of Non-Operating Fixed Assets (ATTB), however the approval was given exceeding the time stipulated in the Articles of Association.
2. Shareholders have stipulated Circular Letter of the Minister of SOE No. SE-9/MBU/09/2021 on Evaluation on Performance of Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs. However, the regulation does not contain the key performance indicators and success criteria for the Board of Commissioners.
3. Shareholders have stipulated Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance, Article 12 paragraph (6) states that the Board of Commissioners/Supervisory Board is required to submit a report on the duties supervision that has been carried out during the recent fiscal year to the GMS/Minister, however there is no specific guideline for preparing the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners.

- | | |
|---|--|
| <p>4. Pemegang Saham telah melakukan pemetaan terhadap AOI GCG PLN, namun di tahun 2022, belum dilakukan pembahasan atas evaluasi GCG secara menyeluruh pada PT PLN (Persero).</p> <p>5. Pemegang Saham belum menyusun rencana tindak lanjut hasil AOI berdasarkan hasil asesmen GCG PT PLN (Persero), khususnya aspek Pemegang Saham periode sebelumnya.</p> | <p>4. Shareholders have mapped PLN's GCG AOI, but in 2022, there has not been a discussion on the overall GCG evaluation at PT PLN (Persero).</p> <p>5. The Shareholders have not prepared a follow-up plan for the AOI results based on the results of PT PLN (Persero)'s GCG assessment, particularly on the Shareholders aspect of the previous period.</p> |
|---|--|

Aspek Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris telah melakukan telaahan atas perubahan lingkungan bisnis perusahaan, namun belum memuat telaah visi dan misi Perusahaan atas perubahan lingkungan tersebut.
2. Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan dan memberikan arahan terkait aspek-aspek GCG atas laporan dari Sekretaris Perusahaan, namun belum melakukan telaahan atas:
 - a. Laporan hasil asesmen atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta memantau tindak lanjut *area of improvement* hasil *assessment* GCG, dan
 - b. Monitoring tindak lanjut AOI GCG yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

Sehingga, tidak terdapat penyampaian kepada Direksi atas hasil telaah tersebut.

3. Anggota komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat Dewan Komisaris belum memberikan surat kuasa kepada anggota komisaris yang mewakilinya.
4. Komite Audit dan Komite Lainnya (Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi) telah menyusun program kerja tahunan namun belum memuat program kerja untuk *self-assessment* kinerja komite.

Aspects of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners has conducted a review of changes in the Company's business environment, but has not yet included a review of the Company's vision and mission for these environmental changes.
2. The Board of Commissioners has monitored and provided direction regarding GCG aspects on reports from the Corporate Secretary, however has not reviewed:
 - a. Report on the results of the assessment of the Implementation of Good Corporate Governance, as well as monitoring the follow-up of areas of improvement on the results of the GCG assessment, and
 - b. Monitoring of AOI GCG follow-up as disclosed in the Annual Report.

Thus, there was no submission to the Board of Directors of the results of the review.

3. Members of the commissioners who are unable to attend the meeting of the Board of Commissioners have not provided a power of attorney to the members of the commissioners who represent them.
4. The Audit Committee and Other Committees (Risk Management Committee and Nomination and Remuneration Committee) have developed an annual work program but have not yet included a work program for self-assessment of committee performance.

**Aspek Direksi**

1. RKAP Tahun 2022 belum memuat rencana kerja dan anggaran secara khusus untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi.
2. Pengadaan barang dan jasa perusahaan telah dilaksanakan dengan sistem *e-procurement*, namun masih terdapat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara manual.
3. Perusahaan memiliki harga perkiraan sendiri (HPS), namun belum seluruh HPS didukung dengan proses dan data yang memadai.
4. Masih terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan barang dan jasa.
5. Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan dan belum ada rencana kerja tindak lanjut hasil survei kepuasan karyawan.
6. Laporan Manajemen Triwulanan disampaikan kepada Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan waktu dalam *Board Manual* karena menunggu laporan keuangan perusahaan.
7. Jumlah penyelenggaraan Rapat Direksi di tahun 2022 belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Aspek Pengungkapan

Kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhiran *website* belum dimutakhirkan.

TINDAKLANJUT AREA OF IMPROVEMENT GCG

Berdasarkan penilaian GCG untuk periode tahun 2021, terdapat sejumlah 63 rekomendasi sebagai *Area of Improvement* (Aol) GCG PLN. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2022, PLN telah menyelesaikan 38 Aol dengan 25 Aol masih dalam proses tindak lanjut.

Sebagai hasil dari tindak lanjut yang dilaksanakan pada masing-masing periode, PLN mampu mencatatkan perbaikan penerapan GCG secara berkesinambungan. Hal tersebut dapat dilihat melalui perbandingan hasil penilaian GCG periode 2018-2022 sebagai berikut:

Aspect of the Board of Directors

1. The 2022 RKAP does not yet contain a specific work plan and budget for training activities for members of the Board of Directors.
2. Procurement of goods and services for the Company has been carried out using the e-procurement system, however there were still procurement of goods and services that are carried out manually.
3. The Company has their own estimated prices (HPS), but not all HPS are supported by adequate processes and data.
4. There were still audit findings, both by external auditors and internal auditors regarding the procurement of goods and services.
5. The Company does not yet have a policy regarding assessment methods to measure employee satisfaction and there was no work plan to follow up on the results of an employee satisfaction survey.
6. The Quarterly Management Report submitted to the Board of Commissioners is not in accordance with the time provisions in the Board Manual as it is waiting for the Company's financial report.
7. Total Board of Directors Meetings held in 2022 has not been in accordance with the set plan.

Disclosure Aspect

The policy regarding managing and updating the website has not been updated.

FOLLOW-UP TO THE GCG AREA OF IMPROVEMENT

The 2021 GCG Assessment consists of 63 recommendations as Area of Improvement for PLN's GCG implementation. In 2022, the Company succeeded in following up on the completion of 38 Aol, and 25 Aol in the follow-up process.

As a result of the follow-up in each period, PLN continuously improves its GCG implementation. This can be seen through a comparison of the GCG assessment results for the 2018-2022 period as follows:

Hasil Penilaian GCG oleh Pihak Independen (BPKP)**GCG Assessment Results by Independent Party (BPKP)**

Deskripsi / Description	2018	2020	2022
Assessment BPKP / BPKP Assessment	87,96	89,56	90,026
Kriteria / Criteria	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent

Hasil Penilaian GCG melalui Metode Self-Assessment**GCG Assessment Results by Self-Assessment**

Deskripsi / Description	2017	2019	2021
Skor / Score	87,40	88,11	90,46
Kriteria / Criteria	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan. Sebagai organ tertinggi, RUPS mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.

PLN merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Atas hal itu, Menteri BUMN sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia bertindak selaku RUPS bagi PLN. Menteri BUMN dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk bertindak sebagai wakil dalam RUPS.

Sesuai Pedoman Tata Kelola PLN, penyelenggaraan RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dengan uraian sebagai berikut:

a. RUPS Tahunan

Merupakan RUPS yang diselenggarakan secara berkala. Di dalam RUPS tersebut, pemegang saham memberikan persetujuan terhadap laporan atas realisasi rencana Perseroan tahun sebelumnya serta pengesahan rencana untuk tahun mendatang.

Atas hal tersebut, RUPS Tahunan terdiri atas::

1. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan;
2. RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).

b. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

Merupakan RUPS yang diselenggarakan sewaktu-waktu ketika dinilai terdapat hal-hal tertentu yang memerlukan pembahasan dan pengambilan keputusan yang mendesak dan signifikan. Pelaksanaan RUPSLB diusulkan oleh

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the corporate governance structure. As the highest organ, the GMS has authority that is not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors within the limits specified in the Law and/or Articles of Association.

All shares of PLN are fully owned by the Government of the Republic of Indonesia. In this regard, the Minister of SOEs as a representative of the Government of the Republic of Indonesia acts as the General Meeting of Shareholders for PLN. The Minister of SOE may grant authorities with substitution rights to individuals or legal entities to act as representatives at the GMS.

In accordance with PLN's Governance Guidelines, the holding of GMS consists of Annual GMS and Extraordinary GMS, with the following description:

a. Annual GMS

Is a GMS which is held regularly. In the GMS, shareholders give their approval for the report on the realization of the Company's plans for the previous year and ratification of plans for the coming year.

Thus, the Annual GMS can be grouped into:

1. Annual GMS to approve the Annual Report and ratify the Annual Calculations;
2. Annual GMS to ratify the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

b. Extraordinary GMS (EGMS)

Is a GMS held at any time if it is deemed that there are certain matters that require urgent and significant discussion and decision making on the Company. The holding of EGMS may be proposed by the Board of



Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Selain RUPSLB yang diselenggarakan dengan kehadiran fisik organ Perseroan, RUPSLB dapat diselenggarakan secara sirkuler. Keputusan RUPS yang diambil secara sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama.

Directors and/or the Board of Commissioners and/or Shareholders. In addition to the EGMS held with the physical attendance of all Company organs, the EGMS can be held through Circular GMS. Resolutions of the Circular GMS has the same legal force as the other GMS.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM

PLN merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Informasi kepemilikan saham PT PLN (Persero) pada 31 Desember 2022 dijelaskan sebagai berikut:

SHAREHOLDERS INFORMATION

PLN is a SOE that is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Information on PT PLN (Persero)'s share ownership on December 31, 2022 is described as follows:



Nama Pemegang Saham / Shareholder Name	Jumlah Saham / Number of Shares	Persentase / Percentage
Pemerintah Republik Indonesia / Government of the Republic of Indonesia	145.536.096	100%

*) Satu lembar saham senilai Rp1.000.000,-

*) One share worth Rp1,000,000-

Kewenangan Pemegang Saham melalui RUPS

Pemegang saham merupakan pihak pemilik Perseroan, yang karenanya, memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris atau Direksi. Meski demikian, pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Hal tersebut dilaksanakan dengan tidak mengurangi wewenang RUPS dalam melakukan haknya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk hak untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Shareholders Authority through GMS

Shareholders are the owners of the Company with special authority not granted to the Board of Commissioners nor the Board of Directors. However, shareholders cannot intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and Board of Directors. This is carried out without prejudice to the authority of the GMS in exercising its rights in accordance with the Articles of Association as well as laws and regulations, including the right to replace or dismiss members of the Board of Commissioners and/or Directors.

Kepentingan Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan pemilik Perseroan dengan kepentingan sebagai berikut:

1. Peningkatan keuntungan Perseroan;
2. Peningkatan nilai Perseroan; dan
3. Pelaksanaan misi pendirian perusahaan.

Shareholders Interests

Shareholders are the owners of the Company with the following interests:

1. Increase in the Company's profits;
2. Increase of the value of the Company; and
3. Accomplishment of mission.

Akuntabilitas Pemegang Saham

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, pemegang saham tidak dapat turut campur dalam kegiatan operasional Perseroan. Kegiatan operasional Perseroan merupakan tanggung jawab Direksi, dengan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Meski demikian, pemegang saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Perseroan.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2022

Pada tahun 2022, PLN menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan berupa RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 dan RUPS Pertanggungjawaban Tahunan Tahun 2021. Informasi mengenai penyelenggaraan RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

RUPS RKAP Tahun Buku 2022

1. Waktu dan Tempat
 Hari/tanggal : Kamis, 27 Januari 2022
 Tempat : Auditorium PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jl. Trunojoyo Blok M-I No. 135, Jakarta Selatan

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Shareholders Accountability

In accordance with the provisions in the Articles of Association and applicable laws and regulations, shareholders cannot interfere in the Company's operational activities. The Company's operational activities are the responsibility of the Board of Directors, which is supervised by the Board of Commissioners. However, shareholders have the responsibility to monitor the implementation of the Company's GCG principles.

IMPLEMENTATION OF THE 2022 GMS

In 2022, PLN held 2 (two) Annual GMS, namely the 2022 RKAP Ratification GMS and the 2021 Annual Annual Accountability GMS. Information regarding the holding of the GMS is as follows:

2022 Fiscal Year RKAP GMS

1. Time and place
 Day/date : Thursday, January 27, 2022
 Place : Auditorium of PT PLN (Persero)'s Head Office, Jl. Trunojoyo Blok M-I No. 135, Jakarta Selatan

2. Attendance of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

No	Nama / Name	Jabatan / Position
Dewan Komisaris / Board of Commissioners		
1	Amien Sunaryadi	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner cum Independent Commissioner
2	Dudy Purwagandhi	Komisaris / Commissioner
3	Mohamad Ikhsan	Komisaris / Commissioner
4	Ardan Adiperdana	Komisaris / Commissioner
5	Susiwijono Moegiarto	Komisaris / Commissioner
6	Eko Sulistyono	Komisaris / Commissioner
7	Heru Winarko	Komisaris Independen / Independent Commissioner
8	Alex Iskandar Munaf	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Direksi / Board of Directors		
1	Darmawan Prasodjo	Direktur Utama / President Director
2	Sinthya Roesly	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management
3	Yusuf Didi Setiarto	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Management
4	Evy Haryadi	Direktur Perencanaan Korporat / Director of Corporate Planning
5	Bob Saril	Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Director of Commerce and Customer Management
6	Hartanto Wibowo	Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy
7	Wiluyo Kusdiharto	Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Mega Projects and New and Renewable Energy

No	Nama / Name	Jabatan / Position
8	Adi Priyanto	Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara / Regional Business Director for Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara
9	Adi Lumakso	Direktur Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan / Regional Business Director for Sumatra and Kalimantan
10	Haryanto WS	Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali / Regional Business Director for Java, Madura, and Bali

RUPS LPT Tahun Buku 2021

1. Waktu dan Tempat

Hari/tanggal : Senin, 27 Juni 2022

Tempat : Gedung Kementerian BUMN Lantai 21,
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13,
Jakarta Pusat**2021 Fiscal Year Annual Accountability (LPT) GMS**

1. Time and place

Day/date : Monday, June 27, 2022

Place : BUMN Ministry Building 21st Floor, Jl. Medan
Merdeka Selatan No. 13, Central Jakarta

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

2. Attendance of Members of the Board of Commissioners and Directors

No	Nama / Name	Jabatan / Position
Dewan Komisaris / Board of Commissioners		
1	Amien Sunaryadi	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner cum Independent Commissioner
2	Suahasil Nazara	Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner
3	Alex Iskandar Munaf	Komisaris Independen / Independent Commissioner
4	Tedi Bharata	Komisaris / Commissioner
5	Mohamad Ikhsan	Komisaris / Commissioner
6	Eko Sulistyio	Komisaris / Commissioner
7	Rida Mulyana	Komisaris / Commissioner
8	Susiwijono Moegiarto	Komisaris / Commissioner
Direksi / Board of Directors		
1	Darmawan Prasodjo	Direktur Utama / President Director
2	Sinthya Roesly	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management
3	Yusuf Didi Setiarto	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Management
4	Evy Haryadi	Direktur Perencanaan Korporat / Director of Corporate Planning
5	Bob Saril	Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Director of Commerce and Customer Management
6	Hartanto Wibowo	Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy
7	Wiluyo Kusdiharto	Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Mega Projects and New and Renewable Energy
8	Adi Priyanto	Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara / Regional Business Director for Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara
9	Adi Lumakso	Direktur Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan / Regional Business Director for Sumatra and Kalimantan
10	Haryanto WS	Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali / Regional Business Director for Java, Madura, and Bali

RUPS Luar Biasa

Pada tahun 2022, Perseroan menyelenggarakan 6 (enam) RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

Extraordinary GMS

In 2022, the Company held 6 (six) Extraordinary GMS as follows:



- | | |
|---|--|
| <p>1. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT PLN (Persero)
Hari/tanggal : Kamis, 06 Januari 2022
Tempat : Jakarta, Indonesia</p> | <p>1. Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT PLN (Persero)
Day/date : Thursday, January 6, 2022
Place : Jakarta, Indonesia</p> |
| <p>2. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN (Persero)
Hari/tanggal : Jumat, 25 Maret 2022
Tempat : Jakarta, Indonesia</p> | <p>2. Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero)
Day/date : Friday March 25, 2022
Place : Jakarta, Indonesia</p> |
| <p>3. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN (Persero)
Hari/tanggal : Jumat, 22 Juli 2022
Tempat : Jakarta, Indonesia</p> | <p>3. Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero)
Day/date : Friday, July 22, 2022
Place : Jakarta, Indonesia</p> |
| <p>4. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT PLN (Persero)
Hari/tanggal : Senin, 25 Juli 2022
Tempat : Jakarta, Indonesia</p> | <p>4. Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT PLN (Persero)
Day/date : Monday, July 25, 2022
Place : Jakarta, Indonesia</p> |
| <p>5. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN (Persero)
Hari/tanggal : Rabu, 21 September 2022
Tempat : Jakarta, Indonesia</p> | <p>5. Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero)
Day/date : Wednesday, September 21, 2022
Place : Jakarta, Indonesia</p> |
| <p>6. Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT PLN (Persero)
Hari/tanggal : Rabu, 21 September 2022
Tempat : Jakarta, Indonesia</p> | <p>6. Dismissal, Changes to Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of PT PLN (Persero)
Day/date : Wednesday, September 21, 2022
Place : Jakarta, Indonesia</p> |

Agenda dan Keputusan RUPS Tahun 2022

RUPS PLN di tahun 2022 diselenggarakan dengan agenda pembahasan serta keputusan sebagai berikut:

Agenda and Resolutions of the 2022 GMS

The 2022 GMS of PLN was held with the following discussion agenda and resolutions:

Agenda	Keputusan / Resolutions	Realisasi / Realization
RUPS RKAP Tahun Buku 2022 / 2022 Fiscal Year RKAP GMS		
1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2022. / Ratification of the 2022 Company Work Plan and Budget (RKAP) and the 2022 Social and Environmental Responsibility Work Plan and Budget (RKA TJSL).	Mengesahkan RKAP Tahun 2022 dan RKA TJSL Tahun 2022. / Ratified the 2022 RKAP and 2022 TJSL RKA.	Telah terealisasi / Realized
2. Penetapan Key Performance Indicators (KPI) Direksi Tahun 2022 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. / Determination of Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors for 2022 as stated in the 2022 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and Shareholders.	Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) Direksi Tahun 2022 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. / Determined the Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors for 2022 which are contained in the 2022 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and Shareholders.	Telah terealisasi / Realized

Agenda	Keputusan / Resolutions	Realisasi / Realization
<p>3. Penetapan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2022 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. / Determination of Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners for 2022 as stated in the 2022 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.</p>	<p>Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2022 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. / Determined the Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners for 2022 which are contained in the 2022 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.</p>	<p>Telah terealisasi / Realized</p>
RUPS LPT Tahun Buku 2021 / 2021 Fiscal Year Annual Report GMS		
<p>1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021. / Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year, as well as the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year.</p>	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021. / Approved the Annual Report regarding the condition and operations of the Company during the 2021 Fiscal Year including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year.</p> <p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00978/2.1025/AU.1/02/0241-2/1/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2021, sepanjang bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercermin pada buku-buku laporan Perseroan. / Ratified the Company's Consolidated Financial Statements of the Company for the Fiscal Year ending December 31, 2021, which has been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as contained in its report No. 00978/2.1025/AU.1/02/0241-2/1/V/2022 dated May 23, 2022 with the opinion "fair in all material respects", and provided full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during The Fiscal Year ending December 30, 2021, as long as they are not criminal acts and/or do not violate applicable legal provisions and procedures and is reflected in the Company's report books.</p>	<p>Telah terealisasi / Realized</p>
<p>2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021. / Approval and Ratification of the 2021 Social and Environmental Responsibility Report.</p>	<p>Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. 00341/2.1025/AU.2/11/0241-2/1/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercermin di dalam Laporan tersebut. / Approved the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program for Fiscal Year 2021 and ratified the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program which ended on December 31, 2021 which had been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. 00341/2.1025/AU.2/11/0241-2/1/III/2022 dated March 15, 2022 with the opinion "reasonable in all material respects", and gave full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to The Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision of the implementation of the Social and Environmental Responsibility Program for the 2021 Fiscal Year, as long as it is not a crime and/or violates the applicable legal provisions and procedures and is reflected in in the Report.</p>	<p>Telah terealisasi / Realized</p>
<p>3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021. / Determination of the Use of the Company's Consolidated Net Profit for Fiscal Year 2021.</p>	<p>Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian yang didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2021 sebesar Rp13.128.626 juta. / Determined the use of the consolidated net profit to be distributed to the Owners of the Parent Entity for the 2021 Fiscal Year in the amount of Rp13,128,626 million</p>	<p>Telah terealisasi / Realized</p>
<p>4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022 serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2021. / Determined the use of the consolidated net profit to be distributed to the Owners of the Parent Entity for the 2021 Fiscal Year in the amount of Rp13,128,626 million</p>	<p>Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun Buku 2022 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2021, akan ditetapkan secara tersendiri. / Determined the salary/honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2022 Fiscal Year as well as bonuses for the Directors and Board of Commissioners for the performance of the 2021 Fiscal Year, will be determined separately.</p>	<p>Telah terealisasi / Realized</p>

Agenda	Keputusan / Resolutions	Realisasi / Realization
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2022. / Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements as well as Financial Statements and the implementation of the Micro and Small Business Funding Program (UMK) for the 2022 Fiscal Year.	<ol style="list-style-type: none"> Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian perseroan, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Evaluasi Kinerja Perseroan (Tingkat Kesehatan), dan Key Performance Indicator (KPI) serta jasa atestasi/non atestasi lainnya untuk periode Tahun Buku 2022. / Re-appointed Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (KAP) as KAP which will audit the company's Consolidated Financial Statements, Financial Statements and Implementation of Micro and Small Business Funding Programs, Compliance with Legislation and Internal Control, Performance Evaluation Company (Health Level), and Key Performance Indicator (KPI) as well as other attestation/non-attestation services for the 2022 Fiscal Year period. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. / Granted power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine fees for audit services, increase the scope of work needed and other requirements for the said Public Accounting Firm, and appoint a replacement Public Accounting Firm in the case of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners Public Accountant Office for reasons whatever, unable to complete the work, including determining fees for audit services and other requirements for the replacement Public Accounting Firm. 	Telah terealisasi / Realized
6. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA. 2020 dan TA. 2021 realisasi tahun 2021. / Approval of the Accountability Report on the Realization of the Use of Additional Funds for State Capital Participation (PMN) of 2020 and 2021 realization in 2021.	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun 2020 dan APBN Tahun 2021 untuk periode Tahun Buku 2021. / Approved the report on the realization of the use of additional State Equity Participation (PMN) funds originating from the 2020 APBN and 2021 APBN for the 2021 Fiscal Year. Direksi diminta agar mengoptimalkan penyerapan dana PMN untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai target yang telah ditetapkan dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait. / The Board of Directors is required to optimize the absorption of PMN funds for the development of electricity infrastructure according to the targets set by carrying out intensive coordination with related parties. 	Telah terealisasi / Realized
RUPS Luar Biasa / Extraordinary GMS		
1. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PLN / Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PLN	<p>Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku RUPS PLN No. SK-2/MBU/01/2022 tanggal 06 Januari 2022, menetapkan: / In connection with the stipulation of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as the PLN General Meeting of Shareholders No. SK-2/MBU/01/2022 dated January 6, 2022, stipulates:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat Sdr. Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energi Primer PLN / Respectfully dismissed Mr. Rudy Hendra Prastowo as PLN Primary Energy Director Mengangkat Sdr. Hartanto Wibowo sebagai Direktur Energi Primer PLN / Appointed Mr. Hartanto Wibowo as PLN Primary Energy Director 	Telah terealisasi / Realized
2. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PLN / Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PLN	<p>Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku RUPS PLN No. SK-85/MBU/03/2022 tanggal 25 Maret 2022, menetapkan: / In connection with the stipulation of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as the PLN General Meeting of Shareholders No. SK-85/MBU/03/2022 dated March 25, 2022, stipulates:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ardan Adiperdana sebagai Komisaris PLN / Respectfully dismissed Mr. Ardan Adiperdana as Commissioner of PLN Mengangkat Sdr. Tedi Bharata sebagai Komisaris PLN / Appointed Mr. Tedi Bharata as Commissioner of PLN 	Telah terealisasi / Realized
3. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PLN / Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PLN	<p>Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku RUPS PLN No. SK-154/MBU/07/2022 tanggal 22 Juli 2022, menetapkan: / In connection with the stipulation of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as the PLN General Meeting of Shareholders No. SK-154/MBU/07/2022 dated July 22, 2022, stipulates:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat Sdr. Heru Winarko sebagai Komisaris Independen PLN terhitung sejak 16 Juni 2022. / Respectfully dismissed Mr. Heru Winarko as PLN Independent Commissioner since June 16, 2022. Mengangkat Sdr. Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen PLN / Appointed Mr. Charles Sitorus as Independent Commissioner of PLN 	Telah terealisasi / Realized
4. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PLN / Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PLN	<p>Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku RUPS PLN No. SK-162/MBU/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, menetapkan: / In connection with the stipulation of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as the PLN General Meeting of Shareholders No. SK-162/MBU/07/2022 dated July 25, 2022, stipulates:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat Sdr. Wiluyo Kusdwiarto sebagai Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri BUMN No. SK-200/MBU/06/2021. / Respectfully dismissed Mr. Wiluyo Kusdwiarto as the Director of Mega Projects and New Renewable Energy at PLN who was appointed based on the Decree of the Minister of SOEs as amended several times, most recently by Decree of the Minister of SOEs No. SK-200/MBU/06/2021. Mengangkat Sdr. Wiluyo Kusdwiarto sebagai Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN / Appointed Mr. Wiluyo Kusdwiarto as Director of Mega Projects and New Renewable Energy PLN 	Telah terealisasi / Realized

Agenda	Keputusan / Resolutions	Realisasi / Realization																													
5. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PLN / Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PLN	Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku RUPS PLN No. SK-212/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022, menetapkan: / In connection with the stipulation of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as the PLN General Meeting of Shareholders No. SK-212/MBU/09/2022 dated September 21, 2022, stipulates: 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Rida Mulyana sebagai Komisaris PLN / Respectfully dismissed Mr. Rida Mulyana as Commissioner of PLN 2. Mengangkat Sdr. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris PLN / Appointed Mr. Dadan Kusdiana as Commissioner of PLN	Telah terealisasi / Realized																													
6. Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PLN / Dismissal, Changes to Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of PLN	Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku RUPS PLN No. SK-213/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022, menetapkan: / In connection with the stipulation of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as the PLN General Meeting of Shareholders No. SK-213/MBU/09/2022 dated September 21, 2022, stipulates: 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi PLN: / Honorably dismissed the following names as members of the Board of Directors of PLN: 1. Sdr. Bob Saril, sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Mr. Bob Saril, as Director of Commerce and Customer Management 2. Sdr. Haryanto WS, sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali / Mr. Haryanto WS, as Regional Business Director for Java, Madura and Bali 2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi menjadi sebagai berikut: / Amended the position nomenclature of members of the Board of Directors to be as follows:	Telah terealisasi / Realized																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="464 824 539 857">No</th> <th data-bbox="539 824 882 857">Semula / Previously</th> <th data-bbox="882 824 1222 857">Menjadi / Becoming</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="464 857 539 958">1</td> <td data-bbox="539 857 882 958">Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Regional Business Director for Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara</td> <td data-bbox="882 857 1222 958">Direktur Distribusi / Director of Distribution</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 958 539 1014">2</td> <td data-bbox="539 958 882 1014">Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy</td> <td data-bbox="882 958 1222 1014">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1014 539 1093">3</td> <td data-bbox="539 1014 882 1093">Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Management</td> <td data-bbox="882 1014 1222 1093">Direktur Legal dan Manajemen Human Capital / Director of Legal and Human Capital Management</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1093 539 1171">4</td> <td data-bbox="539 1093 882 1171">Direktur Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan / Regional Business Director for Sumatra and Kalimantan</td> <td data-bbox="882 1093 1222 1171">Direktur Manajemen Pembangkitan / Director of Power Plant Management</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1171 539 1249">5</td> <td data-bbox="539 1171 882 1249">Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management</td> <td data-bbox="882 1171 1222 1249">Direktur Keuangan / Director of Finance</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1249 539 1328">6</td> <td data-bbox="539 1249 882 1328">Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Director of Commerce and Customer Management</td> <td data-bbox="882 1249 1222 1328">Direktur Retail dan Niaga / Director of Retail and Commerce</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1328 539 1417">7</td> <td data-bbox="539 1328 882 1417">Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Mega Projects and New and Renewable Energy</td> <td data-bbox="882 1328 1222 1417">Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Project Management and New and Renewable Energy</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1417 539 1507">8</td> <td data-bbox="539 1417 882 1507">Direktur Perencanaan Korporat / Director of Corporate Planning</td> <td data-bbox="882 1417 1222 1507">Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis / Director of Corporate Planning and Business Development</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1507 539 1585">9</td> <td data-bbox="539 1507 882 1585">Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Regional Business Director for Java, Madura and Bali</td> <td data-bbox="882 1507 1222 1585">Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem / Director of Transmission and System Planning</td> </tr> </tbody> </table>	No	Semula / Previously	Menjadi / Becoming	1	Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Regional Business Director for Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara	Direktur Distribusi / Director of Distribution	2	Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy	-	3	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Management	Direktur Legal dan Manajemen Human Capital / Director of Legal and Human Capital Management	4	Direktur Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan / Regional Business Director for Sumatra and Kalimantan	Direktur Manajemen Pembangkitan / Director of Power Plant Management	5	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management	Direktur Keuangan / Director of Finance	6	Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Director of Commerce and Customer Management	Direktur Retail dan Niaga / Director of Retail and Commerce	7	Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Mega Projects and New and Renewable Energy	Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Project Management and New and Renewable Energy	8	Direktur Perencanaan Korporat / Director of Corporate Planning	Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis / Director of Corporate Planning and Business Development	9	Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Regional Business Director for Java, Madura and Bali	Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem / Director of Transmission and System Planning	3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PLN: / Transferred the assignment of the following names as members of the Board of Directors of PLN: 1. Sdr. Adi Priyanto semula sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara menjadi Direktur Distribusi / Mr. Adi Priyanto as the Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara to become the Director of Distribution 2. Sdr. Hartanto Wibowo semula sebagai Direktur Energi Primer menjadi Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis / Mr. Hartanto Wibowo as Director of Primary Energy to become the Director of Corporate Planning and Business Development 3. Sdr. Yusuf Didi Setiarto semula sebagai Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia menjadi Direktur Legal dan Manajemen Human Capital / Mr. Yusuf Didi Setiarto as the Director of Human Capital Management to become the Director of Legal and Human Capital Management 4. Sdr. Adi Lumakso semula sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan menjadi Direktur Manajemen Pembangkitan / Mr. Adi Lumakso as Regional Business Director for Sumatra and Kalimantan to become the Director of Power Plant Management
No	Semula / Previously	Menjadi / Becoming																													
1	Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Regional Business Director for Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara	Direktur Distribusi / Director of Distribution																													
2	Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy	-																													
3	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Management	Direktur Legal dan Manajemen Human Capital / Director of Legal and Human Capital Management																													
4	Direktur Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan / Regional Business Director for Sumatra and Kalimantan	Direktur Manajemen Pembangkitan / Director of Power Plant Management																													
5	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management	Direktur Keuangan / Director of Finance																													
6	Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Director of Commerce and Customer Management	Direktur Retail dan Niaga / Director of Retail and Commerce																													
7	Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Mega Projects and New and Renewable Energy	Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Project Management and New and Renewable Energy																													
8	Direktur Perencanaan Korporat / Director of Corporate Planning	Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis / Director of Corporate Planning and Business Development																													
9	Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Regional Business Director for Java, Madura and Bali	Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem / Director of Transmission and System Planning																													

Agenda	Keputusan / Resolutions	Realisasi / Realization
	5. Sdri. Sinhya Roesly semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan / Mrs. Sinhya Roesly as Director of Finance and Risk Management to become the Director of Finance 6. Sdr. Wiluyo Kusdiharto semula sebagai Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan menjadi Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Mr. Wiluyo Kusdiharto as Director of Mega Projects and New Renewable Energy to become the Director of Project Management and New Renewable Energy 7. Sdr. Evy Haryadi semula sebagai Direktur Perencanaan Korporat menjadi Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem / Mr. Evy Haryadi as Director of Corporate Planning to become the Director of Transmission and System Planning 4. Mengangkat Sdr. Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga PLN / Appointed Mr. Edi Srimulyanti as Director of Retail and Commerce of PLN	

Keterlibatan Pihak Independen dalam Penyelenggaraan RUPS

RUPS Tahunan PLN di tahun 2022 diselenggarakan dengan kehadiran Notaris Lenny Janis Ishak, SH selaku pihak eksternal independen.

Involvement of Independent Parties in the GMS

The 2022 GMS of PLN, namely the 2022 RKAP GMS, the 2021 LPT GMS, and the Extraordinary GMS were attended by Notary Lenny Janis Ishak, SH as external independent party.

INFORMASI MENGENAI KEPUTUSAN RUPS TAHUN 2021

Pelaksanaan Keputusan RUPS

Pada tahun 2021, PLN menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan, yaitu RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2021 yang dilaksanakan pada 26 Januari 2021 dan RUPS Pertanggungjawaban Tahunan Tahun 2020 yang dilaksanakan pada 28 Juni 2021. Selain itu terdapat 6 (enam) pelaksanaan RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

- Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perseroan pada tanggal 17 Februari 2021;
- Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN (Persero) pada tanggal 17 Maret 2021;
- Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PLN pada tanggal 16 Juni 2021;
- Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN (Persero) tentang 16 Juli 2021;
- Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi PT PLN (Persero) tanggal 6 Desember 2021;

INFORMATION ON THE 2021 GMS RESOLUTIONS

Implementation of GMS Resolutions

In 2021, PLN held 2 (two) Annual GMS, namely the 2021 RKAP Ratification GMS on January 26, 2021 and the 2020 Annual Accountability GMS held on June 28, 2021. In addition, there were 6 (six) Extraordinary GMS as follows:

- Decree of the Minister of SOEs as PT PLN (Persero)'s General Meeting of Shareholders on Changes to Position Nomenclature and Transfer of Duties of Members of the Board of Directors of the Company dated February 17, 2021;
- Decree of the Minister of SOEs as PT PLN (Persero)'s General Meeting of Shareholders on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) dated March 17, 2021;
- Decree of the Minister of SOEs as PT PLN (Persero)'s General Meeting of Shareholders on Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of PLN dated 16 June 2021;
- Decree of the Minister of SOEs as PT PLN (Persero)'s General Meeting of Shareholders on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) dated July 16, 2021;
- Decree of the Minister of SOEs as PT PLN (Persero)'s General Meeting of Shareholders on Dismissal, Changes to Position Nomenclature, and Transfer of Duties of Members of the Board of Directors of PT PLN (Persero) dated December 6, 2021;



6. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT PLN (Persero) tanggal 7 Desember 2021;

Sampai dengan 31 Desember 2022, seluruh keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) tersebut telah direalisasikan.

Keputusan RUPS Tahun 2021 yang Direalisasikan pada Tahun 2022

Masing-masing keputusan RUPS di tahun 2021 telah direalisasikan pada tahun tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai keputusan RUPS tahun 2021 yang direalisasikan pada tahun 2022.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ dalam tata kelola yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengawasi dan memberikan nasihat terhadap pengelolaan Perseroan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bersifat kolegial. Atas hal tersebut, masing-masing Komisaris tidak dapat bertindak secara sendiri-sendiri, tetapi berdasarkan keputusan kolektif Dewan Komisaris.

PANDUAN TATA LAKSANA KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Pedoman GCG Perseroan dan Tata Laksana Kerja (*Board Manual*). *Board Manual* PLN telah dimutakhirkan dengan ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi pada Juli 2022.

Board Manual PLN disusun dan diterapkan dengan tujuan:

1. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan kerja di antara kedua Organ Perseroan tersebut.
2. Semakin mudahnya bagi Organ-Organ di bawah Direksi dan Organ-Organ di bawah Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara Organ-Organ tersebut.

Sejumlah hal yang telah diatur dalam *Board Manual* PLN adalah sebagai berikut:

6. Decree of the Minister of SOEs as PT PLN (Persero)'s General Meeting of Shareholders on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT PLN (Persero) dated December 7, 2021;

As of December 31, 2022, all of Decrees of the Minister of SOEs as the GMS of PT PLN (Persero) have been realized.

2021 GMS Resolutions Realized in 2022

All 2021 GMS resolutions have been realized for the year. Thus, there is no information regarding the 2021 GMS resolutions realized in 2022.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a governance organ in charge and responsible for supervising and providing advice on the management of the Company. The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners is collegial in nature. On this matter, each Commissioner cannot act severally, but based on a collective decision of the Board of Commissioners.

BOARD MANUAL

The Board of Commissioners in carrying out their duties and authorities is guided by the Company's GCG Guidelines and Work Procedures (*Board Manual*). PLN's latest *Board Manual* was signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners on July 2022.

PLN's *Board Manual* is prepared and implemented with the aim of:

1. Clearer duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the working relationship between the two Organs of the Company.
2. Facilitates Organs under the Board of Directors and the Organs under the Board of Commissioners to understand the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the task relationship between these Organs.

Matters regulated in the PLN *Board Manual* are as follows:

1. Pendahuluan;
2. Tata Laksana Kerja terkait Jabatan;
3. Tata Laksana Kerja terkait Batas Kewenangan;
4. Tata Laksana Kerja terkait Pelaksanaan dan Pengawasan Operasional Perusahaan;
5. Alur Kerja Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

KEDUDUKAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai Pedoman Tata Kelola Perseroan, kedudukan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan dan mempertimbangkan kinerja Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang setara dengan Direksi dan RUPS, meskipun Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
3. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap operasional Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi, serta menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, Pedoman GCG, dan *Board Manual* PLN, Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Preliminary
2. Board Charter related to Position
3. Board Charter related to Limits of Authority
4. Board Charter related to Implementation and Supervision of the Company's Operations
5. Workflow on the Authority of the Board of Directors that requires approval from the Board of Commissioners and the authority of the Board of Directors that requires approval of the GMS after obtaining a written response from the Board of Commissioners

BOARD OF COMMISSIONERS POSITION

In accordance with the Company's Code of Corporate Governance, the position, duties and authorities of the Board of Commissioners are as follows:

1. The Board of Commissioners of the Company is appointed and dismissed by the GMS by taking into account the needs of the Company and considering the performance of the Commissioners in carrying out their duties and responsibilities.
2. The Board of Commissioners has an equal position with the Board of Directors and the GMS, although the Board of Commissioners is appointed and dismissed by the GMS.
3. The Board of Commissioners has the duty of supervising and providing advice on the Company's operations carried out by the Board of Directors, as well as carrying out duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the resolutions of the GMS as well as the prevailing laws and regulations.

DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

In accordance with laws and regulations, the Articles of Association, GCG Code, and Board Manual of PLN, the Board of Commissioners has the duty and responsibility to carry out the following matters:

1. Supervise the management of the Company carried out by the Board of Directors and provide advice to the Directors including regarding the Company's development plan, work plan and annual budget of the Company, implementation of the provisions of the Articles of Association and resolutions of the GMS as well as applicable laws and regulations;



- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundangundangan yang berlaku; 3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS; 4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut; 5. Mengambil alih tugas dan tanggung jawab operasional selayaknya Direksi pada kondisi Perseroan tidak memiliki satu pun Direktur; 6. Mewakili Perseroan dalam hal seluruh Direksi memiliki benturan kepentingan; 7. Melakukan proses penunjukan auditor eksternal Perusahaan untuk ditetapkan oleh RUPS. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Carry out the duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions in the Articles of Association and GMS resolutions as well as the applicable laws and regulations; 3. Carry out the interests of the Company by taking into account the interests of the Shareholders and accountability to the GMS; 4. Examine and review the Annual Report prepared by the Board of Directors and sign the report; 5. Take over operational duties and responsibilities as a Director in the event that the Company has no Director; 6. Represent the Company in the event that all Directors have a conflict of interest; 7. Carry out the process of appointment of the Company's external auditor to be approved in the GMS. |
|---|--|

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak:
 - a. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman atau tempat yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan; dan
 - b. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Membentuk komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris atau menunjuk tenaga ahli;
3. Meminta penjelasan tentang segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan;
4. Memperoleh informasi mengenai Kebijakan dan Tindakan yang telah, sedang dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat Perusahaan dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
6. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
7. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris;
8. Memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi;

Authorities of the Board of Commissioners

In carrying out these duties and responsibilities, the Board of Commissioners has the authority to do the following:

1. Collegially or individually at any time are entitled to:
 - a. Enter buildings and courtyards or places used or controlled by the Company; and
 - b. Examine books, letters of evidence, inventories of goods, check and validate the condition of cash for verification purposes and others, securities and find out all the actions that have been carried out by the Board of Directors.
2. Establishing committees that function as supporting the supervisory duties of the Board of Commissioners or appointing experts;
3. Requesting explanation of all matters from the Board of Directors and the Board of Directors must provide an explanation;
4. Obtaining information regarding the Policies and Actions that have been, are being and will be carried out by the Board of Directors;
5. Requesting the Board of Directors and/or Company officials with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners Meeting;
6. Attending the Board of Directors meetings and provide opinions on the matters discussed;
7. Appointing Secretary to the Board of Commissioners;
8. Temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors;

9. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KOMISARIS

Perseroan menerapkan mekanisme pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas untuk mengawasi Perseroan.
2. Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS. Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar atau oleh RUPS. Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.
3. Komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Komisaris Independen adalah Komisaris yang bukan merupakan representasi dari Pemegang Saham, yang diharapkan memiliki fungsi kontrol bahwa Pemegang Saham tidak memperlakukan Perseroan secara sewenang-wenang yang akan mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.
4. Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direksi atau jabatan lainnya di Perusahaan lain, baik swasta maupun milik Negara, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai pada Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun yang dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk melakukan penggantian sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

KEBIJAKAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Perseroan menerapkan kebijakan yang mengatur proses tindak lanjut yang dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan, berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Perform other supervisory authorities as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.

SELECTION AND APPOINTMENT OF COMMISSIONERS

The Company implements a mechanism for selecting and appointing members of the Board of Commissioners with the following description:

1. The Board of Commissioners is an organ of the Company in charge of supervising the Company.
2. The Board of Commissioners is elected and appointed by the GMS. The procedures for nomination, appointment, replacement, and dismissal of Commissioners are regulated in the Articles of Association or by the GMS. The appointment of Commissioners does not coincide with the appointment of Directors, except the appointment for the first time at the time of establishment.
3. The composition of the Board of Commissioners is at least 20% (twenty percent) of Independent Commissioners as determined in the appointment decision. Independent Commissioner is a Commissioner who is not a representative of the Shareholders, who is expected to have a control function so that the Shareholders do not treat the Company arbitrarily which will result in losses for the Company.
4. The Board of Commissioners is prohibited from holding concurrent positions as Directors or other positions in other companies, both private and state-owned, which may cause a conflict of interest.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with Article 28 Paragraph 3 of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, the term of office for members of the Board of Commissioners is 5 (five) years which can be reappointed for 1 (one) term of office, without prejudice to the rights of the GMS to make replacements at any time before the end of their term of office.

POLICY ON RESIGNATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS INVOLVED IN FINANCIAL CRIMES

The Company implements a policy that regulates a follow-up process to be carried out if a member of the Board of Commissioners is involved in a financial crime, based on the provisions in the Articles of Association and applicable laws and regulations.



PROGRAM PENGENALAN BAGI KOMISARIS BARU

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola GCG dan *Board Manual* PLN, Komisaris yang diangkat untuk pertama kali diwajibkan untuk mengikuti program pengenalan mengenai Perseroan. Program tersebut diberikan agar masing-masing anggota baru dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris, memahami proses bisnis Perseroan, serta dapat bekerja secara sinergis dengan organ Perseroan lainnya.

Materi program pengenalan bagi Dewan Komisaris dapat diberikan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan di mana program tersebut dilaksanakan.

Materi yang diberikan dalam program pengenalan Dewan Komisaris meliputi:

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
- b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan;
- d. Keterangan mengenai audit internal dan eksternal, sistem pengendalian internal dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
- e. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan bagi Komisaris dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan, di bawah koordinasi dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain dengan fungsi Sekretaris Perusahaan.

Pada tahun 2022, terdapat 3 (tiga) anggota Komisaris yang baru menjabat. Masing-masing anggota Komisaris tersebut telah mendapatkan program pengenalan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022 untuk Bapak Tedi Bharata, 1 Agustus 2022 untuk Bapak Charles Sitorus, serta 5 Oktober 2022 untuk Bapak Dadan Kusdiana.

INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

PLN's Board Manual and GCG Code regulate that newly appointed Commissioner must take part in an introduction program of the Company. The program is provided for the new members to better understand the duties and responsibilities as a Commissioner, the Company's business processes, and to be able to work in harmony with the other Company's Organs.

The introduction program can be carried out through presentations, meetings, visits to the Company, and review of documents or other programs deemed appropriate by the Company.

Materials provided in the introduction program for the Board of Commissioners include:

- a. Implementation of GCG principles by the Company;
- b. Description of the Company in relation to the objectives, nature, and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
- c. Information related to the delegated authority
- d. Information on internal and external audits, internal control systems and internal control policies, including the Audit Committee;
- e. Information on the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as prohibited matters.

introduction program for the Board of Commissioners is carried out no later than 3 (three) months after the appointment, under the coordination and responsibility of the Corporate Secretary or other officials with the function of Corporate Secretary.

There were 3 (three) new Commissioners in 2022. Each member of the Board of Commissioners has participated in induction program which was held on March 28, 2022 for Mr Tedi Bharata, August 1, 2022 for Mr Charles Sitorus, and October 5, 2022 for Mr Dadan Kusdiana.

KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2022, Perseroan melakukan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris sejumlah 2 (dua) kali berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku RUPS. Informasi terperinci mengenai perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022 telah disajikan pada bab Profil Perusahaan subbagian Perubahan Komposisi Dewan Komisaris.

Komposisi anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERSHIP COMPOSITION

In 2022, the Company made 2 (two) changes to the composition of the members of the Board of Commissioners based on the decree of the Minister of SOEs as the GMS. Detailed information regarding changes in the composition of members of the Board of Commissioners in 2022 has been presented in the Company Profile chapter, Changes in the Composition of the Board of Commissioners.

The composition of the members of the Board of Commissioners in 2022 is as follows:

No.	Nama / Name	Inisial / Initial	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Akhir Masa Jabatan / End of Tenure
1.	Amien Sunaryadi	AS	Komisaris Utama dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN selaku RUPS No. SK- 326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	23 Desember 2024 / December 23, 2024
2.	Suahasil Nazara	SN	Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	23 Desember 2024 / December 23, 2024
3.	Dadan Kusdiana	DK	Komisaris / Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS selaku RUPS No. SK-212/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-212/MBU/09/2022 dated September 21, 2022	21 September 2027 / September 21, 2027
4.	Susiwijono Moegiarso	SM	Komisaris / Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS selaku RUPS No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	16 Juli 2026 / July 16, 2026
5.	Mohamad Ikhsan	MI	Komisaris / Commissioner	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-334/MBU/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-334/MBU/12/2019 dated December 26, 2019	26 Desember 2024 / December 26, 2024
6.	Dudy Purwagandhi	DP	Komisaris / Commissioner	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-22/MBU/01/2020 dated January 16, 2020	16 Januari 2025 / Januari 16, 2025
7.	Tedi Bharata	TB	Komisaris / Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-85/MBU/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No SK-85/MBU/03/2022 dated March 25, 2022	25 Maret 2027 / March 25, 2027
8.	Eko Sulistyio	ES	Komisaris / Commissioner	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-330/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-330/MBU/10/2020 dated October 9, 2020	9 Oktober 2025 / Oktober 9, 2025
9.	Charles Sitorus	CS	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-154/MBU/07/2022 tanggal 22 Juli 2022 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-154/MBU/07/2022 dated July 22, 2022	22 Juli 2027 / July 22, 2027
10.	Alex Iskandar Munaf	AIM	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021	16 Juli 2026 / July 16, 2026
11.	Rida Mulyana*	RM	Komisaris / Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-55/MBU/02/2019 dated February 28, 2019	21 September 2022 / September 21, 2022
12.	Ardan Adiperdana*	AA	Komisaris / Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-90/MBU/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-90/MBU/03/2021 dated March 17, 2021	25 Maret 2022 / March 25, 2022



No.	Nama / Name	Inisial / Initial	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Akhir Masa Jabatan / End of Tenure
13	Heru Winarko*	HW	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	16 Juni 2022 / June 16, 2022

*) Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perseroan per 31 Desember 2022

*) No longer serving as Commissioner of the Company as of December 31, 2022

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Dewan Komisaris didukung oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Terkait hal itu, Dewan Komisaris membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang di antara anggota Dewan Komisaris, antara lain dengan menetapkan Komisaris sebagai ketua ataupun anggota pada komite-komite tersebut.

Pembagian tugas anggota Dewan Komisaris sebagai ketua ataupun anggota komite pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Komite Audit / Audit Committee	Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee	Komite Nominasi & Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee
Amien Sunaryadi (Ketua / Head)	Mohammad Ikhsan (Ketua / Head)	Amien Sunaryadi (Ketua / Head)
Alex Iskandar Munaf	Suahasil Nazara	Dudy Purwagandhi
Charles Sitorus	Dadan Kusdiana	Eko Sulistyio
	Susijijono Moegiarso	Tedi Bharata

INFORMASI MENGENAI KOMISARIS INDEPENDEN

Sesuai peraturan yang berlaku, Pedoman GCG, serta *Board Manual* PLN, Komisaris Independen mengacu kepada anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan tertentu dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pemenuhan Kriteria Komisaris Independen

Secara khusus, kriteria penentuan Komisaris Independen ditentukan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Pasal 13 ayat 3 dan 4. Kriteria Komisaris Independen serta pemenuhan oleh komposisi Dewan Komisaris di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DIVISION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out their duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretariat of the Board of Commissioners and three committees consisting of the Audit Committee, Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners divides the duties and authorities among the members of the Board of Commissioners by appointing the Commissioners as heads or members of these committees.

Division of duties of members of the Board of Commissioners serving on the Committee of the Board of Commissioners as of December 31, 2022 are as follows:

INFORMATION ON INDEPENDENT COMMISSIONERS

In accordance with applicable regulations, GCG Guidelines, and Board Manual of PLN, Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners with no financial, share ownership and/or family relations with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or any relationships with the Company, which may affect his/her ability to act independently.

Fulfillment of Independent Commissioner Criteria

Specific criteria for determining Independent Commissioner are stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, Article 13 paragraphs 3 and 4. The criteria for Independent Commissioners and fulfillment by the composition of the Board of Commissioners in 2022 are as follows:

Kriteria / Criteria	AS	AIM	CS	HW*
Tidak memiliki hubungan keuangan / Has no financial relationship	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan / Has no management relationship	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki kepemilikan saham / Has no share ownership	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya / Has no family relationship with other members of the Board of Commissioners/Supervisory Board	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali / Has no relationship with the controlling shareholders	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan dengan BUMN yang bersangkutan / Has no relationship with the concerned SOE	✓	✓	✓	✓

*) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 1 Januari-22 Juli 2022

*) Served as Commissioner of the Company on January 1 – July 22, 2022

INDEPENDENSI, HUBUNGAN AFILIASI, SERTA KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Independensi Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris menandatangani Pakta Integritas di setiap awal tahun untuk menyatakan status independensinya dan pada setiap akhir tahun untuk menyatakan apakah dalam satu tahun tersebut terdapat situasi benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris atas tindakan yang dilakukan. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah menandatangani Pakta Integritas pada tahun 2022 yang berisi butir-butir berikut:

Pakta Integritas Dewan Komisaris / Integrity Pact of the Board of Commissioners	AS	SN	DK	SM	MI	DP	TB	ES	CS	AIM	RM*	AA*	HW*
Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan / Has the ability to carry out the mandate on the basis of trust	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mengupayakan capaian kinerja Perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip GCG. / Strive to achieve the Company's maximum performance by heeding the principles of GCG.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian atau prudent / Behave and make careful and prudential decisions	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya Perusahaan / Dare to take full responsibility for the running of the Company	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi. / Consistently put the best for the interests of the Company above personal interests.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual. / Avoid any forms of conflict of interest, both potential and actual.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mematuhi semua ketentuan perundangan yang berlaku / Comply with all of the prevailing laws and regulations.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selama menjabat, tidak akan memanfaatkan posisi pada Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, maupun golongan tertentu / During his/her term, he/she will not take advantage of his/her position in the Company, either directly or indirectly for personal, family and relative interests, as well as certain groups.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*) Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 31 Desember 2022

*) No longer serving as Commissioner of the Company as of December 31, 2022



Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

PLN memiliki aturan yang melarang adanya hubungan afiliasi, baik hubungan keluarga langsung/tidak langsung maupun hubungan keuangan di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham. Hal tersebut diterapkan untuk menjaga independensi, menghindari adanya benturan kepentingan, serta menjaga akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional Perseroan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat di tahun 2022 memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi aturan tersebut. Dewan Komisaris menjamin bahwa seluruh Komisaris yang menjabat di tahun 2022 tidak memiliki hubungan keuangan ataupun hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik dengan sesama Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pengungkapan hubungan afiliasi masing-masing anggota Dewan Komisaris telah disajikan di dalam bab Profil perusahaan, subbagian Dewan Komisaris.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat di tahun 2022 tidak mempunyai kepemilikan saham Perseroan, baik secara pribadi maupun melalui anggota keluarga, serta tidak mempunyai saham pada perusahaan lain, baik secara pribadi maupun melalui anggota keluarga.

INFORMASI RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Beberapa anggota Dewan Komisaris yang menjabat di tahun 2022 memiliki jabatan pada institusi lain. Meski demikian, rangkap jabatan tersebut dilakukan secara tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana termuat di dalam kriteria Dewan Komisaris PLN.

Pengungkapan rangkap jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris telah disajikan dalam bab Profil, subbagian Dewan Komisaris.

Affiliation of Members of the Board of Commissioners

PLN's policy prohibits affiliations of both direct/indirect family relationships and financial relationships between members of the Board of Commissioners, Board of Directors and shareholders. This is aimed to maintain independence, avoid conflicts of interest, and maintain accountability in decision making and in the implementation of the Company's operational activities.

All members of the Board of Commissioners serving in 2022 have complied with these regulations. The Board of Commissioners guarantees that all Commissioners serving in 2022 have no financial or family relationships up to the third degree, either with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or shareholders, both in a straight line and sideways, including relationships from marriage.

Disclosure of the affiliation of each member of the Board of Commissioners has been presented in the Company Profile chapter, the Board of Commissioners subsection.

Share Ownership of Members of the Board of Commissioners

The Company ensures that all members of the Board of Commissioners serving in 2022 have no share ownership of the Company, either personally or through family members, and in other companies, either personally or through family members.

INFORMATION ON CONCURRENT POSITIONS OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Several members of the Board of Commissioners serving in 2022 have concurrent positions in other institutions, while still paying attention the applicable provisions, as contained in the criteria for the Board of Commissioners of PLN.

Disclosure of concurrent positions of each member of the Board of Commissioners has been presented in the Profile chapter, subsection of the Board of Commissioners.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pengambilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat internal yang diselenggarakan secara berkala, atau sewaktu-waktu ketika diperlukan. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Namun, ketika tidak dapat diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat, keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan pemungutan suara. Dalam mekanisme tersebut, masing-masing Komisaris memiliki hak untuk menyampaikan 1 (satu) suara, ditambah 1 (satu) suara untuk Komisaris lain yang diwakilinya.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris PLN menyelenggarakan 29 (dua puluh sembilan) kali rapat internal tanggal pelaksanaan, agenda, serta kehadiran masing-masing anggota dalam penyelenggaraan rapat sebagai berikut:

Pelaksanaan Rapat Dewan Dewan Komisaris Tahun 2022

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Decision-making of the Board of Commissioners is carried out collectively through internal meeting which is held regularly, or at any time as necessary. Decisions of the Board of Commissioners meetings are taken based on deliberation for consensus. However, if deliberation for consensus is not possible, decisions of the Board of Commissioners meeting are taken by voting. In this mechanism, each Commissioner has the right to cast 1 (one) vote, plus 1 (one) vote for the other Commissioner he/she represents.

Implementation of the Board of Commissioners Meetings

In 2022, the Board of Commissioners of held 29 (twenty nine) internal meetings. Details of the meeting dates, agenda, and attendance of each member are as follows:

Implementation of the 2022 Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal / Date	Kehadiran / Attendance												
		AS	SN	DK	RM*	SM	MI	DP	TB	AA**	ES	HW*	CS	AIM
1	2 Januari 2022 / January 2, 2022	✓	✓	BM	✓	✓	✓	✓	BM	✓	✓	✓	BM	✓
2	10 Januari 2022 / January 10, 2022	✓	-	BM	-	-	-	-	BM	✓	✓	✓	BM	✓
3	13 Januari 2022 / January 13, 2022	✓	-	BM	✓	✓	✓	✓	BM	✓	✓	✓	BM	✓
4	20 Januari 2022 / January 20, 2022	✓	✓	BM	✓	-	✓	✓	BM	✓	✓	✓	BM	✓
5	24 Februari 2022 / February 24, 2022	✓	✓	BM	✓	-	✓	✓	BM	✓	✓	✓	BM	✓
6	2 Maret 2022 / March 2, 2022	✓	✓	BM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BM	✓
7	31 Maret 2022 / March 31, 2022	✓	-	BM	-	✓	✓	✓	✓	SM	✓	✓	BM	✓
8	14 April 2022 / April 14, 2022	✓	-	BM	-	✓	✓	✓	✓	SM	✓	✓	BM	✓
9	28 April 2022 / April 28, 2022	✓	-	BM	✓	-	✓	✓	✓	SM	✓	✓	BM	✓
10	12 Mei 2022 / May 12, 2022	✓	✓	BM	-	-	✓	✓	✓	SM	✓	✓	BM	✓
11	16 Juni 2022 / June 16, 2022	✓	✓	BM	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	✓	BM	✓
12	23 Juni 2022 / June 23, 2022	✓	✓	BM	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	BM	✓
13	30 Juni 2022 / June 30, 2022	✓	✓	BM	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	BM	✓
14	14 Juli 2022 / July 14, 2022	✓	✓	BM	✓	-	✓	✓	✓	SM	✓	SM	BM	✓
15	22 Juli 2022 / July 22, 2022	✓	-	BM	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	-

No.	Tanggal / Date	Kehadiran / Attendance												
		AS	SN	DK	RM*	SM	MI	DP	TB	AA**	ES	HW*	CS	AIM
16	4 Agustus 2022 / August 4, 2022	✓	✓	BM	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓
17	18 Agustus 2022 / August 18, 2022	✓	✓	BM	-	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓
18	1 September 2022 / September 1, 2022	✓	-	BM	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓
19	15 September 2022 / September 15, 2022	✓	✓	BM	✓	-	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓
20	18 September 2022 / September 18, 2022	✓	✓	BM	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓
21	29 September 2022 / September 29, 2022	✓	✓	✓	SM	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓
22	20 Oktober 2022 / October 20, 2022	✓	-	✓	SM	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓
23	25 Oktober 2022 / October 25, 2022	✓	-	✓	SM	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓
24	17 November 2022 / November 17, 2022	✓	-	✓	SM	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓
25	29 November 2022 / November 29, 2022	✓	✓	✓	SM	✓	✓	✓	-	SM	✓	SM	✓	✓
26	6 Desember 2022 / December 6, 2022	✓	-	✓	SM	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓
27	15 Desember 2022 / December 15, 2022	✓	✓	✓	SM	-	✓	✓	-	SM	✓	SM	✓	✓
28	22 Desember 2022 / December 22, 2022	✓	-	✓	SM	-	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓
29	28 Desember 2022 / December 28, 2022	✓	-	✓	SM	✓	✓	-	✓	SM	✓	SM	✓	✓

*) Berhenti menjabat sebagai komisaris sejak 21 September 2022

*) No longer serving as commissioner since September 21, 2022

***) Berhenti menjabat sebagai komisaris sejak 25 Maret 2022

**) No longer serving as commissioner since March 25, 2022

**) Berhenti menjabat sebagai komisaris sejak 16 Juni 2022

**) No longer serving as commissioner since June 16, 2022

Keterangan:

- : Tidak Hadir Rapat
SM : Selesai Menjabat
BM : Belum Menjabat

Information:

- : Absent
SM : Term of Office has ended
BM : Term of Office has not started

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

Agenda pada masing-masing penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Internal Meeting Agenda

The agenda for each internal meeting of the Board of Commissioners in 2022 is as follows:

No.	Tanggal / Date	Agenda
1	2 Januari 2022 / January 2, 2022	Update situasi dan rencana ketersediaan energi primer / Update on the situation and plans for the availability of primary energy
2	10 Januari 2022 / January 10, 2022	Kondisi Operasi PLTU / Operating conditions at PLTU
3	13 Januari 2022 / January 13, 2022	Review hasil rapat sebelumnya tentang energi primer / Review the results of the previous meeting on primary energy
4	20 Januari 2022 / January 20, 2022	Usulan Penambahan Pendanaan Pembangkit2. Review tanggapan atas Permohonan Persetujuan atas usulan penghapusbukuandan pemindahtanganan ATTB / Proposal for Additional Generator Funding. Review of responses to the Request for Approval of the proposed write-off and transfer of ATTB

No.	Tanggal / Date	Agenda
5	24 Februari 2022 / February 24, 2022	1. Pembahasan tanggapan LM TW IV 2021 / Discussion of Q4/2021 LM responses 2. Pembahasan Usulan Talent BUMN / Discussion of SOEs Talent Proposals
6	2 Maret 2022 / March 2, 2022	Pembahasan Realisasi PMN TW IV tahun 2021 / Discussion on Realization of PMN in Q4/2021
7	31 Maret 2022 / March 31, 2022	Penghapusbukuan ATTB / ATTB write-off
8	14 April 2022 / April 14, 2022	Pembahasan Usulan Kepala SPI PT PLN (Persero) / Discussion on the Proposal of the Head of SPI of PT PLN (Persero)
9	28 April 2022 / April 28, 2022	Pembahasan Usulan Sekretaris Perusahaan (1) / Discussion of Corporate Secretary Proposal (1)
10	12 Mei 2022 / May 12, 2022	Pembahasan Usulan Sekretaris Perusahaan (2) / Discussion of Corporate Secretary Proposal (2)
11	16 Juni 2022 / June 16, 2022	1. Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan KAP tahun buku 2022 / Response of the Board of Commissioners to KAP's proposal for the 2022 fiscal year 2. Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan Laba Bersih tahun buku 2021 / Response of the Board of Commissioners to the proposed Net Profit for the 2021 fiscal year 3. Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Remunerasi / Response of the Board of Commissioners to the Remuneration Proposal 4. Tanggapan Dewan Komisaris atas LM Audited 2021 / Response of the Board of Commissioners to LM Audited 2021 5. Tanggapan Dewan Komisaris atas LM TW 1 tahun 2022 / Response of the Board of Commissioners to Q1/2022 LM
12	23 Juni 2022 / June 23, 2022	Usulan Persetujuan Direktur Keuangan PT BAG / Proposal for the Approval of PT BAG's Director of Finance
13	30 Juni 2022 / June 30, 2022	1. Usulan Penambahan Modal PT PLN pada perusahaan afiliasi (KMR); / Proposal to increase PT PLN's capital in affiliated companies (KMR); 2. Usulan Direktur Keuangan PT BAG (KNR) / Proposal of PT BAG's Director of Finance (KNR)
14	14 Juli 2022 / July 14, 2022	Pembahasan usulan Komisaris PT IBI / Discussion of PT IBI Commissioner's proposal
15	22 Juli 2022 / July 22, 2022	Pembahasan tanggapan dan Jawaban atas Surat Dekom tentang perusahaan afiliasi / Discussion of responses and answers to the Letter of the Board of Commissioners regarding affiliates
16	4 Agustus 2022 / August 4, 2022	Pembahasan Penghapusan ATTB / Discussion of ATTB write-off
17	18 Agustus 2022 / August 18, 2022	1. Persetujuan asesor GCG tahun 2022 / Approval of GCG assessors in 2022 2. Pembahasan surat usulan penghapusbukuan ATTB / Discussion of the letter of recommendation for the ATTB write-off 3. Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan RKAP 2023 / Response of the Board of Commissioners to the 2023 RKAP Proposal 4. Tanggapan Dewan Komisaris atas LM TW 2 / Response of the Board of Commissioners to Q2 LM
18	1 September 2022 / September 1, 2022	1. Usulan Direksi terkait pendanaan, oleh KMR / Proposal of the Board of Directors regarding funding, by KMR 2. Diskusi Fokus Pengawasan Dekom periode September-Desember 2022, oleh setiap Komite / Discussion on the Focus of Supervision of the Board of Commissioners for the September-December 2022 period, by each Committee
19	15 September 2022 / September 15, 2022	Pembahasan Surat Tanggapan Dewan Komisaris terkait <i> Holding dan Sub-Holding (1) </i> / Discussion of the Board of Commissioners Response Letter regarding Holding and Sub-Holding (1)
20	18 September 2022 / September 18, 2022	Pembahasan Surat Tanggapan Dewan Komisaris terkait <i> Holding dan Sub-Holding (2) </i> / Discussion of the Board of Commissioners Response Letter regarding Holding and Sub-Holding (2)
21	29 September 2022 / September 29, 2022	Pembahasan Piagam Komite Audit / Discussion of the Audit Committee Charter
22	20 Oktober 2022 / October 20, 2022	Pembahasan RKAP 2023 / Discussion of the 2023 RKAP

No.	Tanggal / Date	Agenda
23	25 Oktober 2022 / October 25, 2022	1. Pembahasan Usulan Direksi atas penambahan Direktur Perencanaan dan Niaga pada PT BAG / Discussion of the Board of Directors proposal for the addition of the Director of Planning and Commerce of PT BAG 2. Pembahasan penghapusan ATTB / Discussion of ATTB write-off
24	17 November 2022 / November 17, 2022	Pembahasan Usulan Penghapusan ATTB (oleh KA) / Discussion on the Proposal of ATTB write-off (by the Audit Committee)
25	29 November 2022 / November 29, 2022	Pembahasan <i>Draft</i> Tanggapan atas Usulan RKAP 2023 / Discussion of the Response Draft to the 2023 RKAP Proposal
26	6 Desember 2022 / December 6, 2022	Pembahasan Tanggapan Dekom atas LM TW 3 / Discussion of the Board of Commissioners response to Q3 LM
27	15 Desember 2022 / December 15, 2022	1. Pembahasan Pendanaan Proyek Pembangkit / Discussion of Power Plant Project Funding 2. Permohonan Tanggapan Tertulis <i> Holding dan Sub-Holding</i> tahap legal end state / Request for Written Response Holding and Sub-Holding in the legal end state stage 3. Permohonan Persetujuan Perdir Kebijakan Strategis Audit Internal / Proposal for Board of Directors Approval on Internal Audit Strategic Policy
28	22 Desember 2022 / December 22, 2022	1. Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas Pembentukan <i> Holding dan Sub-Holding</i> tahap Legal End State (1) / Discussion of the Board of Commissioners Responses to the Formation of Holding dan Sub-Holding in the Legal End State stage (1) 2. Pembahasan Tanggapan Surat perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Dana Penambahan PMN tahun 2022 / Discussion of Responses to the Letter regarding Application for Determination of Use of Additional PMN Funds in 2022 3. Pembahasan Tanggapan Surat perihal Pendanaan Proyek Pembangkit / Discussion of Letter Responses regarding Power Plant Project Funding
29	28 Desember 2022 / December 28, 2022	Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas Pembentukan <i> Holding dan Sub-Holding</i> tahap <i> Legal End State</i> (2) / Discussion of the Board of Commissioners Responses to the Establishment of Holding dan Sub-Holding in the Legal End State stage (2)

Frekuensi Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Frekuensi kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam keseluruhan penyelenggaraan rapat internal di tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Frequency of Attendance of Members of the Board of Commissioners

Frekuensi The frequency of attendance of each member of the Board of Commissioners in the overall holding of internal meetings in 2022 can be seen in the following table:

Frekuensi Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Tahun 2022

Frequency of Attendance of Members of the Board of Commissioners in the 2022 Internal Meetings

No.	Nama Anggota / Member	Jabatan / Position	Jumlah Rapat yang Harus dihadiri / Total Meetings Attended	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) / Attendance Percentage (%)
1	Amien Sunaryadi	Komisaris Utama dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	29	29	100
2	Suhasil Nazara	Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner	29	16	55
3	Dadan Kusdiana	Komisaris / Commissioner	9	9	100
4	Rida Mulyana*	Komisaris / Commissioner	20	15	75
5	Susiwijono Moegiarsjo	Komisaris / Commissioner	29	20	69

No.	Nama Anggota / Member	Jabatan / Position	Jumlah Rapat yang Harus dihadiri / Total Meetings Attended	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) / Attendance Percentage (%)
6	Mohamad Ikhsan	Komisaris / Commissioner	29	28	96
7	Dudy Purwagandhi	Komisaris / Commissioner	29	26	90
8	Tedi Bharata	Komisaris / Commissioner	24	22	92
9	Ardan Adiperdana**	Komisaris / Commissioner	6	6	100
10	Eko Sulistyio	Komisaris / Commissioner	29	29	100
11	Heru Winarko***	Komisaris Independen / Independent Commissioner	11	11	100
12	Charles Sitorus	Komisaris Independen / Independent Commissioner	15	15	100
13	Alex Iskandar Munaf	Komisaris Independen / Independent Commissioner	29	28	96

*) Berhenti menjabat sebagai komisaris sejak 21 September 2022

*) No longer serving as commissioner since September 21, 2022

***) Berhenti menjabat sebagai komisaris sejak 25 Maret 2022

**) No longer serving as commissioner since March 25, 2022

*) Berhenti menjabat sebagai komisaris sejak 16 Juni 2022

***) No longer serving as commissioner since June 16, 2022

RAPAT KONSULTASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Mengacu pada *Board Manual* PLN, rapat konsultasi merupakan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi atau rapat Direksi yang dihadiri Dewan Komisaris, yang dapat diselenggarakan di saat Dewan Komisaris memerlukan penjelasan dan/atau informasi terkait pengelolaan Perseroan. Terkait hal itu, selain melalui rapat konsultasi, penjelasan dan/ atau nasihat dapat pula disampaikan secara tertulis oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Penyelenggaraan Rapat Konsultasi

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat konsultasi sejumlah 12 (dua belas) kali, dengan tanggal pelaksanaan dan kehadiran masing-masing Komisaris sebagai berikut:

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Konsultasi Tahun 2022

No.	Tanggal / Date	Kehadiran / Attendance												
		AS	SN	DK	RM*	SM	MI	DP	TB	AA**	ES	HW	CS	AIM
1	3 Februari 2022 / February 3, 2022	✓	✓	BM	✓	✓	✓	✓	BM	✓	✓	✓	BM	✓
2	2 Maret 2022 / March 2, 2022	✓	✓	BM	✓	✓	✓	✓	BM	✓	✓	✓	BM	✓
3	5 April 2022 / April 5, 2022	✓	✓	BM	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	✓	BM	✓
4	28 April 2022 / April 28, 2022	✓	-	BM	✓	-	✓	✓	✓	SM	✓	✓	BM	✓
5	2 Juni 2022 / June 2, 2022	✓	✓	BM	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	✓	BM	✓

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS CONSULTATION MEETING

Referring to the PLN Board Manual, a consultation meeting is a Board of Commissioners meeting attended by the Board of Directors or a Board of Directors meeting attended by the Board of Commissioners, which can be held when the Board of Commissioners requires explanation and/or information on the management of the Company. In this regard, apart from consultation meetings, explanations and/or additional information can also be submitted in writing by the Board of Directors.

Implementation of Consultation Meetings

In 2022, the Board of Commissioners and the Board of Directors held 12 (twelve) consultation meetings. Details of the meeting dates, agenda, and attendance of each Commissioners are as follows:

Attendance of Members of the Board of Commissioners at the 2022 Consultation Meeting

No.	Tanggal / Date	Kehadiran / Attendance													
		AS	SN	DK	RM*	SM	MI	DP	TB	AA**	ES	HW	CS	AIM	
6	7 Juli 2022 / July 7, 2022	✓	✓	BM	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	BM	✓	
7	4 Agustus 2022 / August 4, 2022	✓	✓	BM	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓	
8	8 September 2022 / September 8, 2022	✓	✓	BM	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓	
9	29 September 2022 / September 29, 2022	✓	-	✓	SM	-	✓	-	✓	SM	✓	SM	✓	✓	
10	28 Oktober 2022 / October 28, 2022	✓	-	✓	SM	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓	
11	25 November 2022 / November 25, 2022	✓	✓	✓	SM	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓	
12	22 Desember 2022 / December 22, 2022	✓	✓	✓	SM	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓	

*) Berhenti menjabat sebagai komisaris sejak 21 September 2022

*) No longer serving as commissioner since September 21, 2022

***) Berhenti menjabat sebagai komisaris sejak 25 Maret 2022

**) No longer serving as commissioner since March 25, 2022

****) Berhenti menjabat sebagai komisaris sejak 16 Juni 2022

***) No longer serving as commissioner since June 16, 2022

Keterangan:

Information:

- : Tidak Hadir Rapat

- : Absent

SM : Selesai Menjabat

SM : Term of Office has ended

BM : Belum Menjabat

BM : Term of Office has not started

Agenda Rapat Konsultasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Consultation Meeting Agenda

Agenda pada masing-masing penyelenggaraan rapat konsultasi Dewan Komisaris tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The agenda for each consultation meeting for the Board of Commissioners in 2022 is as follows:

No.	Tanggal / Date	Agenda
1	3 Februari 2022 / February 3, 2022	1. Update K3L per Januari 2022 / Update HSSE as of January 2022 2. Update Direksi / Update on the Board of Directors 3. Rencana Holding dan Sub-Holding PLN / Update of PLN Holding Sub-Holding
2	2 Maret 2022 / March 2, 2022	Update Direksi / Update of Board of Directors
3	5 April 2022 / April 5, 2022	1. Kondisi K3L / HSSE conditions 2. Update dari Direksi / Update from the Board of Directors
4	28 April 2022 / April 28, 2022	Update Direksi / Update of Board of Directors
5	2 Juni 2022 / June 2, 2022	1. Progres capaian KPI 2022 per akhir TW I / Progress on KPI 2022 achievements at the end of Q1 2. Rencana digitalisasi end-to-end inventory PLN / PLN's end-to-end inventory digitalization plan
6	7 Juli 2022 / July 7, 2022	Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham pada RUPS 27 Juni 2022 / Follow up on Shareholders Directions at the GMS on June 27, 2022
7	4 Agustus 2022 / August 4, 2022	Update Rencana Holding dan Sub-Holding / Update of Holding dan Sub-Holding Plan
8	8 September 2022 / September 8, 2022	1. Program Electrifying Lifestyle (EV, Kompor Induksi, Agriculture) / Electrifying Lifestyle Program (EV, Induction Cooker, Agriculture) 2. Progres Persiapan PLN dalam pelaksanaan G20 / PLN's Preparation Progress in implementing the G20
9	29 September 2022 / September 29, 2022	1. Internalisasi Kebijakan Pemerintah terkait Kompor Induksi / Internalization of Government Policy related to Induction Cooker 2. Kepastian alokasi subsidi dan kompensasi pada APBN / Certainty on the allocation of subsidies and compensation in the APBN 3. Backlog investasi untuk penambahan daya KTT / Investment backlog for additional KTT power
10	28 Oktober 2022 / October 28, 2022	Update Direksi: Pencapaian Kinerja Korporat dan Direktorat 2022 / Update of Board of Directors: Corporate and Directorate Performance Achievements in 2022
11	25 November 2022 / November 25, 2022	1. RKAP 2023 / 2023 RKAP 2. Update Pelayanan Ketenagalistrikan dalam KTT G20 / Update on Electricity Services at the G20 Summit

No.	Tanggal / Date	Agenda
12	22 Desember 2022 / December 22, 2022	1. Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas Pembentukan <i>Holding</i> dan <i>Sub-Holding</i> tahap <i>Legal End State (1)</i> / Discussion of the Board of Commissioners' Responses to the Formation of Holding - Sub-Holding in the Legal End State stage (1) 2. Pembahasan Tanggapan Surat perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Dana Penambahan PMN tahun 2022 / Discussion of Responses to the Letter regarding Application for Determination of Use of Additional PMN Funds in 2022 3. Pembahasan Tanggapan Surat perihal Pendanaan Proyek Pembangkit / Discussion of Letter Responses regarding Power Plant Project Funding/

Frekuensi Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Frekuensi kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam keseluruhan penyelenggaraan rapat konsultasi di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Frequency of Attendance of Members of the Board of Commissioners

The frequency of attendance of each member of the Board of Commissioners in the overall holding of consultation meetings in 2022 can be seen in the following table:

Frekuensi Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Konsultasi Tahun 2022

Frequency of Attendance of Members of the Board of Commissioners in the 2022 Consultation Meetings

No.	Nama Anggota / Member	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) / Attendance Percentage (%)
1	Amien Sunaryadi	Komisaris Utama dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	12	12	100
2	Suahasil Nazara	Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner	12	9	75
3	Dadan Kusdiana	Komisaris / Commissioner	4	4	100
4	Rida Mulyana*	Komisaris / Commissioner	8	8	100
5	Susiwijono Moegiarso	Komisaris / Commissioner	12	10	83
6	Mohamad Ikhsan	Komisaris / Commissioner	12	12	100
7	Dudy Purwagandhi	Komisaris / Commissioner	12	11	92
8	Tedi Bharata	Komisaris / Commissioner	10	10	100
9	Ardan Adiperdana**	Komisaris / Commissioner	2	2	100
10	Eko Sulistyio	Komisaris / Commissioner	12	12	100
11	Heru Winarko***	Komisaris Independen / Independent Commissioner	5	5	100
12	Charles Sitorus	Komisaris Independen / Independent Commissioner	6	6	100
13	Alex Iskandar Munaf	Komisaris Independen / Independent Commissioner	12	12	100

*) Berhenti menjabat sebagai komisaris sejak 21 September 2022

***) Berhenti menjabat sebagai komisaris sejak 25 Maret 2022

****) Berhenti menjabat sebagai komisaris sejak 16 Juni 2022

*) No longer serving as commissioner since September 21, 2022

***) No longer serving as commissioner since March 25, 2022

****) No longer serving as commissioner since June 16, 2022

RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI TERTENTU

Di samping rapat internal dan rapat konsultasi, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat yang mengundang Direksi tertentu untuk membahas hal-hal menyangkut bidang permasalahan atau Direktorat tertentu. Pada tahun 2022, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat dengan Direksi tertentu sejumlah 21 (dua puluh satu), dengan agenda pembahasan antara lain *update* kondisi energi primer, *update Holding* dan *Sub-Holding*, serta pembahasan usulan RKAP 2023. Keseluruhan rapat tersebut dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi dengan perincian sebagai berikut:

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Tahun 2022

Nama/Jabatan / Name/Position	Tanggal / Date	Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi / Training and Competency Development Program	Penyelenggara / Organizer	Lokasi / Location
Amien Sunaryadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	26-27 Januari 2022 / January 26-27, 2022	National Conference IKAI 2022 "Leveraging the Roles of Audit Committee"	Ikatan Komite Audit Indonesia / Indonesian Audit Committee Association	Jakarta
	21-22 Juni 2022 / June 21-22, 2022	Program Sertifikasi "Certification in Audit Committee Practices (CACP) Batch 26 / Certification Program "Certification in Audit Committee Practices (CACP)" Batch 26	Ikatan Komite Audit Indonesia / Indonesian Audit Committee Association	Jakarta
Ardan Adiperdana* Komisaris / Commissioner	26-27 Januari 2022 / January 26-27, 2022	National Conference IKAI 2022 "Leveraging the Roles of Audit Committee"	Ikatan Komite Audit Indonesia / Indonesian Audit Committee Association	Jakarta
Heru Winarko* Komisaris Independen / Independent Commissioner	26-27 Januari 2022 / January 26-27, 2022	National Conference IKAI 2022 "Leveraging the Roles of Audit Committee"	Ikatan Komite Audit Indonesia / Indonesian Audit Committee Association	Jakarta
	21-22 Juni 2022 / June 21-22, 2022	Program Sertifikasi "Certification in Audit Committee Practices (CACP) Batch 26 / Certification Program "Certification in Audit Committee Practices (CACP)" Batch 26	Ikatan Komite Audit Indonesia / Indonesian Audit Committee Association	Jakarta

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING WITH CERTAIN DIRECTORS

In addition to internal meetings and consultation meetings, the Board of Commissioners may hold meetings inviting certain Directors to discuss matters relating to certain field or directorats. In 2022, the Board of Commissioners held 21 (twenty one) meetings with certain members of the Board of Directors, with the discussion agenda including update of primary energy condition, update of Holding and Sub-Holding, and discussion of the 2023 RKAP

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

During 2022, the Board of Commissioners participated in competency training and development programs with the following details:

2022 Board of Commissioners Competency Development Program

Nama/Jabatan / Name/Position	Tanggal / Date	Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi / Training and Competency Development Program	Penyelenggara / Organizer	Lokasi / Location
Charles Sitorus Komisaris Independen / Independent Commissioner	18-19 Oktober 2022 / October 18-19, 2022	Seminar Nasional Internal Audit Tahun 2022	Yayasan Pendidikan Internal Audit	Bali
	6-7 Desember 2022 / December 6-7, 2022	Program Sertifikasi "Certification in Audit Committee Practices (CACP) Batch 28 / Certification Program "Certification in Audit Committee Practices (CACP)" Batch 28	Ikatan Komite Audit Indonesia / Indonesian Audit Committee Association	Jakarta
	7-8 Desember 2022 / December 7-8, 2022	Indonesia Cyber Security Summit	Indonesia Cyber Security Forum	Yogyakarta
Alex Iskandar Munaf Komisaris Independen / Independent Commissioner	26-27 Januari 2022 / January 26- 27, 2022	National Conference IKAI 2022 "Leveraging the Roles of Audit Committee"	Ikatan Komite Audit Indonesia / Indonesian Audit Committee Association	Jakarta
	6-7 Desember 2022 / December 6-7, 2022	Program Sertifikasi "Certification in Audit Committee Practices (CACP) Batch 29	Ikatan Komite Audit Indonesia / Indonesian Audit Committee Association	Jakarta

*) Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 31 Desember 2022

*) No longer serving as Commissioner of the Company as of December 31, 2022

RENCANA KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2022

Secara berkala, Dewan Komisaris menyusun rencana kerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Uraian rencana kerja Dewan Komisaris di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Aspek pengarahan dan pengawasan
 - a. Pembahasan dan tanggapan Rencana Perusahaan.
 - b. Pembahasan mengenai progres Transformasi PLN
 - c. Pembahasan dan tanggapan kinerja perusahaan.
 - d. Review tindak lanjut hasil/temuan audit internal / eksternal.
 - e. Memberi tanggapan, persetujuan, teguran, nasihat dan saran kepada Direksi.
2. Aspek Pelaporan
 - a. Menyampaikan program kerja dan KPI Dewan Komisaris tahunan.
 - b. Menyampaikan laporan/pendapat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham/RUPS.
 - c. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - d. Melaksanakan RUPS RKAP Tahun Buku 2022 dan RUPS LPT Tahun Buku 2021

BOARD OF COMMISSIONERS WORK PLAN IN 2022

Periodically, the Board of Commissioners prepares a work plan based on its duties and responsibilities. The description of the work plan of the Board of Commissioners in 2022 is as follows:

1. Direction and supervision aspect
 - a. Discussion and response to the Company Plan.
 - b. Discussion on the progress of the PLN Transformation
 - c. Discussion and response to company performance.
 - d. Review of follow-up results/findings of internal/ external audits.
 - e. Provide response, approval, reprimand, advice and suggestions to the Board of Directors.
2. Reporting Aspect
 - a. Present the work program and annual KPI of the Board of Commissioners.
 - b. Submit report/opinion of the Board of Commissioners to Shareholders/GMS.
 - c. Submit report on the supervisory duties of the Board of Commissioners.
 - d. Hold the RKAP GMS for the 2022 Fiscal Year and the LPT GMS for the 2021 Fiscal Year



3. Aspek Dinamis
 - a. Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Rapat Komite Dewan Komisaris.
 - c. Pengenalan/Induksi/peningkatan kompetensi.
 - d. Pengelolaan GCG.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2022

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk tahun 2022, dengan melakukan pengawasan, penelaahan, pembahasan, hingga pemberian nasihat atas pengelolaan Perseroan. Secara terperinci, sejumlah kegiatan yang telah dilakukan sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan atas Penyusunan Rancangan dan Pelaksanaan RJP dan RKAP

- a. Pengawasan atas Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan pelaksanaannya
 - Dalam upaya mendorong capaian transformasi yang berpengaruh kepada indikator kinerja teknis dan keuangan PLN, Dewan Komisaris mendorong Direksi agar melakukan *monitoring* dan *review* secara berkala terhadap capaian parameter-parameter *Breakthrough Initiatives* dan sesuai sasaran perusahaan yang telah ditetapkan dalam RJP 2020-2024 maupun dalam rangka pemenuhan penugasan pemerintah;
 - Pengawasan atas pelaksanaan RJP di tahun 2022 dilakukan melalui penelaahan dan pembahasan laporan pelaksanaan RJP, hambatan dalam pelaksanaan RJP serta langkah- langkah yang dilakukan oleh Direksi untuk mengatasi hambatan tersebut.
- b. Pengawasan atas Pembahasan RKAP dan Kontrak Manajemen/KPI/Indikator Penilaian Kinerja Operasional dan pelaksanaannya
 - Memastikan bahwa rencana kerja yang tertuang dalam RKAP telah disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan serta penugasan dari pemerintah serta sasaran yang ditetapkan dalam usulan RKAP dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien;

3. Dynamic Aspect
 - a. Board of Commissioners Meeting.
 - b. Board of Commissioners Committee Meeting.
 - c. Introduction/Induction/competence improvement.
 - d. GCG Management.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTY IMPLEMENTATION IN 2022

The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities in 2022, by supervising, reviewing, discussing, and providing advice on the management of the Company. Details on the the implementation of duties and responsibilities in 2022 are as follows:

1. Supervision of the Drafting and Implementation of RJP and RKAP

- a. Supervision of the Draft Long Term Plan (RJP) and its implementation
 - In an effort to encourage transformational achievements that affect PLN's technical and financial performance indicators, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to periodically monitor and review the achievements of the Breakthrough Initiatives parameters and according to the company's targets set in the 2020-2024 RJP as well as in the context of fulfilling assignments government;
 - Supervision of the implementation of RJP in 2022 is carried out through review and discussion of the RJP implementation report, obstacles in implementing the RJP and steps taken by the Board of Directors to overcome these obstacles.
- b. Supervision of RKAP Discussion and Management Contracts/KPI/Operational Performance Evaluation Indicators and their implementation
 - Ensuring that the work plan contained in the RKAP has been prepared in accordance with the vision, mission and objectives of the Company as well as assignments from the government and the targets set in the proposed RKAP can be achieved more effectively and efficiently;

- Memastikan RKAP dan KPI Tahun 2022 dapat dicapai oleh perusahaan. Dengan melakukan monitor variabel-variabel yang mendukung dan menghambat pelaksanaan RKAP serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi untuk mengatasi hambatan tersebut;
- Pengawasan atas pelaksanaan RKAP dan KPI Tahun 2022 dilakukan melalui penelaahan dan pembahasan laporan pelaksanaan RKAP serta pembahasan RUPS melalui *review* dan pemberian pendapat dan saran-saran perbaikan atas Laporan Manajemen Triwulanan serta pembahasan kinerja tahun berjalan di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Penelaahan dan pembahasan dilakukan berdasarkan Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan serta Laporan Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI);
- Pengawasan dalam pembahasan RKAP juga termasuk pengawasan dalam optimalisasi biaya investasi agar dapat mengakomodasi kebutuhan investasi baru yang belum direncanakan tanpa mengubah total anggaran investasi, melakukan efisiensi anggaran untuk komponen pemeliharaan dan kepegawaian sesuai target yang direncanakan serta rekompresi beban administrasi, dan menurunkan beban pinjaman sesuai target yang direncanakan.
- Ensuring that the 2022 RKAP and KPI can be achieved by the Company through monitoring the variables that support and hinder the implementation of the RKAP and the steps taken by the Board of Directors to overcome these obstacles;
- Supervision of the implementation of the 2022 RKAP and KPI is carried out through review and discussion of the RKAP implementation report and discussion of the GMS through review and provision of opinions and suggestions for improvement on the Quarterly Management Report and discussion of current year's performance at the Board of Commissioners and Directors meetings. The review and discussion is carried out based on the Quarterly Management Report and Annual Management Report as well as Key Performance Indicators (KPI) Achievement Reports;
- Supervision in the RKAP discussion also includes supervision in optimizing investment costs so that they can accommodate new investment needs that have not been planned without changing the total investment budget, carrying out budget efficiencies for maintenance and staffing components according to planned targets and recomposing administrative expenses, and reducing loan expenses according to the target set. planned.

2. Pengawasan atas Implementasi Rencana dan Kebijakan Perseroan

- a. Pemberian Keputusan/Tanggapan Tertulis atas Kewenangan Direksi yang memerlukan Persetujuan/Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris
 - Dalam memberikan Keputusan/Tanggapan Tertulis, Dewan Komisaris beserta Komite melakukan telaah terhadap pengajuan permohonan Keputusan/Tanggapan Tertulis melalui rapat secara internal, apabila diperlukan akan turut mengundang Direksi terkait untuk meminta penjelasan lebih lanjut;

2. Supervision of the Implementation of the Company's Plans and Policies

- a. Provision of Written Decisions/Responses to the Authorities of the Board of Directors that require Written Approval/Responses from the Board of Commissioners
 - In providing Written Decisions/Responses, the Board of Commissioners and the Committee conduct a review of the application for Written Decisions/Responses through internal meetings, if necessary, they will also invite the relevant Directors to request further explanation;



- Pada tahun 2022, Dewan Komisaris telah memberikan Keputusan/Tanggapan Tertulis atas usulan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris maupun yang memerlukan rekomendasi/persetujuan RUPS sejumlah 60 surat.
- b. Pengawasan atas Hubungan dengan *Stakeholders*
- Dalam implementasi "Prinsip 4 No", yaitu: *No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality*, Dewan Komisaris mendorong kepada Direksi untuk melaksanakan sosialisasi implementasi SMAP secara masif dan berkelanjutan sehingga nantinya dapat ditularkan ke lingkungan sekitar atau *stakeholder* PLN.
- c. Pengawasan atas Gejala Menurunnya Kinerja Perusahaan
- Melakukan telaah secara berkala adanya gejala menurunnya kinerja perusahaan baik keuangan, operasional, maupun capaian parameter-parameter *Breakthrough Initiatives* Transformasi PLN yang telah ditetapkan dalam RJP 2020-2024;
 - Apabila berdasarkan hasil telaah terdapat gejala menurunnya Kinerja, Dewan Komisaris akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Direksi baik secara tertulis atau secara langsung melalui Rapat Konsultasi atau Rapat dengan Direksi terkait yang menangani.
- d. Pengawasan atas Sistem Pengendalian Internal
- Dalam pengawasan atas Sistem Pengendalian Internal, Dewan Komisaris bersama Komite melakukan pertemuan periodik dengan SPI, Divisi Akuntansi, Divisi Kepatuhan, Divisi Hukum, dan Divisi Lainnya terkait permasalahan untuk memonitor tindak lanjut atau penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern, serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan;
 - Pengawasan atas Sistem Pengendalian Internal juga dilakukan melalui pembahasan dengan KAP untuk memastikan bahwa tindak lanjut oleh Unit Kerja terkait atas kelemahan sistem pengendalian intern serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dan efektif.
- In 2022, the Board of Commissioners has issued 60 Letters of Decisions/Written Responses to the proposals from the Board of Directors that require the approval of the Board of Commissioners and those that require recommendations/Approval of the GMS.
- b. Supervision of Relations with Stakeholders
- In the implementation of "4 No Principles", namely: *No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality*, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to carry out dissemination of SMAP implementation on a massive and sustainable basis so that later it can be transmitted to the surrounding environment or PLN stakeholders.
- c. Monitoring of Signs of Decline in the Company Performance
- Regularly reviewing the signs of decline in the Company performance in terms of finance, operations, and Breakthrough parameters PLN Transformation Initiatives that have been stipulated in the 2020-2024 RJP;
 - If based on the results of the review there are signs of decreased performance, the Board of Commissioners will request further explanation from the Board of Directors either in writing or directly through a Consultation Meeting or Meeting with the relevant Directors in charge.
- d. Supervision of the Internal Control System
- In supervising the Internal Control System, the Board of Commissioners and with the Committees hold periodic meetings with SPI, Accounting Division, Compliance Division, Legal Division, and Other Divisions regarding issues to monitor follow-up or resolve issues related to internal control system weaknesses, as well as compliance on laws and regulations;
 - Supervision of the Internal Control System is also carried out through discussions with KAP to ensure that follow-up by related Work Units on internal control system weaknesses and compliance with laws and regulations has been carried out and is effective.

- e. Pengawasan atas Efektivitas Audit Internal dan Audit Eksternal
- Pengawasan Efektivitas Audit Internal dilakukan dengan pertemuan secara reguler dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dengan agenda antara lain: pembahasan aktivitas audit yang telah dilaksanakan, hasil audit yang berupa temuan (*finding* atau *area of improvement*) dan rekomendasinya, pembahasan realisasi tindak lanjut atas temuan audit internal kurun waktu sebelumnya, serta penelaahan atas pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) SPI;
 - Pengawasan Audit Eksternal dilakukan melalui penelaahan, pembahasan dan pemberian nasihat untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil temuan audit oleh KAP dan BPK telah ditindak lanjuti oleh Direksi;
 - Pengawasan atas pelaksanaan audit PT PLN (Persero) Tahun 2022 oleh KAP meliputi: Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Keuangan TJSL Perusahaan, kinerja dan kepatuhan Perusahaan serta laporan-laporan lainnya sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja;
 - Dalam hal temuan yang mengandung tindakan pidana yang berakibat merugikan perusahaan, Dewan Komisaris bersama Komite terkait memantau penyelesaiannya dengan SPI, Divisi Akuntansi, Divisi Kepatuhan, Divisi Hukum, dan Divisi lain yang terkait
- f. Pengawasan atas Sistem Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
- Memastikan proses penyusunan laporan keuangan masing-masing entitas dan konsolidasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia (SAI) yang digunakan oleh Perseroan;
 - Memastikan keandalan perangkat lunak dan teknologi informasi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan dan konsolidasinya, termasuk pelaksanaan kewajiban administrasi perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak.
- g. Pengawasan atas Kebijakan Mutu dan Pelayanan Perseroan
- Memastikan pelaksanaan Kebijakan Mutu dan Pelayanan Perseroan secara konsisten;
- e. Supervision of the Effectiveness of Internal Audit and External Audit
- Supervision of Internal Audit Effectiveness is conducted through regular meetings with the Internal Audit Unit (SPI) with agendas including: discussion of audit activities that have been carried out, audit results in the form of findings or areas of improvement as well as recommendations, discussion of realization follow-up on the findings of the internal audit in the previous period, as well as a review of the implementation of the SPI Annual Audit Work Program (PKPT);
 - External Audit Supervision is carried out through review, discussion and provision of advice to ensure that the recommendations on audit findings by KAP and BPK have been followed up by the Board of Directors;
 - Supervision of the implementation of the 2022 PT PLN (Persero) audit by KAP includes: Company Financial Statements, Company TJSL Financial Reports, Company performance and compliance and other reports in accordance with work agreements/contracts;
 - In the case of findings containing criminal acts that result in harm to the company, the Board of Commissioners together with the relevant Committee monitors the settlement with SPI, Accounting Division, Compliance Division, Legal Division and other related Divisions
- f. Supervision of the Accounting Policy System and Preparation of Financial Statements
- Ensuring that the process of preparing the financial statements of each entity and the consolidated statements are in accordance with the Indonesian Accounting Standards (SAI) used by the Company;
 - Ensuring the reliability of software and information technology used for the preparation of financial reports and their consolidation, including the implementation of tax administration obligations with the Directorate General of Taxes.
- g. Supervision of the Company's Quality and Service Policy
- Ensuring consistent implementation of the Company's Quality and Service Policy;



- Mendorong Direksi untuk terus melanjutkan digitalisasi kanal pelayanan pelanggan guna meningkatkan mutu pelayanan pelanggan termasuk di antaranya peningkatan *enhancement* PLN Mobile serta peningkatan pelayanan pelanggan, khususnya keandalan sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi.
 - Mendorong Direksi untuk terus memberikan perhatian pada program *Anti Black Out*.
- h. Pengawasan atas Tingkat Kepatuhan Perseroan
- Dalam hal penyusunan Peraturan Direksi terkait pengelolaan *Whistle-Blower System* (WBS), Dewan Komisaris memberikan arahan agar dilakukan kerjasama dengan KPK dan Kejaksaan terkait dengan pembuatan Peraturan Direksi terkait pengelolaan WBS;
 - Memastikan Divisi Kepatuhan sebagai pengelola WBS membangun/meningkatkan kemampuan untuk menganalisis pengaduan WBS, *review analytic database, searching & surfing* media sosial/internet;
 - Dalam hal penguatan kemampuan Divisi Kepatuhan & SPI, personel di Divisi Kepatuhan didorong untuk memiliki kualifikasi *certified ISO-37001 Lead Implementer* dan sejumlah personel di SPI memiliki kualifikasi *certified ISO-37001 Lead Auditor*;
 - Melakukan pertemuan secara reguler dengan Divisi Kepatuhan guna mengkaji aktivitas audit kepatuhan yang telah dilaksanakan, rekomendasinya dan pembahasan realisasi tindak lanjut atas temuan audit kepatuhan kurun waktu sebelumnya.
- i. Pengawasan atas Laporan Manajemen, Realisasi Kontrak Manajemen dan KPI Direktorat
- Melakukan penelaahan atas Laporan Manajemen dan Realisasi KPI triwulanan dan tahunan guna memastikan akurasi dan keandalan data/informasi yang disajikan dalam Laporan Manajemen tersebut;
- Encouraging the Board of Directors to continue digitizing customer service channels in order to improve the quality of customer service, including in including increasing PLN Mobile enhancements and improving customer service, especially the reliability of generation, transmission and distribution systems.
 - Encourage the Board of Directors to continue to pay attention to the Anti Black Out.
- h. Supervision of the Company's Compliance Level
- In terms of drafting the Board of Directors Regulations related to the management of the Whistleblowing System, the Board of Commissioners has provided directions for collaboration with the Corruption Eradication Commission and the Attorney General's Office regarding the drafting of the Board of Directors Regulations regarding the WBS management;
 - Ensuring that the Compliance Division as the WBS manager builds/improves the ability to analyze WBS complaints, review analytic databases, search & surf social media/internet;
 - In strengthening the capabilities of the Compliance Division & SPI, the Compliance Division personnel are encouraged to be certified with ISO-37001 Lead Implementer qualifications and SPI personnel have been certified with ISO-37001 Lead Auditor qualifications;
 - Holding regular meetings with the Compliance Division to review the compliance audit activities that have been carried out, recommendations and discuss the realization of follow-up actions on the previous compliance audit findings.
- i. Supervision of Management Reports, Realization of Management Contracts, and Directorate KPIs
- Reviewing the Management Reports and KPI Realization quarterly and annually to ensure the accuracy and reliability of the data/information presented in the Management Report;

- Melakukan pengawasan jalannya RKAP 2022 melalui *review* dan pemberian pendapat dan saran-saran perbaikan atas Laporan Manajemen Triwulanan serta pembahasan kinerja tahun berjalan di rapat konsultasi Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Melakukan pembahasan dan pengawasan capaian KPI 2022 melalui *review*, pemberian pendapat dan saran-saran perbaikan.
- j. Pengawasan atas Pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan
- Melakukan telaahan atas analisis risiko yang dilakukan Direksi terutama yang terkait dengan permintaan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris atas rencana tindakan Direksi tertentu (aksi korporasi) dengan mengkaji apakah analisis risiko yang dilakukan telah memadai sesuai ketentuan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan;
 - Melakukan telaahan atas risiko dengan level ekstrem, sangat tinggi dan tinggi serta melakukan *monitoring* terhadap mitigasi yang dilakukan serta memberikan saran-saran atas risiko yang mungkin belum teridentifikasi;
 - Mengarahkan Direksi untuk *me-review* dan menata kembali implementasi manajemen risiko yang sedang berjalan sesuai dengan standar ISO 31000 yang diadopsi;
 - Mengarahkan Direksi untuk memperbarui profil risiko beserta mitigasinya sehubungan dengan berbagai perubahan lingkungan yang aktual terjadi dan arah ke depan (antara lain: penurunan pertumbuhan konsumsi listrik, pandemi Covid-19 dan perkembangan penanganannya, kelebihan daya, tuntutan yang semakin kuat atas energi listrik hijau atau bersih, perkembangan teknologi baterai dan kendaraan listrik);
 - Mengarahkan Direksi untuk memperkuat dan memperluas jangkauan kewenangan satuan kerja organisasi yang menangani risiko sehingga seluruh proses bisnis telah mengimplementasikan manajemen risiko sesuai dengan lingkungannya masing-masing secara tepat dan efisien.
- Supervising the implementation of the 2022 RKAP through reviewing and providing opinions and suggestions for improvements to the Quarterly Management Report as well as discussing the current year's performance at consultative meetings of the Board of Commissioners and Directors;
 - Discussing and supervising KPI 2022 achievements through reviews, providing opinions and suggestions for improvement.
- j. Supervision of the Implementation of the Company's Risk Management
- Reviewing the risk analysis carried out by the Board of Directors, especially those related to requests for recommendations or approval from the Board of Commissioners for certain Board of Directors action plans (corporate actions) by reviewing whether the risk analysis carried out is adequate in accordance with risk management provisions within the Company;
 - Reviewing risks with extreme, very high and high levels and monitor the mitigation carried out and provide suggestions for risks that may not have been identified;
 - Directing the Board of Directors to review and rearrange the implementation of ongoing risk management in accordance with the adopted ISO 31000 standard;
 - Directing the Board of Directors to update the risk profile along with its mitigation in relation to various environmental changes that are actually happening and future directions (among others: reduced growth in electricity consumption, the Covid-19 pandemic and developments in handling it, excess power, increasingly strong demands for green or clean electricity, developments in battery technology and electric vehicles);
 - Directing the Board of Directors to strengthen and expand the range of authority of the organizational work unit that handles risk so that all business processes have implemented risk management according to their respective scopes in an accurate and efficient manner.



k. Pengawasan atas Pengembangan Organisasi dan SDM

- Pengawasan dilaksanakan untuk menilai efektivitas organisasi dan tata kerja, antara lain: efektivitas implementasi struktur organisasi dan pengelolaan jabatan strategis serta manajemen SDM. Pengawasan dilakukan melalui pembahasan dan pemberian pendapat/persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Direksi terkait struktur organisasi, pengisian jabatan satu tingkat di bawah Direksi, Direksi anak perusahaan, Sekretaris Perusahaan dan Kepala SPI;
- Mengarahkan kebijakan-kebijakan Direksi yang dapat memperkuat integritas, perilaku efisien, dan soliditas karyawan dalam rangka melaksanakan tugas yang dibebankan perusahaan;
- Dalam hal perubahan Struktur Organisasi PT PLN (Persero) dan pelaksanaan transformasi PLN, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk secara konsisten melaporkan capaian implementasi organisasi baru secara berkala (triwulanan), termasuk kendala yang dihadapi serta mendorong penyelesaian ketentuan-ketentuan pendukung demi terimplementasinya struktur organisasi baru dan segera dapat berfungsi sebagai *strategic enabler* yang efektif, selaras dengan kebutuhan strategi transformasi (*structure follow the strategy*) dengan pengisian posisi kunci, penguatan SDM yang berbasis kompetensi dan fungsional, mekanisme komunikasi dan koordinasi antar unit yang tepat;
- Mengarahkan fungsi *talent pool* yang saat ini berjalan agar lebih ditingkatkan peran dan jangkauannya mengacu pada sasaran strategis Kementerian BUMN dan KPI yang telah ditetapkan;
- Terkait rancangan sistem promosi, Dewan Komisaris mendorong untuk dilaksanakannya asesmen level BoD-2 guna penyusunan *Talent Pool* untuk calon BoD-1 dan asesmen level BoD-3 guna penyusunan *Talent Pool* untuk calon BoD-2.

k. Supervision of HC and Organizational Development

- Supervision is carried out to assess the effectiveness of the organization and work procedures, including: the effectiveness of the implementation of the organizational structure and management of strategic positions and HR management. Supervision is carried out through discussion and giving the opinion/approval of the Board of Commissioners on the proposal of the Board of Directors regarding the organizational structure, filling one-level positions at under the Board of Directors, Directors of subsidiary companies, Corporate Secretary and Head of SPI;
- Directing the policies of the Board of Directors that can strengthen the integrity, efficient behavior and solidity of employees in order to carry out the duties assigned by the Company;
- In terms of changes to the Organizational Structure of PT PLN (Persero) and the implementation of the PLN transformation, the Board of Commissioners requests the Board of Directors to consistently report on the achievements of the implementation of the new organization on a regular basis (quarterly), including the obstacles encountered and encourage the completion of supporting provisions for the implementation of the structure new organization and immediately able to function as an effective strategic enabler, in line with the needs of the transformation strategy (*structure follow the strategy*) by filling in key positions, strengthening competency-based and functional human capital, proper communication and coordination mechanisms between units;
- Directing the talent pool function that is currently running so that its role and reach are further enhanced by referring to the strategic objectives of the Ministry of SOEs and KPIs that have been set;
- Regarding the promotion system design, the Board of Commissioners encourages the implementation of a BoD-2 level assessment to prepare a Talent Pool for BoD-1 candidates and a BoD-3 level assessment to prepare a Talent Pool for BoD-2 candidates.

- Mengawasi implementasi jalur kepakaran, *Set Up HC System & Penguatan Budaya Organisasi* dan mengevaluasi efektivitasnya.
- I. Pengawasan atas Rencana dan Implementasi Teknologi Informasi
- Mengawasi rencana dan implementasi Teknologi Implementasi telah sesuai dengan ITMP 2021-2024 yang telah diselaraskan dengan program Transformasi Digital PLN yang tertuang dalam RJPP 2020 - 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;
 - Memastikan pengelolaan *service management* telah dilakukan untuk memastikan keandalan layanan-layanan TI yang telah beroperasi sesuai dengan target *downtime* yang telah ditentukan untuk menjamin proses bisnis PLN berjalan lancar serta mendorong realisasi kebutuhan *interfacing* dan integrasi data SAP dengan sistem Kementerian BUMN telah sesuai;
 - Mendorong Manajemen untuk menyelesaikan program *Big Data* dan EDM (*Enterprise Data Management*) lengkap dengan *dashboard* yang dibutuhkan sebagai *Single source of truth (SSOT)* untuk pelaporan maupun keperluan *business data analysis*.
- m. Pengawasan atas Kebijakan Pengadaan
- Melakukan telaah dan mengawasi jalannya kebijakan Pengadaan telah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Memberikan saran-saran perbaikan dalam tata laksana pengadaan termasuk kebijakan, struktur organisasi, SOP, *database vendor*, dan lain-lain.
- n. Pengawasan atas Perubahan Lingkungan Bisnis
- Melakukan telaahan atas isu-isu terkini tentang perubahan ekonomi makro, lingkungan bisnis dan permasalahan perseroan yang berdampak pada usaha dan capaian kinerja perseroan;
 - Secara berkala, Dewan Komisaris dengan Direksi melaksanakan Rapat Konsultasi yang membahas seluruh perkembangan dan perubahan dalam Perseroan.
- Supervising the implementation of the expertise path, *Set Up HC System & Organizational Culture Strengthening* and evaluate its effectiveness.
- I. Supervision of Information Technology Plans and Implementation
- Supervising the plans and implementation of Implementation Technology in accordance with ITMP 2021-2024 which has been aligned with the PLN Digital Transformation program as stipulated in the RJPP 2020 - 2024 in accordance with the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/2013 concerning Guidelines for Information Technology Development at State-Owned Enterprises;
 - Ensuring that *service management* has been carried out to ensure the reliability of IT services that have been operating according to predetermined downtime targets to ensure PLN's business processes run smoothly and to encourage the realization of the need for interfacing and integration of SAP data in accordance with the Ministry of SOEs systems;
 - Encouraging the Management to complete the Big Data and EDM (*Enterprise Data Management*) programs with the dashboards needed as a Single source of truth (SSOT) for reporting and business needs data analysis.
- m. Supervision of Procurement Policy
- Reviewing and supervising the implementation of the Procurement policy according to the applicable provisions;
 - Providing suggestions for improvements in procurement management including policies, organizational structures, SOPs, vendor databases, and others.
- n. Supervision of Changes in the Business Environment
- Reviewing the latest issues concerning changes in the macro economy, business environment and company problems that have an impact on the company's business and performance achievements;
 - Periodically, the Board of Commissioners and the Board of Directors hold Consultation Meetings which discuss all developments and changes in the Company.



3. Pengawasan atas Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi

- a. Dalam pengelolaan Anak dan Cucu Perusahaan, Dewan Komisaris memastikan seluruh entitas di bawah PT PLN (Persero) memberi *value* dan kontribusi positif bagi korporasi antara lain dengan melakukan transformasi Anak Perusahaan sebagai bagian transformasi PLN dalam rangka meningkatkan kemandirian Anak Perusahaan, penyelesaian penugasan yang ditetapkan dalam KPI Anak Perusahaan, integrasi manajemen risiko, audit internal dan kepatuhan antara PLN dan Anak Perusahaan sesuai dengan peraturan OJK maupun kementerian terkait;
- b. Mendorong *Risk Management Framework* dan program audit yang telah disusun agar dapat lebih dievaluasi sehingga dapat diimplementasikan secara terintegrasi di Kantor Pusat, Anak Perusahaan, seluruh Unit Operasional, Sub Direktorat Manajemen Risiko, dan SPI.

4. Pengawasan atas Direksi

- a. Dalam melakukan pengawasan atas Direksi, Dewan Komisaris memberikan nasihat dan arahan kepada Direksi berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi dalam kunjungan kerja yang dilakukan serta dari penyampaian surat-surat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan;
- b. Pemberian Nasihat dan Arahan dari Dewan Komisaris disampaikan melalui surat tertulis maupun pemberian arahan secara langsung melalui penyelenggaraan Rapat Konsultasi atau Rapat dengan Direksi terkait;
- c. Penilaian kinerja Direksi secara kolegal dilakukan melalui pembahasan dan pemberian pendapat atas Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang juga mencantumkan realisasi KPI Triwulanan dan Tahunan;
- d. Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual, dalam melakukan penilaian Kinerja Direksi secara Individual dilakukan pembahasan melalui Rapat Internal Dewan Komisaris dan disampaikan secara tertulis kepada RUPS.

3. Supervision of Subsidiaries and Affiliates

- a. In managing the Company's Subsidiaries and Second-Tier Subsidiaries, the Board of Commissioners ensures that all entities in under PT PLN (Persero) providing value and positive contribution to corporations, among others by transforming Subsidiaries as part of PLN's transformation in order to increase the independence of Subsidiaries, completing assignments specified in KPI Subsidiaries, integrating risk management, internal audit and compliance between PLN and Subsidiaries in accordance with OJK regulations and related ministries;
- b. Encouraging the Risk Management Framework and audit program that has been prepared so that it can be further evaluated so that it can be implemented in an integrated manner at the Head Office, Subsidiaries, all Operational Units, Risk Management Sub-Directorates, and SPI.

4. Supervision of the Board of Directors

- a. In supervising the Board of Directors, the Board of Commissioners provides advice and directions to the Board of Directors based on information obtained from evaluation results during working visits and from delivering letters addressed to the Board of Commissioners, both from internal and external parties of the Company;
- b. Providing Advice and Directions from the Board of Commissioners is conveyed through written letters or direct directives through holding Consultation Meetings or Meetings with the relevant Directors;
- c. Assessment of the performance of the Board of Directors collegially is carried out through discussion and giving opinions on the Quarterly and Annual Management Reports which also include the realization of the Quarterly and Annual KPIs;
- d. The Board of Commissioners has conducted an individual assessment of the performance of the Directors. In assessing the performance of the Directors individually, it is discussed through the Board of Commissioners' Internal Meeting and submitted in writing to the GMS.

5. Pengawasan atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)

- Memastikan perusahaan telah menerapkan seluruh unsur-unsur Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*);
- Mengawasi implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016, termasuk mengingatkan Direksi agar SMAP selalu menjadi *Corporate Value* Perseroan;
- Mengawasi tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat melalui berbagai saluran pengaduan atau *whistleblower* antara lain: surat yang diterima langsung oleh Dewan Komisaris, Kementerian BUMN, dan KPK;
- Dewan Komisaris melaksanakan *review* dan perbaikan atas implementasi GCG dalam lingkup Dewan Komisaris.

PRODUK PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2022

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan pendapat terkait rencana tindakan yang memerlukan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris atas permintaan Direksi. Atas hal tersebut, Dewan Komisaris menghasilkan sejumlah produk pengawasan berupa :

- Persetujuan atau Tanggapan tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi,
- Tanggapan tertulis Dewan Komisaris kepada RUPS,
- Nasihat atau Arahan Dewan Komisaris kepada Direksi, dan
- Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris kepada RUPS.

Untuk tahun 2022, Dewan Komisaris menghasilkan sejumlah produk pengawasan sebagai berikut:

1. Persetujuan atau Tanggapan tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi

- Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris atas Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) dan Material;
- Perolehan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri;

5. Supervision of Good Corporate Governance (GCG)

- Ensuring that the Company has implemented all the elements of Good Corporate Governance (GCG);
- Supervising the implementation of the SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP), including reminding the Board of Directors that SMAP will always be the Company's Corporate Value;
- Supervising the follow-up of complaints from the public through various complaint channels or whistleblowers, including: letters received directly by the Board of Commissioners, the Ministry of SOEs, and the KPK;
- The Board of Commissioners carries out reviews and improvements to the implementation of GCG within the scope of the Board of Commissioners.

BOARD OF COMMISSIONERS SUPERVISION IN 2022

In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners provides recommendations and opinions regarding action plans that require recommendation or approval from the Board of Commissioners in accordance with the Articles of Association. The supervisory products of the Board of Commissioners can be in the form of:

- The Board of Commissioners written approval or response to the Board of Directors,
- The Board of Commissioners written response to the GMS.
- Advice or Directions from the Board of Commissioners to the Board of Directors, and
- the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners to the GMS.

The supervisory products of the Board of Commissioners in 2022 were as follows:

1. Board of Commissioners Written Approval to the Board of Directors:

- Approval and Recommendation of the Board of Commissioners on the Write-off and Transfer of Non-operating Fixed Assets (ATTB) and Materials;
- Obtaining loans both from within and outside the country;



- Tanggapan Tertulis Atas Penyampaian Usulan Kandidat Pemangku Jabatan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI) PT PLN (Persero);
- Tanggapan Tertulis atas Pemberitahuan Mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris Pada Anak Perusahaan PT PLN (Persero);
- Perolehan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri dengan nilai di atas kewenangan;
- Usulan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB);
- Tanggapan atas Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021;
- Tanggapan atas Usulan Rekomendasi Penunjukan KAP Audit Tahun Buku 2022;
- Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Tahun Buku 2022;
- RKAP tahun 2023;
- Penambahan modal dasar dan modal disetor anak perusahaan;
- Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Pembentukan anak perusahaan/perusahaan patungan/akuisisi perusahaan.
- Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT PLN (Persero) Tahun 2021 (*Unaudited*) dan Tahun 2021 (*Audited*);
- Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT PLN (Persero) Triwulan I, II, dan III Tahun 2022;
- Laporan Pencapaian KPI Triwulanan dan Tahunan tahun 2022.
- Written Response to the Proposal of the Candidates of Corporate Secretary and the Head of the Internal Audit Unit (KSPI) of PT PLN (Persero);
- Written Response to Notification Regarding Dismissal and Appointment of Directors and Board of Commissioners at the Subsidiary PT PLN (Persero);
- Obtaining loans both from within and outside the country with a value above the authority;
- Proposal for Write-Off and Transfer of Non-Operating Fixed Assets (ATTB);
- Responses to the Proposed Use of the Company's Net Profit for the 2021 Fiscal Year;
- Responses to the Proposed Recommendation for Appointment of KAP Audit for the 2022 Fiscal Year;
- Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit Consolidated Financial Statements and PT PLN (Persero) Partnership and Community Development Program for the 2021 Fiscal Year;
- 2023 RKAP;
- Additional authorized and paid-up capital of subsidiaries;
- Written Response of the Board of Commissioners on the establishment of a subsidiary/joint venture/ company acquisition.
- Written Response of the Board of Commissioners on the Management Reports of PT PLN (Persero) for 2021 (*Unaudited*) and 2021 (*Audited*);
- Written Response of the Board of Commissioners on the Management Report of PT PLN (Persero) Quarter I, II, and III of 2022;
- Quarterly and Annual KPI Achievement Report of 2022.

2. Tanggapan tertulis Dewan Komisaris kepada RUPS

- Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris tahun 2022;
- Usulan Penetapan Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2022 dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021;
- Rekomendasi Penggunaan Laba Bersih PT PLN (Persero) 2021;
- Rekomendasi penunjukan KAP untuk Audit PT PLN (Persero) Tahun 2022;
- Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan RKAP Tahun 2023.

2. Board of Commissioners Written Response to the GMS

- Work Plan and KPI of the Board of Commissioners in 2022;
- Proposal of Salary for the Board of Directors and Honorarium for the Board of Commissioners in 2022 and Tantiem for the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2021;
- Recommendation on the Use of Net Profits of PT PLN (Persero) in 2022 ;
- Recommendations on the appointment of KAP to Audit PT PLN (Persero) in 2022;
- Board of Commissioners response to the 2023 RKAP Proposal.

3. Nasihat atau Arahan Dewan Komisaris kepada Direksi

- Nasihat atau Arahan Dewan Komisaris disampaikan melalui surat Persetujuan atau Tanggapan kepada Direksi serta disampaikan secara langsung dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
- Pada tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat konsultasi dengan seluruh Direksi dan 21 (dua puluh satu) kali rapat Dewan Komisaris dengan Direksi tertentu.

4. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan kepada RUPS

Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan realisasi KPI Dewan Komisaris tahun 2022.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris yang termuat dalam Kontrak Manajemen antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Kontrak manajemen tahun 2022 telah ditetapkan dan disetujui pemegang saham dalam RUPS RKAP 2022 tanggal 27 Januari 2022. KPI Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Kementerian BUMN.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dewan Komisaris Tahun 2022

No.	Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Sasaran / Target			
			Sasaran / Target	Bobot / Value	Realisasi / Realization	Bobot / Value
Dewan Komisaris dengan Direksi / Board of Commissioners with the Board of Directors			54		54	
1	Review dan tanggapan Rencana Perusahaan. / Review and response on the Company's plan	Pembahasan, saran dan atau persetujuan atas RKAP Tahun Buku 2022, KPI Tahun 2022 dan RJP (Review), Revisi RKAP Tahun Buku 2022 jika ada. / Discussion, suggestions and or approval of the 2021 Fiscal Year RKAP, 2021 KPI and RJP (Review), Revision of 2021 Fiscal Year RKAP if any	2 kali setahun / 2 times a year	4	<ul style="list-style-type: none"> Tanggapan atas RKAP tahun 2022 / Response to the 2022 RKAP Tanggapan atas Draft Usulan RKAP Tahun 2023 / Response to the 2023 RKAP Proposal Draft 4 Kali Rapat Dewan Komisaris perihal KPI Direktorat / 4 Meetings of the Board of Commissioners regarding Directorate KPIs 	4
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah draft diperoleh dari Direksi dengan data yang akurat. / Timeliness of response after draft is obtained from the Board of Directors with accurate data	14 hari kerja / 14 work days	2	3 hari kerja / 3 work days	2

3. Board of Commissioners Advice or Directions to the Board of Directors

- Advice or Directions from the Board of Commissioners are conveyed through letters of Approval or Responses to the Directors and delivered directly at the Board of Commissioners Meeting with the Board of Directors.
- In 2022, the Board of Commissioners has held 12 (twelve) consultation meetings with all Directors and 21 (twenty one) Board of Commissioners meetings with certain Directors.

4. Annual Board of Commissioners Supervision Report to the GMS

Report on the implementation of the Board of Commissioners supervisory duties and realization of the Board of Commissioners KPIs in 2022.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out by the Company's shareholders based on the achievement of the Board of Commissioners Key Performance Indicators (KPI) contained in the Management Contract between the Board of Commissioners and the Shareholders. The 2022 management contract has been determined and approved by shareholders in the 2022 RKAP GMS dated January 27, 2022. The Board of Commissioners KPI is prepared by taking into account the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, based on the provisions in the Company's Articles of Association and the regulations of the Ministry of SOEs.

Achievement of the Board of Commissioners Key Performance Indicators in 2022



No.	Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Sasaran / Target			
			Sasaran / Target	Bobot / Value	Realisasi / Realization	Bobot / Value
2	Pembahasan mengenai progres Transformasi PLN / Discussion on the progress of PLN's Transformation	Pembahasan progres 25 <i>breakthrough</i> yang akan dijalankan selama tahun 2022 / Discussion on the progress of 25 breakthroughs carried out during 2022	12 kali setahun / 12 times a year	12	Lebih dari 12 kali pembahasan / More than 12 discussions	12
3	Review dan tanggapan kinerja perusahaan. perusahaan / Company performance reviews and responses	Pembahasan, tanggapan dan persetujuan atas : / Discussion, response and approval of: <ul style="list-style-type: none"> • LM dan KPI PLN Triwulanan Thn 2021, / 2021 Quarterly PLN LM and KPIs • LM dan KPI PLN Tahun 2022, / 2022 PLN LM and KPIs • KPI Direktorat Tahun 2022. / 2022 Directorate KPI 	5 kali setahun / 5 times a year	9	<ul style="list-style-type: none"> • LM <i>Unaudited</i> 2021 • LM <i>Audited</i> 2021 • LM TW I 2022 • LM TW II 2022 • LM TW III 2022 • 4 Kali Rapat Dewan Komisaris perihal KPI Direktorat / 4 Meetings of the Board of Commissioners regarding Directorate KPIs 	9
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah draft diperoleh dari Direksi dengan data yang akurat. / Timeliness of response after draft is obtained from the Board of Directors with accurate data	14 hari kerja / 14 work days	2	7 hari kerja / 7 work days	2
4	Review tindak lanjut hasil /temuan audit internal /eksternal. / Follow-up review of internal/external audit results/findings	Pembahasan dan tanggapan/saran atas laporan pemeriksaan internal dan monitoring tindak lanjut temuan auditor eksternal / Discussion and feedback/suggestions on internal audit reports and follow-up monitoring of external auditor findings	6 kali setahun / 6 times a year	9	6 kali pembahasan / 6 times	9
5	Memberi tanggapan tertulis / persetujuan / nasehat / saran / teguran kepada Direksi. / Provision of written response/ approval/advice/suggestion/reprimand to the Board of Directors.	Pembahasan dan pemberian tanggapan tertulis /persetujuan atas permintaan Direksi setelah data lengkap. / Discussion and provision of written responses/approvals at the request of the Board of Directors after complete data	Usulan Direksi ditanggapi / Board of Directors proposals responded	10	100% usulan Direksi ditanggapi / 100% of Board of Directors suggestions responded	10
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah usulan diperoleh dari Direksi dengan data dan dokumen pendukung yang lengkap. / Timeliness of response after the proposal is obtained from the Board of Directors with complete supporting data and documents	14 hari kerja / 14 work days	1.5	11 hari kerja / 11 Working days	1.5
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan perihal Penghapusan AT/ATTB / Timely response regarding the Write-Off of AT/ ATTB	30 hari kerja / 30 working days	0.5	21 hari kerja / 21 working days	0.5
		Pemberian nasehat/saran/teguran. / Provision of advices/suggestions	4 kali / 4 times	4	Lebih dari 4 kali (seluruh nasihat dan saran terdapat dalam arahan Rapat dan arahan pada surat tanggapan) / More than 4 times (all advice and suggestions are contained in the Meeting directives and directives in the response letter)	4

No.	Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Sasaran / Target			
			Sasaran / Target	Bobot / Value	Realisasi / Realization	Bobot / Value
Dewan Komisaris dengan RUPS / Board of Commissioners with the GMS			20			19
6	Menyampaikan program kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahunan. / Submission of Board of Commissioner Annual work program and KPI	Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2022. / Board of Commissioners Work Plan and KPI in 2021	1 berkas / 1 file	3	1 berkas / 1 file	3
		Ketepatan waktu penyampaian. / Timeliness of Submission	sebelum RUPS / before the GMS	2	20 hari kerja sebelum RUPS / 20 working days before the GMS	2
7	Menyampaikan pendapat/usul Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham/ RUPS. / Submission of opinions/ suggestions of the Board of Commissioners to the Shareholders/GMS	Pendapat atas: / Opinion on <ul style="list-style-type: none"> RJP / Review RJP jika ada, / RJP/RJP Review, if any RKAP Tahun Buku 2022, / 2022 Fiscal Year RKAP LM & KPI PLN Tahun 2021 / 202 PLN LM & KPI. 	4 pendapat atau usulan setahun / 4 opinions or suggestions a year	4	<ul style="list-style-type: none"> Tanggapan atas RKAP 2022 / Responses to the 2022 RKAP Tanggapan atas LM Unaudited / Response to LM Unaudited Tanggapan atas LM Audited / Responses to LM Audited Tanggapan atas LM TW I, II dan III tahun 2022 / Responses to LM of Q1, Q2, Q3 of 2022 Pembahasan KPI Korporat / Discussion of Corporate KPIs 	4
		Ketepatan waktu penyampaian: / Delivery timeliness of: <ul style="list-style-type: none"> Usulan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2022, / Proposal for the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the 2022 Fiscal Year. Usulan Remunerasi tahun Buku 2022 Usulan Penggunaan Laba Bersih tahun buku 2022 / Proposal for the Use of Net Profit for the 2022 fiscal year 	setelah surat dari Direksi diterima / after the letter from the Board of Directors is received	2	3 hari kerja / 3 working days	2
8	Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris. / Submission of reports on supervisory duties of the Board of Commissioners	Laporan terdiri atas: / Report of <ul style="list-style-type: none"> Laporan Progres KPI Semesteran Tahun 2022, / 2022 Biannual KPI Progress Laporan Pengawasan dan KPI Tahun 2021. / KPI and Monitoring Report of 2022 	2 laporan setahun / 2 reports a year	4	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Progres KPI Semesteran Tahun 2022, / 2022 Biannual KPI Progress Laporan Pengawasan dan KPI Tahun 2021. / KPI and Monitoring Report of 2022 	4
		Ketepatan waktu penyampaian: / Timely submission of: <ul style="list-style-type: none"> Laporan KPI Semesteran Tahun 2022. / 2022 Biannual KPI Progress 	30 hr kerja sejak berakhirnya periode / 30 working days from the end of the period	1	sebelum 30 hari kerja sejak periode berakhir / before 30 working days from the end of the period	1
		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengawasan Tahun 2021 / 2021 Supervisory Report 	Sebelum RUPS / Before the GMS	2	7 hari kerja sebelum RUPS / 7 working days before the GMS	2
9	RUPS / GMS	Kehadiran Komisaris kuorum pada: / Board of Commissioner Attendance Quorum at <ul style="list-style-type: none"> RUPS RKAP Tahun Buku 2022, RUPS Tahunan/LPT tahun 2021. / 2022 Fiscal Year GMS, 2021 LPT/Annual GMS 	2 kali setahun / 2 times a year	2	Korum pada RUPS RKAP atau LPT / Quorum at the RKAP or LPT GMS	2

No.	Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Sasaran / Target			
			Sasaran / Target	Bobot / Value	Realisasi / Realization	Bobot / Value
Internal Dewan Komisaris / Board of Commissioners Internal			26		26	
10	Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meeting.	Rapat Dewan Komisaris terdiri dari: Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi / Board of Commissioners meetings consist of: Internal Board of Commissioners meetings and Board of Commissioners and Directors meetings	36 kali setahun / 36 times a year	15	62 kali rapat / 62 meetings	20
11	Rapat Komite / Committee Meeting	Rapat Komite Dewan Komisaris / Board of Commissioners Committee Meeting	72 kali, terdiri dari : 24 kali Rapat KA 24 kali Rapat KMR 24 kali Rapat KNR/ 72 meetings consisting of 24 KA Meetings, 24 KMR Meetings, and 24 KNR Meetings	5	<ul style="list-style-type: none"> Rapat KA : 113 kali / 113 KA Meetings Rapat KMR : 69 kali / 69 KMR Meetings Rapat KNR : 90 kali / 90 KNR Meetings Jumlah : 272 kali / Total: 272 meetings	10
12	Pengenalan/ Induksi/ peningkatan kompetensi. / Introduction/ Induction/ competency improvement.	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti seminar/workshop di luar negeri maupun dalam negeri / Participation in seminars/workshops overseas and domestically Induksi jika ada Komisaris baru. / Induction for new Commissioner. 	2 kali setahun / 2 times a year	2	<ul style="list-style-type: none"> 5 kali workshop / 5 workshops 3 kali induksi / 3 inductions 	2
13.	Pengelolaan GCG / GCG Management	Penunjukan assessor GCG Tahun 2022. / Appointment of the 2022 GCG assessor	1 kali setahun / Once in a year	1	1 kali penunjukan assessor GCG / 1 time appointment of GCG assessor	1
		Pencapaian skor asesmen GCG aspek Dewan Komisaris Tahun 2022 / Achievement of the 2022 GCG Assessment Score for the Board of Commissioners aspects	Capaian Skor minimum 95% / Attain a minimum score of 95%	3	95,18%	3
Jumlah / Total			100		110	

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Perseroan menerapkan prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Sesuai peraturan tersebut, remunerasi Dewan Komisaris terbagi atas honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama dan Komisaris lainnya sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.

BOARD OF COMMISSIONERS REMUNERATION

Procedure for the Board of Commissioners Remuneration Determination

The Company implements the procedure for determining remuneration for the Board of Commissioners based on the Minister of SOE Regulation No PER-12/MBU/11/2020 regarding the Fifth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State Owned Enterprises. In accordance with the regulation, the Board of Commissioners consists of: President Commissioner honorarium of 45% of the salary of the President Director, the Vice President Commissioner honorarium of 42.5% of the salary of the President Director, and other Commissioners honorarium of 90% of the honorarium of the President Commissioner.

Struktur dan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris

Besaran remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan sesuai kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan besaran remunerasi tersebut dilakukan menggunakan faktor penyesuaian industri dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis secara terukur (*benchmark*), kondisi persaingan usaha (*competitiveness*), kompleksitas usaha, serta kelangkaan sumber daya manusia.

Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan, dan tantiem dengan perincian sebagai berikut:

Board of Commissioners Remuneration Structure and Amount

The amount of remuneration of the Board of Commissioners is adjusted to the Company's financial conditions and capabilities and may not conflict with the laws and regulations. The determination of the remuneration amount applies the Industry Adjustment Factor that takes into account similar industrial sectors that are measured (*benchmarks*), conditions of business competition (*competitiveness*), business complexity, and scarcity of human capital.

The Board of Commissioners remuneration consists of honorarium, allowances, and tantiem with the following details:

No.	Jenis Remunerasi / Type of Remuneration	Komisaris Utama / President Commissioner	Komisaris / Commissioner	Keterangan / Description
1	Honorarium (per bulan) / Honorarium (monthly)	Rp200.250.000,-	Rp180.225.000,-	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama: 45% gaji Direktur Utama / President Commissioner: 45% of President Director's Salary Wakil Komisaris Utama: 42,5% gaji Direktur Utama / Vice President Commissioner: 42.5% of President Director's Salary Komisaris: 90% honorarium Komisaris Utama / Commissioner: 90% of President Commissioner's honorarium
Tunjangan / Allowances				
	Tunjangan hari raya keagamaan / Religious holiday allowance	1 (satu) bulan honorarium / 1 (one) month of honorarium		
2	Tunjangan transportasi / Transportation allowance	20% dari Honorarium / 20% of Honorarium		
	Asuransi purna jabatan / Retirement Insurance	Premi yang ditanggung 25% dari honorarium dalam satu tahun / Premium coverage of 25% of the honorarium in one year		
Fasilitas / Facilities				
	Fasilitas kesehatan / Healthcare facility	1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 tahun / 1 wife and 3 children at maximum 25 years old		
3	Fasilitas bantuan hukum / Legal aid facility	Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / Given in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations		
	Fasilitas keanggotaan klub bisnis / Business club membership facility	1 (satu) keanggotaan klub bisnis / 1 (one) business club membership		
	Pakaian Seragam / Uniform	2 (dua) stel setiap 1 (satu) tahun / 2 (two) sets every 1 (one) year		

Secara keseluruhan, remunerasi Dewan Komisaris yang diterima untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The total remuneration for the Board of Commissioners received in 2022 is as follows:

Jenis Remunerasi / Type of Remuneration	Jumlah / Total	Besaran (juta Rp) / Amount (million Rp)
Remunerasi / Remuneration		
Honorarium	13 Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022) dan 1 Sekretaris Dewan Komisaris / 13 Commissioners (including those who have retired in 2022) and 1 Secretary to the Board of Commissioners	Rp22.678.380.164,-

Jenis Remunerasi / Type of Remuneration	Jumlah / Total	Besaran (juta Rp) / Amount (million Rp)
Tantiem Netto / Net Tantiem	15 Komisaris (termasuk mantan Komisaris tahun buku 2021) dan 1 Sekretaris Dewan Komisaris / 15 Commissioners (including former Commissioners for the 2021 fiscal year) and 1 Secretary to the Board of Commissioners	Rp56.787.657.887,-
Tunjangan / Allowances		
Tunjangan Transportasi / Transportation Allowance	13 Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022) dan 1 Sekretaris Dewan Komisaris / 13 Commissioners (including those who have retired in 2022) and 1 Secretary to the Board of Commissioners	Rp4.547.259.033,-
Tunjangan Hari Raya / Religious Holiday Allowance	11 Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022) dan 1 Sekretaris Dewan Komisaris / 11 Commissioners (including those who have retired in 2022) and 1 Secretary to the Board of Commissioners	Rp2.065.595.000,-
Tanggungans PPh Pasal 21 / Income Tax Article 21 Insurance	18 Komisaris (termasuk mantan Komisaris tahun buku 2021) dan 1 Sekretaris Dewan Komisaris / 18 Commissioners (including former Commissioners for the 2021 fiscal year) and 1 Secretary to the Board of Commissioners	Rp34.371.358.702,-
Tanggungans BPJS / BPJS Insurance	13 Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022) dan 1 Sekretaris Dewan Komisaris / 13 Commissioners (including those who have retired in 2022) and 1 Secretary to the Board of Commissioners	Rp1.229.706.084,-
Jumlah / Total		Rp121.679.956.870,-

Pengungkapan Opsi Saham yang Diterima Dewan Komisaris

Perseroan bukan merupakan perusahaan publik. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (*Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program*).

Disclosure of Stock Option Received by the Board of Commissioners

Considering that PLN is not a public company, PLN does not have an Employee Stock Option Plan/Management Stock Option Plan.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

Anggota Dewan Komisaris PLN tidak memiliki hubungan afiliasi baik berupa hubungan keuangan maupun kekeluargaan baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham. Uraian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

DISCLOSURE OF AFFILIATION BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR SHAREHOLDERS

Members of the Board of Commissioners of PLN have no affiliation in the form of financial or familial relations with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or shareholders as described in the following table:

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris Tahun 2022

Disclosure of Affiliation of the Board of Commissioners in 2022

Nama / Name	Hubungan Keluarga dengan / Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan / Financial Relation with					
	Anggota Dewan Komisaris / Board of Commissioners Members		Anggota Direksi / Board of Directors Members		Pemegang Saham / Shareholders		Anggota Dewan Komisaris / Board of Commissioners Members		Anggota Direksi / Board of Directors Members		Pemegang Saham / Shareholders	
	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Amien Sunaryadi	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Suhasil Nazara	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Dadan Kusdiana	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Rida Mulyana*	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Susiwijono Moegiarso	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Mohamad Ikhsan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Dudy Purwagandhi	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Nama / Name	Hubungan Keluarga dengan / Family Relationship with						Hubungan Keuangan dengan / Financial Relation with					
	Anggota Dewan Komisaris / Board of Commissioners Members		Anggota Direksi / Board of Directors Members		Pemegang Saham / Shareholders		Anggota Dewan Komisaris / Board of Commissioners Members		Anggota Direksi / Board of Directors Members		Pemegang Saham / Shareholders	
	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Tedi Bharata	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ardan Adiperdana*	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Eko Sulisty	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Heru Winarko*	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Charles Sitorus	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Alex Iskandar Munaf	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

*) Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 31 Desember 2022

*) No longer serving as Commissioner of the Company as of December 31, 2022

KEBERAGAMAN PADA KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Keberagaman pada komposisi Dewan Komisaris dapat dilihat dari keberagaman latar belakang keahlian dan pengalaman yang mencakup berbagai bidang seperti ekonomi/keuangan, hukum, dan teknik kelistrikan, dengan penjabaran sebagai berikut:

DIVERSITY IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

The diversity of the Board of Commissioners composition can be seen from the diverse expertise and experience covering various fields, such as economics/finance, law, and electrical engineering as shown in the following table:

Keberagaman pada Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2022

Diversity in the Board of Commissioners Composition in 2022

Nama / Name	Jenis Kelamin / Gender	Usia (per 31 Des 2022) / Age (as of Dec 31, 2022)	Pendidikan / Education			Keahlian / Expertise						
			S1 / Bachelor's Degree	S2 / Master's Degree	S3 / Doctoral Degree	Ekonomi/Keuangan / Economics/Finance	Hukum / Law	Ketenagalistrikan / Electricity	Minyak dan Gas / Oil and Gas	Energi Baru Terbarukan / Renewable Energy	Lainnya / Others	
Amien Sunaryadi	Laki-laki / Male	62		✓		✓			✓			
Suahasil Nazara	Laki-laki / Male	52				✓	✓					
Dadan Kusdiana	Laki-laki / Male	54				✓		✓	✓	✓		
Rida Mulyana*	Laki-laki / Male	59		✓				✓	✓	✓		
Susiwijono Moegiarso	Laki-laki / Male	52		✓		✓						
Mohamad Ikhsan	Laki-laki / Male	58				✓	✓					
Dudy Purwagandhi	Laki-laki / Male	52	✓					✓				✓
Tedi Bharata	Laki-laki / Male	39		✓								✓
Ardan Adiperdana*	Laki-laki / Male	62				✓	✓					✓
Eko Sulisty	Laki-laki / Male	54	✓									✓
Heru Winarko*	Laki-laki / Male	60	✓					✓				
Charles Sitorus	Laki-laki / Male	56				✓						✓
Alex Iskandar Munaf	Laki-laki / Male	62				✓	✓					

*) Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 31 Desember 2022

*) No longer serving as Commissioner of the Company as of December 31, 2022

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris sebagai organ pendukung yang memimpin dan melaksanakan fungsi sekretariat Dewan Komisaris, mencakup peran sebagai

BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGANS

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan The Board of Commissioners appoints the Secretary to the Board of Commissioners as a supporting organ that manages and carries out secretariat functions of the Board of



penghubung (*liaison officer*) antara Dewan Komisaris dengan pihak lain. Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris dapat berasal dari lingkup eksternal Perseroan, dengan masa jabatan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur di dalam *Board Manual* PLN, dengan perincian sebagai berikut:

1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris yang perincian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
2. Mengoordinasi penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perseroan.
3. Menyusun dan memfinalisasi laporan dan dokumen yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
4. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi Rapat serta pembuatan risalah Rapat, serta tugas – tugas lain yang terkait.
5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasikan kegiatan Komite Dewan Komisaris.
6. Menyusun dan mengadministrasikan risalah Rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan Rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Menetapkan prosedur teknis Kunjungan Kerja Dewan Komisaris.
8. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
9. Menjadi penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
10. Dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris dan wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut.

Commissioners, including acting as a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties. The Secretary to the Board of Commissioners can be an external party of the Company, with a term of office determined by the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities

The Secretary to the Board of Commissioners has the duties and responsibilities set out in the PLN Board Manual with the following details:

1. Lead and organize activities in the secretariat of the Board of Commissioners with details of duties are further regulated by the Board of Commissioners.
2. Coordinate the provision of information required by the Board of Commissioners, such as periodic reports from Board of Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual Reports, SPI Audit Results Reports) as well as other reports/information regarding the Company).
3. Prepare and finalize mandatory reports and documents of the Board of Commissioners, including the Board of Commissioners Supervisory Report and the Board of Commissioners Work Plan and Budget.
4. Organize meetings of the Board of Commissioners, prepare and send invitations, deliver meeting materials and prepare minutes of meetings, and other related tasks.
5. Coordinate and facilitate the activities of the Board of Commissioners committees.
6. Compile and administer minutes of meeting and other Board of Commissioners' documents and distribute meeting decisions to the interested parties.
7. Set technical procedures for the Board of Commissioners Work Visit.
8. Ensure that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations and implements GCG principles.
9. Serve as a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.
10. Have the access to the records or information on employees, funds, assets, and other resources belonging to the Company related to the implementation of their duties based on the written letter of assignment from the Board of Commissioners with the obligation to report the assignment result in writing.

11. Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan tugasnya.

11. Secretary and Secretariat Staff to Board of Commissioners are required to maintain the confidentiality of documents, data, and information of the Company, both from internal and external parties and only used for the benefit of their duties.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of Secretary to the Board of Commissioners



ACHMAD TAUFIK

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to the Board of Commissioners

Usia / Age	46 tahun / 46 years old
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Graduate, The Federal Bureau Investigation/FBI National Academy, USA. S1 Akuntansi, Universitas Indonesia / Bachelor's Degree in Accounting, Universitas Indonesia
Sertifikasi Profesi / Professional Certifications	<ul style="list-style-type: none"> Akuntan Beregister / Registered Accountant Certified Fraud Examiner (CFE) Certified ISO 31000 Risk Management
Dasar Hukum Penunjukan / Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 16/SK/DK-PLN/2020 tanggal 6 Mei 2020 / Decree of the Board of Commissioners No. 16/SK/DK-PLN/2020 dated May 6, 2020
Pengalaman Kerja / Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> Senior Specialist pada Deputy Informasi dan Data – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) / Senior Specialist under the Deputy of Information and Data – Corruption Eradication Commission (KPK) Associate Auditor pada Kantor Akuntan Publik AAJ-RSM / Associate Auditor at Public Accounting Firm AAJ-RSM Direktur Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jakarta / Executive Director of the Indonesian Institute of Accountant (IAI) Jakarta
Jabatan Rangkap / Concurrent Position	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / Has no concurrent positions in accordance with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Board of Commissioners/Supervisory Board Supporting Organs of SOEs
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / Education and Training for Competence Improvement	<ul style="list-style-type: none"> National Conference IKAI 2022 "Leveraging the Roles of Audit Committee" oleh IKAI tanggal 26-27 Januari 2022 di Jakarta / National Conference IKAI 2022 "Leveraging the Roles of Audit Committee" by IKAI on January 26-27, 2022 in Jakarta Program Sertifikasi "Certification in Audit Committee Practices (CACP) Batch 26 oleh IKAI tanggal 21-22 Juni 2022 di Jakarta / Certification Program "Certification in Audit Committee Practices (CACP)" Batch 26 by IKAI on June 21-22, 2022 in Jakarta Seminar Nasional Internal Audit Tahun 2022 oleh YPAI tanggal 30 November – 1 Desember 2022 di Bali / 2022 Internal Audit National Seminar by YPAI on November 30 – December 1, 2022 in Bali

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola PLN, Dewan Komisaris membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan dan pemberi nasihat atas pengelolaan Perseroan. Terkait hal tersebut,

AUDIT COMMITTEE

Pursuant to the PLN GCG Code, the Board of Commissioners established a committee to assist the implementation of its duties of the Board of Commissioners as a supervisory organ to supervise and give advice on the management of

Dewan Komisaris berkewajiban untuk membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lain apabila diperlukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait komite.

Anggota komite terdiri dari pejabat Dewan Komisaris serta personil lain di luar Dewan Komisaris. Anggota komite yang tidak berasal dari Dewan Komisaris merupakan orang dengan memiliki kompetensi dan pengalaman dalam satu atau lebih area keilmuan tertentu, yang secara khusus ditunjuk untuk dapat membantu Dewan Komisaris.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dengan dasar hukum sebagai berikut:

- Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
- Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 01/SK/DK-PLN/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Komite Audit PT PLN (Persero).

Piagam Komite Audit

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Piagam Komite Audit. Secara mendasar, Piagam tersebut telah memuat ketentuan terkait tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Komite Audit. Perseroan melakukan pemutakhiran terhadap Piagam Komite Audit secara berkala, dengan pemutakhiran terkini dilakukan melalui pengesahan pada 28 September 2022.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit 2022, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan atas Informasi Keuangan

- a. Melakukan telaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PLN, seperti Laporan Keuangan, Laporan Manajemen dan informasi keuangan lainnya.
- b. Pengawasan yang ditujukan terhadap Laporan Keuangan adalah mengenai kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan laporan keuangan telah disusun melalui proses pengendalian internal yang memadai.

the Company. In this regard, the Board of Commissioners is obliged to establish an Audit Committee and may form other committees if necessary while taking into account the applicable laws and regulations on the committee.

Committee members consist of the Board of Commissioners members and other personnel outside the Board of Commissioners. Committee members who are not the Board of Commissioners members possess the competence and experience in one or more fields, who are specifically appointed to assist the Board of Commissioners.

Basis for Establishment of the Audit Committee

The establishment of Audit Committee by the Board of Commissioners refers to the following legal basis:

- Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on Supporting Organs for the Board of Commissioners,
- Regulation of Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 on Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee, and
- Decree of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) No. 01/SK/DK-PLN/2015 dated January 15, 2015 on Audit Committee of PT PLN (Persero).

Audit Committee Charter

The Audit Committee carries out its duties and responsibilities according to the Audit Committee Charter. Fundamentally, the Charter contains provisions related to the duties, responsibilities and obligations of the Audit Committee. The Company regularly updates the Audit Committee Charter, with the most recent update being carried out on September 28, 2022.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Based on the provisions in the Audit Committee Charter, the Audit Committee has following duties and responsibilities:

1. Supervision of Financial Information

- a. Reviewing the financial information to be issued by PLN, such as Financial Statements, Management Reports and other financial information.
- b. Supervision aimed at Financial Statements is regarding compliance with applicable Financial Accounting Standards and financial reports have been prepared through an adequate internal control process.

- c. Meminta SPI memaparkan yang sudah dilakukan terkait ICOFR, Terutama *update* sejak ICOFR dilakukan tahun 2014.
- d. *Review* dilakukan juga terhadap *draft* laporan keuangan tahunan dan interim (termasuk CALK), laporan tahunan dan *press release* yang terkait kinerja keuangan.
- e. Memastikan bahwa penghapusan piutang, penghapusan persediaan dan penghapusan aktiva tidak beroperasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Tugas-tugas khusus lainnya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan Atas Pengendalian Internal

- a. Membantu Dewan Komisaris dengan melakukan telaah untuk menilai keandalan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal PLN.
- b. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
- d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
- e. Memastikan bahwa seluruh hasil observasi ditindaklanjuti secara tuntas dan merupakan upaya untuk memperoleh informasi mengenai kecukupan sistem pengendalian internal.
- f. Komite Audit melakukan pengawasan atas efektivitas pengendalian internal pada organisasi, evaluasi atas pengendalian yang sudah dirancang serta implemetasinya, dan berkoordinasi dengan auditor internal yang melaksanakan fungsi *assurance*.
- g. Mengevaluasi pengendalian internal yang diterapkan manajemen termasuk melakukan evaluasi atas *Risk and Control Self-Assessment* yang dibuat manajemen dan pengujian SPI terkait pengendalian internal.
- h. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

3. Pengawasan Atas Fungsi Audit Internal

- a. Melakukan *review* terhadap Piagam Audit Internal dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- b. Memastikan SPI melakukan *review* secara berkala atas Piagam Audit Internal sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

- c. Requiring SPI to explain what has been done regarding ICOFR, especially updates since ICOFR was carried out in 2014.
- d. Reviews are also carried out on draft annual and interim financial reports (including CALK), annual reports and press releases related to financial performance.
- e. Ensuring that write-off of accounts receivable, write-off of inventories and write-off of non-operating assets have been carried out in accordance with the applicable laws and regulations.
- f. Other special duties in accordance with applicable laws and regulations.

2. Supervision of Internal Control

- a. Assisting the Board of Commissioners by conducting reviews to assess the reliability and effectiveness of the PLN Internal Control System.
- b. Maintaining the confidentiality of documents, data and information of Issuers or Public Companies.
- c. Providing recommendations regarding the improvement of the internal control system and its implementation.
- d. Ensuring a satisfactory evaluation procedure for all information issued by the Company.
- e. Ensuring that all observation results are thoroughly followed up and is an effort to obtain information regarding the adequacy of the internal control system.
- f. The Audit Committee supervises the effectiveness of internal controls in the organization, evaluates the controls that have been designed and implemented, and coordinates with the internal auditors who carry out the assurance function.
- g. Evaluating the internal controls implemented by management including evaluating the Risk and Control Self-Assessments made by management and SPI testing related to internal controls.
- h. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.

3. Supervision of the Internal Audit Function

- a. Reviewing the Internal Audit Charter and the Annual Audit Work Program (PKPT).
- b. Ensuring that SPI regularly reviews the Internal Audit Charter according to the company's needs.



- c. Melakukan telaah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PLN.
 - d. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - e. Agar pengawasan berjalan efektif, Komite Audit harus melaksanakan garis pelaporan secara berkala dari Internal Audit.
 - f. Komite Audit agar melakukan pengawasan kerangka kerja kompetensi audit internal, terkait profesionalisme, kinerja, lingkungan, kepemimpinan dan komunikasi.
 - g. Memastikan SPI melaksanakan audit/*review* terkait manajemen risiko dengan tujuan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.
 - h. Penekanan pada melakukan pengawasan terhadap risiko keuangan dan pelaporan keuangan serta pengendalian terkait.
- c. Conducting a review to ensure the effectiveness of the implementation of activities and audit results carried out by the PLN Internal Control Unit (SPI).
 - d. Reviewing the implementation of inspections by the internal auditors and overseeing the planning, implementation and follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditors.
 - e. In order for supervision to run effectively, the Audit Committee must carry out regular reporting lines from the Internal Audit.
 - f. The Audit Committee to supervise the internal audit competency framework, related to professionalism, performance, environment, leadership, and communication.
 - g. Ensuring SPI carries out audits/*reviews* related to risk management with the aim of evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and corporate governance processes.
 - h. Enforcing supervision of financial risk and financial reporting and related controls.

4. Pengawasan Atas Audit Eksternal

- a. Melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan PLN dan memberikan rekomendasi penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris. Pemilihan dengan mempertimbangkan Independensi AP, KAP dan orang dalam KAP, ruang lingkup, imbalan jasa, metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP serta evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.
- b. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- c. Membantu Dewan Komisaris dan melakukan telaah untuk memastikan efektivitas kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik.
- d. Memastikan kompetensi Kantor Akuntan Publik dengan memahami perencanaan auditnya, mengawasi pelaksanaan audit dan mengevaluasi hasil kerja pada saat finalisasi audit.

4. Supervision of External Audit

- a. Appointing Public Accounting Firm (KAP) to audit PLN's Financial Statements and provide recommendations for the KAP appointment to the Board of Commissioners. The appointment takes into account the independence of the AP, KAP and KAP insiders, the scope, fees, methodology, audit techniques and facilities used by the KAP as well as the evaluation of the implementation of annual historical financial audit services by AP and KAP in the previous period.
- b. Providing an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant for the services provided.
- c. Assisting the Board of Commissioners and conduct reviews to ensure the effectiveness of audit activities and results carried out by the Public Accounting Firm.
- d. Ensuring the competence of the Public Accounting Firm by understanding the audit plan, supervising the implementation of the audit and evaluating work results at the time of finalizing the audit.

5. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

- a. Melakukan telaah atas ketaatan PLN terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada para pemangku kepentingan.
- b. Komite Audit bertanggungjawab melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan, rancangan strategi, kerangka kerja termasuk pelaksanaannya.
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Memastikan bahwa perusahaan melaksanakan aktivitasnya dengan mematuhi seluruh kebijakan perusahaan, sistem operasi prosedur yang sudah ditetapkan dan peraturan-peraturan yang berlaku baik internal maupun eksternal.
- e. Memahami dan mengevaluasi kebijakan kerangka kerja sistem kepatuhan.
- f. Melakukan evaluasi implementasi kepatuhan, kecukupan sumber daya dan fasilitas yang sesuai dengan peraturan.
- g. Melakukan evaluasi kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan.
- h. Melakukan telaahan dan memberi saran kepada Dewan Komisaris apabila ada potensi benturan kepentingan.

6. Melakukan Telaah Atas Pengaduan Yang Berkaitan Dengan PLN

- a. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Menelaah dan mengawasi tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran pakta integritas atau berindikasi tindak pidana korupsi.
- c. Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.

7. Melaksanakan Tugas-Tugas Lainnya Yang Diberikan Oleh Dewan Komisaris

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.

5. Supervision of Regulatory Compliance

- a. Reviewing PLN's compliance with laws and regulations, especially those related to reporting to stakeholders.
- b. The Audit Committee is responsible for supervising compliance with laws and regulations, strategy design, framework including implementation.
- c. Reviewing compliance with laws and regulations related to the activities of Issuers or Public Companies.
- d. Ensuring that the company carries out its activities by complying with all company policies, operating system procedures that have been established and regulations that apply both internally and externally.
- e. Understanding and evaluating compliance system framework policies.
- f. Evaluating the implementation of compliance, adequacy of resources and facilities in accordance with regulations.
- g. Evaluating the clarity of functions, implementation and accountability of company organs.
- h. Conducting reviews and provide advice to the Board of Commissioners if there is a potential conflict of interest.

6. Review of Complaints Related to PLN

- a. Reviewing complaints related to the accounting and financial reporting processes of Issuers or Public Companies.
- b. Reviewing and supervising the follow-up of complaints related to integrity pact violations or indications of corruption.
- c. Improving aspects of corporate governance through Stakeholder Participation.

7. Performing Other Duties from the Board of Commissioners

In addition to the aforementioned duties, the Board of Commissioners may provide other assignments to the Audit Committee as stipulated in the audit committee charter.

Komposisi Komite Audit

Susunan Komite Audit PLN terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua, 2 (dua) orang Komisaris Independen sebagai anggota, dan 3 (tiga) anggota dari pihak luar yang independen dengan keahlian dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, dengan 1 (satu) anggota di antaranya menjabat sampai dengan tanggal 30 September 2022. Masing-masing anggota Komite Audit tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Composition of the Audit Committee

The composition of the PLN Audit Committee consists of 1 (one) Independent Commissioner as head, 2 (two) Independent Commissioners as members, and 3 (three) members from independent external parties with expertise and experience in accordance with the required qualifications. 1 (one) member served until September 30, 2022. Each member of the Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

Komposisi Anggota Komite Audit Tahun 2022

Composition of Audit Committee Members in 2022

No.	Anggota / Member	Inisial / Initial	Posisi di Komite / Position in the Committee	Jabatan di PLN / Position in PLN	Periode / Term of Office
1.	Amien Sunaryadi	AS	Ketua merangkap Anggota / Head cum Member	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner cum Independent Commissioner	
2.	Heru Winarko*	HW	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris / The same as their terms as Commissioners
3.	Alex Iskandar Munaf	AIM	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner	
4.	Charles Sitorus	CS	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner	
5.	Krisna Simbaputra**	KS	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Non-Commissioner Committee Member	21 September 2020-30 September 2022 / September 21, 2020 - September 30, 2022
6.	Nizam Burhanuddin	NB	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Non-Commissioner Committee Member	<ul style="list-style-type: none"> April 2020-7 April 2022 / April, 2020-April 7, 2022 8 April 2022-7 April 2024 / April 8, 2020-April 7, 2024
7.	Tomi Parisianto Wibowo	TPW	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Non-Commissioner Committee Member	1 Desember 2021-30 November 2024 / December 1, 2021-November 30, 2024

* : selesai menjabat mulai 16 Juni 2022

* : No longer serving since June 16, 2022

** : selesai menjabat mulai 30 September 2022

** : No longer serving since September 30, 2022

Profil Anggota Komite Audit

Profil anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris telah disajikan di dalam bab Profil Perusahaan, subagian Dewan Komisaris. Adapun, profil anggota Komite Audit yang merupakan non-anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Profile of Audit Committee Members

Profiles of members of the Audit Committee who are also members of the Board of Commissioners have been presented in the Company Profile chapter, the Board of Commissioners subsection. Meanwhile, the profiles of members of the Audit Committee who are non-members of the Board of Commissioners are as follows:

**NIZAM BURHANUDDIN****Anggota Komite Audit (Non-Komisaris)****Audit Committee Member (Non-Commissioner)**

Usia / Age	64 tahun / 64 years old
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • S3 Ilmu Hukum, Universiti Kebangsaan Malaysia (2011) / Doctoral Degree in Law, Universiti Kebangsaan Malaysia (2011) • S2 Ilmu Hukum, Universitas Indonesia (1997) / Master's Degree in Law, Universitas Indonesia (1997) • S1 Hukum Perdata, Universitas Muhamadiyah Jakarta (1986) / Bachelor's Degree in Civil Law, Universitas Muhamadiyah Jakarta (1986)
Sertifikasi Profesi / Professional Certifications	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Legal Audit – Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Hukum Indonesia / Certified Legal Auditor – Indonesian Certification Institute of Legal Auditor • Certified ISO 31000 Risk Management
Dasar Hukum Penunjukan / Basis of Appointment	<ul style="list-style-type: none"> • SK Dewan Komisaris No. 6/SK/DK-PLN/2019 tanggal 27 Maret 2019 / Decree of the Board of Commissioners No. 6/SK/DK-PLN/2019 dated March 27, 2019 • SK Dewan Komisaris No. 4/SK/DK-PLN/2020 tanggal 19 Maret 2020 / Decree of the Board of Commissioners No. 4/SK/DK-PLN/2020 dated March 19, 2020
Pengalaman Kerja / Professional Experience	Pegawai negeri sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) (1979-2019) dengan jabatan terakhir Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (2010-2019) / Civil service employee at The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) (1979-2019) with the last position as Head of Main Directorate of Legal Development of State Financial Audit (2010-2019)
Jabatan Rangkap / Concurrent Position	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / Has no concurrent positions in accordance with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Board of Commissioners/Supervisory Board Supporting Organs of SOEs
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / Education and Training for Competence Improvement	<ul style="list-style-type: none"> • Konferensi Nasional Komite Audit Pertama di Indonesia "Leveraging the Roles of Audit Committee" yang diselenggarakan oleh Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) (26-27 Januari 2022) / First National Audit Committee Conference in Indonesia "Leveraging the Roles of Audit Committee" organized by the Indonesian Audit Committee Association (IKAI) (January 26-27, 2022) • Sosialisasi Pengguna Jasa Profesi Akuntan Publik "Mengetahui Akuntan Publik dan Mitigasi Laporan Auditor Independen Palsu" yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (29 September 2022) / Dissemination to Users of Public Accounting Professional Services "Knowing Public Accountants and Mitigating False Independent Auditor Reports" organized by the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI) (September 29, 2022)


TOMI PARISIANTO WIBOWO
Anggota Komite Audit (Non-Komisaris)
Audit Committee Member (Non-Commissioner)

Usia / Age	49 tahun / 49 years old
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Educational Background	Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1997) / Bachelor's Degree Economics, Faculty of Economics, Universitas Indonesia (1997)
Sertifikasi Profesi / Professional Certifications	Certification in Audit Committee Practices (CACP)-
Dasar Hukum Penunjukan / Basis of Appointment	Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Non Komisaris pada 1 November 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 25/SK/DK-PLN/2021 / Appointed as a Non-Commissioner Audit Committee Member on November 1, 2021 based on the Decree of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) No. 25/SK/DK-PLN/2021
Pengalaman Kerja / Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> • SEVP Finance, Accounting & Strategic Performance, PT Bank Victoria International Tbk (2018-2021) • EVP Head of Finance and Accounting, PT Bank QNB Indonesia Tbk (2013-2018) • Group Head of Financial Control and Corporate Planning, PT Bank ICB Bumiputera Tbk (2011-2013) • Senior Manager, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan / PricewaterhouseCoopers (2006-2011) • Associate Manager, KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja / Ernst & Young (1997-2006) / Ernst & Young (1997-2006)
Jabatan Rangkap / Concurrent Position	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / Has no concurrent positions in accordance with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Board of Commissioners/Supervisory Boar Supporting Organs of SOEs
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / Education and Training for Competence Improvement	<ul style="list-style-type: none"> • Konferensi Nasional Komite Audit Pertama di Indonesia "Leveraging the Roles of Audit Committee" yang diselenggarakan oleh Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) (26-27 Januari 2022) / First National Audit Committee Conference in Indonesia "Leveraging the Roles of Audit Committee" organized by the Indonesian Audit Committee Association (IKAI) (January 26-27, 2022) • Sosialisasi Pengguna Jasa Profesi Akuntan Publik "Mengetahui Akuntan Publik dan Mitigasi Laporan Auditor Independen Palsu" yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (29 September 2022) / Dissemination to Users of Public Accounting Professional Services "Knowing Public Accountants and Mitigating False Independent Auditor Reports" organized by the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI) (September 29, 2022)

**R. KRISNA SIMBAPUTRA*****Anggota Komite Audit (Non-Komisaris)****Audit Committee Member (Non-Commissioner)**

Usia / Age	63 tahun / 63 years old
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • S2 Information Management, Sheffield University, UK (1995) / Master's Degree in Information Management, Sheffield University, UK (1995) • S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1985) / Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1985)
Sertifikasi Profesi / Professional Certifications	<ul style="list-style-type: none"> • Certified ISO 31000 Risk Management • Certification in Audit Committee Practices (CACP)
Dasar Hukum Penunjukan / Basis of Appointment	<ul style="list-style-type: none"> • SK Dewan Komisaris No. 16/SK/DK-PLN/2017 tanggal 20 September 2017 / Decree of the Board of Commissioners No. 16/SK/DK-PLN/2017 dated September 20, 2017 • SK Dewan Komisaris No. 19/SK/DK-PLN/2018 tanggal 23 Oktober 2018 / Decree of the Board of Commissioners No. 19/SK/DK-PLN/2018 dated October 23, 2018 • SK Dewan Komisaris No. 26/SK/DK-PLN/2020 tanggal 21 September 2020 / Decree of the Board of Commissioners No. 26/SK/DK-PLN/2020 dated September 21, 2020
Pengalaman Kerja / Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan (2013-2017) / Head of Risk Management & Compliance Division (2013-2017) • General Manager PLN Wilayah Sumatra Utara (2011-2013) / General Manager of PLN Region for North Sumatra (2011-2013) • General Manager PLN Wilayah Sumatra Barat (2010-2011) / General Manager of PLN Region for West Sumatra (2010-2011) • Manager Bidang PLN Distribusi Jawa Timur (2009) / Manager of PLN Distribution for East Java (2009) • Manager Bidang Operasi PLN P3B Jawa Bali (2008-2009) / Manager of Operations of PLN P3B for Java Bali (2008-2009) • Manager Bidang Perencanaan PLN Wilayah Kalimantan Timur (2006-2008) / Manager of Planning of PLN Region for East Kalimantan (2006-2008) • Manajer PLN Area Cimahi (2000-2006) / Manager of PLN Area for Cimahi (2000-2006)
Jabatan Rangkap / Concurrent Position	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / Has no concurrent positions in accordance with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Board of Commissioners/Supervisory Board Supporting Organs of SOEs

*) Selesai menjabat pada 30 September 2022

*) Served until September 30, 2022



Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / Education and Training for Competence Improvement

- *Indonesian Governance, Risk, and Compliance (IGRC) National Conference 2022* Seri I "Prospek dan Tantangan Sinergi Penerapan Tata kelola (Governance), Risiko (Risk), dan Kepatuhan (Compliance) pada Organisasi Bisnis, Non Bisnis, dan Publik" yang diselenggarakan oleh LPEP-FEB-UNAIR (17 Februari 2022) / Indonesian Governance, Risk, and Compliance (IGRC) National Conference 2022 Series I "Prospects and Challenges of Synergy Implementation of Governance, Risk, and Compliance in Business, Non-Business, and Public Organizations" organized by LPEP-FEB-UNAIR (February 17, 2022)
- "Triple Regulatory Compliance: GRC, ESG and Risk Allocation" yang diselenggarakan oleh Doctoral Program in Accounting FEB UNPAD (16 April 2022) / "Triple Regulatory Compliance: GRC, ESG and risk Allocation" organized by the Doctoral Program in Accounting FEB UNPAD (April 16, 2022)
- "Legal Course: Contract Drafting" yang diselenggarakan oleh Bidang Penelitian Forum dan Kajian Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (16-17 April 2022) / "Legal Course: Contract Drafting" organized by the Legal Research Forum and Research (FKPH) of Faculty of Law, Universitas Brawijaya (April, 16-17 2022)
- Kuliah Umum "Communicating Key Audit Matters" yang diselenggarakan oleh Magister Akuntansi Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Indonesia (22 April 2022) / Public Lecture "Communicating Key Audit Matters" organized by the Master of Accounting Professional Education, Universitas Indonesia (April 22, 2022)
- Webinar "Building a Positive Safety & Health Culture Through ABA Implementation" yang diselenggarakan oleh Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (26 April 2022) / Webinar "Building a Positive Safety & health culture Through ABA Implementation" organized by the Institute of Applied Psychology, Universitas Indonesia (April 26, 2022)
- Sosialisasi Pengguna Jasa Profesi Akuntan Publik "Mengenal Akuntan Publik dan Mitigasi Laporan Auditor Independen Palsu" yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (29 September 2022) / Dissemination to Users of Public Accounting Professional Services "Knowing Public Accountants and Mitigating False Independent Auditor Reports" organized by the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI) (September 29, 2022)

*) Selesai menjabat pada 30 September 2022

*) No longer serving since September 30, 2022

Pernyataan Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite berkewajiban untuk bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mencakup dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris. Atas dasar tersebut, sesuai peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Perseroan menerapkan kriteria Komite Audit yang antara lain menyangkut pemenuhan independensi. Pemenuhan kriteria independensi diharapkan dapat menjaga pelaksanaan tugas anggota Komite Audit dari adanya benturan kepentingan, sehingga masing-masing anggota dapat bersikap objektif.

Pengukuran terhadap Independensi Komite Audit dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagaimana yang dimaksud, dengan perincian sebagai berikut:

Audit Committee Independence Statement

All members of the Committee must be professional in carrying out their duties and responsibilities, including giving opinions to the Board of Commissioners. Thus, the Company applies the Audit Committee criteria pursuant to the Regulation of the State Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 which include the fulfillment of independence criteria. Fulfillment of the independence criteria is expected to safeguard the implementation of the duties of the Audit Committee members from conflicts of interest, so that each member can act objectively.

Measurement of the Independence of the Audit Committee is carried out with reference to the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Audit Committee Work. All members of the Audit Committee have met the independence criteria referred to, with the following details:

Pengungkapan Independensi Anggota Komite Audit Tahun 2022

Disclosure of Independence of Audit Committee Members in 2022

Kriteria Independensi / Independence Criteria	AS	HW	AIM	CS	TPW	KS	NB
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PLN dalam 6 bulan terakhir. / He/she is not an employee in a public accounting firm, legal firm, public assessment office, or any other parties providing insurance services, non-insurance services, assessment services, and/or other consulting services to PLN within the last 6 months.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kriteria Independensi / Independence Criteria	AS	HW	AIM	CS	TPW	KS	NB
Bukan merupakan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan PLN dalam 6 bulan terakhir. / He/she is not a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise PLN's activities within the last 6 months.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama PLN. / He/she does not have any affiliations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Majority Shareholder of PLN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN. / He/she does not have neither direct nor indirect business relationship related to PLN's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. / He/she does not serve as a party official and/or candidate/legislative member and/or a candidate of or serve as head/deputy head of local government.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait jabatan di PLN. / He/she does not have other positions that may cause a conflict of interest related to the position at PLN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kebijakan Remunerasi Komite Audit

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, remunerasi bagi anggota Komite Audit adalah berupa honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perseroan, dengan besaran pajak ditanggung oleh Perseroan. Anggota Komite Audit tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Rapat Komite Audit

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Sesuai ketentuan dalam Piagam Komite, Komite Audit memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rapat dengan agenda sesuai tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Rencana Rapat Komite Audit tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit tahun 2022.

Pada tahun 2022, Komite Audit menyelenggarakan rapat sejumlah 152 kali atau telah melampaui rencana yang sejumlah 83 kali. Keseluruhan penyelenggaraan rapat Komite Audit tersebut terdiri dari rapat internal Komite, rapat bersama Dewan Komisaris, rapat anggota Komite non-Komisaris, serta rapat dengan manajemen Perseroan dan auditor eksternal.

Audit Committee Remuneration Policy

In accordance with the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, remuneration for members of the Audit Committee is in the form of a maximum honorarium of 20% of the salary of the Company's President Director, with the amount of tax borne by the Company. Members of the Audit Committee are not allowed to receive income other than the honorarium.

Audit Committee meeting

Policy and Implementation of Audit Committee Meeting

In accordance with Committee Charter, the Audit Committee is obliged to hold meeting with agenda according to duties and responsibilities of the Audit Committee. Audit Committee Meeting Plan is stated in 2022 Audit Committee Work Plan.

The Audit Committee held 152 meetings, exceeded the planned 83 meetings. The overall meetings of the Audit Committee consisted of internal meeting, meeting with the Board of Commissioners, non-commissioner committee member meeting, as well as meeting with the management and external auditors.



Pelaksanaan Rapat Komite Audit Tahun 2022

Implementation of Audit Committee Meetings in 2022

No	Jenis Rapat / Type of Meeting	Jumlah / Total
1	Rapat dengan Dewan Komisaris / Meeting with the Board of Commissioners	28 kali / 28 times
2	Rapat internal dengan Komite Audit / Audit Committee Internal Meeting	39 kali / 39 times
3	Rapat dengan Komite lain / Meeting with other Committees	4 kali / 4 times
4	Rapat dengan Direktur, SEVP, EVP Terkait / Meeting with Related Directors, SEVP, EVP	56 kali / 56 times
5	Rapat dengan SPI, BPK, BPKP, KAP / Meeting with SPI, BPK, BPKP, KAP	25 kali / 25 times
Jumlah Rapat / Total Meetings		152 kali / 152 times

Frekuensi Kehadiran Anggota Komite Audit

Frekuensi kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam keseluruhan penyelenggaraan rapat Komite di tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Frequency of Attendance of Audit Committee Members

The frequency of attendance of each member of the Audit Committee in the overall implementation of the Committee meetings in 2022 can be seen in the following table:

Frekuensi Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat Tahun 2022

Frequency of Attendance of Audit Committee Members in the 2022 Meetings

No.	Nama Anggota / Member Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) / Attendance Percentage (%)
1	Amien Sunaryadi	Ketua dan Anggota / Head and Member	104	96	92,3
2	Heru Winarko*	Anggota / Member	51	51	100
3	Alex Iskandar Munaf	Anggota / Member	103	101	98,1
4	Charles Sitorus**	Anggota / Member	46	44	95,6
5	Krisna Simbaputra***	Anggota / Member	109	107	98,2
6	Nizam Burhanuddin	Anggota / Member	152	150	98,7
7	Tomi Parisianto	Anggota / Member	152	152	100

*) Menjabat sebagai anggota Komite Audit sampai dengan 16 Juni 2022

*) Served as a member of the Audit Committee until June 16, 2022

**) Menjabat sebagai anggota Komite Audit mulai 22 Juli 2022

**) Serving as a member of the Audit Committee from July 22, 2022

***) Menjabat sebagai anggota Komite Audit sampai dengan 30 September 2022

***) Served as a member of the Audit Committee until September 30, 2022

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2022

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dalam Piagam Komite Audit serta rencana kerja Komite Audit tahun 2022, dengan perincian sebagai berikut:

1. Melakukan *review* terhadap proses penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2022;
2. Melakukan *review* terhadap progres dan hasil akhir pekerjaan KAP sebelum disajikan dalam Laporan Keuangan;
3. Menelaah dan memberi tanggapan terhadap surat Direksi perihal permintaan persetujuan dan atau rekomendasi penghapusan ATTB dan material;
4. Melakukan *monitoring*/pengawasan aktivitas SPI;

Audit Committee Duty Implementation in 2022

The Audit Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with the provisions of the Audit Committee Charter and the 2022 Audit Committee work plan, with the following details:

1. Reviewing the process of determining the KAP to audit the Company's 2022 financial statements;
2. Reviewing the progress and final results of the work of KAP before being presented in the Financial Statements;
3. Reviewing and responding to the letter of the Board of Directors regarding the request for approval and or recommendation for the write-off of ATTB and materials;
4. Monitoring/supervising SPI's activities;

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Menelaah dan menyusun usulan tanggapan atas tanggapan atas Laporan Manajemen tahun 2021 <i>Unaudited</i> dan <i>Audited</i>; 6. Menelaah dan memberikan tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I, II dan III tahun 2022; 7. Menelaah atas usulan Hasil Penilaian Wajar Properti Investasi tahun 2021 pada PT PLN (Persero); 8. Tanggapan atas Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021; 9. Melakukan <i>review</i> dan rekomendasi terait penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar PLN; 10. Melakukan <i>review</i> dan tanggapan pembaruan Pedoman GCG dan <i>Board Manual</i> PT PLN (Persero); 11. Melakukan <i>review</i> dan tanggapan terkait penunjukan assessor independent untuk pelaksanaan penilaian GCG tahun 2022; 12. Melakukan <i>review</i> dan tanggapan terkait persetujuan usulan Peraturan Direksi Kebijakan Strategis Audit Internal PT PLN (Persero). | <ol style="list-style-type: none"> 5. Reviewing and preparing proposed responses to responses to the 2021 Unaudited and Audited Management Reports; 6. Reviewing the Management Reports Q1, Q2, and Q3 in 2022 and preparing their responses; 7. Reviewing the proposal of Results of the 2021 Investment Property Fairness Assessment at PT PLN (Persero); 8. Response to the Proposal for the Use of the Company's Net Profits for the 2021 Fiscal Year; 9. Providing reviews and recommendations regarding adjustments to Article 3 of the PLN's Articles of Association; 10. Reviewing and responding to updates on the PT PLN (Persero) GCG Code and Board Manual; 11. Reviewing and responding to the appointment of independent assessor for the implementation of GCG assessment in 2022; 12. Reviewing and responding to the approval of the proposed Board of Directors Regulations on PT PLN (Persero)'s Internal Audit Strategic Policy. |
|---|--|

Key Performance Indicators (KPI) Komite Audit

Secara berkala, Komite Audit melakukan penilaian secara *self-assessment* berdasarkan pemenuhan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators/KPI*), dengan hasil untuk tahun 2022 sebagai berikut:

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Komite Audit Tahun 2022

Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Kuantitas / Tolak Ukur / Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan / Score Achieved	
		Setahun / In a year	Bobot / Value		
1. Menyampaikan Rencana Kerja dan KPI Komite / Submission of Committee Work Plan and KPIs	Rencana Kerja dan KPI Komite Tahunan / Annual Committee Work Plan and KPI	1 paper	5	1 paper	5
	Ketepatan waktu penyampaian / Timely submission	Triwulan 1 2022 / Q1 2022	3	Triwulan 1 2022 (24 Januari 2022) / Q1 2022 (January 24, 2022)	3
2. Pembahasan mengenai progres Transformasi PLN / Discussion on the progress of the PLN Transformation	Pembahasan progres 3 <i>breakthrough</i> yang menjadi topik utama Komite Audit yang akan dijalankan selama tahun 2022 / Discussion on the progress of the 3 breakthroughs which are the main topic of the Audit Committee which carried out in 2022	3 kali setahun / 3 times a year	4	8 kali / 8 times	4
3. <i>Review</i> tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal. / Review of follow-up results/findings of internal/external audits.	Pembahasan dan tanggapan/saran atas laporan pemeriksaan internal dan monitoring tindak lanjut temuan auditor eksternal / Discussion and comments/suggestions on internal audit reports and monitoring of follow-up on external auditor findings	6 kali setahun / 6 times a year	10	19 kali / 19 times	10

Key Performance Indicators (KPI) of the Audit Committee

The Audit Committee periodically conducts self-assessments based on the fulfillment of Key Performance Indicators (KPI), with the 2022 results as follows:

Achievement of Key Performance Indicators of the Audit Committee in 2022

Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Kuantitas / Tolak Ukur / Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan / Score Achieved	
		Setahun / In a year	Bobot / Value		
4. Review dan tanggapan atas Laporan Manajemen dan KPI Direktorat / Review and response to Management Reports and Directorate KPIs	Pembahasan, saran dan atau persetujuan atas Laporan Manajemen dan KPI Direktorat dari Direksi setelah data lengkap. / Discussion, suggestions and/or approval of Management Reports and Directorate KPIs from the Board of Directors after the data is complete.	5 kali setahun / 5 times a year	10	5 kali: / 5 times: 1. LM tahun 2021 (Unaudited) / LM of 2021 (Unaudited); 2. LM Tahun 2021 (Audited) / LM of 2021 (Audited); 3. LM Triwulan I Tahun 2022 / LM of Q1 2022; 4. LM Triwulan II tahun 2022 / LM of Q2 2022; 5. LM Triwulan III tahun 2022 / LM of Q3 2022;	10
	Ketepatan waktu penyampaian tanggapan. / Timeliness of submission of responses	14 hari kerja / 14 working days	3	Rata-rata 7 hari kerja / Average of 7 working days	3
5. Review dan tanggapan atas usulan Direksi tentang usulan penghapusan AT/ATTB dan PRR 2022 / Review and response to the Board of Directors proposal to write off AT/ATTB and PRR in 2022	Pembahasan, saran dan atau persetujuan atas Usulan Penghapusan AT/ATTB dan PRR dari Direksi setelah data lengkap. / Discussion, suggestions and or approval of the Proposal for the Write Off of AT/ATTB and PRR from the Board of Directors after the data is complete.	Usulan Direksi ditanggapi / Board of Directors Suggestions responded	8	5 (Lima) Usulan Direksi ditanggapi / 5 (Five) Board of Directors Suggestions responded	8
	Ketepatan waktu penyampaian tanggapan. / Timeliness of submission of responses.	AT/ATTB: 30 hari kerja. / 30 working days. PRR: 14 hari kerja / 14 working days	3	Rata-rata 21 hari kerja (ATTB) / Average of 21 working days (ATTB)	3
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI Komite Triwulanan dan Tahunan / Submission of Quarterly and Annual Committee KPI Realization and Activity Reports	Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI Komite Triwulan dan Tahunan / Quarterly and Annual Committee KPI Realization and Activity Reports	4 kali setahun / 4 times a year	10	4 kali setahun / 4 times a year : 1. Laporan Kegiatan dan KPI KA tahun 2021; / KA Activity Report and KPI of 2021; 2. Laporan Kegiatan KA triwulan I tahun 2022; / KA Activity Report of Q1 2022 3. Laporan Kegiatan KA triwulan II tahun 2022; / KA Activity Report of Q2 2022 4. Laporan Kegiatan KA triwulan III tahun 2022. / KA Activity Report of Q3 2022	10
	Ketepatan waktu penyampaian laporan. / Timeliness of report submission.	30 hari sejak berakhirnya periode / 30 days from the end of the period	3	Rata-rata 21 hari / Average of 21 days	4
7. Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meeting	Menghadiri Rapat Dewan Komisaris. / Attending the Board of Commissioners Meeting	24 kali setahun / 24 times a year	15	28 kali / 28 times	17
8. Rapat Komite Audit / Audit Committee Meeting	Menghadiri Rapat Komite Audit / Attending the Audit Committee Internal Meeting	24 kali setahun / 24 times a year	15	30 kali / 30 times	17
9. Kunjungan Kerja ke Unit / Working Visit to Unit	Melakukan kunjungan kerja ke Unit / AP / Visiting Unit/ Subsidiaries	8 kali setahun / 8 times a year	5	14 kali / 14 times	5

Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Kuantitas / Tolak Ukur / Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan / Score Achieved	
		Setahun / In a year	Bobot / Value		
10. Pengenalan/Induksi/Peningkatan kompetensi / Introduction/ Induction/Competency improvement	Mengikuti seminar/workshop / Attending seminars/ workshops	2 kali setahun / 2 times a year	3	8 kali / 8 times	4
11. Pengelolaan GCG / GCG Management	Pencapaian skor asesmen GCG aspek Dewan Komisaris Tahun 2022 / Achievement of the 2022 GCG Assessment Score for the Board of Commissioners aspects	Minimal 95% / At least 95%	3	95,118%	3
Total			100		106

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris membentuk Komite Manajemen Risiko untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Landasan hukum pembentukan Komite Manajemen Risiko adalah Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 04/KR/DK-PLN/2015 tanggal 6 Mei 2015 serta perubahannya pada SK No. 17/SK/DK-PLN/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Komite Manajemen Risiko.

Piagam Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Komite Manajemen Risiko, yang secara mendasar telah memuat ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Komite Manajemen Risiko. Perseroan melakukan pemutakhiran terhadap Piagam Komite Manajemen Risiko secara berkala, dengan revisi terkini telah disahkan di tahun 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko, dengan perincian sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Komite;
2. Melakukan penelaahan atas manajemen risiko Perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, pengendalian intern Perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur;

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Board of Commissioners established the Risk Management Committee to assist the implementation of duties and functions of the Board of Commissioners. The legal basis of the Risk Management Committee establishment is the Decree of the Minister of SOEs No. KEP-117/M-MBU/2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises and Decree of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) No. 04/KR/DK-PLN/2015 dated May 6, 2015 and its amendments to SK No. 17/SK/DK-PLN/2015 dated May 22, 2015 on the Risk Management Committee.

Risk Management Committee Charter

The Risk Management Committee carries out its duties and responsibilities based on the Risk Management Committee Charter, which contains provisions regarding the duties, responsibilities, and obligations of the Risk Management Committee. The Company regularly updates the Risk Management Committee Charter, with the most recent revision ratified in 2021.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

The Risk Management Committee's duties and responsibilities is set in the Risk Management Committee Charter with the following details:

1. Prepare the Committee annual work plan and budget;
2. Review the Company's risk management that includes various risks encountered by the Company, risk management strategies, systems, and policies, internal control, including policies, methodologies, and infrastructure;



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan evaluasi terhadap model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut; 4. Memantau kesesuaian berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan; 5. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko perusahaan; 6. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM) dalam Perusahaan; 7. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah ditetapkan di Perusahaan; 8. Mengevaluasi hasil kajian risiko dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Direksi sebagai kelengkapan atas usulan rencana investasi/pendanaan/transaksi dan kegiatan operasional lainnya yang berdampak besar terhadap Perusahaan serta memberikan tanggapan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi tersebut; 9. Mengawasi dan memantau bahwa mitigasi risiko terhadap kegiatan investasi dan operasional Perusahaan yang berdampak besar telah dilaksanakan secara konsisten; 10. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; 11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 12. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite; 13. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas triwulanan dan Tahunan Komite kepada Dewan Komisaris. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Evaluate various risk measurement models utilized by the Company and provide recommendations for further improvements; 4. Monitor the conformity of various potential risks faced by the Company; 5. Evaluate the Company's risk management policies; 6. Coordinate the implementation and supervision of the existence and effectiveness level of each component of Enterprise Risk Management (ERM) at the Company; 7. Assess the effectiveness of each ERM component in the Company; 8. Review the risk assessment results and other documents submitted by the Board of Directors as complement to the proposed investment/funding/transaction plan and other operational activities that have significant impact on the Company, as well respond to the Board of Commissioners on the Board of Directors' proposals; 9. Supervise and monitor that the risk mitigation on the Company's investment and operational activities which have significant impact has been done consistently; 10. Identify matters that require attention of the Board of Commissioners; 11. Perform other tasks assigned by the Board of Commissioners in accordance with the prevailing laws and regulations; 12. Coordinate with the Secretary of the Board of Commissioners for smooth implementation of the Committee's duties; 13. Submit the Committee Quarterly Duty Implementation Report to the Board of Commissioners. |
|---|---|

Komposisi Komite Manajemen Risiko

Susunan Komite Manajemen Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris sebagai ketua, 3 (tiga) orang Komisaris sebagai anggota, dan 3 (tiga) anggota dari pihak luar yang independen dengan keahlian dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Risk Management Committee Composition

The composition of the Risk Management Committee consists of 1 (one) Commissioner as head, 3 (three) Commissioners as members, and 3 (three) members from independent external parties with expertise and experience in accordance with the required qualifications. Each member of the Risk Management Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

Komposisi Komite Manajemen Risiko Tahun 2022

Risk Management Committee Composition in 2022

No.	Anggota / Member	Inisial / Initial	Posisi di Komite / Position in the Committee	Jabatan di PLN / Position in PLN	Periode / Term of Office
1	Mohammad Ikhsan	MI	Ketua merangkap Anggota / Head cum Member	Komisaris / Commissioner	18 Maret 2021-saat ini / March 18, 2021-present
2	Susiwijono Moegiarsa	SM	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner	19 Juli 2021-saat ini / July 19, 2021-present
3	Suahasil Nazara	SN	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner	28 Maret 2022-saat ini / March 28, 2022-present
4	Dadan Kusdiana	DK	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner	21 September 2022-saat ini / September 21, 2022-present
5	Widhyawan Prawiraatmadja	WP	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Non-Commissioner Committee Member	1 Jun 2020-31 Mei 2023 / June 1, 2020 – May 31, 2023
6	Saguh Pangaribowo	SP	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Non-Commissioner Committee Member	1 Maret 2021- 29 Februari 2024 / March 1, 2021 - February 29, 2024
7	I Made Ro Sakya	MR	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Non-Commissioner Committee Member	2 Oktober 2021-1 Maret 2024 / October 2, 2021 – March 1, 2024
8	Ardan Adiperdana*	AA	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner	18 Maret 2021-28 Maret 2022 / March 18, 2021-March 28, 2022
9	Rida Mulyana*	RM	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner	6 Maret 2019-21 September 2022 / March 6, 2019-September 21, 2022

*) Sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 31 Desember 2022

*) No longer serving as Commissioner of the Company as of December 31, 2022

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil anggota Komite Manajemen Risiko sekaligus menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris telah disajikan pada bab Profil Perusahaan, subbagian Dewan Komisaris. Adapun, profil anggota Komite Manajemen Risiko yang merupakan non-anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Profile of Risk Management Committee Members

Profile of the Risk Management Committee members who are members of PLN's Board of Commissioners can be seen in the Company Profile chapter, the Board of Commissioners sub-chapter. Meanwhile, the profile of the risk management committee's members who are not members of the Board of Commissioners are as follows:



WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA

Anggota Komite Manajemen Risiko (Non-Komisaris)

Risk Management Committee Member (Non-Commissioner)

Usia / Age	62 tahun / 62 years old
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> S3 Ekonomi, <i>University of Hawaii</i> / Doctoral Degree in Economics, University of Hawaii S2 Ekonomi, <i>University of Hawaii</i> / Master's Degree in Economics, University of Hawaii S1 Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung / Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Institut Teknologi Bandung
Sertifikasi Profesi / Professional Certifications	Certified ISO 31000 Risk Management
Dasar Hukum Penunjukan / Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 19/SK/DK-PLN/2020 tanggal 20 Mei 2020 / Decree of the Board of Commissioners No. 19/SK/DK-PLN/2020 dated May 20, 2020



Pengalaman Kerja / Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Indonesia untuk <i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i> (OPEC) (2015-2016) / Governor of Indonesia for OPEC/Organization of the Petroleum Exporting Countries (2015-2016) • Kepala Unit Pengendalian Kinerja (UPK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2014-2016) / Head of Performance Control Unit (UPK) of Ministry of Energy and Mineral Resources (2014-2016) • Komisaris PT Pertamina Persero (2015-2016) / Commissioner of PT Pertamina Persero (2015-2016) • Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2014-2016) / Special Staff of Minister of Energy and Mineral Resources (2014-2016) • Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas/Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (2013-2014) / Deputy of Commercial Control at SKK Migas/Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (2013-2014) • <i>Deputy Chairman for Commercial</i> – SKK Migas (2013-2014) • <i>Indonesia Country Executive for GE Energy</i> (2010-2011) • <i>Senior Vice President - Corporate Planning, Business Development & Transformation</i> PT Pertamina Persero (2005-2009)
Jabatan Rangkap / Concurrent Position	<p>Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / Has no concurrent positions in accordance with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Board of Commissioners/Supervisory Board Supporting Organs of SOEs</p>
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / Education and Training for Competence Improvement	<ul style="list-style-type: none"> • Menakar Ketahanan Energi RI di tengah Ancaman Perang Dunia, sebagai <i>Speaker</i>, 21 Februari 2022. / Measuring Indonesia's Energy Security amidst the Threat of World War, as Speaker, February 21, 2022. • <i>The geopolitics of energy transition: Impact of war between Russia and Ukraine on global energy system and lessons learned for Indonesia's energy transition</i>, sebagai <i>Speaker</i>, 14 April 2022. / The geopolitics of energy transition: Impact of war between Russia and Ukrainian on global energy system and lessons learned for Indonesia's energy transition, as Speaker, April 14, 2022. • G20 Webinar Series : <i>Maintaining Energy Security During the Energy Transition</i>, sebagai <i>Speaker</i>, 20 April 2022. / G20 Webinars Series: Maintaining Energy Security During the Energy Transition, as Speaker, April 20, 2022. • Konflik Eropa: Risiko Geopolitik Ketahanan Energi dan Perubahan Iklim, sebagai <i>Speaker</i>, 27 April 2022. / European Conflict: Geopolitical Risks of Energy Security and Climate Change, as Speaker, April 27, 2022. • CNBC Indonesia TV – “77 Tahun Indonesia Merdeka: Ekonomi Berdaulat”, sebagai pembicara, 17 Agustus 2022. / CNBC Indonesia TV – “77 Years of Independent Indonesia: Sovereign Economy”, as speaker, August 17, 2022. • C20 “<i>The Dilemma of Gas as Transitory Energy: Lessons learned from current energy crisis</i>”, sebagai pembicara, 7 September 2022. / C20 “The Dilemma of Gas as Transitory Energy: Lessons learned from current energy crisis”, as speaker, 7 September 2022. • Training “<i>ESG Investing and Risk Mitigation</i>” yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikat Profesi Manajemen Risiko (LSPMR), 1-2 Desember 2022. / “ESG Investing Training and Risk Mitigation” organized by the Risk Management Professional Certificate Institute (LSPMR), December 1-2, 2022. • Pembicara pada acara Indonesia <i>Sustainable Energy Week</i> (ISEW) di Jakarta, 14 Oktober 2022, dengan topik “<i>Is Indonesia in the State of Energy Crisis?</i>”. / Speaker at the Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) event in Jakarta, October 14, 2022, with the topic “Is Indonesia in the State of Energy Crisis?”. • Pembicara pada acara North Sumatra Forum II SKK Migas di Medan, 27 Oktober 2022, dengan topik “<i>Peran Sektor Migas bagi Ketahanan Energi Nasional</i>”. / Speaker at the North Sumatra Forum II SKK Migas event in Medan, October 27, 2022, with the topic “The Role of the Oil and Gas Sector for National Energy Security”. • Pembicara pada Talkshow di Kampus Interstudi dengan tema “<i>Siapa Boleh Pakai Peralite?</i>”, 10 November 2022. / Speaker at the Talkshow at the Interstudi Campus with the theme “Who Can Use Peralite?”, November 10, 2022. • Wawancara di CNBC Energy Corner Squawk Box, dengan tema “<i>Pemerintah Warning Krisis Energi, RI Masuk Kategori Waspada?</i>”, 14 November 2022. / Interview at CNBC Energy Corner Squawk Box, with the theme “Government Energy Crisis Warning, Indonesia Enters Alert Category?”, 14 November 2022. • Moderator pada Panel Diskusi Investasi dan Panel Diskusi Komersial di acara <i>3rd International Convention on Indonesia Upstream Oil and Gas</i>, 23 November 2022. / Moderator at the Investment Discussion Panel and Commercial Discussion Panel at the 3rd International Convention on Indonesia Upstream Oil and Gas, November 23, 2022.

**I MADE RO SAKYA****Anggota Komite Manajemen Risiko (Non-Komisaris)****Risk Management Committee Member (Non-Commissioner)**

Usia / Age	63 tahun / 63 years old
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • S2 – Faculty of Engineering Melbourne University / Master's Degree – Faculty of Engineering, Melbourne University • S1 – Departemen Elektroteknik ITB / Bachelor's Degree – Electrical Engineering, ITB
Sertifikasi Profesi / Professional Certifications	-
Dasar Hukum Penunjukan / Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No.21/SK/DK-PLN/2021 tanggal 15 September 2021 / Decree of the Board of Commissioners No.21/SK/DK-PLN/2021 dated September 15, 2021
Pengalaman Kerja / Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Senior Technical Advisor di GIZ (2016-2022) • Power System Technical Advisor di ADB (2016 – 2021) • Short Term Technical Consultant di IBRD – World Bank (2015-2020) • Kepala Divisi Perencanaan Sistem – PT PLN Persero (2013 – 2015) / Head of System Planning Division – PT PLN Persero (2013 – 2015) • Kepala Divisi Perencanaan Korporat – PT PLN Persero (2011 – 2013) / Head of Corporate Planning Division – PT PLN Persero (2011 – 2013)
Jabatan Rangkap / Concurrent Position	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / Has no concurrent positions in accordance with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Board of Commissioners/Supervisory Board Supporting Organs of SOEs



**Pendidikan dan Pelatihan
untuk Meningkatkan
Kompetensi / Education and
Training for Competence
Improvement**

- MKI – *Demand Creation Webinar*, Meningkatkan Efektivitas Konsumsi Listrik pada Era Baru, sebagai *Speaker*, 19 Januari 2022. / MKI – *Demand Creation Webinar*, Increasing the Effectiveness of Electricity Consumption in the New Era, as *Speaker*, January 19, 2022.
- FGD IKPLN, *Apa dan Bagaimana Holding dan Sub-Holding serta Afiliasi*, sebagai *Tim Perumus*, 2 Feb 2022. / IKPLN FGD, *What and How Holding and Sub-Holding and Affiliates*, as *Formulating Team*, February 2, 2022.
- *GIZ Training for Trainers on Power Production Simulation with High VRE Penetration*, sebagai *Speaker/Trainer*, 14 – 17 Feb 2022. / *GIZ Training for Trainers on Power Production Simulation with High VRE Penetration*, as *Speaker / Trainer*, February 14 – 17, 2022.
- MKI – *Webinar Bedah RUPTL, Tantangan dan Kendala Pencapaian Target Bauran Energy*, sebagai *Participant*, 23 Feb 2022. / MKI – *Webinar on RUPTL Operations, Challenges and Obstacles to Achieving the Energy Mix Target*, as *Participant*, February 23, 2022.
- FGD IKPLN, *Pengaruh Restrukturisasi PLN terhadap Industri Ketenagalistrikan di Indonesia*, sebagai *Penanggap*, 3 Maret 2022. / IKPLN FGD, *Effects of PLN Restructuring on the Electricity Industry in Indonesia*, as *Responder*, March 3, 2022.
- *GIZ – FGD Training for Regulator on VRE Development*, sebagai *Speaker*, 31 Maret 2021. / *GIZ – FGD Training for Regulator on VRE Development*, as *Speaker*, March 31, 2021.
- *Designing Carbon Neutral Roadmap*, *Webinar*, PLN sebagai *Peserta*, 19 Mei 2022. / *Designing Carbon Neutral Roadmap*, *Webinar*, PLN as *Participant*, May 19, 2022.
- *Power System Planning Workshop*, *Mentari (UK-Indonesia Low Carbon Energy Partnership)*, dilaksanakan di Kupang, sebagai *Moderator*, 23 Mei 2022. / *Power System Planning Workshop*, *Mentari (UK-Indonesia Low Carbon Energy Partnership)*, held in Kupang, as *Moderator*, May 23, 2022.
- *FGD on Grid Analysis for VRE Intermittency Mitigation*, GIZ, dilaksanakan di Kupang, sebagai *Moderator*, 13 Juni 2022. / *FGD on Grids Analysis for VRE Intermittency Mitigation*, GIZ, held in Kupang, as *Moderator*, June 13, 2022.
- *Hosting Capacity PLTS di Jawa Madura Bali dan Launching Data Platfor Irradiasi*, AESI, sebagai *Peserta*, 16 Juni 2022. / *Hosting Capacity of PLTS in Java Madura Bali and Launching of Data Platform Irradiation*, AESI, as *Participant*, June 16, 2022.
- *Workshop on Power System Operation in Sulawesi*, GIZ, dilaksanakan di Makassar, sebagai *Moderator*, 20 Juni 2022. / *Workshops on Power System Operation in Sulawesi*, GIZ, held in Makassar, as *Moderator*, June 20, 2022.
- *Webinar Hosting Capacity of PV in Distribution Network*, sebagai *moderator*, September 2022. / *Webinar Hosting Capacity of PV in Distribution Network*, as *moderator*, September 2022.
- *GIZ – Workshop Carbon Pricing in Indonesia*, sebagai *Peserta*, September 2022. / *GIZ – Workshops Carbons Pricing in Indonesia*, as *Participant*, September 2022.
- *Pertamina – Designing PV in Power System Planning and Operation*, as *Teacher*, September 2022.
- *Pertamina – Designing PV in Power System Planning and Operation*, sebagai *Pengajar*, September 2022. /
- *IKPLN – FGD Kajian Transisi Energi*, sebagai *Penanggap*, September 2022. / *IKPLN – Energy Transition Study FGD*, as *Responder*, September 2022.
- *IKPLN – FGD Kajian Interkoneksi dan Kesiapan CCS dalam Transisi Energi di Indonesia*, sebagai *Moderator*, Oktober 2022. / *IKPLN – FGD Study of Interconnection and CCS Readiness in Energy Transition in Indonesia*, as *Moderator*, October 2022


SAGUH PANGARIBOWO
Anggota Komite Manajemen Risiko (Non-Komisaris)
Risk Management Committee Member (Non-Commissioner)

Usia / Age	54 tahun / 54 years old
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • S2 Master of Business Administration, International University of Japan • S1 Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia / Bachelor's Degree in Economics, Universitas Indonesia
Sertifikasi Profesi / Professional Certifications	<ul style="list-style-type: none"> • Certified Risk Management Assurance (CRMA) • Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS) • Certified Internal Auditor (CIA)
Dasar Hukum Penunjukan / Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 05/SK/DK-PLN/2020 tanggal 25 Februari 2021 / Decree of the Board of Commissioners No. 05/SK/DK-PLN/2020 dated February 25, 2021
Pengalaman Kerja / Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Management Technical Advisor PT Lippo Karawaci Tbk, 2021. • Konsultan Mandiri PT Pertamina (Persero), 2021. / Independent Consultant at PT Pertamina (Persero), 2021. • Associate Partner PT Ernst & Young Indonesia (2005-2020). • Koordinator and Pengajar Bina Nusantara CIA Executive Program (2005-2012). / Coordinator and Lecturer at Bina Nusantara CIA Executive Program (2005-2012). • Dosen paruh waktu Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara (2002-2008). / Part-time lecturer at the Faculty of Economics, Universitas Bina Nusantara (2002-2008). • Quality Assurance Tim Corporate Governance BPKP (2001-2005). / Corporate Governance Quality Assurance Team at BPKP (2001-2005). • Narasumber Audit Kinerja BUMN-BUMN oleh Ditjen Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan (2002-2005). / Speaker for SOEs Performance Audit by the Directorate General of Financial Institutions, Ministry of Finance (2002-2005). • Tugas belajar ke Jepang dari Overseas Training Office Bappenas 1999-2001. / Assignment to study in Japan from the Overseas Training Office of Bappenas 1999-2001. • Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kantor Perwakilan DKI Jakarta (1990-1999). / Auditor of the Financial and Development Supervisory (1990-1999)
Jabatan Rangkap / Concurrent Position	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / Has no concurrent positions in accordance with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Board of Commissioners/Supervisory Board Supporting Organs of SOEs
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / Education and Training for Competence Improvement	<ul style="list-style-type: none"> • Konferensi Nasional Komite Audit Pertama di Indonesia "Leveraging the Roles of Audit Committee", sebagai peserta, 26-27 Januari 2022. / First National Audit Committee Conference in Indonesia "Leveraging the Roles of Audit Committee", as a participant, January 26-27, 2022. • Digital Leadership Series #2, "Growing Beyond Limits Through Merger And Acquisition", sebagai peserta, 16 Februari 2022 / Digital Leadership Series #2, "Growing beyond Limits Through Merger and Acquisition", as participant, February 16, 2022 • The geopolitics of energy transition: Impact of war between Russia and Ukraine on global energy system and lessons learned for Indonesia's energy transition, sebagai Participant, 14 April 2022. / The geopolitics of energy transition: Impact of war between Russia and Ukrainian on global energy system and lessons learned for Indonesia's energy transition, as Participant, April 14, 2022. • G20 Webinar Series : Maintaining Energy Security During the Energy Transition, sebagai Participant, 20 April 2022. / G20 Webinars Series: Maintaining Energy Security During the Energy Transition, as Participant, April 20, 2022. • Bahana Sekuritas Corporate Access - Understanding Indonesia Battery Corporate's (IBC) Master Plan to Develop 2W Ad 4W Ecosystem, sebagai peserta, 15 Agustus 2022. / Bahana Sekuritas Corporate Access - Understanding Indonesia Battery Corporate's (IBC) Master Plan to Develop 2W Ad 4W Ecosystem, as participant, August 15, 2022.



Pernyataan Independensi Komite Manajemen Risiko

Masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko berkewajiban untuk bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris. Atas hal tersebut, Perseroan menjamin seluruh anggota Komite Manajemen Risiko merupakan personil yang independen sehingga bebas dari benturan kepentingan dan dapat bersikap objektif dalam pelaksanaan tugas.

Pengungkapan independensi masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko Tahun 2022

Kriteria Independensi / Independence Criteria	MI	RM*	SM	AA*	SN	DK	WP	SP	MR
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama PLN. / He/she does not have any affiliations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Majority Shareholder of PLN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN. / He/she does not have neither direct nor indirect business relationship related to PLN's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. / He/she does not serve as a party official and/or candidate/legislative member and/or a candidate of or serve as head/deputy head of local government.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait jabatan di PLN. / He/she does not hold other positions that may cause a conflict of interest related to the position at PLN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*) tidak lagi menjabat pada 31 Desember 2022

Statement of Independence of the Risk Management Committee

Each member of the Risk Management Committee is obliged to behave professionally in carrying out their duties and responsibilities, including in providing opinions to the Board of Commissioners. Thus, the Company guarantees that all members of the Risk Management Committee are independent personnel so that they are free from conflicts of interest and able to act objectively in carrying out their duties.

Disclosure of independence of each member of the Risk Monitoring Committee is as follows:

Independence of Risk Management Committee Members in 2022

*) no longer serving since December 31, 2022

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Sesuai ketentuan dalam Piagam Komite, Komite Manajemen Risiko wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda sesuai tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko. Rencana Rapat Komite Manajemen Risiko tercantum dalam Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko tahun 2022.

Pada tahun 2022, Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) rapat yang terdiri dari rapat internal Komite, rapat bersama Dewan Komisaris, rapat anggota Komite non-Komisaris, serta rapat dengan manajemen Perseroan. Penjabaran mengenai pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko tahun 2022 adalah sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING

Meeting Policy and Implementation

In accordance with the provisions in the Committee Charter, the Risk Management Committee must hold meetings with an agenda according to the duties and responsibilities of the Risk Management Committee. The Risk Management Committee Meeting Plan is listed in the Risk Management Committee Work Plan for 2022.

In 2022, the Risk Management Committee held 98 (ninety eight) meetings consisting of internal Committee meetings, joint meetings with the Board of Commissioners, meetings with non-Commissioner Committee members, and meetings with the Company's management. The description of the implementation of the Risk Management Committee meetings in 2022 is as follows:

Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2022 Risk Management Committee Meetings in 2022

No	Jenis Rapat Komite Risiko / Type of Risk Management Committee's Meetings	Jumlah / Total
1	Rapat dengan Dewan Komisaris / Meeting with the Board of Commissioners	29 kali / times
2	Rapat internal Komite Manajemen Risiko / Internal meeting with other Committees	9 kali / times
3	Rapat dengan Komite Lain / Meeting with the related Directorates (discussion on issues in each directorate)	2 kali / times
4	Rapat dengan Divisi/Direktorat terkait / Discussions with management to review the requests for approval or recommendations of funding	58 kali / times
Jumlah Rapat / Total Meetings		98 kali / times

Frekuensi Kehadiran Anggota Komite

Frekuensi kehadiran masing-masing anggota Komite dalam keseluruhan penyelenggaraan rapat di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Frequency of Attendance of Committee Members

The frequency of attendance of each member of the Committee in the overall implementation of the Committee meetings in 2022 can be seen in the following table:

Frekuensi Kehadiran Anggota Komite dalam Rapat Tahun 2022

No.	Nama Anggota / Member Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) / Attendance Percentage (%)
1	Mohammad Ikhsan	Ketua dan Anggota / Head and Member	77	76	98,70%
2	Rida Mulyana*	Anggota / Member	51	40	78,43%
3	Susiwijono Moegiarso	Anggota / Member	75	54	72,00%
4	Ardan Adiperdana**	Anggota / Member	19	18	94,74%
5	Suahasil Nazara***	Anggota / Member	53	32	60,38%
6	Dadan Kusdiana****	Anggota / Member	24	22	91,67%
7	Widhyawan Prawiraatmadja	Anggota / Member	98	97	98,98%
8	Saguh Pangaribowo	Anggota / Member	98	98	100%
9	I Made Ro Sakya	Anggota / Member	98	95	96,94%

Frequency of Attendance of Committee Members in the 2022 Meetings

*) Menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko pada 6 Maret 2019-21 September 2022

**) Menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko pada 18 Maret 2021-28 Maret 2022

***) Menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko pada 28 Maret 2022-saat ini

****) Menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko pada 21 September 2022-saat ini

*) Served as member of the Risk Management Committee on March 6, 2019-September 21, 2022

**) Served as a member of the Risk Management Committee on March 18, 2021-March 28, 2022

***) Serving as member of the Risk Management Committee on March 28 2022-present

****) Serving as member of the Risk Management Committee on September 21, 2022-present

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Tahun 2022

Secara menyeluruh, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan di dalam Piagam Komite dan rencana kerja Komite untuk tahun 2022. Lebih dari itu, Komite Manajemen Risiko telah melakukan sejumlah 29 (dua puluh sembilan) kajian atas permintaan Direksi untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris, serta melakukan kajian atas kegiatan atau tindakan Direksi yang perlu mendapatkan nasihat ataupun teguran Dewan Komisaris.

Risk Management Committee Duty Implementation in 2022

Overall, the Risk Management Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with the provisions in the Committee Charter and the Committee's work plan for 2022. In addition, the Risk Management Committee has conducted 29 (twenty nine) reviews at the request of the Board of Directors to obtain recommendations or approval from the Board Commissioners, as well as reviewed the activities or actions of the Directors who need to receive advice or reprimands from the Board of Commissioners.

Key Performance Indicators (KPI) Komite Manajemen Risiko

Secara berkala, Komite Manajemen Risiko melakukan penilaian secara *self-assessment* berdasarkan pemenuhan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators/KPI*), dengan hasil untuk tahun 2022 sebagai berikut:

Key Performance Indicators (KPI) of the Risk Management Committee

Periodically, the Risk Management Committee conducts self-assessments based on the fulfillment of Key Performance Indicators (KPI), with the 2022 results as follows:

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Komite Manajemen Risiko Tahun 2022**Achievement of Key Performance Indicators of the Risk Management Committee in 2022**

No.	Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Kuantitas/ Tolok Ukur / Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan / Achievement
			Setahun / In a year	Bobot / Value	
1	Menyampaikan rencana kerja dan KPI Komite Manajemen Risiko Tahunan. / Submission of annual KPI and work plan of the Risk Management Committee.	Menyusun rencana kerja dan KPI tahunan Komite Manajemen Risiko. / Preparing annual KPI and work plan of the Risk Management Committee.	1 berkas / 1 file	2	Ada / Realized - Rencana Kerja KMR Tahun 2022 / 2022 KMR Work Plan
2	Evaluasi, pembahasan dan pemberian saran atas Top Risks (Profil Risiko). / Evaluation, discussion and provision of advice on Top Risks (Risk Profile).	Mengevaluasi, membahas dan memberikan saran atas Top Risks (Profil Risiko) yang dilaporkan secara periodik dan sewaktu-waktu. / Evaluating, discussing, and providing advice on Top Risks (Risk Profiles) which are reported periodically and from time to time.	4 kali setahun / 4 times a year	12	Lebih dari 10 kali / More than 10 times - Update Manajemen Risiko Energi Primer / Update on Primary Energy Risk Management - Update Manajemen Risiko atas Dampak Kondisi Ukraina - Rusia / Update on Risk Management for the Impact of Conditions in Ukraine - Russia - Pembahasan terkait status HOP Batubara & Pemenuhan Kargo LNG / Discussion regarding the status of Coal HOP & Fulfillment of LNG Cargo - Pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko Energi Primer / Discussion on Primary Energy Risk Management Monitoring - Pembahasan Update Manajemen Risiko s.d. TW IV Tahun 2021 / Discussion of Risk Management Update to Q4 2021 - Pembahasan Update Manajemen Risiko s.d. TW I Tahun 2022 / Discussion of Risk Management Update to Q1 2022 - Update KPI Manajemen Risiko / Update on Risk Management KPIs - Manajemen Risiko atas Pembentukan Holding dan Sub-Holding / Risk Management for Formation of Holding and Sub-Holding - Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi PLN / Discussion on Changes in PLN's Organizational Structure - Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor PT PLN pada PT IBI / Increase in Issued and Paid-up Capital of PT PLN at PT IBI - Pemantauan Profil Risiko Korporat TW III Tahun 2022 / Monitoring of Corporate Risk Profile Q3 2022 - Pembahasan Dokumen Risk Appetite Statement Tahun 2023. / Discussion of Risk Documents Appetite Statement for 2023

No.	Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Kuantitas/ Tolok Ukur / Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan / Achievement	
			Setahun / In a year	Bobot / Value		
3	Evaluasi, pengawasan, dan pemantauan terhadap kajian risiko atas usulan rencana investasi/ pendanaan/ transaksi dan kegiatan operasional lainnya. / Evaluation, supervision, and monitoring of the risk assessment of the proposed investment plan/ funding/ transactions and other operational activities.	Mengevaluasi, mengawasi, dan memantau hasil kajian risiko dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Direksi sebagai kelengkapan atas usulan rencana investasi/ pendanaan/ transaksi dan kegiatan operasional lainnya serta memberikan tanggapan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi tersebut. / Evaluating, supervising and monitoring the results of risk studies and other documents submitted by the Board of Directors as a completeness of proposed investment/ funding/ transaction plans and other operational activities and providing responses to the Board of Commissioners on the Board of Directors' proposals.	3 kali setahun / 3 times a year	6	Lebih dari 10 kali / More than 10 times	6
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah draft diperoleh dari Direksi (dengan memenuhi syarat kelengkapan dan legalitas dokumen, data yang akurat). / Timely response after the draft is obtained from the Board of Directors (subject to fulfilling the requirements for completeness and legality of documents, accurate data).	14 hari kerja / 14 working days	4	7-14 hari kerja / 7-14 working days	4
4	Review dan tanggapan atas Rencana Perusahaan / Review and response to the Company Plan	Melakukan review dan memberikan tanggapan atas Rencana Perusahaan: / Reviewing and providing feedback on the Company Plan:	2 kali setahun / 2 times a year	6	2 kali atau lebih / 2 times or more	8
		<ul style="list-style-type: none"> • RKAP tahun buku 2022 (bila terdapat perubahan asumsi). / RKAP for the 2022 fiscal year (for changes in assumptions). • RJPP. • RKAP Tahun Buku 2023 / RKAP for Fiscal Year 2023. 			<p>Terdapat 3 dokumen rekomendasi/ tanggapan atas RKAP tahun buku 2022. / 3 recommendation documents/ response to the RKAP for the 2022 fiscal year.</p> <p>Terdapat 2 dokumen rekomendasi/ tanggapan atas draft pertama usulan RKAP 2023 / 2 recommendation documents/ response to the first draft of the 2023 RKAP proposal</p>	
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah dokumen diperoleh dari Direksi/ manajemen (dengan memenuhi syarat kelengkapan dan legalitas dokumen, data yang akurat). / Timely submission of responses after documents are obtained from the Board of Directors/ management (subject to meeting the requirements for document completeness and legality, accurate data).	14 hari kerja / 14 working days	4	7-14 hari kerja / 7-14 working days	4
					Rata-rata pemberian tanggapan selama 9 hari kerja. / Average response time of 9 working days.	



No.	Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Kuantitas/ Tolok Ukur / Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan / Achievement
			Setahun / In a year	Bobot / Value	
5	Review, pembahasan, tanggapan dan usulan persetujuan kinerja Perusahaan oleh Dewan Komisaris / Reviews, discussion, feedback and performance approval proposals Company by the Board of Commissioners	<p>Melakukan <i>review</i>, membahas, menanggapi dan memberikan usulan persetujuan kinerja Perusahaan oleh Dewan Komisaris, untuk hal-hal berikut: / Reviewing, discussing, responding to and providing proposals for approval of the Company's performance by the Board of Commissioners, for the following matters:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LM dan KPI Aspek Manajemen Risiko Triwulanan Tahun 2022 / Quarterly LM and KPI Aspect of Risk Management in 2022 • <i>Annual Report</i> dan <i>Sustainability Report</i> PLN Tahun 2021 / Annual Report and Sustainability Report of PLN in 2021 • Laporan Realisasi PMN Triwulanan Tahun 2022 / 2022 Quarterly PMN Realization Report 	6 kali setahun / 6 times a year	12	<p>9 kali / 9 times</p> <p>Surat Tanggapan atas: / Response Letter to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LM 2021(Unaudited) 2. LM TW I 2022 LM 2021(Audited) LM TW II 2022 LM TW III 2022 <p>Surat Tanggapan atas: / Response Letter to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan PMN TW IV 2021 / PMN Report of Q4 2021 2. Laporan PMN TW I 2022 / PMN Report of Q1 2022 3. Laporan PMN TW II 2022 / PMN Report of Q2 2022 4. Penambahan PMN Tahun 2022 / Addition of PMN in 2022 <p><i>Annual Report</i> telah disahkan dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris / The Annual Report has been approved and signed by the entire Board of Commissioners</p>
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah draft diperoleh dari Direksi (dengan memenuhi syarat kelengkapan dan legalitas dokumen, data yang akurat). / Timely response after the draft is obtained from the Board of Directors (subject to fulfilling the requirements for completeness and legality of documents, accurate data).	14 hari kerja / 14 working days	4	<p>7-14 hari kerja / 7-14 working days</p> <p>Rata-rata pemberian tanggapan selama 9 hari kerja. / Average response time is 9 working days.</p>
6	Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dekom. / Perform other duties given by the Board of Commissioners.	Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai permintaan dan arahan Dewan Komisaris. / Perform other duties given by the Board of Commissioners.	2 kali setahun / 2 times a year	6	<p>2 kali / 2 times</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kajian risiko terkait kondisi energi primer di awal tahun 2022 / Risk assessment related to primary energy conditions in early 2022 • Kajian risiko atas penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh di PT Industri Baterai Indonesia. / Risk assessment of the additional issued and fully paid up capital at PT Industri Batteries Indonesia.
7	Pengenalan/ induksi/ peningkatan kompetensi. / Introduction/ induction/ competence improvement	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti seminar/ <i>workshop</i> di luar negeri maupun dalam negeri. / Participation in seminars/ workshops abroad and domestically. • Induksi jika ada Komisaris baru. / Induction for new Commissioner. 	2 kali setahun / 2 times a year	4	<p>2 kali atau lebih / 2 times or more</p> <p>32 kali kegiatan <i>capacity building</i> / 32 capacity building activities</p>
8	Melaksanakan program kerja strategis / Implementation of strategic work programs	Melakukan <i>monitoring</i> dan/atau <i>review</i> terhadap: / Monitoring and/ or reviewing:			

No.	Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Kuantitas/ Tolok Ukur / Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan / Achievement
			Setahun / In a year	Bobot / Value	
		<ul style="list-style-type: none"> Dinamika isu/risiko di tahun 2021 yang berpotensi akan muncul di 2022. / Dynamics of issues/risks in 2021 that have the potential to emerge in 2022. 	4 kali setahun / 4 times a year	8	<p>Lebih dari 4 kali / More than 4 times 8</p> <ul style="list-style-type: none"> Review risiko terkait energi primer (>4 kali) / Review of risks related to primary energy (> 4 times) Review risiko terkait proyek terkendala / Risk review related to constrained projects Review terkait rencana holding dan Sub-Holding. / Review regarding holding and Sub-Holding plans. Review pembentukan holding dan Sub-Holding masa/tahap legal end state / Review the establishment of holding and Sub-Holding /legal end state
		<ul style="list-style-type: none"> Capaian RUPTL vs. RKAP / RUPTL achievements vs. RKAP 	2 kali setahun / 2 times a year	4	<p>1 kali / 1 time 2</p> <p>Pembahasan dengan Dir Perencanaan Korporat dan Dir Mega Proyek dan EBT tentang Capaian RUPTL vs RKAP dan RJPP / Discussion with Director of Corporate Planning and Director of Mega Projects and NRE regarding RUPTL vs RKAP and RJPP Achievements</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Program Breakthrough Transformasi yang dipandang lebih strategis dan menjadi prioritas Dekom, yaitu: / Breakthrough Program considered more strategic and priority for the Board of Commissioners, namely: <ol style="list-style-type: none"> Investment prioritization Optimizing primary energy Centralized planning Carbon neutral Streamlining subsidiary Regulatory sector structure & tariff optimization 	6 kali setahun / 6 times a year	12	<p>6 kali / 6 times 12</p> <ol style="list-style-type: none"> Investment prioritization Carbon neutral Regulatory Framework (Regulatory Sector Structure and Tariff Optimization) Optimizing primary energy Centralized planning Streamlining Subsidiary (terkait dengan holding Sub-Holding)
		<ul style="list-style-type: none"> Antisipasi risiko-risiko sehubungan dengan G20 Presidency. / Anticipate the risks associated with the G20 Presidency 	2 kali setahun / 2 times a year	2	<p>2 kali / 2 times 2</p> <p>Relokasi PLTG Grati (Proyek Bali) dalam rangka Persiapan G20 / Relocation of PLTG Grati (Bali Project) in preparation for G20</p> <p>Pada pembahasan profil risiko PLN / In PLN's risk profile</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Implementasi arahan Presiden, Menteri/Wakil Menteri BUMN terkait dengan EBT/transisi energi. / Implementation of the directives of the President, Minister/Deputy Minister of SOEs related to NRE/energy transition. 	2 kali setahun / 2 times a year	2	<p>4 kali / 4 times 2</p> <p>Pembahasan dengan Direktur Perencanaan Korporat terkait energy transition mechanism. / Discussion with the Director of Corporate Planning regarding energy transition mechanics.</p> <p>Pembahasan proyek-proyek PLTS, pembangkit EBT Lisdes dalam Laporan Realisasi PMN Triwulan IV Tahun 2021, Triwulan I Tahun 2022, Triwulan II Tahun 2022, Triwulan III Tahun 2022 / Discussion of PLTS projects, Lisdes EBT generator in PMN Realization Report for Q4 of 2021, Q1 of 2022, Q2 of 2022, Q3 of 2022</p>

No.	Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Kuantitas/ Tolok Ukur / Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan / Achievement
			Setahun / In a year	Bobot / Value	
9	Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas triwulanan Komite kepada Dewan Komisaris. / Submission of quarterly Duty Implementation Report Committee to the Board of Commissioners.	Laporan terdiri atas: / Reports of <ul style="list-style-type: none"> Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI TW IV Tahun 2021. / Activity Report and Realization of KPI in Q4 2021 Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI TW I Tahun 2022. / Activity Report and Realization of KPI in Q1 2022 Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI TW II Tahun 2022. / Activity Report and Realization of KPI in Q2 2022 Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI TW III Tahun 2022. / Activity Report and Realization of KPI in Q3 2022 	4 laporan / 4 reports	8	4 laporan / 4 reports 8
10	Pengelolaan GCG / GCG Management	Pencapaian skor asesmen GCG Aspek Dewan Komisaris Tahun 2022 / Achievement of the 2022 GCG Assessment Score for the Board of Commissioners aspects	Capaian Skor minimum 95% / Minimum Score Achievement of 95%	4	95,118% 4
TOTAL			100		100

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Landasan hukum pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN dan SK Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 24/SK/DK-PLN/2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 28 Juli 2015 beserta perubahannya.

Sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, tugas pokok Komite Nominasi dan Remunerasi adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara efektif terkait (1) pengusulan seseorang untuk ditempatkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris serta (2) imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee to assist the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners. The legal bases for the establishment of the Nomination and Remuneration Committee are SOE Minister Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOE's and Decree of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) No. 24/SK/DK-PLN/2015 on Nomination and Remuneration Committee dated July 28, 2015 and its amendments.

Based on the Nomination and Remuneration Committee Charter, the main duty of the Nomination and Remuneration Committee is to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function and providing effective advice regarding (1) proposal of a person to be placed in a position as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners and (2) remuneration to be determined and given to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners due to the position and role assigned in accordance with their duties, authorities, and responsibilities.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Komite, yang secara mendasar telah memuat ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi. Perseroan melakukan pemutakhiran terhadap Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala, dengan revisi terkini telah disahkan di tahun 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan di dalam Piagam Komite, dengan perincian sebagai berikut:

1. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*);
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*);
4. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri;
5. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi;
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan;
10. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menerapkan sistem Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) yang mengacu kepada *best practice*;

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee carries out its duties and responsibilities based on the Committee Charter, which contains provisions regarding the duties, responsibilities and obligations of the Nomination and Remuneration Committee. The Company regularly updates the Risk Management Committee Charter, with the most recent revision ratified in 2021.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee has duties and responsibilities based on the provisions in the Committee Charter, with the following details:

1. Conducting periodic reviews of the Talent Management System;
2. Evaluating the Talent Classification systems and procedures carried out by the Board of Directors;
3. Validating and calibrating the Talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners/Supervisory Board (*Selected Talent*), to produce a list of Talents to be nominated by the Board of Commissioners/Supervisory Board to the GMS/Minister (*Nominated Talents*);
4. Evaluating the Company's Representative Candidates who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, before being submitted to the GMS/Minister;
5. Evaluating the proposal of Individual Key Performance Indicators for members of the Board of Directors;
6. Preparing proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners/Supervisory Board;
7. Preparing proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners/Supervisory Board;
8. Evaluating remuneration policies for employees that require approval/response from the Board of Commissioners/Supervisory Board;
9. Evaluating the proposal of the Board of Directors regarding the organizational structure of the company;
10. Reviewing and monitoring to ensure that the Board of Directors has implemented the PT PLN (Persero) Nomination and Remuneration system which refers to the best practice;



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 11. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan proses rekrutmen, pengembangan karier, nominasi dan remunerasi sesuai sistem yang telah ditetapkan; 12. Membantu merumuskan dalam menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk diusulkan kepada RUPS guna memperoleh persetujuan; 13. Melakukan identifikasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya; 14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris; 15. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite; 16. Membuat laporan-laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Dewan Komisaris. | <ol style="list-style-type: none"> 11. Reviewing and monitoring to ensure that the Board of Directors has carried out the process of recruitment, career development, nomination and remuneration according to the established system; 12. Assisting the formulation of remuneration policies in the form of salary and honorarium, fixed benefits and facilities as well as variable performance bonuses/incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners to be proposed to the GMS for approval; 13. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners; 14. Performing other assignments from the Board of Commissioners; 15. Coordinating with the Secretary to the Board of Commissioners for the smooth implementation of the Committee's duties; 16. Preparing periodic reports on the implementation of duties to the Board of Commissioners. |
|--|--|

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen sebagai ketua, 3 (tiga) orang Komisaris, dan 2 (dua) anggota dari pihak luar yang independen dengan keahlian dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Nomination and Remuneration Committee Composition

The Nomination and Remuneration Committee consists of the President Commissioner and Independent Commissioner as chairman, 3 (three) Commissioners, and 2 (two) members from independent external parties with expertise and experience in accordance with the required qualifications. Each member of the Nomination and Remuneration Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

Komposisi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2022

No.	Anggota / Member	Inisial / Initial	Posisi di Komite / Position in the Committee	Jabatan di PLN / Position in PLN	Periode / Term of Office
1	Amien Sunaryadi	AS	Ketua dan Anggota / Head and Member	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner cum Independent Commissioner	
2	Dudy Purwagandhi	DP	Sekretaris dan Anggota / Secretary and Member	Anggota Komisaris / Commissioner Member	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris / The same as their terms as Commissioners
3	Eko Sulistyio	ES	Anggota / Member	Anggota Komisaris / Commissioner Member	
4	Tedi Bharata	TB	Anggota / Member	Anggota Komisaris / Commissioner Member	

Composition of the Nomination and Remuneration Committee Members in 2022


No.	Anggota / Member	Inisial / Initial	Posisi di Komite / Position in the Committee	Jabatan di PLN / Position in PLN	Periode / Term of Office
5	Roikhan	R	Anggota / Member	Anggota Komite Non-Komisaris / Non-Commissioner Member	<ul style="list-style-type: none"> • 24 September 2018-23 September 2019 / September 24, 2018 - September 23, 2019 • 24 September 2019 - 23 September 2021 / September 24, 2019 - September 23, 2021 • 24 September 2021-23 September 2023 / September 24, 2021 - September 23, 2021
6	Andi Hanif Mursid	AHM	Anggota / Member	Anggota Komite Non-Komisaris / Non-Commissioner Member	1 Desember 2021-30 November 2024 / December 1, 2021 - December 30, 2024

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris telah disajikan di dalam bab Profil Perusahaan, subbagian Dewan Komisaris. Adapun, profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan non-anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

Profile of members of the Nomination and Remuneration Committee who are members of the Board of Commissioners have been presented in the Company Profile chapter, Board of Commissioners subchapter. Meanwhile, the profile of members of the Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners are as follows:



ROIKHAN
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Non Komisaris
Non-Commissioner Nomination and Remuneration Committee Member

Usia / Age	62 tahun / 62 years old
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • S2 Manajemen Industri, Institut Teknologi Bandung (1998) / Master's Degree in Industrial Management, Institut Teknologi Bandung (1998) • S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1986) / Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1986)
Sertifikasi Profesi / Professional Certifications	Certified ISO 31000 Risk Management
Dasar Hukum Penunjukan / Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 18/SK/DK-PLN/2018 tanggal 21 September 2018 dan perpanjangannya No. 13/SK/DK-PLN/2019 tanggal 4 September 2019 dan No. 18/SK/DK-PLN/2021 tanggal 15 September 2021 / Decree of the Board of Commissioners No. 18/SK/DK-PLN/2018 dated September 21, 2018 and the extension No. 13/SK/DK-PLN/2019 dated September 4, 2019 and No. 18/SK/DK-PLN/2021 dated September 15, 2021



Pengalaman Kerja / Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur SDM PT Indonesia Power (2013-2018) / Director of Human Resources at PT Indonesia Power (2013-2018) • <i>Expert Manajemen SDM pada Direktorat SDM dan Umum PLN Kantor Pusat (2013) / HR Management Expert at Directorate of HR and General Affairs at PLN Head Office (2013)</i> • Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta PLN Kantor Pusat (2010-2013) / Head of HR and Talent Development Division at PLN Head Office (2010-2013) • Deputi Direktur Pengembangan SDM dan Talenta Pada Direktorat SDM dan Umum PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010) / Deputy Director of HR and Talent Development at the Directorate of HR and General Affairs of PT PLN (Persero) Head Office (2010)
Jabatan Rangkap / Concurrent Position	<p>Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / Has no concurrent positions in accordance with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Board of Commissioners/Supervisory Board Supporting Organs of SOEs</p>
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / Education and Training for Competence Improvement	<ul style="list-style-type: none"> • Webinar serial kedua MKI, "Meningkatkan Efektivitas Konsumsi Listrik pada Era Baru", 19 Januari 2022 / MKI second webinar series, "Increasing the Effectiveness of Electricity Consumption in the New Era", January 19, 2022 • Webinar Konferensi Nasional Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), "Leveraging the roles of Audit Committee", 26-27 Januari 2022 / Webinar of the National Conference of the Association of Indonesian Audit Committees (IKAI), "Leveraging the roles of Audit Committee", January 26-27, 2022 • Webinar Digital Leadership #2 tahun 2022 PT PLN (Persero), "Growing Beyond Limits Through Merger and Acquisition", 16 Februari 2022 / Webinar Digital Leadership #2 in 2022 PT PLN (Persero), "Growing beyond Limits Through Merger and Acquisition", February 16, 2022 • Webinar FGD #4 Dewan Pakar IKPLN, "Apa dan Bagaimana Organisasi Perusahaan Holding berikut Sub-Holding dan Afiliasinya", 21 Februari 2022 / Webinar #4 IKPLN Expert Council, "What and How are Holding Company Organizations and their Sub-Holding and Affiliates", February 21, 2022 • Webinar HSSE Talk #2, "Safety Culture for Zero Accident", PT PLN (Persero), 23 Februari 2022 / Webinar HSSE Talk #2, "Safety culture for Zero Accident", PT PLN (Persero), February 23, 2022 • Pelatihan Pemadam Kebakaran untuk PLTU Batubara <i>Low Rank Coal</i> yang diselenggarakan via Zoom oleh IP dan PJB, 13-21 April 2022 / Fire Fighting Training for Low Rank Coal PLTU held via Zoom by IP and PJB, April 13-21, 2022 • Webinar <i>Asset Management Series #4</i>, Pemanfaatan Risiko & <i>Criticality Asset</i> pada Pengambilan Keputusan <i>Asset Management</i>, PT PLN (Persero), 5 Juli 2022 / Webinar <i>Asset Management Series #4</i>, Utilization of Risk & Criticality of Assets in Asset Decision Making Management, PT PLN (Persero), July 5, 2022 • UMKM Talk Series #2, topik: PLTB & Matahari, Urban Farming, Budidaya Lele, IKPLN Pusat, 6 Juli 2022 / UMKM Talk Series #2, topic: PLTB & Matahari, Urban Farming, Catfish Cultivation, Central IKPLN, July 6, 2022 • Webinar Bahana Sekuritas, <i>Understanding Indonesia Battery Corporation's (IBC) Master Plan to Develop 2W and 4W EV Ecosystem</i>, 15 Agustus 2022 / Bahana Sekuritas webinar, <i>Understanding Indonesia Battery Corporation's (IBC) Master Plan to Develop 2W and 4W EV Ecosystem</i>, August 15, 2022 • Webinar Energi untuk Negeri: Menjawab Tantangan Pemenuhan Energi Melalui Teknologi Sel Surya dan Divais Elektronika, oleh BRIN, 24 Agustus 2022 / Webinar for the Nation: Answering the Challenges of Fulfillment of Energy Through Solar Cell Technology and Electronic Devices, by BRIN, August 24, 2022 • <i>Workshop-I Dewan Pakar IKPLN, "Mendukung Kajian Hukum Transisi Energi pada Sektor Ketenagalistrikan Menuju Karbon Netral 2060"</i>, 7 September 2022 / <i>Workshop -I IKPLN Expert Council, "Supporting the Study of Energy Transition Law in the Electricity Sector Towards Carbon Neutral 2060"</i>, September 7, 2022 • <i>Benchmarking/Studi Banding ke Astra tentang MAKER terintegrasi Holding Sub-Holding</i>, 27 Oktober 2022 / <i>Benchmarking / Comparative Study to Astra regarding integrated MAKER Holding Sub-Holding</i>, October 27, 2022 • <i>Sharing Session Tata Kelola Terintegrasi oleh Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk</i>, 29 Desember 2022 / <i>Sharing Session of Integrated Governance by the Risk Management Director of PT Bank Mandiri Tbk</i>, December 29, 2022

**ANDI HANIF MURSID****Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Non Komisaris****Non-Commissioner Nomination and Remuneration Committee Member**

Usia / Age	50 tahun / 50 years old
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Management Development Program (MDP), <i>Asian Institute of Management</i> (2005) • S2 Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (2003) / Master's Degree in Agribusiness Management, Institut Pertanian Bogor (2003) • S1 Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (1995) / Bachelor's Degree in Agribusiness Management, Institut Pertanian Bogor (1995)
Sertifikasi Profesi / Professional Certifications	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Certified Human Capital Management</i> • <i>Certified Quality Management System</i> • <i>Certified Quality Management System Lead Auditor</i> • <i>Certified Learning and Development Professional</i> • <i>Certified Organization Development Professional</i> • <i>Certified Strategy and Business Planning Professional</i> • <i>Certified Strategy Execution Professional</i> • <i>Certified Coaching Professional</i> • <i>Certified Leadership Coach</i> • <i>Certified Talent Management Professional</i> • <i>Certified Safety Management System</i> • <i>Certified Change Management Professional</i>
Dasar Hukum Penunjukan / Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 26/SK/DK-PLN/2021 tanggal 25 November 2021 / Decree of the Board of Commissioners No.26/SK/DK-PLN/2021 dated November 25, 2021
Pengalaman Kerja / Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Chief Executive Officer The Next Normal</i> (2020-2021) • <i>Chief Executive Officer The Strengths Zone</i> (2018-2021) • <i>Keynote Speaker, Advisor, Trainer, Coach and Facilitator for Business & Leadership Inspiration Entrepreneurship Zone</i> (1998-2020) • <i>General Manager - Learning and Development</i> PT Intraco Penta, Tbk (2011-2018) • <i>Director - Pramana Agri Resources</i> PT Intraco Penta, Tbk (2011-2018) • <i>Chairman of The Executive Board - Intraco Penta Foundation</i> PT Intraco Penta (2014-2018) • <i>Head of Learning & Development Division</i> DSU Group (2008-2011) • <i>Head of Training & People Development Department - Bogasari Flour Mills</i> PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2006-2008) • <i>Head of Training Program Development Department - Bogasari Flour Mills</i> PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2000-2006) • <i>Chairman Of The Executive Board - Quality & Safety Improvement Team - Bogasari Flour Mills</i> PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2003-2006) • <i>Deputy Head of Human Resources Department - Bogasari Flour Mills</i> PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1998-2000) • <i>Head of Human Resources Information System Department - Bogasari Flour Mills</i> PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1997-1998) • <i>Management Trainee (MT)</i> PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1996-1997)
Jabatan Rangkap / Concurrent Position	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / Has no concurrent positions in accordance with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Board of Commissioners/Supervisory Board Supporting Organs of SOEs

Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / Education and Training for Competence Improvement

- Webinar Konferensi Nasional Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), "Leveraging the roles of Audit Comitee", 26-27 Januari 2022 / Webinar of the National Conference of the Association of Indonesian Audit Committees (IKAI), "Leveraging the roles of Audit Comitee", January 26-27, 2022
- Webinar Digital Leadership #2 tahun 2022 PT PLN (Persero), "Growing Beyond Limits Through Merger and Aquisition", 16 Februari 2022 / Webinar Digital Leadership #2 in 2022 PT PLN (Persero), "Growing Beyond Limits Through Merger and Acquisition", February 16, 2022
- Webinar HSSE Talk #2, "Safety Culture for Zero Accident", PT PLN (Persero), 23 Februari 2022 /
- Pelatihan Pemadam Kebakaran untuk PLTU Batubara Low Rank Coal yang diselenggarakan via Zoom oleh IP dan PJB, 13-21 April 2022 / Webinar HSSE Talk #2, "Safety culture for Zero Accident", PT PLN (Persero), February 23, 2022
- Webinar Asset Management Series #4, Pemanfaatan Risiko & Criticality Asset pada Pengambilan Keputusan Asset Management, PT PLN (Persero), 5 Juli 2022 / Webinar Assets Management Series #4, Utilization of Risk & Criticality of Assets in Asset Decision Making Management, PT PLN (Persero), July 5, 2022
- Webinar Meningkatkan Kesiapan Bakat untuk Pekerjaan Ramah lingkungan, oleh Gugus Tugas B20 ESC, 15 Juli 2022 / Webinar Enhancing Talent Readiness for Green Jobs, by B20 ESC Task Force, July 15, 2022
- Webinar Peran dan Dukungan PLN Dalam Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik, oleh Ruang Energi, 20 Juli 2022 / Webinar on the Role and Support of PLN in Building an Electric Vehicle Ecosystem, by Ruang Energi, July 20, 2022
- Webinar New Paradigm of Talent Management, oleh PLN Corporate University, 21 Juli 2022 / New Paradigm Webinar of Talents Management, by PLN Corporate University, July 21, 2022
- Webinar Reinventing HR Role & Strategy to Accelerate Business Growth in The Post-Pandemic Times, oleh SWA Media Inc, 27 Juli 2022, SWA Media / Webinar Reinventing HR Roles & Strategy to Accelerate Business Growth in The Post-Pandemic Times, by SWA Media Inc, July 27, 2022, SWA Media
- Webinar Mempercepat Transisi Penggunaan Energi Berkelanjutan, oleh Gugus Tugas B20 ESC, 10 Agustus 2022 / Webinar to Accelerate the Transition to Sustainable Energy Use, by the B20 ESC Task Force, August 10, 2022
- Webinar Optimalisasi Sistem Proteksi Kebakaran di Lingkungan PLN Group, 7 September 2022 / Webinar on Optimizing Fire Protection Systems in the PLN Group, September 7, 2022
- Webinar Digital Transformation: New Goal Require New Strategies, oleh PLN Pusdiklat, 21 September 2022 / Webinar Digital Transformation: New Goals Require New Strategies, by PLN Pusdiklat, September 21, 2022
- Webinar The Balance Between Human Work and Intelligent Robots, oleh Forum Human Capital Indonesia BUMN, 21 September 2022 / The Balance webinar Between Human Work and intelligent Robots, by the SOE Indonesia Human Capital Forum, 21 September 2022
- Webinar Building Stronger Foundation for Growth, oleh Kementerian BUMN, 22 September 2022 / Webinar building stronger Foundation for Growth, by the Ministry of BUMN, September 22, 2022
- Executing Business Strategy in Challenging Era, oleh PLN Pusdiklat, 12 Oktober 2022 / Executing Business Strategy in Challenging Era, by PLN Pusdiklat, October 12, 2022
- SOE Internasional Conference-Driving Sustainable & Inclusive Growth, oleh Kementerian BUMN, 17-18 Oktober 2022 / SOE International Conference-Driving Sustainable & Inclusive Growth, by the Ministry of SOEs, October 17-18, 2022
- Indonesia Energy Investment Landscape, oleh PLN Pusdiklat, 26 Oktober 2022 / Indonesia Energy Investment Landscape, by PLN Pusdiklat, October 26, 2022
- Benchmarking/Studi Banding ke Astra tentang MAKER terintegrasi Holding Sub-Holding, 27 Oktober 2022 / Benchmarking / Comparative Study to Astra regarding integrated MAKER Holding Sub-Holding, October 27, 2022
- Mandiri Sustainability Forum 2022 - Industry for Tomorrow, oleh Mandiri Institute, 02 November 2022 / Mandiri Sustainability Forum 2022 - Industry for Tomorrow, by Mandiri Institute, November 2, 2022
- Investment Planning and Prioritization in Asset Management, oleh PLN Pusdiklat, 08 November 2022 / Investment Planning and Prioritization in Assets Management, by PLN Pusdiklat, November 8, 2022
- Sharing Session Tata Kelola Terintegrasi oleh Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk, 29 Desember 2022 / Sharing Session of Integrated Governance by the Risk Management Director of PT Bank Mandiri Tbk, December 29, 2022

Pernyataan Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berkewajiban untuk bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris. Atas hal tersebut, Perseroan

Statement of Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Members of the Nomination and Remuneration Committee must be professional in carrying out their duties and responsibilities, including in providing opinions to the Board of Commissioners. Thus, the Company guarantees that all

menjamin bahwa seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan personil yang independen, sehingga bebas dari benturan kepentingan dan dapat bersikap objektif dalam pelaksanaan tugas.

members of the Nomination and Remuneration Committee are independent personnel, so that they are free from conflicts of interest and can act objectively in carrying out their duties.

Pengungkapan independensi masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Disclosure of independence of each member of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2022

Independence of the Nomination and Remuneration Committee Members in 2022

Kriteria Independensi / Independence Criteria	AS	DP	ES	TB	R	AHM
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama PLN. / He/she does not have any affiliations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Main Shareholder of PLN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN. / He/she does not have any affiliations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Majority Shareholder of PLN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. / He/she does not serve as a party official and/or candidate/legislative member and/or a candidate of or serve as head/deputy head of local government.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan bentur Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait jabatan di PLN. / He/she does not have other positions that may cause a conflict of interest related to the position at PLN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kebijakan Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, remunerasi bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah berupa honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perseroan, dengan pajak ditanggung oleh Perseroan. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Nomination and Remuneration Committee Remuneration Policy

Pursuant to the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, remuneration for members of the Nomination and Remuneration Committee is in the form of a maximum honorarium of 20% of the salary of the Company's President Director, with taxes borne by the Company. Members of the Nomination and Remuneration Committee are not allowed to receive income other than the honorarium.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan 111 (seratus sebelas) kali rapat yang terdiri dari rapat internal Komite, rapat bersama Dewan Komisaris, rapat anggota non-Komisaris, serta rapat dengan para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING Meeting Policy and Implementation

The Nomination and Remuneration Committee held 111 (one hundred eleven) meetings which consist of internal Committee meetings, joint meetings with the Board of Commissioners, meetings with non-Commissioners members, as well as meetings with interested parties according to the demands of the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee.



No.	Jenis Rapat / Type of Meeting	Jumlah / Total
1	Rapat dengan Dewan Komisaris / Meeting with the Board of Commissioners	21 kali
2	Rapat internal / Internal meeting	25 kali
3	Rapat dengan Komite lain / Meeting with other Committee	2 kali
4	Rapat dengan Direktur, SEVP, EVP Terkait / Meeting with the related Directors, SEVP's, EVP's	63 kali
Jumlah Rapat / Total Meetings		111 kali

Frekuensi Kehadiran Anggota Komite

Frekuensi kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam penyelenggaraan rapat di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Frequency of Attendance of Committee Members

The frequency of attendance of each member of the Nomination and Remuneration Committee in the overall implementation of the Committee meetings in 2022 can be seen in the following table:

Frekuensi Kehadiran Anggota Komite dalam Rapat Tahun 2022

No.	Nama Anggota / Member Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) / Attendance Percentage (%)
1	Amien Sunaryadi	Ketua dan Anggota / Head and Member	88	87	99
2	Dudy Purwagandhi	Sekretaris dan Anggota / Secretary and Member	87	86	99
3	Eko Sulistyono	Anggota / Member	87	87	100
4	Tedi Bharata*	Anggota / Member	66	65	98
5	Roikhan	Anggota / Member	111	111	100
6	Andi Hanif Mursid	Anggota / Member	111	111	100

*) Mulai menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada 28 Maret 2022

*) Serving as member of the Nomination and Remuneration Committee from March 28, 2022

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2022

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Piagam Komite dan program kerja Komite untuk tahun 2022, dengan perincian sebagai berikut:

1. Menelaah Usulan Penunjukan Pejabat Direksi dan Dekom Anak-Anak Perusahaan.
2. Menyampaikan *Nominated Talent* BoD-1 dari PT PLN (Persero) ke Kementerian BUMN
3. Menelaah Usulan Kandidat Pemangku Jabatan Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI) PT PLN (Persero)
4. Menelaah Usulan Pemangku Jabatan Jenjang BOD-I
5. Menelaah Permohonan Persetujuan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero)
6. Menelaah Usulan Penetapan Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2022 dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2021

Nomination and Remuneration Committee Duty Implementation in 2022

The Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Committee Charter and the Committee's 2022 work program with the following details:

1. Reviewing the Proposal for the Appointment of Board of Directors and Board of Commissioners Subsidiaries.
2. Presenting Nominated Talent BoD-1 from PT PLN (Persero) to the Ministry of BUMN
3. Reviewing Candidates for Head of Internal Audit Unit (KSPI) of PT PLN (Persero)
4. Reviewing the Proposal of BOD-1 Candidate
5. Reviewing the Request for Approval for Changes in the Organization and Working Procedures of PT PLN (Persero)
6. Reviewing Proposal for Determining the Board of Directors' Salary and Honorarium for the Board of Commissioners for 2022 and Tantiem for Board of Directors and Board of Commissioners for 2021

- | | |
|---|--|
| <p>7. Menelaah Rencana Pembentukan <i> Holding </i> dan <i> Sub-Holding </i> PT PLN (Persero)</p> <p>8. Menelaah Usulan Perubahan <i> Blue Print </i> Organisasi dan Pengusulan Wakil PLN Pada <i> Sub-Holding </i>/Anak Perusahaan Dalam Rangka Pembentukan <i> Holding </i> dan <i> Sub-Holding </i> PLN</p> <p>9. Menelaah Usulan Penambahan Jabatan Direktur Perencanaan dan Niaga PT Pelayaran Bahtera Adhiguna</p> <p>10. Berkontribusi dalam rekomendasi Dewan Komisaris terkait Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar PLN tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT PLN (Persero) sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020</p> <p>11. Berkontribusi dalam tanggapan tentang Usulan Direksi PLN untuk Laporan Manajemen PT PLN (Persero)</p> | <p>7. Reviewing the Plan for of PT PLN (Persero) Holding and Sub-Holding Establishment</p> <p>8. Reviewing the Proposal of Changes in the Blue Print of Organization and Proposal for PLN Representatives in Sub-Holdings /Subsidiaries in Establishing Holding and Sub-Holding of PLN</p> <p>9. Reviewing the Proposal for Addition to the Position of Planning and Commerce Director of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna</p> <p>10. Contributing to the recommendations of the Board of Commissioners regarding the Adjustment of Article 3 of the Articles of Association of PLN concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of PT PLN (Persero) according to the 2020 Indonesian Business Field Standard Classification</p> <p>11. Contributing in response to the PLN Board of Directors Proposal for PT PLN (Persero) Management Report..</p> |
|---|--|

Key Performance Indicators (KPI) Komite Nominasi dan Remunerasi

Secara berkala, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian *self-assessment* berdasarkan pemenuhan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators/KPI*), dengan hasil untuk tahun 2022 sebagai berikut:

Key Performance Indicators (KPI) of the Nomination and Remuneration Committee

Periodically, the Nomination and Remuneration Committee conducts self-assessments based on the fulfillment of Key Performance Indicators (KPI), with the 2022 results as follows:

Pemenuhan Indikator Kinerja Utama Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2022

Fulfillment of the Nomination and Remuneration Committee Key Performance Indicators in 2022

Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Kuantitas/Tolak Ukur / Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan / Achievement
		Setahun / In a year	Bobot / Value	
1. Menyampaikan Rencana Kerja dan KPI Komite / Submitting the Committee's Work Plan and KPIs	Rencana Kerja dan KPI Komite Tahunan 2021 / 2021 Annual Committee Work Plan and KPI	1 <i>paper</i>	5	1 <i>paper</i> 5
	Ketepatan waktu penyampaian / Timeliness of submission	Desember 2021 / December 2021	4	Desember 2021 / December 2021 4
2. Mengawasi Efektivitas Pengelolaan Organisasi dan SDM (termasuk Transformasi Organisasi) / Supervising Organizational and HR Management Effectiveness (including Organizational Transformation)	<ul style="list-style-type: none"> Mengawasi Implementasi Struktur Organisasi yg sudah disetujui (2x setahun) / Supervising the Organizational Structure Implementation approved (2x a year) Mereview usulan perubahan struktur BoD-1 / Reviewing proposed changes to the structure of BoD-1 Meminta DirHCM memaparkan rapat / semesteran atau sewaktu diperlukan / Requiring the Director of HCM to present the semiannual meeting or as needed Dekom memberikan pendapat semesteran atau sewaktu-waktu / The Board of Commissioners provides opinion semiannually or at any time Memonitor pelaksanaan ISO / Monitor the implementation of ISO Memonitor struktur Organisasi PLN Gas dan Geothermal / Monitoring the organizational structure of PLN Gas and Geothermal Memonitor konsolidasi Geothermal dan pembentukan komunitas Geothermal / Monitoring Geothermal consolidation and formation of Geothermal community 	Frekuensi rapat minimal 2x setahun / Meetings of at least 2x a year	5	2 kali setahun / 2 times a year 5
	Jumlah saran/ pendapat Dekom yang ditindak lanjuti / Number of suggestions/ opinion of the Board of Commissioners followed up	2	2 kali setahun / 2 times a year 2	

Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Kuantitas/Tolak Ukur / Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan / Achievement	
		Setahun / In a year	Bobot / Value		
3. Penilaian Kinerja Direksi / Board of Directors Performance Assessment	Mengawasi hasil Kinerja Direksi triwulanan / Supervising quarterly Board of Directors Performance results	Laporan pencapaian KPI Direksi pada LM triwulanan 4 kali setahun / Board of Directors KPI achievement report on quarterly LM 4 times a year	4	4 kali setahun / 4 times a year	4
4. Mengawasi HSSE / HSSE Supervision	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan update Direksi setiap rapat konsultasi (setiap bulan); / Ensuring updates to the Board of Directors at every consulting meeting (every month); Meminta Direksi untuk merumuskan standar HSSE yang digunakan; / Requesting the Board of Directors to formulate the HSSE standards used; Meminta Direksi untuk melaporkan jenis Mitigasi Risiko Kecelakaan Kerja yg diimplementasikan; / Requesting the Board of Directors to report the type of Work Accident Risk Mitigation implemented; Memastikan Direksi melakukan rapat koordinasi PLN grup (setahun sekali); / Ensuring that the Board of Directors holds a PLN group coordination meeting (once a year); Mengawasi Implementasi penanganan Covid (perlu SOP untuk SDM guna menavigasi bila terjadi penyebaran virus baru. Misal SOP untuk operator P2B dalam melaksanakan tugasnya, dengan antar jemput dll); / Ensuring the implementation of Covid handling (requires SOP for HC to navigate when a new virus spreads. For example, SOP for P2B operators in carrying out their duties, with pick-ups, etc.); Memonitor ESG (Environment, Social and Governance) terkait transisi Energi, dan perubahan iklim. / Monitoring ESG (Environmental, Social and Governance) related to the Energy transition, and climate change. 	Update HSSE setiap rapat Konsultasi / Update of HSSE on every Consultation meeting	6	Update lengkap HSSE setiap rapat Konsultasi / Update of HSSE on every Consultation meeting	6
5. Mengawasi TJSL dan UMKM / TJSL and MSME Supervision	Memastikan dilaksanakan program TJSL dan UMKM serta melakukan monitoring terhadap program tersebut / Ensuring that the TJSL and MSME programs are implemented and monitoring these programs	Monitor laporan pelaksanaan program TJSL/UMKM / Monitoring reports on the implementation of the TJSL/MSME programs	2	Rapat 3 kali / 3 times meeting	2
6. Mengawasi Pengelolaan & Pengembangan SDM (SDM Development) / Monitoring of HC Development and Management	<p>Memonitor mekanisme Talent Pool PLN termasuk hubungannya dengan AP, dan update asesmen untuk BoD-1, BoD-2 dan BoD-3. / Monitoring the PLN Talent Pool mechanism including its relationship with Subsidiaries, and updates assessment for BoD-1, BoD-2 and BoD-3.</p> <p>Memasukkan ke dalam <i>Board Manual</i> mengenai penunjukan pejabat AP yg langsung ditunjuk oleh pemegang saham PLN. / Incorporating into the Board Manual regarding the appointment of AP officials who are directly appointed by PLN shareholders.</p> <p>Memonitor sistem hubungan industrial yg dibangun oleh PLN dengan karyawan termasuk dalam bentuk PKB. / Monitoring the industrial relations system those built by PLN with employees are included in the form of PKB.</p> <p>Memonitor Mitigasi terhadap Tenaga Alih Daya. (Memonitor hubungan kerja dan kontrak dengan vendor alih daya). / Monitoring the Mitigation of Outsourcing. (Monitor working relationships and contracts with outsourced vendors).</p>	Monitor <i>talent pool</i> PLN termasuk hubungannya dengan AP / Monitoring the talent pool of PLN including its relationship with Subsidiaries	2	Rapat 4 kali / 4 times meeting	2
		Monitor sistem hubungan industrial yg dibangun oleh PLN dengan karyawan termasuk dalam bentuk PKB / Monitoring the industrial relations system those built by PLN with employees are included in the form of CLA	2	Rapat 3 kali / 3 times meeting	2

Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Kuantitas/Tolak Ukur / Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan / Achievement	
		Setahun / In a year	Bobot / Value		
	<p>Kontrak harus proper tidak hanya perlindungan pekerja tetapi masalah <i>properness</i> kontrak, termasuk dalam hal pemilihan vendor. / The contract must be appropriate not only for worker protection but also for the <i>properness</i> of the contract, including in terms of vendor selection.</p> <p>Review kontrak2 eksisting, bila perlu meminta bantuan konsultan (termasuk kebijakan umum dalam konteks menyediakan vendor terkait penyediaan tenaga alih daya). / Reviewing existing contracts, if necessary, seek consultant assistance (including general policies in the context of providing vendors regarding the supply of outsourcing).</p>				
7. Menelaah usulan Direksi tentang Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan / Reviewing the proposals of the Board of Directors regarding the Directors and Commissioners of Subsidiaries	<p>Memastikan Direksi membuat perencanaan 6 bulanan untuk pengisian/penggantian Direksi/Komisaris AP / Ensuring that the Board of Directors makes a 6-month plan for filling/replacing Directors/Commissioners of subsidiaries</p> <p>Menelaah dan menyampaikan hasil telaah atas usulan Direksi setelah data lengkap termasuk jika tidak ada usulan / Reviewing and submitting the results of the review of the Board of Directors' proposals after the data is complete, including if there are no suggestions</p> <p>Ketepatan waktu pemberian telaahan / Timeliness of review</p>	<p>2 kali setahun / 2 times a year</p> <p>Menanggapi usulan Direksi termasuk jika tidak ada usulan / Respond to the proposal of the Board of Directors including if there is no suggestion</p> <p>14 hari kerja / 14 working days</p>	<p>2</p> <p>6</p> <p>4</p>	<p>2 kali setahun 2 times a year</p> <p>100 % usulan / 100% of proposal</p> <p>Rata-rata 7 hari kerja / Average of 7 working days</p>	<p>2</p> <p>6</p> <p>4</p>
8. Menelaah usulan Direksi tentang Sekper dan KSPI / Reviewing the proposal of the Board of Directors regarding the Corporate Secretary and KSPI	<p>Menelaah dan menyampaikan hasil telaah atas usulan Direksi setelah data lengkap termasuk jika tidak ada usulan / Reviewing and submitting the results of the review of the Board of Directors' proposals after the data is complete, including if there are no suggestions</p> <p>Ketepatan waktu pemberian telaahan / Timeliness of review</p>	<p>Menanggapi usulan Direksi termasuk jika tidak ada usulan / Respond to the proposal of the Board of Directors including if there is no suggestion</p> <p>14 hari kerja / 14 working days</p>	<p>4</p> <p>4</p>	<p>100 % usulan / 100% of proposal</p> <p>Rata-rata 13 hari kerja / Average of 13 working days</p>	<p>4</p> <p>4</p>
9. Mengusulkan Talent Pool PT PLN (Persero) ke BUMN / Proposing PT PLN (Persero) Talent Pool to SOEs	<p>Mereview Usulan Direksi mengenai Talent Pool tahun berjalan yang telah sesuai dengan ketentuan BUMN dan mengirimkannya kepada pemegang saham dengan tepat waktu / Reviewing the Board of Directors' proposals regarding the current year's Talent Pool which are in accordance with BUMN regulations and sending them to shareholders in a timely manner</p>	<p>1x setahun / 1 time a year</p>	<p>4</p>	<p>1x setahun / 1 time a year</p>	<p>4</p>
10. Menelaah Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris / Reviewing the Remuneration Policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners	<p>Meminta Direksi untuk memberikan angka Benchmark untuk usulan remunerasi Direksi sesuai dengan metodologi yang dirumuskan / Requesting the Board of Directors to provide Benchmark figures for the proposed remuneration of the Board of Directors in accordance with the formulated methodology</p>	<p>1 berkas usulan remunerasi Dirut / 1 file of the Board of Directors remuneration proposal</p>	<p>2</p>	<p>Usulan siap 11 hari sebelum RUPS / Proposal is ready 11 days before the GMS</p>	<p>1</p>
11. Menelaah Pembentukan Anak Perusahaan/ Yayasan/ Organisasi / Reviewing the Establishment of Subsidiaries/Foundations/ Organizations	<p>Membuat telaah dan menanggapi permintaan Direksi; / Reviewing and responding to requests from the Board of Directors;</p> <p>Memonitor pembentukan cucu perusahaan (contoh untuk mengelola limbah/FABA); / Monitoring the establishment of subsidiary (e.g., for dealing with waste/FABA)</p> <p>Menelaah mengenai Anak Perusahaan (mana yg mandatori dan yg tidak). Bila sudah tersedia bidang usaha terkait di luar PLN sebaiknya dilakukan kerjasama, bila di luar PLN tidak ada, maka dilaksanakan oleh PLN. / Examining Subsidiaries (which one is mandatory and not). If there are related business fields outside PLN, cooperation should be carried out, if there are none outside PLN, then it will be carried out by PLN.</p>	<p>14 hari setelah surat masuk / 14 days after the letter is received</p>	<p>3</p>	<p>Rata-rata 1 hari kerja / Average of 1 working day</p>	<p>3</p>



Program Kerja / Work Program	Uraian / Description	Kuantitas/Tolak Ukur / Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan / Achievement	
		Setahun / In a year	Bobot / Value		
12. Menelaah Penugasan Lain dari Dewan Komisaris: / Reviewing Other Assignments from the Board of Commissioners: • Menyiapkan Surat Keputusan-Surat Keputusan terkait dengan Internal Dewan Komisaris (SK Komite, IKS, THR dll), / Preparing Decrees related to Internal Board of Commissioners (Committee SK, IKS, THR etc.) • Menelaah calon AKNK Komite Dewan Komisaris, Lain-lain. / Examining the candidates for AKNK Committee of the Board of Commissioners, Others.	Menelaah dan menyampaikan hasil telaah kepada Dewan Komisaris / Reviewing and submitting the results of the review to the Board of Commissioners	Menanggapi penugasan Dewan Komisaris / Responding to the assignment of the Board of Commissioners	4	100 % usulan / 100% of proposal	4
	Ketepatan waktu penyampaian / Timeliness of delivery	Tanggal jatuh tempo SK / SK due date	4	Sampai dengan tanggal jatuh tempo / Until the due date	4
13. Menyampaikan Laporan Kegiatan Komite Triwulanan dan Tahunan / Submitting Quarterly and Annual Committee Activity Reports	Laporan Kegiatan Komite Triwulanan Tahun 2022 dan Tahunan Tahun 2022 / 2022 Quarterly and 2022 Annual Committee Activity Reports Ketepatan waktu penyampaian / Timeliness of delivery	4 kali setahun / 4 times a year	6	4 kali / 4 times	6
		30 hari sejak berakhirnya periode / 30 days from the end of the period	4	Rata-rata 9 hari sejak berakhirnya periode / Average of 9 days from the end of the period	4
14. Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meeting	Menghadiri Rapat Dewan komisaris / Attending Board of Commissioners Meeting	Sesuai jumlah rapat Dekom / In accordance with the number of Board of Commissioners meetings	6	100%	7
15. Rapat Komite / Committee Meeting	Mengadakan rapat Komite Dewan Komisaris / Attending Board of Commissioners Committee Meeting	24 kali setahun / 24 times a year	6	25 kali / 25 times	6
16. Kunjungan Kerja ke Unit bila memungkinkan atau via Zoom / Working Visit to Unit if possible or via Zoom	Melakukan kunjungan kerja ke Unit/ AP / Working visit to Unit / Subsidiaries	2 kali setahun / 2 times a year	3	16 kali / 16 times	3
17. Pengenalan/ Induksi / peningkatan kompetensi	Mengikuti seminar/workshop/ diklat / Attend seminars/workshops /training	2 kali setahun / 2 times a year	3	27 kali / 27 times	3
18. Pengelolaan GCG / GCG Management	Pencapaian skor asesmen GCG aspek Dewan Komisaris Tahun 2022 / Achievement of the 2022 GCG Assessment Score for the Board of Commissioners aspects	Capaian skor minimum 95% / Minimum score achievement of 95%	3	95,118%	3
TOTAL			100	100	

DIREKSI

Direksi merupakan organ dalam tata kelola yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan, yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi adalah pihak yang berwenang dalam mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan batasan yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a governance organ in charge of and responsible for managing the Company, which is carried out for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company. Board of Directors is authorized to represent the Company, both inside and outside the court, with the limits specified in the Articles of Association.

Berdasarkan *Board Manual* PLN, Direksi mengambil keputusan secara kolegial melalui pelaksanaan rapat Direksi. Dengan tetap memenuhi akuntabilitas pengambilan keputusan dan pendelegasian kewenangan, Direksi dapat mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada Direktur tertentu, pejabat Perseroan, ataupun pihak lain.

PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA DIREKSI

Direksi menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Tata kelola berdasarkan Anggaran Dasar dan berbagai peraturan terkait dirangkum dalam *Board Manual* bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dengan versi terkini ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Juli 2022.

Board Manual PLN memuat sejumlah ketentuan terkait tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Tata Laksana Kerja Terkait Jabatan;
3. Tata Laksana Kerja Terkait Batas Kewenangan;
4. Tata Laksana Kerja Terkait Pelaksanaan dan Pengawasan Operasional Perusahaan;
5. Alur Kerja Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI

Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta *Board Manual* PLN, Direksi memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perusahaan;
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun dan jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Based on the PLN Board Manual, the Board of Directors take collegial decisions collegially through the Board of Directors meeting. Through accountable decision-making and delegation of authority, the Board of Directors delegate some of its decision-making authority to certain Directors, Company officials or other parties.

BOARD MANUAL

The Board of Directors carries out its duties, responsibilities, and authorities based on the provisions in the Articles of Association of the Company. Governance based on the Articles of Association and various related regulations are summarized in the Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors, with the latest version signed by all members of the Board of Commissioners and Directors in July 2022.

The PLN Board Manual contains provisions related to the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors, including:

1. Introduction
2. Board Charter related to Position
3. Board Charter related to Limits of Authority
4. Board Charter related to Implementation and Supervision of the Company's Operations
5. Workflow on the authority of the Board of Directors that requires approval from the Board of Commissioners and the authority of the Board of Directors that requires approval of the GMS after obtaining a written response from the Board of Commissioners

DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with laws and regulations, the Articles of Association, and the PLN Board Manual, the Board of Directors has the following duties, responsibilities and authorities:

1. Issuing policies in leading and managing the Company;
2. Arranging provisions on employment, including the determination of salaries, retirement and old-age benefits, and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations and GMS resolutions;
3. Appointing and dismissing the Company's employees based on the Company's employment regulations and the prevailing laws and regulations;



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain atau badan lain; dan 5. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Arranging the delegation of authority of the Board of Directors to represent the Company in and out of court to a member or several members of the Board of Directors specifically appointed for the purpose, or to one or more employees of the Company, either individually or collectively, or to other persons or institutions; and 5. Carrying out other actions both related to management and ownership in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association and resolutions of the GMS pursuant to the prevailing laws and regulations. |
|--|---|

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya dibahas di dalam RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
3. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelazimannya yang berlaku bagi suatu perusahaan;
4. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
5. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada RUPS;
6. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta Pemegang Saham;
7. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
8. Menyiapkan neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

In performing its main duties, the Board of Directors is obliged to:

1. Perform and ensure the implementation of business and activities of the Company in accordance with its purpose and objectives and business activities;
2. Prepare for timely corporate development plans, work plans, and annual budgets, including other plans related to the implementation of the Company's business and activities, and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders to be approved at the GMS;
3. Organize and maintain the Company's books and administration in accordance with the prevailing rules for a company;
4. Develop an accounting system in accordance with the financial accounting standards and the principles of internal control, especially the functions of administration, recording, storage, and supervision;
5. Provide accountability and any information regarding the circumstances and the Company's business in the form of annual reports, including annual calculations, to the GMS;
6. Provide periodic reports based on the procedures and time set out in the applicable provisions and other reports each time requested by the Shareholder;
7. Prepare the Company's organizational structure in detail with job descriptions;
8. Prepare balance sheets and income statement that have been validated by the GMS for the Minister of Law and Human Rights of Indonesia based on the laws and regulations; and
9. Perform other obligations based on the provisions stated in the Articles of Association and validated in the GMS based on the laws and regulations.

10. Meminta persetujuan RUPS untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama pemegang saham Seri A Dwiwarna pada anak perusahaan eks BUMN dalam hal: (i) pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, (ii) perubahan anggaran dasar, (iii) pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan untuk dan atas nama pemegang saham Seri A Dwiwarna.

10. Request approval from the GMS to take action for and on behalf of the Series A Dwiwarna shareholder in a former SOE subsidiary in terms of: (i) appointment and dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, (ii) changes to the articles of association, (iii) nominating candidates members of the Board of Directors and candidates for members of the Board of Commissioners.
11. Report every implementation of action for and on behalf of the Series A Dwiwarna shareholder.

KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Perseroan melakukan perubahan komposisi anggota Direksi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku RUPS. Informasi terperinci mengenai perubahan komposisi anggota Direksi pada tahun 2022 telah disajikan pada bab Profil Perusahaan subbagian Perubahan Komposisi Direksi.

Komposisi anggota Direksi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS MEMBERSHIP COMPOSITION IN 2022

In 2022, the Company made 2 (two) changes to the composition of the members of the Board of Directors based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS. Detailed information regarding changes in the composition of members of the Board of Directors in 2022 has been presented in the Company Profile chapter, Changes in the Composition of the Board of Directors .

Composition of members of the Board of Directors in 2022 are as follows:

Komposisi Anggota Direksi Tahun 2022

No.	Nama / Name	Inisial / Initial	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode / Term of Office
1	Darmawan Prasodjo	DP	Direktur Utama (1 Januari-31 Desember 2022) / President Director (January 1 - December 31, 2022)	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN selaku RUPS No. SK-389/MBU/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 / Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-389/MBU/12/2021 dated December 6, 2021 Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN selaku RUPS No. SK- 325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 / Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK- 325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019 	23 Desember 2024 / December 23, 2024
2	Sinthya Roesly	SR	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (1 Januari-21 September 2022) / Director of Finance and Risk Management (January 1 - September 21, 2022) Direktur Keuangan (21 September-31 Desember 2022) / Director of Finance (September 21 - December 31, 2022) 	<ul style="list-style-type: none"> Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 / Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019 	23 Desember 2024 / December 23, 2024
3	Yusuf Didi Setiarto	YDS	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia (1 Januari-21 September 2022) / Director of Human Capital Management (January 1 - September 21, 2022) Direktur Legal dan Manajemen Human Capital (21 September-31 Desember 2022) / Director of Legal and Human Capital Management (September 21 - December 31, 2022) 	<ul style="list-style-type: none"> Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-392/MBU/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 / Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-392/MBU/12/2021 dated December 7, 2021 	7 Desember 2026 / December 7, 2026



No.	Nama / Name	Inisial / Initial	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode / Term of Office
4	Evy Haryadi	EH	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Perencanaan Korporat (1 Januari-21 September 2022) / Director of Corporate Planning (January 1 - September 21, 2022) Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem (21 September-31 Desember 2022) / Director of Transmission and System Planning (September 21 - December 31, 2022) 	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-200/MBU/6/2021 tanggal 16 Juni 2021 / Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-200/MBU/6/2021 dated June 16, 2021	16 Juni 2026 / June 16, 2026
5	Edi Srimulyanti	ES	Direktur Retail dan Niaga / Director of Retail and Commerce	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-213/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022 / Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-213/MBU/09/2022 dated September 21, 2022.	21 September 2027 / September 21, 2027
6	Hartanto Wibowo	HW	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Energi Primer (6 Januari-21 September 2022) / Director of Primary Energy Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis (21 September-31 Desember 2022) / Director of Corporate Planning and Business Development (September 21 - December 31, 2022) 	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-2/MBU/01/2022 tanggal 6 Januari 2022 / Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-2/MBU/01/2022 dated January 6 2022	6 Januari 2027 / January 6, 2027
7	Wiluyo Kusdwiarto	WK	Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Project Management and New and Renewable Energy	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/2017 tanggal 24 Juli 2017 jo Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 / Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-138/MBU/2017 dated July 24, 2017 jo Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020	25 Juli 2027 / July 25, 2027
8	Adi Lumakso	AL	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan (1 Januari-21 September 2022) / Director of Regional Business for Sumatra and Kalimantan (January 1-September 21, 2022) Direktur Manajemen Pembangkitan (21 September-31 Desember 2022) / Director of Power Plant Management (September 21 - December 31, 2022) 	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-392/MBU/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 / Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-392/MBU/12/2021 dated December 6, 2021	7 Desember 2026 / December 7, 2026
9	Adi Priyanto	AP	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (1 Januari-21 September 2022) / Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara (January 1 - September 21, 2022) Direktur Distribusi (21 September-31 Desember 2022) / Director of Distribution (September 21 - December 31, 2022) 	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-392/MBU/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 / Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-392/MBU/12/2021 dated December 7, 2021	7 Desember 2026 / December 7, 2026
10	Rudy Hendra Prastowo*	RHP	Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 / Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020	6 Januari 2022 / January 6, 2022

No.	Nama / Name	Inisial / Initial	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode / Term of Office
11	Bob Saril*	BS	Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Director of Commerce and Customer Management	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 / Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020	21 September 2022 / September 21, 2022
12	Haryanto W.S*	HWS	Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali	Kepmen BUMN selaku RUPS No. S-211/MBU/10/2015 tanggal 8 September 2015 jo Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-357/MBU/11/2020 tanggal 4 November 2020 / Decree of the Minister of SOEs as GMS No. S-211/MBU/10/2015 dated September 8, 2015 jo Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-357/MBU/11/2020 dated November 4, 2020	21 September 2022 / September 21, 2022

*) Sudah tidak menjabat sebagai Direktur Perseroan pada 31 Desember 2022

*) No longer serving as Director of the Company as of December 31, 2022

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Perseroan mengatur pembagian tugas bagi anggota Direksi untuk menjaga serta memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dapat dilaksanakan secara efektif. Secara mendasar, pembagian tugas anggota Direksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembagian tugas anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
2. Penjabaran tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) yang mengatur mengenai kewenangan setiap anggota Direksi.

Pembagian tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi PLN berdasarkan struktur organisasi sesuai Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0054.P/DIR/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

DIVISION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company regulates the division of duties for members of the Board of Directors to maintain and ensure that the duties and responsibilities of each member are carried out effectively. Fundamentally, the division of duties for members of the Board of Directors is carried out with the following provisions:

1. The division of duties to the member of the Board of Directors is determined by GMS Resolutions. If the GMS does not do so, the division of duties is determined based on a meeting of the Board of Directors.
2. The description of duties, authorities, and responsibilities of members of the Board of Directors is further specified in Regulation of the Board of Directors on Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero) stipulating the authority of each member of the Board of Directors.

For the composition of the Board of Directors as of December 31, 2022, the division of duties is determined based on the Board of Directors Decree No. 0054.P/DIR/2022 dated October 20, 2022 on on Organization and Work Procedures PT PLN (Persero), with details of the duties and responsibilities of each Board of Directors explained as follows:

Pembagian Tanggung Jawab dan Tugas Pokok Direksi 31 Desember 2022

Division of Main Duties Responsibilities and of the Board of Directors as of December 31, 2022

No.	Jabatan / Position	Tanggung Jawab / Responsibilities	Tugas Pokok / Main Duties
1	Direktur Utama / President Director	Direktur Utama bertanggung jawab memberikan arahan secara keseluruhan dan mengawasi serta mengendalikan semua aspek strategis, operasional, dan bisnis perusahaan untuk memastikan seluruh tujuan pertumbuhan dan profitabilitas yang ditetapkan dalam perencanaan perusahaan dapat tercapai. / The President Director is responsible for providing overall direction and overseeing and controlling all strategic, operational and business aspects of the company to ensure that all growth and profitability goals set in the Company's plans can be achieved.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin tim manajemen eksekutif perusahaan dan <i>Sub-Holding</i>/anak perusahaan dalam memastikan arah keseluruhan tim manajemen perusahaan selaras dengan visi, misi, dan aspirasi perusahaan; / Leading the executive management team of the company and its Sub-Holdings /subsidiaries in ensuring the overall direction of the Company's management team is aligned with the Company's vision, mission and aspirations; 2. Mewakili perusahaan dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal perusahaan; / Representing the Company in communicating with key external stakeholders; 3. Mengelola visibilitas di seluruh area bisnis perusahaan dan mengambil keputusan akhir dalam keputusan <i>cross-company value chain</i> untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan; / Managing visibility across the company's business areas and take the final say in cross-company decisions value chain to maximize the interests of the company; 4. Menyetujui dan menetapkan alokasi modal dan belanja modal sesuai dengan pendelegasian wewenang pada kegiatan usaha hulu, menengah dan hilir; / Approving and determining the allocation of capital and capital expenditure in accordance with the delegation of authority in upstream, medium and downstream business activities; 5. Mengembangkan strategi dan memantau pencapaian target perusahaan dan <i>Sub-Holding</i>/ anak perusahaan; / Developing strategies and monitoring the achievement of company and Sub-Holding /subsidiary targets; 6. Memantau pelaksanaan strategi dan mengarahkan tim manajemen eksekutif dalam pengambilan keputusan bisnis yang penting; dan / Monitoring strategy execution and directing the executive management team in making important business decisions; and 7. Memastikan perusahaan terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Ensuring the Company continues to increase and provide added value to stakeholders.
2	Direktur Keuangan / Director of Finance	Direktur Keuangan bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola PLN khususnya Direktorat Keuangan yang meliputi memimpin fungsi keuangan korporat secara keseluruhan, di antaranya keuangan, anggaran, <i>treasury</i> , akuntansi, dan tarif, serta memantau kinerja aset PLN untuk memastikan PLN dapat mencapai visi, misi, dan aspirasinya. / The Director of Finance is in charge of leading, fostering and managing PLN, especially the Directorate of Finance which includes leading the overall corporate finance function, including finance, budget, treasury, accounting and tariffs, as well as monitoring the performance of PLN assets to ensure that PLN can achieve its vision, mission, and aspirations.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi strategi dan kebijakan pembiayaan di PLN, termasuk pendanaan, penyediaan, dan pengelolaan dan pemenuhan keuangan terhadap kewajiban dan perpanjangannya; / Overseeing the financing strategies and policies at PLN, including funding, provision, and financial management and fulfillment of obligations and agreements; 2. Memastikan perencanaan dan pengendalian yang tepat waktu dan akurat untuk memastikan PLN memiliki alokasi dana yang cukup untuk mencapai tujuan bisnis yang ditentukan dalam rencana kerja dan anggaran PLN; / Ensuring timely and accurate planning and control to ensure that PLN has an adequate allocation of funds to achieve the business objectives specified in PLN's work plan and budget; 3. Memimpin inisiatif manajemen likuiditas untuk memastikan arus kas yang cukup untuk mendukung operasi PLN dan manajemen investasi; / Leading the liquidity management initiatives to ensure sufficient cash flow to support PLN's operations and investment management; 4. Memimpin inisiatif pelaporan kondisi keuangan PLN, termasuk akuntansi dan analisis pajak; / Leading PLN's financial condition reporting initiatives, including tax accounting and analysis; 5. Memantau kinerja keuangan aset operasional termasuk penilaian dan asuransi aset; / Monitoring the financial performance of operational assets including valuation and asset insurance; 6. Mengembangkan dan mengevaluasi usulan subsidi listrik yang optimal dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; / Developing and evaluating proposals for optimal electricity subsidies in determining the State Revenue and Expenditure Budget; 7. Memastikan penggantian dan pembayaran tepat waktu terkait dengan tarif tenaga listrik dan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Pemerintah; dan / Ensuring timely reimbursement and payment related to electricity tariffs and the Public Service Obligation (PSO) in accordance with applicable regulations in coordination with the Government; And 8. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di Direktorat Keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), manajemen risiko, dan kepatuhan, termasuk menerapkan <i>check and balance</i> melalui <i>4 Eyes Principle</i> untuk proses bisnis yang bersifat kritis dalam kerangka <i>3 Lines Model</i>. / Ensuring planning, implementation and evaluation of all business processes in the Directorate of Finance based on the principles of good corporate governance, risk management, and compliance, including implementing checks and balance through 4 Eyes Principles for critical business processes within the framework of the 3 Lines Model.
3	Direktur Legal dan Manajemen Human Capital / Director of Legal and Human Capital Management	Direktur Legal dan Manajemen <i>Human Capital</i> bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola PLN khususnya Direktorat Legal dan Manajemen <i>Human Capital</i> yang meliputi memimpin strategi sumber daya manusia, pengembangan talenta, pelayanan sumber daya manusia, pelayanan umum, mengawasi keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan lingkungan, serta fungsi hukum, kebijakan, dan kepatuhan. / The Director of Legal and Human Capital Management is in charge of for leading, fostering and managing PLN in particular the Directorate of Legal and Human Capital Management which includes leading human resource strategy, talent development, human resource services, public services, overseeing safety, occupational health, safety and environment, as well as other functions law, policy, and compliance.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi perencanaan tenaga kerja secara keseluruhan, strategi dan kebijakan sumber daya manusia, dan menstandarisasi budaya kerja yang selaras dengan aspirasi PLN untuk meningkatkan kapabilitas SDM; / Overseeing overall workforce planning, human resource strategies and policies, and standardize work culture in line with PLN's aspirations to enhance HC capabilities; 2. Mengoptimalkan pengembangan talenta PLN dan <i>Sub-Holding</i>/ anak perusahaan; / Optimizing the development of PLN and Sub-Holdings/ subsidiaries; 3. Memastikan diberikannya pelayanan terbaik kepada pegawai dan pensiunan yang didukung dengan sistem informasi serta mengelola hubungan industrial dan alih daya; / Ensuring the best service is provided to employees and retirees supported by an information system and managing industrial relations and outsourcing; 4. Memimpin penerapan praktik terbaik keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan, serta terus memantau kinerja HSE; / Leading the implementation of safety, health, security and environmental best practices, and continuously monitor HSE performance; 5. Mengawasi pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan untuk karyawan PLN dan <i>Sub-Holding</i>/ anak perusahaan; / Supervising the development of education and training centers for PLN and Sub-Holding/subsidiary employees; 6. Mengawasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan administrasi umum perusahaan secara terpadu, di antaranya manajemen administrasi dan arsip, manajemen fasilitas, dan koordinator anggaran administrasi umum, serta manajemen aset properti; / Supervising the planning, implementation, and evaluation of the Company's general administrative management in an integrated manner, including administrative and archive management, facility management, and general administration budget coordinator, as well as property asset management;

No.	Jabatan / Position	Tanggung Jawab / Responsibilities	Tugas Pokok / Main Duties
			<ol style="list-style-type: none"> 7. Meninjau kebijakan untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman standar, serta menetapkan protokol standar dan pedoman dalam membuat kebijakan; <i>Reviewing policies to ensure adherence to standard guidelines, and establish standard protocols and guidelines for creating policies;</i> 8. Membuat repositori kebijakan terpusat dan menerapkan pemeriksaan wajib untuk kebijakan serupa/terkait yang ada, sebelum pembuatan kebijakan; <i>Developing a centralized policy repository and implementing mandatory checks for existing similar/related policies, prior to policy generation;</i> 9. Mengelola kepatuhan hukum PLN terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengantisipasi perubahan peraturan perundang-undangan di Perusahaan; <i>Managing PLN's legal compliance with applicable laws and regulations and anticipate changes in laws and regulations in the Company;</i> 10. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di Direktorat Legal dan Manajemen <i>Human Capital</i> berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>), manajemen risiko, dan kepatuhan, termasuk menerapkan <i>check and balance</i> melalui <i>4 Eyes Principle</i> untuk proses bisnis yang bersifat kritis dalam kerangka <i>3 Line Model</i>. <i>Ensuring the planning, implementation and evaluation of all business processes in the Directorate of Legal and Human Capital Management based on the principles of good corporate governance, risk management, and compliance, including implementing checks and balance through 4 Eyes Principles for critical business processes within the framework of the 3 Line Model.</i>
4	Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis / Director of Corporate Planning and Business Development	Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola PLN khususnya Direktorat Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis yang meliputi memimpin dan mengawasi pengembangan dan implementasi bisnis perusahaan secara keseluruhan (termasuk <i>Sub-Holding/ Anak Perusahaan</i>) dengan mengarahkan tim lintas fungsi mulai dan tahap strategi praeksekusi (dan definisi konsep, pemilihan opsi sampai dengan definisi proyek dalam batasan jadwal, anggaran, dan ruang lingkup), memimpin, mengembangkan dan mengawasi manajemen portofolio perusahaan, serta memastikan pemantauan kinerja perusahaan dan <i>Sub-Holding/ Anak Perusahaan</i> / The Director of Corporate Planning and Business Development is responsible for leading, fostering, and managing PLN especially the Directorate of Corporate Planning and Business Development which includes leading and overseeing the development and implementation of the company's business as a whole (including <i>Sub-Holdings/ Subsidiaries</i>) by directing a cross-functional team starting from the strategy stage pre-execution (and concept definition, selection of options up to project definition within the constraints of schedule, budget and scope), leading, developing, and overseeing the management of the Company's portfolio, as well as ensuring monitoring of the performance of the Company and <i>Sub-Holdings/ Subsidiaries</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin fungsi perencanaan korporat secara <i>end-to-end</i> dalam mengembangkan dan mengelola bisnis inti perusahaan; <i>Leading end-to-end corporate planning function in developing and managing the company's core business;</i> 2. Memimpin implementasi strategi dan kebijakan perusahaan dalam perencanaan strategis, proyeksi keuangan perusahaan jangka panjang, pengembangan bisnis lintas wilayah, unit, dan <i>Sub-Holding/ anak perusahaan</i>, serta strategi pendanaan untuk proyek-proyek baru; <i>Leading the implementation of corporate strategies and policies in strategic planning, long-term corporate financial projections, business development across regions, units and Sub-Holdings/ subsidiaries, as well as funding strategies for new projects;</i> 3. Memimpin pengembangan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan di seluruh bisnis dan fungsi perusahaan; <i>Leading the development of the company's overall business strategy across all business and corporate functions;</i> 4. Mengawasi, mengkoordinasikan, dan memastikan pelaksanaan pengembangan bisnis secara korporat untuk mencapai strategi perusahaan untuk produk yang berkaitan dengan kelistrikan, serta memimpin pengembangan produk untuk produk baru diluar bisnis inti perusahaan dan <i>sub-holding/ anak perusahaan</i>; <i>Initiating, coordinating, and ensuring the implementation of corporate business development to achieve the Company's strategy for electricity-related products, as well as leading product development for new products outside the company's core business and Sub-Holdings/ subsidiaries;</i> 5. Memimpin dan mengelola kemitraan bisnis/ pengembangan kemitraan (<i>joint venture</i>), inisiatif sinergi dengan BUMN dan <i>Sub-Holding/ anak perusahaan</i>; <i>Leading and managing business partnerships/partnership development (joint venture), synergy initiatives with SOEs and Sub-Holdings/ subsidiaries;</i> 6. Memimpin fungsi <i>monitoring</i> kinerja perusahaan dan manajemen program strategis; <i>Leading the Company's performance monitoring function and strategic program management;</i> 7. Memimpin perencanaan <i>end-to-end</i> untuk pengadaan energi primer (batu bara dan gas), mulai dan strategi eksekusi rencana sumber, negosiasi, kontrak pengadaan, hingga strategi logistik untuk PLN Group; <i>Leading end-to-end planning for primary energy procurement (coal and gas), starting and executing the sourcing plan strategy, negotiations, procurement contracts, to the logistics strategy for the PLN Group;</i> 8. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan penyediaan, <i>delivery</i>, logistik, dan kualitas batu bara untuk kebutuhan batu bara jangka pendek dan panjang serta memastikan pelaksanaan rencana pengadaan sejalan dengan rencana strategis, anggaran, dan kebutuhan bisnis; <i>Establishing and ensuring the implementation of strategies and policies for supply, delivery, logistics, and quality of coal for short and long term coal needs and ensure the implementation of procurement plans is in line with strategic plans, budgets, and business needs;</i> 9. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan penyediaan, <i>delivery</i>, logistik, dan kualitas gas dan bahan bakar minyak untuk kebutuhan gas dan bahan bakar minyak jangka pendek dan panjang serta memastikan pelaksanaan rencana pengadaan sejalan dengan rencana strategis, anggaran, dan kebutuhan bisnis; dan <i>Establishing and ensuring the implementation of strategies and policies for supply, delivery, logistics, and quality of gas and fuel oil for short- and long-term gas and fuel oil needs and ensure the implementation of procurement plans is in line with strategic plans, budgets and business needs; And</i> 10. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di Direktorat Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>), manajemen risiko, dan kepatuhan, termasuk menerapkan <i>check and balance</i> melalui <i>4 Eyes Principle</i> untuk proses bisnis yang bersifat kritis dalam kerangka <i>3 Lines Model</i>. <i>Ensuring the planning, implementation and evaluation of all business processes in the Directorate of Corporate Planning and Business Development based on the principles of good corporate governance, risk management, and compliance, including implementing checks and balance through 4 Eyes Principles for critical business processes within the framework of the 3 Lines Model.</i>

No.	Jabatan / Position	Tanggung Jawab / Responsibilities	Tugas Pokok / Main Duties
5	Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Project Management and New and Renewable Energy	Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola PLN khususnya Direktorat Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan yang meliputi memimpin dan mengelola perencanaan dan enjiniring konstruksi untuk proyek-proyek baru dan perencanaan awal hingga Engineering, Procurement, and Construction (EPC), serta untuk independent Power Producer (IPP), pembangunan pembangkit listrik, transmisi dan gardu induk, project management office, dan manajemen rantai pasokan. / The Director of Project Management and New Renewable Energy is in charge leading, fostering, and managing PLN, especially the Directorate of Project Management and New Renewable Energy which includes leading and managing construction planning and engineering for new projects and initial planning to Engineering, Procurement, and Construction (EPC), as well as for independent Power Producer (IPP), construction of power plants, transmission and substations, projects management office, and supply chain management.	<ol style="list-style-type: none"> Memimpin tahapan perencanaan dan enjiniring untuk proyek pembangkit listrik (EBT dan Non-EBT), transmisi, pembangunan gardu induk, serta pembangkit IPP sesuai dengan parameter ekonomi yang disepakati; / Leading the planning and engineering stages for power plant projects (NRE and Non-NRE), transmission, construction of substations, and IPP plant in accordance with agreed economic parameters; Mengawasi implementasi dan standarisasi praktik terbaik dan inisiatif pengadaan terpusat di PLN untuk barang/ jasa yang melibatkan aset operasional PLN (Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk, MTU, dan MDU) serta kontrak layanan; / Oversee the implementation and standardization of best practices and centralized procurement initiatives at PLN for goods/services involving PLN's operational assets (Power Plant, Transmission, Substations, MTU, and MDU) and service contracts; Memantau dan memastikan kepuasan pelanggan internal yang optimal terkait dengan proses pengadaan Material Transmisi Utama (MTU), Material Distribusi Utama (MDU), minyak pelumas, logistik dan manajemen inventory; / Monitoring and ensuring optimal internal customer satisfaction related to the procurement process of Main Transmission Materials (MTU), Main Distribution Materials (MDU), lubricating oil, logistics and inventory management; Mengawasi prosedur terkait proyek, termasuk perizinan, pengadaan tanah, kontrak pengembangan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di antaranya pembangkit (EBT dan Non EBT), transmisi, gardu induk, dan IPP; / Overseeing project-related procedures, including permits, land acquisition, development contracts, and supervision of electricity infrastructure development including generators (NRE and Non-NRE), transmission, substations, and IPP; Mengoptimalkan penyelesaian permasalahan proyek untuk mencapai desain teknik dan hasil ekonomi yang diinginkan serta mengevaluasi CAPEX keseluruhan untuk semua investasi yang sedang berlangsung dan/atau di masa depan di PLN; / Optimizing project problem solving to achieve the desired engineering design and economic results as well as evaluating the overall CAPEX for all ongoing and/or future investments in PLN; Menetapkan dan memastikan pelaksanaan strategi dan kebijakan pengawasan siklus kepemilikan Independent Power Producer (IPP), dan mengintegrasikannya dengan sistem kelistrikan PLN, termasuk perencanaan, kontrak, pemantauan konstruksi; dan / Establishing and ensuring the implementation of the strategy and policy for supervision of the Independent Power Producer (IPP) ownership cycle, and integrate it with the PLN electricity system, including planning, contracts, construction monitoring; And Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di Direktorat Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan berbasiskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>), manajemen risiko, dan kepatuhan, termasuk menerapkan check and balance melalui <i>4 Eyes Principle</i> untuk proses bisnis yang bersifat kritikal dalam kerangka <i>3 Lines Model</i>. / Ensuring the planning, implementation, and evaluation of all business processes in the Directorate of Project Management and New Renewable Energy based on the principles of good corporate governance, risk management, and compliance, including implementing checks and balance through 4 Eyes Principles for critical business processes within the framework of the 3 Lines Model.
6	Direktur Manajemen Pembangkitan / Director of Power Plant Management	Direktur Manajemen Pembangkitan bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola PLN khususnya Direktorat Manajemen Pembangkitan yang meliputi memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyelenggarakan fungsi manajemen pembangkitan; mengelola kinerja dan menstandarisasi praktik manajemen aset perusahaan dan Sub-Holding/ anak perusahaan pembangkitan, serta penyelesaian dengan Independent Power Producer (IPP). / The Director of Power Plant Management is in charge of leading, fostering, and managing PLN, especially the Directorate of Power Plant Management which includes leading, planning, implementing, evaluating, and carrying out generation management functions; manage performance and standardize asset management practices of companies and generation Sub-Holdings /subsidiaries, as well settlement with Independent Power Producer (IPP).	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan dan memastikan penerapan kebijakan dan strategi dalam pengoperasian dan pemeliharaan aset pembangkitan dengan menstandarisasi praktik <i>operation and maintenance</i> di perusahaan dan Sub-Holding/ anak perusahaan pembangkitan; / Establishing and ensure the implementation of policies and strategies in the operation and maintenance of power plant assets by standardizing operational practices and maintenance at the Company and Sub-Holding/subsidiaries; Mengkonsolidasikan, meninjau dan menyetujui perencanaan Sub-Holding/anak perusahaan pembangkitan pada operasi, investasi, dan anggaran untuk mencapai kinerja sesuai dengan rencana strategis PLN; / Consolidating, reviewing, and approving power plant Sub-Holding/subsidiary plans on operations, investments, and budgets to achieve performance in accordance with PLN's strategic plan; <ol style="list-style-type: none"> Meninjau dan menyetujui rencana bisnis sub kepemilikan Sub-Holding / anak perusahaan pembangkitan; / Reviewing and approving business plans for power plant Sub-Holding/subsidiary; Mengidentifikasi dan melaporkan KPI untuk memantau dan mengontrol kinerja di sub kepemilikan; / Identifying and reporting KPIs to monitor and control performance across sub-ownerships Menetapkan panduan, kebijakan, standar, dan <i>service level agreement</i> PKS untuk memantau kinerja manajemen aset oleh Sub-Holding/anak perusahaan pembangkitan; / Establishing PKS guidelines, policies, standards and service level agreements to monitor the performance of asset management by the power plant Sub-Holding/subsidiary; Memantau dan memberikan panduan kepada Sub-Holding/ anak perusahaan pembangkitan terkait deviasi pasokan bahan bakar (dan rencana) setiap bulan untuk memastikan keamanan pasokan di seluruh perusahaan dan Sub-Holding/anak perusahaan pembangkitan; / Monitoring and providing guidance to power plant Sub-Holding/ subsidiary regarding deviation of fuel supply (and plans) every month to ensure security of supply across the Company and power plant Sub-Holding/subsidiary; Memimpin operasi untuk pembangkitan dan kebijakan <i>operation and maintenance</i> perusahaan berkaitan dengan aspek keamanan keandalan, ekonomi dan kualitas; / Leading operations for power plant and operation policies and company maintenance related to security aspects of reliability, economy and quality; Mengendalikan operasi untuk pembangkitan di tingkat Sub-Holding/anak perusahaan pembangkitan berkaitan dengan aspek keamanan keandalan, ekonomi, dan kualitas; / Controlling operations for generation at the Sub-Holding /subsidiary power plant with regard to aspects of safety, reliability, economy and quality; Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas Unit Pembangkitan, agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan tetap memenuhi persyaratan faktor ketersediaan untuk memastikan pasokan listrik yang andal; / Planning, coordinating, direct, control, supervise and evaluate the tasks of the Generation Unit, so that all activities run according to the strategies and policies that have been set while still meeting the availability factor requirements to ensure reliable electricity supply;

No.	Jabatan / Position	Tanggung Jawab / Responsibilities	Tugas Pokok / Main Duties
			<ol style="list-style-type: none"> 7. Memantau kinerja operasi dengan <i>Independent Power Producer</i> (IPP) berdasarkan kewajiban kontrak (di antaranya ketersediaan IPP, heat rate, safety, kepatuhan, dan lain-lain); / Monitoring operational performance with Independent Power Producer (IPP) based on contractual obligations (including IPP availability, heat rate, safety, compliance, and others); 8. Memantau dan meninjau target dispatch untuk <i>Independent Power Producer</i> (IPP) yang harus dipenuhi; / Monitoring and reviewing the target dispatch for Independent Power Producer (IPP) that must be met; 9. Menyetujui pembayaran dengan <i>Independent Power Producer</i> (IPP) berdasarkan ketentuan kontrak yang telah ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan oleh DIV Perbendaharaan; / Approving payments with Independent Power Producer (IPP) based on predetermined contract terms to be executed by DIV Treasury; 10. Memimpin pengembangan dan penerapan standar teknis dan strategi untuk manajemen aset pembangkitan dengan pemantauan kinerja yang ketat; / Leading the development and implementation of technical standards and strategies for generation asset management with strict performance monitoring; 11. Mengelola penyusunan strategi, kebijakan dan mekanisme pengelolaan <i>Single Buyer</i> meliputi administrasi, proses setelmen transaksi tenaga listrik dengan pihak internal, mensupervisi pengelolaan transaksi tenaga listrik dan memastikan pengelolaannya sesuai ketentuan; dan / Managing the preparation of strategies, policies and mechanisms for the management of singles Buyers include administration, settlement processes for electricity transactions with internal parties, supervising the management of electricity transactions and ensuring that they are managed according to regulations; And 12. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di Direktorat Manajemen Pembangkitan berbasis prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>), manajemen risiko, dan kepatuhan, termasuk menerapkan <i>check and balance</i> melalui <i>4 Eyes Principle</i> untuk proses bisnis yang bersifat kritis dalam kerangka <i>3 Lines Model</i>. / Ensuring the planning, implementation and evaluation of all business processes in the Generation Management Directorate based on the principles of good corporate governance, risk management, and compliance, including implementing checks and balance through 4 Eyes Principles for critical business processes within the framework of the 3 Lines Model.
7	Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem / Director of Transmission and System Planning	Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola PLN khususnya Direktorat Transmisi dan Perencanaan Sistem yang meliputi memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyelenggarakan fungsi perencanaan transmisi dan sistem ketenagalistrikan, konsolidator untuk mengembangkan sistem manajemen aset, akuntabilitas <i>end to end</i> pada manajemen aset transmisi dan pengembangan strategi hingga implementasi. / The Director of Transmission and System Planning is responsible for leading, fostering and managing PLN in particular the Directorate of Transmission and System Planning which includes leading, planning, implementing, evaluating and carrying out the transmission and electricity system planning functions, consolidator to develop an asset management system, end accountability to end on transmission asset management and strategy development to implementation.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi fungsi perencanaan sistem ketenagalistrikan yang meliputi: penyusunan rencana bisnis penyediaan tenaga listrik, peramalan beban/permintaan, perancangan sistem ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, dan distribusi; / Leading the planning, implementation, and evaluation of the electricity system planning function which includes: preparation of electricity supply business plans, load/demand forecasting, design of electricity systems including generation, transmission, and distribution; 2. Menetapkan dan memastikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang transmisi: / Establishing and ensuring the implementation of policies and strategies in the field of transmission: <ol style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi operasi dan pemeliharaan aset transmisi; / Optimizing the operation and maintenance of transmission assets; b. Penerapan kebijakan dan strategi pengelolaan aset guna mencapai tujuan bisnis dan kinerja yang optimal; / Implementation of asset management policies and strategies to achieve business goals and optimal performance; c. Mengawasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengoperasian sistem ketenagalistrikan dan pendistribusian tenaga listrik tegangan ekstra tinggi dan tegangan tinggi serta proses "<i>energy bidding</i>" (termasuk pasokan dan sumber pembeli tunggal) untuk mendukung kinerja yang efisien, aman, andal, dan ramah lingkungan. / Supervising the planning, implementation, evaluation of the operation of the electricity system and the distribution of extra high voltage and high voltage electricity as well as the "energy bidding" process (including supply and single-buyer sourcing) to support efficient, safe, reliable and environmentally sound performance. 3. Menetapkan dan memastikan pelaksanaan perencanaan pembangunan, investasi dan perencanaan anggaran operasional untuk mencapai kinerja PLN sesuai dengan rencana strategis PLN untuk mengoptimalkan profit and loss; / Establishing and ensuring the implementation of development planning, investment and operational budget planning to achieve PLN's performance in accordance with PLN's strategic plan to optimize profit and loss; 4. Memastikan pelaksanaan dan perencanaan strategis pengelolaan manajemen aset (pembangkit, transmisi dan distribusi) di perusahaan dan <i>Sub-Holding</i>/Anak Perusahaan, sesuai dengan strategi dan kebijakan pengelolaan aset untuk mencapai kinerja operasional yang optimal; / Ensuring the implementation and strategic planning of asset management (generation, transmission and distribution) in the company and its Sub-Holdings/subsidiaries, in accordance with the strategy and asset management policies to achieve optimal operational performance; 5. Memimpin pengembangan dan implementasi kerangka kerja, pedoman dan sistem untuk manajemen aset, standar teknis dan strategi untuk aset transmisi dan mengkonsolidasikan optimalisasi strategi manajemen aset untuk pembangkitan dan distribusi; / Leading the development and implementation of frameworks, guidelines and systems for asset management, technical standards and strategies for transmission assets and consolidate optimization of asset management strategies for generation and distribution; 6. Memimpin tanggung jawab <i>end to end</i> untuk mempercepat transisi energi dan pengembangan aset energi baru dan terbarukan dengan berkoordinasi dengan perencanaan sistem ketenagalistrikan dan manajemen proyek; dan / Leading the development and implementation of frameworks, guidelines and systems for asset management, technical standards and strategies for transmission assets and consolidate optimization of asset management strategies for generation and distribution; 7. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di Direktorat Transmisi dan Perencanaan Sistem berbasis prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>), manajemen risiko, dan kepatuhan, termasuk menerapkan <i>check and balance</i> melalui <i>4 Eyes Principle</i> untuk proses bisnis yang bersifat kritis dalam kerangka <i>3 Lines Model</i>. / Ensuring the planning, implementation and evaluation of all business processes in the Directorate of Transmission and System Planning based on the principles of good corporate governance, risk management, and compliance, including implementing checks and balance through 4 Eyes Principles for critical business processes within the framework of the 3 Lines Model.

No.	Jabatan / Position	Tanggung Jawab / Responsibilities	Tugas Pokok / Main Duties
8	Direktur Distribusi / Director of Distribution	Direktur Distribusi bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola PLN khususnya Direktorat Distribusi yang meliputi memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaksanakan fungsi distribusi; akuntabilitas <i>end to end</i> dalam pengelolaan aset distribusi mulai dari pengembangan strategi hingga implementasi. / The Director of Distribution is in charge of leading, fostering and managing PLN, especially the Directorate of Distribution which includes leading, planning, implementing, evaluating and carrying out distribution functions; final accountability to end in managing distribution assets from strategy development to implementation.	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan dan memastikan pelaksanaan perencanaan pembangunan, investasi dan perencanaan anggaran operasional distribusi untuk mencapai kinerja PLN sesuai dengan rencana strategis PLN: / Establishing and ensuring the implementation of development planning, investment and distribution operational budget planning to achieve PLN's performance in accordance with PLN's strategic plan: <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi untung dan rugi / Profit and loss optimization Optimalisasi pengelolaan aset operasional distribusi / Optimization of the management of distribution operational assets Kontrol kinerja fungsi distribusi / Distribution function performance control Menetapkan dan memastikan penerapan kebijakan dan strategi dalam pengoperasian dan pemeliharaan aset distribusi dengan penerapan kebijakan dan strategi pengelolaan aset dalam rangka mencapai tujuan bisnis dan kinerja yang optimal; / Establishing and ensuring the implementation of policies and strategies in the operation and maintenance of distribution assets by implementing policies and strategies for asset management in order to achieve business goals and optimal performance; Memimpin pengembangan dan penerapan standar teknis dan strategi untuk manajemen aset distribusi dengan pemantauan kinerja yang ketat; / Leading the development and implementation of technical standards and strategies for distribution asset management with strict performance monitoring; Melakukan pengembangan, penyediaan, dan evaluasi implementasi listrik pedesaan dan sistem <i>isolated</i> untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan RUPTL; / Developing, providing, and evaluating the implementation of rural electricity and isolated systems to ensure implementation is in accordance with RUPTL; Memastikan penyusunan kebijakan standarisasi metering dari hulu sampai dengan hilir dan kebijakan yang berkaitan dengan meter (P2TL dan P3TL) serta penyusunan SPLN; dan / Ensuring the metering standardization policies from upstream to downstream and policies related to meters (P2TL and P3TL) as well as the preparation of SPLN; And Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di Direktorat Distribusi berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>), manajemen risiko, dan kepatuhan, termasuk menerapkan <i>check and balance</i> melalui <i>4 Eyes Principle</i> untuk proses bisnis yang bersifat kritis dalam kerangka <i>3 Lines Model</i>. / Ensuring the planning, implementation and evaluation of all business processes in the Distribution Directorate based on the principles of good corporate governance, risk management, and compliance, including implementing checks and balance through <i>4 Eyes Principles</i> for critical business processes within the framework of the <i>3 Lines Model</i>.
9	Direktur Retail dan Niaga / Director of Retail and Commerce	Direktur Retail dan Niaga bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola PLN khususnya Direktorat Retail dan Niaga yang meliputi memimpin komersial <i>excellence</i> dan pelayanan pelanggan, pemasaran dan pengembangan produk, pelayanan pelanggan institusi besar (<i>enterprise</i>), dan pelayanan pelanggan ritel di lingkungan PLN untuk memastikan PLN dapat mencapai visi, misi, dan aspirasinya. / The Director of Retail and Commerce is responsible for leading, fostering and managing PLN, especially the Directorate Retail and Commerce which includes leading commercial excellence and customer service, marketing and product development, large institutional (<i>enterprise</i>) customer service, and retail customer service within PLN to ensure PLN	<ol style="list-style-type: none"> Merumuskan strategi retail dan penjualan dan kebijakan pelayanan pelanggan, serta menetapkan target penjualan, SLA, dan mensosialisasikan produk layanan segmen retail dan SOP ke seluruh saluran layanan (termasuk <i>call center</i>, unit layanan, aplikasi PLN Mobile); / Formulating retail and sales strategies and customer service policies, as well as setting sales targets, SLAs, and disseminating retail segment service products and SOPs to all service channels (including call center, service unit, PLN Mobile application); Mengawasi dan mengevaluasi kinerja penjualan (terhadap target yang ditetapkan); mengoptimalkan inisiatif pemasaran untuk memastikan kinerja penjualan yang baik, serta memperkuat kemampuan penjualan saluran layanan pelanggan terpusat (misalnya, <i>call center</i>) dan tidak terpusat (misalnya <i>customer service center</i>), yaitu dengan membuat program pelatihan <i>ad-hoc</i>; / Monitoring and evaluating sales performance (against the set targets); optimizing marketing initiatives to ensure good sales performance, as well as strengthening sales capabilities of centralized customer service channels (e.g. call center) and non-centralized (e.g. customer service center), namely by creating an <i>ad-hoc</i> training program; Memantau manajemen penagihan dan piutang (AIR), serta memberikan perbaikan berkelanjutan pada layanan PLN berdasarkan wawasan dan data pelanggan; / Monitoring the billing and accounts receivable management (AIR), as well as providing continuous improvement to PLN services based on customer insights and data; Mengawasi proses akuisisi dan retensi pelanggan <i>business-to-business</i> dan <i>business-to-customer</i> dengan menstandarisasi dan menerapkan praktik terbaik dalam analitik data, sistem, dan proses bisnis; / Overseeing the <i>business-to-business</i> and <i>business-to-customer</i> customer acquisition and retention processes by standardizing and implementing best practices in data analytics, systems and business processes; Memimpin pengembangan bisnis dan produk <i>end to end</i> untuk produk/layanan ritel listrik baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan, mulai dari perencanaan dan penganggaran awal, konsepsi dan desain produk (pengumpulan dan analisis data, studi kelayakan, <i>compliance standard</i>, <i>quality checks</i>) hingga aktivitas pengembangan produk (termasuk peningkatan skala awal, dan upaya komersialisasi) serta pertumbuhan dan pemeliharaan produk ritel listrik yang berkelanjutan; / Leading the business and end product development to end for new electrical retail products/services according to customer needs, start and initial planning and budgeting, product conception and design (collection and analysis of data, feasibility studies, compliance standards, quality checks) as well as product development activities (including initial scale-up, and commercialization efforts) and the growth and maintenance of sustainable electric retail products; Memastikan tarif listrik memberikan margin keuntungan yang optimal bagi perusahaan, memenuhi prinsip keadilan bagi pelanggan, kompetitif, dan memenuhi ketentuan yang berlaku; / Ensuring electricity tariffs provide optimal profit margins for the company, meet the principles of fairness for customers, are competitive, and comply with applicable regulations; Memastikan penyusunan strategi pemenuhan <i>additional demand</i> dan ketepatan penyusunan anggaran pemenuhan <i>additional demand</i>; dan / Ensuring the planning of <i>additional fulfillment strategies demand</i> and the accuracy of preparing the budget for <i>additional fulfillment request</i>; and Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di Direktorat Retail dan Niaga berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>), manajemen risiko, dan kepatuhan, termasuk menerapkan <i>check and balance</i> melalui <i>4 Eyes Principle</i> untuk proses bisnis yang bersifat kritis dalam kerangka <i>3 Lines Model</i>. / Ensuring the planning, implementation and evaluation of all business processes in the Directorate of Retail and Commerce based on the principles of good corporate governance, risk management, and compliance, including implementing checks and balance through <i>4 Eyes Principles</i> for critical business processes within the framework of the <i>3 Lines Model</i>.

MASA JABATAN DIREKSI

Perseroan menerapkan masa jabatan bagi Direksi dengan mengacu pada Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk melakukan penggantian sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI

Mengacu pada peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan, kebijakan pemilihan dan pengangkatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direktur diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
2. Pengangkatan Direktur dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
3. Komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat.
4. Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direktur atau Komisaris di BUMN/BUMD/Perusahaan swasta lain atau jabatan lainnya di Perusahaan lain, baik swasta maupun milik negara, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali apabila mendapatkan persetujuan dari RUPS.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Perseroan melaksanakan kebijakan suksesi bagi Direksi melalui beberapa tahapan. Pada tahap awal, jika pergantian kepemimpinan dinilai butuh dilakukan, Perseroan akan mengajukan kandidat internal melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh panitia *ad hoc*, yang difasilitasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Kandidat yang terpilih dalam proses tersebut kemudian diajukan kepada Kementerian BUMN untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Adapun, ketentuan suksesi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Calon Direktur yang diangkat oleh RUPS berasal dari calon-calon yang diusulkan oleh pemegang saham dan dari internal Perseroan;

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The term of office for the Board of Directors at the Company refers to Article 28 Paragraph 3 of Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs), with a term of 5 (five) years and reappointment of 1 (one) term of office, without prejudice to the right of the GMS to make replacements at any time before the term ends.

SELECTION AND APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Referring to laws and regulations as well as the Company's Articles of Association, the policies for selecting and appointing the Board of Directors are as follows:

1. Directors are appointed by the GMS from the candidates proposed by the Shareholder and the nominations are binding for the GMS.
2. The appointment of Directors is carried out through a fit and proper test mechanism.
3. The composition of the Board of Directors shall be adjusted to the needs and developments of the Company to enable effective, precise, and fast decision making.
4. Directors are prohibited from holding concurrent positions as Directors or Commissioners in other SOEs/Regional-Owned Enterprises/Private companies, or other positions in other companies, either private or state-owned, which may result in a conflict of interest, unless approved by the GMS.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

The Company has a succession policy for the Board of Directors which is implemented through several stages. In the early stages, if it is deemed necessary to change leadership, the Company will nominate internal candidates through an election process carried out by an *ad hoc* committee, facilitated by the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee. Candidates selected in the process are then submitted to the Ministry of SOEs to undergo a fit and proper test

Meanwhile, the provisions for the succession of the Board of Directors are as follows:

1. Prospective Directors appointed by GMS shall be candidates proposed by the Shareholder and come from the Company's internal;



2. Pengangkatan Direktur dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon Direktur oleh Kementerian BUMN atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN;
 3. Komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat;
 4. Calon Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direktur atau Komisaris di BUMN/BUMD/Perusahaan swasta lain atau jabatan lainnya di perusahaan lain, baik swasta maupun milik negara, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali apabila mendapatkan persetujuan dari RUPS.
2. Appointment of Directors is conducted through a fit and proper test on prospective Directors by the Ministry of SOEs or a third party assigned by the Ministry of SOEs;
 3. Composition of the Board of Directors shall always be adjusted to the Company's needs and development, thus enabling effective, proper, and prompt decision making;
 4. Prospective Directors are prohibited to hold concurrent position as Directors or Commissioners in other SOEs/Regional-Owned Enterprises/Private-Owned Enterprises/other private companies or other positions in other companies, either private or state-owned, which may result in a conflict of interest, unless approved by the GMS.

KEBIJAKAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Perseroan menerapkan kebijakan yang mengatur proses tindak lanjut yang dilakukan apabila anggota Direksi terlibat dalam kejahatan keuangan, berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROGRAM PENGENALAN BAGI DIREKTUR BARU

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola GCG dan *Board Manual* PLN, Direktur yang diangkat untuk pertama kali diwajibkan untuk mengikuti program pengenalan mengenai Perseroan. Program tersebut diberikan agar masing-masing anggota baru dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur, memahami proses bisnis Perseroan, serta dapat bekerja secara sinergis dengan organ Perseroan lainnya.

Materi program pengenalan bagi Direktur baru dapat diberikan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan di mana program tersebut dilaksanakan.

Materi yang diberikan dalam program pengenalan bagi Direktur baru meliputi:

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
- b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;

POLICY ON RESIGNATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS INVOLVED IN FINANCIAL CRIMES

The Company has a policy that regulates the follow-up process to be carried out if members of the Board of Directors are involved in financial crimes, based on the provisions in the Articles of Association and applicable laws and regulations.

INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

Based on PLN GCG Code and PLN Board Manual, Director appointed for the first time are required to take part in an introductory program on the Company. The program is provided so that each new member can understand the duties and responsibilities as a Director, understand the Company's business processes, and able work synergistically with other Company organs.

introduction program materials for new Directors can be provided through presentations, meetings, visits to the Company and review of documents or other programs deemed appropriate by the Company where the program is implemented.

Materials provided in the introduction program for new Directors include:

- a. Implementation of GCG principles by the Company.
- b. Description of the Company in relation to the objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term plans, composition, risks, and other strategic issues.

- | | |
|--|--|
| <p>c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan;</p> <p>d. Keterangan mengenai audit internal dan eksternal, sistem pengendalian internal dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;</p> <p>e. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.</p> | <p>c. Information related to the delegated authority;</p> <p>d. Information on internal and external audits, internal control systems and policies, and the Audit Committee.</p> <p>e. Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as prohibited matters.</p> |
|--|--|

Program pengenalan bagi Direktur baru dilaksanakan paling lambat 1(satu) bulan setelah pengangkat, di bawah koordinasi dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain dengan fungsi Sekretaris Perusahaan.

The introduction program for new Director is carried out no later than 1 (one) month after the appointment, under the coordination and responsibility of the Corporate Secretary or other official with the Corporate Secretary function.

Pada tahun 2022, program pengenalan perusahaan diberikan kepada 2 (dua) orang direktur yang baru diangkat yaitu: Hartanto Wibowo selaku Direktur Energi Primer dan kepada Edi Srimulyanti selaku Direktur Retail dan Niaga.

In 2022, the Company's introduction program was given to 2 (two) newly appointed directors, namely: Hartanto Wibowo as Director of Primary Energy and to Edi Srimulyanti as Director of Retail and Commerce.

INDEPENDENSI, HUBUNGAN AFILIASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Independensi

Perseroan mewajibkan anggota Direksi untuk menandatangani pakta integritas secara berkala di awal tahun, untuk menyatakan status independensinya. Di samping itu, setiap akhir tahun, anggota Direksi juga berkewajiban untuk menyatakan apakah dalam satu tahun terdapat situasi benturan kepentingan oleh Direksi atas tindakan yang dilakukan. Kewajiban ini dilaksanakan di bawah koordinasi dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

INDEPENDENCE, AFFILIATION, AND SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

Independence

The Company requires members of the Board of Directors to sign an integrity pact periodically at the beginning of the year to state their independence status. Moreover, at the end of each year, members of the Board of Directors are also required to state whether within one year there is a situation of conflict of interest by the Board of Directors for the actions that have been taken. This obligation is carried out under the coordination and responsibility of the Corporate Secretary.

Pada tahun 2022, seluruh anggota Direksi telah menandatangani pakta integritas dengan butir-butir sebagai berikut:

All members of the Board of Directors have signed an integrity pact in 2022 with the following points:

Pakta Integritas Direksi / Board of Directors Integrity Pact	DP	SR	YDS	EH	HW	WK	AL	AP	ES	RHP*	BS*	HWS*
Patuh dan sanggup menjalankan tugas serta amanah jabatan sesuai dengan Peraturan Perusahaan, etika bisnis dan pedoman perilaku / Comply with and be able to carry out the duties and mandates of the position in accordance with Company Regulations, business ethics, and code of conduct	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selama menjabat akan menghindari konflik kepentingan dan mendeklarasikan setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko fraud / During his/her term of office, he/she will avoid conflicts of interest and declare any conflicts of interest that pose a risk of fraud	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Pakta Integritas Direksi / Board of Directors Integrity Pact	DP	SR	YDS	EH	HW	WK	AL	AP	ES	RHP*	BS*	HWS*
Selama menjabat sanggup menjalankan Perusahaan dengan berintegritas dan berpegang teguh pada prinsip 4 NO's: / During his/her tenure, he/she is able to run the Company with integrity and adhere to the 4 NO's principles: 1. No Bribery 2. No Kickback 3. No Gift 4. No Luxurious Hospitality	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Melakukan internalisasi dan mengajak Insan PLN termasuk keluarga untuk menerapkan prinsip 4 NO's / Internalize and invite PLN personnel, including families, to apply the 4 NO's principles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS berdasarkan alasan apapun yang dinilai tepat oleh RUPS, dan tidak akan menggugat ataupun mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut / Willing to be dismissed at any time by the GMS based on any reason deemed appropriate by the GMS, and will not sue or file a legal process in connection with the dismissal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*) Sudah tidak menjabat sebagai Direktur Perseroan pada 31 Desember 2022

*) No longer serving as Director as of December 31, 2022

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

PLN memiliki aturan melarang adanya hubungan afiliasi baik hubungan keluarga langsung/tidak langsung maupun hubungan keuangan di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham. Aturan tersebut diterapkan untuk menjaga independensi, menghindari adanya benturan kepentingan, serta menjaga akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional Perseroan.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat di tahun 2022 memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi aturan tersebut. Perseroan memastikan bahwa seluruh Direksi yang menjabat di tahun 2022 tidak memiliki hubungan keuangan ataupun hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik dengan sesama Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pengungkapan hubungan afiliasi masing-masing anggota Direksi dapat dilihat di bab Profil Perusahaan subbagian Direksi.

Board of Directors Affiliation

PLN has a regulation that prohibits any direct or indirect affiliate relationships among members of Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholder. This is carried out to uphold independence, to avoid conflict of interest, and to maintain accountability in all decision-making and implementation of operational activities of the Company.

All members of the Board of Directors who served in 2022 have a strong commitment to comply with these regulations. The Company ensures that all Directors who served in 2022 do not have financial or family relations up to the third degree with other Directors, members of the Board of Commissioners, or shareholders, either horizontally or vertically, including via marital relations.

Disclosure of the affiliation of each member of the Board of Directors can be seen in the Company Profile chapter, subsection of the Board of Directors.



Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Direksi yang menjabat tidak mempunyai kepemilikan saham Perseroan, baik kepemilikan secara pribadi maupun melalui anggota keluarga, serta tidak mempunyai saham pada perusahaan lain, baik secara pribadi maupun melalui anggota keluarga.

RAPAT DIREKSI

Pelaksanaan Rapat Direksi

Untuk tahun 2022, Direksi PLN telah menyelenggarakan rapat internal sejumlah tiga puluh dua (32) kali. Rapat-rapat internal tersebut juga dihadiri oleh peserta selain Direksi, mencakup Direksi anak perusahaan, Kepala Satuan, SEVP, EVP, GM atau jajaran manajemen, sesuai agenda pembahasan di dalam rapat.

Tanggal pelaksanaan, agenda, serta kehadiran masing-masing anggota dalam penyelenggaraan rapat Direksi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Board of Directors Share Ownership

The Company ensures that all members of the Board of Directors who serve do not have share ownership in the Company, either personally or through family members, and do not own shares in other companies, either personally or through family members.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Implementation of Board of Directors Meeting

The Board of Directors held 32 (thirty-two) internal meetings throughout 2022. These internal meetings were also attended by participants other than the Directors, including the Directors of subsidiaries, Unit Heads, SEVP, EVP, GM or management, according to the agenda for discussion at the meeting.

The date, agenda, and attendance of each member in the 2022 Board of Directors meeting are as follows:

Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2022

Implementation of Board of Directors Meeting in 2022

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Kehadiran / Attendance												
			DP	SR	YDS	EH	WK	BS	ES	RHP	HW	AL	AP	HWS	
1	14 Januari 2022 / January 14, 2022	1. Kelanjutan Proyek PLTMG / PLTMG Project Continuation 2. Penyesuaian Jadwal COD IPP / COD IPP schedule adjustments 3. SDM / HR	✓	Kuasa ke EH / Authorization to EH	✓	✓	✓	✓	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
2	16 Januari 2022 / January 16, 2022	1. Iuran Pemberi Kerja / Employer Contribution 2. Peraturan Dana Pensiun / Pension Fund Regulation 3. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Divisi dan Bidang / Changes in the Organization and Working Procedures of Divisions and Fields	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
3	14 Februari 2022 / February 14, 2022	1. SDM / HR 2. Penetapan Pagu Rekrutmen / Determination of Recruitment Ceilings	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
4	17 Maret 2022 / March 17, 2022	1. Rekomposisi Anggaran Investasi / Investment Budget Recomposition 2. Penyediaan Pasokan Gas / Provision of Gas Supply 3. Jasa Konsultansi Supporting PLN / PLN Supporting Consulting Services	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
5	24 Maret 2022 / March 24, 2022	Tindak Lanjut Purchase Option Notice PLTGU / Follow-up on the PLTGU Purchase Option Notice	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Kehadiran / Attendance												
			DP	SR	YDS	EH	WK	BS	ES	RHP	HW	AL	AP	HWS	
6	13 April 2022 / April 13, 2022	1. Kelayakan Kepemilikan Saham PLN / Feasibility of PLN Share Ownership 2. SDM / HR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kuasa ke AP / Authorization to AP	BM	SM	✓	✓	✓	✓
7	26 Apr 2022 / April 26, 2022	RUPS Tahunan PT Industri Baterai Indonesia / Annual GMS of PT Industri Baterai Indonesia	✓	Kuasa ke HW / Authorization to HW	✓	✓	✓	Kuasa ke AL / Authorization to AL	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
8	13 Mei 2022 / May 13, 2022	1. Penyediaan Pasokan Gas / Provision of Gas Supply 2. Rencana Pembangunan Gedung Kantor PLN / PLN Office Building Development Plan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
9	19 Mei 2022 / May 19, 2022	Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 (Audited) / Financial Statement for 2021 Fiscal Year (Audited)	✓	✓	✓	✓	✓	Kuasa ke WK / authorization to WK	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
10	30 Mei 2022 / May 30, 2022	Penyesuaian Operasi Proyek IPP PLTU / Adjustment of PLTU IPP Project Operations	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
11	02 Juni 2022 / June 02, 2022	1. SDM / HR 2. Rencana Pengadaan Konsultan PLN / PLN Consultant Procurement Plan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
12	09 Juni 2022 / June 09, 2022	Tindak Lanjut Penyesuaian Proyek IPP PLTU / Follow-up on IPP PLTU Project Adjustment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
13	23 Juni 2022 / June 23, 2022	Penyesuaian Proyek IPP PLTU / Adjustments to the PLTU IPP Project	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
14	29 Juni 2022 / June 29, 2022	1. Upaya Mengatasi Dampak Global Supply Chain Crisis / Efforts to Overcome the Impact of the Global Supply Chain Crisis 2. SDM / HR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
15	06 Juli 2022 / July 06, 2022	Upaya Mengatasi Dampak Global Supply Chain Crisis / Efforts to Overcome the Impact of the Global Supply Chain Crisis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
16	19 Juli 2022 / July 19, 2022	1. Program Strategis Pengalihan Energi / Energy Transfer Strategic Program 2. Kegiatan PLN Road to G20 Summit / PLN Road to G20 Summit activities	✓	✓	✓	✓	✓	Kuasa ke WK / authorization to WK	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
17	01 Agustus 2022 / August 01, 2022	RKAP Tahun 2023 / 2023 RKAP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BM	SM	✓	✓	✓	✓
18	04 Agustus 2022 / August 04, 2022	1. Program Strategis Pengalihan Energi / Energy Transfer Strategic Program 2. SDM / HR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kuasa ke HWS / Authorization to HWS	BM	SM	✓	✓	✓	✓



No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Kehadiran / Attendance												
			DP	SR	YDS	EH	WK	BS	ES	RHP	HW	AL	AP	HWS	
19	09 Agustus 2022 / August 09, 2022	1. Penyesuaian Proyek PLTU IPP / Adjustments to the IPP PLTU Project 2. Disaster Recovery Center (DRC) dan Main Control Center (MCC) / Disaster Recovery Center (DRC) and Main Control Center (MCC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		BM	SM	✓	✓	✓	✓
20	16 Agustus 2022 / August 16, 2022	1. SDM / HR 2. Pengadaan Proyek EPC / EPC Project Procurement	✓	✓	✓	✓	✓	✓		BM	SM	✓	✓	✓	✓
21	22 Agustus 2022 / August 22, 2022	SDM / HR	✓	✓	✓	✓	✓	✓		BM	SM	✓	✓	✓	✓
22	16 Sep 2022 / September 16, 2022	1. Penghapusbukuan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) / Fixed Assets Write-off Not Operating (ATTB) 2. Penyertaan Modal Negara (PMN) / State Equity Participation (PMN)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		BM	SM	✓	✓	✓	✓
23	23 Sep 2022 / September 23, 2022	SDM / HR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓	✓	SM
24	03 Okt 2022 / October 03, 2022	1. Pendanaan Proyek EBT / EBT Project Funding 2. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal / Internal Control System Policy	✓	✓	✓	✓	✓	Kuasa ke HW / Authorization to HW	SM	✓	SM	✓	✓	✓	SM
25	16 Okt 2022 / October 16, 2022	1. RKAP Tahun 2023 / 2023 RKAP 2. SDM / HR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓	✓	SM
26	17 Okt 2022 / October 17, 2022	RKAP Tahun 2023 / 2023 RKAP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓	✓	SM
27	16 Nov 2022 / November 16, 2022	RKAP Tahun 2023 / 2023 RKAP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓	✓	SM
28	21 Nov 2022 / November 21, 2022	RKAP Tahun 2023 / 2023 RKAP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓	✓	SM
29	26 Nov 2022 / November 26, 2022	1. Holding Sub-Holding PLN / PLN Holding Sub-Holding 2. Peraturan Kebijakan Strategis Audit Internal / Internal Audit Strategic Policy Regulations	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SM	✓	SM	✓	✓	✓	SM
30	05 Des 2022 / December 05, 2022	Penyertaan Modal Negara (PMN) / State Equity Participation (PMN)	✓	✓	Kuasa ke SR / Authorization to SR	✓	Kuasa ke HW / Authorization to HW	SM	✓	SM	✓	✓	✓	✓	SM
31	08 Des 2022 / December 08, 2022	Pendanaan Proyek EBT / EBT Project Funding	✓	✓	✓	✓	✓	Kuasa ke HW / Authorization to HW	SM	✓	SM	✓	Kuasa ke AP / Authorization to AP	✓	SM

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Kehadiran / Attendance												
			DP	SR	YDS	EH	WK	BS	ES	RHP	HW	AL	AP	HWS	
32	31 Des 2022 / December 31, 2022	Penyertaan Modal Negara (PMN) / State Equity Participation (PMN)	✓	✓	✓	✓	Kuasa ke EH / Authorization to EH	SM	✓	SM	✓	✓	✓	✓	SM

Keterangan:

BM = Belum Menjabat

SM = Selesai Menjabat

Description:

BM = Not serving yet

SM = Finished serving

Frekuensi Kehadiran Anggota Direksi

Frekuensi kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam keseluruhan penyelenggaraan rapat internal di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Frequency of Board of Directors Attendance in Internal Meeting in 2022

Frequency of attendance of each directors in internal meetings in 2022 is as follows:

Frekuensi Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Internal Tahun 2022

Frequency of Board of Directors Attendance in Internal Meeting in 2022

No.	Nama Anggota / Member	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) / Attendance Percentage (%)
1	Darmawan Prasodjo Direktur Utama / President Director	32	32	100%
2	Sinthya Roesly • Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (1 Januari-21 September 2022) / Director of Finance and Risk Management (January 1 - September 21, 2022) • Direktur Keuangan (21 September-31 Desember 2022) / Director of Finance (September 21 - December 31, 2022)	32	30	94%
3	Yusuf Didi Setiarto • Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia (1 Januari-21 September 2022) / Director of Human Capital Management (January 1 - September 21, 2022) • Direktur Legal dan Manajemen <i>Human Capital</i> (21 September-31 Desember 2022) / Director of Legal and Human Capital Management (September 21 - December 31, 2022)	32	31	97%
4	Evy Haryadi • Direktur Perencanaan Korporat (1 Januari-21 September 2022) / Director of Corporate Planning (January 1 - September 21, 2022) • Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem (21 September-31 Desember 2022) / Director of Transmission and System Planning (September 21 - December 31, 2022)	32	30	94%
5	Edi Srimulyanti Direktur Retail dan Niaga (21 September - 31 Desember 2022) / Director of Retail and Commerce (September 21 - December 31, 2022)	10	10	100%
6	Hartanto Wibowo • Direktur Energi Primer (6 Januari-21 September 2022) / Director of Primary Energy (January 6 - September 21, 2022) • Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis (21 September-31 Desember 2022) / Director of Corporate Planning and Business Development (September 21 - December 31, 2022)	32	32	100%
7	Wiluyo Kusdiharto • Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan (1 Januari - 21 September 2022) / Director of Mega Project and New Renewable Energy • Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (21 September - 31 Desember 2022) / Director of Project Management and New and Renewable Energy (September 21 - December 31, 2022)	32	27	84%

No.	Nama Anggota / Member	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) / Attendance Percentage (%)
8	Adi Lumakso	32	31	97%
	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan (1 Januari-21 September 2022) / Director of Regional Business for Sumatra and Kalimantan (January 1 - September 21, 2022) Direktur Manajemen Pembangkitan (21 September-31 Desember 2022) / Director of Generator Management (September 21 - December 31, 2022) 			
9	Adi Priyanto	32	32	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (1 Januari-21 September 2022) / Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara (January 1 - September 21, 2022) Direktur Distribusi (21 September-31 Desember 2022) / Director of Distribution (September 21 - December 31, 2022) 			
10	Rudy Hendra Prastowo* Direktur Energi Primer (1 - 6 Januari 2022) / Director of Primary Energy (1 - January 6, 2022)	0	0	-
11	Bob Saril* Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan (1 Januari - 21 September 2022) / Director of Commerce and Customer Management (January 1 - September 21, 2022)	22	20	91%
12	Haryanto W.S* Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali (1 Januari - 21 September 2022) / Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali (January 1 - September 21, 2022)	22	22	100%

*) Sudah tidak menjabat sebagai Direktur Perseroan pada 31 Desember 2022

*) No longer serving as director as of December 31, 2022

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Pada tahun 2022, Direksi mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, dengan perincian sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Board of Directors participated in the following trainings and competency development programs throughout 2022:

Program Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2022

Board of Directors Competency Development Program in 2022

Nama/Jabatan / Name/Position	Tanggal / Date	Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi / Training and Competence Development Program	Penyelenggara / Organizer	Lokasi / Location
Darmawan Prasodjo Direktur Utama / President Director	11 Januari 2022 / January 11, 2022	Program <i>Economic Challenges</i> "Kebijakan Stop Ekspor Batu Bara dan Pengaturan Pasokan ke Pembangkit Listrik" / <i>Economic Challenges Program</i> "Policy to Stop Coal Exports and Organize Supply to Power Plants"	Metro TV	Jakarta
	22 April 2022 / April 22, 2022	Webinar Internasional <i>Invest in Our Planet: Green Ecosystem as an Investment in Future Earth</i>	PLN	Jakarta
	29 Juni 2022 / June 29, 2022	Narasumber Republika "Peran Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil dalam Percepatan Transisi Energi menuju <i>Zero Emission</i> " / Speaker at Republika "The Role of Private Sector and Civil Society in Accelerating Energy Transition to Zero Emission"	Republika	Jakarta
	13 Juli 2022 / July 13, 2022	<i>Road to G20 Dialogue: "The Global Blended Finance Alliance for Micro Small Medium Enterprise (MSMEs) and Energy Transition"</i>	Tri Hita Karana	Jakarta
	17 Juli 2022 / July 17, 2022	<i>G20 High Level Seminar on Green Economy and Finance</i>	Bank Indonesia	Jakarta
	November 2022	Narasumber B.1 <i>Decarbonizing Energy Sector for Net Zero : Achievement, Progress and Challenges, COP 27</i>	United Nation Framework Convention on Climate Change	Mesir
	November 2022	Narasumber B.13 <i>Achieving Net Zero Emission : A High Call for Urgency, COP 27</i>	United Nation Framework Convention on Climate Change	Mesir
	2022 November	<i>"Mobilising Capital for a Just Energy Transition"</i>	Tri Hita Karana	Bali

Nama/Jabatan / Name/Position	Tanggal / Date	Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi / Training and Competence Development Program	Penyelenggara / Organizer	Lokasi / Location
Sinthya Roesly • Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (1 Januari-21 September 2022)/ Director of Finance and Risk Management (January 1- September 21, 2022) • Direktur Keuangan (21 September-31 Desember 2022)/ Director of Finance (September 21 - December 31, 2022)	Maret – Juni 2022 / March – June 2022	Program CFO School	Kementerian BUMN bersama BLMI dan Forum Human Capital Indonesia / The Ministry of SOE together with BLMI and the Indonesian Human Capital Forum	Jakarta
	16 – 17 Maret 2022 / March 16-17, 2022	Southeast Asia Development Symposium (SEADS)	Asian Development Bank (ADB)	Jakarta
	16 & 23 Maret 2023 / March 16 & 23, 2023	Webinar Fitch on Indonesia 2022: Exit Strategy after the Pandemic	Fitch Ratings	Jakarta
	29 Maret 2022 / March 29, 2022	Sertifikasi Akuntan Profesional Tingkat Dasar / Basic Level Professional Accountant Certification	Ikatan Akuntan Indonesia / Institute of Indonesia Chartered Accountants	Jakarta
	Maret – April 2022 / March – April 2022	Training on Financial & Economic Analysis of Energy Projects	ADB	Jakarta
	22 April 2022 / April 22, 2022	International Webinar “Invest in Our Planet: Green Ecosystem as An Investment in Future Earth”	PLN	Jakarta
	26 – 27 April 2022 / April 26-27, 2022	Asia Women Leaders Program (AWLP) Virtual Training for Srikandi – Indonesia	ADB	Jakarta
	17 Mei 2022 / May 17, 2022	Moody’s Webinar : Supply – chain Constraints and Trade Impacts on the APAC Economy	Moody’s Rating	Jakarta
	18 Mei 2022 / May 18, 2022	Egon Zehnder Leadership Series	PT Egon Zehnder International	Jakarta
	19 Mei 2022 / May 19, 2022	International Webinar on Designing Carbon Neutral Roadmap	PLN	Jakarta
	21 Mei 2022 / May 21, 2022	Sertifikasi Manajemen Aset / Asset Management Certification	The Institute of Asset Management	Jakarta
	25 Mei 2022 / May 25, 2022	Webinar #4 G20 Empower “Mengurangi Ketimpangan Gender pada Dunia Kerja dan Dunia Usaha” / Webinar #4 G20 Empower “Reducing Gender Inequality in the World of Work and the Business World”	Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak / Ministry of Women Empowerment & Child Protection	Jakarta
	14 Juni 2022 / June 14, 2022	The Asia Clean Energy Forum 2022 “Catalyzing the Energy Transition” : ADB SEE Change Empowerment and Leadership Seminar	Global Power System Transformation Consortium (G-PST)	Jakarta
	Juni – Juli 2022 / June – July 2022	Webinar B20 – Side Event Women in Business Action Council: “Accelerating the Inclusion of Women MSMEs in the Global Economy”	B20	Jakarta
	17 Juni 2022 / June 17, 2022	Seminar Bioenergi & Cofiring	PLN	Bali
	13 Juli 2022 / July 13, 2022	G20 “Sustainable Finance : Instruments and Management in Achieving Sustainable Development in Indonesia”	PT SMI	Bali
	13 Juli 2022 / July 13, 2022	Energy and Climate Financing Webinar	Kementerian ESDM / Ministry of ESDM	Jakarta
	26 Juli 2022 / July 26, 2022	Webinar “Accelerating, Opportunities and Challenges For Women In World of Work and Business	G20 Empower 3 rd Side Event – The Future of Work	Jakarta
	26 – 27 Juli 2022 / July 26-27, 2022	Webinar Trade, Investment, and Industry	G20 High-Level Forum	Jakarta
	16 Agustus 2022 / August 16, 2022	Webinar “Women’s Voices for Future Energy Sustainability”	PLN	Jakarta
	25 Agustus 2022 / August 25, 2022	“Sailing in the multiverse of uncertainty”	GRC Summit 2022	Yogyakarta
30 Agustus 2022 / August 30, 2022	Fitch Roundtable on ‘Sustainable Fitch: Introduction to ESG Ratings’	Fitch Ratings	Jakarta	
6 September 2022 / September 6, 2022	The Fourth Parallel Session on “Promoting Sustainable Investment and Financing (Sif) as a New Approach for Infrastructure Development”	UGM, the T20 Summit	Bali	
6 September 2022 / September 6, 2022	High Level Panel – 2022 Zero World Forum	UNOPS	Paris	

Nama/Jabatan / Name/Position	Tanggal / Date	Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi / Training and Competence Development Program	Penyelenggara / Organizer	Lokasi / Location
	9 September 2022 / September 9, 2022	In-Person Strategic Meeting	Global Power System Transformation Consortium (GPST)	London
	14 September 2022 / September 14, 2022	Advancing Sustainable and Inclusive Infrastructure Investment: A Collaborative Seminar Between the Indonesian G20 Presidency and G20 Engagement Groups	Kementerian Keuangan / Ministry of Finance	Yogyakarta
	17 - 18 Oktober 2022 / October 17-18, 2022	SOE International Conference	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Bali
	21 Oktober 2022 / October 21, 2022	Webinar The Synergy of Climate Change Adaptation-Mitigation in Indonesia to Leverage Sustainable Climate Finance	ITB	Jakarta
	6 Desember 2022 / December 6, 2022	COP 27 "Financing for Energy Transition"	United Nation Framework Convention on Climate Change	Mesir
	9 November 2022 / November 9, 2022	COP 27 "Engaging state-owned enterprises in decarbonization plans: barriers and strategies"	AFD	Mesir
	29 November 2022 / November 29, 2022	The 6 th ILSAS International Conference on Learning & Development "Impact of ESG : Challenges & Opportunities"	TNB Integrated Learning Solution Sdn. Bhd. - ILSAS	Kuala Lumpur
	17 Desember 2022 / December 17, 2022	SI Green Fashion Day "Sustainable Fashion for Everyday Living Act Responsible, Think Sustainable"	Indonesia Alumni Swedia	Jakarta
Yusuf Didi Setiarto <ul style="list-style-type: none"> Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia (1 Januari-21 September 2022) / Director of Human Capital Management (January 1 - September 21, 2022) Direktur Legal dan Manajemen Human Capital (21 September-31 Desember 2022) / Director of Legal and Human Capital Management (September 21 - December 31, 2022) 	09 Februari 2022 / February 09, 2022	Kegiatan Asesmen Talenta Direksi BUMN : Kompetensi & Traits / SOE Board of Directors Talent Assessment Activities: Competence & Traits	Assessment Center Indonesia (ACI) & PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	Jakarta
	01 Maret 2022 / March 01, 2022	"Ada apa dengan holdingisasi PLN?" / "What is it with the PLN holding?"	Laskar PLN	Jakarta
	17 Maret 2022 / March 17, 2022	Onboarding Directorship Program	FHCI	Jakarta
	07 April 2022 / April 07, 2022	Webinar Pemanfaatan FABA untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat / Webinar: Utilization of FABA for infrastructure and community empowerment	PLN	Jakarta
	18 Mei 2022 / May 18, 2022	Benchmark dengan PT Pertamina (Persero) terkait implementasi Human Resource Business Partner (HRBP) / Benchmark with PT Pertamina (Persero) regarding the implementation of Human Resource Business Partner (HRBP)	PT Pertamina (Persero)	Jakarta
	23 Agustus 2022 / August 23, 2022	B20 Webinar side event : The energy, sustainability and climate task force	Pertamina	Bali
	01 Oktober 2022 / October 01, 2022	Narasumber acara webinar "Upstream Fiscal System in Indonesia" / Speaker on the webinar "Upstream Fiscal System in Indonesia"	PT PGN	Jakarta
	23 November 2022 / November 23, 2022	The HAPUA JEPIC Symposium Accelerating electric vehicle toward net zero emission	Hapua	Bali
	Maret - Juni 2022 / March - June 2022	Program CFO School	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Jakarta
	7 Februari 2022 / February 7, 2022	Seminar Nasional Energi dan Pertambangan / National Seminar on Energy and Mining	PWI	Jakarta
Evy Haryadi <ul style="list-style-type: none"> Direktur Perencanaan Korporat (1 Januari-21 September 2022) / Director of Corporate Planning (January 1 - September 21, 2022) Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem (21 September-31 Desember 2022) / Director of Transmission and System Planning (September 21 - December 31, 2022) 	16 February 2022 / February 16, 2022	Workshop "Energy Strategy under an Evolving Sector Context in Asia"	AiIB	Jakarta
	1 Maret 2022 / March 1, 2022	Panelis pada Indonesia-Europe Business Forum 2022 / Panelists at the 2022 Indonesia-Europe Business Forum	Indonesia-Europe Business Forum 2022	Indonesia

Nama/Jabatan / Name/Position	Tanggal / Date	Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi / Training and Competence Development Program	Penyelenggara / Organizer	Lokasi / Location
	30 Maret 2022 / March 30, 2022	Promoting Investment of Qatar in Indonesia: Challenges, Experiences and Opportunities	Kementerian Luar Negeri RI / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia	Indonesia
	7 April 2022 / April 7, 2022	Speaker on RE Invest Indonesia	RE Invest Indonesia	South Korea
	20 April 2022 / April 20, 2022	"Strategi PLN untuk Transisi ke Listrik Hijau dan Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional" / "PLN's Strategy for Transitioning to Green Electricity and Realizing National Energy Security"	Lemhanas	Jakarta
	9 Juni 2022 / June 9, 2022	Narasumber Webinar Bisnis Indonesia " Tantangan Sektor Kelistrikan dalam Transisi Energi" / Speaker on the Indonesian Business Webinar "Challenges of the Electricity Sector in the Energy Transition"	PLN	Jakarta
	29 Agustus 2022 / August 29, 2022	C20 ECE Working Group Session "Role of G20 Power Utilities in Climate Mitigation Efforts"	IESR	Bali
	30 Agustus 2022 / August 30, 2022	High Level Dialogue G20 Parallel Event "Mobilizing Finance for Indonesia's Just Energy Transition"	IESR	Bali
	19 Oktober 2022 / October 19, 2022	"Optimalisasi Peran Perusahaan dalam Presidensi G20 Indonesia" / "Optimizing the Company's Role in Indonesia's G20 Presidency"	KOMPAS	Jakarta
	6 Desember 2022 / December 6, 2022	COP 27 "Co-Firing Options on the Emissions Reduction"	Kementerian LHK	Mesir
	12 November 2022 / November 12, 2022	Side Panel BNEF Summit (GPST) "Scaling RE Penetration into Indonesian Grid"	BloombergNEF	Bali
	15 November 2022 / November 15, 2022	Participant Dialogue on IPP Just Energy Transition Initiatives	JETP	Bali
Edi Srimulyanti Direktur Retail dan Niaga (21 September - 31 Desember 2022) / Director of Retail and Commerce (September 21 - December 31, 2022)	12 Oktober 2022 / October 12, 2022	Webinar "Electrifying Lifestyle dalam Perspektif Pelayanan Publik Sektor Ketenagalistrikan / Webinar "Electrifying Lifestyle in the Perspective of Electricity Sector Public Services"	Lingkar Pemuda Nusantara	Jakarta
	17-18 Oktober 2022 / October 17-18, 2022	SOE Internasional Conference	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Bali
	25 Oktober 2022 / October 25, 2022	Side Event dengan tema "Guarding Energy Transition in Indonesia and Beyond: High Level Policy Discussion on Promoting Investment, Financing and Development of Renewable and Green Energy" / Side Event with the theme "Guarding Energy Transition in Indonesia and Beyond: High Level Policy Discussion on Promoting Investment, Financing and Development of Renewable"	HIMPUNI	IPB Bogor
	November - Desember 2022 / November - December 2022	Onboarding Directorship Program Angkatan 6 Tahun 2022 / Onboarding Directorship Program Batch 6 of 2022	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Jakarta
	2 November 2022 / November 2, 2022	Focus Group Discussion: EV Ecosystem Development to Accelerate Electric Mobility	KADIN	Jakarta
	6 Desember 2022 / December 6, 2022	Talkshow TV Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kompas TV / TV talk show for Kompas TV's New Electricity Installation Assistance Program (BPBL).	DJK KESDM	Jakarta
Hartanto Wibowo • Direktur Energi Primer (6 Januari-21 September 2022) / Director of Primary Energy (January 6 - September 21, 2022) • Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis (21 September-31 Desember 2022) / Director of Corporate Planning and Business Development (September 21 - December 31, 2022)	10 Maret 2022 / March 10, 2022	Panelis Diskusi Terbatas Kontribusi Pemikiran Mendukung Pembentukan Badan Layanan Umum Pengatur Tata Kelola Pasokan Batubara Untuk Kelistrikan / Panelists on Limited Discussion on Thought Contribution to Support the Establishment of a Public Service Board to Regulate Coal Supply Governance for Electricity	APBI	Jakarta

Nama/Jabatan / Name/Position	Tanggal / Date	Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi / Training and Competence Development Program	Penyelenggara / Organizer	Lokasi / Location
Wiluyo Kusdiharto • Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan (1 Januari – 21 September 2022) / Director of Mega Project and New Renewable Energy) • Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (21 September – 31 Desember 2022) / Director of Project Management and New and Renewable Energy (September 21 – December 31, 2022)	9 Februari 2022 / February 9, 2022	International Seminar on the United Arab Emirates Investment in Indonesia: Accelerating Investment from Middle East	Kementerian Luar Negeri RI / Ministry of Foreign Affairs	Jakarta
	16 Februari 2022 / February 16, 2022	Seminar Digital Leadership Growing Beyond Limits through merger and acquisition	PLN	Jakarta
	30 Maret 2022 / March 30, 2022	International Webinar on Promoting Investment of Qatar in Indonesia: Challenges, Experiences and Opportunities	Kementerian Luar Negeri RI / Ministry of Foreign Affairs	Jakarta
	14 April 2022 / April 14, 2022	Planning Workshop REEP2 Tahun 2022 / Planning Workshop REEP2 in 2022	GIZ	Jakarta
	14 April 2022 / April 14, 2022	Webinar Menagih Kontribusi Swasta & BUMN di Masa Transisi Menuju Zero Carbon Emission 2060 / Webinar: Collecting Private and SOE Contributions in the Transition Period Towards Zero Carbon Emissions in 2060	Warta Ekonomi	Jakarta
	18 April 2022 / April 18, 2022	Envision Leadership Workshop (ELW)	PLN	Jakarta
	22 April 2022 / April 22, 2022	Webinar "Invest in Our Planet: Green Ecosystem as An Investment in Future Earth"	PLN	Jakarta
	11 Mei 2022 / May 11, 2022	Webinar "Green Economy Indonesia Summit 2022"	Quadrant 1 Komunika	Jakarta
	19 Mei 2022 / May 19, 2022	International Webinar on Designing Carbon Neutral Roadmap	PLN	Jakarta
	19 Mei 2022 / May 19, 2022	Webinar Internasional "Enhancing Investments from South Korea for Renewable Energy Development in Indonesia"	Kementerian Luar Negeri RI / Ministry of Foreign Affairs	Jakarta
	27 Mei 2022 / May 27, 2022	Webinar Nasional "Peluang dan tantangan Renewable Energy di Indonesia"	UII	Jakarta
	8 Juni 2022 / June 8, 2022	Virtual Workshop G20 Webinar Series "Expanding Solar, Wind and Ocean Energy"	Kementerian ESDM RI / Ministry of ESDM of the Republic of Indonesia	Jakarta
	16 Juni 2022 / June 16, 2022	Virtual Workshop Side Event G20 "Biofuel for Green Economy"	Kementerian ESDM RI / Ministry of ESDM of the Republic of Indonesia	Jakarta
	22 Juni 2022 / June 22, 2022	Webinar Mekanisme Persetujuan Harga Jual dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik / Webinar: Mechanism of Approval of Selling Prices and Determination of Electricity Tariffs	Kementerian ESDM RI / Ministry of ESDM of the Republic of Indonesia	Jakarta
	28 Juni 2022 / June 28, 2022	Workshop "Indonesia Sketch: Transition Toward a Sustainable and Inclusive Energy Future"	PT Shell Indonesia	Jakarta
	30 Juni 2022 / June 30, 2022	Seminar Bioenergi & Cofiring	PLN	Jakarta
5 Juli 2022 / July 5, 2022	Webinar #4 Asset Management Series "Pemanfaatan Risiko & Criticality Aset Pada Pengambilan Keputusan Asset Management" / Webinar #4 Asset Management Series "Utilization of Risk & Criticality Asset in Asset Management Decision Making"	PLN	Jakarta	
13 Juli 2022 / July 13, 2022	G20 Webinar Series "Energy and Climate Financing": KESDM	Kementerian ESDM RI / Ministry of ESDM of the Republic of Indonesia	Jakarta	
27 Juli 2022 / July 27, 2022	Webinar Sinergitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Industri dan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Pengembangan EBT / Webinar on Synergy of Government, Regional Government, Industry and Society in the Context of Accelerating EBT Development	DEN	Jakarta	
10 Agustus 2022 / August 10, 2022	Webinar: Accelerating the Transition to Sustainable Energy Use	PwC	Jakarta	

Nama/Jabatan / Name/Position	Tanggal / Date	Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi / Training and Competence Development Program	Penyelenggara / Organizer	Lokasi / Location
	29 Agustus 2022 / August 29, 2022	G20 Webinar Series "Coal Biomass Cofiring Technologies to Accelerate Energy Transition"	Kementerian ESDM RI / Ministry of ESDM of the Republic of Indonesia	Jakarta
	29 Agustus 2022 / August 29, 2022	Seminar Nasional Patriot Energi Tahun 2021 / 2021 Energy Patriot National Seminar	IBEKA-METI	Jakarta
	30 Agustus 2022 / August 30, 2022	Event G20 Webinar "Smart Grid in Accelerating Energy Transition in Southeast Asia"	Kementerian ESDM RI / Ministry of ESDM of the Republic of Indonesia	Jakarta
	8 September 2022 / September 8, 2022	Workshop Dukungan Regulasi untuk Percepatan Implementasi Program Cofiring Biomassa pada PLTU / Workshop on Regulatory Support to Accelerate the Implementation of the Biomass Cofiring Program at PLTU	Kementerian ESDM RI / Ministry of ESDM of the Republic of Indonesia	Jakarta
	15 September 2022 / September 15, 2022	Seminar "100 Years NRE for the Next 100 Years- the Second Curve of Opportunity for the Growth and Sustainability"	PT PLN IP	Jakarta
	15 September 2022 / September 15, 2022	Seminar: Potential of Solar Cell for Photovoltaic Industry in Indonesia to Fulfill NDC 2030	PUCI	Jakarta
	21 September 2022 / September 21, 2022	Workshop Perdagangan Karbon pada Pembangkit EBT / Workshop: Carbon Trading on NRE Generators	Kementerian ESDM RI / Ministry of ESDM of the Republic of Indonesia	Jakarta
	22 September 2022 / September 22, 2022	Seminar Hydropower dan Geothermal dan Pelaksanaan Groundbreaking Proyek PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (4x260 MW) / Seminar: Hydropower and Geothermal and Groundbreaking Implementation of the Upper Cisokan Pumped Storage Hydropower Project (4x260 MW)	PLN	Jakarta
	28 September 2022 / September 28, 2022	Webinar Hosting Capacity EBT Intermitten pada Jaringan Distribusi / Webinar: Intermittent NRE Capacity Hosting on Distribution Networks	Kementerian ESDM RI / Ministry of ESDM of the Republic of Indonesia	Jakarta
	30 September 2022 / September 30, 2022	Webinar terkait Perpres No 112 Tahun 2022 / Webinar regarding Presidential Regulation No. 112 of 2022	Bappenas	Jakarta
	4 Oktober 2022 / October 4, 2022	Webinar #6 Asset Management Series "Sharing Experiences - The Use of Asset Risk in Asset Management Decision-Making"	PLN	Jakarta
	11 Oktober 2022 / October 11, 2022	Seminar Nasional Series #3: "Transisi EBT menuju NZE dan Tantangannya" / National Seminar Series #3: "NRE Transition to NZE and its Challenges"	ITS	Jakarta
	14 Oktober 2022 / October 14, 2022	Workshop Working Group Maritime Education 4th Bilateral Maritime Forum (BMF) RI-Belanda	Kemenko Marinvet RI	Jakarta
	22 Oktober 2022 / October 22, 2022	Ocean Talk Webinar: Ocean Renewable Energy	ITS	Jakarta
	22 Oktober 2022 / October 22, 2022	Editor Meeting #1: Co-Firing di PLTU untuk Narasi Transisi Energi dalam Perhelatan G20 / Editor Meeting #1: Co-Firing at PLTU for Narrative of Energy Transition in the G20 Event	SIEJ	Jakarta
	10 November 2022 / November 10, 2022	Workshop Project 9 Investment Prioritisation	PLN	Jakarta
	24 November 2022 / November 24, 2022	Webinar Implementasi Green Investment oleh Kementerian Keuangan RI untuk Penanggulangan Perubahan Iklim / Webinar: Green Investment Implementation by the Indonesian Ministry of Finance for Climate Change Mitigation	Kementerian Keuangan RI / Ministry of Finance of the Republic of Indonesia	Jakarta
	29 November 2022 / November 29, 2022	77th Indonesia National Electricity Day 2022 Conference	MKI	Jakarta
	30 November 2022 / November 30, 2022	Workshop IBEC (Indonesia Blue Energy for Blue Economy Center)	ITS	Jakarta
	13 Desember 2022 / December 13, 2022	APEC Workshop Clean Energy Star-Ups Forum: "Advancing Market Reach and Business Growth"	Kementerian ESDM RI / Ministry of ESDM of the Republic of Indonesia	Jakarta
Adi Lumakso				
<ul style="list-style-type: none"> Direktur Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan (1 Januari-21 September 2022) / Director of Regional Business for Sumatra and Kalimantan (January 1 - September 21, 2022) Direktur Manajemen Pembangkitan (21 September-31 Desember 2022) / Director of Generator Management (September 21 - December 31, 2022) 	Maret - Mei 2022 / March - May 2022	Onboarding Directorship Program angkatan 4 / Onboarding Directorship Program batch 5	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Jakarta

Nama/Jabatan / Name/Position	Tanggal / Date	Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi / Training and Competence Development Program	Penyelenggara / Organizer	Lokasi / Location
Adi Priyanto <ul style="list-style-type: none"> Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (1 Januari-21 September 2022) / Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara (January 1 - September 21, 2022) Direktur Distribusi (21 September-31 Desember 2022) / Director of Distribution (September 21 - December 31, 2022) 	25 Mei 2022 / May 25, 2022	Seminar Electricity Expert Series 2022 – Distribution Expert Series #3: Pemanfaatan Big Data dalam Pengelolaan Distribusi Tenaga Listrik. / Seminar Electricity Expert Series 2022 – Distribution Expert Series #3: Utilization of Big Data in Managing Electric Power Distribution.	PLN	Jakarta

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian terhadap kinerja Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris, berdasarkan pencapaian KPI Direksi/KPI Korporat yang termuat di dalam Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Kontrak Manajemen tahun 2022 telah ditetapkan dan disetujui Pemegang Saham dalam RUPS RKAP Tahun Buku 2022 tanggal 27 Januari 2022. Secara periodik, pemantauan atas pencapaian kinerja Perusahaan dilakukan oleh Satuan Pengendalian Kinerja Korporat. Dokumen laporan hasil evaluasi ini juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Hasil pencapaian KPI Direksi kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham di dalam RUPS Persetujuan Laporan Tahunan tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan capaian kinerja KPI Korporat pada tahun operasional, dengan Direksi memiliki kewajiban untuk menjelaskan kaitan perolehan KPI dengan kondisi lapangan dan respons operasional yang diimplementasikan. Adapun, di dalam forum itu, Dewan Komisaris memberi penjelasan dan mempertanggungjawabkan aspek pengawasan dan pemberian nasihat yang telah dilaksanakan selama tahun pelaporan.

Berikut ini adalah capaian KPI Perusahaan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh auditor eksternal:

No	Perspektif / Perspective	Bobot / Weight	Nilai / Score
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia / Economic and Social Value for Indonesia	33	35,08
2	Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation	21	21,62
3	Kepemimpinan Teknologi / Technological Leadership	23	21,89
4	Peningkatan Investasi / Increase in investment	11	10,77
5	Pengembangan Talenta / Talent Development	12	12,56
Total Penilaian Kinerja / Total Performance Achievement		100	101,92
Nilai Kinerja Organisasi / Organization Performance Value		100	101,92

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

Assessment of the performance of the Board of Directors is supervised by the Board of Commissioners based on the achievement of the Board of Directors KPIs/Corporate KPIs contained in the Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders. The 2022 Management Contract has been determined and approved by the Shareholders at the 2022 Annual Work Plan and Budget GMS on January 27, 2022. Periodically, monitoring of the achievement of the Company's performance is carried out by the Corporate Performance Control Unit. This evaluation report document is also audited by the Public Accounting Firm (KAP).

The results of the Board of Directors KPI achievement are then submitted to the Shareholders at the GMS. Through the Board of Directors and Board of Commissioners are accountable for corporate KPI performance achievements in the operational year, with the Board of Directors having the obligation to explain the relation between KPI acquisition with field conditions and the operational response implemented. Meanwhile, in that forum, the Board of Commissioners provides explanations and accounts for aspects of supervision and providing advice that has been carried out during the reporting year.

The Company's KPI achievements for the 2022 fiscal year which have been audited by external auditors are as follows:

Hasil capaian KPI Perusahaan adalah sebagai berikut:

Results of the Company's KPI are as follows:

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Direksi Tahun 2022

Achievement of Main Performance Indicator of Board of Directors in 2022

No	Indikator Kinerja Kunci / Key Performance Indicator	Bobot / Weight	Satuan / Unit	Target 2022 / 2022 Target	Realisasi 2022 / 2022 Realization	Pencapaian / Achievement	Nilai / Value
A	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia / Economic and Social Value for Indonesia	33					35,08
1	EBITDA	↑	6 Rp. Triliun	80,10	84,74	105,79%	6,34
2	ROIC- WACC (Cost of Equity =4%)	↑	6 %	-1,97	-1,53	110,00%	6,60
3	Interest Bearing Ratio						
a.	Interest Bearing Debt to EBITDA	↓	3 Kali	5,80	4,83	110,00%	3,30
b.	Interest Bearing Debt to Invested Capital	↓	3 %	31,09	29,24	105,96%	3,17
4	Rasio Elektrifikasi Nasional / National Electrification Ratio	↑	5 %	99,63	99,63	100,00%	5,00
5	Implementasi Program Reformasi Subsidi / Implementation of Subsidy Reformation Program	↓	4 Tahapan / Milestone / Stage/ Milestone	Implementasi Program Reformasi Subsidi / Implementation of Subsidy Reformation Program	Surat Kementerian ESDM / DIRJEN GATRIK tgl 8 Desember 2022 perihal Kebijakan Subsidi Rumah Tangga tahun 2023 / Letter of the Ministry of Energy and Mineral Resources / DIRJEN GATRIK dated December 8, 2022 on the 2023 household subsidy policy	104,25%	4,17
6	a. Penurunan Emisi Karbon CO ₂ e / Decrease in CO ₂ e Carbon Emission	↑	2 %	0,87	2,35	110,00%	2,20
b.	Implementasi Kerjasama PLN (PT EMI) dengan BKI dan Pertamina terkait Carbon Credit Pilot Project / Implementation of Cooperation between PLN (PT EMI) with BKI and Pertamina regarding the Carbon Credit Pilot Project	↓	2 Tahapan / Milestone / Stage/ Milestone	Penandatanganan PKS Pilot Project Dekarbonisasi dengan BUMN / Signing of PKS Pilot Project for Decarbonization with SOEs	Penandatanganan PKS Pilot Project Dekarbonisasi antara PT EMI & PT BKI Tgl 24 Juni 2022 / Signing of PKS Pilot Project for Decarbonization between PT EMI & PT BKI dated June 24, 2022	107,31%	2,14
c.	Pembangunan Green Industry Cluster / Development of Green Industry Clusters	↓	2 Tahapan / Milestone / Stage/ Milestone	Tersedianya dokumen Kajian Bersama dengan PT Pupuk Indonesia dan/ atau Pertamina terkait Green Industry Cluster yang ditandatangani Direksi BUMN terkait. / Availability of Joint Studies document with PT Pupuk Indonesia and/ or Pertamina related to Green Industry Cluster that signed by Directors of related SOEs.	Penyampaian Kajian Pre-Feasibility Study Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe tanggal 15 Des 2022 / Submission of the Pre-Feasibility Study of Arun Lhokseumawe Special Economic Zone on December 15, 2022	108,44%	2,16
B	Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation	21					21,62
7	Penyelesaian Program Dedieselisasi dan Gasifikasi / Completion of the Dedieselization and Gasification Program						
a.	Penyelesaian Program Dedieselisasi / Completion of Dedieselization Program	↓	5 Tahapan / Milestone / Stage/ Milestone	Penyelesaian 2 Dokumen LOI dan Usulan Persetujuan Harga ke Kementerian ESDM / Completion of 2 LOI Documents and Proposed Price Approval to the Ministry of Energy and Mineral Resources	Proses pengadaan gagal yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.0363.K/DIR/2022 dan No.0364.K/DIR/2022 tanggal 02 Desember 2022 / The failed procurement process was determined through KEPDIR PT PLN (Persero) No.0363.K/DIR/2022 and No.0364.K/DIR/2022 dated December 02, 2022	92,24%	4,61



No	Indikator Kinerja Kunci / Key Performance Indicator	Bobot / Weight	Satuan / Unit	Target 2022 / 2022 Target	Realisasi 2022 / 2022 Realization	Pencapaian / Achievement	Nilai / Value	
	b. Penyelesaian Program Konversi PLTD ke EBT / Completion of the PLTD to EBT Conversion Program	↑	-	Lokasi terkontrak / Contracted location	200	Proses pengadaan gagal / Procurement process failed	0,00%	0,00
	c. Penyelesaian program gasifikasi (dekarbonisasi) / Completion of the gasification (decarbonization) program							
	1. Kesepakatan skema Logistik dan Harga Nias / Agreement on Nias Logistics Scheme and Prices	↓	0	Tahapan / Milestone / Stage/ Milestone	Penandatanganan Kesepakatan Skema Logistik dan Harga Nias / Signing of the Nias Logistics Scheme and Price Agreement	Telah Terbit Keputusan Menteri ESDM No.249.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan tidak terdapat lokasi Nias dalam daftar pembangkit penugasan gasifikasi / MEMR Decree No.249.K/MG.01/MEM.M/2022 has been issued on October 14, 2022 and there is no Nias location in the list of gasification assignment generators	0,00%	0,00
	2. Gas in Gorontalo	↓	2,5	Tahapan / Milestone / Stage/ Milestone	Gas in Gorontalo	4 Februari 2022 / February 4, 2022	107,86%	2,69
	3. Penandatanganan Kesepakatan Penyediaan New FSRU Jawa Barat / Signing on New FSRU West Java Provision Agreement	↓	2,5	Tahapan / Milestone / Stage/ Milestone	Kesepakatan Penyediaan New FSRU Jawa Barat / West Java New FSRU Provision Agreement	Heads of Agreement FSRU PLN dengan PT Nusantara Regas tanggal 19 September 2022 / FSRU Heads of Agreement between PLN and PT Nusantara Regas dated September 19, 2022	110,00%	2,75
8	Pendirian Holding dan Sub-Holding Anak Perusahaan / Establishment of Subsidiary Holding and Sub-Holding Companies	↓	5	Tahapan / Milestone / Stage/ Milestone	Legal End State 3 Sub-Holding	Legal End State 3 Sub-Holding tanggal 30 Desember 2022 / Legal End State 3 Sub-Holding dated December 30, 2022	110,00%	5,50
9	Risk Maturity Index(RMI)	↑	6	Level	3,10	3,14	101,29%	6,07
C	Kepemimpinan Teknologi / Technology Leadership		23					21,89
10	a. SAIDI (System Average Interruption Duration Index)	↓	6	Menit/ pelanggan / Minute/ customer	586	463,20	110,00%	6,60
	b. SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)	↓	6	Kali/ pelanggan / Times/ customer	7	5,62	110,00%	6,60
	c. Distribution Efficiency Rate	↓	5	%	8,90	8,72	102,05%	5,10
11	a. Implementasi Smart Meter AMI	↑	3	Jumlah kWh meter AMI terpasang / Number of installed AMI kWh meters	1.200.000	118.725	9,89%	0,29
	b. Implementasi Smart Grid	↑	3	Tahapan / Milestone / Stage/ Milestone	Implementasi Online Monitoring Susut di 2 lokasi / Implementation of Losses Online Monitoring in 2 locations	Go Live Online Monitoring Susut pada 24 Oktober 2022 / Go Live Online Monitoring for Loss on October 24, 2022	110,00%	3,30
D	Peningkatan Investasi / Increase in Investment		11					10,77
12	a. Penambahan Kapasitas Pembangkit EBT / Addition of EBT Generating Capacity	↑	1,7	MW	228,69	172,25	75,32%	1,25



No	Indikator Kinerja Kunci / Key Performance Indicator	Bobot / Weight	Satuan / Unit	Target 2022 / 2022 Target	Realisasi 2022 / 2022 Realization	Pencapaian / Achievement	Nilai / Value
	b. Peningkatan Kapasitas Transmisi / Increased Transmission Capacity	↑	1,7 kms	4.537	2.984,57	65,78%	1,09
	c. Peningkatan Kapasitas Gardu Induk / Increase in Substation Capacity	↑	1,7 MVA	4.930	5.610,00	110,00%	1,83
13	Infrastruktur kendaraan listrik (EV) / Electric vehicle (EV) infrastructure	↑	6 SPKLU	40	73	110,00%	6,60
E	Pengembangan Talenta / Talent Development		12				12,56
14	Talent milenial (<=42 tahun) dalam <i>nominated talent</i> / Millennial talent (<=42 years old) in <i>nominated talent</i>	↑	6 %	6	6,45	107,53%	6,45
15	Perempuan dalam <i>nominated talent</i> / Women in <i>nominated talent</i>	↑	6 %	19	19,35	101,87%	6,11
TOTAL PENILAIAN KINERJA / TOTAL PERFORMANCE ASSESSMENT			100				101,92
NILAI KINERJA ORGANISASI / ORGANIZATIONAL PERFORMANCE VALUE			100,00				101,92

REMUNERASI DIREKSI

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Perseroan menerapkan prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Sesuai peraturan tersebut, remunerasi Direksi terbagi atas gaji Direktur Utama yang ditentukan oleh hasil RUPS Kementerian BUMN, kemudian gaji Wakil Direktur Utama sebesar 90% dari gaji Direktur Utama, dan Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

Struktur dan Besaran Remunerasi Direksi

Besaran remunerasi Direksi ditetapkan sesuai kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan besaran

REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Procedure for Determination of Remuneration for the Board of Directors

The Company implements the procedure for determining remuneration for the Board of Commissioners based on the Minister of SOE Regulation No. PER-12/MBU/11/2020 regarding the Fifth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State Owned Enterprises. In accordance with these regulations, the remuneration of the Board of Directors is divided into the salary of the President Director which is determined by the results of the GMS of the Ministry of SOEs. It was determined that salary of the Vice Director is 90% of the President Director's salary, and other Directors is 85% of the President Director's salary.

Structure and Amount of Remuneration for the Board of Directors

The amount of remuneration for the Board of Directors is determined according to the conditions and financial capabilities of the Company, in accordance with the

remunerasi tersebut dilakukan menggunakan faktor penyesuaian industri dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis secara terukur, kondisi persaingan usaha, kompleksitas usaha, serta kelangkaan sumber daya manusia.

applicable laws and regulations. Determination of the amount of remuneration is carried out using the industry adjustment factor by considering similar industrial sectors on a measurable basis (benchmarks), conditions of business competition (competitiveness), business complexity, and scarcity of human resources.

Remunerasi yang diterima Direksi terdiri dari Gaji, Tunjangan, dan Tantiem dengan perincian sebagai berikut:

The remuneration received by the Board of Directors consists of salaries, allowances, and tantiem with the following details:

No	Jenis Remunerasi / Type of Remuneration	Direktur Utama / President Director	Direktur / Director	Keterangan / Description
1	Gaji per bulan / Salary per month	Rp445.000.000,-	Rp378.250.000,-	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama 100% / President Director 100% Wakil Direktur Utama 95% dari gaji Direktur Utama / Vice President Director 95% of President Director's Salary Direktur Lainnya 85% dari gaji Direktur Utama / Other Directors 85% of President Director's Salary
Tunjangan / Allowance				
2	Tunjangan hari raya keagamaan / Religious holiday allowance	1 (satu) bulan gaji / 1 (one) month salary		
	Tunjangan Perumahan / Housing Allowance	Sebesar 40% dari Gaji dengan ketentuan paling banyak sebesar Rp27.500.000,- untuk wilayah Ibu Kota / 40% of salary with maximum value of Rp27,500,000 for those living in Capital City.		
	Asuransi purna jabatan / Post-tenure insurance	Premi yang ditanggung 25% dari honorarium dalam satu tahun / The premium covered 25% of the honorarium in one year.		
Fasilitas / Facilities				
3	Fasilitas kesehatan / Health facility	1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 tahun / 1 wife and 3 children at maximum of 25 years		
	Fasilitas bantuan hukum / Legal aid facility	Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / Given in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations		
	Fasilitas keanggotaan klub bisnis / Business club membership facility	1 (satu) keanggotaan klub bisnis / 1 (one) business club membership		
	Pakaian Seragam / Uniform	2 (dua) setel setiap 1 (satu) tahun / 2 (two) sets every 1 (one) year		

Secara keseluruhan, remunerasi Direksi yang diterima untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

In total, the remuneration of Board of Directors received in 2022 is as follows:

Jenis Remunerasi / Type of Remuneration	Jumlah / Total	Besaran (juta Rp) / Amount (million Rp)
Remunerasi / Remuneration		
Gaji / Salary	12 Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022) / 12 Directors (including those who have retired in 2022)	Rp 45.182.333.333,-
Tantiem Netto / Net Tantiem	15 Direksi (termasuk mantan direksi tahun buku 2021) / 15 Directors (including former directors for the 2021 fiscal year)	Rp120.495.275.350,-
Tunjangan / Allowance		
Tunjangan Perumahan / Housing Allowance	9 Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022) / 9 Directors (including those who have retired in 2022)	Rp2.557.500.000,-
Tunjangan Hari Raya / Holiday Allowance	10 Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022) / 10 Directors (including those who have retired in 2022)	Rp3.849.250.000,-



Jenis Remunerasi / Type of Remuneration	Jumlah / Total	Besaran (juta Rp) / Amount (million Rp)
Remunerasi / Remuneration		
Tanggung PPh Pasal 21 / Income Tax Article 21 Insurance	17 Direksi (termasuk mantan direksi tahun buku 2021) / 17 Directors (including former directors for the 2021 fiscal year)	Rp76.756.752.863,-
Tanggung BPJS / BPJS Insurance	12 Direksi (termasuk mantan direksi tahun buku 2021) / 12 Directors (including former directors for the 2021 fiscal year)	Rp2.450.068.620,-
Jumlah / Total		Rp251.291.180.166,-

Pengungkapan Opsi Saham yang Diterima Direksi

Perseroan bukan merupakan perusahaan publik. Atas hal tersebut, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham bagi Direksi.

Disclosure of Stock Options Received by the Board of Directors

The Company is not a public company. For this reason, the Company does not have Stock Ownership Program) for the Board of Directors.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTAR ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

Anggota Direksi PLN menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik berupa hubungan keuangan maupun kekeluargaan, baik dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham. Uraian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

DISCLOSURE OF AFFILIATION BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR SHAREHOLDERS

Members of the Board of Directors of PLN do not have any affiliation in the form of financial or family relations, either with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or shareholders. The

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Direksi

Disclosure of Affiliation of the Board of Directors

Nama / Name	Hubungan Keluarga dengan / Family Relation with						Hubungan Keuangan dengan / Financial Relation with					
	Anggota Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Anggota Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham / Shareholders		Anggota Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Anggota Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham / Shareholders	
	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Darmawan Prasodjo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sinthya Roesly		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Yusuf Didi Setiarto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Evy Haryadi		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Edi Srimulyanti		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hartanto Wibowo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Wiluyo Kusdwiarto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Adi Lumakso		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Adi Priyanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rudy Hendra Prastowo*		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Bob Saril*		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Haryanto W.S*		✓		✓		✓		✓		✓		✓

*) Sudah tidak menjabat sebagai Direktur Perseroan pada posisi 31 Desember 2022

*) No longer serving as Director as of December 31, 2022

KEBERAGAMAN PADA KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi Direksi ditentukan oleh Pemegang Saham dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris dan latar belakang keahlian personil untuk masing-masing jabatan serta pembagian tugas dan tanggung jawab.

Perseroan memastikan bahwa komposisi Direksi telah memenuhi aspek keberagaman berdasarkan latar belakang keahlian, baik secara kolegal maupun individu, sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar kepengurusan Perseroan senantiasa dilaksanakan secara profesional, efektif, dan akuntabel. Disamping itu, pemenuhan aspek keberagaman dilaksanakan agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan bagi Direksi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga mampu memenuhi harapan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Terkait hal tersebut, keberadaan anggota Direksi yang merupakan pegawai karier yang berpengalaman di lingkungan internal PT PLN (Persero) menunjukkan bahwa pengembangan karir pegawai di PLN berjalan dengan baik.

Keberagaman pada komposisi Direksi Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

DIVERSITY IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

The composition of the Board of Directors is determined by the Shareholders by taking into account the consideration of the Board of Commissioners and the expertise background of the personnel for each position as well as the division of tasks and responsibilities.

The Company ensures that the composition of the Board of Directors meets the diversity aspect based on expertise background, both collegially and individually, in accordance with applicable regulations. This is done so that the management of the Company is always carried out in a professional, effective, and accountable manner. In addition, the fulfilment of diversity aspects is carried out so that the duties and responsibilities assigned to the Board of Directors can be carried out optimally so as to be able to meet the expectations of shareholders and all stakeholders.

In this regard, the existence of members of the Board of Directors who are career employees with tiered assignment experience within the internal scope of PT PLN (Persero) shows that the talent management system and career development in PLN is running well.

Diversity in the composition of the Board of Directors of the Company is explained as follows:

Keberagaman pada Komposisi Direksi Tahun 2022

Diversity in the Board of Directors Composition in 2022

Nama / Name	Jenis Kelamin / Gender	Usia per 31 Des 2022 / Age as of December 31, 2022	Pendidikan / Education			Keahlian / Expertise				
			S1 / Bachelor's Degree	S2 / Master's Degree	S3 / Doctoral Degree	Ekonomi / Keuangan / Manajemen / Economics/Finance/ Management	Hukum / Legal	Teknik / Engineering	Energi / Energy	Ketenagalistrikan / Electricity
Darmawan Prasodjo	Laki-laki / Male	52			✓	✓		✓		✓
Sinthya Roesly	Perempuan / Female	53	✓			✓		✓		✓
Yusuf Didi Setiarto	Laki-laki / Male	48	✓			✓	✓	✓		
Evy Haryadi	Laki-laki / Male	53	✓					✓	✓	
Edi Srimulyanti	Perempuan / Female	57	✓			✓				✓
Hartanto Wibowo	Laki-laki / Male	47	✓			✓		✓		
Wiluyo Kusdwiarto	Laki-laki / Male	50	✓					✓		
Adi Lumakso	Laki-laki / Male	52	✓			✓		✓		✓
Adi Priyanto	Laki-laki / Male	55	✓			✓		✓		
Bob Saril*	Laki-laki / Male	53	✓					✓		✓
Rudy Hendra Prastowo*	Laki-laki / Male	58	✓					✓		
Haryanto W.S*	Laki-laki / Male	62	✓			✓		✓		

*) Sudah tidak menjabat sebagai Direktur Perseroan pada posisi 31 Desember 2022

*) No longer serving as Director as of December 31, 2022



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merujuk pada individu yang diangkat oleh Direksi untuk memimpin Sekretariat Perusahaan, yaitu pejabat yang secara khusus melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan. Mengacu pada Pedoman GCG Perseroan, Sekretaris Perusahaan merupakan individu yang bertugas: (1) Memastikan kepatuhan keterbukaan pengelolaan Perseroan sesuai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*; (2) Sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*); dan (3) Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan mencakup Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan RUPS. Lebih lanjut, berdasarkan kebijakan tentang organisasi dan tata kerja Perseroan Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam memastikan fungsi perencanaan, implementasi dan *monitoring* agenda Transformasi PLN, pengelolaan *stakeholder*, memastikan pengelolaan rapat, administrasi, keprotokolan Direksi dan Dewan Komisaris serta kebijakan, strategi dan implementasi komunikasi PLN.

PROSES PENETAPAN/PEMBERHENTIAN CORPORATE SECRETARY

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi melalui mekanisme internal, dengan persetujuan oleh Dewan Komisaris untuk kemudian dilaporkan kepada regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Proses pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan digambarkan dalam diagram berikut:

Proses Penetapan/Pemberhentian Sekretaris Perusahaan



CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary refers to an individual appointed by the Board of Directors to lead the Corporate Secretariat, namely an official who specifically carries out the function of the Corporate Secretary. Referring to the Company's GCG Code, the Corporate Secretary is an individual who: (1) Ensures compliance with the transparency of the Company's management according to the implementation of the principles of Good Corporate Governance; (2) Serves as a liaison officer; and (3) Administers and stores Company documents including Shareholder Register, Special Register, and Minutes of Board of Directors Meetings, Board of Commissioners Meetings, and GMS. Furthermore, based on policy on organization and work procedure of the Company, Corporate Secretary is responsible to the President Director in ensuring the function of planning, implementing, and monitoring the PLN Transformation agenda, managing stakeholders, ensuring the management of meetings, administration, protocols of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as the policy, strategy and implementation of PLN communication.

PROCESS FOR APPOINTMENT/DISMISSAL OF CORPORATE SECRETARY

The appointment and dismissal of the Corporate Secretary is carried out based on the Decree of the Board of Directors through an internal mechanism with approval from the Board of Commissioners to be reported to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX).

The process of appointing and dismissing the Corporate Secretary is illustrated in the following diagram:

Appointment/Dismissal of the Corporate Secretary

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY PROFILE



ALOIS WISNUHARDANA
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Usia / Age	52 Tahun / 52 years old
Domisili / Domicile	Ciledug, Tangerang
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Education	Sarjana Sains, Jurusan Kimia, FMIPA Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta / Bachelor's Degree in Science, Majoring in Chemistry, FMIPA Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Dasar Hukum Penunjukan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Direksi No. 0226.K/SDM.01.04/DIR/2022 tanggal 23 Mei 2022 / Board of Directors Decree No. 0226.K/SDM.01.04/DIR/2022 dated May 23, 2022
Pengalaman Kerja / Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Perusahaan, PT PLN (Persero) (Juni 2022 – Sekarang) / Corporate Secretary of PT PLN (Persero) (June 2022 – present) • Kepala Departemen Manajemen Stakeholder, Eximbank Indonesia / Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Juli 2020– Juni 2022) / Head of Stakeholder Management Department, Eximbank Indonesia / Indonesian Export Financing Agency (July 2020 – June 2022) • Communication and Content Advisor, PT PLN (Persero) – Feb 2020–Jun 2020 • Communication Advisor, Kementerian PUPR (Okt 2019–Jun 2020) / Communication Advisor, Ministry of PUPR (October 2019 – June 2020) • Communication Advisor, Kementerian Perhubungan (Okt 2019–Jan 2020) / Communication Advisor, Ministry of Transportation (October 2019 – January 2020) • Asisten Juru Bicara Presiden (Nov 2019–Jan 2020) / Assistant to the Presidential Spokesperson (Nov 2019–Jan 2020) • Advisor, Kantor Staf Presiden (Agustus 2016 – Okt 2019) / Advisor, Presidential Staff Office (August 2016 – Oct 2019) • Editor in Chief, Tabloid RUMAH dan Majalah IDEA, Kompas Gramedia Group (2009–2016) / Editor in Chief, RUMAH Tabloid and IDEA Magazine, Kompas Gramedia Group (2009–2016) • Deputy Managing Editor, Tabloid PCPlus, Kompas Gramedia Group (2002–2007) • Reporter di berbagai media (1995 – 2000) / Reporter in various media (1995 – 2000)
Jabatan Rangkap / Concurrent Position	Tidak ada / None

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2022, Sekretaris Perusahaan mengikuti kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dengan perincian sebagai berikut:

EDUCATION AND/OR TRAINING FOR CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary participated in education and/or training activities in 2022 with the following details:



Pendidikan dan/atau pelatihan Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary education and/or training in 2022 Tahun 2022

Nama/Jabatan / Name/Position	Tanggal / Date	Pelatihan dan/atau Pendidikan / Training and/or Education	Penyelenggara / Organizer	Lokasi / Location
Alois Wisnuhardana Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	13 Juli 2022 / July 13, 2022	Road to G20 Dialogue "The Global Blended Finance Alliance for Micro Small Medium Enterprise (MSMEs) and Energy Transition"	Tri Hita Karana	Jakarta
	17 Juli 2022 / July 17, 2022	G20 High Level Seminar on Green Economy and Finance	Bank Indonesia	Jakarta
	25 – 26 Agustus 2022 / August 25-26, 2022	Forum GCG PLN Group	PLN	Yogyakarta
	9 November 2022 / November 9, 2022	"Mobilising Capital for a Just Energy Transition"	Tri Hita Karana	Bali
	12 Desember 2022 / December 12, 2022	Sustainability Day	PLN	Jakarta

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sesuai Peraturan Direksi No. 0054.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan rapat Perusahaan, tindak lanjut risalah/rapat dan aktivitas program perubahan serta kebijakan dan strategi perangkat dan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) untuk fungsi sekretariat perusahaan;
2. Mengelola aktivitas rapat, kesekretariatan, administrasi, fasilitas, dan protokol pemangku kepentingan (Direksi dan Dewan Komisaris), termasuk data operasional, laporan PLN, dan penggunaan anggaran;
3. Menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai kebutuhan Keterbukaan Informasi Publik, serta memelihara laman PPID di website PLN;
4. Menyediakan laporan-laporan dan informasi material kepada pasar modal, lembaga serta pihak pihak terkait sesuai kewajiban selaku emiten dan BUMN serta memenuhi ketentuan dan regulasi termasuk memelihara laman hubungan investor di website Perusahaan;
5. Melakukan pengelolaan hubungan dengan investor dan institusi lain (Lembaga Negara, DPR, Pemda, Kedutaan dan lain-lain) dalam dan luar negeri, termasuk menyediakan informasi Perusahaan sesuai peraturan (PPID) melalui penyelenggaraan pertemuan dengan investor, analis, lembaga, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mengembangkan dan mengkaji strategi, pedoman valuasi untuk program Transformasi PLN;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY

Duties and responsibilities of the Corporate Secretary in accordance with Regulation of the Board of Directors No. 0054.P/DIR/2022 on Organization and Work Procedures are as follows:

1. Plan, implement, evaluate the Company's meeting activities, follow up on minutes/ meetings, and change program activities as well as policies and strategies for Good Corporate Governance (GCG) tools and guidelines for the corporate secretariat function;
2. Manage meeting activities, secretariat, administration, facilities, and stakeholders (Board of Directors and Board of Commissioners) protocols, including operational data, PLN reports, and budget usage;
3. Carry out the function as an Information and Documentation Management Officer (PPID) according to the needs of Public Information Disclosure, and maintain the PPID page on the PLN website;
4. Provide reports and material information to the capital market, institutions and related parties according to obligations as issuers and SOEs and comply with terms and regulations including maintaining an investor relations page on the Company's website;
5. Manage relations with investors and other institutions (State Institutions, DPR, Local Government, Embassies, and others) at home and overseas, including provide Company information according to regulations (PPID) by holding meetings with investors, analysts, institutions and others in accordance with the applicable provisions;
6. Develop and review strategies and valuation guidelines for the PLN Transformation program;

7. Mengidentifikasi risiko dan mitigasi perubahan untuk memastikan keberhasilan perubahan serta menjaga stabilitas organisasi berdasarkan *Good Corporate Governance* (GCG), manajemen risiko, dan kepatuhan;
 8. Memastikan standar *Key Performance Indicator* (KPI) program perubahan dan berkoordinasi dengan fungsi pengendalian kinerja PLN untuk menetapkan KPI program perubahan;
 9. Mengelola dan memonitor implementasi kelangsungan perubahan;
 10. Mengelola hubungan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan berbagai fungsi di PLN untuk mendorong program inisiatif;
 11. Mengembangkan kebijakan strategi komunikasi PLN serta TJSL yang berbasis pada *International Organization for Standardization* (ISO) selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 12. Mengelola komunikasi internal, eksternal, dan hubungan masyarakat, serta mengelola isu dan krisis komunikasi yang terjadi;
 13. Mengelola program TJSL serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), termasuk memastikan pengendalian pelaksanaan dan kinerja program TJSL di seluruh lingkungan PLN (pusat dan Anak Perusahaan);
 14. Memastikan terlaksananya kebijakan, strategi, dan implementasi komunikasi PLN, hubungan masyarakat, hubungan dengan media, hubungan komunikasi pihak internal dan eksternal, serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), termasuk di dalamnya pengarusutamaan gender, untuk meningkatkan citra positif dan *positioning* PLN sebagai perusahaan listrik milik negara yang berkontribusi positif bagi pembangunan dan rakyat Indonesia; dan
 15. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di sekretariat perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko, dan kepatuhan, termasuk menerapkan *check and balance* melalui *4 Eyes Principle* untuk proses bisnis yang bersifat kritical dalam kerangka *3 Lines Model*.
7. Identify risks and mitigate changes to ensure the success of changes and maintain organizational stability based on Good Corporate Governance (GCG), risk management and compliance;
 8. Ensure the Key Performance Indicator (KPI) standard for the transformation program and coordinate with the PLN performance control function to determine the KPI for the transformation program;
 9. Manage and monitor the implementation of continuity of transformation;
 10. Manage relations and communication with stakeholders and various functions at PLN to encourage program initiatives;
 11. Develop a communication strategy policy for PLN and TJSL based on the International Organization for Standardization (ISO) in line with the Sustainable Development Goals;
 12. Manage internal, external, and public relations communications, as well as manage occurred communication issues and crises;
 13. Manage the TJSL program and the Partnership and Community Development Program (PKBL), including ensure control of the implementation and performance of the TJSL program throughout the PLN environment (central and Subsidiaries);
 14. Ensure the implementation of PLN's policies, strategies, and implementation of communications, public relations, relations with the media, internal and external party communication relations, as well as Social and Environmental Responsibility (TJSL) and Environmental, Social, and Governance (ESG), including gender mainstreaming, to enhance PLN's positive image and positioning as a state-owned electricity company that contributes positively to development and the people of Indonesia; and
 15. Ensure the planning, implementation and evaluation of all business processes in the corporate secretariat based on the principles of good corporate governance, risk management and compliance, including implementing checks and balances through the 4 Eyes Principle for critical business processes within the framework of the 3 Lines Model.



PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2022

Sekretaris Perusahaan melaksanakan tugas di sepanjang tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Menyelenggarakan RUPS RKAP Tahun Buku 2022 dan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2021;
2. Melaksanakan dokumentasi risalah RUPS, akta RUPS dan hal-hal lain berkenaan dengan RUPS;
3. Membuat risalah Rapat Direksi dan mendokumentasikannya;
4. Mengoordinasikan rapat-rapat yang dihadiri oleh Direksi, seperti rapat bersama Dewan Komisaris, Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, dan sebagainya;
5. Menyusun laporan korporat, di antaranya Laporan Manajemen, Laporan Statistik, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan;
6. Melaksanakan penilaian *Self Assessment* GCG periode tahun 2021;
7. Memutakhirkan Pedoman GCG dan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*);
8. Melaporkan setiap informasi material kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
9. Melakukan pengkinian informasi yang ada di dalam situs web Perusahaan;
10. Melakukan korespondensi dengan para pemangku kepentingan dari lembaga keuangan;
11. Menerima kunjungan investor dan analis terkait *update* informasi Perusahaan periode triwulanan;
12. Mengelola hubungan dengan lembaga negara dan pemangku kepentingan lainnya; dan
13. Mendukung kelancaran tugas Direksi dan Dewan Komisaris dari sisi keprotokolan di lingkungan PLN dan kegiatan kelistrikan strategis PLN (peresmian, peletakan batu pertama, dan peninjauan proyek kelistrikan strategis PLN).

UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)

SPI merupakan satuan kerja di PLN yang memiliki fungsi utama melaksanakan audit internal untuk mewujudkan visi dan misi PLN. Dalam struktur organisasi PLN, untuk menjaga independensi SPI berada langsung dibawah Direktur Utama dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional PLN. SPI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF CORPORATE SECRETARY IN 2022

Throughout 2022, the Corporate Secretary performed the following duties:

1. Organized Annual General Meeting of Shareholder of Annual Budget for the 2022 Fiscal Year and Annual General Meeting of Shareholders of Management Report for the 2021 Fiscal Year.
2. Organized GMS documentation, including minutes of meetings, deeds, and so forth.
3. Prepared and documented Minutes of Board of Directors Meetings.
4. Coordinated meetings attended by Board of Directors, such as Meetings with the Board of Commissioners, Hearings with DPR and so forth.
5. Prepared corporate reports including Management Reports, Statistics Reports, Annual Report and Sustainability Report.
6. Carried out GCG Self Assessment in 2021.
7. Updating the GCG Code and Board of Commissioners and Board of Directors Work Procedure Guidelines (*Board Manual*).
8. Reported any material information to Indonesia Stock Exchange ("IDX") and Financial Services Authority (OJK).
9. Updated information disclosure on the Company's website.
10. Organized correspondence with financial institutions.
11. Accepted investor and analyst visits regarding quarterly update on corporate information.
12. Managed relationships with government institutions and other stakeholders.
13. Facilitated activities of Board of Directors and Board of Commissioners in terms of protocol in PLN's environment and PLN's strategic electricity activities (launching, commencement, and visit of PLN's strategic electricity project).

INTERNAL AUDIT UNIT

Internal Audit Unit (SPI) is a work unit in PLN which has the main function of carrying out internal audits to realize PLN's vision and mission. In the PLN organizational structure, to maintain independence, SPI is directly positioned under the President Director and is not involved in PLN's operational activities. SPI submits a report to the President Director with a copy to the Board of Commissioners through the Audit

SPI dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI), dengan tanggung jawab memimpin, menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan pembinaan fungsi SPI untuk menjamin terselenggaranya evaluasi dan peran aktif audit internal dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan berkaitan dengan operasional perseroan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Committee. SPI is led by Chief Audit Executive (KSPI), with responsibility for leading, planning, implementing, evaluating, and coaching the SPI function to ensure the evaluation and active role of internal audit in improving the effectiveness of the internal control system, risk management and governance on an ongoing basis related to the Company's operations in achieving the targets set by management.

PENGANGKATAN KEPALA SATUAN PENGAWAS INTERN

Mengacu pada Piagam Pengawasan SPI, KSPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris yang prosesnya dijabarkan melalui diagram berikut:

APPOINTMENT OF CHIEF AUDIT EXECUTIVE

With reference to the Internal Audit Unit Charter point 2.1 Organizational Structure, KSPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The process of appointing and dismissing KSPI is described in the following diagram:

Proses Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern

Appointment of Chief Audit Executive



PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWAS INTERN

PROFILE OF CHIEF AUDIT EXECUTIVE



SULISTYO BIANTORO

Kepala Satuan Pengawas Intern (KSPI)
Chief Audit Executive (CAE)

Usia / Age	46 tahun / 46 years old
Domisili / Domicile	Tangerang Selatan / South Tangerang
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> S2 Master of Commerce, University of Queensland, Australia (2004 - 2006) D -IV STAN (1998 - 2000) D-III STAN (1995 - 1998)



Sertifikasi Profesi / Professional Certificate	<ul style="list-style-type: none"> • Certified Fraud Examiner (CFE)(2022) • Certified GRC Professional (GRCP)(2022) • Certified GRC Audit (GRCA)(2022) • Certificate Qualified Chief Risk Officer (QCRO)(2022) • Loop Certified Professional Coach (LCPC)(2022) • Certified Public Accountant (CPA)(2001) • Granted Chartered Accountant (CA) Indonesia (2014) • Passed Chartered Financial Analyst (CFA level I exam)(2017)
Dasar Hukum Penunjukan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0294.K/SDM.02.02/DIR/2022 tanggal 22 April 2022. / Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0294.K/SDM.02.02/DIR/2022 dated April 22, 2022.
Pengalaman Kerja / Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Satuan Pengawasan Intern PLN / Chief Audit Executive of PLN April 2022 – Sekarang / April 2022 – Present • Expert Human Capital Management PLN Desember 2020 – April 2022 / December 2020 – April 2022 • Plt. Direktur Utama PT Haleyora Power / Act. President Director of PT Haleyora Power Juni 2020 – Desember 2020 / June 2020 – December 2020 • EVP Keuangan PLN / EVP Finance of PLN Agustus 2017 – Juni 2020 / August 2017 – June 2020 • Kepala Divisi Akuntansi PLN / Head of Accounting Division of PLN Agustus 2014 – Agustus 2017 / August 2014 – August 2017 • Group Head Regional V SPI PLN / SPI Group Head of Regional V of PLN Juni 2012 – Agustus 2014 / June 2012 – August 2014 • Badan Pemeriksa Keuangan RI / The Audit Board of the Republic of Indonesia Juli 1998 – Juni 2012 / July 1998 – June 2012
Jabatan Rangkap / Concurrent Position	Tidak ada / None
Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti di Tahun 2022 / Education and Training to Improve Competency	Seminar Nasional Internal Audit 2022 / Internal Audit National Seminar 2022

SERTIFIKASI PROFESI AUDIT INTERNAL

SPI telah melaksanakan sertifikasi internasional dan nasional sebagai upaya untuk senantiasa meningkatkan kompetensi auditor internal dengan realisasi untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT PROFESSIONAL CERTIFICATION

Internal Audit Professional Certification SPI has carried out international and national certifications as an effort to continuously improve the competence of internal auditors with the realization for 2022 as follows:

Sertifikasi SPI Tahun 2022

SPI Certification in 2022

No	Sertifikasi / Certification	Jumlah Pemegang Sertifikasi / Total Certification Holder
Sertifikasi Internasional / International Certification		
1	Certified Fraud Examiner (CFE)	8
2	Certified Information System Auditor (CISA)	1
3	Certified Internal Auditor (CIA)	1
4	Certified Hacking Forensic Investigator (CHFI)	11
5	DF 120 - Foundations In Digital Forensic with Encase Forensic	1
6	Certified Oxygen Forensic Detective Expert User	2

No	Sertifikasi / Certification	Jumlah Pemegang Sertifikasi / Total Certification Holder
Sertifikasi Nasional / National Certification		
7	Qualified Internal Auditor (QIA)	111
8	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	5
9	Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	16
10	Certified Risk Management Professional (CRMP)	2
11	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	14
12	Dunamis Certified Human Capital Management (DCHCM)	1
13	Certified Human Resource Professional (CHRP)	2
Jumlah / Total		176

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN SPI TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Perseroan melaksanakan pemenuhan pendidikan profesi berkelanjutan (PPL/CPE) melalui keikutsertaan auditor SPI dalam *workshop/seminar/konferensi* dengan realisasi sebagai berikut:

EDUCATION AND/OR TRAINING FOR SPI IN 2022

In 2022, the Company carried out the fulfilment of continuing professional education (PPL/CPE) through the participation of SPI auditors in *workshops/seminars/conferences* with the following realizations:

Pengembangan Berkelanjutan Auditor SPI Tahun 2022

Sustainable Development of SPI Auditor in 2022

No.	Pengembangan Auditor / Auditor Development	Jumlah Auditor / Total Auditors
1.	Diklat ITN (Pusdiklat) / ITN Education and Training (Education and Training Center)	2.196
2.	Pelatihan / Training	5.285
3.	<i>Workshop/Seminar/Konferensi</i> / <i>Workshop/Seminar/Conference</i>	1.294
Jumlah / Total		8.775

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SPI DI DALAM PERUSAHAAN

Pada tahun 2022, Perseroan melaksanakan transformasi organisasi SPI seiring perubahan organisasi Direksi yang menjadi *functional-based* setelah diterapkannya restrukturisasi organisasi. Hal ini dilaksanakan guna memastikan organisasi SPI memenuhi standar dan definisi Internal Audit (IA).

SPI STRUCTURE AND POSITION IN THE COMPANY

In 2022, the Company carried out an SPI organizational transformation in line with the changes in the Board of Directors' organization to become *functional-based* following the implementation of organizational restructuring. This is carried out to ensure the SPI organization meets the standards and definitions of Internal Audit (IA).

Dengan dilaksanakannya restrukturisasi, peran IA di dalam SPI tidak hanya *assurance* tetapi juga konsultasi, yang diwujudkan melalui penambahan fungsi konsultasi di dalam organisasi SPI. Perseroan menerapkan penguatan pada struktur audit TI dalam rangka pengelolaan risiko terkait penggunaan digitalisasi dan teknologi informasi, yang dilakukan melalui pembentukan fungsi *data analytic and continuous audit*.

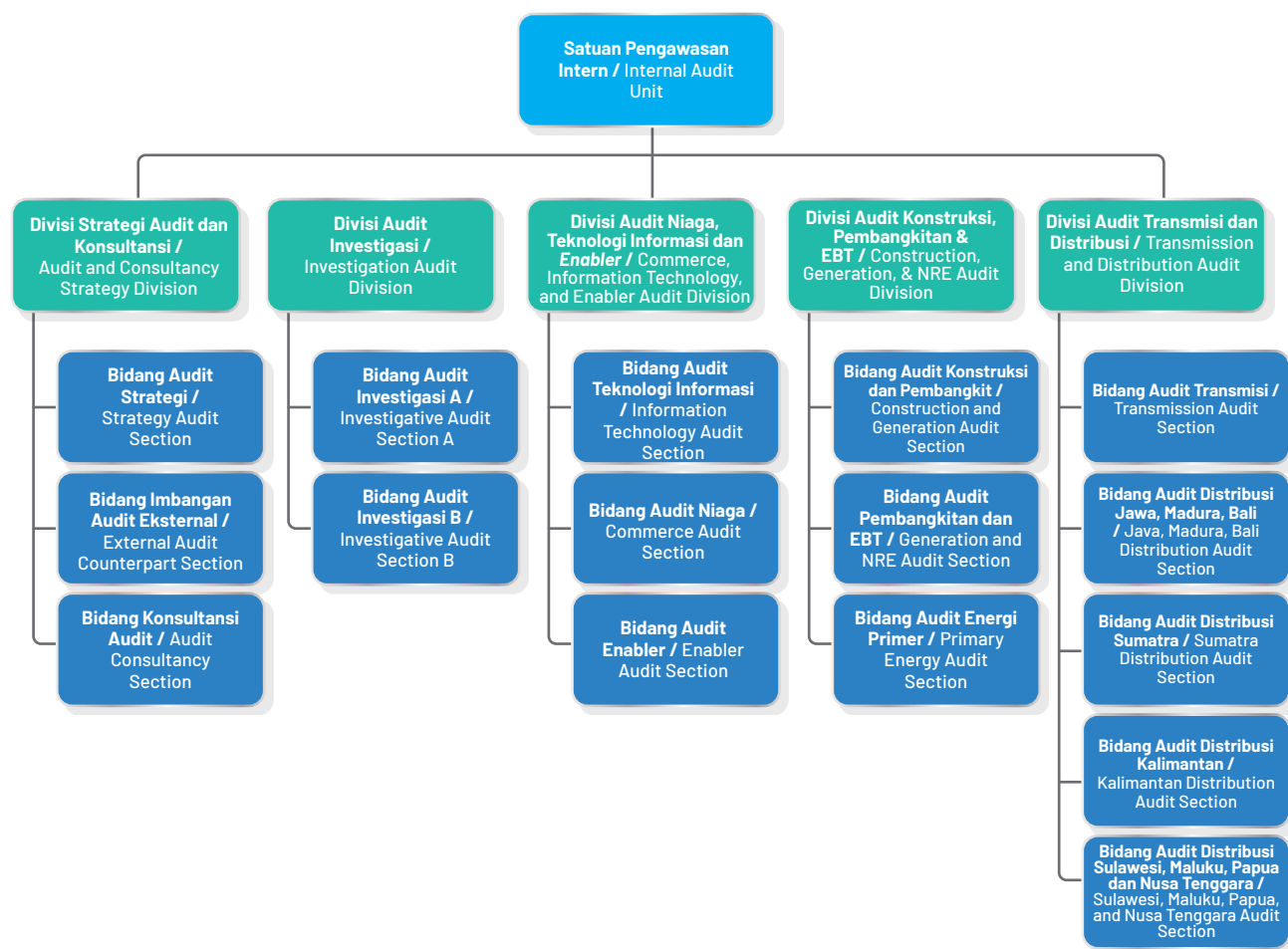
With the implementation of the restructuring, IA's role in SPI is not only *assurance* but also consulting, which is realized through the addition of a consulting function within the SPI organization. The Company strengthens the IT audit structure to manage risks related to the use of digitalization and information technology, which is carried out through the establishment of a *data analytic and continuous audit* function.

Sesuai Peraturan Direksi No.0304.P/DIR/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 0061.P/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Utama PT PLN (Persero), struktur SPI Perseroan adalah sebagai berikut:

In accordance with Regulation of the Board of Directors No.0304.P/DIR/2022 dated December 12, 2022 on Amendments to Regulation of the Board of Directors No. 0061.P/DIR/2022 on the Organization and Work Procedures of the Main Directorate of PT PLN (Persero), the Company's SPI structure is as follows:

Struktur Organisasi SPI

SPI Organizational Structure



Pada 31 Desember 2022, SPI Perseroan terdiri atas sejumlah 497 pegawai dengan perincian sebagai berikut:

As of December 31, 2022, the Company's SPI consisted of a total of 497 employees with the following details:

No	Pegawai SPI pada 31 Desember 2022 / SPI Employees as of December 31, 2022	Jumlah Pegawai / Total Employees
1	Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI) / Chief Audit Executive (CAE)	1
2	Executive Vice President (EVP)	5
3	Vice President (VP)	16
4	Manager Audit / Audit Manager	52
5	Auditor Fungsional / Functional Auditor	423
Total		497

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Perseroan menerapkan tugas dan tanggung jawab bagi SPI berdasarkan Piagam Pengawasan Intern. Piagam Pengawasan Intern ditetapkan oleh Direksi melalui persetujuan oleh Dewan Komisaris. Untuk tahun 2022, SPI bekerja dengan mengacu pada Piagam Pengawasan Intern tahun 2020. Secara mendasar, Piagam Pengawasan Intern memuat sejumlah ketentuan tanggung jawab, kewenangan, independensi dan pelaporan kegiatan yang berlaku bagi SPI.

Piagam Pengawasan Intern disusun dan diberlakukan sebagai pedoman yang menjelaskan mandat dan kewenangan SPI sekaligus sebagai pernyataan independensi, objektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan audit internal.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KSPI

KSPI memiliki tanggung jawab memastikan terlaksananya program audit internal berbasis risiko, dengan rincian tugas pokok antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan audit internal, kebijakan audit, standar audit, metodologi audit, sistem dan teknologi informasi audit Perusahaan, termasuk didalamnya meningkatkan kualitas audit Perusahaan;
2. Mengarahkan dan melaksanakan strategi dan kebijakan bidang tugas internal audit yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan perseroan yang telah ditetapkan;
3. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk audit dan administrasi dengan melakukan sertifikasi dan pengembangan lainnya secara efektif dan efisien;
4. Memastikan terjadinya pelaksanaan evaluasi kualitas audit dan pelaporan oleh jajaran Satuan Pengawasan Intern maupun pihak independen atas seluruh proses audit pada organisasi Satuan Pengawasan Intern sesuai kewenangan bidang tugasnya, untuk memperoleh gambaran atas kualitas hasil audit, sebagai masukan dalam penyempurnaan kebijakan dan prosedur audit, peningkatan sarana penunjang audit serta kualitas sumber daya manusia pada organisasi Satuan Pengawasan Intern sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan;

INTERNAL AUDIT CHARTER

The Company implements duties and responsibilities for SPI based on the Internal Audit Charter. The Internal Audit Charter is determined by the Board of Directors with approval by the Board of Commissioners. For 2022, SPI worked with reference to the 2020 Internal Audit Charter. Fundamentally, the Internal Audit Charter contains a number of provisions on responsibility, authority, independence, and activity reporting that apply to SPI.

The Internal Audit Charter was prepared and enforced as a guideline explaining the mandate and authority of the SPI as well as a statement of independence, objectivity, and professionalism in the implementation of internal audit activities.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CAE

In accordance with the Internal Audit Charter, KSPI has the responsibility to ensure the implementation of a risk-based internal audit program, with details of the main duties as follows:

1. Develop planning, implementation, and evaluation of internal audit management policies and strategies, audit policies, audit standards, audit methodologies, systems and information technology for company audits, including improve the quality of corporate audits;
2. Direct and implement strategies and policies in the field of internal audit tasks that are his/her responsibility by taking into account the established vision, strategy, and company policies;
3. Ensure the availability of facilities and infrastructure for auditing and administration by carrying out certification and other developments effectively and efficiently;
4. Ensure the implementation of reporting and audit quality evaluation by the ranks of the Internal Audit Unit and independent parties on the entire audit process in the Internal Audit Unit organization in accordance with the authority of its task area, to obtain an overview of the quality of audit results, as input in improving audit policies and procedures, improving audit support facilities and the quality of human resources in the organization of the Internal Audit Unit in accordance with applicable regulations and set targets;



5. Memastikan berjalannya dan ketersediaan jasa konsultasi oleh jajaran Satuan Pengawasan Intern atas seluruh proses audit pada organisasi Satuan Pengawasan Intern sesuai kewenangan bidang tugasnya;
 6. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan konsolidasi program audit internal, audit eksternal (BPK dan KAP) dan audit investigasi (investigasi/ *fraud*) yang berbasis risiko di seluruh Unit Perusahaan (Anak Perusahaan, pembangkit dan transmisi, distribusi dan niaga, keuangan, teknologi informasi, *human capital*, dan fungsi pendukung), termasuk di dalamnya memberikan rekomendasi hasil audit internal dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya;
 7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab internal audit kepada pihak internal dan eksternal sebagaimana yang diatur dalam peraturan internal dan peraturan perundangan;
 8. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan untuk menjamin terselenggaranya evaluasi dan peran aktif Internal Audit dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern, *risk management*, dan *governance process* secara berkesinambungan berkaitan dengan operasional perseroan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen
 9. Menilai penerapan manajemen risiko perseroan dengan mengkaji ulang penilaian risiko yang dihasilkan oleh Satuan Manajemen Risiko, membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta memberikan rekomendasi dan solusi peningkatan kualitas manajemen risiko;
 10. Melakukan evaluasi kecukupan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh *auditee* untuk menyakini sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko dan *governance process* telah dilaksanakan secara memadai; dan
 11. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di Divisi (*Division*)-nya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko, dan kepatuhan, termasuk menerapkan *check and balance* melalui *4 Eyes Principle* untuk proses bisnis yang bersifat kritikal dalam kerangka *3 Lines Model*.
5. Ensure the running and availability of consulting services by the ranks of the Internal Audit Unit for the entire audit process in the Internal Audit Unit organization according to the authority in their field of work;
 6. Ensure risk-based planning, implementation, evaluation and consolidation of internal audit programs, external audits (BPK and KAP) and investigative audits (investigation/fraud) in all Company Units (Subsidiaries, generation and transmission, distribution and trade, finance, information technology, human capital, and support functions), including providing recommendations on internal audit results and monitoring the follow-up of their completion;
 7. Report on the implementation of internal audit duties and responsibilities to internal and external parties as stipulated in internal regulations and laws and regulations;
 8. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in carrying out the oversight function to ensure the evaluation and active role of Internal Audit in continuously improving the effectiveness of the internal control system, risk management, and governance processes related to the Company's operations in achieving the targets set by management
 9. Assess the implementation of the Company's risk management by reviewing the risk assessment produced by the Risk Management Unit, assisting in identifying and evaluating risks, and providing recommendations and solutions to improve the quality of risk management;
 10. Evaluate the adequacy of the implementation of follow-up improvements that have been carried out by the auditee to ensure that the internal control system, risk management, and governance processes have been carried out adequately; and
 11. Ensure that the planning, implementation, and evaluation of all business processes in the Division is based on the principles of good corporate governance, risk management and compliance, including implementing checks and balances through the 4 Eyes Principle for critical business processes within the framework of the 3 Lines Model.

KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

CODE OF CONDUCT OF INTERNAL AUDIT



Integritas / Integrity	<p>Membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak auditor yang profesional, dengan: / Building trust as the basis of professional auditors, by:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pekerjaan audit internal dengan jujur, produktif, profesional dan bertanggung jawab. / Performing internal audit with honesty, productivity, professionalism, and responsibility. • Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku. / Complying with applicable internal laws and the Company's regulations. • Tidak ikut serta dalam kegiatan yang tidak legal atau melakukan kegiatan yang dilarang oleh profesi auditor. / Not participating in any unauthorized activity or conducting activities that are prohibited by the Auditor's profession. • Menghormati dan berkontribusi pada tujuan hukum dan etika yang ditetapkan PLN. / Respecting and contributing to the legal and ethical goals set by PLN.
Objektivitas / Objectivity	<p>Mempraktikkan perilaku objektif dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas/kegiatan yang sedang diaudit. Auditor internal membuat penilaian secara bebas (independen) dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau pendapat orang lain dalam memberikan pendapat profesionalnya, dengan: / Practicing objective behavior in collecting, evaluating, and communicating information about the audited activities. The internal auditor makes the judgment freely (independently) and is not affected by the personal interest or opinion of others in providing his/her professional opinion, by:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat memengaruhi penilaian auditor. / Not participating in activities that may affect the Auditor's judgment. • Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apa pun yang dapat memengaruhi pertimbangan profesionalnya. / Not accepting anything in any form that may affect his/her professional judgment. • Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaksanakan tugasnya dan jika tidak dilaporkan dapat merugikan Perusahaan. / Disclosing all the important facts in carrying out his/her duties, which, if not reported may cause harm to the Company.
Kerahasiaan / Confidentiality	<ul style="list-style-type: none"> • Bijaksana dalam menggunakan dan melindungi informasi yang didapat dalam melakukan pekerjaan; dan / Being wise in using and protecting information obtained in his/her work; and • Tidak menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan sendiri dengan cara yang tidak legal atau tidak sejalan dengan tujuan hukum dan etika di PLN. / Not using the information obtained in performing its duties for his/her own sake in a way that is not legal or inconsistent with the legal and ethical purposes of PLN.
Kompetensi / Competency	<p>Menggunakan ketrampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit. Hanya melakukan audit pada objek audit yang sesuai dengan ketrampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit, dengan: / Using the skills, knowledge, expertise, and experience owned in performing the audit. Auditing the audit object in accordance with the skills, knowledge, expertise, and experience owned in performing the audit, by:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan audit sesuai dengan Piagam dan Pedoman Audit Intern PLN yang sejalan dengan Standar Profesi Auditor Internal. / Performing audit in line with the PLN's Internal Audit Guidelines and Charter, in accordance with the Internal Auditor Profession Standard. • Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan untuk tujuan peningkatan kualitas dan efisiensi kerja. / Increasing competence through continuous professional education for the purpose of improving the quality and work efficiency.

PELAKSANAAN TUGAS SPI TAHUN 2022

Kegiatan audit yang dilakukan SPI selama tahun 2022 meliputi:

1. Audit operasional;
2. Audit investigasi dan *Whistleblowing System* (WBS);
3. Audit khusus dan penugasan lainnya dari Dewan Komisaris dan atau Direktur Utama;

IMPLEMENTATION OF SPI DUTIES IN 2022

Audit activities carried out by SPI in 2022 include:

1. Operational audit;
2. Whistleblowing System (WBS) and Investigative audit;
3. Special audits and other assignments from the Board of Commissioners and or President Director;



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan audit penghapusan ATTB, Uji Petik PRR dan pemeriksaan/verifikasi status <i>mothballed</i> dan <i>retired</i> unit Pembangkit pada beberapa unit; 5. Memberikan layanan konsultansi bagi manajemen; dan 6. Melaksanakan kegiatan <i>quality assurance</i> fungsi SPI yang terdiri dari <i>checklist on going review</i>, penilaian kualitas LHA dan penilaian mandiri (<i>self assessment</i>) kapabilitas SPI. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Carried out ATTB wirting-off audits, PRR Sample Tests and check/verify the status of mothballed and retired generator units in several units; 5. Provided consulting services for management; and 6. Carried out quality assurance activities for the SPI function which consist of an on-going checklist, quality assessment of LHA and self-assessment of SPI capabilities. |
|--|--|

Perseroan menerapkan metode audit berbasis risiko (*risk-based internal audit*). Untuk tahun 2022, SPI memiliki jumlah *audit universe* sebanyak 484 auditee yang terdiri dari 50 direktorat/satuan Kantor Pusat, 49 unit induk, 23 anak perusahaan (operasional dan TI) dan 362 unit pelaksana yang ditangani oleh 4 Divisi Audit yaitu Divisi Audit Niaga, Teknologi Informasi dan *Enabler*, Divisi Audit Konstruksi, Pembangkitan & EBT, Divisi Audit Transmisi dan Distribusi, dan Divisi Audit Investigasi. Jumlah *audit universe* menyesuaikan dengan organisasi Perseroan saat program audit dibuat. Sebagai perbandingan, *audit universe* dari tahun 2020 – 2022 sebagai berikut:

The Company implements a risk-based internal audit method. For 2022, SPI has a total audit universe of 484 auditees consisting of 50 directorates/Head Office units, 49 parent units, 23 subsidiaries (operational and IT) and 362 implementing units handled by 4 Audit Divisions, namely the Commerce Audit Division, Technology Information and *Enabler*, Construction Audit Division, Generation & NRE, Transmission and Distribution Audit Division, and Investigative Audit Division. Total audit universes adjusts to the Company's organization when the audit program was made. As a comparison, the audit universe from 2020 – 2022 is as follows:

No	Audit Universe	2020	2021	2022
1	Direktorat / Directorate	70	50	50
2	Unit Induk / Parent Unit	56	49	49
3	Unit Pelaksana / Executing Unit	381	362	362
4	Anak Perusahaan / Subsidiaries	19	19	23
Jumlah / Total		526	480	484

AUDIT OPERASIONAL TAHUN 2022

SPI melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan audit dan konsultansi tahun 2022 sebagai berikut:

1. Terdapat 228 audit operasional yang direncanakan pada PKPT 2022 dan terlaksana 100%;
2. Layanan Konsultansi terlaksana sebanyak 9 kali selama tahun 2022;
3. Terdapat 95 audit investigasi selama tahun 2022 dimana 93 penugasan telah selesai di tahun 2022 dan 2 lainnya masih berproses;
4. Terdapat 4 audit tematik yang dilaksanakan pada tahun 2022:
 - a. Tematik *Supply* MDU / MTU;
 - b. Tematik Peningkatan Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik;
 - c. Tematik *Anti Black Out* Luar Jawa Bali;
 - d. Tematik Utilisasi Pembangkit;
5. Terdapat 5 audit *ad hoc* yang dilaksanakan pada tahun 2022:

OPERATIONAL AUDIT IN 2022

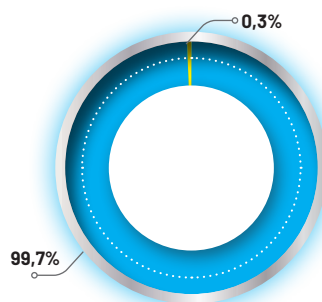
SPI SPI reported the realization of the implementation of audit and consulting activities in 2022 as follows:

1. There were 228 operational audits planned for the 2022 PKPT and implemented 100%;
2. Consultancy services were carried out 9 times throughout 2022;
3. There were 95 investigative audits throughout 2022 of which 93 assignments were completed in 2022 and 2 others are still in process;
4. There were 4 thematic audits carried out in 2022:
 - a. *Supply* MDU/MTU Thematic audit;
 - b. Increase in Electricity Sales Revenue Thematic audit;
 - c. *Anti-Black Out* Outside Java Bali Thematic audit;
 - d. Power Utilization Thematic audit;
5. There were 5 ad hoc audits carried out in 2022:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Pelaksanaan ICOFR Tahun 2022; b. Implementasi P3DN Pada Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022; c. Evaluasi Pelaksanaan Audit Sistem Pengendalian Intern Tahun 2022; d. Peranan SPI dalam Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Bergerak(ATTB); e. Pengelolaan batubara; <p>6. Terdapat 2 penugasan <i>fact findings</i> pada tahun 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Yantek Optimization</i>; b. <i>E-Procurement</i>; <p>7. Audit Subsidi Listrik TA 2022 dilakukan sesuai dengan Surat Tugas Nomor 104/SPI.01.04/F01000200/2022 tanggal 1 Desember 2022 dan dilaksanakan tanggal 12 Desember 2022 – 10 Februari 2023 dengan pendampingan dari BPK-RI.</p> <p>8. Kegiatan monitoring dan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah <i>Area Of Improvement</i> (AOI) sebanyak 1.261 AOI dan 3.751 Rekomendasi; b. Jumlah rekomendasi yang <i>due date</i> 31 Desember 2022 sebanyak 3.446 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 3.427(99,7%)rekomendasi; c. Sebanyak 9 rekomendasi sisa masih dalam tahap penyelesaian. | <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluation of ICOFR Implementation in 2022; b. Implementation of P3DN in Procurement of Goods/ Services in 2022; c. Evaluation of the 2022 Internal Control System Audit Implementation; d. The Role of SPI in Writing off Immovable Fixed Assets (ATTB); e. Coal management; <p>6. There were 2 assignments of fact findings in 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Technical Service Optimization; b. E-Procurement; <p>7. The 2022 Fiscal Year Electricity Subsidy Audit was carried out in accordance with Letter of Assignment No. 104/SPI.01.04/F01000200/2022 dated December 1, 2022 and was carried out December 12, 2022 – February 10, 2023 with assistance from BPK-RI.</p> <p>8. Monitoring activities on follow-up on recommendations from operational audit results:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Total Area Of Improvement (AOI) of 1,261 AOI and 3,751 Recommendations; b. Total recommendations due on December 31, 2022 was 3,446 recommendations and 3,427 (99.7%) recommendations have been followed up; c. The remaining 9 recommendations are still in the finalization stage. |
|--|---|

Status Tindak Lanjut Rekomendasi SPI

Status of Follow-up on SPI Recommendation



● Selesai /
Finished

● Belum Selesai /
Not Yet Finished

Pelaporan Kegiatan SPI pada Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi SPI kepada manajemen, KSPI melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris (Komite Audit), yang membahas terkait hasil pelaksanaan audit internal, audit eksternal, penugasan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang berkembang di PLN yang perlu mendapat perhatian bersama.

SPI Activity Reporting to the Board of Commissioners

To improve the role and function of SPI to management, KSPI coordinates with the Board of Commissioners (Audit Committee), which discusses the results of the implementation of internal audits, external audits, assignments, as well as matters relating to issues that are currently developing at PLN that are need to pay attention.



Pelaksanaan Rapat Koordinasi

Implementation of Coordination Meeting

No.	Tanggal Pelaksanaan / Date	Agenda Pembahasan / Discussion Agenda
1	Januari 2022 / January 2022	Laporan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi BPK, Laporan Pelaksanaan PKPT dan Monitoring Tindak Lanjut Atas Hasil Audit SPI, Audit Investigasi, Audit Tematik TS P2TL dan Significant Findings SPI PT PLN (Persero) 2021. / Follow-up Reports on BPK Recommendations, PKPT Implementation Reports and Follow-up Monitoring on SPI Audit Results, Investigative Audits, TS P2TL Thematic Audits and Significant Findings of SPI of PT PLN (Persero) 2021.
2	15 Maret 2022 / March 15, 2022	Laporan Pelaksanaan PKPT dan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Hasil Audit SPI, BPK, KAP dan BPKP, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan dalam Pengelolaan Stimulus Tarif Tenaga Listrik dan Program Kerja Pengembangan Auditor. / PKPT Implementation Report and Monitoring Follow-up Recommendations on SPI, BPK, KAP and BPKP Audit Results, Reports on Compliance Audit Results in the Management of Electricity Tariff Stimulus and Auditor Development Work Programs.
3	31 Mei 2022 / May 31, 2022	Laporan Pelaksanaan PKPT dan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Hasil Audit SPI, BPK, KAP dan BPKP, Audit Investigasi dan Laporan Significant Findings SPI PLN. / PKPT Implementation Report and Monitoring Follow-up Recommendations on SPI, BPK, KAP and BPKP Audit Results, Investigative Audits and PLN SPI Significant Findings Reports.
4	9 Agustus 2022 / August 9, 2022	Laporan Pelaksanaan PKPT dan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Hasil Audit SPI, BPK, KAP dan BPKP dan Laporan Significant Findings SPI PLN. / PKPT Implementation Report and Monitoring Follow-up Recommendations on SPI, BPK, KAP and BPKP Audit Results and PLN SPI Significant Findings Report.
5	11 Oktober 2022 / October 11, 2022	Laporan Pelaksanaan PKPT dan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Hasil Audit SPI, BPK, KAP dan BPKP dan Laporan Significant Findings SPI PLN. / PKPT Implementation Report and Monitoring Follow-up Recommendations on SPI, BPK, KAP and BPKP Audit Results and PLN SPI Significant Findings Report.
6	8 Desember 2022 / December 8, 2022	Permohonan Persetujuan Kebijakan Strategis Audit Internal, Laporan Pelaksanaan PKPT dan Tindak Lanjut Atas Hasil Audit SPI BPK RI, BPKP, dan KAP s.d November 2022 dan Temuan – Temuan Signifikan Atas Hasil Audit SPI (Oktober–November 2022). / Request for Approval of Internal Audit Strategic Policy, PKPT Implementation Report and Follow-Up on BPK RI, BPKP, and KAP SPI Audit Results until November 2022 and Significant Findings on SPI Audit Results (October–November 2022).

AKUNTAN PUBLIK

Pemegang Saham melalui RUPS menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2022, berdasarkan Risalah RUPS PT PLN (Persero) tanggal No. 0223.K/DIR/2022 Tanggal 27 Juni 2022.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

PUBLIC ACCOUNTANT

Shareholders through the GMS determined the appointment of Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements and the implementation of the Micro and Small Business Funding Program (UMK) for the 2022 Fiscal Year, based on Minutes of GMS of PT PLN (Persero) No.0223.K/DIR/2022 dated June 27, 2022.

Further explanation is as follows:

Informasi Akuntan Publik Tahun 2022**Information on Public Accountants**

Nama / Name	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
Alamat / Address	Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Objek Audit / Audit Object	PT PLN (Persero) PT Indonesia Power dan Entitas Anak / PT Indonesia Power and Its Subsidiaries PT Haleyora Power dan Entitas Anak / PT Haleyora Power and Its Subsidiaries PT PLN Gas dan Geothermal PT PLN Nusantara Power (dahulu bernama PT Pembangkitan Jawa Bali) dan Entitas Anak / PT PLN Nusantara Power (formerly known as PT Pembangkitan Jawa Bali) and Its Subsidiaries PT PLN Batam dan Entitas Anak / PT PLN Batam and Its Subsidiaries PT Pelayaran Bahtera Adhiguna PT PLN Energi Primer Indonesia (dahulu bernama PT PLN Batubara) / PT Energi Primer Indonesia (formerly known as PT PLN Batubara) PT PLN Tarakan dan Entitas Anak / PT PLN Tarakan and Its Subsidiaries PT Indonesia Comnets Plus PT PLN Enjiniring dan Entitas Anak / PT PLN Enjiniring and Its Subsidiaries PT Energy Management Indonesia PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara Dana Pensiun PT PLN (Persero)
Biaya Audit / Audit Fee	Rp37,46 miliar / Rp37.46 billion
Periode Penugasan / Assignment Period	Tahun 2022 / 2022 Fiscal Year

Dengan demikian, informasi KAP yang ditunjuk untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan pada 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel berikut:

Thus, the information on KAP appointed to audit the Company's Financial Statements in the last 5 (five) years can be seen in the following table:

Informasi Kantor Akuntan Publik 2018-2022**Information on Public Accountant in 2018-2022**

Tahun / Year	Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	Nama Akuntan / Accountant's Name	Perincian Jasa KAP / KAP Service Detail	Biaya Jasa Audit (Rp Miliar) / Audit Fee (Rp Billion)
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)	Yanto	Audit Laporan Keuangan PLN dan entitas anak; Laporan Keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) / Audit of the Financial Statements of PLN and its subsidiaries; Financial Statements and the implementation of the Micro and Small Business Funding Program (UMK)	37,46
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)	Yanto	Audit Laporan Keuangan PLN dan entitas anak; Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / Audit of the Financial Statements of PLN and its subsidiaries; Partnership and Community Development Program Report	35,05
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)	Yanto	Audit Laporan Keuangan PLN dan entitas anak; Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / Audit of the Financial Statements of PLN and its subsidiaries; Partnership and Community Development Program Report	27,5
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ)	Dedy Sukrisnadi	Audit Laporan Keuangan PLN dan entitas anak; Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / Audit of the Financial Statements of PLN and its subsidiaries; Partnership and Community Development Program Report	14,85
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ)	Saptoto Agustomo	Audit Laporan Keuangan PLN dan entitas anak; Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / Audit of the Financial Statements of PLN and its subsidiaries; Partnership and Community Development Program Report	15,30

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal merupakan sistem internal dari setiap unit kerja atau unit organisasi perusahaan untuk memastikan setiap pengambilan keputusan hingga pelaksanaan transaksi dilakukan melalui mekanisme benar, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas pemahaman tersebut, Perseroan menerapkan Sistem Pengendalian Internal dengan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, anggota manajemen lainnya, serta seluruh personel PLN. Secara mendasar, Sistem Pengendalian Internal Perseroan diterapkan sebagai upaya dalam memperoleh keyakinan yang memadai atas tercapainya operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sesuai peran SPI sebagai lini ketiga (*3rd line*) dalam model tiga lini tata kelola perusahaan, SPI berperan untuk memberikan penjaminan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif atas efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan melalui penugasan audit dan konsultasi tahun 2022 antara lain audit SPIn dan audit ICOFR.

Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal

Kerangka kerja Sistem Pengendalian Internal adalah terdiri atas 5 (lima) hal berikut:



KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA YANG DIAKUI INTERNASIONAL (COSO)

Perseroan menerapkan Sistem Pengendalian Internal sesuai standar yang dikeluarkan *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO). Sesuai standar COSO, Sistem Pengendalian Internal Perseroan merupakan proses yang dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi, sebagai berikut:

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The internal control system is an internal system of each work unit or organizational unit to ensure that every decision-making related to transactions is made correctly, fairly, and accountably.

Based on this understanding, the Company implements an Internal Control System involving the Board of Commissioners, Board of Directors, other management members, and all PLN personnel. Fundamentally, the Company's Internal Control System is implemented as an effort to obtain adequate assurance for the achievement of effective and efficient operations, reliable financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations.

In accordance with the role of SPI as the third line (*3rd line*) in the three-line model of corporate governance, SPI has a role to provide assurance and consultancy that is independent and objective on the effectiveness of the implementation of the Company's internal control system through audit and consulting assignments in 2022, including SPIn and ICOFR audits.

Internal Control System Framework

The Internal Control System framework consists of the following 5 (five) things:

CONFORMITY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM TO INTERNATIONALLY RECOGNIZED FRAMEWORK (COSO)

The Company implements an Internal Control System according to standards issued by the *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO). In accordance with the COSO standards, the Company's Internal Control System is a process designed to provide adequate assurance in order to achieve organizational goals, as follows:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi;
2. Pelaporan keuangan yang andal; dan
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan.

Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan kerangka COSO bertujuan agar perseroan mampu mencapai sasaran yang selaras dengan visi dan misi perseroan, memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Salah satu upaya pemenuhan kesesuaian standar ini pada proses pelaporan keuangan adalah melalui penerapan sistem *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR).

Sampai dengan tahun 2022, penerapan ICoFR telah memberikan manfaat bagi terjaganya keandalan pelaporan keuangan Perseroan, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Effective and efficient operations;
2. Reliable financial reporting; and
3. Compliance with applicable laws and regulations.

The conformity of the internal control system with the COSO framework aims to enable the Company to achieve targets that are aligned with the Company's vision and mission, ensure effectiveness and efficiency in the use of resources and compliance with applicable regulations.

One of the efforts to comply with this standard in the financial reporting process is through the implementation of the Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) system.

As of 2022, the implementation of ICoFR has provided benefits for maintaining the reliability of the Company's financial reporting, with the following description:



EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2022

Secara periodik, Perseroan melakukan evaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal melalui audit Sistem Pengendalian Intern (SPI) oleh Satuan Pengawasan Intern. Hasil evaluasi tersebut merupakan dasar bagi upaya perbaikan dan penyempurnaan sistem serta kebijakan pengendalian internal, yang diharapkan mampu menjaga manajemen untuk menerapkan kegiatan operasional secara efektif.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN 2022

The Company periodically evaluates the effectiveness of the Internal Control System through an audit of the Internal Control System (SPI) by the Internal Audit Unit. The evaluation results are the basis for improvement and refinement of the system and internal control policies, which are expected to be able to keep management in implementing operational activities effectively.



Untuk tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan audit SPIn terhadap 43 unit induk dan 6 unit kantor pusat, dengan level pemenuhan komponen pengendalian internal sebagai berikut:

For 2022, the Company has carried out SPIn audits of 43 main units and 6 head office units, with the level of fulfilment of internal control components as follows:

Hasil Evaluasi Pengendalian Internal Tahun 2022

Results of Internal Control Evaluation in 2022

No	Komponen Penilaian SPIn / SPIn Evaluation Component	Implementasi (%) / Implementation (%)
1	Lingkungan Pengendalian / Control Environment	87%
2	Penilaian Risiko / Risk Assessment	89%
3	Aktivitas Pengendalian / Control Activities	84%
4	Informasi Komunikasi / Information and Communication	89%
5	Aktivitas <i>Monitoring</i> / Monitoring Activity	87%

Terhadap efektivitas pelaksanaan ICoFR, telah dilakukan audit untuk level transaksional dimana berdasarkan audit yang dilakukan, tidak terdapat hal-hal yang membuat yakin bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan (ICoFR) tidak efektif. Adapun kelemahan minor yang perlu mendapat perhatian manajemen untuk tindak lanjut perbaikan kedepan terus dilakukan monitoringnya secara memadai.

Regarding the effectiveness of ICoFR implementation, an audit has been carried out at the transactional level where based on the conducted audit, there were no matters that assure that the internal control over financial reporting (ICoFR) is not effective. As for the minor weaknesses, the management will address them by management for follow-up for future improvements, while continue to monitor them adequately.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL

Dalam *Board Manual*, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dimana dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk melakukan telaah terhadap sistem pengendalian internal yang digunakan Perseroan.

In the Board Manual, the Board of Commissioners has the duty and responsibility to ensure the effectiveness of the internal control system where in carrying out this responsibility, the Board of Commissioners assigns the Audit Committee to conduct a review of the internal control system used by the Company.

Direksi berkewajiban menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian internal yang efektif untuk menjamin keyakinan yang memadai atas keandalan Laporan Keuangan, pengamanan terhadap aset, tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, dan mendorong dipatuhinya kebijakan dan peraturan Perseroan.

The Board of Directors is obliged to establish a policy regarding an effective internal control system to ensure reasonable assurance in the reliability of Financial Statements, safeguard assets, achieve operational efficiency and effectiveness, and encourage compliance with Company policies and regulations.

Satuan Pengawasan Intern telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal terhadap pelaksanaan operasional secara berkelanjutan dalam rangka pencapaian sasaran yang selaras dengan visi dan misi perseroan dan kepatuhannya terhadap ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku antara lain melalui kegiatan audit dan konsultasi terhadap unit maupun program/aktivitas.

The Internal Audit Unit has evaluated the effectiveness of the internal control system for operational implementation on an ongoing basis to achieve targets that are aligned with the vision and mission of the Company and its compliance with applicable laws and regulations, including through auditing and consulting activities on units and programs/activities.

Hasil evaluasi yang dilakukan telah dikomunikasikan kepada Direksi dan unit terkait untuk ditindak lanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Upaya perbaikan secara konsisten dimonitor untuk memastikan sistem pengendalian intern berjalan secara efektif. Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah berperan aktif dalam melakukan evaluasi melalui penelaahan hasil evaluasi Satuan Pengawasan Intern.

MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko adalah bagian dari tata kelola dan kepemimpinan, serta merupakan dasar pengelolaan organisasi pada semua tingkat dan berkontribusi pada peningkatan sistem manajemen. PLN merancang infrastruktur manajemen risiko baik dari segi organ, kebijakan dan teknologi untuk mendorong efektivitas pengelolaan risiko dalam rangka menjaga keberlanjutan bisnis Perusahaan. Perusahaan menerapkan manajemen risiko berdasarkan mekanisme *Four Eyes Principle* (4EP) yang dijalankan secara melekat dalam manajemen risiko terintegrasi yang diterapkan dalam Model 3 Lini (*3 Lines Model*) dimana masing-masing pihak melaksanakan proses bisnis manajemen risiko terintegrasi sekaligus mekanisme 4EP.

Perusahaan telah menetapkan Satuan Manajemen Risiko sebagai unit yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan risiko PLN. Satuan Manajemen Risiko membawahi Divisi Infrastruktur, Jaminan Kualitas dan Pelaporan Manajemen Risiko; Divisi Manajemen Risiko Konstruksi, Pembangkitan dan EBT; Divisi Manajemen Risiko Transmisi dan Distribusi dan Divisi Manajemen Risiko Strategis, Keuangan dan *Human Capital*. Melalui Satuan Manajemen Risiko, PLN secara berkala melakukan pemantauan dan peninjauan seluruh risiko utama yang tergambar dalam profil risiko korporat sesuai dengan selera risiko dan melakukan analisis mendalam untuk menyusun profil risiko berdasarkan sasaran tahunan dan sasaran strategis jangka panjang Perusahaan. Profil risiko dikaji secara komprehensif oleh Direksi sebagai pemilik risiko utama dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris.

Results of the evaluation have been communicated to the Board of Directors and related units to be followed up and monitored for implementation. Improvement efforts are consistently monitored to ensure the internal control system is running effectively. The Board of Commissioners through the Audit Committee has played an active role in conducting evaluations through reviewing the evaluation results of the Internal Audit Unit.

RISK MANAGEMENT

Risk management is part of governance and leadership, and is the basis for managing the organization at all levels and contributes to the improvement of the management system. PLN designed a risk management infrastructure in terms of organs, policies and technology to encourage the effectiveness of risk management to maintain the sustainability of the Company's business. The Company implements risk management based on the Four Eyes Principle (4EP) mechanism which is embedded in integrated risk management implemented in the 3 Lines Model where each party carries out integrated risk management business processes as well as the 4EP mechanism.

The Company has established Risk Management Unit as the unit tasked with coordinating PLN's risk management. The Risk Management Unit oversees the Infrastructure, Quality Assurance and Risk Management Reporting Division; Construction, Generation and NRE Risk Management Division; Transmission and Distribution Risk Management Division, and Strategic Risk Management, Finance and Human Capital Division. Through the Risk Management Unit, PLN regularly monitors and reviews all the main risks that are reflected in the corporate risk profile according to risk appetite and conducts in-depth analysis to develop risk profiles based on the Company's annual goals and long-term strategic goals. The risk profile is reviewed comprehensively by the Board of Directors as the main risk owner and communicated to the Board of Commissioners.

**PROFIL KEPALA SATUAN MANAJEMEN RISIKO****PROFILE OF HEAD OF RISK MANAGEMENT UNIT****GONG MATUA HASIBUAN****Kepala Satuan Manajemen Risiko**
Head of Risk Management Unit

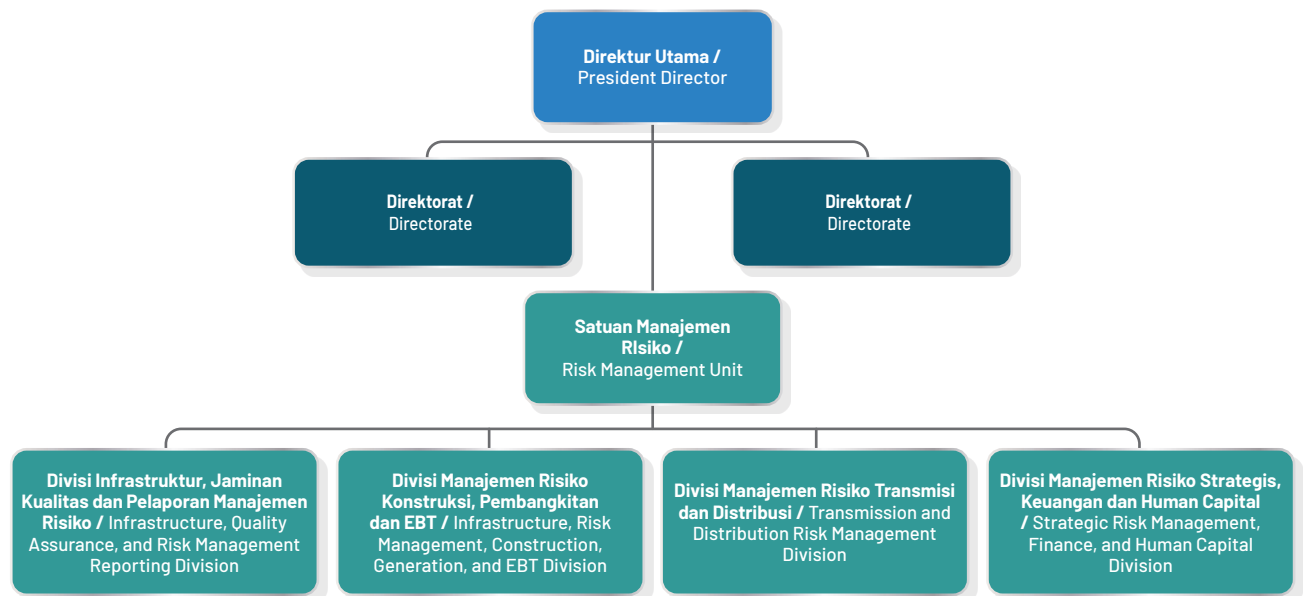
Usia / Age	55 Tahun / 55 years old
Domisili / Domicile	Jakarta
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
Riwayat Pendidikan / Education	<ul style="list-style-type: none"> • S2 dari FEB Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia / Master's Degree from FEB Financial Management, Universitas Indonesia • S1 dari STIE Nusa Bangsa Medan / Bachelor's Degree from STIE Nusa Bangsa Medan
Sertifikasi Profesi / Professional Certificate	<ul style="list-style-type: none"> • Certified In Risk Governance Professional (CRGP) • Ahli Pembangun Integritas (Certified Integrity Officer)
Pengalaman Kerja / Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • 2022-Sekarang / 2022-present: Kepala Satuan Manajemen Risiko PT PLN (Persero) / Head of Risk Management Unit of PT PLN (Persero) • 2021-2022 : Direktur Utama PT PJB / President Director of PT PJB • 2019-2021 : SEVP Pengelola Aset PT PLN (Persero) / SEVP Asset Management of PT PLN (Persero) • 2017-2019 : EVP Portfolio Management PT PLN (Persero) / EVP Portfolio Management of PT PLN (Persero) • 2012-2017 : Kepala Divisi Anggaran PT PLN (Persero) / Head of Budget Division of PT PLN (Persero) • 2011-2012 : Kepala Divisi Keuangan Korporat PT PLN (Persero) / Head of Corporate Financial Division of PT PLN (Persero)
Jabatan Rangkap / Concurrent Position	Tidak ada / None
Pendidikan dan/atau Pelatihan yang Diikuti di Tahun 2022 / Education and/or Training in 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Masterclass GRC Foundation (Kementerian BUMN) • Awareness Competency BUMN for Future Leader • Business Excellence & Performance Management for Executives • Workshop Developing Professional Qualification for Executives • Workshop Stakeholder Management & Communication for Executives (IGICO) • Workshop Academy Meeting Finance dan Corporate Planning Level Advance

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGAN MANAJEMEN RISIKO

Kedudukan organ Satuan Manajemen Risiko secara struktural berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0054.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

POSITION AND STRUCTURE OF RISK MANAGEMENT ORGANS

Structurally, the position of the Risk Management Unit is based on Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Directors No. 0054.P/DIR/2022 on the Organization and Working Procedures of PT PLN (Persero).



KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

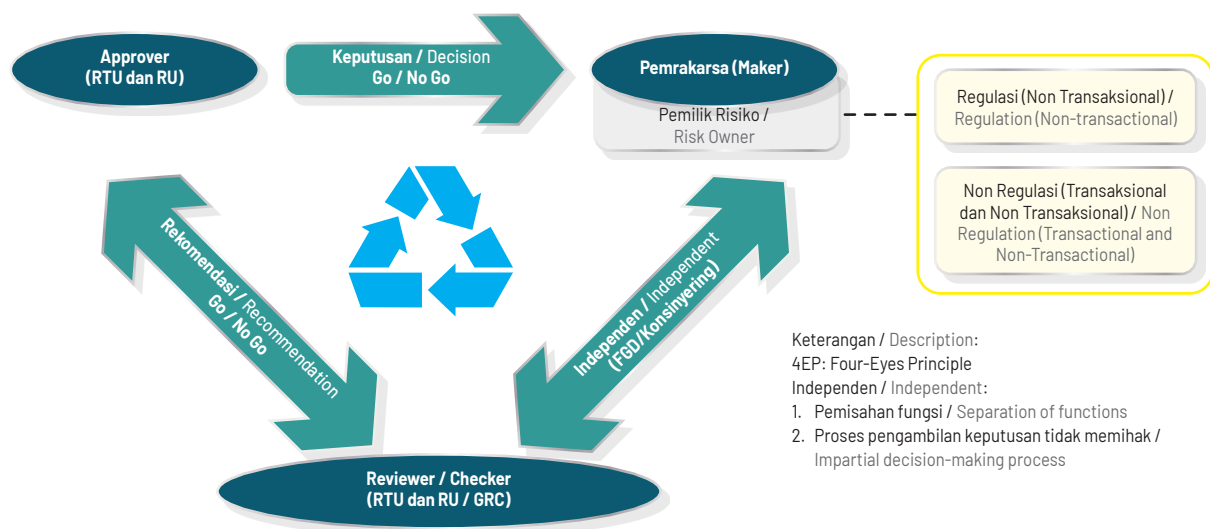
Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan melalui *Statement of Corporate Intent* Manajemen Risiko Terintegrasi Nomor 0070.P/DIR/2021 sebagai *core policy* yang berisikan Tata Nilai Risiko dan Strategi & Mekanisme Manajemen Risiko Terintegrasi. Pengaturan tentang implementasi 4EP yang dijalankan dalam manajemen risiko terintegrasi PT PLN (Persero) ditetapkan melalui Peraturan Direksi Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi Nomor 0071.P/DIR/2021. Peraturan Direksi tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam pengelolaan risiko dan menjadi pedoman umum manajemen risiko sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan risiko PLN. Kebijakan Manajemen Risiko ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan kebijakan, standar praktik terbaik serta skala organisasi dan bisnis yang dijalankan PLN dengan mengadopsi standar ISO 31000 *Risk Management - Guidelines*.

RISK MANAGEMENT POLICY

The Risk Management Policy is stipulated through the Integrated Risk Management Statement of Corporate Intent No. 0070.P/DIR/2021 as the core policy which contains the Risk Values and Integrated Risk Management Strategy & Mechanism. Arrangements regarding the implementation of the 4EP that are carried out in the integrated risk management of PT PLN (Persero) are stipulated by virtue of the Board of Directors Regulation on General Guidelines for Integrated Risk Management No. 0071.P/DIR/2021. The Board of Directors Regulation contains provisions required for risk management and serves as a general guideline for risk management as a reference in the implementation of PLN's risk management. The Risk Management Policy is reviewed periodically in accordance with the policies, best practice standards and organizational and business scale implemented by PLN by adopting the ISO 31000 Risk Management - Guidelines standard.

Pengambilan Keputusan dan Kegiatan 4EP

Decision Making and Activities of 4EP



SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko terintegrasi PLN dijalankan berdasarkan suatu kerangka kerja manajemen risiko yang bersifat dinamis, terstruktur, terintegrasi dan perbaikan berkesinambungan yang mencerminkan siklus *Plan, Do, Check, Act* (PDCA) yang dibangun untuk mengintegrasikan 4EP dengan praktik pengelolaan risiko yang melekat pada rangkaian proses bisnis dan manajerial yang dijalankan di seluruh lingkungan dan tingkatan PLN secara relevan dengan tetap memperhatikan keselarasan dan kesesuaiannya dengan tata kelola perusahaan yang baik yang diterapkan oleh PLN, termasuk didalamnya pengambilan keputusan dalam pengelolaan risiko yang diselaraskan dengan mekanisme *delegation of authority* yang berlaku bagi jajaran manajemen PLN sehingga PLN mampu menerapkan manajemen risiko secara efektif.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

The implementation of PLN's integrated risk management is carried out based on a risk management framework that is dynamic, structured, integrated, and continuous improvement that reflects the Plan, Do, Check, Act (PDCA) cycle which was built to integrate 4EP with risk management practices embedded in a series of business processes and managerial activities carried out in all relevant PLN environments and levels while still paying attention to alignment and conformity with good corporate governance implemented by PLN, including decision-making in risk management that is aligned with the delegation of authority mechanism that applies to PLN management, therefore PLN is able to implement risk management effectively.



Dalam pelaksanaan praktik pengelolaan risiko, PLN melaksanakan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko di tiap proses manajemen risiko yang berlangsung dengan didukung oleh mekanisme 4EP dalam prosesnya. Proses manajemen risiko dilakukan oleh Pemilik Risiko yang dibantu oleh *Risk Officer* masing-masing Unit Kerja yang difasilitasi oleh Satuan Manajemen Risiko. Pengelolaan risiko aset dilakukan selaras dengan sistem manajemen ISO 55000.

In implementing risk management practices, PLN carries out a risk assessment which consists of identifying, analyzing, and evaluating risks in each ongoing risk management process supported by the 4EP mechanism in the process. The risk management process is carried out by the Risk Owner who is assisted by the Risk Officer of each Work Unit which is facilitated by the Risk Management Unit. Asset risk management is carried out in line with the ISO 55000 management system.

SASARAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Perseroan menerapkan program budaya Manajemen Risiko yang secara mendasar diarahkan guna menuju *Maturity 4.0 (managed)* pada tahun 2024. Untuk memudahkan implementasi dan sosialisasi rencana jangka panjang ini, ditetapkan tema setiap tahun yang dapat digunakan dalam sosialisasi dan promosi Sasaran, Strategi dan Program Manajemen Risiko setiap tahun sebagai berikut:

TARGET OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

The Company implements a Risk Management culture program which is fundamentally directed towards *Maturity 4.0 (managed)* in 2024. To facilitate the implementation and dissemination of this long-term plan, a theme is set every year which can be used in the dissemination and promotion of Risk Management Targets, Strategies and Programs each year as follows:

	Komitmen / Commitment	Keterpaduan / Integrated	Konsistensi / Consistency	Keunggulan / Excellence	Keberlanjutan / Sustainability
	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran / Target	Tersedianya komitmen manajemen untuk mendukung program-program manajemen risiko sesuai roadmap / Availability of management commitment to supporting risk management programs according to the roadmap	Terbangunnya kapasitas internal untuk melaksanakan program-program integrasi manajemen risiko / Building internal capacity to carry out integrated risk management programs	Terwujudnya integrasi manajemen risiko di seluruh organisasi sebagai stepping-stone menuju kinerja berbasis manajemen risiko / Realization of risk management integration throughout the organization as a stepping-stone towards performance-based risk management	Tersedianya sistem informasi manajemen risiko yang andal guna mendukung kinerja manajemen risiko / Availability of a reliable risk management information system to support risk management performance	Tercapainya kapabilitas manajemen risiko untuk pengembangan ketahanan dan risiko keberlanjutan organisasi / Achievement of risk management capabilities for the development of organizational resilience and risk sustainability
Strategi / Strategy	<ul style="list-style-type: none"> Membangun komitmen Manajemen PLN Penguatan struktur organisasi manajemen risiko Building PLN Management commitment Strengthening the risk management organizational structure 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun sinergi manajemen risiko di seluruh organisasi PLN Penguatan proses pengambilan keputusan Building risk management synergy across the PLN organization Strengthening decision-making processes 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja manajemen risiko Meningkatkan dan meratakan keahlian manajemen risiko Improving risk management performance Improving and leveling risk management expertise 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem informasi manajemen risiko Peningkatan budaya manajemen risiko Mempertahankan keunggulan organisasi Strengthening the risk management information system Improvement of risk management culture Maintaining organizational excellence 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Budaya Risiko Penguatan ketahanan dan keberlanjutan perusahaan Strengthening Risk Culture Strengthening corporate resilience and sustainability

Berdasarkan tema strategis untuk mencapai target maturitas *Managed*, disusun 5 (lima) kelompok program besar yaitu dimulai dengan Kebijakan, yang diikuti pelaksanaan *Capacity Building* untuk mengintegrasikan kebijakan. Kemudian Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk memperkuat pelaksanaan Kebijakan, yang selanjutnya

Based on the strategic theme of achieving the *Managed* maturity target, 5 (five) major program groups were prepared, starting with the Policy, followed by the implementation of *Capacity Building* to integrate the policies. Then Development of a Risk Management Information System to strengthen Policy implementation, which is then assessed as a form of



dilakukan asesmen sebagai bentuk evaluasi kebijakan dan pelaksanaannya. Untuk mendukung seluruh proses tersebut, kelengkapan dokumentasi dibangun dan dibuat untuk mendukung perbaikan berkelanjutan.

RISIKO UTAMA PERUSAHAAN DAN PENANGANANNYA

PLN membentuk Satuan Manajemen Risiko untuk membantu manajemen Perseroan dalam mengidentifikasi risiko strategis yang terkait dengan proses bisnis. Berikut beberapa risiko utama yang mempengaruhi kegiatan bisnis PLN:

1. Strategis

- Perusahaan menghadapi risiko ketidakselarasan regulasi dengan kondisi bisnis PLN. Tindakan mitigasi untuk risiko ini yaitu dengan melakukan *Regulatory Impact Analysis*.
- Perusahaan juga menghadapi risiko kontribusi anak perusahaan tidak optimal yang dimitigasi dengan cara melakukan pengembangan pedoman-pedoman terkait pengelolaan portofolio PLN Group sesuai dengan *clustering subsidiary*.
- Terkait dengan risiko sistem IT yang kurang *reliable* untuk mendukung *operasional excellence*, kami berupaya mengendalikannya dengan cara menerapkan ISO 27001 Standarisasi Keamanan Manajemen Informasi serta melaksanakan pengadaan penyempurnaan ERP untuk *improvement proses, data, integrasi dan people (SSoT)*.
- Risiko strategi penjualan produk *Beyond kWh* tidak optimal dimitigasi dengan cara mengoptimalkan fitur dan fungsi PLN Mobile.
- Untuk risiko realisasi pencapaian TKDN belum memenuhi Peraturan Pemerintah/Regulasi yang berlaku dimitigasi dengan cara menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi market *research/market sounding/market survey* untuk menunjang proses pengadaan strategis,
- Untuk risiko *market share* bisnis PLN tertekan oleh kompetitor dimitigasi dengan cara mendorong Charge.IN untuk SPKLU PLN dan Non PLN, serta MoU dengan ATPM (agen tunggal pembeli merk) mobil listrik.

2. Finansial

- Terhadap risiko pendapatan penjualan listrik tidak sesuai target, Perusahaan memitigasinya dengan cara menyelesaikan proyek infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan prioritas, serta melakukan strategi pemasaran untuk ekstensifikasi dan intensifikasi.

policy evaluation and implementation. To support the entire process, complete documentation is built and made to support continuous improvement.

THE MAIN RISKS OF THE COMPANY AND THEIR MANAGEMENT

PLN established a Risk Management Unit to assist the Company's management in identifying strategic risks related to business processes. The following are some of the main risks that affect PLN's business activities:

1. Strategic

- The Company faces the risk of regulatory misalignment with PLN's business conditions. The mitigation measure for this risk is by conducting a *Regulatory Impact Analysis*.
- The Company also faces the risk of non-optimal contribution of its subsidiaries which is mitigated by developing guidelines related to the management of the PLN Group's portfolio in accordance with *clustering subsidiaries*.
- Related to the risk of an IT system that is less reliable to support operational excellence, we are striving to control it by implementing ISO 27001 Information Management Security Standardization and carrying out procurement of ERP enhancements for process, data, integration and people (SSoT) improvements.
- The risk of the sales strategy for the *Beyond kWh* product not being optimal is mitigated by optimizing the features and functions of PLN Mobile.
- For the risk of realization of TKDN achievement not complying with Government Regulations/Regulations in effect, it is mitigated by preparing plans, implementing and evaluating market research/market sounding/market surveys to support the strategic procurement process,
- The risk of the PLN business market share being pressured by competitors is mitigated by pushing Charge.IN for SPKLU PLN and Non-PLN, as well as an MoU with ATPM (single agent for brand buyers) of electric cars.

2. Financial

- Regarding the risk of electricity sales revenue not meeting the target, the Company mitigates this by completing electricity infrastructure projects according to priorities, as well as implementing marketing strategies for extensification and intensification.

- Untuk risiko gagal bayar kepada Mitra PLN karena keterbatasan likuiditas dimitigasi dengan cara mengoptimalkan program pemasaran aktif, mendorong terciptanya *demand* / model bisnis baru, menggali potensi penerimaan lain dengan sinergi PLN Grup serta pengoptimalan program efisiensi biaya secara berkesinambungan (antara lain melalui *Cash War Room/Centralized Planning* dan *Spending Control Tower*).
- Terhadap risiko adanya tuntutan terhadap PLN atas kelebihan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu dengan cara menyusun kajian transisi energi untuk mencapai *Carbon Neutral 2060*.

3. Operasional

- Untuk risiko operasional berupa suplai MDU dan MTU terlambat yaitu dengan cara melakukan integrasi dan optimalisasi fungsi *Supply Chain* berbasis Aplikasi Teknologi Informasi yang meliputi: Aplikasi e-SCM, Aplikasi e-Procurement, Aplikasi PLN *Marketplace*, dan *Digital Procurement*.
- Untuk risiko implementasi pengembangan EBT tidak memenuhi penugasan transisi energi nasional dimitigasi dengan cara implementasi *co-firing* PLTU dengan biomassa serta program dedieselisasi.
- Tindakan mitigasi untuk risiko kontinuitas pasokan batubara tidak stabil yaitu dengan cara meningkatkan akurasi kebutuhan PLN dan mengusahakan pemenuhannya dari pemasok pemilik tambang. Selain itu juga dilakukan pemutakhiran *monitoring tools* pasokan batubara pada Aplikasi Batubara Online BBO sebagai *Single Source of Truth (SSoT)*.
- Risiko kontrak ToP IPP tidak terserap dimitigasi dengan melakukan prioritas penyelesaian proyek transmisi terutama untuk evakuasi daya pembangkit IPP serta melaksanakan strategi pemasaran untuk mendorong tumbuhnya permintaan terutama di sistem yang mengalami kelebihan cadangan kapasitas pembangkit listrik.
- Upaya mitigasi risiko gangguan penyaluran tenaga listrik yaitu dengan cara melakukan perencanaan sistem *regional balance* untuk meningkatkan keandalan antar regional.
- Risiko utilisasi pengoperasian pembangkit PLN rendah dimitigasi dengan cara melakukan *improvement* melalui integrasi penerapan sistem manajemen pembangkit yang sudah berjalan di PLN. Selain itu, juga dilakukan penyusunan standar acuan untuk meningkatkan kinerja pembangkit PLN.

- The risk of default to PLN Partners due to limited liquidity is mitigated by optimizing active marketing programs, encouraging the creation of new demand/ business models, exploring other revenue potential with the PLN Group synergy and continuously optimizing cost efficiency programs (among others through the *Cash War Room/Centralized Planning*, and *Spending Control Tower*).
- Against the risk of suing PLN for excess Greenhouse Gas (GHG) emissions, namely by preparing an energy transition review to achieve *Carbon Neutral 2060*.

3. Operational

- For operational risks in the form of late supply of MDU and MTU, namely by integrating and optimizing *Supply Chain* functions based on Information Technology Applications which include: e-SCM Application, e-Procurement Application, PLN *Marketplace* Application, and *Digital Procurement*.
- The risk of the implementation of NRE development not fulfilling the national energy transition assignment is mitigated by implementing *co-firing* PLTU with biomass and the dedieselization program.
- Mitigation measures for the risk of continuity of unstable coal supply, namely by increasing the accuracy of PLN's requirements and seeking fulfillment from mine owner suppliers. In addition, coal supply monitoring tools were also updated on the BBO Online Coal Application as a *Single Source of Truth (SSoT)*.
- The risk of the ToP IPP contract not being absorbed is mitigated by prioritizing the completion of the transmission project, especially for the evacuation of IPP generating power and implementing a marketing strategy to encourage demand growth, especially in systems that experience excess reserves of power generation capacity.
- Efforts to mitigate the risk of disruption to the distribution of electric power, namely by planning a *regional balance* system to improve inter-regional reliability.
- The risk of low utilization of PLN's generator operations is mitigated by carrying out improvements through the integration of the implementation of the generator management system that is already running at PLN. Apart from that, the preparation of reference standards is also carried out to improve the performance of PLN generators.



- Untuk risiko penyerapan gas tidak optimal dimitigasi dengan cara menyusun kebijakan Tata Kelola Energi Primer Terintegrasi serta *improvement Early Warning System* (EWS).
- Terhadap risiko inkonsistensi implementasi budaya K3 dilakukan mitigasi yaitu dengan melakukan program pembangunan budaya K3 dan *Safety Leadership Assessment* untuk menilai peran dari manajemen terkait pengelolaan K3 & memetakan *Maturity* Budaya K3.
- Dan untuk risiko kompetensi pegawai belum siap menghadapi era globalisasi dan digitalisasi dimitigasi dengan menyusun strategi perbaikan *succession planning* dan *talent pool management* Perusahaan dengan memasukkan target 19% wanita dan 6% *talent* muda sesuai arahan dari Kementerian BUMN.

4. Proyek

Risiko ketidakselarasan penyelesaian proyek konstruksi yang saling terkait dimitigasi dengan cara mengembangkan regulasi dan standar acuan untuk *Feasibility Study* (FS), *Engineering Design* (ED), *Bidding Document* (BD), dan *Engineering Cost Estimate* (ECE) untuk proyek pembangkit konvensional, transmisi, dan gardu induk.

5. Kepatuhan

Risiko pembangkit termal tidak memenuhi Permen LHK P15/2019 dimitigasi dengan cara menambahkan peralatan CEMS dan integrasi SISPEK bagi pembangkit yang masuk wajib pantau untuk semua parameter yang disyaratkan Permen KLHK No P.15/2019. Selain itu juga memasukkan program penambahan peralatan pengendali emisi berdasarkan *Road Map* pemenuhan Baku Mutu Emisi ke dalam program prioritas anggaran investasi sesuai tahapan roadmap. Sedangkan untuk risiko sertifikasi aset tanah PLN Terkendala dimitigasi dengan cara optimalisasi aplikasi mengenai aset untuk mempercepat informasi dan pengambilan keputusan.

- The risk of non-optimal absorption of gas is mitigated by developing an *Integrated Primary Energy Management* policy and an improved *Early Warning System* (EWS).
- The risk of inconsistency in the implementation of the OHS culture is mitigated by conducting an OHS culture development program and a *Safety Leadership Assessment* to assess the role of management related to OHS management & mapping the *Occupational Health and Safety Culture*.
- For the competency risk of employees not being ready to face the era of globalization and digitalization is mitigated by developing a strategy to improve the Company's *succession planning* and *talent pool management* by including a target of 19% women and 6% young talent according to directions from the Ministry of SOE.

4. Project

The risk of inconsistency in the completion of interrelated construction projects is mitigated by developing regulations and reference standards for *Feasibility Study* (FS), *Engineering Design* (ED), *Bidding Document* (BD), and *Engineering Cost Estimate* (ECE) for conventional power generation, transmission, and substation.

5. Compliance

The risk of thermal generators not meeting Regulation of the Minister of Environment and Forestry P15/2019 is mitigated by adding CEMS equipment and SISPEK integration for power plants that are required to monitor all parameters required by Regulation of the Minister of Environment and Forestry No P.15/2019. In addition, it also includes a program for adding emission control equipment based on the *Road Map* for compliance with Emission Quality Standards into the investment budget priority program according to the roadmap stages. Meanwhile, the risk of certification of constrained PLN land assets is mitigated by optimizing applications regarding assets to accelerate information and decision making.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Risk Maturity Index

Selaras dengan komitmen Manajemen dalam implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Perusahaan secara Korporat serta dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko lebih baik sesuai dengan PER-5/MBU/09/2022 yang mengatur penerapan Manajemen Risiko di Badan Usaha Milik Negara, maka PLN terus berusaha meningkatkan penerapan manajemen risiko agar semua kebijakan yang berlaku sesuai termasuk dengan melakukan penyesuaian terhadap pengukuran *Risk Maturity*. Penilaian *Risk Maturity*, yang sebelumnya dikenal dengan *Maturity Level ERM* atau *Risk Management Maturity (RMM)* sekarang disebut dengan *Risk Maturity Index*, mengacu pada cara yang diterapkan untuk mengetahui kondisi penerapan manajemen risiko pada organisasi, dengan melakukan proses perbandingan kondisi lapangan dengan ukuran-ukuran tertentu yang ditetapkan sebelumnya.

Perseroan menerapkan *Risk Maturity Index*, dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengenal kelemahan dan kekuatan organisasi dalam penerapan manajemen risiko;
2. Mendapatkan praktik terbaik manajemen risiko di organisasi;
3. Mendapatkan manfaat terbaik dari manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi;
4. Untuk membuat program kerja unit dan organisasi yang sudah mempertimbangkan risiko;
5. Sebagai panduan pembuatan *roadmap* pengembangan manajemen risiko organisasi;
6. Kepatuhan terhadap aturan internal dan eksternal; dan
7. Untuk mendapatkan pengakuan dari pihak tertentu baik internal maupun eksternal.

Pengukuran Risk Maturity Index

Penilaian *Risk Maturity Index (RMI)* bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dari implementasi manajemen risiko secara berkesinambungan pada periode tertentu dan berdasarkan metodologi yang disusun dan disepakati. Pengukuran RMI di PLN dilakukan setiap semester, pada seluruh entitas yaitu Divisi/Satuan Kantor Pusat, Unit Induk, Anak Perusahaan, dan secara Korporat. Pengukuran RMI di PLN menggunakan level skala 5, dengan polaritas positif (semakin tinggi semakin baik). Hasil pengukuran RMI pada semester II tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

REVIEW ON THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

Risk Maturity Index

In line with Management's commitment to implementing Risk Management within the Corporate environment as well as in supporting better implementation of Risk Management in accordance with PER-5/MBU/09/2022 which regulates the implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises, PLN always strives to improve management implementation risk so that all applicable policies are appropriate, including by aligning the Risk Maturity measurement. Risk Maturity Assessment, which was previously known as ERM Maturity Level or Risk Management Maturity (RMM) is now called the Risk Maturity Index, refers to the method used to determine the condition of the implementation of risk management in organizations, by carrying out the process of comparing field conditions with certain predetermined measurements

The Company implements Risk Maturity Management with the following objectives:

1. Recognize the organization's weaknesses and strengths in implementing risk management.
2. Obtain the best practice of risk management in the organization.
3. Obtain the best benefits from risk management in achieving organizational goals.
4. Create work programs for units and organizations that have considered risks.
5. Serve as a guide for the creation of an organization's risk management development roadmap.
6. Compliance with internal and external regulations.
7. Obtain recognition from certain parties, both internal and external.

Measurement of Risk Management Maturity

Assessment of Risk Maturity Index (RMI) aims to determine the level of achievement of the implementation of risk management on an ongoing basis in a certain period and based on a methodology that has been prepared and agreed upon. RMI measurements at PLN are carried out every half year, for all entities, namely Head Office Divisions/Units, Main Units, Subsidiaries, and Corporately. RMI measurement at PLN uses a scale level of 5, with positive polarity (the higher the better). The results of RMI measurements in second half of 2022 can be seen in the following table:



Rekapitulasi Assessment Risk Management Maturity Index (RMI)

Recapitulation of Risk Maturity Index (RMI) Assessment

No.	Uraian / Description	Semester I	Semester II	
			Target	Realisasi / Realization
1	Rata-Rata RMM DIV Formasi Organisasi Lama / Average RMM of DIV Old Organizational Formation	3,19	3,12	3,51
2	Rata-Rata RMM DIV Formasi Organisasi Baru / Average RMM of DIV New Organization Formation	-	2,23	2,42
3	Rata-Rata RMM Unit Induk / Average RMM of Main Unit	3,51	2,51	3,75
4	Rata-Rata RMM Anak Perusahaan / Average RMM of Subsidiaries	2,92	3,10	3,26

UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN RISIKO

Peningkatan Kapasitas

Sesuai *roadmap* menuju level *maturity* 4.0 pada tahun 2024, PLN menetapkan 2 *stream* pada strategi *Capacity Building* yaitu program diklat pembelajaran dan program sertifikasi manajemen risiko. SAT MRO bersama Pusdiklat terus mengadakan diklat pembelajaran internal manajemen risiko, dengan pencapaian pegawai yang telah mengikuti program diklat pembelajaran manajemen risiko sampai tahun 2022 sebesar 23.970 pegawai dan yang telah tersertifikasi sebanyak 1.813 pegawai.

Adapun, Program Pembelajaran berbasis ITN & LNA dengan progres pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV telah diikuti sebanyak 5.887 peserta.

Capacity Building Internal dan Eksternal SAT MRO

Dalam pengelolaan risiko Perusahaan, Perseroan menerapkan Tata Kelola Risiko Model 3 Lini (*three lines model*). SAT MRO sebagai lini kedua dalam Model 3 Lini dimana seluruh *risk officer* pada SAT MRO berperan sebagai *pairing* dari seluruh *Business Process Owner* (BPO) atau lini pertama, sehingga *risk officer* pada SAT MRO dituntut untuk memiliki pemahaman yang jauh lebih baik dalam mengimplementasikan Manajemen Risiko Terintegrasi. Untuk itu, SAT MRO melakukan upaya percepatan peningkatan kompetensi internal dengan melakukan beberapa program *Capacity Building* yang juga dapat diikuti para *risk officer* dari unit kerja lain.

Untuk tahun 2022, SAT MRO melakukan *knowledge sharing* dan forum diskusi baik internal maupun eksternal, dalam rangka meningkatkan kompetensi para *risk officer* dan memastikan keseragaman pemahaman atas setiap

EFFORTS TO IMPROVE THE QUALITY OF RISK MANAGEMENT Capacity Building

According to the roadmap towards maturity level 4.0 in 2024, PLN has established 2 streams in the capacity building strategy, namely the learning training program and the risk management certification program. SAT MRO together with Training Center continues to hold Risk Management internal learning training, with the achievement of employees who have participated in the risk management learning training program as of 2022 of 23,970 employees and 1,813 employees who have been certified.

Meanwhile, the ITN & LNA-based Learning Program with progress from 2022 to Quarter IV has been attended by 5,887 participants.

Capacity Building for Internal SAT MRO

In managing corporate risk, the Company implements a three-line model of risk management as the second line in a 3-line model. All risk officers at SAT MRO act as pairing of all Business Process Owners (BPO) or first line, so that risk officers at SAT MRO are required to have a much better understanding in implementing integrated risk management. For this reason, SAT MRO is making efforts to accelerate internal competency improvement by carrying out several capacity building programs which risk officers from other work units can also participate in.

In 2022, SAT MRO conducted knowledge sharing and formed of a discussion forum in the internal and external scope to improve the competence of risk officers and ensure uniform understanding of each Risk Management infrastructure

infrastruktur dan kebijakan Manajemen Risiko yang dikembangkan. Forum diskusi Internal dikoordinasikan oleh DIV IJP dan telah berlangsung sebanyak 20 kali pertemuan dari rencana 20 pertemuan dengan nama kegiatan yaitu *Risk Talk* Rukun Warga (RT/RW). Dalam setiap pelaksanaannya, RT/RW mengambil topik yang diangkat dari Perdir 0071.P/DIR/2021 tentang Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dan bersifat wajib diikuti oleh seluruh pegawai SAT MRO dengan durasi maksimum 2,5 jam. Selain kegiatan forum diskusi internal, SAT MRO juga melakukan *Knowledge Sharing* Eksternal dimana SAT MRO diundang menjadi Narasumber oleh Angkasa Pura II, PERURI, PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam acara *Benchmark* terkait Penerapan Manajemen Risiko.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Perseroan telah melakukan evaluasi atas manajemen risiko yang diterapkan untuk tahun 2022. Dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa manajemen risiko Perseroan telah diterapkan secara efektif dengan infrastruktur yang memadai, sesuai lingkungan bisnis, ekonomi, serta standar penerapan yang berlaku untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022.

FUNGSI KEPATUHAN

Perseroan memahami peran penting sistem, regulasi, kebijakan dan proses bisnis yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dalam rangka memastikan kepatuhan dan integritas di dalam pengelolaan perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, PLN membentuk Divisi Kepatuhan berdasarkan Perdir 0054.P/DIR/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). Divisi Kepatuhan (*Compliance Division*) dipimpin oleh Executive Vice President (EVP) Kepatuhan (*Compliance*) yang bertanggung jawab kepada Senior Vice President Hukum, Kebijakan dan Kepatuhan (*Senior Vice President Legal, Policy and Compliance*).

Divisi Kepatuhan bertanggung jawab memimpin, membina dan mengelola Divisi Kepatuhan yang meliputi pengembangan dan pengendalian strategi, kebijakan, sistem dan program terkait *anti-fraud*, *integrity management*, anti-penyuapan dan kepatuhan PLN dalam rangka penyelenggaraan PLN yang bersih dan peningkatan citra Perseroan.

and policy developed. This Internal discussion forum is coordinated by DIV IJP and has held 20 meetings out of the planned 20 meetings with the name of the activity, namely Rukun Warga (RT/RW) Risk Talk. In each implementation, RT/RW take topics raised from Perdir 0071.P/DIR/2021 on Guidelines for Integrated Risk Management and are mandatory for all SAT MRO employees to follow with a maximum duration of 2.5 hours. In addition to internal discussion forum, SAT MRO also conducts External Knowledge Sharing where SAT MRO is invited to be a speaker by Angkasa Pura II, PERURI, PT Pupuk Indonesia (Persero) and the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning in Benchmark events related to the Implementation of Risk Management.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company has conducted an evaluation of the risk management implemented for 2022. Taking into account the results of this evaluation, the Board of Commissioners and Board of Directors stated that the Company's risk management has been implemented effectively with adequate infrastructure, according to the business environment, economy, and implementation standards that apply for the period ending on December 31, 2022.

COMPLIANCE FUNCTION

The Company recognizes the important role of systems, regulations, policies, and business processes in accordance with the principles of good governance to ensure compliance and integrity in the management of the Company. Based on these considerations, PLN established a Compliance Division based on Regulation of the Board of Directors No. 0054.P/DIR/2022 dated October 20, 2022 on Organization and Working Procedures of PT PLN (Persero) No. 076.P/DIR/2021. The Compliance Division is led by the Compliance Executive Vice President (EVP) who is responsible to the Director of Corporate Planning.

Compliance Division is responsible for leading, fostering, and managing the Compliance Division which includes the development and control of strategies, policies, systems, and programs related to anti-fraud, integrity management, anti-bribery, and PLN compliance in the framework of implementing a clean PLN and enhancing the Company's image.

Dasar hukum struktur organisasi Divisi Kepatuhan adalah Perdir Nomor 0063.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) beserta perubahannya pada Perdir Nomor 0003.P/DIR/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 0063.P/DIR/2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Legal Dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero).

Divisi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan pengembangan dan evaluasi program kepatuhan untuk mengidentifikasi potensi terjadinya kecurangan kebijakan/regulasi perusahaan yang bersifat strategis dan berdampak besar terhadap keberlangsungan perusahaan;
2. Memastikan pengembangan, evaluasi dan metode analisis kebijakan/regulasi dan proses bisnis yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis perusahaan untuk memastikan terhindar dan tindakan *fraud* dan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memastikan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuaan secara *best practice* di perusahaan termasuk Anak Perusahaan yang sejalan dengan strategi perusahaan maupun peraturan yang berlaku;
4. Memastikan pemberian pendampingan, saran atau rekomendasi kepada Direksi atas dampak dan kebijakan/regulasi yang bersifat strategis, berpotensi terjadinya kecurangan yang berdampak besar terhadap keberlangsungan perusahaan dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan;
5. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan *Fraud Risk Management System* di perusahaan serta sumber daya yang memadai untuk implementasi program *anti fraud*, termasuk didalamnya *fraud risk management information system* dan memfasilitasi pembangunan kompetensi (*capacity building*);
6. Memastikan pemantauan kinerja dan *maturity level* kepatuhan perusahaan dan perbaikan secara berkesinambungan mengacu pada *best practice* sebagai bagian dan program integritas perusahaan;

The legal basis for the organizational structure of the Compliance Division is Regulation of the Board of Directors No. 0063.P/DIR/2022 on Organizational Structure and Working Procedures at the Directorate of Legal and Human Capital Management of PT PLN (Persero) and its amendments on Regulation of the Board of Directors No. 0003.P/DIR/2023 on Amendments to Regulation of the Board of Directors No. 0063.P/DIR/2022 2022 on Organizational Structure and Working Procedures at the Directorate of Legal and Human Capital Management of PT PLN (Persero)

Duties and responsibilities of Compliance Division are as follows:

1. Ensure the development and evaluation of compliance programs to identify potential fraud against policies/regulations that are strategic and have a major impact on the sustainability of the Company;
2. Ensure the development and evaluation of strategies and methods for analyzing policies/regulations that affect the continuity of the Company's business to ensure that fraud, unethical or inappropriate actions are avoided by referring to Company provisions and laws and regulations;
3. Ensure that the planning, development, and evaluation of the best practice Anti-Bribery management system in the Company and its subsidiaries is carried out in a sustainable manner in line with the Company's strategy and prevailing regulations;
4. Ensure the provision of assistance, advice, and/or recommendations to the Board of Directors on the impact and strategic policies/regulations of aspects of compliance that have the potential for fraud to have a major impact on the sustainability of the Company and cause losses to the Company;
5. Ensure the planning, implementation and evaluation of the Fraud Risk Management System policy in the Company as well as adequate resources for the implementation of the anti-fraud program, including the fraud risk management information system and facilitate capacity building;
6. Ensure performance control, maturity level and continuous improvement of Company compliance which refers to best practices and the Company's integrity program;

7. Memastikan pengembangan dan evaluasi *due diligence system* sebagai bagian dan strategi *anti fraud* perusahaan;
8. Memastikan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pendeteksian dan respon dalam rangka program pencegahan *fraud* di perusahaan termasuk pengelolaan WBS dan investigasi proaktif/ observasi;
9. Memastikan pengembangan dan evaluasi program kerja sama dengan institusi eksternal dalam rangka penguatan integritas perusahaan; dan
10. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di Divisi Kepatuhan berbasiskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko, dan kepatuhan, termasuk menerapkan *check and balance* melalui *4 Eyes Principle* untuk proses bisnis yang bersifat kritical dalam kerangka *3 Lines Model*.

SERTIFIKASI PROFESI

Pegawai pada Divisi Kepatuhan telah memiliki sertifikasi profesi dengan perincian sebagai berikut:

Sertifikasi Profesi Divisi Kepatuhan

No	Sertifikasi / Certification	Penyelenggara / Certifying Institution	Jumlah Pegawai / Number of Employees
1	Lead Implementer ISO 37001:2016 SMAP	PECB	2
2	Lead Auditor ISO 37001:2016 SMAP	PECB	3
3	Certified Forensic Auditor (CFrA)	LSP AF (BNSP)	6
4	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	LSP MKS (BNSP)	3
5	Penyuluh Anti Korupsi Pratama / Primary Anti-Corruption Counseling	LSP KPK (BNSP)	2

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2022

Divisi Kepatuhan melaksanakan berbagai kegiatan pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Divisi Kepatuhan mengawal pencapaian *Maturity Level* Kepatuhan pada seluruh kontrak manajemen Satuan Kerja, yang digunakan sebagai *tools* dalam memastikan implementasi SNI ISO 37001:2016 SMAP dapat berjalan dengan efektif;
2. PT PLN (Persero) telah melakukan *Audit Surveillance* SMAP yang dilakukan oleh Lembaga TUVNORD pada bulan September-Oktober 2023, dimana hasil audit *surveillance* tersebut guna memastikan konsistensi implementasi SNI ISO 37001:2016 SMAP di Perseroan;

PROFESSIONAL CERTIFICATION

Employees in the Compliance Division already have professional certification with the following details:

Professional Certificate of Compliance Division

No	Sertifikasi / Certification	Penyelenggara / Certifying Institution	Jumlah Pegawai / Number of Employees
1	Lead Implementer ISO 37001:2016 SMAP	PECB	2
2	Lead Auditor ISO 37001:2016 SMAP	PECB	3
3	Certified Forensic Auditor (CFrA)	LSP AF (BNSP)	6
4	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	LSP MKS (BNSP)	3
5	Penyuluh Anti Korupsi Pratama / Primary Anti-Corruption Counseling	LSP KPK (BNSP)	2

IMPLEMENTATION OF DUTIES IN 2022

The Compliance Division will carry out various activities in 2022, as follows:

1. The Compliance Division oversees Compliance Maturity Level for all Work Unit management contracts, which serve as tools in ensuring the implementation of SNI ISO 37001: 2016 SMAP to run effectively;
2. PT PLN (Persero) has conducted a SMAP Surveillance Audit by the TUVNORD Institute in September-October 2023, where the results of the surveillance audit are to ensure consistency in the implementation of SNI ISO 37001: 2016 SMAP in the Company;



3. Menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PLN dengan KPK RI yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Maret 2021 sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara KPK dan PT PLN (Persero) Nomor: 77 Tahun 2021 / Nomor: 0043.Pj/HKM.02.01/C01000000/2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perseroan telah memiliki rencana pembangunan WBS TPK terintegrasi tahun 2022 yang terdiri dari kegiatan yang berdasar lima pilar pembangunan WBS yaitu komitmen pimpinan tertinggi, penyusunan/penguatan aturan internal, pembangunan budaya organisasi, aplikasi terkoneksi, dan *continuous improvement* (melalui monitoring dan evaluasi); dan
4. Program Kepatuhan Terintegrasi pada PLN Group, dengan maksud untuk menyelaraskan implementasi program Kepatuhan di PLN Group sehingga dapat terimplementasi secara *best practice*.
3. Following up on the Cooperation Agreement (PKS) between PLN and KPK RI which was signed on March 2, 2021 in accordance with the Cooperation Agreement between KPK and PT PLN (Persero) No. 77 of 2021 / No. 0043.Pj/HKM.02.01/C01000000 /2021 March 2, 2021 on Handling of Complaints in Efforts to Eradicate Corruption Crimes, the Company already has an integrated TPK WBS development plan for 2022 which consists of activities based on the five pillars of WBS development, namely the commitment of the highest leadership, preparation/strengthening of internal regulations, development of organizational culture, connected applications, and continuous improvement (through monitoring and evaluation); and
4. Integrated Compliance Program in the PLN Group, with the aim of aligning the implementation of the Compliance program in the PLN Group so that it can be implemented in the best practice.

TARGET COMPLIANCE TAHUN 2023

Divisi Kepatuhan telah menyusun sejumlah target untuk tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Peningkatan *Maturity Level* Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
2. Penyusunan *Fraud Risk Profile* Korporat tahun 2024;
3. Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 :2016;
4. Implementasi *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC);
5. Monitoring dan Evaluasi Implementasi *Integrity Due Diligence*;
6. Implementasi Pengelolaan WBS;
7. Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengendalian Gratifikasi;
8. Penyusunan Kebijakan Strategis Kepatuhan;
9. *Maturity Level* PLN Bisnis Ekselen;
10. Pemenuhan *Risk Maturity Index* (RMI).

Adapun selain KPI pada kontrak manajemen tahun 2023, Divisi Kepatuhan juga menyusun beberapa program strategis antara lain:

1. Program Kepatuhan Terintegrasi pada Holding, Sub-Holding dan Anak Perusahaan PLN;
2. Mengintegrasikan sistem pelaporan dan pengaduan (*Whistleblowing System*) antara Holding, Sub-Holding, Anak Perusahaan dan stakeholder eksternal; dan
3. Penguatan Tata Kelola Kepatuhan, *Comply to Regulation* dan Peningkatan Kompetensi Kepatuhan.

COMPLIANCE TARGET FOR 2023

The Compliance Division has set a number of targets for 2023 with the following details:

1. Increasing the *Maturity Level* of the Anti-Bribery Management System;
2. Compilation of the 2024 Corporate *Fraud Risk Profile*;
3. Internal Audit of Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001:2016;
4. Implementation of *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC);
5. Monitoring and Evaluation of the Implementation of *Integrity Due Diligence*;
6. Implementation of WBS Management;
7. Monitoring and Evaluation of Gratuity Control Reports;
8. Formulation of Compliance Strategic Policy;
9. *Maturity Level* PLN Business Excellence;
10. Fulfillment of *Risk Maturity Index* (RMI).

In addition to the KPIs in the 2023 management contract, the Compliance Division has also developed several strategic programs including:

1. Integrated Compliance Program for Holding, Sub-Holding and Subsidiaries of PLN;
2. Integrating reporting and complaint systems (*Whistleblowing System*) between Holding, Sub-Holding, Subsidiaries and external stakeholders; and
3. Strengthening Compliance Governance, *Complying to the Regulations*, and Improving Compliance Competency.

PERKARA PENTING

Di tahun 2022, Perseroan menghadapi perkara hukum dengan pengungkapan pokok perkara, status penyelesaian, dan pengaruh terhadap kondisi Perseroan sebagai berikut:

SIGNIFICANT CASE

In 2022, the Company faced legal proceedings with the disclosure of the subject matter, status of settlement, and the impact on the condition of the Company as follows:

Perkara Penting Tahun 2022

Legal Case in 2022

No.	Pokok Perkara Hukum / Main Legal Case	Status Penyelesaian / Settlement Status	Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai gugatan / The risks faced by the Company and the lawsuit value	Pengaruhnya Terhadap Perusahaan / Effect on the Company
1	<p>Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perusahaan menghadapi Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") sebagai Pemohon melawan PC Muriah Ltd ("PCML") sebagai Termohon 1 dan Perusahaan sebagai Termohon 2 di <i>International Court of Commerce</i> ("ICC"). Permohonan tersebut terkait sengketa <i>Gas Transportation Agreement</i> ("GTA") antara PCML selaku <i>Shipper</i>/Penjual, KJG selaku <i>Transporter</i>, dan Perusahaan selaku <i>Offtaker</i>/Pembeli mengenai kekurangan pembayaran atas biaya transportasi gas ke PLTGU Tambak Lorok dikarenakan volume gas yang dikirim kurang dari volume gas minimum yang disepakati. / On August 29, 2018, the Company faced a Request for Arbitration filed by PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") as Petitioner against PC Muriah Ltd ("PCML") as Respondent 1 and the Company as Respondent 2 at the <i>International Court of Commerce</i> ("ICC"). The request is related to a <i>Gas Transportation Agreement</i> ("GTA") dispute between PCML as <i>Shipper</i>/Seller, KJG as <i>Transporter</i>, and the Company as <i>Offtaker</i>/Buyer regarding underpayment of gas transportation costs to PLTGU Tambak Lorok due to the volume of gas sent being less than the minimum volume of gas agreed.</p> <p>Pemohon menuntut pengembalian sejumlah uang yang dipotong oleh Perusahaan dari tagihan Pemohon sejak April 2018 dan secara alternatif dengan PCML bertanggung jawab atas <i>Ship or Pay</i> ("SOP") 2016-2019 senilai USD144.536.677 (nilai penuh) ditambah biaya-biaya (<i>pre-award</i> dan <i>post-award</i>). Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di ICC. / The Applicant demands a refund of the amount deducted by the Company from the Applicant's invoice since April 2018 and alternatively with PCML being responsible for <i>Ship or Pay</i> ("SOP") 2016-2019 worth USD144,536,677 (full amount) plus fees (<i>pre-award</i> and <i>post-award</i>). As of the completion date of these consolidated financial statements, this case is still under examination at the ICC.</p>	<p>Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di ICC. / This case is still under investigation at the ICC.</p> <p>Pemeriksaan selanjutnya dijadwalkan pada 30 Oktober 2023 dengan agenda <i>Hearing</i> penjelasan dari Para Pihak. / The next examination is scheduled for October 30, 2023 with an agenda for <i>Hearing</i> explanations from the Parties.</p> <p>Bersamaan menunggu jadwal pemeriksaan pada 30 Oktober 2023, KJG dan PLN telah sepakat melakukan perdamaian, dengan pokok kesepakatan KJG membebaskan PLN dari kewajiban hukum apapun (termasuk pembayaran SOP) yang timbul dari Putusan Arbitrase perkara <i>a quo</i>. / While waiting for the examination schedule on October 30, 2023, KJG and PLN have agreed to reconcile, with the principal agreement being that KJG frees PLN from any legal obligations (including SOP payments) arising from the Arbitration Award for the <i>a quo</i> case.</p>	<p>Berdasarkan kesepakatan perdamaian KJG dengan PLN, maka PLN sudah tidak menghadapi risiko membayar kepada KJG. / Based on the KJG settlement agreement with PLN, PLN is no longer facing the risk of paying KJG.</p>	<p>Tidak berpengaruh secara material terhadap Perusahaan. / No material impact on the Company</p>
2	<p>Pada tanggal 31 Mei 2018, Konsorsium Kinarya Liman Margaseta ("KKLM") mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap PT Indonesia Power ("IP") dan PT Perusahaan Gas Negara ("PGN") di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Perselisihan ini disebabkan pengakhiran perjanjian sewa fasilitas penyaluran bahan bakar gas untuk PLTGU Priok oleh IP. / On May 31, 2018, the Kinarya Liman Margaseta Consortium ("KKLM") filed a Request for Arbitration against PT Indonesia Power ("IP") and PT Perusahaan Gas Negara ("PGN") at the Indonesian National Arbitration Board ("BANI"). This dispute was due to the termination of the gas fuel distribution facility lease agreement for PLTGU Priok by IP.</p>	<p>Pada tanggal 8 September 2022 IP dan KKLM sepakat membuat Perdamaian atas sengketa <i>aquo</i>. / On September 8, 2022 IP and KKLM agreed to make settle over the <i>aquo</i> dispute.</p>	<p>PLN NP (dahulu IP) membayar ganti rugi kepada KKLM sebesar Rp129 miliar, lebih kecil dari nilai ganti rugi sebesar Rp172,28 miliar sesuai putusan BANI dan Mahkamah Agung RI. / PLN NP (formerly IP) paid compensation to KKLM in the amount of IDR 129 billion, less than the compensation value of Rp172.28 billion according to the ruling of BANI and the Supreme Court of the Republic of Indonesia.</p>	<p>Tidak berpengaruh secara material terhadap Perusahaan. / Has no material impact on the Company</p>



No.	Pokok Perkara Hukum / Main Legal Case	Status Penyelesaian / Settlement Status	Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai gugatan / The risks faced by the Company and the lawsuit value	Pengaruhnya Terhadap Perusahaan / Effect on the Company
	<p>Pada tanggal 16 Juli 2019, BANI memutuskan IP membayar ganti rugi kepada KKLM sebesar Rp172,28 miliar. Pada tanggal 11 September 2019, IP mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diputus tanggal 17 Desember 2019 dengan amar putusan membatalkan putusan BANI. Pada tanggal 9 Januari 2020, KKLM mengajukan upaya hukum Banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Mahkamah Agung dan telah diputus dengan amar putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta menguatkan putusan BANI. Pada tanggal 12 Oktober 2020, IP mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung tersebut. / On July 16, 2019, BANI decided that IP would pay compensation to KKLM in the amount of Rp172.28 billion. On September 11, 2019, IP filed a lawsuit to cancel the BANI arbitration award to the South Jakarta District Court and was terminated on December 17, 2019 with the ruling of canceling BANI's decision. On January 9, 2020, KKLM filed an appeal against the ruling of the South Jakarta District Court to the Supreme Court and resulted in a ruling of canceling the ruling of the South Jakarta District Court and upholding BANI's decision. On October 12, 2020, IP filed a legal action for judicial review of the Supreme Court's ruling.</p> <p>KKLM mengajukan Sita Eksekusi putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juli 2019, terhadap kepemilikan saham IP di CDB (entitas anak IP) dan juga pemblokiran salah satu rekening bank milik IP. IP mengajukan Gugatan Perlawanan/Verzet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Sita Eksekusi tersebut. Pada tanggal 2 Juni 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak Gugatan IP, kemudian terhadap putusan tersebut IP mengajukan upaya hukum Banding pada 3 Juni 2022. / KKLM filed a Confiscation of Execution of BANI's decision to the South Jakarta District Court on July 16, 2019, regarding IP's share ownership in CDB (subsidiary of IP) and also the blocking of one of IP's bank accounts. IP filed a Lawsuit Against/Verzet at the South Jakarta District Court against the Seizure of the Execution. On June 2, 2022, the South Jakarta District Court rejected IP's lawsuit, then IP filed an appeal against this decision on June 3, 2022.</p> <p>Pada tanggal 10 Agustus 2021, KKLM mengajukan tuntutan pailit terhadap IP melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terdiri atas pengalihan tagihan kepada PT Balai 128 sebesar Rp5 miliar dan KKLM sebesar Rp167,28 miliar. Pada tanggal 1 November 2021 Pengadilan Niaga memberikan putusan menolak permohonan pailit yang diajukan KKLM. / On August 10, 2021, KKLM filed a bankruptcy claim against IP through the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, consisting of transferring claims to PT Balai 128 in the amount of Rp5 billion and KKLM in the amount of Rp167.28 billion. On November 1, 2021 the Commercial Court issued a ruling of rejecting the bankruptcy application submitted by KKLM.</p>			
3	<p>Pada tanggal 6 Maret 2023 ELB dan PLN Batam sepakat melakukan perdamaian terhadap perkara a quo. / On March 6, 2023 ELB and PLN Batam agreed to settle the a quo case.</p>	<p>Pada tanggal 6 Maret 2023 ELB dan PLN Batam sepakat melakukan perdamaian terhadap perkara a quo. / On March 6, 2023 ELB and PLN Batam agreed to settle the a quo case.</p>	<p>PLN Batam akan membayar ganti rugi kepada ELB sebesar Rp77 miliar, lebih kecil dari nilai ganti rugi sebesar Rp154,7 miliar sesuai putusan BANI dan Mahkamah Agung. / PLN Batam would pay compensation to ELB in the amount of RP77 billion, less than the compensation value of RP154.7 billion according to the ruling of BANI and the Supreme Court</p>	<p>Tidak berpengaruh secara material terhadap Perusahaan. / Has no material impact on the Company</p>

No.	Pokok Perkara Hukum / Main Legal Case	Status Penyelesaian / Settlement Status	Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai gugatan / The risks faced by the Company and the lawsuit value	Pengaruhnya Terhadap Perusahaan / Effect on the Company
4	<p>Pada tanggal 24 Juni 2020, PT PLN (Persero) ("PLN") menghadapi gugatan yang diajukan oleh PT Sumsel Energi Gemilang ("SEG") di BANI terkait perselisihan pelaksanaan perjanjian jual beli gas dan kesepakatan bersama dalam hal ini yaitu mengenai kewajiban pembayaran jumlah minimum gas atau <i>Take or Pay</i> ("TOP") dan jumlah penyaluran gas minimum atau SOP. / On June 24, 2020, PT PLN (Persero) ("PLN") faced a lawsuit filed by PT Sumsel Energi Gemilang ("SEG") at BANI regarding a dispute in the implementation of a gas sale and purchase agreement and mutual agreement in this matter regarding the obligation to pay the amount minimum gas or <i>Take or Pay</i> ("TOP") and the minimum amount of gas distribution or SOP.</p> <p>SEG menuntut pembayaran TOP dan SOP tersebut mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan nilai total USD31.523.588 (nilai penuh). Pada 3 Mei 2021, BANI telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan menghukum Perusahaan membayar USD27.021.871 (nilai penuh). Pada tanggal 22 Juni 2021, PLN mengajukan upaya hukum pembatalan putusan BANI tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada tanggal 11 Oktober 2021 telah diputus dengan amar putusan membatalkan Putusan BANI. Pada tanggal 21 Oktober 2021, SEG mengajukan upaya hukum Banding atas Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Putusan Arbitrase tersebut ke Mahkamah Agung dan pada tanggal 14 April 2022 telah diputus dengan amar putusan mengurangi nilai putusan BANI menjadi USD13.510.935 (nilai penuh) dan dapat dibayar secara bertahap paling lama 10 tahun sejak permohonan pembatalan didaftarkan di pengadilan. / SEG demands payment of the TOP and SOP starting from 2015 to 2019 with a total value of USD31,523,588 (full amount). On May 3, 2021, BANI has decided that PLN must pay compensation to the Plaintiff amounted to USD27,021,871 (full amount). On June 22, 2021, PLN submitted a petition to cancel the BANI decision to the South Jakarta District Court and on October 11, the District Court of South Jakarta has decided to annul the arbitration decision. On October 21, 2021, SEG filed an appeal against the District Court's ruling which canceled the Arbitration Award to the Supreme Court and on April 14, 2022 it was decided to reduce the value of BANI's decision to USD13.510.935 and can be paid in stages at the latest 10 years since the request for annulment was registered in court.</p>	<p>Putusan Mahkamah Agung 14 April 2022 telah berkekuatan hukum tetap. / The Supreme Court's ruling on April 14, 2022 has permanent legal force.</p>	<p>PLN membayar ganti rugi kepada SEG sebesar USD13,5 juta dan dibayar secara bertahap paling lama 10 tahun, lebih kecil dari Nilai ganti rugi sebesar USD27 juta sesuai Putusan BANI. Perusahaan telah membukukan provisi senilai Rp210,66 miliar di tahun 2022 pada laba rugi konsolidasian. / PLN paid compensation to SEG in the amount of USD13.5 million and was paid in stages for a maximum of 10 years, less than the amount of compensation of USD27 million according to the BANI Ruling. PLN has recorded a provision of Rp210,66 billion in 2022 in consolidated profit or loss.</p>	<p>Tidak berpengaruh secara material terhadap Perusahaan. / Has no material impact on the Company</p>
5	<p>Pada tanggal 29 April 2021, PT PLN (Persero) "PLN" menghadapi gugatan yang diajukan oleh Ince Baharudin dan Ince Rahmawati sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Makassar terkait kepemilikan aset tanah PLN di Jalan Latimojong Makassar. Penggugat mengajukan kerugian materiil akibat penguasaan tanah sengketa oleh Perusahaan sebesar Rp432,65 miliar dan kerugian non materiil sekitar Rp200 miliar. Penggugat mengajukan tuntutan agar PLN mengosongkan tanah dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut ke Penggugat. / On April 29, 2021, PT PLN (Persero) "PLN" faced a lawsuit filed by Ince Baharudin and Ince Rahmawati as Plaintiffs at the Makassar District Court regarding ownership of PLN land assets on Jalan Latimojong Makassar. The Plaintiff filed for material losses due to the Company's control of the disputed land amounted to Rp432.65 billion and non-material losses of approximately Rp200 billion. The plaintiff filed a demand that PLN vacate the land and then hand over the land to the plaintiff.</p> <p>Pada tanggal 3 Februari 2022, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan amar putusan menolak seluruh gugatan Penggugat. Pada tanggal 16 Februari 2022, Penggugat mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. / On February 3, 2022, the District Court of Makassar has decided to deny the entire Plaintiff's claims. On February 16, 2022, the Plaintiff submitted an appeal to the High Court of Makassar.</p> <p>Pada tanggal 8 September 2022, upaya hukum banding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan amar Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar. / On September 8, 2022, the appeal was decided by the Makassar High Court with a ruling to uphold the Makassar District Court's decision.</p> <p>Berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Januari 2023, disampaikan bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan banding tersebut. / Based on a letter from the Makassar District Court on January 25, 2023, it was stated that the Plaintiff did not take legal action against the appeal decision.</p>	<p>Putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 8 September 2022 telah berkekuatan hukum tetap. / The ruling of the Makassar High Court on September 8, 2022 has permanent legal force.</p>	<p>Pengosongan aset berupa tanah PLN di Jalan Latimojong Makassar. / Discharging assets in the form of PLN land on Jalan Latimojong Makassar.</p>	<p>Tidak berpengaruh secara material terhadap Perusahaan. / Has no material impact on the Company</p>

No.	Pokok Perkara Hukum / Main Legal Case	Status Penyelesaian / Settlement Status	Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai gugatan / The risks faced by the Company and the lawsuit value	Pengaruhnya Terhadap Perusahaan / Effect on the Company
6	<p>Pada tanggal 25 Oktober 2016, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh Poe Soe Fang sebagai Penggugat, dalam hal ini juga sebagai Komisaris PT Barito Jaya, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register No. 501/Pdt.G/2016/PN.JKT. UTR terkait Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTMG Kalsel Peaker 200 MW. Penggugat mengajukan ganti rugi atas Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum sebesar Rp191,39 miliar yang sebelumnya sudah disetujui oleh Tergugat I, Edy Kartono selaku Direktur Utama PT Barito Jaya, sebesar Rp18,32 miliar. / On October 25, 2016, the Company faced a lawsuit filed by Poe Soe Fang as a Plaintiff and also as the Commissioner of PT Barito Jaya, in the District Court of North Jakarta with register No. 501/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR regarding the Procurement of Land for Construction PLTMG Kalsel Peaker 200 MW. The Plaintiff filed for the compensation due to the Procurement of Land for Publics amounted to Rp191.39 billion that has been previously agreed by the Defendant I, Edy Kartono as President Director of PT Barito Jaya, amounted to Rp18.32 billion. The Plaintiff submitted the claims in order to get the compensation from the Company amounted to Rp191.39 billion instead of Rp18.32 billion.</p> <p>Pada tanggal 23 Oktober 2018, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan amar putusan menolak seluruh gugatan Penggugat. Pada tanggal 1 November 2018, Penggugat mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Utara dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 7 Mei 2019. / On October 23, 2018, the District Court of North Jakarta has decided to deny the entire Plaintiff's claim. On November 1, 2018, the Plaintiff filed an appeal to the Court of North Jakarta and sent the Memorandum of Appeal on May 7, 2019.</p> <p>Perusahaan menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 November 2019. / The Company submitted the Counter Memorandum of Appeal on November 15, 2019.</p>	<p>Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan tahunan ini, kasus ini masih dalam tahap proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan sedang menunggu Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta. / As of the completion date of this annual report, this case is still in the appeal process at the High Court of Jakarta and is awaiting the High Court of Jakarta Appeal Decision.</p>	<p>Apabila Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan Permohonan Banding dari Penggugat, maka PLN masih dapat mengajukan upaya hukum Kasasi. / If the High Court of Jakarta grants the Plaintiff's Appeal, PLN can still submit a cassation.</p>	<p>Tidak berpengaruh secara material terhadap Perusahaan. / Has no material impact on the Company.</p>
7	<p>Pada tanggal 7 Juni 2022, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh Ronny Rotinsulu Tumengkol sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Tondano dengan register No. 172/Pdt.G/2022/PN.Tnn terkait kepemilikan atas tanah di PLTA Tonsea Lama. Penggugat mengajukan ganti rugi sebesar Rp409,56 miliar dan tuntutan bahwa tanah seluas 15.000 m² dengan bukti kepemilikan berupa Buku Garisan Tanah Tonsea Lama No. 829 Folio 80 adalah atas nama Almarhum Hendrik Nelwan. / On June 7, 2022, the Company faced a lawsuit filed by Ronny Rotinsulu Tumengkol as a Plaintiff in the District Court of Tondano with register No.172/Pdt.G/2022/PN.Tnn regarding ownership of land right in PLTA Tonsea Lama. The Plaintiff filed for losses amounted to Rp409.56 billion and a demand that the land of 15,000 m² with proof of ownership of land rights by Land Line Book of Tonsea Lama No. 829 Folio 80 is on behalf of Almarhum Hendrik Nelwan.</p> <p>Pada tanggal 5 April 2023, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima. Penggugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Manado dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 26 April 2023. / On April 5, 2023, the District Court of Tondano has decided to declare inadmissible the Plaintiff's claim. On April 26, 2023, the Plaintiff filed an appeal to the High Court of Manado and sent the Memorandum of Appeal on April 26, 2023.</p>	<p>Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan tahunan ini, kasus ini masih dalam tahap proses banding di Pengadilan Tinggi Manado dan sedang menunggu Putusan Banding Pengadilan Tinggi Manado / As of the the completion date of this annual report, this case is still in the appeal process at the High Court of Manado and is awaiting the High Court of Manado Appeal Decision</p>	<p>Apabila Pengadilan Tinggi Manado mengabulkan Permohonan Banding dari Penggugat, maka PLN masih dapat mengajukan upaya hukum Kasasi. / If the High Court of Manado grants the Plaintiff's Appeal, PLN can still submit a cassation.</p>	<p>Tidak berpengaruh secara material terhadap Perusahaan. / Has no material impact on the Company.</p>

SANKSI ADMINISTRATIF OLEH REGULATOR

Di tahun 2022, tidak terdapat sanksi administratif material yang dikenakan kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris, ataupun Direksi oleh regulator.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS IMPOSED BY REGULATORS

There were no material administrative sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners or Board of Directors by the regulator in 2022.

INFORMASI KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN

PLN memiliki komitmen untuk secara konsisten mendukung seluruh kebijakan Pemerintah, mencakup kebijakan perpajakan, sebagai bagian penting dalam keseluruhan upaya pembangunan di tanah air. Sebagai wujud komitmen tersebut, sampai dengan 31 Desember 2022, tidak terdapat pelanggaran pemenuhan kewajiban pembayaran pajak apa pun yang dilakukan oleh PLN.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Sebagai wujud implementasi prinsip keterbukaan informasi, Perseroan telah menyediakan sarana dan fasilitas komunikasi untuk memudahkan para pemangku kepentingan memperoleh berbagai informasi terkait aktivitas dan kinerja yang tidak berklasifikasi rahasia. Seluruh informasi berkaitan dengan PT PLN (Persero) dapat diperoleh pada alamat:

Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero)

Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135 Kebayoran Baru,
Jakarta 12160, Indonesia
Tel. :+62 21 7251234, 7250550, 7261122
Fax. :+62 21 7221330
Website : www.pln.co.id

Lebih lanjut, akses informasi dan data perusahaan dapat diperoleh melalui sejumlah sarana sebagai berikut:

RUPS / GMS	Sarana komunikasi PLN dengan Pemegang Saham untuk penyampaian informasi mengenai kinerja operasional dan keuangan Perusahaan serta pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham. / PLN communication channel with the Shareholder for information disclosure on the Company and decision-making that requires shareholder approval.
Situs Website / Website	PLN memiliki situs web resmi terkait profil perusahaan yang dapat diakses melalui web.pln.co.id . Para pemangku kepentingan dapat menemukan berbagai informasi terkini terkait Perusahaan, seperti profil Perusahaan, struktur organisasi, profil manajemen, inovasi dan sertifikasi, Siaran Pers Media dan informasi kegiatan Perusahaan, tata kelola perusahaan, Manajemen Risiko, Pedoman Perilaku, Keterbukaan Informasi Publik, Whistleblowing System, Layanan Pelanggan, Sustainability yang meliputi prinsip <i>Environmental, Social and Governance</i> (ESG), Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), laporan dan presentasi termasuk Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan. Publikasi informasi yang tersedia di situs web Perusahaan telah mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. / PLN has an official website at http://www.pln.co.id . The stakeholders can find the Company's latest information, such as company profile, organizational structure, management profile, innovation and certification, corporate activities, corporate governance, Code of Conduct, whistleblowing system, media release, reports and presentations, including Annual Report, Sustainability Report, and Financial Statements. Publication of information available on the Company's website refers to OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Website of Issuer or Public Company.

INFORMATION ON COMPLIANCE WITH TAX REGULATIONS

PLN is committed to consistently supporting all Government policies, including tax policies, as an important part of the overall development efforts in the country. As a manifestation of this commitment, up to December 31, 2022, there has been no violation of fulfilling any tax payment obligations by PLN.

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

As a form of implementing the principle of information disclosure, the Company has provided communication tools and facilities to facilitate stakeholders to obtain various information related to activities and performance that are not classified as confidential. All information pertaining to PT PLN (Persero) can be obtained at the address:

PT PLN (Persero) Corporate Secretariat

Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135 Kebayoran Baru,
Jakarta 12160, Indonesia
Tel. :+62 21 7251234, 7250550, 7261122
Fax. :+62 21 7221330
Website : www.pln.co.id

Furthermore, access to company information and data can be obtained through a number of means as follows:



Keterbukaan Informasi Publik / Public Information Disclosure	<p>Dalam rangka menerapkan prinsip GCG terutama prinsip transparansi, serta sebagai implementasi Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perusahaan berusaha meningkatkan transparansi perusahaan dan membentuk perangkat pelayanan informasi publik. Perusahaan menunjuk Sekretaris Perusahaan di tingkat PLN Pusat dan Senior Manager terkait di unit sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Melalui pelayanan informasi publik ini hak masyarakat mendapatkan informasi mengenai perusahaan, layanan perusahaan, laporan keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan informasi terkait lainnya dapat terpenuhi. / To implement GCG principles, especially the transparency principle, as well as Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, the Company seeks to improve corporate transparency and to provide public information service. The Company appoints the Corporate Secretary at PLN Head Office and senior managers/related field managers at units as Information and Documentation Management Officers (PPID). This public information service aims at fulfilling the public's rights to obtain information about the Company, the Company's services, financial statements, corporate social responsibility, and other related information.</p> <p>Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, dapat mengunjungi situs web www.pln.co.id; atau dapat mengirimkan surat ke Perusahaan dalam rangka mendapatkan informasi sesuai dengan Daftar Informasi Publik yang ada di Perusahaan. / People who wish to obtain information can visit the website www.pln.co.id or send a letter to the Company to obtain information in accordance with the Company's List of Public Information.</p>
Email / E-mail	<p>Perusahaan membuka alamat email resmi pln123@pln.co.id bagi pemangku kepentingan yang ingin menyampaikan saran, keluhan dan meminta informasi mengenai kondisi Perusahaan terkini. Untuk meningkatkan pelayanan kepada investor, perusahaan juga memiliki alamat email resmi investor.relation@pln.co.id yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi seluruh investor PLN yang membutuhkan informasi dan data terkait kondisi Perusahaan. / The Company provides official e-mail address pln123@pln.co.id for stakeholders to submit suggestions, complaints, or request information on the Company's current condition. To improve service for investors, the Company also has an official email address investor.relation@pln.co.id as a means of communication for all PLN investors who require information and data related to the condition of the Company.</p>
Media Komunikasi Lainnya / Other Communication Media	<p>Media Aplikasi Mobile / Mobile Application Media</p> <p>Perusahaan memiliki aplikasi layanan digital PLN Mobile untuk Android dan iOS. Aplikasi ini juga memiliki fitur PLN Magazine yang menampilkan update pemberitaan korporat. / The Company provides PLN Mobile application for Android and iOS. This application also has PLN Magazine feature that provides corporate news updates.</p>
Media Sosial / Social Media	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan atau contact Center PLN 123: / Contact Center PLN 123: <ul style="list-style-type: none"> Twitter : @pln_123 Facebook Fanpage : PLN 123 Instagram : @pln123_official Telepon : 123 Handphone : (kode area / area code) 123 e-mail : pln123@pln.co.id • Informasi Korporat : / Corporate Information: <ul style="list-style-type: none"> Twitter : @_pln_id Facebook Fanpage : PLN Instagram : @pln_id Youtube : PLN

TRANSFORMASI BUDAYA PERUSAHAAN PROGRAM BUDAYA

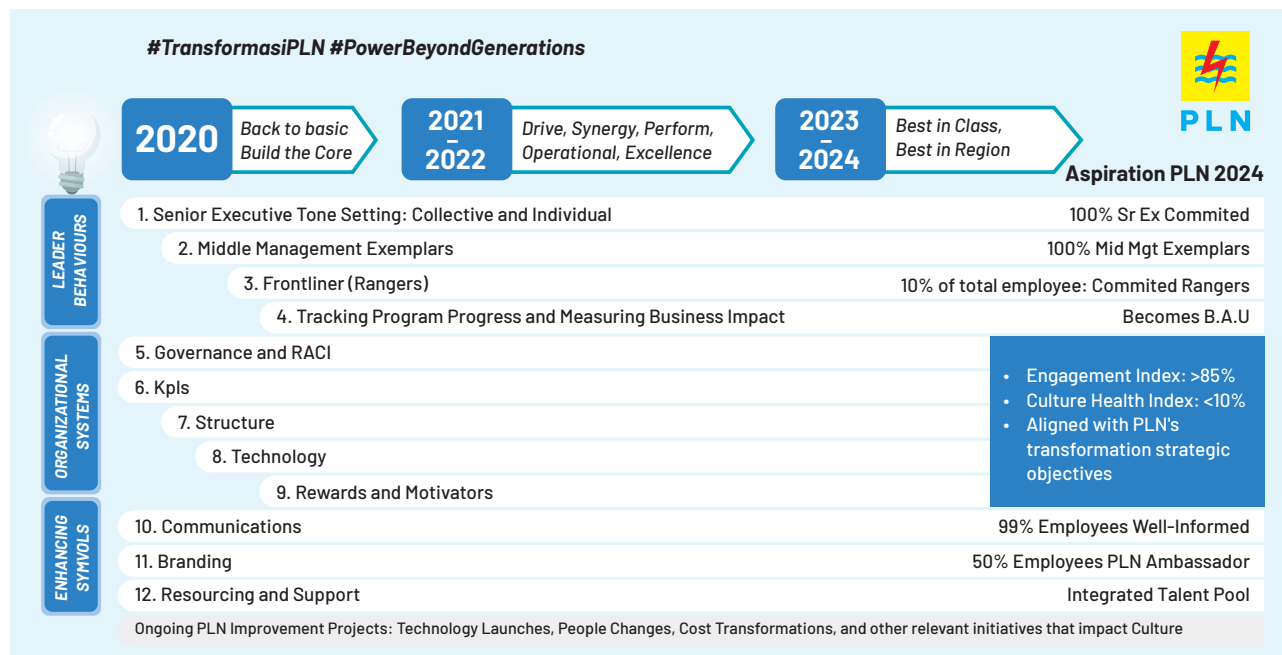
Berdasarkan Surat Direktur Utama nomor 00006/REN.08.01/DIRUT/2020 tentang Penguatan Budaya Transformasi PLN dan Peraturan Direksi Nomor 0073.P/DIR/2020 tentang Budaya Perusahaan PLN, PLN mencanangkan agenda penguatan budaya yang dibangun di atas tiga kerangka kerja: 1) Perilaku Pemimpin; 2) Organisasi dan Sistem; dan 3) Meningkatkan simbol. Untuk menyukseskan Transformasi Budaya tersebut, telah disusun *road map* 2020 hingga 2024 dan diimplementasikan baik di tingkat korporasi maupun unit kerja.

TRANSFORMATION OF CORPORATE CULTURE CULTURAL PROGRAM

Based on the Letter of the President Director Letter No. 00006/REN.08.01/DIRUT/2020 on Strengthening PLN's Transformational Culture and Board of Directors Regulation No. 0073.P/DIR/2020 on PLN's Corporate Culture, PLN launched an agenda to strengthen culture built on three frameworks: 1) Leader Behavior; 2) Organization and System; and 3) Improving symbols. To make this Cultural Transformation a success, the 2020-2024 roadmap has been prepared and implemented at both the corporate and work unit levels.

Road Map Transformasi Budaya 2020 - 2024

Cultural Transformation Road Map 2020 - 2024



Dalam mewujudkan transformasi budaya tersebut, PLN telah menetapkan inisiatif dan *timeline* untuk memastikan implementasi program dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam *road map*. Pada tahun 2022, telah dilakukan rangkaian penguatan budaya yang dilaksanakan dengan tema *Drive Synergy, Perform Operational Excellence*. *Pertama*, Pelatihan Ranger, Forum Kepemimpinan dan Forum Ranger dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Jaringan Ranger dalam melaksanakan implementasi. *Kedua*, Program *Coaching* dan Monitoring dengan metode *virtual site visit* yang dilakukan oleh Tim Budaya berkolaborasi dengan tim *coach site visit* untuk melihat perkembangan implementasi masing-masing Unit, Divisi dan Anak Perusahaan. *Coaching* dan monitoring ini dilakukan oleh tim budaya dalam dua putaran (*cycle*). Putaran pertama bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai AKHLAK melalui program budaya dan dampaknya terhadap perubahan perilaku dan kinerja, sedangkan putaran kedua difokuskan pada eksekusi untuk memantau konsistensi pelaksanaan program dan dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan perilaku dan kinerja. Setelah seluruh pelaksanaan dan evaluasi dari dua siklus pembinaan kunjungan lapangan, PLN menetapkan unit kerja implementasi budaya terbaik. *Ketiga*, pelaksanaan evaluasi penguatan budaya melalui kegiatan *callback* penguatan budaya dan *mystery shopping* yang dilakukan oleh pihak independen. Setelah itu dilaksanakan *Employee Engagement*

In realizing this cultural transformation, PLN has established initiatives and a timeline to ensure program implementation can proceed according to the plans set out in the road map. In 2022, a series of cultural reinforcements have been carried out with the theme *Drive Synergy, Perform Operational Excellence*. First, Ranger Training, Leadership Forum and Ranger Forum are conducted to increase the capacity and capability of the Ranger Network in carrying out implementation. Second, the Coaching and Monitoring Program with the virtual site visit method carried out by the Culture Team in collaboration with the coach site visit team to see the progress of the implementation of each Unit, Division and Subsidiary. Coaching and monitoring is carried out by the culture team in two cycles. The first round aims to develop understanding and internalization of AKHLAK values through the cultural program and its impact on behavior and performance change, while the second round focuses on execution to monitor the consistency of program implementation and the resulting impact on behavior and performance improvement. After all implementation and evaluation of the two cycles of field visit coaching, PLN determines the best cultural implementation work unit. Third, the evaluation of cultural strengthening through cultural strengthening callback activities and mystery shopping conducted by an independent party. After that, an Employee Engagement Survey and a Culture Health Survey were carried out to find out the impact of implementing a



Survey dan *Culture Health Survey* untuk mengetahui dampak implementasi program penguatan budaya. Selanjutnya, Festival Budaya diselenggarakan sebagai sarana *sharing* implementasi dan pemberian penghargaan.

Program budaya disusun berdasarkan *roadmap* dan objektif budaya PLN Group. Jika tahun 2020-2021 (*milestone 1*), tema budaya adalah "*Back to basic, build the core*", maka tema pada tahun 2021-2022 (*milestone 2*) adalah "*Drive synergy, perform operational excellence*". Tema meneruskan upaya untuk mencapai 3 objektif budaya PLN Group, yaitu:

1. *Governance, risk and compliance culture*;
2. *Collaboration and performance culture*; dan
3. *Service culture*.

culture strengthening program. Furthermore, the Cultural Festival was held as a means of sharing implementation and awarding.

The cultural program is prepared based on the PLN Group cultural roadmap and objectives. If in 2020-2021 (*milestone 1*), the cultural theme is "Back to basic, build the core", then the theme for 2021-2022 (*milestone 2*) is "Drive synergy, perform operational excellence". The theme is continuing efforts to achieve the 3 PLN Group cultural objectives, namely:

1. *Governance, risk and compliance culture*;
2. *Collaboration and performance culture*; dan
3. *Service culture*.



Aspiration PLN 2024

Green – Unggul dalam transisi energi di Indonesia melalui pengembangan EBT secara cepat dengan skala yang efisien / *Leading the energy transition in Indonesia through the development of NRE quickly with efficient scale*

- **Innovative** – Menstimulasi pertumbuhan melalui model bisnis dan jasa yang inovatif / *Stimulating growth through innovative business models and services*
- **Consumer Focused** – Melayani pelanggan dengan kualitas dan layanan kelas dunia / *Serving customers with world-class quality and service*
- **Lean** – Penyedia listrik untuk rumah tangga, bisnis, dan industri yang *lean*, andal, dan biaya termurah / *Provider for household, business and industrial electricity at lean, reliable and cheapest cost*

GRC Culture

PLN 1 :
Satu Informasi setiap hari / One Information every day

Collaboration & Performance Culture

PLN 2 :
Dua Capaian setiap minggu / Two Achievements every week

Service Culture

PLN 3 :
Tiga Perbaikan setiap bulan / Three Fixes each month

Program Budaya :
Drive synergy, perform operational excellence

AKHLAK

6 Core Values dan 18 Panduan Perilaku

Masing-masing objektif diturunkan dalam bentuk program PLN 1 untuk menjawab GRC Culture, PLN 2 untuk menjawab *collaboration & performance culture* dan PLN 3 untuk menjawab *Service Culture*. Sedangkan untuk memastikan pencapaian budaya tersebut, maka ditetapkan 5 *critical few behavior* dari AKHLAK yang melekat ke dalam semua program, yaitu:

1. Memenuhi janji dan Komitmen (*value Amanah*);
2. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama ;
3. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi (*value Adaptif*);
4. Bertindak proaktif (*value Adaptif*); dan
5. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik (*value Kompeten*)

Setelah *enforcement* dalam bentuk Peraturan Direksi, *Roadmap*, *Critical Few Behavior* AKHLAK, Program budaya PLN 1, 2, dan 3 ditetapkan oleh Direksi untuk menjawab tantangan Budaya PLN Group, selanjutnya seluruh Divisi, Unit dan Anak Perusahaan (melibatkan *ranger network* dan PLNers) menyusun Program PLN 1, 2, dan 3 untuk segera dieksekusi sesuai objektif budaya dan kinerja berdasarkan panduan penyusunan program budaya. Program budaya yang disusun harus menyenangkan, memberikan dampak pada perubahan perilaku dan budaya, serta melibatkan banyak PLNers.

Hasil *Site Visit* implementasi Penguatan budaya pada putaran ke-2 yang dilakukan pada 114 unit kerja menunjukkan bahwa 96% unit kerja telah mencapai kategori *outstanding* yang menunjukkan bahwa penguatan budaya sudah konsisten dilaksanakan.

HASIL COACHING PENGUATAN IMPLEMENTASI BUDAYA CYCLE 2

Kategori Unit Kerja Kantor Pusat, Unit Induk, Anak Perusahaan dan Total

Unit Kerja / Work Unit	Below	Meet	Exceed	Outstanding	Jumlah / Total
Kantor Pusat / Head Office	0	0	2	53	55
Unit Induk / Main Unit	0	0	0	48	48
Anak Perusahaan / Subsidiaries	0	1	1	9	11
Total	0	1	3	110	114

Each objective is derived in the form of PLN 1 program to answer GRC Culture, PLN 2 to answer Collaboration & performance culture and PLN 3 to answer Service Culture. Meanwhile, to ensure the achievement of this culture, 5 critical few behaviors from AKHLAK are determined which are inherent in all programs, namely:

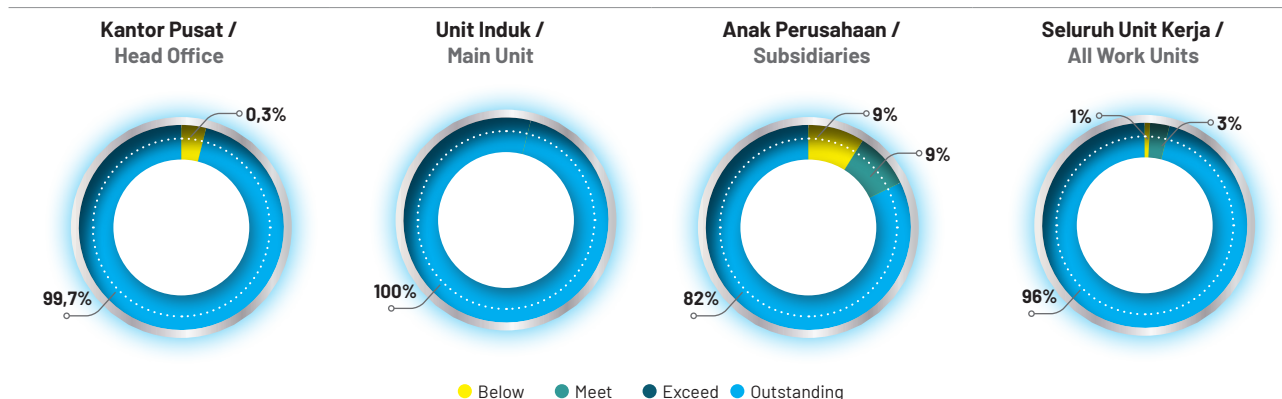
1. Fulfilling promises and commitments (*value Amanah*);
2. Mobilizing the use of various resources for common goals (*collaborative value*);
3. Keep following the improvements of technological developments (*Adaptive value*);
4. Acting proactively (*Adaptive value*); and
5. Completing tasks with the best quality (*competent value*).

After the enforcement in the form of Board of Directors Regulations, Roadmaps, Critical Few Behaviors AKHLAK, PLN 1, 2, and 3 cultural programs are determined by the Board of Directors to answer the challenges of the PLN Group Culture, then all Divisions, Units and Subsidiaries (involving ranger networks and PLNers) develop a program PLN 1, 2, and 3 to be executed immediately according to cultural and performance objectives based on the guidelines for preparing cultural programs. The cultural program that is prepared must be fun, have an impact on changing behavior and culture, and involve many PLNers.

The results of the Site Visit of the implementation of cultural strengthening in the 2nd round which was carried out in 114 work units showed that 96% of work units had reached the outstanding category which showed that cultural strengthening had been consistently carried out.

RESULTS OF COACHING ON STRENGTHENING CYCLE 2 CULTURE IMPLEMENTATION

Head Office Work Unit, Main Unit, Subsidiaries, and Total Categories



Hasil Penguatan Budaya Putaran ke-2 Tahun 2022

Results of the 2nd Round of Cultural Strengthening in 2022

Hasil Pelaksanaan *Callback* Penguatan Budaya yang dilakukan dengan metode *random sampling* terhadap 5 responden per masing-masing unit kerja menunjukkan bahwa hasil secara keseluruhan PLN Group adalah sebagai berikut:

The results of the Implementation of the *Callback* for Strengthening Culture carried out using the random sampling method for 5 respondents per each work unit show that the overall results of the PLN Group are as follows:

- a. Hasil Total skor (pengetahuan dan Implementasi) *callback* penguatan budaya pada putaran ke-2 menunjukkan nilai 81 dengan kategori *outstanding*; dan
- b. Hasil *Response Rate* (respon pegawai dalam menjawab telepon dari pihak independen) *callback* penguatan budaya pada putaran ke-2 menunjukkan nilai 81 dengan kategori Responsif.

- a. Results of the total score (knowledge and implementation) of the cultural strengthening *callback* in the 2nd round shows a value of 81 in the outstanding category; and
- b. Results of the *Response Rate* (employee response in answering the phone from an independent party) *callback* for strengthening culture in the 2nd round show a value of 81 in the Responsive category.

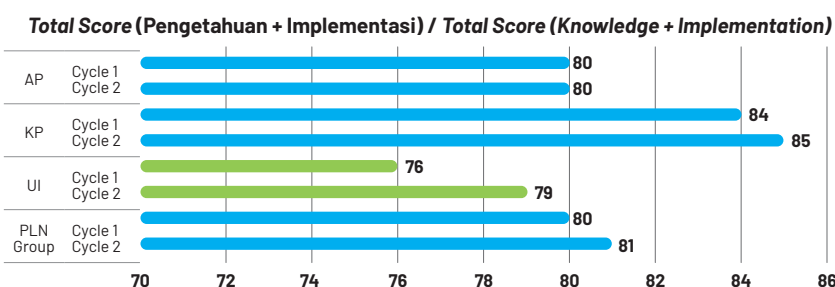
HASIL CALLBACK PENGUATAN IMPLEMENTASI BUDAYA CYCLE 1 & 2

RESULTS OF CALLBACK ON STRENGTHENING CULTURE IMPLEMENTATION CYCLE 1 & 2

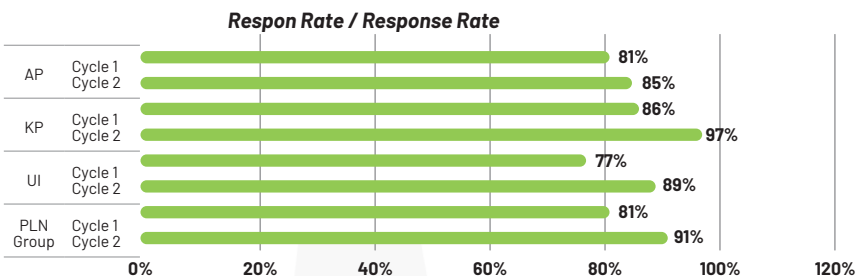
Hasil Rata-Rata Seluruh Unit Kerja dan Perbandingannya

Average Results of All Work Units and Their Comparison

Total Score (Pengetahuan + Implementasi) / Total Score (Knowledge + Implementation)	
Rating	Total Score
Outstanding	81-100
Exceed	61-80
Meet	41-60
Below	21-40
Unsatisfactory	0-20



Respon Rate / Response Rate		
Rating	Respon Rate (%) / Response Rate (%)	Score Tambahan
Sangat Responsif / Highly Responsive	100	5
Responsif / Responsive	83	3
Cukup Responsif / Fairly Responsive	71	2
Kurang Responsif / Less Responsive	<71	0



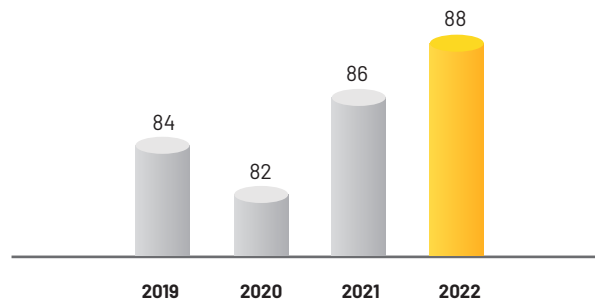
Hasil *Callback* Penguatan Budaya Putaran ke-2 Tahun 2022

Results of the 2nd Round of 2022 Cultural Strengthening Callback

Hasil Survey Kepuasan Karyawan

Hasil Pengukuran *Employee Engagement Survey* (EES) juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan *Employee Engagement Indeks* (EEI) dari 86 menjadi 88 dengan tren sebagai berikut:

Trend EEI Tahun 2019 - 2022



Results of the Employee Satisfaction Survey

The *Employee Engagement Survey* (EES) results also indicate an increase in the *Employee Engagement Index* (EEI) from 86 to 88 with the following trends:

EEI Trends in 2019 - 2022

TINDAKAN SIMBOLIK LEADER (BOD & BOD-1) SEBAGAI WUJUD LEADER AS ROLE MODEL

Seluruh BOD dan BOD-1 diharapkan menerapkan tindakan simbolik secara konsisten, baik kolektif maupun individu, sebagai wujud komitmen *Setting Tone from the Top*. Akan dilakukan pengukuran baik dalam bentuk *survey* maupun *callback* untuk melihat konsistensi tersebut dan dilaporkan ke Direktur Utama. Tindakan simbolik juga merupakan komitmen dalam mendorong munculnya *critical few behaviors* dalam lingkup unit kerja senior leader. Menindaklanjuti evaluasi tindakan simbolik leader yang diimplementasikan pada *milestone 1*, maka pada agenda implementasi program budaya *milestone 2* aksi tetap dilanjutkan dengan beberapa penguatan.

SYMBOLIC ACTIONS OF LEADERS (BOD & BOD-1) TO REALIZE LEADERS AS ROLE MODELS

All BOD and BOD-1 are expected to consistently implement symbolic actions, both collectively and individually, as a form of commitment to *Setting Tone from the Top*. Measurements will be carried out in the form of surveys and callbacks to see the consistency and reported to the President Director. The symbolic action is also a commitment to encourage the emergence of *critical few behaviors* within the senior leader's work unit. Following up on the evaluation of the leader's symbolic actions implemented at *milestone 1*, the agenda for implementing the cultural program *milestone 2* will continue with several reinforcements.



Tindakan simbolis Pimpinan akan memberikan dampak kuat dalam perubahan perilaku hal-hal yang perlu menjadi prioritas / The symbolic action of Leaders will give a strong impact on behaviors or other matters that need to be prioritized

Tindakan Simbolik Perusahaan / Corporate Symbolic Action

**Kolektif /
Collective**

- a. Selalu mengajak PLNer terlibat dalam mensukseskan Transformasi PLN fokus 4 Aspirasi: **Green, Innovative, Customer Focused dan Lean** / Always invite PLNers to be involved in the success of the PLN Transformation focusing on 4 Aspirations: **Green, Innovative, Customer Focused, and Lean**
- b. Selalu mendorong penerapan *value* AKHLAK, utamanya dalam membangun **GRC Culture, Collaboration & Performance Culture dan Service Culture** / Always encourage the implementation of AKHLAK values, especially in establishing **GRC Culture, Collaboration & Performance Culture and Service Culture**
- c. Menyampaikan secara jelas keempat pesan penting Manajemen: **Pentingnya menjaga keandalan listrik, meningkatkan revenue, menurunkan cost dan meningkatkan pelayanan** / Clearly deliver the four important messages of Management: **The importance of maintaining electricity reliability, increasing revenue, reducing costs, and improving services**

**Individu /
Individual**

- a. Selalu aktif **menciptakan suasana kerja kondusif/mendukung** melalui komunikasi terbuka, kegiatan kebersamaan dan pendekatan personal / Always **actively create a conducive/supportive work atmosphere** through open communication, togetherness activities, and a personal approach
- b. Selalu aktif memberi **apresiasi** sekecil apa pun pencapaian staf / Always actively give **appreciation**, no matter how small the staff's achievements
- c. Aktif dan terbuka dalam memberikan dan menerima **feedback** untuk perbaikan diri / Active and open in giving and receiving **feedback** for self-improvement

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

PLN memiliki Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis yang terakhir diperbarui dan disepakati bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris pada Desember 2021.

Buku Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis ini bertujuan untuk mendorong agar segenap anggota perusahaan konsisten dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, serta menumbuhkembangkan kebiasaan dan tata pergaulan profesional yang baik, yang sekaligus mencerminkan jati diri PLN yang dapat dibanggakan bersama agar tetap selaras dengan visi, misi dan tata nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Berikut ini adalah aspek-aspek yang termuat dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PLN:

CODE OF CONDUCT

PLN has a Code of Conduct which was last updated and mutually agreed upon by the Board of Directors and Board of Commissioners in December 2021.

This Guidebook of Code of Conduct aims to encourage all members of the Company to be consistent in implementing good corporate governance, as well as to cultivate good professional habits and social relations, which at the same time reflect PLN's identity which we can be proud of together so that we remain aligned with the vision, mission, and the AKHLAK values (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative).

Aspects contained in the PLN Business Code of Conduct are as follows:

Pokok-Pokok Standar Etika / Principles of Ethical Standards

01

Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris / Commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners

09

Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan / Statement of Vision, Mission, and Corporate Values

02

Konflik Kepentingan / Conflict of Interest

10

Gratifikasi / Gratuity

03

Komitmen, Kepedulian dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan / Commitment, Concern, and Participation in the Management of Occupational Health and Safety, Security and Environment

04

Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi / Equal Opportunity to Get Jobs and Promotions

11

Integritas Laporan Keuangan / Financial Report Integrity

05

Perlindungan Informasi Perusahaan dan Intangible Asset / Protection of Company Information and Intangible Assets

12

Perlindungan Harta Perusahaan / Protection of Company Assets

06

Whistle Blowing System / Whistle Blowing System

13

Etika Terkait dengan Stakeholder / Ethics Related to Stakeholders

07

Kegiatan Sosial dan Politik / Social and Political Activities

14

Pelanggaran dan Sanksi / Violations and Sanctions

08

Mekanisme Penegakan Pedoman Perilaku Termasuk Pelaporan Atas Pelanggaran / Mechanism for Enforcement of the Code of Conduct Including Reporting of Violations

PEMBERLAKUAN STANDAR ETIKA DI SELURUH LEVEL ORGANISASI DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh:

1. Seluruh insan PLN di segala tingkatan termasuk Dewan Komisaris, Direksi dan organ pendukung Dewan Komisaris;
2. Direksi, Dewan Komisaris serta pegawai anak perusahaan dan afiliasi di bawah pengendalian;
3. Investor Perusahaan (kreditur, pemegang obligasi, dan lain-lain); dan
4. Para pemangku kepentingan Perusahaan seperti pelanggan, mitra kerja/pemasok, pesaing, investor, Pemerintah/DPR, masyarakat, media, organisasi, profesi/ institusi pendidikan, penegak hukum.

ENFORCEMENT OF CODE OF CONDUCT TO ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION AND STAKEHOLDERS

The Company's Code of Conduct and Business Ethics must be observed and implemented by:

1. All PLN personnel at all levels including Board of Commissioners, Board of Directors and supporting organs of Board of Commissioners;
2. Board of Directors, Board of Commissioners and employees of subsidiaries and affiliates under control;
3. Corporate Investors (creditors, bondholders and so forth); and
4. The Company's stakeholders such as customers, business partners/ suppliers, competitors, investors, the Government/ Parliament, public, media, organizations, professional/ educational institutions, law enforcement.



PENYEBARLUASAN STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

PLN senantiasa melakukan sosialisasi Standar Etika Perusahaan guna memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran seluruh insan PLN agar senantiasa menegakkan Standar Etika Perusahaan. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung ke unit bisnis maupun melalui situs web PLN yang dikenal dengan *website* KOMANDO (<https://budaya.pln.co.id/>) di sepanjang tahun 2022.

Seluruh insan PLN wajib menandatangani komitmen mematuhi Standar Etika Perusahaan. Penandatanganan komitmen dilakukan setiap tahun secara daring melalui portal internal PLN sehingga lebih efisien waktu dan biaya serta lebih mudah untuk didokumentasikan. Persentase penandatanganan komitmen Standar Etika Perusahaan mencapai 91.17% dari seluruh pegawai Perusahaan pada tahun 2022.

SANKSI PELANGGARAN STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

Perseroan menerapkan pemberian sanksi bagi pelanggaran Standar Etika Perusahaan sebagai berikut:

1. Mitra kerja PLN: sanksi sesuai dengan peraturan dan keputusan Perusahaan;
2. Insan PLN: tindakan-tindakan disipliner berupa teguran lisan maupun tulisan, peringatan keras dengan skorsing sampai pemutusan hubungan kerja;
3. Apabila mengakibatkan pelanggaran hukum, permasalahan dapat diproses lebih lanjut kepada pihak yang berwajib.

Sanksi atas pelanggaran telah diberikan dengan mengacu pada ketentuan internal Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

JUMLAH PELANGGARAN STANDAR ETIKA DAN SANKSI PELANGGARAN TAHUN 2022

PLN telah mengambil tindakan tegas berupa penjatuhan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku demi penegakkan disiplin pegawai di lingkungan PLN.

DISSEMINATION OF CODE OF CONDUCT

PLN consistently disseminates the Company's Code of Conduct to build the understanding and awareness of all PLN personnel to uphold the Company's Code of Conduct. Throughout 2022, dissemination was carried out both directly to the business units and through PLN website known as KOMANDO website (<https://budaya.pln.co.id/>).

All PLN personnel are obligated to sign a commitment to complying with the Company's Code of Conduct. The commitment is signed every year online through PLN's internal portal so that it is more time and cost efficient and easier to document. In 2022, 91.17% of all employees have signed the Company's Code of Conduct commitment.

SANCTION FOR VIOLATION OF CODE OF CONDUCT

PLN imposes sanctions for violation of Code of Conduct as follows:

1. PLN partners: sanctions in accordance with the Company's regulations and decisions;
2. PLN personnel: disciplinary actions in the form of oral and written reprimands, severe warning with suspension or employment termination;
3. In case of violation of laws, the issue may be further processed by the authorities.

Sanctions for violation have been imposed based on the Company's internal provisions and Collective Labor Agreement (CLA).

NUMBER OF CODE OF CONDUCT VIOLATIONS AND SANCTIONS IN 2022

PLN takes strict action by imposing disciplinary sanctions in accordance with the applicable Employee Discipline Regulation to enforce employee discipline within PLN environment

Pelanggaran Standar Etika dan Sanksi Pelanggaran
Violations against the Code of Conduct and the Sanctions

No	Jenis Pelanggaran / Type of Violation	Sanksi sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) / Sanctions Based on Collective Labor Agreement (PKB)	Jumlah Kasus / Total Cases
1	Asusila atau Narkotika / Immorality or Narcotics	Sanksi Disiplin Berat / Severe Disciplinary Sanction	2
2	Barang Milik Perseroan / Company Property	Sanksi Disiplin Sedang, Berat / Moderate, Severe Disciplinary Sanction	7
3	Citra Perseroan / Company Image	Sanksi Disiplin Sedang / Moderate Disciplinary Sanction	17
4	Gratifikasi atau Pemerasan / Gratuity or Extortion	Sanksi Disiplin Sedang / Moderate Disciplinary Sanction	14
5	Mangkir / Absence	Sanksi Disiplin Ringan, Sedang, Berat / Light, Moderate, Severe Disciplinary Sanction	53
6	Menolak Mutasi / Refusal of Transfer	Sanksi Disiplin Sedang / Moderate Disciplinary Sanction	5
7	Pemalsuan data/dokumen / Data/document forgery	Sanksi Disiplin Berat / Severe Disciplinary Sanction	0
8	Pengadaan Barang dan Jasa / Procurement of Goods and Services	Sanksi Disiplin Sedang / Moderate Disciplinary Sanction	0
9	SPPD	Sanksi Disiplin Sedang / Moderate Disciplinary Sanction	7
10	Tugas Kedinasan / Service Duties	Sanksi Disiplin Sedang, Berat / Moderate, Severe Disciplinary Sanction	25

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perseroan memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa yang merujuk pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.0022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0156.P/DIR/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0022.P/DIR/2020. Pedoman pengadaan barang dan jasa tersebut antara lain mengatur mengenai:

- Ketentuan umum;
- Perencanaan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya;
- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya;
- Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi;
- Pengadaan khusus;
- Perjanjian/kontrak;
- Pengadaan barang/jasa melalui media elektronik PLN (*e-Procurement* PLN); dan
- Pengendalian dan Pengawasan.

PLN melakukan sosialisasi melalui pertemuan dengan pemasok terkait penggunaan Sistem *e-Procurement* (*e-Proc*) PLN dan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di Perusahaan pada saat kegiatan penjelasan pengadaan. Dalam berbagai kesempatan, Perusahaan juga melakukan sosialisasi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0076.P/

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Procurement of goods and service in the Company refers to the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No.0022.P/DIR/2020 on Guidelines for the Procurement of Goods/Services of PT PLN (Persero) and the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No.0156.P/DIR/2021 on Amendments to the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No.0022.P/DIR/2020. The guidelines for the procurement of goods and services regulate on:

- General provisions;
- Procurement planning for goods/construction services/ other services;
- Procurement of goods/construction services/other services;
- Planning and procurement of consulting services;
- Special procurement;
- Agreements/contracts;
- Procurement of goods/services through PLN's electronic media (*e-Procurement* PLN); and
- Control and Supervision.

PLN conducts meetings with suppliers to disseminate the use of PLN's *e-Procurement* (*e-Proc*) System and Regulations on Procurement for Goods and Services applicable at the Company. On various occasions, the Company also disseminates Regulation of the Board of Directors No. 0076.P/DIR/2017 on Guidelines for Gratuity Control to suppliers to



DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada pemasok untuk menegaskan bahwa seluruh Insan PLN berkomitmen untuk tidak menerima hadiah atau imbalan dari pihak manapun termasuk dari pemasok.

Sehubungan dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dan pelaksanaan Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0013.E/DIR/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Integrity Due Diligence* (IDD), PLN mewajibkan setiap mitra kerja untuk mengisi kuesioner *Integrity Due Diligence* (IDD), melampirkan dokumen pendukung, dan menyampaikannya kepada PLN (secara manual atau elektronik). PLN meminta mitra kerja menandatangani Pakta Integritas (*offline* atau *online*) sebagai bukti dukungan terhadap penerapan SMAP di lingkungan Perusahaan.

Adapun sasaran Pengadaan di PLN harus memenuhi 6 kriteria sebagai berikut:

1. Tepat Mutu (*Quality*);
2. Tepat Jumlah (*Quantity*);
3. Tepat Lokasi;
4. Tepat Waktu;
5. Tepat Tujuan Sosial Ekonomi;
6. Tepat Harga

ETIKA PENGADAAN

Perseroan menerapkan etika pengadaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
3. Tidak saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;

affirm that all PLN Personnel are committed not to receive any gifts or rewards from any parties, including suppliers.

With regard to the implementation of the SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) and Circular Letter of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0013.E/DIR/2020 concerning Guidelines for Implementation of Integrity Due Diligence (IDD), PLN requires each business partner to fill out an IDD questionnaire, attach supporting documents, and submit it to PLN (manually or electronically) in the implementation of SNI ISO 37001:2016 SMAP and the implementation of EDIR No. 0013.E/DIR/2020 regarding Guidelines for Implementation of Integrity Due Diligence (IDD). PLN requests business partners to sign an Integrity Pact (*offline* or *online*) as an evident support for SMAP implementation in the Company.

PLN's Procurement target must meet these 6 criteria, as follows:

1. Appropriate Quality;
2. Appropriate Quantity (Quantity);
3. Appropriate Location;
4. Punctual;
5. Appropriate Socio-Economic Goals;
6. Appropriate Price

PROCUREMENT ETHICS

The Company implements ethics in the procurement process as follows:

1. Carry out tasks in an orderly manner, accompanied by a sense of responsibility to achieve the smoothness and accuracy of achieving the objectives of the procurement of goods/services;
2. Work professionally, independently, and maintain the confidentiality of information which by its nature must be kept confidential to prevent irregularities in the procurement of goods and services;
3. Do not influence each other directly or indirectly to prevent and avoid unfair competition;
4. Accept and be responsible for all decisions made in accordance with the agreement of the parties;

5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) para pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa, baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan kepentingan pengguna barang/jasa;
 6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan dalam pengadaan barang/jasa;
 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan; dan
 8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
5. Avoid and prevent the occurrence of conflicts of interest (*conflict of interest*) of the parties involved in the process of procurement of goods/services, either directly or indirectly, which is detrimental to the interests of the users of the goods/services;
 6. Avoid and prevent the occurrence of waste and leakage of company finances in the procurement of goods/services;
 7. Avoid and prevent abuse of authority and/or collusion with the aim of personal gain, group or other parties that directly or indirectly harm the company; and
 8. Not accepting, not offering or not promising to give or receive gifts, rewards of any kind to anyone who is known or reasonably suspected to be related to the procurement of goods/services.

PRINSIP DASAR PENGADAAN

Prinsip dasar pengadaan Perseroan dapat dilihat melalui ilustrasi berikut

BASIC PRINCIPLES OF PROCUREMENT

Basic principles of procurement in the Company are illustrated as follows:



KRITERIA DAN PROSES SELEKSI PEMASOK

Perseroan menyediakan informasi terkait kriteria dan seleksi pemasok secara terperinci yang dimuat dalam situs web Perusahaan pada menu *eproc website pln.co.id* yang dapat dengan mudah diakses oleh publik. Bagi masyarakat umum yang ingin menjadi rekanan Perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa dapat mendaftar melalui *eproc.pln.co.id*. Panduan untuk menjadi mitra kerja Perusahaan dapat diperoleh dengan mengunduh *Terms of Condition* Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) secara elektronik yang terdapat pada menu *e-Procurement*.

SUPPLIER CRITERIA AND SELECTION PROCESS

The Company provides detailed information on supplier criteria and selection process on the Company's website, which is easily accessible by the public. The general public who wishes to become PLN's goods and services supplier can register at *eproc.pln.co.id*. Guidance for supplier registration can be obtained by downloading the electronic document of Terms and Conditions of Goods/Services Procurement Procedures of PT PLN (Persero) in e-Procurement menu.



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Perseroan telah mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) sebagai salah satu cara untuk mencegah dan memerangi praktik korupsi, suap, dan praktik-praktik kecurangan lainnya yang bertentangan dengan kaidah GCG.

PEDOMAN WHISTLEBLOWING

Perseroan telah memberlakukan Pengelolaan Sistem Pengaduan Pelanggaran di PT PLN Persero melalui Peraturan Direksi No. 010.P/DIR/2022 tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PLN (Persero) yang disahkan pada tanggal 02 Maret 2022. Perdir ini mengatur pembagian tugas dan peran antara Sub Direktorat Hukum Kebijakan dan Kepatuhan, Satuan Pengawasan Intern, dan Divisi Pelayanan *Human Capital* dalam pengelolaan pengaduan dan sekaligus menggantikan EDIR 008.E/DIR/2016 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Ruang lingkup Perdir ini sudah meliputi seluruh Pegawai Perusahaan, termasuk Pegawai yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan perusahaan terafiliasi, pegawai Anak Perusahaan serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.

MEDIA WHISTLEBLOWING SYSTEM

Media Pengaduan dugaan *Fraud*/Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT PLN (Persero):

1. Website: cos.pln.co.id;
2. Telepon, *Short Message Service* (SMS) atau *Whatsapp* ke nomor resmi Pengaduan Pelanggaran: 08119861901;
3. *Email*: wbpln@pln.co.id; dan/atau
4. Surat: Ditujukan kepada *Executive Vice President* Kepatuhan PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jalan Trunojoyo Blok M – I No. 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160.

Komunikasi lebih lanjut atas laporan yang disampaikan akan dilakukan oleh Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) PT PLN (Persero).

WHISTLEBLOWING SYSTEM

PLN implements a whistleblowing system as the most effective method to prevent and eradicate corruption, bribery and other fraudulent practices, which are contrary to GCG principles.

WHISTLEBLOWING GUIDELINES

The Company has implemented a Whistleblowing System at PT PLN Persero through the Board of Directors Regulation No. 010.P/DIR/2022 concerning the Whistleblowing System within PT PLN (Persero), which was ratified on March 2, 2022. This regulation stipulates the division of tasks and roles between the Sub Directorate of Law, Policy and Compliance, the Internal Audit Unit, and Human Capital Service Division in managing complaints and at the same time replacing EDIR 008.E/DIR/2016 concerning the Whistleblowing System. The scope of this regulation includes all employees of the Company, including employees assigned to Subsidiaries and affiliated companies, employees of Subsidiaries and other personnel who work directly for and on behalf of the Company.

Whistleblowing System Channels

Whistleblowing Channels for Alleged Fraud/Violations (*Whistleblowing System*) PT PLN (Persero):

1. Website: cos.pln.co.id;
2. Telephone, Short Message Service (SMS) or Whatsapp to official number for Whistleblowing: 08119861901;
3. *Email*: wbpln@pln.co.id; and/or
4. Letter: Addressed to the *Executive Vice President* of Compliance at PT PLN (Persero) Head Office Jalan Trunojoyo Blok M – I No. 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160.

Further communication on the reports submitted will be carried out by the PT PLN (Persero) Whistleblowing System (WBS) Manager.

PIHAK PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM

Berdasarkan Peraturan Direksi No. 010.P/DIR/2022 tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PLN (Persero), pengelola WBS adalah Divisi Kepatuhan. Setelah menerima pengaduan melalui beberapa media pengaduan (website, telepon/WA/SMS, email dan surat) yang didokumentasikan ke media aplikasi WBS.

Divisi Kepatuhan akan melakukan telaah, analisis dan evaluasi terhadap informasi pengaduan tersebut jika pengaduan terkait dugaan *fraud*/pelanggaran akan diteruskan ke SPI untuk ditindaklanjuti dalam bentuk audit investigasi. Hasil investigasi SPI dilaporkan kepada Kepala SPI yang selanjutnya melaporkannya kepada Direktur Utama dan *Executive Vice President* Pelayanan *Human Capital* untuk dapat ditindaklanjuti pelaksanaan Investigasi Pelanggaran Disiplin Pegawai.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Pelapor/*whistleblower* (internal maupun eksternal PLN) diwajibkan menyampaikan pengaduan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan disertai dokumen pendukung guna mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut atas pengaduan tersebut, dengan menyampaikan informasi pengaduan sebagai berikut:

- Dugaan *fraud*/pelanggaran yang dilaporkan disebutkan secara singkat dan jelas;
- Waktu dan tempat terjadinya dugaan *fraud*/pelanggaran;
- Pihak terlapor dan terlibat disebutkan dengan jelas nama dan unit kerjanya;
- Mengapa peristiwa dugaan *fraud*/pelanggaran terjadi;
- Kronologi kejadian diuraikan secara jelas dan lengkap; dan
- Dugaan kerugian/dampak atas peristiwa dugaan *fraud*/pelanggaran tersebut.

PENANGANAN PENGADUAN

Prosedur penyampaian *Whistleblowing System* PLN adalah sebagai berikut:

WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGER

Based on the Board of Directors Regulation No. 010.P/DIR/2022 on Whistleblowing System, the WBS within PT PLN (Persero) is managed by the Internal Audit Unit (SPI). Upon receipt of a whistleblowing report through several reporting media (website, telephone/WA/SMS, e-mail, and letter), documented by the WBS application media, the Compliance

Division will review, analyze, and evaluate the report. If the report is related to alleged fraud/violation, it will be forwarded to SPI to be followed up through an investigative audit. The results of the SPI investigation are reported to the Head of SPI who will forward them to the Main Director and Executive Vice President of Human Capital Services to be followed up through the implementation of Employee Discipline Violation Investigations.

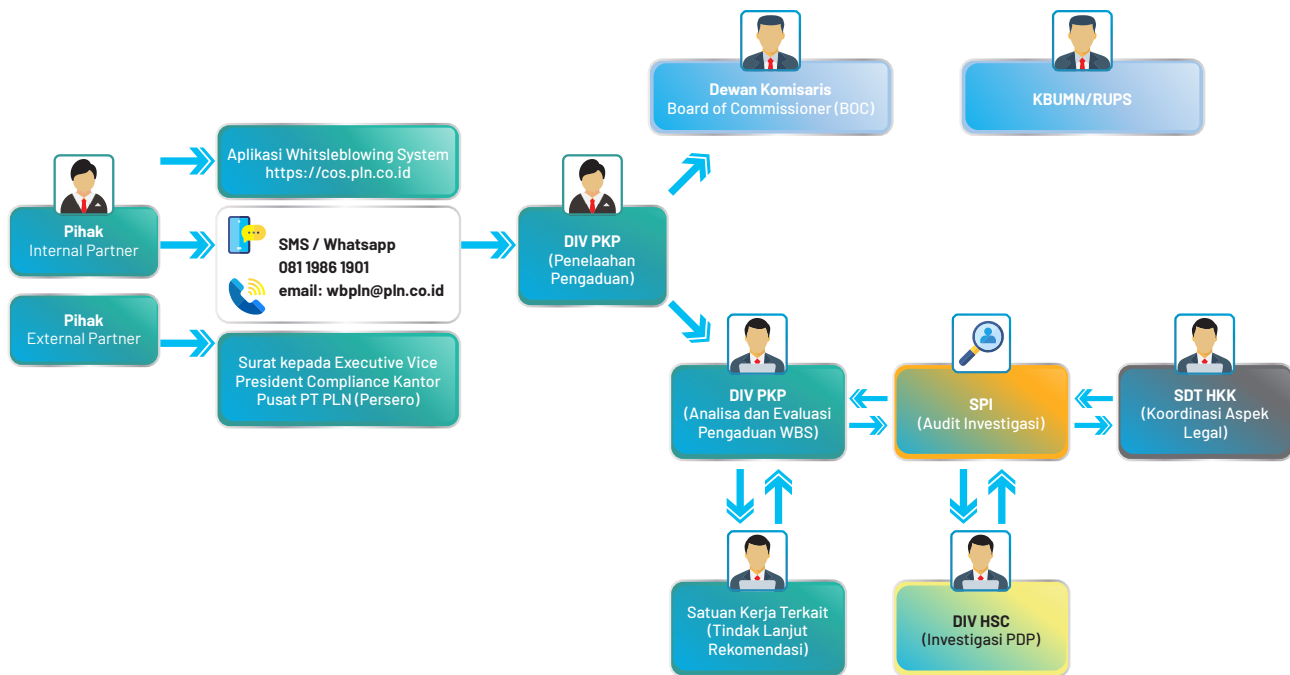
WHISTLEBLOWING REPORT SUBMISSION

The whistleblower (PLN internal or external party) is required to submit a clear and accountable report, by attaching supporting document to accelerate and facilitate the follow-up process on the report, by presenting reporting information as follows:

- Briefly and clearly stated alleged fraud/violations reported;
- Time and place of alleged fraud/violation;
- Clearly stated name and work unit of the reported party involved;
- Reason for the occurrence of alleged fraud/violation;
- Clearly and comprehensively described chronology of events; and
- Alleged loss/impact of the alleged fraud/violation.

Whistleblowing Handling

The reporting mechanism in the Whistleblowing System is as follows:



1. Divisi Kepatuhan menerima pengaduan melalui beberapa media pengaduan, untuk pengaduan diluar aplikasi didokumentasikan ke media aplikasi WBS;
2. Divisi Kepatuhan menganalisis kecukupan informasi pengaduan dan melakukan konfirmasi kepada Pelapor dengan jangka waktu jawaban konfirmasi selama 3 Hari Kerja;
3. Divisi Kepatuhan melakukan analisis informasi pengaduan dan mengevaluasi relevansi dan kecukupan informasi, jika
 - a. Pengaduan tidak cukup informasi/tidak relevan, pengaduan WBS akan diarsipkan pada aplikasi WBS;
 - b. Pengaduan bersifat operasional/kepegawaian akan diteruskan kepada Satuan kerja untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya;
 - c. Pengaduan terkait *Fraud*/Pelanggaran akan diteruskan ke SPI secara manual dan aplikasi untuk ditindaklanjuti;
4. SPI melakukan Pra-Audit Investigasi sekaligus membuat surat penugasan serta melakukan audit investigasi dan menentukan terbukti/tidak terbukti pengaduan dugaan *Fraud*/Pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Diberhentikan dan dinyatakan selesai apabila hasil audit atau hasil konfirmasi/keterangan/penjelasan menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak benar atau tidak terbukti;

1. The Compliance Division receives reports via several reporting channels. Reports made outside the application are documented to the WBS application channels;
2. The Compliance Division analyzes the adequacy of complaint information and confirms it to the Whistleblower with a confirmation response period of 3 Working Days;
3. The Compliance Division analyzes the complaint information and evaluates the relevance and adequacy of the information, in the case of:
 - a. Insufficient information on/irrelevant reports, the reports will be archived on the WBS application;
 - b. Reports related to operations/employees will be forwarded to the task force to be followed-up according to its authority;
 - c. Reports related to *Fraud*/violation will be forwarded to the SPI manually and application to be followed-up;
4. SPI conducts Investigative Pre-Audit as well as prepares assignment letters and conducts investigative audits and determines proven/unproven complaints of alleged *fraud*/violations as follows:
 - a. Dismissed and declared completed if the results of the audit or the results of confirmation/information/explanation state that the report is incorrect or not proven;

- b. Jika pengaduan terbukti SPI akan menyampaikan hasil audit investigasi kepada Direktur Utama, Direktur Legal dan Manajemen *Human Capital* dan Direktur pembina terkait untuk ditindaklanjuti Divisi Pelayanan *Human Capital* dalam bentuk investigasi Pelanggaran Disiplin Pegawai.
 5. Divisi Pelayanan *Human Capital* akan melakukan investigasi pelanggaran disiplin pegawai (PDP) sesuai kewenangannya dan menetapkan penjatuhan/pembebasan hukuman disiplin;
 6. Satuan Pengawasan Intern, Divisi Kepatuhan dan Divisi Pelayanan *Human Capital* melakukan rekonsiliasi data, dan Divisi Kepatuhan akan menyusun langkah pencegahan kepada satuan kerja terkait.
- b. If the complaint is proven, SPI will forward the results of the investigative audit to the President Director, Director of Legal and Human Capital Management and the relevant supervisory Director for follow-up by the Human Capital Services Division in the form of an investigation into Employee Discipline Violations.
 5. The Human Capital Services Division will investigate violations of employee discipline (PDP) according to its authority and determine the imposition/exemption of disciplinary sanction;
 6. The Internal Audit Unit, the Compliance Division and the Human Capital Services Division will adjust the data, and the Compliance Division will prepare preventive measures for the relevant work units.

KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR/SAKSI

Seluruh informasi, dokumen, dan proses dalam Peraturan ini bersifat rahasia dan digunakan secara terbatas untuk kepentingan internal Perusahaan serta semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan ini wajib merahasiakan dan tidak mengungkapkan setiap informasi, dokumen dan proses baik sebagian maupun seluruhnya kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, PLN menjamin kerahasiaan dan memberikan perlindungan kepada pengelola, penindaklanjut pengaduan termasuk kepada pelapor/*whistleblower* (internal/eksternal) yang dengan itikad baik menyampaikan pengaduan dugaan *fraud* dan/atau pelanggaran sebagai berikut:

1. Perlindungan Karier:
 - a. Pemutusan Hubungan Kerja;
 - b. Penurunan jabatan, penurunan *grade*, penurunan penilaian kinerja individu dan/atau pelaksanaan mutasi;
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; dan/atau
 - d. Catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya;
2. Perlindungan Hukum:
 - a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
 - b. Perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga dari ancaman fisik dan/atau mental;
 - c. Perlindungan terhadap harta; dan/atau
 - d. Kerahasiaan dan/atau penyamaran identitas.

CONFIDENTIALITY AND PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS/WITNESSES

All information, documents and processes in this Regulation are confidential and have limited uses for the Company's internal interests and all parties involved in the implementation of this Regulation must protect the confidentiality and not disclose any information, documents and processes either in part or in whole to anyone and in any form.

In accordance with applicable rules and regulations, PLN guarantees confidentiality and provides protection to managers, follow-up complaints, including whistleblowers (internal/external) who submit reports of suspected fraud and/or violations in good faith, as follows:

1. Career Protection:
 - a. Work Termination;
 - b. Demotion, reduction in grade, lower individual performance assessment score, and/or transfer;
 - c. Harassment or discrimination of any forms; and/or
 - d. Adverse records in their personal data file;
2. Legal Protection:
 - a. Protection from criminal and/or civil charges;
 - b. Protection for personal and/or family security from physical and/or mental threats;
 - c. Protection of assets; and/or
 - d. Confidentiality and/or disguise of identity.



SANKSI DAN TINDAK LANJUT TAHUN 2022

Selama tahun 2022, jumlah pengaduan WBS yang diterima PT PLN (Persero) tahun 2022 sebanyak 220 materi pengaduan dari 191 pelapor. Rekapitulasi pengaduan yang masuk pada media pengaduan (email, surat dan WhatsApp) sebanyak 220 materi pengaduan (100%) telah selesai dilakukan analisa dan evaluasi pengaduan, dengan pembagian pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 77 materi pengaduan (35%), terkait operasional/kepegawaian sebanyak 97 materi pengaduan (44%) serta yang masuk dalam kategori *Fraud* dan/atau Pelanggaran hanya sebanyak 46 (21%) dari total 220 Materi.

Pengaduan yang telah selesai dilaksanakan Audit Investigasi sebanyak 46 materi pengaduan (100%), dengan jumlah pengaduan yang terbukti sebanyak 31 materi pengaduan (67%) dan 15 materi pengaduan (33%) yang tidak terbukti.

Mayoritas pengaduan yang terbukti adalah terkait perilaku pegawai dengan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang/jabatan dan pelaksanaan pengadaan tidak sesuai ketentuan. Terhadap kasus-kasus yang terbukti SPI telah melaporkan kepada Direktur Utama, Direktur Legal dan Manajemen *Human Capital*, Direktur Pembina terkait dan Divisi Pelayanan *Human Capital* untuk diproses tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Setiap tahun, PLN menyelenggarakan sosialisasi WBS kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Perusahaan telah melakukan sosialisasi kepada seluruh Satuan Kerja, melalui tatap muka virtual, portal internal dan situs web Perusahaan termasuk melalui *Banner* yang dipasang pada tiap Satuan/Divisi/Unit Kerja. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem pelaporan pelanggaran PLN yang dikelola secara profesional.

Selain itu, sosialisasi Peraturan Direksi No. 0010.P/DIR/2022 tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di lingkungan PT PLN (Persero) juga dilaksanakan kepada seluruh Anak Perusahaan di Lingkungan PT PLN (Persero) yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Anak Perusahaan PLN Group.

SANCTIONS AND FOLLOW-UPS IN 2022

Throughout 2022, PT PLN (Persero) received of 220 WBS complaint materials from 191 whistleblowers. Based on the recapitulation of complaints received in the whistleblowing channels (email, letter and WhatsApp), 220 complaint materials (100%) has been analyzed and evaluated, with 77 complaint materials (35%) cannot be followed-up, 97 complaint materials (44%) related to operations/staffing, and only 46 (21%) fall into the category of Fraud and/or Violation of the total 220 Materials.

Complaints that have been completed by the Investigative Audit were 46 complaints (100%), with 31 complaints (67%) proven and 15 complaints (33%) unproven.

The majority of proven complaints are related to employee behavior with cases of alleged abuse of authority/position and implementation of procurement not in accordance with regulations. SPI has reported cases that have been proven to the President Director, Director of Legal and Human Capital Management, the relevant Director of Trustees and the Human Capital Services Division for follow-up processing in accordance with applicable regulations.

WHISTLEBLOWING SYSTEM DISSEMINATION

On an annual basis, PLN conducts WBS dissemination to the Company's internal and external stakeholders. The Company carried out dissemination to all Work Units, directly through internal portal and website, including through banners posted in each Unit/Division/Work Unit. The dissemination aims to provide an understanding of the professionally managed whistleblowing system of PLN.

In addition, dissemination of Directors Regulation No. 0010.P/DIR/2022 concerning the Whistleblowing System within PT PLN (Persero) was also implemented for all Subsidiaries within PT PLN (Persero) which was attended by representatives from all PLN Group Subsidiaries.

Kerja Sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PLN dengan KPK RI telah ditandatangani pada tanggal 2 Maret 2021 sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara KPK dan PT PLN (Persero) Nomor: 77 Tahun 2021 / Nomor: 0043.Pj/HKM.02.01/C01000000/2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun maksud dan tujuan WBS Terintegrasi adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam rangka membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

1. Penyusunan dan/atau penguatan aturan internal terkait penanganan pengaduan;
2. Komitmen pengelolaan penanganan pengaduan;
3. Penanganan pengaduan melalui aplikasi;
4. Koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan; dan
5. Pertukaran data dan/atau informasi.

Menindaklanjuti PKS tersebut, PLN dan KPK melakukan pembahasan atas rencana pembangunan WBS TPK terintegrasi tahun 2022 pada tanggal 16 Desember 2021. Rencana pembangunan yang disepakati terdiri dari kegiatan yang berdasar lima pilar pembangunan WBS yaitu komitmen pimpinan tertinggi, penyusunan/penguatan aturan internal, pembangunan budaya organisasi, aplikasi terkoneksi, dan *continuous improvement* (melalui monitoring dan evaluasi).

Rencana Aksi tersebut telah disahkan bersama antara PLN dengan KPK pada tanggal 23 Desember 2021 (Lampiran 1) serta telah disampaikan kepada PIC Satuan/Divisi terkait sesuai dengan ND EVP PKP Nomor : 4126/MRK.03.01/EVP PKP/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Monitor dan Evaluasi ke-1 serta Rencana Pembangunan WBS TPK Terintegrasi PLN-KPK Tahun 2022.

Cooperation with the Corruption Eradication Commission

The Cooperation Agreement (PKS) between PLN and KPK RI was signed on March 2, 2021 in accordance with the Cooperation Agreement between KPK and PT PLN (Persero) Number: 77 of 2021/ No. 0043.Pj/HKM.02.01/C01000000/2021 March 2, 2021 concerning Handling of Complaints to Eradicate Corruption. The intent and purpose of the Integrated WBS is to serve as a guideline for the implementation of cooperation in handling complaints to eradicate corruption and in the context of building and increasing the effectiveness and efficiency of complaint handling both internally and externally which are integrated in a professional, transparent, accountable manner by prioritizing confidentiality to optimize eradication of corruption.

The scope of this Cooperation Agreement is as follows:

1. Formulation and/or strengthening of internal rules related to the handling of complaints;
2. Commitment to complaint handling management;
3. Handling complaints through applications;
4. Coordination and joint activities for handling complaints; and
5. Exchange of data and/or information.

To follow-up on the agreement, PLN and the KPK held discussions on the integrated WBS TPK development plan for 2022 on December 16, 2021. The agreed development plan consisted of activities based on the five pillars of WBS development, namely commitment from the highest leadership, drafting/strengthening internal rules, building organizational culture, connected applications, and continuous improvement (through monitoring and evaluation).

The Action Plan has been ratified jointly by PLN and the KPK on December 23, 2021, (Appendix 1) and has been submitted to the PIC of the relevant Unit/Division in accordance with ND EVP PKP No. 4126/MRK.03.01/EVP PKP/2022 dated January 20, 2022 regarding Submission of the 1st Monitoring and Evaluation Results Report and the 2022 PLN-KPK Integrated WBS TPK Development Plan.



Pada tanggal 21 April 2022 dan 20 Desember 2022 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pertama dan kedua Rencana Aksi Pembangunan WBS Tipikor Terintegrasi PLN - KPK RI tahun 2022 yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, Satuan Pengawasan Intern, Divisi Sistem Teknologi dan Informasi, dan Sub Direktorat Hukum Kebijakan dan Kepatuhan.

Realisasi kegiatan Rencana Aksi Pembangunan TPK Terintegrasi Tahun 2022 merujuk pada Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi perihal Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi WBS TPK Terintegrasi No. B/2856/PM/30-35/05/2022 tanggal 27 Mei 2022. Adapun kegiatan yang perlu ditindaklanjuti antara lain kegiatan FGD/Benchmark kepada BUMN/instansi, sesuai informasi dari Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK saat ini ditunda pelaksanaannya dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya serta terkait dengan penggunaan aplikasi dan teknis konektivitas Aplikasi WBS dengan Aplikasi KPK.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Kebijakan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kebijakan mengenai Penyampaian Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diatur dalam Peraturan Direksi No. 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero).

WAJIB LAPOR LHKPN

Berdasarkan Peraturan Direksi tersebut, pejabat di lingkungan PLN yang menjadi Wajib Lapo (WL) LHKPN adalah:

1. Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Manajemen Atas (MA);
3. Manajemen Menengah (MM);
4. Manajemen Dasar (MD);
5. Fungsional I, II, III;
6. Pejabat Perencana Pengadaan;
7. Pejabat Pelaksana Pengadaan; dan
8. Supervisor Atas.

On April 21, 2022, and December 20, 2022, the first and second monitoring and evaluation of the 2022 PLN - KPK RI Integrated WBS Development Action Plan were carried out in the presence of representatives from the Directorate of Community Reporting and Complaint Services of the KPK, the Internal Audit Unit, the Technology Systems Division and Information, and Sub Directorate of Law, Policy and Compliance.

The realization of the 2022 Integrated TPK Development Action Plan activities refers to the Letter from the Corruption Eradication Commission regarding Submission of Monitoring and Evaluation Results of the Integrated TPK WBS No. B/2856/PM/30-35/05/2022 dated May 27, 2022. Activities that need to be followed up include FGD/Benchmark activities for SOEs/agencies, according to information from the Directorate of Reporting Services and Community Complaints, the KPK is currently being postponed and planned to be carried out in the following year. It is related to the use of applications and technical connectivity of the WBS application with the KPK application.

MANAGEMENT OF STATE OFFICIALS ASSETS REPORT

Policy on Reports on Assets of State Officials (LHKPN) Management

Policy on Report on Assets of State Officials (LHKPN) Form Submission is stipulated in Board of Directors Regulation No. 0074.P/DIR/2017 concerning Guidelines for Report on Assets of State Officials (LHKPN) of PT PLN (Persero).

STATE OFFICIALS REQUIRED TO SUBMIT LHKPN

According to the Board of Directors Regulation, PLN officials that are required to submit (WL) LHKPN include:

1. Board of Commissioners and Board of Directors,
2. Senior Management (MA),
3. Middle Management (MM),
4. Junior Management (MD),
5. Functional I, II, III,
6. Procurement Planning Officer,
7. Procurement Officer,
8. Senior Supervisor.

PENGELOLA LHKPN

Perusahaan menunjuk pengelola LHKPN sebagai berikut:

1. Koordinator Pelaksana LHKPN adalah *Executive Vice President* (EVP) Kepatuhan dengan tugas:
 - a. Menyiapkan infrastruktur, kebijakan, sarana, dan prasarana untuk pelaksanaan program pelaporan LHKPN,
 - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan program pelaporan LHKPN.
2. Admin e-LHKPN yang berada di Kantor Pusat dan unit-unit PLN dengan tugas:
 - a. Melakukan pemutakhiran data Wajib Lapo LHKPN di lingkungan PLN pada aplikasi e-LHKPN;
 - b. Sebagai Helpdesk aplikasi E-LHKPN; dan
 - c. Melakukan *monitoring* progres pelaporan LHKPN.

PENYAMPAIAN LHKPN TAHUN 2022

PLN melaporkan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN Periode Pelaporan tahun 2022 mencapai 100% dari 8.819 wajib lapor. Perseroan telah mempublikasikan LHKPN dalam situs web www.pln.co.id. Adapun, perkembangan pelaporan LHKPN di lingkungan PLN mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana tabel grafik berikut:

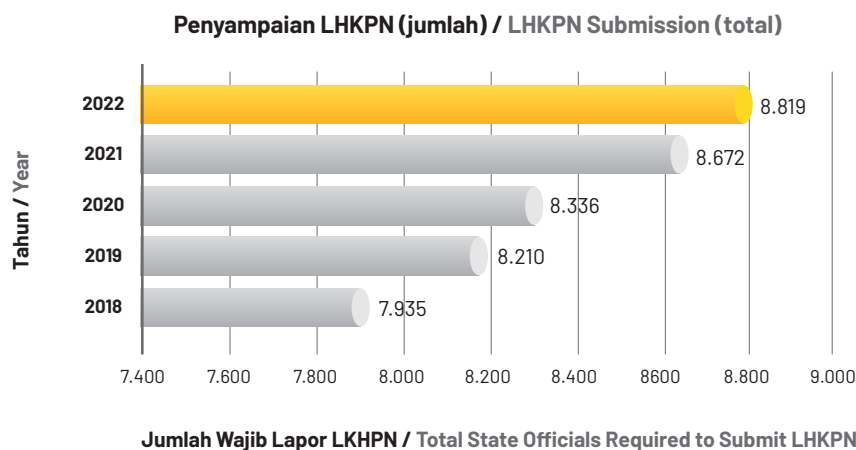
LHKPN MANAGERS

The Company assigns LHKPN managers as follows:

1. LHKPN Coordinator is Executive Vice President (EVP) Compliance with the following duties:
 - a. Preparing infrastructure, policies and facilities for LHKPN reporting program,
 - b. Monitoring implementation of LHKPN reporting program.
2. e-LHKPN Admin at PLN Head Office and units with the following duties:
 - a. Updating data of PLN Officials Required to Submit LHKPN in E-LHKPN application,
 - b. Acting as Helpdesk of E-LHKPN application,
 - c. Monitoring progress of LHKPN reporting program.

2022 LHKPN SUBMISSION

PLN reports that the reporting compliance rate in the 2022 reporting period reached 100% of the 8,819 Mandatory Reports. The Company publishes LHKPN on the website www.pln.co.id. The LHKPN reporting at PLN improves every year as shown in the following table:



Deskripsi / Description	2018	2019	2020	2021	2022
Penyampaian LHKPN (jumlah) / LHKPN Submissions (total)	7.935	8.210	8.336	8.672	8.819



PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU DIREKSI

Perseroan menjalankan berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan secara menyeluruh dengan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku termasuk terkait kebijakan pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Namun demikian, status PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi dasar PLN tidak menyajikan informasi terkait pengungkapan kepemilikan saham PLN oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

PLN adalah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menerapkan kebijakan *Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program* (ESOP/MSOP).

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

Program dan prosedur

Peraturan Direksi / Board of Directors Regulations	0060.K/DIR/2014	Pedoman PLN Bersih di Lingkungan PT PLN (Persero) / Clean PLN in the PT PLN (Persero) Environment
Peraturan Direksi / Board of Directors Regulations	0074.P/DIR/2017	Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero) / Guidelines for Reporting State Officials' Wealth (LHKPN) within PT PLN (Persero)
Peraturan Direksi / Board of Directors Regulations	0076.P/DIR/2017	Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT PLN (Persero) / Gratuity Control Guidelines at PT PLN (Persero)
Peraturan Direksi / Board of Directors Regulations	0121.P/DIR/2019	Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT PLN (Persero) / Anti-Fraud Policy in PT PLN (Persero) Environment
Peraturan Direksi / Board of Directors Regulations	0122.P/DIR/2019	Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero) / Management of Conflicts of Interest in PT PLN (Persero) Environment
Peraturan Direksi / Board of Directors Regulations	0048.P/DIR/2020	Tata Kelola Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN (Persero) / Anti-Bribery Governance within PT PLN (Persero)

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Company is fully committed to complying with applicable regulations, including the policy on the disclosure of share ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as stipulated in the Regulation of Financial Services Authority No. 11/POJK.04/2017 on Report of Ownership or Any Change in Share Ownership of a Public Company. However, PLN's status is a State-Owned Enterprise (SOE) which is wholly owned (100%) by the Government of the Republic of Indonesia, so that PLN does not provide information on PLN's share ownership by members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

MANAGEMENT AND/OR EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM (ESOP/MSOP)

PLN is a State-Owned Enterprise (BUMN) which is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, the Company does not implement the Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP) policy.

ANTI-CORRUPTION POLICY

Programs and procedures

Edaran Direksi / Board of Directors Circular	0011.E/DIR/2020	Pedoman Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN (Persero) / Guidelines for the Anti-Bribery Compliance Function within PT PLN (Persero)
Edaran Direksi / Board of Directors Circular	0012.E/DIR/2020	Pedoman Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN (Persero) / Guidelines for Implementing Internal Audit of the Anti-Bribery Management System within PT PLN (Persero)
Edaran Direksi / Board of Directors Circular	0013.E/DIR/2020	Pedoman Pelaksanaan Integrity Due Diligence di Lingkungan PT PLN (Persero) / Guidelines for Implementation of Integrity Due Diligence within PT PLN (Persero)
Peraturan Direksi / Board of Directors Regulations	0010.P/DIR/2022	Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistle Blowing System) di Lingkungan PT PLN (Persero) / Violation Complaint System (Whistle Blowing System) within PT PLN (Persero)

Sosialisasi

Setiap tahun, PLN menyelenggarakan sosialisasi WBS kepada seluruh pegawai di Satuan Kerja termasuk Anak Perusahaan melalui tatap muka virtual, portal internal dan situs web Perusahaan termasuk melalui *Banner* terkait dengan integrasi Program Kepatuhan PLN Group.

PERNYATAAN BEBAS PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Sebagai bagian dari pemenuhan terhadap kode etik, Perseroan memastikan bahwa seluruh insan PLN telah bertindak independen dalam bekerja, termasuk terkait adanya keterlibatan di dalam kegiatan politik. Perseroan memastikan, tidak terdapat penggunaan atribut ataupun aset Perseroan oleh insan PLN untuk kepentingan lain selain kepentingan Perseroan, termasuk terkait aktivitas penyaluran dana untuk kegiatan politik tertentu.

KEBIJAKAN ANTI-FRAUD

Kebijakan *Anti-Fraud* ditetapkan pada tahun 2019 melalui Peraturan Direksi sebagai bentuk komitmen Direksi dalam mendukung peningkatan integritas dan bagian dari nilai-nilai Perusahaan. Kebijakan tersebut menjadi landasan dari strategi dan program-program *anti-fraud*, baik berupa kebijakan, pedoman, prosedur, petunjuk pelaksanaan, dan ketentuan internal lainnya, sehubungan dengan upaya pemetaan potensi *fraud*, pencegahan, pendeteksian, serta respons terhadap risiko dan kejadian *fraud* di lingkungan PLN.

PENCEGAHAN GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

PLN berkomitmen kuat mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bersih, sehat, dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Salah satu perangkat untuk mendukung komitmen tersebut adalah kebijakan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 0076.P/ DIR/2017 tentang Pedoman

Dissemination

Every year, PLN conducts WBS dissemination to all employees in the Labor Union, including the Subsidiary through virtual meeting, internal portal and Company's web site, including the banner related to integration of PLN Group Compliance Program.

STATEMENT OF NOT GRANTING FUNDS FOR POLITICAL ACTIVITIES

As part of complying with the code of conduct, the Company ensures that all PLN personnel act independently at work, including in relation to involvement in political activities. The Company ensures that there is no use of the Company's attributes or assets by PLN personnel for purposes other than the interests of the Company, including those related to channeling funds for certain political activities.

ANTI-FRAUD POLICY

The Anti-Fraud Policy was established in 2019 through Board of Directors Regulation as a form of the Board of Directors' commitment to improving the integrity and as a part of the Company's values. These policies are the basis of anti-fraud strategies and programs, in the form of policies, guidelines, procedures, implementation instructions, and other internal Company regulations in the efforts to map potential fraud, prevent, detect, and respond to risks and incidents of fraud in PLN environment.

PREVENTION OF GRATUITY AND CONFLICT OF INTEREST

PLN is committed to realizing a corporate management that is clean, healthy and free of all forms of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN). One of the tools to support this commitment is the policy on gratuity and conflict of interest as stipulated in regulation of the Board of Directors No. 0076.P/DIR/2017 on Guidelines for Gratuity Control in PT

Pengendalian Gratifikasi di PT PLN (Persero) dan Peraturan Direksi Nomor 122.P/DIR/2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan PT PLN (Persero). Pedoman Pengendalian Gratifikasi mengatur secara jelas beragam penafsiran mengenai gratifikasi, legal dan ilegal yang bertujuan untuk memperkuat posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, memaksimalkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Pedoman pengelolaan konflik kepentingan bertujuan sebagai pedoman bagi insan PLN untuk memahami, mencegah, dan mengambil sikap yang tegas terhadap konflik kepentingan di lingkungan Perusahaan. Dengan adanya pengelolaan konflik kepentingan, diharapkan tidak terjadi hanya segelintir orang yang menikmati keuntungan, tetapi akan dicapai persamaan kepentingan menuju perusahaan yang tumbuh dan berkembang dan kesejahteraan seluruh karyawan akan meningkat.

PENGAWASAN GRATIFIKASI

Setiap bentuk gratifikasi yang diterima maupun ditolak, wajib disampaikan dan dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang ditetapkan oleh Direksi. Pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku.

ETIKA GRATIFIKASI

Dalam menjalankan kegiatannya, setiap insan PLN wajib menjunjung tinggi komitmen untuk menjalankan usaha yang bebas dengan segala bentuk kecurangan (*fraud*) dan tindakan korupsi dengan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Semua insan PLN dilarang menawarkan atau memberikan suap dan gratifikasi dalam bentuk apa pun;
2. Semua insan PLN dilarang meminta atau menerima gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pemangku kepentingan, mitra kerja dan/atau pihak ketiga karena jabatannya, dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
3. Semua insan PLN wajib berpartisipasi untuk menyukseskan program pencegahan korupsi di lingkungan Perusahaan;
4. Semua insan PLN wajib melakukan penolakan secara sopan terhadap segala bentuk pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan pedoman gratifikasi; dan
5. Semua insan PLN harus melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi atas penerimaan, permintaan, dan/atau penolakan gratifikasi yang dilakukan.

PLN (Persero) and Regulation of the Board of Directors No. 122.P/DIR/2019 on Management of Conflict of Interest in PT PLN (Persero). Guidelines for Gratuity Control clearly set various interpretations of legal and illegal gratuities within the Company to strengthen its position in facing business competition, to improve efficiency and effectiveness of resource management, to maximize the Company's value in a sustainable manner and to increase the trust of stakeholders. Management of Conflict of Interest is intended as a guideline for PLN personnel to understand, prevent, and take a firm attitude towards conflict of interest within the Company. With the management of conflicts of interest, it is expected that only certain people will enjoy the benefits, but an equality of interest will be achieved for a growing and developing company, so that the Company's goals will be achieved and employee welfare will be improved.

GRATUITY CONTROL

Any form of gratuity received or rejected must be submitted and reported to Gratuity Control Unit established by PLN's Board of Directors. Violations shall be liable to sanctions in accordance with the applicable laws and regulations as well as the Company's regulations.

Ethics Related to Gratuity

In carrying out their activities, every PLN personnel must uphold a commitment to running a business free of all forms of fraud and corruption by complying with the following provisions:

1. All PLN personnel are prohibited from offering or giving bribes and gratuities in any form;
2. All PLN personnel are prohibited from directly or indirectly requesting or receiving gratuities from stakeholders, partners and/or third parties for their positions, contrary to their obligations or duties;
3. All PLN personnel are required to participate in corruption prevention programs within the Company;
4. All PLN personnel are required to reject courteously any gratuity that is not in accordance with the provisions of the gratuity guidelines; and
5. All PLN personnel must report to Gratuity Control Unit on any receipt, request, and/or rejection of gratuity.

PELAPORAN GRATIFIKASI

PLN membuka saluran untuk melaporkan gratifikasi dalam bentuk aplikasi *Compliance Online System* yang dapat diakses oleh seluruh insan PLN melalui <http://cos.pln.co.id>.

PUBLIKASI PELAPORAN GRATIFIKASI

Perseroan telah mempublikasikan rekapitulasi pelaporan gratifikasi untuk tahun 2022 melalui situs web www.pln.co.id.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENOLAKAN GRATIFIKASI TAHUN 2022

Laporan Penerimaan Gratifikasi 2022

- Total laporan penerimaan gratifikasi: 54 laporan
- Jumlah laporan yang tidak ditindaklanjuti: 1 laporan
Tidak ditindaklanjuti dengan justifikasi salah kategori pelaporan setelah melakukan klarifikasi kepada pelapor.
- Jumlah laporan yang ditindaklanjuti: 53 laporan
Dengan perincian 47 laporan telah selesai ditindaklanjuti, 3 laporan dalam proses pengembalian objek gratifikasi ke KPK, dan 3 laporan masih dalam proses verifikasi KPK.
- UPG PLN secara berkala melakukan reminder dan pengecekan pada pelapor terkait tindak lanjut dari penetapan KPK tersebut.

Laporan Penolakan Gratifikasi 2022

- Total laporan penolakan gratifikasi: 44 laporan
- Jumlah laporan yang tidak ditindaklanjuti: 4 laporan
Tidak ditindaklanjuti dengan justifikasi salah kategori pelaporan setelah melakukan klarifikasi kepada pelapor.
- Jumlah laporan yang ditindaklanjuti: 40 laporan
Dengan perincian 40 laporan telah mendapatkan surat apresiasi dari KPK atas penolakan gratifikasi yang dilakukan.

SISTEM MANAJEMEN ANTI-PENYUAPAN

Penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980, penyuapan dapat diartikan memberi suap dan menerima suap. Memberi suap merupakan tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan menerima suap merupakan

GRATUITY REPORTING

The Company provides channels to report gratuity through the Compliance Online System application that can be accessed by all PLN personnel on <http://cos.pln.co.id>.

GRATUITY REPORTING PUBLICATION

The Company publishes the recapitulation of Gratuity reports in 2022 on the website www.pln.co.id.

ACCEPTED AND REJECTED GRATUITY IN 2022

Gratuity Acceptance Report in 2022

- Number of received gratuity reports: 54 reports
- Number of reports not followed up: 1 report
Not followed up with the justification of report miscategorization after clarification with the reporter.
- Number of followed up reports: 53 reports
In which 47 reports have been followed up, 3 reports are in the process of gratuity object return to the CEC, and 3 reports are still in the verification process by CEC.
- UPG PLN periodically reminds and verifies the reporter regarding the follow up of the CEC decision.

Gratuity Rejection in 2022

- Number of gratuity rejection reports: 44 reports
- Number of reports that were not followed up: 4 reports
Not followed up with justification for wrong reporting category after clarifying it to the complainant.
- Number of reports followed up: 40 reports
With details of 40 reports, letters of appreciation have been received from the Corruption Eradication Commission for the rejection of gratuities.

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

Bribery is the act of giving money, goods or other forms from the giver of bribe to the recipient of bribe which is carried out to change the attitude of recipient towards a particular interest. According to Law Number 11 of 1980, bribery can be interpreted as giving bribes and receiving bribes. Giving bribe is an act of giving or promising something to someone with the intention of persuading that person to do something or not to do something in their duties, which is contrary to their authority or obligations concerning the public interest. While receiving bribe is an act of accepting something or a promise, which is known or reasonably suspected that the gift is

tindakan menerima sesuatu atau janji, yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut dimaksudkan agar penerima berbuat sesuai atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.

Untuk memperkuat sistem pencegahan tindak korupsi dan penyuapan di PLN yang dapat berisiko pada reputasi Perusahaan serta kualitas dan keandalan produk tenaga listrik bagi pelanggan, sejak tahun 2019 PLN melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) dimulai dari kegiatan *gap analysis*, *capacity building* (pelatihan, *workshop*), sosialisasi, penyusunan dan pengembangan kebijakan, prosedur dan manual sistem manajemen anti penyuapan hingga proses pengujian efektivitas sistem.

Setelah menjalani proses sertifikasi termasuk verifikasi kesesuaian penerapan SMAP di PLN dengan standar internasional, PLN Group berhasil memperoleh Sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP. Hingga akhir tahun 2022, unit PLN dan anak perusahaan yang telah memperoleh sertifikat SMAP ISO 37001:2016 sebagai berikut:

intended so that the recipient does or does not do something in their duties, which is contrary to the authority or obligation that concerns the public interest.

To strengthen the system for preventing corruption and bribery at PLN which can risk the Company's reputation as well as the quality and reliability of electricity power product for customers, since 2019 PLN made various preparations to take part in ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) certification, starting from gap analysis, capacity building (training, workshops), dissemination, preparation and development of policies, procedures and manuals for anti-bribery management system, as well as system effectiveness test.

After passing the certification process, including verification of the conformity of SMAP implementation at PLN with international standards, PLN Group succeeded in obtaining ISO 37001:2016 SMAP Certificate. Until the end of 2022, PLN units and subsidiaries that have obtained the SMAP ISO 37001:2016 certificate are as follows:

No	Penerima / Recipient	Lingkup Sertifikasi / Certification Scope	Lembaga Penilai / Assessor Institution	Tanggal Sertifikat / Certification Date
1	PT PLN (Persero) Kantor Pusat / PT PLN (Persero) Head Office	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan semua Divisi / Satuan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat / Anti-Bribery System Implementation for all Divisions / Units in PT PLN (Persero) Head Office	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
2	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara / PT PLN (Persero) North Sumatra Development Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara / Anti-Bribery System Implementation for all Business Process in PT PLN (Persero) North Sumatra Development Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
3	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah / PT PLN (Persero) Central Sumatra Development Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah / Anti-Bribery System Implementation for all Business Process in PT PLN (Persero) Central Sumatra Development Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
4	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan / PT PLN (Persero) South Sumatra Development Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan / Anti-Bribery System Implementation for all Business Process in PT PLN (Persero) South Sumatra Development Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
5	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat / PT PLN (Persero) West Kalimantan Development Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat / Anti-Bribery System Implementation for all Business Process in PT PLN (Persero) West Kalimantan Development Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
6	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur / PT PLN (Persero) East Kalimantan Development Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur / Anti-Bribery System Implementation for all Business Process in PT PLN (Persero) East Kalimantan Development Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
7	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat / PT PLN (Persero) West Java Development Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat / Anti-Bribery System Implementation for all Business Process in PT PLN (Persero) West Java Development Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
8	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah / PT PLN (Persero) Central Java Development Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah / Anti-Bribery System Implementation for all Business Process in PT PLN (Persero) Central Java Development Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
9	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali / PT PLN (Persero) East Java and Bali Development Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali / Anti-Bribery System Implementation for all Business Process in PT PLN (Persero) East Java and Bali Development Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021

No	Penerima / Recipient	Lingkup Sertifikasi / Certification Scope	Lembaga Penilai / Assessor Institution	Tanggal Sertifikat / Certification Date
10	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara / PT PLN (Persero) Nusa Tenggara Development Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara / Anti-Bribery System Implementation for all Business Process in PT PLN (Persero) Nusa Tenggara Development Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
11	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi / PT PLN (Persero) Sulawesi Development Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi / Anti-Bribery System Implementation for all Business Process in PT PLN (Persero) Sulawesi Development Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
12	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku Papua / PT PLN (Persero) Maluku Papua Development Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku Papua / Anti-Bribery System Implementation for all Business Process in PT PLN (Persero) Maluku Papua Development Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
13	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara / PT PLN (Persero) Northern Sumatra Development Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara / Anti-Bribery System Implementation for all Business Process in PT PLN (Persero) Northern Sumatra Development Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
14	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan / PT PLN (Persero) Southern Sumatra Development Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan / Anti-Bribery System Implementation for all Business Process in PT PLN (Persero) Southern Sumatra Development Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
15	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B / PT PLN (Persero) Tanjung Jati B Generation Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Process at PT PLN (Persero) Tanjung Jati B Generation Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
16	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan / PT PLN (Persero) Kalimantan Generation and Distribution Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Process at PT PLN (Persero) Kalimantan Generation and Distribution Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
17	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi / PT PLN (Persero) Sulawesi Generation and Distribution Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Process at PT PLN (Persero) Sulawesi Generation and Distribution Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
18	PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera / PT PLN (Persero) Sumatra Distribution Main Unit and Load Control Center	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) Sumatra Distribution Main Unit and Load Control Center	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
19	PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali / PT PLN (Persero) Java, Madura, and Bali Distribution Main Unit and Load Control Center	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) Java, Madura, and Bali Distribution Main Unit and Load Control Center	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
20	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat / PT PLN (Persero) West Java Transmission Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) West Java Transmission Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
21	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah / PT PLN (Persero) Central Java Transmission Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) Central Java Transmission Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
22	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali / PT PLN (Persero) West Java Transmission Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) West Java Transmission Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
23	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya / PT PLN (Persero) Greater Jakarta Distribution Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) Greater Jakarta Distribution Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
24	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten / PT PLN (Persero) Banten Distribution Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) Banten Distribution Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
25	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat / PT PLN (Persero) West Java Distribution Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) West Java Distribution Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
26	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / PT PLN (Persero) Central Java and Special Region of Yogyakarta Distribution Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) Central Java and Special Region of Yogyakarta Distribution Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021

No	Penerima / Recipient	Lingkup Sertifikasi / Certification Scope	Lembaga Penilai / Assessor Institution	Tanggal Sertifikat / Certification Date
27	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur / PT PLN (Persero) East Java Distribution Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) East Java Distribution Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
28	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali / PT PLN (Persero) Bali Distribution Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) Bali Distribution Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
29	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung / PT PLN (Persero) Lampung Distribution Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) Lampung Distribution Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
30	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Aceh / PT PLN (Persero) Aceh Distribution Main Unit	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Aceh / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) Aceh Distribution Main Unit	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
31	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara / PT PLN (Persero) Main Unit for North Sumatra Region	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit for North Sumatra Region	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
32	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau / PT PLN (Persero) Main Unit for Riau Islands Region	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit for Riau Islands Region	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
33	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat / PT PLN (Persero) Main Unit for West Sumatra Region	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit for West Sumatra Region	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
34	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu / PT PLN (Persero) Main Unit for South Sumatra, Jambi, and Bengkulu Region	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit for South Sumatra, Jambi, and Bengkulu Region	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
35	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung / PT PLN (Persero) Main Unit for Bangka Belitung Region	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit for Bangka Belitung Region	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
36	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah / PT PLN (Persero) Main Unit for South Kalimantan and Central Kalimantan Region	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit for South Kalimantan and Central Kalimantan Region	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
37	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat / PT PLN (Persero) Main Unit for West Kalimantan Region	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit for West Kalimantan Region	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
38	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara / PT PLN (Persero) Main Unit for East and North Kalimantan Region	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit for East and North Kalimantan Region	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
39	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo / PT PLN (Persero) Main Unit for North Sulawesi, Central Sulawesi, and Gorontalo Region	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit for North Sulawesi, Central Sulawesi, and Gorontalo Region	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
40	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat / PT PLN (Persero) Main Unit for South Sulawesi, South-East Sulawesi and West Sulawesi Region	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit for South Sulawesi, South-East Sulawesi and West Sulawesi Region	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
41	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara / PT PLN (Persero) Main Unit for Maluku and North Maluku Region	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit for Maluku and North Maluku Region	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
42	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat / PT PLN (Persero) Main Unit for Papua and West Papua Region	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit for Papua and West Papua Region	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
43	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat / PT PLN (Persero) Main Unit for West Nusa Tenggara Region	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit for West Nusa Tenggara Region	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021

No	Penerima / Recipient	Lingkup Sertifikasi / Certification Scope	Lembaga Penilai / Assessor Institution	Tanggal Sertifikat / Certification Date
44	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur / PT PLN (Persero) Main Unit for East Nusa Tenggara Region	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit for East Nusa Tenggara Region	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
45	PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan / PT PLN (Persero) Research and Development Center	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Research and Development Center	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
46	PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan / PT PLN (Persero) Electricity Maintenance Center	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan / Anti-Bribery Management Implementation System to all Business Processes at PT PLN (Persero) Electricity Maintenance Center	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
47	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi / PT PLN (Persero) Certification Center	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at the PT PLN (Persero) Certification Center	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
48	PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek / PT PLN (Persero) Project Management Center	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) Project Management Center	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
49	PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Corporate University) / PT PLN (Persero) Education and Training Center (Corporate University)	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis di PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan / Anti-Bribery Management System Implementation to all Business Processes at PT PLN (Persero) Education and Training Center	TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
50	PT Haleyora Power	Proses Pengadaan Barang & Jasa / Products and Services Procurement	Mutuagung Lestari	30 November 2020 / November 30, 2020
51	PT Indonesia Comnets Plus	Bidang Procurement, Treasury, Human Capital, dan Risk Management / Procurement, Treasury, Human Capital and Risk Management Sector	PT Chesna	4 Oktober 2021 / October 4, 2021
52	PT Indonesia Power	20 Proses Bisnis yang ada di Kantor Pusat IP / 20 Business Processes in IP Headquarters	Mutuagung Lestari	18 April 2020 / April 18, 2020
53	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	5 Divisi Kantor Pusat PT BAg / 5 PT BAg Head Office Division	TUV Nord Indonesia	15 September 2021 / September 15, 2021
54	PT PLN Nusantara Power (dahulu bernama PT Pembangkitan Jawa Bali) / PT PLN Nusantara Power (formerly known as PT Pembangkitan Jawa Bali)	Seluruh bisnis proses manajemen di Kantor Pusat / All business process management at Head Office	BSI	10 Agustus 2020 / August 10, 2020
55	PT PLN Batam	Seluruh 15 divisi dan unit di PLN Batam / All 15 divisions and units in PLN Batam	SAI Global	24 Maret 2021 / March 24, 2021
56	PT PLN Energi Primer Indonesia (dahulu bernama PT PLN Batubara) / PT Energi Primer Indonesia (formerly known as PT PLN Batubara)	Seluruh Divisi di Kantor Pusat PLN Batubara / All Division in PLN Batubara Head Office	BSI	26 Juli 2021 / July 26, 2021
57	PT PLN Gas & Geothermal	Kantor Pusat (Seluruh Divisi) dan Kantor Unit Tanjung Batu / Head Office (All Division) and Tanjung Batu Unit Office	Asricert Indonesia	15 Desember 2020 / December 15, 2020
58	PT PLN Tarakan	Pada Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik termasuk Transmisi, Distribusi dan Manajemen Penagihan / On Operation and Maintenance Power Generation including Transmission, Distribution and Billing Management	Asricert Indonesia	23 Desember 2020 / December 23, 2020
59	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	Proses Pengadaan Barang & Jasa / Products and Services Procurement	PT Chesna	26 Februari 2021 / February 26, 2021
60	PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara	Provision of Generate Electricity and Steam	IAS	31 Mei 2022 / May 31, 2022
61	PT Energy Management Indonesia	Penyediaan Jasa Konsultasi, Kajian Manajemen Proyek, Engineering, dan Penyediaan Jasa dan/atau Barang untuk Bidang Konservasi Energi dan Lingkungan dan Energi Baru Terbarukan / Provision of Consulting Services, Project Management Studies, Engineering, and Provision of Services and/or Goods for the Field of Energy and Environmental Conservation and New and Renewable Energy	Asricert Indonesia	17 Desember 2020 / December 17, 2020

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan teknologi digital menuntut PLN untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan proses bisnis melalui pengembangan sistem dan teknologi informasi

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

The development of digital technology requires PLN to continuously improve the efficiency and effectiveness of business process management through the development



yang mampu mengoptimalkan operasi bisnis, memberikan nilai tambah serta mendukung proses pengambilan keputusan dalam waktu yang relatif singkat untuk menjawab dinamika bisnis. PLN memerlukan dukungan TI yang modern dan mengadaptasi tren teknologi seperti *big data* dan *analytics*, *integration system*, *cloud computing*, *mobility*, *social media*, *Internet of Things (IoT)*, *artificial intelligence*, dan sebagainya.

Platform aplikasi korporat dan pelayanan pelanggan, pengembangan *Advanced Metering Infrastructure (AMI)*, implementasi *big data analytics* serta penguatan integrasi data melalui pembangunan MIS (*Management Information System*) menuju SSoT (*Single Source of Truth*) menjadi fokus mendasar dalam pengembangan layanan TI selama tahun 2022. Dukungan TI diselaraskan dengan kebutuhan bisnis korporat dalam mencapai Transformasi Digital PLN dengan memperhatikan standar global ataupun *benchmark* serta memperhatikan prinsip - prinsip pengembangan TI.

Dalam memastikan pemanfaatan TI selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, strategi dan budaya perusahaan, PLN menerapkan tata kelola TI (*IT Governance*). Tata kelola TI mendeskripsikan akuntabilitas pengambilan keputusan pada fungsi penyelenggaraan teknologi informasi di perusahaan termasuk peran Direksi dan Eksekutif. Selain itu, tata kelola TI juga mencakup struktur organisasi serta prinsip-prinsip dan proses-proses yang memastikan sistem TI dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara komprehensif.

of systems and information technology that are capable of optimizing business operations, providing added value, and supporting decision-making processes in a relatively short time to respond to business dynamics. PLN requires modern IT support and adapts technology trends such as big data and analytics, system integration, cloud computing, mobility, social media, internet of things (IoT), artificial intelligence, etc.

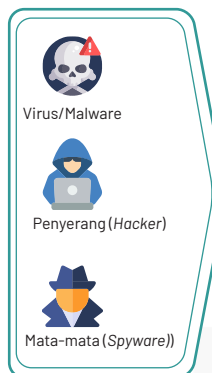
Corporate application platforms and customer service, development of advanced metering infrastructure (AMI), implementation of big data analytics and strengthening of data integration through the development of MIS (Management Information System) towards SSoT (Single Source of Truth) will be the fundamental focus in developing IT services during 2021. IT support is aligned with corporate business needs in achieving PLN's Digital Transformation by taking into account global standards or benchmarks as well as paying attention to the principles of IT development.

In ensuring the utilization of IT is in line with the vision, mission, values, strategy and corporate culture, PLN applies IT governance. IT governance describes accountability for decision-making in the function of administering information technology in the Company, including the roles of Directors and Executives. In addition, IT governance also includes the organizational structure as well as the principles and processes that ensure that IT systems can support the achievement of company goals in a comprehensive manner.

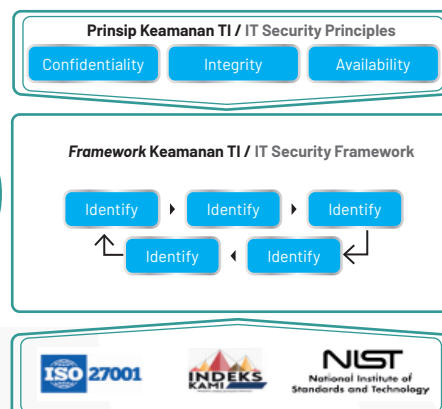
TATA KELOLA KEAMANAN TI



Ancaman Keamanan TI / IT Security Threats



Strategi Keamanan TI / IT Security Strategy



Penggunaan TI memiliki sejumlah risiko yang terkait dengan *cyber security* dan *disaster recovery*. Untuk melindungi sistem TI Perusahaan dari ancaman risiko tersebut, PLN telah melaksanakan upaya-upaya mitigasi termasuk telah memiliki sertifikasi ISO27001 untuk memastikan mekanisme proses pengamanan data dan informasi terlaksana secara terstruktur. Pengamanan informasi itu sendiri adalah suatu proses perlindungan terhadap informasi untuk memastikan *confidentiality*, *integrity*, dan *availability* atas informasi tersebut. Pada tahun 2022, PLN telah melakukan reorganisasi guna pengelolaan penguatan keamanan siber, dengan membentuk bidang khusus untuk menangani keamanan siber.

Sistem keamanan TI di PLN juga mengacu pada beberapa kerangka kerja mengacu pada praktik terbaik. Beberapa kerangka kerja yang digunakan sebagai referensi oleh PLN selain Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001, antara lain: *National Institute of Standards and Technology* (NIST), dan *North American Electric Reliability Corporation* (NERC). Dengan mengadopsi beberapa kerangka kerja terbaik pada pengamanan siber, PLN menetapkan beberapa aspek dalam menjalankan kerangka kerja keamanan TI di PLN sebagaimana gambar berikut:

The use of IT poses several risks associated with *cyber security* and *disaster recovery*. To protect the Company's IT systems from these risks, PLN has carried out mitigation efforts including obtaining ISO27001 certification to ensure that the data and information security process mechanism is carried out in a structured manner. Information security itself is a securing process of the information to ensure confidentiality, integrity, and availability of said information. In 2022, PLN has carried out reorganization to manage cyber security enhancement by establishing a special sector in handling cyber security.

IT Security System in PLN also refers to several frameworks in best practices. Several frameworks used as reference by PLN aside Information Security Management ISO 27001, among which are: *National Institute of Standards and Technology* (NIST), dan *North American Electric Reliability Corporation* (NERC). By adopting several best practices frameworks in cyber security, PLN has set a few aspects in carrying out the IT security framework in PLN as depicted below:

Kerangka Kerja Manajemen Keamanan Siber PLN / PLN Cyber Security Management Framework



Panduan dan Referensi / Guide and Reference





- **Pengawasan (Monitoring)**

PLN telah membentuk *Security Operation Center (SOC)* dalam melakukan monitoring sistem TI 24x7, dan dilakukan pelaporan terkait kondisi keamanan secara berkala.

- **Teknologi**

PLN telah menerapkan teknologi pengamanan terbaru dan diperbarui secara rutin untuk dapat memastikan perangkat keamanan selalu dalam kondisi terbaik dan untuk dapat melakukan pengamanan secara menyeluruh (*end to end*) pada sistem teknologi informasi perusahaan. Dalam mengamankan data dan informasi, PLN juga telah menerapkan enkripsi untuk dapat memastikan keamanan pada saat data disimpan, ditransmisikan dan digunakan dengan aspek menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data.

- **Kolaborasi**

PLN berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengamanan data dan informasi. Kerja sama strategis dengan lembaga negara maupun asosiasi serta organisasi profesional menjadi poin penting untuk dapat menunjang bagaimana organisasi dapat menerapkan pengamanan data dan informasi secara menyeluruh.

- **Kebijakan**

PLN membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengamanan data dan informasi dalam bentuk Keputusan Direksi (Kepdir), Standar minimum dalam implementasi kontrol keamanan (Standard), dan Standar Prosedur Operasi (SOP) untuk dapat mengatur bagaimana organisasi dapat melaksanakan fungsi pengamanan secara lebih terkendali dan terstruktur.

- **Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran**

PLN juga melakukan inisiatif peningkatan pengamanan melalui program-program *awareness* dan sosialisasi baik secara internal, eksternal dan pihak-pihak yang terkait yang terhubung dengan PLN.

PLN melakukan *awareness* secara berkala dengan memberikan buletin secara rutin pada seluruh karyawan, menempatkan poster-poster terkait keamanan data dan informasi di lingkungan kerja. *Awareness* keamanan data dan informasi juga diprogramkan pada pelanggan, mitra, supplier untuk dapat memberikan pemahaman secara lebih luas terkait bahaya ancaman keamanan siber, dan pentingnya menjaga keamanan data dan informasi.

- **Monitoring**

PLN has established Security Operation Center (SOC) in monitoring the IT system 24/7, and reported periodically the security condition.

- **Technology**

PLN has implemented the latest security technology and is updated regularly to ensure that security devices are always in the best condition and to be able to provide end-to-end security for the company's information technology systems. In securing data and information, PLN has also implemented encryption to ensure security when data is stored, transmitted and used with aspects of maintaining data confidentiality, integrity and availability.

- **Collaboration**

PLN collaborates with related parties in securing data and information. Strategic cooperation with state institutions as well as associations and professional organizations is an important point to be able to support how organizations can implement data and information security as a whole.

- **Policy**

PLN establishes and implements data and information security policies in the form of Directors' Decree (Kepdir), minimum standards in implementing security controls (Standards), and Standard Operating Procedures (SOPs) to be able to regulate how organizations can carry out a more controlled and structured security functions.

- **Dissemination and Raising Awareness**

PLN also carries out initiatives to increase security through awareness programs and socialization both internally, externally and related parties connected to PLN.

PLN conducts awareness regularly by giving bulletins regularly to all employees, placing posters related to data and information security in the work environment. Data and information security awareness is also programmed for customers, partners, suppliers to be able to provide a broader understanding of the dangers of cybersecurity threats, and the importance of maintaining data and information security.

Secara rutin PLN juga melakukan simulasi-simulasi keamanan untuk dapat memastikan bahwa perusahaan dalam kondisi yang siap dalam menanggulangi ancaman keamanan.

- **Evaluasi**

PLN melakukan evaluasi berkala terkait sistem, kebijakan, operasional pengamanan data dan informasi secara berkala. Beberapa program evaluasi pada PLN antara lain: Pengujian keamanan pada sistem TI dan OT (*Penetration Testing and Vulnerability Assessment*), *Cyber Security Assessment*, serta audit TI yang dilakukan secara berkala baik dari audit internal maupun audit eksternal.

PLN melakukan *security assessment* dan *penetration testing* secara periodik terutama untuk aplikasi-aplikasi kritikal dan aplikasi yang dapat diakses secara publik untuk memastikan perlindungan keamanan data pelanggan, data perusahaan, dan sistem TI terhadap ancaman keamanan siber serta untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dalam melaksanakan kegiatan operasional bisnis.

Dalam memberikan ketahanan terkait pengamanan data dan informasi PLN telah membentuk tim tanggap dan penanggulangan insiden. Tim tersebut diberi nama PLN CSIRT (*PLN Cyber Security Incident Response Teams*). PLN CSIRT ini juga berkoordinasi dengan Nasional CSIRT serta mengkoordinir CSIRT pada Anak Perusahaan dan Sub-Holding PLN untuk memberikan jaminan layanan TI yang tangguh dan andal.

STRATEGI PENGEMBANGAN TI

Dalam menghadapi perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan digitalisasi di masa depan serta untuk meningkatkan daya saing PLN sebagai penyedia listrik, diperlukan perencanaan strategis sebagai respons terhadap tren TI dan menerapkannya dalam kegiatan bisnis PLN. PLN memerlukan dukungan TI yang modern dan mengadaptasi tren teknologi seperti *big data analytics*, *integration system*, *cloud computing*, *mobility*, *social media*, *internet of things* (IoT), *artificial intelligence* dan sebagainya. Platform aplikasi korporat dan integrasi data serta pembangunan *Management Information System* (MIS) menjadi fokus mendasar dalam pengembangan layanan TI. Dukungan TI diselaraskan dengan kebutuhan bisnis korporat dengan memperhatikan standar global ataupun *benchmark* serta memperhatikan prinsip-prinsip acuan TI yang termuat pada ITMP PLN 2021-2024 sebagai berikut:

PLN routinely conducts security simulations to ensure that the company is ready to deal with security threats.

- **Evaluation**

PLN conducts periodic evaluations regarding systems, policies, data, and information security operations on a regular basis. Several evaluation programs at PLN, including Security testing on IT and OT (*Penetration Testing and Vulnerability Assessment*) systems, *Cyber Security Assessments*, as well as regular IT audits conducted by both internal and external audits.

PLN conducts periodic security assessments and penetration testing, especially for critical applications and applications that can be accessed publicly to ensure the security protection of customer data, company data, and IT systems against cyber security threats as well as to meet the demands of the organization's needs in carrying out business operational activities.

In providing data and information security resilience, PLN has formed an incident response team named PLN CSIRT (*PLN Cyber Security Incident Response Teams*). The PLN CSIRT is also in coordination with the National CSIRT and coordinates CSIRT at Subsidiaries and PLN Sub-Holdings to provide guarantees for tough and reliable IT services.

IT DEVELOPMENT STRATEGY

In dealing with the development of Information Technology (IT) and digitization in the future and to increase PLN's competitiveness as an electricity provider, strategic planning is required as a response to IT trends and implementing them in PLN's business activities. PLN needs modern IT support and adapts technology trends such as big data and analytics, integration systems, cloud computing, mobility, social media, internet of things (IoT), artificial intelligence and so on. Corporate application platforms and data integration as well as the development of Management Information Systems (MIS) are the fundamental focus in the development of IT services. IT support is aligned with corporate business needs by taking into account global standards or benchmarks and taking into account the principles of IT development, which are included in the 2021-2024 ITMP PLN as follows:



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengedepanan <i>people engagement</i> dan <i>experience</i>; 2. Proses bisnis yang <i>lean</i> dan <i>simple</i>; 3. Bisnis bersifat adaptif dan fleksibel; 4. Bisnis dilakukan berkesinambungan; 5. Aplikasi dirancang dengan mengutamakan pengalaman pengguna; 6. Integrasi aplikasi; 7. Aplikasi yang dikembangkan secara tersentral; 8. Data <i>trustee</i> untuk memastikan pengelolaan data sebagai aset perusahaan; 9. Data didefinisikan aksesnya dan tersedia bagi pengguna; 10. Definisi data konsisten di seluruh organisasi; 11. Keamanan data dijaga dari pihak yang tidak bertanggung jawab; 12. Interoperabilitas teknologi; 13. Manajemen perubahan yang responsif; 14. Teknologi yang bersifat <i>agile</i> dan mendukung fleksibilitas dan skalabilitas layanan; dan 15. Pengembangan dan operasional TI berbasis DevOps. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritized <i>people engagement</i> and <i>experience</i>; 2. Lean and simple business process; 3. Adaptive and flexible business; 4. Continuous business; 5. User Experience (UX) centric application design; 6. Integrated application; 7. Centrally developed application; 8. Data trustee to ensure data management as company's assets; 9. Accessible data for users; 10. Consistent data definition in all organization; 11. Secured data from irresponsible parties; 12. Technology interoperabilities; 13. Responsive management changes; 14. Agile and service flexibility and scalability supporting technology; and 15. DevOps-based IT developments and operations. |
|--|---|

Strategi utama perusahaan berimplikasi pada ICT (*Information and Communication Technology*) PLN yang harus selalu selaras dalam menghadapi tantangan di era disrupsi melalui transformasi digital dan *best practice* yang dirumuskan dalam 6 strategi pengembangan TI.

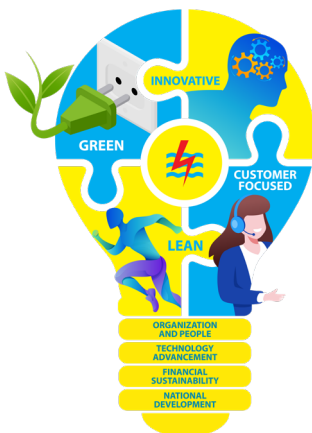
The Company's main strategy has implications for PLN's ICT (*Information and Communication Technology*) which must always be aligned in facing challenges in the era of disruption through digital transformation and best practices which are formulated in 6 IT development strategies .

Strategi TI Mendukung Strategi Utama Transformasi PLN

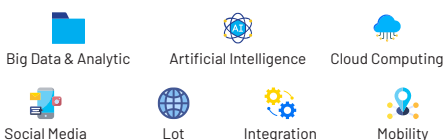
IT Main Strategy to Support PLN's Transformation

Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi /
To be the Leading Electricity Company in Southeast Asia and #1 Customer Choice for Energy Solutions

Strategi TI Mendukung Transformasi PLN /
IT Strategy to Support PLN's Transformation



Tren Teknologi /
Technology Trends



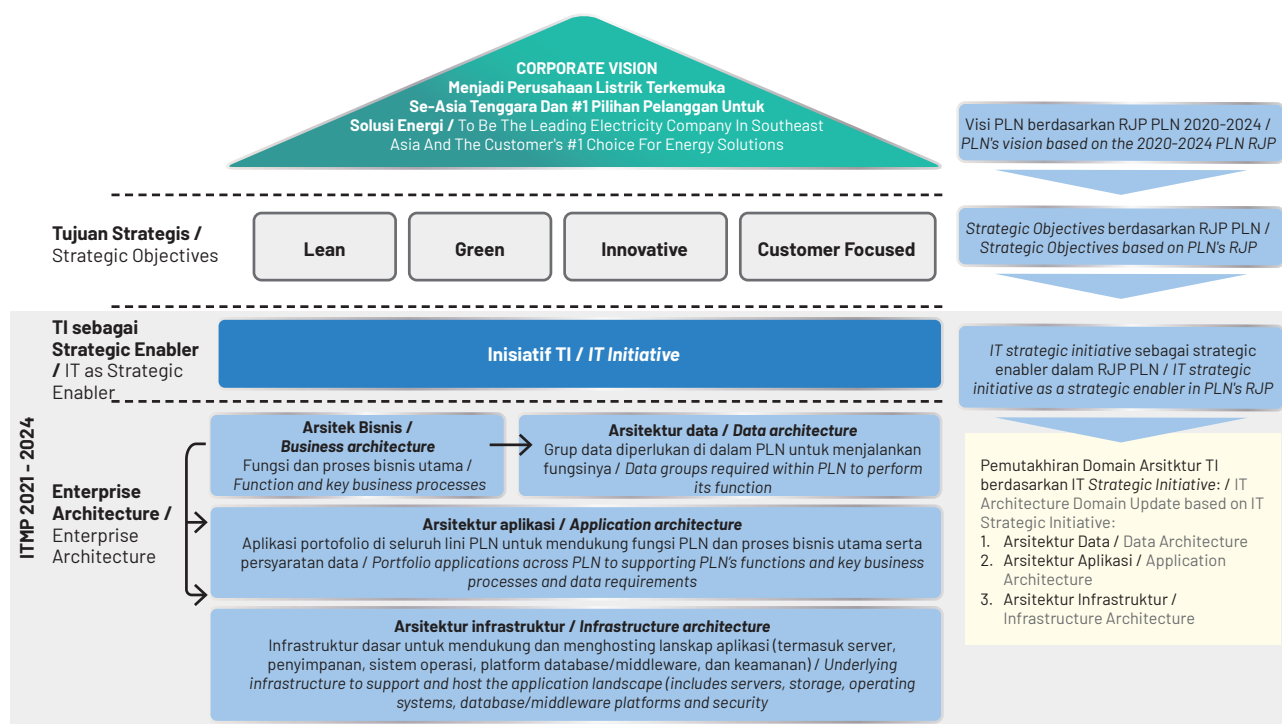
1. **Driver proses bisnis di *Domain* Pembangunan (CAPEX), Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Niaga/Retail dan Korporasi /** Business process drivers in the Development Domain (CAPEX), Generation, Transmission, Distribution, Commerce/Retail and Corporate
2. **Optimalisasi aplikasi bisnis melalui standarisasi, konsolidasi dan integrasi. /** Optimization of business applications through standardization, consolidation and integration.
3. **Integrasi informasi eksternal dan internal untuk monitoring, analisis dan pengambilan keputusan bisnis dan operasional. /** Integration of external and internal information for monitoring, analysis and business and operational decision making.
4. **Pemanfaatan *Internet of Things (IoT)* di era Industri 4.0 untuk konvergensi *Operation Technology (OT)* seperti teknologi SCADA, dengan *Information Technology (IT)* seperti *Artificial Intelligence (AI)* dalam mendukung pengoperasian dan pemeliharaan aset perusahaan /** Utilization of the Internet of Things (IoT) in the Industry 4.0 era for the convergence of Operation Technology (OT) such as SCADA technology, with Information Technology (IT) such as Artificial Intelligence (AI) in supporting the operation and maintenance of company assets.
5. **Infrastruktur dan Teknologi yang mendukung keandalan, *agility*, ketersediaan dan keamanan layanan TI sesuai dengan *best practice*. /** Infrastructure and technology that support the reliability, agility, availability and security of IT services in accordance with best practice.
6. **Model Operasi TI mendukung bisnis perusahaan yang semakin kompleks dan luas cakupannya. /** The IT Operations Model supports the company's business which is increasingly complex and broad in scope.

IT MASTER PLAN 2021 - 2024

PLN memiliki *IT Master Plan* (ITMP) 2021-2024 dimana TI sebagai *strategic enabler* dalam mencapai tujuan strategis korporat. Rencana Pengembangan TI tertuang dalam IT Master Plan (ITMP) 2021 - 2024 telah diselaraskan dengan program Transformasi Digital PLN yang tertuang dalam RJPP 2020 - 2024 dan mengusung konsep *continuous improvement* sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.

IT MASTER PLAN 2021-2024

PLN has prepared the IT Master Plan (ITMP) for 2021-2024 where IT is a strategic enabler in achieving corporate strategic goals. The IT Development Plan contained in the IT Master Plan (ITMP) for 2021 - 2024 has been aligned with the PLN Digital Transformation program contained in the RJPP 2020 - 2024 and carries the concept of continuous improvement in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-02/MBU/2013 on Guidelines for Preparation Information Technology Management of State-Owned Enterprises



PLN memiliki ITMP 2021-2024 di mana IT sebagai *Strategic Enabler* dalam mencapai *Strategic Objective* Korporat

ITMP 2021-2024 dibagi ke dalam 3 Program Utama yang diturunkan menjadi 25 inisiatif dan 40 program TI, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Digital Transformation Breakthrough**

Mencakup inisiatif TI untuk mendukung program Transformasi Digital (17 *Breakthrough*), yang terdiri dari 17 inisiatif dan 18 program TI.

2. **Business Support Improvement Program**

Mencakup inisiatif *improvement* sistem TI eksisting yang digunakan untuk mendukung proses bisnis korporat, yang terdiri dari 4 inisiatif dan 18 program TI.

PLN has prepared the 2021-2021ITMP in which IT was placed as as *Strategic Enabler* in achieving corporate *Strategic Objectives*.

ITMP ITMP 2021 - 2024 is divided into 3 Main Programs which are reduced to 25 IT initiatives and 40 programs, with the following explanations:

1. **Digital Transformation Breakthrough**

Includes IT initiatives to support the Digital Transformation program (17 *Breakthrough*), which consists of 17 initiatives and 18 IT programs

2. **Business Support Improvement Program**

Includes existing IT system improvement initiatives that are used to support corporate business processes, consisting of 4 initiatives and 18 IT programs



3. Corporate Supporting Program

Mencakup inisiatif baru untuk mendukung proses bisnis korporat, yang terdiri dari 4 inisiatif TI dan 4 program TI.

Keseluruhan inisiatif TI dalam 3(tiga)program utama tersebut telah mencakup keseluruhan *layer* proses bisnis di PLN.

PENCAPAIAN IT MATURITY LEVEL

PLN telah melakukan *IT Maturity Assessment* untuk mengukur *capability level* organisasi terhadap penerapan tata kelola TI dengan menggunakan standar COBIT 5 (*Control Objective for Information and Related Technologies*) pada 5 domain proses yang terdiri dari *Evaluate, Direct and Monitor, Align Plan and Organize, Build Acquire and Implement, Deliver Service Support*, serta *Monitor Evaluate and Assess*. Berdasarkan hasil *assessment* terhadap *capability level* pada setiap proses didapatkan nilai *IT Maturity Level* PLN yaitu mencapai 3.03 (*defined*) yang menunjukkan bahwa seluruh proses telah terdokumentasi dengan baik dan terkomunikasikan oleh seluruh bagian terkait. Selaras dengan arah strategis PLN dalam pembentukan Holding Sub-Holding, telah dilakukan analisis kapabilitas dan *maturity assessment* terhadap tingkat kesiapan TI pada Sub-Holding dan Anak Perusahaan.

PENCAPAIAN PERFORMA LAYANAN TI

Pengelolaan *service management* dilakukan untuk memastikan keandalan layanan-layanan TI yang telah beroperasi sesuai dengan target *downtime* yang telah ditentukan untuk menjamin proses bisnis PLN berjalan lancar. Layanan TI terdiri dari Layanan Aplikasi, Jaringan, dan Infrastruktur yang masing-masing memiliki target SLA (*Service Level Agreement*), dengan rata-rata realisasi pencapaian SLA Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 sebagai berikut:



3. Corporate Supporting Program

Includes new initiatives to support corporate business processes, consisting of 4 IT initiatives and 4 IT programs

All IT initiatives in the 3 (three) main programs have covered all layers of business processes at PLN.

IT MATURITY LEVEL ACHIEVEMENT

PLN has carried out *IT Maturity Assessment* to measure the organization's *capability level* in IT governance using the COBIT 5 (*Control Objective for Information and Related Technologies*) standards to the 5 process domains, which consist of *Evaluate, Direct and Monitor, Align Plan and Organize, Build Acquire and Implement, Deliver Service Support*, as well as *Monitor Evaluate and Assess*. Based on the assessment results of the *capability level* of all processes, PLN gains *IT Maturity Level* score of 3.03 (*defined*), which shows that all processes have been well-documented and communicated to all related parties. In line with PLN strategic direction in forming Holding Sub-Holding, *capability analysis* and *maturity assessment* have been carried out to the IT preparedness level of Sub-Holding and Subsidiary.

IT SERVICE PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

Service management is carried out to ensure the reliability of IT services that have been operating according to predetermined *downtime* targets to ensure PLN's business processes run smoothly. IT services consist of Application, Network and Infrastructure Services, each of which has an SLA target and average realization of SLA (*Service Level Agreement*) achievement from January to December 2022 as follows:

ASSESSMENT INDI 4.0

Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) merupakan indeks acuan yang diberlakukan oleh Kementerian Perindustrian RI untuk mengukur tingkat kesiapan suatu perusahaan dalam bertransformasi menuju industri 4.0. Pengukuran berdasarkan INDI 4.0 ditetapkan sebagai kewajiban bagi BUMN sesuai Surat Kementerian BUMN Nomor S-949/MBU/10/2020. PLN telah melaksanakan *assessment Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) pada periode Oktober 2021-Maret 2022, dengan PT Surveyor Indonesia ditunjuk sebagai pihak *assessor*. Melalui *assessment* tersebut, PLN meraih skor INDI 4.0 sebesar 3,5 atau berada pada level kesiapan matang.

Secara mendasar, hasil *assessment* tersebut dapat tercapai seiring proses transformasi digital yang dilakukan oleh PLN pada semua lini, mencakup proses pelayanan pelanggan (PLN Mobile), operasi pembangkitan (*digital power plant*), serta lini-lini lain yang telah terdigitalisasi secara *end-to-end* mulai dari energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, ritel, sampai beyond kWh.

PENGEMBANGAN TI TAHUN 2022

DIGITAL TRANSFORMATION BREAKTHROUGH

Manajemen Aset Pembangkitan

EAM Pembangkitan merupakan sistem informasi pendukung proses bisnis *operation, maintenance, engineering* Pembangkitan dan proses bisnis *material management* yang terintegrasi dengan Sistem ERP PLN. EAM Pembangkitan bertujuan untuk standarisasi proses bisnis pemeliharaan aset pembangkitan, efisiensi operasional pada unit pembangkitan dengan fitur *preventive maintenance* dan *corrective maintenance*, peningkatan kualitas informasi untuk pengambilan keputusan dan memaksimalkan ROA (*Return on Assets*).

EAM Pembangkitan telah diimplementasikan secara bertahap di unit pembangkitan level 1, 2 dan 3. EAM Pembangkitan mengakomodir fitur untuk menampilkan status pekerjaan pemeliharaan aset pembangkitan yang meliputi *preventive maintenance* dan *corrective maintenance* yang disajikan dalam *dashboard* sesuai dengan parameter yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui komponen pembangkitan mana yang membutuhkan prioritas penanganan sehingga kegiatan operasional menjadi lebih efektif dan efisien.

INDI 4.0 ASSESSMENT

Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) is a reference index imposed by the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia to measure the level of readiness of a company in transforming towards industry 4.0. Measurements based on INDI 4.0 are determined as an obligation for SOEs according to the Letter of the Ministry of SOE No. S-949/MBU/10/2020. PLN has carried out an *Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) assessment for the period of October 2021-March 2022, with PT Surveyor Indonesia appointed as the assessor. Through this assessment, PLN achieved an INDI 4.0 score of 3.5 or is at a mature readiness level.

Fundamentally, the result of this assessment can be achieved in line with the digital transformation process carried out by PLN on all lines, including the customer service process (PLN Mobile), generation operations (*digital power plant*), as well as other lines that have been digitized in an *end-to-end* manner, starting from primary energy, generation, transmission, distribution, retail, to beyond kWh.

IT DEVELOPMENT IN 2022

DIGITAL TRANSFORMATION BREAKTHROUGH

Generation Asset Management

Generation EAM is an information system supporting business process operations, maintenance, Generation engineering and material management business processes that are integrated with the PLN ERP System. EAM Generation aims to standardize business processes for maintenance of generation assets, operational efficiency in generation units with *preventive maintenance* and *corrective maintenance* features, improve the quality of information for decision making and maximize ROA (*Return on Assets*).

Generation EAM has been implemented in stages at generation units level 1, 2 and 3. Generation EAM accommodates features to display the status of generation asset maintenance work which includes *preventive maintenance* and *corrective maintenance* presented on the dashboard in accordance with predetermined parameters so that it can be identified which generation component which require priority handling so that operational activities become more effective and efficient.

Manajemen Aset Transmisi

EAM Transmisi merupakan sistem pendukung proses bisnis *Operation, Maintenance, Engineering* untuk aset transmisi dimana dapat dilakukan *monitoring* kondisi peralatan transmisi untuk meminimalisir gangguan peralatan yang dapat mengakibatkan gangguan layanan kelistrikan secara meluas, *monitoring* perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan, serta hasil inspeksi pemeliharaan. EAM Transmisi merupakan aplikasi input dan *interfacing* dari aplikasi *satellite* lainnya yaitu CBM PST, JALUR, FOIS, GIS dan Aplikasi *Enterprise Asset Management* di unit transmisi yang dapat meningkatkan pemeliharaan aset melalui *preventive maintenance* dan *condition base maintenance*.

Manajemen Aset Distribusi

Penerapan EAM Distribusi bertujuan meningkatkan *predictive maintenance* sebagai informasi dalam pengambilan keputusan, standarisasi proses bisnis *maintenance* dan integrasi sistem yang lebih efektif dan efisien, kontrol dan *monitoring* sistem operasi dan pemeliharaan yang lebih terukur. EAM Distribusi ditargetkan untuk diimplementasikan di seluruh unit Distribusi PLN. Pendataan penambahan aset dan implementasi *Asset Health Index* untuk menuju *predictive maintenance* sebagai *value proposition* untuk mendukung digitalisasi data aset distribusi, serta perencanaan pemeliharaan aset dengan *Preventive Maintenance* dan *Condition Base Maintenance*.

Online Monitoring Losses

Implementasi Aplikasi *Online Monitoring Losses* untuk meningkatkan kapabilitas evaluasi pemantauan susut jaringan sehingga dapat mengoptimalkan proses *monitoring* dan peningkatan kinerja perusahaan terutama dalam penurunan susut. Aplikasi *Online Monitoring Losses* saat ini telah mengakomodir pemantauan susut energi pada *value chain* transmisi dan distribusi.

Advanced Metering Infrastructure (AMI)

AMI merupakan sistem informasi *metering* yang memiliki kapabilitas dalam pembacaan meter secara *realtime* untuk meningkatkan keberhasilan dan kelengkapan *Load Profile*, mampu menyimpan data meter, *remote connect/disconnect*, serta *Validation, Estimation, and Editing* (VEE). Selain itu pengembangan AMI juga bertujuan untuk meningkatkan fitur *theft detection* yang lebih akurat dalam mendeteksi anomali dan pencurian listrik lebih dini. AMI adalah pengembangan

Transmission Asset Management

EAM Transmission is a support system for Operation, Maintenance, Engineering business processes for transmission assets where monitoring of the condition of transmission equipment can be carried out to minimize equipment disruptions that can result in widespread disruption of electrical services, monitoring maintenance planning and scheduling, as well as the results of maintenance inspections. EAM Transmission is an input and interfacing application from other satellite applications, namely CBM PST, JALUR, FOIS, GIS Enterprise Asset Management applications in transmission units that can improve asset maintenance through preventive maintenance and condition base maintenance.

Distribution Asset Management

Implementation of Distribution EAM aims to increase predictive maintenance as information in decision making, standardization of maintenance business processes and more effective and efficient system integration, more measurable control and monitoring of operating and maintenance systems. EAM Distribution is targeted to be implemented in all PLN distribution units. Data collection on additional assets and implementation of the Asset Health Index towards predictive maintenance as a value proposition to support the digitization of distribution asset data, as well as planning for asset maintenance with Preventive Maintenance and Condition Base Maintenance.

Online Monitoring Losses

Implementation of the Online Monitoring Losses Application to improve the evaluation capability of monitoring network losses so that it can optimize the monitoring process and improve company performance, especially in reducing losses. The Online Monitoring Losses application currently accommodates monitoring of energy losses in the transmission and distribution value chain.

Advanced Metering Infrastructure (AMI)

AMI is a metering information system that has the capability of real time meter reading to increase the success and completeness of Load Profiles, is able to store meter data, remote connect/disconnect, and Validation, Estimation, and Editing (VEE). In addition, the development of AMI also aims to improve the theft detection feature which is more accurate in detecting anomalies and electricity theft earlier. AMI is an extension of AMR for automatic meter reading

dari AMR untuk pembacaan meter otomatis dengan tambahan kemampuan untuk penerapan tarif dinamis dan koneksi *Home Area Network*. Ekosistem AMI terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu *smart meter*, media komunikasi dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi yang terdiri dari *Head End System* (HES) dan *Meter Data Management System* (MDMS).

Pengembangan AMI yang telah berhasil dilakukan dari sisi teknologi informasi yaitu instalasi *Server MDMS* serta Migrasi data *A2MRT* dan *MDMS* ke *server MDMS* baru dan penyempurnaan *Dashboard MDMS* beserta fitur-fitur utama yaitu *Fitur ANEV*, *Fitur Commissioning*, *Integrasi billing AP2T*.

New PLN Mobile

PLN Mobile dikembangkan sebagai *marketplace* untuk produk kelistrikan, anak perusahaan dan mitra sekaligus *partner* diluar PLN Group. Secara garis besar tujuan dari pengembangan New PLN Mobile adalah untuk menciptakan *direct marketing channel*, membangun *branding* perusahaan, memberikan nilai pada pelanggan, meningkatkan *engagement* pelanggan, menumbuhkan loyalitas pelanggan, terwujudnya *Beyond kWh* dan Monetisasi serta tercapainya Transformasi Digital PLN.

with the addition of the ability to apply dynamic tariffs and *Home Area Network* connections. The AMI ecosystem consists of 3 (three) main components, namely smart meters, communication media and information technology-based support systems consisting of *Head End Systems* (HES) and *Meter Data Management Systems* (MDMS).

AMI development that has been successfully carried out in the information technology sector, namely the installation of the *MDMS Server* and Migration of *A2MRT* and *MDMS* data to the new *MDMS server* and refinement of the *MDMS Dashboard* along with its main features, namely *ANEV Features*, *Commissioning Features*, *Integration of AP2T billing*.

New PLN Mobile

PLN Mobile was developed as a marketplace for electricity products, subsidiaries and partners as well as partners outside the PLN Group. In general, the objectives of the development of New PLN Mobile are to create direct marketing channels, build company branding, provide value to customers, increase customer engagement, grow customer loyalty, realize *Beyond kWh* and Monetization and achieve PLN Digital Transformation.

BUMN UNTUK INDONESIA

PLN

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Yuk Download Aplikasi PLN Mobile

The New PLN 4.0
Unleashing Energy and Beyond

www.pln.co.id

Pengembangan fitur PLN Mobile yang telah berhasil diimplementasikan terdiri dari Fitur *New Electricity Connection*, Fitur *Monitoring Energy Use*, Fitur *Outage Notification*, Fitur *Billing & Payment* serta Fitur *Beyond kWh*.

- Fitur *New Electricity Connection*: terdiri dari Fitur Permohonan Layanan PLN, Fitur Pasang Baru, Fitur Ubah Daya, Fitur Penerangan Sementara, Fitur Penyambungan Sementara, Fitur Turun Daya, Fitur Listriku, Fitur integrasi Charge IN, Fitur Kelistrikan (PLTU Atap), Fitur Baterai Swap Motor Listrik;
- Fitur *Monitoring Energy Use* terdiri dari Fitur Informasi Tagihan/Token Pelanggan dan Informasi TDL;
- Fitur *Outage Notification* terdiri dari Fitur Pengaduan Pelanggan, *Pop Up Rating* Pengaduan, Fitur *Chatting*, Fitur *Broadcast Promo*, *PLN Magazine*;
- Fitur *Billing & Payment* terdiri dari Fitur Pembayaran Layanan Listrik, Fitur Pembayaran Non Tagihan Listrik; dan
- Fitur *Beyond kWh* yang terdiri dari Fitur ICONNET.

Selama tahun 2022, pengembangan PLN Mobile berpegang pada transformasi proses bisnis menuju digitalisasi dengan mengedepankan prinsip *customer focused* untuk memberikan layanan terbaik dengan integrasi fitur Pengaduan Pelanggan dengan Aplikasi Yantek Mobile. New PLN Mobile telah menjadi kanal pelaporan pengaduan yang cepat dan dapat diandalkan untuk memberikan layanan interaktif dan transparan kepada pelanggan.

Yantek Mobile

Aplikasi Yantek (Pelayanan Teknik) *Mobile* merupakan bentuk transformasi digital terhadap proses penanganan gangguan yang telah terintegrasi secara *end-to-end* untuk melakukan *tracking* posisi dan progres penanganan gangguan yang dilakukan oleh petugas Yantek. Aplikasi Yantek Mobile juga telah terintegrasi dengan Aplikasi New PLN Mobile sehingga pelanggan dapat langsung mengetahui status progres pengaduan yang dilakukan. Selain itu, dengan implementasi Aplikasi Yantek Mobile PLN mampu meningkatkan performa petugas Yantek dan mengoptimalkan kinerja petugas Yantek di lapangan.

PLN Mobile feature development that has been successfully implemented consists of New Electricity Connection feature, Energy Use Monitoring feature, Outage Notification feature, the Billing & Payment feature and Beyond kWh feature.

- New Electricity Connection Feature: consists of PLN Services Request Feature, New Installation Feature, Power Change Feature, Temporary Lighting Feature, Temporary Connection Feature, Power Down Feature, Electricity Feature, Charge IN integration feature, Electrical Feature (Rooftop Power Plant), Electric Motor Swap Battery Feature;
- Energy Use Monitoring Feature: consists of a Customer Billing/Token Information Feature and TDL Information;
- Outage Notification feature: consists of Customer Complaint Feature, Complaint Rating Pop Up, Chatting Feature, Broadcast Promo Feature, PLN Magazine;
- Billing & Payment Features: consists of Electricity Service Payment Features, Non-Electricity Billing Payment Features; And
- Beyond kWh Features: consists of ICONNET Features.

Throughout 2022, the PLN Mobile development adheres to the transformation of business processes towards digitization by prioritizing the principle of customer focus to provide the best service by integrating the Customer Complaint feature with the Yantek Mobile Application. New PLN Mobile has become a fast and reliable complaint reporting channel to provide interactive and transparent services for customers.

Yantek Mobile

The Yantek Mobile Application (Technical Services) is a form of digital transformation of the disturbance handling process that has been integrated end-to-end to track the position and progress of disturbance handling carried out by Yantek officers. The Yantek Mobile application has also been integrated with the New PLN Mobile Application so that customers can immediately find out the progress status of complaints made. In addition, by implementing the Yantek Mobile Application PLN was able to improve the performance of Yantek officers and optimize the performance of Yantek officers in the field.

Melalui transformasi layanan yang mengedepankan pelayanan terbaik kepada pelanggan, proses bisnis yang dahulu manual dan kompleks kini telah diubah berbasis digital, sehingga layanan PLN kepada pelanggan kini menjadi lebih sederhana, cepat, terintegrasi, mudah dan dapat dimonitor serta dikontrol secara *real-time*.

Virtual Command Center

Sebagai bagian dari digitalisasi proses bisnis pelayanan pelanggan, *Virtual Command Center* dikembangkan sebagai *platform monitoring* kinerja penanganan gangguan dan keluhan pelanggan. *High Level Management* kini dapat memonitor dan menghubungi secara hirarki pihak yang terlibat dalam tindak lanjut pengaduan gangguan listrik di setiap unit PLN.

Peremajaan dan Reengineering Sistem Billing & Payment Collection

Pelaksanaan Peremajaan Infrastruktur Sistem *Payment Collection* dilakukan pada sisi *hardware* dan migrasi *software* untuk meningkatkan keandalan dan *high availability* pengelolaan sistem *billing* PLN. Selain itu, secara bertahap telah disusun rencana jangka panjang *Re-engineering Design* sistem *Billing* dan pelayanan pelanggan untuk modernisasi proses bisnis pelayanan pelanggan dan pengembangan *High Level Design Architecture*-nya.

Centralized Payment

Pengembangan Aplikasi *Vendor Invoicing Portal* (VIP) sebagai sentralisasi pembayaran merupakan bagian dari transformasi digital PLN dari sisi keuangan. Melalui Aplikasi *Vendor Invoicing Portal* (VIP) dapat dilakukan *streamline* proses pembayaran yang dahulu dilakukan secara manual oleh pihak ketiga menjadi satu pintu melalui *platform* yang terintegrasi. Proses pembayaran yang tersentralisasi mendukung percepatan proses verifikasi dan validasi penagihan serta monitoring status pembayaran yang lebih transparan.

Through service transformation that prioritizes the best service to customers, business processes that used to be manual and complex have now been changed to a digital basis, so that PLN's services to customers are now simpler, faster, integrated, easier and can be monitored and controlled in real-time.

Virtual Command Center

As part of digitizing customer service business processes, the *Virtual Command Center* was developed as a performance monitoring platform for handling customer disturbances and complaints. *High Level Management* can now monitor and contact the hierarchical parties involved in following up on complaints of power failures in each PLN unit.

Billing & Payment Collection System Rejuvenation and Reengineering

Payment Collection System Infrastructure Rejuvenation implementation was carried out on the hardware aspect and software migration to increase the reliability and high availability of the PLN billing system management. In addition, a long term plan has been drawn up for the *Re-engineering Design* of the *Billing* system and customer service to modernize customer service business processes and develop its *High Level Design Architecture*.

Centralized Payment

Vendor Invoicing Portal (VIP) application development as a centralized payment is a part of PLN digital transformation from financial aspects. Through *Vendor Invoicing Portal* (VIP) application, payment process streamline can be first carried out manually by third-party as a one-stop solution through an integrated platform. The centralized payment process supports the acceleration of billing verification and validation processes as well as more transparent monitoring of payment status.



Centralized Planning

Pengembangan Aplikasi DAMS (*Daily Activity Management System*) sebagai aplikasi untuk pengendalian secara vertikal dan horizontal seluruh proses perencanaan program investasi secara terpusat yang termasuk didalamnya evaluasi dan prioritas proyek investasi selaras dengan RKAP, RJP dan RUPTL PLN.

Centralized Planning

The DAMS (*Daily Activity Management System*) application development for vertical and horizontal control of all centralized investment planning which includes investment project evaluation and prioritization in line with PLN's Work Plan and Budget, Long-Term Plan, and Electricity Supply Business Plan.

PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN BISNIS

Implementasi MIS menuju *Single Source of Truth (SSoT)*

Penyempurnaan ERP termasuk data, proses, dan *people* sebagai solusi yang perlu dilakukan untuk menuju *Single Source of Truth (SSoT)* melalui arsitektur desain yang terintegrasi, revitalisasi proses bisnis berbasis TI dengan pembaharuan platform ERP serta melaksanakan *change management* yang melibatkan *business process owner*. Manfaat operasional yang didapatkan dari implementasi *Management Information System (MIS)* menuju *Single Source of Truth (SSoT)* antara lain sumber data utama yang akuntabel, valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembuatan laporan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan validitas data laporan keuangan, laporan progres dan keuangan proyek, dan realisasi anggaran, serta peningkatan efektivitas dan kemudahan dalam proses 4R (*right size, right spend, right skill, right system*) dalam *Human Experience Management*.

BUSINESS SUPPORT IMPROVEMENT PROGRAM

MIS Implementation to *Single Source of Truth (SSoT)*

Improvements to ERP including data, processes, and people as solutions that need to be implemented towards a *Single Source of Truth (SSoT)* through an integrated design architecture, revitalized IT-based business processes by updating the ERP platform and implementing change management involving business process owners. Operational benefits obtained from the implementation of the *Management Information System (MIS)* towards a *Single Source of Truth (SSoT)* include accountable, valid and accountable main data sources as a basis for preparing reports and supporting appropriate decision making, increasing the validity of financial report data, reporting project progress and finance, and budget realization, as well as increasing the effectiveness and ease of the 4R process (*right size, right spend, right skill, right system*) in *Human Experience Management*.

Implementasi *Management Information System (MIS)* menuju *Single Source of Truth (SSoT)* selaras dengan *IT Master Plan 2021-2024* yang ditargetkan secara jangka panjang dengan 3 tahapan utama sebagai berikut :

- *Short Term Improvement* yang mencakup perbaikan *monitoring* anggaran dan konsolidasi keuangan, *improvement* SAP HR, integrasi ke aplikasi Non-SAP, dan *enhancement* *Project Management Office (PMO)*;
- Fase Implementasi pertama yang mencakup fungsi *back office* (keuangan, akuntansi, perpajakan, anggaran) *material management* dan *human resources*; dan
- Fase Implementasi kedua yang mencakup integrasi *Enterprise Asset Management (EAM)* serta fungsi *Governance, Risk and Compliance (GRC)*.

Management Information System (MIS) implementation to *Single Source of Truth (SSoT)* aligns with the 2021-2024 *IT Master Plan*, which will be carried out in the long term in 3 main stages as follows:

- *Short Term Improvement*, which includes consolidation budget and financial monitoring improvement, SAP HR improvement, integration into Non-SAP applications, and *Project Management Office (PMO)* enhancements;
- The first implementation phase, which includes back office functions (finance, accounting, taxation, budgeting) *material management* and *human resources*; and
- The second implementation phase, which includes the integration of *Enterprise Asset Management (EAM)* and the *Governance, Risk and Compliance (GRC)*.

Selama tahun 2022, telah dilakukan *short term improvement* dengan pencapaian 26 inisiatif *quick win* perbaikan pada sistem anggaran, keuangan, konsolidasi laporan keuangan, *human resource*, konsolidasi Non ERP/SAP dan *project management office*.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi

Pengembangan Aplikasi SMARTER (Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi) sebagai aplikasi konsolidasi pengelolaan risiko korporat secara terintegrasi. Aplikasi SMARTER telah diimplementasikan secara Nasional di Unit PLN untuk penyalarsan penyusunan profil dan kajian risiko, pemantauan mitigasi risiko dan pencapaian *key risk indicator* serta pengelolaan tingkat risiko korporat untuk mencapai *risk appetite* perusahaan.

PROGRAM PENDUKUNG PERUSAHAAN

Project Management Office (PMO)

Peningkatan keandalan sistem PMO yang telah digunakan secara nasional untuk memonitor *milestone* utama pembangunan proyek-proyek pembangkit, transmisi dan gardu induk. Selama tahun 2022 telah dilakukan *enhancement* terhadap sistem PMO eksisting dengan melakukan integrasi pada sistem *budgeting* dan pengembangan *Dashboard Capex Monitoring* untuk menunjang proses bisnis *end-to-end* perencanaan dan pengelolaan proyek.

Manajemen Energi Primer

Sistem manajemen energi primer meliputi aplikasi pengelolaan batubara dan aplikasi pengelolaan bahan bakar gas dan minyak. Aplikasi pengelolaan batubara yang mencakup fungsi pencatatan kontrak, transaksi, persediaan dan pembayaran pada Pembangkit Listrik PLN Group telah diimplementasikan secara nasional pada regional bisnis PLN. Sedangkan aplikasi GBMO (Gas BBM Online) dengan fitur yang mengakomodir pencatatan kontrak, transaksi dan pelaporan persediaan bahan bakar minyak pada Pembangkit PLN Group yang telah diimplementasikan secara nasional pada regional bisnis PLN.

Throughout 2022, short term improvement has been carried out with 26 quick win initiatives in improving the budget, financing, consolidated financial statements, human resource, consolidated Non-ERP/SAP and project management office.

Integrated Risk Management Information System

SMARTER Application (Integrated Risk Management Information System) application development as an integrated corporate risk management consolidated application. The SMARTER application has been implemented nationally in the PLN Unit for alignment of profile preparation and risk assessment, monitoring of risk mitigation and achievement of key risk indicators as well as management of corporate risk levels to achieve the company's risk appetite.

CORPORATE SUPPORTING PROGRAM

Project Management Office (PMO)

Increasing the reliability of the PMO system which has been used nationally to monitor key milestones in the construction of power, transmission and substation projects. During 2022 enhancements have been made to the existing PMO system by integrating the budgeting system and developing the Capex Monitoring Dashboard to support the end-to-end business processes of project planning and management.

Primary Energy Management

The primary energy management system includes coal management applications and gas and oil fuel management applications. The coal management application which includes the function of recording contracts, transactions, inventories and payments at the PLN Group Power Plant has been implemented nationally in the PLN business region. Meanwhile, the GBMO (Gas BBM Online) application has a feature that accommodates the recording of contracts, transactions and reporting of fuel supplies at the PLN Group Power Plant which has been implemented nationally in the PLN business region.



Implementasi *Big Data Analytics*

Pengembangan *Big Data* dan EDM (*Enterprise Data Management*) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen, meningkatkan kualitas, kelengkapan, dan validitas data pada bisnis proses perusahaan, membangun pusat data transaksi PLN untuk keperluan pelaporan dan analisis, serta sebagai instrumen dalam melakukan *predictive analysis* sehingga hal-hal yang dapat menghambat operasional bisnis dapat diantisipasi.

Pengembangan *dashboard* strategis utama dengan skala korporat yang telah berhasil diimplementasikan, yaitu:

- **Dashboard PBR (Performance Business Review)**
Dashboard data kinerja perusahaan secara korporat hingga turunannya pada level Divisi, Regional, Unit hingga Anak Perusahaan.
- **Dashboard Cash War Room**
Dashboard pengendalian anggaran dan kinerja perusahaan guna meningkatkan likuiditas dan akuntabilitas, pengelolaan *profit and loss* tingkat regional serta manajemen investasi terintegrasi yang selaras dengan rencana jangka menengah, *pipeline* proyek dan rencana investasi.
- **Dashboard Keuangan Anak Perusahaan**
Membangun *dashboard* Konsolidasi Laporan Keuangan Anak Perusahaan.
- **Dashboard Pengadaan (E-Procurement)**
Dashboard data pengadaan untuk meningkatkan produktivitas proses pengadaan.
- **Dashboard PLN Mobile**
Dashboard data PLN Mobile untuk pengelolaan pengguna dan strategi peningkatan kepuasan pelanggan.
- **Dashboard Customer Complaints**
Dashboard optimalisasi biaya operasional yantek, evaluasi kinerja operasi aset distribusi, dan personalisasi respons penanganan keluhan pelanggan untuk meningkatkan bisnis proses PLN dalam penanganan keluhan dan meminimalkan keluhan pelanggan di masa depan. *Insight customer complaints* juga termasuk dalam sub-inisiatif dalam *breakthrough Yantek Optimization*.
- **Dashboard Peta Potensi Pasar**
Dashboard untuk evaluasi peta potensi pasar sehingga dapat disusun strategi literasi pasar yang lebih optimal.

Implementation of *Big Data Analytics*

The development of Big Data and Enterprise Data Management (EDM) aims to increase the effectiveness of management decision making, improve the quality, completeness, and validity of data in the company's business processes, build a PLN transaction data center for reporting and analysis purposes, as well as an instrument in performing predictive analysis so that things that can hinder business operations can be anticipated.

Dashboard development that has been successfully implemented, namely:

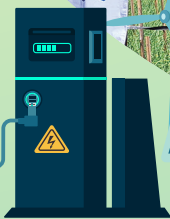
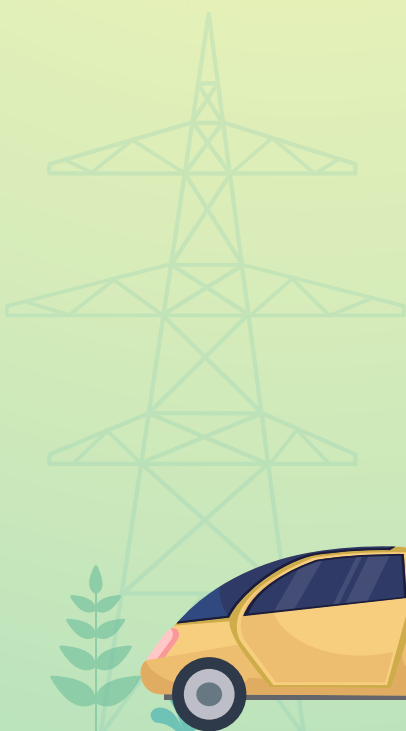
- **PBR Dashboard (Performance Business Review)**
Corporate performance data dashboard from a corporate down to its derivatives at the Division, Regional, Unit to Subsidiary levels.
- **Cash War Room Dashboard**
Dashboard for budget and corporate performance control to improve liquidity and accountability, regional profit and loss management, as well as integrated investment management aligning with the medium-term plan, the pipeline project and investment plan.
- **Subsidiary Financial Dashboard**
Establishing dashboard for Consolidated Subsidiaries Corporate Financial Statements.
- **Procurement Dashboard (E-Procurement)**
Procurement data insights dashboard which increase the productivity of the procurement process.
- **PLN Mobile Dashboard**
PLN Mobile data insights dashboard which increase the number of users and customer satisfaction.
- **Customer Complaints Dashboard**
Technical service operational cost optimization insights, evaluating distribution asset operating performance, and personalizing customer complaint handling responses to improve PLN's business processes in handling complaints and minimizing future customer complaints. *Insight customer complaints* are also included in sub-incentives in Technical Service Optimization breakthrough.
- **Market Potential Map Dashboard**
Dashboard used to evaluate market potency map, thereby a more optimum market literacy is able to be arranged.

- **Dashboard Stok Material**
Dashboard data ketersediaan material dalam rangka pelayanan pelanggan.
- **Dashboard Transmission and Distribution**
Dashboard data aset transmisi dan distribusi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen terkait *asset performance* serta *operation maintenance effectiveness*.
- **Dashboard Anti Blackout**
Dashboard untuk *monitoring* kesiapan Pembangkit, Transmisi dan Operasi Sistem melalui serangkaian pengujian dan aktivasi peralatan pembangkit, implementasi *adaptive defense scheme* pada Sistem Jawa Bali, penggantian material transmisi utama, realisasi *scanning* dan *recommissioning* di transmisi sehingga mempunyai upaya preventif dalam mencegah terjadi *blackout*.
- **Dashboard Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi**
Dashboard untuk *monitoring* risiko korporat termasuk pemantauan mitigasi risiko, tingkat risiko dan pemantauan *key risk indicator* yang terkonsolidasi secara korporat.
- **Dashboard Natural Disaster Management System**
Dashboard peta risiko, mitigasi, dan koordinasi untuk optimalisasi pengelolaan kebencanaan.
- **Material Stock Dashboard**
Dashboard for material availability data for customer service.
- **Transmission and Distribution Dashboard**
Transmission and distribution asset data dashboard used to assist management decision making regarding asset performance and Operation Maintenance Effectiveness (OpHar effectiveness).
- **Anti Blackout Dashboard**
Dashboard used to monitoring system generator, transmission, and operation preparedness through a set of tests and activations of generation equipment, adaptive defense scheme system implementation in Java Bali, replacement of main transmission material, transmission scanning and recommissioning realization in order to have blackout preventive measures.
- **Integrated Risk Management System Dashboard**
Dashboard for monitoring consolidated corporate risk, including risk mitigation, risk level and key risk indicator.
- **Natural Disaster Management System Dashboard**
Dashboard of risk maps, mitigation, and coordination of disaster management optimization.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social and Environmental Responsibility

06







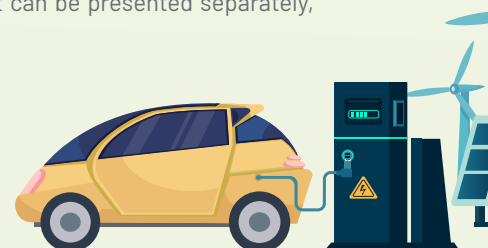
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social and Environmental Responsibility



Seuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /SE0JK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, seluruh informasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang telah dilaksanakan untuk tahun 2022 disajikan di dalam Laporan Keberlanjutan 2022 PT PLN (Persero), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini namun dapat disajikan secara terpisah, dan melengkapi satu sama lain.

In accordance with the Financial Services Authority Circular No. 16 /SE0JK.04/2021 Regarding Report Form and Content Issuer or Public Company Annual Report, all information on Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities that have been carried out for 2022 is presented in the Report Sustainability 2022 PT PLN (Persero), which is an integral part of this Annual Report but can be presented separately, and complement one another.



Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
I. Ketentuan Umum / General Provisions	
1. Laporan tahunan emiten atau perusahaan publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik. / Annual report of a listed company is one of the most important sources as the base for investors or shareholders in making investment decision, and is a means of monitoring issuers or public company.	✓
2. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. / Along with the development of capital market and the growing needs of investors or shareholders regarding information disclosure, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to improve the quality of information disclosure through annual report.	✓
3. Laporan tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. / Annual report should be prepared in an orderly manner and should be informative to provide conveniences for the investors or shareholders in getting the information they need.	✓
4. Surat edaran otoritas jasa keuangan ini merupakan pedoman bagi emiten atau perusahaan publik yang wajib diterapkan dalam menyusun laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. / This circular letter of the financial service agency serves a guidelines for issuers or public companies that should be applied in preparing their annual report.	✓
II. Bentuk Laporan Tahunan / Format Of Annual Report	
1. Laporan tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik. / Annual report should be presented in the printed format and in electronic document copy.	✓
2. Laporan tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran a4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. / The printed version of the annual report should be printed on light-colored paper of fine quality, in a4 size, bound and can be reproduced in good quality.	✓
3. Laporan tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan laporan tahunan yang dikonversi dalam format pdf. / The annual report presented in electronic document format is the annual report converted into pdf format.	✓
4. Laporan tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan laporan tahunan yang dikonversi dalam portable document format (pdf). / The annual report presented in the form of an electronic document is an annual report converted in a portable document format (pdf).	✓
III. Isi Laporan Tahunan / Content Of Annual Report	
1. Laporan tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai / annual report should contain at least the following information :	✓
a. Ikhtisar data keuangan penting; / Summary of key financial information;	✓
b. Informasi saham (jika ada); / Stock information (if any);	✓
c. Laporan Direksi; / The Board of Directors report;	✓
d. Laporan Dewan Komisaris; / The Board of Commissioners report;	✓
e. Profil emiten atau perusahaan publik; / Profile of issuer or public company;	✓
f. Analisis dan pembahasan manajemen; / Management discussion and analysis;	✓
g. Tata kelola emiten atau perusahaan publik; / Corporate governance applied by the issuer or public company;	✓
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik; / Corporate social and environmental responsibility of the issuer or public company;	✓
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan / Audited annual report; and	✓
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan; / Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the annual report;	✓
2. uraian isi laporan tahunan / description of content of annual report	
a. Ikhtisar data keuangan penting / Summary of key financial information Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika emiten atau perusahaan publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: / Summary of key financial information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business if the issuers or the public company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:	22-26

**Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021:****Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik**

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
1) Pendapatan/penjualan; / Income/sales;	24
2) Laba bruto; / Gross profit;	24
3) Laba (rugi); / Profit (loss);	25
4) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; / Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;	25
5) Total laba (rugi) komprehensif; / Total comprehensive profit (loss);	25
6) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; / Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;	25
7) Laba (rugi) per saham; / Earning (loss) per share;	25
8) Jumlah aset; / Total assets;	22
9) Jumlah liabilitas; / Total liabilities;	23-24
10) Jumlah ekuitas; / Total equities;	23
11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; / Profit (loss) to total assets ratio;	26
12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; / Profit (loss) to equities ratio;	26
13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; / Profit (loss) to income ratio;	26
14) Rasio lancar; / Current ratio;	26
15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas; / Liabilities to equities ratio;	26
16) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan / Liabilities to total assets ratio; and	26
17) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya; / Other information and financial ratios relevant to the issuer or public company and type of industry;	26
b. informasi saham / Stock information	32
informasi saham (jika ada) paling sedikit memuat: / Stock information (if any) at least contains:	32
1) Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi: / Shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:	-
a) Jumlah saham yang beredar; / Number of outstanding shares;	-
b) Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; / Market capitalization based on the price at the stock exchange where the shares listed on;	-
c) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan / Highest share price, lowest share price, closing share price at the stock exchange where the shares listed on; and	-
d) Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan; / share volume at the stock exchange where the shares listed on;	-
Informasi pada huruf b), huruf c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika emiten merupakan perusahaan terbuka dan sahamnya tercatat di bursa efek; / Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the issuer is a public company whose shares is listed in the stock exchange;	-
2) Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: / In the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:	33
a) Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; / Date of corporate action	33
b) Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham; / Stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;	33
c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan / Number of outstanding shares prior to and after corporate action; and	33
d) Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan / Total converted securities (if any); and	33
e) Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; / Share price prior to and after corporate action;	33
3) Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>), dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, emiten atau perusahaan publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; dan / In the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the issuers or public company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and	-

Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
4) Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode laporan tahunan, emiten atau perusahaan publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; / In the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the annual report, then the issuer or the public company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;	-
c. Laporan Direksi / The Board of Directors report	58-83
Laporan Direksi paling sedikit memuat: / The Board of Directors report should at least contain the following items	
1) Uraian singkat mengenai kinerja emiten atau perusahaan publik, paling sedikit meliputi: / The performance of the issuer or public company, at least covering:	
a) Strategi dan kebijakan strategis emiten atau perusahaan publik; / Strategy and strategic policies of the issuer or public company;	63-64
b) Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis emiten atau perusahaan publik; / The role of the Board of Directors in formulating the strategy and strategic policies of the issuer or public company;	64
c) Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi emiten atau perusahaan publik; / Processes carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the issuer's or public company's strategy;	65
d) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan / Comparison between achievement of results and targets; and	65
e) Kendala yang dihadapi emiten atau perusahaan publik; / Challenges faced by the issuer or public company;	75-76
2) Gambaran tentang prospek usaha; / Description on business prospects;	77-78
3) Penerapan tata kelola emiten atau perusahaan publik; dan / Implementation of good corporate governance by issuer or public company; and	79-80
d. Laporan Dewan Komisaris / The Board of Commissioners report	38-57
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat: / The Board of Commissioners report should at least contain the following items:	
1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan emiten atau perusahaan publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi emiten atau perusahaan publik yang dilakukan oleh Direksi; / Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the issuer or the public company;	42-45
2) Pandangan atas prospek usaha emiten atau perusahaan publik yang disusun oleh Direksi; / View on the business prospects of the issuer or public company as established by the Board of Directors;	54-55
3) Pandangan atas penerapan tata kelola emiten atau perusahaan publik; / View on the implementation of the corporate governance by the issuer or public company;	45-49
e. Profil emiten atau perusahaan publik / Profile of the issuer or public company	86-163
Profil emiten atau perusahaan publik paling sedikit memuat: / Profile of the issuer or public company at least contains:	
1) Nama emiten atau perusahaan publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; / Name of issuer or public company, including change of name, reason of change, and the effective date of the change of name during the year under review;	86, 90
2) Akses terhadap emiten atau perusahaan publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai emiten atau perusahaan publik, meliputi: / Access to issuer or public company, including branch office or representative office, where public can have access of information of the issuer or public company, which include:	87
a) Alamat; / Address;	87
b) Nomor telepon; / Telephone number;	87
c) Alamat surat elektronik; dan / E-mail address; and	87
d) Alamat situs web; / Website address;	87
3) Riwayat singkat emiten atau perusahaan publik; / Brief history of the issuer or public company;	88-89
4) Visi dan misi emiten atau perusahaan publik serta budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan; / Vision and mission of the issuer or public company;	100-105
5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; / Line of business according to the latest articles of association, and types of products and/or services produced;	96-99

**Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021:****Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik**

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
6) Wilayah operasional emiten atau perusahaan publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. / The operational area of the issuer or public company; operational area is the area of implementation of operational activities or the scope of the company's operational activities.	152-157
7) Struktur organisasi emiten atau perusahaan publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan; / Structure of organization of the issuer or public company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;	106-107
8) Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; / list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	138
9) Profil Direksi, paling sedikit memuat: / The Board of Directors profiles include:	122-133
a) Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; / Name and short description of duties and functions;	122-133
b) Foto terbaru; / Latest photograph;	122-133
c) Usia; / age;	122-133
d) Kewarganegaraan; / Citizenship;	122-133
e) Riwayat pendidikan; / Education;	122-133
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi: / History position, covering information on:	122-133
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan; / Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said issuer or public company	122-133
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan / Dual position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position (if any); and	122-133
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; / Working experience and period in and outside the issuer or public company;	122-133
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; / Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party;	122-133
h) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; / Changes in the composition of members of the Board of Directors and the reasons for the changes. in the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, then this matter shall be disclosed;	81-82, 134
10) Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: / The Board of Commissioners profiles, at least include:	108-120
a) Nama; / Name;	108-120
b) Foto terbaru; / Latest photograph;	108-120
c) Usia; / Age;	108-120
d) Kewarganegaraan; / Citizenship;	108-120
e) Riwayat pendidikan; / Education;	108-120
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi: / History position, covering information on:	108-120
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan komisaris independen pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan; / Legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners who is not independent commissioner at the said issuer or public company;	108-120
(2) Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan; / Legal basis for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also independent commissioner at the said issuer or public company;	108-120
(3) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan / Dual position; as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other position (if any); and	108-120
(4) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; / Working experience and period in and outside the issuer or public company;	108-120
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan / Affiliation with other members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party; and	108-120
h) Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada); / Statement of independence of independent commissioner in the event that the independent commissioner has been appointed more than 2 (two) periods (if any);	-

Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
i) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; / Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the change. in the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, then this matter shall be disclosed;	55-56, 121
11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; / In the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the annual report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the annual report;	135
12) Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku; / Number of employees and description of distribution of education level and age of the employee in the year under review;	136-138
13) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari: / Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:	139
a) Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham emiten atau perusahaan publik; / shareholders having 5% (five percent) or more shares of issuer or public company;	139
b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham emiten atau perusahaan publik; dan / Commissioners and Directors who own shares of the issuers or public company; and	139
c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik; / Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the issuers or public company;	139
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. / The above information can be presented in tabular form.	139
14) Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham emiten atau perusahaan publik oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota direksi dan anggota dewan komisaris; / percentage of indirect ownership of issuer or public company shares by members of the board of directors and members of the board of commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information regarding shareholders who are registered in the register of shareholders for the benefit of indirect ownership by members of the board of directors and members of the board of commissioners; Dalam hal seluruh anggota direksi dan/atau seluruh anggota dewan komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham emiten atau perusahaan publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. / In the event that all members of the board of directors and/or all members of the board of commissioners do not have indirect ownership of the shares of the issuer or public company, then this matter must be disclosed.	139
15) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: / Number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:	139
a) Kepemilikan institusi lokal; / Ownership of local institutions;	
b) Kepemilikan institusi asing; / Ownership of foreign institutions;	
c) Kepemilikan individu lokal; dan / Local individual ownership; and	
d) Kepemilikan individu asing; / Foreign individual ownership;	
16) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali emiten atau perusahaan publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; / information on major shareholders and controlling shareholders the issuers of public company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;	139, 264
17) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana emiten atau perusahaan publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi emiten atau perusahaan publik tersebut (jika ada); / Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by issuers or public company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the issuers of public company (if any); Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut; / For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;	140-144
18) Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham emiten atau perusahaan publik dicatitkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); / Chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of stock exchange where the issuers of public company shares are listed;	145
19) Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); / Chronology of securities listing in addition to the said security in point 15), which at least should contain the name of the securities, year of issuance, date of maturity, bid price, and rating of the securities (if any);	145-146

**Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021:****Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik**

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
<p>20) Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: / Information on the use of public accounting (AP) and public accounting firms (KAP) services and their networks/associations/alliance includes:</p> <p>a) Nama dan alamat; / Name and address;</p> <p>b) Periode penugasan; / Assignment period;</p> <p>c) Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; / Information on audit and/or non-audit services provided;</p> <p>d) Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan / Audit and/or non-audit fee for each assignment given during the fiscal year; and</p> <p>e) Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan / In the event that the appointed AP and KAP and their network/association/alliance do not provide non-audit services, the information shall be disclosed; and</p> <p>Pengungkapan informasi penggunaan jasa ap dan kap beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. / Disclosure of information on the use of ap and kap services and their networks/associations/alliances can be presented in tabular form.</p>	147, 394-395
21) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP; / Name and address of capital market supporting institutions and/or professionals;	147-152
f. Analisis dan pembahasan manajemen / Management discussion and analysis	166-243
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: / Management analysis and discussion annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:	
1) Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri emiten atau perusahaan publik, paling sedikit mengenai: / Operational review per business segment, according to the type of industry of the issuer or public company including:	178-187
a) Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; / Production, including process, capacity, and growth;	178-187
b) Pendapatan/penjualan; dan / Income/sales; and	178-187
c) Profitabilitas; / Profitability;	178-187
2) Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: / Comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:	189-205
a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; / Current assets, non-current assets, and total assets;	189-191
b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; / z term liabilities, long term liabilities, total liabilities;	189, 192-193
c) Ekuitas; / Equities;	191-192
d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan / Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and	194-204
e) Arus kas; / Cash flows;	204-205
3) Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; / The capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;	205-206
4) Tingkat kolektibilitas piutang emiten atau perusahaan publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; / Accounts receivable collectability of the issuer or public company, including the computation of the relevant ratios;	205-206
5) Struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; / Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;	207-208
6) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi: / Discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:	208-210
a) Tujuan dari ikatan tersebut; / The purpose of such ties;	209-210
b) Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; / Source of funds expected to fulfill the said ties;	210
c) Mata uang yang menjadi denominasi; dan / Currency of denomination; and	210
d) Langkah yang direncanakan emiten atau perusahaan publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; / Steps taken by the issuer of public company to protect the position of a related foreign currency against risks;	210
7) Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi: / Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:	211

Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
a) Jenis investasi barang modal; / Type of investment of capital goods;	211
b) Tujuan investasi barang modal; dan / Objective of the investment of capital goods; and	211
c) Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; / Value of the investment of capital goods;	211
8) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); / Material information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);	211-212
9) Prospek usaha dari emiten atau perusahaan publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; / Information on the prospects of the issuer or the company in connection with industry, economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;	214-218
10) Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: / Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:	213-214
a) Pendapatan/penjualan; / Income/sales;	214
b) Laba (rugi); / Profit (loss);	214
c) struktur modal (<i>capital structure</i>); atau / Capital structure; or	214
d) Hal lainnya yang dianggap penting bagi emiten atau perusahaan publik; / Others that deemed necessary for the issuer or public company;	214
11) Target/proyeksi yang ingin dicapai emiten atau perusahaan publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: / Target/projection at most for the next one year of the issuer or public company, concerning:	214 213-214
a) Pendapatan/penjualan; / Income/sales;	214
b) Laba (rugi); / Profit (loss);	214
c) struktur modal (<i>capital structure</i>); / Capital structure;	214
d) Kebijakan dividen; atau / Dividend policy; or	214
e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi emiten atau perusahaan publik; / Others that deemed necessary for the issuer or public company;	214
12) Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa emiten atau perusahaan publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; / Marketing aspects of the company's products and/or services the issuer or public company, among others marketing strategy and market share;	218-222
13) Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit: / Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:	222-223
a) Kebijakan dividen; / Dividend policy;	222
b) Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; / the date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;	223
c) Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan / Amount of cash per share (cash and/or non cash); and	223
d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar; / Amount of dividend per year paid;	223
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. / Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the issuer or public company has not distributed dividends in the last 2 (two) years, this will be disclosed.	222-223
14) Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: / Use of proceeds from public offerings, under the condition of:	223
a) Dalam hal selama tahun buku, emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan / During the year under review, on which the issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and	-
b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka emiten menjelaskan perubahan tersebut; / In the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the regulation of the financial services authority on the report of the utilization of proceeds from public offering, then issuer should explain the said changes;	-
15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat: / Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, among others include:	223-231

Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021:

Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi; / Transaction date, value, and object;	227-228
b) Nama pihak yang melakukan transaksi; / Name of transacting parties;	224-226
c) Sifat hubungan afiliasi (jika ada); / Nature of related parties (if any);	224-226
d) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan / Description of the fairness of the transaction; and	228
e) Pemenuhan ketentuan terkait; / Compliance with related rules and regulations;	228-229
f) Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), emiten atau perusahaan publik juga mengungkapkan informasi: / In the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information referred to in letter a) through letter e), the issuer or public company also discloses the following information:	
(1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms-length principle</i>); dan / A statement from the Board of Directors that the affiliated transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliated transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by fulfilling the arms-length principle; and	228-229
(2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms-length principle</i>); / The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others carried out by fulfilling the arms-length principle;	228
g) Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; / For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out in order to generate business income and are carried out routinely, repeatedly and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out in order to generate business income and carried out routinely, repeatedly, and/or continuously;	
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. / In case of the aforementioned affiliated transactions or material transactions have been disclosed in the annual financial statements, information is added regarding references to disclosure in said annual financial statements.	223-229
h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; / For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions which are the result of the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, information regarding the date of the GMS that approves the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	-
i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; / In the event that there are no affiliated transactions and/or conflict of interest transactions, then this matter shall be disclosed;	-
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap emiten atau perusahaan publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan / Changes in regulation which have a significant effect on the issuer or public company and impacts on the company (if any); and	232-235
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); / Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any);	235-236
g. Tata kelola emiten atau perusahaan publik / Corporate governance of the issuer or public company	247
Tata kelola emiten atau perusahaan publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: / Corporate governance of the issuer or public company contains at least:	
1) RUPS, paling sedikit memuat: / GMS, at least contains:	263-272
a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1(satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: / Information regarding GMS resolutions in the fiscal year and 1(one) year before the fiscal year includes:	267-271
(1) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1(satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan / GMS resolutions in the fiscal year and 1(one) year prior to the fiscal year realized in the fiscal year; and	271-272
(2) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1(satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; / GMS decisions in the fiscal year and 1(one) year prior to the fiscal year that have not been realized and the reasons for not being realized;	271-272

Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
b) Dalam hal emiten atau perusahaan publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; / In the event that an issuer or public company uses an independent party in the implementation of the GMS to count the votes, it shall be disclosed regarding this matter;	271
2) Direksi, paling sedikit memuat: / The Board of Directors, covering:	348-379
a) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; / The tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors; informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. / information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	349-351, 353-358
b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi; / Statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;	349
c) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut; / The policies and the frequency of the meeting of the Board of Directors, including the joint meeting with board of commissioners, and attendance of member of the Board of Directors in the said meeting; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. / Information on the level of attendance of members of the Board of Directors at meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners or GMS can be presented in tabular form.	363-367
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi; / Training and/or competency improvement for members of the Board of Directors:	367-373
(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan / Policy on training and/or competency improvement for members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	360-361, 367-373
(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); / Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	367-373
e) Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: / Assessment on the performance of the committee under the Board of Directors;	-
(1) Prosedur penilaian kinerja; dan / Performance assessment procedures; and	-
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan / The criteria used are performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and	-
f) Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. / In the event that the issuer or public company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then this is disclosed.	-
3) Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: / The Board of Commissioners, among others include:	272-307
a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; / Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	273-275
b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris; / Statement that the board of commissioner has already have the board manual or charter;	272-273
c) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; / Policies and frequency of meeting of the Board of Commissioners, meeting with the Board of Directors, and attendance of each member of the Board of Commissioners in the said meetings; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. / Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at meetings of the Board of Commissioners, meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, or GMS can be presented in tabular form.	281-289
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris; / Training and/or competency improvement for members of the Board of Commissioners:	288-289
(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan / Policy on training and/or competency improvement for members of the Board of Commissioners, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	276, 288-289
(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); / Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	288-289

**Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021:****Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik**

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
e) Penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: / Policies of the issuer or public company regarding the assessment on the performance of the Board of Directors and board of commissioners and the implementation, at least covering:	301-304, 373-376
(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; / Procedure for the implementation of performance assessment;	301
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan / The criteria used include performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and	301
(3) Pihak yang melakukan penilaian; / Assessor;	301
f) Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: dan / Assessment on the performance of the committees under the Board of Commissioners; and	49-53
(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; / Procedure for the implementation of performance assessment;	49-53
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan / The criteria used include performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and	49-53
4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: / Nomination and remuneration for the Board of Directors and board of commissioners, at least contains:	304-306
a) Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; dan / Nomination procedures, including a brief description of the policies and nomination process for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	275, 359
b) Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: / Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and board of commissioners, including:	304-306
(1) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; / Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and board of commissioners;	304, 376
(2) Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan / Remuneration structure for the Board of Directors and board of commissioners, such as salaries, allowances, tantiem/bonuses and others; and	305-306, 376-378
(3) Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; / The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. / disclosure of information can be presented in tabular form.	305-306
5) Dewan pengawas syariah, bagi emiten atau perusahaan publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: / Sharia supervisory board, for issuer or public company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:	-
a) Nama; / Name;	-
b) Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; / Legal basis for appointment of the sharia supervisory board;	-
c) Periode penugasan dewan pengawas syariah; / The assignment period of the sharia supervisory board;	-
d) Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan / Duty and responsibility of sharia supervisory board; and	-
e) Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap emiten atau perusahaan publik; / Frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of sharia principles by the issuer or public company in the capital market;	-
6) Komite audit, mencakup antara lain: / Audit committee, among others covering:	309-323
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; / Name and position in the committee;	314-318
b) Usia; / Age;	314-318
c) Kewarganegaraan; / Citizenship;	314-318
d) Riwayat pendidikan; / Education background;	314-318
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi: / History of position; including:	314-318

Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; / Legal basis for the appointment as member of the committee;	314-318
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota Komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan / Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of Committee, and other position (if any); and	314-318
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; / Working experience and period in and outside the issuer or public company;	314-318
f) Periode dan masa jabatan anggota komite audit; / Period and terms of office of the member of audit committee;	314
g) Pernyataan independensi komite audit; / Statement of independence of the audit committee;	318-319
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan / Education and/or training during the year under review (if any); and	314-318
i) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; / policies and implementation of the frequency of meeting of the audit committee and attendance of member of audit committee;	319-320
j) Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; / The activities of the audit committee in the year under review, in accordance with the audit committee charter;	320-321
7) Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi emiten atau perusahaan publik, paling sedikit memuat: / Nomination and remuneration committee or function of issuer or public company, at least contains:	336-348
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; / Name and position in the committee;	338-339
b) Usia; / Age;	339-342
c) Kewarganegaraan; / Citizenship;	339-342
d) Riwayat pendidikan; / Education background;	339-342
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi; / History of position; including:	339-342
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; / Legal basis for the appointment as member of the committee;	339-342
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan / Dual position, as member of board of commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and	339-342
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; / Working experience and period in and outside the issuer or public company;	339-342
f) Periode dan masa jabatan anggota komite; / Period and terms of office of the member of committee;	338-339
g) Pernyataan independensi komite; / Statement of independence of the committee;	342-343
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan / Education and/or training during the year under review (if any); and	339-342
i) Uraian tugas dan tanggung jawab; / Description of duties and responsibilities;	337-338
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); / A statement that the committee already has a guideline or charter;	337
k) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; / Policies and implementation of the frequency of meeting and attendance of the member in the said meetings;	343-345
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan / A brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	344-345
m) Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai: / In the event that the Board of Commissioners does not establish the nomination and remuneration committee, than should contain at least:	-
(1) Alasan tidak dibentuknya komite; dan / Reason not to establish the committee; and	-
(2) Prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku; / Procedure of nomination and remuneration performed in the year under review;	-

**Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021:****Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik**

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
8) Komite lain yang dimiliki emiten atau perusahaan publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: / Other committee of the issuer or the public company formed to support the function and duty of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, such as nomination and remuneration committee, containing:	323-336
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; / Name and position in the committee;	325-329
b) Usia; / Age;	325-329
c) Kewarganegaraan; / Citizenship;	325-329
d) Riwayat pendidikan; / Education background;	325-329
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi: / History of position, including:	325-329
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; / Legal basis for the appointment as member of the committee;	325-329
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan / Dual position, as member of board of commissioners, member of board of directors, and/or member of committee, and other position (if any); and	325-329
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; / Working experience and period in and outside the issuer or public company;	325-329
f) Periode dan masa jabatan anggota komite; / Period and terms of office of the member of committee;	324-325
g) Pernyataan independensi komite; / Statement of independence of the committee;	330
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan / Education and/or training during the year under review (if any); and	325-329
i) Uraian tugas dan tanggung jawab; / Description of duty and responsibility;	323-324
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite; / Statement that the committee has already have the charter;	323
k) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; / Policies and frequency of meeting of the committee, and attendance of each member of the committee in the said meetings;	330-331
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; / Brief description on the activities of the committee;	331
9) Sekretaris perusahaan, mencakup antara lain: / Corporate secretary, including:	380-384
a) Nama; / Name;	381
b) Domisili; / Domicile;	381
c) Riwayat jabatan, meliputi informasi: / History of position, including:	381
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan / Legal basis for the appointment as corporate secretary; and	381
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; / Working experience and period in and outside the issuer or public company;	381
d) Riwayat pendidikan; / Education background;	381
e) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan / Education and/or training during the year under review; and	381-382
f) Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; / Brief description on the implementation of duties of the corporate secretary in the year under review;	384
10) Unit audit internal, mencakup antara lain: / Internal audit unit, among others including:	384-394
a) Nama kepala unit audit internal; / Name of head of internal audit unit;	385-386
b) Riwayat jabatan, meliputi informasi: / History of position, including:	385-386
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan / Legal basis for the appointment as head of internal audit unit; and	385-386
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; / Working experience and period in and outside the issuer or public company;	385-386
c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); / Qualification or certification as internal auditor (if any);	386-387
d) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; / Education and/or training during the year under review;	387

Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
e) Struktur dan kedudukan unit audit internal; / Structure and position of internal audit unit;	387-388
f) Uraian tugas dan tanggung jawab; / Description of duties and responsibilities;	389-390
g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal; dan / Statement that the internal audit unit has already have internal audit unit charter; and	389
h) Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; / Brief description on the implementation of duty of internal audit unit during the year under review;	391-392
11) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal control</i>) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan publik, paling sedikit mengenai: / Description on internal control system adopted by the issuer or public company, at least covering:	396-340
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; / Financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules;	396-397
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan / Review on the effectiveness of internal control systems; and	397-398
c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; / Statements of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on adequacy of internal control system;	398-399
12) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan publik, paling sedikit mengenai: / Risk management system implemented by the company, at least includes:	399-409
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko emiten atau perusahaan publik; / General description about the company's risk management system the issuer or public company;	399, 401-403
b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan / types of risk and the management; and	404-406
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko emiten atau perusahaan publik; / Review the effectiveness of the risk management system applied by the issuer or public company;	407-408
d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; / Statement of the Board of Directors and/or board of commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	409
13) perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi: / important cases faced by the issuer or public company, subsidiaries, current members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, among others include:	413-416
a) Pokok perkara/gugatan; / Substance of the case/claim;	413-416
b) Status penyelesaian perkara/gugatan; dan / Status of settlement of case/claim; and	413-416
c) Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik; / Potential impacts on the condition of the issuer or public company;	413-416
14) Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); / Information about administrative sanctions imposed to issuer or public company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the capital market authority and other authorities during the last fiscal year (if any);	416
15) Informasi mengenai kode etik emiten atau perusahaan publik meliputi: / Information about codes of conduct of the issuer or public company, includes:	424-427
a) pokok-pokok kode etik; / key points of the code of conduct;	424-425
b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan / Socialization of the code of conduct and enforcement; and	426
c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan emiten atau perusahaan publik; / Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the issuer of public company;	425
16) Uraian mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh emiten atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSop</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESop</i>); / Description of employee or management stock ownership program of the issuer or public company, among others contains: Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: / in case of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed shall contain at least:	223, 438



Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021:

Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
a) jumlah saham dan/atau opsi; / number of share and/or option;	-
b) jangka waktu pelaksanaan; / period;	-
c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan / requirement for eligible employee and/or management; and	-
d) Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; / Exercised price;	-
17) Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: / Brief description of the information disclosure policy regarding:	
a) Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham perusahaan terbuka; dan / Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the ownership or any change in ownership of the public company's shares; and	139, 306, 378, 438
b) Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; / Implementation of the said policy;	-
18) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di emiten atau perusahaan publik, antara lain meliputi: / description of whistleblowing system at the issuer or public company, among others include:	430-436
a) Cara penyampaian laporan pelanggaran; / Mechanism for violation reporting;	431
b) Perlindungan bagi pelapor; / Protection for the whistleblower;	433
c) Penanganan pengaduan; / Handling of violation reports;	431-432
d) Pihak yang mengelola pengaduan; dan / Unit responsible for handling of violation report; and	431-432
e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi: / Results from violation report handling, at least includes	434
(1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan / Number of complaints received and processed during the fiscal year; and	434
(2) Tindak lanjut pengaduan; / Follow up of complaints;	434
Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. / In case the issuer or public company does not have a violation reporting system (<i>whistleblowing system</i>), then it is disclosed regarding this matter.	-
19) Uraian mengenai kebijakan anti korupsi emiten atau perusahaan publik, paling sedikit memuat: / Description of anti-corruption policy of issuer or public company, at least contains:	438-439
a) Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam emiten atau perusahaan publik; dan / Programs and procedures carried out in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in issuers or public companies; and	438-439
b) Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan emiten atau perusahaan publik; / Anti-corruption training/socialization for employees of issuers or public companies;	439
Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. / If an issuer or public company does not have an anti-corruption policy, then the reason for not having such policy is explained.	-
20) Penerapan atas pedoman tata kelola perusahaan terbuka bagi emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik, meliputi: / Implementation of the guidelines of corporate governance for public companies for issuer issuing equity-based securities or public company, including:	-
a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau / Statement regarding recommendation that have been implemented; and/or	-
b) Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada); / Description of recommendation that have not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);	-
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. / Disclosure of information can be presented in tabular form.	-
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik / Social and environmental responsibility of the issuer or public company	464
1) Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51/pojk.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, paling sedikit memuat: / The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a sustainability report as referred to in the financial services authority regulation no.51/pojk.03/2017 on the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers and public companies, at least include:	✓

Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
a) Penjelasan strategi keberlanjutan; / Explanation of the sustainability strategy;	✓
b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); / An overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);	✓
c) Profil singkat emiten atau perusahaan publik; / Brief profile of the issuer or public company;	✓
d) Penjelasan Direksi; / Explanation of the Board of Directors;	✓
e) Tata kelola keberlanjutan; / Sustainability governance;	✓
f) Kinerja keberlanjutan; / Sustainability performance;	✓
g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; / Written verification from an independent party, if any;	✓
h) Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada; dan / Feedback sheet for readers, if any; and	✓
i) Tanggapan emiten atau perusahaan publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; / THE issuer's or public company's response to the previous year's report feedback;	✓
2) Laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) bagi emiten dan perusahaan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran otoritas jasa keuangan ini; / THE sustainability report as referred to in number 1), must be prepared in accordance with the technical guidelines for preparing sustainability reports for issuers and public companies as listed in appendix II which is an integral part of this financial services authority circular letter;	✓
3) Informasi laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) pada angka 1) dapat: / Information on the sustainability report in number 1) may:	✓
a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait laporan keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait laporan Direksi; dan/atau / Be disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the board of directors explanation regarding the sustainability report disclosed in the related section of the Board of Directors report; and/or	✓
b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) bagi emiten dan perusahaan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran otoritas jasa keuangan ini, seperti profil emiten atau perusahaan publik; / Refer to other sections outside the social and environmental responsibility section while still referring to the technical guidelines for preparing sustainability reports for issuers and public companies as listed in appendix II which is an integral part of this financial services authority circular letter, such as issuer or public company profiles;	✓
4) Laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan laporan tahunan; / The sustainability report as referred to in number 1) is an integral part of the annual report but can be presented separately from the annual report;	✓
5) Dalam hal laporan keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan laporan tahunan, informasi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan dimaksud harus: / If the sustainability report is presented separately from the annual report, the information disclosed in the sustainability report must:	✓
a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan / Contains all the information referred to in number 1); and	✓
b) Disusun sesuai pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) bagi emiten dan perusahaan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran otoritas jasa keuangan ini; / Be prepared in accordance with the technical guidelines for preparing sustainability reports for issuers and public companies as listed in appendix II which is an integral part of this financial services authority circular letter;	✓
6) Dalam hal laporan keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan laporan tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam laporan keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari laporan tahunan; dan / In the event that the sustainability report is presented separately from the annual report, then the social and environmental responsibility section contains information that information regarding social and environmental responsibility has been disclosed in the sustainability report which is presented separately from the annual report; and	✓
7) Penyampaian laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan laporan tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan. / Submission of the sustainability report which is presented separately from the annual report must be submitted simultaneously with the submission of the annual report.	✓

Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021:**Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik**

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Reference on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan / Description	Halaman / Page
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit / Audited annual financial statement	✓
<p>Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam laporan tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal emiten merupakan perusahaan efek; dan / Financial statements included in annual report should be prepared in accordance with the financial accounting standards in Indonesia and audited by an accountant. The said financial statement should be included with statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislations in the capital markets sector governing the responsibility of the Board of Directors on the financial report or the legislations in the capital markets sector governing the periodic reports of securities company in the event the issuer is a securities company; and</p>	✓
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan / Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for annual reporting	✓
<p>Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan disusun sesuai dengan format surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran otoritas jasa keuangan ini. / Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for annual reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for annual reporting as attached in the attachment, which is an integral part of this circulation letter of the financial services authority.</p>	✓

**Surat Pernyataan
Dewan Komisaris dan Direksi
Tentang Tanggung Jawab atas
Laporan Tahunan 2022
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)**

Board of Commissioners and Board of Directors Statement
of Accountability for 2022 Annual Report of
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)



Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan 2022 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Mei 2023

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

AMIEN SUNARYADI
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

SUAHASIL NAZARA
Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner

SUSIWIYONO MOEGIARSO
Komisaris
Commissioner

MOHAMAD IKHSAN
Komisaris
Commissioner

DUDY PURWAGANDHI
Komisaris
Commissioner

EKO SULISTYJO
Komisaris
Commissioner

DADAN KUSDIANA
Komisaris
Commissioner

TEDI BHARATA
Komisaris
Commissioner

ALEX ISKANDAR MUNAF
Komisaris Independen
Independent Commissioner

CHARLES SITORUS
Komisaris Independen
Independent Commissioner



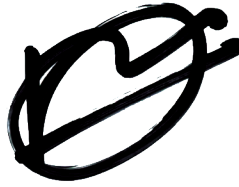
Board of Commissioners and Board of Directors Statement of Accountability for 2022 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

We, the signatories, hereby stated that all information contained in the 2022 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) has been comprehensively presented and that we are fully accountable for the accuracy of the content of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Annual Report.

This Statement is made truthfully.

Jakarta, May 2023

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS



DARMAWAN PRASODJO
Direktur Utama
President Director



SINTYA ROESLY
Direktur Keuangan
Director of Finance



YUSUF DIDI SETIARTO
Direktur Legal dan
Manajemen *Human Capital*
Director of Legal and Human Capital
Management



HARTANTO WIBOWO
Direktur Perencanaan Korporat dan
Pengembangan Bisnis
Director of Corporate Planning and
Business Development



WILUYO KUSDWIARTO
Direktur Manajemen Proyek dan
Energi Baru Terbarukan
Director of Project Management and
New Renewable Energy



ADI LUMAKSO
Direktur Manajemen Pembangkitan
Director of Generation Management



EVY HARYADI
Direktur Transmisi dan Perencanaan
Sistem
Director of Transmission and
System Planning



ADI PRIYANTO
Direktur Distribusi
Director of Distribution



EDI SRIMULYANTI
Direktur Retail dan Niaga
Director of Retail and Commerce



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2022 DAN 2021/
*DECEMBER 31, 2022 AND 2021***

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/We, the undersigned:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama/Name | : | DARMAWAN PRASODJO |
| Alamat kantor/Office address | : | PT PLN (PERSERO)
Jl. Trunojoyo Blok M I/135
Jakarta Selatan |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile as stated in ID Card | : | The Green Cluster Grand Canyon Blok I-2 No. 25 BS
RT. 009, RW. 005, Kec Serpong,
Tangerang Selatan |
| Nomor telepon/Phone number | : | (021) 7261122 |
| Jabatan/Position | : | DIREKTUR UTAMA / PRESIDENT DIRECTOR |
| 2. Nama/Name | : | SINTHYA ROESLY |
| Alamat kantor/Office address | : | PT PLN (PERSERO)
Jl. Trunojoyo Blok M I/135
Jakarta Selatan |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile as stated in ID Card | : | APT Taman Rasuna TWR 17-14 D
RT 003 RW 010
Menteng Atas, Setiabudi
Jakarta Selatan |
| Nomor telepon/Phone number | : | (021) 7261122 |
| Jabatan/Position | : | DIREKTUR KEUANGAN / DIRECTOR OF FINANCE |

menyatakan bahwa/state that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian; | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements; |
| 2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia; | 2. The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles; |
| 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information contained in the Consolidated Financial Statements is complete and correct; |
| b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information and facts; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan Entitas Anak. | 4. We are responsible for the Company and its Subsidiaries Internal control system. |


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 02 Mei 2023 / May 02 2023



DARMAWAN PRASODJO
Direktur Utama / President Director



SINTHYA ROESLY
Direktur Keuangan / Director of Finance



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian tahun ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id



Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

1. Pemulihan atas pajak dibayar di muka

Lihat Catatan 4 - Pertimbangan akuntansi penting dan estimasi akuntansi signifikan, Catatan 19 - Pajak dibayar di muka dan Catatan 47 - Pajak penghasilan, atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mencatat pajak dibayar di muka sebesar Rp15,7 triliun dan provisi atas ketidakpastian perlakuan pajak sebesar Rp4,4 triliun. Provisi tersebut merupakan estimasi eksposur pajak yang mungkin timbul jika Grup tidak berhasil dalam proses keberatan atau banding pajak.

Kami fokus pada area ini karena pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Selain itu, penyelesaian posisi pajak yang diambil oleh Grup dapat berlangsung beberapa tahun dan pada beberapa kasus, sulit untuk memprediksi hasilnya.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespon hal ini:

- Kami memperoleh pemahaman atas penilaian manajemen atas pemulihan pajak dibayar di muka sehubungan dengan ketidakpastian perlakuan pajak yang diambil oleh Grup.
- Kami memeriksa korespondensi dengan otoritas pajak dan hasil putusan pengadilan pajak dan peninjauan kembali untuk memahami posisi yang diambil oleh Grup.
- Kami menilai probabilitas hasil sengketa kasus pajak yang masih berjalan, kemampuan Grup untuk mempertahankan posisinya, dan pemulihan atas pajak dibayar di muka yang diestimasi oleh Grup dengan memeriksa korespondensi antara Grup dan otoritas pajak yang relevan, dengan keterlibatan spesialis pajak kami.
- Kami melakukan rekalkulasi provisi berdasarkan estimasi kemungkinan keberhasilan yang ditentukan oleh Grup dan, dengan keterlibatan spesialis pajak kami, menilai apakah kemungkinan keberhasilan tersebut telah tepat.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:

1. Recoverability of prepaid taxes

Refer to Note 4 - Critical accounting judgements and significant accounting estimates, Note 19 - Prepaid taxes and Note 47 - Income tax, to the consolidated financial statements.

As at 31 December 2022, the Group recorded prepaid taxes of Rp15.7 trillion and a provision against uncertain tax treatment of Rp4.4 trillion. The provision is an estimate of the tax exposure that may arise in the event that the Group is unsuccessful in the tax objection or appeal process.

We focused on this area because the judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the tax determination is uncertain. In addition, the resolution of the tax position taken by the Group can take several years and in some cases, it is difficult to predict the outcome.

How our audit addressed the key audit matter

We performed the following audit procedures in response to this matter:

- We understood management's assessment of the recoverability of the prepaid taxes with respect to the uncertain tax treatment taken by the Group.
- We examined the correspondence with the tax authorities and the outcomes of tax court rulings and judicial reviews to understand the position taken by the Group.
- We assessed the probability of outcomes on the open tax cases, the Group's ability to defend its position and the recoverability of prepaid tax estimated by the Group by examining the correspondence between the Group and the relevant tax authorities, with the involvement of our tax specialists.
- We recalculated the provision based on the estimated likelihood of success determined by the Group and, with the involvement of our tax specialists, assessed whether the likelihood of success was appropriate.



- Kami menilai apakah pengungkapan terkait yang disajikan di Catatan 19 dan Catatan 47 atas laporan keuangan konsolidasian telah memadai sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan standar akuntansi yang berlaku.

2. Penilaian atas nilai tercatat liabilitas imbalan kerja

Lihat Catatan 4 - Pertimbangan akuntansi penting dan estimasi akuntansi signifikan dan Catatan 49 - Liabilitas imbalan kerja, atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mencatat liabilitas imbalan kerja sebesar Rp68,9 triliun, yang terdiri atas program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan, dan imbalan jangka panjang lainnya. Program pensiun dikelola oleh Dana Pensiun PLN, pihak berelasi.

Manajemen melibatkan aktuaris independen untuk menentukan liabilitas imbalan kerja pada akhir tahun. Aktuaris mengestimasi nilai kini liabilitas imbalan kerja berdasarkan asumsi-asumsi utama untuk setiap jenis program imbalan kerja. Asumsi-asumsi signifikan meliputi estimasi tingkat kenaikan gaji per tahun, tingkat kenaikan manfaat pensiun per tahun, tingkat kenaikan biaya kesehatan dan tingkat diskonto.

Kami memfokuskan pada area ini karena estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam menentukan nilai kini dari liabilitas imbalan kerja.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespon hal ini:

- Kami memperoleh pemahaman atas syarat dan ketentuan program liabilitas imbalan kerja.
- Kami mengevaluasi keahlian, kompetensi dan objektivitas aktuaris independen sebagai pakar manajemen.
- Kami menguji nilai kini liabilitas imbalan kerja, dengan melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Memahami metode penilaian yang digunakan oleh aktuaris dan menilai apakah metode penilaian telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

- We assessed the adequacy of the related disclosures provided in Note 19 and Note 47 to the consolidated financial statements in accordance with the requirements of the applicable accounting standards.

2. Assessment on the carrying value of employee benefits liabilities

Refer to Note 4 - Critical accounting judgements and significant accounting estimates and Note 49 - Employee benefits liabilities, to the consolidated financial statements.

As at 31 December 2022, the Group recorded employee benefits liabilities of Rp68.9 trillion, consisting of pension plans, other post-employment benefits, health care benefits and other long-term benefits. The pension plans are managed by Dana Pensiun PLN, a related party.

Management engaged an independent actuary to determine the employee benefits liabilities at the year end. The actuary estimated the present value of employee benefit liabilities based on the key assumptions for each type of employee benefit plan. The significant assumptions include the estimated rate of salary increase per annum, pension benefit increase rate per annum, future medical cost increases and discount rates.

We focused on this area because of the significant estimates made by management in determining the present value of the employee benefits liabilities.

How our audit addressed the key audit matter

We performed the following audit procedures in response to this matter:

- We understood the terms and conditions of the employee benefit plans.
- We assessed the expertise, competence and objectivity of the independent actuary as management's expert.
- We tested the present value of the employee benefits liabilities by performing the following procedures:
 - Understood the valuation method used by the actuary and assessed whether the valuation method used was acceptable under the applicable accounting standards;



- Memahami dan mengevaluasi asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuarial, dengan bantuan aktuaris internal kami, dengan melakukan prosedur berikut:
 - Menilai kewajaran tingkat diskonto dengan membandingkannya dengan imbal hasil pasar obligasi Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2022.
 - Menilai kewajaran estimasi tingkat kenaikan gaji, kenaikan manfaat pensiun, dan kenaikan biaya kesehatan dengan membandingkannya dengan data historis dan rencana jangka panjang manajemen mengenai proyeksi kenaikan gaji, program imbalan pemeliharaan kesehatan, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya.
 - Merekalkulasi liabilitas imbalan kerja Grup untuk memeriksa keakuratan matematis.
 - Menguji ketepatan data pegawai yang digunakan dalam model aktuarial, secara sampel, pada dokumen pendukung.
 - Kami menilai apakah pengungkapan terkait yang disajikan di Catatan 49 atas laporan keuangan konsolidasian telah memadai sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan standar akuntansi yang berlaku.
- *Understood and evaluated the key assumptions used in the actuarial calculation, with the assistance of our internal actuarial experts, by performing the following procedures:*
 - *Assessing the reasonableness of the discount rates by comparing them to market yields of Government bonds as at 31 December 2022.*
 - *Assessing the reasonableness of the estimated rate of salary increase, pension benefit increase and future health cost increase by comparing them to historical data and management's long-term plan regarding the projected salary increase, health-care benefit and other long-term benefit plans.*
 - *Recalculating the employee benefits liabilities of the Group to check their mathematical accuracy.*
 - *Tested the appropriateness of employee data used in the actuarial models, on a sample basis, to supporting documents.*
 - *We assessed the adequacy of the related disclosures provided in Note 49 to the consolidated financial statements in accordance with the requirements of the applicable accounting standards.*

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan Grup (tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami). Laporan tahunan Grup diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi diatas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Group's annual report (but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon). The Group's annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.



Ketika kami membaca laporan tahunan Grup, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

When we read the Group's annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*



- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tahun kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

JAKARTA,
2 Mei/May 2023

Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0241

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.



Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Listrik Negara
00840/2.1025/AU.1/02/0241-3/1/V/2023

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

AS AT DECEMBER 31, 2022 AND 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
ASET				ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	6	1,433,048,983	1,427,058,358	<i>Property, plant and equipment</i>
Aset hak guna	7	29,005,193	29,762,537	<i>Right-of-use assets</i>
Properti investasi	8	5,623,489	5,451,410	<i>Investment properties</i>
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	9	24,243,468	17,810,839	<i>Investments in associates and joint ventures</i>
Pajak dibayar di muka	19	11,351,639	17,112,377	<i>Prepaid taxes</i>
Aset pajak tangguhan	47	427,448	264,705	<i>Deferred tax assets</i>
Piutang pihak berelasi	10	1,288,270	1,160,081	<i>Receivables from related parties</i>
Rekening bank dibatasi penggunaannya	11	4,454,508	4,861,882	<i>Restricted cash in banks</i>
Piutang lain-lain	17	1,348,132	1,145,976	<i>Other receivables</i>
Piutang dari Pemerintah	16	2,587,938	18,254,891	<i>Receivables from Government</i>
Biaya dibayar di muka dan uang muka	20	169,367	-	<i>Prepaid expenses and advances</i>
Aset tidak lancar lain	12	5,199,459	4,422,025	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>1,518,747,894</u>	<u>1,527,305,081</u>	Total Non-current Assets
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	13	51,503,096	37,968,399	<i>Cash and cash equivalents</i>
Rekening bank dibatasi penggunaannya	11	302,386	206,279	<i>Restricted cash in banks</i>
Investasi jangka pendek	14	533,332	297,720	<i>Short-term investments</i>
Piutang usaha				<i>Trade receivables</i>
Pihak berelasi	15	2,258,400	2,142,886	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	15	22,498,882	21,659,500	<i>Third parties</i>
Piutang dari Pemerintah	16	18,882,562	8,300,000	<i>Receivables from Government</i>
Piutang lain-lain	17	1,368,707	1,249,618	<i>Other receivables</i>
Persediaan	18	17,534,804	10,393,419	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar di muka	19	3,524,488	2,701,520	<i>Prepaid taxes</i>
Biaya dibayar di muka dan uang muka	20	646,651	808,968	<i>Prepaid expenses and advances</i>
Piutang pihak berelasi	10	231,006	183,066	<i>Receivables from related parties</i>
Aset derivatif	56	107,068	-	<i>Derivative assets</i>
Jumlah Aset Lancar		<u>119,391,382</u>	<u>85,911,375</u>	Total Current Assets
JUMLAH ASET		<u>1,638,139,276</u>	<u>1,613,216,456</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

AS AT DECEMBER 31, 2022 AND 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				<i>Equity attributable to owners of the parent</i>
Modal saham - nilai nominal Rp1 per saham				<i>Capital stock - par value of Rp1 per share</i>
Modal dasar - 439.000.000 saham				<i>Authorised - 439,000,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh				<i>Subscribed and paid-up</i>
145.536.096 saham				<i>145,536,096 shares,</i>
pada 31 Desember 2022 dan				<i>as at December 31, 2022 and</i>
135.460.886 saham pada				<i>135,460,886 shares, as at</i>
31 Desember 2021	21	145,536,096	135,460,886	<i>December 31, 2021</i>
Penyertaan modal Negara				<i>Stock subscription from</i>
dalam proses penerbitan saham	22b	5,000,000	10,075,210	<i>Government in issuance process</i>
Tambahan modal disetor	22a	34,608	34,608	<i>Additional paid-in capital</i>
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali		(2,100)	-	<i>Difference in value from transactions with non-controlling interests</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
Ditentukan penggunaannya	21	64,657,026	64,657,026	<i>Appropriated</i>
Belum ditentukan penggunaannya	21	99,438,371	84,962,218	<i>Unappropriated</i>
Penghasilan komprehensif lain		<u>675,695,036</u>	<u>685,408,045</u>	<i>Other comprehensive income</i>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		990,359,037	980,597,993	<i>Equity attributable to owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali		<u>1,091,529</u>	<u>1,009,130</u>	<i>Non-controlling interests</i>
Jumlah Ekuitas		<u>991,450,566</u>	<u>981,607,123</u>	Total Equity
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	47	48,427,461	45,576,375	<i>Deferred tax liabilities</i>
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				<i>Long-term liabilities - net of current portion</i>
Penerusan pinjaman	24	30,182,450	31,778,793	<i>Two-step loans</i>
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan				<i>Government and non-bank Government</i>
Pemerintah non-bank	25	2,202,823	2,927,754	<i>financial institution loans</i>
Utang sewa	26	8,413,952	10,471,903	<i>Lease liabilities</i>
Utang bank	27	122,437,243	139,045,012	<i>Bank loans</i>
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28	198,471,221	187,734,643	<i>Bonds payable and sukuk ijara</i>
Utang listrik swasta	29	5,711,856	5,711,211	<i>Electricity purchase payables</i>
Utang lain-lain	31	671,526	466,379	<i>Other payables</i>
Pendapatan ditangguhkan	23	20,060,147	13,271,056	<i>Deferred revenue</i>
Liabilitas imbalan kerja	49	<u>65,038,580</u>	<u>48,087,727</u>	<i>Employee benefits liabilities</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>501,617,259</u>	<u>485,070,853</u>	Total Non-current Liabilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/3 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

AS AT DECEMBER 31, 2022 AND 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				<i>Trade payables</i>
Pihak berelasi	30	15,212,073	20,566,633	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	30	35,871,189	27,338,123	<i>Third parties</i>
Utang pajak	32	2,285,782	1,998,768	<i>Taxes payable</i>
Biaya masih harus dibayar	33	7,353,802	6,528,616	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas imbalan kerja				<i>Short-term employee</i>
jangka pendek	49	9,311,116	10,320,993	<i>benefits liabilities</i>
Uang jaminan langganan	34	16,539,411	15,584,069	<i>Customer security deposits</i>
Utang biaya proyek	35	2,096,511	114,546	<i>Project cost payables</i>
Pendapatan ditangguhkan	23	1,143,357	740,906	<i>Deferred revenue</i>
Liabilitas derivatif	56	-	107,271	<i>Derivative liabilities</i>
Utang jangka panjang jatuh tempo				<i>Current maturities of</i>
dalam satu tahun				<i>long-term liabilities</i>
Penerusan pinjaman	24	3,002,264	2,920,412	<i>Two-step loans</i>
Utang kepada Pemerintah dan				<i>Government and non-bank</i>
lembaga keuangan				<i>Government financial</i>
Pemerintah non-bank	25	1,425,985	1,960,686	<i>institution loans</i>
Utang sewa	26	4,448,363	4,570,040	<i>Lease liabilities</i>
Utang bank	27	29,972,875	26,841,397	<i>Bank loans</i>
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28	2,863,200	5,420,392	<i>Bonds payable and sukuk ijarah</i>
Utang listrik swasta	29	528,890	457,545	<i>Electricity purchase payables</i>
Utang KIK - EBA	28	-	569,578	<i>KIK - EBA loans</i>
Utang lain-lain	31	13,016,633	20,498,505	<i>Other payables</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>145,071,451</u>	<u>146,538,480</u>	Total Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>646,688,710</u>	<u>631,609,333</u>	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		<u>1,638,139,276</u>	<u>1,613,216,456</u>	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 2/1 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021*)	
PENDAPATAN USAHA				REVENUE
Penjualan tenaga listrik	36	311,057,224	288,862,726	Sales of electricity
Penyambungan pelanggan	23	857,468	493,437	Customer connection fees
Subsidi listrik Pemerintah	37	58,831,960	49,796,949	Government electricity subsidy
Pendapatan kompensasi	16	63,649,821	23,392,162	Compensation income
Lain-lain	38	<u>6,735,470</u>	<u>4,426,733</u>	Others
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>441,131,943</u>	<u>366,972,007</u>	Total Revenue
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	39	151,376,726	118,419,490	Fuel and lubricants
Pembelian tenaga listrik	40	130,230,383	103,553,472	Purchased electricity
Sewa	41	2,793,187	4,772,014	Leases
Pemeliharaan	42	23,948,698	22,600,774	Maintenance
Kepegawaian	43	24,884,860	25,092,756	Personnel
Penyusutan aset tetap	6	40,992,657	38,327,468	Property, plant and equipment depreciation
Penyusutan aset hak guna	7	3,063,978	3,113,803	Right-of-use assets depreciation
Lain-lain	44	<u>8,903,313</u>	<u>7,239,348</u>	Others
Jumlah Beban Usaha		<u>386,193,802</u>	<u>323,119,125</u>	Total Operating Expenses
LABA USAHA		<u>54,938,141</u>	<u>43,852,882</u>	OPERATING PROFIT
Penghasilan/(beban) lain-lain - bersih (Kerugian)/keuntungan	46	2,841,675	(3,719,419)	Other income/(expense) - net (Loss)/income on foreign exchange - net
kurs mata uang asing - bersih		(19,790,474)	2,676,145	
Penghasilan keuangan		687,495	787,231	Finance income
Beban keuangan	45	<u>(17,135,165)</u>	<u>(20,375,755)</u>	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK		<u>21,541,672</u>	<u>23,221,084</u>	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	47	<u>(7,126,952)</u>	<u>(10,046,207)</u>	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		<u>14,414,720</u>	<u>13,174,877</u>	PROFIT FOR THE YEAR

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 58

*) As reclassified, see Note 58

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 2/2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
LABA TAHUN BERJALAN		14,414,720	13,174,877	PROFIT FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				Other comprehensive income for the year
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				<i>Item that may be reclassified subsequently to profit or loss:</i>
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	9	2,928,156	610,789	<i>Share of other comprehensive income from associates and joint ventures</i>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				<i>Items that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	6	412,522	19,559,900	<i>Changes in property, plant and equipment revaluation surplus</i>
Pengkukuran kembali atas program manfaat pasti	49	(15,713,180)	8,533,129	<i>Remeasurement of defined benefit plans</i>
Manfaat/(beban) pajak terkait	47.b	3,366,144	(4,696,115)	<i>Related income tax benefit/(expense)</i>
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		(9,006,358)	24,007,703	Other comprehensive (loss)/income for the year after tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>5,408,362</u>	<u>37,182,580</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				<i>Profit for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		14,334,040	13,128,626	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali		80,680	46,251	<i>Non-controlling interests</i>
Jumlah		<u>14,414,720</u>	<u>13,174,877</u>	Total
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				<i>Total comprehensive income for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		5,316,879	37,107,612	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali		91,483	74,968	<i>Non-controlling interests</i>
Jumlah		<u>5,408,362</u>	<u>37,182,580</u>	Total
LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (dalam Rupiah penuh)	48	<u>99,339</u>	<u>96,972</u>	EARNINGS PER SHARE BASIC/DILUTED (in Rupiah full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 3/1 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Subscribed and paid-in capital	Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham/ Stock subscription from Government in issuance process	Tambah modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba/Retained earnings	Surplus revaluasi aset tetap/ Property, plant and equipment revaluation surplus	Pengukuran kembali atas program manfaat pensiun/ Remeasurement on defined benefit plans	Bagian komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ Share of other comprehensive income from associates and joint ventures	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
	135,342,182	-	5,216,571	64,657,026	672,475,750	(11,239,870)	557,217	938,878,430	934,162	939,812,592	Balance as at January 1, 2021
Penambahan modal dari penerbitan saham	118,704	-	-	71,923,554	-	-	-	118,704	-	118,704	Addition from shares issuance
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	(106,753)	-	-	-	-	(106,753)	-	(106,753)	Difference in restructuring transactions between entities under common control
Penambahan modal Negara dalam proses penerbitan saham	-	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	Stock subscription from Government in issuance process
Reklasifikasi dari lambahan modal disetor	-	5,075,210	(5,075,210)	-	-	-	-	(400,000)	-	-	Reclassification from additional paid-in capital
Dividen	-	-	-	(400,000)	-	-	-	(400,000)	-	(400,000)	Dividends paid-in capital
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	-	-	-	305,038	(305,038)	-	-	-	-	-	Reclassification of property, plant and equipment revaluation surplus
Jumlah penghasilan komprehensif lain/berjalan	-	-	-	13,128,626	16,741,074	6,627,123	610,789	37,107,612	74,968	37,182,580	Total comprehensive income for the year
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	135,460,886	10,075,210	34,608	64,657,026	688,812,786	(4,672,747)	1,168,006	980,597,993	1,009,130	981,607,123	Balance as at December 31, 2021

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 3/2 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Distribusikan kepada pemilik entitas induk/Atributable to owners of the parent entity										Balance as at January 1, 2022
	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Subscribed and paid-in capital	Modal disetor/Additional paid-in capital	Tambahan modal disetor/Additional paid-in capital	Saldo laba/Retained earnings	Surplus revaluasi aset tetap/ Property, plant and equipment revaluation surplus	Pengukuran kembali atas program manfaat pensiun/ Remeasurement on defined benefit plans	Bagian komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ Share of other comprehensive income from associates and joint ventures	Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali/ Difference in value from transactions with non-controlling interests	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent	Keuntungan non-pengendali/ Non-controlling interests	
	135,460,886	10,075,210	34,608	64,657,026	84,962,218	688,912,786	(4,672,747)	1,168,006	980,697,993	1,009,130	981,607,123
Penambahan modal dari penerbitan saham/ Penambahan modal Negara dalam proses penerbitan saham/ Stock subscription from Government in issuance process	10,075,210	(10,075,210)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Negara dalam proses penerbitan saham/ Akuisi entitas anak dari kepentingan non-pengendali	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000
Dividen	-	-	-	-	(750,000)	-	-	-	(2,100)	(9,084)	(11,184)
Reklasifikasi surplus ke saldo laba	-	-	-	-	882,113	(695,848)	-	-	186,265	-	186,265
Jumlah pengisian komprehensif lain/ tahun berjalan	-	-	-	-	14,334,040	321,767	(12,256,281)	2,917,353	5,316,679	91,483	5,408,362
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	145,536,096	5,000,000	34,608	64,657,026	99,438,371	688,538,705	(16,929,028)	4,085,359	990,359,037	(2,100)	991,450,566
											Balance as at December 31, 2022
											Addition from shares issuance Stock subscription from Government in issuance process Acquisition of subsidiaries' shares from non-controlling interests Dividends Reclassification of property, plant and equipment revaluation surplus Total comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 4/1 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		327,584,754	301,069,399	Cash receipts from customers
Penerimaan subsidi listrik	37	56,129,265	46,155,349	Government subsidy received
Penerimaan kompensasi		72,127,059	17,904,508	Compensation received
Penerimaan pajak penghasilan badan		592,194	479,309	Cash receipts for corporate income tax
Penerimaan restitusi pajak lainnya		7,357,277	5,798,026	Cash receipts for other taxes
Penerimaan bunga		800,071	787,231	Interest received
Pembayaran kas kepada pemasok		(322,795,079)	(246,824,172)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan		(24,698,911)	(21,894,618)	Cash paid to employees
Pembayaran bunga		(15,982,713)	(20,229,812)	Interest expense paid
Pembayaran pajak penghasilan		(1,766,874)	(1,760,566)	Income tax paid
Pembayaran surat ketetapan pajak		(434,556)	(12,863,580)	Payment of tax assessment letters
Pembayaran utang kepada pemerintah		(1,202,263)	-	Payment of amounts due to Government
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		<u>97,710,224</u>	<u>68,621,074</u>	Net cash provided from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama	9	557,792	323,358	Dividends received from associates and joint ventures
Hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi		110,064	23,240	Proceeds from sale of assets not used in operations
Akuisisi entitas anak		-	(552,605)	Acquisition of subsidiary
Perolehan aset tetap (termasuk uang muka proyek)		(54,653,968)	(59,633,724)	Addition of property, plant and equipment (including advances for projects)
Perolehan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	9	(457,398)	(179,664)	Acquisition of investments in associates and joint ventures
Penarikan rekening bank dibatasi penggunaannya		7,055,832	8,092,156	Withdrawal of restricted cash in banks
Penempatan rekening bank dibatasi penggunaannya		(6,402,396)	(7,618,115)	Placement of restricted cash in banks
Penarikan investasi jangka pendek		30,000	577,776	Withdrawal of short-term investments
Penempatan investasi jangka pendek		(246,195)	(30,000)	Placement of short-term investments
Penerimaan atas piutang kepada ventura bersama		99,364	-	Receipts of receivable from joint ventures
Penambahan piutang pihak berelasi		(35,802)	-	Additions of receivables from related parties
Penambahan aset tidak lancar lain		(821,255)	(554,450)	Addition of other non-current assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(54,763,962)</u>	<u>(59,552,028)</u>	Net cash used in investing activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 4/2 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Perolehan penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham	21	5,000,000	5,000,000	<i>Proceeds from stock subscription from Government in issuance process</i>
Pembayaran dividen	22	(750,000)	(400,000)	<i>Payment of dividends</i>
Penerimaan penerusan pinjaman		876,645	894,658	<i>Proceeds of two-step loans</i>
Pembayaran penerusan pinjaman		(2,831,819)	(3,044,547)	<i>Repayments of two-step loans</i>
Penerimaan utang dari				<i>Proceeds of Government and non-bank Government financial institution loans</i>
Pemerintah dan lembaga keuangan				
Pemerintah non-bank		-	8,423	<i>Repayments of Government and non-bank Government financial institution loans</i>
Pembayaran utang kepada				<i>Repayments of Government and non-bank Government financial institution loans</i>
Pemerintah dan lembaga keuangan				
Pemerintah non-bank		(758,423)	(750,000)	<i>Proceeds of bank loans - short term</i>
Penerimaan utang bank - jangka pendek		21,400,000	3,400,000	<i>Proceeds of bank loans - long term</i>
Penerimaan utang bank - jangka panjang		16,942,458	31,428,400	<i>Repayments of bank loans - short term</i>
Pembayaran utang bank - jangka pendek		(23,400,000)	(2,384,541)	<i>Repayments of bank loans - long term</i>
Pembayaran utang bank - jangka panjang		(35,428,734)	(38,783,470)	<i>Repayments of bonds payable and sukuk ijarah</i>
Pembayaran utang obligasi dan sukuk ijarah		(5,345,442)	(15,166,000)	<i>Repayments of KIK - EBA loans</i>
Pembayaran utang KIK - EBA		(587,288)	(883,666)	<i>Payments of lease liabilities</i>
Pembayaran utang sewa		(4,721,269)	(4,765,662)	<i>Payments of electricity purchase payable</i>
Pembayaran utang listrik swasta		(477,008)	(434,255)	<i>Acquisition of interest in subsidiaries from non-controlling interest</i>
Akuisisi kepentingan pada entitas anak dari kepentingan non-pengendali		(11,184)	-	
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>(30,092,064)</u>	<u>(25,880,660)</u>	Net cash used in financing activities
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		<u>12,854,198</u>	<u>(16,811,614)</u>	NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		680,515	44,621	<i>Effect of changes in foreign currency</i>
Cadangan kerugian kredit ekspektasian atas kas dan setara kas		(16)	(42)	<i>Allowance for expected credit loss of cash and cash equivalents</i>
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		<u>37,968,399</u>	<u>54,735,434</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		<u>51,503,096</u>	<u>37,968,399</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR
Lihat Catatan 50 untuk penyajian informasi arus kas.				<i>Refer to Note 50 for the presentation of cash flow information.</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi lainnya

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" atau "Perusahaan") didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut meliputi: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan Akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6731.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 11, tanggal 22 Agustus 2022 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-0060721.AH.01.02 tanggal 25 Agustus 2022.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 48 unit pelaksana yang tersebar di wilayah Indonesia dan 13 entitas anak. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and other information

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" or the "Company") was established in 1961 as a unit of the Indonesian Ministry of Energy and Public Works. The Company is a business continuation of several Dutch electricity companies which have been taken over by the Government of the Republic of Indonesia including, among others, the following: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM and NV WEMI. Based on Government Regulation No. 19 year 1965, the status of the Company was changed to that of a legal entity. Subsequently, based on Government Regulation No. 30 year 1970, as amended by Government Regulation No. 18 year 1972, the Company became a Perusahaan Umum (Perum). Based on Notarial Deed No. 169 of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, dated July 30, 1994, the Company's status was changed to a Limited Liability Company and it was named Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara or PT PLN (Persero). This change was approved by the Minister of Justice in his decision letter No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 dated August 1, 1994 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 13, 1994, Supplement No. 6731.

The Articles of Association of the Company have been amended several times, with the most recent change by Notarial Deed No. 11, dated August 22, 2022 of Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta regarding the purposes and objectives as well as the business activities of the Company. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on Ministerial Decree No. AHU-0060721.AH.01.02, dated August 25, 2022.

The Company is domiciled in Jakarta, with 48 business unit offices across Indonesia and 13 subsidiaries. The Company's Head Office is located at Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi lainnya (lanjutan)

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka mendukung pembangunan negara dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin tertentu yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus. Perusahaan merupakan BUMN yang sedang melaksanakan penugasan khusus berupa penyediaan tenaga listrik bersubsidi kepada masyarakat (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki 51.477 karyawan tetap (2021: 52.116 karyawan tetap) (tidak diaudit). Jumlah karyawan tidak termasuk karyawan dari PT Haleyora Powerindo yang bergerak dibidang jasa tenaga kerja. PT Haleyora Powerindo adalah entitas anak dari PT Haleyora Power, entitas anak Perusahaan.

b. Penawaran umum efek utang Perusahaan

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi dan Surat Utang PLN, sebagai berikut:

	Tanggal efektif/ Effective date	Bursa pencatatan/ Listed on *)	Tanggal pencatatan/ Listed date	Jumlah yang ditawarkan/ Offered amount Rp	
Obligasi Rupiah					Rupiah Bonds
Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020	31 Agustus 2020/ August 31, 2020	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	8 September 2020/ September 8, 2020	1,500,000	Shelf Registration Bonds IV PLN Phase I Year 2020
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020	31 Agustus 2020/ August 31, 2020	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	8 September 2020/ September 8, 2020	376,500	Shelf Registration Sukuk Ijarah IV PLN Phase I Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	6 Mei 2020/ May 6, 2020	1,737,135	Shelf Registration Bonds III PLN Phase VII Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	18 Februari 2020/ February 18, 2020	4,812,430	Shelf Registration Bonds III PLN Phase VI Year 2020
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	18 Februari 2020/ February 18, 2020	115,500	Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase VI Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	1 Oktober, 2019 October 1, 2019	1,912,900	Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	1 Oktober, 2019 October 1, 2019	797,500	Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase V Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	1 Agustus 2019/ August 1, 2019	2,953,620	Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	1 Agustus 2019/ August 1, 2019	1,250,000	Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase IV Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	19 Februari 2019/ February 19, 2019	2,393,000	Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019

*) Pada tanggal 22 Juli 1995 Bursa Paralel Indonesia diakuisisi oleh Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta digabungkan dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and other information (continued)

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Purpose and Objective of the Company is to engage in electricity business for public use of sufficient quantity and quality and also to earn profit and perform the Government's assignment in electricity business in order to support the development of the country with the application of the principles of a Limited Liability Company.

Based on Law No. 19 year 2003, regarding State-Owned Enterprises ("SOEs"), the Government is obliged to provide compensation to SOEs, that were appointed to perform special assignments, for all expenses which they have incurred, including a certain expected return (margin). The Company is an SOE, that performs the special assignment of providing subsidised electricity to the public (Note 37).

b. The Company's public offering of bonds

The Company has issued several PLN Bonds and Notes, as follows:

	Tanggal efektif/ Effective date	Bursa pencatatan/ Listed on *)	Tanggal pencatatan/ Listed date	Jumlah yang ditawarkan/ Offered amount Rp	
Obligasi Rupiah					Rupiah Bonds
Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020	31 Agustus 2020/ August 31, 2020	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	8 September 2020/ September 8, 2020	1,500,000	Shelf Registration Bonds IV PLN Phase I Year 2020
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020	31 Agustus 2020/ August 31, 2020	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	8 September 2020/ September 8, 2020	376,500	Shelf Registration Sukuk Ijarah IV PLN Phase I Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	6 Mei 2020/ May 6, 2020	1,737,135	Shelf Registration Bonds III PLN Phase VII Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	18 Februari 2020/ February 18, 2020	4,812,430	Shelf Registration Bonds III PLN Phase VI Year 2020
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	18 Februari 2020/ February 18, 2020	115,500	Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase VI Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	1 Oktober, 2019 October 1, 2019	1,912,900	Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	1 Oktober, 2019 October 1, 2019	797,500	Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase V Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	1 Agustus 2019/ August 1, 2019	2,953,620	Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	1 Agustus 2019/ August 1, 2019	1,250,000	Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase IV Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	19 Februari 2019/ February 19, 2019	2,393,000	Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019

*) On July 22, 1995 the Indonesia Parallel Exchange was acquired by the Surabaya Stock Exchange. On November 30, 2007, the Surabaya Stock Exchange and Jakarta Stock Exchange merged and changed their name to the Indonesia Stock Exchange.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Penawaran umum efek utang Perusahaan (lanjutan)

b. The Company's public offering of bonds (continued)

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi dan Surat Utang PLN, sebagai berikut: (lanjutan)

The Company has issued several PLN Bonds and Notes, as follows: (continued)

	Tanggal efektif/ Effective date	Bursa pencatatan/ Listed on *)	Tanggal pencatatan/ Listed date	Jumlah yang ditawarkan/ Offered amount Rp	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	19 Februari 2019/ February 19, 2019	863,000	Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase III Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	10 Oktober 2018/ October 10, 2018	832,000	Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	10 Oktober 2018/ October 10, 2018	224,000	Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase II Year 2018
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	10 Juli 2018/ July 10, 2018	1,278,500	Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	10 Juli 2018/ July 10, 2018	750,000	Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase I Year 2018
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018	21 Juni 2017/ June 21, 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	23 Februari 2018/ February 23, 2018	2,535,000	Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018	21 Juni 2017/ June 21, 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	23 Februari 2018/ February 23, 2018	698,500	Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase III Year 2018
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	21 Juni 2017/ June 21, 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	2 November 2017/ November 2, 2017	2,545,500	Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Year 2017
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	21 Juni 2017/ June 21, 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	2 November 2017/ November 2, 2017	694,500	Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase II Year 2017
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	21 Juni 2017/ June 21, 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	12 Juli 2017/ July 12, 2017	1,600,000	Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Year 2017
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	21 Juni 2017/ June 21, 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	12 Juli 2017/ July 12, 2017	400,000	Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase I Year 2017
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ June 27, 2013	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	11 Desember 2013/ December 11, 2013	1,244,000	Shelf Registration Bonds I PLN Phase II Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ June 27, 2013	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	11 Desember 2013/ December 11, 2013	429,000	Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase II Year 2013
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ June 27, 2013	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	8 Juli 2013/ July 8, 2013	879,000	Shelf Registration Bonds I PLN Phase I Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ June 27, 2013	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	8 Juli 2013/ July 8, 2013	121,000	Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase I Year 2013
Obligasi PLN XII Tahun 2010	30 Juni 2010/ June 30, 2010	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	9 Juli 2010/ July 9, 2010	2,500,000	PLN XII Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	30 Juni 2010/ June 30, 2010	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	9 Juli 2010/ July 9, 2010	500,000	Sukuk Ijara V PLN Year 2010
Obligasi PLN XI Tahun 2010	31 Desember 2009/ December 31, 2009	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	13 Januari 2010/ January 13, 2010	2,703,000	PLN XI Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	31 Desember 2009/ December 31, 2009	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	13 Januari 2010/ January 13, 2010	297,000	Sukuk Ijara IV PLN Year 2010
Obligasi PLN X Tahun 2009	31 Desember 2008/ December 31, 2008	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	12 Januari 2009/ January 12, 2009	1,440,000	PLN X Bonds Year 2009
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009	31 Desember 2008/ December 31, 2008	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	12 Januari 2009/ January 12, 2009	760,000	Sukuk Ijara III PLN Year 2009
Obligasi PLN IX Tahun 2007	29 Juni 2007/ June 29, 2007	Bursa Efek Surabaya/ Surabaya Stock Exchange	11 Juli 2007/ July 11, 2007	2,700,000	PLN IX Bonds Year 2007
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	29 Juni 2007/ June 29, 2007	Bursa Efek Surabaya/ Surabaya Stock Exchange	11 Juli 2007/ July 11, 2007	300,000	Sukuk Ijara II PLN Year 2007
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	12 Juni 2006/ June 12, 2006	Bursa Efek Surabaya/ Surabaya Stock Exchange	22 Juni 2016/ June 22, 2016	2,200,100	PLN VIII Bonds Year 2006
Sukuk Ijarah PLN I Tahun 2006	12 Juni 2006/ June 12, 2006	Bursa Efek Surabaya/ Surabaya Stock Exchange	22 Juni 2016/ June 22, 2016	200,000	Sukuk Ijara I PLN Year 2006
Obligasi PLN VII Tahun 2004	3 November 2004/ November 3, 2004	Bursa Efek Surabaya/ Surabaya Stock Exchange	12 November 2004/ November 12, 2004	1,500,000	PLN VII Bonds Year 2004
Obligasi PLN VI Tahun 1997	27 Juni 1997/ June 27, 1997	Bursa Efek Surabaya/ Surabaya Stock Exchange	12 Agustus 1997/ August 12, 1997	600,000	PLN VI Bonds Year 1997
Obligasi PLN V Tahun 1996	28 Juni 1996/ June 28, 1996	Bursa Efek Surabaya/ Surabaya Stock Exchange	28 Agustus 1996/ August 28, 1996	1,000,000	PLN V Bonds Year 1996
Obligasi PLN IV Tahun 1995	30 Juni 1995/ June 30, 1995	Bursa Paralel Indonesia/ Indonesia Parallel exchange	4 September 1995/ September 4, 1995	680,000	PLN IV Bonds Year 1995
Obligasi PLN III Tahun 1995	30 Januari 1995/ January 30, 1995	Bursa Paralel Indonesia/ Indonesia Parallel exchange	18 April 1995/ April 18, 1995	318,430	PLN III Bonds Year 1995
Obligasi PLN II Tahun 1993	28 September 1993/ September 28, 1993	Bursa Paralel Indonesia/ Indonesia Parallel exchange	8 November 1993/ November 8, 1993	600,000	PLN II Bonds Year 1993
Obligasi PLN I Tahun 1992	25 September 1992/ September 25, 1992	Bursa Paralel Indonesia/ Indonesia Parallel exchange	10 November 1992/ November 10, 1992	300,000	PLN I Bonds Year 1992
Jumlah				51,541,115	Total

*) Pada tanggal 22 Juli 1995 Bursa Paralel Indonesia diakuisisi oleh Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta digabungkan dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia.

*) On July 22, 1995 the Indonesia Parallel Exchange was acquired by the Surabaya Stock Exchange. On November 30, 2007, the Surabaya Stock Exchange and Jakarta Stock Exchange merged and changed their name to the Indonesia Stock Exchange.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Penawaran umum efek utang Perusahaan (lanjutan)

b. The Company's public offering of bonds (continued)

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah PLN, sebagai berikut:

The Company has issued several PLN Medium-term Notes, as follows:

	<u>Tanggal efektif/ Effective date</u>	<u>Bursa pencatatan/ Listed on</u>	<u>Tanggal pencatatan/ Listed date</u>	<u>Jumlah yang ditawarkan/ Offered amount USD *)</u>	
Surat Utang Jangka Menengah Global - USD					Global Medium Term Notes - USD
Penerbitan tahun 2020	30 Juni 2020/ June 30, 2020	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	1 Juli 2020/ July 1, 2020	1,500,000,000	Issued in 2020
Penerbitan tahun 2019	5 November 2019/ November 5, 2019	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	7 November 2019/ November 7, 2019	1,000,000,000	Issued in 2019
	17 Juli 2019/ July 17, 2019	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	18 Juli 2019/ July 18, 2019	1,400,000,000	
Penerbitan tahun 2018	25 Oktober 2018/ October 25, 2018	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	26 Oktober 2018/ October 26, 2018	1,000,000,000	Issued in 2018
	21 Mei 2018/ May 21, 2018	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	16 Mei 2018/ May 16, 2018	2,000,000,000	
Penerbitan tahun 2017	15 Mei 2017/ May 15, 2017	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	16 Mei 2017/ May 16, 2017	2,000,000,000	Issued in 2017
Penerbitan tahun 2012	24 Oktober 2012/ October 24, 2012	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	25 Oktober 2012/ October 25, 2012	1,000,000,000	Issued in 2012
Penerbitan tahun 2011	22 November 2011/ November 22, 2011	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	23 November 2011/ November 23, 2011	1,000,000,000	Issued in 2011
Jumlah				10,900,000,000	Total
Surat Utang Jangka Menengah Global - EUR					Global Medium Term Notes - EUR
Penerbitan tahun 2019	5 November 2019/ November 5, 2019	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	7 November 2019/ November 7, 2019	500,000,000	Issued in 2019
Penerbitan tahun 2018	25 Oktober 2018/ October 25, 2018	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	26 Oktober 2018/ October 26, 2018	500,000,000	Issued in 2018
Jumlah				1,000,000,000	Total
Surat Utang Jangka Menengah Global - JPY					Global Medium Term Notes - JPY
Penerbitan tahun 2019	20 September 2019/ September 20, 2019	Tidak tercatat/ Not listed	N/A	23,200,000,000	Issued in 2019
Jumlah				23,200,000,000	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

Majapahit Holding B.V., Belanda, entitas anak yang bertujuan khusus yang sepenuhnya milik Perusahaan, menerbitkan Obligasi Terjamin, sebagai berikut:

Majapahit Holding B.V., Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary of the Company, issued Guaranteed Notes, as follows:

	<u>Tanggal efektif/ Effective date</u>	<u>Bursa pencatatan/ Listed on</u>	<u>Tanggal pencatatan/ Listed date</u>	<u>Jumlah yang ditawarkan/ Offered amount USD *)</u>	
Obligasi Terjamin - USD					Guaranteed Notes - USD
Penerbitan 2009	6 November 2009/ November 6, 2009	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	9 November 2009/ November 9, 2009	1,250,000,000	Issued in 2009
Penerbitan 2009	7 Agustus 2009/ August 7, 2009	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	11 Agustus 2009/ August 11, 2009	750,000,000	Issued in 2009
Penerbitan 2007	28 Juni 2007/ June 28, 2007	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	29 Juni 2007/ June 29, 2007	1,000,000,000	Issued in 2007
Penerbitan 2006	16 Oktober 2006/ October 16, 2006	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	17 Oktober 2006/ October 17, 2006	1,000,000,000	Issued in 2006
Jumlah				4,000,000,000	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Susunan pengurus dan informasi lain

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Amien Sunaryadi	Amien Sunaryadi
Wakil Komisaris Utama	Suhasil Nazara	Suhasil Nazara
Komisaris	Dadan Kusdiana	Rida Mulyana
	Susiwijono Moegiarso	Susiwijono Moegiarso
	Mohamad Ikhsan	Mohamad Ikhsan
	Dudy Purwagandhi	Dudy Purwagandhi
	Tedi Bharata	Ardan Adiperdana
	Eko Sulisty	Eko Sulisty
Komisaris Independen	Amien Sunaryadi	Amien Sunaryadi
	Charles Sitorus	Heru Winarko
	Alex Iskandar Munaf	Alex Iskandar Munaf
Direksi		
Direktur Utama	Darmawan Prasodjo	Darmawan Prasodjo
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	-	Sinthya Roesly
Direktur Keuangan	Sinthya Roesly	-
Direktur Perencanaan Korporat	-	Evy Haryadi
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis	Hartanto Wibowo	-
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia	-	Yusuf Didi Setiarto
Direktur Legal dan Manajemen <i>Human Capital</i>	Yusuf Didi Setiarto	-
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan	-	Bob Saril
Direktur Retail dan Niaga	Edi Srimulyanti	-
Direktur Energi Primer	-	Rudy Hendra Prastowo
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali	-	Haryanto W.S
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem	Evy Haryadi	-
Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan	-	Adi Lumakso
Direktur Manajemen Pembangkitan	Adi Lumakso	-
Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	-	Adi Priyanto
Direktur Distribusi	Adi Priyanto	-
Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan	-	Wiluyo Kusdwiarto
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan	Wiluyo Kusdwiarto	-
Komite Audit		
Ketua	Amien Sunaryadi	Amien Sunaryadi
Anggota	Alex Iskandar Munaf	Heru Winarko
	Charles Sitorus	Alex Iskandar Munaf
	Tomi Parisianto Wibowo	Tomi Parisianto Wibowo
	Nizam Burhanuddin	Krisna Simbaputra
		Nizam Burhanuddin
Sekretaris Perusahaan		
Sekretaris Perusahaan	Alois Wisnuhardana	Ova Kurniawan

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Management and other information

As at December 31, 2022 and 2021, the Company's management consisted of the following:

	2022	2021
Board of Commissioners		
President Commissioner	Amien Sunaryadi	Amien Sunaryadi
Vice President Commissioner	Suhasil Nazara	Suhasil Nazara
Commissioners	Dadan Kusdiana	Rida Mulyana
	Susiwijono Moegiarso	Susiwijono Moegiarso
	Mohamad Ikhsan	Mohamad Ikhsan
	Dudy Purwagandhi	Dudy Purwagandhi
	Tedi Bharata	Ardan Adiperdana
	Eko Sulisty	Eko Sulisty
Independent Commissioners	Amien Sunaryadi	Amien Sunaryadi
	Charles Sitorus	Heru Winarko
	Alex Iskandar Munaf	Alex Iskandar Munaf
Board of Directors		
President Director	Darmawan Prasodjo	Darmawan Prasodjo
Director of Finance and Risk Management	-	Sinthya Roesly
Director of Finance	Sinthya Roesly	-
Director of Corporate Planning	-	Evy Haryadi
Director of Corporate Planning and Business Development	Hartanto Wibowo	-
Director of Human Capital Management	-	Yusuf Didi Setiarto
Director of Legal and Human Capital Management	Yusuf Didi Setiarto	-
Director of Commerce and Customer Management	-	Bob Saril
Director of Retail and Commerce	Edi Srimulyanti	-
Director of Primary Energy	-	Rudy Hendra Prastowo
Director of Regional Business of Java, Madura and Bali	-	Haryanto W.S
Director of Transmission and System Planning	Evy Haryadi	-
Director of Regional Business of Sumatera and Kalimantan	-	Adi Lumakso
Director of Generation Management	Adi Lumakso	-
Director of Regional Business of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara	-	Adi Priyanto
Director of Distribution	Adi Priyanto	-
Director of Mega Projects and New Renewable Energy	-	Wiluyo Kusdwiarto
Director of Management Projects and New Renewable Energy	Wiluyo Kusdwiarto	-
Audit Committee		
Chairman	Amien Sunaryadi	Amien Sunaryadi
Members	Alex Iskandar Munaf	Heru Winarko
	Charles Sitorus	Alex Iskandar Munaf
	Tomi Parisianto Wibowo	Tomi Parisianto Wibowo
	Nizam Burhanuddin	Krisna Simbaputra
		Nizam Burhanuddin
Corporate Secretary		
Corporate Secretary	Alois Wisnuhardana	Ova Kurniawan

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Pembentukan struktur *subholding*

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor S-886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan *Holding* dan *Subholding* PT PLN (Persero) Masa/tahap *Legal End-State* Serta Restrukturisasi dan Pengalihan Harta, Perseroan membentuk *Subholding* Grup yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023 melalui:

1. Pemekaran usaha atau pemisahan tidak murni/*spin-off* atas sebagian aktiva dan pasiva kegiatan usaha pembangkitan dan energi primer Perusahaan kepada PT PLN Nusantara Power ("PNP"; dahulu bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali) dan PT Indonesia Power ("IP").
2. Penyertaan modal non-tunai (*inbreg*) kepada PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI"; dahulu bernama PT PLN Batubara) berupa seluruh kepemilikan saham Grup pada PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal ("PLN GG") dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAG").

Pembentukan empat *Subholding* Grup yang terdiri atas:

1. Dua *Subholding* di bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu PNP dan IP;
2. Satu *Subholding* di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu EPI; dan
3. Satu *Subholding* untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan, yaitu bernama PT Indonesia Comnets Plus.

Pada tanggal 30 Desember 2022, sebagai bagian dari Pembentukan *Holding* dan *Subholding* PLN, Perusahaan telah menandatangani akta-akta sebagai berikut yang telah berlaku efektif pada 1 Januari 2023 sebagaimana disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Establishment of subholding structure

Based on Decision Letter of the Minister of SOE of the Republic of Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 dated December 30, 2022, regarding the Approval for the Establishment of *Holding* and *Subholding* of PT PLN (Persero) for the *Legal End-State Period/Stage* as well as the *Restructuring and Transfer of Assets* , the Company established *Group Subholdings* which became effective on January 1, 2023, through:

1. *Partial spin-off* of part of the Company's assets and liabilities relating to the generation and primary energy business activities to PT PLN Nusantara Power ("PNP"; previously named PT Pembangkitan Jawa-Bali) and PT Indonesia Power ("IP").
2. *In-kind capital participation (inbreg)* to PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI"; previously named PT PLN Batubara) in the form of the Group's entire share ownership in PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal ("PLN GG") and PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAG").

The formation of four *Subholdings* of the Group, consisting of:

1. Two *Subholdings* in the power generation sector, namely PNP and IP;
2. One *Subholding* in the primary energy procurement and logistics sector, namely EPI;
3. One *Subholding* for business activities outside of power generation, transmission, and distribution, namely PT Indonesia Comnets Plus.

On December 30, 2022, as part of the Establishment of PLN *Holding* and *Subholdings* , the Company has signed the following Deeds that took effect on January 1, 2023 as approved and/or notified to the Minister of Law and Human Rights as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Pembentukan struktur *subholding* (lanjutan)

1. Akta pemisahan kegiatan usaha pembangkitan kepada PNP dengan nilai yang akan ditukar menjadi kepemilikan saham baru Perusahaan pada PNP sebesar Rp151.255.249, sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid, & Rekan ("KJPP RHR"), yang tertuang dalam Akta Notaris No. 70 dan No. 76 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H.
2. Akta pemisahan kegiatan usaha pembangkitan dengan IP dengan nilai yang akan ditukar menjadi kepemilikan saham baru Perusahaan pada IP sebesar Rp175.974.993, sesuai dengan hasil penilaian KJPP RHR yang tertuang dalam Akta Notaris No. 71 dan No. 77 dari tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H.
3. Akta pemasukan (*inbreng*) ke dalam EPI berupa seluruh kepemilikan saham Perusahaan pada PLN GG dan BAG dengan nilai yang akan ditukar menjadi kepemilikan saham baru sebesar Rp2.273.717, sesuai dengan hasil penilaian KJPP RHR, yang tertuang dalam Akta Notaris No. 72 dan No. 78 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H.

Dampak kejadian di atas, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Grup sebagai berikut:

1. Pembentukan *Holding* dan *Subholding* PLN diharapkan akan membangun struktur PLN Group yang ramping, lincah, efisien, dan memberikan nilai tambah, agar setiap *Subholding* memiliki fokus pada kegiatan usaha masing-masing, meminimalisir risiko usaha (*ring fencing*) di tingkat *Subholding*, dan fleksibilitas dalam memperoleh kerja sama strategis.
2. Setelah transaksi tersebut di atas dilaksanakan, Perusahaan akan memiliki tambahan kepemilikan saham pada anak perusahaan terkonsolidasi, yaitu PNP, IP, dan EPI dalam nilai masing-masing tersebut di atas, di mana hal ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Grup serta memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kegiatan usaha Grup.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Establishment of subholding structure (continued)

1. Deed of spin-off of power generation business activities to PNP to be compensated with newly issued shares of the Company in PNP amounting to Rp151,255,249 as per the independent appraisal of Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid, & Rekan ("KJPP RHR"), as stated in the Notarial Deeds No. 70 and No. 76 dated December 30, 2022 of Muhammad Hanafi, S.H.
2. Deed of spin-off of power generation business activities to IP to be compensated with newly issued shares of the Company in IP amounting to Rp175,974,993 as per the independent appraisal of KJPP RHR, as stated in Notarial Deeds No. 71 and No. 77 dated December 30, 2022 of Muhammad Hanafi, S.H.
3. Deed of in-kind capital participation to EPI in the form of the Company's entire share-ownership in PLN GG and BAG to be compensated with newly issued shares in the value of Rp2,273,717 as per the independent appraisal of KJPP RHR, as stated in Notarial Deeds No. 72 and No. 78 dated December 30, 2022 of Muhammad Hanafi, S.H.

The impact of the above events, information or material facts on the operational activity, legal, financial condition or the business sustainability of the Group, is as follows:

1. The establishment of PLN Holding and Subholding is expected to build a PLN Group structure that is lean, agile, efficient, and create value creation, and to enable each of the Subholdings, to focus on their respective business activities, ring fencing of risk at Subholding level, and flexibility in obtaining strategic partnerships.
2. Upon the consummation of the transaction, the Company will have additional share ownership in consolidated subsidiaries, which are PNP, IP, and EPI in the value as mentioned above. This is expected to provide additional value to the Group and have a positive impact for the continuity of the Group's business activities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG
BERLAKU UMUM DI INDONESIA (“PABU”)**

**a. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan
Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (“POJK No.
6”)**

Grup mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik, yakni Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (“PPA”) dan Kontrak Penjualan Energi (“ESC”), dengan Penyedia dan Pengembang Tenaga Listrik Swasta (“IPP”). IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

Sebelum 1 Januari 2016, Grup menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) No. 8: “Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa” (“ISAK No. 8”) dalam mengevaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung unsur sewa (Catatan 3.k).

Pada tanggal 1 Maret 2017, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan POJK No. 6 yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Berdasarkan POJK No. 6, transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut mengandung substansi selain jual beli listrik. POJK No. 6 berlaku secara prospektif untuk tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan mengizinkan perlakuan lebih awal sejak 1 Januari 2016. POJK No. 6 berlaku sampai akhir tahun buku berakhirnya penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 tahun 2017.

Grup memutuskan untuk menerapkan lebih awal POJK No. 6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016. Oleh karena itu transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik yang mengandung sewa (Catatan 3.k), mulai 1 Januari 2016 disajikan sebagai pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun terjadinya. Pada tanggal 1 Januari 2016, Grup juga melakukan penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait.

**2. IMPLEMENTATION OF
GENERALLY ACCEPTED
PRINCIPLES (“GAAP”)**

**a. Implementation of Financial Services
Authority Regulation No. 6/POJK.04/2017
regarding Accounting Treatment for
Transactions Based on Power Purchase
Agreements (“POJK No. 6”)**

The Group has entered into Power Purchase Agreements (“PPAs”) and Energy Sales Contracts (“ESCs”), with Independent Power Producers (“IPPs”). Those IPPs are holders of Electricity Business Licences for public use.

Before January 1, 2016, the Group applied Interpretation of Financial Accounting Standards (“IFAS”) No. 8: “Determining Whether an Arrangement Contains a Lease” (“IFAS No. 8”) in evaluating whether PPAs and ESCs with IPPs contain a lease (Note 3.k).

On March 1, 2017, the Financial Services Authority (“FSA”) issued POJK No. 6 which is applicable for listed and public companies. Based on POJK No. 6, transactions based on a PPA are treated as sale and purchase transactions, even though the PPAs contain substance other than that of sale and purchase of electricity. POJK No. 6 applies prospectively for the year beginning on January 1, 2017 and early implementation is allowed for the year beginning on January 1, 2016. POJK No. 6 is valid until the end of the assignment on acceleration of electricity infrastructure development in accordance with Presidential Regulation No. 14 year 2017.

The Group decided to implement POJK No. 6 early prospectively beginning on January 1, 2016. Therefore, the electricity sale and purchase transactions based on PPAs which contain a lease (Note 3.k), since January 1, 2016 are presented as purchase of electricity in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred. On January 1, 2016, the Group also adjusted the related assets and liabilities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/9 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG
BERLAKU UMUM DI INDONESIA (“PABU”)
(lanjutan)**

**a. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan
Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (“POJK No.
6”) (lanjutan)**

Jumlah bersih penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait sebesar Rp43.428.454 dan telah dicatat sebagai penyesuaian saldo laba pada tanggal 1 Januari 2016, dengan rincian sebagai berikut:

	1 Januari 2016 sebelum penyesuaian/ January 1, 2016 before adjustment	Penyesuaian saldo awal/ Beginning balance adjustment	1 Januari 2016 setelah penyesuaian/ January 1, 2016 after adjustment	
Aset tetap	1,187,879,590	(72,227,600)	1,115,651,990	Property, plant and equipment
Aset pajak tangguhan	29,088,271	(14,787,769)	14,300,502	Deferred tax assets
	<u>1,216,967,861</u>	<u>(87,015,369)</u>	<u>1,129,952,492</u>	
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang listrik swasta	7,093,280	755,783	7,849,063	Electricity purchase payable
Utang sewa	149,621,763	(128,065,144)	21,556,619	Lease Liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang sewa	6,759,138	(3,313,534)	3,445,604	Lease liabilities
Biaya masih harus dibayar	10,627,055	(2,216,084)	8,410,971	Accrued expenses
Utang listrik swasta	311,196	9,968	321,164	Electricity purchase payable
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	8,910,438	380,409	9,290,847	Related parties
Pihak ketiga	17,715,563	1,998,142	19,713,705	Third parties
Utang lain-lain	20,188,608	6,637	20,195,245	Other payables
	<u>221,227,041</u>	<u>(130,443,823)</u>	<u>90,783,218</u>	
Dampak penerapan POJK No. 6 terhadap saldo laba awal		<u>43,428,454</u>		The effect of POJK No. 6 application on beginning retained earnings

Mulai 1 Januari 2020, Grup menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) 73, “Sewa”. Standar akuntansi ini menggantikan standar akuntansi berikut:

- PSAK No. 30: “Sewa”
- ISAK No. 8: “Penentuan apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa”
- ISAK No. 23: “Sewa Operasi-Insentif”
- ISAK No. 24: “Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa”
- ISAK No. 25: “Hak atas Tanah”

Starting January 1, 2020, the Group implemented Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”) 73, “Leases”. This standard replaced the previous accounting standards as follows:

- SFAS No. 30: “Leases”
- IFAS No. 8: “Determining Whether an Arrangement Contains a Lease”
- IFAS No. 23: “Operating Leases-Incentives”
- IFAS No. 24: “Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease”
- IFAS No. 25: “Land Rights”

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2022 AND 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG
BERLAKU UMUM DI INDONESIA (“PABU”)
(lanjutan)**

**a. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan
Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (“POJK No.
6”) (lanjutan)**

Perjanjian jual beli tenaga listrik yang diikuti oleh Grup tetap mengacu pada POJK No. 6 karena peraturan tersebut masih berlaku sampai berakhirnya penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden. Dengan demikian perlakuan akuntansi untuk PPA dan ESC dengan IPP masih tetap sama seperti sebelum Grup menerapkan PSAK No. 73, yaitu diperlakukan sebagai transaksi jual beli dan dikecualikan dari ruang lingkup penerapan PSAK No. 73.

**b. Perubahan pada PSAK, amandemen dan
penyesuaian tahunan yang berlaku efektif
untuk tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2022**

Penerapan, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- Amandemen PSAK No. 22: “Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual”
- Amandemen PSAK No. 57: “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak”
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69: “Agrikultur”
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: “Instrumen Keuangan”
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73: “Sewa”

Sehubungan dengan amandemen PSAK No. 71, No. 55, No. 60, No. 62 dan No. 73, Grup saat ini memiliki pinjaman dari pihak berelasi (Catatan 27) yang mengacu pada Dolar Amerika Serikat London Interbank Offered Rate (“LIBOR”) dan berlaku hingga Juni 2023. Pada tanggal 31 Desember 2022, suku bunga acuan alternatif belum semuanya ditentukan.

**2. IMPLEMENTATION OF
GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING
PRINCIPLES (“GAAP”) (continued)**

**a. Implementation of Financial Services
Authority Regulation No. 6/POJK.04/2017
regarding Accounting Treatment for
Transactions Based on Power Purchase
Agreements (“POJK No. 6”) (continued)**

The PPAs entered into by the Group are still accounted for under POJK No. 6 because it remains valid until the end of the assignment on acceleration of electricity infrastructure development in accordance with Presidential Regulation. Therefore, the accounting treatment for PPAs and ESCs with IPPs remains the same as before the Group implemented SFAS No. 73, i.e. treated as sale and purchase transactions and hence excluded from the scope of SFAS No. 73.

**b. Changes to SFAS, amendments and annual
improvements effective for years beginning
on or after January 1, 2022**

The adoption of the following, amendments and annual improvements to accounting standards which are effective from January 1, 2022 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- Amendment to SFAS No. 22: “Business Combinations - Reference to Conceptual Framework”
- Amendment to SFAS No. 57: “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract”
- Annual improvement to SFAS No. 69: “Agriculture”
- Annual improvement to SFAS No. 71: “Financial Instruments”
- Annual improvement to SFAS No. 73: “Leases”

With respect to the amendments to SFAS No. 71, No. 55, No. 60, No. 62 and No. 73, the Group currently has loans from related parties (Note 27) which refer to the United States Dollar London Interbank Offered Rate (“LIBOR”) and extend until June 2023. As at December 31, 2022, the majority of the alternative benchmark has not yet been determined.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG
BERLAKU UMUM DI INDONESIA (“PABU”)
(lanjutan)**

**b. Perubahan pada PSAK, amandemen dan
penyesuaian tahunan yang berlaku efektif
untuk tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2022 (lanjutan)**

Standar baru, amandemen, dan revisi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74: “Kontrak Asuransi”
- Amandemen PSAK No. 1: “Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar”
- Amandemen PSAK No. 1: “Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”
- Amandemen PSAK No. 1: “Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan”
- Amandemen PSAK No. 16: “Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan”

- Amandemen PSAK No. 25: “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi”
- Amandemen PSAK No. 46: “Pajak Penghasilan - Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal”
- Amandemen PSAK No. 73: “Sewa – Kewajiban Sewa dalam Transaksi Jual dan Sewa Balik”
- Amandemen PSAK No. 74: “Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - “Informasi Komparatif”

- Revisi PSAK No. 101: “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”
- Revisi PSAK No. 107: “Akuntansi Ijarah”
- Revisi PSAK No. 109: “Zakat, Infaq dan Akuntansi Sedekah”

Standar baru, amandemen dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali untuk Amandemen atas PSAK No. 1 “Penyajian Laporan Keuangan – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan”, Amandemen atas PSAK No. 73 dan revisi atas PSAK No. 101 dan 109, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, dan PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen, revisi dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

**2. IMPLEMENTATION OF INDONESIAN
GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING
PRINCIPLES (“GAAP”) (continued)**

**b. Changes to SFAS, amendments and annual
improvements of effective for years beginning
on or after January 1, 2022 (continued)**

New standards, amendments and revisions issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2022 are as follows:

- SFAS No. 74: “Insurance Contracts”
- Amendment to SFAS No. 1: “Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current”
- Amendment to SFAS No. 1: “Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies”
- Amendment to SFAS No. 1: “Presentation of Financial Statements - Long-term Liabilities with Covenants”
- Amendment to SFAS No. 16: “Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use”
- Amendment to SFAS No. 25: “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates”
- Amendment to SFAS No. 46: “Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction”
- Amendment to SFAS No. 73: “Leases – Leases Liability in a Sale and Leaseback Transaction”
- Amendment to SFAS No. 74: “Insurance Contracts regarding Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information”
- Revision to SFAS No. 101: “Presentation of Sharia Financial Statements”
- Revision to SFAS No. 107: “Ijarah Accounting”
- Revision to SFAS No. 109: “Zakah, Infaq and Sadaqah Accounting”

The above new standard, amendments and revisions are effective beginning January 1, 2023, except for Amendment to SFAS No. 1 “Presentation of Financial Statements – Long-term Liabilities with Covenants”, Amendment to SFAS No. 73 and revisions to SFAS No. 101 and 109, which are effective beginning January 1, 2024 and SFAS No. 74 and Amendment to SFAS No. 74 which are effective beginning January 1, 2025, but early adoption is permitted.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standard, amendments, revisions and annual improvements on the Group’s consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Pernyataan kepatuhan

Sejak 1 Januari 2016, laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan PABU, yang mencakup sebagai berikut:

- (a) Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), yang meliputi PSAK dan ISAK;
- (b) Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAS-IAI"), yang meliputi Standar Akuntansi Syariah ("SAS"); dan
- (c) Ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh OJK, terdiri dari Peraturan OJK No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No. 6 POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Grup. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Statement of compliance

Since January 1, 2016, the consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian GAAP, which covers the following:

- (a) Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI"), which cover SFAS and IFAS;*
- (b) Syariah Financial Accounting Standards issued by the Syariah Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants ("DSAS-IAI"), which cover Syariah Accounting Standards ("SAS"); and*
- (c) Applicable Capital Market Regulations as stated by the FSA, including FSA Regulation No. VIII.G.7 consisting of Guidance for the Presentation of Financial Statements, Decree of Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board ("CM-FISB") No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed or Public Companies, and FSA Regulation No. 6 POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements.*

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared using the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Group. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on the going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 4.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

i. Entitas anak

i.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

c. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

i.1. Consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

c. Principles of consolidation (continued)

i. Entitas anak (lanjutan)

i. Subsidiaries (continued)

i.2. Akuisisi

i.2. Acquisition

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. The identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owner of the parent entity.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured and its subsequent settlement is accounted for within equity.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

c. Principles of consolidation (continued)

i. Entitas anak (lanjutan)

i. Subsidiaries (continued)

i.2. Akuisisi (lanjutan)

i.2. Acquisition (continued)

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired are recorded as goodwill. If these amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

ii. Changes in ownership interest in subsidiaries without loss of control

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Pelepasan entitas anak

iii. Disposal of subsidiaries

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained on the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

- Akuisisi

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi atau ventura Bersama merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

- Metode ekuitas

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura Bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

c. Principles of consolidation (continued)

iv. Accounting for associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, and is generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investment in associates is accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

- Acquisitions

Investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill on the acquisition of an associate or a joint venture represents the excess of the cost of acquisition of the associate or joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate or joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

- Equity method of accounting

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

c. Principles of consolidation (continued)

**iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan
ventura bersama (lanjutan)**

**iv. Accounting for associates and joint
ventures (continued)**

- Metode ekuitas (lanjutan)

**- Equity method of accounting
(continued)**

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates or joint ventures are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of the impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amount of the investment.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- Pelepasan

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

d. Goodwill

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak dan merupakan selisih imbalan yang ditransfer terhadap kepemilikan dalam nilai wajar neto atas aset, liabilitas, dan liabilitas kontinjensi teridentifikasi dan nilai wajar kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK"), atau kelompok UPK, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi *goodwill* menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. *Goodwill* dipantau pada level segmen operasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

iv. Accounting for associates and joint ventures (continued)

- Disposals

An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Gains and losses arising from partial disposal or dilution of an investment in an associate and a joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

d. Goodwill

Goodwill arises from the acquisition of subsidiaries and represents the excess of the consideration transferred over the interest in the net fair value of the net identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the acquiree and the fair value of the non-controlling interest in the acquiree.

For the purposes of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each Cash-Generating Unit ("CGU"), or group of CGUs, that is expected to benefit from the synergies of the combination. Each CGU or group of CGUs to which the goodwill is allocated represents the lowest level within the entity at which goodwill is monitored for internal management purposes. Goodwill is monitored at the operating segment level.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Penjabaran mata uang asing

e. Foreign currency translation

i. Mata uang fungsional dan penyajian

i. Functional and presentation currency

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rp, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rp, which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

ii. Transaksi dan saldo

ii. Transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency were adjusted to reflect the exchange rates prevailing at this date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

As at the consolidated statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the exchange rates prevailing at the date of the consolidated statement of financial position published by Bank Indonesia were as follows:

	2022	2021	
	Kurs tengah/ Middle rate*)	Kurs tengah/ Middle rate*)	
Yen Jepang (JPY)	118	124	Japan Yen (JPY)
Dolar AS (USD)	15,592	14,269	US Dollars (USD)
Euro (EUR)	16,609	16,127	Euro (EUR)
Franc Swiss (CHF)	16,865	15,544	Swiss Franc (CHF)
Dolar Kuwait (KWD)	51,350	47,146	Kuwait Dollars (KWD)

*) dalam jumlah penuh

*) in full amount

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

e. Foreign currency translation (continued)

iii. Entitas dalam Grup

iii. Group companies

Hasil usaha operasi dan posisi keuangan dari seluruh entitas anak Grup (tidak ada yang mata uang fungsionalnya mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi) yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang penyajian Perusahaan, ditranslasikan dalam mata uang penyajian Perusahaan sebagai berikut:

The results of the operations and financial position of all of the Group's subsidiaries (none of which has the currency of a hyperinflationary economy) that have a functional currency different from the Company's presentation currency are translated into the Company's presentation currency as follows:

- (a) Aset dan liabilitas yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dijabarkan pada kurs penutup tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut;
- (b) Penghasilan dan beban untuk setiap laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata (kecuali jika rata-rata tersebut bukan perkiraan wajar efek kumulatif dari kurs yang berlaku pada tanggal transaksi, maka penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs tanggal transaksi); dan

- (a) *The assets and liabilities presented in the consolidated statement of financial position are translated at the closing rate at the date of the consolidated statement of financial position;*
- (b) *The income and expenses for each item of profit or loss are translated at the average exchange rates (unless this average is not a reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in which case the income and expenses are translated at the rates in force on the dates of the transactions); and*

	2022	2021	
	Kurs rata-rata/ Average rate*)	Kurs rata-rata/ Average rate*)	

Dolar AS (USD) 14,875

14,312

US Dollars (USD)

*) dalam jumlah penuh

*) *in full amount*

- (c) Seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

- (c) *All of the resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.*

f. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi

f. Transactions with related parties

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7: "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan OJK No. VIII.G.7:

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS No. 7: "Related Party Disclosures" and OJK Regulation No. VIII.G.7:

- (a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) Merupakan personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

- (a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - (i) *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - (ii) *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - (iii) *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

**f. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi
(lanjutan)**

f. Transactions with related parties (continued)

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

(b) *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:*

(i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);

(i) *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to each other);*

(ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

(ii) *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*

(iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

(iii) *Both entities are joint ventures of the same third party;*

(iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

(iv) *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*

(v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

(v) *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of the employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*

(vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);

(vi) *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*

(vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

(vii) *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

A Government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a Government. Government refers to Government, Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah termasuk entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

g. Aset keuangan

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain; dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arusnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan bergantung pada apakah Grup telah memilih tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transactions with related parties (continued)

Government related entities include entities which are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOEs as the shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

g. Financial assets

i. Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- financial assets measured at fair value either through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI"); and
- those to be measured at amortised cost.

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI").

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing such assets changes.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

g. Aset keuangan (lanjutan)

g. Financial assets (continued)

**i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran
(lanjutan)**

**i. Classification, recognition and
measurement (continued)**

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are SPPI.

Instrumen utang

Debt instruments

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- *Amortised cost: Assets that are held for the collection of contractual cash flows in cases where such cash flows represent SPPI are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/24 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

g. Aset keuangan (lanjutan)

g. Financial assets (continued)

**i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran
(lanjutan)**

**i. Classification, recognition and
measurement (continued)**

Instrumen utang (lanjutan)

Debt instruments (continued)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam penghasilan atau beban lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam penghasilan dan beban kurs mata uang asing dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.
- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi dan disajikan bersih dalam laba rugi.

- *Fair value through other comprehensive income ("FVOCI"):* Assets that are held for the collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, in cases where the assets' cash flows represent SPPI, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income and expenses. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other gains and losses on foreign exchanges, net and impairment expenses in other expenses.
- *Fair value through profit or loss:* Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and that is not part of a hedging relationship, is recognised in profit or loss and presented net in profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

g. Aset keuangan (lanjutan)

g. Financial assets (continued)

**i. Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran
(lanjutan)**

**i. Classification, recognition and
measurement (continued)**

Instrumen ekuitas

Equity instruments

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. In cases where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

Changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recognised in other gains/(losses) in the consolidated statement of profit or loss as applicable. Impairment losses (and the reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

ii. Penghentian pengakuan

ii. Derecognition

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

iii. Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2022 AND 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tahun pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan “pendekatan yang disederhanakan” untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha, dan piutang lain-lain, dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan, dan “pendekatan umum” untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri kerugian kredit ekspektasiannya.

i. Aset tetap

Pada tanggal akuisisi, Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing tanah dan hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73, “Sewa”. Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16, “Aset Tetap” yaitu tanah dan hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, which is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applies the “simplified approach” to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected credit loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the “general approach” for other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since initial recognition. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due, with the exception of the receivables which can be assessed at their own rating of expected credit losses.

i. Property, plant and equipment

At acquisition date, the Group analyses the facts and circumstances for each type of land and land rights in determining the accounting for each of these land and land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land and land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group accounts for these transactions as leases under SFAS No. 73, “Leases”. If the land and land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 16, “Fixed Assets” under which land and land rights are recognised at cost and not depreciated.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2022 AND 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama tahun tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama tahun tersebut.

Setelah pengakuan awal, kelas-kelas aset berikut ini yang diukur menggunakan metode revaluasi:

- Tanah dan hak atas tanah;
- Bangunan umum, waduk, dan prasarana;
- Instalasi dan mesin pembangkit;
- Perlengkapan transmisi;
- Perlengkapan distribusi;
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik; dan
- Material cadangan utama.

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Tanah dan hak atas tanah tidak didepresiasi. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain termasuk aset tersebut ditransfer ke aset tidak digunakan dalam operasi; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Property, plant and equipment (continued)

Property, plant and equipment are initially recognised at cost, which comprises the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprise the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular year for purposes other than to produce inventories during that year.

After initial recognition, the following classes of assets are measured using the revaluation method:

- *Land and land rights;*
- *Buildings, reservoirs and infrastructure;*
- *Installations and power plants;*
- *Transmission equipment;*
- *Distribution equipment;*
- *Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply; and*
- *Major spare parts.*

The classes of asset above are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses. Land and land rights are not depreciated. Valuation of those assets is performed by external independent valuers which are registered with the FSA. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Assets that do not change significantly in fair value must be re-evaluated at least every 3 (three) years. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the property, plant and equipment.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use a revaluation model are credited to "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income including the assets that are transferred to assets not used in operations; all other decreases are charged to profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/28 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

i. Aset tetap (lanjutan)

i. Property, plant and equipment (continued)

Aset tetap disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:

Property, plant and equipment are depreciated to their residual values using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

Tahun/Years

Bangunan umum, waduk, dan prasarana	10 - 50	<i>Buildings, reservoirs, and infrastructure</i>
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	<i>Installations and power plants</i>
Perlengkapan transmisi	40	<i>Transmission equipment</i>
Perlengkapan distribusi	10 - 40	<i>Distribution equipment</i>
Perlengkapan umum	5	<i>General equipment</i>
Kendaraan bermotor	5	<i>Motor vehicles</i>
Material cadangan utama	10 - 40	<i>Major spare parts</i>
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	10	<i>Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply</i>
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	10	<i>Other telecommunications and data processing equipment</i>
Kapal dan perlengkapan	10 - 25	<i>Vessels and equipment</i>

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa, dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The useful lives, residual values and depreciation methods of property, plant and equipment are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 3.j).

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 3.j).

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The costs of repairs and maintenance are charged to profit or loss as incurred. Subsequent costs incurred to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognised as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

For property, plant and equipment which can no longer be utilised or sold, the carrying amount is eliminated from the group of property, plant and equipment. The resulting gains or losses on disposals of property, plant and equipment are recognised in profit or loss.

Jika aset yang direvaluasi tidak digunakan lagi atau dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

When revalued assets are no longer utilised or sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari aset tetap yang akan direlokasi/ditransfer dan sedang diperbaiki. Aset yang tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode garis lurus dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Assets not used in operations consist of property, plant and equipment that will be relocated/transferred and will be repaired. Assets not used in operations are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2022 AND 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam pembangunan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Aset dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

j. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya *goodwill*, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui langsung dalam laba rugi. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

i. Property, plant and equipment (continued)

Construction in progress represents costs directly attributable to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, depreciation of property, plant and equipment used in the construction and cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during the commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

j. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life - for example, goodwill - are not subject to amortisation but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for a possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognised, if and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment testing was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

k. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

l. Sewa

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi.

Pendapatan sewa dari operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pesewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi saat mendapatkan sewa operasi ditambahkan pada nilai tercatat aset pendasar dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan basis yang sama dengan pendapatan sewa. Aset terkait yang disewakan ditampilkan di laporan posisi keuangan berdasarkan sifatnya.

Grup sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa aset tetap tertentu. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 2 hingga 20 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

k. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year of the reporting date. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

l. Leases

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease.

Lease income from operating leases where the Group is a lessor is recognised as revenue on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease are added to the carrying amount of the underlying asset and recognised as expense over the lease term on the same basis as lease income. The respective leased assets are included in the statement of financial position based on their nature.

The Group as a lessee

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Group leases certain property, plant and equipment. Rental contracts are typically made for fixed periods of 2 to 20 years but may have extension options. Contracts may contain both lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices.

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Group.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/31 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup:

- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan
- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, mata uang, dan jaminan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivables;
- variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Group:

- where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;
- uses a *build-up* approach that starts with a risk free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Group, where there is no recent third-party financing; and
- makes adjustments specific to the lease, e.g., term, currency and security.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/32 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima; dan
- biaya langsung awal, dan biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 3.j).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

Opsi ekstensi dan terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- the amount of the initial measurement of lease liability;
- any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received; and
- any initial direct costs, and restoration costs.

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use assets are depreciated over the underlying assets' useful life.

The right-of-use assets are also subject to impairment (Note 3.j).

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Sewa (lanjutan)

I. Leases (continued)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

The Group as a lessee (continued)

Jaminan nilai residu

Residual value guarantees

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Grup terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

To optimise lease costs during the contract period, the Group sometimes provides residual value guarantees in relation to equipment leases.

Modifikasi sewa

Lease modification

Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

A lessee shall account for a lease modification as a separate lease if both:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa:

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, a lessee shall:

- mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian; dan
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisi menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan; atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

- allocate the consideration in the modified contract;
- determine the lease term of the modified lease; and
- remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. The revised discount rate is determined as the interest rate implicit in the lease for the remainder of the lease term, if that rate can be readily determined, or the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification, if the interest rate implicit in the lease cannot be readily determined.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan:

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, the lessee shall account for the measurement of the lease liability by:

- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut.
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

- decreasing the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee shall recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease.
- making a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

m. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

n. Properti investasi

Properti investasi adalah properti (tanah dan hak atas tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

m. Borrowing costs

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

n. Investment properties

Investment properties are properties (land and land rights or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognised as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprising its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Properti investasi (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya.

Nilai wajar didasarkan kepada harga pasar aktif, disesuaikan, jika perlu, dengan perbedaan alam, lokasi atau kondisi dari aset tersebut. Jika informasi tersebut tidak tersedia, Grup menggunakan metode penilaian alternatif, seperti harga terbaru di pasar yang kurang aktif atau proyeksi arus kas yang didiskontokan.

Penentuan nilai wajar investasi dilakukan pada tanggal posisi keuangan didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Penilaian ini membentuk dasar untuk nilai tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan (pada tanggal penerima mendapatkan kontrol) atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan. Dalam menentukan nilai pertimbangan dari pelepasan properti investasi, Grup mempertimbangkan dampak dari variabel pertimbangan, adanya komponen pembiayaan yang signifikan, dan pertimbangan utang ke pembeli (jika ada).

Pengalihan dilaksanakan ke (atau dari) properti investasi hanya ketika adanya perubahan pemakaian. Untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang ditempati pemilik, biaya yang dianggap untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan pemakaian tersebut. Jika properti yang ditempati pemilik menjadi properti investasi, Grup mengakui properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum pada aset tetap sampai tanggal perubahan pemakaian.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

n. Investment properties (continued)

After initial recognition, the Group chooses to use the fair value model and measure all of its investment properties at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognised in profit or loss for the year in which it arises.

Fair value is based on active market prices, adjusted, if necessary, for differences in the nature, location or condition of the specific asset. If this information is not available, the Group uses alternative valuation methods, such as recent prices on less active markets or discounted cash flow projections.

The fair value of investment property as at the financial position date is based on an annual valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued. These valuations form the basis for the carrying amounts in the consolidated financial statements.

Investment properties are derecognised either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the year of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property, the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/36 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

o. Aset takberwujud

o. Intangible assets

Piranti lunak komputer

Computer software

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian *overhead* yang relevan. Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya antara 4 sampai dengan 5 tahun.

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets. Directly attributable costs are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads. Computer software development costs recognised as assets are amortised using the straight line method over their estimated useful lives of between four to five years.

Biaya legal terkait pembaruan tanah dan hak atas tanah

Legal costs to renew land and land rights

Biaya legal terkait dengan pembaruan tanah dan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum tanah dan hak atas tanah antara 20 sampai dengan 30 tahun.

Legal costs related to renewal of land and land rights are recognised as intangible assets and amortised over the period of the land or land rights between 20 to 30 years.

p. Biaya dibayar di muka

p. Prepaid expenses

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama periode manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight line method.

q. Kas dan setara kas

q. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

r. Persediaan

r. Inventories

Persediaan suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan, dan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan jenis persediaan pada masa mendatang.

Spare parts, fuel, lubricants, tools and supplies are valued at cost less a provision for obsolete and slow moving inventory. Cost is determined based on the moving average method. A provision for obsolete and slow moving inventory is determined on the basis of estimated future usage of individual inventory items.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

s. Pengakuan pendapatan dan beban

s. Revenue and expense recognition

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Revenue from contracts with customers

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

Revenue recognition has to fulfil 5 (five) steps of assessment as follows:

- i. identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- ii. identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- iii. penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diterimanya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diterimanya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- iv. alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
- v. pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

- i. identify contract(s) with a customer;*
- ii. identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
- iii. determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;*
- iv. allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost plus margin; and*
- v. recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).*

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

A performance obligation may be satisfied at the following:

- Pada waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/38 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2022 AND 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Penjualan tenaga listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh). Umumnya, pelanggan dapat membeli token mereka sendiri ("prabayar") atau ditagih setiap bulan ("pascabayar"). Untuk pelanggan pascabayar, pendapatan dari penjualan listrik diakui setiap bulan berdasarkan hasil baca meter atas pemakaian pelanggan. Untuk pelanggan prabayar, Grup mengakui pendapatan berdasarkan estimasi jumlah penggunaan token pelanggan pada periode tertentu. Penerimaan dimuka dari pelanggan telah dicatat pada utang lain-lain.

Subsidi listrik Pemerintah

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah margin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif yang diberlakukan penyesuaian tarif menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral ("ESDM") No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020.

Subsidi listrik Pemerintah diakui sebagai pendapatan berdasarkan berita acara verifikasi bulanan dimana tertera berapa jumlah subsidi yang akan dibayarkan oleh Pemerintah dan telah diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah Indonesia. Nilai subsidi listrik Pemerintah pada akhir tahun perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK").

Pendapatan kompensasi

Pendapatan kompensasi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas tarif golongan non-subsidi yang sejak tahun 2017 tidak mengalami perubahan kenaikan tarif. Kompensasi dari Pemerintah diakui sebagai pendapatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan ("LHP") Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") dan/atau BPK Republik Indonesia dan jumlahnya telah diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah Indonesia.

Nilai kompensasi merupakan estimasi manajemen yang pada akhir tahun akan direview oleh BPKP dan/atau BPK.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

**s. Revenue and expense recognition
(continued)**

Sale of electricity

Revenue from the sale of electricity is recognised based on customers' electricity usage (kWh). Generally, customers can buy their own token ("prepaid") or are billed monthly ("postpaid"). For postpaid customers, revenue from sale of electricity is recognised monthly based on the meter reading result of each customer. For prepaid customers, the Group recognises the revenue based on the estimated usage of the customer during the period. The prepayment from customers received is recorded under other payables.

The Government's electricity subsidy

Subsidy revenue represents the revenue from the Government of Indonesia for the difference between allowable cost plus 7% margin and the actual sales price for each tariff group except for tariff groups for which tariff adjustments were applied based on Minister of Energy and Mineral Resources ("ESDM") Regulation No. 28 Year 2016 regarding tariff for electricity provided by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara with the latest amendment by Regulation of the Minister of ESDM No. 3 Year 2020.

The Government's electricity subsidy is recognised as revenue based on a monthly verification report where the amount of subsidy to be paid by the Government is stated and has been recognised as an obligation by the Government of Indonesia. The Government's electricity subsidy value at the end of the year is subjected to Supreme Audit Agency ("BPK") audit.

Compensation income

Compensation income is income from the Government of Indonesia for non-subsidy tariff groups which since 2017, have not experienced a tariff adjustment. Compensation from the Government is recognised as income based on the Audit Report ("LHP") of the State Development Audit Agency ("BPKP") and/or BPK of the Republic of Indonesia and the amount has been recognised as an obligation by the Government of Indonesia.

The compensation value is a management estimate which at the end of the year will be reviewed by BPKP and/or BPK.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

**s. Revenue and expense recognition
(continued)**

Biaya penyambungan pelanggan

Customer connection fees

Grup menganggap biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan yang digunakan untuk membangun atau mengakuisisi aset tetap untuk menghubungkan pelanggan secara tidak langsung berkaitan erat dengan pasokan listrik kepada pelanggan. Pasokan listrik dan biaya penyambungan merupakan satu kesatuan karena pelanggan tidak dapat memperoleh manfaat dari kedua layanan ini sendiri. Infrastruktur penyambungan berfungsi untuk memenuhi kewajiban penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan. Pasokan listrik dan biaya penyambungan pada dasarnya sama, dan memiliki pola transfer yang sama ke pelanggan. Oleh karena itu, biaya penyambungan dan pasokan tenaga listrik merupakan satu kewajiban pelaksanaan. Dengan demikian, biaya penyambungan diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi dengan tarif 5% per tahun terhitung sejak tanggal koneksi.

The Group views connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant and equipment to connect the customers as indirectly related to the promise of providing supply of electricity to the customers. Supply of electricity and connection fees are not distinct because the customers cannot benefit from these two services on their own. The connection infrastructure is to fulfil the obligation to supply electricity to the customers. Both the supply of electricity and connection fees are substantially the same and have the same pattern of transfer to the customers. Therefore, connection fees and the supply of electricity are one performance obligation. As such, connection fees are recognised as deferred revenue and amortised at the rate of 5% per annum starting from the connection date.

Penjualan batubara

Sales of coal

Pendapatan penjualan diakui pada setiap penjualan individu ketika mengontrol transfer ke pelanggan. Kontrol beralih ke pelanggan dan pendapatan penjualan diakui ketika batu bara dimuat ke kapal dimana batubara akan dikirim ke pelabuhan tujuan atau tempat pelanggan.

Sales revenue is recognised on each individual sale when control transfers to the customer. Control passes to the customer and sales revenue is recognised when the coal is loaded onto the vessel on which the coal will be shipped to the destination port or the customer's premises.

Grup menjual batubara dengan syarat *Free on Board* ("FOB"), di mana Grup tidak memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan atau asuransi setelah kontrol barang telah berlalu di pelabuhan muat. Untuk jangka waktu ini hanya ada satu kewajiban pelaksanaan, yaitu untuk penyediaan produk pada titik di mana kontrol lewat. Selain itu juga, Grup menjual batubara dengan syarat *Cost, Insurance and Freight* ("CIF"), tetapi berdasarkan perjanjian penjualan, kepemilikan dan risiko kerugian atas batubara akan tetap berada pada Grup sampai batubara melewati pelabuhan bongkar.

The Group generally sells its coal products under Free on Board ("FOB") terms, where the Group has no responsibility for freight or insurance once control of the goods has passed at the loading port. For this term there is only one performance obligation, being for provision of product at the point where control passes. In addition, the Group also sells coal under Cost, Insurance and Freight ("CIF") terms, but under the sales agreement, the title and risk of loss of coal shall remain with the Group until such coal passes at the discharging port.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

**s. Revenue and expense recognition
(continued)**

Penjualan batubara (lanjutan)

Sales of coal (continued)

Oleh karena itu, Grup menganggap bahwa biaya asuransi dan pengangkutan bukan merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah melainkan satu kesatuan dengan kewajiban pelaksanaan dengan penjualan batubara dikarenakan kontrol atas persediaan batubara berpindah ke pembeli pada saat batubara tersebut sudah sampai di lokasi pembeli. Oleh karena itu Grup tidak memiliki kewajiban pelaksanaan terpisah untuk jasa pengangkutan dan asuransi yang disediakan.

As such, the Group considers that the insurance and freight costs are not separate performance obligations but one performance obligation with the sale of coal, because the control over coal supplies passes to the buyer when the coal has arrived at the buyer's location. Accordingly, the Group does not have any separate performance obligations for the transportation and insurance services provided.

Pendapatan usaha lainnya

Other revenues

Pendapatan usaha lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi, sewa trafo dan jasa-jasa administratif lainnya. Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada periode akuntansi saat jasa tersebut telah diberikan. Untuk kontrak harga tetap, pendapatan diakui berdasarkan servis aktual yang diberikan hingga akhir periode pelaporan sebagai proporsi dari total servis yang akan diberikan karena pelanggan telah menerima dan menggunakan manfaat secara simultan.

Other revenues consist of telecommunications network and services, transformer rental and other administrative services. Revenue from providing services is recognised in the accounting period in which the services are rendered. For fixed-price contracts, revenue is recognised based on the actual service provided to the end of the reporting period as a proportion of the total services to be provided because the customers received and consumed the benefit simultaneously.

Komponen pembiayaan

Financing component

Grup tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun dengan nilai waktu uang.

The Group does not expect to have any contracts where the period between the transfer of the promised goods or services to the customer and payment by the customer exceeds one year. As a consequence, the Group does not adjust any of the transaction prices for the time value of money.

Beban

Expenses

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Imbalan kerja

Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi. Karena Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB adalah program manfaat pasti.

Sehubungan dengan program manfaat pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian setara dengan nilai kini kewajiban manfaat pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban manfaat pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan.

Nilai kini kewajiban manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi Pemerintah.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

t. Employee benefits

Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current period and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Manpower Regulations or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Manpower Regulations or the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Manpower Regulations or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension program is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Post-employment benefits consist of severance benefits and employment award.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of Government bonds are used.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program manfaat pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun dimana beban tersebut terjadi. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran kepada dana pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar di muka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

t. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in the consolidated statement of other comprehensive income in the year in which they arise. The accumulated remeasurements balance is reported in retained earnings.

For defined contribution plans, the Group pays contributions to publicly or privately managed pension plans. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or reduction in the future payments is available.

Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for certain benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan penghargaan kesetiaan kerja. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada Perjanjian Kerja Bersama.

Cuti besar diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun terus menerus. Tunjangan kecelakaan dinas diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan dinas. Bantuan kematian diberikan kepada ahli waris bagi karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun tidak. Penghargaan kesetiaan kerja diberikan setiap delapan tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 16 tahun terus menerus.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

u. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

t. Employee benefits (continued)

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit, death benefit and loyalty benefit. The benefits paid are based on the Group's CLA.

Long leave allowance is given to employees who have worked for at least six years continuously. Disability benefit is provided to employees who have a work accident. Death benefit is provided to the heirs whether or not the employee passes away as a result of a work accident. Loyalty benefit is given every eight years for employees who have worked for 16 years continuously.

Long-term benefits are determined using the *Projected Unit Credit Method*. The long-term employee benefits liabilities recognised in the consolidated statement of financial position represent the present value of the defined benefit obligation.

u. Provisions

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Group will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The provisions are measured at the present value of the management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognised as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received, and the amount of the receivable can be measured reliably.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

v. Piutang

Piutang usaha merupakan jumlah yang dapat diterima dari pelanggan atas penjualan tenaga listrik, energi primer dan jasa dalam kegiatan usaha normal. Piutang lain-lain merupakan saldo piutang yang tidak terkait dengan kegiatan usaha normal Grup. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika efek pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan cadangan kerugian.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap *item* baris yang sama.

Piutang pihak berelasi pada awalnya disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada alasan tertentu untuk disajikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Lihat Catatan 3g untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

w. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara dimana Grup beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

v. Receivables

Trade receivables represent amounts due from customers for sales of electricity, primary energy and services in the normal course of business. Other receivables represent receivables that are not related to the normal business activities of the Group. If receivables are expected to be collected within one year or less, they are classified as current assets. Otherwise, the receivables are presented as non-current assets in the consolidated statement of financial position

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any loss allowance.

Impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

Receivables from related parties are initially presented as non-current assets unless there are specific reasons for them to be presented as current assets in the consolidated statements of financial position.

See Note 3g for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

w. Income tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Pajak penghasilan (lanjutan)

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak atas dalam dalam ventura bersama dan asosiasi dimana Grup dapat mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer dan kemungkinan perbedaan tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

x. Aset donasi dari Pemerintah

Aset donasi dari Pemerintah Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Perusahaan, diakui sebagai transaksi ekuitas dengan pemegang saham. Aset yang didonasikan tersebut dicatat sesuai dengan nilai transaksi yang telah disepakati dengan Pemerintah. Perusahaan mencatat aset donasi dari Pemerintah sebagai penambahan aset tetap dan peningkatan tambahan modal disetor oleh pemegang saham.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

w. Income tax (continued)

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognised proportionally with the accounting revenue recognised and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rates that have been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in joint ventures and associates where the Group is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not be reversed in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

x. Government contributed assets

Assets contributed by the Government of Indonesia, in its capacity as a shareholder of the Company, are accounted for as an equity transaction with the shareholder. The assets are recorded at the transaction costs agreed with the Government. The Company records the Government contributed asset as an addition to property, plant and equipment with a corresponding increase to additional paid-in capital by the shareholder.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

y. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar untuk mengasumsikan konversi seluruh potensi saham biasa yang dilutif.

z. Informasi segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka dikategorikan berdasarkan lokasi geografis di mana penjualan tenaga listrik dilakukan.

aa. Properti pertambangan

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah (seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang dicatat sebagai aset tetap.

ab. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interest*). Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dicatat sebagai bagian dari tambahan modal disetor dalam bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

y. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding for the year.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume the conversion of all dilutive potential ordinary shares.

z. Segment information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group and are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their segment operation performance.

Information reported to the chief operating decision maker for the purposes of resource allocation and assessment of their performance is grouped based on the geographical location where electricity sales are made.

aa. Mining properties

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is accumulated separately for each area of interest in which economically recoverable resources have been identified. Such expenditure includes costs directly attributable to the construction of mines and related infrastructure and excludes physical assets and land rights (i.e., right to build, right to cultivate and right to use), which are recorded as fixed assets.

ab. Business combinations of entities under common control

Business combinations of entities under common control are accounted for using the pooling-of-interest method. The difference between the transfer price and the book value of each restructuring transaction between entities under common control is recorded as part of additional paid-in capital in the equity section of the consolidated statement of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

ac. Pinjaman

ac. Borrowings

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Biaya pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak diselesaikan, dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Borrowings are derecognised from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Ketika liabilitas keuangan dinegosiasikan kembali dan entitas mengeluarkan instrumen ekuitas kepada kreditor untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian liabilitas (*debt for equity swap*), keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang dicatat sebagai selisih antara jumlah tercatat dari liabilitas keuangan.

Where the terms of a financial liability are renegotiated and the entity issues equity instruments to a creditor to extinguish all or part of the liability (debt for equity swap), a gain or loss is recognised in profit or loss, which is measured as the difference between the carrying amount of the financial liability and the fair value of the equity instruments issued.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Loans are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer payment of the liability for at least 12 months after the reporting date.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2022 AND 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direvisi secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada tahun dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap tahun tersebut, atau pada tahun revisi dan tahun berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi tahun tersebut.

Pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Penentuan umur sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau tahun setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Umur sewa dinilai kembali ketika opsi sebenarnya diambil (atau tidak diambil) atau grup menjadi berkewajiban untuk mengambil (atau tidak mengambil) opsi tersebut. Penilaian kepastian yang wajar hanya direvisi ketika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan terjadi, yang mempengaruhi penilaian ini, dan hal tersebut dalam pengendalian penyewa.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES**

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the year in which the estimate is revised if the revision affects only that year, or in the year of the revision and future years if the revision affects both current and future years.

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made:

Determining lease term

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or years after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reassessed if an option is actually exercised (or not exercised) or the group becomes obliged to exercise (or not exercise) it. The assessment of reasonable certainty is only revised if a significant event or a significant change in circumstances occurs, which affects this assessment, and that is within the control of the lessee.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pertimbangan penting dalam penerapan
kebijakan akuntansi (lanjutan)**

Pendapatan dari jasa penyambungan pelanggan

Sebagai bagian dari implementasi PSAK No. 72, Grup telah menilai kembali perlakuan yang diterapkan pendapatan dari penyambungan pelanggan. Grup mempertimbangkan semua fakta dan kondisi yang relevan untuk menentukan pengakuan pendapatan terkait biaya penyambungan pelanggan. Untuk itu, Grup perlu menentukan kewajiban pelaksanaan yang timbul sehubungan dengan penerimaan biaya penyambungan dari pelanggan. Grup mempertimbangkan fakta bahwa kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik secara berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2009 dan semua pelanggan dikenakan tarif listrik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk penggunaan tenaga listrik. Penerimaan biaya penyambungan menimbulkan kewajiban bagi Grup untuk menyediakan akses listrik secara berkelanjutan kepada pelanggan. Grup menyimpulkan bahwa menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan merupakan kewajiban yang tidak terpisah dengan penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan.

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
 - bentuk legal dari kendaraan terpisah;
 - persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
 - fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

**Critical judgements in applying accounting
policies (continued)**

Revenues from customer connection fees

As a result of the implementation of SFAS No. 72, the Group has reassessed its treatment of revenue from customer connection fees. The Group has considered all relevant facts and circumstances to determine the exact timing of revenue recognition pertaining to connection fees paid by customers. To do so, the Group needs to determine what performance obligations it has as a result of receiving connection fees. The Group considered the fact that the obligation to provide ongoing supply of electricity is regulated by the 2009 Electricity Law and that the Group charges all customers the same regulated tariff for electricity usage prescribed by the Government of the Republic of Indonesia. The receipt of connection fees creates an obligation for the Group to provide ongoing electricity supply to its customers. The Group has concluded that connecting the customers to its network is an obligation which cannot be separated from the delivery of electricity.

Interest in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle;
- When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:
 - the legal form of the separate vehicle;
 - the terms of the contractual arrangement; and
 - other facts and circumstances (when relevant).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pertimbangan penting dalam penerapan
kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**Kepentingan dalam pengaturan bersama
(lanjutan)**

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, lihat Catatan 9 untuk daftar ventura bersama tersebut. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan ventura bersama.

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir tahun pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

**Provisi atas kerugian kredit ekspektasian
piutang usaha dan aset keuangan lainnya**

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan tipe produk dan tipe dan/atau peringkat pelanggan).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

***Critical judgements in applying accounting
policies (continued)***

Interest in joint arrangements (continued)

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures, see Note 9 for the list of joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangements. The Group has also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting year, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

***Provision for expected credit losses of trade
receivables and other financial assets***

The Group uses a provision matrix to calculate expected credit losses for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g., by product type and customer type and/or customer rating).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/51 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

**Provisi atas kerugian kredit ekspektasian
piutang usaha dan aset keuangan lainnya
(lanjutan)**

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Pengakuan pendapatan

Penjualan tenaga listrik Prabayar

Penjualan tenaga listrik Prabayar mencakup estimasi atas listrik yang dikonsumsi oleh pelanggan antara tanggal pembelian token terakhir dan akhir tahun keuangan Grup. Estimasi dilakukan dengan memproporsikan jumlah hari antara tanggal terakhir pembelian token yang dibeli dengan tanggal laporan keuangan Grup dengan konsumsi historis pelanggan.

Biaya penyambungan pelanggan

Jasa koneksi yang diserahkan kepada pelanggan tidak merepresentasikan nilai yang berdiri sendiri (*stand-alone value*) untuk pelanggan tersebut. Sebagai hasilnya, Grup mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Grup sebagai pendapatan yang diakui sepanjang waktu dan diamortisasi sejak tanggal penyambungan sesuai masa estimasi konsumsi pelanggan. Konsumsi pelanggan diestimasi berdasarkan rata-rata masa manfaat aset distribusi. Dengan mempertimbangkan banyaknya variasi aset distribusi dan masa manfaat atas aset-aset tersebut, Grup telah menerapkan rata-rata masa manfaat 20 tahun yang di percaya telah merepresentasikan keseluruhan masa manfaat. Perubahan estimasi atas masa manfaat aset distribusi akan mengakibatkan perubahan pada pengakuan pendapatan dari biaya penyambungan.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

**Provision for expected credit losses of trade
receivables and other financial assets (continued)**

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and expected credit losses is a significant estimate. The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of a customer's actual default in the future.

Revenue recognition

Prepaid sales of electricity

Prepaid sales of electricity includes an estimate of electricity consumed by customers between the date of the last token purchased and the financial year end of the Group. An estimate is made by prorating the total days between the date of the last token purchased and the date of the Group's financial statement using the historical consumption of the customers.

Customer connection fees

A connection service which is provided to the customer does not represent a stand-alone value for that customer. Consequently, the Group recognises connection fees received from customers to connect the customers to its network as revenue over time and amortises it starting from the connection date based on the estimated consumption pattern of the customer. The customers' consumption is estimated based on the average useful life of the distribution assets. Given the wide variety of distribution assets and remaining useful lives, the Group has applied an average life of 20 years, which the Group believes to be representative of the useful lives of the assets. A change in the estimated useful lives of distribution assets would result in a change in the revenue recognised from connection fees.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/52 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap yang dimiliki Grup ditentukan berdasarkan periode aset tersebut diharapkan masih dapat digunakan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta tahun pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Nilai wajar aset tetap dan properti investasi yang menggunakan model revaluasi

Dalam proses revaluasi aset, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi diungkapkan masing-masing dalam Catatan 6 dan 8.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

Estimated useful lives of property, plant and equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant, and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

Fair value of property, plant and equipment and investment properties that use the revaluation model

In the process of asset revaluation, management, with the assistance of an independent public valuer, determines the data inputs and assumptions, assesses valuation methods, and holds discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the asset class. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use the revaluation model.

Details of the valuation approach and significant data inputs used in the revaluation of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 8, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Imbalan pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Grup.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 49.

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasi. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

Post-employment benefits

The determination of the post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, the discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from assumptions are accumulated and amortised over future periods and therefore, generally affect the recognised expense and liabilities recorded in such future periods. While it is believed that the assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the post-employment benefits liability of the Group.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefits are disclosed in Note 49.

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Group requires judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/54 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

**Sewa - estimasi suku bunga pinjaman
inkremental**

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan estimasi untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

**Leases - estimation of the incremental borrowing
rate**

Since the Group cannot readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need estimation in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining the incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

5. ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

5. SUBSIDIARIES

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi/ Year of commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi **/ Total assets before elimination **	
			2022	2021		2022	2021
PT Indonesia Power ("IP")/PT PLN Indonesia Power ("PLN IP") **** dan entitas anak/and subsidiaries	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	99.99	99.99	1995	211,876	207,252
PT Cogindo Daya Bersama ("CDB") *	Jakarta	Kogenerasi, pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen/ Cogeneration, energy distribution, energy service and management	99.99	99.99	1999	1,198	1,204
PT Artha Daya Coalindo ("ADC") *	Jakarta	Perdagangan batu bara/ Coal trading	80.00	80.00	1998	668	896
PT Indo Ridlatama Power ("IRP") *	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	90.00	90.00	2018	1,549	1,503
PT Putra Indotena ("PIT") dan entitas anak/and its subsidiaries *)	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ Electricity and energy	99.99	99.99	2016	7,257	4,536
PT Indo Tenaga Hijau ("ITH") * (d/h PT Tangkuban Parahu Geothermal Power)	Jakarta	Pengembangan energi baru dan terbarukan/Development of new and renewable energy	95.81	95.45	***	92	86
PT Suralaya Indo Tenaga ("SIT") **** dan entitas anak/and its subsidiary	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ Electricity and energy	99.99	99.99	***	5,694	3,293
PT Putra Suralaya Indo Tenaga ("PSI") ****	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ Electricity and energy	99.99	99.99	***	5,694	3,293
PT PLN Nusantara Power ("PLN NP")***** (dahulu PT Pembangkitan Jawa Bali ("PJB")) dan entitas anak/and subsidiaries	Surabaya	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	99.99	99.99	1995	174,960	172,164
PT PJB Services ("PJBS") * dan entitas anak/and subsidiaries	Surabaya	Jasa/Service	99.00	98.00	2001	1,689	1,414
PT Mitra Karya Prima ("MKP") *	Surabaya	Jasa/Service	92.00	92.00	2005	174	146
PT Rekadaya Elektri ("RE") * dan entitas anak/and subsidiary	Jakarta	Jasa listrik dan engineering/ Electricity and engineering	98.90	98.90	2004	1,943	1,437
PT Prima Power Nusantara ("PPN") *****	Jakarta	Jasa engineering, pengadaan dan konstruksi/ Engineering, procurement and construction	100.00	99.99	2017	200	241

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/55 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. ENTITAS ANAK (lanjutan)

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut: (lanjutan)

5. SUBSIDIARIES (continued)

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries: (continued)

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Year of commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi **/ Total assets before elimination **	
			2022	2021		2022	2021
PT Navigat Innovative Indonesia ("NII") *	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian/ Trading, construction, mining and agriculture	72.97	72.97	2002	485	395
PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi ("PJB") *	Jakarta	Investasi/ Investment	99.99	99.99	2015	8,010	6,428
PT Pembangkitan Jawa-Bali Investindo ("PJB Investindo") *	Jakarta	Investasi/ Investment	99.99	99.99	2020	194	118
PT Pembangkitan Jawa Baskara Investasi Cirata ("PJBIC")	Jakarta	Investasi/ Investment	99.99	99.99	2020	194	123
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ("PLN SC") *	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa engineering supply chain dan konsultasi dibidang ketenagalistrikan/ Operation and services trading, engineering supply chain and consultation in the electricity sector	100.00	100.00	2018	471	299
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") dan entitas anak/ and subsidiary	Batam	Penyedia tenaga listrik/ Electricity supplier	99.99	99.99	2000	19,978	20,269
PT Pelayanan Energi Batam ("PEB")	Batam	Pembangunan pipa gas dan energi lainnya/ Construction of gas pipeline and other energy sector	99.99	99.99	2016	987	904
PT PLN ICON Plus ("PLN ICON+****") (dahulu PT Indonesia Comnets Plus ("ICON"))	Jakarta	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi/Telecommunication provider	99.99	99.99	2000	6,955	5,327
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PLNE") dan entitas anak/ and subsidiary	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi ("EPC")/ Engineering, procurement and construction ("EPC")	99.90	99.90	2003	1,167	1,167
PT Rekadaya Elekrika Consult ("REC") ****)	Jakarta	Supervisi dan konsultasi/ Supervision and consultation,	99.80	99.80	2010	121	123
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ("PLN Tarakan") dan entitas anak/ and subsidiary	Tarakan	Jasa pemeliharaan dan operasi/ Maintenance and operation	99.97	99.97	2004	817	685
PT Paguntaka Cahaya Nusantara ("PCN") *	Balikpapan	Jasa pemeliharaan dan operasi/ Maintenance and operation	99.96	99.96	2018	112	93
Majapahit Holding B.V. ("MH") dan entitas anak/ and subsidiary	Belanda/ The Netherlands	Lembaga keuangan/ Financial institution	100.00	100.00	2006	5,752	5,225
Majapahit Finance B.V. ("MF") *	Belanda/ The Netherlands	Lembaga keuangan/ Financial institution	100.00	100.00	2006	12,795	12,795
PT PLN Energi Primer Indonesia ("PLN EPI") ****) (dahulu PT PLN Batubara) dan entitas anak/ and subsidiaries	Jakarta	Perdagangan batu bara/ Coal trading	99.99	99.99	2009	5,604	6,113
PT Jambi Prima Coal ("JPC")	Jambi	Pertambangan batu bara/ Coal mining	60.00	60.00	2010	286	267
PT PLN Batubara Investasi ("BBI") dan entitas anak/ and subsidiaries	Jakarta	Investasi/ Investment	99.96	99.96	2018	2,024	1,880
PT Bangun Persada Jambi Energi ("BPJE")	Jambi	Pertambangan batu bara/ Coal mining	80.00	80.00	***)	51	36
PT Mahakarya Abadi Prima ("MAP")	Jambi	Pertambangan batu bara/ Coal mining	80.00	80.00	***)	5	3
PT Bayan Koalindo Lestari *) ("BKL")	Palembang	Pertambangan batu bara/ Coal mining	51.00	51.00	2018	574	464
PT Prima Bara Indonesia *) ("PBI")	Kalimantan Tengah/ Central Kalimantan	Pertambangan batu bara/ Coal mining	51.00	51.00	***)	139	139
PT PLN Batubara Niaga ("BBN")	Jakarta	Perdagangan batu bara/ Coal trading	100.00	100.00	***)	183	283

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/56 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. ENTITAS ANAK (lanjutan)

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut: (lanjutan)

5. SUBSIDIARIES (continued)

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries: (continued)

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Year of commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi **/ Total assets before elimination **)	
			2022	2021		2022	2021
PT Pengembang Listrik Nasional Gas Dan Geothermal ("PLN Gas & Geothermal") (d/h PT Pengembang Listrik Negara Geothermal)	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	99.99	99.99	2010	2,765	890
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAG")	Jakarta	Pelayaran/ Shipping	99.99	99.99	2011	4,508	3,703
PT Haleyora Power ("HP") dan entitas anak/and subsidiary	Jakarta	Jasa pemeliharaan dan operasi/ Maintenance and operation	99.99	99.99	2013	1,356	1,375
PT Haleyora Powerindo ("HPI") *)	Jakarta	Jasa/Service	95.00	95.00	2013	553	527
PT Energy Management Indonesia ("EMI") dan entitas anak/and subsidiary	Jakarta	Jasa konservasi energi dan lingkungan serta energi baru terbarukan/Energy and environmental conservation service and new renewable energy	99.99	99.99	1987	41	64
PT Energi Biomasa Indonesia ("EBI")	Jakarta	Jasa konservasi energi dan lingkungan serta energi baru terbarukan/Energy and environmental conservation service and new renewable energy	99.00	99.00	2015	3	3
PT Energi Bangun Indonesia ("EBI2") ***)	Jakarta	Jasa perdagangan ekspor dan impor, perindustrian, pembangunan/ Export and import trading, industry construction	80.00	80.00	***)	-	-
PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara ("MCTN")	Jakarta	Jasa pengelolaan energi/Energy services	95.00	95.00	2000	1,322	450

*) Pemilikan tidak langsung/Indirect ownership

***) Dalam miliaran Rupiah/Stated in billions of Rupiah

****) Dalam tahap pengembangan/Under development stage

*****) Sub holding PT PLN (Persero) yang telah disahkan pada Legal End-state Holding Subholding PT PLN (Persero) pada tanggal 30 Desember 2022/

Sub holding of PT PLN (Persero) which has been approved in the Legal End-state Holding Subholding of PT PLN (Persero) on December 30, 2022

*****) Terdapat Shares Swap dari sebelumnya (Streamlining Subsidiary)/There was an earlier shares swap (Streamlining Subsidiary)

Efektif pada tanggal 20 Desember 2021, sesuai dengan Akta Notaris No. 7 dari Erna Anggraini Hutabarat, S.H., M.Si., Notaris di Surabaya, PJBS mengadakan perjanjian jual beli saham untuk menjual saham SKP ke Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali, dimana PJBS menjual seluruh kepemilikan saham SKP atau setara dengan 95% kepemilikan atas SKP dengan nilai pengalihan sebesar Rp9.785. Nilai buku bersih SKP untuk porsi kepemilikan PJBS adalah sebesar Rp6.158. Keuntungan dari penjualan saham sebesar Rp3.627 disajikan sebagai bagian dari (beban)/penghasilan lain-lain - bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian Grup.

Akuisisi EMI

Berdasarkan SK Menteri BUMN No. S-603/MBU/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021, pemegang saham menyetujui penambahan penyertaan modal saham Pemerintah sebesar 118.704 saham dengan nilai Rp118.704 yang berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Pemerintah di EMI.

Effective on December 20, 2021, in accordance with Notarial Deed No. 7 of Erna Anggraini Hutabarat, S.H., M.Si., Notary in Surabaya, PJBS entered into a share sale and purchase agreement to sell shares of SKP to Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali, under which PJBS sold all shares or equivalent to 95% ownership of SKP with a total transaction value of Rp9,785. The net book value of PJBS's ownership portion in SKP was Rp6,158. The gain on sale of investment amounting to Rp3,627 is presented as part of other (expenses)/income - net in the Group's consolidated statements of profit or loss.

Acquisition of EMI

Based on Decision Letter of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. S-603/MBU/08/2021 dated August 20, 2021, the shareholders approved the addition of the Government's share capital of 118,704 shares with a value of Rp118,704 from the transfer of all series B shares owned by the Government in EMI.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/57 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. ENTITAS ANAK (lanjutan)

Akuisisi EMI (lanjutan)

Efektif pada tanggal 7 September 2021, sesuai dengan Akta No. 34 dari Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan saham EMI, entitas sepengendali, dari Pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan modal saham (Catatan 21) dimana Perusahaan mengakuisisi 15.554 lembar saham biasa atau setara dengan 99,99% kepemilikan atas EMI dengan jumlah imbalan yang dialihkan sebesar Rp118.704.

Jumlah tercatat aset bersih EMI untuk porsi kepemilikan Perusahaan adalah sebesar Rp11.951, sehingga selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah aset tercatat bersih yang diterima sebesar Rp106.753 dicatat dalam akun ekuitas sebagai tambahan modal disetor (Catatan 22).

Akuisisi MCTN

Pada tanggal 6 Agustus 2021, Perusahaan melakukan akuisisi 95% saham MCTN dengan biaya perolehan sebesar Rp647.195. Perincian nilai wajar pada aset bersih MCTN yang diakuisisi adalah sebagai berikut:

	Rp
Aset lancar	222,670
Aset tidak lancar	770,567
Liabilitas jangka pendek	(122,628)
Liabilitas jangka panjang	(7,033)
Aset bersih	863,576

Tabel berikut merangkum harga perolehan yang dibayar atas akuisisi MCTN, jumlah aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi:

	Rp
Imbalan yang dialihkan	
Pembayaran kas	647,195
Jumlah yang diakuisisi dari nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih	
Kas dan setara kas	81,511
Piutang usaha	68,029
Piutang lain-lain	1,629
Pajak dibayar di muka	57,626
Biaya dibayar di muka	3,527
Persediaan	24,348
Aset tetap, bersih	756,567
Utang usaha	(281)
Utang lain-lain	(12,221)
Biaya yang masih harus dibayar	(73,698)
Utang pajak	(36,428)
Kewajiban pajak tangguhan, bersih	(3,441)
Liabilitas imbalan kerja	(3,592)

5. SUBSIDIARIES (continued)

Acquisition of EMI (continued)

Effective on September 7, 2021, in accordance with Notarial Deed No. 34 of Dewi Kusumawati, S.H., Notary in Jakarta, the Company entered into an agreement to transfer shares of EMI, an entity under common control, from the Government of the Republic of Indonesia by issuing capital stock (Note 21) whereby the Company acquired 15,554 ordinary shares or equivalent to 99.99% ownership of EMI with a consideration amount of Rp118,704.

EMI's net asset amount for the Company's ownership portion is Rp11,951, therefore, the difference of Rp106,753 between the consideration amount and the net asset amount received is recorded in the equity account as additional paid-in capital (Note 22).

Acquisition of MCTN

On August 6, 2021, the Company acquired 95% of the shares of MCTN at an acquisition cost of Rp647,195. The detail of MCTN's fair value of the identifiable net assets acquired are as follows:

	Rp
Aset lancar	222,670
Aset tidak lancar	770,567
Liabilitas jangka pendek	(122,628)
Liabilitas jangka panjang	(7,033)
Aset bersih	863,576

The following table summarises the consideration paid for the acquisition of MCTN, the amounts of the assets acquired and liabilities assumed as at the acquisition date:

	Rp
Imbalan yang dialihkan	
Pembayaran kas	647,195
Jumlah yang diakuisisi dari nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih	
Kas dan setara kas	81,511
Piutang usaha	68,029
Piutang lain-lain	1,629
Pajak dibayar di muka	57,626
Biaya dibayar di muka	3,527
Persediaan	24,348
Aset tetap, bersih	756,567
Utang usaha	(281)
Utang lain-lain	(12,221)
Biaya yang masih harus dibayar	(73,698)
Utang pajak	(36,428)
Kewajiban pajak tangguhan, bersih	(3,441)
Liabilitas imbalan kerja	(3,592)

Current assets
Non-current assets
Current liabilities
Non-current liabilities

Net assets

Consideration transferred
Cash payment

Recognised fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed

Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables
Prepaid taxes
Prepaid and advances
Inventories
Property, plant and equipment, net
Trade payables
Other payables
Accrued expenses
Taxes payable
Deferred tax liabilities, net
Employee benefit liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. ENTITAS ANAK (lanjutan)

5. SUBSIDIARIES (continued)

	<u>Rp</u>	
Nilai wajar aset neto teridentifikasi yang diperoleh	863,576	<i>Fair value of identifiable net assets acquired</i>
Imbalan yang dialihkan	<u>(647,195)</u>	<i>Consideration transferred</i>
Keuntungan dari pembelian dengan diskon atas akuisisi MCTN (Catatan 46)	<u>216,381</u>	<i>Gain on bargain purchase of MCTN (Note 46)</i>
Harga perolehan:		<i>Purchase consideration:</i>
Pembayaran kas	647,195	<i>Cash payment</i>
Kas dan setara kas MCTN	<u>(81,511)</u>	<i>Cash and cash equivalents in MCTN</i>
Arus kas keluar neto untuk akuisisi MCTN	<u>565,684</u>	<i>Net cash outflow for acquisition of MCTN</i>

Nilai wajar aset neto tersebut berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP RHR berdasarkan laporannya No. 00221/2.0012-00/BS/02/0006/1/VII/2021, tertanggal 2 Juli 2021, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

The fair value of identifiable net assets was performed by KJPP RHR based on its report No. 00221/2.0012-00/BS/02/0006/1/VII/2021, dated July 2, 2021, independent valuers registered with the Ministry of Finance and the FSA.

Estimasi nilai wajar ditentukan didasarkan pada tingkat diskonto sebesar 10.48% dan diklasifikasikan sebagai pengukuran nilai wajar Tingkat 3 dalam hierarki nilai wajar.

The fair value estimate is based on a discount rate of 10.48% and is classified as a Level 3 fair value measurement in the fair value hierarchy.

Total pendapatan usaha dan laba dari MCTN sejak tanggal akuisisi yang diakui dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp185.080 dan Rp117.529.

The total revenue and net income of MCTN from the acquisition date until the reporting date which was recognised in profit or loss for the year ended December 31, 2021 amounted to Rp185,080 and Rp117,529, respectively.

Total pendapatan usaha dan laba dari MCTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 seolah-olah MCTN telah diakuisisi sejak tanggal 1 Januari 2021 masing-masing adalah sebesar Rp716.060 dan Rp274.311.

The total revenue and net income of MCTN for the year ended December 31, 2021 as if MCTN had already been acquired from January 1, 2021, would have amounted to Rp716,060 and Rp274,311, respectively.

Grup menelaah kembali pengakuan dan pengukuran aset neto teridentifikasi yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih, dan menyimpulkan bahwa seluruh aset neto yang diakuisisi telah diakui dan bahwa prosedur penilaian dan pengukuran hasilnya sudah wajar.

The Group reassessed the recognition and measurement of identifiable net assets acquired and liabilities assumed, and concluded that all acquired net assets were recognised and that the valuation procedures and resulting measures were appropriate.

Akuisisi MCTN telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Peraturan OJK.

The acquisition of MCTN has been conducted in accordance with FSA Regulation.

Berdasarkan Akta Notaris No. 38 tanggal 27 April 2022 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, PLN NP mengadakan perjanjian jual beli saham untuk membeli saham PJBS dari YK PJB, dimana Perusahaan membeli sebagian kepemilikan saham PJBS atau setara dengan 1% kepemilikan atas PJBS dengan nilai pengalihan sebesar Rp11.184.

Based on Notarial Deed No. 38 dated 27 April 2022 of Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta, PLN NP entered into a share sale and purchase agreement to purchase shares of PJBS of YK PJB, under which the Company purchased a part of shares or equivalent to 1% ownership of PJBS with a total transaction value of Rp11,184.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/59 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	2022				Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Biaya perolehan						At cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah dan hak atas tanah	163,835,912	44,862	-	1,841,759	165,722,533	Land and land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	76,580,417	305,415	-	3,356,030	80,241,862	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	557,335,600	523,387	-	19,044,918	576,903,905	Installations and power plants
Perlengkapan transmisi	205,592,452	22,459	-	36,756,016	242,370,927	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	235,041,034	201,001	-	13,518,875	248,760,910	Distribution equipment
Perlengkapan umum	19,538,455	284,577	-	432,134	20,255,166	General equipment
Kendaraan bermotor	2,740,665	23,332	-	98,733	2,862,730	Motor vehicles
Material cadangan utama	3,095,028	110,524	-	(10,695)	3,194,857	Major spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	6,198,821	21,439	-	1,054,040	7,274,300	Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	4,206,352	4,420	-	1,585,140	5,795,912	Other telecommunications and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	1,691,216	240,374	-	(18,810)	1,912,780	Vessels and equipment
Subjumlah	<u>1,275,855,952</u>	<u>1,781,790</u>	<u>-</u>	<u>77,658,140</u>	<u>1,355,295,882</u>	Subtotal
Aset dalam pembangunan	167,052,758	46,527,258	-	(77,823,601)	135,756,415	Construction in progress
Aset tidak digunakan dalam operasi	<u>20,658,820</u>	<u>-</u>	<u>(2,652,091)</u>	<u>1,277,158</u>	<u>19,283,887</u>	Assets not used in operations
Jumlah	<u>1,463,567,530</u>	<u>48,309,048</u>	<u>(2,652,091)</u>	<u>1,111,697</u>	<u>1,510,336,184</u>	Total
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai						Accumulated depreciation and impairment
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	2,543,184	-	160,378	2,703,562	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	-	19,044,450	-	924,340	19,968,790	Installations and power plants
Perlengkapan transmisi	-	6,261,538	-	36,548	6,298,086	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	-	9,466,781	-	3,831	9,470,612	Distribution equipment
Perlengkapan umum	16,106,443	1,650,412	-	(723,854)	17,033,001	General equipment
Kendaraan bermotor	2,046,087	290,207	-	(23,268)	2,313,026	Motor vehicles
Material cadangan utama	-	100,271	-	(3,128)	97,143	Major spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	-	1,114,302	-	13,351	1,127,653	Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	2,490,772	493,376	-	(5,164)	2,978,984	Other telecommunications and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	806,536	135,087	-	7,369	948,992	Vessels and equipment
Subjumlah	<u>21,449,836</u>	<u>41,099,608</u>	<u>-</u>	<u>390,403</u>	<u>62,939,849</u>	Subtotal
Aset tidak digunakan dalam operasi	<u>12,342,577</u>	<u>689,003</u>	<u>(2,630,925)</u>	<u>193,950</u>	<u>10,594,605</u>	Assets not used in operations
Jumlah	<u>33,792,415</u>	<u>41,788,611</u>	<u>(2,630,925)</u>	<u>584,353</u>	<u>73,534,454</u>	Total
Penyisihan penurunan nilai	<u>2,716,757</u>	<u>1,035,990</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,752,747</u>	Provision for impairment
Jumlah tercatat	<u>1,427,058,358</u>				<u>1,433,048,983</u>	Net carrying value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/60 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

	2021							
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Akuisisi/ <i>Acquisitions*)</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Surplus revaluasi/ <i>Revaluation surplus</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya perolehan								At cost
Pemilikan langsung								Direct acquisitions
Tanah dan hak atas tanah	155,990,777	3,754	54,259	-	803,447	6,983,675	163,835,912	Land and land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	79,287,430	4,419	170,390	-	2,538,710	(5,420,532)	76,580,417	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	605,697,073	648,697	659,128	-	8,479,042	(58,148,340)	557,335,600	Installations and power plants
Perlengkapan transmisi	195,233,525	-	86,471	-	17,828,307	(7,555,851)	205,592,452	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	236,963,683	-	93,123	-	11,900,664	(13,916,436)	235,041,034	Distribution equipment
Perlengkapan umum	18,869,706	2,022	230,661	-	436,066	-	19,538,455	General equipment
Kendaraan bermotor	2,581,618	-	45,457	-	113,590	-	2,740,665	Motor vehicles
Material cadangan utama	4,307,260	-	29,766	-	(1,206,616)	(35,382)	3,095,028	Major spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	7,732,432	-	20,142	-	678,136	(2,231,889)	6,198,821	Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	3,535,114	-	1,751	-	669,487	-	4,206,352	Other telecommunications and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	1,607,664	-	83,649	-	(97)	-	1,691,216	Vessels and equipment
Subjumlah	<u>1,311,806,282</u>	<u>658,892</u>	<u>1,474,797</u>	<u>-</u>	<u>42,240,736</u>	<u>(80,324,755)</u>	<u>1,275,855,952</u>	Subtotal
Aset dalam pembangunan	165,830,608	101,502	46,917,138	-	(45,796,490)	-	167,052,758	Construction in progress
Aset tidak digunakan dalam operasi	<u>19,480,452</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(728,490)</u>	<u>2,243,238</u>	<u>(336,380)</u>	<u>20,658,820</u>	Assets not used in operations
Jumlah	<u>1,497,117,342</u>	<u>760,394</u>	<u>48,391,935</u>	<u>(728,490)</u>	<u>(1,312,516)</u>	<u>(80,661,135)</u>	<u>1,463,567,530</u>	Total
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai								Accumulated depreciation and impairment
Pemilikan langsung								Direct acquisitions
Bangunan umum, waduk dan prasarana	5,085,712	-	2,347,004	-	10,351	(7,443,067)	-	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	36,014,570	-	18,644,822	-	(593,795)	(54,065,597)	-	Installations and power plants
Perlengkapan transmisi	8,982,409	-	5,481,988	-	79,855	(14,544,252)	-	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	14,716,399	-	8,336,371	-	(153,652)	(22,899,118)	-	Distribution equipment
Perlengkapan umum	13,580,555	-	1,777,090	-	748,798	-	16,106,443	General equipment
Kendaraan bermotor	1,715,025	-	317,667	-	13,395	-	2,046,087	Motor vehicles
Material cadangan utama	243,349	-	96,006	-	(69,204)	(270,151)	-	Major spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	1,729,199	-	960,551	-	(33,762)	(2,655,988)	-	Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	2,147,699	-	346,659	-	(3,586)	-	2,490,772	Other telecommunications and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	673,368	-	133,168	-	-	-	806,536	Vessels and equipment
Subjumlah	<u>84,888,285</u>	<u>-</u>	<u>38,441,326</u>	<u>-</u>	<u>(1,600)</u>	<u>(101,878,173)</u>	<u>21,449,838</u>	Subtotal
Aset tidak digunakan dalam operasi	<u>10,132,148</u>	<u>-</u>	<u>671,660</u>	<u>(717,213)</u>	<u>2,599,232</u>	<u>(343,250)</u>	<u>12,342,577</u>	Assets not used in operations
Jumlah	<u>95,020,433</u>	<u>-</u>	<u>39,112,986</u>	<u>(717,213)</u>	<u>2,597,632</u>	<u>(102,221,423)</u>	<u>33,792,415</u>	Total
Penyisihan penurunan nilai	<u>208,422</u>	<u>-</u>	<u>2,508,335</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,716,757</u>	Provision for impairment
Jumlah tercatat	<u>1,401,888,487</u>						<u>1,427,058,358</u>	Net carrying value

*) Penambahan aset tetap dari akuisisi EMI dan MCTN (Catatan 5)

*) Additions of property, plant and equipment from acquisitions of EMI and MCTN (Note 5)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/61 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

	2022	2021	
Beban usaha	40,992,657	38,327,468	<i>Operating expenses</i>
Aset dalam pembangunan	106,951	113,858	<i>Construction in progress</i>
Beban lain-lain	689,003	671,660	<i>Other expenses</i>
Jumlah	41,788,611	39,112,986	Total

Grup memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu sedangkan HGB Perusahaan jatuh tempo antara tahun 2023 sampai dengan 2051, tetapi dapat diperpanjang oleh Grup. Grup juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Grup.

The Group owns several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date while HGB will expire from 2023 to 2051, but they are renewable by the Group. The Group also has several pieces of land and land rights, which are still in an extension process and in the process of transfer of certificates to the name of the Group.

Pada tanggal 31 Desember 2022, bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya serta kapal diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia, pihak berelasi, sebagai penanggung utama dengan jumlah pertanggungan sebesar USD24.292.883.042 (nilai penuh) atau setara dengan Rp378.774.632 (2021: USD24.258.526.246 (nilai penuh) atau setara dengan Rp346.144.911) dan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai penanggung risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp4.264.973 (2021: Rp2.896.627). Grup tidak mengasuransikan aset tetap selain bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya serta kapal. Manajemen berpendapat bahwa risiko kerugian yang berkaitan dengan aset yang tidak diasuransikan tersebut dapat dikelola oleh Grup sehubungan dengan pertimbangan biaya yang akan dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

As at December 31, 2022, the buildings, installations and power plants, transmission equipment, other telecommunications and data processing equipment and vessels were insured with several insurance companies, with PT Asuransi Jasa Indonesia, a related party, acting as the lead insurer with total insurance coverage of USD24,292,883,042 (full amount) or equivalent to Rp378,774,632 (2021: USD24,258,526,246 (full amount) or equivalent to Rp346,144,911) and PT Asuransi Tugu Kresna Pratama acting as the insurer against fire and other possible risks with total insurance coverage of Rp4,264,973 (2021: Rp2,896,627). The Group does not insure property, plant and equipment other than buildings, installations and power plants, transmission equipment, other telecommunications and data processing equipment and vessels. Management believes that the risks of losses related to the uninsured assets can be managed by the Group in consideration of the costs that would be spent and the benefits that would be obtained. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Jumlah tercatat dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp14.081.063 dan Rp13.147.650.

The carrying amount of property, plant and equipment that has been fully depreciated but is still in use as at December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp14,081,063 and Rp13,147,650 respectively.

Pada tahun 2021, manajemen mempekerjakan penilai eksternal independen dan berkualifikasi untuk menentukan nilai wajar aset tetap yaitu KJPP RHR, berdasarkan laporannya No. 00142/2.0012-00/PI/02/0006/1/IV/2022, tertanggal 26 April 2022. KJPP RHR merupakan penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

In 2021, management engaged external independent and qualified valuers, KJPP RHR to determine the fair value of fixed assets, based on its report No. 00142/2.0012-00/PI/02/0006/1/IV/2022, dated April 26, 2022. KJPP RHR is an independent valuer registered with the Ministry of Finance and FSA.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/62 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Manajemen tidak mengidentifikasi adanya perubahan signifikan yang mengharuskan dilakukannya revaluasi untuk tahun 2022.

Tabel di bawah ini menganalisis aset tetap yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan hierarki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 68 dan berdasarkan valuasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tingkat pengukuran nilai wajar 31 Desember 2021 menggunakan/ Fair value measurement at December 31, 2021 using					
Level 1/ Level 1	Level 2/ Level 2	Level 3/ Level 3	Jumlah/ Total		
Pengukuran nilai wajar berulang				Recurring fair value measurement	
Tanah dan hak atas tanah	-	36,735,664	126,806,369	163,542,033	Land and land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	6,988,067	69,138,909	76,126,976	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	-	-	556,182,532	556,182,532	Installations and power plants
Perlengkapan transmisi	-	-	204,873,601	204,873,601	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	-	-	235,012,113	235,012,113	Distribution equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi data yang digunakan dalam penyediaan listrik	-	-	6,134,499	6,134,499	Telecommunications and processing equipment used for electricity supply
Material cadang utama	-	-	3,090,753	3,090,753	Major spare parts
Jumlah	-	43,723,731	1,201,238,776	1,244,962,507	Total

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam nilai wajar Tingkat 1.

Tidak terdapat transfer antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 selama tahun berjalan.

Nilai wajar Tingkat 2 dari tanah dan hak atas tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, sedangkan untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:

- a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
- b. Tingkat hunian;
- c. Tingkat pertumbuhan;
- d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi;
- e. Biaya pembuatan baru per meter persegi;
- f. Tingkat depresiasi;
- g. Biaya operasional;
- h. Keuntungan pengembangan; dan
- i. Indeks kemahalan konstruksi.

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Management did not identify any significant changes in circumstances which would require a revaluation exercise to be performed for 2022.

The table below analyses fixed assets recorded at fair value, based on the fair value hierarchy in SFAS No. 68 and based on valuation as at December 31, 2021 as follows:

- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and
- Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).

There were no fixed assets which could be classified at Level 1 fair value.

There were no transfers between Level 1 and Level 2 during the year.

The Level 2 fair value of land and land rights is calculated using the market approach and income approach, while the value of building is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of the following:

- a. Sale or rental price per square metre;
- b. Occupancy rate;
- c. Growth rate;
- d. Discount and capitalisation rate;
- e. Replacement cost new per square metre;
- f. Depreciation rate;
- g. Operational expense;
- h. Developers margin; and
- i. Construction cost index.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/63 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Rekonsiliasi atas saldo awal terhadap saldo akhir dari pengukuran nilai wajar dengan menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Reconciliation of the beginning balances to the closing balances of the fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follows:

	1 Januari/ January 2021	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Jumlah yang diakui pada laba rugi/ Amount recognised in profit or loss		Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain/Amount recognised in other comprehensive income	31 Desember/ December 2021	
				Depresiasi/ Depreciation	Penurunan nilai/ Impairment			
Tanah	120,748,069	90	344,881	-	(233,550)	5,946,879	126,806,369	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	68,575,318	11,935	1,396,506	(2,075,199)	(326,876)	1,557,225	69,138,909	Building, reservoirs and infrastructures
Instalasi dan mesin pembangkit	569,627,746	1,307,825	9,073,213	(18,644,822)	(1,098,687)	(4,082,743)	556,182,532	Installations and power plants
Perengkapan transmisi	186,216,183	86,471	17,752,609	(5,481,988)	(688,075)	6,988,401	204,873,601	Transmissions equipment
Perengkapan distribusi	222,243,033	93,123	12,051,446	(8,336,371)	(21,800)	8,982,682	235,012,113	Distributions equipment
Perengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	5,997,253	20,142	711,983	(960,551)	(58,427)	424,099	6,134,499	Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply
Material cadangan utama	4,063,814	29,766	(1,137,411)	(96,006)	(4,179)	234,769	3,090,753	Major spare parts
Jumlah	1,177,471,416	1,549,352	40,193,227	(35,594,937)	(2,431,594)	20,051,312	1,201,238,776	Total

Nilai wajar Tingkat 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya dengan menggunakan input yang tidak dapat diobservasi.

The Level 3 fair value is calculated through the market approach, income approach, and cost approach by using unobservable inputs.

Perubahan surplus revaluasi, dikurangi dengan penghasilan final dan penghasilan pajak tangguhan yang terkait, yang dibebankan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai surplus revaluasi aset tetap dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

The changes in revaluation surplus, net of final income tax and applicable deferred income taxes, were charged to other comprehensive income and are presented in property, plant, and equipment revaluations surplus in the consolidated statements of changes in equity.

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya selain aset yang menggunakan model revaluasi.

There is no significant difference between the fair value and carrying value of fixed assets other than assets that have applied the revaluation model.

Mutasi surplus revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut:

The movements of property, plant and equipment revaluation surplus are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	688,912,786	672,476,750	Beginning balance
Kenaikan surplus revaluasi	925,253	21,560,288	Increase on revaluation surplus
Penghapusan aset tetap	<u>(512,731)</u>	<u>(2,000,388)</u>	Disposals of property, plant and equipment
	412,522	19,559,900	
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba atas aset tetap yang telah dijual	(695,848)	(305,038)	Reclassification of revaluation surplus to retained earnings from disposals of property, plant and equipment
Beban pajak terkait	<u>(90,755)</u>	<u>(2,818,826)</u>	Related income tax expense
Saldo akhir	<u>688,538,705</u>	<u>688,912,786</u>	Ending balance

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2022 AND 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Selain menggunakan input yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, dan lainnya.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah, dan elemen perbandingan lainnya.

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialised property, such as power plants and others.

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

	Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2021/ Fair value as at 31 December 2021	Teknik penilaian/ Valuation technique	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ Unobservable inputs	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi yang dipakai/ Range of unobservable inputs used	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ Relationship of unobservable inputs to fair value	
						Land
Tanah						
Tapak Tower	51,471,076	Pendekatan biaya dengan metode penjumlahan/ The cost approach with the summation method	- Luas Right of Way ("ROW")/ ROW area - Kompensasi ROW/ Compensation ROW	60.00% - 70.00%*	- Semakin tinggi luas dan kompensasi ROW maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the ROW area and compensation the higher the fair value	Land for tower site
Tanah gardu dan pembangkit	75,335,293	Pendekatan pendapatan dengan metode pengembangan lahan/ The income approach with the land development method	- Peruntukan sesuai pengembangan/ Adjustment of parameter development - Data luas dan aspek legal/ Land area and legal aspects - Perubahan peruntukan/ Zoning changes	60.00% - 80.00%*	- Semakin tinggi koefisien luas bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the KLB, the higher the fair value - Tanah bersertifikat akan memiliki nilai wajar lebih tinggi/ Certified land will have higher fair value - Peruntukan tanah sekitar mengindikasikan nilai wajar yang lebih tinggi/ Zoning of neighboring land might have higher fair value	Land for substation and power plant
						Buildings
Bangunan						
Bangunan umum	52,306,552	Pendekatan biaya/ Cost approach	- Indeks koefisien/ Index coefficient - Volume bangunan/ Building volumes	0.45 - 5.46 60.00% - 70.00%*	- Semakin besar indeks koefisien maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the index coefficient, the higher the fair value - Semakin besar volume maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher building volumes, the higher the fair value	General buildings
Waduk dan prasarana	16,832,357	Tren/ Trending	- Indeks koefisien/ Index coefficient	1.00 - 2.27	- Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the index coefficient, the higher the fair value	Reservoirs and infrastructures
Instalasi dan mesin pembangkit	556,182,532	Pendekatan biaya/ Cost approach	- Tingkat kemunduran fungsional/ Functional obsolescence rate - Tingkat kemunduran ekonomis/ Economic obsolescence rate - Tingkat indeks PPI/ PPI index rate	1.00% - 30.00% 1.00% - 3.00% 1.00 - 2.00	- Semakin besar tingkatnya, maka semakin rendah nilai wajar/ The higher the rate, the lower the fair value - Semakin besar tingkatnya, maka semakin rendah nilai wajar/ The higher the rate, the lower the fair value - Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the PPI index rate, the higher the fair value	Installations and power plants
Perlengkapan transmisi	204,873,601	Pendekatan biaya/ Cost approach	- Tingkat indeks PPI/ PPI index rate	1.00 - 3.00	- Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the PPI index rate, the higher the fair value	Transmissions equipment
Perlengkapan distribusi	235,012,113	Pendekatan biaya/ Cost approach	- Tingkat indeks PPI/ PPI index rate	1.00 - 1.65	- Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the PPI index rate, the higher the fair value	Distributions equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	6,134,499	Pendekatan biaya/ Cost approach	- Tingkat indeks PPI/ PPI index rate	1.01 - 1.02	- Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the PPI index rate, the higher the fair value	Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply
Material cadang utama	3,090,753	Pendekatan biaya/ Cost approach	- Tingkat indeks PPI/ PPI index rate	1.00 - 3.00	- Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the PPI index rate, the higher the fair value	Major spare parts

*) Terdapat banyak input yang tidak dapat diobservasi. Hal ini merepresentasikan kisaran bobot dari input yang tidak dapat diobservasi./There are too many unobservable inputs. This represents the weights of the unobservable inputs.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Surplus revaluasi, dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan yang terkait, telah dikreditkan pada pendapatan komprehensif lain dan disajikan sebagai "surplus revaluasi aset tetap" pada laba komprehensif lain.

Jika Grup tidak menerapkan model revaluasi, nilai tercatat bersih aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp641.928.399 dan Rp603.974.534.

Aset dalam pembangunan

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Proyek penugasan - program percepatan:			<i>Mandatory project - fast track program:</i>
Pembangkitan	5,092,385	6,549,381	<i>Power plants</i>
Transmisi	<u>5,398,032</u>	<u>5,253,215</u>	<i>Transmission</i>
Subjumlah	<u>10,490,417</u>	<u>11,802,596</u>	<i>Subtotal</i>
Konstruksi rutin:			<i>Regular construction:</i>
Pembangkitan	63,427,712	63,569,898	<i>Power plants</i>
Transmisi	52,904,758	81,842,276	<i>Transmission</i>
Distribusi	8,040,177	9,633,793	<i>Distribution</i>
Perlengkapan	<u>893,351</u>	<u>204,195</u>	<i>Equipment</i>
Subjumlah	<u>125,265,998</u>	<u>155,250,162</u>	<i>Subtotal</i>
Jumlah	<u>135,756,415</u>	<u>167,052,758</u>	Total

(i) Program percepatan

Program percepatan (*fast track program*) merupakan proyek yang ditugaskan Pemerintah kepada Grup. Aset dalam pembangunan untuk program percepatan termasuk pembayaran uang muka kepada kontraktor, biaya pinjaman serta pengeluaran lain yang dikapitalisasi.

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

The revaluation surplus, net of applicable deferred income taxes, was credited to other comprehensive income and is shown in "property, plant and equipment revaluation surplus" in other comprehensive income.

If the Group did not apply the revaluation model, the net carrying value of property, plant and equipment as at December 31, 2022 and 2021 would have amounted to Rp641,928,399 and Rp603,974,534, respectively.

Construction in progress

This account represents costs incurred in relation to the construction and renovation/betterment of power supply facilities, as follows:

(i) Fast track program

The fast track program represents projects which are mandated by the Government to the Group. Construction in progress under the fast track program includes advance payments made to the contractors, borrowing costs and other capitalised expenditures.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/66 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Aset dalam pembangunan (lanjutan)

Construction in progress (continued)

(i) Program percepatan (lanjutan)

(i) Fast track program (continued)

Pembangkitan

Power plants

Program percepatan aset dalam pembangunan pembangkitan terutama merupakan PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW dan PLTU 2 Kalimantan Barat Bengkayang 2x27,5 MW.

The fast track program of power plants under construction consists mainly of PLTU 1 West Kalimantan - Parit Baru 2x50 MW and PLTU 2 West Kalimantan Bengkayang 2x27.5 MW.

Transmisi

Transmission

Program percepatan aset dalam pembangunan transmisi dan gardu induk antara lain proyek Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV New Rawalo (Kesugihan) dan SUTT 150 kV Blang Pidie – Tapak Tuan.

The fast track program of transmission and substation under construction mainly consists of project Extra High Voltage Substations 500 kV New Rawalo (Kesugihan) and Overhead powerline 150 kV Blang Pidie – Tapak Tuan.

(ii) Konstruksi rutin

(ii) Regular construction

Pembangkitan

Power plants

Aset dalam pembangunan untuk pembangkitan terutama merupakan PLTU Lontar Extension 1x315 MW, PLTU Kalselteng 2 2x100 MW dan PLTA Peusangan 2x88 MW.

Power plants under construction consist mainly of PLTU Lontar Extension 1x315 MW, PLTU Kalselteng 2 2x100 MW and PLTA Peusangan 2x88 MW.

Transmisi

Transmission

Aset dalam pembangunan transmisi terutama merupakan proyek jaringan transmisi 500 kV untuk Sumatera, Jawa - Bali, 150 kV untuk luar Sumatera, Jawa - Bali, proyek gardu induk 150 kV serta proyek interkoneksi jaringan.

Transmission under construction consists mainly of projects of transmission lines of 500 kV in Sumatera, Java - Bali, 150 kV outside Sumatera, Java - Bali, substations of 150 kV and interconnection of transmission projects.

Distribusi

Distribution

Aset dalam pembangunan distribusi terutama merupakan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 kV serta proyek gardu distribusi.

Distribution under construction consists mainly of projects of mid and low voltage distribution lines of 20 kV and distribution substation projects.

Perlengkapan

Equipment

Perlengkapan untuk aset dalam pembangunan termasuk materi dan perlengkapan khusus yang digunakan untuk menunjang fungsi pembangkitan dan distribusi listrik.

Equipment under construction consists of specialised materials and equipment used to support the generation and distribution of electricity.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/67 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam pembangunan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, estimasi persentase jumlah tercatat aset dalam pembangunan Grup terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

Nama Proyek/Project Name	Nilai/ Amount	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion
PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW)	7,440,871	94%
PLTA Peusangan (2x88 MW)	6,771,436	90%
PLTA Asahan III - Sumatera Utara (2x87 MW)	4,107,158	71%
PLTU Lontar Extension (1x315 MW)	4,017,420	99%
PLTA Jatigede (2x55 MW)	3,301,283	94%
PLTU Timor 1 (2x50 MW)	3,107,678	82%
PLTU 1 Sulut (2x50 MW)	2,868,643	66%
PLTU Palu 3 (2x50 MW)	2,708,033	62%
PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru (2x50 MW)	1,728,051	86%
PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang (2 x 27.5 MW)	786,182	86%
Transmisi lainnya/Various transmission lines	58,302,790	2% - 98%
Pembangkitan lainnya/Other power plants	31,683,342	2% - 98%
Lainnya/Others	8,933,528	2% - 98%
Jumlah/Total	135,756,415	

Pada tanggal 31 Desember 2021, estimasi persentase jumlah tercatat aset dalam pembangunan Grup terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

Nama Proyek/Project Name	Nilai/ Amount	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion
PLTU Lontar Extension (1x315 MW)	8,212,141	98%
PLTA Peusangan (2x88 MW)	6,162,695	88%
PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW)	5,778,829	78%
PLTU Sulsel Barru-2 Coal Fired Steam Power Plant (1x100 MW)	3,494,427	95%
PLTA Jatigede (2x55 MW)	2,922,247	91%
PLTMG Bangkanai 2 (140 MW)	2,620,885	92%
PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW	1,727,311	86%
PLTU Palu 3 (2x50 MW)	1,190,677	20%
PLTU 1 Sulut (2x50 MW)	1,046,279	15%
PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang (2x27.5 MW)	785,778	86%
Transmisi lainnya/Various transmission lines	87,095,492	2% - 98%
Pembangkitan lainnya/Other power plants	36,178,008	2% - 98%
Lainnya/Others	9,837,989	2% - 98%
Jumlah/Total	167,052,758	

Setelah penyelesaian suatu proyek, masih perlu dilakukan sejumlah pengujian-pengujian sebelum proyek aset dalam pembangunan menerima Sertifikat Laik Operasi.

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Construction in progress (continued)

As at December 31, 2022, the estimated percentage of completion of the Group's construction in progress projects was as follows:

Nama Proyek/Project Name	Nilai/ Amount	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion
PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW)	7,440,871	94%
PLTA Peusangan (2x88 MW)	6,771,436	90%
PLTA Asahan III - Sumatera Utara (2x87 MW)	4,107,158	71%
PLTU Lontar Extension (1x315 MW)	4,017,420	99%
PLTA Jatigede (2x55 MW)	3,301,283	94%
PLTU Timor 1 (2x50 MW)	3,107,678	82%
PLTU 1 Sulut (2x50 MW)	2,868,643	66%
PLTU Palu 3 (2x50 MW)	2,708,033	62%
PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru (2x50 MW)	1,728,051	86%
PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang (2 x 27.5 MW)	786,182	86%
Transmisi lainnya/Various transmission lines	58,302,790	2% - 98%
Pembangkitan lainnya/Other power plants	31,683,342	2% - 98%
Lainnya/Others	8,933,528	2% - 98%
Jumlah/Total	135,756,415	

As at December 31, 2021, the estimated percentage of completion of the Group's construction in progress projects was as follows:

Nama Proyek/Project Name	Nilai/ Amount	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion
PLTU Lontar Extension (1x315 MW)	8,212,141	98%
PLTA Peusangan (2x88 MW)	6,162,695	88%
PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW)	5,778,829	78%
PLTU Sulsel Barru-2 Coal Fired Steam Power Plant (1x100 MW)	3,494,427	95%
PLTA Jatigede (2x55 MW)	2,922,247	91%
PLTMG Bangkanai 2 (140 MW)	2,620,885	92%
PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW	1,727,311	86%
PLTU Palu 3 (2x50 MW)	1,190,677	20%
PLTU 1 Sulut (2x50 MW)	1,046,279	15%
PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang (2x27.5 MW)	785,778	86%
Transmisi lainnya/Various transmission lines	87,095,492	2% - 98%
Pembangkitan lainnya/Other power plants	36,178,008	2% - 98%
Lainnya/Others	9,837,989	2% - 98%
Jumlah/Total	167,052,758	

After completion of a project, there are still a number of tests that need to be performed during the commissioning phase before the projects are Certified for Operations.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/68 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam pembangunan (lanjutan)

Selama tahun berjalan, Grup telah mengkapitalisasi biaya pinjaman mencakup bunga pinjaman dan selisih kurs mata uang asing ke pekerjaan dalam pelaksanaan aset dalam pembangunan sebesar Rp5.174.469 (2021: Rp5.205.448). Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum yaitu sebesar 5,39% pada tahun 2022 (2021: 5,40%).

Aset tidak digunakan dalam operasi

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap yang akan direlokasi, sementara belum digunakan dalam operasi serta aset akan diperbaiki.

Kerugian penurunan nilai dari penghapusan aset yang tidak digunakan dalam operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp689.003 dan Rp671.660 yang disajikan sebagai bagian dari penghasilan/(beban) lain-lain - bersih (Catatan 46).

Keuntungan penjualan aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp88.898 dan Rp11.963 (Catatan 46).

Berdasarkan penelaahan manajemen, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai Grup adalah cukup untuk menutupi kemungkinan adanya kerugian yang timbul dari nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Construction in progress (continued)

During the year, the Group has capitalised borrowing costs including interest expense and foreign exchange differences to construction in progress amounted to Rp5,174,469 (2021: 5,205,448). Borrowing costs were capitalised at the weighted average rate of general borrowings of 5.39% in 2022 (2021: 5.40%).

Assets not used in operations

Assets not used in operations comprised of property, plant and equipment to be relocated, those temporarily not in use in operations, and assets to be repaired.

Loss on write-off of assets not used in operations for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp689,003 and Rp671,660, respectively, which are presented as part of the other income/(expense) - net (Note 46).

Gain on sale of certain assets not used in operations for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp88,898 and Rp11,963, respectively (Note 46).

Based on management's assessment, management is of the opinion that the provision for impairment is adequate to cover the possible impairment losses of the carrying amount of fixed assets as at December 31, 2022 and 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/69 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET HAK GUNA

7. RIGHT-OF-USE ASSETS

	2022					Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi dan penyesuaian/ Reclassification and adjustments	Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ Exchange differences due to financial statements translations		
Biaya perolehan							At cost
Tanah	1,053,498	21,292	(4)	-	-	1,074,786	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	2,187,241	151,841	(24,483)	(158)	-	2,314,441	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	43,841,293	41,554	(771,044)	-	83,219	43,195,022	Installations and power plants
Perlengkapan umum	107,133	35,577	(15,778)	985	-	127,917	General equipment
Kendaraan bermotor	1,739,095	817,792	(217,050)	857	-	2,340,694	Motor vehicles
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	2,014	684	(137)	3,476	-	6,037	Telecommunications and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	1,208,346	1,704,346	-	-	-	2,912,692	Vessels and equipment
Jumlah	50,138,620	2,773,086	(1,028,496)	5,160	83,219	51,971,589	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Tanah	43,416	22,689	-	-	-	66,105	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	660,188	311,502	(24,007)	(25)	-	947,658	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	18,751,846	2,234,861	(487,187)	12,749	-	20,512,269	Installations and power plants
Perlengkapan umum	60,881	41,252	(12,381)	(3,860)	-	85,892	General equipment
Kendaraan bermotor	742,332	589,368	(214,021)	(5,327)	-	1,112,352	Motor vehicles
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	1,524	1,794	(3,014)	3,089	-	3,393	Telecommunications and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	115,896	122,831	-	-	-	238,727	Vessels and equipment
Jumlah	20,376,083	3,324,297	(740,610)	6,626	-	22,966,396	Total
Jumlah tercatat	29,762,537					29,005,193	Net carrying value

	2021					Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions*)	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi dan penyesuaian/ Reclassification and adjustments	Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ Exchange differences due to financial statements translations		
Biaya perolehan							At cost
Tanah	1,059,995	6,083	(118)	(12,462)	-	1,053,498	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	2,193,643	149,532	(150,931)	(5,003)	-	2,187,241	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	43,703,504	245,682	(482,780)	374,887	-	43,841,293	Installations and power plants
Perlengkapan umum	126,053	6,068	(10,650)	(14,338)	-	107,133	General equipment
Kendaraan bermotor	1,768,985	668,149	(353,964)	(344,075)	-	1,739,095	Motor vehicles
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	79,955	918	(78,859)	-	-	2,014	Telecommunications and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	-	1,208,346	-	-	-	1,208,346	Vessels and equipment
Jumlah	48,932,135	2,284,778	(1,077,302)	(991)	-	50,138,620	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Tanah	21,520	22,014	(118)	-	-	43,416	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	521,251	214,920	(52,239)	(23,744)	-	660,188	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	16,559,809	2,299,134	(215,760)	108,663	-	18,751,846	Installations and power plants
Perlengkapan umum	26,212	38,143	(10,095)	6,621	-	60,881	General equipment
Kendaraan bermotor	575,156	582,949	(182,219)	(233,554)	-	742,332	Motor vehicles
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	34,202	1,175	(35,390)	1,537	-	1,524	Telecommunications and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	-	115,896	-	-	-	115,896	Vessels and equipment
Jumlah	17,738,150	3,274,231	(495,821)	(140,477)	-	20,376,083	Total
Jumlah tercatat	31,193,985					29,762,537	Net carrying value

*) Termasuk penambahan aset hak guna dari akuisisi EMI di tahun 2021

*) Including additions of right-of-use assets from acquisition of EMI in 2021

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/70 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET HAK GUNA (lanjutan)

7. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") Tanjung Jati B 4x660 MW diasuransikan kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar JPY390.548.530.325 (nilai penuh) atau setara dengan Rp46.067.542 (2021: JPY390.139.188.104 (nilai penuh) atau setara dengan Rp48.334.266) dan USD24.320.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp379.197 (2021: USD4.320.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp61.642). Manajemen Grup berpendapat bahwa aset hak guna tersebut telah diasuransikan secara memadai pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

As at December 31, 2022, assets of Tanjung Jati B Steam Power Plant ("PLTU") 4x660 MW were insured with PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia against fire and other possible risks with insurance coverage of JPY390,548,530,325 (full amount) or equivalent to Rp46,067,542 (2021: JPY390,139,188,104 (full amount) or equivalent to Rp48,334,266) and USD24,320,000 (full amount) or equivalent to Rp379,197 (2021: USD4,320,000 (full amount) or equivalent to Rp61,642). The Group's management believes that the right-of-use assets were adequately insured as at December 31, 2022 and 2021.

Beban penyusutan untuk aset hak guna dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense for right-of-use assets was allocated to the following:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban usaha			Operating expenses
Penyusutan aset hak guna	3,063,978	3,113,803	Right-of-use of assets depreciation
Bahan bakar dan pelumas	<u>11,132</u>	<u>-</u>	Fuel and lubricants
Subjumlah	3,075,110	3,113,803	Subtotal
Persediaan	139,142	115,896	Inventories
Beban lain-lain	77,713	-	Other expenses
Aset dalam pembangunan	<u>32,332</u>	<u>44,532</u>	Construction in progress
Jumlah	<u>3,324,297</u>	<u>3,274,231</u>	Total

Nilai beban penyusutan yang dikapitalisasi sebagai persediaan, sebagian telah dibebankan pada beban bahan bakar dan pelumas saat persediaan digunakan.

The amount of depreciation expense which is capitalised as inventories, has been partially charged to fuel and lubricants expense when the inventories are used.

Berdasarkan penelaahan manajemen, Grup berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset hak guna pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Based on management's assessment, the Group is of the opinion that there were no indications of impairment of right-of-use assets as at December 31, 2022 and 2021.

8. PROPERTI INVESTASI

8. INVESTMENT PROPERTIES

	<u>2022</u>					
	Saldo awal/ Beginning balance	Perubahan nilai wajar/ Change in fair value	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Pemilikan langsung Tanah dan bangunan	<u>5,451,410</u>	<u>223,354</u>	<u>-</u>	<u>(51,275)</u>	<u>5,623,489</u>	Direct acquisitions Land and buildings
	<u>2021</u>					
	Saldo awal/ Beginning balance	Perubahan nilai wajar/ Change in fair value	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Pemilikan langsung Tanah dan bangunan	<u>5,408,572</u>	<u>36,192</u>	<u>-</u>	<u>6,646</u>	<u>5,451,410</u>	Direct acquisitions Land and buildings

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/71 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2022 AND 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Akun ini merupakan tanah milik Grup, yaitu IP, PJB dan PLN Batam yang terletak di Pademangan - Jakarta Utara, Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Asahan - Sumatera Utara dan Kramatwatu Serang dengan hak legal berupa HGB berjangka waktu dari 7 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Karya Semesta Gemilang, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali dan beberapa tanah yang disewakan ke pihak ketiga.

Selama tahun 2022, beberapa tanah sejumlah Rp115.523 telah direklasifikasi ke aset tetap sedangkan beberapa tanah dan bangunan sejumlah Rp64.248 telah direklasifikasi dari aset tetap ke properti investasi.

Penghasilan sewa yang diperoleh dari properti investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp39.212 dan Rp42.691.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi yang dilakukan oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan berdasarkan laporan No. 02172/2.0027-00/PI/11/0196/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai level 2 dalam hierarki nilai wajar.

Nilai wajar level 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:

- a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
- b. Tingkat hunian;
- c. Tingkat pertumbuhan; dan
- d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, tanah dan hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Grup juga mencatat perubahan nilai wajar masing-masing sebesar Rp223.354 dan Rp36.192 yang disajikan sebagai bagian dari penghasilan/(beban) lain-lain - bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 46).

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, Grup tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk perbaikan dan perawatan di masa depan.

8. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

This account represents pieces of land owned by members of the Group comprising of IP, PJB and PLN Batam, located in Pademangan North Jakarta, Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Asahan - North Sumatera and Kramatwatu Serang with HGB for periods between seven to 40 years until 2032, which are leased to PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Karya Semesta Gemilang, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali and several pieces of land that are leased to third parties.

During 2022, certain lands amounting to Rp115,523 have been reclassified to fixed assets while certain lands and buildings amounting to Rp64,248 have been reclassified from fixed assets to investment properties.

Rental income earned from investment properties for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp39,212 and Rp42,691, respectively.

As at December 31, 2022, the Group performed a revaluation of the fair value of its investment properties which was performed by KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun and Partners based on report No. 02172/2.0027-00/PI/11/0196/1/III/2023 dated March 30, 2023, independent valuers registered with the Ministry of Finance and FSA.

The fair values of investment properties are within level 2 of the fair value hierarchy.

The level 2 fair value of land is calculated using the market approach and income approach. Data inputs were obtained from the market approach which consist of:

- a. Sale or rental price per square metre;*
- b. Occupancy rate;*
- c. Growth rate; and*
- d. Discount and capitalisation rate.*

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land and land rights and other comparison elements.

The Group also recorded the changes in fair value amounting to Rp223,354 and Rp36,192, respectively, which were presented as part of other income/(expense) - net in the consolidated statements of profit or loss for the years ended December 31, 2022 and 2021 (Note 46).

As at December 31, 2022 and 2021, the Group does not have any contractual obligations for future repairs and maintenance.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/72 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA **9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES**

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

The details of investments in associates and joint ventures are as follows:

Entitas/Entity	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Tahun operasi/ Year of commercial operations	Persentase penyertaan/ Percentage of ownership (%)	
				2022	2021
<u>Entitas asosiasi/Associates</u>					
PT Geo Dipa Energi ("GDE")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2002	5.50**)	5.50**)
PT Mitra Energi Batam ("MEB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2004	30.00	30.00
PT Sumber Segara Primadaya ("S2P")	Cilacap	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2006	49.00	49.00
PT Dalle Energy Batam ("DEB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2013	20.00	20.00
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2013	45.00	45.00
PT Tanjung Kasam Power ("TJK")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2012	10.00**)	10.00**)
PT Indo Pusaka Berau ("IPB")	Berau	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2005	46.53	46.53
PT PBM Adhiguna Putera ("PBM AP")	Jakarta	Pelayaran/Shipping	1987	25.00	25.00
PT Musi Mitra Jaya ("MMJ")	Palembang	Transportasi batubara/ Coal transportation	2011	25.50	25.50
PT Sriwijaya Bara Logistic ("SBL")	Musi Banyuasin	Transportasi batubara/ Coal transportation	2014	25.50	25.50
PT Rekind Daya Mamuju ("RDM")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2018	10.00**)	10.00**)
PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali ("SS Pewali")	Sumatera Selatan	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	10.00**)	10.00**)
<u>Ventura bersama/Joint ventures</u>					
PT Unelec Indonesia ("Unindo")	Jakarta	Penunjang penyedia tenaga listrik/ Electricity supports	1988	32.35	32.35
PT Bajradaya Sentranusa ("BDSN")	Asahan	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2011	36.61	36.61
PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI")	Palembang	Pembangkit tenaga listrik uap panas/ Steam gas electricity power plant	2015	40.25	40.25
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("Komipo PJB")	Jejara	Operasi dan pemeliharaan/ Operational and maintenance	2010	49.00	49.00
PT Indo Raya Tenaga ("IRT")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	51.00	51.00
PT Rajamandala Electric Power ("REP")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2019	51.00	51.00
PT Perta Daya Gas ("PDG")	Jakarta	Transportasi dan penyimpanan LNG/ Transportation and storage of LNG	2015	35.00	35.00
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia ("CPSI")	Jakarta	Peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik/ Electricity controller and distribution	2014	49.00	49.00
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2019	30.00	30.00
PT GCL Indotenaga ("GCL")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2021	35.00	35.00
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali ("GTPJB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2019	30.00	30.00
PT North Sumatra Hydro Energy ("NSHE")	Sumatera Utara	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	25.00	25.00
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi ("PMSE")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	51.00	51.00
PT Maxpower Cogindo Batam ("MCB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik, kelistrikan, perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya/Power generation, supporting activities electricity, wholesaler of office machinery and industry, spare parts and fittings	2022	30.00	30.00
PT Industri Baterai Indonesia ("IBI")	Jakarta	Industri EV Battery dan ESS/ EV Battery and ESS Industry	*)	25.00	25.00

*) Dalam tahap pengembangan

***) Terdapat perwakilan PLN

*) In development stage

***) There is PLN's representative

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/73 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Grup dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

**9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURES (continued)**

All the associates and joint ventures are recorded by the Group using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for their shares.

As at December 31, 2022 and 2021, management believes that there is no restriction and significant risk regarding the investments in associates and joint ventures.

Changes in investments in associates and joint ventures are as follows:

	2022					
	Jumlah tercatat 1 Januari 2022/ Carrying amount January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Bagian atas laba/(rugi) bersih entitas/ Share in net income/ (loss)	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income/(loss)	Dividen/ Dividends	
Entitas asosiasi						Associates
S2P	5,192,671	-	1,785,106	-	(275,376)	6,702,401
SBL	326,100	-	664	8,297	-	335,061
MMJ	245,332	-	6,498	3,348	-	255,178
TJK	121,970	-	17,810	71	(744)	139,107
MEB	130,118	-	3,345	-	-	133,463
IPB	123,948	-	3,171	-	(4,517)	122,602
GDE	114,458	-	-	-	-	114,458
DEB	107,312	-	7,647	-	(7,000)	107,959
EPI	52,144	-	4,360	-	(1,549)	54,955
RDM	54,497	-	(1,825)	4,924	-	57,596
AGP	53,392	-	(10,039)	(521)	(6,685)	36,147
SS Pewali	25,505	-	1,282	-	-	26,787
Subjumlah	6,547,447	-	1,818,019	16,119	(295,871)	8,085,714
Ventura bersama						Joint ventures
IRT	3,292,871	-	533,160	1,867,428	-	5,693,459
SGPJB	3,310,343	-	718,315	336,427	(107,186)	4,257,899
BPI	1,502,427	-	96,511	167,989	-	1,766,927
NSHE	1,236,983	393,398	103,652	123,282	-	1,857,315
BDSN	936,965	-	58,414	327,195	(106,324)	1,216,250
GCL	613,580	-	223,803	70,614	(111,013)	796,984
REP	125,627	-	7,443	9,833	-	142,903
PDP	-	-	11,709	-	(300)	11,409
IBI	48,951	64,000	-	-	-	112,951
PMSE	69,243	-	72,779	7,844	-	149,866
Komipo PJB	59,487	-	21,603	-	(4,900)	76,190
PDG	55,954	-	9,792	-	(2,754)	62,992
MCB	8,235	-	120	1,166	-	9,521
GTPJB	2,726	-	269	259	(166)	3,088
CPSI	-	-	-	-	-	-
Subjumlah	11,263,392	457,398	1,857,570	2,912,037	(332,643)	16,157,754
Jumlah	17,810,839	457,398	3,675,589	2,928,156	(628,514)	24,243,468

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/74 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) **9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)**

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Changes in investments in associates and joint ventures are as follows: (continued)

	2021					
	Jumlah tercatat 1 Januari 2022/ Carrying amount January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Bagian atas laba/(rugi) bersih entitas/ Share in net income/ (loss)	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income/(loss)	Dividen/ Dividends	
Entitas asosiasi						Associates
S2P	3,590,968	-	1,830,745	-	(229,042)	5,192,671
SBL	333,847	-	(8,483)	736	-	326,100
MMJ	258,697	-	(13,572)	207	-	245,332
MEB	130,617	-	657	344	(1,500)	130,118
IPB	124,619	-	(671)	-	-	123,948
TJK	98,402	-	23,568	-	-	121,970
GDE	114,458	-	-	-	-	114,458
DEB	103,997	-	9,315	-	(6,000)	107,312
EPI	60,538	-	(8,394)	-	-	52,144
RDM	61,384	-	(6,887)	-	-	54,497
PBM AP	48,526	-	1,566	9,407	(6,107)	53,392
SS Pewali	25,491	-	14	-	-	25,505
Subjumlah	4,951,544	-	1,827,858	10,694	(242,649)	6,547,447
Ventura bersama						Joint ventures
SGPJB	2,589,521	-	662,544	58,278	-	3,310,343
IRT	2,657,595	-	31,697	603,579	-	3,292,871
BPI	1,343,653	-	94,782	63,992	-	1,502,427
NSHE	1,094,049	35,858	271,330	(164,254)	-	1,236,983
BDSN	843,371	-	129,982	37,880	(74,268)	936,965
GCL	420,817	38,115	154,648	-	-	613,580
REP	73,906	-	50,337	1,384	-	125,627
PMSE	23,742	56,740	(10,519)	(720)	-	69,243
Komipo PJB	60,295	-	5,633	-	(6,441)	59,487
PDG	40,125	-	15,829	-	-	55,954
IBI	-	48,951	-	-	-	48,951
MCB	8,234	-	1	-	-	8,235
GTPJB	2,474	-	296	(44)	-	2,726
CPSI	3,259	-	(3,259)	-	-	-
Subjumlah	9,161,041	179,664	1,403,301	600,095	(80,709)	11,263,392
Jumlah	14,112,585	179,664	3,231,159	610,789	(323,358)	17,810,839

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/75 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURES (continued)**

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada 31 Desember 2022 dan 2021 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table contains the summarised financial information for associates and joint ventures as at December 31, 2022 and 2021 which are accounted for using the equity method.

Entitas asosiasi

Associates

	2022				Jumlah/ Total	
	S2P	MMJ	SBL	Lainnya/ Others		
Kas dan setara kas	1,585,991	7,959	2,582	2,058,053	3,654,585	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	3,416,904	232,207	299,589	1,240,819	5,189,519	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	5,002,895	240,166	302,171	3,298,872	8,844,104	Total current assets
Aset tidak lancar	30,970,555	750,355	348,145	8,841,498	40,910,553	Non-current assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha	1,588,051	172,751	96,695	220,914	2,078,411	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	4,915,883	176,986	55,449	846,825	5,995,143	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	6,503,934	349,737	152,144	1,067,739	8,073,554	Total current liabilities
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas keuangan	8,275,878	472,779	89,463	3,066,845	11,904,965	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	7,515,269	5,935	67,076	1,324,911	8,913,191	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	15,791,147	478,714	156,539	4,391,756	20,818,156	Total non-current liabilities
Aset bersih	13,678,369	162,070	341,633	6,680,875	20,862,947	Net assets
% kepemilikan	49.00%	25.50%	25.50%	5.50% - 46.53%		% of ownership
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	6,702,401	41,328	87,116	874,110	7,704,955	The Group's share of the net assets of associates
Penyesuaian metode ekuitas	-	213,850	247,945	(81,036)	380,759	Adjustments of equity methods
Jumlah tercatat	6,702,401	255,178	335,061	793,074	8,085,714	Total carrying value
Pendapatan	12,563,860	226,859	173,105	2,226,139	15,189,963	Revenue
Beban pokok pendapatan	(5,959,095)	(169,659)	(113,726)	(1,527,204)	(7,769,684)	Cost of revenue
Depresiasi dan amortisasi	(43,806)	-	-	(90,802)	(134,608)	Depreciation and amortisation
Pendapatan keuangan	3,572	-	-	273	3,845	Finance income
Beban keuangan	(965,962)	63	46	(58,286)	(1,024,139)	Finance costs
Beban operasi	(2,387,543)	(5,589)	(5,912)	(625,838)	(3,024,882)	Operating expenses
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	1,122,370	(12,232)	(37,338)	(112,340)	960,460	Other income/(expenses) - net
Beban pajak penghasilan	(690,322)	(13,960)	(13,571)	(95,238)	(813,091)	Income tax expense
Laba/(rugi) tahun berjalan	3,643,074	25,482	2,604	(283,296)	3,387,864	Profit/(loss) for the year
% kepemilikan	49.00%	25.50%	25.50%	5.50% - 46.53%		% of ownership
Bagian Grup atas laba/(rugi) bersih asosiasi tahun berjalan	1,785,106	6,498	664	25,751	1,818,019	The Group's share in net income/(loss) for the year of associates
Penghasilan komprehensif lainnya	-	13,129	32,537	47,865	93,531	Other comprehensive income
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lainnya asosiasi	-	3,348	8,297	4,474	16,119	The Group's share of other comprehensive income of associates
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	(275,376)	-	-	(20,495)	(295,871)	Dividends received from associates

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/76 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) **9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)**

Entitas asosiasi (lanjutan)

Associates (continued)

	2021					
	S2P	MMJ	SBL	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	1,139,399	5,145	3,841	1,690,406	2,838,791	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	<u>3,024,301</u>	<u>160,122</u>	<u>251,838</u>	<u>1,560,044</u>	<u>4,996,305</u>	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	<u>4,163,700</u>	<u>165,267</u>	<u>255,679</u>	<u>3,250,450</u>	<u>7,835,096</u>	Total current assets
Aset tidak lancar	29,863,035	681,642	319,253	9,827,436	40,691,366	Non-current assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha	1,246,735	161,461	94,302	236,732	1,739,230	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	<u>5,077,251</u>	<u>149,379</u>	<u>54,922</u>	<u>1,115,597</u>	<u>6,397,149</u>	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	<u>6,323,986</u>	<u>310,840</u>	<u>149,224</u>	<u>1,352,329</u>	<u>8,136,379</u>	Total current liabilities
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas keuangan	9,424,681	-	-	3,263,752	12,688,433	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	<u>6,558,646</u>	<u>442,269</u>	<u>153,623</u>	<u>1,004,899</u>	<u>8,159,437</u>	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	<u>15,983,327</u>	<u>442,269</u>	<u>153,623</u>	<u>4,268,651</u>	<u>20,847,870</u>	Total non-current liabilities
Aset bersih	<u>11,719,422</u>	<u>93,800</u>	<u>272,085</u>	<u>7,456,906</u>	<u>19,542,213</u>	Net assets
% kepemilikan	49.00%	25.50%	25.50%	5.50% - 46.53%	-	% of ownership
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	5,742,516	23,919	69,381	855,678	6,691,494	The Group's share of the net assets of associates
Penyesuaian metode ekuitas	<u>(549,845)</u>	<u>221,413</u>	<u>256,719</u>	<u>(72,334)</u>	<u>(144,047)</u>	Adjustments of equity methods
Jumlah tercatat	<u>5,192,671</u>	<u>245,332</u>	<u>326,100</u>	<u>783,344</u>	<u>6,547,447</u>	Total carrying value
Pendapatan	11,645,263	108,742	89,598	1,595,518	13,439,121	Revenue
Beban pokok pendapatan	(5,775,285)	(92,042)	(68,401)	(1,020,675)	(6,956,403)	Cost of revenue
Depresiasi dan amortisasi	(207,503)	-	-	(27,289)	(234,792)	Depreciation and amortisation
Pendapatan keuangan	7,322	-	-	1,280	8,602	Finance income
Beban keuangan	(999,357)	(21)	-	(46,905)	(1,046,283)	Finance costs
Beban operasi	(1,960,675)	(2,254)	(412)	(196,524)	(2,159,865)	Operating expenses
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	1,388,446	(67,649)	(54,052)	(35,578)	1,231,167	Other income/(expenses) - net
Beban pajak penghasilan	<u>(361,997)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(67,942)</u>	<u>(429,939)</u>	Income tax expense
Laba/(rugi) tahun berjalan	<u>3,736,214</u>	<u>(53,224)</u>	<u>(33,267)</u>	<u>201,885</u>	<u>3,851,608</u>	Profit/(loss) for the year
% kepemilikan	49.00%	25.50%	25.50%	5.50% - 46.53%	-	% of ownership
Bagian Grup atas laba/(rugi) bersih asosiasi tahun berjalan	<u>1,830,745</u>	<u>(13,572)</u>	<u>(8,483)</u>	<u>19,168</u>	<u>1,827,858</u>	The Group's share in net income/(loss) for the year of associates
Penghasilan komprehensif lainnya	-	812	2,886	38,776	42,474	Other comprehensive income
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lainnya asosiasi	<u>-</u>	<u>207</u>	<u>736</u>	<u>9,751</u>	<u>10,694</u>	The Group's share of other comprehensive income of associates
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	<u>(229,042)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(13,607)</u>	<u>(242,649)</u>	Dividends received from associates

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/77 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) **9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)**

Ventura bersama

Joint ventures

	2022					Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
	BPI	IRT	SGPJB	BDSN	NSHE			
Kas dan setara kas	46,288	230,682	3,666,740	652,936	302,515	946,527	5,845,688	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	650,825	72,211	6,711,063	662,198	68,013	918,415	9,082,725	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	697,113	302,893	10,377,803	1,315,134	370,528	1,864,942	14,928,413	Total current assets
Aset tidak lancar	4,791,900	35,678,691	24,747,224	5,822,212	9,806,685	9,749,442	90,596,154	Non-current assets
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Utang usaha	311,760	8,313	5,166	66,175	-	343,928	735,342	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	230,868	2,014,502	4,142,617	193,967	534,888	1,265,249	8,382,091	Other financial liabilities
Jumlah liabilitas lancar	542,628	2,022,815	4,147,783	260,142	534,888	1,609,177	9,117,433	Total current liabilities
Liabilitas								Liabilities
Liabilitas keuangan	-	20,898,567	15,314,854	2,363,502	529,228	5,807,423	44,913,574	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	574,070	1,896,556	1,469,393	1,171,747	1,702,698	777,944	7,592,408	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	574,070	22,795,123	16,784,247	3,535,249	2,231,926	6,585,367	52,505,982	Total of non-current liabilities
Aset bersih	4,372,315	11,163,646	14,192,997	3,341,955	7,410,399	3,419,840	43,901,152	Net assets
% kepemilikan	40.25%	51%	30%	36.61%	25%	30.00%-51.00%		% of ownership
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	1,759,857	5,693,459	4,257,899	1,223,490	1,852,600	1,282,554	16,069,859	The Group's share of the net assets of joint ventures
Penyesuaian metode ekuitas	7,070	-	-	(7,240)	4,715	83,350	87,895	Adjustments of equity methods
Jumlah tercatat	1,766,927	5,693,459	4,257,899	1,216,250	1,857,315	1,365,904	16,157,754	Total carrying value
Pendapatan	1,063,858	14,227,566	9,454,486	641,023	3,280,340	3,121,965	31,789,238	Revenue
Beban pokok pendapatan	(721,440)	(11,747,487)	(5,756,034)	(59,386)	(2,640,055)	(1,569,993)	(22,494,395)	Cost of revenue
Depresiasi dan amortisasi	(5,955)	-	(11,981)	(1,226)	-	(150,326)	(169,488)	Depreciation and amortisation
Pendapatan keuangan	1,171	265	137,971	-	-	9,792	149,199	Finance income
Beban keuangan	(5,888)	(1,185,383)	(922,757)	(266,181)	(69,978)	(432,719)	(2,882,906)	Interest expense
Beban operasi	(85,933)	(41,795)	(225,227)	-	(43,111)	(56,332)	(452,398)	Operating expenses
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	126,772	174,639	(218,613)	(85,239)	15,453	160,282	173,294	Other income/(expense) - net
Beban pajak penghasilan	(132,806)	(382,394)	(63,461)	(69,434)	(128,042)	(134,514)	(910,651)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	239,779	1,045,411	2,394,384	159,557	414,607	948,155	5,201,894	Profit for the year
% kepemilikan	40.25%	51.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00%-51.00%		% of ownership
Bagian Grup atas laba bersih ventura bersama tahun berjalan	96,511	533,160	718,315	58,414	103,652	347,517	1,857,569	The Group's share of net income for the year of joint ventures
Penghasilan komprehensif lainnya	417,364	3,661,624	1,121,423	893,731	493,127	241,165	6,828,434	Other comprehensive income
Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya ventura bersama	167,989	1,867,428	336,427	327,195	123,282	89,716	2,912,037	Share of other comprehensive income of joint ventures
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	-	-	(107,186)	(106,324)	-	(119,133)	(332,643)	Dividends received from joint ventures

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/78 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURES (continued)**

Ventura bersama (lanjutan)

Joint ventures (continued)

	2021					Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
	BPI	IRT	SGPJB	BDSN	NSHE			
Kas dan setara kas	293,902	190,433	1,929,434	355,570	92,070	1,138,289	3,999,698	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	561,615	123,443	6,224,185	320,009	2,033	714,415	7,945,700	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	855,517	313,876	8,153,619	675,579	94,103	1,852,704	11,945,398	Total current assets
Aset tidak lancar	4,657,167	16,176,156	24,039,202	5,437,068	5,841,849	8,459,289	64,610,731	Non-current assets
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Utang usaha	769,800	138,193	19,442	60,560	-	295,215	1,283,210	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	647,454	839,298	4,245,300	453,895	614,308	324,595	7,124,850	Other financial liabilities
Jumlah liabilitas lancar	1,417,254	977,491	4,264,742	514,455	614,308	619,810	8,408,060	Total current liabilities
Liabilitas								Liabilities
Liabilitas keuangan	-	8,580,033	15,650,358	1,872,532	-	6,150,947	32,253,870	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	539,072	475,897	1,243,255	942,450	373,710	973,919	4,548,303	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	539,072	9,055,930	16,893,613	2,814,982	373,710	7,124,866	36,802,173	Total of non-current liabilities
Aset bersih	3,556,358	6,456,611	11,034,466	2,783,210	4,947,934	2,567,317	31,345,896	Net assets
% kepemilikan	40.25%	51.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00% - 51.00%		% of ownership
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	1,431,434	3,292,871	3,310,339	1,018,933	1,236,983	964,144	11,254,704	The Group's share of the net assets of joint ventures
Penyesuaian metode ekuitas	70,993	-	4	(81,968)	-	19,659	8,688	Adjustments of equity methods
Jumlah tercatat	1,502,427	3,292,871	3,310,343	936,965	1,236,983	983,803	11,263,392	Total carrying value
Pendapatan	1,046,089	4,665,015	8,492,010	664,441	1,380,437	2,314,556	18,562,548	Revenue
Beban pokok pendapatan	(601,323)	(3,579,708)	(5,324,028)	(65,024)	(871,073)	(1,200,144)	(11,641,300)	Cost of revenue
Depresiasi dan amortisasi	-	(4,634)	0	(855)	0	(18,343)	(23,832)	Depreciation and amortisation
Pendapatan keuangan	1,464	51	330,615	158	2,514	2,326	337,128	Finance income
Beban keuangan	(34,199)	(405,850)	(687,586)	(182,674)	(81,235)	(168,837)	(1,560,381)	Interest expense
Beban operasi	(82,257)	(19,415)	(238,453)	3,095	(77,822)	(403,829)	(818,681)	Operating expenses
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	13,170	(483,700)	(23,771)	83,826	867,335	88,872	545,732	Other income/(expense) - net
Beban pajak penghasilan	(107,461)	(109,608)	(340,307)	(147,922)	(134,836)	(43,616)	(883,750)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	235,483	62,151	2,208,480	355,045	1,085,320	570,985	4,517,464	Profit for the year
% kepemilikan	40.25%	51.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00%-51.00%		% of ownership
Bagian Grup atas laba bersih ventura bersama tahun berjalan	94,782	31,697	662,544	129,982	271,330	212,966	1,403,301	The Group's share of net income for the year of joint ventures
Penghasilan/(rugi) komprehensif lainnya	158,988	1,183,487	194,261	103,470	(657,017)	1,156	984,345	Other comprehensive income/(loss)
Bagian atas penghasilan/(rugi) komprehensif lainnya ventura bersama	63,992	603,579	58,278	37,880	(164,254)	620	600,095	Share of other comprehensive income/(loss) of joint ventures
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	-	-	-	(74,268)	-	(6,441)	(80,709)	Dividends received from joint ventures

Investasi pada entitas di atas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Grup. Manajemen meyakini bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Group. Management believes that there is no indication of impairment.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/79 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG PIHAK BERELASI

10. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES

	2022	2021	
SGPJB	849,106	806,425	SGPJB
REP	415,493	358,699	REP
PDG	79,733	114,012	PDG
GCL	70,422	-	GCL
PMSE	11,181	9,632	PMSE
Lain-lain	93,341	54,379	Others
Jumlah	1,519,276	1,343,147	Total
Dikurangi: bagian lancar	231,006	183,066	Less: current portion
Bagian tidak lancar	1,288,270	1,160,081	Non-current portion

SGPJB

Pada tanggal 20 November 2018, PJB, entitas anak PJB, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar USD56.516.733 kepada SGPJB dengan suku bunga LIBOR 6 bulan + 4%. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2033. Pelunasan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli. Selama tahun 2022, SGPJB melakukan pembayaran pinjaman sebesar USD4.347.441 atau setara dengan Rp64.720 (2021: USDnihil).

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo piutang pokok pinjaman PJB dari SGPJB adalah sebesar USD52.169.292 (setara dengan Rp813.424) dan piutang bunga sebesar USD2.288.456 (setara dengan Rp35.682).

Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo piutang pokok pinjaman PJB dari SGPJB adalah sebesar USD56.516.733 (setara dengan Rp806.425).

REP

Pada tanggal 4 Juli 2014, IP, entitas anak, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar USD9.399.962 kepada REP, entitas asosiasi, untuk membiayai proyek 46,6 MW di Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") Sungai Citarum di Cianjur, Jawa Barat. Pinjaman ini dikenakan bunga 10% per tahun dengan jangka waktu 17,5 tahun setelah *grace period* selama pembangunan. Tanggal operasi komersial PLTA telah diamandemen, terakhir kali melalui Amandemen Pertama atas PJBTl tertanggal 10 Agustus 2017, menjadi 57 bulan setelah tanggal pendanaan. Pada tanggal 12 Mei 2019, PLTA Rajamandala 1 x 47 MW telah beroperasi secara komersial berdasarkan sertifikat tanggal operasi komersial No. 188.BA/159/REP/2019. Pokok pinjaman akan ditagihkan dan terutang setiap enam bulan sejak tanggal operasi komersial.

SGPJB

On November 20, 2018, PJB, a PJB subsidiary, granted a long-term loan to SGPJB amounting to USD56,516,733 with an interest rate of LIBOR 6 months + 4%. The loan will mature on December 15, 2033. The interest will be due every January 15 and July 15. During 2022, SGPJB made loan payments of USD4,347,441 or equivalent to Rp64,720 (2021: USDnil).

As at December 31, 2022, PJB's principal outstanding loan balance from SGPJB was USD52,169,292 (equivalent to Rp813,424) and interest receivables amounted to USD2,288,456 (equivalent to Rp35,682).

As at December 31, 2021, PJB's principal outstanding loan balance from SGPJB was USD56,516,733 (equivalent to Rp806,425).

REP

On July 4, 2014, IP, a subsidiary, provided a long-term loan of USD9,399,962 to REP, an associate, for the financing of the 46.6 MW project at Hydroelectric Power Plant ("HPP") Citarum River at Cianjur, West Java. This loan bears interest of 10% per annum with a 17.5 year term of repayment after a grace period during construction. The Commercial Operation Date ("COD") has been amended, most recently through the First Amendment of PPA dated August 10, 2017, become 57 months after the financial close date. On May 12, 2019, the HPP Rajamandala 1 x 47 MW was commercially operated based on COD certificate No. 188.BA/159/REP/2019. The principal shall be invoiced and due every six months starting on COD.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/80 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

REP (lanjutan)

Pada tanggal 23 November 2016, IP memberikan tambahan pinjaman sebesar USD5.724.490 kepada REP dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pinjaman sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pokok pinjaman IP kepada REP adalah sebesar USD15.124.452 atau setara dengan Rp235.820 (2021: USD15.124.452 atau setara dengan Rp215.811) dan piutang bunga sebesar USD11.487.115 atau setara dengan Rp179.107 (2021: USD9.947.670 atau setara dengan Rp142.329). Piutang lainnya sebesar Rp566 (2021: Rp559) merupakan biaya relokasi pegawai dan pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, penghasilan bunga masing-masing adalah sebesar USD1.512.445 atau setara dengan Rp22.565 (2021: USD1.512.445 atau setara dengan Rp21.685) yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga yang dibayarkan oleh REP. IP tidak berhak untuk meminta pembayaran kembali atas pokok pinjaman yang diberikan kepada REP sebelum Tanggal Pembebasan Fasilitas Senior, namun untuk pembayaran bunga yang dilakukan oleh REP harus memenuhi syarat dan kondisi yang tertuang dalam perjanjian pemegang saham sebagai berikut:

- Uang yang ada pada kredit dari Rekening Distribusi; atau
- Sumber - sumber lain yang dapat disetujui secara tertulis oleh Agen Antar Kreditur.

PDG

Pada tanggal 12 Juni 2013, IP, entitas anak, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar USD18.837.112 kepada PDG, ventura bersama, untuk membiayai proyek PLTU Tambak Lorok, Semarang. Pada tanggal 30 November 2015, IP melakukan amandemen atas pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada PDG sehingga jumlah pinjaman berubah menjadi USD18.191.529 sesuai dengan jumlah seluruh pencairan hingga tanggal terakhir yakni 9 Januari 2014 dan jangka waktu pinjaman berubah menjadi delapan tahun yang akan jatuh tempo pada 1 Desember 2023. Pemberian pinjaman ini dikenakan bunga 6,5% per tahun.

Jumlah bunga atas pokok pinjaman terutang selama masa pembangunan proyek (*Interest During Construction*) dihitung sejak tanggal pencairan dana sampai tanggal 30 Mei 2014 dan dibayarkan secara penuh pada tanggal 1 Juni 2016. Pokok pinjaman akan ditagihkan setiap 6 bulan dari tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Desember 2023.

**10. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES
(continued)**

REP (continued)

On November 23, 2016, IP provided additional loans of USD5,724,490 to REP with similar terms and conditions to the previous loan.

As at December 31, 2022, IP's principal amounts due from REP is USD15,124,452 or equivalent to Rp235,820 (2021: USD15,124,452 or equivalent to Rp215,811) and interest receivables amounted to USD11,487,115 or equivalent to Rp179,107 (2021: USD9,947,670 or equivalent to Rp142,329). Other receivables of Rp566 (2021: Rp559) represents costs of employee relocation and operation and maintenance services revenue.

As at December 31, 2022, interest income amounted to USD1,512,445 or equivalent to Rp22,565 (2021: USD1,512,445 or equivalent to Rp21,685) which is presented in the consolidated statements of profit or loss.

As at December 31, 2022 and 2021, there was no repayment of the loan principal and interest paid by REP. IP is not entitled to request repayment of loan principal provided to REP before the Senior Facility Release Date, while interest paid by REP should fulfil several terms and conditions as stated in the shareholder agreement as follows:

- The monies stand to the credit of the Distribution Accounts; or
- Other sources as may be approved in writing by the Intercreditor Agent.

PDG

On June 12, 2013, IP, a subsidiary, granted a long-term loan amounting to USD18,837,112 to PDG, a joint venture, for financing the PLTU Tambak Lorok, Semarang. On November 30, 2015, IP made an amendment to the long-term loan given to PDG which resulted in the revision of the total loan granted to become USD18,191,529 in accordance with the funds transferred up to January 9, 2014, and the tenor of the loan was amended to eight years and will be due on December 1, 2023. This loan bears interest of 6.5% per annum.

The total interest on the principal during the construction of the project (*Interest During Construction*) is effective from the date of cash withdrawal until May 30, 2014 and was fully paid on June 1, 2016. The principal shall be collected every six months from June 1, 2016 until December 1, 2023.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/81 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

**10. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES
(continued)**

PDG (lanjutan)

PDG (continued)

Pada tahun 2022, PDG melakukan pembayaran pinjaman atas pokok sebesar USD2.273.941 (setara dengan Rp34.644) dan bunga sebesar USD828.877 (setara dengan Rp12.614) (2021: pokok USD3.410.912 (setara dengan Rp48.670) dan bunga sebesar USD2.078.181 (setara dengan Rp29.654)).

In 2022, PDG has made loan payments of principal amounting to USD2,273,941 (equivalent to Rp34,644) and interest amounting to USD828,877 (equivalent to Rp12,614) (2021: principal USD3,410,912 (equivalent to Rp48,670) and interest amounting to USD2,078,181 (equivalent to Rp 29,654)).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pokok pinjaman IP dari PDG masing-masing adalah sebesar USD4.547.882 (setara dengan Rp70.911) dan USD6.821.823 (setara dengan Rp97.340) dan piutang bunga sebesar USD459.361 (setara dengan Rp7.162) dan USD883.003 (setara dengan Rp12.600).

As at December 31, 2022 and 2021, IP's principal outstanding loan balance from PDG was USD4,547,882 (equivalent to Rp70,911) and USD6,821,823 (equivalent to Rp97,340), respectively, and interest receivables amounted to USD459,361 (equivalent to Rp7,162) and USD883,003 (equivalent to Rp12,600), respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, piutang lainnya sebesar Rp1.660 dan Rp4.072, merupakan piutang atas bunga dan biaya pegawai.

As at December 31, 2022 and 2021, other receivables amounted to Rp1,660 and Rp4,072 respectively, representing interest receivables and employee costs.

GCL

GCL

Pada tanggal 27 Desember 2022, GCL, entitas asosiasi IP, melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") No. 005/GMS-GCLIT/2022 telah mengumumkan dividen kepada PIT, entitas anak IP, sebesar USD7.141.530 (setara dengan Rp111.013). GCL telah membayar PIT sebesar USD2.625.000 (setara dengan Rp40.591) dan sisa saldo yang belum dibayar sebesar USD4.516.530 (setara dengan Rp70.422).

On 27 December 2022, GCL, the associates of IP, through the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 005/GMS-GCLIT/2022 has declared its dividends to PIT, the subsidiary of IP, which amounted to USD7,141,530 (equivalent to Rp111,013). GCL has paid PIT for USD2,625,000 (equivalent to Rp40,591) and the remaining amount that has not been paid amounted to USD4,516,530 (equivalent to Rp70,422).

Manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang pihak berelasi tidak material, sehingga penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian dianggap tidak diperlukan pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Management of the Group is of the opinion that the provision for expected credit losses of receivables from related parties is not material, therefore, a provision for expected credit losses is not considered necessary as at December 31, 2022 and 2021.

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 51 for the information on the details of transactions and balances with related parties.

PMSE

PMSE

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo piutang pokok pinjaman PMSE dari PJBIC adalah sebesar USD663.000 (setara dengan Rp10.429) dan piutang bunga sebesar USD48.213 (setara dengan Rp752).

As at December 31, 2022, PMSE's principal outstanding loan balance from PJBIC was USD663,000 (equivalent to Rp10,429) and balance of interest receivables amounted to USD48,213 (equivalent to Rp752).

Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo piutang pokok pinjaman PMSE dari PJBIC adalah sebesar USD663.000 (setara dengan Rp9.632) dan piutang bunga sebesar USDnihil (setara dengan Rpnihil).

As at December 31, 2021, PMSE's principal outstanding loan balance from PJBIC was USD663,000 (equivalent to Rp9,632) and balance of interest receivables amounted to USDnil (equivalent to Rpnihil).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/82 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. REKENING BANK DIBATASI PENGGUNAANNYA

11. RESTRICTED CASH IN BANKS

	2022	2021	
Dana cadangan			Reserve accounts
Sumitomo Mitsui			Sumitomo Mitsui
Banking Corporation, Singapura			Banking Corporation, Singapore
JPY	3,488,296	4,039,648	JPY
USD	851,029	741,073	USD
Jaminan bank garansi			Bank guarantees
Pihak berelasi:			Related parties:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Tbk ("BRI")			("BRI")
Rupiah	19,550	10,000	Rupiah
USD	161,764	150,792	USD
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
("Bank Mandiri")			("Bank Mandiri")
Rupiah	62,023	53,827	Rupiah
USD	112,262	-	USD
PT Bank Negara Indonesia (Persero)			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Tbk ("BNI")			("BNI")
Rupiah	1,285	10,902	Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah			PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur ("BPD Jatim")			Jawa Timur ("BPD Jatim")
Rupiah	-	268	Rupiah
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Bank KB Bukopin Tbk			PT Bank KB Bukopin Tbk
("Bank Bukopin")			("Bank Bukopin")
Rupiah	16,749	16,750	Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk			PT Bank CIMB Niaga Tbk
("CIMB Niaga")			("CIMB Niaga")
Rupiah	43,938	44,910	Rupiah
Subjumlah	4,756,896	5,068,170	Subtotal
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(2)	(9)	Allowance for expected credit loss
Jumlah	4,756,894	5,068,161	Total
Dikurangi: bagian lancar	302,386	206,279	Less: current portion
Bagian tidak lancar	4,454,508	4,861,882	Non-current portion

Perusahaan menempatkan dana cadangan pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura sebesar JPY29.572.853.747 dan USD54.581.139 pada tanggal 31 Desember 2022 (2021: JPY32.606.787.926 dan USD51.935.860) untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* (Catatan 26).

The Company established a reserve account with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore amounting to JPY29,572,853,747 and USD54,581,139 as at December 31, 2022 (2021: JPY32,606,787,926 and USD51,935,860) to fulfil the requirements of the *Financial Lease Agreement* (Note 26).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/83 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. REKENING BANK DIBATASI PENGGUNAANNYA
(lanjutan)

Jaminan bank garansi merupakan rekening bank yang digunakan untuk jaminan pelaksanaan proyek dan pemberian jasa oleh Grup.

Rincian rekening bank dibatasi penggunaannya dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>		<u>2021</u>		
	<u>Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)</u>	<u>Ekuivalen Rp/ Rp equivalent</u>	<u>Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)</u>	<u>Ekuivalen Rp/ Rp equivalent</u>	
JPY	29,572,853,747	3,488,296	32,606,787,926	4,039,648	JPY
USD	72,115,932	<u>1,125,055</u>	62,503,640	<u>891,865</u>	USD
Jumlah		<u>4,613,351</u>		<u>4,931,513</u>	Total

*) Dalam jumlah penuh

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

11. RESTRICTED CASH IN BANKS (continued)

Bank guarantees represent cash in banks and were used as collateral for projects and services provided by the Group.

Details of restricted cash in banks in foreign currencies are as follows:

*) In full amount

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

12. ASET TIDAK LANCAR LAIN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Properti pertambangan	<u>1,858,369</u>	<u>1,810,266</u>	Mining properties
Uang muka			Advances
Pembelian proyek	1,546,652	1,457,182	Project development
Pembelian batubara	<u>33,833</u>	<u>43,500</u>	Purchase of coal
Subjumlah	<u>1,580,485</u>	<u>1,500,682</u>	Subtotal
Biaya dibayar di muka			Prepayments
Pembelian gas	98,012	127,770	Gas purchased
Lain-lain	<u>169,983</u>	<u>79,306</u>	Others
Subjumlah	<u>267,995</u>	<u>207,076</u>	Subtotal
Aset takberwujud			Intangible assets
Piranti lunak	532,268	566,134	Software
Biaya legal terkait perpanjangan tanah dan hak atas tanah	<u>398,124</u>	<u>133,621</u>	Legal costs for renewal of land rights
Subjumlah	<u>930,392</u>	<u>699,755</u>	Subtotal
Lain-lain	<u>562,218</u>	<u>204,246</u>	Others
Jumlah	<u>5,199,459</u>	<u>4,422,025</u>	Total

Manajemen Grup meyakini bahwa properti pertambangan, uang muka, dan biaya dibayar di muka dapat dipulihkan.

Beban amortisasi aset takberwujud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp370.657 dan Rp217.524 disajikan sebagai beban usaha lain-lain (Catatan 44).

12. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Management of the Group believes that the mining properties, advances, and prepayments are recoverable.

Amortisation of intangible assets for the years ended December 31, 2022 and 2021, amounting to Rp370,657 and Rp217,524 respectively, is presented as part of other operating expenses (Note 44).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/84 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. KAS DAN SETARA KAS

13. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Kas	9,151	8,868	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Entitas yang berelasi dengan			
Pemerintah			Government related entities
BNI			BNI
Rupiah	16,248,331	10,665,609	Rupiah
USD	1,640,073	1,303,639	USD
JPY	85,045	126,208	JPY
EUR	10,523	7,573	EUR
MYR	3,218	3,106	MYR
Bank Mandiri			Bank Mandiri
Rupiah	14,105,086	10,586,554	Rupiah
USD	3,206,199	1,366,973	USD
MYR	88,331	47,329	MYR
JPY	61,154	1,276	JPY
EUR	42,912	32,781	EUR
BRI			BRI
Rupiah	8,142,866	5,828,760	Rupiah
USD	2,233,337	2,157,559	USD
EUR	86,939	272,134	EUR
JPY	17,891	18,799	JPY
Bank Tabungan Negara ("BTN")			Bank Tabungan Negara ("BTN")
Rupiah	750,486	587,275	Rupiah
PT Bank DKI ("Bank DKI")			PT Bank DKI ("Bank DKI")
Rupiah	445,880	132,968	Rupiah
USD	44,624	40,757	USD
JPY	897	942	JPY
Bank Syariah Indonesia ("BSI")			Bank Syariah Indonesia ("BSI")
Rupiah	<u>608,292</u>	<u>176,279</u>	Rupiah
Subjumlah	47,822,084	33,356,521	Subtotal
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	<u>(15)</u>	<u>(40)</u>	Allowance for expected credit losses
Jumlah entitas yang berelasi dengan Pemerintah	<u>47,822,069</u>	<u>33,356,481</u>	Total Government related entities
Pihak ketiga			Third parties
Bank Bukopin			Bank Bukopin
JPY	35,171	37,046	JPY
Rupiah	11,238	29,065	Rupiah
USD	7,523	9,497	USD
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")			PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")
Rupiah	441,546	252,514	Rupiah
PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank OCBC NISP")			PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank OCBC NISP")
Rupiah	298,861	280,943	Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")			PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
Rupiah	170,344	101,452	Rupiah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank Maybank Indonesia") (dahulu Bank Internasional Indonesia)			PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank Maybank Indonesia") (formerly Bank Internasional Indonesia)
Rupiah	29,699	1,145	Rupiah
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			Others (each below 5% of total)
USD	931,601	1,156,376	USD
Rupiah	169,087	153,154	Rupiah
Dinar	52,816	8	Dinar
EUR	<u>7,993</u>	<u>18,134</u>	EUR
Subjumlah	2,155,879	2,039,334	Subtotal
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	<u>(1)</u>	<u>(2)</u>	Allowance for expected credit losses
Jumlah pihak ketiga	<u>2,155,878</u>	<u>2,039,332</u>	Total third parties
Jumlah kas dan bank	<u>49,987,098</u>	<u>35,404,681</u>	Total cash on hand and in banks

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/85 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

13. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	2022	2021	
Setara kas - deposito berjangka			<i>Cash equivalents - time deposits</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
BNI			<i>BNI</i>
Rupiah	173,955	802,670	<i>Rupiah</i>
USD	268,244	159,869	<i>USD</i>
BRI			<i>BRI</i>
Rupiah	542,600	555,600	<i>Rupiah</i>
USD	16,587	751,700	<i>USD</i>
Bank Mandiri			<i>Bank Mandiri</i>
Rupiah	449,500	122,000	<i>Rupiah</i>
USD	-	76,767	<i>USD</i>
BSI			<i>BSI</i>
Rupiah	55,000	55,000	<i>Rupiah</i>
Jumlah pihak berelasi	1,505,886	2,523,606	<i>Total related parties</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Bank Bukopin			<i>Bank Bukopin</i>
Rupiah	10,000	40,000	<i>Rupiah</i>
Lain-lain			<i>Others</i>
Rupiah	112	112	<i>Rupiah</i>
Jumlah pihak ketiga	10,112	40,112	<i>Total third parties</i>
Jumlah deposito berjangka	1,515,998	2,563,718	<i>Total time deposits</i>
Jumlah	51,503,096	37,968,399	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			<i>Interest rate per annum on time deposits</i>
Rupiah	2.25% - 5.00%	1.90% - 4.75%	<i>Rupiah</i>
USD	0.25% - 3.00%	0.20% - 3.50%	<i>USD</i>
Jangka waktu	1 - 3 Bulan/Months	1 - 3 Bulan/Months	<i>Maturity</i>

Rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of cash and cash equivalents in foreign currencies are as follows:

	2022		2021		
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)	Ekivalen Rp/ Rp equivalent	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)	Ekivalen Rp/ Rp equivalent	
USD	535,414,834	8,348,188	492,195,468	7,023,137	<i>USD</i>
JPY	1,696,886,132	200,158	1,487,378,556	184,271	<i>JPY</i>
EUR	8,933,117	148,367	20,501,330	330,622	<i>EUR</i>
Lain-lain	9,258,917	144,365	3,535,211	50,443	<i>Others</i>
Jumlah		8,841,078		7,588,473	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/86 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI JANGKA PENDEK

14. SHORT-TERM INVESTMENTS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Deposito berjangka			<i>Time deposits</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
BRI			<i>BRI</i>
Rupiah	260,000	260,000	<i>Rupiah</i>
USD	37,527	-	<i>USD</i>
Bank Mandiri			<i>Bank Mandiri</i>
Rupiah	303	103	<i>Rupiah</i>
USD	178,879	-	<i>USD</i>
BNI			<i>BNI</i>
Rupiah	5,116	30,229	<i>Rupiah</i>
USD	31,462	-	<i>USD</i>
Jumlah pihak berelasi	<u>513,287</u>	<u>290,332</u>	<i>Total related parties</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Bank Bukopin			<i>Bank Bukopin</i>
Rupiah	10,000	-	<i>Rupiah</i>
Investasi lain-lain			<i>Other investments</i>
Rupiah	<u>10,045</u>	<u>7,388</u>	<i>Rupiah</i>
Jumlah	<u>533,332</u>	<u>297,720</u>	Total
Tingkat bunga deposito berjangka			<i>Interest rate per annum on</i>
per tahun			<i>time deposits</i>
Rupiah	2.25% - 5.55%	1.90% - 3.00%	<i>Rupiah</i>
USD	0.75% - 3.00%	-	<i>USD</i>
Jangka waktu			<i>Maturity</i>
Rupiah	6 - 12 Bulan	6 - 12 Bulan	<i>Rupiah</i>
	<i>/Months</i>	<i>/Months</i>	
USD	6 - 12 Bulan	-	<i>USD</i>
	<i>/Months</i>	<i>/Months</i>	

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

15. PIUTANG USAHA

15. TRADE RECEIVABLES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak berelasi			Related parties
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah	2,347,650	2,280,440	<i>Government related entities</i>
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	<u>(89,250)</u>	<u>(137,554)</u>	<i>Allowance for expected credit losses</i>
Subjumlah	<u>2,258,400</u>	<u>2,142,886</u>	<i>Subtotal</i>
Pihak ketiga			Third parties
Umum	25,306,846	24,052,028	<i>Public</i>
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI dan POLRI)	<u>662,136</u>	<u>698,113</u>	<i>Tentara Nasional Indonesia and Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI and POLRI)</i>
Subjumlah	25,968,982	24,750,141	<i>Subtotal</i>
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	<u>(3,470,100)</u>	<u>(3,090,641)</u>	<i>Allowance for expected credit losses</i>
Subjumlah	<u>22,498,882</u>	<u>21,659,500</u>	<i>Subtotal</i>
Jumlah, bersih	<u>24,757,282</u>	<u>23,802,386</u>	Total, net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/87 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PIUTANG USAHA (lanjutan)

15. TRADE RECEIVABLES (continued)

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Belum jatuh tempo	23,571,376	21,604,276	Not yet due
Lewat jatuh tempo			Past due
1 s/d 30 hari	334,516	1,024,877	1 to 30 days
31 s/d 60 hari	275,833	163,810	31 to 60 days
61 s/d 360 hari	326,072	585,985	61 to 360 days
Lebih dari 360 hari	<u>3,808,835</u>	<u>3,651,633</u>	More than 360 days
Jumlah	<u>28,316,632</u>	<u>27,030,581</u>	Total

Pergerakan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movement of changes in the allowance for impairment losses is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	3,228,195	3,205,012	Balance at beginning
Penambahan	335,322	24,452	Additions
Penghapusan	<u>(4,167)</u>	<u>(1,269)</u>	Write-off
Saldo akhir	<u>3,559,350</u>	<u>3,228,195</u>	Ending balance

Piutang usaha Perusahaan dan PLN Batam dijamin dengan uang jaminan langganan jika terjadi kegagalan pembayaran (Catatan 34).

The Company and PLN Batam's trade receivables are secured by customer security deposits in case of default (Note 34).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh nilai tercatat piutang usaha berdominasi Rupiah.

As at December 31, 2022 and 2021, all carrying amounts of the Group's trade receivables were dominated in Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2022, sebagian dari piutang usaha sebesar Rp28.316.632 mengalami penurunan nilai dan telah diprovokasi sebesar Rp3.559.350. Piutang usaha yang diturunkan nilainya terutama terkait dengan pelanggan umum yang belum melakukan pembayaran piutang lebih dari tiga bulan.

As at December 31, 2022, some of the trade receivables of Rp28,316,632 were impaired and have been provisioned by Rp3,559,350. The impaired trade receivables mainly relate to public customers who have not paid the receivables for more than three months.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk atas piutang usaha karena Grup memiliki jumlah pelanggan yang besar, tersebar mencakup segmen pasar dan area geografis yang luas di seluruh Indonesia. Kesimpulan ini didukung juga oleh data historis kolektibilitas Grup atas piutang usaha yang baik selama beberapa periode. Oleh karena itu, manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha adalah cukup.

Management believes there is no heightened risk of poor credit quality of trade receivables because the Group has a broad customer base, dispersed across varying market segments and geographic locations throughout Indonesia. This assessment is also supported by the Group's good historical collection rates of trade receivables across the periods. Therefore, management is of the opinion that the allowance for expected credit loss of trade receivables is adequate.

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/88 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2022 AND 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. PIUTANG DARI PEMERINTAH

Piutang dari Pemerintah terdiri atas piutang kompensasi, piutang subsidi listrik dan kekurangan bayar atas stimulus COVID-19 kepada Grup.

16. RECEIVABLES FROM GOVERNMENT

Receivables from Government consists of compensation receivables, electricity subsidy receivables and underpayment of COVID-19 stimulus to the Group.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Piutang kompensasi	16,793,172	24,594,425	<i>Compensation receivables</i>
Piutang subsidi listrik (Catatan 37)	4,677,328	1,974,633	<i>Receivables for electricity subsidy (Note 37)</i>
Dampak nilai waktu uang	-	(147,748)	<i>Time value of money impact</i>
	<u>4,677,328</u>	<u>1,826,885</u>	
Piutang stimulus COVID-19	-	133,581	<i>COVID-19 stimulus receivables</i>
Jumlah	<u>21,470,500</u>	<u>26,554,891</u>	<i>Total</i>
Dikurangi: bagian lancar	<u>18,882,562</u>	<u>8,300,000</u>	<i>Less: current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u>2,587,938</u>	<u>18,254,891</u>	<i>Non-current portion</i>

Piutang kompensasi

Piutang kompensasi merupakan piutang atas pendapatan kompensasi dari Pemerintah yang belum diterima untuk penggantian perbedaan tarif aktual dan tarif yang dihitung oleh Grup. Sejak tahun 2017, Grup selalu menerima keputusan tarif tetap dari Pemerintah. Dengan kata lain, perhitungan yang dilakukan oleh Grup terkait tarif listrik tidak disetujui oleh Kementerian ESDM. Grup diharuskan menggunakan tarif listrik tetap yang sudah disetujui atau tarif aktual.

Compensation receivables

Compensation receivables represents receivables of compensation revenue from the Government which not yet received for the difference between the actual tariffs charged versus the tariffs calculated by the Group. Since 2017, the Group has always accepted the fixed electricity tariff decision from the Government. In other words, the calculation of the electricity tariff proposed by the Group was not approved by the Ministry of ESDM. The Group was required to use a fixed electricity tariff which has been approved or actual tariff.

Berdasarkan surat BPKP No. SP-137/D4/04/2022 tanggal 8 Februari 2022 kepada Menteri Keuangan, disampaikan penggantian biaya pokok penyediaan dalam bentuk kompensasi dari Pemerintah atas kehilangan potensi pendapatan tenaga listrik untuk golongan tarif non-subsidi tahun 2021 sebesar Rp24.594.425. Grup telah menerima pembayaran piutang kompensasi tahun 2021 secara penuh pada tanggal 1 Juli 2022.

Based on letter from BPKP No. SP-137/D4/04/2022 dated February 8, 2022 to the Minister of Finance, the reimbursement for cost of electricity supply in the form of Government compensation for potential loss of electricity income for non-subsidy tariff groups for the year 2021 amounted to Rp24,594,425. The Group has received full payment of the 2021 compensation receivables on July 1, 2022.

Pada tanggal 17 Januari 2023, BPK menyampaikan LHP No. 4/S/IX-XX/01/2023 atas perhitungan kompensasi tahun 2021. Berdasarkan LHP tersebut, nilai dana kompensasi pada tahun 2021 sebesar Rp23.918.440 sehingga terdapat kelebihan penerimaan kompensasi tahun 2021 yang diterima oleh Grup sebesar Rp675.985. Kelebihan penerimaan tersebut dicatat sebagai utang kepada Pemerintah pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 25) dan mengurangi pendapatan kompensasi tahun berjalan.

On January 17, 2023, BPK submitted an LHP No. 4/S/IX-XX/01/2023 for the calculation of compensation in 2021. Based on the LHP, the amount of the compensation in 2021 amounted to Rp23,918,440, so there was an excess of 2021 compensation received by the Group amounting to Rp675,985. The excess compensation is recorded as payable to Government in the consolidated statement of financial position (Note 25) and deducting the compensation income in the current year.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/89 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. PIUTANG DARI PEMERINTAH (lanjutan)

Piutang kompensasi (lanjutan)

Berdasarkan PMK No. 159/PMK.02/2022, Perusahaan mencatat pendapatan dan piutang kompensasi sesuai dengan asersi manajemen dan akan ditetapkan sebagai kebijakan dana kompensasi oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil revidi oleh BPKP. Finalisasi kebijakan dana kompensasi tersebut akan dilakukan berdasarkan LHP BPK. Perbedaan yang timbul dari hasil audit BPK akan mempengaruhi laba rugi pada tahun audit tersebut difinalisasi. Nilai piutang kompensasi pada tanggal 31 Desember 2022 diakui berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang akan direvidi oleh BPKP dan/atau BPK.

Berdasarkan surat BPKP No. PE.12.03/S-196/D4/04/2023 tanggal 17 Februari 2023 kepada Menteri Keuangan, disampaikan penggantian biaya pokok penyediaan dalam bentuk kompensasi dari Pemerintah atas kehilangan potensi pendapatan tenaga listrik untuk golongan tarif non-subsidi tahun 2022 sebesar Rp64.325.806. Grup telah menerima pembayaran kompensasi tahun 2022 sebesar Rp47.532.634 sehingga saldo piutang kompensasi tahun 2022 adalah sebesar Rp16.793.172.

Piutang stimulus COVID-19

Grup telah menerima pembayaran piutang stimulus COVID-19 tahun 2021 secara penuh pada tahun berjalan.

Manajemen berkeyakinan bahwa dampak nilai waktu uang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022 atas piutang dari Pemerintah telah mencukupi.

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

17. PIUTANG LAIN-LAIN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Karyawan	999,945	771,668	Employees
Lain-lain	1,716,894	1,623,926	Others
Jumlah	<u>2,716,839</u>	<u>2,395,594</u>	Total
Dikurangi: bagian lancar	<u>1,368,707</u>	<u>1,249,618</u>	Less: current portion
Bagian tidak lancar	<u>1,348,132</u>	<u>1,145,976</u>	Non-current portion

Piutang karyawan merupakan pinjaman kepemilikan rumah yang pelunasannya dilakukan melalui pemotongan gaji.

Piutang untuk lain-lain sebagian besar terdiri dari piutang dari vendor yang akan dilunasi dengan pembayaran tunai atau pemotongan tagihan vendor.

16. RECEIVABLES FROM GOVERNMENT (continued)

Compensation receivables (continued)

Based on PMK No. 159/PMK.02/2022, the Company records compensation income and receivables in accordance with management estimates and they will be finally determined based on the compensation fund policy by the Minister of Finance based on the results of the review by BPKP. Finalisation of the compensation fund policy will be made based on the LHP of the BPK. Any differences from the audit of BPK will impact profit or loss in the year the audit is finalised. The amount of compensation receivables as at December 31, 2022 was recognised based on management's best estimate which will be reviewed by BPKP and/or BPK.

Based on letter from BPKP No. PE.12.03/S-196/D4/04/2023 dated February 17, 2023 to the Minister of Finance, the reimbursement for cost of electricity supply in the form of Government compensation for potential loss of electricity income for non-subsidy tariff groups for the year 2022 amounts to Rp64,325,806. Group has received payments of 2022 compensation amounting to Rp47,532,634 therefore compensation receivables in 2022 were amounted to Rp16,793,172.

COVID-19 stimulus receivables

The Group has received full payment of the 2021 COVID-19 stimulus receivables during the year.

Management believes that the time value of money impact as at December 31, 2021 and 2022 of receivables from Government are adequate.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

17. OTHER RECEIVABLES

Receivables from employees represent housing loans, which are paid monthly through salary deduction.

Receivables from others mostly consist of receivables from vendors which will be settled through cash repayments or deduction of vendor invoices.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/90 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERSEDIAAN

18. INVENTORIES

	2022	2021	
Batubara, bahan bakar dan pelumas	11,972,336	6,598,383	<i>Coal, fuel and lubricants</i>
Persediaan umum	3,898,455	2,791,735	<i>General supplies</i>
Switchgear dan jaringan	1,008,205	710,475	<i>Switchgear and network</i>
Alat ukur, pembatas dan kontrol	810,853	519,029	<i>Meter recording devices, circuit breaker, and control equipment</i>
Transformator	106,136	59,044	<i>Transformers</i>
Kabel	98,706	55,690	<i>Cables</i>
Biomassa	19,741	-	<i>Biomassa</i>
Jumlah	17,914,432	10,734,356	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai dan persediaan usang	(379,628)	(340,937)	<i>Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence</i>
Jumlah, bersih	17,534,804	10,393,419	Total, net

Pergerakan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai dan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movement of changes in allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence is as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	340,937	114,565	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	38,691	226,372	<i>Additions</i>
Saldo akhir	379,628	340,937	Ending balance

Grup tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan kecuali persediaan batubara di Unit Tanjung Jati B yang diasuransikan kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar JPY3.000.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp353.868 (2021: JPY3.000.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp371.669). Manajemen Grup berpendapat bahwa persediaan tersebut telah diasuransikan secara memadai pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

The Group does not have any insurance to cover the possible losses on inventories except for coal stock in Unit Tanjung Jati B which were insured to PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia against fire and other possible risks with insurance coverage of JPY3,000,000,000 (full amount) or equivalent to Rp353,868 (2021: JPY3,000,000,000 (full amount) or equivalent to Rp371,669). The Group's management believes that the inventories were adequately insured as at December 31, 2022 and 2021.

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp107.920.944 dan Rp82.350.492.

The total amount of inventories recognised as expenses for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp107,920,944 and Rp82,350,492, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan dan persediaan usang.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on the decline in value of inventories and inventory obsolescence.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/91 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. PAJAK DIBAYAR DI MUKA

19. PREPAID TAXES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	1,237,310	2,321,200	
Pajak Penghasilan Badan ("PPH") lebih bayar			Value-Added Tax ("VAT") Overpayment of Corporate Income Tax ("CIT")
PPH Badan			CIT
2022	889,399	-	2022
2021	537,168	537,168	2021
2020	18,554	890,457	2020
2019	210,830	210,830	2019
Lebih bayar PPh			Overpayment of income tax
Pasal 26	678,532	-	Article 26
Bea meterai	45,200	74,935	Stamp duty
Pembayaran di muka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Catatan 47.c)	<u>15,693,765</u>	<u>20,298,544</u>	Prepayments of Tax Assessment Letters for Underpayment (Note 47.c)
Jumlah	19,310,758	24,333,134	Total
Provisi atas ketidakpastian posisi pajak	<u>(4,434,631)</u>	<u>(4,519,237)</u>	Provision against uncertain tax treatment
Jumlah, bersih	<u>14,876,127</u>	<u>19,813,897</u>	Total, net
Dikurangi: bagian lancar	<u>3,524,488</u>	<u>2,701,520</u>	Less: current portion
Bagian tidak lancar	<u>11,351,639</u>	<u>17,112,377</u>	Non-current portion

Pada tahun 2022, PLN menerima surat persetujuan pemindahbukuan kelebihan bayar PPh Pasal 26 sebesar Rp678.532 dari Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") untuk pembayaran pajak di 2023.

In 2022, PLN received a letter of approval for the overpayment of Article 26 PPh amounting to Rp 678,532 from Directorate General of Taxation ("DJP") for tax payments in 2023.

Lihat Catatan 47 untuk informasi mengenai beban pajak penghasilan dan surat ketetapan pajak.

Refer to Note 47 for income tax expense information and tax assessment letters.

20. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

20. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Biaya dibayar di muka			Prepaid expenses
Premi asuransi	53,008	66,665	Insurance
Sewa	<u>27,002</u>	<u>28,015</u>	Rent
Subjumlah	<u>80,010</u>	<u>94,680</u>	Subtotal
Uang muka			Advances
Proyek	288,412	124,155	Projects
Pembelian barang	261,301	120,435	Purchases of goods
Pembelian bahan bakar	356	168,329	Purchases of fuel
Lain-lain	<u>73,479</u>	<u>94,259</u>	Others
Subjumlah	<u>623,548</u>	<u>507,178</u>	Subtotal
Aset kontrak	112,460	207,110	Contract assets
Jumlah	<u>816,018</u>	<u>808,968</u>	Total
Dikurangi: bagian lancar	<u>646,651</u>	<u>808,968</u>	Less: current portion
Bagian tidak lancar	<u>169,367</u>	<u> </u>	Non-current portion

21. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA

21. CAPITAL STOCK AND RETAINED EARNINGS

Modal saham

Capital stock

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

The Company's shares of stock are fully owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan mempunyai modal dasar masing-masing sebesar Rp439.000.000 yang terbagi atas 439.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1 per saham.

As at December 31, 2022 and 2021, the Company has authorised capital amounted to Rp439,000,000, consisting of 439,000,000 shares, with par value of Rp1 per share.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/92 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA (lanjutan)

Modal saham (lanjutan)

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-603/MBU/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") menyetujui penambahan penyertaan modal Pemerintah sebesar 118.704 saham dengan nilai Rp118.704 yang berasal dari pengalihan selisih saham seri B milik Pemerintah di EMI sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp135.460.886 (Catatan 5).

Berdasarkan surat Menteri BUMN S-106/MBU/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui penambahan penyertaan modal Negara sebesar 10.075.210 saham dengan nilai Rp10.075.210 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp145.536.096. Atas persetujuan Penyertaan Modal Negara tersebut, maka penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham (Catatan 22b) direklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor.

Saldo laba

Saldo laba terdiri dari sebagai berikut:

i. Saldo laba yang ditentukan penggunaannya

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

ii. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya masing-masing sebesar Rp99.438.371 dan Rp84.962.218.

Dividen

Berdasarkan hasil keputusan RUPS tahun 2021 No. 0223.K/DIR2022 yang diadakan pada tanggal 27 Juni 2022, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai final untuk tahun 2022 sejumlah Rp750.000. Dividen tunai final tahun 2021 ini telah dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2022.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS tahun 2020 No. 0253.K/DIR2021 yang diadakan pada tanggal 28 Juni 2021, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai final untuk tahun 2020 sejumlah Rp400.000. Dividen tunai final tahun 2020 ini telah dibayarkan pada tanggal 26 Juli 2021.

**21. CAPITAL STOCK AND RETAINED EARNINGS
(continued)**

Capital stock (continued)

Based on letter of the Minister of SOE No. S-603/MBU/08/2021 dated August 20, 2021 the decision of the Minister of SOEs as General Meeting Shareholder ("GMS") approved additional Government equity participation of 118,704 shares amounting to Rp118,704 from the transfer of all series B shares owned by the Government in EMI, thereby increasing the subscribed and paid-in capital to Rp135,460,886 (Note 5).

Based on letter of the Minister of SOE No. S-106/MBU/02/2022 dated February 14, 2022 the decision of the Minister of SOE as the GMS approved additional Government equity participation of 10,075,210 shares for a value of Rp10,075,210, thereby increasing the subscribed and paid-up capital to Rp145,536,096. Following the approval of the Government Participation, the stock subscription from the Government in the issuance process (Note 22b) has therefore been reclassified to subscribed and paid-in capital.

Retained earnings

Retained earnings consists of the following:

i. Appropriated retained earnings

Under Indonesian Limited Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital.

ii. Unappropriated retained earnings

As at December 31, 2022 and December 31, 2021, the balance of the unappropriated retained earnings amounted to Rp99,438,371 and Rp84,962,218, respectively.

Dividends

Based on the decision of the GMS for the year 2021 No. 0223.K/DIR2022 on June 27, 2022, the shareholders agreed to distribute cash dividends from 2021 net income amounting to Rp750,000. This cash dividends for 2021 were paid on July 27, 2022.

Based on the decision of the GMS for the year 2020 No. 0253.K/DIR2021 on June 28, 2021, the shareholders agreed to distribute cash dividends from 2020 net income amounting to Rp400,000. This cash dividends for 2020 were paid on July 26, 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/93 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**22. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM
PROSES PENERBITAN SAHAM**

**22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND STOCK
SUBSCRIPTION FROM GOVERNMENT IN
ISSUANCE PROCESS**

a. Tambahan modal disetor

a. Additional paid-in capital

Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dan aset yang dibukukan dan sebagai akibat keikutsertaan Perusahaan dalam pengampunan pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Additional paid-in capital as at December 31, 2022 consists of the difference in restructuring transactions between entities under common control and the assets booked as a result of the Company's participation in the tax amnesty program with the following details:

	2022	2021	
Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya:			<i>Government's participation, the status of which has not been determined:</i>
Bantuan proyek	-	1,241,253	<i>Project aid</i>
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA")	-	3,904,394	<i>List of Project Fund ("LPF")</i>
Penghapusan bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	-	(70,437)	<i>Write-off of Government's participation the status of which has not been determined</i>
Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham	-	(5,075,210)	<i>Stock subscription from Government in issuance process</i>
Subjumlah	-	-	<i>Subtotal</i>
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(106,753)	(106,753)	<i>Difference in restructuring transactions between entities under common control</i>
Aset pengampunan pajak	141,361	141,361	<i>Tax amnesty assets</i>
Jumlah	34,608	34,608	Total

Bantuan proyek merupakan bantuan luar negeri untuk bidang kelistrikan yang diteruskan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan.

Project aid represents overseas aid for electricity projects, which was channelled by the Government of the Republic of Indonesia to the Company.

DIPA merupakan penerimaan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk proyek kelistrikan melalui Kementerian ESDM.

The LPF represents electricity projects received from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of ESDM.

Jumlah aset yang didonasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia telah dicatat sebagai penambahan aset.

The total amount of assets donated by the Government of the Republic of Indonesia has been recognised as additions of assets.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berasal dari akuisisi EMI oleh Perusahaan dengan harga Rp118.704 sehingga menghasilkan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp106.753 (Catatan 5). Transaksi tersebut telah dicatat Perusahaan menggunakan metode penyatuan kepemilikan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

The difference in restructuring transactions between entities under common control came from the Company's acquisition of EMI at a price of Rp118,704 resulting in a difference in restructuring transactions between entities under common control amounting to Rp106,753 (Note 5). The transaction has been recorded by the Company using the pooling of interest method as required in SFAS No. 38 (Revised 2012), "Business Combination of Entities Under Common Control".

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/94 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**22. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM
PROSES PENERBITAN SAHAM (lanjutan)**

**b. Penyertaan modal negara dalam proses
penerbitan saham**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 tahun 2021, tanggal 10 Agustus 2021, penambahan penyertaan modal Negara secara tunai yang masih dalam proses penerbitan saham adalah sebesar Rp5.000.000.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 103 tahun 2021, tanggal 6 Oktober 2021, penambahan penyertaan modal negara adalah sebesar Rp802.014.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 122 tahun 2021, tanggal 29 Desember 2021, penambahan penyertaan modal negara adalah sebesar Rp4.273.196.

Pada tahun 2022, penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham sebesar Rp10.075.210 telah direklasifikasi sebagai modal saham (lihat Catatan 21).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2022, tanggal 31 Agustus 2022, penambahan penyertaan modal negara secara tunai yang masih dalam proses penerbitan saham adalah sebesar Rp5.000.000.

**22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND STOCK
SUBSCRIPTION FROM GOVERNMENT IN
ISSUANCE PROCESS (continued)**

**b. Stock subscription from Government in
issuance process**

Based on the Government Regulation No. 83 year 2021, dated August 10, 2021, the additions of stock subscription from the Government in cash which is still in the issuance process amounted to Rp5,000,000.

Based on the Government Regulation No. 103 year 2021, dated October 6, 2021, the additions of stock subscription from Government in the issuance process amounted to Rp802,014.

Based on the Government Regulation No. 122 year 2021, dated December 29, 2021, the additions of stock subscription from Government in the issuance process amounted to Rp4,273,196.

In 2022, stock subscription from Government in issuance process amounting to Rp10,075,210 has been reclassified to share capital (see Note 21).

Based on Government Regulation No. 27 year 2022, dated August 31, 2022, the additions of stock subscription from the Government in cash which is still in the issuance process amounted to Rp5,000,000.

23. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan berupa jasa penyambungan dan diakui sepanjang waktu oleh Grup dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	14,011,962	7,262,197	Beginning balance
Penambahan	8,049,010	7,243,202	Additions
Diakui sebagai pendapatan tahun berjalan	<u>(857,468)</u>	<u>(493,437)</u>	Recognised as revenue during the year
Saldo akhir	<u>21,203,504</u>	<u>14,011,962</u>	Ending balance
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>1,143,357</u>	<u>740,906</u>	Less: current portion
Bagian jangka panjang	<u>20,060,147</u>	<u>13,271,056</u>	Long-term portion

Biaya penyambungan diamortisasi sejak tanggal penyambungan sesuai masa estimasi konsumsi pelanggan.

23. DEFERRED REVENUE

This account represents connection fees received from customers and recognised over time by the Group. Details of the deferred revenue are as follows:

Connection fees are amortised starting from the connection date based on the estimated consumption pattern of the customer.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/95 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PENERUSAN PINJAMAN

24. TWO-STEP LOANS

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

This account represents overseas, collateral-free loans of the Government of the Republic of Indonesia which are passed on to the Company to finance its projects. The details of the two-step loans are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Periode/ Period*)</u>
International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")			
USD			
IBRD - 7940 IND - 1238	2,377,127	2,304,997	2011 - 2034
IBRD - 8280 ID - 1256	1,462,789	1,423,012	2014 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	498,787	478,690	2012 - 2035
IBRD - 7905 IND - 1235	244,023	236,619	2010 - 2034
IBRD - 4712 & 7758 IND - 1165	-	139,484	2004 - 2023
Asian Development Bank ("ADB")			
USD			
ADB - 1982 INO - 1170	1,131,614	1,188,897	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	768,615	807,523	2004 - 2027
ADB - 3015 INO - 1255	569,475	558,106	2014 - 2033
ADB - 2619 INO - 1236	503,237	478,480	2010 - 2035
ADB - 3083 INO - 1257	217,872	212,699	2014 - 2033
ADB - 8276 INO - 1258	24,120	23,548	2014 - 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman ("KfW")			
EUR			
KfW F 26180 - 1262	163,421	183,092	2019 - 2029
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)			
JPY			
JICA IP 515 - 1177	3,745,025	4,275,455	2004 - 2034
JICA IP 512 - 1163	3,427,373	3,927,041	2004 - 2033
JICA IP 532 - 1214	2,766,481	1,936,955	2006 - 2048
JICA IP 538 - 1221	2,455,428	2,684,212	2009 - 2047
JICA IP 525 - 1197	1,398,239	1,533,847	2005 - 2045
JICA IP 513 - 1164	1,046,024	1,198,521	2004 - 2033
JICA IP 527 - 1211	862,805	964,674	2007 - 2037
JICA IP 539 - 1222	838,234	941,120	2009 - 2037
JICA IP 560 - 1253	432,090	453,827	2013 - 2053
JICA IP 517 - 1178	401,969	441,827	2004 - 2044
JICA IP 555 - 1231	106,587	124,412	2013 - 2039
JICA IP 561 - 1252	85,154	89,438	2013 - 2053
JICA IP 526 - 1198	58,945	64,662	2005 - 2045
JICA IP 516 - 1196	46,425	51,028	2004 - 2044
JICA IP 572 - 1265	40,974	38,397	2016 - 2055
JICA IP 537 - 1220	5,682	6,379	2009 - 2037
JBIC IP - 1243	-	23,935	2012 - 2022
JBIC - 1250	-	8,745	2013 - 2025
Banque Paribas			
GBP			
Banque Paribas - 1063	-	19,433	1998 - 2022
Kerajaan Belgia/Kingdom of Belgium			
EUR			
Kerajaan Belgia/Kingdom of Belgium - 1185	20,637	21,860	2005 - 2033
Export Finance Australia			
AUD			
Efic Australia - 1071	-	7,461	1997 - 2022
China Exim Bank			
USD			
China Exim Bank - 1261	3,697,100	3,834,515	2015 - 2029
China Exim Bank - 1260	2,513,589	2,628,924	2015 - 2029
China Exim Bank - 1248	872,938	944,118	2013 - 2027

*) Termasuk masa tenggang pembayaran/Include grace periods in terms of payments

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/96 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PENERUSAN PINJAMAN (lanjutan)

24. TWO-STEP LOANS (continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Periode/ Period*)</u>
Agence Francaise de Developpement ("AFD")			
USD			
AFD CID 1024 01B - 1254	309,344	334,567	2013 - 2028
AFD CID 1039 01H - 1259	81,307	87,938	2014 - 2026
AFD CID 1019 01H - 1237	<u>51,626</u>	<u>66,142</u>	2010 - 2035
Jumlah/Total	<u>33,225,056</u>	<u>34,744,580</u>	
Biaya transaksi belum diamortisasi/Unamortised transaction costs	<u>(40,342)</u>	<u>(45,375)</u>	
Jumlah, bersih/Total, net	<u>33,184,714</u>	<u>34,699,205</u>	
Dikurangi/less: bagian jatuh tempo dalam satu tahun/current maturities			
IBRD			
USD			
IBRD - 7940 IND - 1238	148,417	129,572	2011 - 2034
IBRD - 8280 ID - 1256	96,928	84,343	2014 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	28,039	24,311	2012 - 2035
IBRD - 7905 IND - 1235	15,235	13,301	2010 - 2034
IBRD - 4712 & 7758 IND - 1165	-	139,484	2004 - 2023
ADB			
USD			
ADB - 1982 INO - 1170	184,620	153,302	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	125,398	104,126	2004 - 2027
ADB - 3015 INO - 1255	42,423	36,952	2014 - 2033
ADB - 2619 INO - 1236	21,615	17,942	2010 - 2035
ADB - 3083 INO - 1257	15,286	13,315	2014 - 2033
ADB - 8276 INO - 1258	1,692	1,474	2014 - 2033
KfW			
EUR			
KfW F 26180 - 1262	25,142	24,412	2019 - 2029
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)			
JPY			
JICA IP 515 - 1177	325,654	342,036	2004 - 2034
JICA IP 512 - 1163	311,579	327,253	2004 - 2033
JICA IP 532 - 1214	133,336	165	2006 - 2048
JICA IP 538 - 1221	100,222	105,263	2009 - 2047
JICA IP 513 - 1164	95,093	99,877	2004 - 2033
JICA IP 525 - 1197	62,144	65,270	2005 - 2045
JICA IP 539 - 1222	57,809	60,717	2009 - 2037
JICA IP 527 - 1211	55,665	58,465	2007 - 2037
JICA IP 560 - 1253	19,747	-	2013 - 2053
JICA IP 517 - 1178	18,696	19,637	2004 - 2044
JICA IP 561 - 1252	6,682	-	2013 - 2053
JICA IP 526 - 1198	2,620	2,752	2005 - 2045
JICA IP 516 - 1196	2,159	2,268	2004 - 2044
JICA IP 555 - 1231	1,372	23,485	2013 - 2039
JICA IP 537 - 1220	392	412	2009 - 2037
JBIC IP - 1243	-	23,935	2012 - 2022
JBIC - 1250	-	8,745	2013 - 2025
Banque Paribas			
GBP			
Banque Paribas - 1063	-	19,433	1998 - 2022
Kerajaan Belgia/Kingdom of Belgium			
EUR			
Kerajaan Belgia/Kingdom of Belgium - 1185	1,876	1,822	2005 - 2033
Export Finance Australia			
AUD			
Efic Australia - 1071	-	7,461	1997 - 2022

*) Termasuk masa tenggang pembayaran/Include grace periods in terms of payments

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/97 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PENERUSAN PINJAMAN (lanjutan)

24. TWO-STEP LOANS (continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Periode/ Period*)</u>
China Exim Bank			
USD			
China Exim Bank - 1261	492,947	451,119	2015 - 2029
China Exim Bank - 1260	359,084	328,615	2015 - 2029
China Exim Bank - 1248	158,716	145,249	2013 - 2027
AFD			
USD			
AFD CID 1024 01B - 1254	56,244	51,472	2013 - 2028
AFD CID 1019 01F - 1237	20,649	18,898	2010 - 2035
AFD CID 1039 01H - 1259	14,783	13,529	2014 - 2026
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/Current portion	<u>3,002,264</u>	<u>2,920,412</u>	
Bagian jangka panjang/Non-current portion	<u>30,182,450</u>	<u>31,778,793</u>	

*) Termasuk masa tenggang pembayaran/Include grace periods in terms of payments

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Tingkat suku bunga per tahun			<i>Interest rate per annum</i>
USD	0.81% - 6.36%	0.81% - 5.39%	USD
JPY	0.012% - 3.31%	0.01% - 3.36%	JPY
EUR	0.35% - 2.35%	0.35% - 2.35%	EUR
AUD	3.85%	3.85%	AUD
GBP	3.69%	3.84%	GBP

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran dalam perjanjian penerusan pinjaman yang berlaku pada tanggal laporan.

The Company made payments of principal and interest on the two-step loans in accordance with the schedule of payment within the agreements of the two-step loans as at the reporting date.

Rincian saldo penerusan pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of the two-step loans balance in foreign currencies are as follows:

	<u>2022</u>		<u>2021</u>		
	<u>Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)</u>	<u>Ekuivalen Rp/ Rp equivalent</u>	<u>Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)</u>	<u>Ekuivalen Rp/ Rp equivalent</u>	
USD	982,783,614	15,323,563	1,103,669,420	15,748,259	USD
JPY	150,203,772,818	17,717,435	151,461,016,318	18,764,475	JPY
EUR	11,082,057	184,058	12,708,786	204,952	EUR
Lain-lain**)	-	-	1,884,757	26,894	Others **)
Jumlah		<u>33,225,056</u>		<u>34,744,580</u>	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

**) Penerusan pinjaman dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

**) Two-step loans denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/98 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**25. UTANG KEPADA PEMERINTAH DAN LEMBAGA
KEUANGAN PEMERINTAH NON-BANK**

**25. GOVERNMENT AND NON-BANK GOVERNMENT
FINANCIAL INSTITUTION LOANS**

	2022	2021	
PT Sarana Multi Infrastruktur	2,952,823	3,677,754	<i>PT Sarana Multi Infrastruktur</i>
Pengembalian kompensasi (Catatan 16)	675,985	1,202,263	<i>Excess of compensation (Note 16)</i>
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	-	8,423	<i>PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)</i>
	3,628,808	4,888,440	<i>Total</i>
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1,425,985	1,960,686	Less: current portion
Bagian jangka panjang	2,202,823	2,927,754	Long-term portion
Tingkat suku bunga per tahun Rupiah	5.25%	5.25% - 10.5%	<i>Interest rate per annum Rupiah</i>

PT Sarana Multi Infrastruktur

PT Sarana Multi Infrastruktur

	2022	2021	
Pokok pinjaman	3,000,000	3,750,000	<i>Principal</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(4,444)	(6,825)	<i>Unamortised transaction cost</i>
Perbedaan nilai wajar	(42,733)	(65,421)	<i>Fair value difference</i>
	2,952,823	3,677,754	Total

Pada tanggal 13 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah ("PIP") Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp7.500.000, dengan tingkat bunga 5,25% per tahun berjangka waktu 15 tahun.

On December 13, 2011, the Company obtained a soft loan facility from the Government Investment Center ("PIP") under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounting to Rp7,500,000 with an annual interest rate of 5.25% with a 15-year term.

Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengadaan dan penggantian trafo, instalasi perlengkapan transmisi dan distribusi serta investasi lainnya.

This loan was used to finance the procurement and replacement of transformers, the equipment installation of transmission and distribution and also other capital expenditures.

Pada tanggal 23 Desember 2015, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan antara PIP dan PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") yang mengalihkan seluruh hak dan kewajiban PIP kepada SMI pada saat ini maupun pada masa yang akan datang yang meliputi kepentingan dan tanggung jawab dalam perjanjian investasi Perusahaan.

On December 23, 2015, PIP and PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") signed a novation agreement which transfers all current and future rights and obligations of PIP to SMI, including interest and responsibilities in the Company's investment agreement.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

In relation to this loan facility, the Company has complied with the covenants in this agreement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/99 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**25. UTANG KEPADA PEMERINTAH DAN LEMBAGA
KEUANGAN PEMERINTAH NON-BANK (lanjutan)**

PT Sarana Multi Infrastruktur (lanjutan)

Saldo pinjaman yang terutang dari utang kepada Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank ini dibayarkan dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Dibayarkan:		
Dalam satu tahun	750,000	750,000
Pada tahun kedua	750,000	750,000
Pada tahun ketiga	750,000	750,000
Pada tahun keempat	750,000	750,000
Pada tahun kelima dan keenam	-	750,000
Jumlah	<u>3,000,000</u>	<u>3,750,000</u>

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga utang kepada Pemerintah sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan - pembatasan dalam perjanjian utang kepada Pemerintah yang berlaku pada tanggal laporan.

Pengembalian kompensasi

Pada tanggal 7 April 2022, BPK menyampaikan LHP No. 26/S/IX-XX.1/4/2022 atas perhitungan kompensasi tahun 2020. Berdasarkan LHP tersebut, nilai dana kompensasi pada tahun 2020 sebesar Rp16.702.245 sehingga terdapat kelebihan penerimaan kompensasi tahun 2020 yang diterima oleh Grup sebesar Rp1.202.263. Pengembalian atas kelebihan penerimaan tersebut telah dibayarkan oleh Grup secara penuh pada tanggal 29 Juni 2022.

Berdasarkan hasil audit BPK atas kompensasi listrik tahun 2021 sesuai LHP No. 04/S/IX-XX/01/2023 tanggal 17 Januari 2023, terdapat kelebihan penerimaan kompensasi listrik oleh Perusahaan sebesar Rp675.985.

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

26. UTANG SEWA

Akun ini terdiri dari utang Perusahaan kepada PT Central Java Power ("CJP") dalam rangka Perjanjian Sewa Pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 4x660MW Tanjung Jati B Unit A, B, C, D, dan beberapa kontrak sewa sehubungan dengan sewa kompresor gas di berbagai daerah.

**25. GOVERNMENT AND NON-BANK GOVERNMENT
FINANCIAL INSTITUTION LOANS (continued)**

PT Sarana Multi Infrastruktur (continued)

The outstanding balance of this non-bank Government Financial Institution Loans is repayable according to the following schedule:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
			Payable:
			Within one year
			In the second year
			In the third year
			In the fourth year
			In the fifth and sixth years
Jumlah	<u>3,000,000</u>	<u>3,750,000</u>	Total

The Company made payments of principal and interest on Government loans in accordance with the schedule of payments and complied with the restrictions specified within the agreements of Government loans as at the reporting date.

Excess compensation

On April 7, 2022, BPK submitted an LHP No. 26/S/IX-XX.1/4/2022 for the calculation of compensation in 2020. Based on the LHP, the amount of the compensation in 2020 amounted to Rp16,702,245, so there was an excess of 2020 compensation received by the Group amounting to Rp1,202,263. Refund of the excess compensation has been fully paid by the Group on June 29, 2022.

Based on the audit result of BPK regarding electricity compensation for the year 2021 as in LHP No. 04/S/IX-XX/01/2023 dated January 17, 2023, there was excess compensation received by the Company amounting to Rp675,985.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

26. LEASE LIABILITIES

This account represents the Company's liabilities to PT Central Java Power ("CJP") in relation to the Financial Lease Agreement on the acquisition of 4x660MW Tanjung Jati B Units A, B, C, D, and several lease contracts in relation to the leases of the gas compressors at the various locations.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/100 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. UTANG SEWA (lanjutan)

26. LEASE LIABILITIES (continued)

Nilai kini pembayaran minimum atas utang sewa tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The present value of minimum lease payments for such lease liabilities as at December 31, 2022 and 2021 is as follows:

Berdasarkan jatuh tempo

By due date

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			<i>Minimum lease payments due:</i>
Tidak lebih dari satu tahun	5,230,840	5,849,483	<i>Not later than one year</i>
Antara lebih dari satu tahun sampai tiga tahun	3,680,822	6,833,463	<i>Later than one year and not later than three years</i>
Antara lebih dari tiga tahun sampai lima tahun	2,166,817	2,413,091	<i>Later than three years and not later than five years</i>
Lebih dari lima tahun	<u>6,904,222</u>	<u>5,268,722</u>	<i>Later than five years</i>
Jumlah	17,982,701	20,364,759	<i>Total</i>
Dikurangi: bunga	<u>5,120,386</u>	<u>5,322,816</u>	<i>Less: interest</i>
Nilai kini pembayaran sewa masa datang	12,862,315	15,041,943	<i>Present value of future minimum lease payments</i>
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>4,448,363</u>	<u>4,570,040</u>	<i>Less: current portion</i>
Bagian jangka panjang	<u>8,413,952</u>	<u>10,471,903</u>	<i>Long-term portion</i>

Total arus kas keluar untuk seluruh sewa pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.775.560 dan Rp11.286.021.

The total cash outflow for all leases as at December 31, 2022 and 2021 were Rp8,775,560 and Rp11,286,021, respectively.

Berdasarkan pemberi sewa

By lessor

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	754,167	1,116,388	<i>PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</i>
Dana Pensiun PLN	399,553	525,431	<i>Dana Pensiun PLN</i>
PT Djakarta Llyod	<u>103,652</u>	<u>-</u>	<i>PT Djakarta Llyod</i>
Subjumlah	<u>1,257,372</u>	<u>1,641,819</u>	<i>Subtotal</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
CJP	4,600,827	7,789,447	<i>CJP</i>
PT Sulawesi Regas Satu	1,713,985	148,862	<i>PT Sulawesi Regas Satu</i>
PT Gas Benoa Terminal	696,291	1,061,829	<i>PT Gas Benoa Terminal</i>
PT Lumoso	681,698	473,844	<i>PT Lumoso</i>
PT Perta Daya Gas	640,825	793,539	<i>PT Perta Daya Gas</i>
PT Batam Trans Gasindo	593,303	614,531	<i>PT Batam Trans Gasindo</i>
PT Indah Bima Prima	441,017	476,454	<i>PT Indah Bima Prima</i>
PT Sumber Petrindo Perkasa	336,400	421,214	<i>PT Sumber Petrindo Perkasa</i>
PT Bahtera Samudera			<i>PT Bahtera Samudera</i>
Gemilang Line	103,467	-	<i>Gemilang Line</i>
Lain-lain	<u>1,797,130</u>	<u>1,620,404</u>	<i>Others</i>
Subjumlah	<u>11,604,943</u>	<u>13,400,124</u>	<i>Subtotal</i>
Jumlah	<u>12,862,315</u>	<u>15,041,943</u>	<i>Total</i>
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>4,448,363</u>	<u>4,570,040</u>	<i>Less: current portion</i>
Bagian jangka panjang	<u>8,413,952</u>	<u>10,471,903</u>	<i>Long-term portion</i>
Tingkat suku bunga per tahun:			<i>Interest rate per annum:</i>
Rupiah	4.55% - 27.67%	4.76% - 16.84%	<i>Rupiah</i>
USD	13.19%	13.19%	<i>USD</i>
JPY	7.57% - 18.10%	7.57% - 18.10%	<i>JPY</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/101 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. UTANG SEWA (lanjutan)

26. LEASE LIABILITIES (continued)

Berdasarkan pemberi sewa (lanjutan)

By lessor (continued)

Rincian utang sewa dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of the lease liabilities in foreign currencies are as follows:

	<u>2022</u>		<u>2021</u>		
	<u>Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)</u>	<u>Ekuivalen Rp/ Rp equivalent</u>	<u>Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)</u>	<u>Ekuivalen Rp/ Rp equivalent</u>	
JPY	39,004,601,063	4,600,827	62,874,000,998	7,789,447	JPY
USD	38,051,779	593,303	43,067,554	614,531	USD
Jumlah		<u>5,194,130</u>		<u>8,403,978</u>	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

Beban bunga dan keuangan terkait utang sewa pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.806.719 dan Rp4.645.416 (Catatan 45).

Interest expense and financial charges related to lease liabilities for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp3,806,719 and Rp4,645,416, respectively (Note 45).

27. UTANG BANK

27. BANK LOANS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<u>Pinjaman terkait program percepatan</u>			<u>Loans related to fast track program</u>
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
Agen: BNI			Agent: BNI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah:			Government related entities:
- BNI	262,496	349,995	BNI -
- BRI	262,496	349,995	BRI -
- Bank Mandiri	262,496	349,995	Bank Mandiri -
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")	<u>262,496</u>	<u>349,994</u>	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") -
Subjumlah	<u>1,049,984</u>	<u>1,399,979</u>	Subtotal
Agen: Bank DKI			Agent: Bank DKI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah:			Government related entities:
- Bank DKI	451,786	616,071	Bank DKI -
- SMI	157,143	214,286	SMI -
- Bank Jateng	78,571	107,143	Bank Jateng -
- BPD Aceh	39,286	53,571	BPD Aceh -
- Bank Kalteng	39,286	53,571	Bank Kalteng -
- Bank Riau	39,286	53,571	Bank Riau -
- Bank Kalbar	39,286	53,571	Bank Kalbar -
- BPD Bali	<u>29,463</u>	<u>40,179</u>	BPD Bali -
Subjumlah	<u>874,107</u>	<u>1,191,963</u>	Subtotal

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/102 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

	2022	2021	
<u>Pinjaman terkait program percepatan</u> (lanjutan)			<u>Loans related to fast track program</u> (continued)
Pihak ketiga			Third parties
The Export-Import Bank of China ("CEXIM")	742,721	5,404,541	The Export-Import Bank of China ("CEXIM")
Agen: Industrial and Commercial Bank of China ("ICBC")			Agent: Industrial and Commercial Bank of China ("ICBC")
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	1,775,413	2,437,151	Third parties
Agen: Bank of China Limited ("BOC")			Agent: Bank of China Limited ("BOC")
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	-	308,312	Third parties
Subjumlah	2,518,134	8,150,004	Subtotal
Jumlah pinjaman terkait program percepatan	4,442,225	10,741,946	Total loans related to fast track program
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u>			<u>Loans not related to fast track program</u>
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
Agen: BNI			Agent: BNI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BNI	1,699,680	1,699,680	BNI -
- BRI	618,273	618,273	BRI -
- Bank Mandiri	1,390,772	1,390,772	Bank Mandiri -
Subjumlah	3,708,725	3,708,725	Subtotal
Agen: BRI			Agent: BRI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BRI	7,874,173	9,849,899	BRI -
- BRI Agro	20,000	60,000	BRI Agro -
- BNI	1,544,349	1,980,312	BNI -
- Bank Mandiri	5,330,064	6,266,027	Bank Mandiri -
- LPEI	321,429	607,143	LPEI -
- SMI	955,357	1,250,000	SMI -
- BPD Papua	401,786	450,000	BPD Papua -
Pihak ketiga	3,603,278	4,466,027	Third parties
Subjumlah	20,050,436	24,929,408	Subtotal
Agen: Bank Mandiri			Agent: Bank Mandiri
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- Bank Mandiri	5,126,089	3,005,648	Bank Mandiri -
- Bank BNI	1,172,462	-	Bank BNI -
- BRI	571,429	1,170,431	BRI -
- BTN	2,179,297	-	BTN -
- SMI	1,142,858	1,656,645	SMI -
- BPD Papua	-	68,422	BPD Papua -
- Bank BJB	-	22,807	Bank BJB -
- LPEI	285,715	357,143	LPEI -
Pihak ketiga	5,179,299	4,548,256	Third parties
Subjumlah	15,657,149	10,829,352	Subtotal

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/103 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

	2022	2021	
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u> (lanjutan)			<u>Loans not related to fast track program</u> (continued)
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)			Government related entities (continued):
Agen: BSI			Agent: BSI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BSI	2,090,316	1,090,316	BSI -
Pihak ketiga	378,302	178,302	Third parties
Subjumlah	2,468,618	1,268,618	Subtotal
BTN	1,285,714	1,500,000	BTN
LPEI	-	2,000,000	LPEI
Pihak ketiga			Third parties
Agen: Bank CIMB Niaga			Agent: Bank CIMB Niaga
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- SMI	669,643	750,000	SMI -
- BSI	133,929	150,000	BSI -
Pihak ketiga	4,321,428	4,600,000	Third parties
Subjumlah	5,125,000	5,500,000	Subtotal
Agen: Bank Maybank Indonesia			Agent: Bank Maybank Indonesia
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BSI	-	1,285,714	BSI -
- SMI	-	857,143	SMI -
Pihak ketiga	-	1,542,857	Third parties
Subjumlah	-	3,685,714	Subtotal
Bank HSBC Indonesia	1,412,203	1,546,722	Bank HSBC Indonesia
ADB	23,230,636	19,837,591	ADB
Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB")	1,509,825	884,678	Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB")

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/104 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u> (lanjutan)			<u>Loans not related to fast track program</u> (continued)
Pihak ketiga (lanjutan)			Third parties (continued)
Agen: Credit Agricole CIB Paris Sindikasi: Pihak ketiga	2,655,565	2,413,038	Agent: Credit Agricole CIB Paris Syndicated: Third parties
Agen: Bank DBS Indonesia Sindikasi: Pihak ketiga	26,818,240	27,111,100	Agent: DBS Bank Indonesia Syndicated: Third parties
Agen: Export Guarantee and Insurance Corporation ("EGAP") Sindikasi: Pihak ketiga	176,844	182,069	Agent: Export Guarantee and Insurance Corporation ("EGAP") Syndicated: Third parties
Agen: Servizi Assicurativi del Commercio Estero ("SACE") Sindikasi: Pihak ketiga	405,182	442,606	Agent: Servizi Assicurativi del Commercio Estero ("SACE") Syndicated: Third parties
Agen: Korea Exim Bank ("KEXIM") Sindikasi: Pihak ketiga	738,021	759,824	Agent: Korea Exim Bank ("KEXIM") Syndicated: Third parties
International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")	7,248,428	6,971,552	International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")
Islamic Development Bank ("IDB")	3,167,662	2,744,415	Islamic Development Bank ("IDB")
Agen: Japan Bank for International Cooperation ("JBIC") Sindikasi: Pihak ketiga	8,315,112	9,571,639	Agent: Japan Bank for International Cooperation ("JBIC") Syndicated: Third parties
Agen: MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank") Sindikasi: Pihak ketiga	4,828,068	5,515,263	Agent: MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank") Syndicated: Third parties
Agen: Export Development Canada ("EDC") Sindikasi: Pihak ketiga	3,800,550	4,013,156	Agent: Export Development Canada ("EDC") Syndicated: Third parties
Agen: Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") Sindikasi: Entitas yang berelasi dengan Pemerintah - LPEI Pihak ketiga	148,833 7,422,638	-	Agent: Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") Syndicated: Government related entities LPEI - Third parties
Agence Francaise De Developpement ("AFD")	1,047,724	659,177	Agence Francaise De Developpement ("AFD")
Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK")	863,872	869,701	Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK")
Agen: BNP Paribas SA Sindikasi: Pihak ketiga	1,193,184	1,287,301	Agent: BNP Paribas SA Syndicated: Third parties
Agen: Standard Chartered Bank ("SCB") Sindikasi: Pihak ketiga	1,076,737	1,254,602	Agent: Standard Chartered Bank ("SCB") Syndicated: Third parties

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/105 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

	2022	2021	
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u> (lanjutan)			<u>Loans not related to fast track program</u> (continued)
Pihak ketiga (lanjutan)			Third parties (continued)
KfW	3,565,914	1,556,508	KfW
Mizuho Bank	801,926	898,457	Mizuho Bank
Subjumlah	100,427,164	156,165,451	Subtotal
Jumlah pinjaman tidak terkait program percepatan	148,722,806	156,165,451	Total loans not related to fast track program
Jumlah	153,165,031	166,907,397	Total
Biaya transaksi belum diamortisasi	(754,913)	(1,020,988)	Unamortised transaction costs
Jumlah, bersih	152,410,118	165,886,409	Total, net
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun			Less: current maturities
<u>Pinjaman terkait program percepatan</u>			<u>Loans related to fast track program</u>
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
Agen: BNI			Agent: BNI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BNI	87,499	87,499	BNI -
- BRI	87,499	87,499	BRI -
- Bank Mandiri	87,499	87,499	Bank Mandiri -
- LPEI	87,498	87,498	LPEI -
Subjumlah	349,995	349,995	Subtotal
Agen: Bank DKI			Agent: Bank DKI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- Bank DKI	164,286	164,286	Bank DKI -
- SMI	57,142	57,142	SMI -
- Bank Jateng	28,571	28,571	Bank Jateng -
- BPD Aceh	14,286	14,286	BPD Aceh -
- Bank Kalteng	14,286	14,286	Bank Kalteng -
- Bank Riau	14,286	14,286	Bank Riau -
- Bank Kalbar	14,286	14,286	Bank Kalbar -
- BPD Bali	10,714	10,714	BPD Bali -
Subjumlah	317,857	317,857	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
CEXIM	742,721	1,857,354	CEXIM
Agen: ICBC			Agent: ICBC
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	887,707	812,384	Third parties
Agen: BOC			Agent: BOC
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	-	308,311	Third parties
Jumlah pinjaman terkait program percepatan	2,298,280	3,645,901	Total loans related to fast track program

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/106 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

	2022	2021	
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u>			<u>Loans not related to fast track program</u>
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
Agen: BNI			Agent: BNI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BNI	125,275	-	BNI -
- BRI	45,570	-	BRI -
- Bank Mandiri	102,507	-	Bank Mandiri -
Subjumlah	273,352	-	Subtotal
Agen: BRI			Agent: BRI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BRI	1,977,527	1,975,726	BRI -
- BRI Agro	20,000	40,000	BRI Agro -
- BNI	435,963	435,963	BNI -
- Bank Mandiri	1,078,820	935,963	Bank Mandiri -
- LPEI	178,571	285,714	LPEI -
- SMI	250,000	294,643	SMI -
- BPD Papua	64,286	48,214	BPD Papua -
Pihak ketiga	778,821	862,749	Third parties
Subjumlah	4,783,988	4,878,972	Subtotal
Agen: Bank Mandiri			Agent: Bank Mandiri
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- Bank Mandiri	464,285	526,487	Bank Mandiri -
- BRI	142,857	184,325	BRI -
- SMI	285,714	306,448	SMI -
- BPD Papua	-	6,220	BPD Papua -
- Bank BJB	-	2,073	Bank BJB -
- LPEI	71,429	71,429	LPEI -
Pihak ketiga	749,999	822,568	Third parties
Subjumlah	1,714,284	1,919,550	Subtotal
Agen: BSI			Agent: BSI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BSI	145,375	-	BSI -
Pihak ketiga	23,774	-	Third Parties
Subjumlah	169,149	-	Subtotal
BTN	214,286	214,286	BTN
LPEI	-	2,000,000	LPEI

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/107 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

	2022	2021	
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u> (lanjutan)			<u>Loans not related to fast track program</u> (continued)
Pihak ketiga			Third parties
Agen: Bank CIMB Niaga			Agent: Bank CIMB Niaga
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BSI	21,429	16,071	BSI -
- SMI	107,143	80,357	SMI -
Pihak ketiga	371,428	278,571	Third parties
Subjumlah	500,000	374,999	Subtotal
Agen: Bank Maybank Indonesia			Agent: Bank Maybank Indonesia
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BSI	-	214,286	BSI -
- SMI	-	142,857	SMI -
Pihak ketiga	-	257,143	Third parties
Subjumlah	-	614,286	Subtotal
Bank HSBC Indonesia	277,929	254,347	Bank HSBC Indonesia
ADB	1,167,420	838,120	ADB
Agen: Credit Agricole CIB Paris			Agent: Credit Agricole CIB Paris
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	363,813	332,943	Third parties
Agen: Bank DBS Indonesia			Agent: DBS Bank Indonesia
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	6,670,257	2,568,420	Third parties
Agen: EGAP			Agent: EGAP
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	22,106	20,230	Third parties
Agen: SACE			Agent: SACE
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	50,648	49,178	Third parties
Agen: KEXIM			Agent: KEXIM
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	92,253	84,425	Third parties
IBRD	374,193	325,320	IBRD
Agen: JBIC			Agent: JBIC
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	1,123,604	1,249,391	Third parties

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/108 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

	2022	2021	
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u> (lanjutan)			<u>Loans not related to fast track program</u> (continued)
Pihak ketiga (lanjutan)			Third parties (continued)
Agen: MUFG Bank			Agent: MUFG Bank
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	1,714,030	570,760	Third parties
Agen: EDC			Agent: EDC
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	584,700	535,088	Third parties
Agen: SMBC			Agent: SMBC
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- LPEI	148,833	-	LPEI -
Pihak ketiga	6,480,004	5,484,197	Third parties
AFD	76,262	77,240	AFD
BGK	111,854	108,609	BGK
Agen: BNP Paribas SA			Agent: BNP Paribas SA
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	132,576	128,730	Third parties
Agen: SCB			Agent: SCB
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	215,347	209,100	Third parties
KfW	290,334	237,511	KfW
Mizuho Bank	123,373	119,794	Mizuho Bank
Subjumlah	20,019,536	13,193,403	Subtotal
Jumlah pinjaman tidak terkait program percepatan	27,674,595	23,195,496	Total loans not related to fast track program
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	29,972,875	26,841,397	Less: current portion
Bagian jangka panjang	122,437,243	139,045,012	Long-term portion
	2022	2021	
Tingkat suku bunga per tahun			Interest rate per annum
Rupiah	3.30% - 8.06%	3.44% - 6.50%	Rupiah
USD	0.66% - 7.50%	0.66% - 4.41%	USD
JPY	0.60% - 1.74%	0.60% - 1.74%	JPY
EUR	0.28% - 4.27%	0.00% - 2.10%	EUR

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, rincian utang bank dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2022 and 2021, the details of bank loans in foreign currency are as follows:

	2022		2021		
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent	
USD	4,976,089,965	77,587,195	6,020,925,730	85,912,589	USD
EUR	963,714,411	16,005,947	889,320,094	14,341,887	EUR
JPY	79,285,135,954	9,352,157	85,876,011,874	10,639,162	JPY
Jumlah		102,945,299		110,893,638	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/109 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

Pinjaman terkait program percepatan

Loans related to fast track program

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak EPC untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Perpres No. 91 Tahun 2007, pengganti dari Perpres No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

The Company obtained loan facilities from several banks to finance 85% of the value of EPC contracts for its fast track program. These loans are fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Perpres No. 91 Year 2007, which superseded Perpres No. 86 Year 2006, regarding the Grant of Government Guarantee for Construction of a Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is restricted by general rules as described in the loan agreements.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2022 and 2021, the details of such loan facilities are as follows:

No.	Kreditur dan jenis pinjaman/ Creditor and type of loan	Mata uang/ Currency	Fasilitas maksimum/ Maximum facility ^{*)}	Jumlah pinjaman/ Outstanding balance ^{*)}		Pembayaran kembali/ Repayment ^{*)}		Periode pinjaman/ Loan term
				2022	2021	2022	2021	
1	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank of China Limited/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/West Java	Dolar AS/ US Dollar	592	-	-	-	27	27 Mei/May 2008 - 27 Mei/May 2021
2	The Export/ Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/East Java	Dolar AS/ US Dollar	331	24	48	24	24	30 Januari/January 2008 - 21 Juli/July 2023
3	The Export Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten	Dolar AS/ US Dollar	284	24	47	24	24	30 Januari/January 2008 - 21 Juli/July 2023
4	BRI/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	Rupiah	1,606,612	-	-	-	168,276	29 Juli/July 2008 - 29 Juli/July 2021
5	BRI/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/East Java	Rupiah	1,045,924	-	-	-	130,741	29 Juli/July 2008 - 29 Juli/July 2021
6	The Export Import Bank of China/ PLTU Pelabuhan Ratu	Dolar AS/ US Dollar	482	-	163	163	47	4 Mei/May 2009 - 21 Januari/January 2025
7	The Export Import Bank of China/ PLTU NAD	Dolar AS/ US Dollar	124	-	32	32	11	4 Mei/May 2009 - 21 Juli/July 2024
8	Bank of China Limited/ PLTU Teluk Naga	Dolar AS/ US Dollar	455	-	22	22	43	4 Mei/May 2009 - 4 Mei/May 2022
9	The Export Import Bank of China/ PLTU Pacitan	Dolar AS/ US Dollar	293	-	88	88	25	17 Juli/July 2009 - 21 Januari/January 2025
10	China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap	Dolar AS/ US Dollar	625	114	171	57	57	14 Oktober/October 2009 - 2 November 2024
11	China Development Bank/ PLTU Sumbar	Dolar AS/ US Dollar	138	-	-	-	31	14 Oktober/October 2009 - 21 Juni/June 2023
12	Bank of China/ PLTU Tanjung Awar - awar	Dolar AS/ US Dollar	372	-	-	-	71	14 Desember/December 2009 - 14 Desember/December 2022
13	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank DKI/ PLTU Riau Tenayan	Rupiah	2,225,000	874,107	1,191,964	317,857	317,857	12 November 2015 - 12 November 2025
14	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by BNI/ PLTU Kalimantan Timur/East Kalimantan	Rupiah	2,449,963	1,049,984	1,399,978	349,995	349,995	17 Desember/December 2015 - 16 Desember/December 2025

^{*)} Dalam jutaan mata uang asal

^{*)} In million original currency

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<i>Interest rate per annum</i>
Tingkat suku bunga per tahun			<i>Rupiah</i>
Rupiah	4.95% - 7.88%	4.95% - 5.25%	<i>USD</i>
USD	1.29% - 4.14%	0.99% - 2.95%	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/110 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

Pinjaman tidak terkait program percepatan

Loans not related to fast track program

No.	Kreditur dan jenis pinjaman/ Creditor and type of loan	Mata uang/ Currency	Fasilitas maksimum/ Maximum facility ¹⁾	Jumlah pinjaman/ Outstanding balance ²⁾		Pembayaran kembali/ Repayment ³⁾		Periode pinjaman/ Loan term
				2022	2021	2022	2021	
1	Bank Mandiri							
-	Pinjaman Perusahaan 2016/ Corporate Loan 2016	Rupiah	12,000,000	6,857,148	8,571,432	1,714,284	1,714,284	19 Desember/December 2016 - 23 November 2026
-	Pinjaman Perusahaan 2018/ Corporate Loan 2018	Rupiah	9,900,000	-	2,257,920	2,257,920	205,265	21 Agustus/August 2018 - 21 Agustus/August 2023
-	Fasilitas Non Cash Loan/ Non Cash Loan Facility	Rupiah	2,000,000	-	-	-	984,540	4 September 2020 - 22 Juli/July 2021
-	Pinjaman Perusahaan 2020/ Corporate Loan 2020	Rupiah	8,800,000	8,800,000	-	-	-	4 Desember/December 2020 - 23 September 2030
-	Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2022/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2022	Rupiah	1,000,000	-	-	1,000,000	-	23 Agustus/August 2022 - 21 Juni/June 2023
	Subjumlah			15,657,148	10,829,352	4,972,204	2,904,089	Subtotal
2	BRI							
-	Pinjaman Perusahaan 2019/ Corporate Loan 2019	Rupiah	13,250,000	11,830,357	13,250,000	1,419,643	-	23 April 2019 - 23 April 2029
-	Pinjaman Perusahaan 2015/ Corporate Loan 2015	Rupiah	12,000,000	5,142,857	6,857,143	1,714,286	1,714,286	17 Desember/December 2015 - 17 Desember/December 2025
-	Pinjaman Perusahaan 2016/ Corporate Loan 2016	Rupiah	4,402,500	568,198	1,704,595	1,136,397	1,136,397	23 Mei/May 2016 - 23 Mei/May 2023
-	Pinjaman Sindikasi 2018/ Syndicated Loan 2018	Rupiah	4,506,787	1,937,594	2,260,526	322,932	-	14 November 2018 - 14 November 2028
-	Pinjaman Perusahaan 2014/ Corporate Loan 2014	Rupiah	2,000,000	571,429	857,143	285,714	285,714	17 Desember/December 2014 - 17 Desember/December 2024
-	Kredit Modal Kerja 2011/ Working Capital Loan 2011	Rupiah	25,000,000	-	-	500,000	-	21 Juni/June 2022 - 21 Juni/June 2023
	Subjumlah			20,050,435	24,929,407	5,378,972	3,136,397	Subtotal
3	BNI							
-	Pinjaman Perusahaan 2019/ Corporate Loan 2019	Rupiah	5,071,000	3,708,725	3,708,725	-	-	18 Desember/December 2019 - 18 Desember/December 2029
4	BSI							
-	Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2019/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2019	Rupiah	2,846,000	1,268,618	1,268,618	-	-	18 Desember/December 2019 - 18 Desember/December 2029
-	Pinjaman Perusahaan 2020 Corporate Loan 2020	Rupiah	1,200,000	1,200,000	-	-	-	4 Desember/December 2020 - 23 September 2030
	Subjumlah			2,468,618	1,268,618	-	-	Subtotal
5	BTN							
-	Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2019/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2019	Rupiah	1,500,000	1,285,714	1,500,000	214,286	-	24 April 2019 - 24 April 2029
6	BCA							
-	Pinjaman Perusahaan 2017/ Corporate Loan 2017	Rupiah	12,000,000	-	-	-	12,000,000	2 November 2017 - 2 November 2027
-	Pinjaman Perusahaan 2013/ Corporate Loan 2013	Rupiah	7,000,000	-	-	-	3,000,000	23 Desember/December 2013 - 23 Desember/December 2023
-	Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2019/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2019	Rupiah	2,000,000	-	-	2,000,000	-	6 September 2021 - 6 Desember/December 2022
	Subjumlah			-	-	2,000,000	15,000,000	Subtotal
7	Bank Danamon Indonesia							
-	Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2019/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2019	Rupiah	2,000,000	-	-	1,000,000	-	12 Desember/December 2021 - 12 Desember/December 2022
8	Bank Maybank Indonesia							
-	Pinjaman Perusahaan 2017/ Corporate Loan 2017	Rupiah	4,300,000	-	3,685,714	3,685,714	614,286	2 November 2017 - 2 November 2027
-	Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2022/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2022	Rupiah	1,000,000	-	-	1,000,000	-	14 Maret/March 2022 - 14 Maret/March 2023
	Subjumlah			-	3,685,714	4,685,714	614,286	Subtotal
9	Bank CIMB Niaga							
-	Pinjaman Perusahaan 2019/ Corporate Loan 2019	Rupiah	3,500,000	3,125,000	3,500,000	375,000	-	23 April 2019 - 23 April 2029
-	Pinjaman Perusahaan 2021/ Corporate Loan 2021	Rupiah	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	4 Desember/December 2020 - 23 Desember/December 2026
-	Pinjaman Perusahaan 2021 (syariah)/ Corporate Loan 2021 (sharia)	Rupiah	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	4 Desember/December 2020 - 23 Desember/December 2026
	Subjumlah			5,125,000	5,500,000	375,000	-	Subtotal
10	Bank HSBC Indonesia							
-	Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2018/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2018	Rupiah	1,400,000	-	-	1,400,000	1,400,000	22 April 2021 - 30 Juni/June 2023
-	Fasilitas Kredit untuk Tambak Lorok 2018 Credit Facility for Tambak Lorok 2018	Dolar AS/ US Dollar	214	91	108	18	18	19 Februari/February 2018 - 19 Agustus/August 2032
	Subjumlah			91	108	1,400,018	1,400,018	Subtotal
11	Bank DBS Indonesia							
-	Fasilitas Kredit Berjangka 2019/ Term Loan Facilities 2019	Dolar AS/ US Dollar	1,000	720	900	180	-	25 Juni/June 2019 - 25 Juni/June 2024
-	Fasilitas Kredit Berjangka MIGA 2020/ MIGA Term Loan Facilities 2020	Dolar AS/ US Dollar	500	500	500	-	-	23 Desember/December 2020 - 23 Desember/December 2025
-	Fasilitas Kredit Berjangka 2021/ Term Loan Facilities 2021	Dolar AS/ US Dollar	500	500	500	-	-	22 Desember/December 2021 - 22 Desember/December 2026
	Subjumlah			1,720	1,900	180	-	Subtotal
12	MUFG Bank							
-	Fasilitas Kredit Berjangka 2020/ Term Loan Facilities 2020	Yen Jepang/ Japan Yen	33,000	33,000	33,000	-	-	5 Maret/March 2020 - 5 Maret/March 2025
-	Pinjaman Perusahaan 2018/ Corporate Loan 2018	Dolar AS/ US Dollar	100	60	100	40	-	13 Desember/December 2018 - 13 Desember/December 2023
-	Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2022/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2022	Rupiah	1,000,000	-	-	3,000,000	-	6 April 2022 - 6 April 2023
	Subjumlah			33,060	33,100	3,000,040	-	Subtotal
13	SCB							
-	Fasilitas Arun 2013/ Arun Facility 2013	Euro	90	35	42	7	7	11 Desember/December 2013 - 30 September 2027
-	Fasilitas Bangkanai 2013/ Bangkanai Facility 2013	Euro	71	30	35	6	6	23 Desember/December 2013 - 30 September 2027
	Subjumlah			65	77	13	13	Subtotal

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/111 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

**Pinjaman tidak terkait program percepatan
(lanjutan)**

Loans not related to fast track program (continued)

No.	Kreditur dan jenis pinjaman/ Creditor and type of loan	Mata uang/ Currency	Fasilitas maksimum/ Maximum facility ¹⁾	Jumlah pinjaman/ Outstanding balance ²⁾		Pembayaran kembali/ Repayment ³⁾		Periode pinjaman/ Loan term
				2022	2021	2022	2021	
14	AFD - Pinjaman Perusahaan 2015/ Corporate Loan 2015	Euro	71	63	41	-	2	7 Mei/May 2015 - 7 Mei/May 2030
15	KW - Fasilitas Kredit untuk Bangkai Peak/ Credit Facility for Bangkai Peak	Euro	83	47	52	8	8	15 September 2017 - 15 Desember/December 2028
	- Fasilitas Kredit untuk Geothermal Energy Programme Ulumbu & Mataloko 2018/ Credit Facility for Geothermal Energy Programme Ulumbu & Mataloko 2018	Euro	150	1.2	1.2	-	-	11 Oktober/October 2018 - 15 November 2033
	- Fasilitas Kredit untuk Kumbih 03 2017/ Credit Facility for Kumbih 03 2017	Euro	85	0.3	0.6	1	-	15 Desember/December 2017 - 30 Desember/December 2032
	- Fasilitas Kredit untuk Hydropower Programme 2019/ Credit Facility for Hydropower Programme 2019	Euro	295	1.6	0.9	-	-	5 September 2019 - 15 November 2033
	- Fasilitas Kredit untuk Kamojang PP 2015/ Credit Facility for Kamojang PP 2015	Euro	60	-	-	-	0.4	8 Mei/May 2015 - 30 Juni/June 2030
	- Fasilitas Kredit untuk 1000 Pulau Renewable Energi untuk Electrification Program (Nusa Tenggara Timur) Credit Facility for 1000 Islands Renewable Energy for Electrification Program (Nusa Tenggara Timur)	Euro	65	0.4	-	-	1	8 Mei/May 2015 - 30 Juni/June 2030
	- Fasilitas Kredit untuk RBL SNT/ Credit Facility for RBL SNT	Euro	45	35	42	6	3	23 Mei/May 2016 - 30 Juni/June 2028
	- Fasilitas Kredit untuk RBL SNT (KW 29069)/ Credit Facility for RBL SNT (KW 29069)	Euro	255	129	-	-	-	8 Desember/December 2020- 15 Mei/May 2036
	Subjumlah			214.5	96.7	15	12.4	Subtotal
16	ADB - Fasilitas Kredit akses Energi berkelanjutan Di Kawasan Indonesia Timur 2017/ Credit Facility for Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia 2017	Dolar AS/ US Dollar	600	565	548	18	-	10 Oktober/October 2017 - 15 Mei/May 2037
	- Fasilitas Kredit Penguatan Gardu Sumatera 2015/ Credit Facility Grid Strengthening Sumatera 2015	Euro Dolar AS/ US Dollar	575	425 25	457 27	33 2	33 2	4 Desember/December 2015 - 15 September 2035
	- Fasilitas Kredit Penguatan Gardu 2015/ Credit Facility Grid Strengthening 2015	Dolar AS/ US Dollar	25	21	23	2	2	4 Desember/December 2015 - 15 September 2035
	- Fasilitas Kredit akses Energi berkelanjutan Di Kawasan Indonesia Timur 2020 (Tahap II)/ Credit Facility for Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia 2020 (Phase II)	Dolar AS/ US Dollar	600	276	276	-	-	8 Desember/December 2020 - 15 Oktober/October 2040
	- Fasilitas Kredit akses Energi yang berkelanjutan dan Andal – Jawa Barat dan Jawa Tengah/ Credit Facility for Sustainable and Reliable Energy Access Program – Western and Central Java	Dolar AS/ US Dollar	600	150	-	-	-	31 Desember/December 2021 - 15 Oktober/October 2041
	Subjumlah			1.462	1.331	55	37	Subtotal
17	EDC dan Hungarian Export Import Bank Private Limited Company ("HEXIM") - Fasilitas Kredit untuk Batam Mobile Power Plant 2016/ Credit Facility for Batam Mobile Power Plant 2016	Dolar AS/ US Dollar	436	236	272	36	36	2 Desember/December 2016 - 27 Januari/January 2029
	- Fasilitas Kredit untuk Batam Mobile Power Plant 2017/ Credit Facility for Batam Mobile Power Plant 2017	Dolar AS/ US Dollar	14	8	9	1	1	1 Mei/May 2017 - 27 Januari/January 2029
	Subjumlah			244	281	37	37	Subtotal
18	JBIC - Fasilitas Kredit untuk Pembangunan PLTU Jawa 2 Priok 2016/ Credit Facility for Construction of Jawa 2 Priok Steam Electricity Power Plant 2016	Yen Jepang/Japan Yen Dolar AS/ US Dollar	31,763 45	21,563 32	24,210 36	2,647 4	2,647 4	20 Oktober/October 2016 - 30 April 2031
	- Fasilitas Kredit untuk Pembangunan PLTU Lontar 2016/ Credit Facility for Construction of Lontar Steam Electricity Power Plant 2016	Yen Jepang/Japan Yen Dolar AS/ US Dollar	16,430 179	10,731 102	12,071 116	1,369 15	1,369 15	14 Maret/March 2016 - 1 Oktober/October 2031
	- Fasilitas Kredit untuk Pembangunan Fasilitas Muara Karang 2017/ Credit Facility for Construction of Muara Karang Facility 2017	Yen Jepang/Japan Yen Dolar AS/ US Dollar	15,449 37	10,134 26	11,327 29	1,192 3	1,287 3	10 Maret/March 2017 - 29 Mei/May 2031
	- Fasilitas Kredit untuk Pembangunan PLTU Kalselteng 2 2017/ Credit Facility for Construction of Kalselteng 2 Steam Electricity Power Plant 2017	Yen Jepang/Japan Yen Dolar AS/ US Dollar	16,939 89	3,857 23	5,269 30	1,412 7	1,412 7	20 Juni/June 2017 - 15 September 2032
	Subjumlah			46,468	53,088	6,649	6,744	Subtotal
19	IBRD - Fasilitas Kredit untuk Membiayai Power Distribution Development Program 2016/ Credit Facility to Finance Power Distribution Development Program 2016	Dolar AS/ US Dollar	500	465	489	24	11	20 Mei/May 2016 - 15 Maret/March 2036
20	KEKIM - Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTGU Grati 2016/ Credit Facility to Finance PLTGU Grati 2016	Dolar AS/ US Dollar	71	47	53	6	6	24 Juni/June 2016 - 23 Desember/December 2030
21	IDB - Fasilitas Kredit untuk Membiayai Power Grid Enhancement Program 2017/ Credit Facility to Finance Power Grid Enhancement Program 2017	Dolar AS/ US Dollar	330	203	192	-	-	10 Januari/January 2017 - 6 Agustus/August 2023
22	SMBC - Fasilitas Kredit Berjangka 2018/ Term Loan Facilities 2018	Dolar AS/ US Dollar	1,320	420	948	528	372	1 Agustus/August 2018 - 1 Agustus/August 2023
	- Fasilitas Kredit Bilateral 2018/ Bilateral Loan Facilities 2018	Dolar AS/ US Dollar	175	-	-	-	175	18 Desember/December 2018 - 18 Desember/December 2023
	- Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTA Jatigede/ Credit Facility to Finance PLTA Jatigede	Dolar AS/ US Dollar	73	66	49	5	3	30 Maret/March 2017 - 30 Maret/March 2031
	Subjumlah			486	997	533	550	Subtotal

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/112 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

**Pinjaman tidak terkait program percepatan
(lanjutan)**

Loans not related to fast track program (continued)

No.	Kreditur dan jenis pinjaman/ Creditor and type of loan	maksimum/ Mata uang/ Currency	Jumlah pinjaman/ Maximum facility*)	Outstanding balance*)		Pembayaran kembali/ Repayment*)		Periode pinjaman/ Loan term
				2022	2021	2022	2021	
23	Mizuho - Fasilitas Kredit untuk Membiayai Lombok Peaker 2017/ Credit Facility to Finance Lombok Peaker 2017	Euro	74	48	56	7	7	24 Mei/May 2017 - 24 Januari/January 2029
24	Credit Agricole CIB PARIS - Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTGU Muara Tawar 2017/ Credit Facility to Finance PLTGU Muara Tawar 2017	Dolar AS/ US Dollar	280	170	169	23	23	8 November 2017 - 8 Mei/May 2032
25	BNP Paribas SA - Fasilitas Kredit untuk Membiayai Sumbagut 2 Peaker 2018/ Credit Facility to Finance Sumbagut 2 Peaker 2018	Euro	108	72	80	8	8	9 Februari/February 2018 - 9 Oktober/October 2031
26	BGK - Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTU Lombok FTP-2 2018/ Credit Facility to Finance PLTU Lombok FTP-2 2018	Euro	81	52	54	7	3	21 Februari/February 2018 - 28 Februari/February 2033
27	SACE - Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTGU Grati 2016/ Credit Facility to Finance PLTGU Grati 2016	Euro	40	24	27	3	3	24 Juni/June 2016 - 23 Desember/December 2030
28	Exportni Garancni a Pojistovaci Spolecnost ("EGAP") - Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTGU Grati 2016/ Credit Facility to Finance PLTGU Grati 2016	Dolar AS/ US Dollar	17	11	13	1	1	24 Juni/June 2016 - 23 Desember/December 2030
29	AIIB - Fasilitas Kredit untuk Membiayai Proyek Penguatan Distribusi Tenaga Listrik Jawa Timur & Bali 2021/ Credit Facility to Finance East Java & Bali Power Distribution Strengthening Project 2021	Dolar AS/ US Dollar	310	97	62	-	-	10 Februari/February 2021 - 15 Oktober/October 2040
30	LPEI - Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2019/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2019	Rupiah	3,500,000	-	2,000,000	10,000,000	-	20 Desember/December 2022- 20 Desember/December 2023
31	UOB - Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2019/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2019	Rupiah	1,000,000	-	-	2,000,000	-	11 Februari/February 2021- 31 Mei/May 2023
32	Muamalat - Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2022/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2022	Rupiah	1,000,000	-	-	1,000,000	-	21 Februari/February 2022- 21 Februari/February 2023
33	DKI - Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2022/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2022	Rupiah	1,000,000	-	-	500,000	-	28 Maret/March 2022- 28 Maret/March 2023

*) Dalam jutaan mata uang asal

*) In million original currency

	2022	2021	<i>Interest rate per annum</i>
Tingkat suku bunga per tahun			
Rupiah	3.30% - 8.06%	3.44% - 6.50%	Rupiah
USD	0.66% - 7.50%	0.66% - 4.41%	USD
EUR	0.60% - 1.74%	0.00% - 2.10%	EUR
JPY	0.28% - 4.27%	0.60% - 1.74%	JPY

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman bank sesuai dengan jadwal pembayaran dalam perjanjian pinjaman bank yang berlaku pada tanggal laporan.

The Company has made payments of principal and interest on the bank loans in accordance with the schedule of payment specified within the agreements of the bank loans as at the reporting date.

Selama tahun 2022, Grup melakukan penarikan seluruh pinjaman bank sebesar USD278.749.233 (setara dengan Rp4.337.617), EUR161.232.418 (setara dengan Rp2.601.349), JPY29.030.085 (setara dengan Rp3.492) dan Rp31.400.000 dan (2021: USD1.572.775.584 (setara dengan Rp20.799.901), EUR80.170.215 (setara dengan Rp1.336.102), JPY35.140.128.242 (setara dengan Rp4.559.011) dan Rp8.133.386). Pelunasan lebih awal secara sukarela atas pokok pinjaman selama tahun 2022 adalah sebesar USD242.225.346 (setara dengan Rp3.469.878) dan Rp5.943.634 (2021: USD614.169.282 (setara dengan Rp8.789.966) dan Rp12.400.000).

During 2022, the Group made withdrawals from all bank loans amounting to USD278,749,233 (equivalent to Rp4,337,617), EUR161,232,418 (equivalent to Rp2,601,349), JPY29,030,085 (equivalent to Rp3,492) and Rp31,400,000 (2021: USD1,572,775,584 (equivalent to Rp20,799,901), EUR80,170,215 (equivalent to Rp1,336,102), JPY35,140,128,242 (equivalent to Rp4,559,011) and Rp8,133,386). The voluntary early repayments of the loan principal during 2022 amounted to USD242,225,346 (equivalent to Rp3,469,878) and Rp5,943,634 (2021: USD614,169,282 (equivalent to Rp8,789,966) and Rp12,400,000).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/113 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA 28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA
LOANS**

Obligasi dan sukuk ijarah

Bonds and sukuk ijarah

	2022	2021	
<u>Obligasi dan Sukuk Ijarah Rupiah</u>			<u>Rupiah Bonds and Sukuk Ijarah</u>
Obligasi Berkelanjutan IV			Shelf Registration Bonds IV
PLN Tahap I Tahun 2020	1,500,000	1,500,000	PLN I Year 2020
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV			Shelf Registration Sukuk Ijarah IV
PLN Tahap I Tahun 2020	376,500	376,500	PLN I Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III			Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap VII Tahun 2020	1,737,135	1,737,135	PLN VII Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III			Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap VI Tahun 2020	4,812,430	4,812,430	PLN VI Year 2020
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			Shelf Registration Sukuk Ijarah III
PLN Tahap VI Tahun 2020	115,500	115,500	PLN VI Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III			Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap V Tahun 2019	1,912,900	1,912,900	PLN V Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			Shelf Registration Sukuk Ijarah III
PLN Tahap V Tahun 2019	797,500	797,500	PLN V Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III			Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap IV Tahun 2019	2,953,620	2,953,620	PLN IV Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			Shelf Registration Sukuk Ijarah III
PLN Tahap IV Tahun 2019	1,250,000	1,250,000	PLN IV Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III			Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap III Tahun 2019	2,024,000	2,393,000	PLN III Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			Shelf Registration Sukuk Ijarah III
PLN Tahap III Tahun 2019	600,000	863,000	PLN III Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III			Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap II Tahun 2018	832,000	832,000	PLN II Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			Shelf Registration Sukuk Ijarah III
PLN Tahap II Tahun 2018	224,000	224,000	PLN II Year 2018
Obligasi Berkelanjutan III			Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap I Tahun 2018	1,278,500	1,278,500	PLN I Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			Shelf Registration Sukuk Ijarah III
PLN Tahap I Tahun 2018	750,000	750,000	PLN I Year 2018
Obligasi Berkelanjutan II			Shelf Registration Bonds II
PLN Tahap III Tahun 2018	2,535,000	2,535,000	PLN III Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II			Shelf Registration Sukuk Ijarah II
PLN Tahap III Tahun 2018	698,500	698,500	PLN III Year 2018
Obligasi Berkelanjutan II			Shelf Registration Bonds II
PLN Tahap II Tahun 2017	2,094,000	2,545,500	PLN II Year 2017
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II			Shelf Registration Sukuk Ijarah II
PLN Tahap II Tahun 2017	611,000	694,500	PLN II Year 2017
Obligasi Berkelanjutan II			Shelf Registration Bonds II
PLN Tahap I Tahun 2017	1,386,000	1,600,000	PLN I Year 2017
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II			Shelf Registration Sukuk Ijarah II
PLN Tahap I Tahun 2017	214,000	400,000	PLN I Year 2017
Obligasi Berkelanjutan I			Shelf Registration Bonds I
PLN Tahap II Tahun 2013	651,000	651,000	PLN II Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I			Shelf Registration Sukuk Ijarah I
PLN Tahap II Tahun 2013	108,000	108,000	PLN II Year 2013
Obligasi Berkelanjutan I			Shelf Registration Bonds I
PLN Tahap I Tahun 2013	697,000	697,000	PLN I Year 2013
Obligasi PLN XII Tahun 2010	-	1,855,000	PLN XII Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	-	340,000	Sukuk Ijarah PLN V Year 2010
Obligasi PLN IX Tahun 2007	-	1,200,000	PLN IX Bonds Year 2007

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/114 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK -
EBA (lanjutan)**

**28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA
LOANS (continued)**

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

Bonds and sukuk ijarah (continued)

	2022	2021	
<u>Surat Utang Jangka Menengah Global – USD</u>			<u>Global Medium-term Notes – USD</u>
Penerbitan tahun 2020	23,388,000	21,403,500	Issued in 2020
Penerbitan tahun 2019	37,420,800	34,245,600	Issued in 2019
Penerbitan tahun 2018	46,776,000	42,807,000	Issued in 2018
Penerbitan tahun 2017	31,184,000	28,538,000	Issued in 2017
Penerbitan tahun 2012	15,592,000	14,269,000	Issued in 2012
 <u>Surat Utang Jangka Menengah Global – EUR</u>			 <u>Global Medium-term Notes – EUR</u>
Penerbitan tahun 2019	8,304,300	8,063,400	Issued in 2019
Penerbitan tahun 2018	8,304,300	8,063,400	Issued in 2018
 <u>Obligasi – JPY</u>			 <u>Bonds – JPY</u>
Penerbitan tahun 2019	2,300,142	2,874,243	Issued in 2019
 <u>Obligasi Terjamin – USD</u>			 <u>Guaranteed Notes – USD</u>
Penerbitan tahun 2007	4,495,361	4,113,924	Issued in 2007
Subjumlah	207,923,488	199,498,652	Subtotal
Biaya emisi belum diamortisasi	(6,589,067)	(6,343,617)	Unamortised debt issuance costs
Jumlah	201,334,421	193,155,035	Total
 Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:			 Presented in consolidated statements of financial position:
Liabilitas jangka pendek	2,863,200	5,420,392	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	198,471,221	187,734,643	Non-current liabilities
Jumlah	201,334,421	193,155,035	Total

Obligasi ini diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

The bonds were issued at nominal value and are denominated in Rupiah, with the following details:

	<u>Pokok/ Principal</u>	<u>Periode pinjaman/ Loan term</u>	<u>Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ Coupon rate/ Ijara fee per annum</u>	<u>Periode pembayaran bunga/ Interest payment period</u>	<u>Wali amanat/ Trustee</u>	
Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020						Shelf Registration Bonds IV PLN Phase I Year 2020
Seri A	312,000	8 September 2020 - 8 September 2025	6.70%			Series A
Seri B	28,000	8 September 2020 - 8 September 2027	7.25%			Series B
Seri C	158,000	8 September 2020 - 8 September 2030	7.90%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Seri D	841,000	8 September 2020 - 8 September 2035	8.65%			Series D
Seri E	161,000	8 September 2020 - 8 September 2040	8.86%			Series E
Subtotal	1,500,000					
 Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020						 Shelf Registration Sukuk Ijarah IV PLN Phase I Year 2020
Seri A	39,000	8 September 2020 - 8 September 2025	6.70%			Series A
Seri B	35,000	8 September 2020 - 8 September 2027	7.25%			Series B
Seri C	200,000	8 September 2020 - 8 September 2030	7.90%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Seri D	56,000	8 September 2020 - 8 September 2035	8.65%			Series D
Seri E	46,500	8 September 2020 - 8 September 2040	8.86%			Series E
Subtotal	376,500					

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/115 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

**28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA
LOANS (continued)**

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

Bonds and sukuk ijarah (continued)

	<u>Pokok/ Principal</u>	<u>Periode pinjaman/ Loan term</u>	<u>Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ Coupon rate/ Ijara fee per annum</u>	<u>Periode pembayaran bunga/ Interest payment period</u>	<u>Wali amanat/ Trustee</u>	
						<i>Shelf Registration Bonds III</i>
Obligasi Berkelanjutan III						<i>PLN Phase VII Year 2020</i>
PLN Tahap VII Tahun 2020						<i>Series A</i>
Seri A	316,700	6 Mei/May 2020 - 6 Mei/May 2023	7.92%			
Seri B	99,155	6 Mei/May 2020 - 6 Mei/May 2025	8.25%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series B</i>
Seri C	312,180	6 Mei/May 2020 - 6 Mei/May 2027	8.55%			<i>Series C</i>
Seri D	<u>1,009,100</u>	6 Mei/May 2020 - 6 Mei/May 2030	9.10%			<i>Series D</i>
Subtotal	<u>1,737,135</u>					
						<i>Shelf Registration Bonds III</i>
Obligasi Berkelanjutan III						<i>PLN Phase VI Year 2020</i>
PLN Tahap VI Tahun 2020						<i>Series A</i>
Seri A	540,630	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2025	7.20%			
Seri B	672,500	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2027	7.70%			<i>Series B</i>
Seri C	544,250	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2030	8.00%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series C</i>
Seri D	1,459,000	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2035	8.70%			<i>Series D</i>
Seri E	<u>1,596,050</u>	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2040	9.05%			<i>Series E</i>
Subtotal	<u>4,812,430</u>					
						<i>Shelf Registration Sukuk Ijarah III</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III						<i>PLN Phase VI Year 2020</i>
PLN Tahap VI Tahun 2020						<i>Series A</i>
Seri A	40,500	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2027	7.70%			
Seri B	3,500	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2030	8.00%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series B</i>
Seri C	9,000	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2035	8.70%			<i>Series C</i>
Seri D	<u>62,500</u>	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2040	9.05%			<i>Series D</i>
Subtotal	<u>115,500</u>					
						<i>Shelf Registration Bonds III</i>
Obligasi Berkelanjutan III						<i>PLN Phase V Year 2019</i>
PLN Tahap V Tahun 2019						<i>Series A</i>
Seri A	795,700	1 Oktober/October 2019 - 1 Oktober/October 2024	7.90%			
Seri B	445,000	1 Oktober/October 2019 - 1 Oktober/October 2026	8.40%			<i>Series B</i>
Seri C	6,200	1 Oktober/October 2019 - 1 Oktober/October 2029	8.60%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series C</i>
Seri D	166,000	1 Oktober/October 2019 - 1 Oktober/October 2034	9.40%			<i>Series D</i>
Seri E	<u>500,000</u>	1 Oktober/October 2019 - 1 Oktober/October 2039	9.90%			<i>Series E</i>
Subtotal	<u>1,912,900</u>					
						<i>Shelf Registration Sukuk Ijarah III</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III						<i>PLN Phase V Year 2019</i>
PLN Tahap V Tahun 2019						<i>Series A</i>
Seri A	6,500	1 Oktober/October 2019 - 1 Oktober/October 2024	7.90%			
Seri B	10,000	1 Oktober/October 2019 - 1 Oktober/October 2026	8.40%			<i>Series B</i>
Seri C	92,000	1 Oktober/October 2019 - 1 Oktober/October 2029	8.60%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series C</i>
Seri D	135,000	1 Oktober/October 2019 - 1 Oktober/October 2034	9.40%			<i>Series D</i>
Seri E	<u>554,000</u>	1 Oktober/October 2019 - 1 Oktober/October 2039	9.90%			<i>Series E</i>
Subtotal	<u>797,500</u>					
						<i>Shelf Registration Bonds III</i>
Obligasi Berkelanjutan III						<i>PLN Phase IV Year 2019</i>
PLN Tahap IV Tahun 2019						<i>Series A</i>
Seri A	637,000	1 Agustus/August 2019 - 1 Agustus/August 2024	8.00%			
Seri B	315,250	1 Agustus/August 2019 - 1 Agustus/August 2026	8.50%			<i>Series B</i>
Seri C	549,000	1 Agustus/August 2019 - 1 Agustus/August 2029	8.70%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series C</i>
Seri D	395,000	1 Agustus/August 2019 - 1 Agustus/August 2034	9.50%			<i>Series D</i>
Seri E	<u>1,057,370</u>	1 Agustus/August 2019 - 1 Agustus/August 2039	9.98%			<i>Series E</i>
Subtotal	<u>2,953,620</u>					

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/116 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

**28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA
LOANS (continued)**

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

Bonds and sukuk ijarah (continued)

	Pokok/ Principal	Periode pinjaman/ Loan term	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ Coupon rate/ Ijara fee per annum	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Wali amanat/ Trustee	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019						<i>Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase IV Year 2019</i>
Seri A	274,000	1 Agustus/August 2019 - 1 Agustus/August 2024	8.00%			<i>Series A</i>
Seri B	368,000	1 Agustus/August 2019 - 1 Agustus/August 2026	8.50%			<i>Series B</i>
Seri C	20,000	1 Agustus/August 2019 - 1 Agustus/August 2029	8.70%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series C</i>
Seri D	49,000	1 Agustus/August 2019 - 1 Agustus/August 2034	9.50%			<i>Series D</i>
Seri E	<u>539,000</u>	1 Agustus/August 2019 - 1 Agustus/August 2039	9.98%			<i>Series E</i>
Subtotal	<u>1,250,000</u>					
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019						<i>Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019</i>
Seri B	1,212,000	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2024	9.10%			<i>Series B</i>
Seri C	183,000	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2026	9.35%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series C</i>
Seri D	211,000	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2029	9.60%			<i>Series D</i>
Seri E	263,000	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2034	9.80%			<i>Series E</i>
Seri F	<u>155,000</u>	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2039	9.95%			<i>Series F</i>
Subtotal	<u>2,024,000</u>					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019						<i>Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase III Year 2019</i>
Seri B	263,000	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2024	9.10%			<i>Series B</i>
Seri C	204,000	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2026	9.35%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series C</i>
Seri D	45,000	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2029	9.60%			<i>Series D</i>
Seri E	60,000	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2034	9.80%			<i>Series E</i>
Seri F	<u>28,000</u>	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2039	9.95%			<i>Series F</i>
Subtotal	<u>600,000</u>					
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018						<i>Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Year 2018</i>
Seri A	210,000	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2023	8.65%			<i>Series A</i>
Seri B	483,000	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2025	9.00%			<i>Series B</i>
Seri C	78,000	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2028	9.10%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series C</i>
Seri D	15,000	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2033	9.30%			<i>Series D</i>
Seri E	<u>46,000</u>	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2038	9.65%			<i>Series E</i>
Subtotal	<u>832,000</u>					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018						<i>Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase II Year 2018</i>
Seri A	114,000	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2023	8.65%			<i>Series A</i>
Seri B	45,000	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2025	9.00%			<i>Series B</i>
Seri C	15,000	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2028	9.10%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series C</i>
Seri D	<u>50,000</u>	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2038	9.65%			<i>Series D</i>
Subtotal	<u>224,000</u>					

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/117 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

**28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA
LOANS (continued)**

Bonds and sukuk ijarah (continued)

	Pokok/ <i>Principal</i>	Periode pinjaman/ <i>Loan term</i>	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ <i>Coupon rate/ Ijara fee per annum</i>	Periode pembayaran bunga/ <i>Interest payment period</i>	Wali amanat/ <i>Trustee</i>	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018						<i>Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Year 2018</i>
Seri A	78,500	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2023	7.80%			<i>Series A</i>
Seri B	442,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2025	8.35%			<i>Series B</i>
Seri C	138,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2028	8.40%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series C</i>
Seri D	281,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2033	8.90%			<i>Series D</i>
Seri E	<u>339,000</u>	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2038	9.00%			<i>Series E</i>
Subtotal	<u>1,278,500</u>					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018						<i>Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase I Year 2018</i>
Seri A	127,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2023	7.80%			<i>Series A</i>
Seri B	150,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2025	8.35%			<i>Series B</i>
Seri C	258,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2028	8.40%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series C</i>
Seri D	105,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2033	8.90%			<i>Series D</i>
Seri E	<u>110,000</u>	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2038	9.00%			<i>Series E</i>
Subtotal	<u>750,000</u>					
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018						<i>Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Year 2018</i>
Seri A	457,000	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2023	6.50%			<i>Series A</i>
Seri B	10,000	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2025	6.80%			<i>Series B</i>
Seri C	341,000	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2028	7.25%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series C</i>
Seri D	362,000	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2033	8.20%			<i>Series D</i>
Seri E	<u>1,365,000</u>	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2038	8.75%			<i>Series E</i>
Subtotal	<u>2,535,000</u>					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018						<i>Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN Phase III Year 2018</i>
Seri A	104,000	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2023	6.50%			<i>Series A</i>
Seri B	88,000	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2028	7.25%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series B</i>
Seri C	57,500	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2033	8.20%			<i>Series C</i>
Seri D	<u>449,000</u>	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2038	8.75%			<i>Series D</i>
Subtotal	<u>698,500</u>					
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017						<i>Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Year 2017</i>
Seri B	201,000	3 November 2017 - 3 November 2024	7.50%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series B</i>
Seri C	800,000	3 November 2017 - 3 November 2027	8.20%			<i>Series C</i>
Seri D	<u>1,093,000</u>	3 November 2017 - 3 November 2032	8.70%			<i>Series D</i>
Subtotal	<u>2,094,000</u>					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017						<i>Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN Phase II Year 2017</i>
Seri B	121,000	3 November 2017 - 3 November 2027	8.20%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Series B</i>
Seri C	<u>490,000</u>	3 November 2017 - 3 November 2032	8.70%			<i>Series C</i>
Subtotal	<u>611,000</u>					

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/118 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS (continued)

Bonds and sukuk ijarah (continued)

	<u>Pokok/ Principal</u>	<u>Periode pinjaman/ Loan term</u>	<u>Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ Coupon rate/ Ijara fee per annum</u>	<u>Periode pembayaran bunga/ Interest payment period</u>	<u>Wali amanat/ Trustee</u>	
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 Seri B	169,000	11 Juli/July 2017 - 11 Juli/July 2024	8.10%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Year 2017 Series B</i>
Seri C	<u>1,217,000</u>	11 Juli/July 2017 - 11 Juli/July 2027	8.50%			<i>Series C</i>
Subtotal	<u>1,386,000</u>					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 Seri B	214,000	11 Juli/July 2017 - 11 Juli/July 2027	8.50%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	<i>Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase I Year 2017 Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B	651,000	10 Desember/ December 2013 - 10 Desember/ December 2023	9.60%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Permata	<i>Shelf Registration Bonds I PLN Phase II Year 2013 Series B</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B	108,000	10 Desember/ December 2013 - 10 Desember/ December 2023	9.60%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Permata	<i>Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase II Year 2013 Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri B	697,000	5 Juli/July 2013 - 5 Juli/July 2023	8.25%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Permata	<i>Shelf Registration Bonds I PLN Phase I Year 2013 Series B</i>
Jumlah	<u>30,158,585</u>					Total

Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus, namun dijamin dengan seluruh aset Perusahaan, serta hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.

The bonds are not secured by specific collateral but secured by all of the Company's assets and the bondholders' rights are pari passu without preference to other creditors.

Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk ijarah.

The Company has complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee of the corresponding bonds and sukuk ijarah.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan sukuk ijarah digunakan untuk mendanai proyek transmisi, proyek distribusi, dan modal kerja.

The proceeds from the issuance of bonds payable and sukuk ijarah are used to finance the transmission project, distribution project, and working capital.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/119 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

Rincian peringkat untuk seluruh obligasi dan Sukuk Ijarah yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS (continued)

Bonds and sukuk ijarah (continued)

Rating details on all outstanding bonds and Sukuk Ijarah bonds issued by the Company are as follows:

	2022	
	Peringkat/ Rating	Lembaga pemeringkat Rating agency
Obligasi/Bonds		
Obligasi/Bonds idAAA		
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 <i>Self Registration Bonds I PLN Phase I Year 2013</i>	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 <i>Self Registration Bonds I PLN Phase II Year 2013</i>	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 <i>Self Registration Bonds II PLN Phase I Year 2017</i>	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 <i>Self Registration Bonds II PLN Phase II Year 2017</i>	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 <i>Self Registration Bonds II PLN Phase III Year 2018</i>	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 <i>Self Registration Bonds III PLN Phase I Year 2018</i>	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 <i>Self Registration Bonds III PLN Phase II Year 2018</i>	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 <i>Self Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019</i>	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 <i>Self Registration Bonds III PLN Phase IV Year 2019</i>	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 <i>Self Registration Bonds III PLN Phase V Year 2019</i>	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020 <i>Self Registration Bonds III PLN Phase VI Year 2020</i>	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020 <i>Self Registration Bonds III PLN Phase VII Year 2020</i>	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 <i>Self Registration Bonds IV PLN Phase I Year 2020</i>	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah/Sukuk Ijara idAAA		
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 <i>Self Registration Sukuk Ijara I PLN Phase II Year 2013</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 <i>Self Registration Sukuk Ijara II PLN Phase I Year 2017</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 <i>Self Registration Sukuk Ijara II PLN Phase II Year 2017</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 <i>Self Registration Sukuk Ijara II PLN Phase III Year 2018</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 <i>Self Registration Sukuk Ijara III PLN Phase I Year 2018</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 <i>Self Registration Sukuk Ijara III PLN Phase II Year 2018</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 <i>Self Registration Sukuk Ijara III PLN Phase III Year 2019</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 <i>Self Registration Sukuk Ijara III PLN Phase IV Year 2019</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 <i>Self Registration Sukuk Ijara III PLN Phase V Year 2019</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020 <i>Self Registration Sukuk Ijara III PLN Phase VI Year 2020</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 <i>Self Registration Sukuk Ijara IV PLN Phase I Year 2020</i>	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/120 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS (continued)

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin

Global Medium-term Notes and Guaranteed Notes

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin dalam Dolar Amerika adalah sebagai berikut:

The details of Global Medium-term Notes and Guaranteed Notes in US Dollars are as follows:

	<u>Pokok/ Principal*) USD</u>	<u>Harga penerbitan/ Issuing price</u>	<u>Periode pinjaman/ Loan term</u>	<u>Tingkat bunga/ Interest rate</u>	<u>Wali amanat/ Trustee</u>	
Surat utang jangka menengah						Global medium-term notes
<u>Penerbitan tahun 2020</u>						<u>Issued in 2020</u>
Jatuh tempo 2030	500,000,000	99.15%	30 Juni/June 2020 - 30 Juni/June 2030	3.00%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2030
Jatuh tempo 2050	<u>1,000,000,000</u>	98.28%	30 Juni/June 2020 - 30 Juni/June 2050	4.00%		Due in 2050
Subjumlah	<u>1,500,000,000</u>					Subtotal
<u>Penerbitan tahun 2019</u>						<u>Issued in 2019</u>
Jatuh tempo 2029	700,000,000	99.39%	17 Juli/July 2019 - 17 Juli/July 2029	3.88%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2029
Jatuh tempo 2049	700,000,000	98.83%	17 Juli/July 2019 - 17 Juli/July 2049	4.88%		Due in 2049
Jatuh tempo 2030	500,000,000	99.78%	5 November 2019 - 5 Februari/February 2030	3.38%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2030
Jatuh tempo 2050	<u>500,000,000</u>	99.57%	5 November 2019 - 5 Februari/February 2050	4.38%		Due in 2050
Subjumlah	<u>2,400,000,000</u>					Subtotal
Surat utang jangka menengah						Global medium-term notes
<u>Penerbitan tahun 2018</u>						<u>Issued in 2018</u>
Jatuh tempo 2028	1,000,000,000	99.62%	21 Mei/May 2018 - 21 Mei/May 2028	5.45%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2028
Jatuh tempo 2029	500,000,000	99.00%	25 Oktober/October 2018 - 25 Januari/January 2029	5.38%		Due in 2029
Jatuh tempo 2048	1,000,000,000	99.32%	21 Mei/May 2018 - 21 Mei/May 2048	6.15%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2048
Jatuh tempo 2049	<u>500,000,000</u>	99.29%	25 Oktober/October 2018 - 25 Oktober/October 2049	6.25%		Due in 2049
Subjumlah	<u>3,000,000,000</u>					Subtotal
<u>Penerbitan tahun 2017</u>						<u>Issued in 2017</u>
Jatuh tempo 2027	1,500,000,000	98.99%	15 Mei/May 2017 - 15 Mei/May 2027	4.13%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2027
Jatuh tempo 2047	<u>500,000,000</u>	98.51%	15 Mei/May 2017 - 15 Mei/May 2047	5.25%		Due in 2047
Subjumlah	<u>2,000,000,000</u>					Subtotal
<u>Penerbitan tahun 2012</u>						<u>Issued in 2012</u>
Jatuh tempo 2042	1,000,000,000	98.51%	24 Oktober/October 2012 - 24 Oktober/October 2042	5.25%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2042
Obligasi terjamin						Guaranteed notes
<u>Penerbitan tahun 2007</u>						<u>Issued in 2007</u>
Jatuh tempo 2037	<u>288,312,000</u>	98.59%	28 Juni/June 2007 - 29 Juni/June 2037	7.88%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2037
Jumlah	<u>10,188,312,000</u>					Total

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dalam Euro adalah sebagai berikut:

The details of Global Medium Term Notes in Euro are as follows:

	<u>Pokok/ Principal*) EUR</u>	<u>Harga penerbitan/ Issuing price</u>	<u>Periode pinjaman/ Loan term</u>	<u>Tingkat bunga/ Interest rate</u>	<u>Wali amanat/ Trustee</u>	
Surat utang jangka menengah						Global medium-term notes
<u>Penerbitan tahun 2019</u>						<u>Issued in 2019</u>
Jatuh tempo 2031	500,000,000	99.42%	5 November 2019 - 5 November 2031	1.88%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2031
<u>Penerbitan tahun 2018</u>						<u>Issued in 2018</u>
Jatuh tempo 2025	<u>500,000,000</u>	99.22%	25 Oktober/October 2018 - 25 Oktober/October 2025	2.88%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2025
Jumlah	<u>1,000,000,000</u>					Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/121 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK -
EBA (lanjutan)**

**28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA
LOANS (continued)**

**Surat Utang Jangka Menengah Global dan
Obligasi Terjamin (lanjutan)**

**Global Medium-term Notes and Guaranteed Notes
(continued)**

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dalam Yen Jepang adalah sebagai berikut:

The details of Global Medium Term Notes in Japanese Yen are as follows:

	Pokok/ Principal*) JPY	Harga penerbitan/ Issuing price	Periode pinjaman/ Loan term	Tingkat bunga/ Interest rate	Wali amanat/ Trustee	Global medium- term notes Issued in 2019 Due in 2024
Surat utang jangka menengah Penerbitan tahun 2019						
Jatuh tempo 2024	18,500,000,000	100%	20 September 2019 - 20 September 2024	0.87%	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Due in 2024
Jatuh tempo 2029	<u>1,000,000,000</u>	100%	20 September 2019 - 20 September 2029	1.05%		Due in 2029
Jumlah	<u>19,500,000,000</u>					Total

Perusahaan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat.

The Company complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin ini digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga listrik, konstruksi rutin, dan untuk tujuan umum korporasi.

The proceeds from the Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes issued were used to fund the capital expenditure requirements in connection with the fast track program, regular construction and for general corporate purposes.

Rincian peringkat untuk seluruh surat utang jangka menengah global, obligasi terjamin, dan Japanese Yen bond yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

Rating details on all outstanding global medium term notes, guaranteed notes, and the Japanese Yen bond owned by the Company are as follows:

	Lembaga pemeringkat/Rating agency			
	Moody's Investor Service, Inc.,	Standard and Poor's	Fitch	Japan Credit Rating
Surat utang jangka menengah global/ Global medium term notes				
Penerbitan tahun 2020/Issued in 2020	Baa2	BBB	BBB	n/a
Penerbitan tahun 2019/Issued in 2019	Baa2	BBB	BBB	n/a
Penerbitan tahun 2018/Issued in 2018	Baa2	n/a	BBB	n/a
Penerbitan tahun 2017/Issued in 2017	Baa2	n/a	BBB	n/a
Penerbitan tahun 2012/Issued in 2012	Baa2	BBB	BBB	n/a
Obligasi terjamin/Guaranteed notes				
Penerbitan tahun 2007/Issued in 2007	Baa2	BBB	BBB	n/a
Obligasi dalam Yen Jepang/ Japanese Yen Bond				
Penerbitan tahun 2019/Issued in 2019	Baa2	BBB	n/a	BBB+

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/122 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

Kredit Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (“KIK - EBA”)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu: Tidak lebih dari satu tahun	-	<u>587,288</u>
Jumlah pembayaran minimum	-	587,288
Biaya keuangan	-	<u>(17,710)</u>
Jumlah	-	<u>569,578</u>
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian: Liabilitas jangka pendek	-	<u>569,578</u>
Jumlah	-	<u>569,578</u>

Pada tanggal 25 April 2017, PT Danareksa Investment Management (“DIM”) dan Bank Rakyat Indonesia menandatangani akta perjanjian Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa IP PLN I - Piutang Usaha. Perjanjian tersebut mengalami beberapa kali amandemen, terakhir pada tanggal 14 September 2017. Pada perjanjian tersebut DIM akan bertindak sebagai Manajer Investasi dan BRI akan bertindak sebagai Bank Kustodian.

Pada tanggal 14 September 2017, IP menandatangani perjanjian jual beli piutang usaha No. 206.PJ/061/IP/2017 dengan Perusahaan. Di dalam perjanjian tersebut, IP setuju untuk menjual piutang usaha sebesar Rp4.932.107 dengan harga Rp4.000.000.

Pada tanggal 15 September 2017, DIM bersama dengan BRI melakukan penawaran umum KIK-DIPP1 sebesar Rp4.000.000 dengan tingkat pengembalian pokok dan hasil investasi dilakukan dengan angsuran tetap (“anuitas”) berdasarkan dari nilai investasi dan yield 8,25%.

Pada laporan keuangan konsolidasian, penerimaan kas dari transaksi sekuritisasi tersebut dicatat sebagai utang Kredit Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (“KIK - EBA”).

Semua pembayaran atas KIK - EBA semata-mata bersumber dari Perusahaan atas piutang usaha milik IP yang disekuritisasi.

Pada tanggal 19 September 2022, KIK - EBA tersebut telah dilunasi secara penuh (2021: Rp587.288).

28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS (continued)

Collective Investment Contract of Asset Backed Securities (“KIK - EBA”)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Minimum lease payments due: Not later than one year	-	<u>587,288</u>
Total minimum payments	-	587,288
Finance cost	-	<u>(17,710)</u>
Total	-	<u>569,578</u>
Presented in the consolidated statements of financial position: Current liabilities	-	<u>569,578</u>
Total	-	<u>569,578</u>

On April 25, 2017, PT Danareksa Investment Management (“DIM”) and Bank Rakyat Indonesia signed a deed of Collective Investment Contract Asset Backed Securities Danareksa of IP PLN I - Accounts Receivable. The agreement has been amended several times, the latest on September 14, 2017. Based on the agreement, DIM will act as Investment Manager and BRI will act as Custodian Bank.

On September 14, 2017, IP signed a trade receivable sale and purchase agreement No. 206.PJ/061/IP/2017 with the Company. In this agreement, IP agreed to sell their trade receivables amounted to Rp4,932,107 at a price of Rp4,000,000.

On September 15, 2017, DIM together with BRI initiate a public offering of KIK-DIPP1 amounted to Rp4,000,000 with a principal rate of return and investment proceeds settled with fixed instalments (“annuity”) based on the investment value and 8.25% yield.

In the consolidated financial statements, cash receipts from securitisation transactions were recorded as Collective Investment Credit - Asset Backed Securities (“KIK - EBA”) loans.

All KIK - EBA payments are solely derived from the Company on securitised IP’s trade receivables.

As at September 19, 2022, the payment of the KIK – EBA loan has been fully repaid (2021: Rp587,288).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/123 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. UTANG LISTRIK SWASTA

Akun ini merupakan utang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegosiasi dengan IPP.

Rincian berdasarkan pemasok dan jadwal pembayaran pokok adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemasok

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PT Paiton Energy		
2022: USD352.640.174		
2021: USD382.877.185	5,498,365	5,463,274
PT Jawa Power		
2022: USD47.612.923		
2021: USD49.441.610	<u>742,381</u>	<u>705,482</u>
Jumlah	6,240,746	6,168,756
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>528,890</u>	<u>457,545</u>
Bagian jangka panjang	<u><u>5,711,856</u></u>	<u><u>5,711,211</u></u>

b. Berdasarkan jadwal pembayaran

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Dibayarkan:		
Dalam satu tahun	528,890	457,545
Pada tahun kedua	560,104	484,013
Pada tahun ketiga	593,897	512,578
Pada tahun keempat	630,606	543,504
Setelah lima tahun	<u>3,927,249</u>	<u>4,171,116</u>
Jumlah	<u><u>6,240,746</u></u>	<u><u>6,168,756</u></u>

Utang kepada PT Paiton Energy dan PT Jawa Power dikenakan bunga sebesar 4,81% dan 18,45% yang dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.

29. ELECTRICITY PURCHASE PAYABLES

This account represents electricity purchase payables, which were restructured through renegotiation with the IPPs.

Details according to creditors and payment schedules are as follows:

a. By creditor

PT Paiton Energy
2022: USD352,640,174
2021: USD382,877,185
PT Jawa Power
2022: USD47,612,923
2021: USD49,441,610
<i>Total</i>
Less: current portion
Long-term portion

b. By instalment schedule

<i>Payable:</i>
<i>Within one year</i>
<i>In the second year</i>
<i>In the third year</i>
<i>In the fourth year</i>
<i>After five years</i>

Payables to PT Paiton Energy and PT Jawa Power bear annual interest of 4.81% and 18.45%, and are payable in 360 monthly instalments from January 1, 2002 until December 1, 2031.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/124 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. UTANG USAHA

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa.

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pihak berelasi		
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	10,715,011	14,400,585
Pembelian tenaga listrik	<u>4,497,062</u>	<u>6,166,048</u>
Subjumlah	<u>15,212,073</u>	<u>20,566,633</u>
Pihak ketiga		
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	18,517,634	17,773,195
Pembelian tenaga listrik	<u>17,353,555</u>	<u>9,564,928</u>
Subjumlah	<u>35,871,189</u>	<u>27,338,123</u>
Jumlah	<u><u>51,083,262</u></u>	<u><u>47,904,756</u></u>

Rincian utang usaha dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>		<u>2021</u>		
	<u>Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)</u>	<u>Ekuivalen Rp/ Rp equivalent</u>	<u>Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)</u>	<u>Ekuivalen Rp/ Rp equivalent</u>	
USD	1,339,342,186	20,883,024	1,627,546,149	23,223,456	USD
Lain-lain**)	11,278,625	<u>175,856</u>	13,474,124	<u>192,262</u>	Others**)
Jumlah		<u><u>21,058,880</u></u>		<u><u>23,415,718</u></u>	Total

*) Dalam jumlah penuh

**) Utang usaha dalam mata uang lainnya disajikan dalam jumlah setara USD, menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount

**) Trade payables in other currencies are presented in USD equivalents using the exchange rate prevailing at the reporting date

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

30. TRADE PAYABLES

This account represents payables arising from purchases of electricity, fuel, goods and services.

Details of trade payables are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
			Related parties
			Purchase of fuel, goods and services
			Purchase of electricity
			Subtotal
			Third parties
			Purchase of fuel, goods and services
			Purchase of electricity
			Subtotal
			Total

Details of trade payables in foreign currencies are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/125 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. UTANG LAIN-LAIN

31. OTHER PAYABLES

	2022	2021	
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan			<i>Acquisition of property, plant and equipment and construction in progress</i>
Rupiah	5,519,163	9,411,031	<i>Rupiah</i>
USD	2,133,890	3,666,000	<i>USD</i>
EUR	429,226	833,825	<i>EUR</i>
JPY	316,598	668,684	<i>JPY</i>
Pemerintah daerah	2,317,377	2,188,109	<i>Local government</i>
Uang muka penjualan tenaga listrik	1,464,068	1,362,106	<i>Advances received on sale of electricity</i>
Karyawan	80,568	62,328	<i>Employees</i>
Lain-lain	1,427,269	2,772,801	<i>Others</i>
Jumlah	13,688,159	20,964,884	<i>Total</i>
Dikurangi: bagian jangka pendek	13,016,633	20,498,505	Less: current portion
Bagian jangka panjang	671,526	466,379	Non-current portion

Pemerintah Daerah

Local Government

Utang kepada Pemerintah Daerah merupakan jumlah yang ditagih Perusahaan dari pelanggan untuk pajak penerangan jalan umum. Selanjutnya jumlah yang dipungut akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah.

The payables to Local Government represent the amount collected by the Company from the customers for street lighting taxes. This is subsequently remitted to the respective Local Government.

Uang muka penjualan tenaga listrik

Advances received on sale of electricity

Akun ini merupakan kas yang diterima atas penjualan listrik Prabayar.

This account represents cash received from the sale of prepaid electricity.

Karyawan

Employees

Utang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan di muka atas cicilan penjualan rumah dinas.

Payable to employees mainly represents receipt of advance instalment payments from employees related to house instalments.

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

32. UTANG PAJAK

32. TAXES PAYABLE

	2022	2021	
PPN	1,222,415	952,659	<i>VAT</i>
PPh Badan	347,673	152,683	<i>CIT</i>
Pajak penghasilan			<i>Income taxes</i>
Pasal 21	296,379	307,299	<i>Article 21</i>
Pasal 22	98,080	219,103	<i>Article 22</i>
Pasal 4(2)	135,721	152,605	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 23 dan 26	155,987	208,801	<i>Articles 23 and 26</i>
Pasal 15	28,879	5,163	<i>Article 15</i>
Lain-lain	648	455	<i>Others</i>
Jumlah	2,285,782	1,998,768	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/126 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

33. ACCRUED EXPENSES

	2022	2021	
Bunga dan beban keuangan			Interest and financing charges
<u>Pihak berelasi</u>			<u>Related parties</u>
Utang bank	313,896	206,671	Bank loans
Utang penerusan pinjaman	274,072	253,127	Two-step loans
Jumlah pihak berelasi	587,968	459,798	Total related parties
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Utang obligasi dan sukuk ijarah	2,205,774	2,154,701	Bonds payable and sukuk ijara
Utang bank	974,173	588,555	Bank loans
Utang bunga sewa	676,380	858,823	Lease liability interest
Utang listrik swasta	44,834	33,216	Electricity purchase payables
Jumlah pihak ketiga	3,901,161	3,635,295	Total third parties
Subjumlah	4,489,129	4,095,093	Subtotal
Biaya operasional	2,864,673	2,433,523	Operational charges
Jumlah	7,353,802	6,528,616	Total

Rincian biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of accrued expenses in foreign currencies are as follows:

	2022		2021		
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent	
USD	181,953,030	2,837,012	158,563,272	2,262,539	USD
JPY	6,327,880,061	746,411	7,631,184,204	945,426	JPY
EUR	6,739,621	111,936	6,206,804	100,096	EUR
Lain-lain**)	-	-	15,788	225	Others**)
Jumlah	3,695,359	3,695,359	3,308,286	3,308,286	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

**) Biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing lainnya disajikan setara USD dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

**) Accrued expenses denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

34. UANG JAMINAN LANGGANAN

34. CUSTOMER SECURITY DEPOSITS

Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

This account represents customer security deposits determined based on power supply and electricity tariff. Customer security deposits will be refunded, net of unpaid electricity bills, upon discontinuation of customers' subscriptions.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/127 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. UTANG BIAYA PROYEK

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor atas biaya konstruksi dan pengadaan material. Akun ini akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan *Withdrawal Authorisation* atau dokumen lain yang sejenis.

35. PROJECT COST PAYABLES

This account represents payable to contractors arising from construction expense and purchases of materials. This account will be reclassified into the two-step loans account at the issuance of the Withdrawal Authorisation or other similar documents.

	2022	2021		Project name
Nama proyek				
PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW)	2,073,066	-		PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW)
Lain-lain	23,445	114,546		Others
Jumlah	2,096,511	114,546		Total

36. PENJUALAN TENAGA LISTRIK

Penjualan tenaga listrik berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

36. SALES OF ELECTRICITY

Sales of electricity by customer are as follows:

	2022	2021		Related parties (Note 51)
Pihak berelasi (Catatan 51)				
Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah	20,157,947	17,884,988		Government related entities
Pihak ketiga				Third parties
Umum	289,298,978	269,565,910		Public
TNI dan Polri	1,856,178	1,592,317		TNI and Polri
Subjumlah	291,155,156	271,158,227		Subtotal
Jumlah	311,313,103	289,043,215		Total
Masa uji coba	(255,879)	(180,489)		Commissioning test period
Jumlah, bersih	311,057,224	288,862,726		Total, net

Pendapatan sebesar Rp311.057.224 (2021: Rp288.862.726) diakui sepanjang waktu.

Revenue amounted to Rp311,057,224 (2021: Rp288,862,726) is recognised overtime.

Pengujian dan masa uji coba (*commissioning test*) merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. Beban dan pendapatan atas penjualan tenaga listrik yang terjadi pada masa uji coba dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan dikarenakan instalasi listrik belum beroperasi secara komersial.

Testing and commissioning (commissioning test) are a series of inspection and testing activities for electrical installations that have been completed and are going into operation. The costs and revenues from the sale of electricity that occurred during the commissioning test are capitalised into construction in progress because the electrical installation has not yet been commercially operated.

Penjualan tenaga listrik untuk tahun 2022 dan 2021 didasarkan pada Tarif Dasar Listrik, yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Sales of electricity for the years 2022 and 2021 are based on the Basic Electricity Tariff determined by the Government and Local Government as follows:

- Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 21 Tahun 2017 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN Batam.

- *Regulation of the MoEMR No. 28 Year 2016 most recently amended by Regulation of the MoEMR No. 3 Year 2020.*
- *Regulation of the Governor of Riau Islands No. 21 Year 2017, regarding the tariff of electricity provided by PLN Batam.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/128 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. PENJUALAN TENAGA LISTRIK (lanjutan)

Berdasarkan Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") No. T-162/TL.04/MEM.L/2022 tanggal 2 Juni 2022, perihal penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) periode Juli - September 2022, dinyatakan bahwa terdapat penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) periode Juli - September 2022 untuk golongan pelanggan R-2/TR, R-3/TR, dan Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

	Penyesuaian tarif tenaga listrik/ Electricity tariff adjustment	
	Januari - Juni/ January - June 2022*)	Juli - Desember/ July - December 2022
	R-2/TR	Rp1,444.70/kWh
R-3/TR	Rp1,444.70/kWh	Rp1,699.53/kWh
P-1/TR	Rp1,444.70/kWh	Rp1,699.53/kWh
P-2/TM		
WBP	K x Rp1,035.78/kWh	K x Rp1,415.01/kWh
LWPB	Rp1,035.78/kWh	Rp1,415.01/kWh
kVarh	Rp1,114.74/kVArh	Rp1,522.88/kVArh
P-3/TR	Rp1,444.70/kWh	Rp1,699.53/kWh

*) Penyesuaian tarif tenaga listrik bulan Januari sampai dengan Maret 2022 sesuai surat dari ESDM No. T-548/TL.04/MEM.L/2021 tanggal 30 Desember 2021 sedangkan bulan April sampai dengan Juni 2022 sesuai surat dari ESDM No. T-65/TL.04/MEM.L/2022 tanggal 24 Februari 2022

Tidak terdapat penyesuaian tarif selama 2022 untuk golongan pelanggan non-subsidi lainnya.

Grup tidak memiliki penjualan kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari total pendapatan usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, total penjualan tenaga listrik termasuk penerimaan stimulus COVID-19 dari pemerintah masing-masing adalah sebesar Rp nihil dan Rp9.971.721. Penerimaan stimulus COVID-19 terdiri dari diskon tarif untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri dan pembebasan rekening minimum, biaya beban, dan abonemen.

37. SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah marjin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif yang telah mendapatkan penyesuaian tarif otomatis menurut Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan ke-4 atas Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

36. SALES OF ELECTRICITY (continued)

Based on the letter of the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MoEMR") No. T-162/TL.04/MEM.L/2022 dated June 2, 2022, regarding electricity tariff adjustment for the period July until September 2022, stating electricity tariff adjustment for the period July until September 2022 for the customers segment of R-2/TR, R-3/TR and government class of customers, with detailed as follows:

	Penyesuaian tarif tenaga listrik/ Electricity tariff adjustment	
	Januari - Juni/ January - June 2022*)	Juli - Desember/ July - December 2022
	R-2/TR	Rp1,444.70/kWh
R-3/TR	Rp1,444.70/kWh	Rp1,699.53/kWh
P-1/TR	Rp1,444.70/kWh	Rp1,699.53/kWh
P-2/TM		
WBP	K x Rp1,035.78/kWh	K x Rp1,415.01/kWh
LWPB	Rp1,035.78/kWh	Rp1,415.01/kWh
kVarh	Rp1,114.74/kVArh	Rp1,522.88/kVArh
P-3/TR	Rp1,444.70/kWh	Rp1,699.53/kWh

*) Electricity tariff adjustment for January up to March 2022 based on MoEMR letter No. T-548/TL.04/MEM.L/2021 dated December 31, 2021 while for April up to June 2022 based on MoEMR letter No. T-65/TL.04/MEM.L/2022 dated February 24, 2022

There is no electricity tariff adjustment during 2022 for other non-subsidy customers.

The Group has no single customer from which it generates revenue of more than 10% of total revenue.

For the years ended December 31, 2022 and 2021, the total sales of electricity includes receipts of COVID-19 stimulus from the Government of Indonesia amounting to Rp nil and Rp9,971,721, respectively. COVID-19 stimulus receipts consist of tariff discount for households, business and industrial customers and minimum account exemption, expenses, and subscription fees.

37. GOVERNMENT ELECTRICITY SUBSIDY

Subsidy revenue represents the revenue from the Government of Indonesia for the difference between allowable cost plus 7% margin with actual sales price for each tariff group except for tariff groups which received automatic tariff adjustment based on MoEMR Regulation No. 3 Year 2020 regarding the fourth amendment of MoEMR Regulation No. 28 Year 2016 regarding electricity tariff provided by PT PLN (Persero).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/129 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH (lanjutan)

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perusahaan. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik tahun anggaran 2022 dan 2021 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.02/2021, tanggal 7 Desember 2021. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi biaya pokok penyediaan tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. Biaya pokok penyediaan tenaga listrik dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, di bawah Kementerian ESDM.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") No. SP.DIPA-999.07.1.979321/2022 revisi ke-2 dan SP.DIPA-999.07.1.979321/2021 revisi ke-1, pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2022 dan 2021 ditetapkan masing-masing sebesar Rp56.400.423 dan Rp53.587.310. Pagu tertinggi tersebut termasuk 7% marjin di atas biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketepatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Direktorat Jenderal Anggaran, di bawah Kementerian Keuangan.

Pendapatan subsidi listrik dirinci selama tahun berjalan sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Piutang subsidi listrik per 31 Desember 2021	1,974,633	-
Subsidi listrik (Catatan 51)	58,831,960	49,796,949
Realisasi penerimaan subsidi tahun anggaran berjalan:		
Penerimaan tunai	(56,129,265)	(46,155,349)
Saling hapus dengan kelebihan penerimaan subsidi tahun anggaran sebelumnya	-	(1,666,967)
Piutang subsidi listrik (Catatan 16)	<u>4,677,328</u>	<u>1,974,633</u>

Pada 31 Desember 2020, Perusahaan menerima subsidi listrik melebihi dari yang seharusnya diterima sebesar Rp1.666.967. Pada tahun 2021, jumlah tersebut disalinghapuskan dengan realisasi penerimaan subsidi listrik selama tahun berjalan.

37. GOVERNMENT ELECTRICITY SUBSIDY (continued)

The Government of the Republic of Indonesia provided electricity subsidy to customers through the Company. The procedure for calculation and payment of the electricity subsidy for budget years 2022 and 2021 use Minister of Finance Regulation No. 178/PMK.02/2021, dated December 7, 2021. The electricity subsidy is calculated from the negative difference between the average sales prices (Rp/kWh) of each tariff group less the cost of electricity supplies (Rp/kWh) on the voltage at each tariff group multiplied by the electricity sales volume (kWh) for each tariff group. The cost of electricity supplies is computed based on the formula, which is determined by the Directorate General of Electricity, under the Ministry of ESDM.

Based on Approval Letter of Budget Performance List ("DIPA") No. SP.DIPA-999.07.1.979321/2022 second revision and No. SP.DIPA-999.07.1.979321/2021 first revision, the electricity subsidy ceiling for budget year 2022 and 2021 amounted to Rp56,400,423 and Rp53,587,310, respectively. The ceiling amount includes 7% margin above the costs of electricity supply.

The amount of the electricity subsidy within a budget year is finalised based on the result of the compliance audit of the usage of the electricity subsidy performed by an auditor assigned by the Directorate General of Budget under the Ministry of Finance.

The details of revenue from electricity subsidy during the years are as follows:

Receivables for electricity subsidy as at December 31, 2021
Electricity subsidy (Note 51)

Realisation of subsidy from current year budget:
Cash received
Offset with excess subsidy receipt from prior year budget

Receivables for electricity subsidy (Note 16)

As at December 31, 2020, the Company received electricity subsidy of more than its entitlement, with the excess amounting to Rp1,666,967. In 2021, this amount has been offset with realisation of the electricity subsidy during the current year.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/130 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2022 AND 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. PENDAPATAN USAHA LAIN-LAIN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Penjualan batubara	2,671,192	1,043,968
Jaringan dan jasa telekomunikasi	2,116,327	1,730,517
Jasa pemeliharaan	676,723	459,245
Sewa transformator	447,662	396,300
Perubahan daya tersambung dan administrasi	93,067	58,974
Lain-lain	730,499	737,729
Jumlah	<u>6,735,470</u>	<u>4,426,733</u>

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

38. OTHER REVENUES

*Coal sales
Telecommunication network and services
Maintenance services
Transformer rental*

Upgrading of electricity power and administration fees

Others

Total

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

39. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bahan bakar minyak		
<i>High speed diesel</i>	37,692,501	21,513,624
<i>Fuel marine oil</i>	1,398,709	1,170,788
Lain-lain	238,339	1,518,947
Subjumlah	<u>39,329,549</u>	<u>24,203,359</u>
Bahan bakar - non minyak		
Batubara	63,060,716	52,934,976
Gas alam	43,888,734	37,153,944
Panas bumi	3,951,310	3,507,676
Air	484,303	399,568
Biomassa	372,034	-
Subjumlah	<u>111,757,097</u>	<u>93,996,164</u>
Minyak pelumas	290,080	219,967
Jumlah	<u>151,376,726</u>	<u>118,419,490</u>

Tidak ada pembelian dari pemasok tunggal yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

39. FUEL AND LUBRICANTS EXPENSE

*Fuel oils
High speed diesel
Fuel marine oil
Others*

Subtotal

Non-oil fuels

*Coal
Natural gas
Geothermal
Water
Biomass*

Subtotal

Lubricants

Total

No purchases from a single supplier exceeded 10% of the total revenues.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

40. BEBAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK

Akun ini termasuk pembelian tenaga listrik dari IPP terkait PPA dan ESC, pembelian tenaga listrik selama masa uji coba dan pembelian tenaga listrik dari kelebihan produksi dari IPP tertentu. Rinciannya adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pihak berelasi		
S2P	13,174,952	12,227,323
SGPJB	10,735,441	8,117,710
Lain-lain	8,656,815	7,271,841
Subjumlah	<u>32,567,208</u>	<u>27,616,874</u>
Pihak ketiga		
PT Paiton Energy	14,843,797	13,614,258
PT Jawa Power	8,702,779	8,598,938
PT Bhumi Jati Power	8,571,386	-
PT Bhimasena Power Indonesia	5,990,485	-
Lain-lain	59,554,728	53,723,402
Subjumlah	<u>97,663,175</u>	<u>75,936,598</u>
Jumlah	<u>130,230,383</u>	<u>103,553,472</u>

40. PURCHASED ELECTRICITY

This account includes the purchase of electricity from certain IPPs in relation to PPAs and ESCs, the purchase of electricity during the commissioning stage and the purchase of excess electricity generated by certain IPPs. The details are as follows:

*Related parties
S2P
SGPJB
Others*

Subtotal

Third parties

*PT Paiton Energy
PT Jawa Power
PT Bhumi Jati Power
PT Bhimasena Power Indonesia
Others*

Subtotal

Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/131 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. BEBAN SEWA

41. LEASE EXPENSES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban yang berkaitan dengan sewa dengan pembayaran variabel yang tidak termasuk dalam utang sewa	1,944,734	3,604,647	<i>Expense relating to variable lease payments not included in lease liabilities</i>
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek	709,767	1,079,954	<i>Expense relating to short-term leases</i>
Beban yang berkaitan dengan sewa nilai rendah	<u>138,686</u>	<u>87,413</u>	<i>Expense relating to leases of low value assets</i>
Jumlah	<u>2,793,187</u>	<u>4,772,014</u>	Total

42. BEBAN PEMELIHARAAN

42. MAINTENANCE EXPENSES

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes. The details of maintenance expenses are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Jasa borongan	18,834,155	17,009,231	<i>Contractor fees</i>
Pemakaian material	<u>5,114,543</u>	<u>5,591,543</u>	<i>Spare parts used</i>
Jumlah	<u>23,948,698</u>	<u>22,600,774</u>	Total

43. BEBAN KEPEGAWAIAN

43. PERSONNEL EXPENSES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Jasa produksi dan insentif prestasi kerja	5,862,563	7,019,176	<i>Bonus and performance incentives</i>
Imbalan kerja (Catatan 49)	5,113,530	5,933,357	<i>Employee benefits (Note 49)</i>
Gaji	5,027,228	4,980,766	<i>Salaries</i>
Tunjangan	4,140,250	3,147,401	<i>Allowances</i>
Lain-lain	<u>4,741,289</u>	<u>4,012,056</u>	<i>Others</i>
Jumlah	<u>24,884,860</u>	<u>25,092,756</u>	Total

44. BEBAN USAHA LAIN-LAIN

44. OTHER OPERATING EXPENSES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Honorarium	1,749,018	1,536,915	<i>Honorarium</i>
Pengelolaan pelanggan	1,258,556	1,086,735	<i>Customer maintenance</i>
Pembacaan meter	957,245	809,312	<i>Meter reading</i>
Teknologi informasi	592,287	643,707	<i>Technological information</i>
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 12)	370,657	217,524	<i>Amortisation of intangible assets (Note 12)</i>
Penyisihan/(pemulihan) kerugian kredit ekspektasian piutang	335,322	(458,087)	<i>Allowance/(recoverable) of expected credit losses of receivables</i>
Lain-lain	<u>3,640,228</u>	<u>3,403,242</u>	<i>Others</i>
Jumlah	<u>8,903,313</u>	<u>7,239,348</u>	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/132 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. BEBAN KEUANGAN

45. FINANCE COSTS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak berelasi			Related parties
Utang bank	1,791,930	2,411,989	Bank loans
Penerusan pinjaman	584,725	646,372	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	204,723	249,335	Government loans
Instrumen derivatif *)	<u>(1,151,838)</u>	<u>756,338</u>	Derivative instruments *)
Subjumlah	<u>1,429,540</u>	<u>4,064,034</u>	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
Utang obligasi	7,982,542	8,046,095	Bonds payable
Utang bank	3,153,850	2,801,255	Bank loans
Utang sewa (Catatan 26)	3,806,719	4,645,416	Lease liabilities (Note 26)
Utang listrik swasta	394,409	398,093	Electricity purchase payables
Lain-lain	<u>368,105</u>	<u>420,862</u>	Others
Subjumlah	<u>15,705,625</u>	<u>16,311,721</u>	Subtotal
Jumlah	<u>17,135,165</u>	<u>20,375,755</u>	Total

*) (Pendapatan)/beban keuangan dari transaksi instrumen derivatif.

*) Finance (income)/expense from transaction of derivative instrument.

46. PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH

46. OTHER INCOME/(EXPENSES) - NET

	<u>2022</u>	<u>2021*)</u>	
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama (Catatan 9)	3,675,589	3,231,159	Share in net income of associates and joint ventures (Note 9)
Penghasilan denda administrasi	1,570,412	1,425,978	Administrative penalty income
Kenaikan nilai wajar properti investasi (Catatan 8)	223,354	36,192	Increase in the fair value of investment properties (Note 8)
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi (Catatan 6)	88,898	11,963	Gain on sale of assets not used in operations (Note 6)
Pemulihan/(penyisihan) atas ketidakpastian dalam perlakuan pajak (Catatan 19)	84,606	(4,519,237)	Reversal/(provision) against uncertain tax treatment (Note 19)
Penghasilan jasa dan klaim	43,886	71,915	Claim and service income
Keuntungan dari pembelian dengan diskon atas akuisisi MCTN (Catatan 5)	-	216,381	Gain on bargain purchase of MCTN (Note 5)
Penurunan nilai aset tetap (Catatan 6)	(1,035,990)	(2,508,335)	Provision for impairment of property, plant and equipment (Note 6)
Kerugian penurunan nilai aset tetap tidak digunakan dalam operasi (Catatan 6)	(689,003)	(671,660)	Loss on impairment of assets not used in operations (Note 6)
Program pemberdayaan lingkungan	(452,297)	(371,782)	Community development programs
Beban penelitian	(88,979)	(101,052)	Research expenses
Lain-lain	<u>(578,801)</u>	<u>(540,941)</u>	Others
Jumlah	<u>2,841,675</u>	<u>(3,719,419)</u>	Total

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 58

*) As reclassified, see Note 58

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/133 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PAJAK PENGHASILAN

47. INCOME TAX

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban pajak kini			<i>Current tax</i>
Perusahaan	88,669	117,478	<i>The Company</i>
Entitas anak	<u>983,796</u>	<u>897,257</u>	<i>Subsidiaries</i>
	<u>1,072,465</u>	<u>1,014,735</u>	
Beban pajak tangguhan			<i>Deferred tax expense</i>
Perusahaan	3,440,094	5,716,619	<i>The Company</i>
Entitas anak	<u>2,614,393</u>	<u>3,314,853</u>	<i>Subsidiaries</i>
	<u>6,054,487</u>	<u>9,031,472</u>	
Jumlah beban pajak	<u>7,126,952</u>	<u>10,046,207</u>	<i>Total income tax expense</i>

a. Pajak kini

a. Current tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the consolidated profit before income tax and the estimated taxable income is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	21,541,672	23,221,084	<i>Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laba sebelum pajak entitas anak	(19,434,182)	(16,953,594)	<i>Profit before tax attributable to subsidiaries</i>
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasian	<u>151,064</u>	<u>(106,979)</u>	<i>Adjustment for consolidation elimination entries</i>
Laba sebelum pajak - Perusahaan	2,258,554	6,160,511	<i>Profit before tax - the Company</i>
Koreksi fiskal:			<i>Fiscal correction:</i>
Beban sewa	(1,958,238)	(2,598,722)	<i>Lease expenses</i>
Penyambungan pelanggan	7,072,651	6,605,916	<i>Customer connection fees</i>
Penyusutan aset tetap	(23,456,619)	(23,749,929)	<i>Depreciation of property, plant and equipment</i>
Imbalan kerja	1,249,838	2,233,807	<i>Employee benefits</i>
Penyusutan biaya dikapitalisasi	(1,148,050)	(1,148,050)	<i>Depreciation of capitalised expense</i>
Biaya/(pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			<i>Non-deductible expenses/ (non-taxable income):</i>
Kesejahteraan karyawan	1,087,438	993,659	<i>Employee welfare</i>
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang dan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	148,023	(402,200)	<i>Allowance for expected credit losses of receivables and allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence</i>
Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final	(422,138)	(607,725)	<i>Interest income subjected to final tax</i>
Beban lain tidak dapat dikurangkan	<u>15,571,580</u>	<u>13,046,725</u>	<i>Other non-deductible expenses</i>
Estimasi laba fiskal kena pajak Perusahaan tahun berjalan	<u>403,039</u>	<u>533,992</u>	<i>The Company's taxable income for the year</i>
Beban pajak kini - Perusahaan	<u>88,669</u>	<u>117,478</u>	<i>Current tax - the Company</i>
Beban pajak kini - Entitas anak	<u>983,796</u>	<u>897,257</u>	<i>Current tax - the Subsidiaries</i>
Total beban pajak	<u>1,072,465</u>	<u>1,014,735</u>	<i>Total income tax expenses</i>

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan.

The taxable income resulting from the reconciliation will become the basis for filing the Annual CIT Return.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/134 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

47. INCOME TAX (continued)

b. Pajak tangguhan

b. Deferred tax

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan
Grup adalah sebagai berikut:

The details of the Group deferred tax assets and
liabilities are as follows:

		2022				
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance			
				Deferred tax assets		
Aset pajak tangguhan					<i>Accumulated tax losses</i>	
Akumulasi rugi fiskal	1,019	690	-	1,709	<i>Employee benefit liabilities</i>	
Liabilitas imbalan kerja	95,679	1,845	9,654	107,178	<i>Finance leases</i>	
Sewa pembiayaan	7,002	(556)	-	6,446	<i>Property, plant and equipment</i>	
Aset tetap	17,534	106,658	-	124,192	<i>Provision for impairment losses of receivables</i>	
Penyisihan penurunan nilai piutang	77,400	14,559	-	91,959	<i>Provision for inventories</i>	
Penyisihan persediaan	1,120	27,944	-	29,064	<i>Bonuses</i>	
Bonus	45,489	11,804	-	57,293	<i>Share net income from associates and joint ventures</i>	
Bagian laba bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama	(3)	-	-	(3)	<i>Others</i>	
Lainnya	19,465	(9,855)	-	9,610		
Jumlah	264,705	153,089	9,654	427,448	Total	
				Deferred tax liabilities		
Liabilitas pajak tangguhan					<i>Employee benefit liabilities</i>	
Liabilitas imbalan kerja	11,289,736	305,760	3,447,210	15,042,706	<i>Deferred revenue</i>	
Pendapatan ditangguhkan	3,057,426	1,589,125	-	4,646,551	<i>Finance leases</i>	
Sewa pembiayaan	(3,199,419)	(134,432)	-	(3,333,851)	<i>Property, plant and equipment</i>	
Aset tetap	(56,967,171)	(7,925,748)	(90,720)	(64,983,639)	<i>Bonuses</i>	
Bonus	196,857	(18,701)	-	178,156	<i>Provision for inventories</i>	
Penyisihan persediaan	34,307	1,649	-	35,956	<i>Provision for impairment losses of receivables</i>	
Penyisihan penurunan nilai piutang	41,218	(39,316)	-	1,902	<i>Others</i>	
Lainnya	(29,329)	14,087	-	(15,242)		
Jumlah	(45,576,375)	(6,207,576)	3,356,490	(48,427,461)	Total	
				(6,054,487)	3,366,144	(48,000,013)
		2021				
Saldo awal/ Beginning balance	Penyesuaian tarif pajak/ Adjustment of tax rate	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiaries*)	Saldo akhir/ Ending balance	
				Deferred tax assets		
Aset pajak tangguhan						<i>Accumulated tax losses</i>
Akumulasi rugi fiskal	-	-	1,019	-	1,019	<i>Employee benefit liabilities</i>
Liabilitas imbalan kerja	79,335	-	20,371	(4,746)	719	<i>Finance leases</i>
Sewa pembiayaan	28,021	538	(21,557)	-	7,002	<i>Property, plant and equipment</i>
Aset tetap	24,578	-	(7,044)	-	17,534	<i>Provision for impairment losses of receivables</i>
Penyisihan penurunan nilai piutang	53,082	-	24,318	-	77,400	<i>Provision for inventories</i>
Penyisihan persediaan	-	-	(24,051)	25,171	1,120	<i>Bonuses</i>
Bonus	-	-	74,820	-	(29,331)	<i>Share net income from associates and joint ventures</i>
Bagian laba bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama	10,273	-	(10,276)	-	(3)	<i>Others</i>
Lainnya	-	-	19,465	-	19,465	
Jumlah	195,289	538	77,065	(4,746)	(3,441)	264,705
				Deferred tax liabilities		
Liabilitas pajak tangguhan						<i>Employee benefit liabilities</i>
Liabilitas imbalan kerja	11,520,499	1,024,724	617,055	(1,872,542)	-	11,289,736
Pendapatan ditangguhkan	1,465,884	112,889	1,478,653	-	-	3,057,426
Sewa pembiayaan	(2,594,037)	(223,346)	(382,036)	-	-	(3,199,419)
Aset tetap	(42,363,139)	(3,588,816)	(8,196,389)	(2,818,827)	-	(56,967,171)
Bonus	208,904	-	(12,047)	-	-	196,857
Penyisihan persediaan	12,886	326	21,095	-	-	34,307
Penyisihan penurunan nilai piutang	2,401	(133)	38,950	-	-	41,218
Lainnya	2	-	-	-	-	(29,329)
Jumlah	(31,746,600)	(2,674,356)	(6,434,719)	(4,691,369)	(29,331)	(45,576,375)
				(2,673,818)	(6,357,654)	(4,696,115)
				(32,772)		

*) Penambahan pajak tangguhan dari akuisisi EMI dan MCTN (Catatan 5)

*) Additions of deferred tax from acquisitions of EMI and MCTN (Note 5)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/135 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

47. INCOME TAX (continued)

b. Pajak tangguhan (lanjutan)

b. Deferred tax (continued)

Pajak atas laba sebelum pajak konsolidasian berbeda dengan jumlah teoritis yang dihitung menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas laba/(rugi) masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on the consolidated profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable of profit/(loss) of the consolidated subsidiaries as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan komprehensif konsolidasian	21,541,672	23,221,084	<i>Profit before income tax per consolidated statements of comprehensive income</i>
Beban pajak sesuai tarif pajak yang berlaku yaitu 22%	4,739,168	5,108,638	<i>Tax expense at prevailing tax rate of 22%</i>
Pengaruh pajak atas:			<i>Tax effect of:</i>
Biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak			<i>Non-deductible expenses</i>
Kesejahteraan karyawan	303,696	313,800	<i>Employee welfare</i>
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(808,630)	(797,915)	<i>Share in net income of associates and joint ventures</i>
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(105,102)	(154,775)	<i>Interest income subject to final tax</i>
Revaluasi aset	49,138	796,301	<i>Revaluation of assets</i>
Beban lain tidak dapat dikurangkan	2,948,682	2,106,340	<i>Other non-deductible expenses</i>
Perubahan tarif pajak	-	2,673,818	<i>Tax rate adjustment</i>
Jumlah	<u>7,126,952</u>	<u>10,046,207</u>	<i>Total</i>

c. Surat ketetapan pajak

c. Tax assessment letters

Jenis pajak/Tax type	Tahun pajak/ Fiscal Year	Surat ketetapan pajak/ Tax assessment letter	Jumlah yang diperkarakan dalam Rupiah/ Dispute amount in IDR 2022	Jumlah yang diperkarakan dalam Rupiah/ Dispute amount in IDR 2021	Status/Status
PLN					
PPN Pemungut/VAT collector	2016	Kurang bayar/Underpayment	75,325	75,325	Putusan diterima, permohonan pengembalian ke DJP/Verdict accepted, request of refund to DJP
PPh pasal 21/Income tax art 21	2017	Kurang bayar/Underpayment	35,522	288,991	Banding/Appeal
PPh pasal 22/Income tax art 22	2017	Kurang bayar/Underpayment	364,684	912,336	Peninjauan kembali/Judicial review
PPh pasal 23/Income tax art 23	2017	Kurang bayar/Underpayment	49,274	189,066	Peninjauan kembali/Judicial review
PPh pasal 4 ayat (2)/Income tax art 4(2)	2017	Kurang bayar/Underpayment	1,219,431	1,320,606	Peninjauan kembali/Judicial review
PPN dalam negeri/Domestic VAT	2017	Kurang bayar/Underpayment	278,105	1,455,199	Banding/Appeal
PPN pemungut/VAT collector	2017	Kurang bayar/Underpayment	304,029	733,725	Peninjauan kembali/Judicial review
STP PPN dalam negeri/ Tax assessment letter domestic VAT	2017	Kurang bayar/Underpayment	219,486	219,486	Menunggu hasil banding PPN DN 2017/Waiting for appeal PPN DN 2017
PPN pemungut/VAT collector	2018	Kurang bayar/Underpayment	310,037	1,024,941	Peninjauan kembali/Judicial review
PPh pasal 21/Income tax art 21	2018	Kurang bayar/Underpayment	336,283	336,283	Banding/Appeal
PPh pasal 22/Income tax art 22	2018	Kurang bayar/Underpayment	176,068	176,068	Banding/Appeal
PPh pasal 23/Income tax art 23	2018	Kurang bayar/Underpayment	2,380,167	2,380,167	Banding/Appeal
PPh pasal 4 ayat (2)/Income tax art 4(2)	2018	Kurang bayar/Underpayment	2,950,558	3,034,000	Banding/Appeal
PPh pasal 26/Income tax art 26	2018	Kurang bayar/Underpayment	-	226,103	Banding/Appeal
Bea meterai/Stamp duty	2018	Kurang bayar/Underpayment	199,341	220,863	Banding/Appeal

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/136 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

47. INCOME TAX (continued)

c. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

c. Tax assessment letters (continued)

Jenis pajak/Tax type	Tahun pajak/ Fiscal Year	Surat ketetapan pajak/ Tax assessment letter	Jumlah yang diperkarakan dalam Rupiah/ Dispute amount in IDR 2022	Jumlah yang diperkarakan dalam Rupiah/ Dispute amount in IDR 2021	Status/Status
PLN (lanjutan/continued)					
PPN JLN/VAT JLN	2019	Kurang bayar/Underpayment	-	20,110	Putusan diterima, pengembalian diterima dari DJP/Verdict accepted, refund has been received from DJP
PPh pasal 21/Income tax art 21	2019	Kurang bayar/Underpayment	114,695	121,325	Banding/Appeal
PPh pasal 22/Income tax art 22	2019	Kurang bayar/Underpayment	499,208	499,208	Banding/Appeal
PPh pasal 4 ayat (2)/ Income tax art 4(2)	2019	Kurang bayar/Underpayment	532,139	532,139	Banding/Appeal
PPh pasal 26/Income tax art 26	2019	Kurang bayar/Underpayment	215,145	313,480	Banding/Appeal
Bea meterai/Stamp Duty	2019	Kurang bayar/Underpayment	188,692	188,692	Banding/Appeal
PPh Badan/Corporate income tax	2019	Kurang bayar/Underpayment	3,061,305	3,061,305	Banding/Appeal
PPN pemungut/VAT collector	2019	Kurang bayar/Underpayment	878,959	1,581,636	Banding/Appeal
PJB					
PPh pasal 22/Income tax art 22	2016	Kurang bayar/Underpayment	-	307,089	Peninjauan kembali/Judicial review
PPh pasal 22/Income tax art 22	2017	Kurang bayar/Underpayment	7,768	172,520	Peninjauan kembali/Judicial review
PPh pasal 22/Income tax art 22	2018	Kurang bayar/Underpayment	162,946	162,946	Banding/Appeal
PPh pasal 22/Income tax art 22	2019	Kurang bayar/Underpayment	136,172	136,172	Banding/Appeal
IP					
PPh Badan/Corporate income tax	2016	Kurang bayar/Underpayment	16,094	16,094	Keberatan/Objection
PPh pasal 22/Income tax art 22	2016	Kurang bayar/Underpayment	161,344	161,344	Banding/Appeal
PPh pasal 22/Income tax art 22	2016	Kurang bayar/Underpayment	75,775	75,775	Banding/Appeal
PPh pasal 22/Income tax art 22	2017	Kurang bayar/Underpayment	46,372	46,372	Banding/Appeal
PPh pasal 22/Income tax art 22	2018	Kurang bayar/Underpayment	-	35,750	Putusan diterima, pengembalian diterima dari DJP/Verdict accepted, refund has been received from DJP
PPh pasal 23/Income tax art 23	2018	Kurang bayar/Underpayment	19,925	19,925	Banding/Appeal
PPh pasal 26/Income tax art 26	2018	Kurang bayar/Underpayment	-	60	Putusan diterima, pengembalian diterima dari DJP/Verdict accepted, refund has been received from DJP
PPh pasal 4 ayat (2)/ Income tax art 4(2)	2018	Kurang bayar/Underpayment	136,071	136,071	Banding/Appeal
PPN dalam negeri/Domestic VAT	2018	Kurang bayar/Underpayment	-	116	Putusan diterima, pengembalian diterima dari DJP/Verdict accepted, refund has been received from DJP
PPh pasal 22/Income tax art 22	2019	Kurang bayar/Underpayment	108,289	108,289	Banding/Appeal
PPN pemungut/VAT collector	2019	Kurang bayar/Underpayment	-	8,967	Putusan diterima, pengembalian diterima dari DJP/Verdict accepted, refund has been received from DJP
PPh pasal 22/Income tax art 22	2020	Kurang bayar/Underpayment	50,404	-	Keberatan/Objection
Majapahit Holding B.V.					
PPh Badan/Corporate income tax	2017	Kurang bayar/Underpayment	384,152	-	Pengajuan keberatan/ Submission of objection
Jumlah/Total			15,693,765	20,298,544	
Provisi/Provision			(4,434,631)	(4,519,237)	
Jumlah, bersih/Total, net			11,259,134	15,779,307	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/137 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

c. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Pada tanggal 25 Juli 2022, Perusahaan telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No PUT-004028.25/2020/PP/M.XIIA tentang Keputusan SKPKB PPh Pasal 4(2) dengan keputusan pengembalian pajak melalui kompensasi SPMKP sebesar Rp238.979 dan penerimaan kas sebesar Rp781.461 untuk masa pajak Juni 2017. Pada tanggal 16 November 2022, DJP telah mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding. Sehubungan dengan keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2022, DJP menerbitkan Surat Keputusan No. KEP-00001/PPH/KPP.1903/2023 tanggal 6 Januari 2023 untuk mengoreksi masa pajak dari Juni 2017 menjadi Desember 2017. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, kasus perpajakan masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.

Selama tahun 2022, Grup menerima pengembalian pajak dari hasil keberatan dan banding untuk tahun fiskal 2017 hingga 2020 sebesar Rp4.938.551 yang terdiri dari pengembalian pajak atas kurang bayar PPh Pasal 22 sebesar Rp1.033.596, PPh Pasal 23 sebesar Rp139.792, PPh Pasal 26 sebesar Rp250.932, PPh Pasal 21 sebesar Rp260.099, PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp184.618, Bea Materai sebesar Rp21.522 dan PPN sebesar Rp3.047.992. Grup menerima pengembalian pajak melalui penerimaan kas sebesar Rp4.934.946 dan melalui pemotongan utang pajak sebesar Rp3.605.

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi atas ketidakpastian posisi pajak telah mencukupi.

d. Tarif pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP"). UU HPP menetapkan tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22%.

e. Administrasi

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

47. INCOME TAX (continued)

c. Tax assessment letters (continued)

On July 25, 2022, the Company has received the Decree of the Director General of Taxes No PUT-004028.25/2020/PP/M.XIIA concerning the decision on SKPKB Income Tax Article 4(2) with the decision of tax refund through compensating the SPMKP amounted to Rp238,979 and cash receipts amounted to Rp781,461 for the fiscal period June 2017. On November 16, 2022, DGT has submitted the judicial review regarding the appeal decision. Regarding the decision issued on July 25, 2022, DGT issued the Decree No. KEP-00001/PPH/KPP.1903/2023 dated January 6, 2023 for correcting the fiscal period from June 2017 to December 2017. Up to the completion date of these consolidated financial statements, the tax case is still in the process of being examined in the Supreme Court.

During 2022, the Group received tax refunds from the proceeds of the objections and appeals for fiscal years 2017 to 2020 amounted to Rp.4,938,551 consisting of tax refunds for underpayment of Income Tax Article 22 amounted to Rp1,033,596, Income Tax Article 23 amounted to Rp139,792, Income Tax Article 26 amounted to Rp250,932, Income Tax Article 21 amounted to Rp260,099, Income Tax Article 4(2) amounted to Rp184,618, Stamp Duty amounted to Rp21,522 and VAT amounted to Rp3,047,992. The Group received the tax refund through cash receipts of Rp4,934,946 and through deduction of the tax payable of Rp3,605.

Management believes that provision against uncertain tax positions is adequate.

d. Tax rates

On October 29, 2021, the President of the Republic Indonesia has ratified the Law No. 7 Year 2021 as Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law"). The HPP Law stipulates that the CIT rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments remains at 22%.

e. Administration

Based on the taxation laws in Indonesia, companies within the Group which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self-assessment. The DJP may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/138 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

48. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

	2022	2021	
Laba konsolidasian tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	14,334,040	13,128,626	<i>Consolidated profit for the year attributable to the owners</i>
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (dalam ribuan lembar saham)	144,294	135,385	<i>Weighted average number of ordinary shares outstanding (in thousand of shares)</i>
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah penuh)	99,339	96,972	Basic earnings per share attributable to the owners of the parent entity (in Rupiah full amount)
Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.			<i>The Company did not have potential dilutive ordinary shares, therefore basic earnings per share is the same as the dilutive earnings per share.</i>

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

	2022	2021	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek			Short-term employee benefit liabilities
Bonus dan insentif prestasi kerja	5,444,480	6,727,558	<i>Bonus and performance incentives</i>
Liabilitas pascakerja jangka pendek	3,866,636	3,593,435	<i>Post-employment benefits liability-current portion</i>
Jumlah	9,311,116	10,320,993	Total
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang			Long-term employee benefit liabilities
<u>Imbalan pascakerja</u>			<u>Post-employment benefits</u>
Program pensiun	445,303	1,246,389	<i>Pension program</i>
Imbalan pascakerja lainnya	14,032,285	13,422,644	<i>Other post-employment benefits</i>
Imbalan pemeliharaan kesehatan	53,702,837	35,481,478	<i>Health care benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	724,791	1,530,651	<i>Other long-term benefits</i>
Jumlah	68,905,216	51,681,162	Total
Dikurangi: bagian jangka pendek	3,866,636	3,593,435	Less: current portion
Bagian jangka panjang	65,038,580	48,087,727	Long-term portion
Beban diakui di laba rugi (Catatan 43):			Expense recognised in profit or loss (Note 43):
<u>Imbalan pascakerja</u>			<u>Post-employment benefits</u>
Program pensiun manfaat pasti	75,876	171,818	<i>Defined benefit pension program</i>
Imbalan pascakerja lainnya	2,065,749	1,765,533	<i>Other post-employment benefits</i>
Imbalan pemeliharaan kesehatan	3,406,338	3,521,835	<i>Health care benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	(434,433)	474,171	<i>Other long-term benefits</i>
Jumlah	5,113,530	5,933,357	Total
Pengukuran kembali program manfaat pasti diakui di penghasilan komprehensif lain:			Remeasurement on defined benefit plan recognised in other comprehensive income:
<u>Imbalan pascakerja</u>			<u>Post-employment benefits</u>
Program pensiun manfaat pasti	23,217	205,065	<i>Defined benefit pension program</i>
Imbalan pascakerja lainnya	(593,930)	76,624	<i>Other post-employment benefits</i>
Imbalan pemeliharaan kesehatan	16,283,893	(8,814,818)	<i>Health care benefits</i>
Jumlah	15,713,180	(8,533,129)	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/139 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Kenaikan signifikan pada pengukuran kembali program manfaat pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain sebagian besar disebabkan karena perubahan asumsi demografis.

Program pensiun manfaat pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 18,94% dari penghasilan dasar pensiun

Pada tanggal 4 April 2022, DSAK-IAI menerbitkan siaran pers mengenai "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa (PSAK No. 24)" sebagai tanggapan atas Standar Akuntansi Keuangan Internasional, Keputusan Agenda Komite Interpretasi: Standar: Akuntansi Internasional 19 Imbalan Kerja - Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa, yang diterbitkan pada Mei 2021. Per 31 Desember 2022 dan 2021, dampak dari perubahan perhitungan tidak material bagi Grup, oleh karena itu, dampak perubahan tersebut dicatat seluruhnya dalam laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan.

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Grup menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Imbalan pascakerja lainnya

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Grup menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

Imbalan jangka panjang lainnya

Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan penghargaan kesetiaan kerja.

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The significant increase in remeasurement on defined benefit plan which recognised in other comprehensive income is mainly due to changes in the demographic assumptions.

Defined benefit pension program

The Group established a defined benefit pension program covering all of its eligible permanent employees. This pension plan provides benefits based on basic pension income and the period of employment.

This pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer which are 6.00% and 18.94% from basic pension income, respectively.

On April 4, 2022, the DSAK-IAI published a press release regarding "Attributing benefit to Periods of Service (SFAS No. 24)" in response to the International Financial Accounting Standards, Interpretation Committee Agenda Decision: International Accounting Standard 19 Employee Benefits - Attributing Benefit to Periods of Service, published in May 2021. As at December 31, 2022 and 2021, the impact of the changes in the calculation is immaterial to the Group, therefore, the impact of the changes is recorded fully in the consolidated financial statements for the current year.

Health care benefits

In addition to the pension plan managed by DP-PLN, the Group also provides unfunded health care benefit plans for pensioners and their eligible dependents.

Other post-employment benefits

In addition to the pension plan and health care benefits, the Group also provides unfunded severance benefits and completion of employment awards for eligible employees.

Other long-term benefits

The Group also provides other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit, death benefit and loyalty benefits.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/140 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja

The principal assumptions used in the calculations of post employment benefits obligation

Tabel mortalita
Usia pensiun normal

CSO-58
56 tahun/years

Mortality table
Normal retirement age

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman setiap wilayah. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience by the Company and its subsidiaries. The mortality assumptions used are based on the CSO-58 mortality table which is applied in calculating the long-term benefits liability recognised within the consolidated statements of financial position.

Perhitungan aktuarial atas program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuarial ("KKA") yang terdaftar yaitu KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan (sebelumnya PT Binaputera Jaga Hikmah) dalam laporannya masing-masing tertanggal 17 April 2023 dan 26 April 2022.

The actuarial calculations of the pension program, other post-employment benefits, health care benefits and other long-term benefits for the years ended December 31, 2022 and 2021 were calculated by a registered Actuarial Consulting Firm ("KKA"), KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan (formerly PT Binaputera Jaga Hikmah), based on its reports dated April 17, 2023 and April 26, 2022, respectively.

Grup melakukan studi pada tahun 2020 untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup. Dalam melakukan studi, Grup telah mempertimbangkan CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011, TMI-2019. Dari studi tersebut, Grup menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup adalah CSO-58.

The Group conducted a study in 2020 to determine which mortality tables best suited most of the Group's employees' and pensioners' mortality profiles. In the study, the Group considered CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011, and TMI-2019. Based on the study, the Group found that the mortality table that best suited the mortality profile of the Group's employees and pensioners is CSO-58.

i. Program pensiun

i. Pension program

Jumlah liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

The liability recognised in the consolidated statements of financial position is determined as follows:

	2022	2021	
Nilai kini kewajiban yang didanai	10,336,245	10,463,943	Present value of funded obligations
Nilai wajar aset program	(9,890,942)	(9,217,554)	Fair value of plan assets
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	445,303	1,246,389	Liability in the consolidated statement of financial position

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/141 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

i. Program pensiun (lanjutan)

i. Pension program (continued)

Pergerakan kewajiban program pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefit pension program obligation over the year is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	10,463,943	10,321,138	Beginning balance
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	69,177	132,184	Current service cost
Biaya bunga	<u>665,556</u>	<u>726,946</u>	Interest expense
	<u>734,733</u>	<u>859,130</u>	
Pengukuran kembali: (Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(48,017)	134,885	Remeasurements: (Gain)/loss from change in financial assumptions
Kerugian aktuarial dari perubahan beberapa asumsi	501	-	Actuarial loss from various of changes in assumptions
Kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	100,466	28,083	Experience loss
Kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografis	<u>6,254</u>	<u>-</u>	Loss from change in demographic assumptions
	<u>59,204</u>	<u>162,968</u>	
Pembayaran manfaat	(921,635)	(898,326)	Benefit payments
Liabilitas yang diambil alih melalui kombinasi bisnis	<u>-</u>	<u>19,033</u>	Liabilities assumed in business combination
Saldo akhir	<u>10,336,245</u>	<u>10,463,943</u>	Ending balance

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets over the year is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	9,217,554	8,907,857	Beginning balance
Imbal hasil atas aset program	617,450	644,386	Return on plan assets
Iuran pemberi kerja	900,179	550,454	Employer's contributions
Iuran pekerja	41,407	42,926	Employee contributions
Pembayaran manfaat	(921,635)	(898,326)	Benefit payments
Kerugian aktuarial pada aset program	35,987	(42,097)	Actuarial loss on plan assets
Kombinasi bisnis (Catatan 5)	<u>-</u>	<u>12,354</u>	Business combination (Note 5)
Saldo akhir	<u>9,890,942</u>	<u>9,217,554</u>	Ending balance

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/142 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

i. Program pensiun (lanjutan)

i. Pension program (continued)

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following:

	2022				2021				
	Dikutip/ Quoted	Tidak dikutip/ Unquoted	Jumlah/ Total	%	Dikutip/ Quoted	Tidak dikutip/ Unquoted	Jumlah/ Total	%	
Tabungan dan deposito									Savings and time deposits
Tabungan	-	8,589	8,589	0.09%	-	96,310	96,310	1.04%	Saving accounts
Deposito on call	-	9,808	9,808	0.10%	-	18,005	18,005	0.20%	On call deposits
Deposito berjangka	-	371,150	371,150	3.75%	-	324,900	324,900	3.52%	Time deposits
Instrumen ekuitas									Equity instruments
Saham	489,625	-	489,625	4.95%	638,255	-	638,255	6.92%	Stocks
Penempatan langsung	-	1,122,023	1,122,023	11.34%	-	975,923	975,923	10.59%	Direct placement
Instrumen utang									Debt instruments
Obligasi	3,847,093	-	3,847,093	38.90%	2,649,476	-	2,649,476	28.74%	Corporate bonds
Sukuk	460,327	-	460,327	4.65%	383,980	-	383,980	4.17%	Sukuk
Unit penyertaan reksa dana	538,960	-	538,960	5.45%	896,400	-	896,400	9.72%	Investment units of mutual funds
Efek beragunan aset Surat utang jangka menengah	-	-	-	0.00%	8,996	-	8,996	0.10%	Asset backed securities
Surat Berharga Negara	50,000	-	50,000	0.51%	-	-	-	-	Medium-term note
	1,773,053	-	1,773,053	17.93%	1,850,709	-	1,850,709	20.08%	Government securities
Properti									Property
Tanah dan hak atas tanah	-	117,095	117,095	1.18%	-	117,095	117,095	1.27%	Land and land rights
Bangunan	-	412,089	412,089	4.17%	-	412,089	412,089	4.47%	Buildings
Tanah dan bangunan	-	604,594	604,594	6.11%	-	604,594	604,594	6.56%	Land and buildings
Lain-lain	-	86,536	86,536	0.87%	-	240,822	240,822	2.62%	Others
Jumlah	7,159,058	2,731,884	9,890,942	100.00%	6,427,816	2,789,738	9,217,554	100.00%	Total

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2022	2021	
Tingkat diskonto	7.07% - 7.42%	6.66% - 7.59%	Discount rate
Tingkat kenaikan manfaat pensiun	5.00%	5.00%	Pension benefit increase rate

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.552.358 dan Rp1.237.766.

Expected contributions to post-employment benefit plans for the years ended December 31, 2022 and 2021 are Rp1,552,358 and Rp1,237,766, respectively.

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban manfaat pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(159,070)	179,581	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	178,216	(159,955)	Salary growth rate

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/143 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

ii. Imbalan pascakerja lainnya

ii. Other post-employment benefits

Pergerakan kewajiban imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the other post-employment benefits obligation over the year is as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	13,422,644	12,661,355	<i>Beginning balance</i>
Dibebankan ke laba rugi:			<i>Charged to profit or loss:</i>
Biaya jasa kini	1,066,392	879,587	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	986,571	892,340	<i>Interest expense</i>
Biaya jasa lalu	23,760	1,443	<i>Past service cost</i>
Imbal hasil atas aset program	(10,974)	(7,837)	<i>Return on plan assets</i>
	2,065,749	1,765,533	
Pengukuran kembali:			<i>Remeasurements:</i>
Keuntungan dari penyesuaian atas pengalaman (Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(561,461)	(329,948)	<i>Experience gains</i>
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	(65,903)	409,272	<i>(Gain)/loss from change in financial assumptions</i>
Kerugian/(keuntungan) yang timbul dari perubahan asumsi demografis	8,680	(2,693)	<i>Loss/(gain) from combination of changes in assumptions</i>
	24,754	(7)	<i>Loss/(gain) from change in demographic assumptions</i>
	(593,930)	76,624	
Pembayaran manfaat	(862,178)	(1,083,748)	<i>Benefit payments</i>
Liabilitas yang diambil alih melalui kombinasi bisnis	-	2,880	<i>Liabilities assumed in business combination</i>
Saldo akhir	14,032,285	13,422,644	Ending balance

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2022	2021	
Tingkat diskonto	6.87% - 7.44%	7.12% - 7.60%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00% - 7.12%	1.00% - 7.12%	<i>Rate of salary increase per annum</i>

Sensitivitas dari imbalan pascakerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other post-employment benefits to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas imbalan pascakerja lainnya/ Impact on other post-employment benefits			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(1,381,789)	1,663,235	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	1%	1,698,478	(1,437,044)	<i>Salary growth rate</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/144 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

iii. Imbalan pemeliharaan kesehatan

iii. Health care benefit

Grup memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun manfaat pasti.

The Group operates a number of post-employment health care benefit schemes. The method of accounting, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes.

Pergerakan kewajiban imbalan pemeliharaan kesehatan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the health care benefits obligation over the year is as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	35,481,478	42,024,517	<i>Beginning balance</i>
Dibebankan ke laba rugi:			<i>Charged to profit or loss:</i>
Biaya jasa kini	826,116	477,856	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	2,580,222	3,043,979	<i>Interest expense</i>
	3,406,338	3,521,835	
Pengukuran kembali:			<i>Remeasurements:</i>
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	20,227	(8,505,354)	<i>Loss/(gain) from change in financial assumptions</i>
Kerugian/(keuntungan) dari penyesuaian atas pengalaman (Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	3,272,494	(517,226)	<i>Experience losses/(gains)</i>
Kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografis	(114,844)	207,762	<i>(Gain)/loss from combination of changes in assumptions Loss from change in demographic assumptions</i>
	13,106,016	-	
	16,283,893	(8,814,818)	
Pembayaran manfaat	(1,468,872)	(1,250,056)	<i>Benefit payments</i>
Saldo akhir	53,702,837	35,481,478	Ending balance

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2022	2021	
Tingkat diskonto	7.32% - 7.60%	7.41% - 7.60%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	5.35%	5.35%	<i>Future health cost increase</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/145 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

iii. Imbalan pemeliharaan kesehatan (lanjutan)

iii. Health care benefits (continued)

Sensitivitas dari imbalan pemeliharaan kesehatan terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the health care benefits to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

Dampak atas imbalan pemeliharaan kesehatan/ Impact on health care benefits			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(5,616,794)	6,879,260 Discount rate
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	1%	6,948,830	(5,759,161) Medical inflation rate

iv. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

iv. Other long-term benefits

Pergerakan kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the other long-term benefits obligation over the year is as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	1,530,651	1,303,927	Beginning balance
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	(500,522)	387,652	Current service cost
Biaya bunga (Keutungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	66,089	86,519	Interest expense
Kerugian/(keuntungan) dari penyesuaian atas pengalaman (Keutungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	(16,093)	80,279	(Gain)/loss from change in financial assumptions
Kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografis	10,101	(80,534)	Experience losses/(gains)
	(111)	255	(Gain)/loss from combination of changes in assumptions
	6,103	-	Loss from change in demographic assumptions
	(434,433)	474,171	
Pembayaran manfaat	(371,427)	(247,905)	Benefit payments
Liabilitas yang diambil alih melalui kombinasi bisnis	-	458	Liabilities assumed in business combination
Saldo akhir	724,791	1,530,651	Ending balance

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2022	2021	
Tingkat diskonto	4.41% - 6.66%	4.41% - 7.60%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00% - 7.12%	6.31% - 7.12%	Rate of salary increase per annum

Sensitivitas dari imbalan kerja jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long-term benefits to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

Dampak atas imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Impact on other long-term benefits			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(17,579)	18,651 Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	19,853	(19,035) Salary growth rate

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/146 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program manfaat pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Kewajiban program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada *Zero Coupon Bond* dari *Indonesia Government Securities Yield Curve*. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Grup menempatkan investasi aset program pada beragam jenis aset investasi agar dapat terdiversifikasi dengan baik sehingga dapat meminimalisir dampak kinerja buruk dari satu aset terhadap seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang, meskipun Grup juga berinvestasi pada tabungan, deposito, instrumen ekuitas, dan properti. Grup meyakini bahwa instrumen utang memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari kewajiban program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Rata-rata durasi kewajiban manfaat pasti untuk program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah 10,27 tahun, 13,80 tahun, 14,58 tahun dan 4,36 tahun secara berurutan.

Manajemen Grup berpendapat bahwa liabilitas imbalan pascakerja cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan dan/atau PKB.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	<u>Kurang dari 1 tahun/ Less than a year</u>	<u>Antara 1 - 2 tahun/ Between 1 - 2 years</u>	<u>Antara 2 - 5 tahun/ Between 2 - 5 years</u>	<u>Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years</u>	<u>Jumlah/Total</u>	
Program pensiun manfaat pasti	894,305	954,188	3,073,868	13,468,513	18,390,874	<i>Defined benefit pension program</i>
Imbalan pascakerja lainnya	1,035,075	1,254,963	4,226,117	153,883,999	160,400,154	<i>Other post-employment benefits</i>
Imbalan pemeliharaan kesehatan	1,704,215	2,823,609	9,051,971	168,301,809	181,881,604	<i>Health care benefits</i>
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	233,041	206,501	654,716	717,875	1,812,133	<i>Other long-term benefits</i>
Jumlah	<u>3,866,636</u>	<u>5,239,261</u>	<u>17,006,672</u>	<u>336,372,196</u>	<u>362,484,765</u>	Total

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The Group is exposed to a number of risks through its defined benefit pension program and post-employment medical plans. The most significant risks are as follows:

Asset volatility

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to the *Zero Coupon Bond* from *Indonesia Government Securities Yield Curve*. If plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

The Group places its investment plan assets in various types of investment assets so that it can be properly diversified to minimise the impact of the bad performance of one asset on all asset groups. The largest proportion of assets is invested in debt instruments, although the Group also invests in savings, time deposits, equity instruments and property. The Group believes that debt instruments offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Life expectancy

The majority of the plans' obligations are to provide benefits for the life of the members, so increases in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

The weighted average duration of the defined benefit obligations for the pension program, other post-employment benefits program, health-care benefits, and other long-term benefits are 10.27 years, 13.80 years, 14.58 years and 4.36 years, respectively.

The management of the Group believes that the estimated liability provided for post-employment benefits is adequate to cover the requirements of the *Manpower Regulations* and/or *CLA*.

The expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and other long-term benefits is as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/147 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

50. INFORMASI ARUS KAS

a. Transaksi non-kas

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

Pengungkapan tambahan atas aktivitas investasi dan pendanaan non-kas adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas:		
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan melalui penarikan pinjaman dan utang proyek	8,398,877	14,579,540
Penambahan aset hak guna melalui utang sewa	2,773,086	2,284,778
Penambahan piutang pihak berelasi atas piutang dividen	70,422	-
Penambahan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dengan reklasifikasi dari deposito berjangka	-	23,347
Penambahan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dengan reklasifikasi dari deposito jangka panjang	-	122,111

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>				
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pembayaran/ Repayments</u>	<u>Perubahan lainnya/ Other changes*)</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>
Penerusan pinjaman	34,699,205	876,645	(2,831,819)	440,683	33,184,714
Utang kepada lembaga keuangan					
Pemerintah non-bank	3,686,177	-	(758,423)	25,069	2,952,823
Utang bank	165,886,409	38,342,458	(58,828,734)	7,009,985	152,410,118
Utang obligasi dan sukuk ijarah	193,155,035	-	(5,345,442)	13,524,828	201,334,421
Utang sewa	15,041,943	2,773,086	(4,721,269)	(231,445)	12,862,315
Utang listrik swasta	6,168,756	-	(477,008)	548,998	6,240,746
Utang KIK - EBA	569,578	-	(587,288)	17,710	-
Jumlah	<u>419,207,103</u>	<u>41,992,189</u>	<u>(73,549,983)</u>	<u>21,335,828</u>	<u>408,985,137</u>

*) Termasuk perubahan selisih kurs dan amortisasi biaya transaksi

50. CASH FLOW INFORMATION

a. Non-cash transactions

The table below details changes in the Group's liabilities arising from investing and financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flow were, or future cash flows will be, classified in the Group's consolidated statements of cash flows as cash flows from financing activities.

Supplemental disclosures on non-cash investing and financing activities are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Non-cash investing and financing activities:		
Aditions to property, plant and equipment and construction in progress through drawdown of loans and project cost payables	8,398,877	14,579,540
Addition of right-of-use assets through lease liabilities	2,773,086	2,284,778
Additions of receivables from related parties from dividend receivable	70,422	-
Placement of restricted cash in banks and time deposits through reclassification from time deposits	-	23,347
Placement of restricted cash in banks and time deposits through reclassification from long-term time deposits	-	122,111

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2022 and 2021 is as follows:

	<u>2022</u>				
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pembayaran/ Repayments</u>	<u>Perubahan lainnya/ Other changes*)</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>
Penerusan pinjaman	34,699,205	876,645	(2,831,819)	440,683	33,184,714
Utang kepada lembaga keuangan					
Pemerintah non-bank	3,686,177	-	(758,423)	25,069	2,952,823
Utang bank	165,886,409	38,342,458	(58,828,734)	7,009,985	152,410,118
Utang obligasi dan sukuk ijarah	193,155,035	-	(5,345,442)	13,524,828	201,334,421
Utang sewa	15,041,943	2,773,086	(4,721,269)	(231,445)	12,862,315
Utang listrik swasta	6,168,756	-	(477,008)	548,998	6,240,746
Utang KIK - EBA	569,578	-	(587,288)	17,710	-
Jumlah	<u>419,207,103</u>	<u>41,992,189</u>	<u>(73,549,983)</u>	<u>21,335,828</u>	<u>408,985,137</u>

*) Including foreign exchange difference and amortisation of transaction costs

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/148 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

50. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan (lanjutan)

50. CASH FLOW INFORMATION (continued)

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities (continued)

	2021					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions*)	Pembayaran/ Repayments	Perubahan lainnya/ Other changes**)	Saldo akhir/ Ending balance	
Penerusan pinjaman	38,534,971	894,658	(3,044,547)	(1,685,877)	34,699,205	Two-step loans
Utang kepada lembaga keuangan						Non-bank Government financial institution loans
Pemerintah non-bank	4,399,146	8,423	(750,000)	28,608	3,686,177	
Utang bank	173,306,708	34,828,400	(41,168,011)	(1,080,688)	165,886,409	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	207,820,308	-	(15,166,000)	500,727	193,155,035	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang sewa	18,486,303	2,284,778	(4,765,662)	(963,476)	15,041,943	Lease liabilities
Utang listrik swasta	6,525,831	-	(434,255)	77,180	6,168,756	Electricity purchase payables
Utang KIK - EBA	1,526,949	-	(883,666)	(73,705)	569,578	KIK - EBA loans
Jumlah	450,600,216	38,016,259	(66,212,141)	(3,197,231)	419,207,103	Total

*) Termasuk penambahan utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non-bank dari akuisisi EMI
**) Termasuk perubahan selisih kurs dan amortisasi biaya transaksi

*) Including additions of government and non-bank government financial institution loans from acquisitions of EMI
**) Including foreign exchange difference and amortisation of transaction cost

51. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan berelasi

- Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN.
- Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan.
- Grup mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (Catatan 9).
- Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Grup.

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup:

51. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

Nature of related parties

- The Government in this case is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, the shareholder of the Company and SOEs.
- The Company is related to other SOEs owned by the Ministry of Finance.
- The Group has significant influence on investments in associates or joint ventures (Note 9).
- The Board of Commissioners and Directors are members of the key management of the Group.

Below is the list of related parties that engage in transactions with the Group:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transaction
Pemerintah Republik Indonesia/ Government of the Republic of Indonesia ("Pemerintah")	Pemegang saham akhir/ Ultimate shareholder	Penerimaan subsidi listrik dan kompensasi, penerimaan penerusan pinjaman, dan utang kepada pemerintah/ Receipt of electricity subsidy and compensation, two-step loan and Government loans
BRI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank/ Placement of restricted cash in banks and time deposits, cash and cash equivalents, short-term investments, and receipt of bank loans
Bank Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank/ Placement of restricted cash in banks and time deposits, cash and cash equivalents, short-term investments, and receipt of bank loans
BNI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, dan penerimaan utang bank/ Placement of restricted cash in banks and time deposits, cash and cash equivalents, and receipt of bank loans
Bank DKI	Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah/ Government related entity	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/ Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
Bank Pembangunan Daerah ("BPD")	Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah/ Government related entity	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/ Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
BTN	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/ Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
BSI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/ Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
LPEI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan utang bank/ Receipt of bank loans

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/149 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

51. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) 51. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of related parties (continued)

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Sifat hubungan/ Nature of relationship</u>	<u>Sifat transaksi dan saldo/ Nature of transaction and balance</u>
PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
Pertamina	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ <i>Purchase of fuels and lubricants</i>
PT Pertamina Gas ("Pertagas")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ <i>Purchase of gas</i>
PT Bukit Asam Tbk ("PTBA")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pembelian bahan bakar batubara/ <i>Purchase of coal</i>
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ <i>Purchase of gas</i>
NR	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ <i>Purchase of gas</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("AJI")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan/ <i>Insurance services for the Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels</i>
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
SMI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah nonbank/ <i>Receipt of non-bank government financial institution loans</i>
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah nonbank/ <i>Receipt of non-bank government financial institution loans</i>
GDE	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
TJK	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
DEB	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
MEB	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
RDM	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
S2P	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
BDSN	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
Komipo PJB	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
BPI	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
SGPJB	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Pemberian pinjaman jangka panjang dan transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Issuance of long-term loans and purchase of electricity</i>
PDG	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Pemberian pinjaman jangka panjang/ <i>Issuance of long-term loans</i>
PMSE	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Pemberian pinjaman jangka panjang/ <i>Issuance of long-term loans</i>
REP	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Pemberian pinjaman jangka panjang dan transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Issuance of long-term loans and purchase of electricity</i>
GCL	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Pemberian pinjaman jangka panjang/ <i>Issuance of long-term loans</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/150 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

51. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) 51. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of related parties (continued)

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat transaksi dan saldo/ <i>Nature of transaction and balance</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("WK")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi jasa konstruksi/ <i>Construction services</i>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Wika")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi jasa konstruksi/ <i>Construction services</i>
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Utang sewa/ <i>Lease liabilities</i>
Dana Pensiun PLN	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Utang sewa/ <i>Lease liabilities</i>
PT Djakarta Llyod	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Utang sewa/ <i>Lease liabilities</i>
Pemerintah Daerah	Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Utang lain-lain/ <i>Other payables</i>

Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi:

Details of transactions and balances with related parties:

	Catatan/ <i>Notes</i>	2022		2021		
		Rp	% ^{*)}	Rp	% ^{*)}	
Piutang pihak berelasi	10					Receivables from related parties
SGPJB		849,106	0.05	806,425	0.05	SGPJB
REP		415,493	0.03	358,699	0.02	REP
PDG		79,733	0.00	114,012	0.01	PDG
GCL		70,422	0.00	-	-	GCL
PMSE		11,181	0.00	9,632	0.00	PMSE
Lain-lain		93,341	0.01	54,379	0.00	Others
Subjumlah		1,519,276	0.09	1,343,147	0.08	Subtotal
Rekening bank dibatasi penggunaannya	11					Restricted cash in banks
BRI		181,314	0.01	160,792	0.01	BRI
Bank Mandiri		174,285	0.01	53,827	0.00	Bank Mandiri
BNI		1,285	0.00	10,902	0.00	BNI
BPD Jatim		-	-	268	0.00	BPD Jatim
Subjumlah		356,884	0.02	225,789	0.01	Subtotal
Kas dan setara kas	13					Cash and cash equivalents
BNI		18,429,389	1.12	13,068,674	0.81	BNI
Bank Mandiri		17,953,182	1.10	12,233,680	0.76	Bank Mandiri
BRI		11,040,220	0.67	9,584,552	0.59	BRI
BTN		750,486	0.05	587,275	0.04	BTN
BSI		663,292	0.04	231,279	0.01	BSI
Bank DKI		491,401	0.03	174,667	0.01	Bank DKI
Subjumlah		49,327,970	3.01	35,880,127	2.22	Subtotal
Investasi jangka pendek	14					Short-term investments
BRI		297,527	0.02	260,000	0.02	BRI
Bank Mandiri		179,182	0.01	103	0.00	Bank Mandiri
BNI		36,578	0.00	30,229	0.00	BNI
Subjumlah		513,287	0.03	290,332	0.02	Subtotal
Piutang usaha	15					Trade receivables
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah		2,347,650	0.14	2,280,440	0.14	Government related entities
Piutang dari Pemerintah	16					Receivables from Government
		21,470,500	1.31	26,554,891	1.65	
Jumlah		75,535,567	4.60	66,574,726	4.12	Total
Penerusan pinjaman	24					Two-step loans
		33,184,714	5.13	34,699,205	5.49	
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	25					Government and non-bank Government financial institution loans
SMI		2,952,823	0.46	3,677,754	0.58	SMI
Pemerintah Republik Indonesia		675,985	0.10	1,202,263	0.19	Government of the Republic of Indonesia
PPA		-	-	8,423	0.00	PPA
Subjumlah		3,628,808	0.56	4,888,440	0.77	Subtotal

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan

*) Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/151 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**51. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**51. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH
RELATED PARTIES (continued)**

Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi: (lanjutan)

Details of transactions and balances with related parties: (continued)

Catatan/ Notes	2022		2021			
	Rp	%)	Rp	%)		
Utang sewa	26				Lease liabilities	
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	754,167	0.11	1,116,388	0.18	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	
Dana Pensiun PLN	399,553	0.06	525,431	0.08	Dana Pensiun PLN	
PT Djakarta Llyod	103,652	0.02	-	-	PT Djakarta Llyod	
Subjumlah	1,257,372	0.19	1,641,819	0.26	Subtotal	
Utang bank	27				Bank loans	
Bank Mandiri	12,109,421	1.87	11,012,442	1.74	Bank Mandiri	
BRI	9,346,371	1.45	12,048,598	1.91	BRI	
BNI	4,678,987	0.72	4,029,987	0.64	BNI	
BTN	3,465,011	0.54	1,500,000	0.24	BTN	
SMI	2,925,001	0.45	4,728,074	0.75	SMI	
BSI	2,224,244	0.34	2,526,030	0.40	BSI	
LPEI	1,018,472	0.16	3,314,280	0.52	LPEI	
Bank DKI	451,786	0.07	616,071	0.10	Bank DKI	
BPD Papua	401,786	0.06	518,422	0.08	BPD Papua	
Bank Jateng	78,571	0.01	107,143	0.02	Bank Jateng	
BPD Aceh	39,286	0.01	53,571	0.01	BPD Aceh	
Bank Kalteng	39,286	0.01	53,571	0.01	Bank Kalteng	
Bank Riau	39,286	0.01	53,571	0.01	Bank Riau	
Bank Kalbar	39,286	0.01	53,571	0.01	Bank Kalbar	
BPD Bali	29,464	0.00	40,179	0.01	BPD Bali	
Bank BJB	-	-	22,807	0.00	Bank BJB	
Subjumlah	36,886,258	5.71	40,678,317	6.45	Subtotal	
Utang usaha	30				Trade payables	
Pertamina	4,190,071	0.65	10,176,188	1.61	Pertamina	
Pertagas	2,412,447	0.37	1,797,585	0.28	Pertagas	
SGPJB	1,776,933	0.27	1,815,259	0.29	SGPJB	
PGE	1,704,639	0.26	899,346	0.14	PGE	
S2P	1,603,246	0.25	2,207,233	0.35	S2P	
PTBA	1,243,733	0.19	1,110,309	0.18	PTBA	
PGN	439,748	0.07	532,523	0.08	PGN	
NR	124,380	0.02	111,259	0.02	NR	
Lain-lain (masing - masing dibawah 5% dari jumlah utang usaha) Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Ventura Bersama Entitas asosiasi	551,553	0.09	1,022,114	0.16	Others (each below 5% of total trade payables) Control through the Government of the Republic of Indonesia Joint ventures Associates	
	891,861	0.14	325,699	0.05		
	273,462	0.04	569,118	0.09		
Subjumlah	15,212,073	2.35	20,566,633	3.25	Subtotal	
Utang lain-lain	31				Other payable	
WK	2,320,373	0.36	2,308,042	0.37	WK	
Pemerintah Daerah	2,317,377	0.36	2,188,109	0.35	Local Government	
Wika	603,331	0.09	537,942	0.09	Wika	
Lain-lain	182,403	0.03	383,578	0.06	Others	
Subjumlah	5,423,484	0.84	5,417,671	0.87	Subtotal	
Biaya masih harus dibayar	33				Accrued expenses	
Bunga dan beban keuangan Penerusan pinjaman	274,072	0.04	253,127	0.04	Interest and financing charges Two-step loans	
Utang bank					Bank loans	
Bank Mandiri	114,017	0.02	50,911	0.01	Bank Mandiri	
BNI	63,552	0.01	31,698	0.01	BNI	
BRI	40,836	0.01	43,418	0.01	BRI	
BTN	39,792	0.01	1,777	0.00	BTN	
BSI	38,229	0.01	41,120	0.01	BSI	
SMI	11,863	0.00	32,583	0.01	SMI	
LPEI	4,185	0.00	3,230	0.00	LPEI	
Bank DKI	593	0.00	539	0.00	Bank DKI	
Lain-lain	829	0.00	1,395	0.00	Others	
Subjumlah	587,968	0.10	459,798	0.09	Subtotal	
Jumlah	96,180,677	14.87	108,351,883	17.15	Total	
Penjualan tenaga listrik	36				Sale of electricity	
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah	20,157,947	6.48	17,884,988	6.19	Government related entities	
Subsidi listrik Pemerintah	37	58,831,960	100.00	49,796,949	100.00	Government electricity subsidy
Pendapatan kompensasi	16	63,649,821	100.00	23,392,162	100.00	Compensation income
Pendapatan usaha lain-lain	38				Other revenues	
SGPJB	1,255,251	18.64	661,451	14.94	SGPJB	
GCL	322,155	4.78	264,040	5.96	GCL	
RDM	200,457	2.98	-	0.00	RDM	

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan

*) Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/152 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

51. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) **51. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)**

Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi: (lanjutan)

Details of transactions and balances with related parties: (continued)

	Catatan/ Notes	2022		2021		
		Rp	%*)	Rp	%*)	
Pendapatan usaha lain-lain (lanjutan)	38					Other revenues (continued)
Pemda		177,784	2.64	205,518	4.64	Pemda
Pemerintah Pusat		153,408	2.28	113,247	2.56	Pemerintah Pusat
S2P		109,795	1.63	104,688	2.36	S2P
Lain-lain		182,949	2.72	317,333	7.17	Lain-lain
Jumlah		2,401,799	35.66	1,666,277	37.64	Total
Beban bahan bakar dan pelumas	39					Fuel and lubricants expenses
Pertamina		31,716,661	20.95	17,865,526	15.09	Pertamina
PTBA		10,523,986	6.95	5,231,289	4.42	PTBA
PGN		9,904,391	6.54	6,101,339	5.15	PGN
NR		5,193,953	3.43	5,393,114	4.55	NR
Lain-lain		5,041,018	3.33	10,431,940	8.81	Others
Jumlah		62,380,009	41.20	45,023,208	38.02	Total
Beban pembelian tenaga listrik	40					Purchased electricity expenses
S2P		13,174,952	10.12	12,227,323	11.81	S2P
SGPJB		10,735,441	8.24	8,117,710	7.84	SGPJB
PGE		3,439,920	2.64	2,592,940	2.50	PGE
BPI		1,464,122	1.12	1,327,640	1.28	BPI
GDE		968,411	0.74	894,908	0.86	GDE
BDSN		885,433	0.68	891,808	0.86	BDSN
TJK		502,963	0.39	480,139	0.46	TJK
RDM		405,117	0.31	225,642	0.22	RDM
REP		243,535	0.19	234,312	0.23	REP
Perum Jasa Tirta		237,180	0.18	186,638	0.18	Perum Jasa Tirta
DEB		194,777	0.15	191,326	0.18	DEB
MEB		51,722	0.04	48,194	0.05	MEB
Lainnya		263,635	0.20	198,294	0.20	Others
Jumlah		32,567,208	25.00	27,616,874	26.67	Total
Beban pemeliharaan	42					Maintenance expenses
Komipo PJB		286,450	1.20	1,462,484	6.47	Komipo PJB
Lain-lain		1,066,788	4.45	858,786	3.80	Others
Jumlah		1,353,238	5.65	2,321,270	10.27	Total
Beban usaha lain-lain	44					Other operating expenses
AJI		277,937	3.12	456,366	6.30	AJI
Lain-lain		583,996	6.56	333,402	4.61	Others
Jumlah		861,933	9.68	789,768	10.91	Total
Beban keuangan	45					Finance costs
Utang bank		1,791,930	10.46	2,411,989	11.84	Bank loans
Penerusan pinjaman		584,725	3.41	646,372	3.17	Two-step loans
Instrumen derivatif		(1,151,838)	(6.72)	756,338	3.71	Derivative instruments
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank		204,723	1.19	249,335	1.22	Government and non-bank Government financial institution loans
Jumlah		1,429,540	8.34	4,064,034	19.94	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan

*) Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp121.680 dan Rp68.679.

Total compensation of the Company's Board of Commissioners for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp121,680 and Rp68,679, respectively.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp251.291 dan Rp159.589.

Total compensation of the Company's Board of Directors for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp251,291 and Rp159,589, respectively.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

All the compensation to the Company's Boards of Commissioners and Directors represent short-term employee benefits.

Informasi mengenai kontribusi yang dilakukan Grup ke DP-PLN diungkapkan di Catatan 49.

Information about the contributions made by the Group to DP-PLN is disclosed in Note 49.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/153 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**52. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

**52. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

As at December 31, 2022 and 2021, the Group had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2022				
	JPY*)	USD*)	EUR*)	Lain-lain/ Others**)	
Aset moneter					Monetary assets
Kas dan setara kas	1,696,886,132	535,414,834	8,933,117	9,258,917	Cash and cash equivalents
Piutang pihak berelasi	-	91,452,983	-	-	Receivables from related parties
Rekening bank dibatasi penggunaannya	29,572,853,747	72,115,932	-	-	Restricted cash in banks
Jumlah aset moneter*)	<u>31,269,739,879</u>	<u>698,983,749</u>	<u>8,933,117</u>	<u>9,258,917</u>	Total monetary assets*)
Liabilitas moneter					Monetary liabilities
Penerusan pinjaman	150,203,772,818	982,783,614	11,082,057	-	Two-step loans
Utang sewa	39,004,601,063	38,051,779	-	-	Lease liabilities
Utang bank	79,285,135,954	4,976,089,965	963,714,411	-	Bank loans
Utang obligasi, sukuk ijarah dan KIK EBA	19,500,000,000	10,188,312,000	1,000,000,000	-	Bonds payable, sukuk ijarah and KIK EBA
Utang listrik swasta	-	400,253,097	-	-	Electricity purchase payables
Utang lain-lain	2,684,038,768	136,858,031	25,843,620	-	Other payables
Utang biaya proyek	5,179,054,039	37,996,797	2,428,825	-	Project cost payables
Utang usaha	-	1,339,342,186	-	11,278,625	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	6,327,880,061	181,953,030	6,739,621	-	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter*)	<u>302,184,482,703</u>	<u>18,281,640,499</u>	<u>2,009,808,534</u>	<u>11,278,625</u>	Total monetary liabilities*)
Liabilitas moneter bersih*)	<u>(270,914,742,824)</u>	<u>(17,582,656,750)</u>	<u>(2,000,875,417)</u>	<u>(2,019,708)</u>	Net monetary liabilities*)
Ekivalen dalam jutaan Rupiah	<u>(31,956,019)</u>	<u>(274,148,784)</u>	<u>(33,231,739)</u>	<u>(31,491)</u>	Equivalent in millions of Rupiah
Jumlah bersih - dalam jutaan Rupiah	<u>(339,368,033)</u>				Net total - in millions of Rupiah
	2021				
	JPY*)	USD*)	EUR*)	Lain-lain/ Others**)	
Aset moneter					Monetary assets
Kas dan setara kas	1,487,378,556	492,195,468	20,501,330	3,535,211	Cash and cash equivalents
Piutang pihak berelasi	-	89,293,682	-	-	Receivables from related parties
Rekening bank dibatasi penggunaannya	32,606,787,926	62,503,640	-	-	Restricted cash in banks
Jumlah aset moneter*)	<u>34,094,166,482</u>	<u>643,992,790</u>	<u>20,501,330</u>	<u>3,535,211</u>	Total monetary assets*)
Liabilitas moneter					Monetary liabilities
Penerusan pinjaman	151,461,016,318	1,103,669,420	12,708,786	1,884,757	Two-step loans
Utang sewa	62,874,000,998	43,067,554	-	-	Lease liabilities
Utang bank	85,876,011,874	6,020,925,730	889,320,094	-	Bank loans
Utang obligasi, sukuk ijarah dan KIK EBA	23,200,000,000	10,188,312,000	1,000,000,000	-	Bonds payable, sukuk ijarah and KIK EBA
Utang listrik swasta	-	432,318,795	-	-	Electricity purchase payables
Utang lain-lain	5,397,407,034	256,920,608	51,704,167	-	Other payables
Utang biaya proyek	63,222,291	6,285,354	180,550	-	Project cost payables
Utang usaha	-	1,627,546,149	-	13,474,124	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	7,631,184,204	158,563,272	6,206,804	15,788	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter*)	<u>336,502,842,719</u>	<u>19,837,608,882</u>	<u>1,960,120,401</u>	<u>15,374,669</u>	Total monetary liabilities*)
Liabilitas moneter bersih*)	<u>(302,408,676,237)</u>	<u>(19,193,616,092)</u>	<u>(1,939,619,071)</u>	<u>(11,839,458)</u>	Net monetary liabilities*)
Ekivalen dalam jutaan Rupiah	<u>(37,465,350)</u>	<u>(273,873,708)</u>	<u>(31,279,849)</u>	<u>(168,937)</u>	Equivalent in millions of Rupiah
Jumlah bersih - dalam jutaan Rupiah	<u>(342,787,844)</u>				Net total - in millions of Rupiah

*) Dalam jumlah penuh

**) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara USD dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount

**) Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalent using the exchange rate prevailing at the reporting date

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2022 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal 2 Mei 2023, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Grup akan mengalami penurunan sebesar Rp19.578.282 (2021: kenaikan sebesar Rp4.958.577 pada tanggal 23 Mei 2022).

If assets and liabilities in foreign currencies as at December 31, 2022 had been translated using the closing rates at issuance of May 2, 2023, the total net foreign currency liabilities of the Group would have been decreased by Rp19,578,282 (2021: increased by Rp4,958,577 at issuance of May 23, 2022).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/154 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

53. SEGMENT OPERASI

Informasi wilayah geografis

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang telah diidentifikasi sebagai pengambil keputusan operasional utama Grup, dalam mengambil keputusan strategis. Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif operasi geografis yang terdiri dari Sumatera, Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku dan Papua.

Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup dibagi dalam operasi geografis Sumatera, Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Operasi geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Grup, rinciannya adalah sebagai berikut:

53. OPERATING SEGMENTS

Geographical information

The operating segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Management has determined the operating segments based on reports reviewed by the Board of Directors, which has been identified as the Group's chief operating decision maker and which makes strategic decisions. The Board of Directors considers the business operations from the geographical operations consisting of Sumatera, Java Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi and Maluku and Papua.

For management reporting purposes, as at December 31, 2022 and 2021, the Group is divided into the geographical areas of Sumatera, Java Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua. These geographical operations are the basis on which the Group reports segment information, with the following details:

	2022					Jumlah/ Total	
	Sumatera	Jawa Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua		
Pendapatan usaha							Revenue
Pendapatan eksternal	103,582,055	866,865,064	35,252,654	31,316,750	7,454,446	1,044,470,969	External revenue
Pendapatan antar segmen	(59,834,211)	(500,744,911)	(20,363,708)	(18,090,132)	(4,306,064)	(603,339,026)	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan usaha	43,747,844	366,120,153	14,888,946	13,226,618	3,148,382	441,131,943	Total revenue
Hasil segmen							Segment results
Beban usaha	38,532,121	(270,480,160)	(14,651,411)	13,031,151	5,442,324	342,137,167	Operating expenses
Beban penyusutan	8,306,957	(29,595,207)	(2,804,881)	2,394,719	954,871	44,056,635	Depreciation expenses
Labai(rugi) usaha	(3,091,234)	66,044,786	(2,567,346)	(2,199,252)	(3,248,813)	54,938,141	Operating profit/(loss)
(Beban)/penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan	(3,245,545)	(14,218,043)	(832,370)	(983,456)	(224,378)	(19,503,792)	Unallocated (expenses)/revenue
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	300,585	3,369,838	5,166	-	-	3,675,589	Share in net income of associates and joint ventures
Penghasilan keuangan	-	687,495	-	-	-	687,495	Finance income
Beban keuangan	(3,013,682)	(12,279,291)	(826,600)	(764,131)	(251,461)	(17,135,165)	Finance costs
Penurunan nilai aset tetap	(107,059)	(896,516)	(19,376)	(13,039)	-	(1,035,990)	Provision for impairment of property plant and equipment
Cadangan atas ketidakpastian dalam perlakuan pajak	-	(84,606)	-	-	-	(84,606)	Allowance for uncertainty over tax treatment
Beban pajak	-	(7,126,952)	-	-	-	(7,126,952)	Income tax expense
Labai(rugi) bersih	(9,156,935)	35,496,711	(4,240,526)	(3,959,878)	(3,724,652)	14,414,720	Profit/(loss) for the year
Aset segmen							Segment assets
Jumlah aset konsolidasian	269,367,059	1,164,436,613	91,423,908	82,915,663	29,996,033	1,638,139,276	Total consolidated assets
Liabilitas segmen							Segment Liabilities
Jumlah liabilitas konsolidasian	18,371,351	609,644,608	7,427,343	8,306,324	2,939,084	646,688,710	Total consolidated liabilities
	2021					Jumlah/ Total	
	Sumatera	Jawa Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua		
Pendapatan usaha							Revenue
Pendapatan eksternal	40,616,465	299,064,191	13,939,628	10,821,525	2,530,198	366,972,007	External revenue
Pendapatan antar segmen	-	-	-	-	-	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan usaha	40,616,465	299,064,191	13,939,628	10,821,525	2,530,198	366,972,007	Total revenue
Hasil segmen							Segment results
Beban usaha	31,184,990	225,980,246	11,851,842	9,112,896	3,547,880	281,677,854	Operating expenses
Beban penyusutan	8,428,717	27,265,469	2,606,643	2,211,720	928,722	41,441,271	Depreciation expenses
Labai(rugi) usaha	1,002,758	45,818,476	(518,857)	(503,091)	(1,946,404)	43,852,882	Operating profit/(loss)
(Beban)/penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan	140,555	2,142,852	157,466	50,316	261,950	2,753,140	Unallocated (expenses)/revenue
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	412,813	2,819,017	(671)	-	-	3,231,159	Share in net income of associates and joint ventures
Penghasilan keuangan	15,684	771,196	351	-	-	787,231	Finance income
Beban keuangan	(2,899,587)	(15,856,362)	(755,437)	(663,043)	(201,326)	(20,375,755)	Finance costs
Penurunan nilai aset tetap	(534,108)	(454,583)	(263,562)	(434,839)	(821,243)	(2,508,335)	Provision for impairment of property plant and equipment
Cadangan atas ketidakpastian dalam perlakuan pajak	-	(4,519,237)	-	-	-	(4,519,237)	Allowance for uncertainty over tax treatment
Beban pajak	(628,657)	(9,349,040)	(68,510)	-	-	(10,046,207)	Income tax expense
Labai(rugi) bersih	(2,490,542)	21,372,319	(1,449,220)	(1,550,657)	(2,707,023)	13,174,877	Profit/(loss) for the year
Aset segmen							Segment assets
Jumlah aset konsolidasian	286,951,543	1,130,134,788	89,597,084	77,755,638	28,777,403	1,613,216,456	Total consolidated assets
Liabilitas segmen							Segment Liabilities
Jumlah liabilitas konsolidasian	279,265,620	147,252,735	91,308,439	78,313,229	35,469,310	631,609,333	Total consolidated

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/155 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI **54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES**

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki perjanjian penting sebagai berikut:

As at December 31, 2022, the Group has significant agreements, as follows:

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar

a. Fuel supply agreements

<u>Gas</u>	<u>Gas</u>			
<u>Sektor/ Sector</u>	<u>Pemasok/ Supplier</u>	<u>Periode/ Period</u>	<u>Satuan/ Unit</u>	<u>Kuantitas/ Quantity</u>
Muara Karang – Priok	PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java	2023*)	Bbtu	5,475
Cilegon			Bbtu	19,991
Muara Karang			Bbtu	22,572
Muara Tawar	PGN	2019 - 2030	Bbtu	27,682
Tanjung Priok			Bbtu	43,747
Sutami			Bbtu	1,862
New Tarahan			Bbtu	1,168
Muara Tawar				
Payo Selincah	PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	2019 - 2026	Bbtu	50,951
Rengat				
Siberida				
Duri				
Koto Gasib				
Keramasan				
Indralaya	PT Medco E&P Indonesia	2017 - 2027	Bbtu	70,260
Borang	PT Medco E&P Lematang			
Gresik				
Grati	Kangean Energy Indonesia Ltd.	2012 - 2027	Bbtu	368,700
Gresik	PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore	2023*)	Bbtu	4,672
Gresik	PGN SAKA eks Hess Ltd.	2006 - 2026	Bbtu	440,000
Teluk Lembu	EMP Korinci Baru Ltd.	2021 - 2026	Bbtu	73,945
PLTGU Riau, Balai Pungut	EMP Korinci Bentu Ltd.			
Keramasan	PT Pertamina EP	2023*)	Bbtu	1,059
Payo Selincah	PT Energasindo Heksa Karya	2009 - 2023	Bbtu	137,579
Sei Gelam				
Tarakan	PT Pertamina EP	2023*)	Bbtu	2,300
Nunukan	PT Pertamina EP	2023*)	Bbtu	700
Bontang	PT Pertamina (Persero)	2023*)	Bbtu	2,808
Tanjung Batu	PT Pertamina EP	2022-2024	Bbtu	3,650
Batam	PGN	2004 - 2023	Bbtu	72,270
Grati	PT Medco Sampang (Lapangan Oyong)	2023*)	Bbtu	6,187
Bangkalanai	Medco Indonesia (Bangkalanai) Ltd.	2013 - 2033	Bbtu	130,000
Muara Tawar	PT Pertamina EP	2018 - 2024	Bbtu	29,244
Tambak Lorok	PT Sumber Petrindo Perkasa	2014 - 2029	Bbtu	219,000
Grati	PT Medco Sampang (Lapangan Wortel)	2023*)	Bbtu	4,453
Melibur	PT Energi Mega Persada Malacca Strait	2020 - 2025	Bbtu	711
Tarakan	PT Medco E&P Tarakan	2022 - 2025	Bbtu	4,367
Purwodadi	PT Medco E&P Indonesia			
Gresik	PT Energasindo Heksa Karya	2023*)	Bbtu	621
	PT Petrogas Jatim Utama	2013 - 2023	Bbtu	61,068

*) Kontrak tahunan/Yearly contract.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/156 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut: (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

Gas (lanjutan)

Sektor/ Sector	Pemasok/ Supplier	Periode/ Period	Satuan/ Unit	Kuantitas/ Quantity
Arun Belawan Paya Pasir Muara Karang Priok Muara Tawar Jawa 1 Jawa Barat via NR Benoa Muara tawar via FSRU Lampung	Tanggung PSC Contract Parties ^{a)}	2016 - 2034	Kargo	696
Arun Belawan Paya Pasir Benoa & Gorontalo Balai Pungut Duri PLTGU Riau Sambera Tambak Lorok Batam	PT Pertamina (Persero)	2023*)	Kargo	Sesuai permintaan/ On demand
	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	2016 - 2023	Bbtu	6,600
	PT Pertagas Niaga	2017 - 2023	Bbtu	14,256
	PGN	2023*)	Bbtu	4,380
	Petrochina Company Limited	2016 - 2023	Bbtu	41,556
	PT Malamoi Olom Wobok	2020 - 2025	Bbtu	14,060
Jawa 1 Tambak Lorok Gresik	Tanggung PSC Contract Parties ^{a)}	2022 - 2035	Kargo	208
	PT Pertamina (Persero)	2022 - 2035	Bbtu	474,500
Simenggaris	JOB PT PHE Simenggaris dan/and PT Medco E&P Simenggaris	2021 - 2028	Bbtu	20,440
Luwuk	JOB PT PHE Tomori dan/and PT Medco E&P Tomori	2021 - 2027	Bbtu	12,775

*) Kontrak tahunan/Yearly contract

a) Tangguh PSC terdiri dari kontraktor BP Berau Ltd., KCT Berau Petroleum Ltd., MI Berau B.V., Nippon Oil Exploration (Berau).Ltd., BP Muturi Holdings B.V., CNOOC Muturi Limited, Indonesia Natural Gas Resources Muturi, Inc., BP Wiriagar Petroleum Ltd. dan Talisman Wiriagar Overseas Limited./Tangguh PSC consists of BP Berau Ltd., KCT Berau Petroleum Ltd., MI Berau B.V., Nippon Oil Exploration (Berau).Ltd., BP Muturi Holdings B.V., CNOOC Muturi Limited, Indonesia Natural Gas Resources Muturi, Inc., BP Wiriagar Petroleum Ltd. and Talisman Wiriagar Overseas Limited.

Sehubungan dengan perjanjian diatas, Perusahaan mempunyai fasilitas *stand-by letter of credit* dengan rincian sebagai berikut:

In relation with the above agreements, the Company has stand-by letter of credit facilities with the following details:

Bank penerbit/ Issuing Bank	Penerima manfaat/ Beneficiary	Mata uang/ Currency	Jumlah/ Total *)
BRI	Ophir Indonesia (Sampang) Pty.	USD	18,424,250
	PGN	USD	20,700
	PT Transportasi Gas Indonesia	USD	953,120
	Kangean Energy Indonesia	USD	9,037,754
	PT Petrogas Jatim Utama	IDR	94,785,778,477
	Medco Energi Sampang Pty. Ltd.	USD	8,910,000
Bank Mandiri	BP Berau Ltd.	USD	110,283,250
BNI	Conoco Philips (Gresik) Ltd., Singapore	USD	4,600,000
	Malamoi Olom Wobok	USD	4,104,000
	PT Perusahaan Gas Negara	USD	15,642,996
	Petrochina international Jabung Ltd.	USD	3,136,000

*) dalam jumlah penuh

*) in full amount

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/157 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan) **54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)**

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

a. Fuel supply agreements (continued)

Batubara

Coal

<u>Pemasok/Suppliers</u>	<u>Volume kontrak tahunan/ Annual contract volume (dalam/in metric ton) *</u>	<u>Periode/Period</u>
Rutin/Regular		
PT Bukit Asam Tbk.	1,700,000	2004 - 2031
CV Tahiti Coal	120,000	2017 - volume terpenuhi/volume fulfilled (360,000 MT)
PT Cahaya Bumi Perdana	25,000	2019 - 2025
CV Bara Mitra Kencana	60,000	2019 - 2025
CV Putri Surya Pratama Natural	30,000	2019 - 2025
PT Dasrat Sarana Arang Sejati	48,000	2019 - 2025
PT Allied Indo Coal Jaya	120,000	2019 - 2025
PLN Batubara	25,216,000	2020 - 2040
PT Adaro Indonesia	1,500,000	2014 - 2023
PT Oktasan Baruna Persada	2,100,000	2018 - 2026
Kerjasama konsorsium/Consortium		
PT Mivagio Coal Indonesia dan PT Nusa Alam Lestari	36,000	2022 - 2027
Program Percepatan/Fast Track Program		
PT Bukit Asam Tbk.	18,000,000	2010 - 2030
PT Titan Infra Energy **)	2,920,000	2007 - 2026
PT Hanson Energy	640,000	2011 - 2030
PT Rizki Anugrah Pertama	1,183,000	Agustus/August 2023
PT Lanna Harita Indonesia	300,000	2015 - 2025
PT Tunas Inti Abadi	600,000	2015 - 2025
PT Dizamatra Powerindo	500,000	2016 - 2025
PT Samantaka	960,000	2017 - 2027
PT Bara Energi Lestari	500,000	2017 - volume terpenuhi/volume fulfilled (1,000,000 MT)
PT Ade Putra Tanrajeng	300,000	2022 - 2027
PT Amanah Batu Alam Pesada	330,000	2022 - 2027
PT Berkat Murah Rejeki	200,000	2022 - 2023
PT Bhumi Rantau Energi	250,000	2022 - 2024
PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua	2,000,000	2022 - 2027
PT Sarolangun Prima Coal	300,000	2022 - 2027
PT Alamjaya Bara Pratama	900,000	2022 - 2027
PT Indexim Coalindo	1,100,000	2018 - 2028
Kerjasama konsorsium/Consortium		
PT Arutmin Indonesia dan/and PT Darma Henwa	5,553,000	2007 - 2027
PT Dwi Guna Laksana dan/and PT Borneo Indo Bara	1,890,000	2009 - 2033
PT Oktasan Baruna Persada dan/and PT Buana Rizky Armia	819,000	2009 - 2032
PT Energi Batubara Lestari dan/and PT Batara Batari Sinergy Nusantara	221,000	2014 - 2034
PT Eksploitasi Energi Indonesia dan/and PT Borneo Indobara	2,000,000	2022 - 2027
PT Bara Makmur Mandiri, PT Khatulistiwa Makmur Persada, PT Anugrah Mining Persada dan/and PT Kurnia Alam Investama	286,000	2022 - 2027
PT Global Energi Lestari dan/and PT Tempirai Energy Resources	275,000	2022 - 2027
PT Global Energi Lestari, PT Era Perkasa Mining dan/and PT Quasar Inti Nusantara	2,215,000	2022 - 2027
PT Inti Garda Nusantara dan/and CV Inti Karya Mandiri	180,000	2022 - 2023
PT Pancaran Surya Abadi dan/and PT Bunarus Laju Sejahtera	180,000	2022 - 2025
PT Rekamitra Cipta Tambang dan/and CV Cinta Puri Pratama	300,000	2022 - 2025
PT Rizki Anugrah Pratama, PT Kasongan Mining Mills, PT Hutamas Koado, PT Marga Perkasa, PT Arini dan CV Hirzan	1,490,000	2022-2027

*) Dalam jumlah penuh/In full amount

**) Sebelumnya/formerly PT Titan Mining Energy

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/158 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

Batubara (lanjutan)

Pada tanggal 9 Maret 2018, Kementerian ESDM menerbitkan surat keputusan No. 1395 K/30/MEM/2018 mengenai harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berlaku surut sejak 1 Januari 2018. Sesuai surat keputusan tersebut, harga batubara ditetapkan sebesar maksimal USD70/metrik ton dengan acuan pada kalori 6.322 kcal/kg. Surat keputusan tersebut juga mengatur formula untuk menghitung harga dengan spesifikasi yang berbeda seperti yang tercantum dalam keputusan tersebut. Pada tanggal 26 Desember 2019, Kementerian ESDM menerbitkan Surat Keputusan No. 261 K/30/MEM/2019 mengenai pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2020 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Surat keputusan ini mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 mengenai harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pada tanggal 2 November 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Poin utama peraturan tersebut yang berkaitan dengan Grup adalah hasil pertambangan batubara termasuk dalam jenis barang yang dikenai PPN, maka seluruh pembelian batubara dikenakan PPN terhitung mulai tanggal tersebut dengan tarif 10%. Sesuai dengan UU HPP yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021, tarif PPN yang akan berlaku per tanggal 1 April 2022 adalah sebesar 11%.

Harga pembelian batubara pada tahun berjalan setelah disesuaikan dengan nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature* ("AFT") dan *Hardgrove Grindability Index* ("HGI") berkisar antara Rp320.945 sampai dengan Rp1.434.804 per ton (2021: Rp256.699 sampai dengan Rp1.167.701 per ton).

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

a. Fuel supply agreements (continued)

Coal (continued)

On March 9, 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Decree No. 1395 K/30/MEM/2018 regarding the coal selling price for electricity supply for the public interest which was retroactively valid from January 1, 2018. According to the decree, the coal price was regulated at a maximum price of USD70/metric ton referenced to coal at 6,322 kcal/kg. The decree also regulated the formula to calculate the price for different specifications of coal as listed in the decree. On December 26, 2019, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Decree No. 261K/30/MEM/2019 regarding the fulfillment of domestic coal needs in 2020 which was effective on January 1, 2020. This decree revokes the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1395K/30/MEM/2018 regarding the selling price of coal for the supply of electricity for public purposes.

On November 2, 2020, the Minister of Law and Human Rights issued Law No. 11 year 2020 on Job Creation. The main point of the law relating to the Group relates to the inclusion of coal mining products in the types of goods subject to VAT, and therefore all purchases of coal are subject to VAT at 10%. In accordance with the HPP Law which was approved on October 29, 2021, the VAT rate that will be applied as at April 1, 2022 is 11%.

The price of coal purchases for the current year after adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, *Ash Fusion Temperature* ("AFT") and *Hardgrove Grindability Index* ("HGI") ranges from Rp320,945 to Rp1,434,804 per ton (2021: Rp259,699 to Rp1,167,701 per ton).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/159 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

Bahan bakar minyak

Perusahaan dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah di addendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mean Oil Platts Singapore* ("MOPS") ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; dan (vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai surveyor independen.

Berdasarkan Addendum IV Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 16 Mei 2017, PLN dan Pertamina menyepakati perpanjangan jangka waktu pasokan hingga tahun 2020.

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

a. Fuel supply agreements (continued)

Fuel

The Company and Pertamina entered into a Fuel Sale and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001. This agreement was amended on May 16, 2007, whereby, the Company and Pertamina agreed among other things: (i) that the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina and the fuel price of 109.5% from Mean Oil Platts Singapore ("MOPS") plus VAT for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) that the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) that the terms of payment and penalty charges on late payment use a monthly rate of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) that effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) that the maximum payable to Pertamina, including bonds which will be issued amounted to Rp18 trillion; and (vi) that this agreement is valid for five years from January 1, 2007 until December 31, 2011.

Based on the Joint Deal Letter dated May 16, 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

Based on Amendment IV of the Fuel Sale and Purchase Agreement dated May 16, 2017, PLN and Pertamina agreed to extend the period of supply until 2020.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/160 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

Bahan bakar minyak (lanjutan)

Atas perjanjian ini sudah diamandemen berdasarkan Addendum VII tanggal 3 Juni 2021, PLN dan Pertamina menyepakati adanya reviu harga dan perpanjangan jangka waktu pasokan hingga tahun 2023.

Berdasarkan Addendum VIII tertanggal 17 Desember 2021, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Selama masa negosiasi, formula harga baru untuk periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, menggunakan formula harga sementara yang telah disepakati pada addendum untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut, formula harga baru akan disepakati untuk periode terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Uap panas bumi

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup memiliki perjanjian dengan beberapa pemasok untuk pengadaan uap panas bumi sebagai berikut:

<u>Sektor/Sector</u>	<u>Pemasok/Supplier</u>	<u>Periode/ Period</u>
Kamojang Unit 1, 2 & 3	PGE	2012 - 2040
Lahendong Unit 1	PGE	2002 - 2032
Lahendong Unit 2 & 3	PGE	2007 - 2039
Lahendong Unit 4	PGE	2011 - 2041
Ulubelu Unit 1 & 2	PGE	2012 - 2042
Hululais Unit 1 & 2	PGE	30 tahun/years*)
Sungai Penuh Unit 1 & 2	PGE	30 tahun/years*)
Kotamobagu Unit 1,2,3 & 4	PGE	30 tahun/years*)
Darajat Unit 1	PGE, Star Energy Geothermal Darajat I Ltd., Star Energy, Geothermal Darajat II Ltd.	1994 - 2030
Gunung Salak Unit 1,2 & 3	PGE, Star Energy Geothermal Salak Ltd., Ltd., Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd.	1993 - 2040

*) Sejak Commercial Date/Since Commercial Date

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Fuel supply agreements (continued)

Fuel (continued)

This agreement has been amended based on Addendum VII dated June 3, 2021, in which PLN and Pertamina agreed on a price review and to extend the supply period until 2023.

Based on Addendum VIII dated December 17, 2021, the agreement on the sale and purchase price of fuel oil (HSD and MFO) from January 1, 2021 to December 31, 2023 between Pertamina and the Company is as follows:

- a. During the negotiation period, the new price formula for the period of January 1, 2021 to December 31, 2021, uses the provisional price formula agreed in the amendment for the period of January 1, 2018 to December 31, 2020.
- b. Based on the above situation, a new price formula will be agreed for the period starting from January 1, 2022 to December 31, 2023.

Geothermal steam

As at December 31, 2022 and 2021, the Group entered into geothermal steam purchase agreements with several suppliers as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/161 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan kontrak penjualan energi

b. Power purchase agreements and energy sales contracts

Sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan PPA dan ESC dengan IPP skala besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegotiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PT PLN (Persero) di bawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas harga jual listrik IPP dan harga jual Perusahaan.

Prior to 1997, the Company entered into PPAs and ESCs with large-scale IPPs. In 1999, the Company entered into renegotiation of the PPAs and ESCs through a Working Group on PT PLN (Persero) Special Contract Renegotiation under the direction of the Government. Such renegotiation includes, among other subjects, equalisation in contract conditions, reasonableness of price and disparity of selling price between the IPPs and the Company.

Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Grup dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek yang bersangkutan.

Based on the agreements with certain IPPs, the Group may exercise its option to purchase all of the IPP's rights, title and interest in the projects at any time during the contract period.

Pada tanggal 31 Desember 2022, perjanjian signifikan antara Grup dengan IPP adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2022, the significant agreements between the Group with IPPs are as follows:

Sudah beroperasi

In operation

<u>Perusahaan/ Company</u>	<u>Proyek/ Project</u>	<u>Bahan Bakar/ Fuel</u>	<u>Kapasitas / Capacity (MW)</u>	<u>AF (%)</u>	<u>Periode/ Period</u>	<u>Tanggal Operasi komersial/ Commercial Operation Date</u>
Perusahaan						
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	PLTU Jawa-7 Bojonegara (2x1000 MW)	Batubara/Coal	2000	86%	2021 - 2046	8 Juli 2021/ July 8, 2021
PT Bhumi Jati Power	PLTU Jawa-4 (FTP2) (2x1000 MW)	Batubara/Coal	2000	86%	2022 - 2047	17 Maret 2022/ March 17, 2022
PT Bhimasena Power Indonesia	PLTU Jawa Tengah 1 (2x1000 MW)	Batubara/Coal	1900	86%	2022 - 2047	31 Agustus 2022/ August 31, 2022
PT Paiton Energy	PLTU Paiton 1 (2x615 MW)	Batubara/Coal	1230	85%	2001 - 2041	01 Januari 2001/ January 1, 2001
PT Jawa Power	PLTU Paiton 2 (2x610 MW)	Batubara/Coal	1220	83%	2000 - 2030	01 November 2020/ November 01, 2020
PT Sumber Segara Primadaya	PLTU Jawa-8 – Cilacap (1x945 MW)	Batubara/Coal	945	80%	2019 - 2049	9 November 2019/ November 9, 2019
PT Paiton Energy	PLTU Paiton 3 (1x815 MW)	Batubara/Coal	815	85%	2012 - 2042	18 Maret 2012/ March 18, 2012
PT Cirebon Electric Power	PLTU Cirebon (1x660 MW)	Batubara/Coal	660	80%	2012 - 2042	27 Juli 2012/ July 27, 2012
PT Lestari Banten Energi	PLTU Banten (1x625 MW)	Batubara/Coal	625	80%	2017 - 2042	28 Maret 2017/ March 28, 2017
PT Sumber Segara Primadaya	PLTU Cilacap Ekspansi (1x614 MW)	Batubara/Coal	614	80%	2016 - 2046	10 Juni 2016/ June 10, 2016
PT Sumber Segara Primadaya	PLTU Cilacap (2x281 MW)	Batubara/Coal	562	80%	2007 - 2037	01 Februari 2007/ February 01, 2007
PT General Energy Bali	PLTU Celukan Bawang (2x125 & 1x130 MW)	Batubara/Coal	380	85%	2015 - 2045	23 September 2015/ September 23, 2015
PT DSSP Power Sumsel	PLTU MT Sumsel-5 (2x150 MW)	Batubara/Coal	300	80%	2016 - 2041	20 Desember 2016/ December 20, 2016
PT Medco Ratch Power Riau	PLTGU Riau (275 MW)	Gas Pipal/Gas Pipe	275	60%	2022 - 2042	10 Februari 2022/ February 10, 2022
Pertamina dan Star Energy Geothermal Ltd	PLTP Darajat Unit 2 & 3	Panas Bumi/Geothermal	220	80%	2000 - 2030	1 Februari 2000/ February 1, 2000
PT Bosowa Energi	PLTU Jeneponto (2x125 MW)	Batubara/Coal	250	80%	2018 - 2048	01 April 2018/ April 01, 2018
PT Priamanaya Energi	PLTU MT Keban Agung (2x120 MW)	Batubara/Coal	240	80%	2016 - 2046	01 Mei 2016/ May 1, 2016

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/162 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan) **54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)**

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan kontrak penjualan energi (lanjutan)

b. Power purchase agreements and energy sales contracts (continued)

Sudah beroperasi (lanjutan)

In operation (continued)

<u>Perusahaan/ Company</u>	<u>Proyek/ Project</u>	<u>Bahan Bakar/ Fuel</u>	<u>Kapasitas / Capacity (MW)</u>	<u>AF (%)</u>	<u>Periode/ Period</u>	<u>Tanggal Operasi komersial/ Commercial Operation Date</u>
Perusahaan (lanjutan)						
PT Gou Hua Energi Musi Makmur Indonesia	PLTU MT Simpang Belimbing (2x113,5 MW)	Batubara/Coal	227	80%	2013 - 2043	27 Februari 2013/ February 27, 2013
Star Energy Geothermal Ltd	PLTP Wayang Windu Unit 1&2	Panas Bumi/Geothermal	227	95%	2000 - 2030	1 Juni 2000/ June 1, 2000
PT Bukit Pembangkit Innovative	PLTU MT Banjarsari (2x110 MW)	Batubara/Coal	220	80%	2015 - 2045	30 Juni 2015/ June 30, 2015
PT GCL Indo Tenaga	PLTU Kalbar-1 (2x100 MW)	Batubara/Coal	200	80%	2021 - 2046	25 Juni 2021/ June 25, 2021
PT Tenaga Listrik Bengkulu	PLTU Bengkulu (2x100 MW)	Batubara/Coal	200	80%	2020 - 2045	27 Juli 2020/ July 27, 2020
PT SKS Listrik Kalimantan	PLTU Kalteng-1 / Kalselteng-1 (2x100 MW)	Batubara/Coal	200	80%	2020 - 2045	4 November 2020/ November 4, 2020
PT Indonesia Energi Dinamika (INDOEKA)	PLTU Kaltim-4 (2x100 MW)	Batubara/Coal	200	80%	2020 - 2045	14 April 2020/ April 14, 2020
PT Graha Power Kaltim	PLTU Kaltim-2 (FTP2) (2x100 MW)	Batubara/Coal	200	80%	2020 - 2045	31 Maret 2020/ March 31, 2020
PT Bosowa Energi	PLTU Jeneponto (2x100 MW)	Batubara/Coal	200	80%	2012 - 2042	31 Oktober 2012/ October 31, 2012
PT Tanjung Power Indonesia	PLTU Kalsel-1 (FTP2) (2x100 MW)	Batubara/Coal	200	80%	2019 - 2044	14 Desember 2019/ December 14, 2019
Star Energy Geothermal Ltd	PLTP Salak Unit 4-6	Panas Bumi/Geothermal	197	85%	2000 - 2030	1 Desember 2000/ December 1, 2000
PT Poso Energy	PLTA Poso	Tenaga Air/Hydro	315	845.52 GWh/year	2012 - 2042	30 Desember 2012/ December 30, 2012
PT Bajradaya Sentranusa	PLTA Asahan	Tenaga Air/Hydro	180	1,175 GWh/year	2011 - 2041	18 Januari 2011/ January 18, 2011
PT Cikarang Litrindo	PLTGU Cikarang Ekspansi (150 MW)	Gas Pipa/Gas Pipe	150	72%	2011 - 2031	01 Juni 2011/ June 01, 2011
PT Asrigita Prasarana	PLTGU Palembang Timur (150 MW)	Gas Pipa/Gas Pipe	150	85%	2005 - 2025	16 Desember 2005/ December 16, 2005
PT Bekasi Power	PLTGU Bekasi Power	Gas Pipa/Gas Pipe	119	90%	2013 - 2033	5 Januari 2013/ January 5, 2013
PT Kertanegara Energi Perkasa	PLTGU Senipah (117 MW)	Gas Pipa/Gas Pipe	117	85%	2015 - 2040	17 Maret 2015/ March 17, 2015
PT Metaepsi Pejebe Power Generation	PLTGU Gunung Megang (2x40 MW)	Gas Pipa/Gas Pipe	110	85%	2007 - 2027	10 November 2007/ November 10, 2007
Sarulla Operations Ltd	PLTP Sarulla 1 Unit 1, 2	Panas Bumi/Geothermal	220	90%	2017 - 2047	2 Oktober 2017/ October 2, 2017
Sarulla Operations Ltd	PLTP Sarulla 1 Unit 3	Panas Bumi/Geothermal	110	90%	2018 - 2048	3 April 2018/ April 3, 2018
PT Minahasa Cahaya Lestari	PLTU Sulut-3 (2x50 MW)	Batubara/Coal	100	80%	2021 - 2046	11 Februari 2021/ February 11, 2021
PT DSSP Power Kendari	PLTU Kendari-3 (2x50 MW)	Batubara/Coal	100	80%	2019 - 2044	28 Oktober 2019/ October 28, 2019
PT Gorontalo Listrik Perdana	PLTU Sulbagut-1 (2x50 MW)	Batubara/Coal	100	80%	2021 - 2046	31 Desember 2021/ December 31, 2021
PT Malea Energy	PLTA Malea	Tenaga Air/Hydro	90	474 GWh/year	2021 - 2051	2 Juli 2021/ July 2, 2021
PT Supreme Energy Rantau Dedap	PLTP Rantau Dedap	Panas Bumi/Geothermal	86	90%	2021 - 2051	26 Desember 2021/ December 26, 2021
PT Supreme Energy Muara Laboh	PLTP Muara Laboh	Panas Bumi/Geothermal	80	90%	2019 - 2049	16 Desember 2019/ December 16, 2019
PT UPC Sidrap Bayu Energi	PLTB Sidrap	Angin/Wind	70	92.5% - 107.5%	2018 - 2048	5 April 2018/ April 5, 2018
PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Kamojang Unit 4	Panas Bumi/Geothermal	60	90%	2008 - 2038	26 Januari 2008/ January 26, 2008

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/163 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan) **54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)**

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan kontrak penjualan energi (lanjutan)

Sudah beroperasi (lanjutan)

b. Power purchase agreements and energy sales contracts (continued)

In operation (continued)

<u>Perusahaan/ Company</u>	<u>Proyek/ Project</u>	<u>Bahan Bakar/ Fuel</u>	<u>Kapasitas/ Capacity (MW)</u>	<u>AF (%)</u>	<u>Periode/ Period</u>	<u>Tanggal Operasi komersial/ Commercial Operation Date</u>
Perusahaan (lanjutan)						
PT Energi Bayu Jeneponto	PLTB Tolo	Angin/Wind	60	92.5% - 107.5%	2019 - 2049	14 Mei 2019/ May 14, 2019
PT Tanggamus Electric Power	PLTA Semangka	Tenaga Air/Hydro	56	278.7 GWh/year	2018 - 2048	2 Juli 2018/ July 2, 2018
PT Indo Ridlatama Power	PLTU MT Kaltim-1 (2x27,5 MW)	Batubara/Coal	55	80%	2018 - 2048	01 Desember 2018/ December 01, 2018
PT Geo Dipa Energi	PLTP Dieng	Panas Bumi/Geothermal	55	95%	2002 - 2032	11 Oktober 2002/ October 11, 2002
PT Geo Dipa Energi	PLTP Patuha	Panas Bumi/Geothermal	55	95%	2014 - 2054	27 September 2014/ September 27, 2014
PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Ulubelu Unit 3	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2016 - 2046	26 Juli 2016/ July 26, 2016
PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Ulubelu Unit 4	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2017 - 2047	25 Maret 2017/ March 25, 2017
PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Lumut Balai	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2019 - 2049	1 September 2019/ September 1, 2019
PT Cahaya Fajar Kaltim	PLTU Embalut Ekspansi (1x50 MW)	Batubara/Coal	50	87%	2014 - 2039	14 Agustus 2014/ Agustus 14, 2014
PT. Lombok Energy Dynamics	PLTU Lombok Timur (2x25 MW)	Batubara/Coal	50	80%	2017 - 2042	10 April 2017/ April 10, 2017
PT Rekind Daya Mamuju Lainnya	PLTU Mamuju (2x25 MW)	Batubara/Coal	50 523	80%	2018 - 2043	18 September 2018/ September 18, 2018
PLN Batam						
PT Dalle Energy Batam	Panaran, Pulau Batam/Batam Island	Gas/Gas	86.5	90%	2005 - 2025	01 Desember 2005/ December 01, 2005
PT Mitra Energy Batam	Panaran, Pulau Batam/Batam Island	Gas/Gas	55	84%	2004 - 2034	29 Oktober 2004/ October 29, 2004
PT Mitra Energy Batam	Panaran, Pulau Batam/Batam Island	Gas/Gas	22.2	-	2014 - 2034	8 September 2014/ September 8, 2014
PT Tanjung Kasam Power	Tanjung Kasam, PulauBatam/ Batam Island	Batubara/Coal	110	85%	2012 - 2021	25 Oktober 2012/ October 25, 2012
PT Energi Listrik Batam	PLTU Kaltim-2 (FTP2) (2x100 MW)	Gas/Gas	70	85%	2016 - 2036	01 Mei 2016/ May 01, 2016
PT Sorik Merapi Geothermal Power	Sorik Marapi #3	Panas Bumi/Geothermal	50	90%	2022 - 2052	7 Oktober 2022/ October 7, 2022
Jumlah			20,177			Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/164 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan kontrak penjualan energi (lanjutan)

b. Power purchase agreements and energy sales contracts (continued)

Belum beroperasi (dalam tahap pengembangan)

Not yet in operation (development stage)

No.	Perusahaan/Company	Proyek/Project	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF ⁽¹⁾ (%)	Periode/ Period	Status/ Status
1	PT Indo Raya Tenaga	PLTU Jawa-9&10	Batubara/Coal	2,000	86%	2024 - 2049	Tahap Pembangunan/Construction Stage
2	PT Jawa Satu Power	PLTGU Jawa-1	LNG	1,760	60%	2023 - 2048	Tahap Pembangunan/Construction Stage
3	PT Hualian Bukit Asam Power	PLTU MT Sumsel-8	Batubara/Coal	1,243	80%	2023 - 2048	Tahap Pembangunan/Construction Stage
4	PT Cirebon Energi Prasarana	PLTU Jawa-1 (FITP2)	Batubara/Coal	924	86%	2023 - 2048	Tahap Pembangunan/Construction Stage
5	PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia	PLTU MT Sumsel-1	Batubara/Coal	800	80%	2023 - 2053	Tahap Pembangunan/Construction Stage
6	PT North Sumatra Hydro Energy	PLTA Batang Toru	Tenaga Air/Hydro	510	47%	2026 - 2056	Tahap Pembangunan/Construction Stage
7	PT Meulaboh Power Generation	PLTA Meulaboh 3&4	Batubara/Coal	400	80%	2023 - 2048	Tahap Pembangunan/Construction Stage
8	PT Kerinci Merangin Hidro	PLTA Merangin	Tenaga Air/Hydro	350	41%	2025 - 2055	Tahap Pembangunan/Construction Stage
9	PT Sumbangselenergi Sakti Pewali	PLTU MT Sumbangsel-1	Batubara/Coal	300	80%	2024 - 2049	Tahap Pembangunan/Construction Stage
10	PT Pembangunan Jawa Bali Masdar Solar Energy	PLTS Terapung Citra	Suryai/Solar	145	17%	2023 - 2053	Tahap Pembangunan/Construction Stage
11	PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD)	Rantau Dedap #2	Panas Bumi/Geothermal	134	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
12	Star Energy Geothermal Wayang Windu	Wayang Windu #4	Panas Bumi/Geothermal	120	90%	2028 - 2058	Potensi/Potential
13	PT Sejahtera Alam Energy (SAE)	Baturaden #1	Panas Bumi/Geothermal	110	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
14	PT Supreme Energy Rajabasa	Rajabasa #1	Panas Bumi/Geothermal	110	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
15	PT Supreme Energy Rajabasa	Rajabasa #2	Panas Bumi/Geothermal	110	90%	2023 - 2059	Eksplorasi/Exploration
16	PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML)	Muara Laboh #2	Panas Bumi/Geothermal	140	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
17	PT Sintesa Banten Geothermal	Rawadano #2	Panas Bumi/Geothermal	80	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
18	PT Sejahtera Alam Energy (SAE)	Baturaden #2	Panas Bumi/Geothermal	75	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
19	Bali Energy Limited (BEL)	Bedugul #2	Panas Bumi/Geothermal	55	85%	2030 - 2055	Eksplorasi/Exploration
20	Star Energy Geothermal Wayang Windu	Wayang Windu #3	Panas Bumi/Geothermal	60	90%	2026 - 2056	Eksplorasi/Exploration
21	Bali Energy Limited (BEL)	Bedugul #1	Panas Bumi/Geothermal	10	95%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
22	Geo Dipa Energy	Dieng #2	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2025 - 2055	Tahap Pembangunan/Construction Stage
23	Geo Dipa Energy	Dieng #3	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2028 - 2058	Eksplorasi/Exploration
24	Geo Dipa Energy	Dieng #4	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2031 - 2061	Eksplorasi/Exploration
25	Star Energy Geothermal	Guning Salak #7	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
26	Pertamina Geothermal Energy	Hululais #1	Panas Bumi/Geothermal	55	85%	2025 - 2055	Pendanaan/Financing
27	Pertamina Geothermal Energy	Hululais #2	Panas Bumi/Geothermal	55	85%	2025 - 2055	Pendanaan/Financing
28	PT Medco Cahaya Geothermal	Ijen #1	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2024 - 2054	Eksplorasi/Exploration
29	PT Medco Cahaya Geothermal	Ijen #2	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2026 - 2056	Eksplorasi/Exploration
30	PT Pertamina Geothermal Energy	Lumut Balai #2	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2024 - 2054	Tahap Pembangunan/Construction Stage
31	PT Pertamina Geothermal Energy	Lumut Balai #3	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2024 - 2054	Potensi/Potential
32	PT Pertamina Geothermal Energy	Lumut Balai #4	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2024 - 2054	Potensi/Potential
33	PT Geo Dipa Energi	Patuha #2	Panas Bumi/Geothermal	55	75%	2025 - 2055	Tahap Pembangunan/Construction Stage
34	PT Geo Dipa Energi	Patuha #3	Panas Bumi/Geothermal	55	75%	2028 - 2058	Eksplorasi/Exploration
35	PT Geo Dipa Energi	Patuha #4	Panas Bumi/Geothermal	55	75%	2029 - 2059	Potensi/Potential
36	PT Pertamina Geothermal	Sungai Penuh #1	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2028 - 2058	Potensi/Potential
37	PT Pertamina Geothermal	Sungai Penuh #2	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2028 - 2058	Potensi/Potential
38	PT Bakrie Damakarya	Telaga Ngebel #1	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2027 - 2057	Eksplorasi/Exploration
39	PT Bakrie Damakarya	Telaga Ngebel #2	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2030 - 2057	Potensi/Potential
40	PT Bakrie Damakarya	Telaga Ngebel #3	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2030 - 2057	Potensi/Potential
41	Geo Dipa Energy	Dieng #5	Panas Bumi/Geothermal	50	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
42	Geo Dipa Energy	Dieng #6	Panas Bumi/Geothermal	50	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
43	PT Sorik Merapi Geothermal Power	Sorik Marapi #4	Panas Bumi/Geothermal	50	90%	2022 - 2051	Eksplorasi/Exploration
44	PT Sorik Merapi Geothermal Power	Sorik Marapi #5	Panas Bumi/Geothermal	50	90%	2022 - 2051	Eksplorasi/Exploration
45	Lainnya/Others c)			923			
Jumlah				11,404			Total

- a) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 20 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal operasi komersial.
- b) AF = Faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perusahaan.
- c) Meliputi kontrak dengan IPP, yang terdiri dari IPP dalam tahap pembangunan dan IPP dalam tahap pembiayaan PPA berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan mini hydro dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.

- a) The agreements are effective from the date of signing and buying and selling of electricity is valid between 20 to 30 years starting from the commercial operation date.
- b) AF = Power supply factor which must be absorbed by the Company.
- c) Represents contracts with IPPs, consisting of IPPs under construction and IPPs in the financing stage, and PPAs which are located in several areas of Indonesia which will use coal, geothermal and mini hydro for generation with each power plant's capacity less than 50 MW.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/165 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan kontrak penjualan energi (lanjutan)

Belum beroperasi (dalam tahap pengembangan) (lanjutan)

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi, dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

Selain dari perjanjian jual beli tenaga listrik di atas, Grup juga memiliki beberapa perjanjian sewa yang termasuk dalam kategori sewa operasi.

c. Perolehan barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi adalah sebagai berikut:

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Power purchase agreements and energy sales contract (continued)

Not yet in operation (development stage) (continued)

The electricity power price per kWh for gas, MFO and coal power plants are determined by certain formulas as stated in the agreement which regulates, among other subjects, capital cost recovery, fixed operation and maintenance cost payment, fuel expense and variable operation and maintenance cost payment. For geothermal heat power plants, the electricity power price is determined by a certain formula as stated in the agreement, involving, among other things, *Energy Charge* and *Capacity Charge*.

In addition to the above PPAs, the Group also entered into rental agreements that fall into the category of operating leases.

c. Capital expenditures

As at December 31, 2022 and 2021, total commitments for capital expenditures based on contracts, which are related to procurement of power plants, transmission and distribution are as follows:

		2022		
Mata Uang/ Currencies	Jumlah dalam mata uang asing/ Amount in foreign currencies*)	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent		
Program percepatan				<i>Fast track program</i>
Kontrak pembangkitan	USD	44,599,629	695,397	<i>Power plant contracts</i>
	Rupiah	-	<u>1,268,234</u>	
			<u>1,963,631</u>	
Kontrak transmisi	Rupiah	-	<u>65,282</u>	<i>Transmission contracts</i>
Kontrak konstruksi rutin	USD	660,301,216	10,295,417	<i>Regular construction contracts</i>
	EUR	195,846,989	3,252,744	
	JPY	8,678,537,824	1,023,685	
	Rupiah	-	33,786,491	
	Lain-lain/Others**)		<u>10,702</u>	
			<u>48,369,039</u>	

*) Dalam jumlah penuh
**) Perolehan barang modal dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount
**) Capital expenditures denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/166 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Perolehan barang modal (lanjutan)

c. Capital expenditures (continued)

		<u>2021</u>		
		Jumlah dalam mata uang asing/ Amount in foreign currencies*)		Setara Rupiah/ Rupiah equivalent
Mata Uang/ Currencies				
Program percepatan Kontrak pembangkitan	USD	45,929,500	655,638	<i>Fast track program Power plant contracts</i>
	Rupiah	-	<u>1,301,947</u>	
			<u>1,957,585</u>	
Kontrak transmisi	Rupiah	-	<u>121,795</u>	<i>Transmission contracts</i>
Kontrak konstruksi rutin	USD	817,364,382	11,662,976	<i>Regular construction contracts</i>
	EUR	234,869,272	3,787,699	
	JPY	22,542,890,164	2,792,834	
	NZD	542,100	5,274	
	Rupiah	-	35,407,623	
Lain-lain/Others**)			<u>12</u>	
			<u>53.656.418</u>	

*) Dalam jumlah penuh

**) Perolehan barang modal dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

Jumlah diatas adalah diluar dari nilai tersisa pembayaran di muka yang sudah dibayarkan oleh Grup sesuai dengan masing-masing kontrak, yang nantinya akan mengurangi pembayaran di masa depan yang dilakukan oleh Grup.

Program percepatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 tanggal 23 Desember 2009, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa - Bali.

Kontrak pembangkitan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.489 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

*) In full amount

**) Capital expenditures denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date

The above amount excludes the remaining advance payments that have been paid by the Group in accordance with the respective contracts, which then will reduce future payments to be made by the Group.

Fast track program

Based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 Year 2006 dated July 5, 2006 which was amended by Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 dated December 23, 2009, the Government mandates the Company to build coal-fired PLTUs at 42 locations in Indonesia, which include ten power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 32 power plants with aggregate capacity of 2,769 MW outside Java - Bali.

Power plant contracts

Until December 31, 2022, the Company has signed 37 EPC contracts which consist of ten electricity power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 27 electricity power plants with aggregate capacity of 2,489 MW outside Java - Bali. Based on the EPC contracts, the Company is required to pay the contractor a down payment, which is approximately 15% of the contract price and the remaining 85% will be funded through credit facilities from banks.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/167 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perolehan barang modal (lanjutan)

Program percepatan (lanjutan)

Kontrak pembangkitan (lanjutan)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar USD876.217.780 (nilai penuh) dan Rp4.790.016 untuk 35 kontrak EPC yang dicatat sebagai aset dalam pembangunan (Catatan 6). Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

Kontrak transmisi

Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

Kontrak konstruksi rutin

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri Perusahaan dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

d. Fasilitas pinjaman yang belum digunakan

Penerusan pinjaman

<u>Mata uang/Currencies</u>	<u>Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)</u>	<u>Setara/ Equivalent Rp</u>
USD	610,000,000	9,511,120
JPY	3,419,397,366	403,338
Jumlah/Total		<u>9,914,458</u>

*) Dalam jumlah penuh

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, fasilitas pinjaman belum digunakan masing-masing setara Rp9.547.643 dan Rp4.717.771 dikenakan provisi masing-masing sebesar 0,10% - 0,25% dan 0,10% per tahun, sedangkan fasilitas masing-masing sebesar Rp366.815 dan Rp1.469.117 tidak dikenakan provisi. Fasilitas ini berakhir antara tahun 2022 sampai dengan 2028.

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Capital expenditures (continued)

Fast track program (continued)

Power plant contracts (continued)

Until December 31, 2022, the Company has made down payment amounting to USD876,217,780 (full amount) and Rp4,790,016 for 35 EPC contracts which is recorded as construction in progress (Note 6). The down payments are funded by the proceeds of the issued Guaranteed Notes and withdrawal of credit facilities for the fast track program.

Transmission contracts

Transmission contracts are contracts for upgrading and constructing new transmission and sub-stations in Java and outside Java. These projects are financed by the Company's own funds and withdrawal of credit facilities from banks.

Regular construction contracts

Capital expenditure commitments for regular construction represent project contracts signed for additional electricity generating plants and development of the transmission and distribution network. These projects are financed by the Company's own funds and other external funding through offshore loans, grants and investment projects from the state budget.

d. Unused loan facilities

Two-step loans

<u>Dalam mata uang asing/ In foreign currencies*)</u>	<u>Setara/ Equivalent Rp</u>
610,000,000	9,511,120
3,419,397,366	403,338
	<u>9,914,458</u>

*) In full amounts

As at December 31, 2022 and 2021, each of the unused facilities equivalent to Rp9,547,463 and Rp4,717,771, each bear a provision charge of 0.10% - 0.25% and 0.10% per annum, while the remaining facilities each of Rp366,815 and Rp1,469,117 do not bear any provision charge. These facilities will be due between 2022 and 2028.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/168 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

d. Fasilitas pinjaman belum digunakan (lanjutan)

d. Unused loan facilities (continued)

Perjanjian pinjaman tidak terkait program percepatan

Loan agreements not related to fast track program

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, rincian fasilitas pinjaman tidak terkait program percepatan adalah sebagai berikut:

Up to the completion date of the consolidated financial statements, details of loan facilities non-related to the fast track program are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded	Fasilitas maksimum/ Maximum facility*)	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ Unused loan facilities*)	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Periode/ Period**) Tahun/Year
<u>Fasilitas pinjaman dalam USD/USD loan facilities</u>					
1	JBIC PLTU Lontar Extension Facility Tr.A	108	20	14 Maret 2016/ March 14, 2016	16
2	JBIC PLTU Lontar Extension Facility Tr.B	72	13	14 Maret 2016/ March 14, 2016	16
3	IDB Power Grid Enhancement Project	330	127	10 Januari 2017/ January 10, 2017	15
4	JBIC PLTU Kalselteng 2 Facility Tr. A	53	31	20 Juni 2017/ June 20, 2017	15
5	JBIC PLTU Kalselteng 2 Facility Tr. B	36	21	20 Juni 2017/ June 20, 2017	15
6	Credit Agricole CIB Paris PLTGU Muara Tawar	280	51	8 November 2017/ November 8, 2017	15
7	HSBC PLTGU Tambak Lorok III	214	88	19 Februari 2018/ February 19, 2018	15
8	ADB ADB 4009-INO - RBL KMP	600	324	8 Desember 2020/ December 8, 2020	20
9	AiIB AiIB L0292A – East Java & Bali Power Distribution	310	213	10 Februari 2021/ February 10, 2021	20
10	ADB ADB 4164-INO-SREAP Western & Central Java	600	450	31 Desember 2021/ December 31, 2021	20
11	Bank DBS Indonesia (Agen) Green Loan – DBS 2022 - Onshore	750	750	23 Desember 2022/ December 23, 2022	5
Jumlah dalam USD/Total in USD		3,353	2,088		
<u>Fasilitas pinjaman dalam EUR/EUR loan facilities</u>					
1	AFD Trans GIS	71	6	7 Mei 2015/ May 7, 2015	15
2	KfW Bangkanai Peaker	83	3	15 September 2017/ September 15, 2017	11
3	KfW Power Plant Kumbih	85	83	15 Desember 2017/ December 15, 2017	15
4	BGK PLTU Lombok FTP-2	81	19	21 Februari 2018/ February 21, 2018	15
5	KfW Geothermal Energy Program	150	149	11 Oktober 2018/ October 11, 2018	15
6	KfW Bakaru I + II Hydro Power Project	225	223	5 September 2019/ September 5, 2019	14
7	KfW 1000 Islands Renewable Energy for electrification Program	70	69	5 September 2019/ September 5, 2019	14
8	Mizuho Bank Riau Peaker - Finnvera Covered Facility	85	85	13 Maret 2020/ March 13, 2020	12
10	KfW KfW 29069 - RBL SNT	255	126	8 Desember 2020/ December 8, 2020	15
11	KfW Sustainable Hydropower Programmer I – Sawangan Hydropower Plant (HPP)	58	58	22 Desember 2022/ December 22, 2022	15
Jumlah dalam EUR/Total in EUR		1,163	821		

*) Dalam jutaan
**) Termasuk masa tenggang

*) In million
**) Include grace period

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/169 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

d. Fasilitas pinjaman belum digunakan (lanjutan)

d. Unused loan facilities (continued)

Perjanjian pinjaman tidak terkait program percepatan (lanjutan)

Loan agreements not related to non fast track program (continued)

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded	Fasilitas maksimum/ Maximum facility*)	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ Unused loan facilities*)	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Periode/ Period**) Tahun/Year
<u>Fasilitas pinjaman dalam JPY/JPY loan facilities</u>					
1	JBIC PLTU Lontar	16,430	1,591	14 Maret 2016/ March 14, 2016	16
2	JBIC PLTU Kaiseliteng 2	16,939	10,259	20 Juni 2017/ June 20, 2017	15
	Jumlah dalam JPY/Total in JPY	33,369	11,850		
<u>Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/Rupiah loan facilities</u>					
1	BRI Bank Loan Capex Sindikasi 2018 PKS 6 - JBT	4,506,787	2,246,261	14 November 2018/ November 14, 2018	10
2	BRI Kredit Modal Kerja Standby Loan (Revolving)	25,000,000	25,000,000	21 Juni 2022/ June 21, 2022	1
3	BNI (Agen Sindikasi) 11 proyek PLTU dan PLTMG Tahap I	5,071,000	1,362,275	18 Desember 2019/ December 18, 2019	10
4	BSI (Agen Sindikasi) 4 proyek PLTU dan PLTMG Tahap II	2,846,000	1,577,382	18 Desember 2019/ December 18, 2019	10
5	BCA (Bilateral) Corporate Loan Facilities BCA 2019 - Revolving	2,000,000	2,000,000	6 September 2022/ September 6, 2022	1
6	Bank Danamon Kredit Modal Kerja 2019 - Danamon - Revolving Syariah	2,000,000	2,000,000	12 Desember 2022/ December 12, 2022	1
7	UOB Kredit Modal Kerja 2021 - UOB - Revolving	1,000,000	1,000,000	11 Februari 2022/ February 11, 2022	1
8	HSBC Indonesia Kredit Modal Kerja 2021 - HSBC - Revolving	1,400,000	1,400,000	22 April 2022/ April 22, 2022	1
9	Muamalat Pembiayaan Musyarakah 2022 - Muamalat - Revolving	1,000,000	1,000,000	21 Februari 2022/ February 21, 2022	1
10	Bank Maybank Indonesia Pembiayaan Musyarakah 2022 - Maybank - Revolving	1,000,000	1,000,000	14 Maret 2022/ March 14, 2022	1
11	LPEI Kredit Modal Kerja 2021 - LPEI Revolving	3,500,000	3,500,000	20 Desember 2021/ December 20, 2021	2
12	Bank DKI Kredit modal kerja 2022 - Bank DKI - Revolving	1,000,000	1,000,000	28 Maret 2022/ March 28, 2022	1
13	MUFG Bank Kredit Modal Kerja 2022 - Bank MUFG - Revolving	1,000,000	1,000,000	6 April 2022/ April 6, 2022	1
14	Bank Mandiri Kredit Modal Kerja 2022 - Bank Mandiri - Revolving	1,000,000	1,000,000	23 Agustus 2022/ August 23, 2022	1
15	PT Bank QNB Indonesia Tbk Kredit Modal Kerja 2022 - Bank QNB - Revolving	500,000	500,000	21 September 2022/ September 21, 2022	1
16	BNI Kredit Modal Kerja 2022 - BNI - Revolving	1,308,607	1,308,607	30 November 2022/ November 30, 2022	1
17	BCA (Agen Sindikasi) Corporate Loan Facilities 2022	10,600,000	10,600,000	9 Desember 2022/ December 9, 2022	10
18	Bank CIMB Niaga Corporate Loan Facilities 2022 Syariah	900,000	900,000	9 Desember 2022/ December 9, 2022	10
19	Bank Bukopin Corporate Loan Facilities 2022 (Bilateral)	300,000	300,000	9 Desember 2022/ December 9, 2022	10
20	PT Bank SBI Corporate Loan Facilities 2022 (Bilateral)	200,000	200,000	9 Desember 2022/ December 9, 2022	10
21	PT Bank Permata Tbk (Agen Sindikasi) Bank Loan Sindikasi 2022 PKS 4 Syariah PLTU Timor 2x5 MW Tahap III	2,750,000	2,750,000	8 Desember 2022/ December 8, 2022	10
	Jumlah dalam IDR/Total in IDR	68,882,394	61,644,525		

*) Dalam jutaan

**) Termasuk masa tenggang

*) In million

**) Include grace period

	2022	2021	
Tingkat suku bunga per tahun			Interest rate per annum
Rupiah	3.30% - 5.32%	3.44% - 6.50%	Rupiah
USD	0.67% - 5.99%	0.66% - 4.41%	USD
JPY	1.58% - 1.73%	0.60% - 1.74%	JPY
EUR	0.28% - 4.28%	0.00% - 2.10%	EUR

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/170 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

e. Program operasi dan pemeliharaan

e. Operation and maintenance programs

Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada tingkat tertentu, Perusahaan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut:

In order to improve and restore the performance of generator units up to a certain level, the Company has entered into Operation and Maintenance Agreements with contractors. The contract payment comprises fixed and variable portions. The contractors have to meet certain targets and will be charged a penalty if these targets are not met. The commitments with the contractors for the fixed portion are as follows:

<u>Pembangkitan/ Power plant</u>	<u>Kontraktor/ Contractors</u>	<u>Nilai kontrak setara/Contract amount equivalent Rp</u>	<u>Periode/ Period</u>
PLTU Tanjung Jati B	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	1,311,706	2011 - 2032
PLTU Tanjung Jati B	Konsorsium/ <i>consortium of</i> Fortum Service OY & PT Medco Energy	<u>624,943</u>	2005 - 2029
Jumlah		<u>1,936,649</u>	Total

f. Kontinjensi

f. Contingencies

(i) Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perusahaan menghadapi Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") sebagai Pemohon melawan PC Muriah Ltd ("PCML") sebagai Termohon 1 dan Perusahaan sebagai Termohon 2 di *International Court of Commerce* ("ICC"). Permohonan tersebut terkait sengketa *Gas Transportation Agreement* ("GTA") antara PCML selaku *Shipper*/Penjual, KJG selaku *Transporter*, dan Perusahaan selaku *Offtaker*/Pembeli mengenai kekurangan pembayaran atas biaya transportasi gas ke PLTGU Tambak Lorok dikarenakan volume gas yang dikirim kurang dari volume gas minimum yang disepakati.

(i) On August 29, 2018, the Company faced an Arbitration request filed by PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") as the Applicant against PC Muriah Ltd ("PCML") as the first defendant and the Company as the second defendant in the *International Court of Commerce* ("ICC"). The application is related to the *Gas Transportation Agreement* ("GTA") dispute between PCML as the Shipper/Seller, KJG as the Transporter, and the Company as the Offtaker/Buyer regarding the underpayment of gas transportation costs to the PLTGU Tambak Lorok since the volume of gas sent is less than the minimum gas volume agreed.

Pemohon menuntut pengembalian sejumlah uang yang dipotong oleh Perusahaan dari tagihan Pemohon sejak April 2018 dan secara alternatif dengan PCML bertanggung jawab atas *Ship or Pay* ("SOP") 2016-2019 senilai USD144.536.677 (nilai penuh) ditambah biaya-biaya (*pre-award* dan *post-award*). Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di ICC.

The Applicant demands a refund of the amount deducted by the Company from the Applicant's invoice since April 2018 and alternatively with PCML being responsible for Ship or Pay ("SOP") for 2016-2019 amounting to USD144,536,677 (full amount) plus costs (pre-award and post-award). Up to the completion date of these consolidated financial statements, this case is still in the process of being examined at the ICC.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/171 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

f. Kontinjensi (lanjutan)

Manajemen meyakini bahwa Perusahaan memiliki posisi yang kuat karena berdasarkan fakta hukum, kegagalan pengiriman volume gas yang disepakati tidak disebabkan oleh kesalahan dari Perusahaan melainkan kesalahan dari PCML karena kegagalannya dalam menyediakan gas sesuai volume gas minimum yang disepakati. Selain itu, KJG dengan Perusahaan telah menyepakati bahwa KJG membebaskan Perusahaan dari tanggung jawab pembayaran SOP 2016-2019, apapun putusan Majelis ICC nantinya. Oleh sebab itu, tidak ada provisi yang perlu diakui berkaitan dengan hal ini.

- (ii) Pada tanggal 31 Mei 2018, Konsorsium Kinarya Liman Margaseta ("KKLM") mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terhadap IP dan PGN kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Perselisihan ini disebabkan permintaan pengakhiran perjanjian sewa fasilitas penyaluran bahan bakar gas untuk PLTGU Priok oleh IP, KKLM menuntut bahwa IP harus membayar ganti rugi kepada KKLM sebesar Rp172.273.

Setelah melalui serangkaian proses hukum dari tahun 2019 sampai dengan 2022, kedua pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan penyelesaian Nomor: 399.Pj/060/IP/2022 untuk IP dan Nomor: 001/KKLM/IX/2022 untuk KKLM pada tanggal 8 September 2022 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

IP telah membayar nilai penyelesaian yang telah disepakati sebesar Rp129.000. IP telah membukukan provisi senilai Rp87.446 di tahun 2021 yang dicatat pada beban lain-lain dalam laba rugi dan tambahan beban senilai Rp41.554 dicatat pada beban lain-lain dalam laba rugi di tahun 2022 atas kesepakatan penyelesaian tersebut.

Atas tindak lanjut kesepakatan perdamaian yang telah diuraikan diatas, seluruh pemeriksaan perkara dalam kasus dengan KKLM telah dihentikan.

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

f. Contingencies (continued)

Management believes that the Company has a strong position because based on legal facts, the failure to deliver the agreed gas volume was not caused by the Company's fault, but was PCML's fault due to its failure to supply gas according to the agreed minimum gas volume. In addition, KJG and the Company have agreed that KJG frees the Company from the responsibility for paying the 2016-2019 SOP, whatever the decision of the ICC Assembly will be. Therefore, there is no provision that needs to be recognised in this regard.

- (ii) *On May 31, 2018, Consortium Kinarya Liman Margaseta ("KKLM") filed an arbitration request for dispute settlement against IP and PGN to Indonesian National Arbitrage Agency ("BANI"). The dispute was caused by the termination of the lease of gas fuel distribution facility agreement for PLTGU Priok by IP. KKLM required IP to pay compensation to KKLM amounted to Rp172,273.*

After through a series of legal processes from 2019 to 2022, both of the two parties agreed to sign a settlement agreement Number: 399. Pj/060/IP/2022 for Company and No. 001/KKLM/IX/2022 for KKLM on September 8, 2022 in the Registrar of the South Jakarta District Court.

IP has paid the settlement amounted to Rp129,000. IP has recorded a provision of Rp87,446 in 2021 which was recorded as other expenses in profit or loss and an additional expense of Rp41,554 was recorded as other expenses in profit or loss in 2022 for the settlement agreement.

Following the peace agreement described above, all case investigations in the case with KKLM have been stopped.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/172 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

f. Kontinjensi (lanjutan)

- (iii) Pada November 2018, terdapat perbedaan terkait dengan penyediaan gas atas penerapan Amandemen II Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PLN Batam dengan PT Energi Listrik Batam ("ELB"). Atas perbedaan tersebut, ELB mengajukan gugatan arbitrase melalui BANI, yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Batam. Pada tanggal 25 Januari 2022, ELB telah mengajukan permohonan banding kepada Mahkamah Agung terkait hasil pembatalan di Pengadilan Negeri Batam.

Pada tanggal 5 Juli 2022, Mahkamah Agung telah memutuskan perkara ini dengan menolak permohonan pembatalan yang diajukan oleh PLN Batam dan menguatkan Putusan Arbitrase BANI.

Pada tanggal 6 Maret 2023, melalui Perjanjian Penyelesaian dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung nomor 996B/Pdt.Sus.Arbit/2022, PLN Batam akan melaksanakan pembayaran ganti rugi sebesar Rp77.389 ke ELB. Pada tanggal 31 Maret 2023, pembayaran atas ganti rugi tersebut sudah dilaksanakan oleh PLN Batam.

- (iv) Pada tanggal 24 Juni 2020, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh PT Sumsel Energi Gemilang ("SEG") di BANI terkait perselisihan pelaksanaan perjanjian jual beli gas dan kesepakatan bersama dalam hal ini yaitu mengenai kewajiban pembayaran jumlah minimum gas atau *Take or Pay* ("TOP") dan jumlah penyaluran gas minimum atau SOP.

Pemohon menuntut pembayaran TOP dan SOP tersebut mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan nilai total USD31.523.588 (nilai penuh). Pada 3 Mei 2021, BANI telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan menghukum Perusahaan membayar USD27.021.871 (nilai penuh). Pada tanggal 22 Juni 2021, Perusahaan mengajukan upaya hukum pembatalan putusan BANI tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

f. Contingencies (continued)

- (iii) In November 2018, there was a dispute regarding the supply of gas over the implementation of the Amendment II of the Power Purchase Agreement between PLN Batam and PT Energi Listrik Batam ("ELB"). Regarding the dispute, ELB filed an arbitration lawsuit through BANI, which was canceled by Batam District Court. On January 25, 2022, ELB submitted an appeal to the Supreme Court regarding the cancellation result at Batam District Court.

On July 5, 2022, the Supreme Court has decided on this case which reject the cancellation request submitted by PLN Batam and strengthen BANI's Arbitrase Decision.

On March 6, 2023, through the Agreement on Settlement and Implementation of the Supreme Court Decision number 996B/Pdt.Sus.Arbit/2022, PLN Batam would pay compensation amounting IDR77,389 to ELB. On March 31, 2023, the compensation payment has been made by PLN Batam.

- (iv) On June 24, 2020, the Company faced an Arbitration Request filed by PT Sumsel Energi Gemilang ("SEG") in the Indonesian National Arbitration Board ("BANI") regarding dispute in the implementation of gas sales and purchase agreement and mutual agreement regarding the obligation to pay minimum gas amount or *Take or Pay* ("TOP") and minimum gas distribution amount or SOP.

The Claimant demanded TOP and SOP payment starting from 2015 to 2019 amounted to USD31,523,588 (full amount). On May 3, 2021, BANI has decided that the Company must pay compensation to the Plaintiff amounted to USD27,021,871 (full amount). On June 22, 2021, the Company submitted a petition to annul the BANI arbitration verdict to District Court of South Jakarta.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/173 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

f. Kontinjensi (lanjutan)

Pada tanggal 11 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan upaya pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Perusahaan melalui Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan membatalkan Putusan BANI No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 3 Mei 2021. Pada tanggal 21 Oktober 2021, SEG mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Putusan Arbitrase tersebut ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya pada tanggal 14 April 2022 Mahkamah Agung telah memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan mengurangi nilai putusan BANI menjadi USD13.510.935 (nilai penuh) atau setara Rp210.662 dan dapat dibayar secara bertahap paling lama 10 tahun sejak permohonan pembatalan didaftarkan di pengadilan. Perusahaan telah membukukan provisi senilai Rp210.662 di tahun 2022 yang dicatat pada beban lain-lain dalam laba rugi konsolidasian.

- (v) Pada tanggal 29 April 2021, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh Ince Baharudin dan Ince Rahmawati sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Makassar dengan register No. 152/Pdt.G/2021/PN.Mks terkait kepemilikan aset tanah milik Perusahaan di Jalan Latimojong Makassar. Penggugat mengajukan kerugian materiil akibat penguasaan tanah sengketa oleh Perusahaan sebesar Rp432.647 dan kerugian non materiil sekitar Rp200.000. Penggugat mengajukan tuntutan agar Perusahaan mengosongkan tanah dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut ke Penggugat. Manajemen meyakini Perusahaan memiliki posisi yang kuat karena faktanya Perusahaan memiliki dokumentasi bukti kepemilikan hak atas tanah yang berasal dari nasionalisasi Perusahaan Listrik Belanda (NV OGEM).

Pada tanggal 3 Februari 2022, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan amar putusan menolak seluruh gugatan Penggugat. Pada tanggal 16 Februari 2022, Penggugat mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar.

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

f. Contingencies (continued)

On October 11, 2021 the District Court of South Jakarta has decided a lawsuit filed by the Company with register No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel with a verdict to annul the arbitration decision No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 dated May 3, 2021. On October 21, 2021, SEG submitted an appeal to the Supreme Court to annul the decision of the Supreme Court.

On April 14, 2022 the Supreme Court has decided on this case with an Amar Decision reducing the value of BANI's decision to USD13,510,935 (full amount) or equivalent to Rp210,662 and can be paid in stages no later than 10 years after the cancellation request is registered in court. The Company has recorded a provision of Rp210,662 in 2022 which recorded as other expenses in consolidated profit or loss.

- (v) On April 29, 2021, the Company faced a lawsuit filed by Ince Baharudin and Ince Rahmawati as a Plaintiff in the District Court of Makassar with register No. 152/Pdt.G/2021/PN.Mks regarding the Company's land located at Latimojong Street, Makassar. The Plaintiff filed for material losses due to the Company's control of the disputed land amounted to Rp432,647 and non-material losses of approximately Rp200,000. The Plaintiff filed a demand that the Company vacate the land and then hand over the land to the Plaintiff. Management believes the Company has a strong position due to the fact that the Company has documentation showing proof of ownership of land rights originating from the nationalisation of the Dutch Electricity Company (NV OGEM).

On February 3, 2022, the District Court of Makassar has decided to deny the entire Plaintiff's claim. On February 16, 2022, the Plaintiff filed an appeal to the High Court of Makassar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/174 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

f. Kontinjensi (lanjutan)

Pada tanggal 8 September 2022, upaya hukum banding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Amar Putusan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 152/Pdt.G/2021/PN.Mks yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Januari 2023.

- (vi) Pada tanggal 25 Oktober 2016, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh Poe Soe Fang sebagai Penggugat, dalam hal ini juga sebagai Komisaris PT Barito Jaya, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register No. 501/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR terkait Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTMG Kalsel Peaker 200 MW. Penggugat mengajukan ganti rugi atas Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum sebesar Rp191.386 yang sebelumnya sudah disetujui oleh Tergugat I, Edy Kartono selaku Direktur Utama PT Barito Jaya, sebesar Rp18.321. Penggugat mengajukan tuntutan agar Perusahaan dapat mengganti rugi sebesar Rp191.386 bukan sebesar Rp18.321.

Pada tanggal 23 Oktober 2018, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan amar putusan menolak seluruh gugatan Penggugat. Pada tanggal 1 November 2018, Penggugat mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Utara dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 7 Mei 2019.

Perusahaan menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 November 2019.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, kasus ini masih dalam tahap proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Utara.

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

f. Contingencies (continued)

On September 8, 2022, the appeal was decided by the Makassar High Court with the decision to strengthen the Makassar District Court's decision No. 152/Pdt.G/2021/PN.Mks which has permanent inkraht based on the letter of the Head of State Court of Makassar on January 25, 2023.

- (vi) *On October 25, 2016, the Company faced a lawsuit filed by Poe Soe Fang as a Plaintiff and also as the Commissioner of PT Barito Jaya, in the District Court of North Jakarta with register No. 501/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR regarding the Procurement of Land for Construction PLTMG Kalsel Peaker 200 MW. The Plaintiff filed for the compensation due to the Procurement of Land for Publics amounted to Rp191,386 that has been previously agreed by the Defendant I, Edy Kartono as President Director of PT Barito Jaya, amounted to Rp18,321. The Plaintiff submitted the claims in order to get the compensation from the Company amounted to Rp191,386 instead of Rp18,321.*

On October 23, 2018, the District Court of North Jakarta has decided to deny the entire Plaintiff's claim. On November 1, 2018, the Plaintiff filed an appeal to the High Court of North Jakarta and sent the Memorandum of Appeal on May 7, 2019.

The Company submitted the Counter Memorandum of Appeal on November 15, 2019.

Up to the completion date of these consolidated financial statements, this case is still in the appeal process in the High Court of North Jakarta.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/175 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

f. Kontinjensi (lanjutan)

- (vii) Pada tanggal 7 Juni 2022, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh Ronny Rotinsulu Tumengkol sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Tondano dengan register No. 172/Pdt.G/2022/PN.Tnn terkait kepemilikan atas tanah di PLTA Tonsea Lama. Penggugat mengajukan ganti rugi sebesar Rp409.560 dan tuntutan bahwa tanah seluas 15.000 m² dengan bukti kepemilikan berupa Buku Garisan Tanah Tonsea Lama No. 829 Folio 80 adalah atas nama Almarhum Hendrik Nelwan.

Pada tanggal 5 April 2023, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima. Penggugat mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Manado dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 26 April 2023.

- (viii) Grup juga menghadapi gugatan sengketa ganti rugi dalam jumlah yang tidak material di beberapa lokasi bangunan jaringan transmisi atau distribusi, perselisihan dengan karyawan, perkara dengan pelanggan dan pemasok. Terhadap gugatan serta ganti rugi yang bersifat tidak materil tersebut, Grup telah menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Manajemen berpendapat klaim-klaim tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha Grup.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, hasil litigasi di atas tidak dapat diestimasi secara andal atau Grup memiliki alasan yang kuat untuk mendukung kasus tersebut, oleh karena itu, Grup berpendapat bahwa keputusan yang merugikan dalam setiap proses hukum yang tertunda atau terancam atau bahwa setiap jumlah yang mungkin harus dibayar dengan alasan tersebut tidak mungkin memiliki dampak material yang merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasinya.

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

f. Contingencies (continued)

- (vii) On June 7, 2022, the Company faced a lawsuit filed by Ronny Rotinsulu Tumengkol as a Plaintiff in the District Court of Tondano with register No.172/Pdt.G/2022/PN.Tnn regarding ownership of land right in PLTA Tonsea Lama. The Plaintiff filed for losses amounted to Rp409,560 and a demand that the land of 15,000 m² with proof of ownership of land rights by Land Line Book of Tonsea Lama No. 829 Folio 80 is on behalf of Almarhum Hendrik Nelwan.

On April 5, 2023, the District Court of Tondano has decided to declare inadmissible the Plaintiff's claim. On April 26, 2023, the Plaintiff filed an appeal to the High Court of Manado and sent the Memorandum of Appeal on April 26, 2023.

- (viii) The Group also faces claims for compensation of losses, which are immaterial in amount, in several areas of its transmission or distribution facilities, disputes with its employees and cases with customers and suppliers. With respect to the claim and compensation that is not material, the Group has followed up in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Management believes that such claims are not material and will not significantly affect the Group's operations.

Up to the completion date of these consolidated financial statements, the results of the above litigation cannot be reliably estimated or the Group has strong grounds supporting the case, therefore, the Group is of the opinion that adverse decisions in any pending or threatened proceedings or that any amount it may be required to pay by reason thereof is unlikely to have a material adverse effect on its financial condition or the results of operations.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/176 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2022 AND 2021

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang dari Pemerintah, piutang lain-lain, piutang pihak berelasi, rekening bank dibatasi penggunaannya, dan investasi jangka pendek sebesar Rp107.257.219 (2021: Rp97.430.298) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset derivatif yang diklasifikasikan oleh Grup sebagai instrumen keuangan derivatif yang dicatat pada laba rugi sebesar Rp107.068 (2021: Rpnil).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mengklasifikasikan utang usaha, biaya masih harus dibayar, uang jaminan langganan, utang biaya proyek, utang penerusan pinjaman, utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank, utang sewa, utang bank, utang obligasi dan sukuk ijarah, utang listrik swasta, utang KIK - EBA, utang pihak berelasi dan utang lain-lain sebesar Rp500.422.267 (2021: Rp511.506.237) sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas derivatif yang diklasifikasikan oleh Grup sebagai instrumen keuangan derivatif yang dicatat pada laba rugi sebesar Rpnil (2021: Rp107.271).

b. Manajemen risiko modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Grup terdiri dari pinjaman (Catatan 24, 25, 26, 27, 28 dan 29) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 21), saldo laba, dan tambahan modal disetor (Catatan 22).

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT**

**a. Categories and classes of financial
instruments**

As at December 31, 2022, the Group classified its cash and cash equivalents, trade receivables, receivables from Government, other receivables, receivables from related parties, restricted cash in banks and short term investments amounted to Rp107,257,219 (2021: Rp97,430,298) as financial assets at amortised cost and derivative asset classified by the Group as derivative financial instrument through profit or loss amounted to Rp107,068 (2021: Rpnil).

As at December 31, 2022, the Group classified its trade payables, accrued expenses, customer security deposits, project cost payable, accrued expenses, two-step loans, Government and non-bank Government financial institution loan, lease liabilities, bank loan, bonds payable and sukuk ijarah, electricity purchase payable, KIK - EBA loans, payable to related party, and other payables amounted to Rp500,422,267 (2021: Rp511,506,237) as financial liabilities carried at amortised cost and derivative liabilities classified by the Group as derivative financial instrument through profit or loss amounted to Rpnil (2021: Rp107,271).

b. Capital risk management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Group's capital structure consists of debt (Notes 24, 25, 26, 27, 28 and 29) and equity attributable to owners of the parent consisting of capital stock (Note 21), retained earnings and additional paid-in capital (Note 22).

The Directors of the Company periodically review the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/177 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)**

b. Manajemen risiko modal (lanjutan)

Batasan pinjaman Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

Grup berusaha untuk meminimalkan biaya pinjaman sehingga dapat memaksimalkan nilai Grup. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam mencari pendanaan melalui utang selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Grup membentuk Subdirektorat Manajemen Risiko ("SEVP Risk Management") yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Grup. Subdirektorat ini juga bertugas untuk memfasilitasi penyusunan profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbauan awal kepada manajemen Grup. SEVP Risk Management bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan.

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)**

b. Capital risk management (continued)

The Company's loan covenants require among other things, the fulfillment of a certain debt to equity ratio and capital adequacy ratio. Management regularly monitors such requirements to ensure that there are no defaults on the loans of the Company.

The Group aims to minimise the cost of debt in order to maximise their value. Therefore, in its financing policies, the Group always takes into account the financial risk that may arise in the future.

c. Financial risk management objectives and policies

The objectives and policies of the Group's financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of their business, while managing their exposure to market risks (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group operates within defined policies approved by the Directors.

In managing those risks, the Group established a subdirectorate of Risk Management ("SEVP Risk Management") which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Group's environment. The subdirectorate is also established to facilitate a strategic risk profile as an early warning to the Group's management. SEVP Risk Management is responsible to the Director of Finance.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/178 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)**

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

Grup telah menetapkan taksonomi risiko dengan membagi risiko menjadi lima kelompok yaitu risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko proyek, dan risiko kepatuhan. Risiko keuangan diantaranya adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko, Grup mempertimbangkan skala prioritas yang didasarkan pada tingkat risikonya. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan skala dampak yang ditimbulkan.

Terkait dengan risiko keuangan, Grup telah menetapkan kebijakan manajemen untuk melakukan transaksi lindung nilai. Sebagai salah satu BUMN, kebijakan manajemen yang telah disetujui menjadi sangat penting agar tidak timbul masalah pada waktu pelaksanaan akuntansi lindung nilai tersebut. Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dengan menggunakan kurs Bloomberg pada tanggal laporan. Aset dan liabilitas derivatif disajikan sebesar keuntungan maupun kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif. Kontrak derivatif Grup diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada FVTPL. Transaksi ini semata-mata dimaksudkan untuk memitigasi risiko nilai tukar, tidak untuk diperdagangkan, dan memastikan ketersediaan likuiditas valas untuk pembayaran sebagian kewajiban valas yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1-3 bulan pada periode pelaporan Grup. Lihat Catatan 3 untuk kebijakan akuntansi untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan untuk klasifikasi instrumen keuangan. Grup tidak menerapkan akuntansi lindung nilai atas transaksi-transaksi tersebut.

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**c. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

The Group has established a risk taxonomy by dividing risk into five categories, such as strategic risk, financial risk, operational risk, project risk and compliance risk. Financial risk includes market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. In managing those risks, the Group considers prioritisation based on risk level. Risk level is determined by the level of possibility and scale of potential impact.

Related to financial risks, the Group has established management's policy related to hedging transactions. As an SOE, the approved management policy is very important in order to avoid any issues that may arise during the implementation of such hedging programs. All derivative instruments are recognised in the consolidated statement of financial position at their fair values. Fair value is determined based on market value using the Bloomberg rate at the reporting date. Derivative assets or liabilities are presented at the amount of unrealised gain or loss from derivative contracts. The Group's derivative contracts are classified as financial assets measured at FVTPL. These transactions are solely intended for mitigating foreign exchange risk, not for trading and ensuring the availability of foreign currency liquidity for principal and interest payment due in the 1-3 months of the Group's reporting period. Refer to Note 3 for the accounting policy of financial assets and liabilities for the financial instruments classification. The Group does not apply hedge accounting on those transactions.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/179 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)**

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

Manajemen risiko mata uang asing

Grup memiliki banyak transaksi dan sumber pendanaan dalam mata uang asing. Sebagai akibatnya timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Grup telah melakukan diskusi dengan Bank Indonesia ("BI") untuk mendapatkan pemahaman komprehensif atas keadaan pasar. Grup kemudian akan mempertimbangkan keadaan pasar ke dalam proyeksi keuangan internal mereka dan mengembangkan strategi yang telah disetujui bersama untuk memitigasi eksposur risiko mata uang asing dengan membeli instrumen mata uang asing yang dibutuhkan disaat yang tepat.

Jumlah eksposur mata uang asing bersih Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 52.

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Grup untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. Kenaikan dan penurunan 10% menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

**Dampak terhadap laba setelah pajak/
Effect to profit after tax*)**

	2022								
	USD		JPY		EUR		Lain-lain/Others**)		
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	
Aset keuangan									
Piutang pihak berelasi	111,223	(111,223)	-	-	-	-	-	-	Financial assets
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	87,706	(87,706)	272,087	(272,087)	-	-	-	-	Receivables from related parties Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	651,159	(651,159)	15,612	(15,612)	11,573	(11,573)	11,260	(11,260)	Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	850,088	(850,088)	287,699	(287,699)	11,573	(11,573)	11,260	(11,260)	Total financial assets
Liabilitas keuangan									Financial liabilities
Penerusan pinjaman	(1,195,238)	1,195,238	(1,381,960)	1,381,960	(14,356)	14,356	-	-	Two-step loans
Utang sewa	(46,278)	46,278	(358,864)	358,864	-	-	-	-	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	(6,051,801)	6,051,801	(729,468)	729,468	(1,248,464)	1,248,464	-	-	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	(12,390,781)	12,390,781	(179,411)	179,411	(1,295,471)	1,295,471	-	-	Bonds payable
Utang listrik swasta	(486,778)	486,778	-	-	-	-	-	-	Electricity purchase payable
Utang lain-lain	(166,443)	166,443	(24,695)	24,695	(33,480)	33,480	-	-	Other payables
Utang biaya proyek	(46,211)	46,211	(47,650)	47,650	(3,146)	3,146	-	-	Project cost payables
Utang usaha	(1,628,876)	1,628,876	-	-	-	-	(13,717)	13,717	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	(221,287)	221,287	(58,220)	58,220	(8,731)	8,731	-	-	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	(22,233,693)	22,233,693	(2,780,268)	2,780,268	(2,603,648)	2,603,648	(13,717)	13,717	Total financial liabilities
Jumlah - bersih	(21,383,605)	21,383,605	(2,492,569)	2,492,569	(2,592,075)	2,592,075	(2,457)	2,457	Total - net

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman
**) Mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) Not considering the effect of borrowing cost capitalisation
**) Other foreign currencies are presented as USD equivalent using the exchange rates prevailing at reporting date

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**c. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

Foreign currency risk management

The Group undertakes many transactions and funding sources denominated in foreign currencies. Consequently, there are exposures to exchange rate fluctuations.

The Group holds regular discussions with Bank Indonesia ("BI") to get a comprehensive understanding of the market outlook. The Group then incorporates this outlook into its internal financial forecasts and develops a concerted strategy to mitigate its foreign currency exposure by purchasing the required foreign currency denominated instruments at the right time.

The Group's foreign currency exposure as at the reporting date is disclosed in Note 52.

Foreign currency sensitivity

The following table explains the details of the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. This 10% increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/180 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)**

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

**c. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

Sensitivitas mata uang asing (lanjutan)

Foreign currency sensitivity (continued)

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax*)									
	USD		JPY		EUR		Lain-lain/Others**)			
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%		
Aset keuangan										
Piutang pihak berelasi	99,382	(99,382)	-	-	-	-	-	-	-	Receivables from related parties
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	69,565	(69,565)	315,093	(315,093)	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	547,805	(547,805)	14,373	(14,373)	25,788	(25,788)	3,935	(3,935)		Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	716,752	(716,752)	329,466	(329,466)	25,788	(25,788)	3,935	(3,935)		Total financial assets
Liabilitas keuangan										
Penerusan pinjaman	(1,228,364)	1,228,364	(1,463,629)	1,463,629	(15,986)	15,986	(2,098)	2,098		Financial liabilities
Utang sewa	(47,933)	47,933	(607,577)	607,577	-	-	-	-		Two-step loans
Utang bank dan surat utang jangka menengah	(6,701,182)	6,701,182	(829,855)	829,855	(1,118,667)	1,118,667	-	-		Lease liabilities
Utang obligasi	(11,339,408)	11,339,408	(224,191)	224,191	(1,257,890)	1,257,890	-	-		Bank loans and medium term notes
Utang listrik swasta	(481,163)	481,163	-	-	-	-	-	-		Bonds payable
Utang lain-lain	(285,948)	285,948	(52,157)	52,157	(65,038)	65,038	-	-		Electricity purchase payable
Utang biaya proyek	(6,995)	6,995	(611)	611	(227)	227	-	-		Other payables
Utang usaha	(1,811,430)	1,811,430	-	-	-	-	(14,996)	14,996		Project cost payables
Biaya masih harus dibayar	(176,478)	176,478	(73,743)	73,743	(7,807)	7,807	(18)	18		Trade payables
Jumlah liabilitas keuangan	(22,078,901)	22,078,901	(3,251,763)	3,251,763	(2,465,615)	2,465,615	(17,112)	17,112		Accrued expenses
Jumlah - bersih	(21,362,149)	21,362,149	(2,922,297)	2,922,297	(2,439,827)	2,439,827	(13,177)	13,177		Total financial liabilities
										Total - net

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman
**) Mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) Not considering the effect of borrowing cost capitalisation
**) Other foreign currencies are presented as USD equivalent using the exchange rates prevailing at reporting date

Manajemen risiko tingkat suku bunga

Interest rate risk management

Grup memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup dengan risiko suku bunga nilai wajar. Grup mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

The Group has transactions at fixed and floating interest rates. Transactions at floating interest rates are exposed to cash flow interest rate risk. Borrowing issued at fixed rates exposes the Group to fair value interest risk. The Group manages the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/181 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)**

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Grup terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir tahun pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**c. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below has been determined based on the Group's exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of a 50 basis point ("bp") increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. A 50 bp increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ <i>Effect to profit after tax</i>		
	2022		
	+ 50 bp	- 50 bp	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	200,826	(200,826)	Cash and cash equivalents
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	18,552	(18,552)	Restricted cash in banks and time deposits
Investasi jangka pendek	2,080	(2,080)	Short-term investments
Subjumlah laba/(rugi)	221,458	(221,458)	Subtotal income/(loss)
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Penerusan pinjaman	(129,574)	129,574	Two-step loans
Utang bank	(597,351)	597,351	Bank loans
Subjumlah (rugi)/laba	(726,925)	726,925	Subtotal (loss)/income
Total (rugi)/laba	(505,467)	505,467	Total (loss)/income
	Dampak terhadap laba setelah pajak/ <i>Effect to profit after tax</i>		
	2021		
	+ 50 bp	- 50 bp	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	148,042	(148,042)	Cash and cash equivalents
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	19,766	(19,766)	Restricted cash in banks and time deposits
Investasi jangka pendek	1,161	(1,161)	Short-term investments
Subjumlah laba/(rugi)	168,969	(168,969)	Subtotal income/(loss)
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Penerusan pinjaman	(135,504)	135,504	Two-step loans
Utang bank	(650,939)	650,939	Bank loans
Subjumlah (rugi)/laba	(786,443)	786,443	Subtotal (loss)/income
Total (rugi)/laba	(617,474)	617,474	Total (loss)/income

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/182 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)**

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa pihak ketiga akan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup. Sebagai perusahaan yang diberikan kewajiban untuk melayani publik oleh Pemerintah Republik Indonesia, Grup diwajibkan melayani semua pelanggan tanpa melihat apakah nantinya akan bisa membayar atau tidak. Dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang, Grup menerapkan uang jaminan pelanggan dan melakukan pemutusan sambungan listrik ke pelanggan ditentukan jika pelanggan tidak membayar lewat dari tiga bulan untuk meminimalkan risiko kredit. Untuk kas dan setara kas, Grup mengelola rekening pada beberapa bank untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan pada satu institusi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit. Lihat Catatan 55.a untuk rinciannya.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp107.248.068 (2021: Rp97.421.430). Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang dari Pemerintah, piutang lain-lain, piutang pihak berelasi, rekening bank dibatasi penggunaannya, dan investasi jangka pendek.

Kualitas kredit piutang usaha

Grup berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas signifikan yang terpusat karena piutang usaha Grup tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar yang meliputi berbagai jenis pelanggan baik ritel maupun industrial yang tersebar di setiap wilayah geografis. Grup juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas piutang usaha secara berkala. Lihat Catatan 15 untuk rincian umur piutang usaha dan penilaian penurunan nilai piutang usaha.

Kualitas kredit piutang dari pemerintah

Grup berkeyakinan bahwa piutang dari pemerintah dapat diterima sepenuhnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dari Pemerintah Republik Indonesia. Grup berkeyakinan bahwa tidak ada risiko gagal bayar oleh Pemerintah.

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**c. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

Credit risk management

Credit risk refers to the risk that the counterparties will default on their contractual obligations resulting in a loss to the Group. As a company that performs a public service obligation on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the Group is obliged to serve all customers regardless of the ability to pay. In minimising the risk of uncollected receivables, the Group collects customer security deposits and will terminate the electricity connection to the customer if a customer does not make payment on time after three-months to minimise the Group's credit risk. For cash and cash equivalents, the Group maintains accounts with several banks to avoid significant concentration of cash with one institution.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk. See Note 55.a for details.

As at December 31, 2022, total maximum exposure from credit risk was Rp107,248,068 (2021: Rp97,421,430). Credit risk arises from cash in banks, time deposits, trade receivables, receivables from Government, other receivables, receivables from related parties, restricted cash in banks and short-term investments.

Credit quality of trade receivables

The Group believes that there is no significant concentration of credit quality risk because its trade receivables are spread over a large number of customers across diverse industries covering various types of customers, both retail and industrial, which are spread across a number of geographic areas. The Group also performs ongoing credit evaluation of its trade receivables. See Note 15 for detailed information of the aging of trade receivables and impairment assessment of trade receivables.

Credit quality of receivables from Government

The Group believes that receivables from Government can be fully recovered in time from the Government of the Republic of Indonesia. The Group believes there is no risk of default by the Government.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/183 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)**

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

Manajemen risiko kredit (lanjutan)

**Kualitas kredit kas di bank, deposito
berjangka dan rekening bank yang dibatasi
penggunaannya**

Grup menempatkan kas di bank, deposito berjangka dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya pada bank yang memiliki peringkat kredit yang baik. Oleh karena itu, Grup berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan ini adalah minimal. Pihak terkait yang dimaksud termasuk institusi keuangan utama dan BUMN.

Kualitas kredit piutang lainnya

Piutang lainnya ditagihkan kepada pihak berelasi dan karyawan Grup. Oleh karena itu, Grup dapat memonitor kolektibilitas piutang-piutang ini dengan seksama. Grup memiliki tingkat kolektibilitas yang baik atas piutang-piutang terkait.

Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan panjang Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas, simpanan, fasilitas bank dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Selanjutnya Grup juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**c. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

Credit risk management (continued)

**Credit quality of cash in banks, time deposits
and restricted cash in banks**

The Group places cash in banks, time deposits and restricted cash in banks with reputable counterparties that have a good credit rating or standing. Consequently, the Group believes that the credit risk of such financial assets is minimal. These counterparties include large financial institutions and SOEs.

Credit quality of other receivables

Other receivables are to be collected from the Group's related parties and employees. Therefore, the Group can closely monitor the collectability of these receivables. The Group has a good historical collection rate of these financial assets.

Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Directors, which have built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate cash, reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.

In addition, the Group maintains an adequate amount of cash and cash equivalents and short-term investments, which may be readily converted to cash should there be any unforeseen interruption to its cash collections.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/184 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)**

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

**c. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk management (continued)

Tabel dibawah ini menganalisis liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak didiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga.

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amount disclosed in the table represent contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments.

	2022					
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ More than one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ More than three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years	Jumlah/ Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Penerusan pinjaman	4,158,660	11,452,687	6,742,774	16,299,071	38,653,192	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan						Government and non-bank Government financial institution loans
Pemerintah non-bank	927,625	2,427,188	-	-	3,354,813	Lease liabilities
Utang sewa	5,230,840	3,680,822	2,166,817	6,904,222	17,982,701	Bank loans
Utang bank	37,581,237	76,433,576	25,628,730	42,756,881	182,400,424	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang obligasi dan sukuk ijarah	15,595,849	47,781,747	59,996,183	236,847,792	360,221,571	Electricity purchase payables
Utang listrik swasta	916,810	1,833,619	1,833,619	3,757,672	8,341,720	Trade payables
Utang usaha	51,083,262	-	-	-	51,083,262	Customer security deposits
Uang jaminan langganan	16,539,411	-	-	-	16,539,411	Project cost payables
Utang biaya proyek	2,096,511	-	-	-	2,096,511	Accrued expenses
Biaya masih harus dibayar	7,353,802	-	-	-	7,353,802	Other payables
Utang lain-lain	13,016,633	671,526	-	-	13,688,159	
Jumlah	154,500,640	144,281,165	96,368,123	306,565,638	701,715,566	Total
	2021					
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ More than one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ More than three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years	Jumlah/ Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Penerusan pinjaman	3,827,187	10,331,657	6,745,508	17,987,738	38,892,090	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan						Government and non-bank Government financial institution loans
Pemerintah non-bank	976,953	2,545,313	769,688	-	4,291,954	Lease liabilities
Utang sewa	5,849,483	6,833,464	2,413,090	5,268,722	20,364,759	Bank loans
Utang bank	31,604,720	88,290,611	28,610,621	33,763,893	182,269,845	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang obligasi dan sukuk ijarah	17,852,937	47,809,367	43,615,649	241,519,998	350,797,951	Electricity purchase payables
Utang listrik swasta	839,017	1,678,034	1,678,034	4,277,846	8,472,931	KJK - EBA loans
Utang KJK - EBA	603,560	-	-	-	603,560	Trade payables
Utang usaha	47,904,756	-	-	-	47,904,756	Customer security deposits
Uang jaminan langganan	15,584,069	-	-	-	15,584,069	Project cost payables
Utang biaya proyek	114,546	-	-	-	114,546	Derivative liabilities
Liabilitas derivatif	107,271	-	-	-	107,271	Accrued expenses
Biaya masih harus dibayar	6,528,616	-	-	-	6,528,616	Other payables
Utang lain-lain	20,498,505	466,379	-	-	20,964,884	
Jumlah	152,291,620	157,954,825	83,832,590	302,818,197	696,897,232	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat masalah likuiditas karena Grup memiliki cadangan fasilitas kredit yang memadai, adanya jaminan Pemerintah untuk pembayaran utang bank terkait, dan pendapatan subsidi dari Pemerintah Indonesia atas penyediaan listrik.

Management believes that there will be no liquidity issue as the Group has sufficient standby credit facilities, government guarantees for related debt repayment and subsidy revenue from the Government of Indonesia for provision of electricity.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/185 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)**

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)**

d. Nilai wajar instrumen keuangan

d. Fair value of financial instruments

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

The fair value is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan, pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK No. 68, "Pengukuran nilai wajar", mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut:

SFAS No. 68, "Fair value measurement", requires disclosure of fair value measurements through the following fair value measurement hierarchy:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga kuotasian dari pasar yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang tidak disajikan Grup pada nilai wajarnya:

The table below describes the carrying amount of the financial liabilities that are not presented by the Group at fair value:

	2022		2021		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi					Liabilities at amortised cost
Penerusan pinjaman	33,184,714	32,314,374	34,699,205	34,790,895	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	3,354,591	3,050,783	4,399,914	4,055,147	Government and non-bank Government financial institution loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	201,334,421	190,047,327	193,155,035	216,805,824	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang bank	152,410,118	151,549,712	165,886,409	167,078,254	Bank loans

Penerusan pinjaman dan utang bank merupakan liabilitas keuangan dengan tingkat bunga mengambang, sehingga nilai tercatat setara dengan nilai wajar.

Two-step loans and bank loans are financial liabilities with floating interest rates, thus the carrying amount of the financial liabilities approximate their fair values.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/186 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)**

d. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Beberapa pinjaman dengan suku bunga tetap, nilai tercatat atas liabilitas keuangan tidak menunjukkan nilai wajarnya, sehingga pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai wajar atas pinjaman diukur dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga pasar dengan penyesuaian kredit pada tanggal pelaporan. Nilai wajar instrumen keuangan di atas diklasifikasikan sebagai nilai wajar Tingkat 2 dalam hirarki nilai wajar.

Nilai wajar dari utang obligasi, ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasian dalam pasar aktif pada tanggal pelaporan. Nilai wajar utang obligasi di atas diklasifikasikan sebagai nilai wajar Tingkat 1 dalam hirarki nilai wajar.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, instrumen keuangan derivatif dihitung menggunakan Tingkat 2. Nilai wajar diukur pada nilai tunai estimasi arus kas masa depan berdasarkan kurva pendapatan yang dapat diobservasi.

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan lainnya telah berkisar menunjukkan nilai wajarnya karena memiliki sifat jangka pendek dari instrumen keuangannya.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat pengalihan antar tingkat.

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)**

d. Fair value of financial instruments (continued)

Certain loans with fixed interest rates, the carrying amount of the financial liabilities does not represent their fair values, thus as at December 31, 2022 and 2021, the fair value of loans is measured using discounted cash flows based on the interest rate based on credit adjusted market interest rates at the reporting date. The fair values of the above financial instruments are classified as Level 2 fair values in the fair value hierarchy.

The fair value of bonds payable is determined by the quoted market price at the reporting date. The fair values of the bonds payable is classified as Level 1 fair values in the fair value hierarchy.

As at December 31, 2022 and 2021, the derivative financial instruments are measured using a Level 2 method. The fair value is measured as the present value of the estimated future cash flows based on observable yield curves.

The carrying amount of other financial assets and liabilities approximate their fair values due to the short-term nature of the financial instruments.

For the years ended December 31, 2022 and 2021, there were no transfers between levels.

56. ASET/(LIABILITAS) DERIVATIF

Perusahaan melaksanakan *hedging* terbatas untuk memitigasi risiko selisih kurs atas transaksi-transaksi tertentu. Jenis transaksi *hedging* yang dilaksanakan adalah kontrak-kontrak *currency forward* dengan jumlah rincian pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

56. DERIVATIVE ASSETS/(LIABILITIES)

The Company has implemented limited hedging on certain transactions to mitigate its foreign currency exposure. The type of hedge transaction is a currency forward contract with details as at December 31, 2022 and 2021, as follows:

Pihak lawan/ <i>Counterparties</i>	Jangka waktu <i>hedging</i> / <i>Hedging periods</i>	2022	
		Jumlah notional (USD)/ <i>Notional amount (USD)</i>	Liabilitas derivatif/ <i>Derivative liabilities*)</i>
BRI	< 1 Bulan/ <i>Month</i>	15,000,000	(445)
Mandiri	< 1 Bulan/ <i>Month</i>	35,000,000	(1,989)
Mandiri	> 1 Bulan/ <i>Month</i>	550,000,000	21,622
BRI	> 1 Bulan/ <i>Month</i>	765,000,000	78,634
BNI	> 1 Bulan/ <i>Month</i>	95,000,000	9,246
Jumlah/Total		1,460,000,000	107,068

*) dalam jutaan Rupiah/in IDR million

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/187 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

56. ASET/(LIABILITAS) DERIVATIF (lanjutan)

56. DERIVATIVE ASSETS/(LIABILITIES) (continued)

<u>Pihak lawan/ Counterparties</u>	<u>Jangka waktu hedging/ Hedging periods</u>	<u>2021</u>	
		<u>Jumlah notional (USD)/ Notional amount (USD)</u>	<u>Liabilitas derivatif/Derivative liabilities*</u>
BRI	> 1 Bulan/Month	700,000,000	(49,080)
Mandiri	> 1 Bulan/Month	510,000,000	(44,504)
BNI	> 1 Bulan/Month	85,000,000	(6,581)
BRI	< 1 Bulan/Month	75,000,000	(7,106)
Jumlah/Total		1,370,000,000	(107,271)

*) dalam jutaan Rupiah/in IDR million

**57. INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT PENERAPAN
POJK NO. 6**

Sejak 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan secara prospektif POJK No. 6 untuk transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan IPP. Dampak penerapan POJK No. 6 telah disesuaikan ke saldo laba 1 Januari 2016 (Catatan 2.a).

Sesuai POJK No. 6, setiap transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun sebenarnya mengandung substansi selain jual beli (Catatan 3.k). Tabel berikut ini disajikan sebagai informasi tambahan jika perjanjian jual beli listrik dianggap mengandung sewa.

**57. ADDITIONAL INFORMATION RELATED TO
IMPLEMENTATION OF POJK NO. 6**

Since January 1, 2016, the Company has implemented POJK No. 6 prospectively for transactions based on Power Purchase Agreements with IPPs. The effect of POJK No. 6 implementation has been accounted for by adjustment to retained earnings as at January 1, 2016 (Note 2.a).

In accordance with POJK No. 6, all transactions based on Power Purchase Agreements are treated as sale and purchase transactions, although containing a substance other than sale and purchase (Note 3.k). The following tables are presented as additional information if PPAs were deemed to contain a lease.

	<u>Dengan/Under PSAK/SFAS No. 73 2022</u>	<u>Dengan/Under PSAK/SFAS No. 73 2021</u>	
Laporan posisi keuangan konsolidasian			Consolidated statements of financial position
<u>Aset tidak lancar</u>			<u>Non-current assets</u>
Aset tetap	1,630,489,082	1,611,915,102	Property, plant and equipment
<u>Ekuitas</u>			<u>Equity</u>
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	22,288,575	27,800,958	Retained earnings - unappropriated
<u>Liabilitas jangka panjang</u>			<u>Non-current liabilities</u>
Utang sewa	296,951,467	261,073,413	Lease liabilities
Utang listrik swasta	5,003,716	5,031,822	Electricity purchase payables
Liabilitas pajak tangguhan	26,710,470	29,251,500	Deferred tax liabilities
<u>Liabilitas jangka pendek</u>			<u>Current liabilities</u>
Utang usaha			Trade payables
Pihak berelasi	14,734,214	19,529,527	Related parties
Pihak ketiga	33,839,527	25,166,918	Third parties
Biaya masih harus dibayar	9,505,157	9,224,392	Accrued expenses
Utang listrik swasta	494,649	431,451	Electricity purchase payables
Utang sewa	13,318,281	13,529,428	Lease liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/188 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**57. INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT PENERAPAN
POJK NO. 6 (lanjutan)**

**57. ADDITIONAL INFORMATION RELATED TO
IMPLEMENTATION OF POJK NO. 6 (continued)**

	Dengan/Under PSAK/SFAS No. 73 2022	Dengan/Under PSAK/SFAS No. 73 2021	
Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian			Consolidated statements of comprehensive income
Beban usaha:			<i>Operating expenses:</i>
Bahan bakar dan pelumas	198,238,031	154,607,490	<i>Fuel and lubricants</i>
Pembelian tenaga listrik	9,400,187	3,126,881	<i>Purchased electricity</i>
Sewa	3,095,672	5,046,219	<i>Leases</i>
Pemeliharaan	33,739,101	30,482,533	<i>Maintenance</i>
Penyusutan aset tetap	51,012,568	47,279,429	<i>Property, plant and equipment depreciation</i>
Laba usaha	108,794,233	90,983,548	<i>Operating profit</i>
(Kerugian)/keuntungan			<i>(Loss)/gain on</i>
kurs mata uang asing - bersih	(44,071,033)	303,100	<i>foreign exchange - net</i>
Beban keuangan	(72,104,315)	(68,971,359)	<i>Finance cost</i>
(Rugi)/laba sebelum pajak	(3,851,946)	19,383,102	<i>(Loss)/profit before tax</i>
Beban pajak	(1,532,241)	(9,185,739)	<i>Income tax expense</i>
(Rugi)/laba tahun berjalan	(5,384,187)	10,197,363	<i>(Loss)/profit for the year</i>
 Laporan arus kas konsolidasian			 Consolidated statements of cash flows
Arus kas dari aktivitas operasi			<i>Cash from operating activities</i>
Pembayaran kas kepada pemasok	(259,103,951)	(191,966,078)	<i>Cash paid to suppliers</i>
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	43,781,892	87,208,703	<i>Cash provided from operation activities</i>
Pembayaran bunga	(71,163,422)	(67,900,593)	<i>Interest expense paid</i>
Kas bersih dari aktivitas operasi	106,220,643	75,808,386	<i>Net cash provided from operating activities</i>
Arus kas dari aktivitas pendanaan			<i>Cash from financing activities</i>
Pembayaran utang listrik swasta	(450,914)	(412,776)	<i>Payment of electricity purchase payable</i>
Pembayaran utang sewa	(13,257,782)	(11,974,453)	<i>Payment of lease liabilities</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(38,602,483)	(33,067,972)	<i>Net cash used in financing activities</i>
Nilai kini pembayaran minimum atas utang sewa pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 jika Grup menerapkan PSAK No. 73, "Sewa" adalah sebagai berikut:			<i>The present value of minimum lease payments on lease liabilities as at December 31, 2022 and 2021, if the Group applied SFAS No. 73, "Leases" are as follows:</i>
	2022	2021	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			<i>Minimum lease payments due:</i>
Tidak lebih dari satu tahun	63,120,975	57,450,831	<i>Not later than one year</i>
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	225,347,594	200,065,761	<i>Later than one year and not later than five years</i>
Lebih dari lima tahun	687,961,006	610,475,668	<i>Later than five years</i>
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	976,429,575	867,992,260	<i>Total minimum lease payments</i>
Dikurangi: bunga	(666,159,827)	(593,389,421)	<i>Less: interest</i>
Nilai kini pembayaran minimum sewa masa datang	310,269,748	274,602,839	<i>Present value of future minimum lease payments</i>
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	13,318,281	13,529,428	Less: current portion
Bagian jangka panjang	296,951,467	261,073,411	Long-term portion

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/189 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

58. REKLASIFIKASI

Laporan keuangan konsolidasian 2021 telah direklasifikasi agar konsisten dengan presentasi laporan keuangan konsolidasian 2022. Rincian akun-akun yang direklasifikasi adalah sebagai berikut:

58. RECLASSIFICATIONS

The 2021 consolidated financial statements have been reclassified to be consistent with the presentation of the 2022 consolidated financial statements. The details of the accounts being reclassified are as follows:

	<u>Sebelum reklasifikasi/ Before reclassifications</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassifications</u>	<u>Setelah reklasifikasi/ After reclassifications</u>	
Laporan laba rugi konsolidasian				Consolidated statement of profit or loss
<u>Pendapatan usaha</u>				<u>Revenue</u>
Pendapatan kompensasi	24,594,425	(1,202,263)	23,392,162	Compensation income
Beban lain-lain - bersih	(4,921,682)	1,202,263	(3,719,419)	Other expense - net

Reklasifikasi di atas tidak berdampak secara material karena reklasifikasi ini tidak mempengaruhi keputusan ekonomis yang dibuat oleh pengguna atas dasar laporan keuangan konsolidasian sehingga penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tiga periode tidak diperlukan.

The above reclassifications have no material impact because the reclassifications do not affect economic decisions made by users on the basis of consolidated financial statements and therefore a restatement of the three-period consolidated financial statements is not necessary.

59. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 20 Maret 2023, entitas anak, PNP, menandatangani Perjanjian Pendahuluan Jual Beli dengan PT Energi Sengkang untuk pembelian PLTGU Sengkang (315 MW).

59. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

On March 20, 2023, a subsidiary, PNP, entered into a Preliminary Sale Purchase Agreement with PT Energi Sengkang to purchase the PLTGU Sengkang (315 MW).

60. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2023.

60. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR AND APPROVAL OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements is the responsibility of the management and the Directors have approved them for issuance on May 2, 2023.



PT PLN (Persero)

KANTOR PUSAT
Jalan Trunojoyo Blok M – I No 135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160,
Indonesia
Telp : 021 – 7251234, 7261122
Fax : 021 – 7221330

www.pln.co.id



LEADING THE WAY TO EMPOWER THE NATION

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2022

2022 LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT